**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024, adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RKPD Tahun 2024.

(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

   a. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

   b. pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan

   c. acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2024, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024 dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :

a. narasi RKPD Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

b. Data dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

c. Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 November 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan
aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SETDA

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

## DAFTAR ISI


Daftar Isi ..... i
Daftar Tabel ..... iv
Daftar Gambar ..... xv
**BAB I PENDAHULUAN ..... I-1**
1.1. Latar Belakang ..... I-1
1.2. Dasar Hukum ..... I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... I-5
1.4. Maksud dan Tujuan ..... I-6
1.5. Sistematika ..... I-6
**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II-1**
2.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ..... II-1
2.1.2 Kondisi Demografi ..... II-9
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II-14
2.3 Kondisi Perekonomian Daerah..... ..... II-26
2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ..... II-26
2.3.2 PDRB Perkapita ..... II-38
2.3.3 Inflasi ..... II-41
2.3.4 Rasio Gini dan Indeks Williamson ..... II-42
2.3.5 Indeks Daya Saing Daerah ..... II-43
2.3.6 Investasi ..... II-44
2.3.7 Pertanian (dalam arti luas) dan Ketahanan Pangan ..... II-47
2.3.8 Koperasi, usaha kecil, dan menengah ..... II-59
2.3.9 Perdagangan ..... II-64
2.3.10 Perindustrian ..... II-67
2.3.11 Pariwisata ..... II-69
2.3.12 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... II-70
2.3.13 Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman ..... II-82
2.3.14 Perhubungan ..... II-89
2.3.15 Pertambangan ..... II-114
2.3.16 Pembangunan Ekonomi Masyarakat dan Desa ..... II-117
2.4 Sumber Daya Manusia ..... II-119
2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..... II-120
2.4.2 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) ..... II-124
2.4.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) ..... II-124
2.4.4 Indeks Pembangunan Kebudayaan ..... II-129
2.4.5 Pendidikan ..... II-131
2.4.6 Kesehatan ..... II-137
2.4.7 Kesejahteraan Sosial ..... II-146
2.4.8 Tenaga Kerja ..... II-151
2.4.9 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... II-159
2.4.10 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..... II-162
2.4.11 Kepemudaan dan olahraga ..... II-164
2.4.12 Perpustakaan ..... II-166
2.4.13 Transmigrasi ..... II-168

2.5 Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan ..... II-169
2.5.1 Daya Dukung dan Daya Tampung ..... II-169
2.5.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ..... II-172
2.5.3 Perubahan Iklim ..... II-174
2.5.4 Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup ..... II-181
2.5.5 Kualitas Lahan di Provinsi Jawa Tengah ..... II-187
2.5.6 Pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan berkelanjutan ..... II-190
2.5.7 Penataan Ruang ..... II-192
2.5.8 Energi dan Sumber Daya Mineral ..... II-202
2.5.9 Penanggulangan Bencana ..... II-211
2.6 Tata Kelola Pemerintahan ..... II-226
2.6.1 Indeks Reformasi Birokrasi ..... II-226
2.6.2 Indeks Kepuasan Masyarakat ..... II-228
2.6.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ..... II-229
2.6.4 Penelitian dan Pengembangan ..... II-241
2.6.5 Kearsipan ..... II-244
2.6.6 Akuntabilitas ..... II-245
2.6.7 Manajemen ASN ..... II-246
2.6.8 Administrasi Kependudukan ..... II-248
2.6.9 Perencanaan ..... II-254
2.6.10 Pengawasan ..... II-254
2.6.11 Pertanahan ..... II-255
2.7 Kondusivitas Daerah ..... II-265
2.8 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2022 ..... II-267
2.9 Permasalahan Pembangunan ..... II-268
2.9.1 Permasalahan Pembangunan Daerah ..... II-268
2.9.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ..... II-271
2.9.3 Isu Strategis Daerah ..... II-281
**BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ... III-1**
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III-1
3.1.1 Dinamika Perekonomian Global ..... III-1
3.1.2 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional ..... III-2
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah ..... III-3
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III-5
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III-5
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... III-9
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III-13
3.2.4 Sumber Pendanaan Lainnya ..... III-15
**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 ..... IV-1**
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah ..... IV-2
4.2.1 Pokok-Pokok Pikiran DPRD ..... IV-2
4.2.2 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024 ..... IV-7

4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 ..... IV-10
4.2.4 Keselarasan RKPD Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024..... IV-181
4.2.5 Inovasi Daerah..... IV-191
**BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA ..... V-1**
5.1 Kebijakan Umum ..... V-1
5.2 Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah..... V-3
5.3 Arah Per Wilayah Pengembangan. ..... V-4
5.3.1 Wilayah Pengembangan Kedungsepur ..... V-5
5.3.2 Wilayah Pengembangan Jekutibanglor ..... V-12
5.3.3 Wilayah Pengembangan Purwomanggung..... V-18
5.3.4 Wilayah Pengembangan Subosukowonosraten ..... V-23
5.3.5 Wilayah Pengembangan Bregasmalang..... V-29
5.3.6 Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb ..... V-34
5.3.7 Wilayah Pengembangan Petanglong ..... V-40
5.4 Arahan Pembangunan Wilayah Perbatasan Antar Provinsi. ..... V-45
**BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... VI-1**
6.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2024..... VI-1
6.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah..... VI-2
A. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar ..... VI-2
B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ..... VI-7
C. Urusan Pilihan ..... VI-16
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ..... VI-23
E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ..... VI-24
F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan ..... VI-26
G. Unsur Pemerintahan Umum ..... VI-26
**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... VII-1**
7.1 Indikator Kinerja Utama..... VII-1
7.2 Indikator Kinerja Daerah ..... VII-1
**BAB VIII PENUTUP .....VIII-1**

## DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah ..... II-3
Tabel 2.2 Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah 2019 ..... II-4
Tabel 2.3 Sebaran kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa di Provinsi Jawa Tengah ..... II-8
Tabel 2.4 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah.2018-2022 ..... II-10
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah ( jiwa) Tahun 2018-2022..... II-10
Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Menurut Eks-Karesidenan di Jawa Tengah Tahun 2018-2022..... II-12
Tabel 2.7 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-13
Tabel 2.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Maret 2018 - September 2022 ..... II-15
Tabel 2.9 Komoditi Makanan dan Bahan Baku makanan yang Memberi Pengaruh Besar Pada Kenaikan Garis Kemiskinan di Jawa Tengah ..... II-18
Tabel 2.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi se-Bali Tahun Periode September 2021 – September 2022 ..... II-23
Tabel 2.11 Persentase Kemiskinan Tahun 2021 dan Perubahan Persentase Kemiskinan Tahun 2021 - 2022 di Wilayah Setara..... II-24
Tabel 2.12 Jumlah dan Persentase Penduduk Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun Periode September 2021 – September 2022 ..... II-25
Tabel 2.13 Kabupaten / Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Tnegah Tahun 2022-2024..... II-26
Tabel 2.14 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2022 ..... II-27
Tabel 2.15 Pertumbuhan Ekonomi (c-to-c) Provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2018 –2022 (%)..... II-30
Tabel 2.16 Nilai PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (Miliar Rupiah) ..... II-31
Tabel 2.17 Nilai PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (Miliar Rupiah) ..... II-32
Tabel 2.18 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –2022 (%) ..... II-33
Tabel 2.19 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –2022 (%) ..... II-34

Tabel 2.20 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –2022 (Miliar Rupiah) ..... II-34
Tabel 2.21 Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%) ..... II-35
Tabel 2.22 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%) ..... II-36
Tabel 2.23 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022 (%) ..... II-36
Tabel 2.24 PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)..... II-38
Tabel 2.25 PDRB Per Kapita Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)..... II-40
Tabel 2.26 Perkembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-45
Tabel 2.27 Jumlah Nilai Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan LKPM dan Non LKPM Tahun 2016 – 2022 ..... II-46
Tabel 2.28 Perkembangan Ketersediaan Energi, Protein Dan Lemak Provinsi Jawa Tengah ..... II-53
Tabel 2.29 Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022 ..... II-54
Tabel 2.30 Pelabuhan, Perikanan, Pantai (PPP) di Provinsi Jawa Tengah ..... II-56
Tabel 2.31 Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 Koperasi Se- Jawa Tengah ..... II-60
Tabel 2.32 Jumlah KSP/USP Sehat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022 ..... II-60
Tabel 2.33 Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-61
Tabel 2.34 Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari Tahun 2018-2022 per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ..... II-62
Tabel 2.35 Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022..... II-64
Tabel 2.36 Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (Juta US$) ..... II-65
Tabel 2.37 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Juta$) ..... II-65
Tabel 2.38 Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Juta US$)..... II-66
Tabel 2.39 Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022..... II-66
Tabel 2.40 Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-67
Tabel 2.41 Nilai dan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-68
Tabel 2.42 Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022 ..... II-68

Tabel 2.43 Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-68
Tabel 2.44 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 ..... II-69
Tabel 2.45 Kondisi Permukaan Jalan Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Kewenangan Tahun 2022 ..... II-70
Tabel 2.46 Kondisi Permukaan Jalan Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Kewenangan Tahun 2022 ..... II-71
Tabel 2.47 Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-71
Tabel 2.48 Kondisi Permukaan Jalan Di Provinsi Jawa Tengah Menurut Lebar Jalan Tahun 2022 ..... II-72
Tabel 2.49 Capaian Akses Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022 ..... II-73
Tabel 2.50 Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Minum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-73
Tabel 2.51 Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-74
Tabel 2.52 Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah ..... II-77
Tabel 2.53 Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2016 – 2022 ..... II-77
Tabel 2.54 Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021 ..... II-78
Tabel 2.55 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-79
Tabel 2.56 Jumlah embung di Jawa Tengah berdasarkan sumbernya ..... II-80
Tabel 2.57 Pengelolaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022 ..... II-80
Tabel 2.58 Bangunan Gedung Yang Sudah Dilakukan Pendataan Teknis ..... II-81
Tabel 2.59 Hasil Pendataan Kondisi Bangunan Gedung Provinsi Jawa Tengah ..... II-81
Tabel 2.60 Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-82
Tabel 2.61 Backlog Kepenghunian dan Kepemilikan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022 ..... II-84
Tabel 2.62 Pembangunan Baru Rumah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 ..... II-85
Tabel 2.63 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2022 ..... II-85
Tabel 2.64 Penanganan Rumah Terdampak Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 Melalui APBD Prov ..... II-88
Tabel 2.65 Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan SK Kumuh Sampai Dengan Tahun 2022 Di Provinsi Jawa Tengah ..... II-89
Tabel 2.66 Perkembangan Jumlah Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-90
Tabel 2.67 Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-91

Tabel 2.68 Persebaran Terminal Tipe C di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-92
Tabel 2.69 Kondisi dan Status Aset Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-93
Tabel 2.70 Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-94
Tabel 2.71 Perkembangan pelayanan Angkutan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-95
Tabel 2.72 Jumlah Halte Pelayanan Trans Jateng Tahun 2018 – 2022 ..... II-96
Tabel 2.73 Hierarki Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah ..... II-97
Tabel 2.74 Perkembangan Pelayanan Angkutan Laut di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-98
Tabel 2.75 Perkembangan Pelayanan ASDP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-98
Tabel 2.76 Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-99
Tabel 2.77 Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-101
Tabel 2.78 Progres Revitalisasi Jalur Kereta Api Non Aktif di Jawa Tengah ..... II-102
Tabel 2.79 Tingkat Fasilitas Kecelakaan Lalu Lintas di Jawa Tengah 2018-2022 ..... II-103
Tabel 2.80 Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-103
Tabel 2.81 Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang dan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang di Perlintasan Sebidang KA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-104
Tabel 2.82 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-104
Tabel 2.83 Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di Ruas Jalan Provinsi yang Belum Tertangani Tahun 2022 ..... II-104
Tabel 2.84 Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Tahun 2022 ..... II-105
Tabel 2.85 Pelaksanaan Ramp Check di Terminal Tipe B Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-106
Tabel 2.86 Perlintasan Rel Kereta Api di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-106
Tabel 2.87 Perlintasan Rel Kereta Api di Ruas Jalan Provinsi Tahun 2022 ..... II-106
Tabel 2.88 Aktivitas dan Kondisi Fasilitas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-108
Tabel 2.89 Kebutuhan Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan di Jawa Tengah ..... II-109
Tabel 2.90 Perkembangan Jumlah Penumpang Moda Transportasi Umum di Perkotaan yang Dilayani Trans Jateng Tahun 2018 – 2022 ..... II-110
Tabel 2.91 Persentase Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng Pelayanan Trans Jateng Tahun 2021 – 2022 ..... II-111
Tabel 2.92 Rekapitualasi Perbandingan Pendapatan dan Biaya Operasional Layanan Trans Jateng Tahun 2017-2022 ..... II-111
Tabel 2.93 Rekapitulasi Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022 ..... II-112

Tabel 2.94 Rekapitulasi Perbandingan Anggaran Operasional Dan Perhitungan Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022 ..... II-113
Tabel 2.95 Jumlah Penumpang (Orang) Pada Masa Angkutan Lebaran dan Nataru ..... II-113
Tabel 2.96 Penerbitan Surat Persetujuan Ijin Operasi (SPIO) Untuk Angkatan Sewa Khusus / Daring (Online) Tahun 2018-2022 ..... II-114
Tabel 2.97 Kondisi PETI di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-115
Tabel 2.98 Perkembangan Good Mining Practice (GMP) di Jawa Tengah Tahun 2016-2021 ..... II-116
Tabel 2.99 Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah lanjut usia terlantar Tahun 2018-2022..... II-117
Tabel 2.100 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2021 ..... II-118
Tabel 2.101 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022..... II-125
Tabel 2.102 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022..... II-126
Tabel 2.103 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022 (%) ..... II-127
Tabel 2.104 Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi di Provinsi Jawa Tengah 2018-2022 (%) ..... II-127
Tabel 2.105 Kondisi Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Nasional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (%)..... II-128
Tabel 2.106 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018 – 2022..... II-129
Tabel 2.107 Perkembangan Warisan Budaya Benda (WBB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022 ..... II-130
Tabel 2.108 Capaian SDI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2022 ..... II-131
Tabel 2.109 Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Provinsi Jawa Tengah (Persen) Tahun 2016 - 2022 ..... II-131
Tabel 2.110 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021..... II-132
Tabel 2.111 Sebaran APK SMA/SMK/Sederajat di Jawa Tengah Tahun 2017-2021 ..... II-134
Tabel 2.112 Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 ..... II-135
Tabel 2.113 Sertifikat Kompetensi Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2021 ..... II-135
Tabel 2.114 Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2021 ..... II-135
Tabel 2.115 Kondisi Sarpras Pendidikan Tahun 2018-2021 ..... II-136
Tabel 2.116 Kemampuan Literasi, Numerasi dan karakter Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2022-2023..... II-136
Tabel 2.117 Prevalensi Stunting Jawa Tengah Tahun 2018-2022..... II-141

Tabel 2.118 Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-144
Tabel 2.119 Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022 ..... II-144
Tabel 2.120 Perkembangan Desa/Kelurahan ODF Di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-145
Tabel 2.121 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%) ..... II-145
Tabel 2.122 Populasi dan Penanganan PPKS di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-146
Tabel 2.123 Kondisi PSKS Tahun 2018-2022 ..... II-147
Tabel 2.124 Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-148
Tabel 2.125 Jumlah dan Kondisi Bangunan Panti Sosial Provinsi Jawa Tengah 2022 ..... II-149
Tabel 2.126 Kondisi dan Kebutuhan SDM Panti Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-149
Tabel 2.127 Pembentukan SLRT Desa/Kelurahan s/d Tahun 2021 ..... II-150
Tabel 2.128 Keterserapan Bansos Tahun 2022 ..... II-151
Tabel 2.129 Data KUBE Di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-151
Tabel 2.130 TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%) ..... II-153
Tabel 2.131 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-155
Tabel 2.132 Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-155
Tabel 2.133 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%) ..... II-156
Tabel 2.134 Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-156
Tabel 2.135 Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-157
Tabel 2.136 Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-157
Tabel 2.137 Jumlah Not in Employment, Education or Training (NEET) di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-158
Tabel 2.138 Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2018 - 2022 ..... II-158
Tabel 2.139 Kondisi Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-160
Tabel 2.140 Kondisi Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-160
Tabel 2.141 Jenis Kekerasan Yang Dialami Perempuan dan Anak 2018-2022 ..... II-161

Tabel 2.142 Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022 ..... II-162
Tabel 2.143 Perkembangan CPR, TFR dan Unmetneed 2018-2022 ..... II-164
Tabel 2.144 Perkembangan Tri Bina 2018-2022 ..... II-163
Tabel 2.145 Perkembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-164
Tabel 2.146 Perkembangan Prestasi Olahraga Jawa Tengah pada Kejuaraan Tingkat Nasional ..... II-165
Tabel 2.147 Capaian SDI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2022 ..... II-166
Tabel 2.148 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022 ..... II-166
Tabel 2.149 Koleksi Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-167
Tabel 2.150 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa TengahTahun 2018-2022 (Orang) ..... II-168
Tabel 2.151 Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-169
Tabel 2.152 Besaran Emisi GRK Untuk Setiap Sektor Pada Tahun 2022 ..... II-175
Tabel 2.153 Aksi Penurunan Emisi GRK untuk Setiap Sektor pada Tahun 2022 ..... II-177
Tabel 2.154 Besaran Penurunan Emisi GRK Tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada Tahun 2019–2022 ..... II-179
Tabel 2.155 Lokasi Prioritas Ketahanan Iklim di Provinsi Jawa Tengah ..... II-179
Tabel 2.156 Kualitas Air Sungai di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-181
Tabel 2.157 Persentase Sampah Yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-182
Tabel 2.158 Data TPA di Jawa Tengah per Tahun 2023 ..... II-183
Tabel 2.159 Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2018 – 2022 ..... II-186
Tabel 2.160 Rekapitulasi Jumlah Perusahaan di Provinsi Jawa Tengah yang Mengikuti Proper Nasional Tahun 2021-2022 ..... II-186
Tabel 2.161 Luas Lahan Kritis Dan Penanganannya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022 ..... II-187
Tabel 2.162 Daerah Aliran Sungai Prioritas di Provinsi Jawa Tengah ..... II-188
Tabel 2.163 Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-189
Tabel 2.164 Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove di Jawa Tengah ..... II-189
Tabel 2.165 Rehabilitasi Mangrove Tahun 2018-2022 Di Jawa Tengah ..... II-190
Tabel 2.166 Produksi Kayu Dari Hutan Rakyat dan Hutan Negara Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-190
Tabel 2.167 Jumlah Pengguna Kawasan, Industri Pengolahan Hasil Hutan dan SVLK di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-191
Tabel 2.168 Perkembangan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah Tahun 2018–2022 ..... II-191
Tabel 2.169 Update Status RTRW Kab/Kota Di Jateng ..... II-192

Tabel 2.170 Progress Legislasi RDTR Kab/Kota Di Jateng ..... II-195
Tabel 2.171 Rata – Rata Luasan RTH Di Kawasan Perkotaan Jawa Tengah ..... II-199
Tabel 2.172 Tabel Hasil Pengawasan Kinerja Penyelenggaran Penataan Ruang..... II-201
Tabel 2.173 Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022..... II-204
Tabel 2.174 Rasio Ketersediaan Daya Listrik Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-204
Tabel 2.175 Indeks Ketersediaan Air Tanah di Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022..... II-209
Tabel 2.176 Potensi Air Tanah pada 31 CAT di Jawa Tengah..... II-209
Tabel 2.177 Potensi Ancaman Kekeringan Desa/Kelurahan di Jawa Tengah ..... II-211
Tabel 2.178 Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-221
Tabel 2.179 Kejadian Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018– 2022..... II-222
Tabel 2.180 Jumlah Korban Akibat Bencana di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-222
Tabel 2.181 Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-223
Tabel 2.182 Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Tengah..... II-224
Tabel 2.183 Indeks Risiko Bencana Berdasarkan Kabupaten/Kota ..... II-224
Tabel 2.184 Pemasangan EWS Dan Rambu Jalur Evakuasi Tahun 2018 – 2022 ..... II-225
Tabel 2.185 Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2016 – 2022 ..... II-225
Tabel 2.186 Data Bantuan Tidak Terduga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 ..... II-226
Tabel 2.187 Catatan Hasil Evaluasi dari Kemenpan RB Tahun 2021 - 2022 ..... II-227
Tabel 2.188 Tingkat Kematangan Keamanan Informasi Dalam Kurun Waktu 2020 s.d 2022 ..... II-239
Tabel 2.189 Jumlah Dokumen Penelitian dan Rekomendasi/Implementasi Penelitian ..... II-242
Tabel 2.190 Jumlah Tenant Binaan Inwinov Jateng yang difasilitasi Program Penguatan Inkubator/Tenant..... II-243
Tabel 2.191 Jumlah Inovasi Hasil Krenova di Jawa Tengah Tahun 2017-2022 ..... II-244
Tabel 2.192 Capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-244
Tabel 2.193 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2018-2022..... II-245
Tabel 2.194 Jumlah Pengunjung Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ..... II-245
Tabel 2.195 Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-246
Tabel 2.196 Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-246

Tabel 2.197 PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Mengajukan Tugas Belajar ..... II-248
Tabel 2.198 Peningkatan Kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2018-2022 ..... II-248
Tabel 2.199 Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2017-2022 ..... II-251
Tabel 2.200 Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Jawa TengahTahun 2017-2022 ..... II-251
Tabel 2.201 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2022 ..... II-252
Tabel 2.202 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-255
Tabel 2.203 Penetapan lokasi aktif Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-256
Tabel 2.204 Capaian Penerbitan Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ..... II-257
Tabel 2.205 Capaian Kinerja urusan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 ..... II-257
Tabel 2.206 Capaian Sertifikasi Lahan LP2B Di Jawa TengahTahun 2022 ..... II-258
Tabel 2.207 Capaian Reforma Agraria Di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-258
Tabel 2.208 Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022 ..... II-266
Tabel 2.209 Penyelesaian Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 ..... II-266
Tabel 2.210 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-267
Tabel 2.211 Rekapitulasi Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023 ..... II-268
Tabel 2.212 Isu Strategis Global, Nasional, dan Daerah ..... II-282
Tabel 3.1 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2024 ..... III-4
Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2022 ..... III-6
Tabel 3.3 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2022 (%) ..... III-7
Tabel 3.4 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... III-8
Tabel 3.5 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2022 ..... III-10
Tabel 3.6 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... III-13
Tabel 3.7 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2022 ..... III-13
Tabel 3.8 Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... III-14
Tabel 3.9 Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... III-14

Tabel 3.10 Realisasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... III-15
Tabel 3.11 Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... III-16
Tabel 3.12 Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... III-17
Tabel 3.13 Rekapitulasi Alokasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Tahun 2022 ..... III-19
Tabel 3.14 Realisasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Tahun 2022 ..... III-19
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2024 ..... IV-2
Tabel 4.2 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah Pada Musrenbang Provinsi Tahun 2024 ..... IV-3
Tabel 4.3 Konsistensi Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah RPD Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2024, serta Konsistensi Permasalahan Daerah, Isu Strategis, dan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2024 ..... IV-26
Tabel 4.4 Program Prioritas Daerah Mendukung Tema Pembangunan dan Prioritas Daerah Disertai Pagu Indikatif Tahun 2024 ..... IV-28
Tabel 4.5 Keselarasan Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 ..... IV-181
Tabel 4.6 Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 ..... IV-182
Tabel 4.7 Keselarasan Target Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2024 dengan Target Pengembangan Wilayah Jawa Tengah Dalam RKP Tahun 2024 ..... IV-182
Tabel 4.8 Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024 ..... IV-182
Tabel 5.1 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Kedungsepur Tahun 2022 ..... V-6
Tabel 5.2 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Kedungsepur Tahun 2024 ..... V-8
Tabel 5.3 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Jekutibanglor Tahun 2022 ..... V-12
Tabel 5.4 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Jekutibanglor Tahun 2024 ..... V-15
Tabel 5.5 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Purwomanggung Tahun 2022 ..... V-18
Tabel 5.6 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Purwomanggung Tahun 2024 ..... V-21
Tabel 5.7 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Subosukawonosraten Tahun 2022 ..... V-24
Tabel 5.8 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Subosukawonosraten Tahun 2024 ..... V-26
Tabel 5.9 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Bregasmalang Tahun 2022 ..... V-29

Tabel 5.10 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Bregasmalang Tahun 2024 ..... V-32
Tabel 5.11 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Barlingmascakeb Tahun 2022 ..... V-35
Tabel 5.12 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Barlingmascakeb Tahun 2024 ..... V-37
Tabel 5.13 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Petanglong Tahun 2022 ..... V-40
Tabel 5.14 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Petanglong Tahun 2024 ..... V-42
Tabel 6.1 Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... VI-1
Tabel 6.2 Rencana Program Priotitas dan Pagu Indikatif Profinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... VI-27
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... VII-1
Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... VII-2

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen ..... I-5
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah ..... II-2
Gambar 2.2 Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-15
Gambar 2.3 Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2022..... ..... II-16
Gambar 2.4 Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022(%) ..... II-17
Gambar 2.5 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022..... II-18
Gambar 2.6 Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2022 ..... II-20
Gambar 2.7 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022..... II-20
Gambar 2.8 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 ..... II-21
Gambar 2.9 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022..... II-22
Gambar 2.10 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 ..... II-22
Gambar 2.11 Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 dan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 – 2022 dengan Wilayah Setara .... II-24
Gambar 2.12 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 ..... II-25
Gambar 2.13 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional (c-to-c), Tahun 2011 – 2022 (Persen)..... II-28
Gambar 2.14 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (y-on-y) Tahun 2017-2022 (Persen) ..... II-28
Gambar 2.15 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (q-to-q), Per-Triwulan Tahun 2017 -2022 (Persen) ..... II-29
Gambar 2.16 Laju Pertumbuhan PDRB dan Distribusi PDRB Menurut Provinsi Sepulau Jawa Pada Triwulan IV-2022 (yoy, persen) ..... II-29
Gambar 2.17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi Se Pulau Jawa dan Nasional Pada Tahun 2022 (c-to-c, persen)..... II-30
Gambar 2.18 Peta Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (c-to-c, persen)..... II-38
Gambar 2.19 PDRB Per Kapita Jawa Tengah Dibandingkan Nasional Tahun 2010 – 2022..... II-39

Gambar 2.20 PDRB Per Kapita Provinsi Se Pulau Jawa Tahun 2022 ..... II-39
Gambar 2.21 PDRB Per Kapita Kabupaten / Kota Se Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-41
Gambar 2.22 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – Maret 2023 (%) ..... II-42
Gambar 2.23 Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022 ..... II-42
Gambar 2.24 Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2021 ..... II-43
Gambar 2.25 Nilai IDSD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan 2021 ..... II-44
Gambar 2.26 Kawasan Industri Eksisting di Provinsi Jawa Tengah ..... II-47
Gambar 2.27 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022..... II-48
Gambar 2.28 Gambar 2.28.Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022..... II-48
Gambar 2.29 Perkembangan Produksi Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2018-2022 ..... II-49
Gambar 2.30 Perkembangan Produksi Bawang Merah, Cabai Besar Tahun 2018-2022 ..... II-50
Gambar 2.31 Perkembangan Produksi Tebu, Kopi, Kelapa Tahun 2018-2022 ..... II-50
Gambar2.32 Perkembangan Populasi Sapi Potong dan Kambing Tahun 2018-2022 ..... II-51
Gambar 2.33 Perkembangan Produksi Daging, Susu, Telur Tahun 2018-2022 ..... II-52
Gambar 2.34 Indeks Ketahanan Pangan Jawa Tengah Tahun 2019 - 2022..... II-52
Gambar 2.35 Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022..... II-53
Gambar 2.36 Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022..... II-55
Gambar 2.37 Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022..... II-57
Gambar 2.38 Produksi Garam (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022 ..... II-58
Gambar 2.39 Angka Konsumsi Ikan di Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-59
Gambar 2.40 Persentase Sungai Dalam Kondisi Baik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022 (%)..... II-77
Gambar 2.41 Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah (Juta m3) Tahun 2017 - 2022 ..... II-79
Gambar 2.42 Persebaran Jumlah Sisa RTLH di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022..... II-87
Gambar 2.43 Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah..... II-90
Gambar 2.44 Sebaran Pelabuhan Laut Strategis di Jawa Tengah ..... II-97
Gambar 2.45 Apron, Terminal dan Runway Bandara Dewadaru Karimunjawa ..... II-100
Gambar 2.46 Apron dan Terminal Bandara Ngloram Kabupaten Blora ..... II-100
Gambar 2.47 Apron dan Runway Bandara J.B. Soedirman Purbalingga ..... II-101
Gambar 2.48 Peta Jaringan Loop Rel Kereta Api di Jawa Tengah ..... II-101

Gambar 2.49 Distribusi Perjalanan Antar Wilayah Perkotaan Di Jawa Tengah ..... II-109
Gambar 2.50 Peta Potensi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah ..... II-115
Gambar 2.51 Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2021 ..... II-119
Gambar 2.52 IPM Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-120
Gambar 2.53 Pengeluaran/kapita/thn disesuaikan Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-121
Gambar 2.54 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-122
Gambar 2.55 Harapan Lama Sekolah (HLS) Jateng dan Nasional Tahun 2018 - 2022 ..... II-123
Gambar 2.56 Usia Harapan Hidup (UHH) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-123
Gambar 2.57 Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Tetangga dan Nasional Tahun 2021 ..... II-124
Gambar 2.58 IPG Provinsi Jawa Tengah Beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2022 ..... II-126
Gambar 2.59 APK SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022 ..... II-132
Gambar 2.60 Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun dan Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan TIK di Jawa Tengah Tahun 2017-2022 (%) ..... II-137
Gambar 2.61 Tren Kasus Kematian Balita Tahun 2018-2022 ..... II-138
Gambar 2.62 Tren Kasus Kematian Bayi Tahun 2018-2022 ..... II-139
Gambar 2.63 Tren Kasus Kematian Balita Tahun 2018-2022 ..... II-139
Gambar 2.64 Tren Kasus Balita Gizi Buruk Tahun (BB/TB) 2018-2022 ..... II-140
Gambar 2.65 Angka Prevalensi Stunting Provinsi Jawa Tengah dibandingkan Provinsi Lainnya Tahun 2022 ..... II-141
Gambar 2.66 Angka Prevalensi Stunting Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan SSGBI 2019 dan SSGI 2021 ..... II-142
Gambar 2.67 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – Agustus 2022 (%) ..... II-152
Gambar 2.68 Struktur Ketenagakerjaan Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-152
Gambar 2.69 Karakteristik Penduduk bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Agustus 2022 ..... II-153
Gambar 2.70 Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022 (%) ..... II-153
Gambar 2.71 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah) ..... II-154
Gambar 2.72 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2022 (Juta Rupiah) ..... II-154
Gambar 2.73 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-159
Gambar 2.74 Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 ..... II-167
Gambar 2.75 Capaian Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat (NTGM) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 ..... II-168

Gambar 2.76 Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Air Provinsi Jawa Tengah ..... II-170
Gambar 2.77 Peta Status Daya Dukung air dan Daya Tampung Pangan Provinsi Jawa Tengah ..... II-171
Gambar 2.78 Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Pangan Provinsi Jawa Tengah ..... II-172
Gambar 2.79 *Peta* Status *Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah* ..... II-172
Gambar 2.80 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022 ..... II-173
Gambar 2.81 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 ..... II-173
Gambar 2.82 Peta Kerentanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-175
Gambar 2.83 Tren Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2021 ..... II-176
Gambar 2.84 Aksi Penurunan Emisi GRK Setiap Sektor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2022 ..... II-177
Gambar 2.85 Jumlah Limbah B3 Per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-185
Gambar 2.86 Sistem Ketenagalistrikan Jawa Tengah dan DIY ..... II-202
Gambar 2.87 Konsumsi Energi Listrik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2022 (GWh) ..... II-203
Gambar 2.88 Program Listrik Gratis di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2022 (Unit) ..... II-204
Gambar 2.89 Potensi Teknis PLTS Terapung di Jawa Tengah ..... II-206
Gambar 2.90 Potensi Biogenic Shallow Gas (Gas Rawa) di Jawa Tengah..... II-206
Gambar 2.91 Potensi Panas Bumi di Jawa Tengah ..... II-207
Gambar 2.92 Persentase EBT Dalam Bauran Energi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2022 ..... II-208
Gambar 2.93 Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Jawa Tengah ..... II-210
Gambar 2.94 Peta Titik Lokasi Sumur Bor Badan Geologi dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah overlay dengan Peta Bencana Rawan Kekeringan ..... II-211
Gambar 2.95 Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah..... II-223
Gambar 2.96 Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah ..... II-226
Gambar 2.97 Jumlah UPP Bersertifikasi ISO dan UPP Yang Melakukan Pengukuran IKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 (Unit) ..... II-228
Gambar 2.98 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 ..... II-229
Gambar 2.99 Indeks SPBE Provinsi..... II-229
Gambar 2.100 Perkembangan Anggaran Diskominfo Tahun 2018-2023 ..... II-230
Gambar 2.101 Target dan Realisasi Indeks SPBE Tahun 2019-2023 ..... II-231
Gambar 2.102 Gambar Rencana Bangunan Data Center Provinsi Jawa Tengah..... II-232
Gambar 2.103 Topologi Jaringan Perangkat Daerah..... II-232
Gambar 2.104 Topologi Jaringan Metro Kab/Kota..... II-233
Gambar 2.105 Kegiatan Live Streaming dan Video Conference ..... II-233

Gambar 2.106 Aplikasi Terintegrasi ..... II-234
Gambar 2.107 Capaian Kinerja Laju Pemanfaatan Data Sektoral ..... II-236
Gambar 2.108 Grafik Kunjungan Portal Data Tahun 2018-2022 ..... II-237
Gambar 2.109 Tampilan Aplikasi Portal Data Jawa Tengah ..... IV-238
Gambar 2.110 Perkembangan Jumlah PNS Provinsi Jawa Tengah Kurun Waktu Tahun 2018-2022 ..... IV-247
Gambar 2.111 Persentase Kepemilikan KTP (KTP-el) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 ..... IV-249
Gambar 2.112 Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (%) ..... IV-250
Gambar 2.113 Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2022 ..... IV-253
Gambar 2.114 Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2021 ..... IV-254
Gambar 2.115 Rekap Kejadian Konflik di Provinsi Jawa Tengah ..... IV-265
Gambar 5.1 Konsep Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah ..... V-2
Gambar 5.2 Konsep Arahan Pengembangan Wilayah Jawa Tengah ..... V-3
Gambar 5.3 Persandingan Sektor Unggulan Berdasarkan RTRWP ..... V-5
Gambar 5.4 Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Kedungsepur Tahun 2022 ..... V-7
Gambar 5.5 Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur ..... V-8
Gambar 5.6 Arah Pengembangan Wilayah Kedungsepur ..... V-12
Gambar 5.7 Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Jekutibanglor Tahun 2022 ..... V-13
Gambar 5.8 Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Jekutibanglor ..... V-14
Gambar 5.9 Arah Pengembangan Wilayah Jekutibanglor ..... V-18
Gambar 5.10 Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Purwomanggung Tahun 2022 ..... V-19
Gambar 5.11 Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Purwomanggung ..... V-20
Gambar 5.12 Arah Pengembangan Wilayah Purwomanggung ..... V-23
Gambar 5.13 Nilai Dimensi IDSD Kabupaten/Kota di Subosukowonosraten ..... V-25
Gambar 5.14 Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Subosukowonosraten ..... V-26
Gambar 5.15 Arah Pengembangan Wilayah Subosukowonosraten ..... V-29
Gambar 5.16 Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Bregasmalang Tahun 2022 ..... V-30
Gambar 5.17 Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Bregasmalang ..... V-31
Gambar 5.18 Arah Pengembangan Wilayah Bregasmalang ..... V-34
Gambar 5.19 Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Barlingmascakeb Tahun 2022 ..... V-36
Gambar 5.20 Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb ..... V-37
Gambar 5.21 Arah Pengembangan Wilayah Barlingmascakeb ..... V-40

Gambar 5.22 Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Petanglong Tahun 2022 ..... V-41
Gambar 5.23 Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Petanglong..... V-42
Gambar 5.24 Arah Pengembangan Wilayah Petanglong ..... V-45

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2024

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023. RPD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan masa transisi di mana RPJMD Tahun 2018-2023 telah berakhir sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2023. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026.

Dokumen RKPD Tahun 2024 disusun sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan perundang-undangan lainnya yang dipedomani dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2024 antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan-peraturan turunannya. Selain itu beberapa permendagri yang juga dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 yaitu Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2022, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 juga memperhatikan keberlanjutan dari kebijakan pembangunan dan capaian RPJMD Tahun 2018–2023 serta proyeksi dalam RKPD Tahun 2023. Dengan berpedoman pada kebijakan dalam RPD Tahun 2024-2026, maka RKPD Tahun 2024 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yaitu "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari" dengan empat sasaran yaitu meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Untuk itu, pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada "Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas". Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan; meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif; meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 didukung dengan 10 (sepuluh) program prioritas daerah meliputi: 1) Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 secara Luber dan Jurdil; 2) Menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat; 3) Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan; 4) Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan stunting; 5) Penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi serta kebakaran hutan dan lahan); 6) Peningkatan kualitas sistem pendidikan vokasi; 7) Pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif; 8) Pengembangan sistem Ekonomi Sirkular dan Transisi Energi; 9) Pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan 10) Meningkatkan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN).

RKPD Tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Jawa Tengah, serta dalam rangka upaya meningkatkan dukungan konvergensi dan percepatan perwujudan kebijakan nasional tahun 2024 terutama pada penurunan *stunting*, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, implementasi Satu Data Indonesia (SDI), dan perluasan implementasi Desa Anti Korupsi. Selanjutnya, dalam RKPD Tahun 2024 disusun dengan menyinergikan program strategis Jawa Tengah dengan kabupaten/kota serta memanfaatkan *competitive* dan *comparative advantage* wilayah. Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antarwilayah, lintas sektor, dan *pentahelix* pelaku pembangunan. Pengembangan pola kerja sama antarwilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah Jawa Tengah.

Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik serta berorientasi secara tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS). Selain itu penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil (*outcome*), terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif, berbasis risiko (*risk based planning*), dan berbasis pada riset (*research based planning*), dengan pendekatan *money follow program* dan *program follow result* serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan.

Dokumen RKPD Tahun 2024 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu tahun;
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja (renja) perangkat daerah; dan
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 meliputi: 1) Persiapan yaitu penyampaian surat edaran Gubernur Jawa Tengah tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan, serta pedoman penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2024; 2) Konsultasi publik sekaligus pembukaan masa musrenbang; 3) Forum perangkat daerah; 4) Musrenbang wilayah (musrenbangwil) dan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan daerah (rakortekbangda); 5) Musrenbang provinsi; 6) Fasilitasi RKPD Tahun 2024 oleh Kemendagri; 7) Pembahasan rancangan akhir RKPD dengan DPRD dalam bentuk dialog interaktif eksekutif dan legislatif; dan 8) Penetapan RKPD Tahun 2024.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12).

## 1.3. Hubungan Antardokumen

Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban merupakan satu siklus manajemen pembangunan yang berkelanjutan sehingga dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, maka RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD atau RPD yang disusun berdasarkan pada RPJPD. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada rencana strategis perangkat daerah (renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Dokumen RKPD ini akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS pada saat memasuki tahapan penganggaran. Selanjutnya pada saat pertanggungjawaban, maka dokumen RKPD ini akan dipertanggungjawabkan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah (LKPJ). Sehingga dokumen RKPD ini menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban.

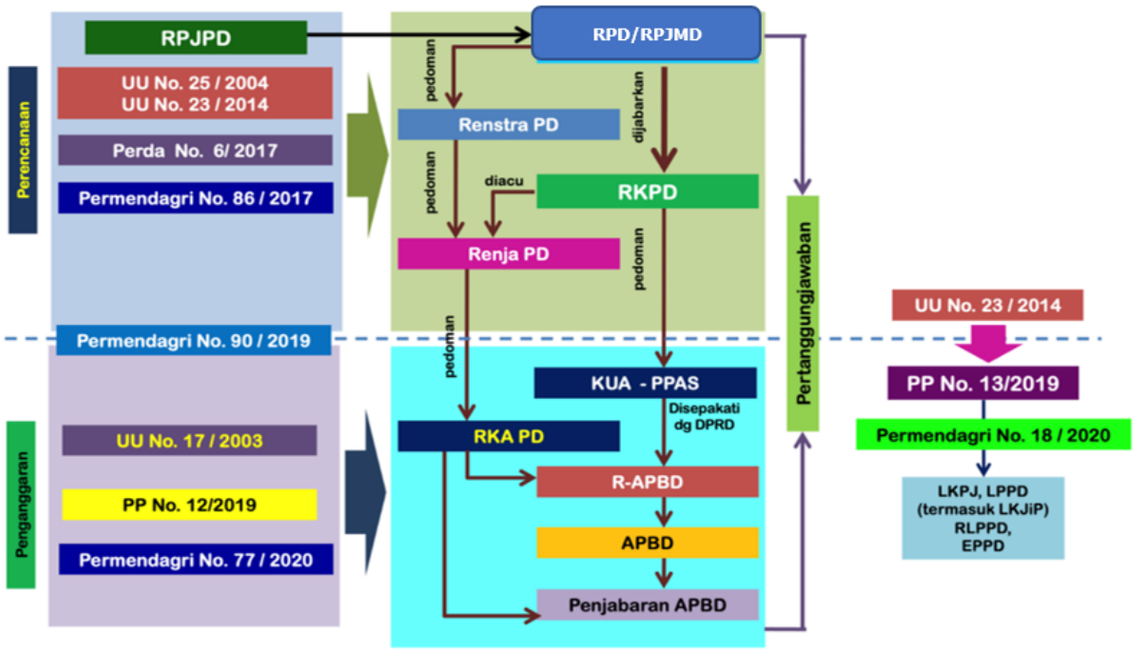


**Gambar 1.1.**
**Hubungan Antardokumen**

Selain itu, penyusunan dokumen RKPD juga tetap memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya baik yang sifatnya nasional, daerah, maupun sektoral. Dokumen tersebut antara lain dokumen tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/*sustainable development goals* (SDGs), *road map* reformasi birokrasi,

strategi penanggulangan kemiskinan, percepatan pencegahan *stunting*, pangan dan gizi, penurunan emisi gas rumah kaca, dan pengurangan risiko bencana. Keselarasan dengan dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2024.

## 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024; dan
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPD Tahun 2024-2026.

Tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2024;
2. Menjadi pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024; dan
3. Menjadi acuan penyelerasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota.

## 1.5. Sistematika

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

1. **Buku I,** narasi RKPD Tahun 2024 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antardokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2022 dan capaian RPJMD sampai dengan tahun 2022; permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi perekonomian daerah; arah kebijakan ekonomi daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2024, 10 program prioritas, pokir, keselarasan prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta inovasi pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun 2022 dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 dalam RPD.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Memuat arahan kebijakan pembangunan kabupaten/ kota yang ditetapkan oleh provinsi sebagai panduan penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2024.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang akan dicapai di tahun 2024.

BAB VIII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

2. **Buku II**, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, terdiri dari:
   1) Indikator Kinerja Utama Daerah;
   2) Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   3) Urusan wajib berkaitan pelayanan dasar;
   4) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
   5) Urusan pilihan;
   6) Unsur pendukung urusan pemerintahan;
   7) Unsur penunjang urusan pemerintahan;
   8) Unsur pemerintahan umum.
3. **Buku III**, Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

### 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

**a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.800,68 km$^2$ atau sebesar 25,34 persen dari luas pulau Jawa atau 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia. Secara administrasi terdiri dari 35 kabupaten/kota yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota, serta terdiri dari 576 kecamatan, 7.809 desa, dan 753 kelurahan, serta meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa.

Wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur pada bagian timur, Provinsi DIY pada bagian selatan, Provinsi Jawa Barat pada bagian barat, Laut Jawa pada bagian utara, dan Samudera Hindia pada bagian Selatan.

**b. Letak Geografis dan Kondisi Topografi**

Secara geografis terletak di tengah Pulau Jawa yang secara geografis berada di 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' – 111°30' Bujur Timur, sehingga secara ekonomi posisi sangat strategis karena berada di diantara dua titik pertumbuhan Pulau Jawa (Jakarta – Surabaya). Panjang garis pantai Jawa Tengah terbentang sejauh 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km.

Topografi wilayahnya sekitar 53 persen berada pada ketinggian 0-99 m dpl yaitu dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah. Dengan kemiringan lereng yang beragam meliputi lahan dengan kemiringan 0-2 persen sebesar 38 persen; lahan dengan kemiringan 2-15 persen sebesar 31 persen; lahan dengan kemiringan 15-40 persen sebesar 19 persen; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen sebesar 12 persen dari total wilayah.

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah. 2018*

**Gambar 2.1.**
**Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah**

**c. Kondisi Geologi**

Kondisi geologi terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jumlah gunung relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 5 (lima) gunung api aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), dan Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal). Gunung api rata-rata mempunyai tingkat ancaman bahaya vulkanik tinggi sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

Jenis tanah meliputi *organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, podsolik*, dan didominasi jenis tanah *latosol, aluvial*, serta *gromosol* yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi.

Potensi sumber daya mineral yang tersebar meliputi 32 jenis mineral non logam (*Phospat, Asbes, Talk, Mika, Leusite, Oker, Granit, Dasit, Diorit*, Batu Setengah Permata, Pasir Kuarsa, *Kaolin, Feldspar, Gips, Bentonite*, Batuapung, *Trass, Diatome, Marmer*, Batu gamping, *Dolomit, Basal, Andesit*, Tanah Liat, Pasir, Tanah urug, *Kalsit, Zeolit*, Sirtu, Batu Sabak, *Toseki*), serta 7 jenis mineral logam (Pasir Besi, Mangaan, Emas, Barit, Belerang, Pirit, dan Galena).

**d. Kondisi Hidrologi**

Kondisi hidrologi memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup banyak dengan 19 DAS diantaranya menjadi DAS prioritas untuk dipulihkan yaitu DAS Lasem, DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar, Jateng), DAS

Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), dan DAS Wawar Medono. Demikian juga sungai yang melintasi wilayah Jawa Tengah juga cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain. Dalam Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai di Jawa Tengah terdapat 10 (sepuluh) Wilayah Sungai (WS) yang kewenangan pengelolaannya terbagi pada kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah Sungai yang pengelolaanya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah adalah Wilayah Sungai Pemali Comal (panjang sungai 930,44 km dan luas DAS 4.425,36 km$^2$) dan Wilayah Sungai Bodri Kuto (panjang sungai 355,03 km dan luas DAS 1.647,40 km$^2$). Sedangkan 6 (enam) WS lainnya merupakan WS kewenangan Pusat dan 2 (dua) WS kewenangan kabupaten/kota.

**Tabel 2.1.**
**Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah**

| Kewenangan | Wilayah Sungai | Luas DAS (km$^2$) |
|---|---|---|
| Pusat | Cimanuk Cisanggarung | 6.888,35 |
| | Jratun Seluna | 9.576,01 |
| | Bengawan Solo | 19.778,00 |
| | Progo Opak Serang | 3.238,89 |
| | Serayu Bogowonto | 7.344,61 |
| | Citanduy | 4.450,44 |
| Provinsi | Pemali Comal | 4.425,36 |
| | Bodri Kuto | 1.647,40 |
| Kabupaten/Kota | Wiso Gelis | 654,27 |

*Sumber: Peraturan Menteri PUPR No 04/PRT/M/2015*

**e. Kondisi Klimatologi**

Suhu udara tahun 2022 berkisar antara 22,00C sampai dengan 35,20C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata antara 74,0 persen sampai dengan 86,0 persen. Curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Meteorologi Cilacap yaitu sebesar 4.661 mm3 dan hari hujan terbanyak tercatat di Stasiun Meteorologi Banjarnegara sebanyak 249 hari.

**f. Penggunaan Lahan**

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 3.436.615,35 hektar. Penggunaan lahan paling besar adalah sawah dengan luas 1.181.758,99 hektar (34,39%), dan luas penggunaan lahan terbesar selanjutnya adalah Kebun dengan luas 638.419,21 hektar (18,58%) dan Permukiman seluas 558.687,35 hektar (16,26%). Luas lahan sawah provinsi di Jawa Tengah mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2016, karena pada tahun tersebut luas lahan sawah sebesar 991.524 hektar (30,47). Penambahan luas lahan sawah merupakan salah satu komitmen Jawa Tengah dalam menjaga ketahanan pangan.

Sepanjang tahun 2014-2016, terjadi perubahan komposisi penggunaan lahan. Luas lahan sawah bertambah dari 990.652 hektar (30,44%) menjadi 991.524 hektar (30,47%), sementara lahan bukan sawah berkurang dari 2.263.760 hektar (69,56) menjadi 2.262.888 hektar (69,53%). Penambahan luas lahan sawah menunjukkan adanya upaya pengembangan sawah baru serta komitmen menjaga

pertanian lahan pangan berkelanjutan (LP2B). Penggunaan lahan di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2.**

**Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah 2019**

| No | Penggunaan Lahan | Luas (Ha) | Luas (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cagar Alam | 2.770,02 | 0,08 |
| 2 | Danau | 16.731,58 | 0,49 |
| 3 | Hutan Lindung | 86.866,17 | 2,53 |
| 4 | Hutan Produksi Terbatas | 181.439,19 | 5,28 |
| 5 | Hutan Produksi Tetap | 366.459,45 | 10,66 |
| 6 | Industri | 10.547,83 | 0,31 |
| 7 | Kebun | 638.419,21 | 18,58 |
| 8 | Lahan Terbuka | 5.179,25 | 0,15 |
| 9 | Mangrove | 2.894,14 | 0,08 |
| 10 | Pasir Darat | 178,62 | 0,01 |
| 11 | Permukiman | 558.687,35 | 16,26 |
| 12 | Sawah | 1.181.758,99 | 34,39 |
| 13 | Semak | 30.941,91 | 0,90 |
| 14 | Suaka Margasatwa | 102,48 | 0,00 |
| 15 | Sungai | 23.718,78 | 0,69 |
| 16 | Taman Hutan Raya | 2.318 | 0,01 |
| 17 | Taman Nasional | 11.888,17 | 0,35 |
| 18 | Taman Nasional Laut | 183,65 | 0,01 |
| 19 | Taman Wisata Alam | 216,39 | 0,01 |
| 20 | Tambak | 56.925,79 | 1,66 |
| 21 | Tegalan | 260.456,73 | 7,58 |
| | **TOTAL** | 3.438.683,70 | **100,00** |

*Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**g. Potensi Pengembangan Wilayah**

Wilayah Jawa Tengah memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus potensi wilayah yang harus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya alamnya.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, potensi dan karakter wilayahnya dibagi atas 8 wilayah pengembangan yang terdiri dari Wilayah Pengembangan (WP) Barlingmascakeb, Purwomanggung, Subosukawonosraten, Banglor, Wanarakuti, Kedungsepur, Petanglong, dan Bregasmalang. Potensi keseluruhan terbagi sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung, sebagaimana tertuang dibawah ini:

**1. Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, serta pesisir dan pulau-pulau kecil.

a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 546.290 hektar terbagi ke dalam 20 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), dengan fungsi hutan sebagai hutan produksi terbatas seluas ±362.360 hektar, dan hutan produksi tetap seluas ±183.930 hektar. Kawasan hutan produksi terbatas berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Sukoharjo) dan satu kota yaitu Kota Semarang. Sedangkan kawasan hutan produksi

tetap berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Karanganyar).

b) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat seluas 345.822,96 hektar (10,63% luas Jawa Tengah), berada di 29 kabupaten dan 5 kota, kecuali Kota Tegal.

c) Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah seluas ±990.652 hektar, dan kawasan pertanian lahan kering seluas ± 995.587 hektar, yang diarahkan dikembangkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Lahan pertanian basah dan kering tersebut dikelola untuk mendukung program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Provinsi Jawa Tengah dengan rencana seluas 1.022.570 hektar.

d) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan di Provinsi Jawa Tengah seluas ±885.344 hektar, terdiri dari perkebunan rakyat seluas 845.668 hektar (96%), PTPN IX seluas 28.212 hektar (3%), dan Perkebunan Besar Swasta/PBS seluas 11.464 hektar (1%).

e) Kawasan Peruntukan Peternakan

Pengembangan kawasan peruntukan peternakan meliputi kawasan peternakan besar, kecil dan kawasan peternakan unggas yang diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

f) Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan seluas ±24.802 hektar, diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dan difungsikan menjadi lokasi budidaya ikan. Kawasan perikanan tersebut meliputi:

1) Kawasan perikanan tangkap, diarahkan pada perairan pantai utara dan pantai selatan, danau, waduk, rawa, sungai dan embung;
2) Kawasan perikanan budidaya (air tawar, air payau, air laut), diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

g) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Potensi kawasan peruntukan pertambangan hampir merata di sebagian besar wilayah kabupaten/kota, meliputi:

1) Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan, dan batu bara, terletak di kawasan Majenang-Bantarkawung, Serayu-Pantai Selatan, Serayu-Pantai Utara, Gunung Slamet, Sindoro-Sumbing–Dieng, Merapi-Merbabu-Ungaran, Gunung Muria, Pegunungan Kendeng Utara, Kendeng Selatan, dan Gunung Lawu;
2) Kawasan pertambangan panas bumi, terletak di 9 (sembilan) lokasi komplek/kawasan panas bumi yang ada di 15 kabupaten, yaitu Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi Dieng, Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, Gunung Lawu, Baturraden, Guci, Banyugaram, Mangunan-Wanayasa, dan Condrodimuka;
3) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terletak di Wilayah Kerja Migas di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Grobogan, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal,

Brebes, Kota Semarang, Salatiga, Pekalongan, Tegal, dan pengembangan sumur tua/marjinal yang tersebar di Kabupaten Blora, Grobogan dan Kendal.

h) Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri skala wilayah diarahkan untuk pengembangan produk-produk unggulan berbasis industri manufaktur. Wilayah industri/kawasan peruntukan industri tersebar di semua kabupaten/kota di Jawa Tengah kecuali Kota Magelang dan Kota Surakarta, sedangkan kawasan berikat berada di Kabupaten Cilacap, Semarang, Kendal dan Kota Semarang.

i) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata, meliputi koridor Borobudur–Prambanan–Surakarta; Borobudur-Dieng; Semarang–Demak–Kudus–Jepara–Pati–Rembang–Blora; Semarang–Ambarawa–Salatiga; Batang –Pekalongan–Pemalang–Tegal–Brebes;Cilacap–Banyumas–Purbalingga–Banjarnegara; dan Cilacap–Kebumen–Purworejo.

j) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Jawa Tengah tersebar di seluruh kabupaten/kota, meliputi:

1) Kawasan permukiman perdesaan diarahkan pada kawasan-kawasan yang sudah ada dan perluasan areal dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan pertanian yang merupakan peruntukan dominan di perdesaan;
2) Kawasan permukiman perkotaan diarahkan pada intensifikasi kawasan-kawasan yang sudah ada melalui upaya pembangunan ke arah vertikal dan perluasan kawasan perkotaan, diikuti upaya pengendalian sehingga tidak mengganggu kawasan peruntukan lainnya terutama sawah di pinggiran kawasan perkotaan.

k) Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada kawasan pesisir yang terletak di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Di Jawa Tengah terdapat 33 pulau-pulau kecil dimana 27 (dua puluh tujuh) pulau terletak di Kepulauan Karimunjawa, 2 (dua) pulau di Kabupaten Jepara (Pulau Panjang, dan Pulau Mandalika); 3 (tiga) pulau di Kabupaten Rembang (Pulau Marongan, Gede dan Sualan,); serta Pulau Nusakambangan di Kabupaten Cilacap.

**2. Kawasan Lindung**

Target rencana Kawasan lindung di Jawa Tengah tahun 2009–2029 seluas 561.404 hektar (17,4% dari luas wilayah provinsi). Pemanfaatan ruang hutan lindung fisiografis merupakan sub kawasan lindung yang paling besar, sedangkan pemanfaatan ruang yang paling kecil adalah kawasan pantai dan sempadan.

a) Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung yang dikelola oleh negara diarahkan penyebarannya di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar,

Sragen, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Brebes. Untuk kawasan hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat terus didorong setidaknya mencapai minimal 10% melalui alih fungsi lahan tidak produktif, yang diarahkan pengembangannya di 29 kabupaten dan 3 kota (Magelang, Salatiga, dan Semarang).

b) Kawasan yang Memberikan Perlindungan bagi Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya berbentuk kawasan resapan air. Luas kawasan resapan air di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan seluas ±114.822 hektar. Kawasan resapan air tersebar di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

c) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar danau/waduk/rawa. Luas kawasan perlindungan setempat ditetapkan minimal seluas ±59.918 hektar, meliputi:

1) Kawasan sempadan sungai, direncanakan berada pada semua wilayah kabupaten/kota yang dilewati oleh sungai, seluas ±23.583 hektar;
2) Kawasan sempadan pantai, direncanakan seluas ±8.786 hektar yang terdiri dari kawasan pesisir pantura dan pansela sejauh 100 meter dari garis pasang tertinggi; dan kawasan pesisir pulau-pulau kecil sejauh 50 meter dari garis pasang tertinggi;
3) Kawasan sekitar danau/waduk/rawa, direncanakan seluas ±24.618,2 hektar, yang terdiri dari kawasan sempadan pagar terhadap danau/waduk/rawa sejauh 50 meter dari titik pasang tertinggi danau/waduk/rawa; dan kawasan sempadan bangunan terhadap danau/waduk/rawa sejauh paling sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan waduk tersebar di 15 kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Pati, Semarang, Pemalang, Tegal dan Brebes;
4) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan pengembangan RTH tersebar di tiap kabupaten/kota, terdiri dari RTH publik dan RTH privat, dengan luas minimal 30% dari kawasan perkotaan. Proporsi RTH publik minimal 20% sedangkan RTH privat 10%.

d) Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya meliputi:

1) Daerah perlindungan plasma nutfah, tersebar di 29 kabupaten dan 4 kota, yaitu Kota Magelang, Salatiga, Semarang, dan Tegal;
2) Kawasan perlindungan plasma nutfah perairan, tersebar di kabupaten/ kota sepanjang pantai utara dan pantai selatan.

e) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya.

Kawasan lindung ini terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, suaka alam laut dan perairan, kawasan pantai berhutan bakau, taman wisata alam, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi:

1) Kawasan cagar alam, taman wisata alam, dan suaka marga satwa tersebar di 4 konservasi wilayah, meliputi Pati, Surakarta, Cilacap dan Pemalang, dengan luas yang telah ditetapkan sebesar ±2.923,3 hektar. Sebaran kawasan ini selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.3.**
**Sebaran Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa di Provinsi Jawa Tengah**

| No | Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Suaka Margasatwa | Lokasi | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|
| **A** | **Konservasi Wilayah I Pati** | | |
| 1 | Cagar Alam Keling I a, b, c | Kabupaten Jepara | 6,8 |
| 2 | Cagar Alam Keling II, III | Kabupaten Jepara | 61 |
| 3 | Cagar Alam Kembang | Kabupaten Jepara | 1,8 |
| 4 | Cagar Alam Gunung Celering | Kabupaten Jepara | 1328,4 |
| 5 | Cagar Alam Bekutuk | Kabupaten Blora | 25,4 |
| 6 | Cagar Alam Cabak I/II | Kabupaten Blora | 30 |
| 7 | Cagar Alam Gunung Butak | Kabupaten Rembang | 45,1 |
| **B** | **Konservasi Wilayah II Surakarta** | | |
| 1 | Cagar Alam Gebugan | Kabupaten Semarang | 1,8 |
| 2 | Cagar Alam Sepakung | Kabupaten Semarang | 10 |
| 3 | Cagar Alam Donoloyo | Kabupaten Wonogiri | 8,3 |
| 4 | Suaka Margasatwa Gunung Tunggangan | Kabupaten Sragen | 103,9 |
| **C** | **Konservasi Wilayah III Cilacap** | | |
| 1 | Cagar Alam Pantodomas | Kabupaten Wonosobo | 4,1 |
| 2 | Cagar Alam Telogo Dringo | Kabupaten Banjarnegara | 26,1 |
| 3 | Cagar Alam Telogo Sumurup | Kabupaten Banjarnegara | 20,1 |
| 4 | Cagar Alam Pringamba I / II | Kabupaten Banjarnegara | 58 |
| 5 | Cagar Alam Nusakambangan Barat | Kabupaten Cilacap | 675 |
| 6 | Cagar Alam Nusakambangan Timur | Kabupaten Cilacap | 277 |
| 7 | Cagar Alam Wijaya Kusuma | Kabupaten Cilacap | 1 |
| 8 | Cagar Alam Karangbolong | Kabupaten Cilacap | 0,5 |
| **D.** | **Konservasi Wilayah IV Pemalang** | | |
| 1 | Cagar Alam Pagerwunung Darupono | Kabupaten Kendal | 33,2 |
| 2 | Cagar Alam Peson Subah I | Kabupaten Batang | 10,4 |
| 3 | Cagar Alam Peson Subah II | Kabupaten Batang | 10 |
| 4 | Cagar Alam Ulolanang Kecubung | Kabupaten Batang | 69,7 |
| 5 | Cagar Alam Bantarbolang | Kabupaten Pemalang | 24,5 |
| 6 | Cagar Alam Curug Bengkawah | Kabupaten Pemalang | 1,5 |
| 7 | Cagar Alam Moga | Kabupaten Pemalang | 3,5 |
| 8 | Cagar Alam Vak 53 Comal | Kabupaten Pemalang | 29,1 |

| No | Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Suaka Margasatwa | Lokasi | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|
| 9 | Cagar Alam Guci | Kabupaten Tegal | 2 |
| 10 | Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara | Kabupaten Tegal | 6,6 |
| 11 | Cagar Alam Telaga Renjeng | Kabupaten Brebes | 48,5 |
| | **Jumlah** | | **2.923.3** |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

2) Kawasan Taman Nasional ditetapkan seluas ±12.135 hektar, meliputi: a) Taman Nasional Gunung Merapi seluas ±6.410 hektar berada di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten dan sebagian Sleman (Provinsi DIY); b) Taman Nasional Gunung Merbabu seluas ±5.725 hektar berada di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Semarang; serta c) Taman Nasional Karimunjawa seluas ±111.625 hektar berada di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara;
3) Kawasan pelestarian alam berupa taman hutan raya dan kebun raya, yaitu kawasan Taman Hutan Raya KGPA Mangkunegoro I berada di Berjo – Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar seluas ± 2.318 Hektar, dan Kebun Raya Baturaden di Kabupaten Banyumas seluas ±150 hektar.
4) Pengembangan taman wisata alam dan taman wisata alam laut meliputi: Taman Wisata Alam Gunung Selok di Kabupaten Cilacap; Taman Wisata Alam Tlogo Warno/Pengilon di Kabupaten Wonosobo; Taman Wisata Alam Grojogan Sewu di Kabupaten Karanganyar; Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kabupaten Rembang; Taman Wisata Alam Laut Ujung Negoro-Roban di Kabupaten Batang;
5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan untuk melindungi 597 benda cagar budaya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Benda cagar budaya tersebut terdiri dari candi, situs purbakala, benteng kuno, makam kuno, masjid, gereja, klenteng, dan bangunan bersejarah lainnya;
6) Daerah pantai berhutan bakau seluas ±10.718,51 hektar tersebar di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Kota Semarang. Kawasan mangrove terluas di pantai selatan berada di Kabupaten Cilacap (77,99%), sedangkan di pantai utara berada di Kabupaten Demak (9,19%).

### 2.1.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 36.516.035 jiwa, naik sebesar 4,1 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk 2010 atau rata-rata sebanyak 400 ribu jiwa setiap tahun. Laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah per tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,17 persen meningkat 0,8 persen poin dibandingkan periode 2000-2010 sebesar 0,37 persen. Adapun jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim tahun 2020–2023 sebanyak 37.032.410 jiwa.

**Tabel 2.4.**
**Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah, 2018-2022**

| Tahun | Jumlah Penduduk | Laju pertumbuhan per tahun (%) | Rasio jenis kelamin |
|---|---|---|---|
| 2018 | 34.358.487 | 0,77 | 98,49 |
| 2019 | 34.552.331 | 0,76 | 98,49 |
| 2020 | 36.516.035 | 1,17 | 101,15 |
| 2021 | 36.742.501 | 0,83 | 101,11 |
| 2022 | 37.032.410 | 0,81 | 101,07 |

*Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2021-2023*

Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada periode 2018-2022 terdapat 19 kabupaten/kota yang pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk provinsi. Pada tahun 2022, kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Cilacap yang memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,26 persen. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk terbesar kedua adalah Kabupaten Purbalingga dengan laju pertumbuhan sebesar 1,20 persen, diikuti Kabupaten Banjarnegara 1,15 persen dan Kabupaten Pemalang 1,11 persen. Sedangkan 16 kabupaten/kota yang lain mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka provinsi. Laju pertumbuhan penduduk terendah sebesar 0,05 persen terdapat di dua kabupaten/kota antara lain Kota Magelang dan Kota Surakarta.

**Tabel 2.5.**
**Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) Tahun 2018-2022**

| Kabupaten/ Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kab cilacap | 1.712.871 | 1.718.824 | 1.944.857 | 1.963.824 | 1.988.622 |
| Kab Banyumas | 1.672.817 | 1.685.078 | 1.776.918 | 1.789.630 | 1.806.013 |
| Kab Purbalingga | 921.639 | 929.403 | 998.561 | 1.007.794 | 1.019.840 |
| Kab Banjarnegara | 914.523 | 918.715 | 1.017.767 | 1.026.866 | 1.038.718 |
| Kab Kebumen | 1.190.280 | 1.192.013 | 1.350.438 | 1.361.913 | 1.376.825 |
| Kab Purworejo | 713.761 | 714.816 | 769.880 | 773.588 | 778.257 |
| Kab Wonosobo | 784.353 | 786.703 | 879.124 | 886.613 | 896.346 |
| Kab Magelang | 1.274.881 | 1.284.627 | 1.299.859 | 1.305.512 | 1.312.573 |
| Kab Boyolali | 976.026 | 980.086 | 1.062.713 | 1.070.247 | 1.079.952 |
| Kab Klaten | 1.166.748 | 1.169.330 | 1.260.506 | 1.267.272 | 1.275.850 |
| Kab Sukoharjo | 881.673 | 887.484 | 907.587 | 911.603 | 916.627 |

| Kabupaten/ Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kab Wonogiri | 953.250 | 954.646 | 1.043.177 | 1.049.292 | 1.057.087 |
| Kab Karanganyar | 875.946 | 882.473 | 931.963 | 938.808 | 947.642 |
| Kab Sragen | 884.448 | 886.196 | 976.951 | 983.641 | 992.243 |
| Kab Grobogan | 1.366.498 | 1.371.423 | 1.453.526 | 1.460.873 | 1.470.150 |
| Kab Blora | 858.153 | 860.957 | 884.333 | 886.147 | 888.224 |
| Kab Rembang | 631.293 | 635.294 | 645.333 | 647.766 | 650.770 |
| Kab Pati | 1.248.286 | 1.253.363 | 1.324.188 | 1.330.983 | 1.339.572 |
| Kab Kudus | 858.153 | 867.154 | 849.184 | 852.443 | 856.472 |
| Kab Jepara | 1.236.006 | 1.252.090 | 1.184.947 | 1.188.510 | 1.192.811 |
| Kab Demak | 1.147.557 | 1.157.421 | 1.203.956 | 1.212.377 | 1.223.217 |
| Kab Semarang | 1.036.929 | 1.049.002 | 1.053.094 | 1.059.844 | 1.068.492 |
| Kab Temanggung | 762.776 | 768.405 | 790.174 | 794.403 | 799.764 |
| Kab Kendal | 960.322 | 966.313 | 1.018.505 | 1.025.020 | 1.033.367 |
| Kab Batang | 759.529 | 764.970 | 801.718 | 807.005 | 813.791 |
| Kab Pekalongan | 888.491 | 893.290 | 968.821 | 976.504 | 986.455 |
| Kab Pemalang | 1.294.639 | 1.296.559 | 1.471.489 | 1.484.209 | 1.500.754 |
| Kab Tegal | 1.431.375 | 1.433.464 | 1.596.996 | 1.608.611 | 1.623.595 |
| Kab Brebes | 1.795.513 | 1.800.142 | 1.978.759 | 1.992.685 | 2.010.617 |
| Kota Magelang | 121.372 | 121.555 | 121.526 | 121.610 | 121.675 |
| Kota Surakarta | 515.865 | 517.045 | 522.364 | 522.728 | 523.008 |
| Kota Salatiga | 190.872 | 193.231 | 192.322 | 193.525 | 195.065 |
| Kota Semarang | 1.779.757 | 1.806.319 | 1.653.524 | 1.656.564 | 1.659.975 |
| Kota Pekalongan | 303.235 | 305.505 | 307.150 | 308.310 | 309.742 |
| Kota Tegal | 248.008 | 248.635 | 273.825 | 275.781 | 278.299 |
| Jawa Tengah | 34.358.487 | 34.552.531 | 36.516.035 | 36.742.501 | 37.032.410 |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak homogen di setiap kabupaten/kota menunjukkan adanya disparitas angka pertumbuhan menurut kabupaten/kota dan kemungkinan adanya disparitas dalam konteks kebijakan kependudukan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah angka pertumbuhan penduduk. Meskipun angka pertumbuhan penduduk di Jawa tengah relatif lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, akan tetapi tidak berarti peningkatan jumlah penduduk juga rendah. Secara absolut pertumbuhan penduduk Jawa Tengah lebih besar dibandingkan provinsi lain. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk di Jawa Tengah yang memang sudah sangat besar bila dibandingkan provinsi lain terutama provinsi di luar Pulau Jawa.

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan dan masih harus dihadapi oleh Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Terdapat beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara di wilayah lain hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan pembangunan wilayah. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran jika tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya.

**Tabel 2.6.**
**Kepadatan Penduduk Menurut eks-Karesidenan di Jawa Tengah**
**Tahun 2018-2022**

| Tahun | Jawa Tengah | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2) eks- karesidenan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Banyumas | Kedu | Surakarta | Pekalongan | Pati | Semarang |
| 2018 | 1.047 | 1.012 | 925 | 1.095 | 1.199 | 853 | 1.197 |
| 2019 | 1.053 | 1.018 | 929 | 1.099 | 1.203 | 860 | 1.209 |
| 2020 | 1.113 | 1.112 | 994 | 1.174 | 1.320 | 863 | 1.214 |
| 2021 | 1.120 | 1.122 | 1.000 | 1.180 | 1.329 | 866 | 1.221 |
| 2022 | 1.129 | 1.134 | 1.008 | 1.189 | 1.342 | 870 | 1.228 |

*Sumber: BPS Jawa Tengah 2022 (Proyeksi Penduduk Jawa Tengah Hasil SUPAS 2015. Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020, Proyeksi Penduduk Interim 2020 – 2023)*

Kepadatan penduduk yang dikelompokkan berdasarkan eks-Keresidenan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 eks-Keresidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu mencapai 1.342 jiwa/km2 diikuti eks-Keresidenan Semarang 1.228 jiwa/km2, sedangkan eks-Keresidenan Pati memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 870 jiwa/km2. Eks-Keresiden Pekalongan memiliki kepadatan penduduk tertinggi terutama didukung oleh Kota Pekalongan dengan kepadatan penduduk 6.845 jiwa/km2 yang merupakan wilayah terpadat keempat di Jawa Tengah dan Kota Tegal dengan kepadatan 7.014 jiwa/km2 yang merupakan wilayah terpadat ketiga di Jawa Tengah. Untuk kota dengan penduduk

terpadat di Jawa Tengah adalah Kota Surakarta dengan kepadatan penduduk 11.367 jiwa/km2. Kota Surakarta merupakan pusat ekonomi dari daerah di sekitarnya. Para pendatang yang mencari rezeki di Kota Surakarta tersebut pada akhirnya memilih untuk bermukim di kota tersebut sehingga menambah populasi di wilayah yang luasnya hanya 46,01 $km^2$.

Angka Beban Ketergantungan (dependency ratio) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin mengecil dapat menggambarkan adanya kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2018-2022 angka beban ketergantungan di Jawa Tengah Fluktuatif tetapi cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2022 angka beban ketergantungan Jawa Tengah sebesar 53,71 persen, artinya setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 53 penduduk tidak produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas).Berdasarkan komposisi usia penduduk, menurunnya angka beban ketergantungan lebih dipengaruhi oleh menurunnya proporsi penduduk usia 0-14 tahun yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 proporsi penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 23,02 persen dan terus menurun hingga tahun 2022 menjadi 21,94 persen. Di sisi lain, proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas berfluktuasi dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah maupun proporsinya.

Pada tahun 2018 proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas sebanyak 8,65 persen, meningkat menjadi 8,90 persen pada tahun 2019, menurun pada tahun 2020 menjadi 7,72 persen, namun kemudian terus meningkat menjadi 8,10 persen pada tahun 2021 dan mencapai 8,48 persen pada tahun 2022. Sementara proporsi penduduk usia produktif sendiri juga berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, proporsinya penduduk usia 15-64 tahun mencapai 68,33 persen, terus meningkat menjadi 69,85 persen pada tahun 2020 dan kemudian menunjukkan penurunan menjadi 69,58 persen pada tahun 2022.

**Tabel 2.7.**
**Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

| Tahun | 0-14 Tahun | 15-64 Tahun | 65+ Tahun | Angka Beban Ketergantungan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 7.909.540 | 23.476.490 | 2.972.460 | 46,35 |
| 2019 | 7.839.940 | 23.636.420 | 3.076.170 | 46,18 |
| 2020 | 8.190.778 | 24.506.691 | 2.818.566 | 43,15 |

| Tahun | 0-14 Tahun | 15-64 Tahun | 65+ Tahun | Angka Beban Ketergantungan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.148.545 | 25.619.556 | 2.924.400 | 43,42 |
| 2022 | 8.123.792 | 25.768.441 | 3.140.177 | 53,71 |

*Sumber: BPS Jawa Tengah 2022 (Proyeksi Penduduk Jawa Tengah Hasil SUPAS 2015. Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020, Proyeksi Penduduk Interim 2020 – 2023)*

Peningkatan proporsi penduduk usia tua dapat dimaknai sebagai hal yang positif karena hal tersebut menunjukkan kualitas kesehatan yang semakin baik sehingga penduduk memiliki usia dan harapan hidup yang lebih panjang. Di sisi lain, hal tersebut menjadi tantangan karena jika penduduk usia tua tersebut semakin banyak maka akan semakin meningkatkan angka beban ketergantungan.

Peningkatan proporsi penduduk usia produktif disebut sebagai bonus demografi. Kondisi ini juga merupakan dua sisi mata uang yang saling berseberangan. Bonus demografi bisa menguntungkan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi ketika sebagian besar penduduk usia produktif tersebut terserap sebagai tenaga kerja. Sebaliknya jika lapangan usaha yang ada saat ini ternyata tidak mampu menyerap sebagian besar dari penduduk usia produktif tersebut, maka justru akan mendorong peningkatan instabilitas sosial dan politik. Bonus demografi yang terjadi di Jawa Tengah sepertinya mulai berakhir. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan 0,38 poin dari tahun sebelumnya.

Hal ini perlu segera diwaspadai oleh pemerintah dengan mendorong peningkatan kualitas penduduk usia produktif yang saat ini proporsinya masih sangat besar. Jika penduduk usia produktif memiliki kualitas yang baik, maka akan mampu menanggung beban ketergantungan yang kemungkinan akan semakin besar di masa mendatang.

## 2.2. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah di Jawa Tengah digambarkan dengan kondisi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem. Persentase penduduk miskinpada tahun 2018 – 2019 menurun dari 11,32% (3.897,20 ribu orang) menjadi 10,58% (3.679,40 ribu orang). Namun mengalami peningkatan pada periode Maret 2020 menjadi 11,41% (3.980,90 ribu orang) dan mengalami peningkatan lagi pada periode September 2020 menjadi 11,84% (4.119,93 ribu orang). Kenaikan tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Seiring dengan upaya intervensi pemerintah kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 11,25 persen pada September 2021 menjadi 10,98 persen pada September 2022. Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang sebanyak 75,78 ribu orang dari 3.934,01 ribu orang (September 2021) menjadi 3.858,23 ribu orang (September 2022). Periode September 2021 - September 2022, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun dari 10,16% menjadi 10,02% atau bertambah sebanyak 5,08 ribu orang. Sedangkan

persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 12,44% menjadi 12,05% atau berkurang sebanyak 80,86 ribu orang.

**Tabel 2.8.**
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Maret 2018 – September 2022**

| Tahun | Bulan | Penduduk Miskin | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (ribu orang) | | | (%) | | |
| | | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan | Perko-taan | Perde-saan | Perkotaan + Perdesaan |
| 2018 | Maret | 1.716,16 | 2.181,04 | 3.897,20 | 9,73 | 12,99 | 11,32 |
| | September | 1.709,56 | 2.157,86 | 3.867,42 | 9,67 | 12,8 | 11,19 |
| 2019 | Maret | 1.633,96 | 2.109,26 | 3.743,23 | 9,20 | 12,48 | 10,80 |
| | September | 1.602,26 | 2.077,15 | 3.679,40 | 8,99 | 12,26 | 10,58 |
| 2020 | Maret | 1.805,65 | 2.175,25 | 3.980,90 | 10,09 | 12,80 | 11,41 |
| | September | 1.890,49 | 2.229,44 | 4.119,93 | 10,57 | 13,20 | 11,84 |
| 2021 | Maret | 1.908,29 | 2.201,44 | 4.109,73 | 10,58 | 13,07 | 11,79 |
| | September | 1.847,09 | 2.086,92 | 3.934,01 | 10,16 | 12,44 | 11,25 |
| 2022 | Maret | 1.818.25 | 2.013,20 | 3.831,44 | 9,92 | 12,04 | 10,93 |
| | September | 1.852,17 | 2.006,06 | 3.858,23 | 10,02 | 12,05 | 10,98 |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Maret 2018 - September 2022*

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar di bawah. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional.

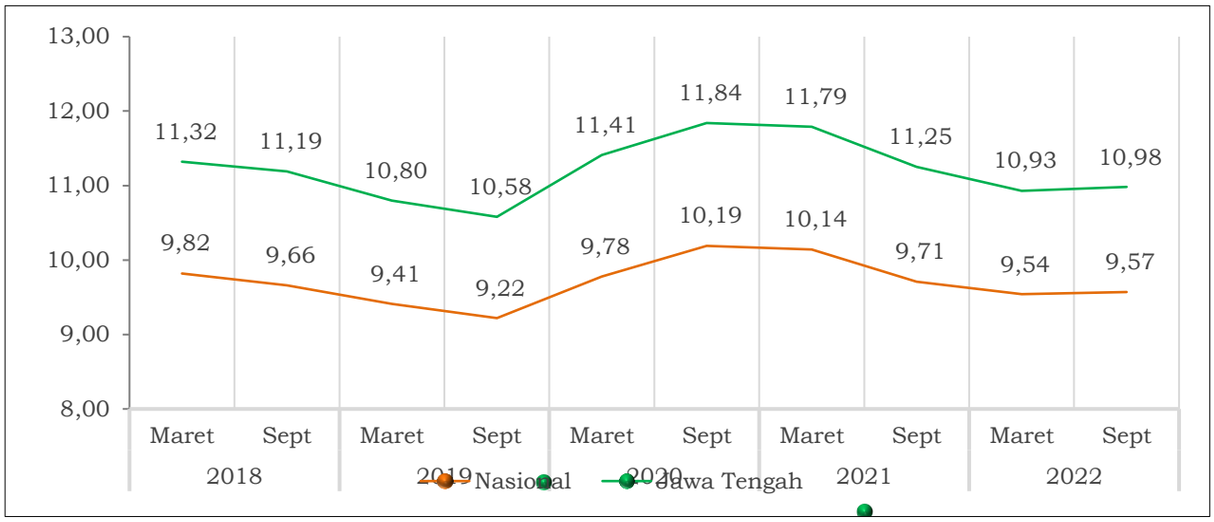


*Sumber: BPS, 2022*

**Gambar 2.2.**
**Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022**

Persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi

persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota mendasarkan data per Maret tahun 2022 (data kemiskinan kabupaten/kota terakhir rilis) yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 17 kabupaten meliputi Kabupaten Magelang, Blora, Purworejo, Grobogan, Demak, Klaten, Banyumas, Sragen, Rembang, Banjarnegara, Purbalingga, Pemalang, Brebes, Wonosobo, Kebumen, Wonogiri dan Cilacap;
2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak 3 kabupaten meliputi Kabupaten Karanganyar, Boyolali dan Pekalongan;
3. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 15 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Jepara, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kota Magelang, Kabupaten Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kota Surakarta, Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kendal.

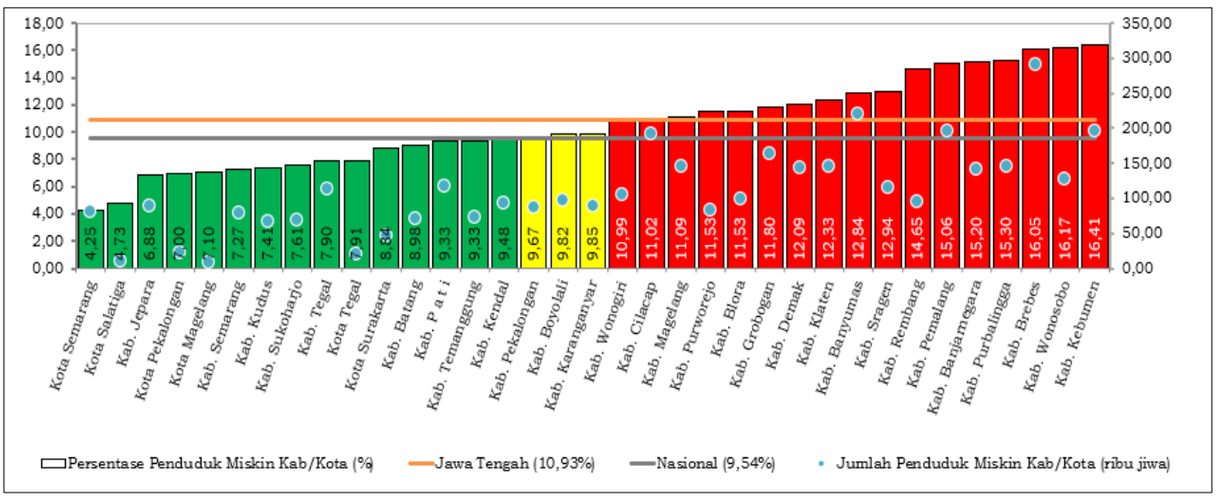


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 2.3.**
**Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2022**

Dilihat dari rata-rata kinerja penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah pada kurun waktu lima tahun (2018-2022), kabupaten dengan kinerja yang paling tinggi adalah Kabupaten Banyumas yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,84 persen. Rata-rata kinerja tingkat kemiskinan kabupaten/kota tahun 2018-2022 sebagaimana gambar berikut.

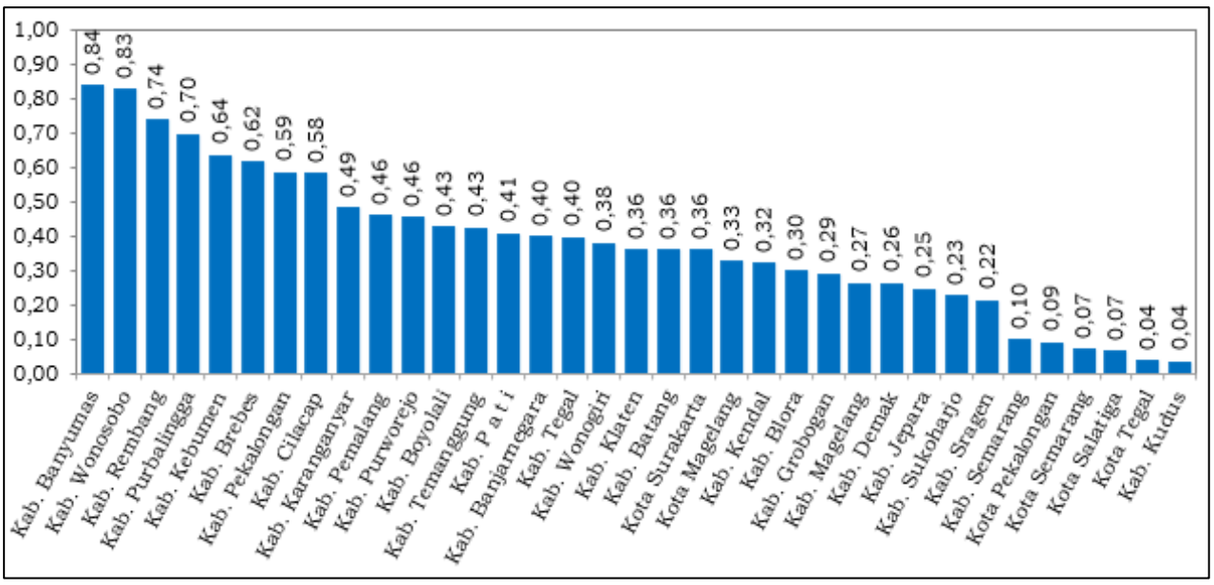


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018-2022*

**Gambar 2.4.**
**Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (%)**

Garis Kemiskinan adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan di Jawa Tengah periode September 2022 sebesar Rp. 464.879 per kapita per bulan, meningkat 9,83 persen dibandingkan dengan September 2021 yang sebesar Rp. 423.264 per kapita per bulan.

Pada daerah perkotaan Garis Kemiskinan periode September 2022 sebesar Rp. 469.623 per kapita per bulan atau naik 9,96 persen dari kondisi September 2021 yang sebesar Rp. 427.099 per kapita per bulan. Sedangkan Garis Kemiskinan di perdesaan periode September 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 9,70 persen menjadi sebesar Rp. 459.714 per kapita per bulan dibandingkan dengan September 2021 yang sebesar Rp. 419.064 per kapita per bulan.

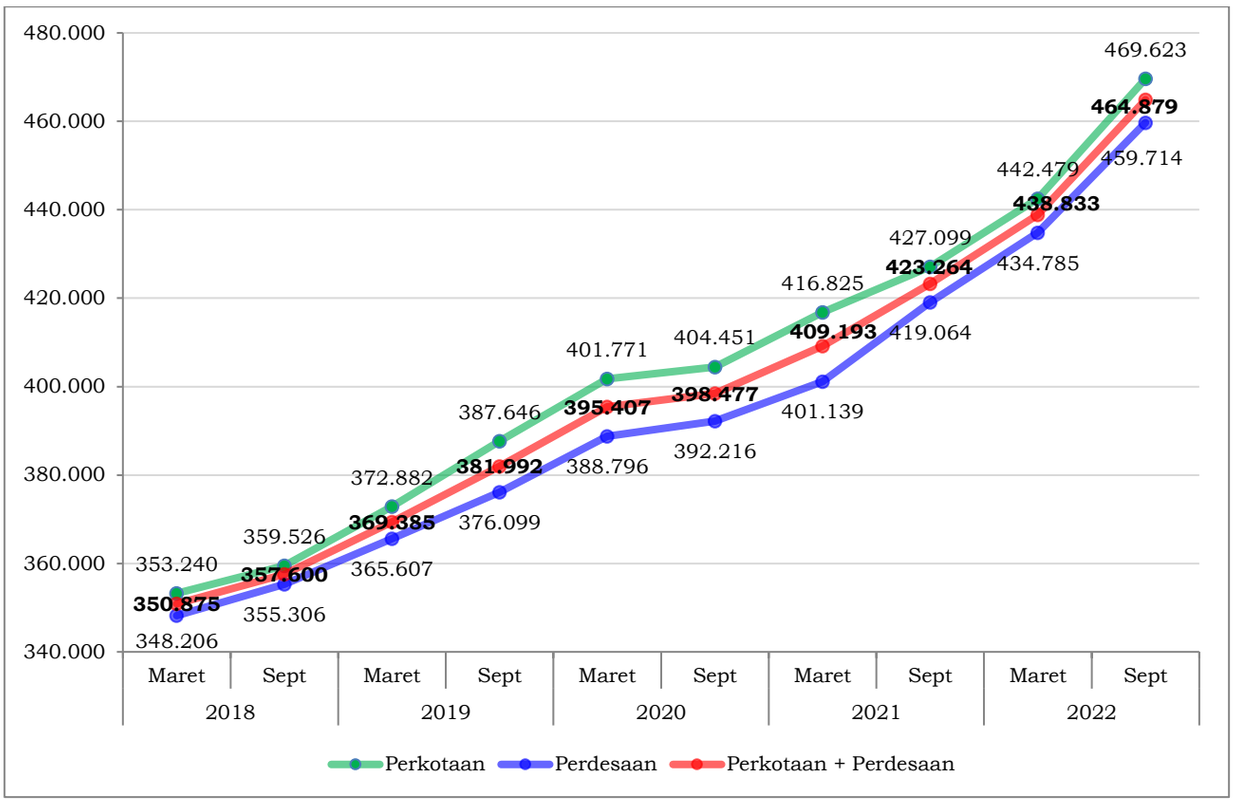


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018 – 2022*

**Gambar 2.5.**
**Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

Garis kemiskinan dipengaruhi komponen bahan makanan dan non makanan. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan masih jauh lebih besar (dominan) dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Terdapat tiga komoditi makanan yang berpengaruh cukup besar terhadap garis kemiskinan pada periode September 2022 baik di perkotaan maupun perdesaan yaitu beras, rokok kretek filter, dan daging ayam ras. Komoditi lainnya relatif berbeda antara perkotaan dan perdesaan. Untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di daerah perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, dan listrik.

**Tabel 2.9.**
**Komoditi Makanan dan Bukan Makanan yang Memberi Pengaruh Besar Pada Kenaikan Garis Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2022**

| **Perkotaan** | | **Perdesaan** | |
|---|---|---|---|
| **Komoditi** | **Kontribusi (%)** | **Komoditi** | **Kontribusi (%)** |
| **Makanan** | **74,66** | **Makanan** | **75,79** |
| Beras | 18,16 | Beras | 19,58 |
| Rokok kretek filter | 9,55 | Rokok kretek filter | 8,76 |
| Daging ayam ras | 4,07 | Daging ayam ras | 4,29 |
| Telur ayam ras | 4,01 | Telur ayam ras | 4,12 |
| Tempe | 2,70 | Tempe | 2,78 |
| Gula pasir | 2,65 | Tahu | 2,54 |
| Tahu | 2,55 | Gula pasir | 2,44 |
| Kue basah | 2,54 | Mie instan | 2,40 |

| Perkotaan | | Perdesaan | |
|---|---|---|---|
| **Komoditi** | **Kontribusi (%)** | **Komoditi** | **Kontribusi (%)** |
| Mie instan | 2,52 | Bawang Merah | 2,37 |
| Bawang Merah | 2,24 | Cabe rawit | 2,18 |
| Lainnya | 23,67 | Lainnya | 24,34 |
| **Bukan Makanan** | **25,34** | **Bukan Makanan** | **24,21** |
| Perumahan | 7,18 | Perumahan | 8,31 |
| Bensin | 4,73 | Bensin | 3,77 |
| Listrik | 2,30 | Listrik | 1,35 |
| Pendidikan | 2,00 | Perlengkapan mandi | 1,21 |
| Perlengkapan mandi | 1,26 | Pendidikan | 1,15 |
| Pajak kendaraan bermotor | 0,68 | Kayu bakar | 0,78 |
| Kesehatan | 0,65 | Sabun Cuci | 0,77 |
| Lainnya | 6,55 | Lainnya | 6,87 |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Posisi relatif persebaran garis kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 (Maret) terhadap provinsi dan nasional dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Garis Kemiskinan Rendah, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di bawah garis kemiskinan provinsi dan nasional, terdapat di 19 kabupaten, yaitu Kabupaten Batang, Banjarnegara, Temanggung, Magelang, Wonogiri, Boyolali, Sragen, Cilacap, Blora, Wonosobo, Purworejo, Purbalingga, Kebumen, Karanganyar, Pemalang, Grobogan, Tegal, Kendal dan Sukoharjo
2. Garis Kemiskinan Sedang, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di atas garis kemiskinan provinsi dan di bawah garis kemiskinan nasional, terdapat di 10 kabupaten, yaitu Kabupaten Rembang, Semarang, Pekalongan, Banyumas, Jepara, Klaten, Demak, Brebes, Kudus dan Pati;
3. Garis Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang berada di atas garis kemiskinan provinsi dan nasional, terdapat di 6 kota, yaitu Kota Pekalongan, Salatiga, Surakarta, Tegal, Magelang dan Semarang.

Kabupaten/kota dengan garis kemiskinan paling rendah adalah Kabupaten Batang sebesar 341.252 rupiah per kapita per bulan, sedangkan garis kemiskinan paling tinggi adalah Kota Semarang sebesar 589.598 rupiah per kapita per bulan.

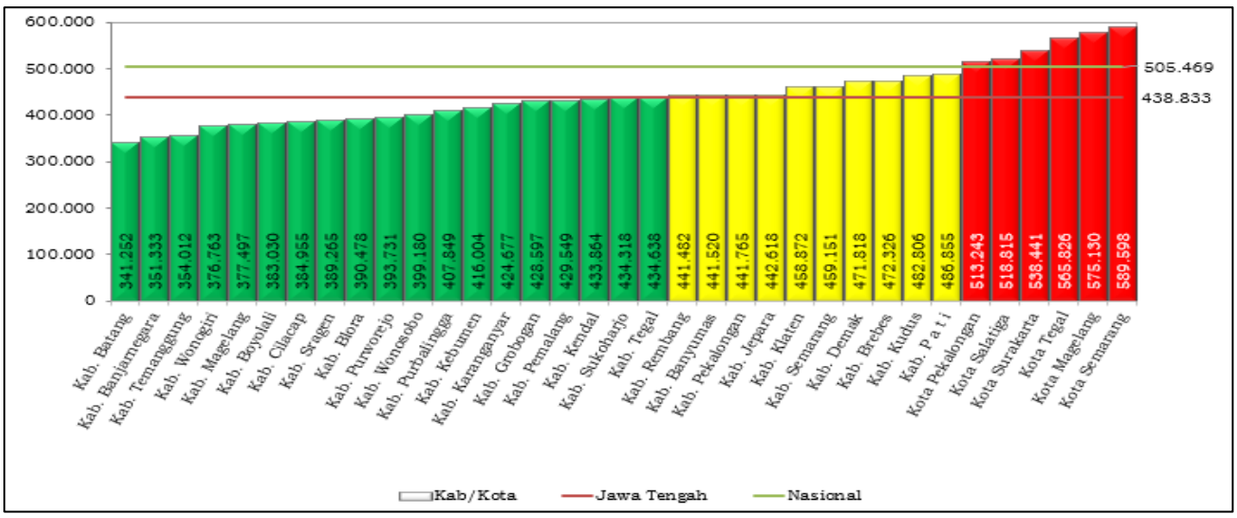


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 2.6.**

**Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2022**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2018 – 2019 menurun dari 1,847 menjadi 1,434 pada September 2019, namun pada September 2020 meningkat menjadi 1,835 dan meningkat kembali menjadi 1,938 pada September 2021 (naik 0,103 dibandingkan September 2020). Pada September 2022, P1 Provinsi Jawa Tengah turun menjadi 1,753 (turun sebesar 0,185 dibandingkan dengan September 2021). Jika dilihat dari wilayah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) September 2022 di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Pada September 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan sebesar 1,640 dari 1,746 (turun 0,106 dibandingkan September 2021) sedangkan di perdesaan sebesar 1,879 dari 2,147 (turun 0,268 dibandingkan September 2021). Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan.

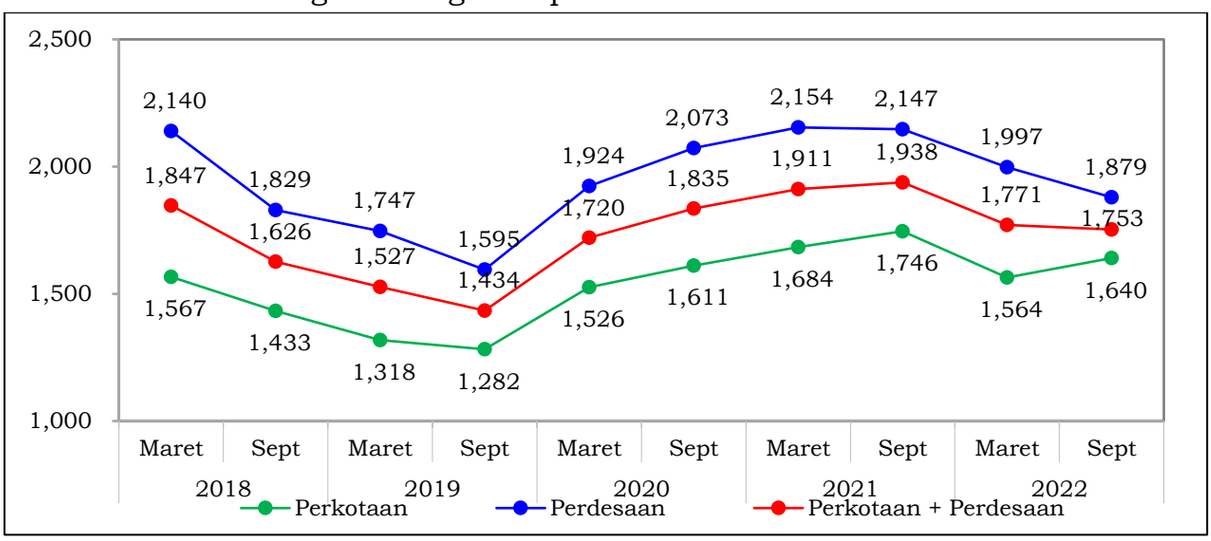


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018 – 2022 (September)*

**Gambar 2.7.**

**Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota pada periode Maret 2022, apabila dibandingkan dengan P1 Provinsi sebesar 1,77 dan P1 Nasional sebesar 1,59 diketahui bahwa Kabupaten Kebumen memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi sebesar 3,41 dan Kota Magelang terendah sebesar 0,47.

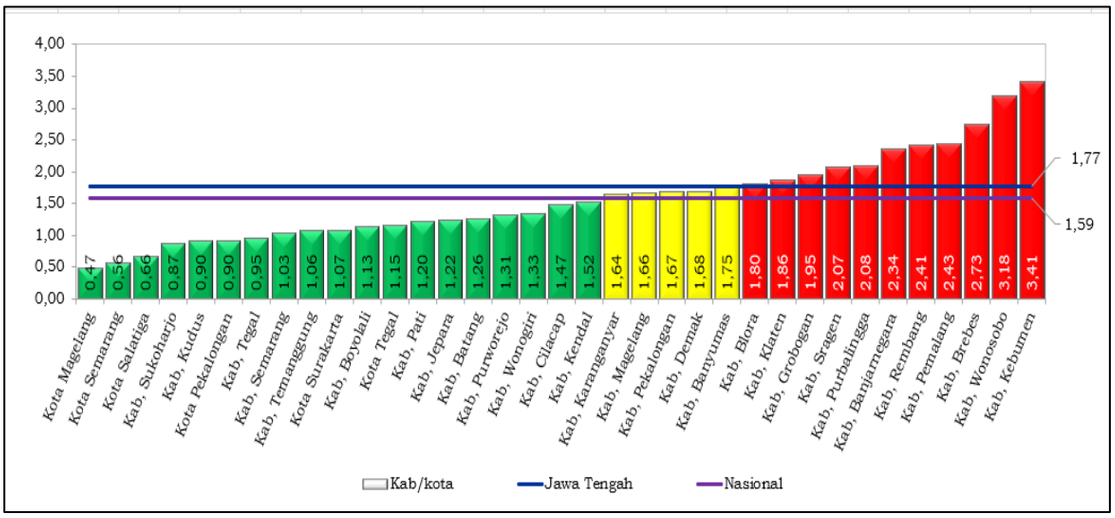


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 2.8.**
**Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022**

Posisi relatif P1 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebagai berikut:

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 diatas provinsi dan nasional, sebanyak 11 kabupaten meliputi Kabupaten Purbalingga, Sragen, Wonosobo, Rembang, Pemalang, Banjarnegara, Brebes, Kebumen, Klaten, Blora dan Grobogan;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 diatas nasional dan dibawah provinsi, sebanyak 5 kabupaten yaitu Kabupaten Demak, Banyumas, Pekalongan, Karanganyar dan Magelang;
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 19 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kabupaten Jepara, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kendal, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pati, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Batang.

Selain dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), gambaran kemiskinan juga dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2018 – 2019 menurun dari 0,448 menjadi 0,279, namun meningkat pada September 2020 menjadi 0,431 dan meningkat kembali pada September 2021 menjadi 0,459. Periode September 2022, P2 Provinsi Jawa Tengah turun menjadi 0,422 (turun sebesar 0,037 dibandingkan dengan September 2021). Jika dilihat dari wilayah perkotaan dan perdesaan, nilai P2 pada Bulan September 2022 di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Periode September 2022, nilai P2 untuk daerah perkotaan sebesar 0,407 turun 0,012 poin dibandingkan September 2021.

Sedangkan pada periode yang sama nilai P2 untuk daerah perdesaan mencapai sebesar 0,439 turun 0,063 poin dibandingkan September 2021.

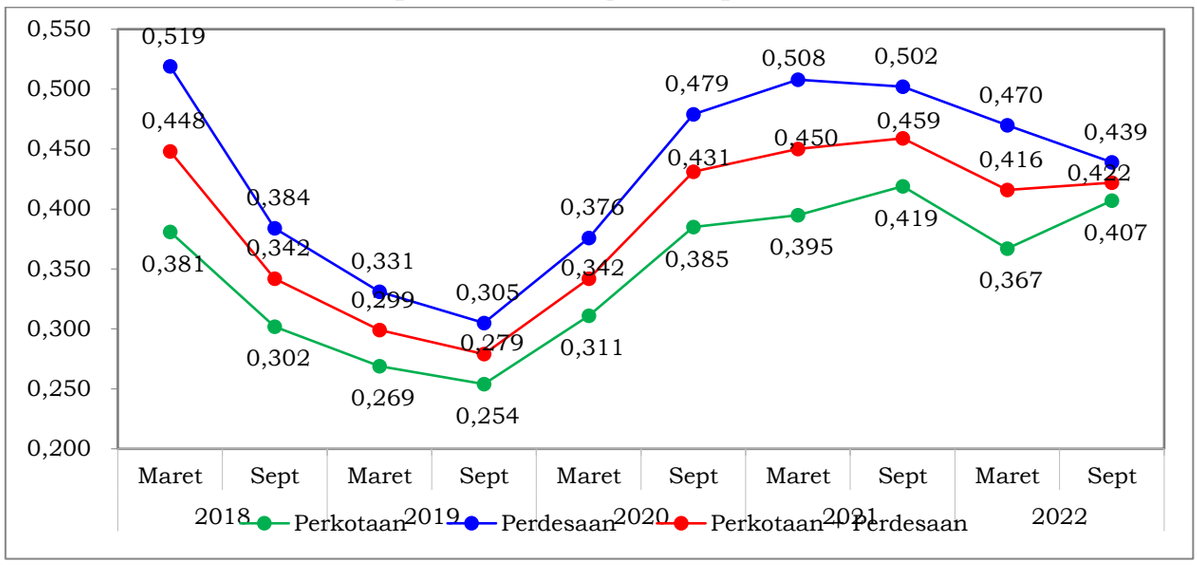


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 2.9.**
**Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota pada periode Maret 2022, apabila dibandingkan dengan P2 Provinsi sebesar 0,42 dan P2 Nasional sebesar 0,39 diketahui bahwa Kabupaten Kebumen memiliki Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi sebesar 1,02 dan Kota Magelang terendah sebesar 0,06.

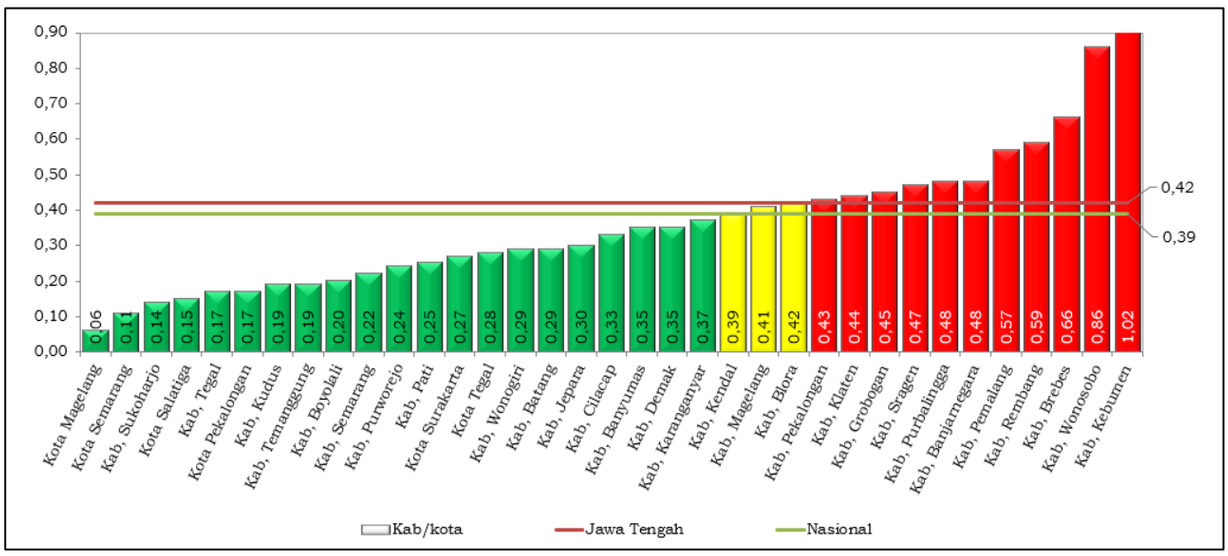


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 2.10.**
**Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022**

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebagai berikut:

1. Indeks Keparahan Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di atas provinsi dan nasional, sebanyak 11 kabupaten meliputi, Kabupaten Purbalingga, Grobogan, Klaten, Pekalongan, Sragen, Wonosobo, Rembang, Brebes, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen;

2. Indeks Keparahan Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah nasional dan diatas provinsi, sebanyak 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Magelang, Blora dan Kendal;
3. Indeks Keparahan Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 21 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kabupaten Jepara, Pati, Semarang, Tegal, Sukoharjo, Kudus, Purworejo, Cilacap, Wonogiri, Karanganyar, Boyolali, Temanggung, Batang, Banyumas dan Demak.

Jika dibandingkan dengan Provinsi se Jawa-Bali, perubahan penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah periode September 2021 – September 2022 sebesar 0,27 persen atau menduduki urutan ke-1 dari 7 Provinsi se Jawa-Bali.

**Tabel 2.10.**
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun Periode September 2021 – September 2022**

| No. | Provinsi | Periode | | | | Perubahan Kenaikan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | September 2021 | | September 2022 | | | |
| | | (Ribu Org) | (%) | (Ribu Org) | (%) | (Ribu Org) | (%) |
| 1 | JAWA TENGAH | 3.934,01 | 11,25 | 3.858,23 | 10,98 | -75,78 | -0,27 |
| 2 | JAWA TIMUR | 4.259,60 | 10,59 | 4.236,51 | 10,49 | -23,09 | -0,10 |
| 3 | BANTEN | 852,28 | 6,50 | 829,66 | 6,24 | -22,62 | -0,26 |
| 4 | DI YOGYAKARTA | 474,49 | 11,91 | 463,63 | 11,49 | -10,86 | -0,42 |
| 5 | BALI | 211,46 | 4,72 | 205,36 | 4,53 | -6,10 | -0,19 |
| 6 | DKI JAKARTA | 498,29 | 4,67 | 494,93 | 4,61 | -3,36 | -0,06 |
| 7 | JAWA BARAT | 4.004,86 | 7,97 | 4.053,62 | 7,98 | 48,76 | 0,01 |

*Sumber: BPS, 2022*

Dengan membandingkan kondisi kemiskinan pada wilayah yang setara dengan Provinsi Jawa Tengah dari variabel persentase penduduk miskin tahun 2021 pada rentang 6,84 persen sampai dengan 11,86 persen, sebanyak 11 provinsi berada kelompok yang sama dengan Jawa Tengah, dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 9,25 persen. Dalam wilayah yang setara persentase penduduk miskin Jawa Tengah lebih tinggi 2,00 poin dibandingkan dengan rata-rata wilayah setara. Sedangkan jika dilihat dari variabel perubahan persentase penduduk miskin tahun 2020-2021 pada rentang -0,53 sampai dengan -0,19 poin, sebanyak 10 provinsi berada dalam wilayah yang setara dengan Jawa Tengah, dengan rata-rata perubahan sebesar -0,86 poin. Dari variabel ini, angka Jawa Tengah tidak lebih baik dibandingkan dengan rata-rata wilayah yang setara atau berada lebih rendah 0,27 poin di bawah rata-rata. Dan jika membandingkan antara peresentase kemiskinan dan perubahan persentase kemiskinan, ada tiga provinsi yang setara dengan Jawa Tengah, yaitu Lampung, Sumatra Utara dan Jawa Timur.

**Tabel 2.11.**
**Persentase Kemiskinan Tahun 2021 dan Perubahan Persentase Kemiskinan Tahun 2021 – 2022 Di Wilayah Setara**

| Provinsi | Persentase Kemiskinan (%) | Perubahan Persentase Kemiskinan (poin) | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Barat | 6,84 | -1,69 | Maluku |
| Riau | 7,00 | -1,09 | Lampung |
| Sulawesi Utara | 7,36 | -0,89 | DIY |
| Jambi | 7,67 | -0,88 | Sulawesi Tengah |
| Jawa Barat | 7,97 | -0,87 | Bengkulu |
| Sumatera Utara | 8,49 | -0,87 | Jawa Timur |
| Sulawesi Selatan | 8,53 | -0,77 | NTT |
| Jawa Timur | 10,59 | -0,65 | Sumatera Utara |
| Jawa Tengah | 11,25 | -0,59 | Jawa Tengah |
| Lampung | 11,67 | -0,59 | Maluku Utara |
| Sulawesi Tenggara | 11,74 | -0,58 | Kalimantan Utara |
| Sulawesi Barat | 11,85 | | |
| **Rata-rata** | **9,25** | **-0,86** | **Rata-rata** |

*Sumber: BPS, 2022(hasil analisis)*

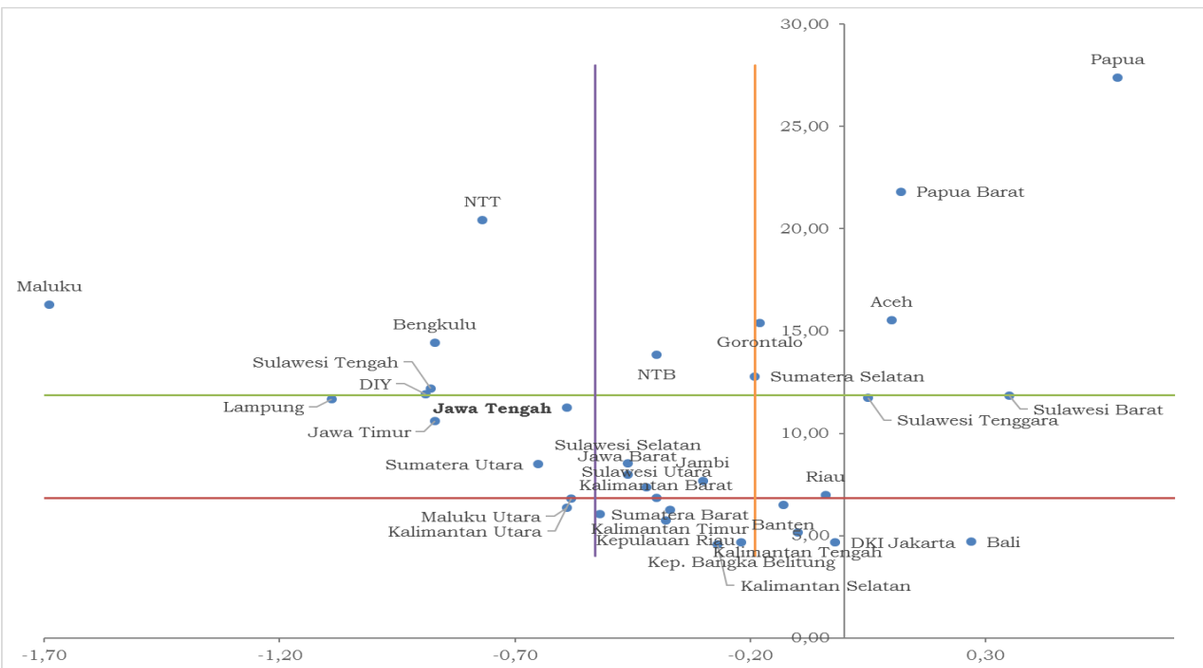


*Sumber: BPS, 2021 (hasil analisis)*

**Gambar 2.11.**
**Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 dan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 – 2022 dengan Wilayah Setara**

Selain kemiskinan, gambaran kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 berada di atas nasional, sedangkan pada tahun 2022 berada di bawah nasional. Persentase penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah mengalami penurunan sebanyak 0,31 persen dari 2,28 persen pada tahun 2021 menjadi 1,97 persen pada tahun 2022. Secara absolut, jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah berkurang sebanyak 105,972 ribu orang dari 795,506 ribu orang pada tahun 2021 menjadi 689,714 ribu orang pada tahun 2022. Penurunan tersebut sejalan dengan berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem, sesuai dengan mandatori kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

**Tabel 2.12.**
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 - 2022**

| Provinsi | Persentase Kemiskinan Ekstrem 2021 | Persentase Kemiskinan Ekstrem 2022 | Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem 2021 (ribu jiwa) | Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem 2022 (ribu jiwa) |
|---|---|---|---|---|
| JAWA TENGAH | 2,28 | 1,97 | 795,506 | 689,714 |
| NASIONAL | 2,14 | 2,04 | 5.800,05 | 5.590,72 |

*Sumber: BPS, 2022*

Persebaran penduduk miskin ekstrem di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional dan kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin ekstrem di kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin ekstrem di atas provinsi dan nasional sebanyak 15 kabupaten meliputi Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Brebes, Rembang, Pemalang, Blora, Sragen, Kendal, Grobogan, Magelang, Klaten, Purbalingga, Cilacap, Demak dan Pekalongan
2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin ekstrem di bawah provinsi dan nasional sebanyak 20 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Karanganyar, Jepara, Wonogiri, Batang, Banjarnegara, Banyumas, Semarang, Purworejo, Temanggung, Pati, Tegal, Kudus, Boyolali, Sukoharjo, Kota Salatiga, Tegal, Surakarta, Pekalongan, Semarang dan Magelang.

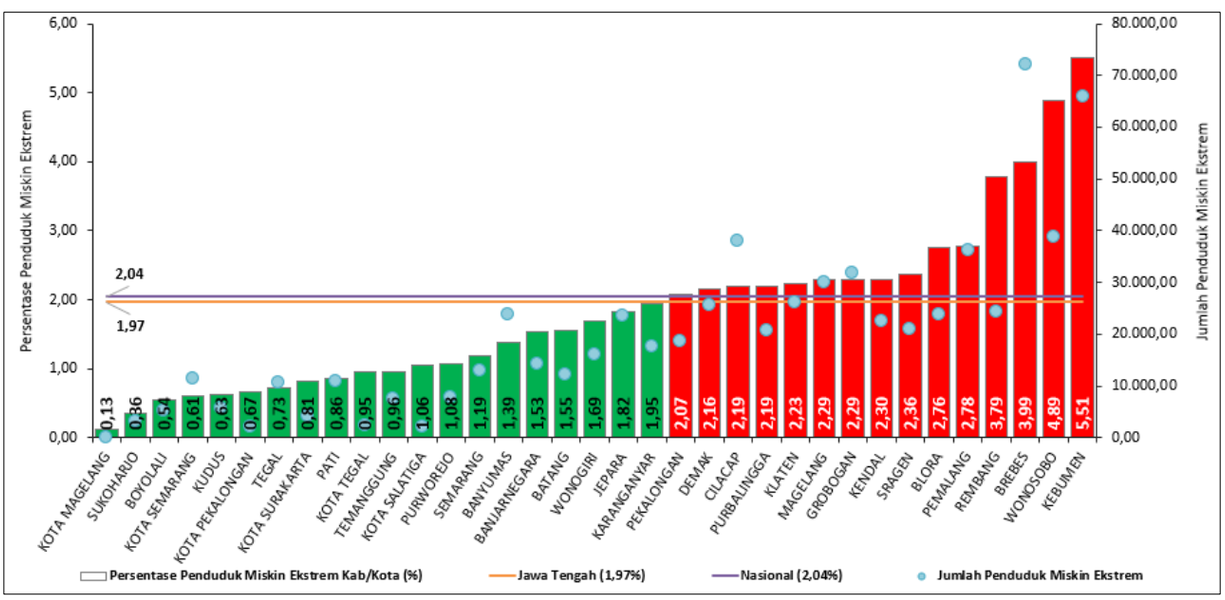


*Sumber: BPS, 2022*

**Gambar 2.12.**
**Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022**

Pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2022 tentang Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 telah menetapkan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024.

**Tabel 2.13.**
**Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Tengah Tahun 2022-2024**

| NO | TAHUN | KABUPATEN/KOTA PRIORITAS | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sregen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes | 19 |
| 2 | 2023-2024 | Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sregen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Temanggung, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Magelang dan Kota Salatiga | 35 |

*Sumber: BPS, 2022*

## 2.3. Kondisi Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian daerah Jawa Tengah dapat digambarkan dari beberapa indikator kinerja antara lain pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, inflasi, rasio Gini, indeks Williamson, dan indeks daya saing daerah (IDSD). Kinerja perekonomian daerah Jawa Tengah didukung dengan kinerja sektor-sektor unggulan daerah yaitu pertanian, koperasi dan UKM, perdagangan, industri pengolahan, dan pariwisata. Selain itu juga, perekonomian daerah Jawa Tengah didukung oleh iklim investasi yang baik, kondisi infrastruktur yang mantap dan transportasi yang menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa, serta pembangunan perekonomian berbasis desa. Gambaran keseluruhan kondisi perekonomian daerah sebagaimana diuraikan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

### 2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro salah satunya dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Kemudian adapun laju pertumbuhan PDRB biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian.

Pembangunan ekonomi Jawa Tengah semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan mulai dari Tahun 2016-2019, dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Namun pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat dampak pandemi covid-19 yang juga dialami oleh semua daerah. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi jawa tengah turun sebesar minus 2,65 persen, penurunan juga terlihat pada PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Tahun 2021 dan Tahun 2022 perkembangan ekonomi sudah semakin membaik seiring menurunnya angka kasus covid-19 dan banyaknya masyarakat yang sudah vaksin, sehingga mobilitas masyarakat dapat terus meningkat. Capaian Tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,31 persen, meningkat dari capaian Tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,33 persen. Capaian ini sudah mendekati capaian sebelum pandemi yaitu sebesar 5,36 persen Tahun 2019.

Nilai PDRB ADHK pada tahun 2021 sebesar Rp997.345 miliar meningkat dari tahun 2020 yang sebesar Rp965.225 miliar. Dan pada tahun 2022 nilai PDRB ADHK kembali meningkat mencapai sebesar Rp1.050.322 miliar. Selanjutnya, nilai PDRB ADHB pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.419.986 miliar meningkat dari tahun 2020 yang sebesar Rp1.347.922 miliar. Dan pada tahun 2022 nilai PDRB ADHB mencapai sebesar Rp1.560.899 miliar.

**Tabel 2.14.**

**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 - 2022**

| No | Tahun | PDRB ADHK Tahun 2010 (Miliar Rupiah) | PDRB ADHB (Miliar Rupiah) | Pertumbuhan Ekonomi (%) (*c-to-c*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jateng | Nasional |
| 1 | 2016 | 849.099 | 1.087.316 | 5,25 | 5,03 |
| 2 | 2017 | 893.750 | 1.172.794 | 5,26 | 5,07 |
| 3 | 2018 | 941.091 | 1.268.261 | 5,30 | 5,17 |
| 4 | 2019 | 991.516 | 1.360.960 | 5,36 | 5,02 |
| 5 | 2020 | 965.225 | 1.347.922 | -2,65 | -2,07 |
| 6 | 2021 | 997.345 | 1.419.986 | 3,33 | 3,70 |
| 7 | 2022 | 1.050.322 | 1.560.899 | 5,31 | 5,31 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Selama kurun waktu tahun 2011-2022, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif stabil. Pada tahun 2011–2013 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berada di bawah nasional. Kemudian pada tahun 2014–2019 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah meningkat dan lebih tinggi dari nasional. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami penurunan akibat terjadi pandemi Covid-19 mencapai minus 2,65 persen, dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar minus 2,07 persen. Tahun 2021 ekonomi mulai membaik serta mengalami perbaikan (recovery) dan tumbuh sebesar 3,33 persen (nasional 3,70 persen). Dan pada tahun 2022 kembali meningkat baik Jawa Tengah dan Nasional sama-sama tumbuh sebesar 5,31 persen.

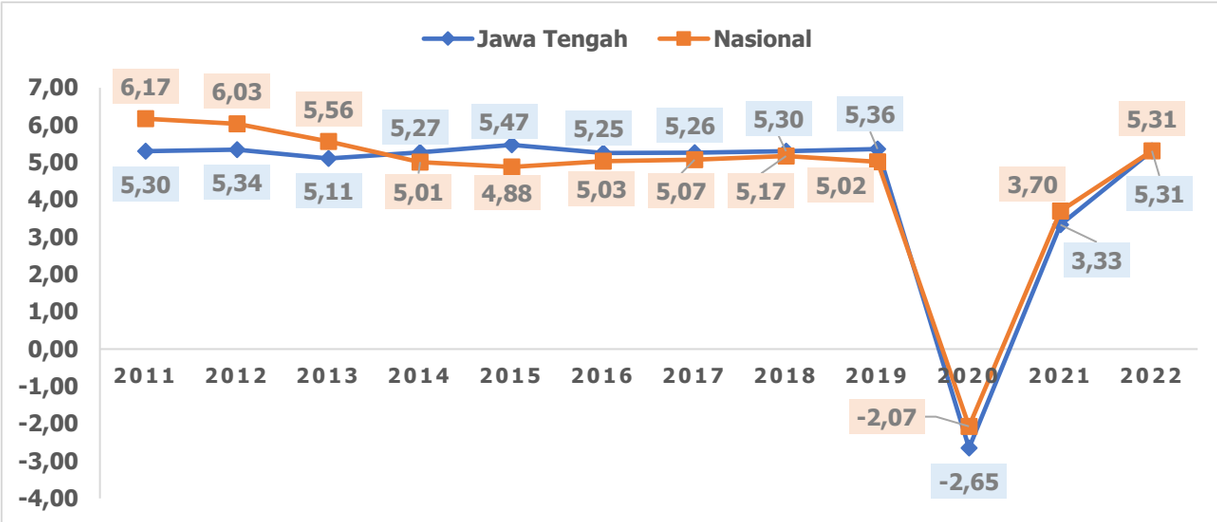


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.13.**
**Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional (c-to-c), Tahun 2011 – 2022 (%)**

Pertumbuhan ekonomi dilihat secara *year on year* (yoy) yang mana memperbandingkan pertumbuhan PDRB tahun sekarang (t) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (t-1) sering disebut dengan istilah laju pertumbuhan PDRB dalam setahun. Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan ke IV-2022 tumbuh sebesar 5,24 persen, menurun dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,27 persen. Gambaran lebih detail terlihat bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sempat resesi dengan pertumbuhan negatif selama lebih dari dua triwulan berturut-turut yaitu pada triwulan II-2020 sampai dengan triwulan I-2021 karena pandemi Covid-19 dan kemudian mulai bangkit pada triwulan II-2021 sampai triwulan IV-2022. Bahkan capaian pertumbuhan ekonomi saat ini sudah menyamai capaian sebelum pandemi yaitu Tahun 2019. Capaian pada Triwulan IV 2022 ini lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 5,01 persen (yoy). Pertumbuhan positif tersebut mengidentifikasikan pemulihan ekonomi Jawa Tengah masih terus berlanjut.

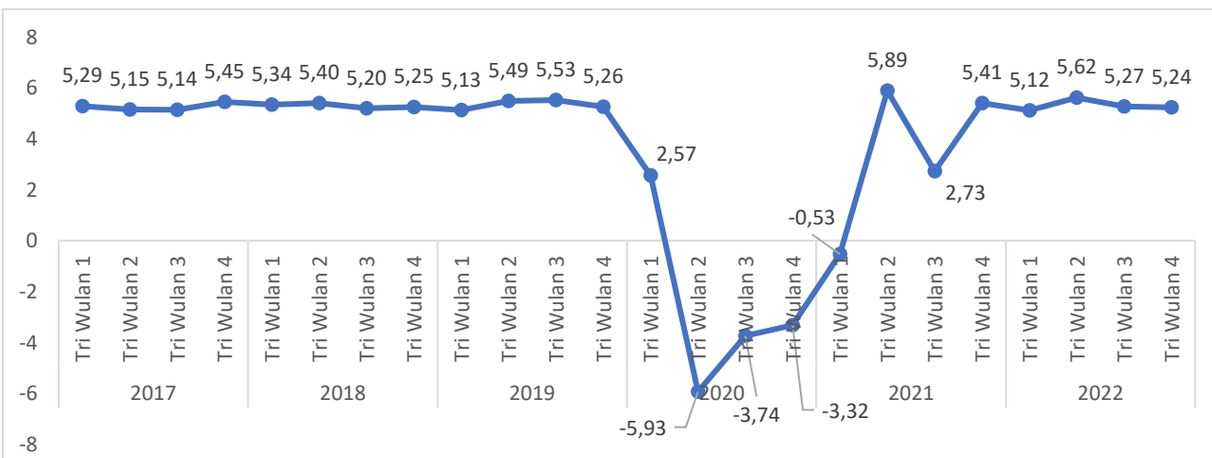


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.14.**
**Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (y-on-y) Per-Triwulan Tahun 2017-2022 (Persen)**

Adapun pertumbuhan ekonomi secara quarter-to-quarter (q-to-q) yang memperbandingkan pertumbuhan PDRB kuartal tahun sekarang (t) dibandingkan dengan kuartal tahun sebelumnya (t-1), dapat digambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama periode tahun 2017-2022 cukup fluktuatif. Dan pada triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 0,63 persen melambat jika dibandingkan triwulan III-2022 sebesar yang 1,34 persen.

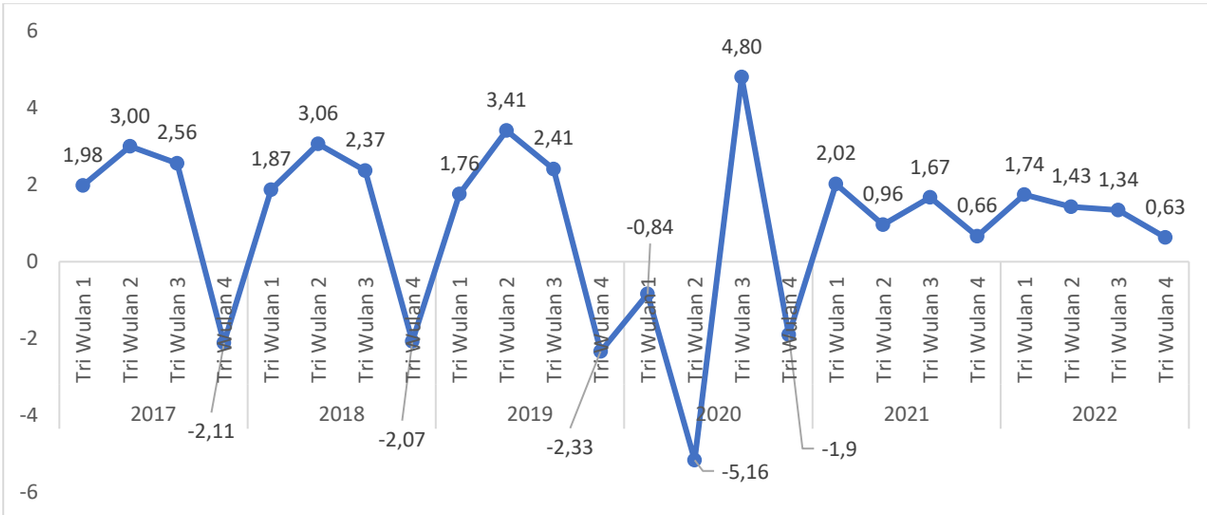


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.15.**
**Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah (q-to-q), Per-Triwulan Tahun 2017 -2022 (%)**

Jika dibandingkan dengan provinsi lain se pulau jawa, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (Triwulan IV 2022 secara yoy) rata-rata lebih tinggi daripada provinsi lain di Jawa, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jawa Tengah tumbuh 5,24 persen (yoy) dan DIY tumbuh 5,53 persen. Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,43 persen terhadap perekonomian Jawa. Jawa Tengah masih menjadi penyumbang keempat terbesar nasional maupu pulau jawa setelah provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat.

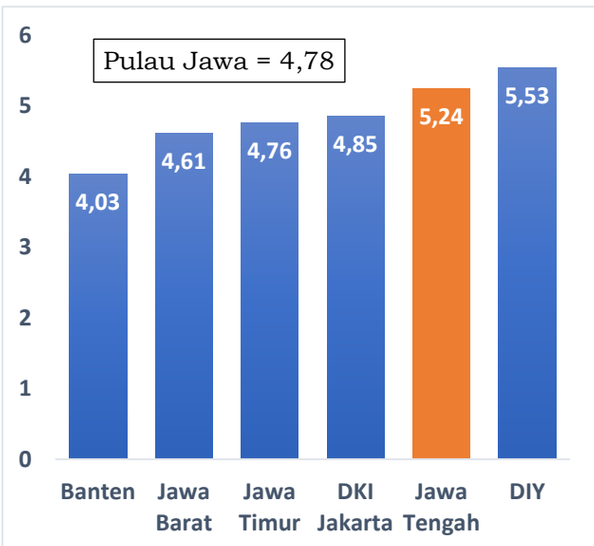


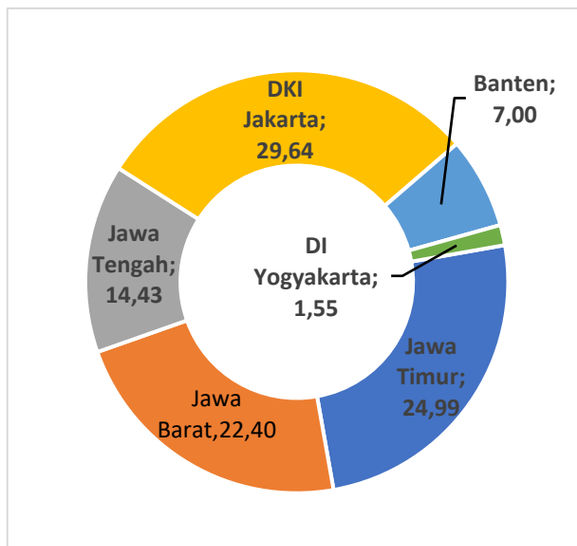


Sumber: BPS, diolah, 2023

**Gambar 2.16.**
**Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB Menurut Provinsi se-Pulau Jawa Pada Triwulan IV-2022 (%)**

Jika dilihat dari pertumbuhan c-to-c se-Pulau Jawa pada Tahun 2022 tertinggi di capai oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 5,45 persen (c-to-c) dan paling rendah oleh Propinsi Banten sebesar 5,03 persen (c-to-c). Jika dibandingkan dengan capaian Nasional (5,31 persen) terdapat dua provinsi di pulau jawa yang diatas capaian nasional dan tiga provinsi di bawah capaian nasional. Sedangkan provinsi jawa tengah memiliki capaian yang sama dengan nasional.

**Tabel 2.15.**

**Pertumbuhan Ekonomi (c-to-c) Provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2018 –2022 (%)**

| No | Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Banten | 5,98 | 5,90 | -3,38 | 4,44 | 5,03 |
| 2 | Jawa Barat | 5,64 | 5,07 | -2,44 | 3,74 | 5,45 |
| 3 | DKI Jakarta | 6,17 | 5,96 | -2,36 | 3,56 | 5,25 |
| 4 | Jawa Tengah | 5,30 | 5,40 | -2,65 | 3,32 | 5,31 |
| 5 | DIY | 6,20 | 6,60 | -2,69 | 5,53 | 5,15 |
| 6 | Jawa Timur | 5,65 | 5,54 | -2,39 | 3,57 | 5,34 |
| | **Rata2 Jawa** | **5,82** | **5,75** | **-2,65** | **4,03** | **5,26** |
| | **Nasional** | **5,17** | **5,02** | **-2,07** | **3,69** | **5,31** |

*Sumber: BPS, 2022*

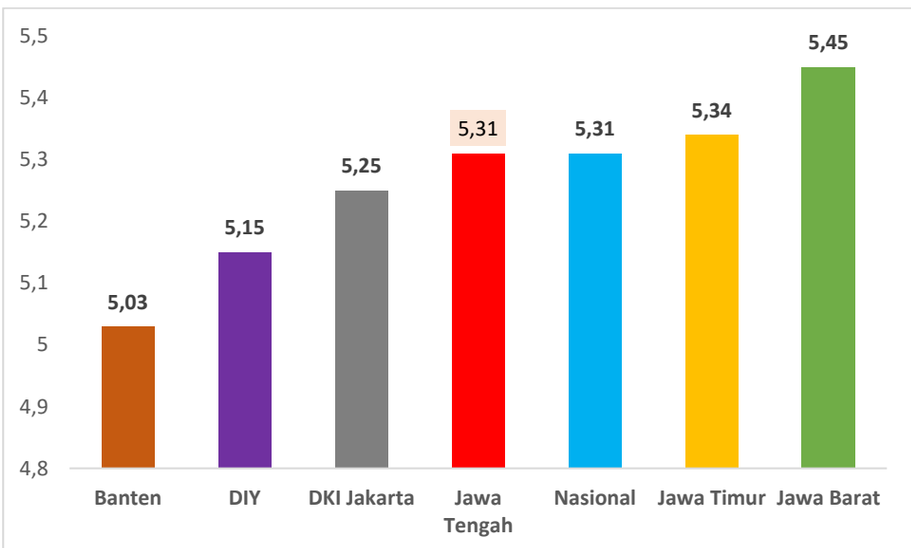


Sumber: BPS, diolah, 2022

**Gambar 2.17.**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi Se Pulau Jawa dan Nasional Pada Tahun 2022 (c-to-c) (%)**

Pertumbuhan ekonomi dapat tergambarkan melalui sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Perkembangan ekonomi Jawa Tengah dari sisi lapangan usaha pada tahun 2022 bersumber dari 3 (tiga) lapangan usaha (LU) yaitu transportasi dan pergudangan (73,03 persen), penyediaan akomodasi dan makan minum (16,99

persen), serta jasa lainnya (11,79 persen). Sementara, tiga LU utama lainnya seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan kontruksi tetap tumbuh meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 2.16.**

**Nilai PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –2022 (Miliar Rupiah)**

| Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 121.554,48 | 123.150,02 | 126.110,20 | 127.128,60 | 130.801,32 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 20.855,98 | 21.557,12 | 21.385,27 | 22.326,16 | 20.942,66 |
| C. Industri Pengolahan | 322.143,29 | 338.470,98 | 325.617,67 | 333.156,60 | 346.169,65 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 1.028,92 | 1.085,27 | 1.104,73 | 1.170,51 | 1.214,86 |
| E. Pengadaan Air, Pengelo-laan Sampah, Limbah & Daur Ulang | 658,88 | 687,51 | 703,22 | 744,50 | 752,41 |
| F. Konstruksi | 98.393,74 | 103.262,32 | 99.380,71 | 106.701,15 | 108.657,61 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 136.581,24 | 144.729,67 | 139.233,05 | 147.313,38 | 153.670,44 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 32.121,01 | 34.848,59 | 23.564,63 | 24.342,19 | 42.108,26 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 30.660,79 | 33.442,26 | 30.773,74 | 32.595,12 | 38.132,45 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 45.500,91 | 50.789,28 | 58.739,21 | 62.288,94 | 63.846,51 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 25.635,54 | 26.533,03 | 27.106,15 | 27.555,91 | 27.690,76 |
| L. Real Estate | 17.797,50 | 18.782,40 | 18.730,35 | 19.133,49 | 20.107,09 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 3.609,30 | 3.989,82 | 3.702,92 | 3.816,62 | 4.051,19 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 24.137,86 | 25.033,50 | 24.687,07 | 24.528,68 | 24.915,02 |
| P. Jasa Pendidikan | 36.286,32 | 39.040,75 | 38.948,07 | 38.974,99 | 39.589,05 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8.187,91 | 8.738,37 | 9.454,46 | 9.471,68 | 9.709,66 |
| R,S,T,U. Jasa lainnya | 15.937,47 | 17.375,66 | 15.984,26 | 16.068,57 | 17.963,16 |
| **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO** | **941.091,14** | **991.516,54** | **965.225,71** | **997.317,10** | **1.050.322,13** |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Tabel 2.17.**

**Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –2022 (Miliar Rupiah)**

| Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 178.352,88 | 184.130,94 | 192.610,19 | 196.876,47 | 211.244,85 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 32.321,26 | 33.727,39 | 33.082,14 | 36.660,13 | 37.723,92 |
| C. Industri Pengolahan | 436.424,70 | 468.374,05 | 464.609,13 | 487.445,10 | 529.612,56 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 1.225,34 | 1.294,44 | 1.309,17 | 1.377,81 | 1.438,00 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 743,87 | 790,46 | 855,45 | 915,06 | 938,29 |
| F. Konstruksi | 136.153,70 | 147.205,58 | 142.205,67 | 158.056,34 | 172.199,81 |
| G. Perdagang-an Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 172.944,07 | 187.064,45 | 181.860,78 | 195.399,04 | 212.208,01 |
| H. Trans-portasi dan Pergudangan | 39.583,09 | 43.834,35 | 30.262,62 | 32.092,97 | 59.263,55 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 39.498,49 | 43.634,69 | 40.359,71 | 43.513,47 | 52.883,12 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 43.963,89 | 49.587,27 | 57.428,84 | 60.910,56 | 62.593,23 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 37.488,38 | 39.403,66 | 40.267,89 | 42.959,77 | 46.920,61 |
| L. Real Estate | 21.450,33 | 22.920,25 | 23.010,53 | 23.741,78 | 25.420,79 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 5.021,62 | 5.712,08 | 5.417,73 | 5.650,01 | 6.259,70 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 34.653,13 | 36.431,29 | 36.457,41 | 35.853,14 | 37.421,33 |
| P. Jasa Pendidikan | 56.951,69 | 62.396,85 | 63.862,38 | 64.584,46 | 65.985,53 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 11.283,42 | 12.275,40 | 13.658,16 | 13.800,24 | 14.372,31 |
| R,S,T,U. Jasa lainnya | 20.201,31 | 22.176,97 | 20.664,88 | 20.963,55 | 24.413,40 |
| **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO** | **1.268.261,17** | **1.360.960,13** | **1.347.922,69** | **1.420.799,91** | **1.560.899,02** |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dari sisi lapangan usaha pada tahun 2022 bersumber dari tiga lapangan usaha yang tumbuh positif pada tahun 2022 yaitu transportasi dan pergudangan (73,03 persen), penyediaan akomodasi dan

makan minum (16,99 persen), serta jasa lainnya (11,79 persen). Sementara, tiga lapangan usaha utama lainnya seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan kontruksi tetap tumbuh meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, terdapat lapangan usaha yang tumbuh negatif yaitu pertambangan dan penggalian sebesar minus 6,20 persen.

**Tabel 2.18.**

**Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –2022 (%)**

| Lapangan Usaha | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2,62 | 1,31 | 2,4 | 0,78 | 2,92 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 2,45 | 3,36 | -0,8 | 4,4 | -6,2 |
| C | Industri Pengolahan | 4,33 | 5,07 | -3,8 | 2,34 | 3,88 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 5,36 | 5,48 | 1,79 | 5,95 | 3,79 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 4,88 | 4,34 | 2,29 | 5,92 | 1,01 |
| F | Konstruksi | 6,07 | 4,95 | -3,76 | 7,37 | 1,83 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,77 | 5,97 | -3,8 | 5,8 | 4,32 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 7,55 | 8,49 | -32,38 | 3,28 | 73,03 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 8,15 | 9,07 | -7,98 | 5,92 | 16,99 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 12,39 | 11,62 | 15,65 | 6,04 | 2,5 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,58 | 3,5 | 2,16 | 1,62 | 0,53 |
| L | Real Estate | 5,58 | 5,53 | -0,28 | 2,15 | 5,09 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 9,48 | 10,54 | -7,19 | 3,07 | 6,15 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,58 | 3,71 | -1,38 | -0,64 | 1,58 |
| P | Jasa Pendidikan | 7,76 | 7,59 | -0,24 | 0,07 | 1,58 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8,8 | 6,72 | 8,19 | 0,18 | 2,51 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 9,45 | 9,02 | -8,01 | 0,53 | 11,79 |
| | **PDRB** | **5,30** | **5,36** | **-2,65** | **3,33** | **5,31** |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Secara struktur, perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2022 masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 33,93 persen; diikuti oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,60 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,53 persen; dan konstruksi sebesar 11,03 persen.

**Tabel 2.19.**

**Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –2022 (%)**

| Lapangan Usaha | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 14,06 | 13,53 | 14,30 | 13,86 | 13,53 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 2,55 | 2,48 | 2,45 | 2,58 | 2,42 |
| C | Industri Pengolahan | 34,41 | 34,44 | 34,52 | 34,31 | 33,93 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,1 | 0,09 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| F | Konstruksi | 10,73 | 10,81 | 10,55 | 11,12 | 11,03 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 13,64 | 13,74 | 13,49 | 13,75 | 13,60 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 3,12 | 3,22 | 2,21 | 2,26 | 3,80 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 3,11 | 3,20 | 2,99 | 3,06 | 3,39 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 3,47 | 3,64 | 4,26 | 4,29 | 4,01 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,96 | 2,89 | 2,98 | 3,02 | 3,01 |
| L | Real Estate | 1,69 | 1,68 | 1,71 | 1,67 | 1,63 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,40 | 0,42 | 0,40 | 0,4 | 0,40 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,73 | 2,68 | 2,70 | 2,52 | 2,40 |
| P | Jasa Pendidikan | 4,49 | 4,58 | 4,74 | 4,55 | 4,23 |
| Q | Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial | 0,89 | 0,90 | 1,01 | 0,97 | 0,92 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 1,59 | 1,63 | 1,53 | 1,48 | 1,56 |
| | **PDRB** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Sedangkan jika dilihat dari sisi pengeluaran pada, nilai PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam table berikut.

**Tabel 2.20.**

**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –2022 (Miliar Rupiah)**

| Jenis Pengeluaran | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 764.808,38 | 821.948,11 | 822.095,50 | 854.472,69 | 940.909,56 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 14.491,86 | 16.443,22 | 16.064,61 | 16.784,70 | 18.971,57 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 98.717,17 | 103.209,52 | 98.678,84 | 100.905,61 | 101.999,40 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 413.749,15 | 448.351.59 | 417.815,40 | 451.241,16 | 479.064,88 |
| Perubahan Inventori | 17.201,59 | 11.362,19 | 12.797,37 | 11.936,47 | 15.501,14 |

| Jenis Pengeluaran | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekspor Luar Negeri | 123.868,88 | 127.703,21 | 122.859,71 | 158.820,64 | 183.486,73 |
| Impor Luar Negeri | 235.222,13 | 203.947,07 | 149.426,64 | 200.678,36 | 240.550,14 |
| Net Ekspor Antar Daerah | 70.646,26 | 35.889,36 | 6.337,70 | 26.503,70 | 61.515,55 |
| **Total PDRB** | **1.268.261,17** | **1.360.960,13** | **1.347.222,49** | **1.419.986,62** | **1.560.899,02** |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Pada tahun 2021 semua komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif dibandingkan dengan tahun 2020. Kenaikan tertinggi dicatat oleh komponen net ekspor antar daerah yaitu sebesar 52,70 persen, diikuti komponen impor luar negeri sebesar 35,69 persen, dan komponen ekspor luar negeri sebesar 21,85 persen. Begitu juga dengan tahun 2022 yang menunjukkan semua komponen tumbuh positif, dengan pertumbuhan tertinggi pada komponen net ekspor antar daerah yaitu 31,66 persen, diikuti oleh impor luar negeri tumbuh 15,84 persen dan ekpor luar negeri yang tumbuh 10,67 persen.

**Tabel 2.21.**

**Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%)**

| Komponen Pengeluaran | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 4,69 | 4,62 | -1,42 | 1,82 | 5,52 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 7,62 | 10,90 | -3,72 | 1,25 | 4,89 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2,70 | 4,04 | -4,14 | 0,55 | 0,12 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 7,68 | 4,85 | -6,98 | 6,84 | 1,95 |
| Ekspor Luar Negeri | 11,79 | 5,10 | -3,79 | 21,85 | 10,67 |
| Impor Luar Negeri | 36,36 | -6,70 | -20,49 | 35,69 | 15,84 |
| Net Ekspor Antar Daerah | 57,00 | -7,10 | -33,49 | 52,70 | 31,66 |
| **Total** | **5,30** | **5,36** | **-2,65** | **3,33** | **5,31** |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Selanjutnya, struktur PDRB Jawa Tengah dari sisi pengeluaran pada tahun 2021 juga tidak mengalami perubahan yang berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga (PK-RT) sebesar 60,17 persen, dan diikuti oleh komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 31,78 persen. Bahkan selama kurun waktu tahun 2018-2021 perekonomian Jawa Tengah menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, dengan kontribusi lebih dari separuh nilai PDRB Jawa Tengah. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Jawa Tengah adalah PMTB, serta impor dan ekspor barang dan jasa. Kondisi ini menggambarkan bahwa ekonomi Jawa Tengah sangat tergantung pada pengeluaran konsumsi rumah tangga, meskipun tren kontribusinya fluktuatif

dalam lima tahun terakhir. Demikian juga kondisi pada tahun 2022 yang menunjukkan struktur yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pengeluaran konsumsi rumah tangga mendominasi dengan angka sebesar 60,28 persen, diikuti dengan komponen PMTB sebesar 30,69 persen.

**Tabel 2.22.**

**Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%)**

| Jenis Pengeluaran | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 60,30 | 60,39 | 61,02 | 60,17 | 60,28 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 1,14 | 1,21 | 1,19 | 1,18 | 1,22 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 7,78 | 7,58 | 7,32 | 7,11 | 6,53 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 32,62 | 32,94 | 31,01 | 31,78 | 30,69 |
| Perubahan Inventori | 1,36 | 0,83 | 0,95 | 0,84 | 0,99 |
| Ekspor Luar Negeri | 9,77 | 9,38 | 9,12 | 11,18 | 11,76 |
| Impor Luar Negeri | 18,55 | 14,99 | 11,09 | 14,13 | 15,41 |
| Net Ekspor Antar Daerah | 5,57 | 2,64 | 0,47 | 1,87 | 3,94 |
| **Total** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang terus membaik pascapandemi Covid-19 tahun 2020 juga diikuti oleh pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2021 tumbuh positif dibandingkan tahun 2020, kecuali Kabupaten Kudus yang mengalami kontraksi sebesar -1,54 persen yang diakibatkan karena industri tembakau di Kudus masih mengalami pertumbuhan negatif. Namun demikian, pada tahun 2022, semua kabupaten/kota telah tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Boyolali dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,33 persen, diikuti oleh Kota Surakarta sebesar 6,25 persen, dan Kabupaten Grobogan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,98 persen. Sedangkan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Kudus sebesar 2,23 persen, Kabupaten Blora 2,68 persen, dan Kabupaten Wonosobo 5,02 persen.

**Tabel 2.23.**

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%)**

| No | Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Cilacap | 2.99 | 2.27 | -10.28 | 2.15 | 5.13 |
| 2 | Kabupaten Banyumas | 6.45 | 6.32 | -1.65 | 4 | 5.86 |
| 3 | Kabupaten Purbalingga | 5.42 | 5.64 | -1.18 | 3.19 | 5.41 |
| 4 | Kabupaten Banjarnegara | 5.67 | 5.6 | -1.32 | 3.26 | 5.29 |
| 5 | Kabupaten Kebumen | 5.53 | 5.52 | -1.45 | 3.71 | 5.79 |
| 6 | Kabupaten Purworejo | 5.33 | 5.44 | -1.61 | 3.31 | 5.36 |
| 7 | Kabupaten Wonosobo | 5.06 | 5.57 | -1.64 | 3.68 | 5.02 |
| 8 | Kabupaten Magelang | 5.28 | 5.3 | -1.67 | 3.48 | 5.46 |
| 9 | Kabupaten Boyolali | 5.72 | 5.96 | -1.2 | 4.63 | 6.33 |

| No | Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kabupaten Klaten | 5.47 | 5.48 | -1.17 | 3.82 | 5.9 |
| 11 | Kabupaten Sukoharjo | 5.79 | 5.92 | -1.7 | 3.82 | 5.61 |
| 12 | Kabupaten Wonogiri | 5.41 | 5.14 | -1.41 | 3.35 | 5.63 |
| 13 | Kabupaten Karanganyar | 5.98 | 5.76 | -1.87 | 3.57 | 5.87 |
| 14 | Kabupaten Sragen | 5.75 | 5.9 | -1.81 | 3.75 | 5.76 |
| 15 | Kabupaten Grobogan | 5.83 | 5.37 | -1.57 | 3.78 | 5.98 |
| 16 | Kabupaten Blora | 4.38 | 4.05 | -4.56 | 3.68 | 2.68 |
| 17 | Kabupaten Rembang | 5.89 | 5.2 | -1.49 | 3.85 | 5.55 |
| 18 | Kabupaten Pati | 5.71 | 5.81 | -1.16 | 3.38 | 5.56 |
| 19 | Kabupaten Kudus | 3.24 | 3.09 | -3.11 | -1.54 | 2.23 |
| 20 | Kabupaten Jepara | 5.85 | 6.02 | -1.92 | 4.63 | 5.95 |
| 21 | Kabupaten Demak | 5.4 | 5.36 | -0.23 | 2.62 | 5.25 |
| 22 | Kabupaten Semarang | 5.67 | 5.39 | -2.67 | 3.63 | 5.31 |
| 23 | Kabupaten Temanggung | 5.13 | 5.05 | -2.13 | 3.34 | 5.2 |
| 24 | Kabupaten Kendal | 5.77 | 5.71 | -1.51 | 3.89 | 5.69 |
| 25 | Kabupaten Batang | 5.72 | 5.39 | -1.29 | 4.88 | 5.97 |
| 26 | Kabupaten Pekalongan | 5.76 | 5.35 | -1.89 | 3.54 | 5.11 |
| 27 | Kabupaten Pemalang | 5.69 | 5.8 | -0.61 | 4.28 | 5.08 |
| 28 | Kabupaten Tegal | 5.51 | 5.56 | -1.48 | 3.71 | 5.14 |
| 29 | Kabupaten Brebes | 5.26 | 5.76 | -0.47 | 2.57 | 5.61 |
| 30 | Kota Magelang | 5.46 | 5.41 | -2.45 | 3.2 | 5.77 |
| 31 | Kota Surakarta | 5.75 | 5.78 | -1.76 | 4.01 | 6.25 |
| 32 | Kota Salatiga | 5.84 | 5.9 | -1.68 | 3.35 | 5.53 |
| 33 | Kota Semarang | 6.48 | 6.81 | -1.85 | 5.16 | 5.73 |
| 34 | Kota Pekalongan | 5.69 | 5.5 | -1.87 | 3.59 | 5.76 |
| 35 | Kota Tegal | 5.87 | 5.77 | -2.29 | 3.12 | 5.16 |
| | **Jawa Tengah** | **5.30** | **5.40** | **-2.65** | **3.32** | **5.31** |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Dari 35 Kabupaten/Kota, sebanyak 23 Kabupaten/Kota yang capaian pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 melebihi capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional, serta terdapat 11 Kabupaten/Kota yang capaian pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 dibawah capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional.

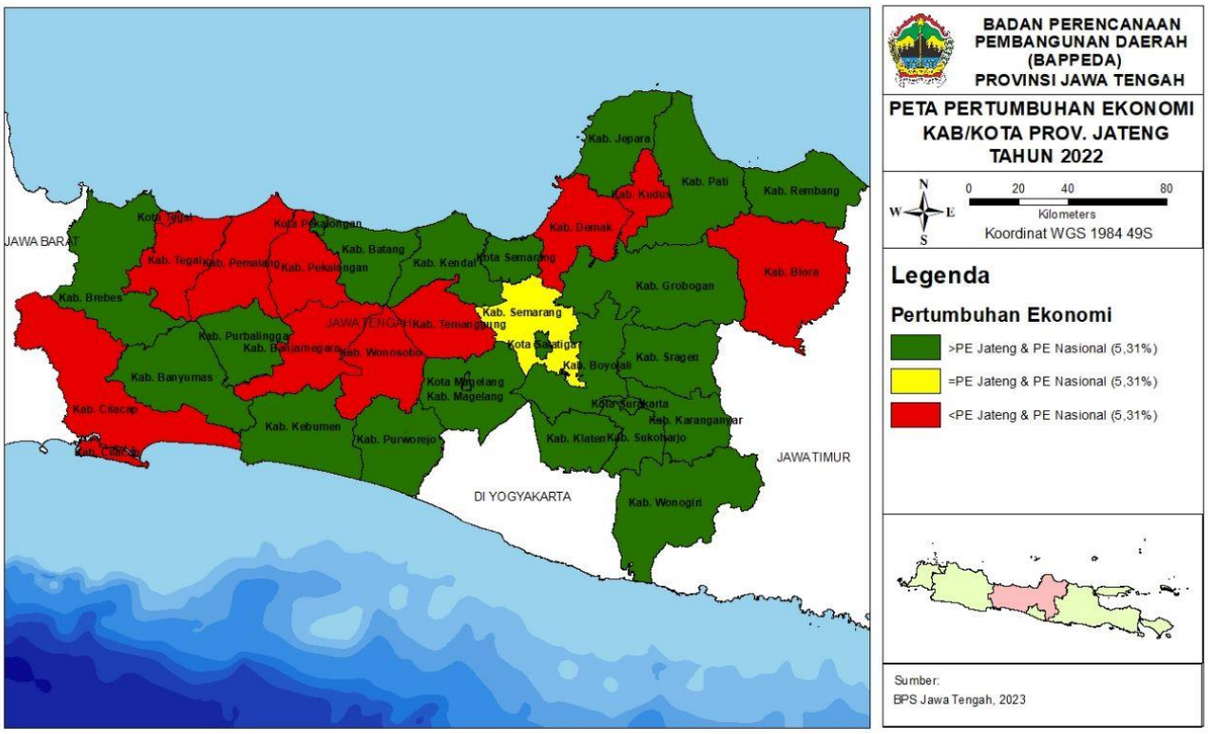


*Sumber: BPS, 2023 (diolah).*

**Gambar 2.18.**
**Peta Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (c-to-c, persen)**

### 2.3.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Selama kurun waktu tahun 2016-2019, PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Namun tahun 2020 mengalami penurunan sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19 menjadi sebesar Rp36,96 juta, turun sebesar 6,15 persen dari sebelum Pandemi yaitu Tahun 2019. Pada Tahun 2021 sudah mengalami kenaikkan seiring dengan membaiknya perekonomian dan mobilitas masyarakat sebesar 38,65 juta rupiah kemudian naik Kembali di Tahun 2022 sebesar Rp.42,15 juta.

**Tabel 2.24.**
**PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)**

| No | Komponen | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDRB ADHB (Milyar Rp) | 1.347.222,49 | 1.419.986,62 | 1.560.899,02 |
| 2 | Jumlah Penduduk (Jiwa) | 36.446.115 | 36.742.501 | 37.032.410 |
| 3 | PDRB Per Kapita ADHB : | | | |
| | • Nilai (Juta Rp) | 36,96 | 38,65 | 42,15 |
| | • Perkembangan (%) | -6,15 | 4,55 | 9,06 |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

PDRB per kapita Jawa Tengah jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Nasional dari Tahun 2010 – 2022 menunjukkan tren kenaikan, kecuali pada Tahun 2020 yang menurun saat terjadi Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 dan 2022 perekonomian Jawa Tengah dan Nasional sudah berangsur pulih seiiring terkendalinya pandemi Covid-19.

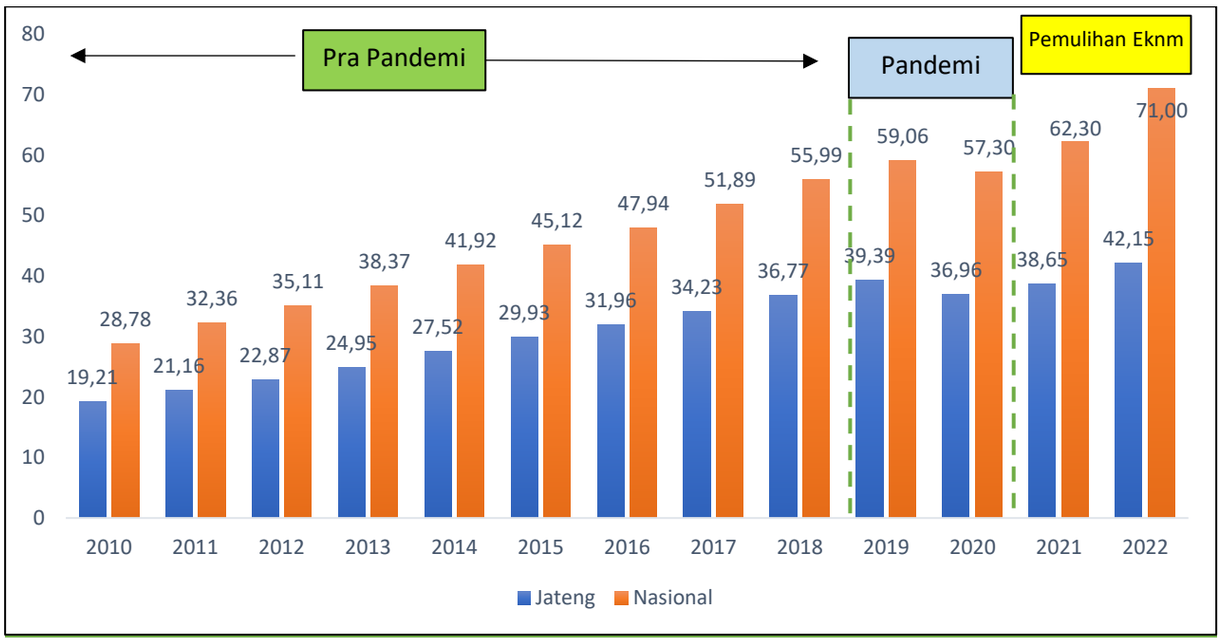


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.19.**

**PDRB Per Kapita Jawa Tengah Dibandingkan Nasional Tahun 2010 – 2022**

Jika dibandingkan dengan provinsi se-Pulau Jawa, PDRB per kapita Jawa Tengah tahun 2022 yang sebesar Rp42,15 juta berada di urutan kelima di bawah Provinsi Jawa Barat yang sebesar Rp49,04 juta. Sedangkan PDRB per kapita tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp298,36 juta, diikuti Provinsi Jawa Timur (Rp66,36 juta) dan Provinsi Banten (Rp60,99 juta).

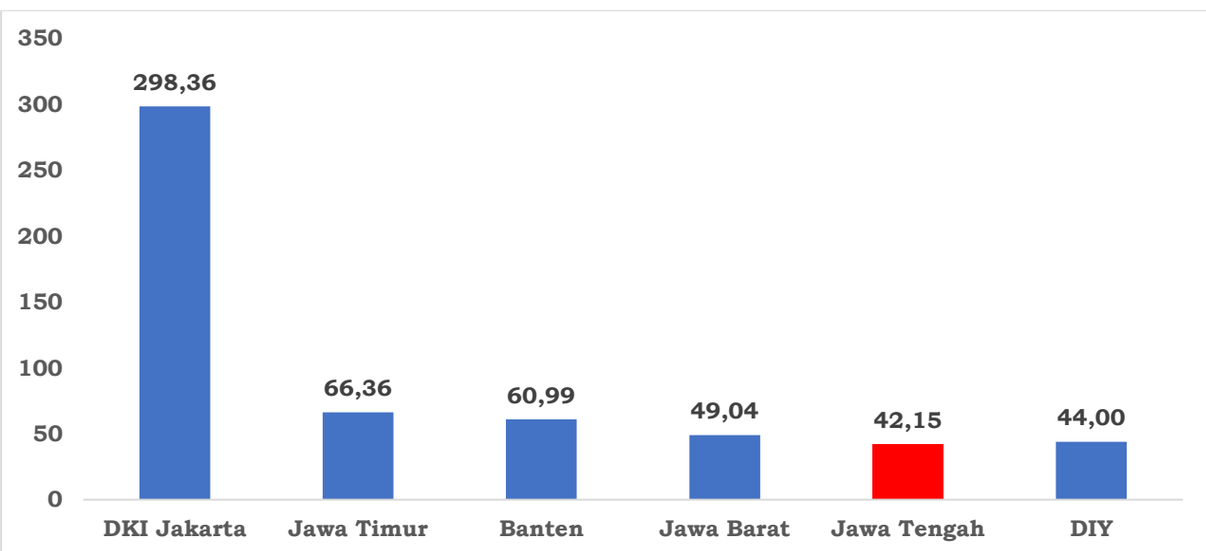


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.20.**

**PDRB Per Kapita Provinsi Se Pulau Jawa Tahun 2022**

Dilihat dari sebaran PDRB per kapita tahun 2022 per kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Kota Semarang menjadi yang tertinggi capaiannya yaitu sebesar Rp137,12 juta, kemudian Kabupaten Kudus sebesar Rp133,88 juta, dan Kota Surakarta sebesar Rp107,01 juta.

**Tabel 2.25.**
**PDRB Per Kapita Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)**

| No | Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Cilacap | 63.8 | 66.39 | 53.92 | 55.84 | 60.82 |
| 2 | Kabupaten Banyumas | 29.72 | 32.02 | 30.28 | 31.81 | 34.8 |
| 3 | Kabupaten Purbalingga | 25.07 | 26.81 | 25.2 | 26.19 | 28.26 |
| 4 | Kabupaten Banjarnegara | 21.86 | 23.51 | 21.38 | 22.23 | 24.06 |
| 5 | Kabupaten Kebumen | 21.79 | 23.44 | 20.8 | 21.71 | 23.68 |
| 6 | Kabupaten Purworejo | 24.3 | 26.1 | 24.26 | 25.34 | 27.43 |
| 7 | Kabupaten Wonosobo | 22.22 | 23.91 | 21.49 | 22.4 | 24.09 |
| 8 | Kabupaten Magelang | 23.71 | 25.3 | 25.01 | 26.18 | 28.53 |
| 9 | Kabupaten Boyolali | 30.88 | 33.33 | 30.83 | 32.61 | 35.94 |
| 10 | Kabupaten Klaten | 31.58 | 34.01 | 31.74 | 33.36 | 36.54 |
| 11 | Kabupaten Sukoharjo | 38.65 | 41.63 | 40.7 | 42.77 | 46.71 |
| 12 | Kabupaten Wonogiri | 28.35 | 30.42 | 28.01 | 29.14 | 31.88 |
| 13 | Kabupaten Karanganyar | 39.05 | 41.94 | 39.82 | 41.71 | 45.5 |
| 14 | Kabupaten Sragen | 39.53 | 42.7 | 38.83 | 40.75 | 44.63 |
| 15 | Kabupaten Grobogan | 18.52 | 19.89 | 18.79 | 19.72 | 21.64 |
| 16 | Kabupaten Blora | 28.57 | 30.16 | 27.16 | 30.39 | 34.87 |
| 17 | Kabupaten Rembang | 27.92 | 29.82 | 29.39 | 30.99 | 33.97 |
| 18 | Kabupaten Pati | 31.84 | 34.34 | 32.74 | 34.23 | 37.41 |
| 19 | Kabupaten Kudus | 120.79 | 127.52 | 129.14 | 127.55 | 133.88 |
| 20 | Kabupaten Jepara | 22.57 | 24.14 | 25.49 | 26.96 | 29.34 |
| 21 | Kabupaten Demak | 21.21 | 22.62 | 22.1 | 22.81 | 24.73 |
| 22 | Kabupaten Semarang | 44.38 | 47.3 | 46.67 | 48.87 | 53 |
| 23 | Kabupaten Temanggung | 26.42 | 28.17 | 27.33 | 28.48 | 30.93 |
| 24 | Kabupaten Kendal | 41.02 | 44.03 | 41.9 | 44.06 | 48.1 |
| 25 | Kabupaten Batang | 26.47 | 28.22 | 27.02 | 28.66 | 31.32 |
| 26 | Kabupaten Pekalongan | 23.9 | 25.59 | 23.6 | 24.61 | 26.36 |
| 27 | Kabupaten Pemalang | 18.21 | 19.65 | 17.6 | 18.49 | 19.96 |
| 28 | Kabupaten Tegal | 22.8 | 24.57 | 22.15 | 23.21 | 25.12 |
| 29 | Kabupaten Brebes | 23.84 | 25.65 | 23.83 | 24.57 | 26.74 |
| 30 | Kota Magelang | 67.29 | 72.45 | 71.7 | 75.48 | 82.91 |
| 31 | Kota Surakarta | 85.79 | 92.83 | 91.17 | 96.36 | 107.01 |
| 32 | Kota Salatiga | 64.41 | 68.89 | 69.14 | 72.39 | 78.99 |
| 33 | Kota Semarang | 98.1 | 105.93 | 114.19 | 123.67 | 137.12 |
| 34 | Kota Pekalongan | 33.14 | 35.59 | 35.36 | 37.17 | 40.68 |
| 35 | Kota Tegal | 56.64 | 61.47 | 55.72 | 58.08 | 63.62 |
| | Provinsi Jawa Tengah | 36.77 | 39.39 | 36.96 | 38.65 | 42.15 |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Tiga kabupaten/kota dengan PDRB per kapita tertinggi di Jawa Tengah sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah kabupaten/kota dengan PDRB per kapita lebih tinggi dari PDRB per kapita Jawa Tengah. Adapun sebanyak sembilan kabupaten/kota memiliki PDRB per kapita antara Rp100 juta dan di atas PDRB per kapita Jawa Tengah yang sebesar Rp42,15 juta. Sedangkan 23 kabupaten/kota lainnya memiliki PDRB per kapita di bawah PDRB per kapita Jawa Tengah (kurang dari Rp.42,15 juta).

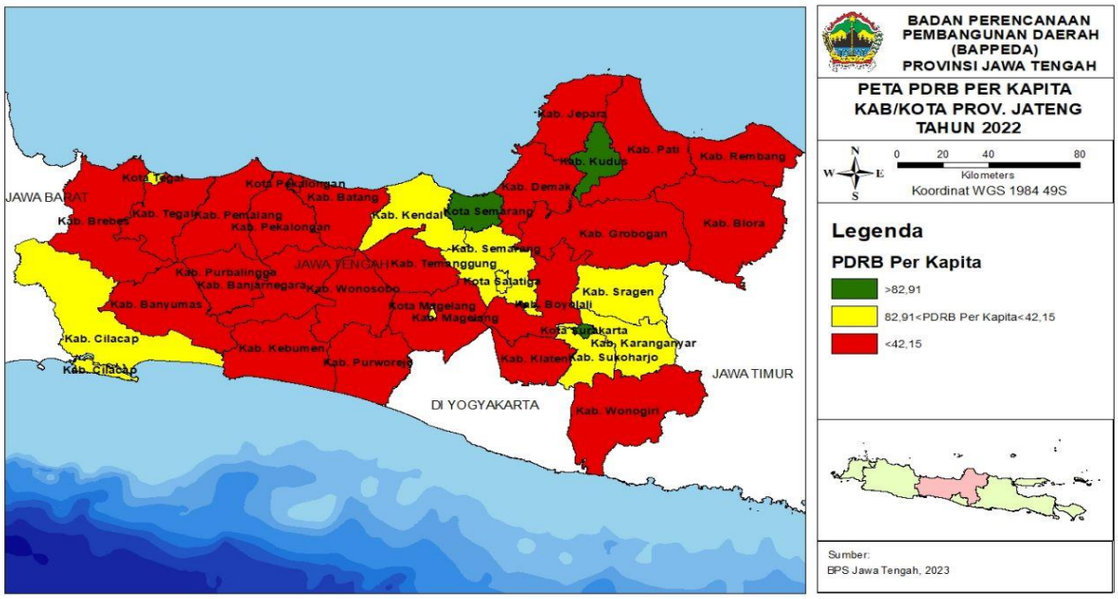


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023 diolah*

**Gambar 2.21.**

**PDRB Per Kapita Kabupaten / Kota Se Jawa Tengah Tahun 2022**

### 2.3.3 Inflasi

Tingkat inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2021 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 1-3 persen. Bahkan tingkat inflasi di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional dalam periode tersebut. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah.

Namun, pada tahun 2022 terjadi kenaikan laju inflasi di Jawa Tengah menjadi sebesar 5,63 persen. Kenaikan inflasi ini juga dialami secara nasional sebagai akibat adanya gejolak ekonomi global akibat konflik geopolitik dan perang Ukraina-Rusia. Kondisi global tersebut menyebabkan gangguan dari sisi *supply* yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan inflasi di banyak negara termasuk Indonesia. Jika tidak terkelola, risiko global ini akan menggiring kepada kondisi stagflasi yaitu fenomena inflasi tinggi dan terjadinya resesi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada periode awal 1980-an dan 1990-an. Kondisi stagflasi akan memberikan imbas negatif luar biasa ke seluruh dunia terutama terhadap negara berkembang dan *emerging market*.

Naiknya laju inflasi Jawa Tengah pada tahun 2022 masih berlanjut hingga awal tahun 2023. Pada bulan Februari 2023 inflasi Jawa Tengah sebesar 5,81 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya semua indeks kelompok pengeluaran terutama komponen makanan dan minuman. Penyebab utama inflasi bulan Februari 2023 adalah kenaikan harga

beras, rokok kretek filter, bawang merah, bawang putih, dan tarif air minum PAM. Penyebab inflasi lain adalah adanya cuaca ekstrem yang menyebabkan beberapa komoditas gagal panen sehingga terjadi lonjakan harga.

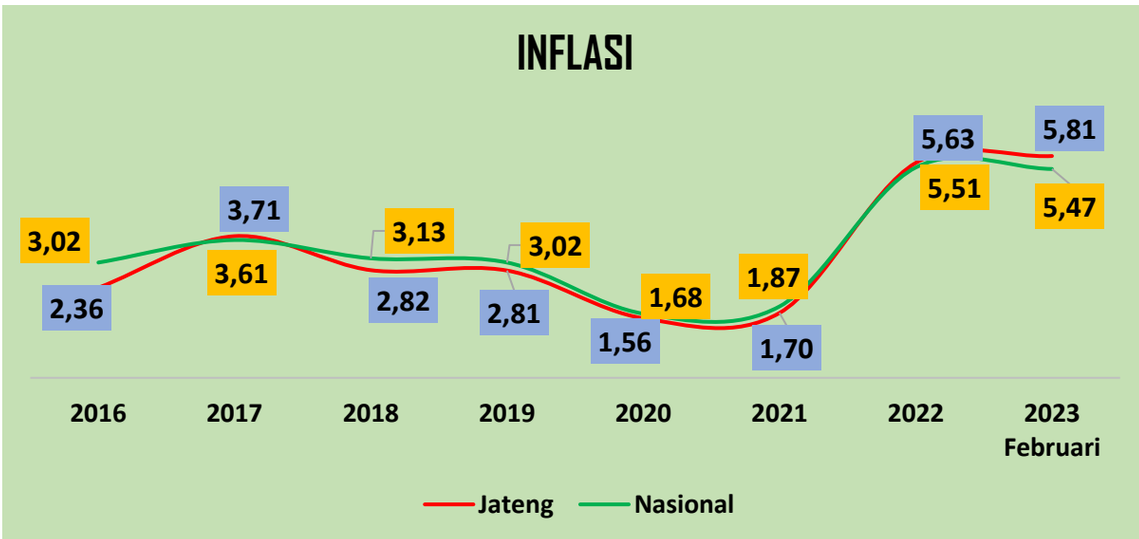


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.22.**
**Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional**
**Tahun 2016 – Maret 2023 (%)**

### 2.3.4 Rasio Gini dan Indeks Williamson

Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan pengeluaran antar penduduk. Dengan nilai berkisar 0-1, semakin tinggi nilai menunjukan ketimpangan yang semakin tinggi, sebaliknya jika nilainya mendekati satu maka angka ketimpangan berkurang (semakin baik). Selama kurun waktu tahun 2019 – 2022 perkembangan Rasio Gini di Jawa Tengah relative menurun. Pada September 2022, Rasio Gini Jawa Tengah tercatat sebesar 0,366, lebih tinggi dibandingkan September 2021 yang sebesar 0,368. Jika dibandingkan dengan nasional, Rasio Gini Jawa Tengah masih lebih rendah sebesar 0,381. Dengan demikian pemerataan pendapatan di Jawa Tengah relatif lebih baik dibandingkan dengan nasional.

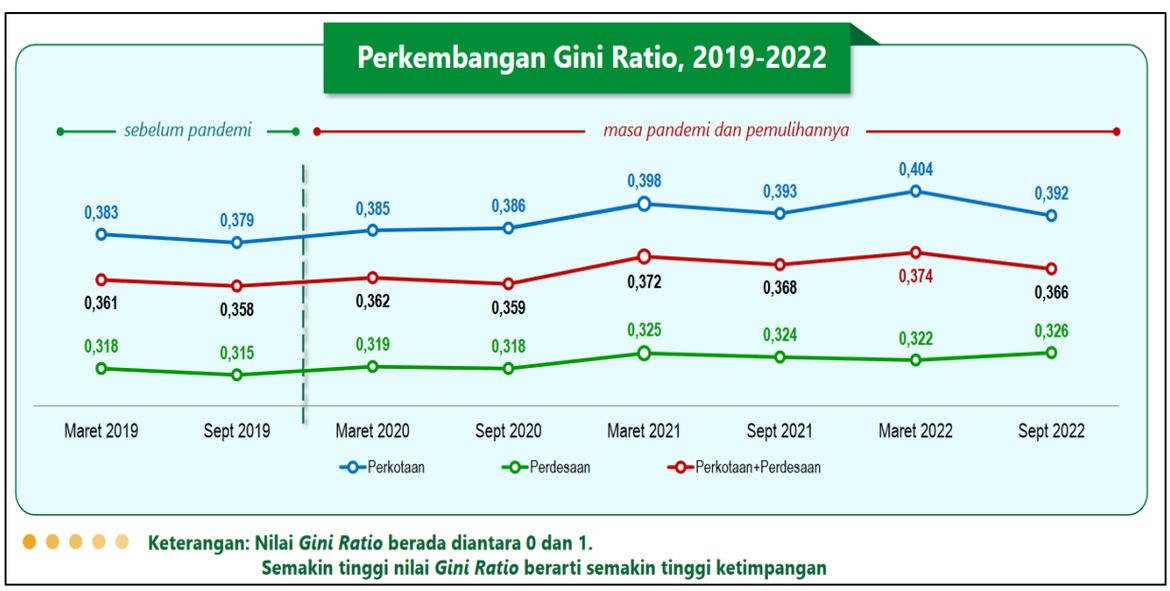


*Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 2.23.**
**Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022**

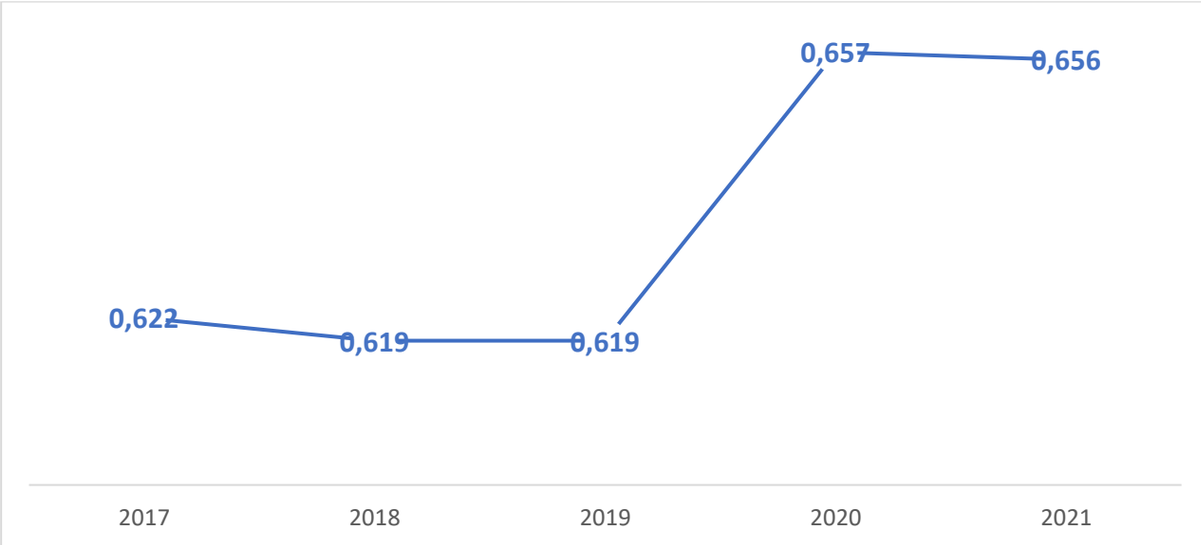


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021*

**Gambar 2.24.**
**Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2021**

### 2.3.5 Indeks Daya Saing Daerah

Adapun tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk selama kurun waktu tahun 2019-2022 di kawasan perkotaan Jawa Tengah lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan di kawasan perdesaan. Pada periode September 2022, rasio Gini di kawasan perkotaan perkotaan Jawa Tengah sebesar 0,392, sedangkan di kawasan perdesaan sebesar 0,326. Fenomena ketimpangan yang tinggi di kawasan perkotaan tersebut juga berlangsung di tingkat nasional, yang dapat mencerminkan bahwa golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan perkotaan lebih mudah terpapar dampak pelemahan ekonomi yang besar dibandingkan dengan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya kapasitas tabungan/dana darurat serta menurunnya penghasilan di tengah penurunan aktivitas produksi.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain se-Pulau Jawa, rasio Gini Jawa Tengah adalah yang terendah setelah Provinsi Jawa Timur dengan perbedaan 0,001. Sementara peningkatan ketimpangan terbesar selama kurun waktu September 2021 sampai dengan September 2022 terjadi di Provinsi DI Yogyakarta.

Selanjutnya dalam rangka melihat tingkat kesenjangan antarwilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah, digunakan indikator Indeks Williamson. Selama kurun waktu tahun 2017–2021, Indeks Williamson Jawa Tengah meningkat yaitu dari 0,622 menjadi 0,656 yang menunjukan ketimpangan antarwilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah semakin besar. Peningkatan ketimpangan antarwilayah di Jawa Tengah terjadi pada tahun 2020 yang merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19. Tahun 2020 Indeks Williamson Jawa Tengah meningkat signifikan menjadi 0,657 atau meningkat 0,038 poin dibandingkan tahun 2019. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah selama masa pandemi untuk memperbaiki perekonomian daerah memberikan dampak positif pada perbaikan perekonomian dan mengurangi ketimpangan antarwilayah pada tahun 2021 menjadi 0,656.

Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) didasarkan pada empat aspek, yaitu aspek ekosistem inovasi, aspek pasar/market, aspek sumber daya manusia/human capital, dan aspek penguat/enabling environment. Secara

keseluruhan, ada 12 pilar, 23 dimensi, dan 97 indikator penilaian yang merepresentasikan keempat aspek tersebut. Berdasarkan nilai IDSD yang dikeluarkan oleh Kemenristek atau BRIN, Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 termasuk daerah pada kategori sangat inovatif dengan nilai 4,52. Namun pada tahun 2021 nilai tersebut turun menjadi 4,0, yang dipengaruhi oleh kondisi akibat terjadinya pandemi Covid-19 di Jawa Tengah.

Dari empat aspek IDSD hanya aspek ekosistem inovasi yang mengalami peningkatan, sedangkan tiga aspek yang lain mengalami penurunan. Penurunan signifikan terjadi pada penilaian aspek pasar, di mana kontributor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah pada pilar dan dimensi ukuran pasar. Walaupun demikian, sebagian dimensi mengalami peningkatan, seperti pada regulasi, penelitian dan pengembangan, serta tata kelola pemerintahan.

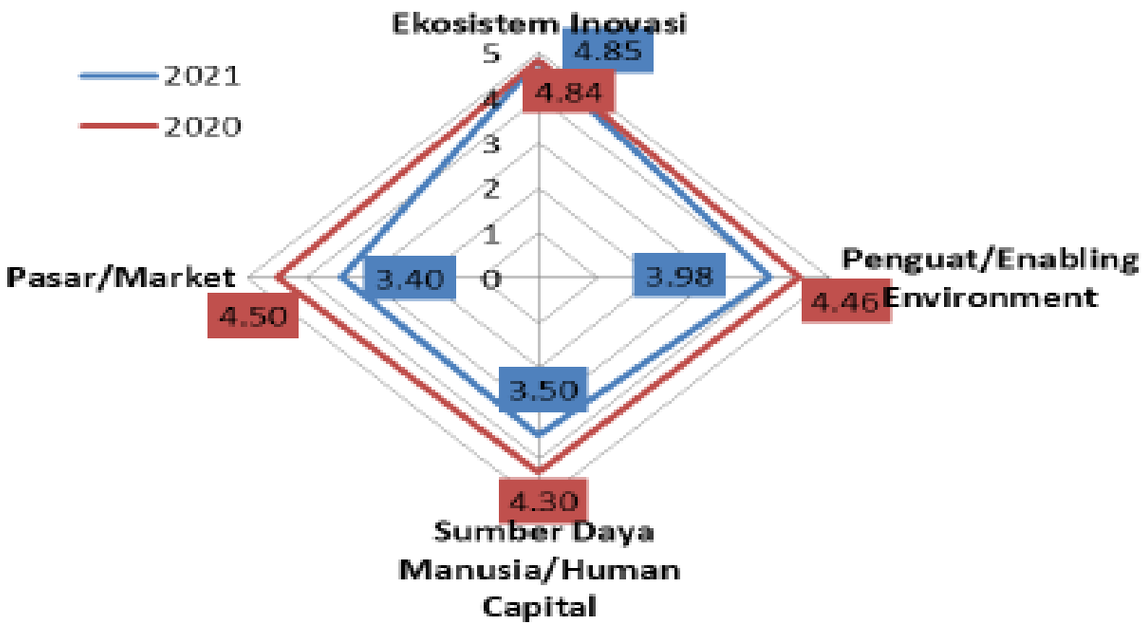


*Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 2.25.**
**Nilai IDSD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan 2021**

### 2.3.6 Investasi

Peningkatan realisasi investasi di Jawa Tengah didukung dengan keberadaan kawasan industri yang ada, terutama penambahan *tenant* di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melaksanakan promosi investasi yang fokus pada sektor unggulan yang mampu menyerap tenaga kerja dan negara tujuan prioritas dengan meningkatkan kerja sama antara stakeholder terkait dan terobosan inovasi digitalisasi promosi. Optimalisasi pemanfaatan Kawasan Industri yang ada di Jawa Tengah terus diupayakan melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur pendukung, air baku dan peningkatan pengelolaan Kawasan Industri yang lebih berkualitas.

**Tabel 2.26.**

**Perkembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah Tahun 2022**

| No. | Nama Kawasan Industri | Pengelola | Total Luas | Lahan Digunakan | Lahan Tersedia | Jumlah Tenant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kawasan Industri Kendal (Kawasan Ekonomi Khusus) | PT. Kawasan Industri Kendal | 1.000 Ha | 460 Ha (tenant, Jalan, Sarana & Prasarana) | - 656,9 Ha (Telah Bersertifikat) - 35,9 Ha (Dalam Proses Sertifikat) | 84 |
| 2. | Grand Batang City | PT. Kawasan Industri Terpadu Batang | 4.300 Ha (Luas Klaster Industri 3.100 Ha) | 182,2 Ha (dari luas total Fase I: 450 Ha ) | - Fase I: 450 Ha - Fase II: 2.650 Ha (dalam proses penyiapan lahan) | 13 |
| 3. | Batang Industrial Park | PT. Perkebunan dan Industri Segajung | 287 Ha | 60 Ha | 227 Ha | 3 |
| 4. | Jatengland Industrial Park Sayung | PT. Jawa Tengah Lahan Andalan | 300 Ha | 100,76 Ha | 227 Ha | 5 |
| 5. | Aviarna Industrial Estate | PT. Bumi Raya Perkasa Nusantara | 462 Ha | + 15 Ha | 447 Ha | 3 |
| 6. | Kawasan Industri Wijayakusuma | PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) | 250 Ha | 144,9 Ha | ± 9 Ha | 117 |
| 7. | BSB Industrial Park | PT. Karyadeka Alam Lestari | 112 Ha | 80,75 Ha | 4 Ha (tidak dalam 1 hamparan) | 48 |
| 8. | Tanjungmas Export Processing Zone | PT. Lamicitra Nusantara | 30 Ha | 27 Ha | 3 Ha | 75 |

*Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah 2012-2025, untuk peluang investasi rentang tahun 2024-2026 mencakup pengembangan industri skala besar yang terintegrasi dan pengembangan investasi di sektor inovasi teknologi tinggi. Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang berkompeten, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Realisasi investasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp68,41 triliun yang terdiri atas realisasi investasi yang dilaporkan melalui sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebesar Rp58,89 triliun dan realisasi investasi non LKPM sebesar Rp9,52 triliun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menghitung angka realisasi investasi Usaha Mikro Kecil (UMK) diluar LKPM mulai

tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelaporan Realisasi Penanaman Modal Sektor Usaha Mikro Dan Kecil Di Provinsi Jawa Tengah. Realisasi investasi sektor UMK tahun 2020 sebesar Rp5,83 triliyun dan meningkat sebesar Rp7,08 triliyun pada tahun 2021. Pada akhir tahun 2022, realisasi sektor UMK meningkat cukup signifikan sebesar Rp9,52 triliyun karena gencarnya pendampingan legalitas perizinan berusaha kepada pelaku usaha sektor UMK.

Realisasi investasi PMA/PMDN sebesar Rp58,89 triliun merupakan rekapitulasi realisasi investasi bernilai diatas Rp5 milliar yang wajib dilaporkan melalui LKPM dengan rincian realisasi PMA sebesar Rp33,9 triliun dan realisasi PMDN sebesar Rp24,99 triliun. Terdapat peningkatan realisasi PMA sebesar Rp12,5 triliun, sedangkan untuk realisasi PMDN mengalami penurunan sebesar Rp6,32 triliun. Realisasi investasi tahun 2022 meningkat lebih besar Rp6,18 triliun (11,72%) dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Jumlah proyek investasi di Jawa Tengah sebanyak 19.374 proyek yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 16.287 proyek dan PMA 3.087 proyek, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 215.775 orang. Sementara itu, realisasi investasi sektor UMK (non LKPM) juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Realisasi sektor ini sebesar Rp9,52 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp2,44 triliun (31,28%). Jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 1.181.350 orang (95,92%) dari jumlah tenaga kerja yang terserap tahun sebelumnya. Jumlah unit UMKM sebesar 227.483 unit dan tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Investasi PMDN, termasuk sektor UKM, menjadi kekuatan yang terus didorong dalam kerangka pemulihan ekonomi daerah. Selain itu, pemulihan ekonomi daerah juga harus didukung dengan program kebijakan prioritas pemerintah, pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha, peningkatan pelayanan perizinan berusaha, ketersediaan tenaga kerja yang berkompeten sesuai kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi yang berkualitas serta komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan iklim investasi yang kondusif.

**Tabel 2.27.**

**Jumlah Nilai Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan LKPM Tahun 2016 – 2022**

| Tahun | Nilai Realisasi Investasi (Rp Triliun) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PMA | PMDN | | Jumlah | Pertumbuhan (%) |
| | | LKPM | Non-LKPM | | |
| 2016 | 14,113 | 24,070 | - | 38,183 | 46,63 |
| 2017 | 31,673 | 19,866 | - | 51,539 | 34,98 |
| 2018 | 31,794 | 27,474 | - | 59,269 | 15,00 |
| 2019 | 40,859 | 18,655 | - | 59,503 | 0,39 |
| 2020 | 19,63 | 30,61 | 5,83 | 50,24 | -15,56 |
| 2021 | 21,4 | 31,31 | 7,08 | 52,71 | 4,91 |
| 2022 | 33,9 | 24,99 | 9,52 | 58,89 | 11,72 |

*Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Berkaitan dengan kawasan industri di Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu sumber investasi, berikut peta persebarannya.

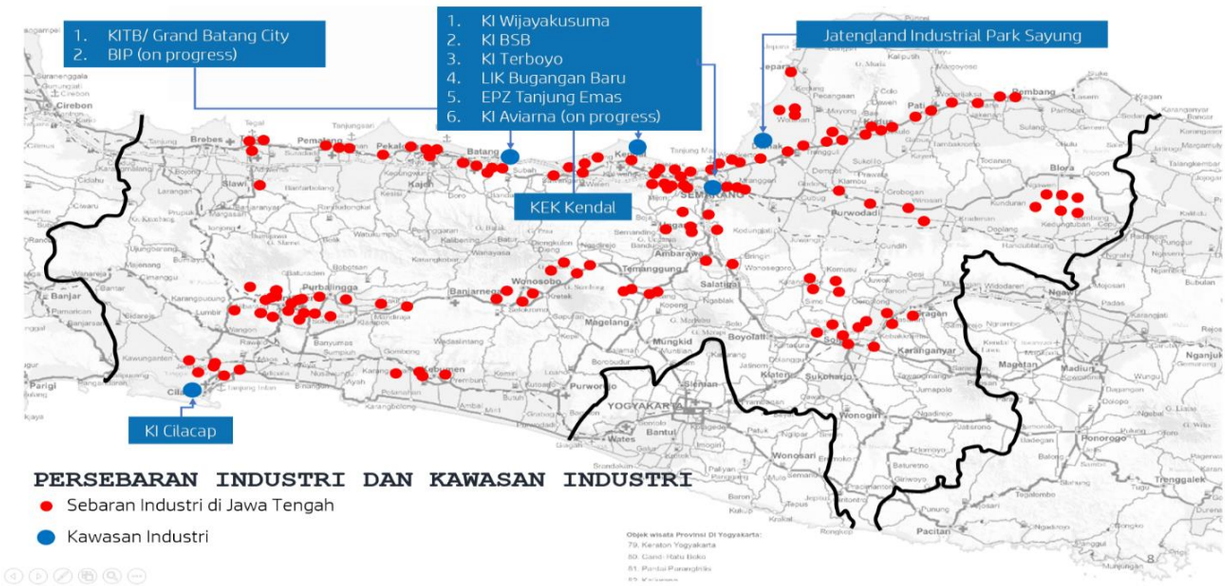


*Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 2.26.**
**Kawasan Industri Eksisting di Provinsi Jawa Tengah**

Dari data di atas, nampak bahwa sampai dengan tahun 2022, persebaran kawasan industri paling banyak berada di wilayah utara Jawa Tengah dengan dominasi berada di Kota Semarang, dan pada saat ini bertambah dengan berdirinya Kawasan Industri di Kabupaten Kendal dan Demak. Sedangkan dari sisi kebijakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Tahun 2012 - 2025 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025. Hal ini dilakukan untuk mendorong kinerja di urusan penanaman modal.

Untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai macam inovasi melalui terobosan Layanan Konsultasi dan Pendampingan Terpadu Secara Elektronik (Lakon-e Pandu), Pekan Layanan Sistem Investasi Jos dan Handal (Pena Si Johan), layanan perizinan secara online menggunakan Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP Jateng) yang telah dilengkapi dengan fitur *digital signature*, maupun digitalisasi promosi melalui aplikasi *Central Java Investment Platform (CJIP)*. Selain itu, dalam rangka mempermudah dan memperluas layanan perizinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memfasilitasi pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Sampai dengan awal tahun 2023, telah beroperasi 28 MPP di 28 Kabupaten/Kota.

### 2.3.7 Pertanian (dalam arti luas) dan Ketahanan Pangan

#### a. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani dan untuk membandingkan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP juga menunjukan daya tukar dari harga pokok produk pertanian dengan barang dan

jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP secara relatif semakin tinggi tingkat kemampuan/daya beli petani.

Pada kurun waktu tahun 2018-2022 perhitungan dan rilis NTP dibandingkan dengan Tahun dasar 2018, NTP per Bulan Desember terendah pada Tahun 2020 yaitu sebesar 101,49, namun kembali meningkat pada Tahun 2021 sebesar 103,18 dan 2022 sebesar 107,27.

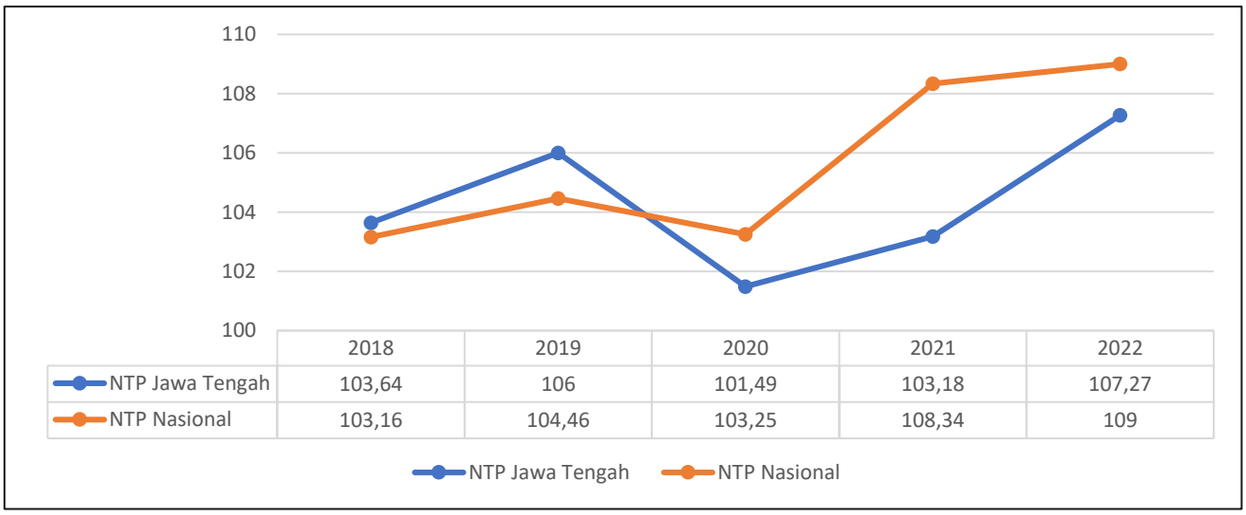


| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| NTP Jawa Tengah | 103,64 | 106 | 101,49 | 103,18 | 107,27 |
| NTP Nasional | 103,16 | 104,46 | 103,25 | 108,34 | 109 |

*Sumber: BPS, 2022*
*Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun*

**Gambar 2.27.**
**Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional**
**Tahun 2018 – 2022**

Dilihat berdasarkan sub sektor, pada kurun waktu tahun 2018-2022, masing-masing sub sektor cenderung fluktuatif. Pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat dan perikanan cenderung mengalami tren yang meningkat, walaupun pada tahun 2020 beberapa sub sektor sempat mengalami penurunan. Tren yang meningkat menunjukkan bahwa sektor pertanian di Jawa Tengah memiliki tingkat kemampuan dan daya beli yang relatif stabil. Namun sebaliknya, sub sektor peternakan mengalami tren yang menurun hingga tahun 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022.

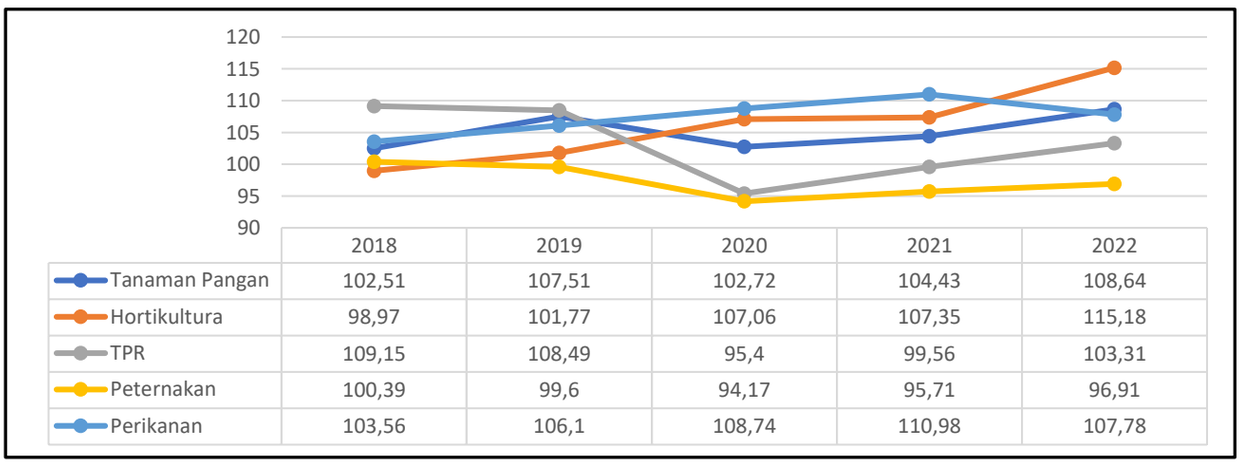


| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanaman Pangan | 102,51 | 107,51 | 102,72 | 104,43 | 108,64 |
| Hortikultura | 98,97 | 101,77 | 107,06 | 107,35 | 115,18 |
| TPR | 109,15 | 108,49 | 95,4 | 99,56 | 103,31 |
| Peternakan | 100,39 | 99,6 | 94,17 | 95,71 | 96,91 |
| Perikanan | 103,56 | 106,1 | 108,74 | 110,98 | 107,78 |

*Sumber: BPS, 2021*
*Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun*

**Gambar 2.28.**
**Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2018 – 2022**

**b. Produksi Pertanian**

Potensi pertanian Jawa Tengah didukung melalui sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Pada kurun waktu 2018-2022, jumlah produksi pada sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan relatif fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan perubahan iklim atau cuaca yang tidak dapat diprediksi yang sangat berpengaruh terhadap hasil panen petani di Jawa Tengah, selain hal tersebut, kualitas SDM petani juga masih membutuhkan intervensi untuk dapat memberikan dampak positif pada peningkatan jumlah produksi di sektor pertanian.

Pada kurun waktu 2018-2022, jumlah produksi pada sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sangat fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan perubahan iklim atau cuaca yang tidak dapat diprediksi yang sangat berpengaruh terhadap hasil panen petani di Jawa Tengah. Selain hal tersebut, kualitas SDM petani juga masih membutuhkan intervensi untuk dapat memberikan dampak positif pada peningkatan jumlah produksi di sektor pertanian.

Pada periode tahun 2018-2020 komoditas padi mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan perubahan standar pengukuran produksi pada komoditas padi menggunakan kerangka sampling area (KSA). Produksi pada komoditas jagung juga masih fluktuatif. Sedangkan pada komoditas kedelai, produksinya menurun dikarenakan menurunnya luas tanam kedelai yang semakin menurun dan minat petani untuk menanam kedelai berkurang dibandingkan komoditas lain.

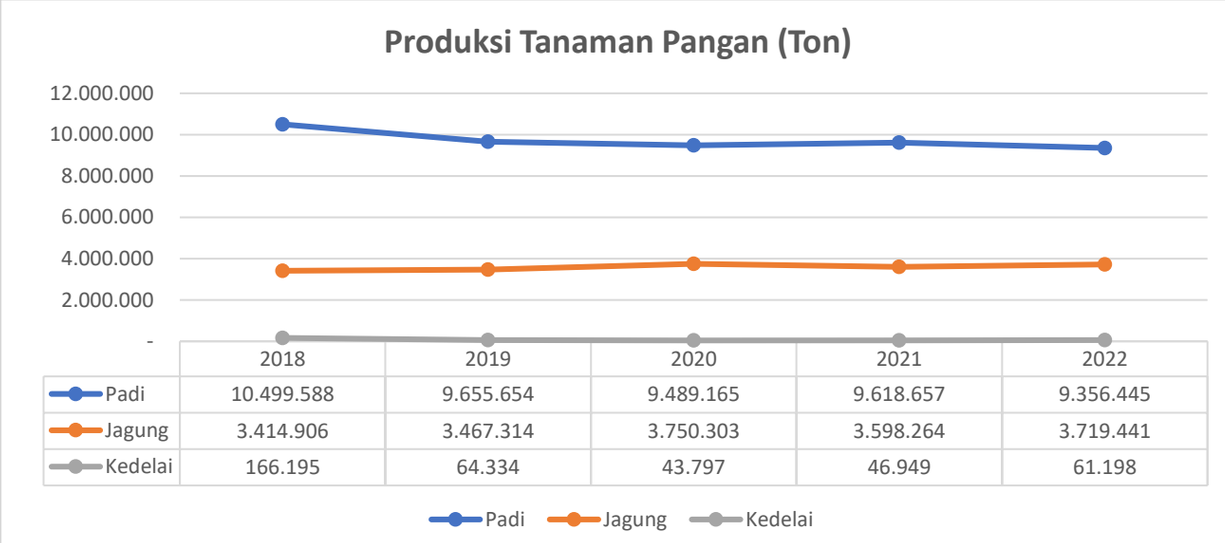


| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Padi | 10.499.588 | 9.655.654 | 9.489.165 | 9.618.657 | 9.356.445 |
| Jagung | 3.414.906 | 3.467.314 | 3.750.303 | 3.598.264 | 3.719.441 |
| Kedelai | 166.195 | 64.334 | 43.797 | 46.949 | 61.198 |

*Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2022*

**Gambar 2.29.**
**Perkembangan Produksi Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2018-2022**

Untuk sektor holtikultura, Komoditas utama di Jawa Tengah terdiri dari bawang merah dan cabai besar. Produksi bawang merah dan cabai besar pada kurun waktu Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi, dengan produksi tertinggi bawang merah pada Tahun 2020 sebesar 611,165 Ton, sedangkan produksi tertinggi cabai besar pada Tahun 2022 sebesar 186,722 Ton. Pada komoditas bawang merah dan cabai besar masih diperlukan intervensi pada penyimpanan hasil panen dan fasilitasi distribusi untuk menjaga stabilitas stok dan harga mengingat komoditas ini menjadi pemicu inflasi di Jawa Tengah.

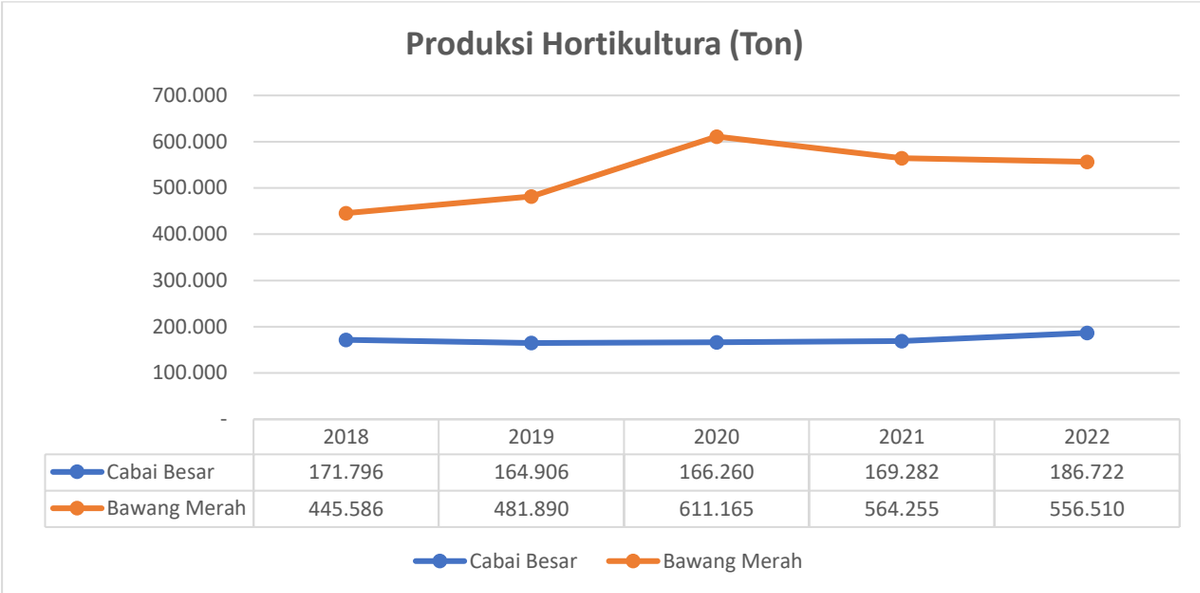


*Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2022*

**Gambar 2.30.**
**Perkembangan Produksi Bawang Merah, Cabai Besar**
**Tahun 2018-2022**

Sementara itu, komoditas utama tanaman perkebunan di Jawa Tengah terdiri dari tebu, kopi, dan kelapa. Produksi komoditas tebu mengalami fluktuasi dengan produksi tertinggi pada 2019 sebesar 2.894.884 Ton, diperlukan upaya peningkatan produktivitas pada komoditas tebu antara lain melalui bongkar roton dan penggunaan bibit unggul. Demikian juga dengan produksi kopi dan kelapa juga mengalami fluktuasi dengan produksi kopi tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 26.549 Ton dan produksi kelapa tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 174.041 Ton.

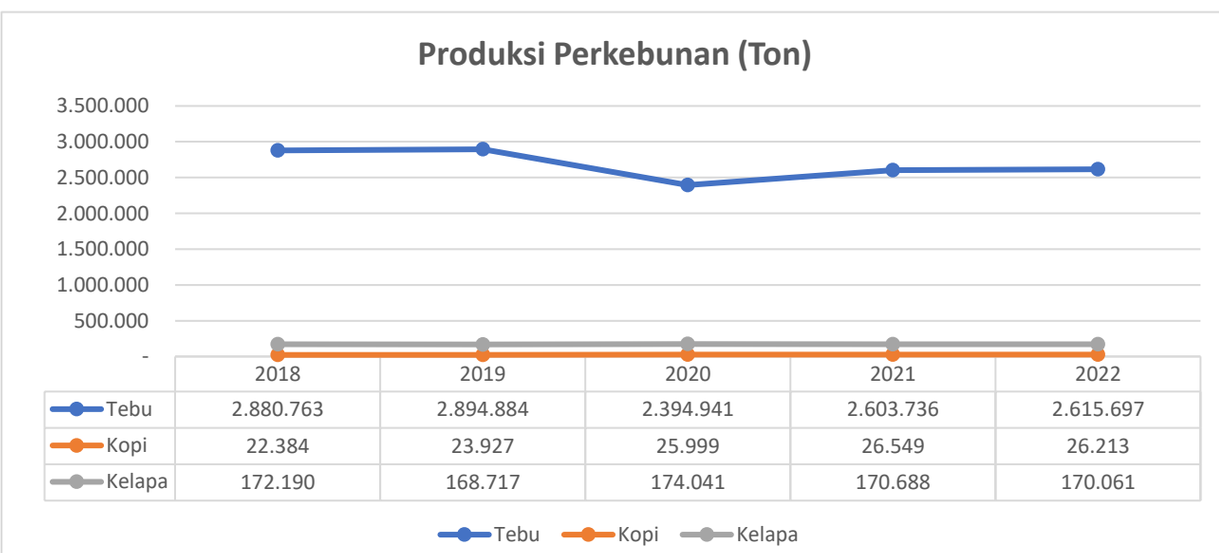


*Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2022*

**Gambar 2.31.**
**Perkembangan Produksi Tebu, Kopi, Kelapa Tahun 2018-2022**

**c. Produksi Peternakan**

Produksi hasil peternakan di Jawa Tengah terutama ternak sapi potong dan kambing di Jawa Tengah mengalami tren yang fluktuatif pada kurun waktu Tahun 2018-2022. Pada komoditas sapi potong, jumlah populasi terus mengalami peningkatan hingga 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan

populasi tertinggi pada Tahun 2021 sebanyak 1.873.206 ekor. Pada komoditas kambing, perkembangan populasi memiliki tren fluktuatif dengan populasi tertinggi pada Tahun 2019 sebanyak 3.937.013 ekor. Penurunan jumlah populasi hewan ternak pada tahun 2022 disebabkan oleh wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak ruminansia. Selain itu, usaha di sektor peternakan belum sepenuhnya pulih setelah mewabahnya PMK yang berimbas pada penurunan jumlah populasi ternak.

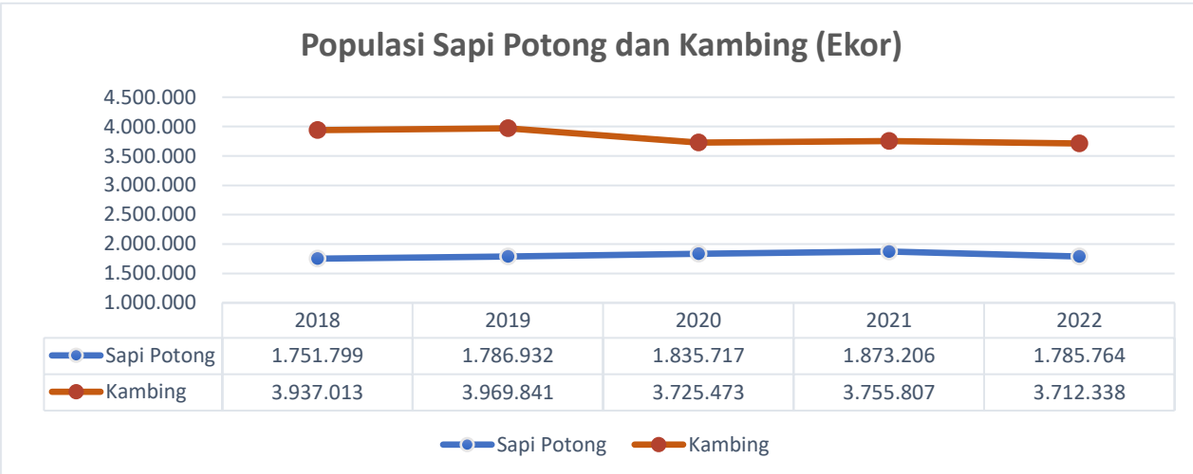


| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapi Potong | 1.751.799 | 1.786.932 | 1.835.717 | 1.873.206 | 1.785.764 |
| Kambing | 3.937.013 | 3.969.841 | 3.725.473 | 3.755.807 | 3.712.338 |

*Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. 2022*

**Gambar 2.32.**
**Perkembangan Populasi Sapi Potong dan Kambing Tahun 2018-2022**

Sehubungan dengan itu, Produksi hasil peternakan pada daging, susu, dan telur di Jawa Tengah relatif juga mengalami peningkatan. Produksi daging tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 457,456,564 Kg, produksi susu tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 105.613.011 Kg dan produksi telur mencapai titik tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 344,700,377 Kg.

Tantangan dalam peningkatan produksi susu adalah adanya penurunan populasi sapi perah dan penurunan kualiatas genetik sapi perah di Jawa Tengah. Banyak peternak sapi perah beralih ke usaha lain dianggap lebih menguntungkan. Faktor ketersediaan hijauan pakan dan masih ditemukan peredaran pakan konsentrat belum sesuai SNI yang mengakibatkan produksi tidak optimal. Selanjutnya tantangan peningkatan produksi telur yaitu antara lain harga pakan yang tinggi, ketersediaan pakan asal jagung yang belum berlanjut sementara ketergantungan terhadap jagung sangat tinggi produktivitas. Produksi daging, telur dan susu dapat dilihat pada gambar berikut.

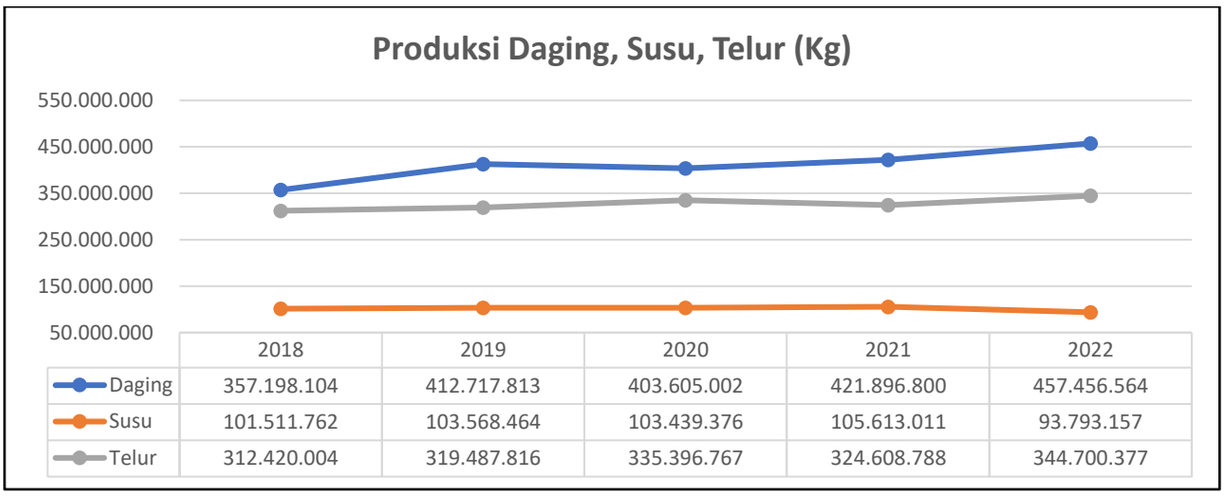


| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daging | 357.198.104 | 412.717.813 | 403.605.002 | 421.896.800 | 457.456.564 |
| Susu | 101.511.762 | 103.568.464 | 103.439.376 | 105.613.011 | 93.793.157 |
| Telur | 312.420.004 | 319.487.816 | 335.396.767 | 324.608.788 | 344.700.377 |

*Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. 2022*

**Gambar 2.33.**
**Perkembangan Produksi Daging, Susu, Telur**
**Tahun 2018-2022**

**d. Ketahanan Pangan**

Kondisi ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah diukur dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Perwujudan ketahanan pangan dicapai melalui tiga pilar yaitu: (1) Ketersediaan pangan; (2) Cadangan pangan; serta (3) Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Capaian IKP Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dari tahun 2019–2022 dengan perkembangan semakin baik dan secara nasional IKP Jawa Tengah terbaik kedua. Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKP pada tahun 2022 sebesar 82,95 lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 82,73, tahun 2020 sebesar 82,31, dan tahun 2019 sebesar 78,85.

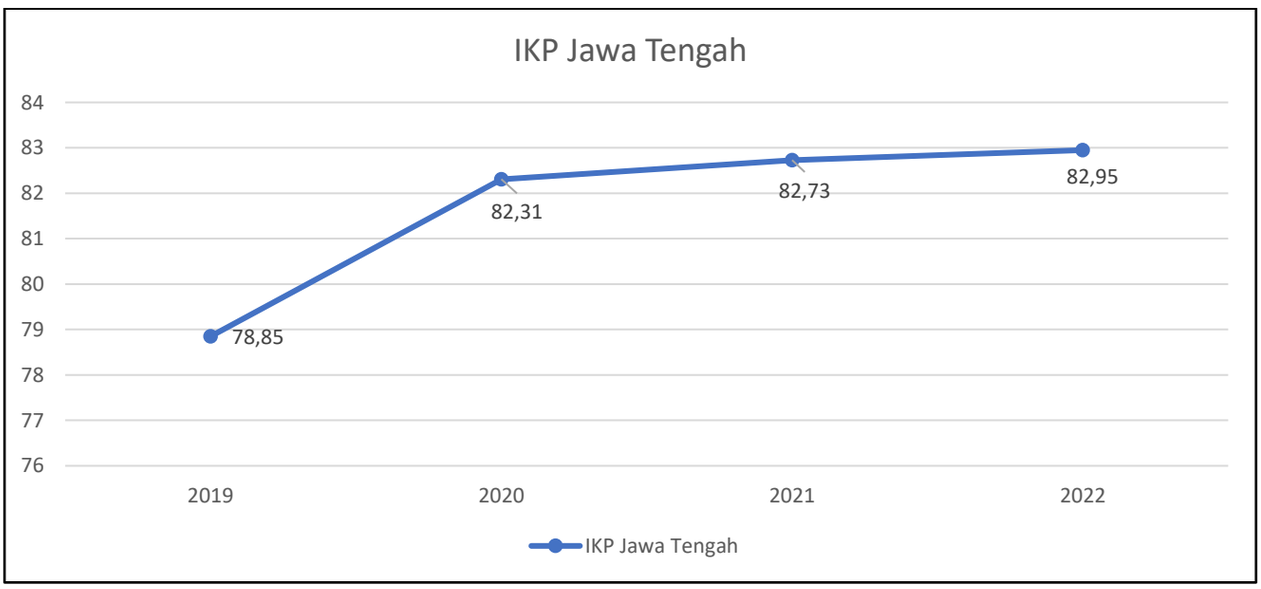


*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2022.*

**Gambar 2.34.**
**Indeks Ketahanan Pangan Jawa Tengah**
**Tahun 2019 - 2022**

Kemudian pada aspek ketersediaan pangan, dapat digambarkan melalui angka ketersediaan energi dan protein. Ketersediaan energi dan protein adalah ketersediaan zat gizi per kapita yang terkandung dalam makanan yang siap dikonsumsi setiap penduduk suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Pada

Tahun 2022 angka ketersediaan energi sebesar 3,797 Kkal/hari dengan ketersediaan protein 95,98 gram/hari dan lemak sebesar 57,99 gram/hari.

**Tabel 2.28.**
**Perkembangan Ketersediaan Energi, Protein Dan Lemak**
**Provinsi Jawa Tengah**

| Tahun Penyusunan | ATAP | Energi (Kkal/hari) | | | Protein (Gram/hari) | | | Lemak (Gram/hari) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total | Nab | Hew | Total | Nab | Hew | Total | Nab | Hew |
| 2016 | 2015 | 4,618 | 4,499 | 118 | 100.92 | 90.65 | 11.19 | 48.15 | 42.3 | 5.84 |
| 2017 | 2016 | 4,055 | 3,925 | 130 | 109.03 | 97.84 | 11.19 | 62 | 55.24 | 6.76 |
| 2018 | 2017 | 4,027 | 3,886 | 141 | 114.46 | 98.77 | 15.69 | 60.88 | 52.92 | 7.96 |
| 2019 | 2018 | 3,730 | 3,605 | 125 | 87.83 | 75.45 | 12.38 | 76.24 | 68.38 | 7.86 |
| 2020 | 2019 | 3,732 | 3,604 | 128 | 87.97 | 74.69 | 13.27 | 40.41 | 32.75 | 7.65 |
| 2021 | 2020 | 3,736 | 3,607 | 129 | 98.17 | 84.51 | 13.66 | 56.38 | 48.74 | 7.63 |
| 2022 | 2021 | 3,797 | 3,680 | 118 | 95.98 | 83.82 | 11.75 | 57.99 | 50.82 | 7.17 |

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Selanjutnya kondisi ketahanan dan kerentanan pangan ditunjukkan melalui peta *Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)*. Peta FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan dan disusun berdasarkan aspek ketersediaan, aspek akses pangan dan aspek pemanfaatan. Kondisi ketahanan dan kerentanan pangan peta FSVA diukur pada prioritas 1 sampai 6. Pada tahun 2022, dari total 576 kecamatan terdapat 46 kecamatan dengan kategori agak rentan (prioritas 3), 27 kecamatan dengan kategori rentan (prioritas 2) dan 5 kecamatan dengan kategori sangat rentan (prioritas 1). Kecamatan dengan prioritas 1, 2 dan 3 merupakan prioritas lokasi penanganan kerentanan dan ketahanan pangan di Jawa Tengah. Kondisi dan peta FSVA Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.

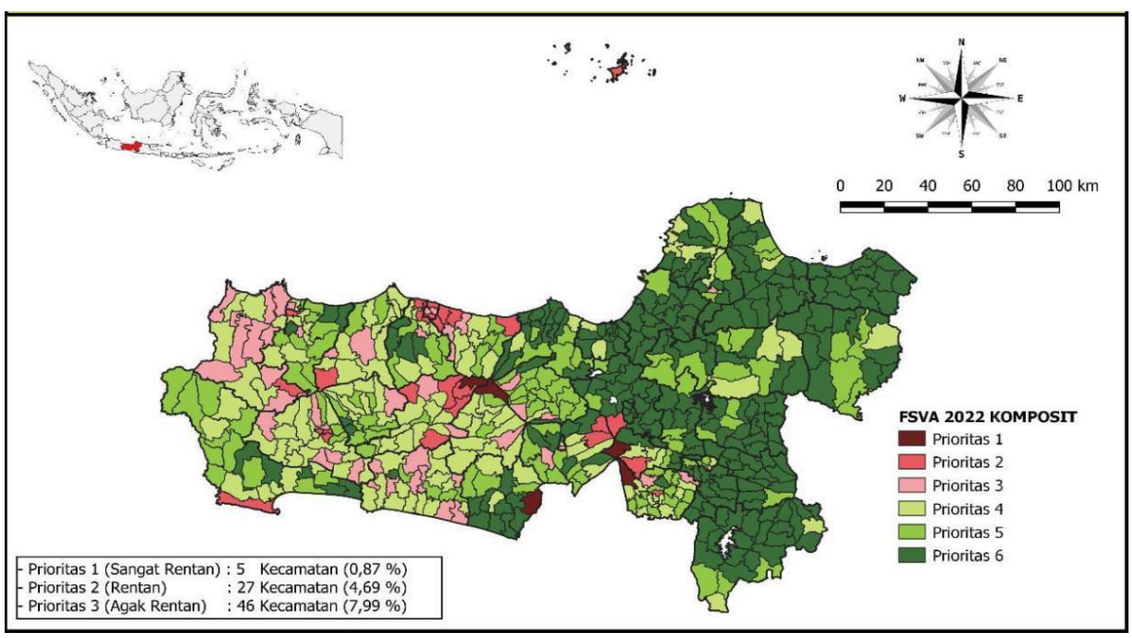


*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 2.35.**
**Peta *Food Security And Vulnerability Atlas* (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

Kemudian keberagaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Berdasarkan skor PPH Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022 untuk kelompok pangan umbi-umbian dan pangan hewani masih dibawah standar sehingga perlu upaya untuk peningkatan konsumsi, sedangkan disisi lain masih banyak terjadi pemborosan pangan yang perlu segera ditangani. Secara rinci perkembangan skor PPH Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022 sebagai berikut.

**Tabel 2.29.**
**Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022**

| No | Kelompok Pangan | Standar | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Padi-padian | 25,0 | 25,00 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2 | Umbi-umbian | 2,5 | 1,42 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
| 3 | Pangan Hewani | 24,0 | 17,09 | 20,0 | 20,4 | 21,0 | 22,9 |
| 4 | Minyak & lemak | 5,0 | 5,00 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | Buah/biji berminyak | 1,0 | 0,70 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 6 | Kacang-kacangan | 10,0 | 10,00 | 6,4 | 6,1 | 6,3 | 8,0 |
| 7 | Gula | 2,5 | 2,37 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
| 8 | Sayur & buah | 30,0 | 25,71 | 29,5 | 27,1 | 26,0 | 30,0 |
| 9 | Lain-lain | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Skor PPH Jateng** | | **100,0** | **91,80** | **86,41** | **89,6** | **87,1** | **94,4** |
| **Skor PPH Nasional** | | **100,0** | **85,20** | **90,40** | **90,8** | **87.9** | **92,9** |

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, 2022*

**e. Produksi Perikanan dan Kelautan**

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung peningkatan konsumsi protein dan pangan hewani, sektor perikanan juga turut mengambil peran. Sektor perikanan terdiri dari perikanan tangkap dan budidaya, selain itu juga didukung dengan pengelolaan kawasan pesisir, termasuk di dalamnya pergaraman.

Produksi perikanan tangkap menunjukkan penurunan dari tahun 2018 – 2022, salah satu penyebabnya karena belum seluruhnya nelayan memiliki keterampilan. Berdasarkan data jumlah nelayan yang memiliki kompetensi sebanyak 3.444 (18%) dari jumlah total sebanyak 129.620 nelayan. Selain itu kapal yang menerapkan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) sangat sedikit yaitu sebanyak 204 kapal atau (0,74%) dari total kapal di Jawa Tengah sebanyak 27.488 unit. Perkembangan produksi perikanan tangkap ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

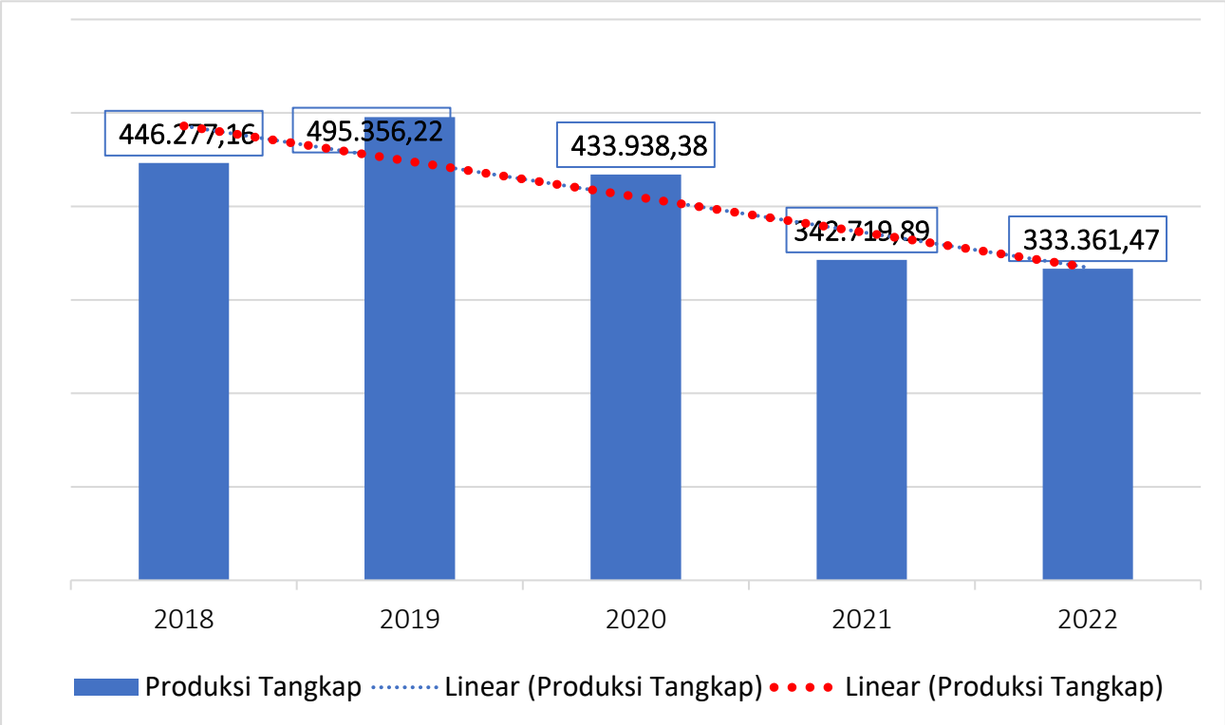


*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.36.**
**Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

Dari sisi prasarana yang menunjang produksi perikanan tangkap, Provinsi Jawa Tengah memiliki 11 (sebelas) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Secara umum Pelabuhan Perikanan di Jawa Tengah telah memiliki kriteria yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. Namun demikian masih diperlukan peningkatan kapasitas dermaga maupun kolam pelabuhan dan breakwater (penahan gelombang) mengingat semakin meningkatnya jumlah kapal.

**Tabel 2.30.**
**Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Provinsi Jawa Tengah**

| KRITERIA TEKNIS : | | PPP Tegalsari | PPP Karimunjawa | PPP Tasikagung | PPP Bajomulyo | PPP Morodemak | PPP Tawang | PPP Klidanglor | PPP Wonokerto | PPP Asemdoyong | PPP Larangan | PPP Lohgending |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Fasilitas* | *Standar* | | | | | | | | | | | |
| Tambat labuh Kapal | ≤ 10 GT | ≥ 10 GT | ≤ 10 GT | ≥ 10 GT | ≥ 10 GT | ≤ 10 GT | ≤ 10 GT | ≥ 10 GT | ≤ 10 GT | ≤ 10 GT | ≤ 10 GT | ≤ 10 GT |
| Panjang Dermaga | ≥ 100 m | 694 m | 160 m | 2400 m | 693 m | 400 m | 450 m | 300 m | 450 m | 215 m | 130 m | 414 m |
| Kedalaman Kolam | Min >2 m | sesuai | sesuai | sesuai | sesuai | sesuai | Sesuai | Sesuai | sesuai | sesuai | sesuai | Sesuai |
| Daya tampung | 30 Unit Kapal/Total 300 GT | ≥ 30 Unit Kapal | ≥ 30 Unit Kapal | ≥ 30 Unit Kapal | ≥ 30 Unit Kapal | ≥ 30 Unit Kapal | ≥ 30 Unit Kapal | ≥ 30 Unit Kapal | ≥ 30 Unit Kapal | ≥ 30 Unit Kapal | ≥ 30 Unit Kapal | ≥ 30 Unit Kapal |
| Lahan | 5 Ha | 16.3 Ha | 16,4 Ha | 9,659 Ha | 6,36 Ha | 3,9 Ha | 0,7 Ha | 50 Ha | 0,8 Ha | 2,2 Ha | 5,1 Ha | 18,7 Ha |
| PENUNJANG : | | | | | | | | | | | | |
| Hasil Perikanan | rata-rata 5 Ton/Hari | 169 Ton | 5,2 Ton | 19,2 Ton | 87 Ton | 13 Ton | 1,5 Ton | 51 Ton | 0,5 Ton | 29 Ton | 2,8 Ton | 0,9 Ton |
| Terdapat Industri Pengolahan Ikan | Perusahaan / UPI mikro | 27 | 5 | 220 | 10 | 127 | Ada | 62 | Ada | 95 | Ada | Ada |
| Industri Penunjang Lainnya | perusahaan | 478 | 1 | 2 | 19 | 4 | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| KETERANGAN : | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Kapal | | 335 | 358 | 359 | 318 | 46 | 759 | 153 | 421 | 253 | 138 | 83 |
| < 10 GT | | 1 | 351 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 332 | 227 | 109 | 83 |
| 10-30 GT | | 54 | 7 | 155 | 34 | 46 | 59 | 114 | 89 | 26 | 29 | 0 |

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Disisi lain, risiko kecelakaan yang dihadapi nelayan saat melaut cukup tinggi, maka perlu diberikan perlindungan kepada nelayan dalam bentuk asuransi nelayan. Melalui asuransi nelayan diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi individu nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan paruh waktu, nelayan buruh, wanita nelayan dan ABK kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT). Nelayan Jawa Tengah yang sudah memperoleh bantuan premi asuransi sebesar 40.000 nelayan dari total 129.620 nelayan. Tercatat pada tahun 2019 sebanyak 50 klaim dengan nilai Rp.1.216.262.959, pada tahun 2021 sebanyak 12 klaim dengan nilai Rp.201.846.000, dan pada tahun 2022 sebanyak 93 klaim dengan nilai Rp 1.536.491.607

Sedangkan pada produksi perikanan budidaya relatif mengalami peningkatan karena didukung dengan peningkatan luas lahan budidaya dan adanya pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan. Perkembangan produksi perikanan budidaya ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

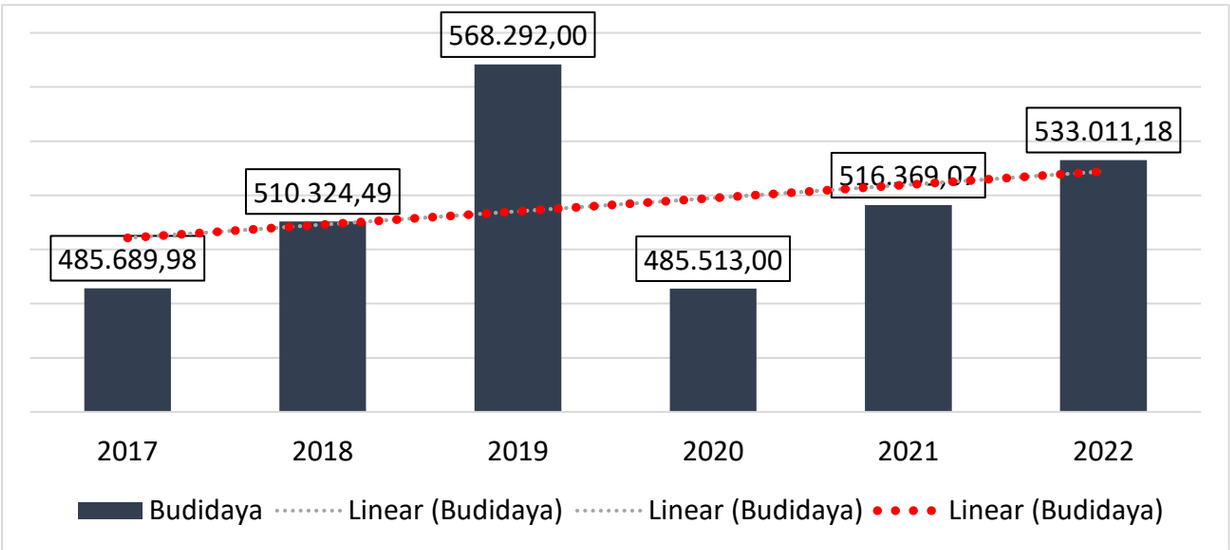


*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.37.**
**Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022**

Peningkatan luas lahan terlihat dari saat ini total seluas 419.394.272 m² yang terdiri dari lahan budidaya intensif - semi intensif 59. 938.532 m² dan lahan tradisional 359.455.740 m², serta didukung dengan jumlah pembudidaya tradisional sebanyak 220.229 orang dan pembudidaya intensif-semi intensif sebanyak 4.948 orang. Adapun jumlah pembudidaya yang berkompeten/terampil 1.323 orang (0,60%) dari keseluruhan pembudidaya. Selain itu, terdapat sejumlah pembudidaya yang bersertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik sebanyak 231, Cara Pembenihan Ikan Yang Baik sebanyak 93, serta Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik sebanyak 9 unit.

Dari sisi prasarana yang menunjang produksi perikanan budidaya, Provinsi Jawa Tengah memiliki sepuluh loka perikanan budidaya berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Budidaya Air Tawar dan Payau Nomor B.22151/DJPB/X/2021, bahwa pemerintah provinsi berperan sebagai penyedia induk unggul dan benih bermutu di lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. Dalam lima tahun

terakhir, produksi perikanan budidaya menunjukkan peningkatan. Namun terdapat beberapa tantangan dalam mengelola perikanan budidaya antara lain kondisi prasarana dan sarana yang belum memadai, serta penurunan kualitas dan kuantitas induk nila, lele, dan gurame. Penurunan kualitas induk tersebut menyebabkan calon induk yang dihasilkan menurun performa dan jumlahnya. Penurunan performa terjadi pada induk kelas GGPS (great grand parent stock), kelas GPS (grand parent stock) maupun benih kelas sebar.

Selain itu, pada aspek kelestarian sumber daya ikan perlu dilakukan upaya pelestarian ikan jenis endemik lokal Jawa Tengah, misalnya jenis ikan beong, wader, nilem, tawes, derbang, gabus, dan dewa. Upaya pelestarian ini memberi manfaat untuk aspek konservasi maupun aspek ekonomi. Dalam aspek konservasi berfungsi untuk mempertahankan dari kepunahan plasma nutfah serta mempertahankan keanekaragaman jenis ikan lokal di perairan umum. Sedangkan secara ekonomi akan meningkatkan pendapatan nelayan perairan umum daratan karena ikan endemik memiliki rasa yang khas, unik serta bermanfaat bagi kesehatan sehingga harganya mahal. Namun masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu belum adanya prasarana dan sarana secara khusus untuk mengembangkan ikan endemik.

Sedangkan pada pergaraman, secara umum produksi garam mengalami penurunan, disebabkan karena musim kemarau basah cukup lama. Perkembangan produksi garam ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

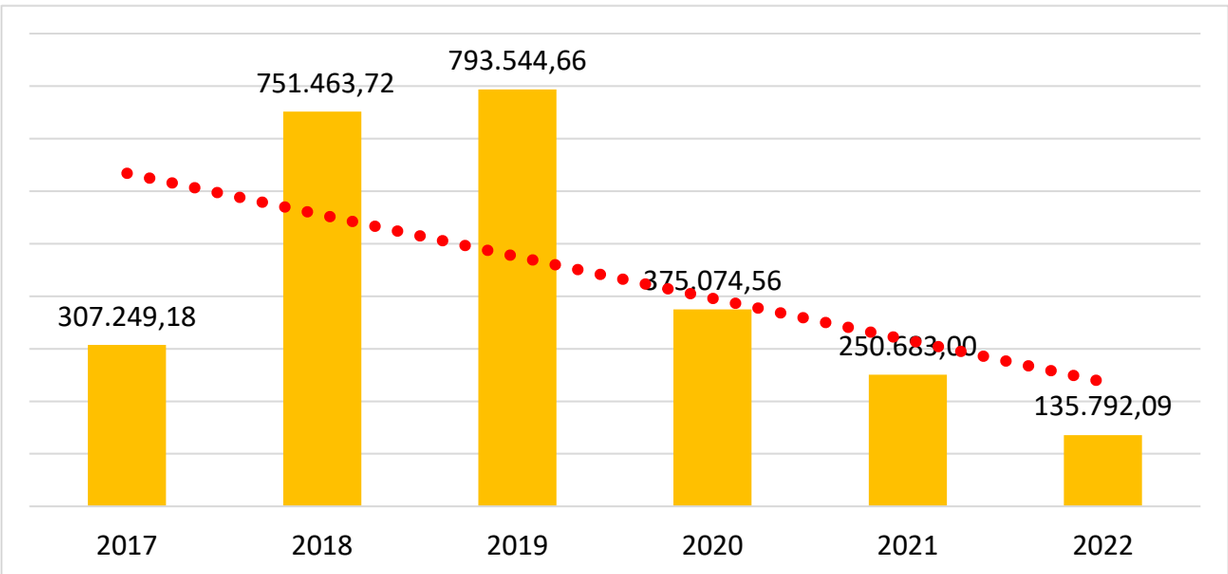


*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.38.**
**Produksi Garam (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022**

Hal ini dapat diminimalisir dengan penerapan teknologi pergaraman berupa penggunaan geoisolator (geomembran), rumah tunnel, gudang garam yang standar serta peralatan pencucian garam. Eksisting luas tambak garam yang menerapkan teknologi seluas 3.316,2 hektar atau 51% dari luas total 6.419,7 hektar. Pada aspek pemberdayaan masyarakat, dilakukan sertifikasi kompetensi bagi petambak garam.

Di sisi lain, tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah pada periode 2018 – 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih berada di bawah angka

nasional. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

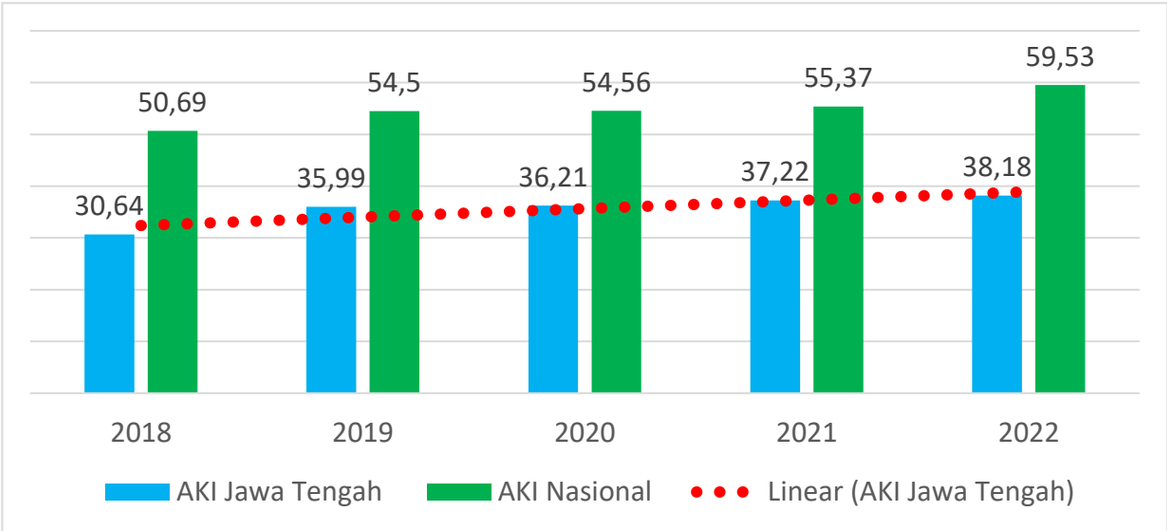


*Sumber :Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.39.**
**Angka Konsumsi Ikan di Nasional dan Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2018-2022**

Angka konsumsi ikan Jawa Tengah masih dibawah nasional disebabkan beberapa hal yaitu antara lain masih terdapat pemahaman yang salah di masyarakat bahwa ikan dapat memberikan dampak buruk berupa gatal, bau amis, dan alergi; harga produk ikan relatif lebih tinggi dibandingkan sumber protein lainnya; serta ragam pengolahan ikan yang belum bervariasi. Sedangkan pada aspek pengolahan masih didominasi oleh usaha skala mikro dan kecil dengan segala keterbatasan terutama pada aspek pemenuhan standar kelayakan produksi.

### 2.3.8 Koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Jumlah koperasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2018 – 2022 cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Apabila pada tahun 2019 jumlah koperasi sebanyak 22.274 unit dengan presentase koperasi aktif sebesar 84,22%, maka pada tahun 2020 sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 yang sangat berdampak terhadap perekonomian Jawa Tengah dan kinerja koperasi, maka jumlah koperasi meskipun mengalami kenaikan, tetapi dari tingkat keaktifan terus menunjukkan penurunan. Selain dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, meningkatnya jumlah koperasi tidak aktif juga disebabkan tingginya jumlah koperasi yang sedang menunggu pengesahan status pembubaran dan pencabutan badan hukumnya dari lembaran berita negara sebagai dampak dari kebijakan percepatan pembubaran koperasi oleh Kementerian Koperasi UKM RI dalam rangka mewujudkan koperasi modern. Sejak tahun 2017 terdapat 3.768 unit koperasi yang telah resmi dibubarkan, dan 115 koperasi yang masih dalam proses penelaahan di Kementerian Koperasi UKM RI untuk dilakukan pembubaran. Secara lengkap data koperasi se-Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.31.**

**Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

**Koperasi Se-Jawa Tengah**

| No. | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Koperasi | 26.458 | 22.274 | 19.447 | 20.777 | 21.018 |
| 2. | Jumlah Koperasi aktif | 21.832 | 18.759 | 13.090 | 10.770 | 10.327 |
| 3. | Prosentase Kopereasi Aktif (%) | 82,51 | 84,22 | 67,35 | 48,16 | 49,13 |

*Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2022.*

**Data tahun 2022 merupakan data sementara pra rekonsiliasi dengan Kabupaten/kota*

Hasil pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi dapat dilihat dari capaian indikator persentase koperasi sehat. Persentase koperasi sehat di Jawa Tengah mengalami kenaikan dimana pada tahun 2018 sebesar 19,62 persen sedangkan pada tahun 2022 sebesar 23,73 persen, hal ini didukung adanya kolaborasi antar bidang dalam pembinaan koperasi melalui kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan sehingga koperasi mampu meningkatkan kualitas dan kinerja koperasi dalam kelembagaan dan usahanya. Untuk Perkembangan tingkat Kesehatan koperasi di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.32.**

**Jumlah KSP/USP Sehat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022**

| No. | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Se-Jawa Tengah (KSP/USP) | 16.344 | 13.101 | 12.774 | 12.903 | 13.166 |
| 2. | Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Provinsi (KSP/USP) yang dinilai kesehatannya | 474 | 454 | 128 | 222 | 375 |
| 3. | Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi Sehat (unit) | 93 | 115 | 30 | 29 | 89 |
| 4. | Prosentase Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi Sehat (%) | 19,62 | 25,33 | 23,44 | 13,06 | 23,73 |

*Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2022.*

Dalam rangka pemberdayaan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara sinergi bersama dengan segenap pihak senantiasa melakukan pembinaan UMKM berkelanjutan. Jumlah UMKM yang telah dibina menunjukkan peningkatan dari sebanyak 143.738 unit pada tahun 2018 menjadi 180.579 unit pada tahun 2022. Penyerapan tenaga kerja dari UMKM juga meningkat dari sebesar 1.043.320 orang pada tahun 2018 menjadi sebanyak 1.330.343 orang pada tahun 2022. Aset UMKM juga meningkat dari sebesar Rp.29.824 milyar pada tahun 2018 menjadi Rp 38.898 milyar pada tahun 2022. Demikian juga omset mengalami peningkatan dari sebesar Rp.55.691 milyar pada tahun 2018 menjadi Rp 68.581 milyar pada tahun 20. Secara rinci data UMKM binaan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.33.**

**Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| No. | Uraian | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah UMKM Binaan | UMKM | 143,738 | 161,458 | 167,391 | 173,431 | 180,579 |
| | – Produksi/Non Pertanian | UMKM | 49,328 | 55,275 | 57,527 | 60,449 | 65,063 |
| | – Pertanian | UMKM | 23,956 | 26,833 | 27,653 | 28,284 | 28,400 |
| | – Perdagangan | UMKM | 53,063 | 59,836 | 62,083 | 63,965 | 65,979 |
| | – Jasa | UMKM | 17,391 | 19,514 | 20,128 | 20,733 | 21,137 |
| 2 | Penyerapan Tenaga Kerja | Orang | 1,043,320 | 1,312,400 | 1,298,007 | 1,311,015 | 1,330,343 |
| 3 | Asset | Rp. Milyar | 29,824 | 38,158 | 38,353 | 38,521 | 38,898 |
| 4 | Omzet | Rp. Milyar | 55,691 | 67,550 | 67,087 | 68,242 | 68,581 |

*Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2022.*

Dukungan kredit perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank menjadi hal yang cukup penting dalam rangka pengembangan UMKM. Penyaluran kredit bagi UMKM dapat dilihat dari realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari tahun 2018-2022 per kabupaten/kota yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.34.**

**Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari Tahun 2018-2022 per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**

| No | Penyaluran Kur per wilayah | Tahun | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| | | UMKM | Realisasi (Rp) | UMKM | Realisasi (Rp) | UMKM | Realisasi (Rp) | UMKM | Realisasi (Rp) | UMKM | Realisasi (Rp) |
| 1 | KAB. CILACAP | 38 | 856,659,249,002 | 41,355 | 960,285,860,282 | 49,966 | 1,394,346,710,619 | 67,017 | 2,129,737,861,185 | 71,016 | 2,624,919,833,453 |
| 2 | KAB. BANYUMAS | 50,460 | 1,178,085,177,264 | 55,115 | 1,282,747,263,690 | 62,067 | 1,722,310,316,244 | 81,032 | 2,592,038,105,781 | 84,593 | 3,076,948,656,311 |
| 3 | KAB. PURBALINGGA | 22,649 | 501,592,223,432 | 25,654 | 602,714,584,855 | 27,689 | 803,732,756,908 | 40,839 | 1,299,152,047,779 | 40,276 | 1,442,972,839,914 |
| 4 | KAB. BANJARNEGARA | 26,102 | 523,179,431,304 | 29,766 | 632,705,263,546 | 36,186 | 899,705,181,588 | 42,432 | 1,251,222,195,514 | 44,733 | 1,521,610,585,804 |
| 5 | KAB. KEBUMEN | 24,158 | 538,823,990,024 | 25,513 | 573,708,207,067 | 34,149 | 952,579,273,357 | 42,936 | 1,388,686,443,433 | 41,576 | 1,645,011,183,407 |
| 6 | KAB. PURWOREJO | 20,917 | 376,431,320,603 | 21,332 | 408,576,873,790 | 28,451 | 698,850,237,182 | 35,719 | 1,027,427,376,945 | 36,796 | 1,332,611,684,888 |
| 7 | KAB. WONOSOBO | 25,026 | 461,715,984,838 | 23,057 | 515,131,370,783 | 29,502 | 786,462,223,780 | 32,089 | 1,087,479,988,575 | 34,258 | 1,335,876,474,453 |
| 8 | KAB. MAGELANG | 30,992 | 702,174,782,519 | 32,030 | 732,548,594,861 | 40,950 | 1,097,838,191,734 | 46,039 | 1,460,713,188,234 | 49,489 | 1,867,082,199,837 |
| 9 | KAB. BOYOLALI | 26,929 | 676,618,908,508 | 31,959 | 828,780,579,519 | 37,366 | 1,112,557,697,460 | 45,996 | 1,606,818,765,940 | 49,694 | 2,077,453,794,156 |
| 10 | KAB. KLATEN | 34,572 | 879,808,412,373 | 37,544 | 982,285,115,877 | 51,196 | 1,444,646,931,716 | 61,939 | 2,121,148,190,896 | 63,467 | 2,681,277,315,450 |
| 11 | KAB. SUKOHARJO | 24,163 | 615,378,379,858 | 25,087 | 706,836,957,302 | 34,744 | 1,081,776,881,390 | 42,854 | 1,582,353,275,797 | 41,976 | 1,920,002,945,800 |
| 12 | KAB. WONOGIRI | 23,421 | 574,459,496,201 | 25,496 | 685,671,001,093 | 35,877 | 1,087,998,374,407 | 46,919 | 1,590,755,342,861 | 49,380 | 2,044,594,999,547 |
| 13 | KAB. KARANGANYAR | 25,500 | 610,990,807,640 | 27,911 | 722,856,807,398 | 35,901 | 1,088,590,422,286 | 43,330 | 1,569,531,753,495 | 44,436 | 2,053,690,544,527 |
| 14 | KAB. SRAGEN | 30,639 | 761,472,883,668 | 34,534 | 899,981,114,268 | 40,635 | 1,300,547,042,229 | 52,677 | 2,013,289,872,710 | 54,400 | 2,541,688,588,633 |
| 15 | KAB. GROBOGAN | 44,130 | 802,071,291,527 | 49,175 | 979,056,006,113 | 67,026 | 1,542,288,553,779 | 82,266 | 2,405,075,535,917 | 89,416 | 3,173,851,980,803 |
| 16 | KAB. BLORA | 55,268 | 1,035,403,109,778 | 57,549 | 1,210,374,601,719 | 73,654 | 1,699,912,069,917 | 75,130 | 2,104,246,917,986 | 76,514 | 2,611,075,351,064 |
| 17 | KAB. REMBANG | 22,861 | 462,869,548,005 | 25,223 | 544,814,780,697 | 28,769 | 699,336,336,217 | 32,345 | 1,010,725,024,881 | 36,240 | 1,369,369,188,553 |
| 18 | KAB. PATI | 60,583 | 1,316,275,974,087 | 66,826 | 1,486,154,011,274 | 79,555 | 2,249,691,305,260 | 80,544 | 2,797,359,822,366 | 83,493 | 3,631,451,274,447 |
| 19 | KAB. KUDUS | 21,345 | 541,886,029,299 | 23,425 | 589,874,956,352 | 26,887 | 780,606,313,383 | 29,209 | 1,061,448,572,509 | 32,328 | 1,436,607,198,786 |
| 20 | KAB. JEPARA | 29,831 | 651,902,295,805 | 35,160 | 740,258,155,922 | 36,752 | 954,019,977,024 | 46,850 | 1,474,838,409,206 | 50,478 | 1,976,896,899,818 |
| 21 | KAB. DEMAK | 29,097 | 627,563,823,928 | 32,212 | 769,213,338,424 | 36,477 | 1,020,473,479,231 | 42,974 | 1,527,633,391,898 | 48,849 | 2,037,771,456,030 |
| 22 | KAB. SEMARANG | 27,386 | 672,318,320,669 | 30,419 | 765,945,740,676 | 41,340 | 1,098,366,277,769 | 44,383 | 1,651,074,085,410 | 46,723 | 2,095,318,514,959 |
| 23 | KAB. TEMANGGUNG | 22,851 | 463,444,943,399 | 23,732 | 522,430,931,880 | 32,682 | 812,940,656,417 | 37,125 | 1,149,057,568,683 | 40,697 | 1,449,775,849,161 |

| No | Penyaluran Kur per wilayah | Tahun | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| | | UMKM | Realisasi (Rp) | UMKM | Realisasi (Rp) | UMKM | Realisasi (Rp) | UMKM | Realisasi (Rp) | UMKM | Realisasi (Rp) |
| 24 | KAB. KENDAL | 21,407 | 504,425,741,198 | 27,899 | 652,804,255,069 | 39,596 | 999,378,230,464 | 42,382 | 1,403,642,495,261 | 44,397 | 1,722,038,355,016 |
| 25 | KAB. BATANG | 17,048 | 365,752,159,664 | 21,407 | 443,649,337,912 | 24,481 | 661,257,570,763 | 32,120 | 1,066,373,925,602 | 37,065 | 1,353,706,515,946 |
| 26 | KAB. PEKALONGAN | 15,636 | 310,398,836,804 | 18,725 | 378,276,899,231 | 24,150 | 629,124,933,039 | 31,580 | 981,476,531,591 | 35,577 | 1,222,824,400,202 |
| 27 | KAB. PEMALANG | 30,058 | 569,317,904,509 | 36,203 | 739,922,402,326 | 48,814 | 1,164,357,376,954 | 62,162 | 1,773,175,921,199 | 65,552 | 2,157,929,858,009 |
| 28 | KAB. TEGAL | 43,492 | 867,744,725,423 | 47,475 | 1,021,705,034,995 | 56,474 | 1,432,849,120,987 | 73,900 | 2,057,898,435,824 | 77,384 | 2,450,206,822,298 |
| 29 | KAB. BREBES | 72,596 | 1,256,158,500,939 | 75,573 | 1,417,876,938,238 | 86,856 | 1,956,644,782,697 | 93,977 | 2,558,951,345,370 | 102,660 | 3,080,273,062,920 |
| 30 | KOTA MAGELANG | 3,118 | 84,218,967,491 | 3,417 | 79,949,600,586 | 4,993 | 130,892,399,071 | 4,793 | 159,603,112,815 | 4,827 | 216,101,106,000 |
| 31 | KOTA SURAKARTA | 12,767 | 354,224,755,149 | 13,086 | 391,251,167,491 | 19,305 | 593,619,780,111 | 30,071 | 1,047,482,051,404 | 27,952 | 1,290,010,839,228 |
| 32 | KOTA SALATIGA | 4,532 | 124,949,506,233 | 4,771 | 128,492,192,604 | 5,926 | 179,309,053,998 | 5,676 | 220,769,639,245 | 6,110 | 320,100,400,000 |
| 33 | KOTA SEMARANG | 18,922 | 626,331,699,058 | 21,371 | 695,195,395,549 | 31,861 | 1,070,732,933,645 | 37,328 | 1,702,978,989,436 | 42.230 | 2,430,847,721,262 |
| 34 | KOTA PEKALONGAN | 5,711 | 119,476,891,400 | 6,464 | 150,943,612,600 | 7,247 | 224,298,605,237 | 10,143 | 323,354,337,497 | 11,052 | 386,682,529,242 |
| 35 | KOTA TEGAL | 7,507 | 193,973,622,844 | 7,676 | 229,764,739,800 | 7,889 | 262,776,282,173 | 9,515 | 360,062,578,224 | 10,930 | 464,287,866,282 |

*Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2022.*

### 2.3.9 Perdagangan

Sektor perdagangan semenjak dari tahun 2016 hingga tahun 2021 memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Jawa Tengah dan hingga saat ini merupakan tiga besar sektor dengan kontribusi terbesar setelah sektor industri pengolahan, dan pertanian. Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan tahun 2021 sebesar 195.399.044,07 juta rupiah, dan memberikan kontribusi terhadap total PDRB ADHB Jawa Tengah sebesar 13,75 persen. Nilai dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2016-2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.35.**
**Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Nilai total PDRB (Milyar Rp) | 1.268.261,17 | 1.360.960,13 | 1.347.922,69 | 1.420.799,91 | 1.560.899,02 |
| 2 | Nilai Sektor Perdagangan (Milyar Rp) | 172.944,07 | 187.064,45 | 181.860,78 | 195.399,04 | 212.208,01 |
| 3 | Kontribusi (%) | 13,64 | 13,74 | 13,48 | 13,75 | 13,60 |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Total ekspor Jawa Tengah selama tahun 2018-2022 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 yang menurun karena pengaruh dari pandemi Covid-19. Nilai ekspor tahun 2018 tercatat sebesar US$8.260,18 juta, menurun menjadi sebesar US$8.088,33 juta pada tahun 2020, dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar US$11.777,91 juta. Ekspor Jawa Tengah terdiri dari ekspor migas dan nonmigas dengan proporsi lebih besar pada ekspor nonmigas, yang selama kurun waktu tahun 2018-2020 trennya sejalan dengan tren nila ekspor total di Jawa Tengah.

Nilai ekspor nonmigas Jawa Tengah pada tahun 2018 tercatat sebesar US$8.091,62 juta, menurun menjadi sebesar US$7.704,24 juta pada tahun 2020, dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar US$11.210,92 juta. Namun, untuk nilai ekspor migas Jawa Tengah selama lima tahun terakhir tetap meningkat dan tidak mengalami penurunan pada tahun 2020. Nilai ekspor migas Jawa Tengah tahun 2018 tercatat sebesar US$168,55 juta, meningkat menjadi US$566,99 juta pada tahun 2022.

Komoditas utama golongan barang yang memiliki peran terbesar pada ekspor nonmigas Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah komoditas pakaian dan aksesorisnya (bukan rajutan) yang tercatat sebesar US$2.470,91 juta atau 22,04 persen dari nilai ekspor nonmigas Jawa Tengah. Komoditas berikutnya adalah pakaian dan aksesorisnya (rajutan) sebesar US$1.450,72 juta (12,94 persen), komoditas alas kaki sebesar US$1.283,83 juta (11,45 persen), dan komoditas kayu dan barang dari kayu sebesar US$1.130,20 juta (10,08 persen). Nilai komoditas tersebut meningkat dari nilai pada tahun 2021. Perkembangan ekspor Jawa Tengah baik migas dan nonmigas dapat dilihat di tabel berikut.

**Tabel 2.36.**
**Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2018 – 2022 (Juta US$)**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Ekspor** | **8.260,18** | **8.516,70** | **8.088,30** | **10.733,44** | **11.777,91** |
| - Migas | 168,55 | 303,86 | 384,06 | 438,99 | 566,99 |
| - Non Migas | 8.091,62 | 8.212,84 | 7.704,24 | 10.294,45 | 11.210,92 |

*Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023*

Sementara itu, total nilai impor Jawa Tengah selama tahun 2018-2022 Cukup fluktuatif, di mana pada tahun 2018-2020 trennya menurun, kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Nilai impor Jawa Tengah tahun 2018-2020 tercatat sebesar US$14.779,38 juta menurun menjadi US$8.719,80 juta, kemudian meningkat menjadi US$15.013,61 juta pada tahun 2022. Nilai impor migas Jawa Tengah pada tahun 2022 tercatat sebesar US$7.435,63 juta, meningkat cukup signifikan dari tahun 2021 yang sebesar US$4.440,52 juta.

Demikian juga untuk impor nonmigas Jawa Tengah yang pada tahun 2022 mencatatkan nilai sebesar US$7.577,98 juta, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar US$7.341,27 juta. Komoditas impor nonmigas terbesar adalah golongan mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya yang pada tahun 2022 tercatat sebesar US$810,13 juta atau sebesar 10,69 persen dari total nilai impor Jawa Tengah. Komoditas selanjutnya adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya sebesar US$699,49 juta (9,23 persen), serta plastik dan barang dari plastik sebesar US$657,03 juta (8,67 persen). Perkembangan nilai impor Jawa Tengah baik migas dan nonmigas dapat dilihat di tabel sebagai berikut

**Tabel 2.37.**
**Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2018 – 2022 (Juta US$)**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Impor** | **14.779,38** | **12.567,62** | **8.719,80** | **11.781,79** | **15.013,61** |
| - Migas | 5.635.27 | 3.906,03 | 2.154,76 | 4.440,52 | 7.435,63 |
| - Non Migas | 9.144,12 | 8.661,59 | 6.565,04 | 7.341,27 | 7.577,98 |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Neraca perdagangan Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami defisit, di mana selama tahun 2018-2020 mengalami penurunan defisit, namun kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2018, neraca perdagangan Jawa Tengah mengalami defisit sebesar US$6.519,20 juta, menurun pada tahun 2020 sebesar US$631,5 juta. Pada tahun 2021 defisit kembali meningkat menjadi US$1.048,35 juta, dan semakin meningkat pada tahun 2022 menjadi US$3.235,70 juta. Defisit dalam neraca perdagangan Jawa Tengah pada tahun 2022 dipicu oleh defisit sektor migas sebesar US$6.868,64 juta. Sementara di sisi lain, sektor nonmigas mencatatkan surplus pada neraca perdagangan Jawa Tengah sebesar US$3.632,94 juta.

Perkembangan neraca perdagangan Jawa Tengah tahun 2018- 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.38.**
**Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (Juta US$)**

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ekspor** | **8,260.18** | **8.516,70** | **8.088,30** | **10.733,44** | **11.777,91** |
| - Migas | 168.55 | 303,86 | 384,06 | 438,99 | 566,99 |
| - Non Migas | 8,091.62 | 8.212,84 | 7.704,24 | 10.294,45 | 11.210,92 |
| **Impor** | **14,779.38** | **12.567,62** | **8.719,80** | **11.781,79** | **15.013,61** |
| - Migas | 5.635,27 | 3.906,03 | 2.154,76 | 4.440,56 | 7.435,63 |
| - Non Migas | 9.144,12 | 8.661,59 | 6.565,04 | 7.341,23 | 7.577,98 |
| **Surplus/Defisit** | **(6.519,20)** | **(4.050,92)** | **(631,5)** | **(1.048,35)** | **(3.235,70)** |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021*

Guna mendukung peningkatan ekspor nonmigas Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memfasilitas penerbitan sertifikasi mutu barang. Untuk penerbitan sertifikasi mutu barang sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2018 mencapai 260 sertifikat untuk lima jenis barang, meningkat menjadi 2.019 sertifikat untuk tujuh jenis barang pada tahun 2022.

**Tabel 2.39.**
**Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| No | Jenis Usaha Perdagangan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah izin usaha perdagangan luar negeri (Angka Pengenal Impor - unit) | 260 | 2.437 | 1.767 | 1.925 | 2.019 |
| 2 | Jumlah jenis barang bersertifikat mutu (jenis) | 5 jenis barang | 5 jenis barang | 7 jenis barang | 6 jenis barang | 7 jenis barang |

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Dalam rangka pelaksanaan konsumen cerdas, yang diharapkan konsumen dapat untuk memperoleh barang atau jasa sesuai dengan mutu dan kualitas maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan kabupaten/kota melakukan upaya perlindungan konsumen. Namun demikian apabila terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Jumlah LPKSM sampai dengan tahun 2021 sebanyak 3 unit yaitu di 3 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

**Tabel 2.40.**
**Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah kabupaten/kota memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK (kab/kota) | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Jumlah kabupaten/kota memiliki Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM (kab/kota) | 28 di 29 Kab/Kota | 18 di 9 Kab/Kota | 18 di 9 Kab/Kota | 3 di 3 kab kota | 5 di 4 Kab/Kota |
| 3 | Persentase penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK kabupaten/kota (%) | 68 Kasus (100%) | 111 kasus (100%) | 27 kasus (100%) | 6 kasus (100%) | 0 kasus (-) |
| 4 | Jumlah jenis barang beredar yang dilakukan pengawasan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) (jenis) | 1.124 | 3.512 | 2.741 | 1.228 | 305 |

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Lebih lanjut dalam rangka lebih memperkuat daya tahan industri dan perdagangan di dalam negeri telah diinisiasi pula upaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat; memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; serta memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri. Adapun sasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri meliputi peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh kementerian kementerian/lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta maupun masyarakat; peningkatan capaian nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN); peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN; serta peningkatan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan produk dalam negeri.

### 2.3.10 Perindustrian

Kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk sektor industri pada tahun 2021 sebesar 487.445.099,28 juta rupiah, dan memberikan kontribusi sebesar 34,31 persen terhadap total PDRB yang sebesar 1.420.799.908,38 juta rupiah. Nilai dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.41.**
**Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB**
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Nilai total PDRB (Juta Rp) | 1.268.454.783,96 | 1.362.457.380,57 | 1.347.922.689,03 | 1.420.799.908,38 | 1.157.316.832,47 |
| 2 | Nilai Sektor Industri (Juta Rp) | 436.477.149,74 | 468.992.159,77 | 464.609.134,06 | 487.445.099,28 | 392.749.654,42 |
| 3 | Kontribusi (%) | 34,41 | 34,41 | 34,47 | 34,31 | 33.94 |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Capaian pertumbuhan industri besar di Jawa Tengah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Industri besar dari 972 unit usaha pada tahun 2016 menjadi 2.417 unit usaha pada tahun 2021. Untuk jumlah IKM di tahun 2021 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. IKM di tahun 2021 sebanyak 912.421 unit usaha meningkat dibanding tahun 2016 yang sebesar 449.090 unit usaha.

**Tabel 2.42.**
**Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022**

| No | Jenis Industri | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Besar | 1.228 | 1.584 | 1.591 | 2.417 | 2.982 |
| 2 | Kecil dan Menengah | 325.091 | 327.110 | 327.200 | 912.421 | 204.608 |

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Dari sejumlah industri yang berkembang di Jawa Tengah, beberapa jenis industri menjadi industri unggulan daerah dan dijadikan sebagai kompetensi inti industri meliputi industri mebel, tekstil produk tekstil, makanan ringan, mesin dan perlogaman, komponen otomotif, dan kerajinan. Pola pengembangan industri tersebut diarahkan melalui pendekatan pembentukan klaster industri potensial untuk meningkatkan jejaring dan rantai nilai industri unggulan daerah yang melibatkan industri utama, industri pendukung dan usaha terkait. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah terbentuk kelembagaan klaster industri sebanyak 19 klaster terdiri dari 6 klaster logam mesin dan tekstil, 7 klaster komponen otomotif, elektronika, aneka, serta 6 klaster agro, kimia dan hasil hutan.

**Tabel 2.43.**
**Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2018 – 2022**

| No | Jenis industri | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | jumlah klaster logam, mesin, tekstil | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | jumlah klaster komponen otomotif, elektronika dan aneka | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| No | Jenis industri | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3 | Jumlah klaster agro, kimia dan hasil hutan | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| | **Jumlah klaster industri** | **19** | **19** | **19** | **19** | **20** |

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Selain itu dalam pengembangan kelembagaan usaha sektor industri tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 3 (tiga) lembaga industri meliputi Pokja Industri pada Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD), Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), dan Mitra Praja Utama.

### 2.3.11 Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, mampu memberdayakan perempuan dan anak muda melalui karya-karya kreatif, serta berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Dalam pelaksanaannya capaian indikator kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.44.**
**Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022**

| No | Indikator | Capaian |
|---|---|---|
| 1 | Kontribusi PAD Sektor Pariwisata | 9,63 % |
| 2 | Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata | 3,39 % |
| 3 | Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata | 16,99% |
| 4 | Rata-rata jumlah pengeluaran belanja wisatawan nusantara (Rp/Orang) | Rp. 4,184,389,00 |
| 5 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara | 144.691 orang |
| 6 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara | 46.465.437 orang |
| 7 | Rata-rata lama menginap Wisatawan Nusantara | 1,36 hari |
| 8 | Rata-rata lama menginap Wisatawan Mancanegara | 2,57 hari |
| 9 | Daya Tarik Wisata (DTW) | 1235 (DTW Alam 607, DTW Budaya 456 dan DTW Buatan 172) |
| 10 | SDM Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi | 700 orang |
| 11 | SDM Pariwisata yang tersertifikasi | 3,609 orang |
| 12 | Penetapan Kabupaten/Kota Kreatif (KaTaKreatif) Indonesia | 9 Kab/Kota Kreatif |

*Sumber: Dinporapar Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Jumlah kunjungan wisatawan 46.610.128 orang yang terdiri dari Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara sebesar 144.691 orang dan Wisatawan Nusantara 46.465.437 orang. Pengeluaran Wisatawan Nusantara sebesar 4.184.389 per orang dan Wisatawan mancanegara sebesar $ 670 per orang. Penetapan Kabupaten/Kota Kreatif (KaTaKreatif) Indonesia 9 Kabupaten/Kota (Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kab. Rembang, Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kab. Karanganyar dan Kab. Kebumen. Ini

menunjukan sektor pariwisata Jawa Tengah mengalami pertumbuhan di tahun 2022.

### 2.3.12 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**a. Infrastruktur Jalan dan Jembatan**

Total panjang jalan di Jawa Tengah sebesar 31.165,85 km yang terbagi sesuai kewenangan sebagai berikut:

1. Kewenangan provinsi sebesar 7,73 persen;
2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 87,39 persen;
3. Kewenangan Nasional sebesar 4,88 persen.

Sedangkan jalan tol yang sudah fungsional sepanjang 330,71 km dalam kondisi baik dan Jalan Non Status (NS) sepanjang 109,82 km yang merupakan bagian dari Jalur JJLS Jawa Tengah. JJLS merupakan jaringan jalan strategis yang menghubungkan PKW Cilacap – Yogya, dan merupakan jaringan jalan pulau terluar negara yang berbatasan dengan Australia. JJLS di ruas Kebumen – Cilacap juga dapat berperan menjadi tanggul mitigasi penanggulangan bencana tsunami yang mengacam wilayah di sepanjang pantai selatan.

Kondisi jalan kewenangan provinsi tahun 2022 yang telah sesuai dengan standar yaitu lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton adalah sepanjang 1046,035 km atau 43,50 persen. Sedangkan berdasarkan kondisi perkerasan jalan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.45.**
**Kondisi Permukaan Jalan Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Kewenangan Tahun 2022**

| Kewenangan | Kondisi Ruas Jalan | | | | | | | | Total Panjang Jalan (Km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baik | | Sedang | | Rusak Ringan | | Rusak Berat | | |
| | Km | % | km | % | km | % | Km | % | |
| Nasional | 560,93 | 36,95 | 820,79 | 54,07 | 122,75 | 8,09 | 13,61 | 0,90 | 1518,09 |
| Provinsi | 2.010,27 | 83,60 | 213,89 | 8,89 | 68,33 | 2,84 | 112,25 | 4,67 | 2404,74 |
| Kabupaten/ Kota | 14.909,02 | 54,83 | 7.385,37 | 27,16 | 2.587,33 | 9,51 | 2.312,08 | 8,50 | 27.193,81 |
| Jumlah Jateng | 17.480,22 | 56,18 | 8.420,05 | 27,06 | 2.778,42 | 8,93 | 2.437,95 | 7,83 | 31.116,64 |
| Jalan Non Status | 15,74 | 242,99 | 52,62 | 199,35 | 13,30 | 66,30 | 25,45 | 91,37 | 109,82 |
| Jalan Tol | 330,71 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,71 |

*Sumber: SNVT P2JN Jawa Tengah, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah*

Perkembangan kondisi jalan kewenangan provinsi dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Kondisi permukaan jalan baik sejak tahun 2019 mengalami penurunan hingga tahun 2021, namun pada tahun 2022 dapat diperbaiki dengan kondisi mantap 92,49% (terdiri dari kondisi baik 83,60 % dan kondisi sedang 8,89 %). Sedangkan Jalan Provinsi dalam kondisi rusak ringan sebesar 2,84 % dan kondisi rusak berat sebesar 4,67%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.46.**
**Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

| Tahun | Kondisi | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baik | | Sedang | | Rusak Ringan | | Rusak Berat | |
| | KM | % | KM | % | KM | % | KM | % |
| 2018 | 2.154,65 | 89,60 | 196,145 | 8,16 | 53,95 | 2,24 | 0,000 | 0,00 |
| 2019 | 1.946,86 | 80,96 | 234,01 | 9,73 | 223,87 | 9,31 | 0,000 | 0,00 |
| 2020 | 1.869,69 | 77,75 | 312,13 | 12,98 | 222,93 | 9,27 | 0,000 | 0,00 |
| 2021 | 1.871,61 | 77,83 | 313,45 | 13,03 | 219,682 | 9,14 | 0,000 | 0,00 |
| 2022 | 2.010,27 | 83,60 | 213,89 | 8,89 | 68,33 | 2,84 | 112,25 | 4,67 |

*Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Adapun persebaran kondisi jalan kewenangan kabupaten/kota untuk tiap-tiap daerah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.47.**
**Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

| No. | Kabupaten/ Kota | Kondisi Jalan Kabupaten / Kota Tahun 2022 | | | | | | | | Total Panjang (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Baik | | Sedang | | Rusak Ringan | | Rusak Berat | | |
| | | (km) | % | (km) | % | (km) | % | (km) | % | |
| 1 | Banjarnegara | 714,96 | 76,17 | 132,69 | 14,14 | 19,44 | 2,07 | 71,56 | 7,62 | 938,65 |
| 2 | Banyumas | 765,294 | 50,749 | 319,243 | 21,170 | 277,852 | 18,425 | 145,611 | 9,656 | 1.508,000 |
| 3 | Batang | 317,96 | 57,56 | 148,75 | 26,93 | 56,88 | 10,30 | 28,83 | 5,22 | 552,42 |
| 4 | Blora | 481,35 | 39,75 | 330,51 | 27,30 | 63,96 | 5,28 | 335,02 | 27,67 | 1.210,84 |
| 5 | Boyolali | 412,88 | 60,90 | 148,88 | 21,96 | 67,22 | 9,91 | 49,01 | 7,23 | 678,00 |
| 6 | Brebes | 199,25 | 31,10 | 242,13 | 37,79 | 98,86 | 15,43 | 100,49 | 15,68 | 640,73 |
| 7 | Cilacap | 864,28 | 68,10 | 137,70 | 10,85 | 124,28 | 9,79 | 142,94 | 11,26 | 1.269,20 |
| 8 | Demak | 175,43 | 20,55 | 589,92 | 69,12 | 75,71 | 8,87 | 12,46 | 1,46 | 853,52 |
| 9 | Grobogan | 571,700 | 60,660 | 231,723 | 24,590 | 62,049 | 6,580 | 76,917 | 8,160 | 942,389 |
| 10 | Jepara | 329,43 | 37,77 | 442,79 | 50,77 | 74,38 | 8,53 | 25,54 | 2,93 | 872,14 |
| 11 | Karanganyar | 437,54 | 41,81 | 420,58 | 40,19 | 145,71 | 13,92 | 42,69 | 4,08 | 1.046,52 |
| 12 | Kebumen | 292,18 | 30,42 | 416,84 | 43,40 | 162,03 | 16,87 | 89,31 | 9,30 | 960,36 |
| 13 | Kendal | 518,03 | 67,25 | 169,03 | 21,94 | 47,20 | 6,13 | 36,07 | 4,68 | 770,33 |
| 14 | Klaten | 437,44 | 61,10 | 214,36 | 29,94 | 55,98 | 7,82 | 8,11 | 1,13 | 715,89 |
| 15 | Kudus | 560,16 | 87,63 | 36,53 | 5,71 | 14,29 | 2,24 | 28,28 | 4,42 | 639,26 |
| 16 | Magelang | 680,20 | 67,96 | 206,28 | 20,61 | 79,30 | 7,92 | 35,05 | 3,50 | 1.000,83 |
| 17 | Pati | 412,20 | 56,23 | 92,10 | 12,56 | 121,40 | 16,56 | 107,42 | 14,65 | 733,115 |
| 18 | Pekalongan | 384,700 | 61,99 | 139,011 | 19,40 | 50,103 | 7,61 | 96,081 | 14,34 | 669,895 |
| 19 | Pemalang | 482,64 | 63,03 | 76,34 | 9,97 | 67,60 | 8,83 | 139,15 | 18,17 | 765,72 |
| 20 | Purbalingga | 566,68 | 63,81 | 191,73 | 21,59 | 64,70 | 7,29 | 64,98 | 7,32 | 888,09 |
| 21 | Purworejo | 214,09 | 27,83 | 414,78 | 53,92 | 97,74 | 12,71 | 42,65 | 5,54 | 769,26 |
| 22 | Rembang | 332,35 | 68,98 | 89,90 | 15,15 | 59,70 | 10,36 | 94,20 | 16,35 | 576,15 |
| 23 | Semarang | 485,79 | 66,22 | 191,39 | 26,09 | 29,73 | 4,05 | 26,73 | 3,64 | 733,62 |
| 24 | Sragen | 800,64 | 78,47 | 65,01 | 6,37 | 86,07 | 8,44 | 68,53 | 6,72 | 1.020,25 |
| 25 | Sukoharjo | 141,04 | 23,31 | 399,70 | 66,05 | 63,51 | 10,50 | 0,88 | 0,15 | 605,12 |
| 26 | Tegal | 577,01 | 76,78 | 95,48 | 10,97 | 73,34 | 5,17 | 101,44 | 11,97 | 847,27 |

| No. | Kabupaten/ Kota | Kondisi Jalan Kabupaten / Kota Tahun 2022 | | | | | | | | Total Panjang (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Baik | | Sedang | | Rusak Ringan | | Rusak Berat | | |
| | | (km) | % | (km) | % | (km) | % | (km) | % | |
| 27 | Temanggung | 465,76 | 71,60 | 107,61 | 16,54 | 49,51 | 7,61 | 27,61 | 4,24 | 650,48 |
| 28 | Wonogiri | 1.110,63 | 77,08 | 158,64 | 11,01 | 133,46 | 9,26 | 38,20 | 2,65 | 1.440,93 |
| 29 | Wonosobo | 193,39 | 19,35 | 455,20 | 45,55 | 133,47 | 13,36 | 217,22 | 21,74 | 999,28 |
| 30 | Kota Magelang | 71,56 | 60,17 | 29,11 | 24,48 | 17,26 | 14,51 | 1,01 | 0,85 | 118,93 |
| 31 | Kota Pekalongan | 101,00 | 65,83 | 24,12 | 15,72 | 9,58 | 6,25 | 18,71 | 12,20 | 153,41 |
| 32 | Kota Salatiga | 235,40 | 69,75 | 87,41 | 25,90 | 11,25 | 3,33 | 3,41 | 1,01 | 337,47 |
| 33 | Kota Semarang | 381,72 | 45,45 | 377,70 | 44,97 | 52,14 | 6,21 | 28,34 | 3,37 | 839,90 |
| 34 | Kota Surakarta | 86,14 | 40,18 | 102,34 | 47,73 | 25,43 | 11,86 | 0,50 | 0,23 | 214,41 |
| 35 | Kota Tegal | 108,20 | 46,75 | 99,85 | 43,14 | 16,21 | 7,00 | 7,17 | 3,10 | 231,44 |
| | **JUMLAH** | 14.909,02 | 54,83 | 7.385,37 | 27,16 | 2.587,33 | 9,51 | 2.312,08 | 8,50 | 27.193,81 |

*Sumber: DPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah*

Mendasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, mengamanatkan 10 tahun terhitung sejak diundangkan jalan provinsi harus sesuai dengan standar. Standar jalan provinsi dilihat dari aspek dimensi jalan (lebar perkerasan jalan minimal 7 m), aspek konstruksi perkerasan jalan (muatan sumbu terberat sebesar 8 ton) dan aspek ketersediaan bangunan pelengkap jalan sebagai pendukung konstruksi jalan (saluran drainase dan dinding penahan tanah serta bahu jalan).

Sampai dengan tahun 2022, panjang Jalan Provinsi yang telah sesuai dengan standar (dari sisi lebar jalan ≥7 m dan konstruksi sesuai MST 8 ton) sepanjang 1.046,035 km. Sedangkan jalan provinsi yang telah sesuai dengan standar dengan kondisi permukaan mantap adalah sepanjang 2.224,15 km atau mencapai 92,49 persen. Penyesuaian standar jalan provinsi perlu dilakukan secara bertahap utamanya untuk penuntasan jalan yang mempunyai nilai strategis dengan tetap menjaga kondisi permukaan seluruh Jalan Provinsi.

**Tabel 2.48.**

**Kondisi Permukaan Provinsi Jawa Tengah Menurut Lebar Jalan Tahun 2022**

| No. | Lebar Perke-rasan Jalan | Panjang (km) | Persen-tase (%) | Kondisi | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Baik | | Sedang | | Rusak Ringan | | Rusak Berat | |
| | | | | Panjang (km) | Persen-tase (%) | Panjang (km) | Persen-tase (%) | Panjang (km) | Persen-tase (%) | Panjang (km) | Persen-tase (%) |
| 1 | ≥7 m | 1.046,035 | 43,50 | 904,758 | 37,62% | 88,586 | 3,68% | 29,177 | 1,21% | 23,514 | 0,98% |
| 2 | <7 m | 1.358,706 | 56,50 | 1105,579 | 45,98% | 125,229 | 5,21% | 39,171 | 1,63% | 88,727 | 3,69% |
| **Total** | | **2.404,741** | **100** | **2010,337** | **83,60%** | **213,815** | **8,89%** | **68,348** | **2,84%** | **112,241** | **4,67%** |

*Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**b. Air Minum dan Sanitasi**

Cakupan akses air minum layak pada tahun 2022 sebesar 88,27 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 86,87 persen, dan termasuk di dalamnya cakupan akses air minum aman pada tahun 2022 sebesar 36,93 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 34,06 persen. Sedangkan untuk cakupan akses air minum jaringan

perpipaan pada tahun 2022 sebesar 48,82 persen yang juga mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 44,37 persen.

Cakupan akses air limbah domestik layak pada tahun 2022 sebesar 90,38 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 88,67 persen, dan termasuk di dalamnya cakupan akses air limbah domestik aman pada tahun 2022 sebesar 9,94 persen menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 10,75 persen dikarenakan terjadi kerusakan pada prasarana yang sudah ada dan tidak ada pembangunan baru.

Guna mendukung percepatan pencapaian akses menyeluruh air minum di Jawa Tengah terdapat 5 (lima) SPAM Regional yang berperan sebagai penyedia air curah bagi PDAM kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2022 telah terbangun dan operasional SPAM Regional Bregas, Keburejo dan Petanglong, serta sedang dalam proses pembangunan yaitu SPAM Regional Wososukas, dan proses inisiasi yaitu SPAM Regional Dadimuria. Sedangkan dalam rangka percepatan pencapaian akses menyeluruh air limbah domestik, diinisiasi penyediaan sarana prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Jawa Tengah.

**Tabel 2.49.**
**Capaian Akses Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022**

| No | Uraian | Tahun (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | **Akses Air Minum** | | | | | | |
| | Layak | - | 79.35 | 81.77 | 85,11 | 86,87 | 88,27 |
| | Aman | - | 22,66 | 26,7 | 32,24 | 34,06 | 36,93 |
| | Jaringan Perpipaan | - | 36,8 | 39,08 | 43,74 | 44,37 | 48,82 |
| 2 | **Akses Air Limbah Domestik** | | | | | | |
| | Layak | 80 | 82,04 | 89,57 | 90,72 | 88,67 | 90,38 |
| | Aman | - | - | - | 10,69 | 10,75 | 9,94 |

*Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Dalam rangka pengelolaan air minum dan air limbah domestik yang berkelanjutan maka dilakukan pendampingan terhadap institusi dan kelompok masyarakat pengelola layanan air minum dan air limbah domestik di kabupaten/kota dengan kondisi pengelolaannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.50.**
**Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Minum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022**

| No | Kab/Kota | Akses Air Minum (%) | | | Kondisi SPAM Perkotaan PDAM (Buku BPPW 2022) | | | Kondisi BP/KP-SPAMS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Layak | Aman | Jaringan Perpipaan | Kapasitas Produksi (Lps) | Idle Capacity (Lps) | Status Kinerja | Jumlah BP/KP SPAMS | Jumlah Fungsi Baik | Jumlah Fungsi Sebagian | Jumlah Tidak Fungsi |
| 1 | Cilacap | 89,25 | 31,67 | 29,99 | 869,30 | 451,90 | Sehat | 165 | 149 | 16 | 0 |
| 2 | Banyumas | 76,99 | 20,74 | 31,67 | 974,67 | 159,32 | Sehat | 192 | 182 | 4 | 6 |
| 3 | Purbalingga | 94,61 | 46,43 | 46,43 | 544,42 | 204,08 | Sehat | 167 | 166 | 0 | 1 |
| 4 | Banjarnegara | 95,73 | 25,92 | 26,15 | 101,84 | 33,16 | Kurang Sehat | 194 | 190 | 2 | 2 |
| 5 | Kebumen | 92,42 | 12,06 | 19,17 | 300,00 | 139,00 | Sehat | 179 | 174 | 3 | 2 |
| 6 | Purworejo | 96,86 | 35,89 | 27,32 | 237,66 | 69,34 | Sehat | 222 | 216 | 2 | 4 |

| No | Kab/Kota | Akses Air Minum (%) | | | Kondisi SPAM Perkotaan PDAM (Buku BPPW 2022) | | | Kondisi BP/KP-SPAMS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Layak | Aman | Jaringan Perpipaan | Kapasitas Produksi (Lps) | Idle Capacity (Lps) | Status Kinerja | Jumlah BP/KP SPAMS | Jumlah Fungsi Baik | Jumlah Fungsi Sebagian | Jumlah Tidak Fungsi |
| 7 | Wonosobo | 93,77 | 49,95 | 86,02 | 1.067,67 | 349,33 | Sehat | 176 | 176 | 0 | 0 |
| 8 | Magelang | 91,24 | 85,88 | 41,98 | 849,09 | 193,51 | Sehat | 234 | 227 | 7 | 0 |
| 9 | Boyolali | 94,11 | 38,87 | 52,58 | 418,00 | 270,00 | Sehat | 187 | 187 | 0 | 0 |
| 10 | Klaten | 93,19 | 32,63 | 32,67 | 512,83 | - | Sehat | 155 | 147 | 1 | 7 |
| 11 | Sukoharjo | 93,18 | 14,90 | 28,87 | 326,78 | 66,22 | Sehat | 88 | 88 | 0 | 0 |
| 12 | Wonogiri | 89,82 | 27,91 | 42,00 | 440,13 | 76,13 | Sehat | 185 | 182 | 3 | 0 |
| 13 | Karanganyar | 98,00 | 30,71 | 75,50 | 659,00 | 12,00 | Sehat | 154 | 150 | 3 | 1 |
| 14 | Sragen | 87,08 | 20,11 | 42,00 | 765,89 | 163,90 | Sehat | 160 | 160 | 0 | 0 |
| 15 | Grobogan | 86,30 | 17,63 | 21,86 | 384,00 | 67,00 | Sehat | 186 | 176 | 0 | 10 |
| 16 | Blora | 93,00 | 9,50 | 25,00 | 192,00 | 76,80 | Sehat | 186 | 180 | 0 | 6 |
| 17 | Rembang | 90,72 | 39,87 | 28,81 | 212,57 | 37,36 | Sehat | 175 | 163 | 7 | 5 |
| 18 | Pati | 81,53 | 35,81 | 35,81 | 332,12 | 102,78 | Sehat | 204 | 191 | 6 | 7 |
| 19 | Kudus | 98,25 | 38,06 | 38,06 | 428,30 | 260,60 | Sehat | 87 | 83 | 0 | 4 |
| 20 | Jepara | 97,48 | 19,92 | 19,92 | 627,10 | 126,40 | Kurang Sehat | 88 | 88 | 0 | 0 |
| 21 | Demak | 83,65 | 41,47 | 79,95 | 483,91 | 276,81 | Sehat | 184 | 174 | 4 | 6 |
| 22 | Semarang | 98,80 | 37,34 | 40,52 | 386,00 | 80,00 | Sehat | 178 | 177 | 1 | 0 |
| 23 | Temanggung | 95,17 | 31,00 | 76,07 | 444,02 | 95,37 | Sehat | 199 | 199 | 0 | 0 |
| 24 | Kendal | 94,29 | 70,75 | 69,00 | 670,19 | 73,11 | Sehat | 154 | 154 | 0 | 0 |
| 25 | Batang | 90,00 | 47,00 | 47,00 | 469,28 | 127,00 | Sehat | 183 | 181 | 1 | 1 |
| 26 | Pekalongan | 87,62 | 87,62 | 58,00 | 203,75 | - | Sehat | 188 | 188 | 0 | 0 |
| 27 | Pemalang | 88,00 | 40,97 | 43,00 | 424,78 | 317,72 | Sehat | 180 | 168 | 7 | 5 |
| 28 | Tegal | 66,80 | 32,80 | 34,00 | 365,57 | 35,51 | Sehat | 171 | 163 | 3 | 5 |
| 29 | Brebes | 60,00 | 23,04 | 23,04 | 356,75 | 449,95 | Sehat | 158 | 152 | 0 | 6 |
| 30 | Kota Magelang | 98,05 | 85,88 | 91,02 | 775,16 | - | Sehat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kota Surakarta | 95,84 | 58,00 | 61,30 | 858,98 | 113,81 | Sehat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kota Salatiga | 75,32 | 74,12 | 75,32 | 327,78 | 190,76 | Sehat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kota Semarang | 79,76 | 61,95 | 79,76 | 3.965,13 | - | Sehat | 88 | 85 | 0 | 3 |
| 34 | Kota Pekalongan | 86,00 | 52,00 | 86,00 | 356,00 | 291,00 | Sehat | 47 | 43 | 3 | 1 |
| 35 | Kota Tegal | 93,77 | 59,28 | 92,91 | 277,33 | 145,67 | Sehat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Jawa Tengah** | | | | | | | **5114** | **4959** | **73** | **82** |

*Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2022*

## Tabel 2.51.
## Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022

| No | Kab/Kota | Akses Air Limbah Domestik (%) | | Kondisi Layanan Air Limbah Domestik | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Layak | Aman | Nama/Lokasi IPLT | Status Operasi | Jumlah KPP |
| 1 | Cilacap | 90,37 | 0,19 | IPLT Tritih Lor Desa Tritih Lor Kec. Jeruk Legi | Beroperasi | 1 |
| 2 | Banyumas | 90 | 1,4 | IPLT Gunung Tugel Desa Kedungrandu Kec. Patikraja | Beroperasi tidak sebagaimana mestinya | 30 |

| No | Kab/Kota | Akses Air Limbah Domestik (%) | | Kondisi Layanan Air Limbah Domestik | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Layak | Aman | Nama/Lokasi IPLT | Status Operasi | Jumlah KPP |
| 3 | Purbalingga | 93,18 | belum ada IPLT | - | | 2 |
| 4 | Banjarnegara | 71,99 | belum ada IPLT | - | | 2 |
| 5 | Kebumen | 93 | 3,09 | IPLT Kaligending Desa Kaligending Kec. Karang Sambung | Beroperasi | 14 |
| | | | | IPLT Semali Desa Semali Kec. Sempor | Beroperasi | |
| 6 | Purworejo | 89,43 | 20 | IPLT Gunung Tumpeng Desa Jetis Kec. Loano | Tidak Dioperasikan | 17 |
| 7 | Wonosobo | 71,61 | 0,35 | IPLT Wonorejo Desa Wonorejo Kec. Selomerto | Beroperasi tidak sebagaimana mestinya | n/a |
| 8 | Magelang | 91,11 | belum ada IPLT | - | | 12 |
| 9 | Boyolali | 98,28 | 29,19 | IPLT Winong Desa Jelok Kec. Boyolali | Tidak Dioperasikan | 32 |
| 10 | Klaten | 100 | 1,32 | IPLT Jomboran Desa Jomboran Kec. Klaten Tengah | Beroperasi | 50 |
| 11 | Sukoharjo | 97,91 | 2,31 | IPLT Mojorejo Desa Mojorejo Kec. Bendosari | Beroperasi | 10 |
| 12 | Wonogiri | 99,86 | IPLT belum beroperasi | IPLT Ngadirojo Desa Kerjo Lor Kec. Ngadirojo | Belum Beroperasi | 33 |
| 13 | Karanganyar | 99,38 | 2,9 | IPLT Mojogedang Desa Kaliboto Kec. Mojogedang | Beroperasi | 30 |
| 14 | Sragen | 84 | 1,91 | IPLT Tanggan Desa Tanggan Kec. Gesi | | 20 |
| 15 | Grobogan | 77,37 | 19,97 | IPLT Ngembak Desa Ngembak Kec. Purwodadi | Beroperasi | n/a |
| 16 | Blora | 95,6 | 1,4 | IPLT Temurejo Desa Temurejo Kec. Blora | Beroperasi tidak sebagaimana mestinya | 20 |
| 17 | Rembang | 96,56 | n/a | IPLT Landoh Desa Landoh Kec. Sulang | Tidak beroperasi | 21 |
| 18 | Pati | 100 | 15,45 | IPLT Sukoharjo Desa Sukoharjo Kec. Margorejo | Beroperasi | 22 |
| 19 | Kudus | 100 | 24 | IPLT Tanjungrejo Desa Tanjungrejo Kec. Jekulo | Beroperasi | 50 |
| 20 | Jepara | 74,45 | 3,15 | IPLT Bandengan Desa Bandengan Kec. Jepara | Beroperasi | 95 |
| 21 | Demak | 98,31 | 3,55 | IPLT Kalikondang Desa Kalikondang Kec. Demak | Beroperasi | 6 |
| 22 | Semarang | 94,7 | 0,42 | - | | 39 |
| 23 | Temanggung | 85,76 | 2,5 | IPLT Sanggrahan Desa Sanggrahan Kec. Kranggan | Beroperasi | n/a |
| 24 | Kendal | 87,57 | belum ada IPLT | - | | 13 |
| 25 | Batang | 81 | 5 | IPLT Randu Kuning Desa Tegalsari Kec. Kandeman | Beroperasi | 4 |

| No | Kab/Kota | Akses Air Limbah Domestik (%) | | Kondisi Layanan Air Limbah Domestik | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Layak | Aman | Nama/Lokasi IPLT | Status Operasi | Jumlah KPP |
| 26 | Pekalongan | 87 | 61,86 | IPLT Kab. Pekalongan Desa Bener Kec. Wiradesa | Beroperasi | 4 |
| 27 | Pemalang | 75,99 | 49,17 | IPLT Pegongsoran Desa Pegongsoran Kec. Pemalang | Beroperasi | 3 |
| 28 | Tegal | 95,34 | n/a | IPLT Kedungjati Desa Dukuhjati Kidul Kec. Pangkah | Beroperasi | n/a |
| 29 | Brebes | 78,87 | 1,25 | - | | 1 |
| 30 | Kota Magelang | 98,68 | 13,24 | IPLT Dumpoh Kel. Tegalrejo Kec. Magelang Utara | Beroperasi | 21 |
| 31 | Kota Surakarta | 97,32 | 61 | IPLT Putri Cempo Kel. Mojosongo Kec. Jebres | Beroperasi | 50 |
| 32 | Kota Salatiga | 94,37 | 8,37 | IPLT Ngronggo Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo | Beroperasi | n/a |
| 33 | Kota Semarang | 92,63 | 2,87 | IPLT Tambak Lorok Kel. Terboyo Kulon Kec. Genuk | Beroperasi | 1 |
| 34 | Kota Pekalongan | 100 | 8,95 | IPLT Degayu Kel. Degayu Kec. Pekalongan Utara | Beroperasi | 50 |
| 35 | Kota Tegal | 75,77 | 3,21 | IPLT Muarareja Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat | Beroperasi | 8 |
| | **Jawa Tengah** | | | | | |

*Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2022*

### c. Infrastruktur Sumber Daya Air

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai (WS) yang pengelolaanya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah adalah WS Pemali Comal (panjang 946,35 km/luas DAS 4.898,54 km2) dan WS Bodri Kuto (panjang 377,32 km/luas DAS 1.282,85 km2).

Kondisi baik sungai kewenangan provinsi pada tahun 2022 tercatat 52,32 persen (692,56 km dari 1.323,67 km), sedikit meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 52,29 persen. Hal ini merupakan hasil kegiatan normalisasi sungai, perkuatan tebing sungai dan konservasi DAS.

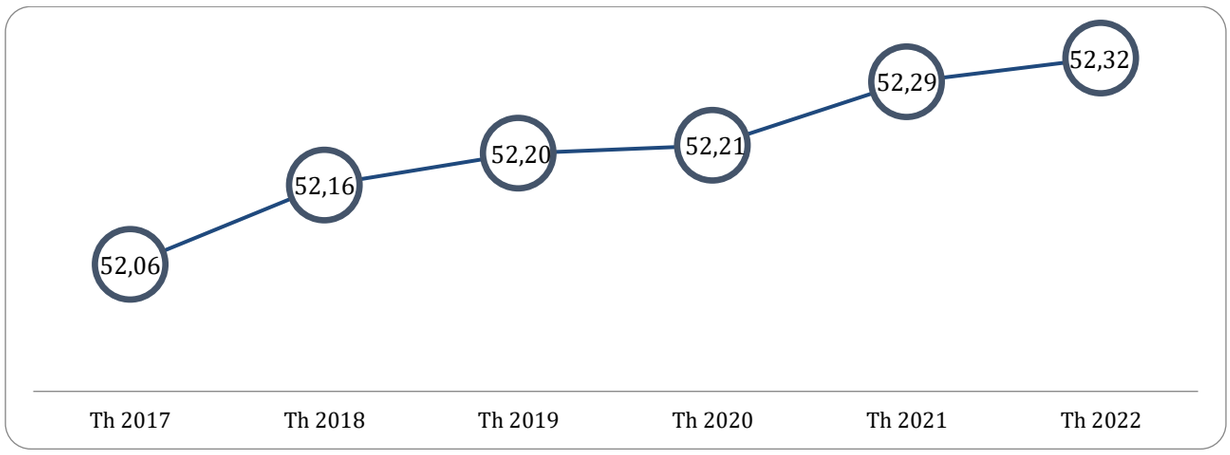


*Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.40.**
**Persentase Sungai Dalam Kondisi Baik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022 (%)**

Kebutuhan air irigasi rata-rata pertahun sebesar 19.636.378.014m$^3$/tahun dengan asumsi memperhitungkan/mendasarkan pada rencana kebutuhan air MT 1 (musim tanam pertama) sampai dengan MT 3 (musim tanam ketiga).Dukungan terhadap ketahanan pangan ditempuh dengan pengelolaan irigasi serta pembangunan penampungan air seperti waduk dan embung. Di Jawa Tengah, total luas area Daerah Irigasi (DI) seluas 953.804 ha, yang terdiri dari 33 DI kewenangan pusat seluas 347.674 ha (36,45 persen), 108 DI kewenangan provinsi seluas 86.865 ha (9,11 persen) dan 11.401 DI kewenangan kabupaten/kota seluas 519.265 ha (54,44 persen).

**Tabel 2.52.**
**Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah**

| No. | Kewenangan Daerah Irigasi | Luas Area (ha) | % Dari Total Luas | Jumlah Daerah Irigasi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pusat | 347.674 | 36,45% | 37 |
| 2. | Provinsi | 86.865 | 9,11% | 108 |
| 3. | Kab/Kota | 519.265 | 54,44% | 11.401 |
| Total Jawa Tengah | | 953.804 | 100,00% | 11.546 |

*Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan pengelolaan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Namun demikian, dalam kurun waktu tahun 2016-2022 masih terdapat jaringan irigasi dalam kondisi rusak sedang hingga rusak ringan yang jumlahnya cukup besar sehingga masih perlu dilakukan upaya-upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan Provinsi.

**Tabel 2.53.**
**Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2016 – 2022**

| Tahun | Kondisi Jaringan Irigasi Provinsi | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baik | | Ringan | | Sedang | | Berat | | Luas |
| | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % | (Ha) |
| 2016 | 1.730 | 6 | 67.754 | 73 | 17.044 | 19 | 337 | 2 | 86.865 |
| 2017 | 4.433 | 6 | 64.207 | 74 | 18.225 | 20 | 0 | 0 | 86.865 |
| 2018 | 4.941 | 7 | 63.349 | 75 | 18.575 | 18 | 0 | 0 | 86.865 |
| 2019 | 4.941 | 6 | 66.723 | 77 | 15.201 | 17 | 0 | 0 | 86.865 |

| Tahun | Kondisi Jaringan Irigasi Provinsi | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baik | | Ringan | | Sedang | | Berat | | Luas |
| | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % | (Ha) |
| 2020 | 4.333 | 5 | 67.178 | 77 | 15.354 | 18 | 0 | 0 | 86.865 |
| 2021 | 4.333 | 5 | 67.513 | 78 | 15.019 | 17 | 0 | 0 | 86.865 |
| 2022 | 4.333 | 5 | 67.595 | 78 | 14.937 | 17 | 0 | 0 | 86.865 |

*Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Berdasarkan sebaran kondisi daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota, persentase kondisi baik irigasi tercatat ada 11 kabupaten dibawah 50 persen, 11 kabupaten antara 50 – 70 persen, serta 10 kabupaten antara 70– 95 persen. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membantu rehabilitasi daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan.

**Tabel 2.54.**
**Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022**

| No | Kabupaten/ Kota | Jumlah DI | Luas DI (ha) | Kondisi Fisik Irigasi % | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Baik | Rusak Ringan (RR) | Rusak Sedang (RS) | Rusak Berat (RB) |
| 1 | Cilacap | 702 | 21,745 | 42.69 | 2.25 | 0.15 | 54.90 |
| 2 | Banyumas | 573 | 23,716 | 80.35 | 12.62 | 2.66 | 4.37 |
| 3 | Purbalingga | 255 | 19,159 | 48.00 | - | 31.00 | 21.00 |
| 4 | Banjarnegara | 322 | 16,483 | 70.30 | 10.87 | 8.02 | 10.92 |
| 5 | Kebumen | 283 | 12,260 | 75.17 | 1.23 | 1.55 | 22.04 |
| 6 | Purworejo | 250 | 9,470 | 21.48 | 25.40 | 28.20 | 24.92 |
| 7 | Wonosobo | 705 | 21,050 | 67.54 | 7.42 | 9.29 | 15.75 |
| 8 | Magelang | 993 | 35,662 | 52.16 | 18.72 | 14.57 | 14.54 |
| 9 | Boyolali | 255 | 9,821 | 60.77 | 8.46 | 24.23 | 6.54 |
| 10 | Klaten | 478 | 29,713 | 40.89 | - | 41.99 | 17.12 |
| 11 | Sukoharjo | 70 | 4,353 | 19.29 | 24.70 | 50.04 | 5.97 |
| 12 | Wonogiri | 403 | 28,784 | 72.67 | 6.34 | 6.80 | 14.18 |
| 13 | Karanganyar | 351 | 18,867 | 35.06 | 10.20 | 16.52 | 38.54 |
| 14 | Sragen | 118 | 12,323 | 78.68 | - | 10.30 | 11.02 |
| 15 | Grobogan | 268 | 20,194 | 24.54 | 18.76 | 41.82 | 14.88 |
| 16 | Blora | 183 | 13,351 | 51.03 | 14.55 | 12.73 | 21.68 |
| 17 | Rembang | 318 | 21,193 | 65.11 | 6.16 | 18.90 | 9.80 |
| 18 | Pati | 327 | 20,965 | 83.26 | 3.34 | 3.40 | 10.00 |
| 19 | Kudus | 231 | 10,295 | 87.90 | 7.12 | 4.98 | 0.00 |
| 20 | Jepara | 834 | 28,247 | 28.00 | 9.00 | 20.50 | 42.50 |
| 21 | Demak | 4 | 1,627 | 94.90 | - | - | 5.10 |
| 22 | Semarang | 666 | 32,687 | 60.01 | 13.11 | 10.59 | 16.29 |
| 23 | Temanggung | 577 | 17,709 | 45.32 | - | 25.58 | 29.09 |
| 24 | Kendal | 686 | 10,427 | 63.94 | - | - | 36.06 |
| 25 | Batang | 573 | 18,231 | 34.43 | 23.84 | 15.75 | 25.98 |
| 26 | Pekalongan | 339 | 13,818 | 49.19 | 4.00 | 7.34 | 39.47 |
| 27 | Pemalang | 91 | 7,343 | 70.26 | 9.15 | 11.26 | 9.32 |
| 28 | Tegal | 208 | 9,281 | 60.27 | 20.27 | 15.77 | 3.69 |
| 29 | Brebes | 449 | 25,731 | 65.08 | 2.97 | 8.49 | 23.46 |
| 30 | Kota Salatiga | 12 | 373 | 84.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 |
| 31 | Kota Semarang | 41 | 2,339 | 78.70 | 6.79 | 8.42 | 6.07 |
| 32 | Kota Tegal | 6 | 489 | 59.50 | 16.85 | 10.91 | 12.74 |

*Sumber: Bappeda Kabupaten/Kota Tahun 2022*

Kebutuhan akan penyediaan air yang mencakup kapasitas daya dukung serta tingkat perkembangan kebutuhan air semakin dirasakan meningkat, salah satunya penyediaan air untuk air baku. Pemenuhan air baku penting bahkan utama karena digunakan utamanya untuk pemenuhan kebutuhan air minum. Selain air minum, air baku juga dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi utamanya kebutuhan industri dan kebutuhan kawasan prioritas (pengembangan pariwisata).

Ketersediaan air khususnya untuk air baku dipengaruhi oleh jumlah bangunan bendungan/waduk. Sampai saat ini terdapat 41 bangunan bendungan/waduk (9 waduk besar dan 32 waduk kecil). Kebutuhan air baku khususnya air minum sejalan dengan besaran tingkat pertumbuhan jumlah penduduk. Oleh karena itu diharapkan meningkatnya pertumbuhan penduduk dapat diimbangi secara positif dengan ketersediaan air baku.

Ketersediaan air baku di Jawa Tengah (pemenuhan kebutuhan air minum) mengalami peningkatan dari tahun 2016 dari 56,49 persen menjadi menjadi 62 persen di tahun 2022.

**Tabel 2.55.**
**Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2016 – 2022**

| Uraian | Tahun | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kebutuhan Air Baku (juta m³/tahun) (air minum, industri, dan lain-lain) | 739,65 | 745,02 | 750,25 | 755,35 | 760,33 | 760,33 | 770,08 |
| Ketersediaan Air Baku (juta m³/tahun) (air minum, industri, dan lain-lain) | 417,83 | 435,84 | 456,83 | 466,78 | 466,78 | 467,62 | 477,45 |
| Ketersediaan Air Baku (%) | 56,49 | 58,5 | 60,89 | 61,8 | 61,39 | 61,50 | 62 |

*Sumber : Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023*

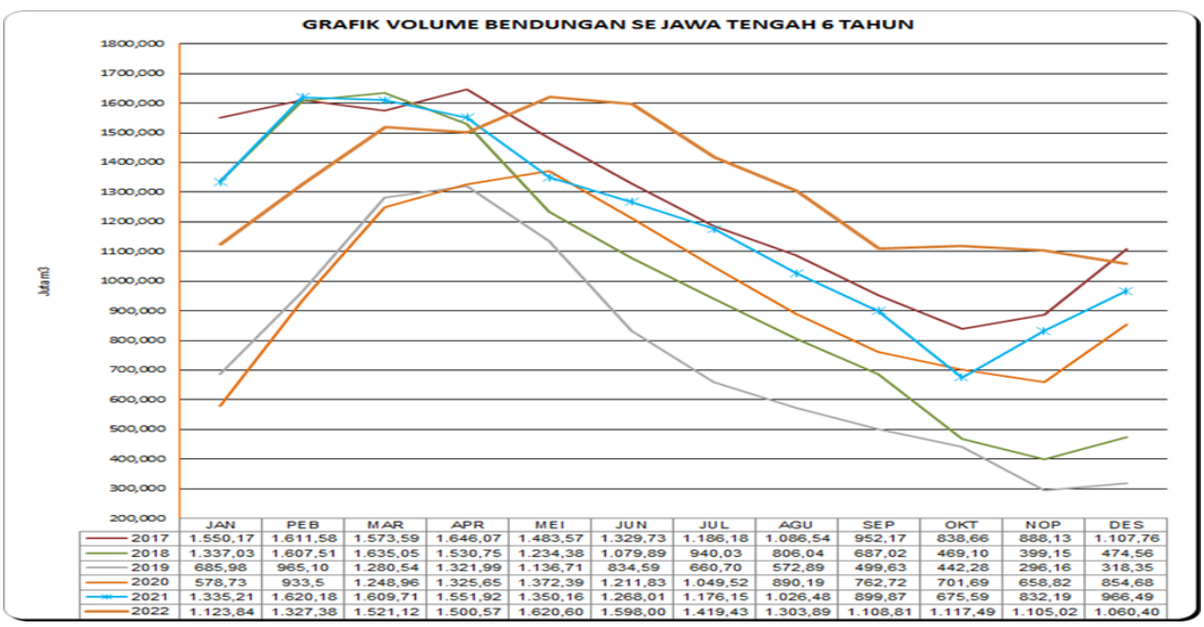


| | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOP | DES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.550,17 | 1.611,58 | 1.573,59 | 1.646,07 | 1.483,57 | 1.329,73 | 1.186,18 | 1.086,54 | 952,17 | 838,66 | 888,13 | 1.107,76 |
| 2018 | 1.337,03 | 1.607,51 | 1.635,05 | 1.530,75 | 1.234,38 | 1.079,89 | 940,03 | 806,04 | 687,02 | 469,10 | 399,15 | 474,56 |
| 2019 | 685,98 | 965,10 | 1.280,54 | 1.321,99 | 1.136,71 | 834,59 | 660,70 | 572,89 | 499,63 | 442,28 | 296,16 | 318,35 |
| 2020 | 578,73 | 933,5 | 1.248,96 | 1.325,65 | 1.372,39 | 1.211,83 | 1.049,52 | 890,19 | 762,72 | 701,69 | 658,82 | 854,68 |
| 2021 | 1.335,21 | 1.620,18 | 1.609,71 | 1.551,92 | 1.350,16 | 1.268,01 | 1.176,15 | 1.026,48 | 899,87 | 675,59 | 832,19 | 966,49 |
| 2022 | 1.123,84 | 1.327,38 | 1.521,12 | 1.500,57 | 1.620,60 | 1.598,00 | 1.419,43 | 1.303,89 | 1.108,81 | 1.117,49 | 1.105,02 | 1.060,40 |

*Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.41.**
**Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah (Juta m³)**
**Tahun 2017 - 2022**

Gambar diatas menunjukan bahwa ketersediaan air waduk dari tahun ke tahun memiliki pola yang hampir sama yaitu debit tertinggi

berkisar antara bulan Maret sampai dengan bulan April dan debit terendah pada bulan Oktober sampai dengan bulan November, artinya bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan upaya agar pada saat ketersediaan air waduk mengalami penurunan kebutuhan air tetap bisa terpenuhi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencukupi kebutuhan air mendukung ketahanan pangan yaitu melalui Program 1000 Embung yang sebagian besar menggunakan prinsip memanen hujan. Program 1000 embung ini diinisiasi pada tahun 2016 dan pada tahun 2022 sudah melebihi target. Tercatat sudah ada 1.156 embung yang dibangun untuk mencukupi kebutuhan air baku masyarakat. se-Jawa Tengah.

**Tabel 2.56.**
**Jumlah embung di Jawa Tengah berdasarkan sumbernya**

| No | Instansi/Lembaga | Sumber Pendanaan | Embung (Lokasi) | *Long Storage (Lokasi)* | Jumlah (Lokasi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pemerintah Pusat (BB WS) | APBN | 141 | 3 | 144 |
| 2. | Dinas PUSDATARU | APBD | 75 | 17 | 92 |
| 3. | Distanbun | APBD | 4 | - | 4 |
| | | APBN | 512 | - | 512 |
| 4. | DLHK | DAK | 390 | - | 390 |
| 5. | Pemkab (Bankeu) | APBD | 11 | - | 11 |
| 6. | CSR/TJSLP | Hibah | 3 | - | 3 |
| **TOTAL** | | | **1.136** | **20** | **1.156** |

*Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**d. Jasa Konstruksi**

Sertifikasi Hasil Uji pada tahun 2021 mencapai 2.312 SHU mengalami peningkatan kondisi jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 1.138 SHU. Sedangkan pelaku jasa konstruksi yang difasilitasi di tahun 2021 sejumlah 1.000 orang berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2020 sejumlah 3.288 orang.

**Tabel 2.57.**
**Pengelolaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Sertifikasi Hasil Uji (SHU) | 1.853 | 1.080 | 750 | 1.138 | 2.312 | 2.702 |
| 2 | Informasi Jasa Kontruksi pelaksanaan event / pameran} | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Pelaku Jasa Kontruksi (orang) sosialisasi, bintek terkait jakon (peraturan jasa konstruksi, HSD, HSPK, dsb), | 1.228 | 2.038 | 2.798 | 3.288 | 1.000 | 1260 |

*Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2021*

**e. Bangunan Gedung Milik Daerah**

Hingga tahun 2022, Bangunan Gedung Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1,030 komplek, Pendataan teknis Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah sudah dilakukan terhadap sejumlah 189 komplek, Bantuan Teknis untuk pengelolaan Bangunan Gedung Milik Daerah telah diberikan kepada 147 komplek bangunan Gedung,

**Tabel 2.58.**
**Bangunan Gedung Yang Sudah Dilakukan Pendataan Teknis**

| Lokasi Pendataan Teknis BGMD | TA | JUMLAH |
|---|---|---|
| BGMD Kab, Rembang + Kab, Blora | 2019 | 51 |
| BGMD Kota + Kab Pekalongan | 2021 | 36 |
| BGMD Kab, Pemalang | 2021 | 27 |
| BGMD Kab, Brebes | 2022 | 32 |
| BGMD Kota + Kab Tegal | 2022 | 43 |
| **TOTAL** | | 189 |

*Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Dari jumlah tersebut sejak tahun 2019 telah dilakukan pendataan kondisi bangunan gedung dan telah terdata untuk 8 wilayah kabupaten/kota, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

**Tabel 2.59.**
**Hasil Pendataan Kondisi Bangunan Gedung**
**Provinsi Jawa Tengah**

| No | Lokasi | Jumlah BGMD | | Telah dilakukan pendataan kondisi bangunan gedung | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Komplek | Unit | Kondisi Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Kondisi Khusus | Reno vasi |
| 1 | DKI Jakarta | 1 | | | | | | | |
| 2 | Kab. Banjarnegara | 24 | | | | | | | |
| 3 | Kab. Banyumas | 45 | | | | | | | |
| 4 | Kab. Batang | 19 | | | | | | | |
| 5 | Kab. Blora | 23 | 353 | 27 | 313 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kab. Boyolali | 36 | | | | | | | |
| 7 | Kab. Brebes | 32 | 405 | 0 | 365 | 26 | 9 | 0 | 5 |
| 8 | Kab. Cilacap | 37 | | | | | | | |
| 9 | Kab. Demak | 21 | | | | | | | |
| 10 | Kab. Grobogan | 20 | | | | | | | |
| 11 | Kab. Jepara | 29 | | | | | | | |
| 12 | Kab. Karanganyar | 26 | | | | | | | |
| 13 | Kab. Kebumen | 32 | | | | | | | |
| 14 | Kab. Kendal | 29 | | | | | | | |
| 15 | Kab. Klaten | 34 | | | | | | | |
| 16 | Kota Magelang | 14 | | | | | | | |
| 17 | Kota Pekalongan | 16 | 166 | 0 | 156 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Kota Salatiga | 15 | | | | | | | |
| 19 | Kota Semarang | 110 | | | | | | | |
| 20 | Kota Surakarta | 37 | | | | | | | |
| 21 | Kota Tegal | 15 | 118 | 21 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kab. Kudus | 18 | | | | | | | |
| 23 | Kab. Magelang | 21 | | | | | | | |
| 24 | Kab. Pati | 27 | | | | | | | |
| 25 | Kab. Pekalongan | 20 | 325 | 0 | 319 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 26 | Kab. Pemalang | 27 | 361 | 1 | 349 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 27 | Kab. Purbalingga | 25 | | | | | | | |
| 28 | Kab. Purworejo | 34 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Kab. Rembang | 28 | 407 | 26 | 378 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kab. Semarang | 42 | | | | | | | |
| 31 | Kab. Sragen | 31 | | | | | | | |
| 32 | Kab. Sukoharjo | 29 | | | | | | | |
| 33 | Kab. Tegal | 28 | 369 | 43 | 308 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| 34 | Kab. Temanggung | 24 | | | | | | | |
| 35 | Kab. Wonogiri | 37 | | | | | | | |
| 36 | Kab. Wonosobo | 24 | | | | | | | |
| | **Jumlah** | **1.030** | **2.504** | **118** | **2.283** | **70** | **25** | **4** | **5** |

*Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2023*

### 2.3.13 Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

**a. Perkembangan Jumlah dan Kebutuhan Rumah**

Peningkatan infrastuktur perumahan merupakan salah satu kebijakan pemenuhan pelayanan dasar dalam rangka penurunan wilayah kantong kemiskinan yang menjadi salah satu strategi di dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, dimana hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan Jawa Tengah tahun 2024-2026 yaitu Mewujudkan Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari yang salah satu tolak ukurnya yaitu berkaitan dengan angka kemiskinan.

Berdasarkan data Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III pada akhir tahun 2022 asumsi jumlah rumah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 8.731.768 unit rumah dengan jumlah rumah layak huninya sebesar 66,47 % atau sebanyak 5.804.006 unit rumah.

**Tabel 2.60.**
**Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

| No | Provinsi/Kabupaten/Kota | Asumsi Jumlah Rumah | Rumah Layak Huni |
|---|---|---|---|
| **Provinsi Jawa Tengah** | | **8,731,768** | **5,804,006** |
| 1 | Cilacap | 455,869 | 248,859 |
| 2 | Banyumas | 441,410 | 272,306 |
| 3 | Purbalingga | 229,802 | 126,598 |
| 4 | Banjarnegara | 234,361 | 67,519 |
| 5 | Kebumen | 306,407 | 205,722 |
| 6 | Purworejo | 189,603 | 120,625 |
| 7 | Wonosobo | 212,495 | 91,904 |
| 8 | Magelang | 339,627 | 220,011 |
| 9 | Boyolali | 269,043 | 189,514 |
| 10 | Klaten | 306,594 | 268,086 |
| 11 | Sukoharjo | 217,000 | 184,212 |
| 12 | Wonogiri | 255,108 | 221,715 |
| 13 | Karanganyar | 220,546 | 195,580 |
| 14 | Sragen | 242,574 | 168,201 |
| 15 | Grobogan | 386,693 | 170,880 |
| 16 | Blora | 235,302 | 122,239 |
| 17 | Rembang | 171,604 | 115,987 |
| 18 | Pati | 359,459 | 283,541 |
| 19 | Kudus | 212,789 | 188,957 |
| 20 | Jepara | 313,884 | 152,736 |

| No | Provinsi/Kabupaten/Kota | Asumsi Jumlah Rumah | Rumah Layak Huni |
|---|---|---|---|
| 21 | Demak | 303,265 | 230,178 |
| 22 | Semarang | 279,683 | 210,546 |
| 23 | Temanggung | 199,797 | 102,296 |
| 24 | Kendal | 251,502 | 166,495 |
| 25 | Batang | 186,489 | 105,124 |
| 26 | Pekalongan | 194,914 | 133,809 |
| 27 | Pemalang | 289,862 | 186,208 |
| 28 | Tegal | 290,648 | 218,190 |
| 29 | Brebes | 435,007 | 289,410 |
| 30 | Kota Magelang | 25,208 | 19,609 |
| 31 | Kota Surakarta | 113,983 | 88,610 |
| 32 | Kota Salatiga | 51,113 | 44,535 |
| 33 | Kota Semarang | 409,676 | 276,326 |
| 34 | Kota Pekalongan | 56,033 | 49,505 |
| 35 | Kota Tegal | 48,905 | 41,730 |

*Sumber : Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, 2022*

Terdapat sekitar 33,53% rumah yang belum layak huni yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi rumah tidak layak huni. Sebagaimana data pada tabel diatas, terlihat bahwa sebagian besar Kabupaten dengan status merah/miskin memiliki rumah layak huni rata-rata ≤ 50%.

Terpenuhinya kebutuhan rumah/tempat tinggal sangat bergantung pada sisi kebutuhan (demand) dan sisi penyediaan (supply). Sisi kebutuhan dipengaruhi oleh kemampuan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah/tempat tinggal. Sedangkan sisi penyediaan ditentukan oleh kemampuan badan usaha/lembaga untuk membangun rumah. Adanya gap antara kebutuhan dan ketersediaan rumah ini yang sering kita sebut dengan backlog rumah. Pengertian backlog berdasarkan laman Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR (https://ppdpp.id/konsep-backlog) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu backlog kepemilikan dan backlog kepenghunian. Backlog kepenghunian merupakan perspektif untuk konsep 1 (satu) keluarga menghuni 1 (satu) rumah, sehingga menghitung backlog kepenghunian menggunakan rumus jumlah keluarga dikurangi dengan data jumlah rumah yang tersedia. Konsep menghuni yang dimaksud adalah keluarga atau rumah tangga yang tidak memiliki rumah tetapi menghuni rumah yang layak baik sewa/ kontrak, beli/ menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga. Sedangkan untuk backlog kepemilikan adalah berdasarkan pada presentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri, sehingga backlog kepemilikan adalah rumah tangga yang tidak memiliki rumah milik sendiri seperti sewa/ kontrak, beli/ menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/ keluarga.

**Tabel 2.61.**
***Backlog* Kepenghunian dan Kepemilikan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022**

| No | Kabupaten/Kota | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Backlog* Milik | *Backlog* Huni | *Backlog* Milik | *Backlog* Huni | *Backlog* Milik | *Backlog* Huni | *Backlog* Milik | *Backlog* Huni | *Backlog* Milik | *Backlog* Huni |
| 1 | Kab.Cilacap | 33.567 | 27.166 | 34.111 | 23.125 | 22.526 | 17.075 | 29.037 | 73.366 | 16.154 | 12.923 |
| 2 | Kab.Banyumas | 35.597 | 20.585 | 33.423 | 24.345 | 44.736 | 30.901 | 47.953 | 33.166 | 35.908 | 24.419 |
| 3 | Kab.Purbalingga | 17.222 | 12.611 | 11.125 | 8.786 | 7.922 | 4.699 | 201.781 | 263.865 | 10.132 | 7.593 |
| 4 | Kab.Banjarnegara | 15.998 | 13.472 | 12.192 | 10.331 | 18.299 | 14.116 | 17.261 | 44.477 | 11.919 | 8.878 |
| 5 | Kab.Kebumen | 32.727 | 28.145 | 28.297 | 24.976 | 28.397 | 22.483 | 17.808 | 13.461 | 17.789 | 15.602 |
| 6 | Kab.Purworejo | 42.034 | 35.907 | 32.790 | 25.503 | 32.200 | 25.976 | 26.772 | 21.180 | 22.658 | 19.198 |
| 7 | Kab.Wonosobo | 17.374 | 13.274 | 16.849 | 12.882 | 16.047 | 11.028 | 16.047 | 11.028 | 4.686 | 3.433 |
| 8 | Kab.Magelang | 26.327 | 20.343 | 31.944 | 24.903 | 33.259 | 22.981 | 55.735 | 17.205 | 21.877 | 14.372 |
| 9 | Kab.Boyolali | 18.443 | 12.296 | 16.071 | 9.757 | 19.935 | 16.073 | 19.075 | 15.843 | 13.377 | 9.066 |
| 10 | Kab.Klaten | 46.233 | 37.381 | 43.185 | 39.418 | 38.820 | 32.972 | 51.993 | 45.235 | 39.450 | 33.198 |
| 11 | Kab.Sukoharjo | 45.826 | 28.524 | 44.202 | 28.604 | 45.798 | 23.418 | 21.852 | 17.398 | 45.957 | 32.155 |
| 12 | Kab.Wonogiri | 13.596 | 10.417 | 11.662 | 9.692 | 7.094 | 6.044 | 69.931 | 68.606 | 10.874 | 9.472 |
| 13 | Kab.Karanganyar | 15.296 | 11.247 | 32.653 | 24.576 | 24.198 | 16.944 | 19.662 | 17.632 | 22.701 | 18.075 |
| 14 | Kab.Sragen | 24.891 | 22.439 | 17.038 | 14.313 | 18.156 | 16.427 | 43.997 | 18.782 | 16.620 | 14.308 |
| 15 | Kab.Grobogan | 24.885 | 19.207 | 20.734 | 20.339 | 16.211 | 14.602 | 15.187 | 13.828 | 15.473 | 14.150 |
| 16 | Kab.Blora | 17.298 | 14.118 | 23.472 | 20.845 | 18.263 | 15.633 | 17.010 | 14.530 | 14.447 | 12.933 |
| 17 | Kab.Rembang | 9.345 | 7.824 | 7.411 | 5.804 | 9.748 | 8.749 | 43.152 | 43.152 | 9.945 | 5.362 |
| 18 | Kab.Pati | 23.240 | 20.447 | 15.515 | 13.516 | 16.547 | 14.479 | 20.426 | 16.820 | 12.591 | 9.785 |
| 19 | Kab.Kudus | 15.271 | 11.077 | 23.326 | 14.470 | 18.549 | 12.982 | 19.313 | 14.014 | 15.613 | 9.306 |
| 20 | Kab.Jepara | 31.954 | 26.733 | 20.669 | 18.628 | 27.554 | 24.872 | 29.352 | 26.514 | 31.038 | 26.925 |
| 21 | Kab.Demak | 15.832 | 12.934 | 14.634 | 12.565 | 17.955 | 14.195 | 15.795 | 12.717 | 13.650 | 11.260 |
| 22 | Kab.Semarang | 20.992 | 10.294 | 25.991 | 15.958 | 25.107 | 16.006 | 39.813 | 37.301 | 32.713 | 12.658 |
| 23 | Kab.Temanggung | 11.566 | 8.316 | 10.154 | 6.231 | 11.927 | 8.831 | 54.193 | 49.095 | 7.674 | 5.397 |
| 24 | Kab.Kendal | 27.457 | 22.103 | 24.458 | 20.025 | 20.982 | 17.093 | 26.958 | 23.800 | 21.542 | 16.437 |
| 25 | Kab.Batang | 13.732 | 11.734 | 11.414 | 9.762 | 10.986 | 9.387 | 8.698 | 7.601 | 12.040 | 11.210 |
| 26 | Kab.Pekalongan | 32.780 | 29.183 | 13.480 | 8.593 | 23.825 | 18.516 | 103.300 | 103.300 | 18.767 | 16.903 |
| 27 | Kab.Pemalang | 44.367 | 35.865 | 44.389 | 40.135 | 48.802 | 42.771 | 45.335 | 41.240 | 38.182 | 33.413 |
| 28 | Kab.Tegal | 72.469 | 70.231 | 78.245 | 68.920 | 64.604 | 56.942 | 161.943 | 150.751 | 84.584 | 77.132 |
| 29 | Kab.Brebes | 71.536 | 66.400 | 79.803 | 71.429 | 43.631 | 39.929 | 43.765 | 39.133 | 44.139 | 38.084 |
| 30 | Kota Magelang | 12.775 | 7.236 | 12.572 | 6.617 | 11.443 | 5.388 | 12.376 | 6.188 | 12.694 | 7.878 |
| 31 | Kota Surakarta | 60.653 | 33.446 | 57.627 | 29.602 | 65.282 | 32.914 | 63.665 | 34.427 | 56.254 | 34.717 |
| 32 | Kota Salatiga | 19.772 | 6.732 | 18.215 | 5.182 | 15.574 | 4.918 | 11.259 | 9.441 | 14.961 | 4.645 |

| No | Kabupaten/Kota | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Backlog* Milik | *Backlog* Huni | *Backlog* Milik | *Backlog* Huni | *Backlog* Milik | *Backlog* Huni | *Backlog* Milik | *Backlog* Huni | *Backlog* Milik | *Backlog* Huni |
| 33 | Kota Semarang | 163.643 | 94.962 | 164.448 | 100.313 | 154.725 | 80.195 | 83.532 | 100.905 | 152.361 | 88.306 |
| 34 | Kota Pekalongan | 21.994 | 17.208 | 23.484 | 20.049 | 21.473 | 17.426 | 19.542 | 14.512 | 23.578 | 21.854 |
| 35 | Kota Tegal | 30.142 | 24.290 | 23.796 | 19.213 | 22.431 | 19.195 | 22.292 | 19.959 | 22.797 | 18.833 |
| | Jumlah Total | 1.126.837 | 844.148 | 1.079.379 | 809.410 | 1.023.008 | 736.159 | 1.495.810 | 1.440.472 | 950.089 | 703.141 |

*Sumber : Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, 2022*

Dari data tersebut terlihat bahwa kebutuhan kepenghunian Rumah (backlog kepenghunian) cukup besar di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjom Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kota Semarang.

Salah satu bentuk fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyediakan rumah yang layak huni adalah dengan menyediakan bantuan stimulan bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan backlog kepemilikan di Provinsi Jawa Tengah yaitu melalui Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat. Program Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Provinsi Jawa Tegah baru dimulai tahun 2020. Berikut ini adalah capaian pembangunan baru rumah di Provinsi Jawa Tengah melalui berbagai sumber pembiayaan dari tahun 2019-2022.

**Tabel 2.62.**
**Pembangunan Baru Rumah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022**

| Tahun | Sumber Pembiayaan | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APBN | APBD Prov. | APBD Kab/Kota | Asosiasi Perumahan | CSR & Swadaya | |
| 2019 | 1.279 | - | - | 11.483 | - | 12.762 |
| 2020 | 25 | 205 | - | 30.193 | - | 30.423 |
| 2021 | 220 | 186 | - | 30.595 | 5.799 | 36.800 |
| 2022 | 2.201 | 326 | 143 | 24.709 | 183 | 27.603 |
| **Total** | **3.725** | 717 | 143 | **96.980** | 5.982 | 107.547 |

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2022*

**b. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni**

Intervensi program penanganan RTLH telah dilakukan dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah serta didukung oleh Corporate Social Responsibility (CSR) dari swasta. Penanganan RTLH ini dilakukan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin di Jawa Tengah. Adapun perkembangan penanganan RTLH dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 2.63.**
**Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2022**

| Tahun | Sumber Pembiayaan | | | | Verivali lapangan | JUMLAH TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APBN | APBD Prov. | APBD Kab/Kota | CSR & Swadaya | | |
| 2019 | 36.725 | 23.208 | 26.651 | 15.986 | | 102.570 |
| 2020 | 48.809 | 10.298 | 12.855 | 3.268 | | 75.230 |

| Tahun | Sumber Pembiayaan | | | | Verivali lapangan | JUMLAH TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APBN | APBD Prov. | APBD Kab/Kota | CSR & Swadaya | | |
| 2021 | 32.623 | 11.293 | 11.370 | 1.593 | 397.572 | 454.451 |
| 2022 | 35.771 | 11.487 | 12.714 | 2.659 | 231.279 | 293.910 |
| **Total** | **153.928** | **56.286** | **63.590** | **23.524** | **628.851** | **926.161** |

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2022*

Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015, terdapat 1.582.024 unit RTLH yang menjadi baseline data RPJMD By Name By Address (BNBA) calon penerima bantuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diintervensi mulai tahun 2019. Peningkatan kualitas RTLH dari sumber pembiayaan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Corporate Social Responsibility (CSR) dan lain-lain dari tahun 2019-2022 sebanyak 297.310 unit, sedangkan 628.851unit merupakan hasil verifikasi dan validasi data lapangan tahun 2019 sampai dengan 2022. Sehingga secara keseluruhan baik melalui intervensi sumber pembiayaan dan verivali lapangan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, RTLH sudah tertangani sebanyak 926.161 unit.

Sampai dengan akhir tahun 2022, dari baseline data RPJMD masih terdapat sisa RTLH yang harus ditangani sebanyak 755.143 unit rumah, namun tidak dapat dipungkiri terdapat pertumbuhan data jumlah RTLH pada kurun tahun waktu tahun 2018-2022 berdasarkan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM) tahun 2018 dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2018-2022 yaitu sebanyak 635.682 unit RTLH telah ditangani baik melalui intervensi fisik dari berbagai sumber pendanaan maupun proses verifikasi dan validasi data jumlah RTLH. Sehingga sesuai baseline data dari PBDT tahun 2015 dan pembaharuan tahun 2018-2022 dari DTPFMOTM dan DTKS maka pada akhir tahun 2022 jumlah RTLH yang masih harus ditangani sebanyak 1.390.825 unit dengan sebaran sebagai berikut :

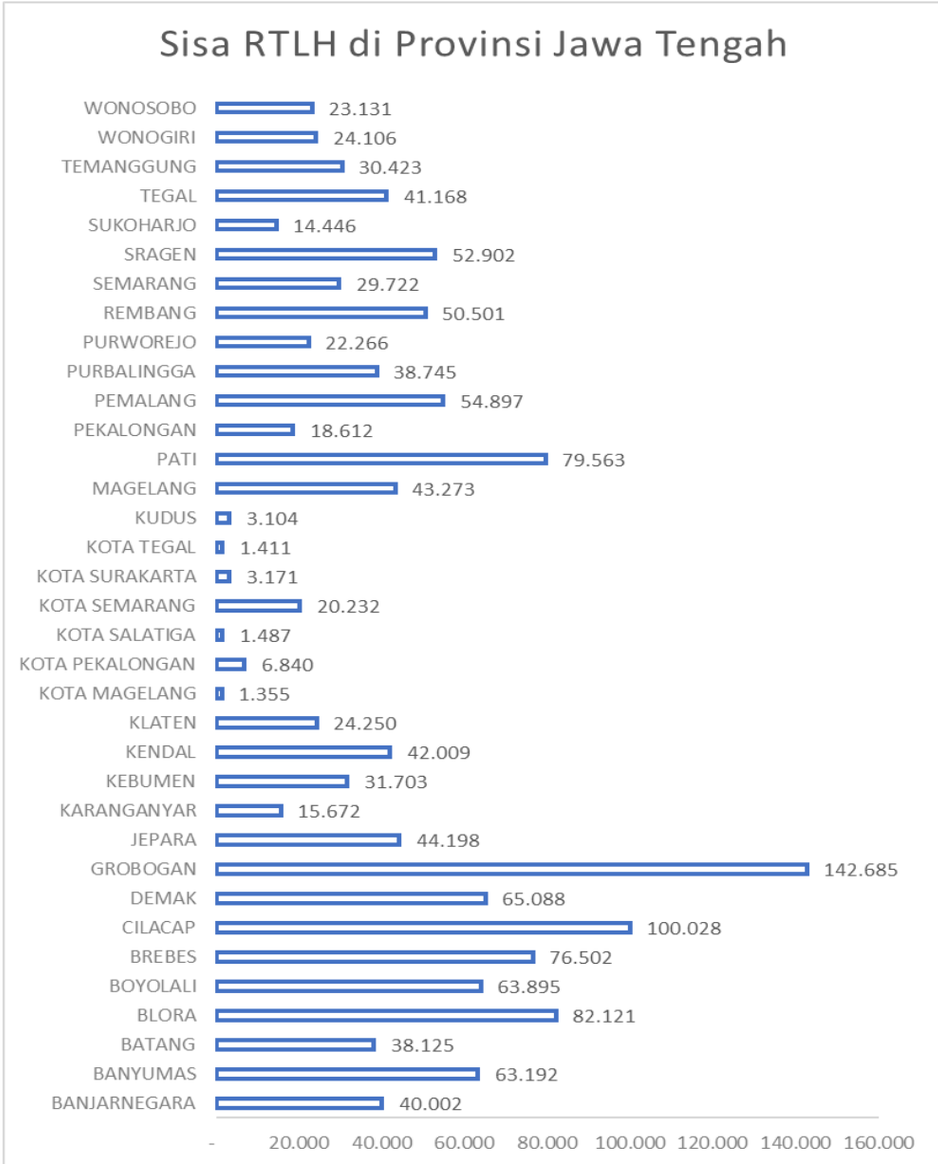


*Sumber : Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos*

**Gambar 2.42.**
**Persebaran Jumlah Sisa RTLH di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

**c. Upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan**

Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 terdapat 2 jenis layanan terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan yaitu:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang terdiri dari 10 kawasan rawan bencana. Selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan intervensi terhadap pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana Provinsi. Melalui bantuan sosial pembangunan baru rumah dan peningkatan kualitas rumah terdampak bencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan.

Adapun rekap penanganan rumah korban bencana pemerintah Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.64.**
**Penanganan Rumah Terdampak Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 melalui APBD Prov**

| No | JENIS PENANGANAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PK Bencana** | 150 | 105 | 118 | 51 |
| 2 | **PB Bencana** | 0 | 11 | 23 | 19 |
| | **Jumlah** | **150** | **116** | **141** | **70** |

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2022*

**d. Penanganan Kawasan Kumuh**

Rendahnya tingkat kesejahteraan, rendahnya perilaku hidup sehat, ketaatan dan kesadaran hukum terhadap kelestarian lingkungan menjadi salah satu faktor tumbuhnya kawasan permukiman kumuh. Perkembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yang disertai dengan peningkatan pemanfaatan lahan permukiman secara swadaya masyarakat khususnya kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seringkali tidak difasilitasi dengan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang memadai, seperti tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik, mengakibatkan penurunan kualitas kawasan permukiman yang dibangun pengembang dan munculnya kawasan permukiman kumuh baru yang dibangun MBR.

Penanganan permukiman kumuh diawali dengan identifikasi lokasi permukiman kumuh dan penetapan lokasi permukiman kumuh melalui SK Walikota/Bupati. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan luasan kawasan kumuh dibagi menjadi 3 kewenangan yaitu luasan kumuh dibawah 10 ha menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, luasan kumuh 10-15 ha merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, serta luasan kumuh di atas 15 ha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Pada tahun 2018 pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan identifikasi dan menetapkan kawasan permukiman kumuh seluas 3.004,59 Ha dengan kumuh 10-15 Ha seluas 474,66 Ha. Penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan SK Bupati/ Walikota sampai dengan Tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah menyisakan luasan kawasan kumuh sebesar 571,10 Ha sedangkan untuk sisa luasan kawasan permukiman kumuh kewenangan Provinsi (10 – 15 Ha) adalah sebesar 152,85 Ha. Namun, terjadi penambahan kawasan permukiman kumuh sampai dengan Tahun 2022 menjadi 10.671,84 Ha. Beberapa penanganan telah dilakukan untuk menangani kawasan permukiman kumuh, hingga pada akhir Tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah sisa kawasan permukiman kumuh total di Provinsi Jawa Tengah sebesar 6.094,91 Ha, dan untuk sisa luasan kawasan kumuh kewenangan Provinsi (10 – 15 Ha) adalah sebesar 1.101,02 Ha.

Secara detail sebaran penanganan Kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan SK Kumuh Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.65.**
**Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan SK Kumuh Sampai Dengan Tahun 2022 Di Provinsi Jawa Tengah**

| No | Kabupaten/Kota | Sisa Luasan Tahun 2022 | | | Total Sisa Kumuh |
|---|---|---|---|---|---|
| | | <10 | 10-15 | >15 | |
| 1 | Kab. Cilacap | 0,00 | 0,00 | 63,74 | 63,74 |
| 2 | Kab. Banyumas | 30,77 | 14,44 | 43,37 | 88,568 |
| 3 | Kab. Purbalingga | 72,64 | 48,91 | 184,39 | 305,94 |
| 4 | Kab. Banjarnegara | 83,51 | 87,98 | 290,64 | 462,13 |
| 5 | Kab. Kebumen | 153,09 | 122,05 | 36,71 | 311,86 |
| 6 | Kab. Purworejo | 4,27 | 5,60 | 0,00 | 9,865 |
| 7 | Kab. Wonosobo | 0,00 | 0,00 | 149,53 | 149,53 |
| 8 | Kab. Magelang | 116,86 | 74,66 | 53,26 | 244,78 |
| 9 | Kab. Boyolali | 0,00 | 5,59 | 58,63 | 64,22 |
| 10 | Kab. Klaten | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,45 |
| 11 | Kab. Sukoharjo | 0,99 | 26,69 | 19,69 | 47,36 |
| 12 | Kab. Wonogiri | 8,80 | 11,15 | 51,54 | 71,49 |
| 13 | Kab. Karanganyar | 75,15 | 10,38 | 17,34 | 102,87 |
| 14 | Kab. Sragen | 12,48 | 3,94 | 39,39 | 55,81 |
| 15 | Kab. Grobogan | 32,65 | 0,00 | 70,64 | 103,29 |
| 16 | Kab. Blora | 20,71 | 44,40 | 309,20 | 374,31 |
| 17 | Kab. Rembang | 71,15 | 81,04 | 107,03 | 259,22 |
| 18 | Kab. Pati | 46,77 | 91,73 | 35,67 | 174,17 |
| 19 | Kab. Kudus | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 5,95 |
| 20 | Kab. Jepara | 11,16 | 6,79 | 36,89 | 54,84 |
| 21 | Kab. Demak | 4,08 | 59,73 | 100,27 | 164,08 |
| 22 | Kab. Semarang | 34,20 | 10,28 | 269,27 | 313,75 |
| 23 | Kab. Temanggung | 3,87 | 23,91 | 93,60 | 121,38 |
| 24 | Kab. Kendal | 33,51 | 12,24 | 31,20 | 76,95 |
| 25 | Kab. Batang | 16,88 | 2,98 | 52,45 | 72,31 |
| 26 | Kab. Pekalongan | 28,16 | 36,29 | 224,67 | 289,12 |
| 27 | Kab. Pemalang | 0,00 | 0,00 | 235,91 | 235,91 |
| 28 | Kab. Tegal | 31,34 | 28,82 | 177,78 | 237,94 |
| 29 | Kab. Brebes | 22,91 | 178,34 | 584,21 | 785,46 |
| 30 | Kota Magelang | 6,41 | 12,80 | 0,00 | 19,21 |
| 31 | Kota Surakarta | 13,23 | 0,00 | 74,05 | 87,27 |
| 32 | Kota Salatiga | 13,91 | 8,85 | 1,10 | 23,86 |
| 33 | Kota Semarang | 103,37 | 77,09 | 150,19 | 330,65 |
| 34 | Kota Pekalongan | 21,97 | 14,35 | 243,76 | 280,08 |
| 35 | Kota Tegal | 6,41 | 0,00 | 99,13 | 105,54 |
| **Jumlah** | | **1087,19** | **1101,02** | **3906,69** | **6094,91** |

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng (Status : Akhir Desember 2022)*

### 2.3.14 Perhubungan.

Untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah yang berdaya saing diperlukan peningkatan kualitas pelayanan transportasi, utamanya : konektivitas jaringan, keselamatan perjalanan dan kualitas layanan angkutan umum.

## 1. Konektivitas Jaringan Transportasi

Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 sebesar 0,30 yang lebih rendah dibandingkan dengan target Rasio Konektivitas Transportasi Nasional di Tahun 2022 sebesar 0,695.

Untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pencapaian Sasaran Utama Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 diperlukan upaya peningkatan komponen penyusun Rasio Konektivitas Provinsi yang terdiri dari : Angkutan darat; Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP); Angkutan Laut dan Angkutan Perkotaan.

### a) Terminal Penumpang

Terminal penumpang di Jawa Tengah pada tahun 2022 sejumlah 221 terminal yang terdiri dari 19 terminal tipe A (kewenangan pusat), 24 terminal tipe B (kewenangan provinsi) dan 178 terminal tipe C (kewenangan kabupaten/kota). Untuk terminal tipe B, pada Terminal Nampurejo di Kabupaten Purworejo dalam proses penghapusan (Revisi SK Gub Nomor 551.22/31 Tahun 2019).

**Tabel 2.66.**

**Perkembangan Jumlah Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah terminal tipe A | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 |
| 2. | Jumlah terminal tipe B | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3. | Jumlah terminal tipe C | 151 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| **Total Terminal di Jawa Tengah** | | **120** | **118** | **219** | **221** | **221** |

*Keterangan:*
- *Sumber Terminal Tipe A = Kementerian Perhubungan,*
- *Sumber Terminal Tipe B = Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah,*
- *Sumber Terminal Tipe C = BAPPEDA Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.*

Jumlah dan persebaran terminal tipe A dan tipe B, jika dibandingkan dengan kebutuhan terminal mendasarkan Dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah masih belum dapat memenuhi kebutuhan. Sampai dengan tahun 2022 masih terdapat kebutuhan pembangunan terminal tipe A di 8 kabupaten/kota dan tipe B di 11 kabupaten/kota.

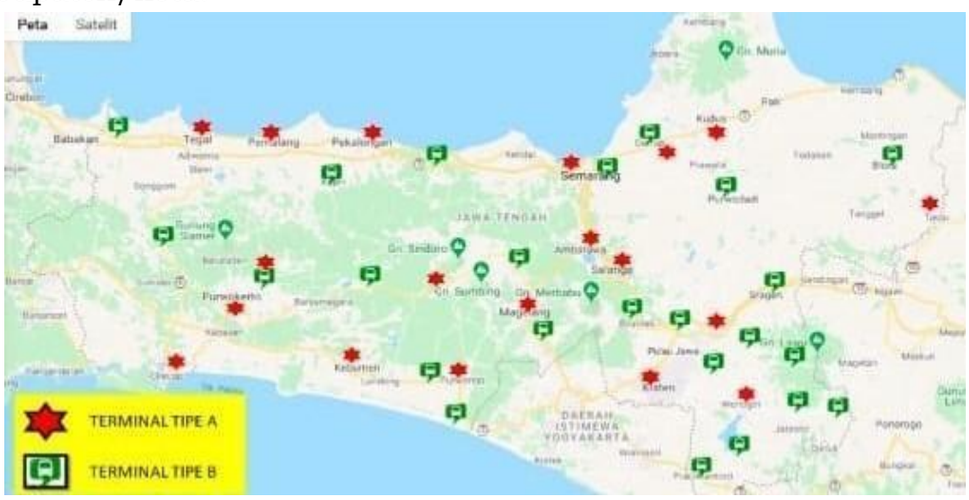


*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 2.43.**

**Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah**

**Tabel 2.67.**
**Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

| No | Kabupaten / Kota | Terminal Tipe A | | Terminal Tipe B | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Eksisting | Revisi RTRW Provinsi | Eksisting | Revisi RTRW Provinsi |
| | **Kedungsepur** | | | | |
| 1 | Kab. Kendal | | | | Ada |
| 2 | Kab. Demak | Demak* | Ada | Bintoro | Ada |
| 3 | Kab. Semarang | Bawen | Ada | | |
| 4 | Kota Semarang | Mangkang | Ada | Penggaron | Ada |
| 5 | Kota Salatiga | Tingkir | Ada | | |
| 6 | Kab. Grobogan | | Ada | Purwodadi | Ada |
| | **Jekutibanglor** | | | | |
| 7 | Kab. Jepara | | Ada | | Ada |
| 8 | Kab. Kudus | Jati | Ada | | |
| 9 | Kab. Pati | | Ada | | Ada |
| 10 | Kab. Rembang | | Ada | | Ada |
| 11 | Kab. Blora | Cepu | Ada | Gagak Rimang | Ada |
| | **Subosukowonosraten** | | | | |
| 12 | Kab. Sukoharjo | | | Kartosuro, Sukoharjo | Ada |
| 13 | Kab. Boyolali | | Ada | Penggung | Ada |
| 14 | Kota Surakarta | Tirtonadi | Ada | | |
| 15 | Kab. Karanganyar | | | Tegalgede, Tawangmangu | Ada |
| 16 | Kab. Wonogiri | Giri Adipura | Ada | Jatisrono, Pracimantoro, Purwantoro, dan Baturetno | Ada |
| 17 | Kab. Sragen | | Ada | Pilangsari | Ada |
| 18 | Kab. Klaten | Ir. Soekarno | Ada | | |
| | **Bregasmalang** | | | | |
| 19 | Kab. Brebes | | | Bumiayu dan Tanjung | Ada |
| 20 | Kab. Tegal | | | | Ada |
| 21 | Kota Tegal | Tegal | Ada | | Ada |
| 22 | Kab. Pemalang | Induk Pemalang | Ada | | Ada |
| | **Petanglong** | | | | |
| 23 | Kab. Pekalongan | | | Kajen | Ada |
| 24 | Kab. Batang | | | Banyuputih | Ada |
| 25 | Kota Pekalongan | Pekalongan | Ada | | |
| | **Barlinmascakeb** | | | | |
| 26 | Kab. Banjarnegara | | Ada | Banjarnegara | Ada |
| 27 | Kab. Purbalingga | Bobotsari | Ada | Purbalingga | Ada |
| 28 | Kab. Banyumas | Purwokerto | Ada | | Ada |
| 29 | Kab. Cilacap | Bangga Bangun Desa | Ada | | Ada |
| 30 | Kab. Kebumen | Kebumen | Ada | | Ada |
| | **Purwomanggung** | | | | |
| 31 | Kab. Purworejo | Purworejo | Ada | Kutoarjo* dan Nampurejo** | Ada |
| 32 | Kab. Wonosobo | Mendolo | Ada | | |
| 33 | Kab. Magelang | | | Drs. Prayitno | Ada |
| 34 | Kota Magelang | Tidar | Ada | | |
| 35 | Kab. Temanggung | | | Madureso | Ada |
| J U M L A H | | 19 Terminal | 26 Terminal | 24 Terminal | 27 Terminal |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, dan Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2022*
*Catatan : * Terminal Kutoarjo proses pembangunan dan ** Terminal Nampurejo proses penghapusan aset.*

Terminal Kutoarjo mulai dibangun pada tahun 2021, dilanjutkan pada tahun 2022-2023 dan masih direncanakan lanjutan pembangunannya di tahun 2024-2026. Adapun Terminal Nampurejo dalam proses penghapusan karena sudah ada pembangunan terminal baru di Kutoarjo. Pada tahun 2022, terdapat 178 buah terminal Tipe C yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hanya Kota Pekalongan dan Kota Tegal yang tidak mempunyai Terminal Tipe C.

**Tabel 2.68.**

**Persebaran Terminal Tipe C di Jawa Tengah Tahun 2022**

| No. | Perwilayahan/ kabupaten/kota | Terminal Tipe C Eksisting | |
|---|---|---|---|
| | | Data Sumber Bappeda Kab./Kota Tahun 2022 | |
| | **KEDUNGSEPUR** | | |
| 1. | Kab. Kendal | 4 | Sukorejo, Boja*, Weleri dan Kendal* (* : SK Bupati Kendal No. 231/211/2008) |
| 2. | Kab. Demak | 2 | Karangawen dan Pucanggading (Mranggen) |
| 3. | Kab. Semarang | 9 | Sisemut Ungaran, Ambarawa, Sumowono, Sruwen Tengaran, Suruh, Pos Terminal Bringin, Pos Terminal Kopeng Getasan, Palbapang dan Bandungan |
| 4. | Kota Semarang | 2 | Cangkiran dan Gunungpati (SK Walikota Semarang No. 551.22/1169 Tahun 2016) |
| 5. | Kota Salatiga | 1 | Tamansari |
| 6. | Kab. Grobogan | 5 | Sulursari, Wirosari, Angkotdes Purwodadi, Godong dan Gubug |
| | **JEKUTIBANGLOR** | | |
| 7. | Kab. Jepara | 5 | Welahan, Pecangaan, Jepara, Bangsri dan Kelet (SK Bupati Jepara No. 551.22/172 Tahun 2016) |
| 8. | Kab. Kudus | 4 | Jetak, Kalirejo, Getas, Singocandi |
| 9. | Kab. Pati | 3 | Kembang Joyo*, Juwana dan Tayu (* : SK Bupati Pati No. 551.22/2174 2016, Juwana dan Tayu belum ada SK) |
| 10. | Kab. Rembang | 7 | Rembang, Lasem, Pamotan, Sarang, Sulang, Sumber dan Gunem (SK Bupati Rembang No. 551.4/0984/2016) |
| 11. | Kab. Blora | 4 | Todanan, Kunduran, Ngawen, dan Wulung |
| | **SUBOSUKO WONOSRATEN** | | |
| 12. | Kab. Sukoharjo | 4 | Sukoharjo, Bekonang, Watukelir dan Tawangsari |
| 13. | Kab. Boyolali | 13 | Karanggede, Guwo, Klewor, Nogosari, Simo, Cepogo, Ampel, Sunggingan, Randuasri, Tambak, Tamansari, Bangak dan Selo |
| 14. | Kota Surakarta | 2 | Kadipiro dan Semanggi |
| 15. | Kab. Karanganyar | 10 | Matesih, Palur, Gondangrejo, Jongke, Jambangan, Jenawi, Ngargoyoso, Karangpandan, Jumapolo dan Jatipuro |
| 16. | Kab. Wonogiri | 18 | Wonogiri, Ngadirojo, Baturetno, Batuwarno, Tirtomoyo, Pracimantoro, Wuryantoro, Eromoko, Giri Belah, Manyaran, Slogohimo, Purwantoro, Bulukerto, Puhpelem, Jatisrono, Jatiroto, Sidoharjo dan Girimarto |
| 17. | Kab. Sragen | 7 | Kragilan, Batujamus, Gondang, Tangen, Pasar Bunder, Sumberlawang dan Gemolong |
| 18. | Kab. Klaten | 7 | Penggung, Cawas, Teloyo, Pasar Klaten, Bendogantungan, Tulung, dan Delanggu |
| | **BREGASMALANG** | | |
| 19. | Kab. Brebes | 7 | Ketanggungan, Brebes, Bumiayu, Jatibarang, Banjarharjo, Larangan dan Losari |
| 20. | Kab. Tegal | 3 | Dukuhsalam, Adiwerna dan Trayeman (SK Bupati Tegal No. 769 Tahun 2017) |
| 21. | Kota Tegal | 0 | Belum ada Terminal Tipe C |
| 22. | Kab. Pemalang | 8 | Belik, Moga, Comal, Randudongkal, Grosir Comal, Angkutan Kota Pemalang, Petarukan dan Warungpring |
| | **PETANGLONG** | | |
| 23. | Kab. Pekalongan | 5 | Wiradesa, Kedungwuni, Doro, Kesesi dan Sragi |
| 24. | Kab. Batang | 5 | Bandar, Bawang, Reban, Limpung, dan Blado |
| 25. | Kota Pekalongan | 0 | Belum ada Terminal Tipe C |
| | **BARLINGMASCAKEB** | | |
| 26. | Kab. Banjarnegara | 4 | Mandiraja, Karangkobar, Kalibening & Banjarnegara (Angkudes) |
| 27. | Kab. Purbalingga | 4 | Bukateja, Kejobong, Jompo, dan Penaruban |

| No. | Perwilayahan/ kabupaten/kota | Terminal Tipe C Eksisting | |
|---|---|---|---|
| | | Data Sumber Bappeda Kab./Kota Tahun 2022 | |
| 28. | Kab. Banyumas | 3 | Wangon*, Ajibarang* dan Baturaden** (*sesuai SK Bupati Banyumas No. 480/324 Tahun 2016), ** : Terminal Baturaden dikelola oleh pariwisata) |
| 29. | Kab. Cilacap | 8 | Karangpucung, Sidareja, Majenang, Kawunganten, Adipala, Sampang, Wanareja dan Kroya (SK Bupati Cilacap No. 551.2/591/17/2015) |
| 30. | Kab. Kebumen | 3 | Kebumen, Gombong (bus dan non bus) dan Karanggayam (Perdesaan) |
| | **PURWOMANGGUNG** | | |
| 31. | Kab. Purworejo | 3 | Kutoarjo, Kongsi dan Terminal non bus Pasar Kutoarjo |
| 32. | Kab. Wonosobo | 4 | Sawangan, Terminal Keselamatan Jalan Reco, Mendolo dan Stasiun (meliputi Pasar Induk/TPR Bhayangkara/Jl. Resimen (SK Bupati Wonosobo No. 551.21/630/2019) |
| 33. | Kab. Magelang | 6 | Borobudur, Salaman, Secang, Grabag, Tegalrejo dan Bandongan |
| 34. | Kota Magelang | 1 | Magersari |
| 35. | Kab. Temanggung | 7 | Maron, Kerkop, Ngadirejo, Candiroto, Kranggan, Pingit dan Plaza |
| | **Jumlah se-JATENG** | **178** | |

*Sumber: Bappeda Kabupaten/Kota se - Jawa Tengah, 2022*

Kondisi terminal Tipe B di Jawa Tengah pada tahun 2022 sebagian besar masih layak operasi. Untuk Terminal Nampurejo Purworejo dalam proses penghapusan dengan mulai beroperasinya Terminal Kutoarjo.

**Tabel 2.69.**

**Kondisi dan Status Aset Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2022**

| No | Kabupaten / Kota | Nama Terminal | Kondisi | Status Aset |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kota Semarang | 1. Penggaron | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 2. | Kab. Grobogan | 2. Purwodadi | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 3. | Kab. Blora | 3. Gagak Rimang | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 4. | Kab. Demak | 4. Bintoro | Tidak dapat dikembangkan | Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik PT. KAI |
| 5. | Kab. Batang | 5. Banyu Putih | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 6. | Kab. Pekalongan | 6. Kajen | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 7. | Kab. Temanggung | 7. Madureso | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 8. | Kab. Magelang | 8. Drs. Prayitno | Layak Operasi | Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik PT. KAI |
| 9. | Kab. Boyolali | 9. Penggung | Layak Operasi | Milik Pemprov (2019) |
| 10. | Kab. Sragen | 10. Pilangsari | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 11. | Kab. Karanganyar | 11. Tegalgede | Layak Operasi | Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Pemkab |
| | | 12. Tawangmangu | Layak Operasi | Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Pemkab |
| 12. | Kab. Wonogiri | 13. Jatisrono | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| | | 14. Baturetno | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| | | 15. Pracimantoro | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| | | 16. Purwantoro | Layak Operasi | Milik Pemprov |

| No | Kabupaten / Kota | Nama Terminal | Kondisi | Status Aset |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Kab. Purworejo | 17. Kutoarjo | Proses Pembangunan | Milik Pemprov (2020) |
| | | 18. Nampurejo | Tidak Layak Operasi | Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Bondo Deso, Proses Penghapusan |
| 14. | Kab. Sukoharjo | 19. Kartosuro | Tidak Layak Operasi | Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Bondo Deso |
| | | 20. Sukoharjo | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 15. | Kab. Banjar | 21. Banjarnegara | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 16. | Kab. Purbalingga | 22. Purbalingga | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 17. | Kab. Brebes | 23. Bumiayu | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| | | 24. Tanjung | Layak Operasi | Milik Pemprov |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Sesuai dengan Sasaran Strategis (Utama) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terminal Penumpang Tipe B tahun 2022 dengan rata-rata nilai 78,25.

Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2022 sebanyak 452.746 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan bus besar dengan jumlah 271.242 kendaraan. Terminal dengan jumlah kendaraan masuk terbanyak ada di terminal Tipe B Purbalingga sebanyak 51.309 kendaraan.

**Tabel 2.70.**

**Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2022**

| No. | Nama Terminal | Kabupaten / Kota | Kendaraan Masuk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bis Besar | Bis Sedang | Bis Kecil | Mobil Penumpang Umum | Jumlah |
| 1 | Penggaron | Kota Semarang | 11.449 | 1.079 | 605 | 1.343 | 14.476 |
| 2 | Purwodadi | Grobogan | 15.166 | 20.423 | - | - | 35.589 |
| 3 | Bintoro | Kab. Demak | 5.194 | 2.609 | 3.100 | - | 10.903 |
| 4 | Gagak Rimang | Kab. Blora | 23.376 | - | - | - | 23.376 |
| 5 | Penggung | Kab. Boyolali | 40.981 | 330 | - | - | 41.311 |
| 6 | Pilangsari | Kab. Sragen | 18.918 | 118 | 2.057 | - | 21.093 |
| 7 | Kartosuro | Sukoharjo | 17.442 | 6.178 | - | - | 23.620 |
| 8 | Sukoharjo | Sukoharjo | 22.631 | 5.227 | - | 2.229 | 30.087 |
| 9 | Tegalgede | Karanganyar | 3.672 | 2.251 | 440 | 3.829 | 10.192 |
| 10 | Tawangmangu | Karanganyar | 8.914 | 4.163 | 2.370 | - | 15.447 |
| 11 | Baturetno | Kab. Wonogiri | 7.990 | - | - | - | 7.990 |
| 12 | Jatisrono | Kab. Wonogiri | 11.969 | - | - | - | 11.969 |
| 13 | Pracimantoro | Kab. Wonogiri | 11.533 | 687 | - | - | 12.220 |
| 14 | Purwantoro | Kab. Wonogiri | 16.499 | - | - | - | 16.499 |
| 15 | Madureso | Temanggung | 12.466 | 10.848 | 1.555 | - | 24.869 |
| 16 | Dr. Prayitno Muntilan | Kab. Magelang | - | - | 6.801 | - | 6.801 |
| 17 | Kutoarjo | Purworejo | - | - | - | - | - |
| 18 | Nampurejo | Purworejo | - | - | - | - | - |
| 19 | Banjarnegara | Banjarnegara | 17.717 | 7.805 | 15.655 | 1.589 | 42.766 |

| No. | Nama Terminal | Kabupaten / Kota | Kendaraan Masuk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bis Besar | Bis Sedang | Bis Kecil | Mobil Penumpang Umum | Jumlah |
| 20 | Purbalingga | Purbalingga | 3.843 | 5.973 | 5.229 | 36.264 | 51.309 |
| 21 | Banyuputih | Batang | 4.777 | 6.611 | 10.327 | - | 21.715 |
| 22 | Kajen | Kab. Pekalongan | 9.161 | 1.335 | 4.271 | - | 14.767 |
| 23 | Tanjung | Brebes | 7.379 | - | 6.427 | - | 13.806 |
| 24 | Bumiayu | Brebes | 165 | 1.712 | 64 | - | 1.941 |
| | JUMLAH | | 271.242 | 77.349 | 58.901 | 45.254 | 452.746 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**b) Trayek Angkutan Umum**

Pelayanan angkutan umum di Jawa Tengah, utamanya angkutan pariwisata pada tahun 2022 sejumlah 2.754 kendaraan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 sejumlah 3.093 kendaraan, selain merupakan lanjutan dampak dari pandemi Covid-19 juga masyarakat lebih berminat menggunakan moda angkutan pribadi.

**Tabel 2.71.**
**Perkembangan Pelayanan Angkutan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah Izin Trayek Antar Kota Antar Provinsi/AKAP (trayek) | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 |
| 2. | Jumlah Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi/AKDP (trayek) | 269 | 269 | 272 | 272 | 272 |
| 3. | Angkutan wisata (kendaraan) | 4.666 | 4.666 | 4.666 | 3.093 | 2.754 |
| 4. | Jumlah bus (unit) | 12.737 | 12.737 | 12.737 | 12.737 | 10.825 |
| 5. | Mobil Penumpang Umum (unit) | 397.667 | 397.667 | 397.667 | 397.667 | 397.667 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Untuk pelayanan angkutan pemadu moda telah ditetapkan jaringan trayek sebagai berikut:

1. Pemadu moda Bandara Ahmad Yani – Kudus PP
2. Pemadu moda Bandara Ahmad Yani – Salatiga PP
3. Pemadu moda Bandara Ahmad Yani – Pekalongan PP
4. Pemadu moda Bandara Adi Sumarmo – Wonogiri PP
5. Pemadu moda Bandara Adi Sumarmo – Sragen PP
6. Pemadu moda Bandara Adi Sumarmo – Terminal Tirtonadi PP

Dari jaringan trayek pemadu moda di atas sampai dengan saat ini baru terlayani 2 (dua) trayek, yaitu Bandara Adi Sumarmo – Terminal Tirtonadi PP dan Bandara Adi Sumarmo - Sragen oleh DAMRI namun saat ini pelayanannya dihentikan sementara.

**c) Halte Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan**

Untuk mendukung konektivitas jaringan transportasi aglomerasi perkotaan diperlukan peningkatan cakupan wilayah yang telah terlayani koridor Trans Jateng. Fasilitas yang mempengaruhi cakupan wilayah adalah pemenuhan jumlah halte yang representatif untuk memudahkan penumpang naik dan turun bus Trans

Jateng. Antara Tahun 2018 – 2022 telah terbangun 280 halte di 6 koridor Trans Jateng. Pada Bulan Agustus 2023 direncanakan mulai beroperasional koridor ke-7 Trans Jateng pada koridor Surakarta – Sukoharjo – Wonogiri, dengan kebutuhan halte sejumlah 122 unit, dimana sejumlah 32 unit sudah tersedia / terbangun karena berhimpitan dan merrupakan fasilitas integrasi dengan layanan angkutan umum perkotaan eksisting di beberapa koridor Batik Solo Trans /BST.

**Tabel 2.72.**
**Jumlah Halte Pelayanan Trans Jateng Tahun 2018 – 2022**

| Koridor Trans Jateng | Inventarisasi Halte | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Kebutuhan | Terbangun | | Belum Terbangun* |
| | | Aset Pemprov | Aset Kab/Kota/Swasta | |
| Kota Semarang – Kabupaten Banyumas (Bawen) | 94 | 40 | 52 | 2 |
| Kabupaten Banyumas (Purwokerto) - Purbalingga | 62 | 60 | 2 | 0 |
| Kota Semarang – Kendal (Weleri) | 53 | 40 | 13 | 0 |
| Kabupaten Magelang – Purworejo (Kutoarjo ) | 49 | 36 | 0 | 13 |
| Surakarta – Sragen (Sumberlawang) | 85 | 17 | 0 | 68 |
| Kota Semarang – Grobogan (Gubug – Godong) | 69 | 20 | 0 | 49 |
| Surakarta – Sukoharjo – Wonogiri (Rencana Operasional Agustus 2023) | 122 | Rencana dibangun mulai 2023 | 32 | 90 |
| **Total** | **534** | **213** | **99** | **222** |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*
*Catatan :* * Halte yang belum terbangun di beberapa tempat sudah dilengkapi rambu bus stop/MMT

**d) Perhubungan Laut**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017, terdapat 14 Pelabuhan di Jawa Tengah yang terdiri dari 1 Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang), 2 Pelabuhan Pengumpul (Tanjung Intan Cilacap, dan Tegal), 8 Pelabuhan Pengumpan Regional (Batang, Kendal, Jepara, Legok Bajak, Karimunjawa, Juwana, Tasik Agung dan Sluke), dan 3 Pelabuhan Lokal (Brebes, Pekalongan dan Pemalang). Secara umum, kondisi Pelabuhan Pengumpul Regional sebagai berikut : Pelabuhan Juwana berada pada alur sungai, Pelabuhan Tasik Agung tidak ada aktivitas karena di dasar kolam terdapat karang hidup. Pelabuhan Batang dan Kendal kedalaman kolam dan alur pelayarannya tidak ideal karena sedimentasi. Pelabuhan Kendal terdapat usulan untuk menjadi satu kesatuan dengan Pelabuhan Tanjung Emas. Untuk Pelabuhan Jepara, Legonbajak, Karimunjawa dan Sluke secara fisik masih dalam kondisi yang cukup baik.

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelabuhan pengumpan regional merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, sampai dengan akhir tahun 2022 proses penlimpahan aset dari Pemerintah Pusat ke Provinsi belum diselesaikan oleh Kementerian Perhubungan.

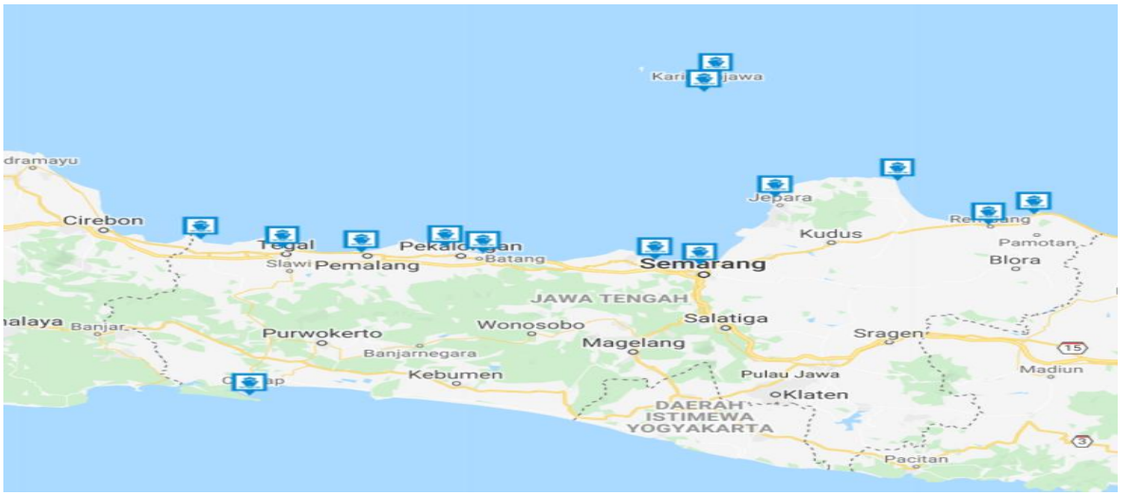


*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 2.44.**
**Sebaran Pelabuhan Laut Strategis di Jawa Tengah**

**Tabel 2.73.**
**Hierarki Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah**

| No. | Pelabuhan | Hierarki dalam RIPN | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Tanjung Emas Semarang | Utama | RTRWN : Pemantapan Pel. Utama |
| 2. | Tanjung Intan Cilacap | Pengumpul | RTRWN : Pemantapan Pel. Pngmpl |
| 3. | Tegal | Pengumpul | |
| 4. | Batang | Pengumpan Regional | RTRWN : Pemantapan Pel. Pngmpl<br>RIPN : Pel. Pengumpul (2027) |
| 5. | Sluke Rembang | Pengumpan Regional | RTRWN : Pemantapan Pel. Pngmpl<br>RIPN : Pel. Pengumpul (2027) |
| 6. | Tasik Agung Rembang | Pengumpan Regional | |
| 7. | Juwana Pati | Pengumpan Regional | RTRWN : Pemantapan Pel. Pngmpl |
| 8. | Jepara | Pengumpan Regional | |
| 9. | Karimunjawa Jepara | Pengumpan Regional | |
| 10. | Legon Bajak Jepara | Pengumpan Regional | |
| 11. | Kendal | Pengumpan Regional | RTRWN : Pel. Angk. Penyeberangn<br>Saat ini = Wil. Ker. Tanjung Emas |
| 12. | Brebes | Pelabuhan Lokal | RIPN : Pel. Pengumpan Reg. (2027) |
| 13. | Pekalongan | Pelabuhan Lokal | RIPN : Pel. Pengumpan Reg. (2027) |
| 14. | Pemalang | Pelabuhan Lokal | RIPN : Pel. Pengumpan Reg. (2027) |

*Sumber : PP 13/2017 tentang Perub. PP 26/2008 tentang RTRWN & SK Menhub. KP.432/2017 tentang RIPN*

Kondisi pelabuhan pengumpan regional di Jawa Tengah secara umum, laju sedimentasi pada kolam labuh dan alur pelayaran sangat tinggi yang memerlukan upaya penanganan berupa normalisasi secara berkala dengan periode 3 – 4 tahun sekali. Jumlah kunjungan kapal tahun 2022 di Pelabuhan Tanjung Emas mencapai 3.537 *call*. Mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021 yang mencapai 3.634 *call*, hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi ekspor-impor.

**Tabel 2.74.**
**Perkembangan Pelayanan Angkutan Laut di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2018 – 2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah pelabuhan | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2 | Pelabuhan Tanjung Emas | | | | | |
| | a. Kunjungan kapal (*call*) | 3.410*) | 3.804 | 2.663 | 3.634 | 3.537 |
| | b. GRT (GT) | 24.902.093*) | 30.236.211 | 22.999.480 | 21.505.841 | 28.396.326 |
| | c. Kargo (ton) | 13.919.940*) | 14.682.120 | 14.185.650 | 4.292.136 | 6.342.781 |
| | d. Kontainer (*Teus*) | 539.158*) | 658.303 | 355.774 | 797.020 | 810.544 |
| | e. Penumpang (orang) | 280.142*) | 390.693 | 134.997 | 182.342 | 341.244 |
| | f. *Dweelling Time* TPKS Impor | 4,5 | 4,91 | 3,84 | 3,93 | 3,65 |
| | g. *Dweelling Time* TPKS Expor | 3,4 | 2,48 | 2,78 | 3,52 | 3,05 |
| 3 | Pelabuhan Tanjung Intan | | | | | |
| | a. Kunjungan kapal (*call*) | 354**) | 1.240 | 1.441 | 1.030 | 150 *) |
| | b. GRT (GT) | 1.971.910**) | 23.713.251 | 28.826.775 | 18.658.236 | 2.355.920 |
| | c. Kargo (ton) | 6.276.236**) | 16.586.884 | 8.524.893 | 7.525.056 | 3.530.857 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Selama tahun 2022 *dwelling time* Pelabuhan Tanjung Emas (sebagai Pelabuhan utama di Jawa Tengah) mencapai 3,65 hari (impor) yang mengalami peningkatan kinerja jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,93 hari. Sedangkan untuk ekspor juga mengalami penurunan kinerja dari 3,52 hari di tahun 2021 menjadi 3,05 hari di tahun 2022.

**e) Aktivitas Penyeberangan**

Pelabuhan penyeberangan yang ada di Jawa Tengah melayani lintas Jepara – Karimunjawa dan Semarang – Karimunjawa. Jumlah penumpang KM. Siginjai pengganti KM. Muria yang melayani lintas Jepara – Karimunjawa pp pada tahun 2022 melayani penumpang sejumlah 98.293 orang yang meningkat dibandingkan tahun 2021 sejumlah 98.173 orang. Sedangkan penumpang KM Bahari Ekspres 1 yang melayani Jepara-Karimunjawa, di tahun 2022 mengalami kenaikan jumlah penumpang menjadi 118.599 orang dibandingkan tahun 2021 sejumlah 112.378 orang.

**Tabel 2.75.**
**Perkembangan Pelayanan ASDP di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2018 – 2022**

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Penumpang KM. Muria (orang)/KMC. Siginjai*) | 75.525 | 75.679 | 72.962 | 98.173 | 98.293 |
| 2. | Penumpang KMC. Kartini I (orang) | 1.796 | 2.725 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Penumpang KMC. Bahari Ekspress 1 (Jepara –Karimunjawa) (orang) | 103.617 | 102.684 | 98.998 | 112.378 | 118.599 |
| 4. | Jumlah penumpang KMC. Bahari Ekspress 2 (Kendal –Karimunjawa) (orang) | off | off | off | off | off |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**f) Perhubungan Udara**

Terdapat 3 bandara komersial yang sudah beroperasi yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang, Adi Sumarmo Boyolali dan JB. Soedirman Purbalingga, serta 3 bandara perintis yang sudah beroperasi yaitu Bandara Dewadaru Karimunjawa Jepara, Tunggul Wulung Cilacap dan Ngloram Blora.

Untuk Bandara Adi Sumarmo Surakarta pada tahun 2020 telah terdapat intermoda transportasi dengan adanya kereta api bandara yang menghubungkan Bandara Adi Sumarmo dengan Stasiun Solo Balapan. Dari Stasiun Solo Balapan sudah terintegrasi langsung dengan *sky bridge* ke Terminal Tipe A Tirtonadi.

Jumlah penumpang di Bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo baik domestik dan internasional tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah barang baik domestik maupun internasional di Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2021.

**Tabel 2.76.**
**Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah bandara | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Bandara Ahmad Yani | | | | | |
| | - Penumpang domestik (orang) | 4.943.701 | 3.678.104 | 1.342.341 | 884.970 | 1.618.109 |
| | - Penumpang internasional (orang) | 216.548 | 228.700 | 35.728 | 9 | 77 |
| | - Barang domestik (kg) | 29.485.686 | 15.788.447 | 9.157.070 | 6.763.331 | 6.222.664 |
| | - Barang internasional (kg) | 2.226.842 | 2.086.421 | 239.699 | 1.212.031 | 3.578.079 |
| 3 | Bandara Adi Soemarmo | | | | | |
| | - Penumpang domestik (orang) | 1.303.570 | 1.565.093 | 516.780 | 427.536 | 839.773 |
| | - Penumpang internasional (orang) | 60.032 | 155.400 | 17.198 | 15 | 33.739 |
| | - Barang domestik (kg) | 7.808.387 | 7.074.726 | 1.596.685 | 1.856.723 | 1.760.287 |
| | - Barang internasional (kg) | 968.226 | 2.982.541 | - | 15.158 | 0 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Sebagai dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Karimunjawa, telah dikembangkan Bandara Dewandaru pada tahun 2019 melalui perpanjangan *runway* dari 1.200 meter menjadi 1.400 meter dan pada Tahun 2022 terdapat perluasan gedung terminal penumpang dengan luas bangunan lantai 1 seluas 980 $m^2$ dan lantai 2 seluas 880 $m^2$ untuk memenuhi kebutuhan jasa angkutan udara terkait dengan kepariwisataan.

*Sumber: Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Dewadaru, 2022*

**Gambar 2.45.**

**Apron, Terminal dan *Runway* Bandara Dewadaru Karimunjawa**

Bandara Tunggul Wulung Cilacap dominan digunakan sebagai sarana pendidikan sekolah penerbangan. *Runway* sepanjang 1.400 meter dengan lebar 30 meter dapat dilandasi oleh pesawat sejenis ATR 72 atau CN 235 (kapasitas 60 – 70 penumpang) atau yang lebih kecil. Kondisi saat ini terutama untuk landas pacu Bandara Tunggul Wulung tidak memungkinkan untuk diperpanjang karena terdapat kendala dilapangan (*obstacle*).

Untuk mendukung pengembangan Jawa Tengah khususnya untuk wilayah timur sedang dilakukan Pengembangan Bandara Ngloram Kabupaten Blora, sampai dengan tahun 2021 sudah terbangun *runway* sepanjang 1.500 meter, landas parkir dan landas hubung, gedung terminal, jalan akses dan fasilitas penunjang lainnya serta mulai operasional pada November 2021. Pada Tahun 2022 Bandara Ngloram kembali diperluas melalui pengadaan lahan yang direncanakan untuk fasilitas keselamatan penerbangan.

*Sumber: Satuan Pelayanan Bandara Ngloram, 2022.*

**Gambar 2.46.**

**Apron dan Terminal Bandara Ngloram Kabupaten Blora**

Untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah masih diperlukan persebaran bandara untuk pemerataan pembangunan. Untuk wilayah tengah dan selatan, karena Bandara Tunggul Wulung Cilacap sulit untuk dikembangkan, maka dilakukan pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman (Wirasaba) di Kabupaten Purbalingga. Di Bandara Jenderal Besar Soedirman Kabupaten Purbalingga telah terbangun *runway* sepanjang 1.600 meter, *apron, taxiway* dan jalan akses.

*Sumber: PT. Angkasa Pura II, 2022*

**Gambar 2.47.**
**Apron dan *Runway* Bandara J.B. Soedirman Purbalingga**

**g) Perkeretaapian**

Total panjang jalur kereta api di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2022, sepanjang 1.680,26 km/sp, terdiri dari 929,50 km/sp jalur rel aktif/operasional (55,32 persen dari total panjang rel), dan 750,757 km jalur rel non aktif/belum operasional (44,68 persen dari total panjang rel). Posisi Jawa Tengah yang sangat strategis karena berada diantara 2 kota besar (Kota Jakarta dan Kota Surabaya), jalur rel di Jawa Tengah sangat padat, sehingga pembangunan rel ganda kereta api (*double track*) pada Lintas Utara dan Lintas Selatan masih diperlukan lanjutan penanganan sampai dengan semua jaringan rel tuntas dengan rel ganda. Dari 929,50 km/sp rel aktif terdiri dari 292,44 km/sp jalur tunggal dan 637,06 km/sp jalur ganda.

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 2.48.**
**Peta Jaringan *Loop* Rel Kereta Api di Jawa Tengah**

**Tabel 2.77.**
**Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Penumpang (orang) | 25.624.133 | 24.638.063 | 8.318.591 | 4.982.954 | 6.434.642 |
| 2. | Barang terangkut (ton) | 1.939.940 | 2.056.546 | 1.902.245 | 2.661.209 | 2.053.983 |
| 3. | Stasiun Kereta (buah) | 140 | 106 | 106 | 115 | 115 |
| 4. | Perlintasan KA (unit) | 1.369 | 1.168 | 1.369 | 1369 | 1369 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Jawa Tengah telah dikembangkan sistem angkutan rel di wilayah perkotaan Solo Raya yaitu pengembangan Kereta Bandara Internasional Adi Soemarmo (KA BIAS) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (mulai operasional Desember 2019). Jaringan KA BIAS menghubungkan Stasiun Bandara Adi Soemarmo dengan Stasiun Solo Balapan (sepanjang 12,77 km) yang direncanakan diperpanjang sampai dengan Stasiun Klaten sepanjang 43,77 km.

**Tabel 2.78.**
**Progres Revitalisasi Jalur Kereta Api Non Aktif di Jawa Tengah**

| No. | Reaktivasi Jalur KA Lintas | Panjang ± (km) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Kedungjati – Tuntang | 32 | FS 2009, MoU & PKS 2013, DED 2014, AMDAL 2015, Tanah 2016, Proses Review DED |
| 2. | Stasiun Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas | 2,9 | FS 2012, MoU 2014, PKS 2015, DED 2015, UKL-UPL 2015, Ijin Lingkungan 2016, Pembebasan lahan sudah selesai dan dalam tahap konstruksi, namun terdapat 8 bidang yang masih perlu ditertibkan untuk aspek keselamatan dan pintu perlintasan |
| 3. | Purwokerto - Wonosobo | 94 | FS 2009, Study Trase 2015, Rekom Gub kesesuaian RTRW 2016, Penetapan Trase 2016, Rencana : 2018 - 2023 |
| 4. | Semarang – Demak – Kudus | 52 | Studi KA Regional Semarang – Demak – Rembang 2006, FS Semarang – Rembang – Bojnegoro 2015, Studi SID APBN 2020 terkena Refocussing dan diusulkan Kembali Tahun 2021. Studi SID APBN 2021. Rencana 2021 – 2030 |
| 5. | Kudus – Pati – Rembang | 60 | Studi KA Regional Semarang – Demak – Rembang 2006, FS Semarang – Rembang – Bojonegoro 2015, Rencana 2021 – 2030 |
| 6. | Bedono – (Secang – Parakan) – Magelang – Yogyakarta :<br>- Magelang – Yogyakarta<br>- Magelang – Secang –Parakan | <br><br>46<br>37 | FS 2013, Kajian Trase Bedono – Secang – Magelang 2014, Rekom Gubernur 2019, Studi Kelayakan Survei Investigasi dan Rancangan Dasar akses jalur kereta 2018, Studi DED APND 2020 terkena Refocussing dan diusulkan Kembali 2022. Rencana 2018 – 2024 |
| 7. | Cepu – Rembang | 72 | Masuk RIPNAS (Belum Ada Persiapan Dokumen) : Rencana 2025 – 2030 |
| 8. | Purwosari – Wonogiri - Baturetno | 82 | Masuk RIPNAS (Belum Ada Persiapan Dokumen) : Rencana 2025 – 2030 |
| 9. | Wonosobo – Magelang | 29,6 | Belum Ada Persiapan Dokumen |
| Total Panjang | | 507,5 | |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

## 2. Keselamatan Perjalanan Transportasi

Keselamatan perjalanan transportasi diukur dengan Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi (dalam 1 Juta Keberangkatan), dimana capaian Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 sebesar 16,91 yang lebih baik jika dibandingkan dengan target ditingkat Nasional pada Tahun 2022 sebesar 28,85.

Untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pencapaian Sasaran Utama Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 diperlukan upaya peningkatan kinerja komponen yang mempengaruhi Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi yang diantaranya meliputi : Pemasangan fasilitas keselamatan jalan, Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK); Pelaksanaan *ramp check*; Peningkatan jumlah kendaraan laik jalan; Penanganan perlintasan sebidang dan Pemenuhan fasilitas penyeberangan sungai.

**a) Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan**

Jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2018-2022, rata-rata korban jiwa setiap tahunnya sebesar ±4.000 jiwa dimana rata-rata per hari terdapat 11 orang yang meninggal dunia di jalan. Indeks Fatalitas Kecelakaan Per 100.000 Penduduk pada Tahun 2022 sebesar 11,91, yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Mempertimbangkan hal tersebut peningkatan keselamatan dijalan harus dijadikan sebagai salah satu prioritas penanganan yang dilakukan secara komprehensif. Adapun selengkapnya data terkait tingkat fatalitas kecelakaan di Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut

**Tabel 2.79.**
**Tingkat Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas di Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

| Tahun | Jumlah Kematian (Jiwa) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Indeks Fatalitas Per 100.000 Penduduk |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4.116 | 34.490.835 | 11,93 |
| 2019 | 4.215 | 34.718.204 | 12,14 |
| 2020 | 3.508 | 36.516.035 | 9,61 |
| 2021 | 3.750 | 36.742.501 | 10,21 |
| 2022 | 4.409 | 37.032.410 | 11,91 |

*Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Data kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah pada tahun 2022 terdapat 30.730 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban 4.409 jiwa meninggal dunia, 77 orang luka berat, 35.869 orang luka ringan dan jumlah kerugian materiil Rp. 24.819.905.000,-.

**Tabel 2.80.**
**Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

| No. | Uraian | Satuan | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah Laka | Kejadian | 19.016 | 25.962 | 21.396 | 22.521 | 30.730 |
| 2. | Jumlah Korban MD | Jiwa | 4.116 | 4.141 | 3.508 | 3.750 | 4.409 |
| 3. | Korban Luka Berat | Orang | 97 | 96 | 48 | 77 | 77 |
| 4. | Korban Luka Ringan | Orang | 21.679 | 30.555 | 24.495 | 25.847 | 35.869 |
| 5. | Kerugian Materiil | Rupiah (Rp.000) | 14.138.632 | 17.858.087 | 14.746.525 | 16.836.435 | 24.819.905.000 |

*Sumber: Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, 2022*

Pada tahun 2022, dari 52.817 kendaraan yang terlibat kecelakaan sebesar 0,55 persen atau 290 kendaraan merupakan mobil bus (AKAP, AKDP, Angkutan Kota/Pedesaan, Pariwisata).

**b) Perlengkapan Jalan (Fasilitas Keselamatan) di Ruas Kewenangan Provinsi**

Tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan kewenangan provinsi pada tahun 2022 mencapai 30,03 persen, selalu terdapat peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang kereta api pada tahun 2022 sebesar 17,88 persen yang juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

**Tabel 2.81.**
**Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang dan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang di Perlintasan Sebidang KA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Persentase fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, RPPJ, Marka, Guard-rail, LPJU, APILL, WL, Deliniator, Cermin Tikung, dan ATCS) terpasang (%) | 7,74 | 12,18 | 16,93 | 25,06 | 30,03 |
| 2. | Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api (%) | 3,85 | 4,55 | 4,55 | 9,09 | 17,88 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Tabel 2.82.**
**Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Rambu Jalan | Buah | 375 | 600 | - | 478 | 245 |
| 2. | RPPJ | Buah | 50 | 60 | - | 46 | - |
| 3. | APILL | Unit | 8 | 6 | - | 2 | - |
| 4. | *Guardrail* | Beam | 448 | 290 | 30 | 176 | 31 |
| 5. | Marka Jalan | m’ | 12.001 | 102.000 | - | 52.444 | 73.976 |
| 6. | LPJU | Unit | 263 | 513 | 150 | 174 | 355 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

### c) Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK)

Di ruas jalan kewenangan provinsi, pada Tahun 2022 masih terdapat 86 titik ruas jalan yang termasuk kategori Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang masih belum tertangani.

**Tabel 2.83.**
**Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di Ruas Jalan Provinsi yang Belum Tertangani Tahun 2022**

| No. | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan (BPSPP) | DRK (Lokasi) | % |
|---|---|---|---|
| 1. | BPSPP Wilayah I Kelas A (Wilayah Semarang) | 18 | 20,93 |
| 2. | BPSPP Wilayah II Kelas B (Wilayah Pati) | 16 | 18,60 |
| 3. | BPSPP Wilayah III Kelas A (Wilayah Surakarta) | 9 | 10,47 |
| 4. | BPSPP Wilayah IV Kelas A (Wilayah Magelang) | 14 | 16,28 |
| 5. | BPSPP Wilayah V Kelas B (Wilayah Banyumas) | 4 | 4,65 |
| 6. | BPSPP Wilayah VI Kelas A (Wilayah Pekalongan) | 25 | 29,07 |
| **Jumlah** | | **86** | **100%** |

*Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

### d) Kendaraan Laik Jalan

Untuk meningkatkan keselamatan transportasi diperlukan peningkatan jumlah kendaraan yang laik jalan. Uji laik jalan merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Adapun kewenangan Pemerintah Provinsi pada pelaksanaan pembinaan kepada Kabupaten/Kota. Semakin banyak Kendaraan

Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji sebagai salah satu indikator penting terwujudnya keselamatan di jalan.

**Tabel 2.84.**
**Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Tahun 2022**

| No. | Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) | KBWU Yang Diuji | KBWU Yang Lulus Uji | KBWU Yang Tidak Lulus Uji |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kota Semarang | 65.138 | 65.138 | 0 |
| 2. | Kab. Semarang | 16.360 | 16.101 | 269 |
| 3. | Kota Salatiga | 5.649 | 4.929 | 720 |
| 4. | Kab. Demak | 11.403 | 10.861 | 544 |
| 5. | Kab. Grobogan | 10.082 | 10.082 | 0 |
| 6. | Kab. Kendal | 8.133 | 8.038 | 95 |
| 7. | Kab. Batang | 7.520 | 7.474 | 45 |
| 8. | Kab. Pekalongan | 6.106 | 6.048 | 75 |
| 9. | Kota Pekalongan | 7.019 | 6.963 | 53 |
| 10. | Kota Tegal | 6.421 | 6.421 | 87 |
| 11. | Kab. Tegal | 18.131 | 17.876 | 255 |
| 12. | Kab. Pemalang | 11.889 | 11.554 | 0 |
| 13. | Kab. Brebes (Pagojengan) | 4.002 | 3.996 | 6 |
| 14. | Kab. Brebes (Kluwut) | 12.736 | 12.732 | 4 |
| 15. | kab. Boyolali | 7.514 | 7.223 | 291 |
| 16. | Kota Surakarta | 23.549 | 23.534 | 15 |
| 17. | Kab. Sukoharjo | 12.864 | 12.549 | 315 |
| 18. | Kab. Wonogiri | 12.082 | 12.014 | 68 |
| 19. | Kab. Klaten | 15.015 | 14.209 | 811 |
| 20. | Kab. Sragen | 12.136 | 12.122 | 14 |
| 21. | Kab. Karanganyar | 13.785 | 13.738 | 44 |
| 22. | Kab. Kudus | 9.730 | 9.715 | 15 |
| 23. | Kab. Pati | 9.599 | 9.555 | 44 |
| 24. | Kab. Rembang | 8.663 | 8.494 | 169 |
| 25. | Kab. Blora | 3.392 | 3.392 | 0 |
| 26. | Kab. Jepara | 16.111 | 15.528 | 583 |
| 27. | Kota Magelang | 7.244 | 6.449 | 795 |
| 28. | Kab. Magelang | 19.156 | 19.156 | 0 |
| 29. | Kab. Kebumen | 8.060 | 8.060 | 0 |
| 30. | Kab. Purworejo | 5.554 | 5.267 | 287 |
| 31. | Kab. Temanggung | 8.266 | 8.085 | 181 |
| 32. | Kab. Wonosobo | 11.098 | 10.286 | 812 |
| 33. | Kab. Banyumas | 13.886 | 11.606 | 2.267 |
| 34. | Kab. Cilacap (Majenang) | 1.045 | 1.045 | 0 |
| 35. | Kab. Cilacap | 11.951 | 11.776 | 175 |
| 36. | Kab. Purbalingga | 12.455 | 11.933 | 522 |
| 37. | Kab. Banjarnegara | 12.914 | 12.914 | 0 |
| **Jumlah** | | **446.658** | **436.863** | **9.561** |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

**e) Ramp Check di Terminal Tipe B Jawa Tengah**

*Ramp check* bertujuan untuk meningkatkan kendaraan yang berkeselamatan. Sesuai dengan kewenangannya pelaksanaan *ramp check* dilakukan pada 23 Terminal Tipe B. Selama tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan pada 37.564 kendaraan dengan hasil 28.559 kendaraan tidak

terdapat pelanggaran dan 9.005 kendaraan melakukan pelanggaran yang didominasi pelanggaran administrasi.

**Tabel 2.85.**

**Pelaksanaan *Ramp Check* di Terminal Tipe B Jawa Tengah Tahun 2022**

| Uraian | Jumlah Kendaraan | | | Pelanggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Diperiksa | Tidak Melanggar | Melanggar | Adminis-trasi | Opera-sional | Teknis |
| Ramp Check di Terminal Tipe B | 37.564 | 28.559 | 9.005 | 8.353 | 0 | 2.000 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Jawa Tengah, 2022*

**f) Perlintasan Jalur Kereta Api dengan Jalan**

Di Jawa Tengah terdapat 1.369 titik perlintasan jalur kereta api dengan jalan, sebagian besar terdapat di jalan kewenangan kabupaten/kota sebesar 1.303 titik atau 95,18 persen dari total perlintasan. Kondisi perlintasan terdiri dari 109 perlintasan tidak sebidang (terdiri dari 24 *fly over* dan 85 *underpass*) dan 1.261 sebidang (326 berpalang pintu/dijaga dan 887 belum dilengkapi dengan palang pintu). Perlintasan sebidang yang terletak di perkotaan yang lalu lintasnya cukup tinggi berpotensi berkontribusi menyebabkan kemacetan. Perlintasan yang belum dilengkapi dengan palang pintu berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu-lintas.

**Tabel 2.86.**

**Perlintasan Rel Kereta Api di Jawa Tengah Tahun 2022**

| No | Status Jalan | Jumlah Perlintasan Dengan Rel Kereta Api | | Perlintasan Tidak Sebidang | | | | Perlintasan Sebidang | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Fly Over* | | *Underpass* | | Berpalang Pintu & Dijaga | | Tidak Ada Palang Pintu | |
| | | Jmlh | % | Jmlh | % | Jmlh | % | Jmlh | % | Jmlh | % |
| 1. | Nasional | 39 | 2,85 | 10 | 41,67 | 6 | 7,06 | 22 | 5,91 | 1 | 0,11 |
| 2. | Provinsi | 27 | 1,97 | 1 | 4,17 | 1 | 1,18 | 24 | 6,45 | 1 | 0,11 |
| 3. | Kab/Kota | 1.303 | 95,18 | 13 | 54,16 | 78 | 91,76 | 326 | 87,63 | 887 | 99,78 |
| **Jumlah** | | **1.369** | **100** | **24** | **100** | **85** | **100** | **372** | **100** | **889** | **100** |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Khusus untuk jalan yang merupakan kewenangan provinsi, terdapat 27 titik perlintasan dengan jalur rel kereta api yang terdiri dari 25 titik perlintasan sebidang dan 2 titik tidak sebidang yang tersebar di 13 kabupaten/kota yang meliputi 4 Daerah Operasi (DAOP) PT. KAI. Beberapa titik sudah mendesak memerlukan penanganan dengan perlintasan tidak sebidang karena telah menyebabkan kemacetan utamanya pada Kabupaten Grobogan dan Cilacap.

**Tabel 2.87.**

**Perlintasan Rel Kereta Api di Ruas Jalan Provinsi Tahun 2022**

| No | Jalan / Daerah | JPL | KM | Kab / Kota | Kelengkapan |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Perlintasan Sebidang** | | | | |
| | **DAOP 3 Cirebon** | | | | |
| 1. | Ketanggungan - Kersana - Bantarsari | 263 | 264+138 | Kab. Brebes | Berpalang Pintu |
| | **DAOP 4 Semarang** | | | | |
| 2. | Wiradesa - Kajen | 115 | 94+425 | Kab. Pekalongan | Berpalang Pintu |
| 3. | Tegowanu - Tanggung - Kapung | 33 | 23+025 | Kab. Grobogan | Berpalang Pintu |
| 4. | Gubug - Kapung - Kedungjati / Bts Kab. Semarang | 39 | 30+840 | Kab. Grobogan | Berpalang Pintu |

| No | Jalan / Daerah | JPL | KM | Kab / Kota | Kelengkapan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Gubug - Kapung - Kedungjati / Bts Kab. Semarang | 27 | 33+832 | Kab. Grobogan | Berpalang Pintu |
| 6. | Purwodadi - Geyer / Bts Kab. Semarang | 81 | 58+880 | Kab. Grobogan | Berpalang Pintu |
| 7. | Purwodadi - Geyer / Bts Kab. Semarang | 6 | 006+833 | Kab. Grobogan | Berpalang Pintu |
| 8. | Singget / Bts Kab. Grobogan - Doplang - Cepu | 99 | 65+202 | Kab. Blora | Berpalang Pintu |
| 9. | Wirosari - Sulursari - Singget / Bts Kab.Blora | 72 | 42+634 | Kab. Grobogan | Berpalang Pintu |
| 10. | Kuwu - Galeh / Bts Kab. Sragen | 54 | 32+897 | Kab. Grobogan | Berpalang Pintu |
| | **DAOP 5 Purwokerto** | | | | |
| 11. | Buntu - Kroya - Slarang | 409 | 402+292 | Kab. Cilacap | Berpalang Pintu |
| 12. | Menganti - Kesugihan | 2 | 387+325 | Kab. Cilacap | Berpalang Pintu |
| 13. | Menganti - Kesugihan | 464 | 387+966 | Kab. Cilacap | Berpalang Pintu |
| 14. | Sidareja - Cukangleuleus | 441 | 339+819 | Kab. Cilacap | Berpalang Pintu |
| 15. | Sidareja - Cukangleuleus | 446 | 346+950 | Kab. Cilacap | Berpalang Pintu |
| 16. | Sidareja - Cukangleuleus | 446 H | 353+612 | Kab. Cilacap | Tidak Ada Pintu |
| 17. | Kutoarjo - Ketawang | 610 | 479+174 | Kab. Purworejo | Berpalang Pintu |
| | **DAOP 6 Yogyakarta** | | | | |
| 18. | Gemolong / Bts Kab. Grobogan | 123 | 80+144 | Kab. Sragen | Berpalang Pintu |
| 19. | Gemolong / Bts Kab. Grobogan | 138 | 84+703 | Kab. Sragen | Berpalang Pintu |
| 20. | Gemolong - Andong / Bts Kab. Boyolali | 146 | 89+038 | Kab. Sragen | Berpalang Pintu |
| 21. | Sragen - Batujamus/ Bts. Karanganyar | 72 | 233+038 | Kab. Sragen | Berpalang Pintu |
| 22. | Karangwuni / Bts.Prov. Diy | 251 | 130+530 | Kab. Klaten | Berpalang Pintu |
| 23. | Lingkar Timur Sukoharjo | 19 | 14+990 | Kab. Sukoharjo | Berpalang Pintu |
| 24. | Lingkar Timur Sukoharjo | 9 | 10+185 | Kab. Sukoharjo | Berpalang Pintu |
| 25. | Palur - Karanganyar | 108 | 256+761 | Kab.Karanganyar | Berpalang Pintu |
| | **Perlintasan Tidak Sebidang** | | | | |
| 1. | Jl. A. Yani (Surakarta) | - | - | Kota Surakarta | *Underpass* |
| 2. | Semarang – Godong | 15&17 | 13+257 | Kab. Demak | *Fly Over* |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

### g) Fasilitas Penyeberangan Sungai

Sebagai dukungan pencapaian terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), diperlukan peningkatan kondisi dan kinerja angkutan penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi (yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi). Pada tahun 2020 telah dilakukan identifikasi aktivitas penyeberangan sungai di Jawa Tengah, dimana setidaknya terdapat 5 aktivitas penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota. Sehingga setidaknya diperlukan 10 sisi dermaga (plengsengan) untuk meningkatkan keselamatan aktivitas penyeberangan sungai di Jawa Tengah. Pada tahun 2021 sudah ditetapkan trayek lintas penyeberangan dan fasilitasi proses perijinannya.

Sesuai dengan Sasaran Strategis (Utama) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Terwujudnya Konektivitas Nasional dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Rasio Konektivitas Transportasi Nasional, kondisi Rasio Konektivitas Transportasi Laut (Penyeberangan Sungai) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dengan nilai 0,24.

**Tabel 2.88.**
**Aktivitas dan Kondisi Fasilitas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022**

| No | Aktivitas Lintas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota | Sisi Dermaga | Fasilitas Penyeberangan | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dermaga | Lampu Penerangan |
| 1. | Sungai Kalikutho | Desa Lutungmati (Batang) | Non Permanen | Ada (2019) |
| | Kab. Batang – Kab. Kendal | Desa Tegalsari (Kendal) | Non Permanen | Ada (2018) |
| 2. | Sungai Kalkutho | Desa Yosorejo (Batang) | Non Permanen | Ada (2021) |
| | Kab. Batang – Kab. Kendal | Desa Jatipurwo (Kendal) | Non Permanen | Ada (2021) |
| 3. | Sungai Pemali | Desa Tegalwangi (Brebes) | Non Permanen | Ada (2022) |
| | Kab. Brebes – Kab. Tegal | Desa Bojong (Kab. Tegal) | Non Permanen | Ada (2022) |
| 4. | Sungai Kaligangsa | Desa Randusangawetan (Brebes) | Non Permanen | Ada (2019) |
| | Kab. Brebes – Kota Tegal | Desa Kajongan (Kota Tegal) | Non Permanen | Sudah Ada |
| 5. | Sungai Bengawan Solo | Desa Sangkrah (Kota Surakarta) | Non Permanen | Belum Ada |
| | Surakarta – Sukoharjo | Desa Gading (Sukoharjo) | Non Permanen | Belum Ada |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

### 3. Pelayanan Angkutan Umum

Kualitas pelayanan angkutan umum diukur melalui *On Time Performance* (OTP) dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Angkutan Umum. OTP Jawa Tengah (yang diukur pada angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan / Trans Jateng) Tahun 2022 sebesar 82,21, lebih tinggi dibandingkan dengan target OTP Nasional di Tahun 2022 sebesar 78,44. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Angkutan Umum Aglomerasi Perkotaan (Trans Jateng) mendasarkan survei Tahun 2022 mencapai 83,21, lebih rendah jika dibandingkan dengan target Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Angkutan Umum di tingkat Nasional Tahun 2022 sebesar 85,00.

Untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pencapaian Sasaran Utama Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 diperlukan upaya peningkatan kinerja komponen yang mempengaruhi OTP, diantaranya : peningkatan kualitas layanan angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) dan fasilitasi penyediaan angkutan umum pada saat lebaran, natal dan tahun baru.

#### a) Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan

Besaran bangkitan tarikan perjalanan yang membebani jalan di Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk mengetahui pergerakan perjalanan, dimana pergerakan internal didominasi ke pusat – pusat kegiatan seperti Kota Semarang dan Kota Surakarta. Pusat – pusat kegiatan tersebut belum dilayani angkutan umum yang menghubungkan antar wilayah perkotaan. Sehingga kebutuhan untuk pelayanan angkutan umum yang melayani antar wilayah perkotaan sudah menjadi suatu kebutuhan untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan raya.

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 2.49.**
**Distribusi Perjalanan Antar Wilayah Perkotaan Di Jawa Tengah**

Untuk membantu mengatasi kemacetan pada ruas jalan utamanya pada wilayah perkotaan, diperlukan upaya untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Untuk itu, peningkatan layanan angkutan umum penumpang di perkotaan perlu ditingkatkan kenyamanan, kehandalan serta keamanannya. Salah satu upaya yang ditempuh dengan pengembangan transportasi perkotaan pada wilayah aglomerasi.

Angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan di Jawa Tengah dilayani oleh Trans Jateng. Kondisi sampai dengan tahun 2022 telah terdapat pelayanan di 6 (enam) koridor, yaitu Terminal Bawen Kabupaten Semarang – Stasiun Tawang Kota Semarang, Terminal Bulupitu Purwokerto – Terminal Bukateja Purbalingga, Terminal Mangkang Kota Semarang – RTH Weleri Kabupaten Kendal, Terminal Tirtonadi Surakarta – Sumber Lawang Kabupaten Sragen via Sangiran, Stasiun Kutoarjo Purworejo – Terminal Borobudur Kabupaten Magelang dan Terminal Penggaron Kota Semarang - Terminal Gubug Kabupaten Grobogan Via Godong. Pada 22 Agustus 2022 telah diresmikan perpanjangan Trans Jateng Koridor Kota Semarang - Kendal dari semula Terminal Mangkang hanya sampai Terminal Bahurekso diperpanjang sampai RTH Weleri. Hal ini mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kendal. Sehingga dari kebutuhan jumah koridor angkutan aglomerasi sejumlah 14 koridor, pada tahun 2022 masih terdapat kekurangan 8 (delapan) koridor.

**Tabel 2.89.**
**Kebutuhan Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan di Jawa Tengah**

| No. | Wilayah Aglomerasi | Jaringan Trayek |
|---|---|---|
| 1 | KEDUNGSEPUR (Kendal, Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Salatiga, Grobogan) | 1. Semarang – Bawen (Op. 7 Juli 2017) |
| | | 2. Semarang – Kendal (Op. 28 Oktober 2019) |
| | | 3. Semarang – Demak |
| | | 4. Semarang – Purwodadi (Op.13 Oktober 2021) |
| 2 | SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, | 5. Boyolali – Surakarta |
| | | 6. Surakarta – Sragen (Op. 3 September 2020) |

| No. | Wilayah Aglomerasi | Jaringan Trayek |
|---|---|---|
| | Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) | 7. Surakarta – Karanganyar |
| | | 8. Surakarta – Wonogiri |
| | | 9. Sukoharjo – Klaten |
| 3 | BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen) | 10. Purwokerto – Purbalingga (Op. 13 Agus. 2018) |
| | | 11. Purwokerto – Wangon |
| 4 | PURWOMANGGUNG (Purworejo, Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung | 12. Terminal Secang – Muntilan (via Borobudur) |
| | | 13. Terminal Secang – Terminal Parakan |
| | | 14. St. Kutoarjo – Borobudur (Op. 1 Sep. 2020) |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Adanya angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan yang dilayani Trans Jateng memiliki kontribusi riil terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu mendukung peningkatan pengguna moda transportasi umum di perkotaan (target tahun 2030 mencapai 32 persen). Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 Trans Jateng telah melayani total 18.768.235 orang, dengan jumlah penumpang setiap tahun terus mengalami kenaikan dari 724.320 orang di tahun 2017 menjadi 6.506.462 orang di tahun 2022.

**Tabel 2.90.**
**Perkembangan Jumlah Penumpang Moda Transportasi Umum di Perkotaan yang Dilayani Trans Jateng Tahun 2018 – 2022**

| No | Wilayah Pengembangan / Koridor Trans Jateng | Jumlah Penumpang yang Dilayani (Orang) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total 2018-2022 |
| | **Kedungsepur** | | | | | | |
| 1. | Terminal Bawen – Stas. Tawang (Juli 2017) | 1.886.694 | 2.117.390 | 1.051.768 | 1.136.921 | 1.686.921 | 7.882.017 |
| 2. | Terminal Mangkang – T. Bahurekso (Nov. 2019). Diperpanjang ke RTH Weleri (Agustus 2022) | - | 178.943 | 592.411 | 682.477 | 1.235.294 | 2.689.125 |
| 3. | Terminal Penggaron - T. Gubug Via Godong (Okt.2021) | - | - | - | 133.380 | 774.188 | 907.568 |
| | **Barlingmascakeb** | | | | | | |
| 4. | Purwokerto – Purbalingga (Agustus 2018) | 351.896 | 1.141.126 | 613.804 | 673.120 | 1.261.351 | 4.041.297 |
| | **Subosukowonosraten** | | | | | | |
| 5. | Tirtonadi – Sumberlawang via Sangiran (Sept. 2020) | - | - | 55.442 | 327.786 | 676.153 | 1.059.381 |
| | Purwomanggung | | | | | | |
| 6. | Kutoarjo – Borobudur (September 2020) | - | - | 106.124 | 485.848 | 872.555 | 1.464.527 |
| | **Total 6 Koridor** | **2.238.590** | **3.437.459** | **2.421.872** | **3.439.532** | **6.506.462** | **18.043.915** |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Pada tahun 2021, mulai dilakukan survey perhitungan jumlah perpindahan kendaraan pribadi ke moda angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) untuk mengetahui kontribusi Trans Jateng dalam meningatkan jumlah pengguna angkutan umum perkotaan. Hal ini untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Provinsi Jateng dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB) pada indikator pengguna moda transportasi umum di perkotaan.

Selain itu angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan Trans Jateng memiliki kontribusi untuk mendorong perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Sebagaimana hasil survey Kepuasan Masyarakat terdapat perpindahan moda sebesar 46,39% pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebesar 48,16%.

**Tabel 2.91.**
**Persentase Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng Pelayanan Trans Jateng Tahun 2021 – 2022**

| No. | Koridor | Persentase Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng (%) | |
|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 |
| 1. | Semarang-Bawen | 43,79 | 46,06 |
| 2. | Purwokerto-Purbalingga | 59,05 | 52,81 |
| 3. | Semarang-Kendal | 36,94 | 41,21 |
| 4. | Kutoarjo-Borobudur | 43,22 | 47,84 |
| 5. | Solo-Sangiran Via Sumberlawang | 49,28 | 48,16 |
| 6. | Semarang-Gubug Via Godong | - | 56,15 |
| **Persentase Total Perpindahan Kendaraan Pribadi ke Trans Jateng** | | **46,39** | **48,16** |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat (Perpres No. 79 Tahun 2019 dan Perpres No. 109 Tahun 2020) terkait pembangunan kawasan industri di Brebes dan Batang diperlukan kajian kelayakan kebutuhan angkutan umum untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas kawasan industri.

Layanan Trans Jateng berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah. PAD yang dihasilkan dari tiket yang dibayarkan oleh penumpang Trans Jateng dan iklan mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun (diluar masa pandemi 2020 – 2021) seiring dengan peningkatan jumlah penumpang yang menggunakan Trans Jateng. Data secara lengkap sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.92.**
**Rekapitualasi Perbandingan Pendapatan dan Biaya Operasional Layanan Trans Jateng Tahun 2017-2022**

| Tahun | Total Operasional (Rp) | Total Pendapatan (Rp) | Proporsi Pendapatan dan Biaya Operasional (%) | Jumlah Penumpang Terlayani (orang) | Proporsi Biaya Operasional Per Penumpang Terlayani (Rp/penumpang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (3 : 2) x 100 % | 5 | 6 = 3 : 5 |
| 2017 | 9.448.667.000 | 1.958.450.000 | 20,727 | 724.320 | 13.045 |
| 2018 | 28.000.000.000 | 6.621.215.000 | 23,647 | 2.238.590 | 12.508 |
| 2019 | 45.904.608.000 | 11.668.972.500 | 25,420 | 3.437.459 | 13.354 |
| 2020 | 64.111.322.000 | 8.722.194.000 | 13,605 | 2.419.549 | 26.497 |
| 2021 | 90.982.851.000 | 12.549.852.000 | 13,794 | 3.439.532 | 26.452 |
| 2022 | 93.761.160.000 | 22.405.562.336 | 23,685 | 6.506.462 | 14.410 |
| Total | 332.208.608.000 | 63.926.245.836 | 19,183 | 18.765.912 | 17.703 |

*Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Proporsi biaya operasional penumpang terlayani menunjukkan tingkat efektifitas anggaran, semakin kecil proporsi semakin tinggi efektifitas anggaran yang dikeluarkan. Mendasarkan tabel diatas kinerja pelayanan Trans Jateng sudah hampir kembali ke tahun sebelum adanya pandemi (capaian 2022 lebih tinggi dibandingkan capaian 2019).

Manfaat layanan Trans Jateng yang langsung dirasakan oleh masyarakat adalah berkurangnya biaya transportasi, berdasarkan beberapa kajian yang dilaksanakan pada tahun 2022 rata-rata penghematan biaya perjalanan untuk masyarakat katagori umum dan non umum total sebesar Rp. 36.763.473.450,- Penghematan sebesar dimaksud digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain sehingga dapat mendukung peningkatan kesejaterahan.

Bagi pemerintah terdapat penghematan anggaran yang dikeluarkan pada pembelian bahan bakar yang bersubsidi berdasarkan kajian yang dimaksud pada tahun 2022 sebesar Rp.12.825.370.659,-. Penghematan konsumsi bahan bakar selain bermanfaat untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang lain.

Dengan beralihnya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum *(mode shifting)* dapat mengatasi kemacetan lalu lintas, meningkatkan keselamatan dan menghemat biaya peningkatan kapasitas infrastruktur jalan. Mendasarkan kajian tahun 2022 rata-rata *mode shifting* sebesar 46,85% atau sejumlah 3.025.427 penumpang yang berpindah moda.

Adapun selengkapnya rekapitulasi hasil kajian pengukuran kemanfaatan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaaan (Trans Jateng) di 6 koridor, sebagai berikut :

**Tabel 2.93.**
**Rekapitualasi Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022**

| No. | Koridor | Moda Shifting (%) | Penghematan Biaya Perjalanan (Rp/Tahun) | Penghematan Subsidi BBM (Rp/Tahun) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Semarang-Bawen ** | Spd Motor : 46,67 % (787.286 Pnp) | 9.777.310.419 | 3.409.932.620 |
| 2. | Purwokerto-Purbalingga *** | Spd Motor : 53 % (668.516 Pnp) | 6.917.730.328 | 2.702.476.051 |
| 3. | Semarang-Kendal * | Spd Motor : 34 % (420.000 Pnp) | 6.889.393.581 | 1.564.447.351 |
| 4. | Kutoarjo-Borobudur *** | Spd Motor : 53 % (462.454 Pnp) | 5.023.324.483 | 2.225.560.597 |
| 5. | Solo-Sangiran Via Sumberlawang ** | Spd Motor : 46,67 % (315.561 Pnp) | 3.747.843.949 | 1.063.044.788 |
| 6. | Semarang-Gubug Via Godong * | Spd Motor : 48 % (371.610 Pnp) | 4.407.870.689 | 1.859.909.251 |
| **Total Jawa Tengah** | | **3.025.427 pnp** | 36.763.473.450 | 12.825.370.659 |

*Sumber:*
** : Laporan Riset Unggulan Daerah (RUD) Jawa Tengah : Analisa Biaya Perjalanan Penggunan Bus Trans Jateng dalam Mengurangi Biaya Pengeluaran Pengguna, Bappeda Provinis Jawa Tengah 2022*
*** : Laporan Akhir Penelitian Efektifitas dan Kontribusi Layanan Transportasi Trans Jateng Terhadap Tingkat Kemacetan dan Lingkungan Hidup di Jawa Tengah, 2022*
**** : Studi tingkat kemanfaatan layanan Trans Jateng Dishub Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Adapun manfaat layanan Trans Jateng yang dapat dikapitasikan dibandingkan dengan biaya atau anggaran yang dikeluarkan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut

**Tabel 2.94.**
**Rekapitualasi Perbandingan Anggaran Operasional dan Perhitungan Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022**

| Total Biaya Operasional Trans Jateng ( Rp.) | Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022 | | | | Proporsi Anggaran dan Manfaat (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pendapatan Asli Daerah/PAD (Rp.) | Penghematan Biaya Perjalanan (Rp.) | Penghematan Subsidi BBM (Rp.) | Total Nilai Manfaat (Rp) | |
| 93.761.160.000 | 22.405.562.336 | 36.763.473.450 | 12.825.370.659 | 71.994.406.445 | 76,78 |

*Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Beberapa nilai manfaat layanan angkutan agloerasi perkotaan (Trans Jateng) yang lain diantaranya : penurunan kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas, peningkatan kualitas udara, peningkatan keselamatan lalu lintas dan pengendalian inflasi.

**b) Angkutan pada Masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru**

Angkutan pada masa lebaran, natal dan tahun baru merupakan penyelenggaraan / pengelolaan angkutan (disemua moda transportasi) pada masa lalu lintas tinggi pada waktu tertentu (*peak season*). Penyelenggaran ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang bertujuan untuk menciptakan kelancaran lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, dan terkendali. Pada Tahun 2022 pengguna angkutan umum sebanyak 15.477.634 orang pada masa lebaran dan 9.986.033 orang pada masa nataru. Hal ini mengalami lonjakan pada tahun sebelumnya dikarenkan sudah tidak diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

**Tabel 2.95.**
**Jumlah Penumpang (Orang) Pada Masa Angkutan Lebaran dan Nataru**

| No | Jumlah Penumpang | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Lebaran** | **15.551.741** | **16.329.328** | **NA** | **7.851.683** | **24.343.824** |
| a. | Angkutan Umum | 7.790.299 | 8.179.814 | NA | 5.295.715 | 15.477.634 |
| b. | Pribadi | 7.761.442 | 8.149.514 | NA | 2.555.968 | 8.866.190 |
| | | | | | | |
| 2. | **Nataru** | **10.936.166** | **11.482.975** | **NA** | **15.653.528** | **16.978.216** |
| a. | Angkutan Umum | 3.486.134 | 3.660.441 | NA | 11.446.488 | 9.986.033 |
| b. | Pribadi | 7.450.032 | 7.822.534 | NA | 4.207.039 | 6.992.183 |
| **Total** | | **26.487.907** | **27.812.303** | **NA** | **23.505.211** | **41.322.039** |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan dimasa lebaran, natal dan tahun baru lebih banyak yang menggunakan angkutan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Namun, hal ini masih tetap diperlukan peningkatan layanan angkutan umum untuk mengatasi permasalahan yang terkait kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Untuk tahun 2020 tidak ada pendataan pergerakan penumpang pada masa angkutan lebaran, natal dan tahun baru dikarenakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Pelaksanaan Posko Angkutan dilakukan untuk penyekatan/pembatasan pergerakan).

**c) Angkutan Umum *Online***

Mendasarkan Permen Perhubungan No. PM 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permen Perhubungan No. PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi, mengatur penerbitan ijin operasi angkutan sewa khusus/daring (*online*). Pada Tahun 2022 telah diterbitkan 30 Surat Persetujuan Ijin Operasi (SPIO).

**Tabel 2.96.**
**Penerbitan Surat Persetujuan Ijin Operasi (SPIO) Untuk Angkutan Sewa Khusus/Daring (*Online*) Tahun 2018 – 2022**

| No. | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kedungsepur | 77 | 1.196 | 405 | 2 | 16 |
| 2. | Bregasmalang | - | 47 | 28 | - | - |
| 3. | Barlingmascakeb | 12 | 180 | 219 | - | - |
| 4. | Subosukowonosraten | - | 721 | 115 | 2 | 8 |
| 5. | Purwomanggung | - | 76 | 235 | - | - |
| 6. | Petanglong | - | 17 | 26 | - | 6 |
| 7. | Banglor | - | - | - | - | - |
| 8. | Wanarakuti | - | 23 | 2 | - | - |
| JUMLAH | | **89** | **2.237** | **1.030** | **4** | **30** |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

### 2.3.15 Pertambangan

Potensi mineral dan batuan di Jawa Tengah tersebar di 35 kabupaten/kota yang menjadi komoditas utama sebagai bahan konstruksi pembangunan, baik untuk proyek infrastruktur Jawa Tengah maupun Proyek Strategis Nasional yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Perkiraan kebutuhan material untuk Proyek PSN di Jawa Tengah adalah sebesar ± 113 Juta $m^3$. Akan tetapi Jawa Tengah hanya mampu memenuhi ± 31 Juta m3. Potensi mineral dan batuan harus dipetakan dengan detail berdasarkan depositnya sehingga diharapkan penambangan yang dilakukan tidak berdampak besar pada kerusakan lingkungan hidup.

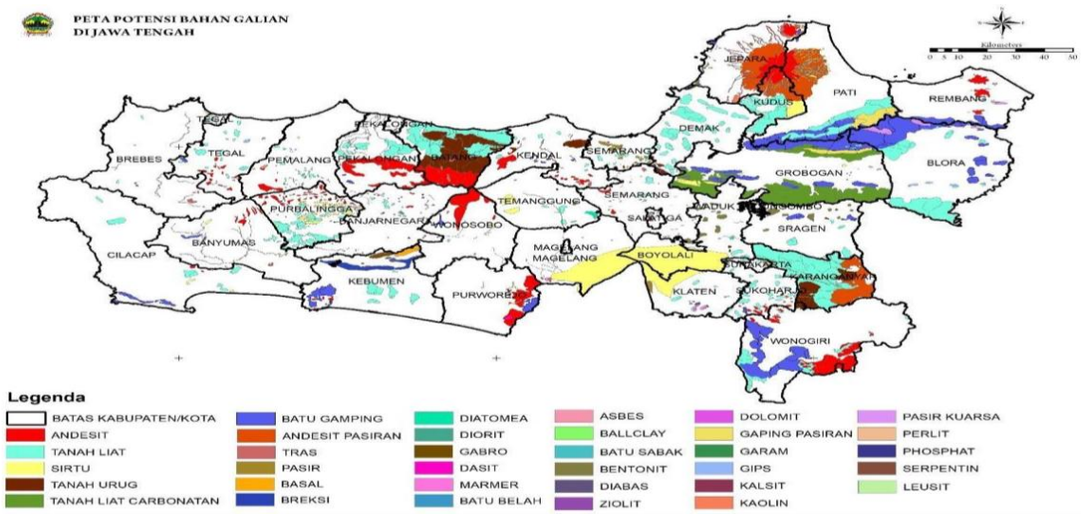


*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2021*

**Gambar 2.50.**
**Peta Potensi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah**

Tantangan yang di hadapi Provinsi Jawa Tengah terkait urusan pertambangan adalah pertambangan ilegal yang keberadaanya hilang dan timbul. Hilang setelah dilakukan penertiban tetapi muncul lagi di kemudian hari. Aktivitas illegal mining di Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan perkembangan yang fluktuatif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pertambangan melalui penegakan hukum agar fungsi dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga. Berikut kondisi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2018-2022.

**Tabel 2.97.**
**Kondisi PETI di Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Luas PETI (ha) | 489.55 | 133 | 128 | 85,98 | 278,97 |
| Sidak PETI (obyek) | 169 | 114 | 107 | 89 | 160 |
| Proses Hukum (kasus) | 11 | 9 | 8 | 23 | 23 |
| Lokasi di Kab/Kota | 29 | 28 | 26 | 24 | 24 |

*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2022*

Karakter pertambangan tanpa izin bersifat sporadik sehingga luas areanya tidak bisa ditetapkan secara pasti. Pertambangan tanpa izin tidak hanya melanggar peraturan sektor mineral dan batubara. tetapi dapat diduga melanggar sektor lain seperti lingkungan dan tata ruang sehingga penertiban dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang di sektor tersebut, baik instansi provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Tim Satgas Puser Bumi yang terdiri dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menangani penambangan liar. Penertiban pertambangan tanpa izin selain dengan cara penegakan hukum tetapi juga diarahkan pada pemenuhan aspek legalitas sehingga dapat dilakukan penindakan dan pengendalian yang didukung dengan Sistem Pelaporan Usaha Pertambangan (SILUP).

Aktivitas pertambangan sering bersinggungan dengan masalah lingkungan, sehingga perlu dorongan untuk melaksanakan kaidah penambangan yang baik. Kaidah penambangan yang baik artinya penambangan yang menaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai dengan berlandaskan pada efektifitas dan efesiensi, melaksanakan konservasi, memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta ikut serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kaidah penambangan yang baik dapat diukur melalui persentasi Good Mining Practice. Di Jawa Tengah selama kurun waktu 2018 hingga 2022 persentase *Good Mining Practice* mengalami peningkatan dari 54,82 persen tahun 2018 menjadi 89,00 persen tahun 2022. Provinsi Jawa Tengah telah meningkatkan kualitas pengelolaan pertambangan yang berdampak terhadap pengelolaan lingkungan hidup sekitar yang lebih baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.98.**
**Perkembangan *Good Mining Practice* (GMP) di Jawa Tengah**
**Tahun 2016 - 2021**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Total Pemegang IUP | 425 | 360 | 355 | 355 | 309 |
| Jumlah Pemegang IUP yang melaksanakan GMP | 233 | 306 | 302 | 306 | 275 |
| Persentase *Good Mining Practice* (%) | 54,82 | 85,00 | 85,07 | 86,20 | 89,00 |

*Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2021*

Kedepan penilaian *Good Mining Practice* periode 2024 sampai dengan 2026 menggunakan penilaian baru yang lebih detail, yaitu terkait 5 aspek kewajiban diantaranya:

- Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan (K3 Pertambangan)
- Keselamatan Operasi Pertambangan (KO Pertambangan)
- Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklamasi dan pasca tambang
- Upaya konservasi sumberdaya mineral dan batubara
- Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan baik cair, padat, gas, sampai memenuhi baku mutu lingkungan

5 aspek kwajiban kemudian dijabarkan menjadi 15 poin kriteria sebagai berikut :

- Kepala Teknik Tambang
- Tanda Batas WIUP
- Statistik kecelakaan tambang
- Laporan Kegiatan
- Kelengkapan sarana pendukung
- Tenaga teknis
- Pembayaran pajak mineral

- Teknik pertambangan
- Pengolahan lanjutan
- Konservasi bahan tambang
- Keselamatan operasional pertambangan
- Keselamatan dan kesehatan kerja
- Pengelolaan lingkungan hidup
- Program pemberdayaan masyarakat/CSR
- Reklamasi dan pascatambang

### 2.3.16 Pembangunan Ekonomi Masyarakat dan Desa

Pembangunan di desa dilaksanakan dengan konsep Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Untuk memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, dan PDTT dengan gambaran sebagai berikut.

dari data tersebut, pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi status desa sangat tertinggal. Desa dengan status tertinggal berkurang dari 266 pada tahun 2020 menjadi 147 di tahun 2021. Di Tahun 2021 status desa mandiri mengalami peningkatan dari 140 di tahun 2020 menjadi 199 pada tahun 2021. Selanjutnya salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dan desa di Jawa Tengah adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa meliputi BUMDes, Pasar Desa, UP2K-PKK dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa.

**Tabel 2.99.**
**Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah lanjut usia terlantar Tahun 2018-2022**

| No | Jenis Lembaga Ekonomi Desa | Jumlah (unit) s.d. Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | BUMDesa | 2.511 | 4.215 | 5.539 | 6.776 | n/a |
| 2 | Pasar desa | 1.369 | 1.349 | 1.671 | 1.671 | n/a |
| 3 | UED-SP | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | n/a |
| 3 | UP2K-PKK | 22.326 | 22.326 | 22.326 | 22.326 | n/a |

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2017-2021 perkembangan lembaga ekonomi masyarakat khususnya BUMDesa meningkat signifikan dari 2.230 unit di tahun 2017 menjadi 6.776 unit di tahun 2021. Untuk melihat perkembangan BUMDes berdasarkan Klasifikasi pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.100.**
**Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2021**

| NO | KABUPATEN | JML DS | PENILAIAN BUMDES 2021 | | | | | KETERANGAN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DASAR | TUMBUH | BERKEMBANG | MAJU | JUMLAH | *2021 BARU* | *% progress input* | *pertumbuhan BUMDES 2020-2021* |
| 1 | Banjarnegara | 266 | 103 | 67 | 1 | - | 171 | - | 100 | 0,00% |
| 2 | Banyumas | 301 | 120 | 153 | 23 | 3 | 299 | 30 | 100 | 10,03% |
| 3 | Batang | 239 | 132 | 68 | 7 | 1 | 208 | 86 | 100 | 41,35% |
| 4 | Blora | 271 | 131 | 101 | 10 | 3 | 245 | 40 | 100 | 16,33% |
| 5 | Boyolali | 261 | 84 | 96 | 16 | 4 | 200 | 66 | 100 | 33,00% |
| 6 | Brebes | 292 | 116 | 161 | 14 | 1 | 292 | 10 | 100 | 3,42% |
| 7 | Cilacap | 269 | 59 | 179 | 27 | 4 | 269 | 18 | 100 | 6,69% |
| 8 | Demak | 243 | 111 | 67 | 7 | - | 185 | 69 | 100 | 37,30% |
| 9 | Grobogan | 273 | 163 | 99 | 7 | 4 | 273 | 11 | 100 | 4,03% |
| 10 | Jepara | 184 | 81 | 93 | 10 | - | 184 | - | 100 | 0,00% |
| 11 | Karanganyar | 162 | 80 | 65 | 8 | 1 | 154 | 37 | 100 | 24,03% |
| 12 | Kebumen | 449 | 78 | 275 | 44 | 5 | 402 | 13 | 100 | 3,23% |
| 13 | Kendal | 266 | 124 | 91 | 6 | 1 | 222 | 75 | 100 | 33,78% |
| 14 | Klaten | 391 | 157 | 177 | 34 | 12 | 380 | 49 | 100 | 12,89% |
| 15 | Kudus | 123 | 41 | 3 | 1 | - | 45 | 13 | 100 | 28,89% |
| 16 | Magelang | 367 | 137 | 167 | 23 | 6 | 333 | 144 | 100 | 43,24% |
| 17 | Pati | 401 | 222 | 172 | 5 | 2 | 401 | - | 100 | 0,00% |
| 18 | Pekalongan | 272 | 91 | 85 | 8 | 7 | 191 | 56 | 100 | 29,32% |
| 19 | Pemalang | 211 | 106 | 93 | 9 | 3 | 211 | - | 100 | 0,00% |
| 20 | Purbalingga | 224 | 98 | 75 | 25 | 4 | 202 | 49 | 100 | 24,26% |
| 21 | Purworejo | 469 | 152 | 240 | 20 | 5 | 417 | 43 | 100 | 10,31% |
| 22 | Rembang | 287 | 144 | 69 | 8 | 5 | 226 | 90 | 100 | 39,82% |
| 23 | Semarang | 208 | 51 | 107 | 15 | 1 | 174 | 44 | 100 | 25,29% |
| 24 | Sragen | 196 | 110 | 80 | 1 | 1 | 192 | 4 | 100 | 2,08% |
| 25 | Sukoharjo | 150 | 45 | 77 | 3 | - | 125 | 55 | 100 | 44,00% |
| 26 | Tegal | 281 | 63 | 97 | 18 | 4 | 182 | 83 | 100 | 45,60% |
| 27 | Temanggung | 266 | 43 | 150 | 11 | 1 | 205 | - | 100 | 0,00% |
| 28 | Wonogiri | 251 | 97 | 122 | 6 | - | 225 | 80 | 100 | 35,56% |
| 29 | Wonosobo | 236 | 114 | 44 | 3 | 2 | 163 | 72 | 100 | 44,17% |
| | **JUMLAH** | **7.809** | 3.053 | 3.273 | 370 | 80 | **6.776** | **1.237** | 100 | **0,18355608** |

Berdasarkan data Penilaian Klasifikasi BUMDesa, dari 7.809 Desa di Jawa Tengah di tahun 2021 BUMDesa dengan kategori Maju sejumlah 80 unit (1,02 persen) dan kategori berkembang 370 unit (4,73 persen), sedangkan BUMDesa dengan kategori Tumbuh sejumlah 3.273 unit (41,91 persen) dan kategori dasar sejumlah 3.053 unit (39,09 persen). Kondisi tersebut cenderung disebabkan karena sebagian besar pembentukan BUMDesa belum didahului dengan proses identifikasi unit usaha yang sesuai dengan potensi di desa, permodalan yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah serta kurangnya pemahaman kelembagaan BUMDesa, keberpihakan pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDesa masih belum optimal, unit usaha yang dikembangkan belum

melakukan jejaring usaha, produk unggulan belum mampu menembus pasar yang luas, serta kualitas SDM pengelola BUMDesa yang masih kurang.

Pembangunan di desa dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan Berdasarkan data Penilaian Klasifikasi BUMDesa, dari 7.809 Desa di Jawa Tengah di tahun 2021 BUMDesa dengan kategori Maju sejumlah 80 unit (1,02 persen) dan kategori berkembang 370 unit (4,73 persen), sedangkan BUMDesa dengan kategori Tumbuh sejumlah 3.273 unit (41,91 persen) dan kategori dasar sejumlah 3.053 unit (39,09 persen). Kondisi tersebut cenderung disebabkan karena sebagian besar pembentukan BUMDesa belum didahului dengan proses identifikasi unit usaha yang sesuai dengan potensi di desa, permodalan yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah serta kurangnya pemahaman kelembagaan BUMDesa, keberpihakan pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDesa masih belum optimal, unit usaha yang dikembangkan belum melakukan jejaring usaha, produk unggulan belum mampu menembus pasar yang luas, serta kualitas SDM pengelola BUMDesa yang masih kurang.

Pembangunan di desa dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan

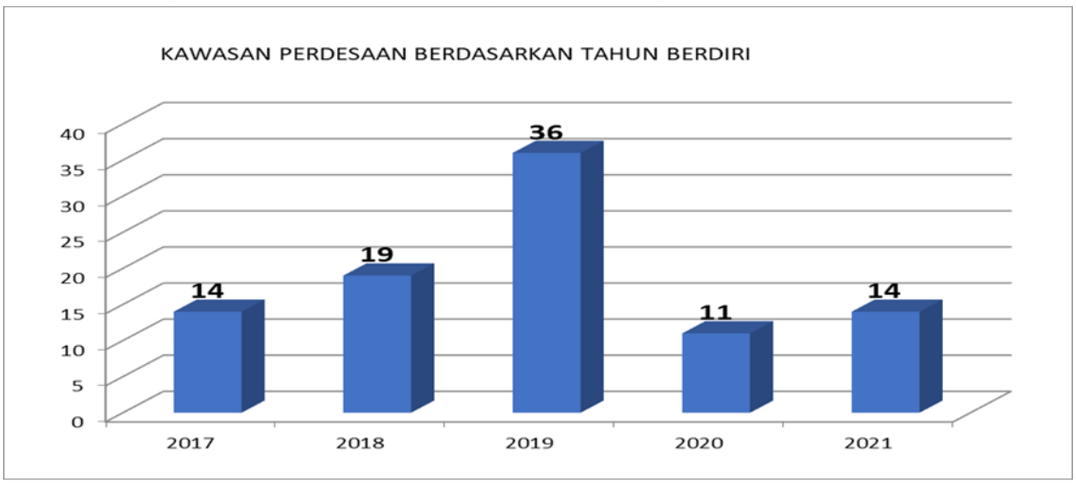


**Gambar 2.51.**

**Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2021**

Walaupun dari sisi kuantitas meningkat, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain 1) Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap regulasi pembangunan kawasan perdesaan; 2) Belum sinerginya pembangunan kawasan perdesaan baik di Provinsi maupun di Kabupaten; serta 3) Masih lemahnya komitmen pelaku dalam pembangunan.

## 2.4. Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia di Jawa Tengah dilakukan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing. Gambaran kinerja hasil pembangunan sumber daya manusia Jawa Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga), dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Pencapaian sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing didukung kinerja berbagai sektor antara lain pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. Gambaran keseluruhan kondisi sumber daya manusia sebagaimana diuraikan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

### 2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), direpresentasikan dalam 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kehidupan layak. Ketiga dimfensi tersebut diukur menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai dimensi pendidikan, Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai dimensi kesehatan serta Pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai dimensi kehidupan layak. Perhitungan IPM menggunakan metode rata-rata geometric, artinya capaian satu komponen IPM tidak dapat digantikan oleh capaian komponen lainnya, sehingga ketiga dimensi IPM yang terdiri dari 4 komponen tersebut memiliki kepentingan yang setara. Capaian IPM Jawa Tengah mengalami peningkatan selama kurun waktu 2018 hingga 2022, namun masih berada di bawah nasional.

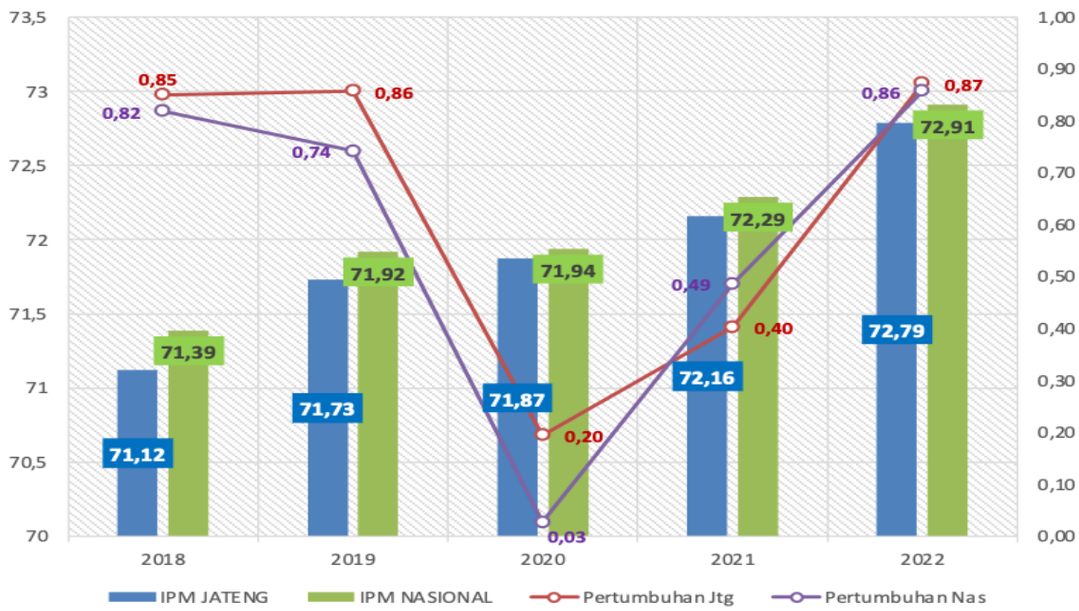


*Sumber: BPS, 2022*

**Gambar 2.52.**
**IPM Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022**

Perkembangan kinerja IPM sempat melambat di tahun 2020 disebabkan pandemi covid-19. Namun secara perlahan mulai bangkit di tahun 2021, bahkan tahun 2022 laju pertumbuhan semakin cepat sebesar 0,87 menyamai dengan saat sebelum terjadi pandemic covid-19. Faktor yang sangat mempengaruhi penurunan laju pertumbuhan IPM di tahun 2020 adalah komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

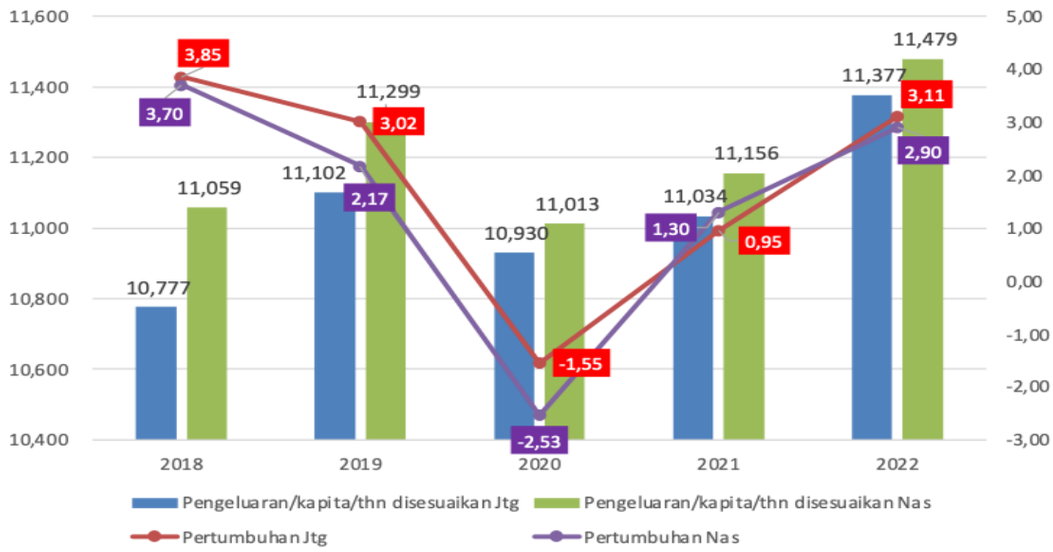


*Sumber: BPS, 2022*

**Gambar 2.53.**
**Pengeluaran/kapita/thn disesuaikan Jateng dan Nasional**
**Tahun 2018-2022**

Namun, pada tahun 2022 percepatan pertumbuhan IPM bukan hanya dipengaruhi oleh komponen pengeluaran per kapita tetapi juga komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat partisipasi pendidikan di suatu wilayah, termasuk untuk mengetahui pemenuhan terhadap Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun. RLS Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 7,93, maknanya rata-rata penduduk Jawa Tengah usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan formal selama 7,93 tahun atau setara kelas VIII (SMP Kelas 2). Upaya untuk meningkatkan RLS, salah satunya dengan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Kinerja RLS Jawa Tengah masih di bawah nasional, namun laju pertumbuhan lebih baik dibandingkan nasional bahkan meningkat signifikan dari 0,78 pada tahun 2021 menjadi 2,32 pada tahun 2022. Peningkatan laju pertumbuhan tersebut mengindikasikan bahwa program-program penanganan ATS yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terutama intervensi melalui pendidikan non formal dan kesetaraan mulai menunjukkan hasil.

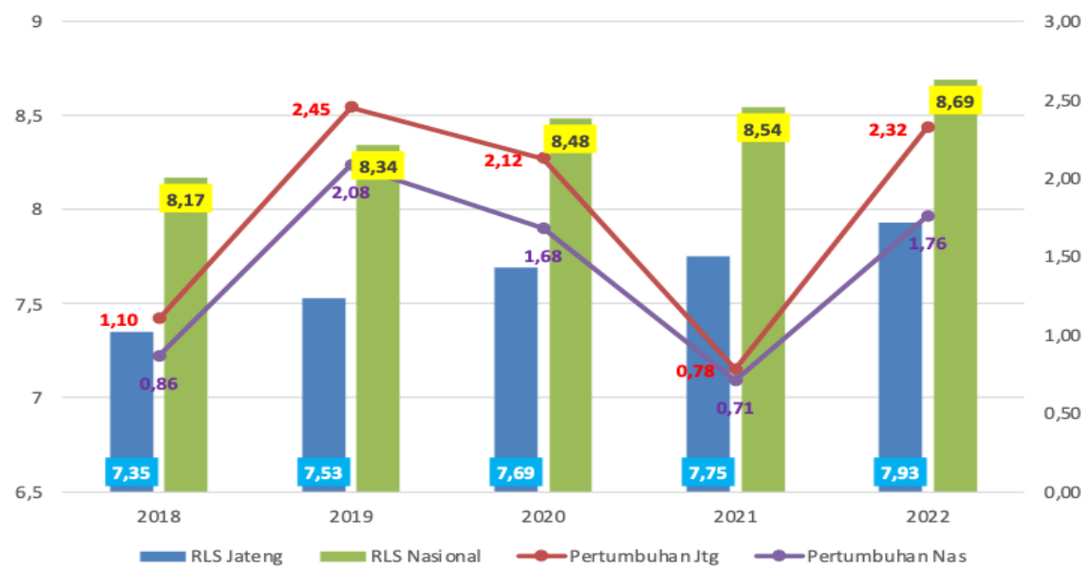


*Sumber: BPS, 2022*

**Gambar 2.54.**
**Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022**

Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan formal di berbagai jenjang antara lain direpresentasikan dalam penyediaan akses pemerataan dan mutu layanan pendidikan. HLS Jawa Tengah sebesar 12,81 pada tahun 2022 artinya bahwa peluang bagi penduduk usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal selama 12,81 tahun atau setara Diploma 1 (D1). Capaian HLS Jawa Tengah masih berada di bawah nasional, dan laju pertumbuhan cenderung melambat dari 0,55 menjadi 0,31 di tahun 2022. Pelambatan ini terjadi antara lain disebabkan peningkatan minat masyarakat terhadap pendidikan non formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), ditunjukkan dari jumlah peserta PKBM yang terus meningkat dari 93.408 siswa di tahun 2019 menjadi 124.646 siswa tahun 2021. Ke depan, nampaknya jalur pendidikan formal bukan satu-satunya pilihan untuk memperoleh akses layanan pendidikan tetapi terdapat juga jalur pendidikan non formal umum maupun keagamaan seperti PKBM dan pondok pesantren. Sehingga pendidikan non formal baik umum maupun keagamaan perlu ditingkatkan kualitasnya, meskipun secara kewenangan berada pada pemerintah kabupaten/kota dan pusat.

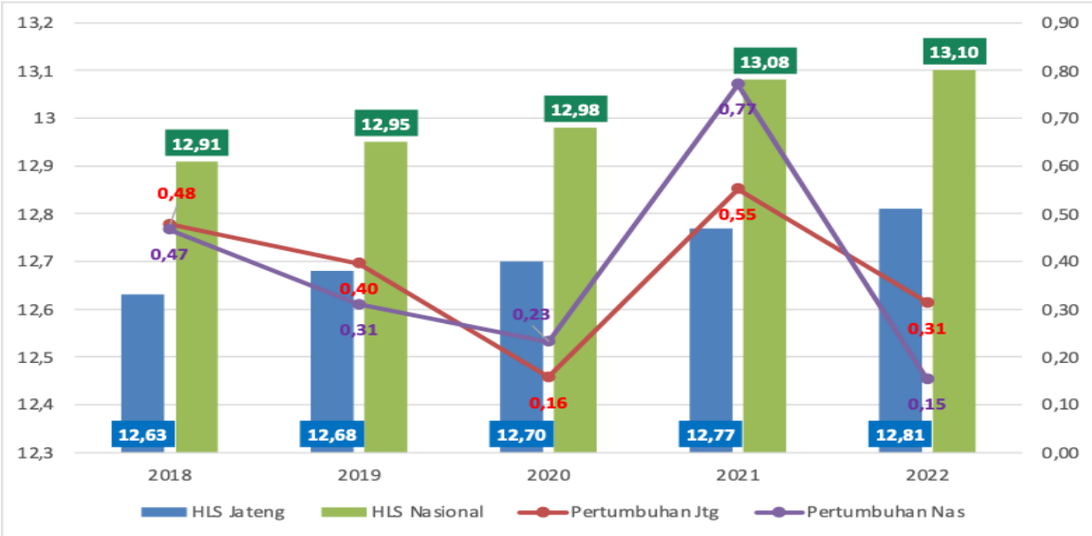


*Sumber: BPS, 2022*

**Gambar 2.55.**
**Harapan Lama Sekolah (HLS) Jateng dan Nasional Tahun 2018 - 2022**

Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH juga dapat digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Capaian UHH Jawa Tengah melampaui nasional, namun laju pertumbuhan Jateng melambat di tahun 2022 sebesar 0,13 dibandingkan nasional yang melesat menjadi 0,39 di tahun 2022.

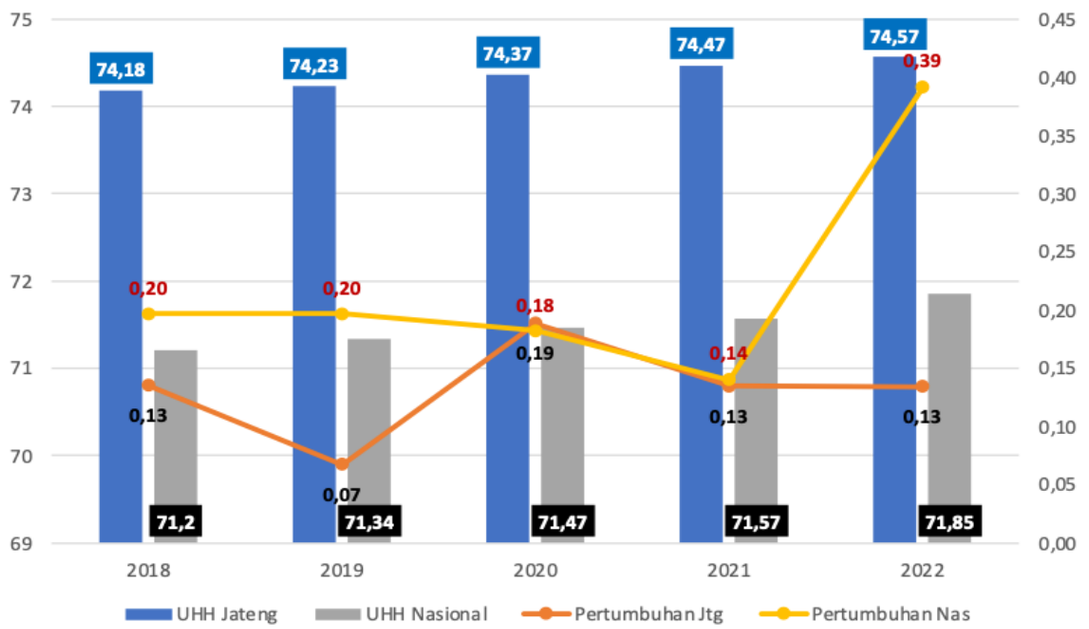


*Sumber: BPS, 2022*

**Gambar 2.56.**
**Usia Harapan Hidup (UHH) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022**

### 2.4.2 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)

Pembangunan keluarga sebagai unit terkecil dan pintu masuk bagi pembangunan SDM menghadapi kondisi yang perlu untuk terus mendapat perhatian. Berdasarkan capaian indek pembangunan keluarga (ibangga) tahun 2021 tercatat Jawa Tengah sebesar 56,1 menurun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 58. Jika dibangikan dengan provinsi tentangg ibangga Jawa Tengah berada diurutan kedua setelah DIY (57,41) dan lebih baik dari Jawa Timur, Banten dan Jabar.

*Sumber: BKKBN*

**Gambar 2.57.**
**Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Tetangga dan Nasional Tahun 2021**

### 2.4.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Ketimpangan gender diukur dari indeks komposit bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

IPG Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2018-2022 berada di atas nasional dan menunjukkan tren kecenderungan yang terus meningkat. Tercatat hanya di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,06 poin dibanding tahun 2018, sementara periode 2020 hingga 2022 terus mengalami peningkatan yaitu dari 92,18 menjadi 92,83. Capaian ini mengindikasikan bahwa proses pembangunan gender yang terus dilakukan di Jawa Tengah kian berdampak positif.

**Tabel 2.101.**
**Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022**

| No | Tahun | IPG Prov Jateng | IPG Nasional |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 91,95 | 90,99 |
| 2 | 2019 | 91,89 | 91,07 |
| 3 | 2020 | 92,18 | 91,06 |
| 4 | 2021 | 92,48 | 91,27 |
| 5 | 2022 | 92,83 | 91,63 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022*

Berdasarkan komponen pembentuk IPG tahun 2022, diketahui bahwa komponen Usia Harapan Hidup (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki. Sedangkan, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, perempuan selalu tertinggal dibandingkan laki-laki. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian kedepan antara lain masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pengeluaran per kapita yang disesuaikan, kurangnya peran serta perempuan khususnya di bidang politik, serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Pada tahun 2022 UHH perempuan di Jawa Tengah telah mencapai 76,53 tahun, sementara laki-laki mencapai 72,71 tahun. Nilai UHH perempuan dan laki-laki setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berarti, indikasi tingkat kesejahteraan dan pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan. Di sisi yang lain, selisih UHH antara perempuan dan laki-laki di Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa kedepannya, fenomena female advantages tidak terjadi di Jawa Tengah. Sementara itu pada angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2022, HLS perempuan adalah 12,99 tahun dan laki-laki sebesar 12,72 tahun. Dengan nilai pencapaian yang relatif hampir sama, mengindikasikan bahwa kesetaraan pembangunan dalam aspek pendidikan dapat diwujudkan secara merata dalam waktu yang tidak lama.

Rata-rata lama sekolah Jawa Tengah tahun 2022 untuk laki-laki sekitar 1 tahun lebih lama dibandingkan perempuan yaitu laki laki adalah sekitar 8,31 tahun, sedangkan perempuan 7,35 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di atas 25 tahun bersekolah hanya sampai tingkat SMP kelas 1. Sedangkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar 10,098 juta rupiah per kapita per tahun, jauh di bawah laki-laki sebesar 15,606 juta rupiah per kapita per tahun. Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki, seperti pada pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, serta angkutan, pergudangan dan komunikasi. Lapangan usaha yang masih didominasi oleh laki-laki tersebut memiliki tingkat produktivitas yang relatif tinggi dibanding lapangan usaha lainnya. Selain itu juga karena perempuan lebih banyak berada pada sektor usaha informal atau nonformal yang terkadang tidak tercatat resmi.

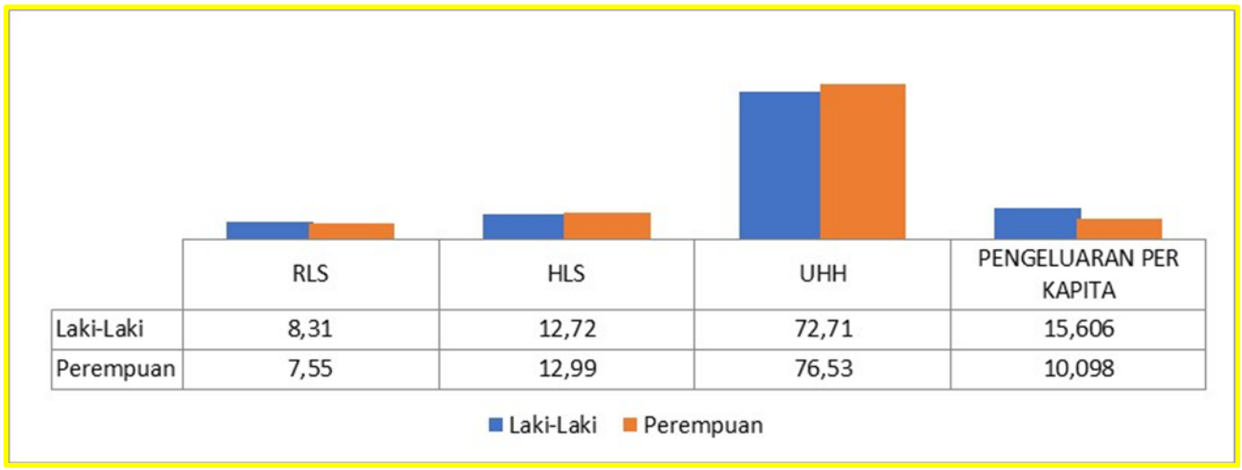


*Sumber: BPS, 2022*

**Gambar 2.58.**
**IPG Provinsi Jawa Tengah Beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2022**

Sebagai upaya peningkatan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Provinsi Jawa Tengah masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Perkembangan IDG Jawa Tengah tahun 2018-2022 cenderung menurun dari 74,03 menjadi 73,78. Tahun 2021, IDG Jawa Tengah mengalami kondisi skor terendah selama periode 2018-2022. Tahun 2022, mengalami perbaikan menjadi sebesar 73,78 atau meningkat sebesar 2,14 point dibanding tahun 2021. Namun, capaian IDG tahun 2022 tersebut masih dibawah nasional yang sebesar 76,59. Kenaikan IDG Jawa Tengah tahun 2022 terutama terjadi karena kenaikan komponen persentase keterlibatan perempuan di parlemen dan persentase perempuan sebagai tenaga profesional.

**Tabel 2.102.**
**Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**
**Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022**

| No | Tahun | IDG Prov Jateng | IDG Nasional |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 74,03 | 72,1 |
| 2 | 2019 | 72,18 | 75,24 |
| 3 | 2020 | 71,73 | 75,57 |
| 4 | 2021 | 71,64 | 76,26 |
| 5 | 2022 | 73,78 | 76,59 |

*Sumber: BPS, 2023*

Persentase keterlibatan perempuan di parlemen meningkat sebesar 1,67 persen dibanding tahun 2021 (18,33 persen) menjadi 20,00 persen di tahun 2022. Kenaikan ini lebih baik dari nasional yang justru mengalami penurunan dari 21,89 di tahun 2021 menjadi 21,74 di tahun 2022. Kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan pembangunan global membutuhkan aksi nyata dalam upaya meraihnya. Perempuan selama ini memiliki capaian lebih rendah dibanding laki-laki serta mengalami berbagai diskriminasi sebagai dampak budaya patriarki. Isu kesetaraan dan keadilan gender diharapkan dapat digaungkan lebih tegas ketika perempuan mampu berpartisipasi dan menduduki jabatan yang strategis dalam parlemen.

Keterlibatan perempuan di lembaga eksekutif diharapkan mampu membawa peluang perubahan bagi pemberdayaan perempuan di Indonesia. Hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah apakah keterwakilan perempuan di parlemen berpengaruh signifikan terhadap disahkannya peraturan-peraturan yang memperjuangkan kesetaraan gender, baik dilevel nasional maupun daerah.

**Tabel 2.103.**

**Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022 (%)**

| No | Tahun | Prov Jateng | Nasional |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 22 | 17,32 |
| 2 | 2019 | 19,17 | 20,52 |
| 3 | 2020 | 18,80 | 21,09 |
| 4 | 2021 | 18,33 | 21,89 |
| 5 | 2022 | 20,00 | 21,74 |

*Sumber: BPS, 2023*

Dilihat dari indikator komposit perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, dan teknisi di Provinsi Jawa Tengah, terjadi pergerakan yang terus meningkat dari 47,57 pada tahun 2018 sampai 50,72 pada tahun 2022. Kondisi tersebut berbeda dengan nasional yang justru mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 1,34% setelah konsisten mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2021.

**Tabel 2.104.**

**Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi di Provinsi Jawa Tengah 2018-2022 (%)**

| No | Tahun | Prov Jateng | Nasional |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 47,57 | 47,02 |
| 2 | 2019 | 49,36 | 47,46 |
| 3 | 2020 | 50,20 | 48,76 |
| 4 | 2021 | 50,67 | 49,99 |
| 5 | 2022 | n/a | n/a |

*Sumber: BPS, 2022*

Lonjakan atas indikator ini dipengaruhi oleh kualitas pendidikan perempuan. Menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 48,83 persen perempuan di perkotaan telah mencapai pendidikan SMA ke atas, sementara di pedesaan baru mencapai 23,93 persen. Capaian ini telah merubah posisi perempuan penganggur menjadi bekerja, karyawan menjadi pekerja profesional. Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi merupakan indikator untuk menghitung kemampuan dalam pengambilan keputusan. Beberapa hal dapat memperkuat peningkatan indikator ini adalah meningkatnya jumlah PNS perempuan serta jumlah PNS yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Terdapat 31,13 persen perempuan yang telah mampu berada di eselon tiga dan dua.

Kesenjangan capaian antara laki-laki dan perempuan di pasar tenaga kerja merupakan fenomena yang umum terjadi terutama di negara-negara berkembang. Perbedaan upah yang diterima menjadi salah satu hal yang paling sering terjadi.

Kesenjangan upah di beberapa sektor di negara-negara Asia bahkan mencapai 40 persen. Kesenjangan dalam upah pada akhirnya berimbas pada munculnya kesenjangan dalam sumbangan pendapatan.

Kesenjangan pendapatan yang diterima tidak terlepas dari perbedaan kualitas pendidikan. Tingkat pendidikan adalah karakteristik terpenting dalam menjelaskan fenomena ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan. Penurunan kesenjangan upah dalam beberapa dekade terakhir terjadi karena peningkatan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja perempuan.

Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan juga dipengaruhi oleh sektor pekerjaan. Menurut data KPPPA di sektor formal, laki-laki menempati porsi sebesar 65,78 persen dan perempuan 34,22 persen. Pada sektor informal laki-laki sebanyak 57,96 persen dan perempuan 42,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pekerja perempuan di sektor informal lebih banyak dibanding di sektor formal. Pekerja informal perempuan lebih banyak ditemukan dalam pekerjaan yang cukup riskan, seperti pekerja domestik serta pekerja rumahan atau pekerja keluarga.

Pekerja perempuan di sektor informal juga berpenghasilan lebih rendah. Banyak risiko yang terjadi dari kecenderungan perempuan untuk bekerja di sektor informal seperti bekerja tanpa proteksi sosial dan hukum, tidak mendapat dana pensiun, tidak mendapatkan cuti, dan tidak mendapatkan asuransi kesehatan. Perempuan yang bekerja di sektor informal juga mendapatkan upah yang relatif rendah serta rentan terhadap keadaan yang tidak aman seperti pelecehan seksual. Meskipun jumlah perempuan bekerja di sektor informal lebih tinggi di bandingkan sektor formal, namun hal lain yang menghambat adalah penghasilan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jenis usaha yang digeluti juga lebih ke arah pekerjaan domestik.

Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Provinsi Jawa Tengah selama kuran waktu 2018-2022 mengalami fluktuatif pada kisaran angka 34 persen. Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 34,29 persen setelah tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen. Tahun 2021 sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja di Jawa Tengah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 34,60 persen dan tahun 2022 turun menjadi 34,59. Kondisi tersebut berbeda dengan nasional dimana dua tahun berturut turut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 turun 0,04 persen dan tahun 2022 turun 0,05 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.105.**

**Kondisi Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Nasional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (%)**

| No | Tahun | Prov Jateng | Nasional |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 34,28 | 36,70 |
| 2 | 2019 | 34,31 | 37,10 |
| 3 | 2020 | 34,29 | 37,26 |
| 4 | 2021 | 34,60 | 37,22 |

*Sumber: BPS, 2023*

### 2.4.4 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kontribusi kebudayaan dalam pembangunan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Namun demikian, pembangunan kebudayaan di Jawa tengah menghadapi tantangan tersendiri, yaitu menurunnya nilai pembangunan kebudayaan yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dalam kurun waktu 2020-2021 sebagai dampak dari pandemi Cov-19. IPK dibentuk melalui 7 dimensi yang memiliki ruang lingkup cukup luas dan bersifat lintas sektor, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.106.**
**Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018 – 2022**

| Dimensi IPK | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ekonomi Budaya | 37,67 | 44,45 | 37,17 | 25,96 | 44,00 |
| Pendidikan | 69,71 | 71,46 | 72,64 | 71,21 | 73,56 |
| Ketahanan Sosial Budaya | 79,57 | 80,30 | 80,97 | 72,37 | 74,02 |
| Warisan Budaya | 55,16 | 51,95 | 45,58 | 50,12 | 52,31 |
| Ekspresi Budaya | 44,70 | 45,45 | 43,69 | 34,79 | 41,59 |
| Budaya Literasi | 51,64 | 56,67 | 59,90 | 50,00 | 53,36 |
| Gender | 60,05 | 58,95 | 58,57 | 58,28 | 58,88 |
| **Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah** | **60,05** | **60,94** | **59,12** | **55,24** | **59,43** |
| **Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional** | **53,74** | **55,91** | **54,65** | **51,9** | **55,13** |

*Sumber: Kemendikbud, 2022*

Capaian IPK Jawa Tengah selama lima tahun terakhir konsisten lebih tinggi dari angka Nasional. Penurunan angka IPK Jawa Tengah selama 2020-2021 didorong oleh penurunan pada 3 dimensi pembentuknya, yaitu dimensi ekonomi budaya, dimensi ekspresi budaya dan dimensi gender.

Kecenderungan penurunan dimensi ekonomi budaya mengindikasikan bahwa minat masyarakat yang menurun untuk menjadikan aktivitas seni budaya sebagai salah satu upaya peningkatan kemampuan ekonomi mereka. Hal tersebut bisa saja terjadi karena "pasar budaya lokal" di Jawa Tengah belum memberikan reward yang menjanjikan untuk para pelaku seni budaya lokal. Selain itu, pengukuran ekonomi kreatif/industri ekonomi kreatif juga belum terukur dalam dimensi ini.

Penurunan dimensi ekspresi budaya menunjukkan indikasi bahwa ada kecenderungan peralihan cara masyarakat untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yaitu melalui media digital. Sementara itu, pengukuran dimensi ekspresi budaya (indikator) masih terbatas pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat, kegiatan organisasi, penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni, dan rumah tangga yang menyelenggarakan/menghadiri acara adat. Pada dimensi ekspresi budaya, penurunan angka didorong oleh menurunnya indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dan persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni.

Hal yang sama juga berlaku bagi dimensi gender. Menurunnya angka dimensi gender didorong oleh penurunan indikator rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki pada dua tahun terakhir (2020-2021). Kinerja dimensi gender selama 2021-2022 konsisten berada di bawah angka

Nasional. Salah satu indikator pembentuk dimensi gender yaitu rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki di Jawa Tengah pada tahun 2022 masih menunjukkan kecenderungan menurun.

Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan sebagai penggerak roda pembangunan berkelanjutan bukan merupakan hal yang baru. Unsur kebudayaan menjadi hal penting yang patut diperhatikan, saat arah pembangunan berkelanjutan saat ini tidak hanya bertumpu pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan semata.

Dengan segala karakteristik penduduknya, keanekaragaman budaya di Jawa Tengah merupakan modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, rancangan kebijakan yang berfokus kepada pengembangan dan pelestarian budaya, sekaligus sebagai *booster* untuk mendorong laju pembangunan perlu dilakukan. Isu-isu sosial budaya yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan mutlak diperlukan untuk peningkatan kualitas hidup manusia sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sehingga perwujudan agenda SDGs (Goals 11.4 Mempromosikan dan Menjaga Warisan Budaya Dunia dan Warisan Alam Dunia) dapat dipetakan dengan baik.

Pemajuan kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan (UU No. 5 Tahun 2017). Upaya tersebut dilakukan untuk memajukan objek pemajuan kebudayaan (OPK) yang meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Data perkembangan OPK yang tersedia di Jawa Tengah dijelaskan dalam Tabel berikut.

**Tabel 2.107.**
**Perkembangan Warisan Budaya Benda (WBB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022**

| Keterangan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022* |
| Warisan Budaya Benda (WBB) | | | | | |
| Museum | 54 | 62 | 62 | n/a | n/a |
| Cagar Budaya (CB) | 397 | 527 | 273 | n/a | n/a |
| Pengelolaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya** | | | | | |
| CB dikelola | 93 | 93 | 93 | 65 | 65 |
| CB dimanfaatkan | 11 | 28 | 33 | 29 | 36 |
| Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) | | | | | |
| Penetapan WBTB | 9 | 9 | 14 | n/a | n/a |

*Sumber: Statistik Kebudayaan Kemdikbud, Laporan Kinerja BPCB Jateng, 2019-2021*
**) data belum tersedia/ belum rilis* ***) Publikasi Laporan Kinerja BPCB Jateng 2021*

**Olahraga**

Olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Olahraga dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah timbulnya berbagai

penyakit. Ada tiga faktor yang berdampak pada partisipasi olahraga, yaitu faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor sosial budaya. Peran olahraga mendukung terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas fisik yang baik. Selain bermanfaat untuk jasmani, olahraga juga berperan dalam pengembangan karakter. Kesadaran masyarakat untuk berolahraga memberikan kontribusi dalam pembangunan individu dan masyarakat yang cerdas, sehat, terampil, tangguh, kompetitif, sejahtera, dan bermartabat.

*Sport Development Index* (SDI) merupakan metode pengukuran keberhasilan pembangunan olahraga di Indonesia. Terdapat 9 dimensi dalam SDI, yaitu ketersediaan SDM olahraga, ruang terbuka, partisipasi, kebugaran jasmani, literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, performa, dan ekonomi.

Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga semakin meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada indeks pembangunan olahraga/*Sport Development Index* (SDI).

Capaian SDI Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan fluktuatif, sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.108.**

**Capaian SDI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2022**

| Tahun | Angka *Sport Development Index* (SDI) Jawa Tengah |
|---|---|
| 2019 | 0,55 |
| 2020 | 0,60 |
| 2021 | 0,34 |
| 2022 | 0,37 |

*Sumber: Laporan Nasional Sport Development Index (SDI) Kemenpora Tahun 2022*

### 2.4.5 Pendidikan

Keberhasilan pencapaian Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun salah satunya ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan. Partisipasi pendidikan digambarkan sebagai jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan merupakan salah satu indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan kecenderungan partisipasi pendidikan semakin turun, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.107.

**Tabel 2.109.**

**Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Provinsi Jawa Tengah (Persen) Tahun 2016 - 2022**

| Tahun | PENDUDUK KELOMPOK UMUR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-12 | | | 13-15 | | | 16-18 | | |
| | Tdk/Blm Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tdk Sekolah Lagi | Tdk/Blm Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tdk Sekolah Lagi | Tdk/Blm Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tdk Sekolah Lagi |
| 2016 | 0,39 | 99,58 | 0,03 | 0,32 | 95,41 | 4,27 | 0,33 | 67,95 | 31,72 |
| 2017 | 0,38 | 99,62 | 0 | 0,42 | 95,48 | 4,1 | 0,48 | 68,48 | 31,04 |
| 2018 | 0,15 | 99,76 | 0 | 0,35 | 95,79 | 3,86 | 0,35 | 69,02 | 30,63 |
| 2019 | 0,05 | 99,77 | 0,18 | 0,11 | 96,11 | 3,78 | 0,49 | 69,65 | 29,86 |
| 2020 | 0,22 | 99,73 | 0,05 | 0,24 | 96,37 | 3,39 | 0,28 | 70,14 | 29,58 |
| 2021 | 0,32 | 99,66 | 0,02 | 0,32 | 96,84 | 2,84 | 0,28 | 70,80 | 28,92 |
| 2022 | 0,31 | 99,58 | 0,11 | 0,27 | 96,77 | 2,97 | 0,29 | 70,82 | 28,89 |

*Sumber: Susenas, BPS (2021)*

Data Susenas BPS memperlihatkan bahwa masih terdapat penduduk usia sekolah tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi, yang kemudian dikategorikan sebagai kelompok Anak Tidak Sekolah (ATS). Hasil olahan terhadap data Susenas mencatat bahwa tahun 2022 jumlah ATS Usia 7-18 tahun di Jawa Tengah sebesar 556.205 jiwa.

**Tabel 2.110.**
**Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021**

| TAHUN | Usia 7-12 th | | Usia 13-15 th | | Usia 16-18 th | | Jumlah ATS Usia 7-18 th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tdk/Blm Pernah Sekolah | Tdk Sekolah Lagi | Tdk/Blm Pernah Sekolah | Tdk Sekolah Lagi | Tdk/Blm Pernah Sekolah | Tdk Sekolah Lagi | |
| **2017** | 12.824 | - | 7.080 | 69.116 | 8.501 | 549.718 | 647.239 |
| **2018** | 5.031 | - | 5.814 | 64.117 | 6.204 | 542.899 | 624.065 |
| **2019** | 1.688 | 6.075 | 1.821 | 62.577 | 8.253 | 502.951 | 583.365 |
| **2020** | 7.909 | 1.798 | 4.046 | 57.157 | 4.816 | 508.724 | 584.449 |
| **2021** | 10.494 | 656 | 5.340 | 47.390 | 4.715 | 486.980 | 555.575 |
| **2022** | 10.128 | 3.594 | 4.481 | 49.292 | 4.857 | 483.853 | 556.205 |

*Sumber: Susenas, BPS, diolah (2021)*

Kondisi ini memperlihatkan perlunya penanganan secara serius terhadap ATS di Jawa Tengah, mengingat penanganan ATS juga merupakan bagian dari upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu pendidikan sepanjang hayat untuk semua. Hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah masih rendahnya partisipasi pendidikan khusus untuk penduduk disabilitas usia 4-18 tahun yang merupakan indikator SPM yaitu sebesar 23,21% pada tahun 2022 (Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud 2023).

Selain partisipasi pendidikan, akses pemerataan layanan pendidikan juga perlu untuk diperhatikan. Akses pemerataan layanan pendidikan yang direpresentasikan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional, meskipun di tahun 2021 mengalami penurunan.

Penyebab penurunan tersebut diindikasikan karena terdapatnya perubahan metode pembelajaran pasca covid-19 yaitu mengoptimalkan pemanfaatan IT untuk pembelajaran *hybrid* (kombinasi daring dan luring).

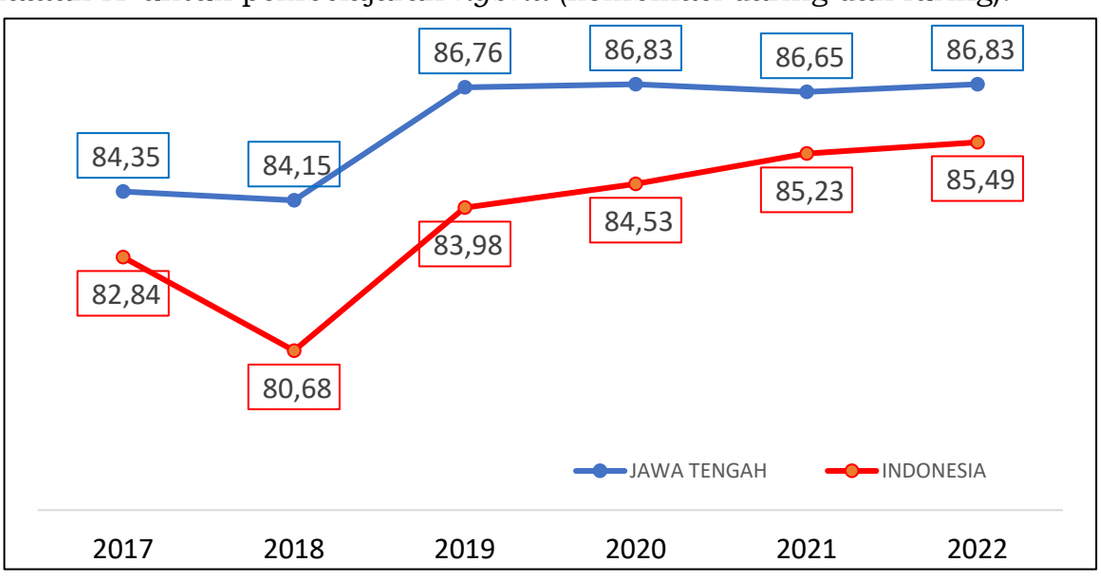


*Sumber: BPS, 2022*

**Gambar 2.59.**
**APK SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022**

Meskipun secara nasional capaian APK SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah lebih baik, namun distribusi akses layanan pendidikan di 35 kab/kota belum merata. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.109, dimana APK SMA/SMK/Sederajat di 35 kabupaten/kota sangat bervariasi dari kisaran 50% hingga di atas 100%. Kondisi ini menunjukkan adanya gap atau kesenjangan yang cukup tinggi antar kabupaten dan kota. Persoalan kesenjangan dan distribusi pemerataan akses layanan pendidikan telah diupayakan untuk diatasi oleh pemerintah, salah satunya melalui zonasi pendidikan. Zonasi dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan, tidak hanya secara distribusi akses namun juga kualitas layanan pendidikan. Zonasi juga dianggap efektif, hal ini terlihat pada tahun 2017 APK SMA/SMK/Sederajat di atas 100% didominasi wilayah kota, namun rentang 2018 hingga 2021 terjadi pergeseran khususnya untuk Kota Magelang dan Kota Surakarta. Melalui zonasi ini diharapkan wilayah kota bukan satu-satunya tempat dan tujuan favorit untuk menempuh pendidikan.

**Tabel 2.111.**

**Sebaran APK SMA/SMK/Sederajat di Jawa Tengah Tahun 2017-2021**

| KABUPATEN/KOTA | APK SMA/SMK/Sederajat | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **PROVINSI JAWA TENGAH** | **84,35** | **84,15** | **86,76** | **86,83** | **86,65** |
| Kabupaten Cilacap | 87,28 | 95,83 | 91,42 | 91,73 | 91,5 |
| Kabupaten Banyumas | 85,43 | 89,77 | 101,68 | 100,42 | 108,66 |
| Kabupaten Purbalingga | 72,83 | 68,08 | 71,56 | 71,28 | 69,89 |
| Kabupaten Banjarnegara | 66,77 | 74,98 | 71,9 | 71,37 | 70,02 |
| Kabupaten Kebumen | 104,89 | 95,1 | 104,39 | 103,71 | 102,46 |
| Kabupaten Purworejo | 102,81 | 95,04 | 92,67 | 93,63 | 95,57 |
| Kabupaten Wonosobo | 52,98 | 54,8 | 55,2 | 56,29 | 57,43 |
| Kabupaten Magelang | 75,56 | 69,59 | 70,56 | 70,13 | 67,7 |
| Kabupaten Boyolali | 77,45 | 78,46 | 81,37 | 80,4 | 79,36 |
| Kabupaten Klaten | 100,58 | 104,48 | 109,2 | 108,59 | 106,85 |
| Kabupaten Sukoharjo | 96,11 | 92,74 | 81,17 | 83,41 | 84,16 |
| Kabupaten Wonogiri | 86,58 | 83,48 | 90,45 | 92,36 | 90,3 |
| Kabupaten Karanganyar | 83,11 | 75,74 | 77,28 | 78,2 | 75,34 |
| Kabupaten Sragen | 106,49 | 100,86 | 114,62 | 110,98 | 108,05 |
| Kabupaten Grobogan | 81,28 | 85,26 | 93,21 | 93,6 | 92,47 |
| Kabupaten Blora | 84,82 | 94,12 | 86,39 | 87,3 | 85,16 |
| Kabupaten Rembang | 72,05 | 71,12 | 72,99 | 74,53 | 71,94 |
| Kabupaten Pati | 91,14 | 89,84 | 101,67 | 101,34 | 102,6 |
| Kabupaten Kudus | 93,35 | 91,66 | 91,45 | 90,1 | 92,16 |
| Kabupaten Jepara | 87,05 | 85,55 | 87,65 | 88 | 90,31 |
| Kabupaten Demak | 91,7 | 110,29 | 106,41 | 102,7 | 100,07 |
| Kabupaten Semarang | 78,21 | 66,93 | 78,44 | 78,77 | 80,91 |
| Kabupaten Temanggung | 70,09 | 71,31 | 77,34 | 77,59 | 75,27 |
| Kabupaten Kendal | 87,1 | 106,43 | 105,77 | 103,73 | 106,32 |
| Kabupaten Batang | 73,93 | 62,13 | 67,57 | 69,78 | 72,27 |
| Kabupaten Pekalongan | 55,13 | 60,36 | 61,24 | 64,22 | 62,3 |
| Kabupaten Pemalang | 71,38 | 69,9 | 75,14 | 74,18 | 72,03 |
| Kabupaten Tegal | 75,44 | 81,13 | 81 | 80,26 | 78,78 |
| Kabupaten Brebes | 76,51 | 69,29 | 68,96 | 70,34 | 73,73 |
| Kota Magelang | 107,24 | 91,97 | 89,74 | 90,07 | 88,16 |
| Kota Surakarta | 103,55 | 80,85 | 77,92 | 81,43 | 79,62 |
| Kota Salatiga | 109,61 | 120,18 | 121,91 | 119,1 | 118,12 |
| Kota Semarang | 107,82 | 103,54 | 106,63 | 104,6 | 105,01 |
| Kota Pekalongan | 92,04 | 74,41 | 74,92 | 78,66 | 76,12 |
| Kota Tegal | 87,08 | 79,7 | 83,2 | 82,32 | 84,39 |

*Sumber:BPS,2022*

Selain akses pemerataan layanan pendidikan, mutu pendidikan juga masih menjadi persoalan di Jawa Tengah. Mutu pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan itu sendiri. Relevansi pendidikan, kualitas guru, kondisi sarana prasarana pendidikan serta kemampuan literasi dan numerasi siswa dapat menggambarkan bagaimana kondisi mutu pendidikan di Jawa Tengah. Relevansi pendidikan ditunjukkan melalui kualitas lulusan pendidikan terutama pada kesesuaian lulusan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja. Data memperlihatkan bahwa serapan tamatan SMK belum optimal, ditandai dengan penurunan jumlah lulusan SMK yang bekerja, sebaliknya jumlah lulusan SMK yang berwirausaha justru mengalami peningkatan. Namun demikian, dari hasil penilaian Rapor Pendidikan Kemendikbud menunjukkan hasil yang cukup baik untuk tingkat penyerapan lulusan SMK di Jateng sudah mencapai 92,53% pada tahun 2022. Kondisi ini menggambarkan adanya kecenderungan serapan lulusan SMK lebih banyak ke arah berwirausaha daripada bekerja di dunia usaha maupun industri.

**Tabel 2.112.**
**Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| • Jumlah siswa kelas III/IV | 195.354 | 164.231 | 167.751 | 248.065 | 208.194 |
| • Jumlah lulusan | 194.768 | 164.231 | 167.751 | 248.065 | 208.194 |
| • Bekerja | 100.500 | 111.096 | 99.278 | 73.778 | 65.241 |
| • Wirausaha | 1.266 | 13.159 | 35.517 | 1.012 | 14.480 |
| • Melanjutkan | 55.762 | 22.568 | 1.720 | 31.727 | 18.155 |
| • Belum bekerja | 37.240 | 17.048 | 21.081 | 141.548 | 75.269 |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan peningkatan keterserapan lulusan SMK pada DUDI salah satunya melalui penyelenggaraan Uji Kompetensi Siswa SMK yang sesuai kebutuhan DUDI serta mengoptimalkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat untuk SMK melalui program *Center of Excellent* (CoE) dan DAK Fisik Sarpras Pendidikan SMK.

Kualitas guru salah satunya dapat dinilai melalui kompetensi yang dimiliki. Sampai dengan tahun 2021 persentase guru dengan sertifikat kompetensi cenderung tidak mengalami peningkatan signifkan, berada pada rentang cakupan 40 hingga 65 persen. Beberapa kendala dijumpai dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi mulai dari belum memiliki ijazah D4/S1, sudah memiliki ijazah D4/S1 namun tidak linier dengan bidang yang diajar hingga keterbatasan jumlah kuota sertifikasi kompetensi yang ditetapkan pemerintah pusat.

**Tabel 2.113.**
**Sertifikat Kompetensi Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2021**

| Uraian | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum |
| Sertifikat Kompetensi | SMA | 65 | 35 | 66,7 | 33,3 | 65,1 | 34,9 | 57,1 | 42,9 |
| | SMK | 41 | 59 | 43,6 | 56,4 | 44,2 | 55,8 | 44,2 | 55,8 |
| | SLB | 50,8 | 49,2 | 52,2 | 47,8 | 46,1 | 53,9 | 40,3 | 59,7 |

*Sumber Kemendikbud, 2022*

Kualifikasi guru minimal D4/S1 dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Kondisi tersebut diperkuat dengan data sebagaimana table 2.112, memperlihatkan bahwa di Jawa Tengah masih terdapat Guru belum memiliki kualifikasi minimal D4/S1 dan paling banyak dijumpai pada jenjang pendidikan khusus.

**Tabel 2.114.**
**Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2021**

| Uraian | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sudah D4/S1 | Belum D4/S1 | Sudah D4/S1 | Belum D4/S1 | Sudah D4/S1 | Belum D4/S1 | Sudah D4/S1 | Belum D4/S1 |
| Kualifikasi Guru | SMA | 98,1 | 1,9 | 98,2 | 1,8 | 89 | 11 | 98,8 | 1,2 |
| | SMK | 95,5 | 4,5 | 96,2 | 3,8 | 88,5 | 11,5 | 97,3 | 2,7 |
| | SLB | 92,3 | 7,7 | 92 | 8 | 92,7 | 7,3 | 96,3 | 3,7 |

*Sumber Kemendikbud, 2022*

Mutu pendidikan lainnya tergambarkan melalui kondisi sapras pendidikan di Jawa Tengah. Jawa Tengah masih memiliki ruang kelas kondisi rusak berat, sedang maupun ringan. Terhadap kondisi tersebut, maka pemerintah berupaya melakukan peningkatan sarpras pendidikan melalui rehabilitasi sarpras pendidikan baik dengan optimalisasi APBN (DAK Fisik Sarpras Pendidikan) maupun APBD.

**Tabel 2.115.**
**Kondisi Sarpras Pendidikan Tahun 2018-2021**

| Uraian | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rusak berat | Rusak sedang | Baik+ Rusak ringan | Rusak berat | Rusak sedang | Baik+ Rusak ringan | Rusak berat | Rusak sedang | Baik+ Rusak ringan | Rusak sedang +berat | Rusak ringan | Baik |
| **SMA** | 278 | 434 | 12.927 | 296 | 456 | 12.861 | 215 | 688 | 13.269 | 3 | 6.349 | 8.502 |
| **SMK** | 296 | 452 | 23.373 | 295 | 431 | 23.434 | 204 | 698 | 25.105 | - | 13.070 | 14.797 |
| **SLB** | - | - | - | 106 | 104 | 1.825 | 82 | 249 | 2.514 | 25 | 1.656 | 1.517 |

*Sumber Kemendikbud, 2022*

Kemampuan literasi dan numerasi juga gambaran mutu pendidikan dari segi proses. Literasi adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa serta mampu menganalisa dan memahamai konsep, sedangkan numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai literasi secara umum mengalami penurunan pada tahun 2023, sementara nilai numerasi mengalami peningkatan pada tahun yang sama, terkecuali jenjang SMPLB.

**Tabel 2.116.**
**Kemampuan Literasi, Numerasi dan Karakter Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2022-2023**

| Tahun | Jenjang Pendidikan | Literasi | Numerasi | Karakter |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | SMA | 80,02 | 56,03 | 57,99 |
| | SMK | 65,00 | 56,04 | 57,44 |
| | SDLB | 79,10 | 75,40 | 55,89 |
| | SMPLB | 65,38 | 64,50 | 56,58 |
| | SMALB | 50,00 | 41,95 | 57,25 |
| 2023 | SMA | 79,51 | 67,80 | 59,02 |
| | SMK | 62,48 | 70,01 | 58,81 |
| | SDLB | 75,98 | 76,19 | 58,28 |
| | SMPLB | 51,20 | 48,29 | 58,21 |
| | SMALB | 38,37 | 45,31 | 56,39 |

*Sumber: Rapor Pendidikan Jawa Tengah, 2023*

Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya diukur melalui kemampuan literasi dan numerasi siswa, namun juga nilai karakter siswa. Rapor Pendidikan juga telah memuat pengukuran nilai karakter siswa yang mengukur kecenderungan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai - nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong – royong, kreativitas, nalar kritis kebinekaan global, serta kemandirian. Penerimaan terhadap siswa dari kelompok

rentan seperti kurang mampu secara ekonomi dan disabilitas merupakan bagian dari perwujudan nilai karakter siswa. Nilai karakter tertinggi berada pada jenjang SMA dan terendah pada jenjang SD, namun terjadi penurunan nilai karakter pada jenjang SMALB di Tahun 2023.

Transformasi digital menuntut pemahaman dan skill/keterampilan terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Data memperlihatkan bahwa proporsi penduduk usia 15-24 tahun dengan keterampilan TIK jauh lebih baik dibandingkan penduduk usia 15-59 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penguasaan TIK masih didominasi oleh kelompok usia muda produktif.

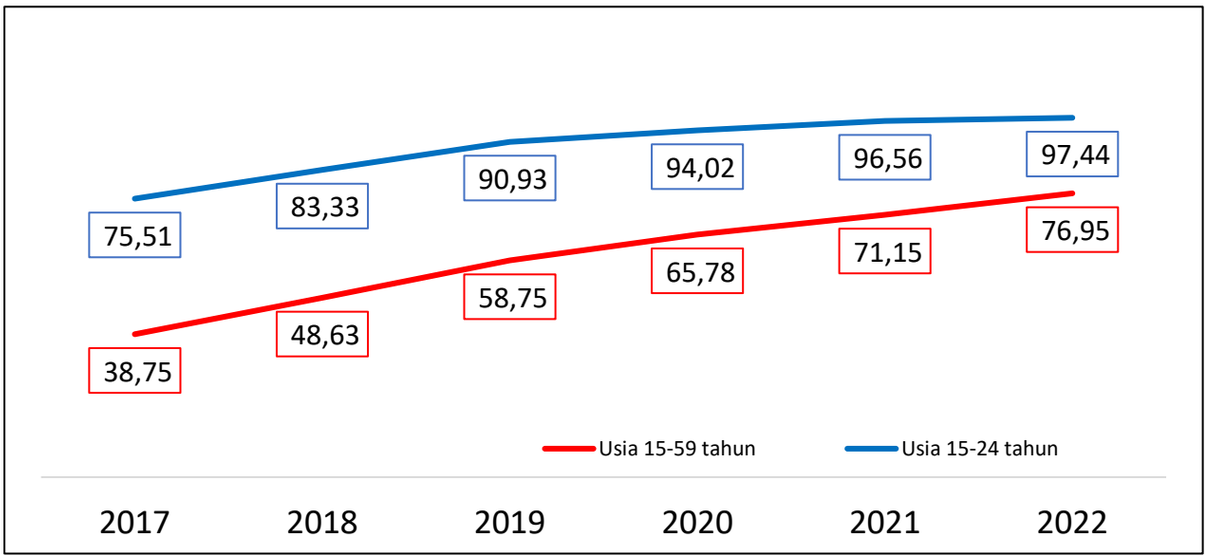


*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, 2022*

**Gambar 2.60.**
**Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun dan Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan TIK di Jawa Tengah Tahun 2017-2022 (%)**

### 2.4.6 Kesehatan

#### a. Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Balita

Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2018 – 2019 menunjukkan tren yang semakin baik dari 78,60 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) pada 2019 menjadi 76,93 per 100.000 KH. Terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 menimbulkan perburukan kasus kematian ibu secara signifikan pada 2020 dan 2021 menjadi 98,60 pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan menjadi 199 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2021. Keterbatasan layanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil selama pandemi, potensi keterpaparan virus, dan komplikasi kehamilan (perdarahan, hipertensi kehamilan, jantung, diabetes) menjadi faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi naiknya angka kematian ibu. Jika dilihat dari data tahun 2022 menunjukkan bahwa Angka kematian ibu di Jawa Tengah sebanyak 485 Kasus. Tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 50 Kasus dan terendah di Kota Magelang 1 kasus. Angka di tahun 2022 tersebut menurun dibanding Angka kematian Ibu tahun 2021 yang sebanyak 1.011 kasus.

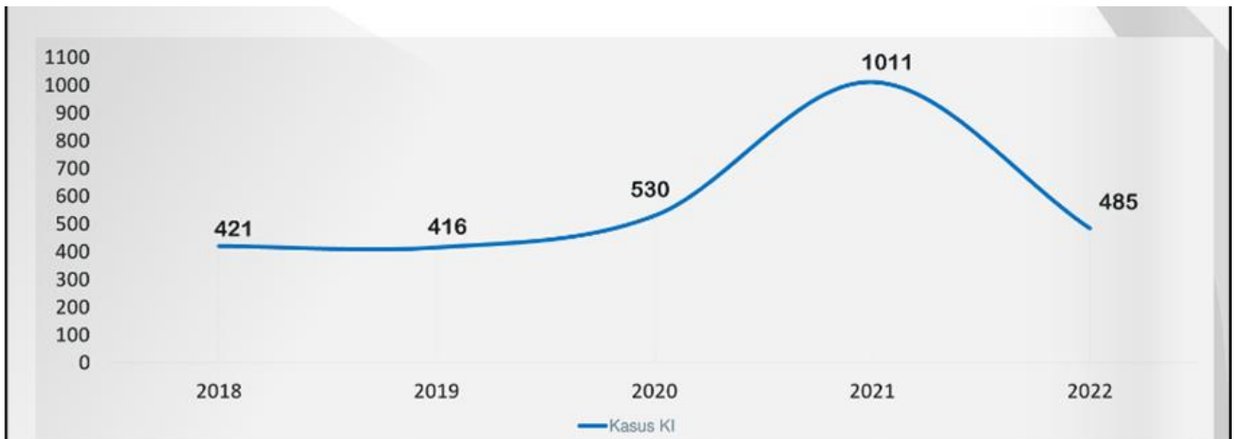


| Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH) | 78,60 | 76,93 | 98,60 | 199 | 84,60 |

**Jumlah KH: Th.2022=573,304, Th. 2021=508.062, Th. 2020=537.513, Th 2019=540.786, Th. 2018= 535.630, Th.2017= 536.238, Th. 2016= 548.993.**

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.61.**
**Tren Kasus Kematian Ibu Tahun 2018-2022**

Angka Kematian Bayi (AKB) periode tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan tren membaik yaitu sebesar 8,37 per 1.000 KH pada tahun 2018 menjadi sebesar 7,87 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2021. Meskipun AKB telah menunjukkan kinerja membaik, namun secara absolut jumlah kasus kematian bayi masih tinggi. Faktor penyebab kematian bayi antara lain kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan konginetal pada bayi dan komplikasi kehamilan serta keterbatasan layanan kesehatan ibu dan anak pada masa pandemi Covid-19. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa Kasus kematian bayi di Jawa Tengah sebanyak 4.024 Kasus. Tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 259 Kasus dan terendah di Kota Magelang sebanyak 11 kasus.

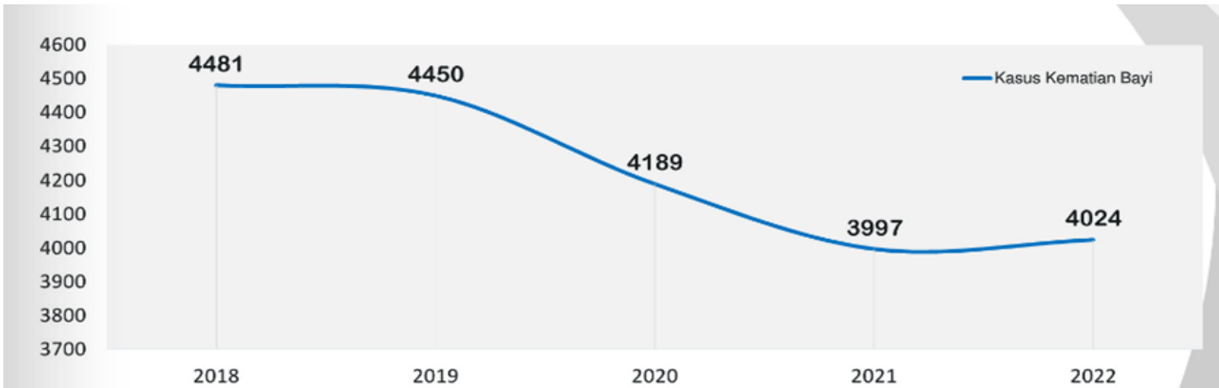


| Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angka Kematian Bayi 0-1th (per 1.000 KH) | 8,37 | 8,22 | 7,79 | 7,87 | 7,02 |

**Jumlah KH: Th, 2022= 573,304 , Th. 2021= 508.062, Th. 2020=537.513, Th 2019=540.786, Th. 2018= 535.630**

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.62.**

**Tren Kasus Kematian Bayi Tahun 2018-2022**

Angka Kematian Balita (AKABA) di Jawa Tengah pada 2018 sampai dengan 2021 menunjukkan tren membaik dari 9,48 per 1.000 KH pada 2018 menjadi 8,95 per 1.000 KH pada 2021. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa kasus kematian balita di Jawa Tengah sebanyak 4.699 Kasus. Tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 310 Kasus dan terendah di Kota Magelang sebanyak 11 kasus. Beberapa penyebab kematian balita antara lain pneumonia, penyakit bawaan, diare, cedera, campak dan malaria di daerah endemis. Selain infeksi penyakit, faktor pola asuh juga menjadi faktor penyumbang kasus kematian balita. Masih perlu upaya edukasi dan peningkatan pemahaman orang tua dan pengasuh untuk menerapkan pola asuh secara benar kepada balita.

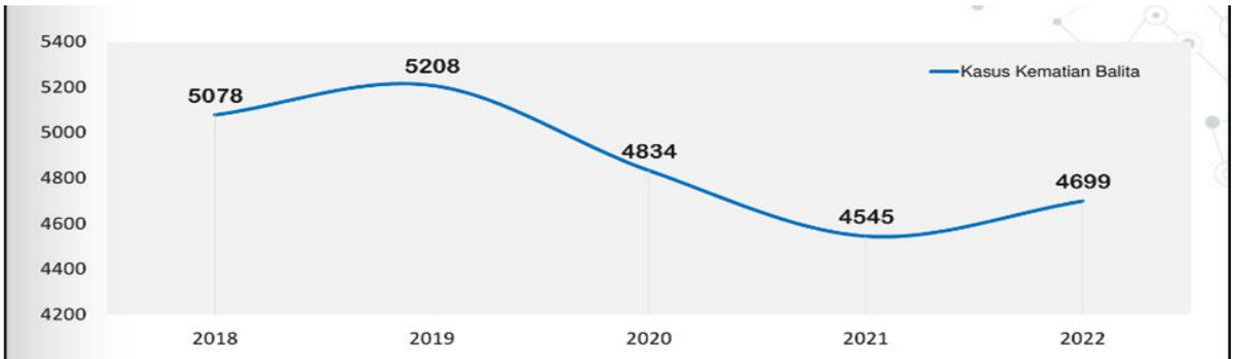


| Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angka Kematian Balita 0-5 th (per 1.000 KH) | 9,48 | 9,63 | 8,99 | 8,95 | 8,20 |

**Jumlah KH: Th, 2022= 573,304, Th. 2021= 508.062, Th. 2020=537.513, Th 2019=540.786, Th. 2018= 535.630**

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.63.**

**Tren Kasus Kematian Balita Tahun 2018-2022**

**b. Kasus gizi buruk**

Kasus gizi buruk di Jawa Tengah mengindikasikan peningkatan pula dari 961 pada tahun 2018 menjadi 2.999 pada tahun 2022 seperti yang ditunjukan pada gambar 2.4. Hal ini terdapat 4 faktor yang melatarbelakangi gizi buruk yaitu :ekonomi, sanitasi, pendidikan orangtua, dan perilaku orangtua. Kemiskinan salah satu determinan social-ekonomi, merupakan akar dari ketiadaan pangan, tempat mukim yang berjejalan, dan tidak sehat serta ketidak mampuan mengakses fasilitas kesehatan. Malnutrisi masih saja melatar belakangi penyakit dan kematian anak. Kurang kalori protein sesungguhnya berpeluang menyerap siapa saja, terutama bayidan anak yang tengah tumbuh-kembang. Gizi buruk cenderung menyerang setelah merekaberusia 18 bulan. Penilaian status gizi masyarakat memerlukan kebijakan yang menjaminsetiap anggota masyarakat mendapatkan makanan yang cukup jumlah dan mutunya. Gizi yang diperoleh seorang anak melalui konsumsi makanan setiap hari. Kecukupan zat gizi berpengaruh pada kesehatan dan kecerdasan anak. Kasus gizi buruk bukanlah jenis penyakit yang datang tiba-tiba begitu saja. Tetapi karena proses yang menahun terus bertumpuk dan menjadi kronik saat mencapai puncaknya. Masalah defisiensi gizi khususnyamenjadiperhatian karena berbagai penelitian menunjukan adanya efek jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan otak manusia.

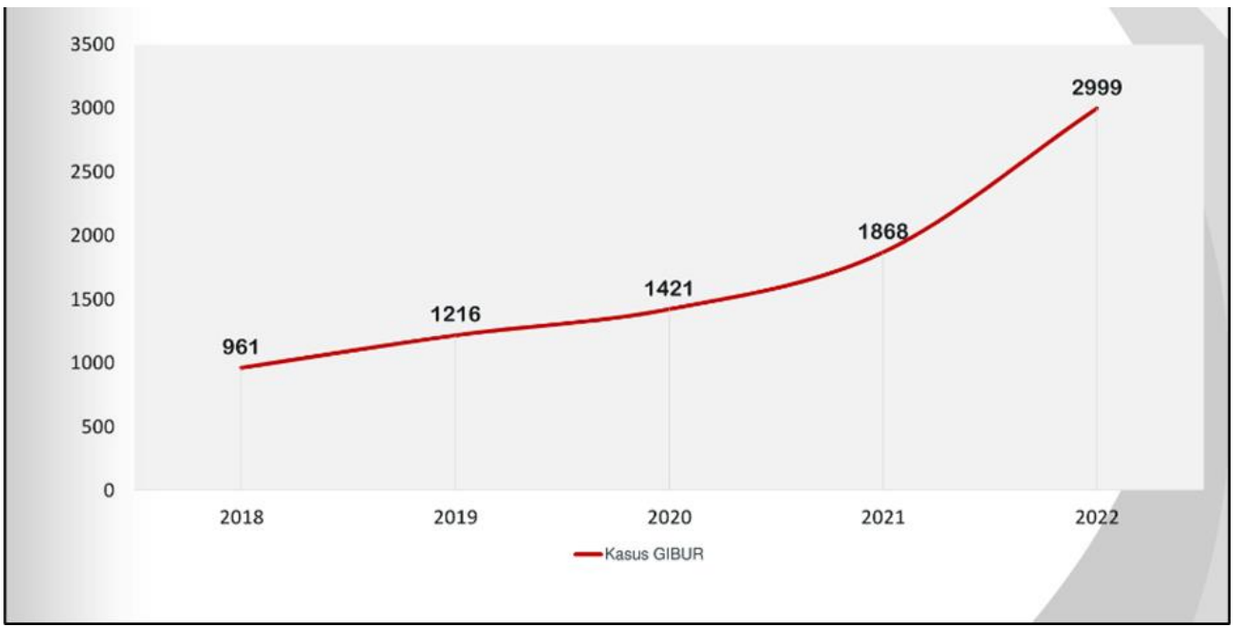


*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.64.**

**Tren Kasus Balita Gizi Buruk Tahun (BB/TB) 2018-2022**

Permasalahan gizi yang terjadi di Jawa Tengah secara umum disebabkan oleh masalah kekurangan dan kelebihan gizi. Kekurangan gizi dalam waktu lama maupun infeksi berulang yang mengganggu intake zat gizi menyebabkan masalah gizi kronis sehingga mengakibatkan anak menjadi pendek (stunting). Kekurangan gizi dalam waktu singkat, misalnya karena wabah penyakit dan kelaparan menyebabkan masalah gizi akut sehingga mengakibatkan anak menjadi kurus (underweight dan wasted). Selain permasalahan kekurangan gizi, kelebihan gizi juga menimbulkan masalah karena menyebabkan anak menjadi obesitas. Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa tren permasalahan gizi di Jawa Tengah menunjukkan angka yang semakin membaik. Prevalensi balita

underweight dan wasted sebesar 17,1 persen dan 7,7 persen pada 2022. Prevalensi balita stunted turun dari 20,9 persen pada 2021 menjadi 20,8 persen pada 2022. Berdasarkan standar WHO, suatu wilayah dikatakan baik jika prevalensi balita pendek <20 persen dan prvalensi balita kurus <5 persen. Suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut jika prevalensi balita pendek <20 persen dan prevalensi balita kurus >5 persen. Suatu wilayah dikalakan mengalami masalah gizi kronis apabila prevalensi balita pendek >20 persen dan prevalensi balita kurus <5 persen. Suatu wilayah dikatakan memiliki permasalahan gizi kronis dan akut apabila prevalensi balita pendek >20 persen dan prevalensi balita kurus >5 persen. Berdasarkan standar tersebut, Provinsi Jawa Tengah termasuk wilayah dengan permasalahan gizi kronis dan akut.

Penanganan permasalahan gizi yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu menurunkan angka prevalensi stunting pada balita menjadi 14 persen dan angka prevalensi wasting pada balita menjadi 7 persen sampai dengan tahun 2024. Angka prevalensi stunting di Jawa Tengah terus menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu. Jika mengacu pada target nasional maka perlu upaya untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Jawa Tengah pada tahun 2023 menjadi di bawah 16 persen dan menjaga angka prevalensi wasting tidak lebih dari 7 persen

**Tabel 2.117.**

**Prevalensi *Stunting* Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

| Tahun | *Stunting* | Sumber |
|---|---|---|
| 2018 | 31,2% | Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) |
| 2019 | 27,68% | Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI telah terintegrasi dengan riskesdas) |
| 2020 | - | Tidak dilakukan pengukuran karena pandemi |
| 2021 | 20,9% | Survey Status Gizi Indonesia |
| 2022 | 21,6% | Survey Status Gizi Indonesia |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

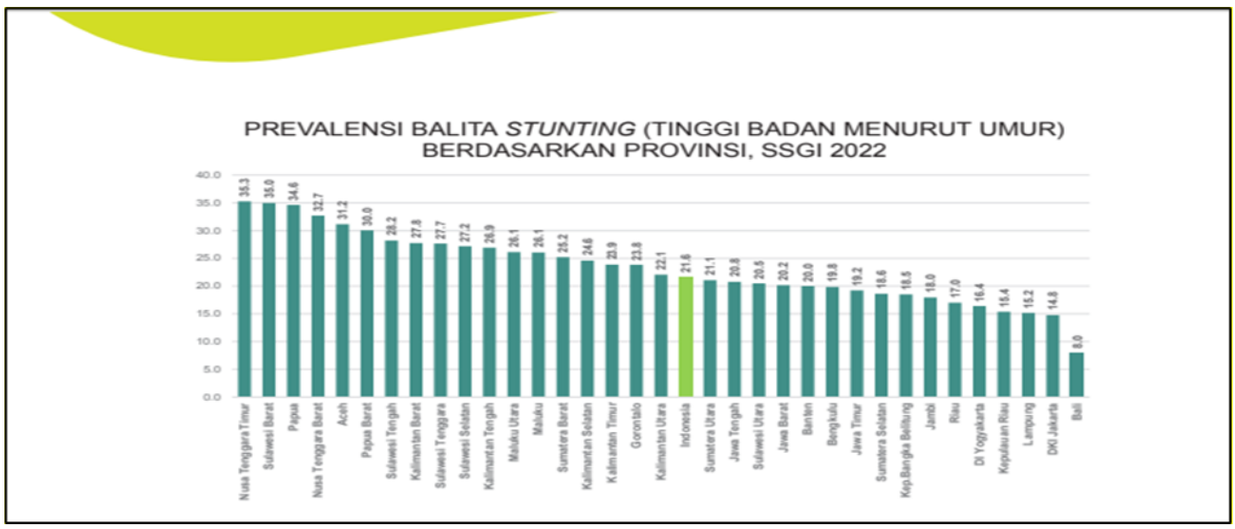


*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2021*

**Gambar 2.65.**

**Angka Prevalensi *Stunting* Provinsi Jawa Tengah dibandingkan Provinsi Lainnya Tahun 2022**

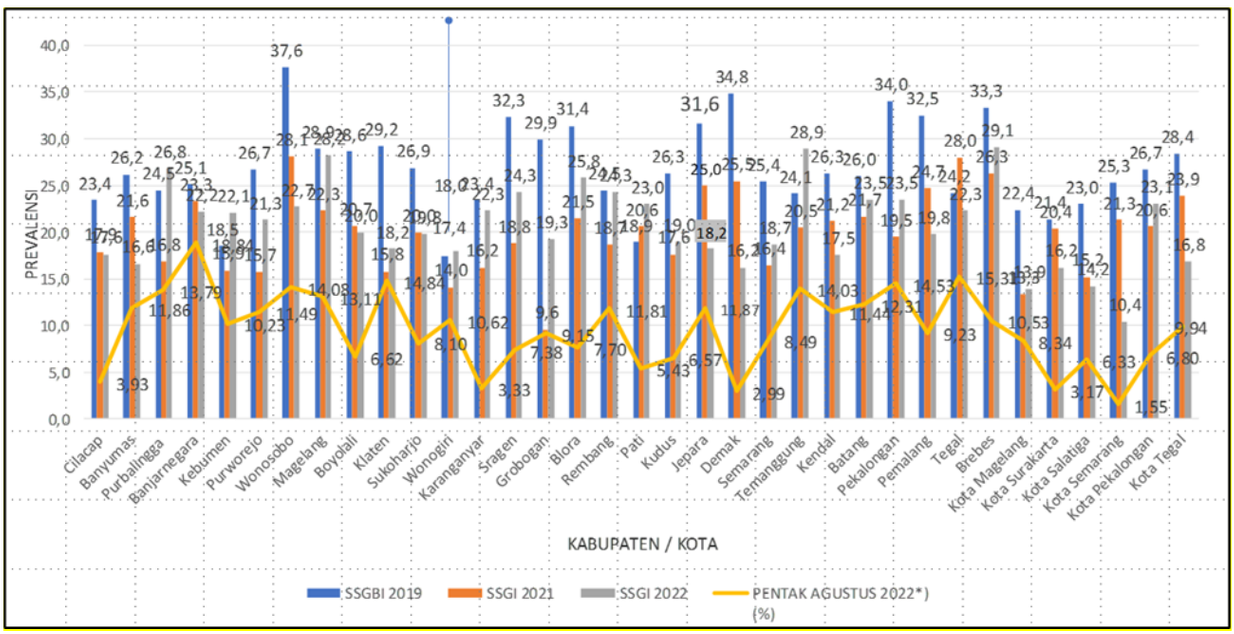


*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2021*

**Gambar 2.66.**

**Angka Prevalensi *Stunting* Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan SSGBI 2019 dan SSGI 2021**

Terjadinya kondisi stunting secara umum dipengaruhi oleh asupan gizi dan status kesehatan. Asupan gizi berkaitan dengan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan bergizi. Status kesehatan berkaitan dengan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, lingkungan permukiman, serta lingkungan sosial (noram dan pola asuh, pendidikan, lingkungan kerja).

**c. Penyakit Menular dan Tidak Menular**

Beban ganda penyakit saat ini menjadi tantangan kesehatan Jawa Tengah, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Perubahan pola penyakit tersebut sangat dipengaruhi antara lain oleh perubahan lingkungan, perilaku masyarakat, transisi demografi, teknologi, ekonomi dan sosial budaya. Untuk itu penting dilakukan upaya pengendalian penyakit melalui upaya menurunkan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal. Pengendalian penyakit menular dilakukan terhadap penyakit menular langsung, penyakit menular bersumber binatang, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan pengendalian penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

**Kondisi Penyakit Menular**

Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas program di Provinsi Jawa Tengah adalah TB, HIV/AIDS, Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Angka kesakitan DBD (Incidence Rate/IR DBD) di Jawa Tengah mengalami peningkatan yang cukup siginifkan di tahun 2022 dibanding tahun 2021 yaitu menjadi 33,80 per 100.000 penduduk setelah tahun sebelumnya di angka 12,80 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka kesakitan DBD (CFR DBD) mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yaitu dari 2,71 persen pada tahun 2021 menjadi 2,08 persen pada tahun 2022. Angka ini perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut

angka kematian yang disebabkan oleh DBD, dimana angka kesakitan menurun, namun angka kematian meningkat.

Angka Kesakitan Malaria (API) berdasarkan data tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,028 dibandingkan Tahun 2021 sebesar 0,024. Saat ini dari 35 Kabupaten/Kota yang mempunyai kasus Malaria tertinggi sebesar 514 kasus hanya di Kabupaten Purworejo. Hal ini dipengaruhi adanya Migrasi Kasus dari Pendatang.

Sementara itu penemuan kasus TB yang ternotifikasi (CNR TB) mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 116,2 persen menjadi 179 persen di tahun 2022, namun harapan penanganan TB mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu ditandai dengan naiknya angka keberhasilan pengobatan TB (SRTB) dari tahun 2021 sebesar 83,5 persen menjadi sebesar 84,5 persen di tahun 2022. Penemuan kasus TB semakin membaik seiring dengan dilakanakannya deteksi dini oleh petugas Puskesmas yang langsung turun ke masyarakat serta peran Balai Kesehatan Masyarakat milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Pada penyakit HIV/AIDS perlu diwaspadai secara serius, mengingat terjadi lonjakan angka yang cukup besar pada tahun 2022, tercatat kasus HIV meningkat dari 2.708 kasus di tahun 2021 menjadi 3.120 kasus di tahun 2022. Kasus AIDS juga meningkat dari 835 kasus di tahun 2021 menjadi 1.309 kasus di tahun 2022. Kasus HIV dan AIDS perlu menjadi perhatian bersama dikarenakan masih rendahnya pemahaman remaja terhadap akibat penyalahgunaan narkoba, kecenderungan meningkatnya perilaku yang menyimpang. Meskipun kinerja pelayanan HIV/AIDS semakin baik, hal ini dipengaruhi karena semakin efektifnya pemanafaatan Voluntary Conselling Test (VCT) di Puskesmas dan Rumah Sakit.

**Tabel 2.118.**

**Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| Tahun | IR DBD per 100.000 penduduk | CFR DBD (%) | API Malaria (%) | CNR TB (%) | SR TB (%) | HIV / AIDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kasus HIV | Kasus AIDS |
| 2018 | 8,68 | 1,25 | 0,02 | 143 | 77,13 | 2.654 | 1.879 |
| 2019 | 26,21 | 1,4 | 0,012 | 210,8 | 83,93 | 2.704 | 2.316 |
| 2020 | 16,30 | 1,9 | 0,009 | 118 | 84,5 | 2.749 | 1.549 |
| 2021 | 12,80 | 2,71 | 0,024 | 116,2 | 83,5 | 2.708 | 835 |
| 2022 | 33,69 | 2,08 | 0.028 | 179 | 84,5 | 3.120 | 1.309 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Tantangan besar yang saat ini dihadapi bersama adalah ditemukannya jenis corona virus baru yang menjadi wabah pandemi hampir diseluruh dunia. Corona virus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis corona virus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Corona virus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit Covid-19 yaitu Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penularan Covid-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dan tidak langsung yakni percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi

Covid-19 batuk, bersin atau berbicara. Penularan kontak tidak langsung dapat terjadi melalui benda dan permukaan benda yang terkontaminasi percikan orang yang terinfeksi seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan.

Untuk mengurangi penyebaran kasus yang semakin banyak dan mengurangi kasus kematian akibat Covid-19, berbagai upaya promotif dan preventif terus dilakukan antara lain edukasi penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat dengan menjaga jarak minimal satu meter, memakai masker, mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih. Disamping itu, penanganan kuratif dan rehabilitatif terus dilakukan dengan melakukan tes Covid-19 (testing), penelusuran kontak erat (tracing), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien Covid-19 (treatment) di tempat karantina terpusat dan fasilitas kesehatan rujukan Covid-19. Beberapa upaya tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, stakeholder dan masyarakat.

Vaksin diakui dan terbukti dapat mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri dan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kontribusi vaksin pada turunnya angka penularan penyakit tertentu sangat besar. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd imunity), dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Ketersediaan vaksin Covid-19, akan membantu proses penanganan pandemi Covid-19 lebih cepat.

**Kondisi Penyakit Tidak Menular (PTM)**

Peningkatan beban akibat penyakit tidak menular sejalan dengan meningkatnya faktor risiko yang meliputi meningkatnya tekanan darah, gula darah, indeks massa tubuh atau obesitas, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas sik, dan merokok serta alkohol. Peningkatan PTM dapat mengakibatkan penurunan produktivas penduduk karena kasus PTM banyak ditemukan pada usia produktif seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan kanker. Data menunjukkan bahwa hipertensi menjadi penyakit tidak menular yang perlu diwaspadai, dimana jumlah penderita hipertensi mengalami lonjakan yang cukup signifikan yaitu sebesar 3.329.052 kasus pada tahun 2021 menjadi 4.695.927 kasus pada tahun 2022. Selain Hipertensi diabetes melitus mengalami tren kenaikan dari 467.365 kasus pada tahun 2021 menjadi 613.524 kasus di tahun 2022. Penyakit kanker juga perlu diwaspadai, dimana jumlah penderita kanker mengalami peningkatan dari 12.886 kasus di tahun 2021 menjadi 17.292 kasus di tahun 2022.

**Tabel 2.119.**

**Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022**

| Tahun | Jenis PTM | | |
|---|---|---|---|
| | Diabetes Milletus | Hipertensi | Kanker |
| 2018 | 508.881 | 1.393.751 | 21.298 |
| 2019 | 490.444 | 2.073.852 | 13.256 |
| 2020 | 582.559 | 2.543.732 | 12.702 |
| 2021 | 467.365 | 3.329.052 | 12.886 |
| 2022 | 613.524 | 4.695.927 | 17.292 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

### d. Kesehatan Lingkungan

Perilaku hidup sehat menjadi hal yang penting untuk ditanamkan pada masyarakat sejak mulai usia dini. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat adalah melalui program Open Defacation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah meningkatkan jumlah desa/kelurahan agar terverifikasi sebagai ODF melalui pemberian jamban kepada kepala keluarga.

Pada Tahun 2022 masih terdapat 5 kabupaten/kota yang belum ODF yakni Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Batang, Magelang dan Pekalongan. Akan dilakukan percepatan pencapaian target seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah Bebas Buang Air Besar Sembarangan Pada Tahun 2023.

Perkembangan desa/kelurahan ODF di Jawa Tengah dari tahun 2018 hingga 2022 terus meningkat yaitu sebanyak 3.668 desa/kelurahan ODF di tahun 2018 menjadi 7.710 desa/kelurahan ODF di tahun 2022.

**Tabel 2.120.**

**Perkembangan Desa/Kelurahan ODF Di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| No | Tahun | Jumlah Kelurahan/Desa ODF |
|---|---|---|
| 1 | 2018 | 3.668 |
| 2 | 2019 | 5.863 |
| 3 | 2020 | 6.818 |
| 4 | 2021 | 7.162 |
| 5 | 2022* | 7.710 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

### e. Kesehatan Usia Lanjut

Dalam rangka antisipasi pasca bonus demografi dimasa mendatang, penduduk usia lanjut (penduduk usia 60 tahun keatas) perlu mendapat perhatian dalam pelayanan kesehatan perorangan dan rujukan agar lansia dapat tetap menjalani aktivitas fisik, menjaga kesehatan, tidak menggantungkan kepada orang lain dalam kehidupan bahkan masih bisa produktif. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut di Jawa Tengah, data yang tersaji adalah periode 2018 sampai 2022. Tahun 2018 cakupan pelayanan kesehatan lansia sebesar 65,00 persen yang kemudian meningkat menjadi 85,00 persen di tahun 2022.Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan promosi kesehatan, meningkatkan akses pelayanan kesehatan lanjut usia, Kerjasama dengan universitas dan Lembaga penelitian untuk pengembangan program, pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan mandiri di usia lanjut, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam upaya kesehatan lanjut usia.

**Tabel 2.121.**

**Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%)**

| No | Tahun | Cakupan Layanan Kesehatan Lansia |
|---|---|---|
| 1 | 2018 | 65,00 |
| 2 | 2019 | 74,90 |
| 3 | 2020 | 65,90 |
| 4 | 2021 | 70,90 |

| No | Tahun | Cakupan Layanan Kesehatan Lansia |
|---|---|---|
| 5 | 2022 | 85,00 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

### 2.4.7 Kesejahteraan Sosial

**a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Kondisi kesejahteraan sosial di Jawa Tengah selain masih dihadapkan pada tingginya angka kemiskinan juga masih tingginya penduduk yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS). Berdasarkan perkembangan data PPKS lima tahun terakhir, PPKS di Jawa Tengah relatif mengalami perkembangan yang fluktuatif yang mengarah pada peningkatan jika mendasarkan base line pada tahun 2018. Tahun 2019 PPKS mengalami penurunan menjadi 3.042.030 jiwa, namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 4.056.054 jiwa dan tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 4.654.151 jiwa dan tahun 2022 sedikit turun menjadi 4.579.790 jiwa. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum sebanding dengan penambahan PPKS baru, baik yang disebabkan kondisi sosial ekonomi masyarakat maupun dampak pandemi covid-19 di tahun 2021. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam penanganan PPKS baik melalui layanan panti maupun bantuan sosial yang hanya sebesar 0,47% atau hanya 19.214 penerima manfaat. Diperlukan kolaborasi semua pihak baik Pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota, swasta maupun masyarakat sesuai kewenangannya untuk terus bersama-sama memberikan layanan kepada PPKS.

**Tabel 2.122.**
**Populasi dan Penanganan PPKS di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| No | Tahun | Populasi PPKS (Orang) | Jumlah Penanganan (Orang) | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 4.045.143 | 60.381 | 1,49 |
| 2 | 2019 | 3.042.030 | 19.214 | 0,47 |
| 3 | 2020 | 4.056.054 | 19.214 | 0,47 |
| 4 | 2021 | 4.654.151 | 19.214 | 0,47 |
| 5 | 2022 | 4.579.790 | 19.214 | 0,47 |

*Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

Sementara itu, peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diharapkan dapat menjadi faktor dominan dalam penyelenggaraan sosial termasuk membantu para PPKS untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya belum dapat diharapkan sepenuhnya. Beberapa hal yang masih menjadi tantangan pada PSKS dalam menjalankan perannya yaitu terbatasnya kapasitas dan kuantitas SDM PSKS, termasuk tingkat kesejahteraan SDM PSKS yang masih rendah sehingga berpengaruh pada komitmen dalam penyelenggaraan sosial maupun pengkaderisasian SDM PSKS. Data perkembangan jumlah PSKS menunjukkan bahwa jumlah PSKS makin menurun sejak tahun 2019 sebesar 32.874 PSKS menjadi 30.632 PSKS pada tahun 2022.

**Tabel 2.123.**
**Kondisi PSKS Tahun 2018-2022**

| No | Jenis | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Karang Taruna (KT) | 8.578 | 8.578 | 8.562 | 8.562 | 8.562 |
| 2 | Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) | 920 | 902 | 866 | 866 | 866 |
| 3 | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | 13.794 | 16.260 | 12.540 | 11.440 | 11.440 |
| 4 | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | 573 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| 5 | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 35 | 39 | 38 | 38 | 37 |
| 6 | Dunia Usaha | 58 | 63 | 63 | 63 | 56 |
| 7 | Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | 934 | 1.090 | 1.123 | 1.123 | 1.019 |
| 8 | Family Care Unit (FCU) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Sakti Peksos | 0 | 63 | 63 | 63 | 69 |
| 10 | Pekerja Sosial Profesional (PSP)/Fungsional | 399 | 120 | 117 | 117 | 123 |
| 11 | Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) | 20 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 12 | Penyuluh Sosial Fungsional | 0 | 0 | 25 | 25 | 46 |
| 13 | Penyuluh Sosial Masyarakat | 710 | 710 | 77 | 77 | 77 |
| 14 | PPNS | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | Pelopor Perdamaian | 0 | 0 | 230 | 230 | 245 |
| 16 | SDM PKH | 0 | 2.348 | 5.495 | 5.495 | 5026 |
| 17 | SLRT | 0 | 11 | 21 | 21 | 21 |
| 18 | Puskesos | 0 | 52 | 306 | 385 | 405 |
| | **Total** | **28.039** | **32.874** | **32.165** | **31.145** | **30.632** |

*Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**c. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial**

Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan SPM Sosial mendasarkan pada capaian tahun 2022 menunjukkan bahwa layanan terhadap rehabilitasi sosial dalam panti untuk anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis serta dan layanan penanganan saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana telah mencapai 100 persen. Namun demikian, capaian 100 persen belum menunjukkan coverage seluruh kebutuhan penanganan di Jawa Tengah dan masih sebatas sasaran yang ditangani saja. Kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya kapasitas sarpras, pendanaan dan SDM panti. Berikut tabel capaian pelaksanaan SPM Sosial Tahun 2022.

**Tabel 2.124.**

**Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jawa Tengah TAhun 2022**

| No | Jenis Pelayanan | Penerima layanan Dasar | | | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | APBD (Rp000) | Realisasi (Rp000) | Capaian Anggaran (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti | 3.762 Orang | 3.762 Orang | 100 | 20.248.253 | 19.714.490 | 97.36 |
| 2 | Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di dalam panti | 2.795 Orang | 2.795 Orang | 100 | 14.894.872 | 14.270.684 | 95,81 |
| 3 | Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia Terlantar di dalam panti | 1.685 Orang | 1.685 Orang | 100 | 13.273.822 | 12.921.217 | 97,34 |
| 4 | Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan &pengemis di Dalam panti | 810 Orang | 810 Orang | 100 | 5.346.951 | 5.180.769 | 96,89 |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat & Setelah tanggap Darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi | 145.407 Orang | 145.407 Orang | 100 | 1.050.000 | 1.049.980 | 100,00 |
| | Jumlah | 154.459 Orang | 154.459 Orang | 100 | 54.813.898 | 53.137.142 | 96,94 |

*Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah*

**d. Penanganan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Urusan sosial mempunyai peranan besar dalam memberikan pelayanan umum khususnya terkait dengan layanan pemenuhan kesejahteraan sosial. Beberapa layanan yang tersedia dan menjadi kewenangan provinsi antara lain layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS terlantar di dalam panti, layanan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI), dan layanan SLRT/Puskessos.

**(1) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam Panti**

Layanan PPKS dalam Panti menghadapi beberapa tantangan antara lain kondisi sarpras panti, kapasitas dan kuantitas SDM panti serta pemenuhan layanan panti yang terbatas. Kondisi sarpras panti mengalami perkembangan yang terus memburuk secara fisik jika dilihat dari kondisi bangunan. Tercatat tahun 2022 kondisi bangunan baik sebanyak 548 unit menurun sejak tahun 2018 (578). Hal ini dikarenakan tidak adanya peningkatan/pemeliharaan sarpras secara masif tiap tahunnya. Sementara total kapasitas daya tampung panti tercatat 4.602 orang. Daya tampung ini masih jauh dari harapan jika dibanding jumlah PPKS yang mencapai 4,5 juta orang lebih.

**Tabel 2.125.**

**Jumlah dan Kondisi Bangunan Panti Sosial Provinsi Jawa Tengah 2022**

| No | Tahun | Panti/Rumpel | Jumlah Unit Bangunan | Kondisi Baik | Kondisi Rusak Ringan | Kondisi Rusak Sedang | Kondisi Rusak Berat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 54 | 767 | 578 | 93 | 70 | 26 |
| 2 | 2019 | 54 | 770 | 572 | 95 | 71 | 32 |
| 3 | 2020 | 54 | 789 | 570 | 105 | 70 | 44 |
| 4 | 2021 | 54 | 789 | 548 | 110 | 73 | 58 |
| 5 | 2022 | 54 | 790 | 548 | 111 | 73 | 58 |

*Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Dari sisi SDM Panti, beberapa kebutuhan tenaga layanan yang ada saat ini masih jauh dari kebutuhan untuk memberikan layanan di 56 panti/rumah pelayanan sosial. Beberapa pos SDM yang dibutuhkan antara lain pekerja sosial terampil dari kebutuhan 57 orang baru tersedia 35 orang, pekerja sosial ahli dari kebutuhan 426 orang baru tersedia 65, penyuluh sosial ahli dari 104 kebutuhan baru tersedia 40 orang, perawat dari 68 orang hanya tersedia 1 orang dan dokter belum ada.

**Tabel 2.126.**

**Kondisi dan Kebutuhan SDM Panti Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

| PEKSOS TERAMPIL | | PEKSOS AHLI | | PENYSOS AHLI | | PERAWAT | | DOKTER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kondisi | Kebutuhan | Kondisi | Kebutuhan | Kondisi | Kebutuhan | Kondisi | Kebutuhan | Kondisi | Kebutuhan |
| 35 | 57 | 65 | 426 | 40 | 104 | 1 | 68 | 0 | 0 |

*Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Kondisi terbatasnya panti milik provinsi baik menyangkut kapasitas maupun SDM sehingga dalam penanganan PPKS kurang optimal, maka penting untuk mendorong keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan PPKS. Sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan rumah singgah yang berfungsi untuk melakukan penanganann PPKS yang sifatnya sementara dan melakukan assesment terhadap PPKS hasil penjaringan. Sampai dengan tahun 2022 tercatat baru 27 kabupaten/kota yang telah memiliki rumah singgah baik dibiayai APBD masing-masing maupun bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah. Tersisa delapan kabupaten/kota yang belum memiliki rumah singgah yaitu Cilacap, Banjarneqara, Pemalang, Wonosobo, Sukoharjo. Kab. Semarang, Kudus, dan Kota Magelang.

**(2) Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI)**

Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) adalah upaya yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi dan melindungi hak anak. Pelaksanaan PKSAI memberikan dampak signifikan terhadap jumlah kasus yang direspon. Rujukan dan layanan yang disediakan dalam model PKSAI bertujuan untuk menghubungkan layanan perlindungan anak (seperti bantuan psikososial, pengasuhan alternatif dan bantuan hukum serta pendampingan bagi anak berkonflik dengan hukum), layanan penguatan keluarga (seperti konseling keluarga), dengan layanan

perlindungan sosial dan kebutuhan dasar. Layanan PSKAI menghadapi tantangan antara lain makin terbatasnya SDM yang peduli dan memiliki pemahaman mengenai perlindungan anak, ketersediaan sarana prasarana belum layak, intervensi layanan cenderung masih bersifat sectoral/belum terintegrasi dengan layanan anak lainnya dan data kerentanan belum diintervensi secara holistik integrative. Sampai dengan tahun 2022, jumlah PKSAI yang terbentuk baru di 10 kab/kota, oleh sebab itu masih perlu didorong kepada kab/kota di Jawa Tengah untuk membentuk PKSAI sebagai bentuk penyelenggaraan layanan perlindungan dan kesejahteraan anak di daerah.

**(3) Layanan Puskessos-SLRT**

Puskessos-SLRT sebagai lembaga dan sistem layanan untuk membantu dalam program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan (berupa mengidentifikasi kebutuhan, menangani aduan dan sebagai rujukan masyarakat miskin/rentan miskin) masih dihadapkan pada tantangan pada konsistensi/keaktifan layanan dikarenakan terbatasnya kapasitas SDM pengelola dan kurangnya kemitraan dengan pemangku kepentingan termasuk dunia usaha. Selain itu juga masih terbatasnya Puskessos-SLRT yang belum merata terbentuk di semua desa/kelurahan. Kondisi sampai dengan tahun 2021, Puskessos –SLRT tingkat kabupaten/kota telah terbentuk 100%, sedangkan Puskessos-SLRT tingkat desa/kelurahan baru mencapai 405 Puskessos-SLRT.

**Tabel 2.127.**
**Pembentukan SLRT Desa/Kelurahan s/d TAhun 2021**

| Sumber Dana | Pembentukan Puskessos-SLRT Desa/Kelurahan |
|---|---|
| APBN | 64 |
| APBD Prov | 127 |
| APBD Kab/Kota | 214 |
| Total | 405 |

*Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**e. Pemberian Bantuan Sosial dan Ekonomi**

Dalam hal pemberian bantuan sosial (bansos) dalam upaya penanganan PPKS di Jawa Tengah, dihadapkan pada kondisi data penerima bansos by name by address yang belum valid dan akurat sehingga terjadi exclusion error dan inclusion error. Masalah lain terkait data adalah adanya jarak waktu antara data penetapan sasaran dengan pelaksanaan bansos sehingga sering terjadi keterserapan/realisasi pelaksanaan bansos tidak mencapai 100 persen yang disebabkan karena perubahan secara alami penduduk seperti meninggal dunia, pindah alamat, menjadi mampu atau telah mendapat bantuan lain. Beberapa jenis bansos yang diberikan antara lain Kartu Jateng Sejahtera (KJS), program keluarga harapan (PKH), serta bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari DBHCHT dan DID. Pada tahun 2022, KJS menjadi program dengan tingkat keterserapan terendah dibanding dengan program bansos lainnya, dimana pada tahap II dan III serapannya hanya sekitar 75 persen dari total sasaran yang RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 / Bab II - 136 seharusnya disalurkan.Sementara PKH, BLT DBHCHT, BLT DID sudah cukup baik mendekati angka 100%.

**Tabel 2.128.**
**Keterserapan Bansos Tahun 2022**

| Tahap | PKH | | | DBHCHT (BLT Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok) 2022 | | | BLT DID 2022 | | | KJS 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quota KPM | Realisasi | % | Quota KPM | Realisasi | % | Quota KPM | Realisasi | % | Quota KPM | Realisasi | % |
| Tahap I | 1.707.511 | 1.688.044 | 98,86 | 71.000 | 69.090 | 97,31 | 71.745 | 70.557 | 98,34 | 12.764 | 10.252 | 80,32 |
| Tahap II | 1.622.754 | 1.592.052 | 98,11 | 71.000 | 70.445 | 99,22 | - | - | | 12.764 | 9.804 | 76,81 |
| Tahap III | 1.603.536 | 1.591.558 | 99,25 | - | - | - | - | - | | 12.764 | 9.525 | 74,62 |
| Tahap IV | 1.681.053 | 1.593.651 | 94,80 | - | - | - | - | - | | 12.764 | 11.539 | 90,40 |

*Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022.*

Upaya lain dalam penanganan PPKS adalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Program ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin melalui pemberian modal usaha sebagai dukungan dalam mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP), namun sampai dengan tahun 2022 karena berbagai permasalahan diantaranya belum maksimalnya sinergi dan kolaborasi program dan kegiatan antar OPD sehingga program ini belum optimal. Total saat ini terdapat 2.839 KUBE di Jawa Tengah dan sebanyak 1.745 KUBE telah mendapatkan bantuan baik melalui APBN, APBD, maupun donor asing, sisanya sebanyak 1.094 KUBE belum mendapatkan bantuan.

**Tabel 2.129.**
**Data KUBE Di Jawa Tengah Tahun 2022**

| No | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| A. | **Total KUBE di Jawa Tengah** | **2.839** |
| 1 | Akumulasi KUBE yang sudah mendapat bantuan APBN / APBD/Donasi | **1.745** |
| | a. KUBE yang sudah mendapat bantuan APBN / APBD | 1.196 |
| | b. KUBE yang mendapat bantuan APBD TA 2022 | 30 |
| | c. Bantuan kepada KUBE dari Pemerintah Australia (Queensland) 2022 | 528 |
| 2 | KUBE belum mendapatkan bantuan | **1.094** |

*Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022*

### 2.4.8 Tenaga kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Agustus 2021 sebesar 5,95 persen turun sebesar 0,53 poin dari kondisi TPT pada Agustus 2020 yang sebesar 6,48 persen. Bulan Agustus 2022 TPT di Jawa Tengah sebesar 5,57 persen, turun sebesar 0,38 point dibandingkan Bulan Agustus 2021. Di tingkat nasional TPT Januari 2022 lebih besar dari Jawa Tengah yaitu sebesar 5,86 persen turun sebesar 0,63 point dibandingkan edngan TPT Nasional bulan Agustus 2021.

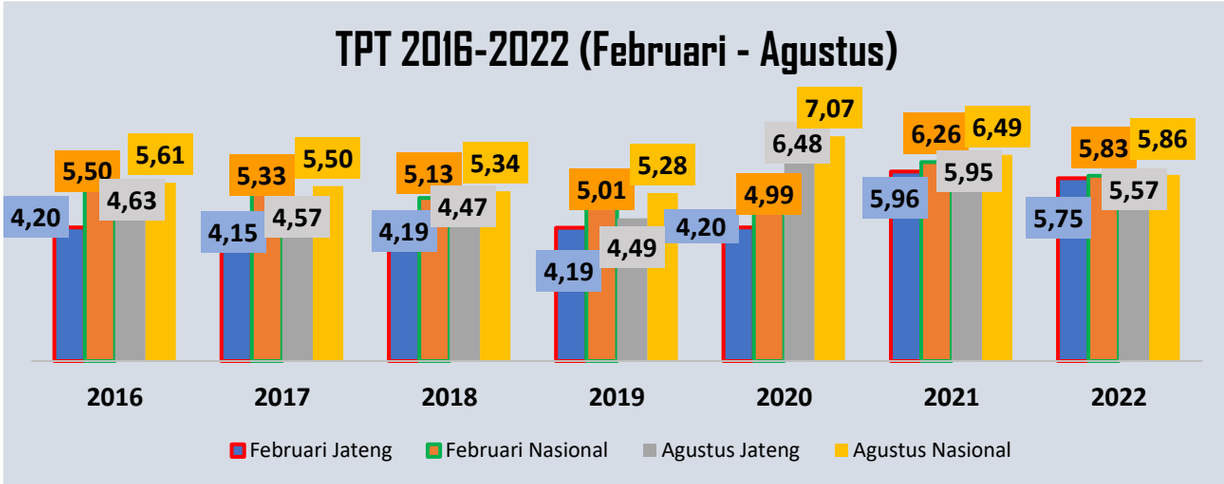


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 2.67.**
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2017 – Agustus 2022 (%)**

Salah satu imbas dari persoalan kependudukan dan dihadapi hampir di semua wilayah adalah pengangguran. Bahkan di negara maju pun pengangguran masih menjadi masalah serius. Tingkat pengangguran akan semakin meningkat saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut rendah. Tingkat tenaga kerja yang tinggi tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai menambah beban persoalan yang ada. Struktur ketenagakerjaan di Jawa Tengah tahun 2022 menurut BPS, diperlihatkan pada gambar di bawah ini:

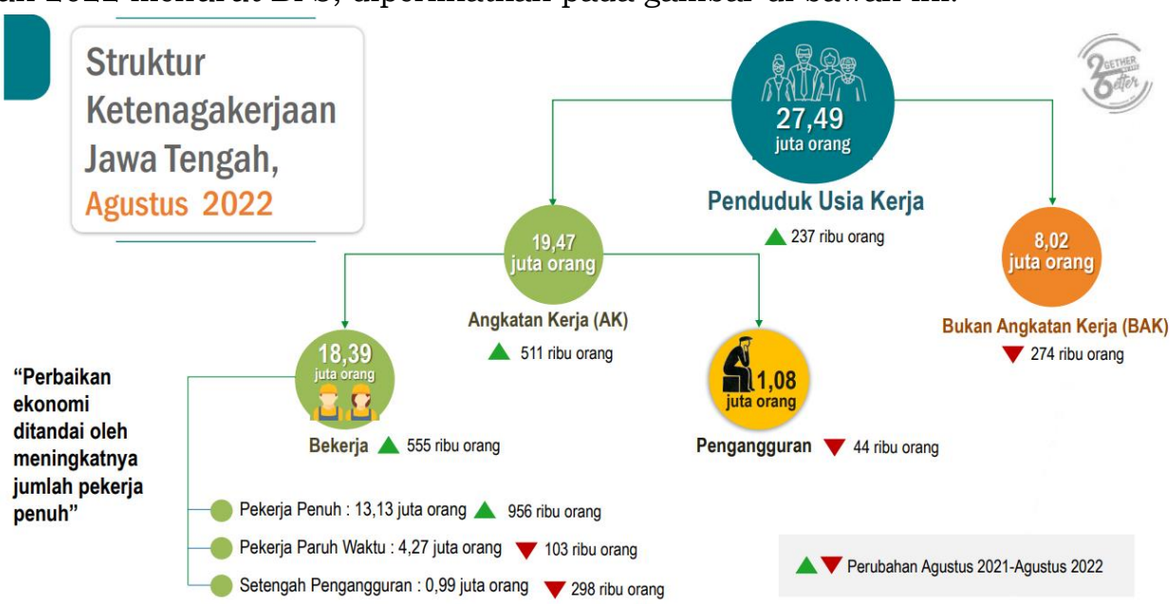


**Gambar 2.68.**
**Struktur Ketenagakerjaan Jawa Tengah Tahun 2022**

Dari 36,74 juta jiwa penduduk Jawa tengah, 27,49 juta jiwa merupakan penduduk usia kerja dengan jumlah Angkatan Kerja (AK) sebesar 19,47 juta orang. Dimana sebanyak 18,39 juta orang bekerja dan 1,08 juta orang pengangguran. Meskipun jumlah bekerja lebih banyak dibandingkan pengangguran, namun secara kualitas perlu mendapatkan perhatian khusus. Mengingat karakteristik penduduk bekerja di Jawa Tengah mendasarkan tingkat pendidikan sebagaimana gambar berikut:

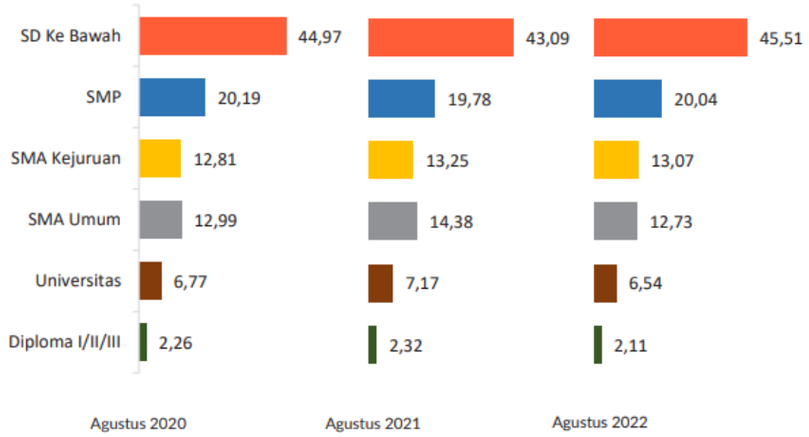


*Sumber:*

**Gambar 2.69.**
**Karakteristik Penduduk bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Agustus 2022**

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2022 TPT tertinggi berasal dari lulusan SMK sebesar 8,42 persen, meskipun menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 10,00 persen. TPT untuk lulusan SD ke bawah justru mengalami kenaikan dari sebelumnya 3,70 persen di tahun 2021 menjadi 4,59 persen di tahun 2022. TPT terendah berasal dari lulusan Diploma yang sebesar 2,95 persen.

**Tabel 2.130.**
**TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%)**

| No. | Tahun | Tingkat Pendidikan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SD | SMP | SMA | SMK | Diploma | Univ |
| 1. | 2018 | 2,14 | 4,62 | 6,50 | 10,60 | 3,64 | 5,47 |
| 2. | 2019 | 2,09 | 4,64 | 6,26 | 9,92 | 3,59 | 5,44 |
| 3. | 2020 | 3,70 | 6,40 | 8,41 | 13,20 | 6,46 | 7,01 |
| 4. | 2021 | 3,70 | 6,87 | 7,32 | 10,00 | 5,66 | 5,62 |
| 5. | 2022 | 4,59 | 5,55 | 7,21 | 8,42 | 2,95 | 4,02 |

*Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022*

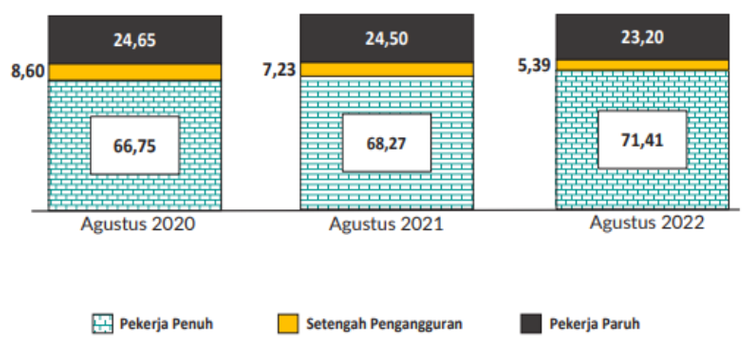


**Gambar 2.70.**
**Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja**
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022 (%)**

Pada tahun 2022 71,41 persen penduduk bekerja Jawa Tengah merupakan pekerja penuh waktu, 23,20 persen merupakan pekerja paruh waktu dan 5,39 persen merupakan setengah pengangguran. Dibandingkan dengan tahun 2021, pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan sebesar 1,84 persen poin dan 1,30 persen poin. Setengah pengangguran dan pekerja tidak penuh waktu merupakan pekerja yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu), dan masih mencari atau menerima pekerjaan lain. Hal ini perlu menjadi perhatian karena menggambarkan tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah yang masih rendah.

Tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 57,11 juta rupiah, tertinggi dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 54,6 juta rupiah. Namun jika dibandingkan dengan daerah lain di pulau Jawa, tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur, namun masih diatas provinsi DI Yogyakarta.

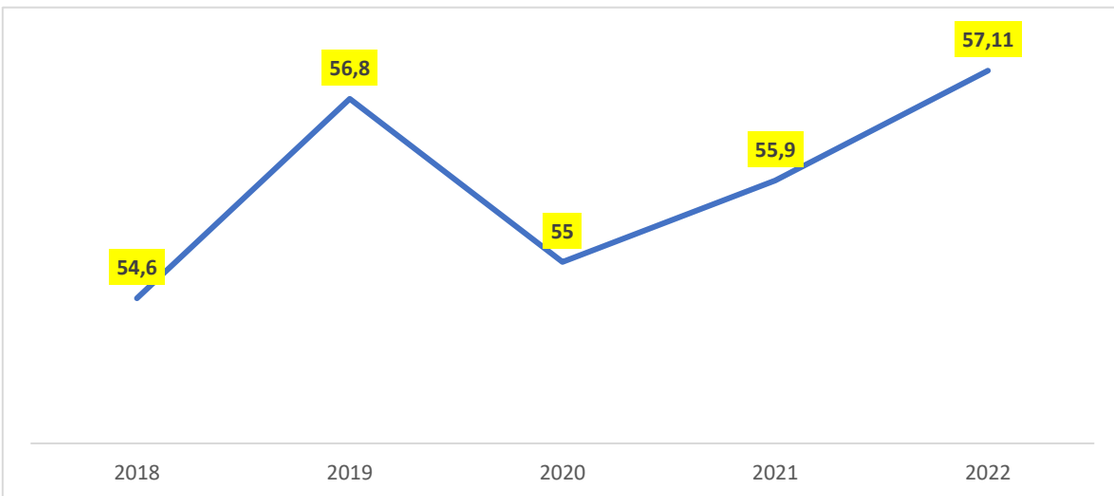


*Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023.*

**Gambar 2.71.**
**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)**

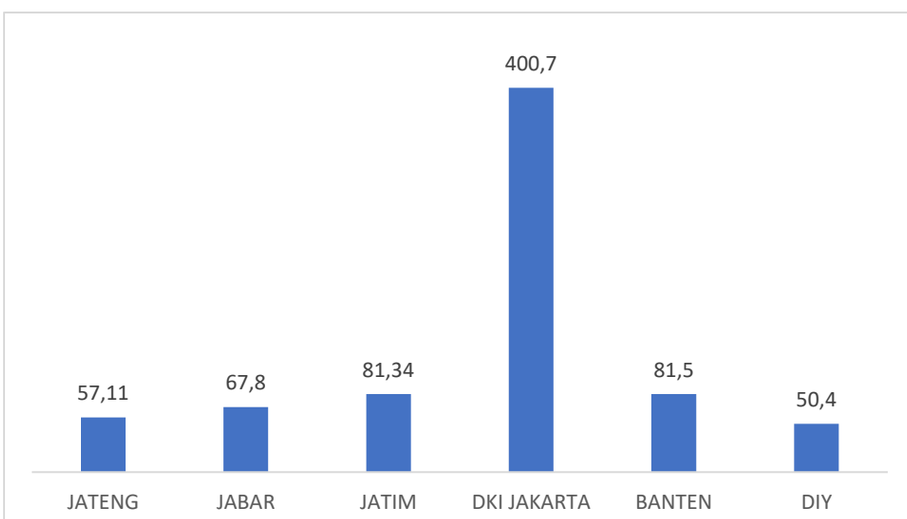


*Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023.*

**Gambar 2.72.**
**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2022 (Juta Rupiah)**

Tingkat pendidikan penduduk bekerja di Jawa Tengah pada tahun 2022 masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah sebanyak 45,51%, hanya 8,65% merupakan penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma ke atas). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut pendidikan (BPS, Agustus 2022) ternyata paling tinggi berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 8,42%. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengingat filosofi adanya SMK agar para lulusan kejuruan sudah siap kerja atau bahkan sudah direkrut oleh dunia usaha atau industri sebelum lulus. Sehingga perlu dicari apa penyebab mendasar dari kondisi itu. Apakah karena ketidakseimbangan antara demand dan supply atau terjadinya asimetri antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.

Rasio kesempatan kerja pada tahun 2022 sebesar 66,90% naik 1,45 persen poin dibanding dengan tahun 2021 dan 1,97 persen poin dibanding dengan tahun 2020. Rasio kesempatan kerja yang naik ini menandakan bahwa peluang penduduk usia kerja yang bekerja semakin meningkat, dan menandakan juga semakin baiknya kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Adanya peningkatan kesempatan kerja merupakan suatu indikator yang penting karena hal itu dapat diartikan bahwa permintaan terhadap tenaga kerja pada pasar kerja dapat dipenuhi.

**Tabel 2.131.**
**Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| No | Tahun | Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang) | Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang) | Rasio Kesempatan Kerja (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018 | 17 245 548 | 26.340.000 | 69,21 |
| 2. | 2019 | 17.440.000 | 26.610.000 | 69,22 |
| 3. | 2020 | 17.540.000 | 27.010.000 | 64,93 |
| 4. | 2021 | 17.835.770 | 27.253.914 | 65,45 |
| 5. | 2022 | 18.390.459 | 27.490.000 | 66,90 |

*Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023*

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang selalu naik. Pada tahun 2022 TPAK sebsar 70,84% naik sebanyak 1,26 persen poin dibanding dengan TPAK tahun 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang selalu naik menandakan bahwa pasokan tenaga kerja (labour supply) di Jawa Tengah yang tersedia semakin tinggi dan mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi semakin naik. TPAK yang tinggi ini harus diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang luas juga agar tidak berdampak negatif terhadap peningkatan angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah.

**Tabel 2.132.**
**Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| No | Tahun | Penduduk Usia Kerja (orang) | Angkatan Kerja*) | TPAK (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018 | 26.340.000 | 18.228.952 | 68,81 |
| 2. | 2019 | 26.610.000 | 18.421.193 | 68,85 |

| No | Tahun | Penduduk Usia Kerja (orang) | Angkatan Kerja*) | TPAK (%) |
|---|---|---|---|---|
| 3. | 2020 | 27.010.000 | 18.751.277 | 69,43 |
| 4. | 2021 | 27.250.000 | 18.963.993 | 69,58 |
| 5. | 2022 | 27.490.000 | 19.474.934 | 70,84 |

*Sumber: BPS 2022 diolah dari Sakernas*
*Keterangan : *) data per Agustus tahun bersangkutan*

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2017-2019 cenderung meningkat. Namun di tahun 2020 kondisinya menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana di tahun 2019 sebesar 70,27 persen menjadi 37,07 persen di tahun 2020. Kondisi ini merupakan salah satu dampak terjadinya pandemi Covid-19 dimana perekonomian terpuruk akibat pandemi. Namun di tahun 2021 mulai kembali meningkat sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian daerah. Untuk itu ke depan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi pasar kerja, serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan pasar kerja.

**Tabel 2.133.**
**Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%)**

| Tahun | Pencari Kerja yang Terdaftar | Pencari Kerja yang Ditempatkan | Persentase |
|---|---|---|---|
| 2018 | 240.246 | 167.247 | 69,61 |
| 2019 | 300.098 | 210.889 | 70,27 |
| 2020 | 220.763 | 81.835 | 37,07 |
| 2021 | 269.810 | 136.611 | 50,63 |
| 2022 | 322.041 | 227.088 | 70,52 |

*Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja (Pekerja Penerima Upah) yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.

**Tabel 2.134.**
**Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| No | Tahun | Jumlah Perusahaan (Unit) | Jumlah Tenaga Kerja (Orang) Peserta Program Jamsostek |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 56.574 | 1.698.265 |
| 2 | 2019 | 69.866 | 1.781.754 |
| 3 | 2020 | 76.196 | 1.908.465 |
| 4 | 2021 | 83.511 | 2.003.518 |
| 5 | 2022 | 89.016 | 3.196.431 |

*Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Kepesertaan pekerja/buruh sektor non formal (Bukan Penerima Upah) mengikuti program Jamsostek atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) berfluktuasi selama tahun 2018-2022. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dan kemudian mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2022, hal ini dikarenakan pertambahan dari sektor informal seperti

pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan), Perum Perhutani (LMDH Kehutanan), Perangkat Desa (ASN/Non ASN), dan sebagainya. Selanjutnya mengalami penurunan sangat signifikan pada tahun 2021 menjadi 310.785 orang disebabkan dampak pandemi Covid-1.

**Tabel 2.135.**
**Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| No | Tahun | Jumlah Tenaga Kerja (orang) Peserta Program Jamsostek |
|---|---|---|
| 1 | 2018 | 1.465.847 |
| 2 | 2019 | 1.378.435 |
| 3 | 2020 | 892.866 |
| 4 | 2021 | 310.785 |
| 5 | 2022 | 1.192.763 |

*Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Jumlah kasus Hubungan Industrial (HI) selama tahun 2017-2021 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017, jumlah kasus hubungan industrial sebanyak 1.927 kasus yang 100 persen terselesaikan. Tahun-tahun berikutnya jumlah kasus terus menurun sejalan dengan meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. Sehingga di tahun 2021, jumlah kasus yang terjadi sebanyak 35 kasus yang 100 persen dapat terselesaikan.

**Tabel 2.136.**
**Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| No | Tahun | Jumlah Kasus | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 265 | 100% terselesaikan |
| 2 | 2019 | 124 | 100% terselesaikan |
| 3 | 2020 | 96 | 100% terselesaikan |
| 4 | 2021 | 35 | 100% terselesaikan |
| 5 | 2022 | 66 | 100% terselesaikan |

*Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022*

*Not in Employment, Education or Training* (NEET) adalah penduduk usia 15-24 tahun yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan (sekolah), dan tidak dalam pelatihan. Jumlah NEET di Jawa Tengah relatif meningkat sejak tahun 2017 dari 1.044.465 orang menjadi 1.205.564 orang pada tahun 2019, demikian pula pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.298.297 orang. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1.097.209 orang. Hal tersebut menandakan bahwa dalam masyarakat masih terdapat sekelompok orang yang mempunyai ketergantungan secara permanen pada orang tua dan dapat menjadi beban ekonomi keluarga.

**Tabel 2.137.**
**Jumlah *Not in Employment, Education or Training (NEET)* di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| No | Tahun | Jumlah *NEET* (orang) | Penduduk Usia Kerja Muda | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 1.171.567 | 5.521.380 orang | 21,21 |
| 2 | 2019 | 1.205.564 | 5.524.810 orang | 21,82 |
| 3 | 2020 | 1.298.297 | 5.407.899 orang | 24,00 |
| 4 | 2021 | 1.097.209 | 5.388.228 orang | 20,36 |
| 5 | 2022 | 562.474 | 2.751.828 orang | 20,44 |

*Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah dokumen yang harus dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun oleh perusahaan selama periode tahun 2018-2022 mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2019. Hal ini menunjukkan masih kurang optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

**Tabel 2.138.**
**Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2018 - 2022**

| No | Tahun | Jumlah *Peraturan Perusahaan (PP)* | Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 4.857 | 830 |
| 2 | 2019 | 3.967 | 579 |
| 3 | 2020 | 4.230 | 614 |
| 4 | 2021 | 4.540 | 661 |
| 5 | 2022 | 4.641 | 661 |

*Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022.*

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 menunjukkan perbaikan. Terdapat 19 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di bawah capaian provinsi dan nasional (peta warna hijau), terdapat 3 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di antara capaian nasional dan Provinsi Jawa Tengah (peta warna kuning), dan terdapat 13 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di atas capaian nasional (peta warna merah)

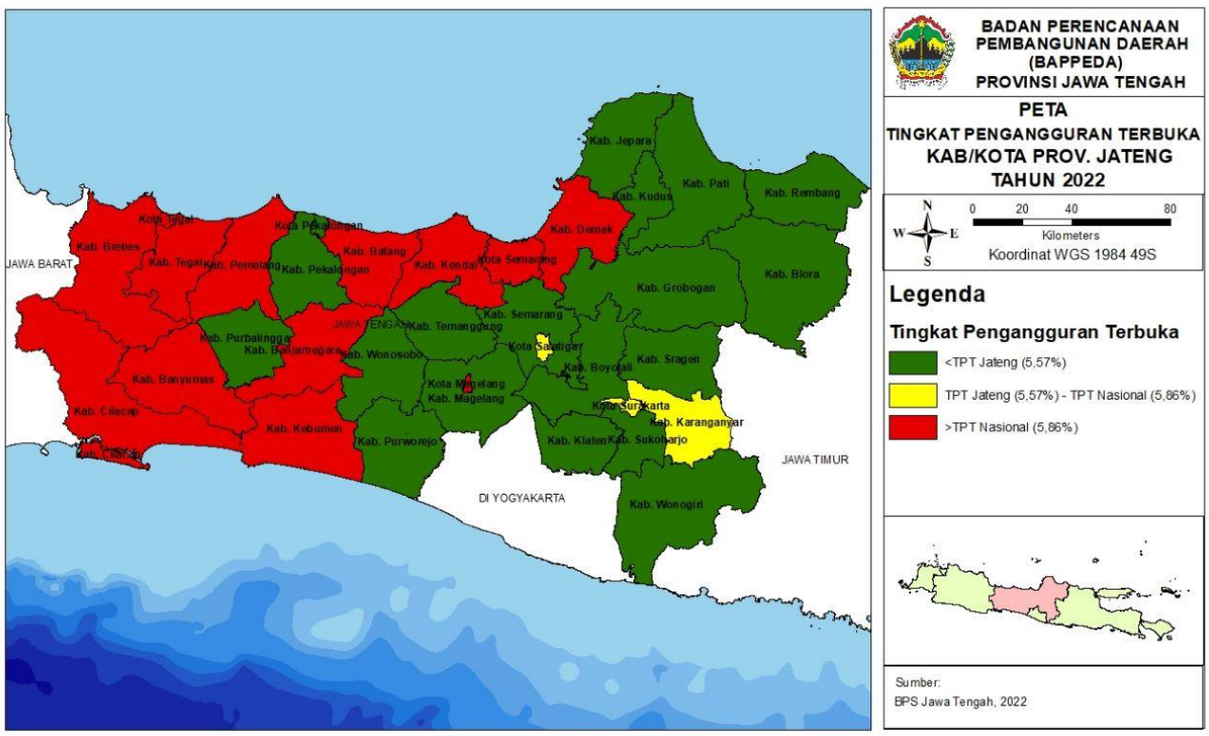


*Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023. Diolah.*

**Gambar 2.73.**

**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

### 2.4.9 Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es dimana kejadian yang tampak dipermukaan (terlapor) tidak sebanding dengan kejadian sesungguhnya yang diperkirakan jauh lebih tinggi. Adanya budaya malu dan takut melapor karena bisa dianggap aib menjadi kendala di masyarakat sehingga ini perlu terus didorong untuk memberikan penyadaran dan keberanian kepada masyarakat utamanya kaum perempuan dan anak. Upaya penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus dilakukan baik berupa advokasi, sosialisasi maupun pelatihan kepada SDM yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan. Upaya ini telah memberikan dampak positif pada penurunan rasio kasus maupun rasio korban kekerasan. Periode 2018-2022, tercatat rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 7,47 di tahun 2022, menurun dibanding tahun 2018 yang sebesar 8,2. Demikian juga dengan rasio korban kekerasan yang turun dari 8,44 di tahun 2018 menjadi 8,10 di tahun 2022. Sementara itu, Rasio korban kekerasan terhadap peremuan juga mengalami penurunan dari 5,93 di tahun 2018 menjadi 4,38 di tahun 2022, sedangkan rasio korban kekerasan terhadap anak turun dari 12,76 di tahun 2018 menjadi 10,33 di tahun 2022. Angka tersebut meskipun telah mengalami perkembangan yang positif tetap perlu mendapat perhatian serius dimasa mendatang mengingat angkanya yang masih cukup tinggi.

**Tabel 2.139.**

**Kondisi Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| Tahun | Rasio Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak (per 100.000 penduduk) | Rasio Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (per 100.000 penduduk) | Rasio Korban Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk) | Rasio Korban kekerasan terhadap anak (per 100.000 penduduk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 8,2 | 8,44 | 5,93 | 12,76 |
| 2019 | 7,78 | 8,25 | 5,89 | 12,44 |
| 2020 | 8,49 | 8,99 | 5,75 | 12,15 |
| 2021 | 8,35 | 8,97 | 5,11 | 11,02 |
| 2022 | 7,47 | 8,10 | 4,38 | 10,33 |

*Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id | AplikasiSimfoni-PPA 2022*

Sementara itu, upaya pemenuhan hak anak secara umum telah mencapai tahap yang cukup menggembirakan jika dilihat dari capaian program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), meskipun berbagai persoalan pemenuhan hak dan perlindungan anak masih menjadi tantangan untuk dipecahkan. Sampai dengan tahun 2022 secara bervariasi sesuai tingkatkan penghargaan tercatat sudah 100 persen kabupaten/kota memperoleh penghargaan KLA (kategori pratama, madya, nindya dan utama). Sehingga diharapkan ke depan progam KLA tidak hanya sebatas kegiatan memperoleh penghargaan semata tetapi secara riil dapat berdampak pada pemenuhan hak anak. Kota Surakarta merupakan satu-satunya Kota di Jawa Tengah yang telah memperoleh penghargaan tertinggi kategori Utama.

**Tabel 2.140.**

**Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak Di Jawa Tengah Tahun 2022**

| Pratama | Madya | Nindya | Utama |
|---|---|---|---|
| Pati, Banyumas, Purworejo, Blora, Kudus, Purbalingga, Banjarnegara, Semarang, Jepara dan Kendal | Temanggung, Tegal, Boyolali, Demak, Pemalang, Wonogiri, Wonosobo, Kota Magelang, Kebumen, Batang, Sukoharjo, Karanganyar, Kota Pekalongan, Grobogan, Klaten, Kota Salatiga, Pekalongan | Rembang, Kota Semarang, Cilacap, Brebes, Sragen, Kota Tegal, Magelang | Kota Surakarta |

Dari sisi jenis kekerasan yang dialami perempuan dan anak, paling banyak yang dialami oleh perempuan dewasa adalah kekerasan fisik, psikis dan seksual. Sementara pada anak tertinggi adalah kekerasan seksual disusul psikis dan fisik. Jenis kekerasan yang dialami perempuan yang perlu mendapat perhatian dimana angkanya terus meningkat yaitu kekerasan seksual, eksploitasi dan lainnya, Sedangkan pada anak yang perlu mendapat perhatian antara lain psikis, seksual dan eksploitasi.

**Tabel 2.141.**
**Jenis Kekerasan Yang Dialami Perempuan dan Anak 2018-2022**

| URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis kekerasan yang dialami korban perempauan dewasa: | | | | | |
| Fisik | 565 | 604 | 484 | 539 | 495 |
| psikis | 409 | 438 | 297 | 372 | 405 |
| seksual | 122 | 146 | 126 | 145 | 186 |
| penelantaran | 201 | 203 | 119 | 135 | 117 |
| trafficking | 38 | 1 | 5 | 10 | 2 |
| eksploitasi | 8 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| lainnya | 43 | 44 | 26 | 47 | 60 |
| **Total** | **1.386** | **1.438** | **1.057** | **1.255** | **1.274** |
| Jenis kekerasan yang dialami korban anak: | | | | | |
| Fisik | 324 | 293 | 205 | 204 | 193 |
| psikis | 306 | 312 | 296 | 327 | 361 |
| seksual | 734 | 700 | 789 | 807 | 748 |
| penelantaran | 91 | 85 | 58 | 66 | 84 |
| trafficking | 48 | 8 | 8 | 16 | 7 |
| eksploitasi | 5 | 9 | 15 | 9 | 30 |
| lainnya | 85 | 51 | 56 | 72 | 72 |
| **Total** | **1.593** | **1.458** | **1.427** | **1.501** | **1.495** |

*Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id | AplikasiSimfoni-PPA 2022*

Isu lain terkait anak adalah mengenai perkawinan anak, data I tahun 2022 menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Jawa Tengah sebanyak 11.366 kasus, tertinggi berada di Kabupaten Grobogan (808 kasus) dan terendah di Kota Salatiga (21 kasus). Data tersebut menurun dibanding tahun 2021 yang sebesar 13.595 kasus. Perkawinan anak dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mental, khususnya pada anak perempuan jika segera diikuti dengan kehamilan. Selain melahirkan, norma yang masih banyak berlaku di masyarakat memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada istri untuk mengasuh anak dan mengelola rumah tangga. Di sisi lain, norma sosial mengenai peran laki-laki dalam keluarga dapat menyebabkan suami yang masih berusia muda rentan mengalami tekanan mental jika tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada keluarganya. Tekanan ini dapat memicu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga dan perceraian.

**Tabel 2.142.**
**Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun**
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022**

| Tahun | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1.942 | 1.264 | 3.206 |
| 2019 | 1.513 | 3.726 | 5.239 |
| 2020 | 1.671 | 11.301 | 12.972 |
| 2021 | 1.909 | 11.686 | 13.595 |
| 2022 | 1.850 | 9.516 | 11.366 |

*Sumber: DP3AP2KB dan Kemenag, 2022*

### 2.4.10 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pembangunan kependudukan ke depan dihadapkan pada tantangan mengimplementasikan sinergitas pembangunan kependudukan lima pilar yaitu pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, serta penataan data dan informasi kependudukan termasuk administrasi kependudukan. Implementasi ini kian sulit terwujud manakala capaian kab/kota yang seharusnya telah menyusun Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) masih belum 100% di Jawa Tengah. Rakapitulasi data Kab/Kota di Jawa Tengah yang telah menyusun GDPK sampai dengan tahun 2022 baru tercatat 14 Kab/kota yaitu Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Blora, Kabupaten Brebes.

Sementara itu, upaya menggalakkan kembali program keluarga berencana perlu untuk terus dilakukan mengingat beberapa indicator terkait KB masih perlu ditingkatkan kinerjanya. Hal ini terindikasi dari capaian indikator Contraceptive Prevalence Rate (CPR) yang mengalami tren penurunan, tercatat tahun 2018 sebesar 74,69% menjadi 70,53% di tahun 2022. Tahun 2022, CPR membaik dibanding tahun 2021 tercatat naik sebesar 0,18 point. Meski demikian, angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) justru mengalami tren yang sama yaitu turun dari 2,4 menjadi 2,15. TFR tahun 2022 perlu diwaspadai karena adanya kenaikan sebesar 0,06 point yang menandakan bahwa angka kelahiran tetap mengalami peningkatan meskipun unmetneed telah turun menjadi 11,60 di tahun 2022 atau turun 2,69 point dibanding dengan tahun 2021. Tingginya kelahiran yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan akan berisiko pada rendahnya kualitas SDM dimasa mendatang.

**Tabel 2.143.**
**Perkembangan CPR, TFR dan *Unmetneed* 2018-2022**

| Tahun | CPR | TFR | *Unmet Need* |
|---|---|---|---|
| 2018 | 74,69 | 2,4 | 13,59 |
| 2019 | 73,48 | 2,23 | 13,03 |
| 2020 | 73,26 | 2,27 | 12,90 |
| 2021 | 70,35 | 2,09 | 14,29 |
| 2022 | 70,53 | 2,15 | 11,60 |

*Sumber: BKKBN dan DP3AP2KB Prov.Jateng, 2022*

Tri bina memiliki peranan penting dalam pembangunan keluarga. Melalui tri bina (Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR dan Bina Keluarga Lansia/BKL) diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan orang tua maupun anggota keluarga lainnya dalam membina balita, remaja dan mempersiapkan kelak di masa lansia agar tetap memiliki produktifitas. Data perkembangan BKB, BKR dan BKL menunjukkan tren yang menurun baik jumlahnya maupun keaktifannya, ini menjadi tantangan ke depan untuk bagaimana meningatkan Tri Bina ini lebih berkembang dan berkualitas.

**Tabel 2.144.**
**Perkembangan Tri Bina 2018-2022**

| Tahun | BKB | | | BKR | | | BKL Jateng | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | Aktif | % | Jumlah | Aktif | % | Jumlah | Aktif | % |
| 2018 | 12.717 | 12.204 | 95,97 | 6.418 | 6.236 | 97,16 | 8.673 | 8.273 | 95,39 |
| 2019 | 19.465 | 11.473 | 58,94 | 10.268 | 6.145 | 59,85 | 13.496 | 7.948 | 58,89 |
| 2020 | 11.071 | 10.533 | 95,14 | 5.947 | 5.921 | 99,56 | 7.763 | 7.696 | 99,14 |
| 2021 | 10.473 | 10.338 | 98,71 | 5.860 | 5.794 | 98,87 | 7.804 | 7.724 | 98,97 |
| 2022 | 9.184 | 9.049 | 98,53 | 5.490 | 5.311 | 96,74 | 7.180 | 7.010 | 97,63 |

*Sumber: BKKBN dan DP3AP2KB Prov.Jateng, 2022*

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena data penduduk wajib KTP yang sangat dinamis, setiap harinya terdapat penambahan penduduk wajib KTP. Peningkatan layanan kependudukan melalui perekaman, penerbitan KTP dan mendekatkan layanan terus didorong dalam rangka mewujudkan target semua penduduk wajib KTP memiliki identitas resmi penduduk. Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran Kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0-18 tahun di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2017-2019 meningkat dari 87,42 persen menjadi 96,09 persen, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 83,16 persen. Tingkat kepemilikan akte kelahiran kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 99,01 persen. Peningkatan yang signifikan tersebut disebabkan karena pelayanan administrasi kependudukan yang semakin baik serta adanya inovasi yang dilakukan di kabupaten/kota, seperti pelayanan dokumen kependudukan 1 (satu) hari jadi, pelayanan 3 in 1 (three in one), bayi lahir pulang dari rumah sakit langsung mendapatkan akta kelahiran, sms gateway, dan layanan online. Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah diketahui dari jumlah penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pada tahun 2021, sebanyak 24 antara lain, Dinas Sosial, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Pandapatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, RS Karyadi, RSJD Surakarta, Biro Kesejahteraan Rakyat, Balkesmas Provinsi, Balkesmas Pati, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPR BKK Jawa Tengah, RS Panti Wiloso,

RSJD Amino Gondohutomo, RSJD Soedjarwadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### 2.4.11 Kepemudaan dan olahraga

Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai kekuatan utama berupa daya piker revolusioner, kreatif, agresif, inovatif, dan produktif sehingga mampu memunculkan ide-ide konstruktif dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa. Pemuda merupakan kekuatan moral, control social, dana gen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang dimaksud dengan pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang berusia 16-30 Tahun. Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2022, jumlah pemuda di Jawa Tengah mencapai 7,97 juta jiwa.

Pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Jawa Tengah. Permasalahan terkait pengangguran merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan di Jawa Tengah yang perlu mendapat perhatian serius. Pengangguran dapat menjadi sumber utama kemiskinan, mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Jawa Tengah merupakan persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan dan tidak sedang mempunyai pekerjaan. TPT Pemuda Jawa Tengah tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif. TPT pemuda Jawa Tengah pada Tahun 2022 sebesar 11,87%, terus mengalami penuruan dari Tahun 2020.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari banyaknya jumlah pemuda yang bekerja. Salah satu indikator kemandirian pemuda dapat dilihat dari persentase Pemuda yang berusaha sendiri/berwirausaha. Dengan adanya kewirausahaan pemuda diharapkan mampu menciptakan lapangan usaha sendiri, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesempatan bekerja. Tingginya jumlah pemuda yang berstatus sebagai buruh/karyawan menggambarkan masih rendahnya kewirausahaan di kalangan Pemuda Jawa Tengah. Persentase pemuda yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020. Di sisi lain persetase pemuda yang berusaha sendiri mengalami peningkatan dari Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pemuda yang berusaha sendiri/berwirausaha, dan masih tingginya pemuda yang bekerja sebagai buruh/karyawan. Perkembangan Kepemudaan di Jawa Tengah tergambarkan pada tabel di bawah ini

**Tabel 2.145.**
**Perkembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
| Jumlah Pemuda di Jawa Tengah (Juta Jiwa) | 7,84 | 7,79 | 7,75 | 7,77 | 7,97 |
| Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda | 12,33 | 11,87 | 14,83 | 13,23 | 11,87 |
| Persentase pemuda yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan | 55,36 | 60,91 | 54,18 | 58,21 | Na |

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
| Persentase pemuda yang berusaha sendiri | 12,05 | 12,31 | 11,83 | 12,05 | Na |
| Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) | 53,50 | 54,50 | 53,67 | 50,67 | Na |

*Sumber: 1. BPS 2023*
*2. BPS Provinsi Jawa Tengah 2023)*
*Keterangan : Sebagian data Tahun 2022 belum dirilis (Statistik Pemuda Jawa Tengah)*

Olahraga merupakan jati diri bangsa dan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Peran olahraga di antaranya bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Perkembangan prestasi olahraga di Jawa Tengah salah satunya dapat diukur dari peringkat pada kejuaraan tingkat nasional melalui Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) bagi atlet penyandang disabilitas. Pelaksanaan kejuaraan PON dan PEPARNAS dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali. Perkembangan prestasi atlet Jawa Tengah pada perhelatan PON mengalami fluktuatif dari Tahun 2012-2021 yaitu menduduki peringkat 4 pada Tahun 2012, meningkat keperingkat 2 pada Tahun 2016, namun mengalami penurunan cukup siknifikan pada Tahun 2021 pada peringkat 6 nasional. Sedangkan prestasi olahraga Jawa Tengah pada kejuaraan PEPARNAS terus mengalami penurunan dari Tahun 2021-2021. Perkembangan prestasi olahraga Provinsi Jawa Tengah pada kejuaraan tingkat Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.146.**
**Perkembangan Prestasi Olahraga Jawa Tengah pada Kejuaraan Tingkat Nasional**

| Kejuaraan | Peringkat | | |
|---|---|---|---|
| | Tahun 2012 | Tahun 2016 | Tahun 2021 |
| Pekan Olahraga Nasional (PON) | 4 | 2 | 6 |
| Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) | 1 | 2 | 3 |

*Sumber: DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Olahraga menjadi bagian penting dari kebijakan publik perlu mendapatkan pengaturan, termasuk dalam menentukan ukuran keberhasilannya. Dalam UU No. 3 Tahun 2005 yang kemudian diganti menjadi UU No. 11 Tahun 2022, tujuan olahraga bersifat majemuk yang mencakup kesehatan fisik dan psikis, karakter etos dan moral, ekonomi, sosial, budaya, dan martabat bangsa. Tujuan tersebut perlu diukur guna memastikan sudah sampai di mana upaya kita mewujudkan tujuan tersebut. *Sport Development Index* (SDI) merupakan instrumen untuk mengukur sekaligus instrumen kebijakan untuk mendinamisasi dan mengoptimalisasi pembangunan olahraga. Pada tahun 2021 dimensi SDI terdiri dari SDM, ruang terbuka, partisipasi, kebugaran, literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, ekonomi, dan performa.

Capaian SDI Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan fluktuatif, dari Tahun 2019-2022 sebagaimana pada tabel sebagai berikut

**Tabel 2.147.**

**Capaian SDI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2022**

| Tahun | Angka *Sport Development Index* (SDI) Jawa Tengah |
|---|---|
| 2019 | 0,55 |
| 2020 | 0,60 |
| 2021 | 0,34 |
| 2022 | 0,37 |

*Sumber: Laporan Nasional Sport Development Index (SDI) Kemenpora Tahun 2022*

### 2.4.12 Perpustakaan

Literasi merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi dan menghitung, menggunakan bahan cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks. Literasi melibatkan rangkaian pembelajaran yang memungkinkan individu untuk dapat mencapai tujuan mereka, mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka, serta berpartisipasi penuh dalam masyarakat luas. Peradaban yang berliterasi selalu ditandai dengan kepedulian yang tinggi terhadap perpustakaan. Perpustakaan 8selalu menjadi transportasi literasi ketika suatu peradaban mencapai puncak keemasan. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang peradaban manusia tidak dapat lepas dari perpustakaan. Oleh karenanya, perpustakaan memegang peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan perpustakaan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berikut merupakan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Tengah.

**Tabel 2.148.**

**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022**

| Unsur Pembentuk Literasi Masyarakat (UPLM) | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM 1) | 0,00140 | 0,00080 | 0,00066 | 0,0033 |
| Ketercukupan Koleksi (UPLM 2) | 0,05210 | 0,06760 | 0,04780 | 1,5831 |
| Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM 3) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00003 | 0,0045 |
| Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari (UPLM 4) | 0,00020 | 0,00050 | 0,00057 | 0,3342 |
| Perpustakaan ber-SNP (UPLM 5) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00006 | 2,3270 |
| Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM 6) | 0,03270 | 0,03380 | 0,03249 | 0,2727 |
| Anggota Perpustakaan (UPLM 7) | 0,03040 | 0,03260 | 0,03160 | 0,6471 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)** | **11,68** | **13,54** | **11,33** | **15,62** |

*Sumber: Perpusnas 2019 - 2022*

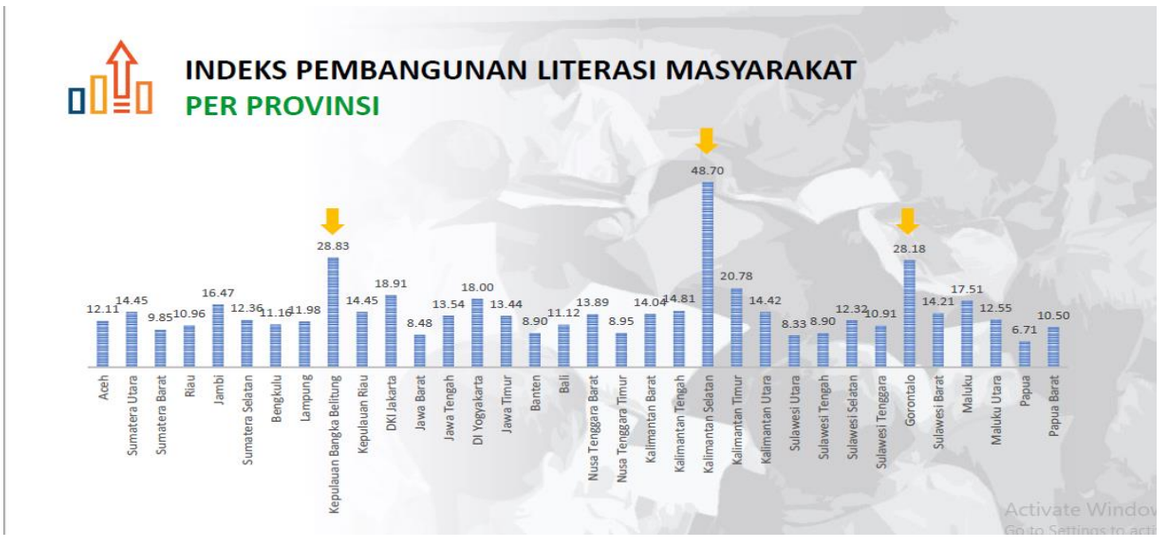


*Sumber: Perpusnas, 2020*

**Gambar 2.74.**
**Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020**

Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 13,54 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 11,33. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena literasi masyarakat merupakan salah satu pembentuk karakter sumber daya manusia.

**Tabel 2.149.**
**Koleksi Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| No | Jenis Koleksi | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Judul | Eks | Judul | Eks | Judul | Eks | Judul | Eks | Judul | Eks |
| 1 | Koleksi Perpustakaan Provinsi dan Keliling | 1.028.856 | 1.805.519 | 1.053.825 | 1.906.840 | 1.061.697 | 1.920.846 | 1.111.585 | 1.914.474 | 1.190.688 | 2.092.799 |
| 2 | Koleksi e-book | 20.672 | 12.6913 | 50.085 | 235.236 | 75.998 | 452.112 | 68.802 | 516.436 | 79.949 | 527.485 |
| 3 | Koleksi Khusus untuk pemustaka berkebutuhan khusus | 3.545 | 6.697 | 8.462 | 16.096 | 9.165 | 17.618 | 10.756 | 19.665 | 4.480 | 6.525 |
| | **TOTAL** | **1.053.073** | **1.939.129** | **1.112.372** | **2.158.172** | **1.146.860** | **2.390.576** | **1.184.867** | **2.437.435** | **1.275.117** | **2.626.809** |

*Sumber: Dinas Kersipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Koleksi pada 36 Perpustakaan Umum Daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan perpustakaan keliling (perpusling) pada tahun 2018 sebanyak 1.028.856 judul, kemudian perlahan meningkat menjadi 1.190.688 tahun 2022. Sedangkan untuk koleksi e-book pada tahun 2018 semula sejumlah 20.672 judul menjadi 79.949 judul pada tahun 2022.

Sedangkan untuk pengunjung pada 36 Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2020-2021 mengalami tren penurunan. Kondisi

ini antara lain disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 dimana diterapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga kunjungan perpustakaan mulai 2020 jumlahnya menurun.

**Tabel 2.150.**
**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Orang)**

| NO | Tahun | Pengunjung |
|---|---|---|
| 1 | 2018 | 5.611.358 |
| 2 | 2019 | 5.871.814 |
| 3 | 2020 | 3.160.335 |
| 4 | 2021 | 3.131.755 |
| 5 | 2022 | 4.891.435 |

*Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Menurut survei yang dilakukan oleh Perpusnas pada tahun 2021 meningkatnya koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ternyata belum berbanding lurus dengan persentase koleksi yang dipinjam per tahun yang hanya berada di kisaran 13,5 persen, hal ini menunjukkan bahwa koleksi bahan Pustaka baik fisik maupun digital yang ada belum secara optimal dimanfaatkan oleh pemustaka. Sejalan dengan hal tersebut, hasil penilaian kegemaran membaca masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 61.88 atau termasuk kategori sedang. Menunjukkan bahwa minat membaca masyarakat Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan.

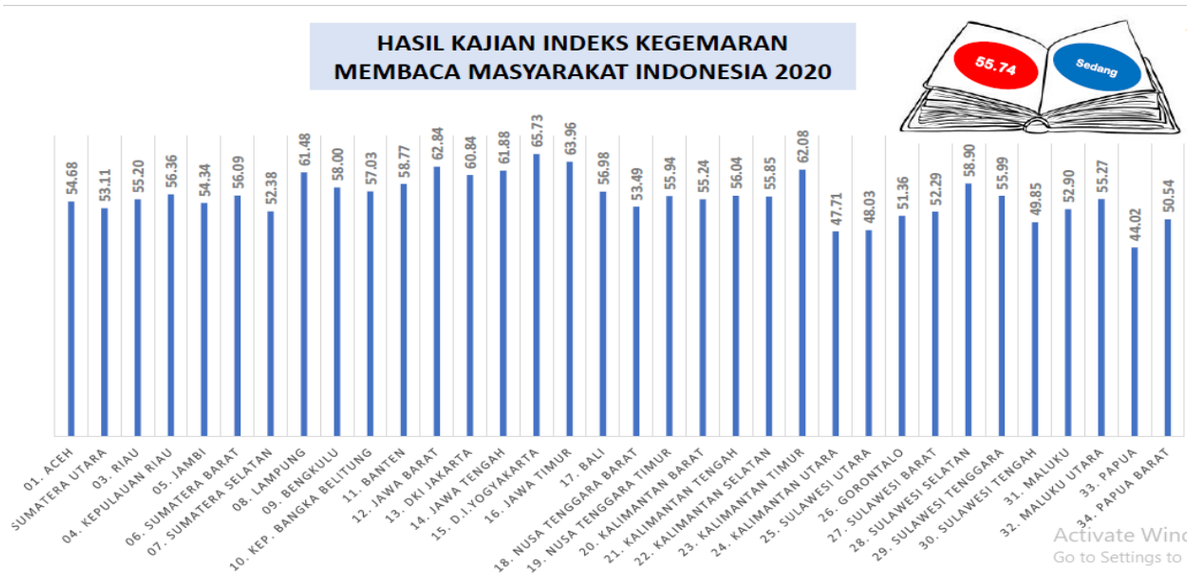


*Sumber: Perpusnas, 2020*

**Gambar 2.75.**
**Capaian Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat (NTGM) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020**

### 2.4.13 Transmigrasi

Upaya sinkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi dilakukan melalui kerjasama dengan daerah transmigrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi lahan transmigrasi yang ideal yaitu 2C (*clean and clear*) dan 4L (Layak huni, Layak berkembang, Layak usaha, dan Layak lingkungan) bagi calon transmigran. Upaya kerjasama yang telah dilakukan adalah kerjasama den

gan 22 provinsi lokasi transmigrasi diluar Jawa yaitu Provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Kalimantan Utara, Aceh, dan Bangka Belitung. Kerjasama tersebut direalisasikan dengan penyusunan *MoU* antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 22 Provinsi tersebut.

Selama tahun 2016 – 2021, persentase penempatan transmigran Jawa Tengah cenderung meningkat. Tahun 2016 sebesar 13,26 persen menurun menjadi 10,23 persen di tahun 2019, dan sempat terjadi kekosongan penempatan transmigran di tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 dan di tahun 2021 menjadi sebesar 0,79 persen. Apabila dilihat dari animo masyarakat terhadap transmigrasi cukup baik namun terkendala kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga realisasi penempatannya tidak cukup besar setiap tahunnya.

**Tabel 2.151.**
**Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| No | Tahun | Animo (KK) | Kuota Pusat (KK) | Jumlah Penempatan (KK) | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2.246 | 170 | 169 | 7,52 |
| 2 | 2019 | 2.160 | 257 | 221 | 10,23 |
| 3 | 2020 | 1.263 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2021 | 1.263 | 10 | 10 | 0,79 |
| 5 | 2022 | Na | Na | Na | Na |

*Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan transmigran sebagai bekal di daerah tujuan telah dilaksanakan pelatihan dan pembekalan pengetahuan mengenai kondisi tempat tujuan, budaya dan tradisi masyarakat setempat kepada calon transmigran yang dilakukan oleh Balai Latihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat (Balatranspenca) Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017 pelatihan dasar umum calon transmigran dialihkan ke Balai Latihan Pertanian dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di Klampok, Banjarnegara. Di tahun 2021, Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Banjarnegara tidak lagi melatih calon transmigran. Namun demikian para calon transmigran dari Provinsi Jawa Tengah tetap mengikuti pelatihan di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPLM) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2.5. Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan

Kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta kebencanaan di Provinsi Jawa Tengah ditunjukan dari gambaran daya dukung dan daya tampung lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan perubahan iklim. Gambaran lainnya yang dapat menunjukan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup antara lain terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, kualitas lahan, rehabilitasi pesisir, pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan berkelanjutan, kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB, pengelolaan sumberdaya energi dan mineral, dan penganggulangan bencana. ambaran kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta kebencanaan diuraikan sebagai berikut.

### 2.5.1.Daya Dukung dan Daya Tampung

Keberadaan sumberdaya alam di bumi tidak tersebar merata sehingga daya dukung lingkungan pada setiap daerah akan berbeda-beda. Oleh karena itu,

pemanfaatannya harus dijaga agar terus berkesinambungan dan tindakan eksploitasi harus dihindari. Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus memperhatikan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, Indeks Jasa Penyedia Air, Jasa Penyedia Pangan, Jasa Pengaturan Air, Jasa Pengaturan Iklim, Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Perlindungan Bencana masih dalam rentang sedang, status D3T air terlampaui, dan D3T pangan belum terlampaui.

Pada Keputusan Menteri LHK No. SK. 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional ditetapkan bahwa kondisi daya dukung dan daya tampung air di Provinsi Jawa Tengah telah terlampaui yang mana ketersediaan air sebesar 31.032.527.608,75 m3/tahun dan kebutuhan atau pemanfaatan air sebesar 32.719.164.930,76 m3/tahun. Jika dilihat dari distribusi wilayah dengan status D3T air sudah terlampaui mencapai 47,55% dan yang belum terlampaui sebesar 52,45% dari total wilayah Jawa Tengah. Dengan demikian dari hasil perhitungan secara nasional maka kondisi ketersediaan di Jawa Tengah mengalami defisit sebesar 1.686.637.322,01 m3/tahun. Berdasarkan pemetaan D3T air Jawa Tengah, maka terdapat 20 Kabupaten/Kota dengan status agregrat daya dukung dan daya tampung air terlampaui. Berikut distribusi daya dukung dan daya tampung air setiap kabupaten/ kota di Jawa Tengah.

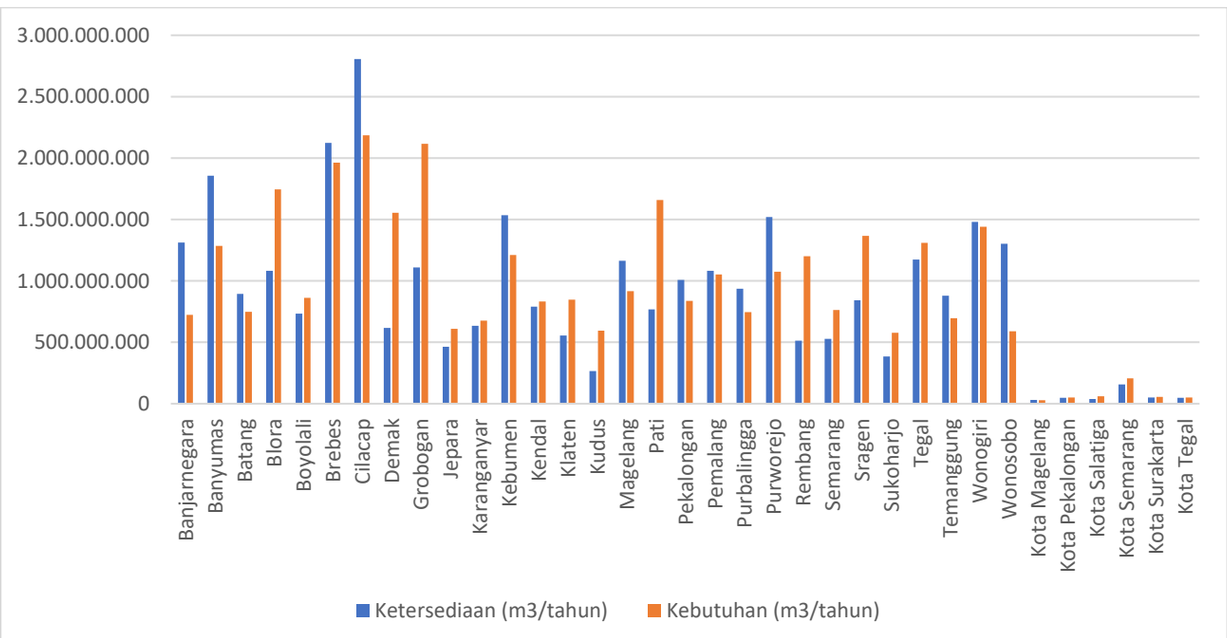


*Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023*

**Gambar 2.76.**

**Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Air Provinsi Jawa Tengah**

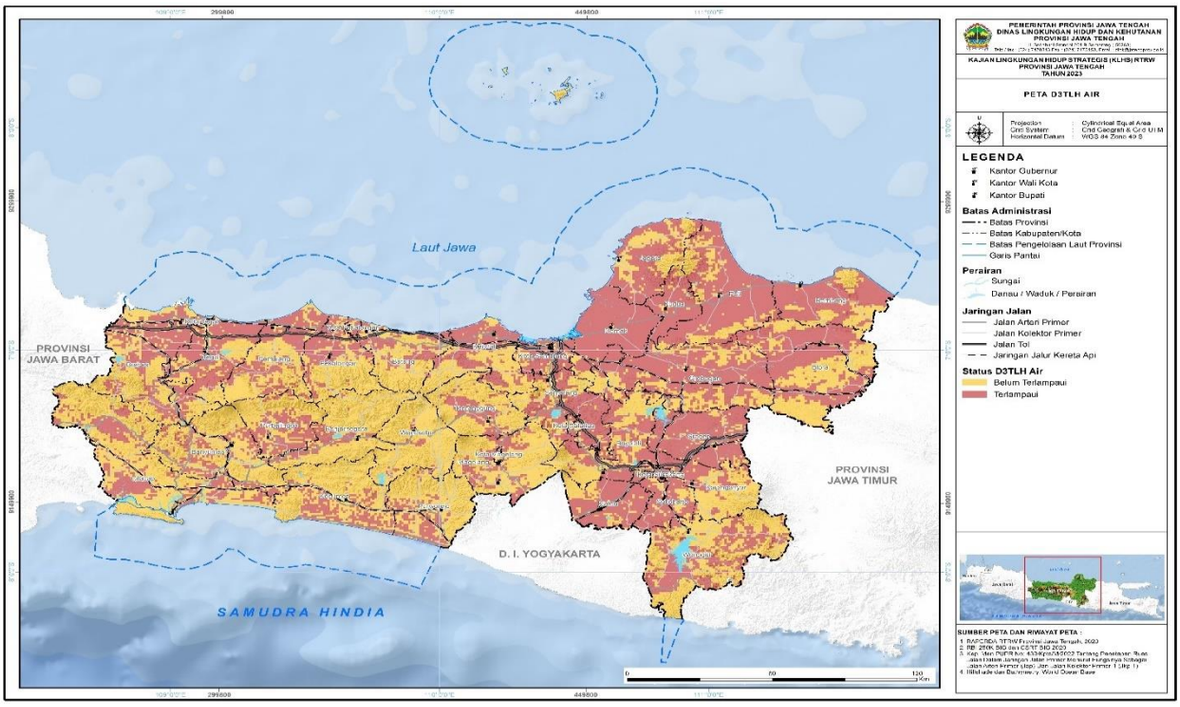


*Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023*

**Gambar 2.77.**

***Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Jawa Tengah***

Berdasarkan grafik diatas wilayah Kota di Jawa Tengah cenderung melampaui ambang batas penduduk yang dapat didukung, hal ini disebabkan kondisi wilayah terkait jasa lingkungan hidup penyedia air tidak terlalu baik, tetapi disisi lain wilayah tersebut memiliki jumlah populasi yang banyak. Provinsi Jawa Tengah mengalami peninggkatan ketersediaan dan kebutuhan air. Hal ini disebabkan perubahan penutupan lahan di Jawa Tengah di ikuti dengan peningkatan jumlah populasi.

Selanjutnya Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan total ketersediaan 5.508.531,0 ton beras dan kebutuhan mencapai 2.792.243,71 ton beras sehingga kondisinya masih surplus sebesar 2.716.287,29 ton beras. Jika dilihat berdasarkan wilayahnya maka masih terdapat sekitar 11,38% yang daya dukung pangannya sudah terlampaui. Kondisi daya dukung pangan di setiap kabupaten/kota berbeda sesuai kondisi wilayah tersebut terutama penggunaan lahan dan jumlah penduduk. Jika dilihat di masing-masing kabupaten/kota maka seluruh kota daya dukung pangannya terlampaui. Berikut ditampilkan status daya dukung dan daya tampung pangan untuk setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah.

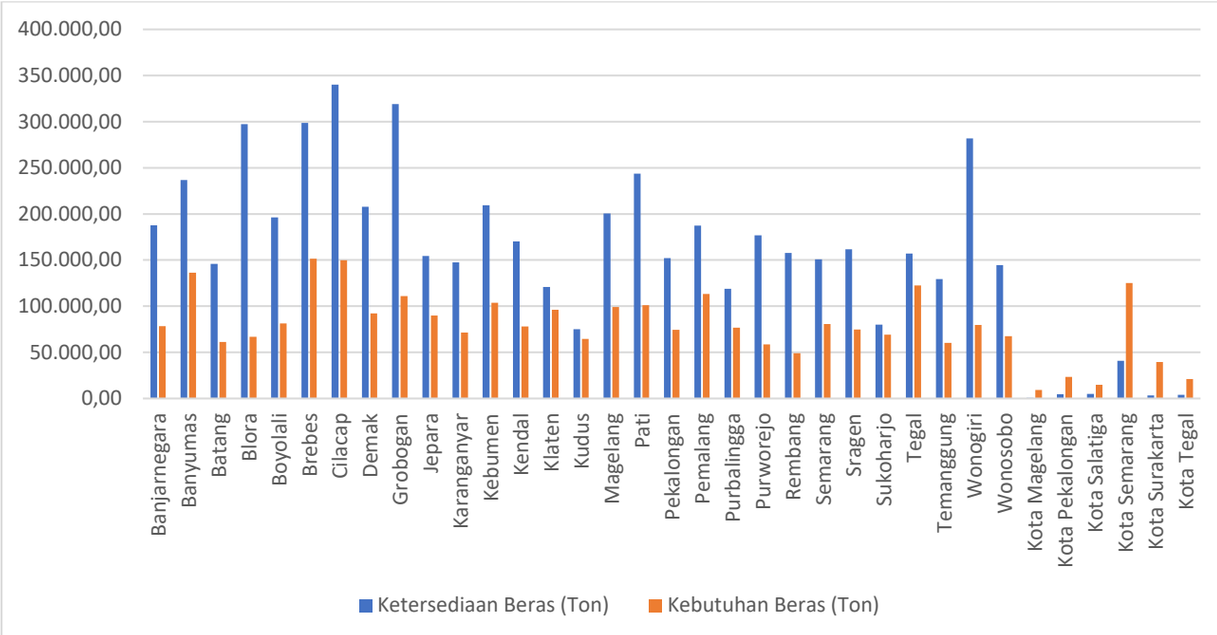


*Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023*

**Gambar 2.78.**

**Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Pangan Provinsi Jawa Tengah**

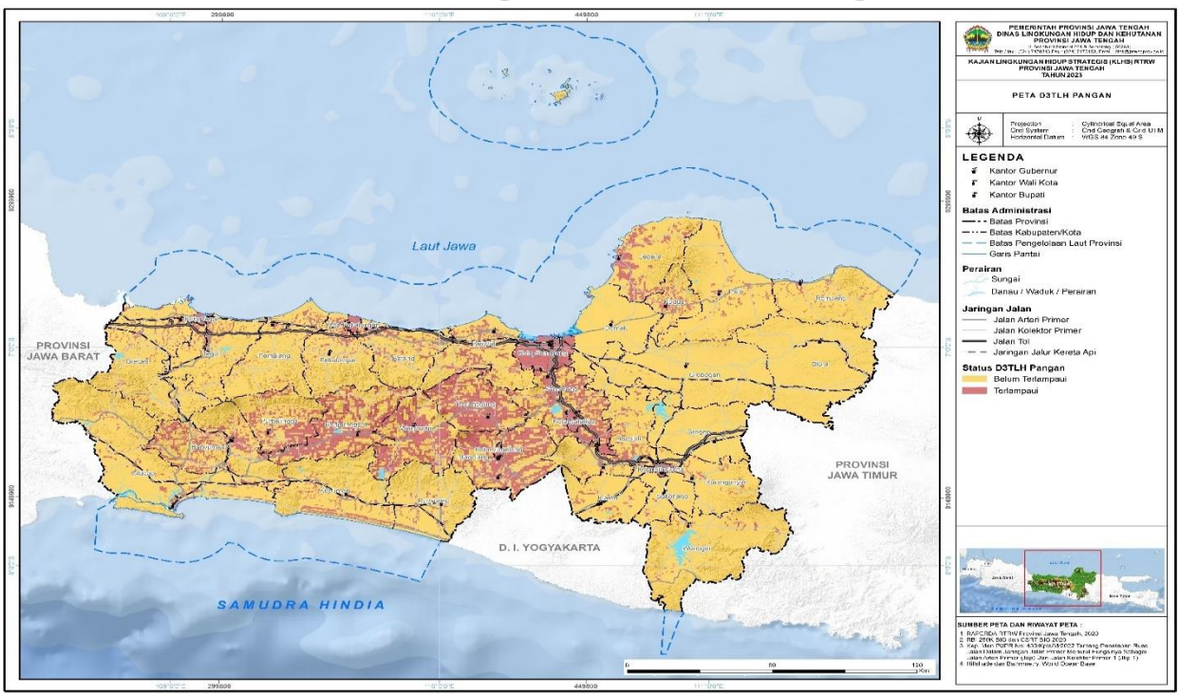


*Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023*

**Gambar 2.79.**

***Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah***

## 2.5.2.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah secara umum menunjukkan peningkatan. Upaya perbaikan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup dapat ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menggambarkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan yang telah mengalami perbaikan.

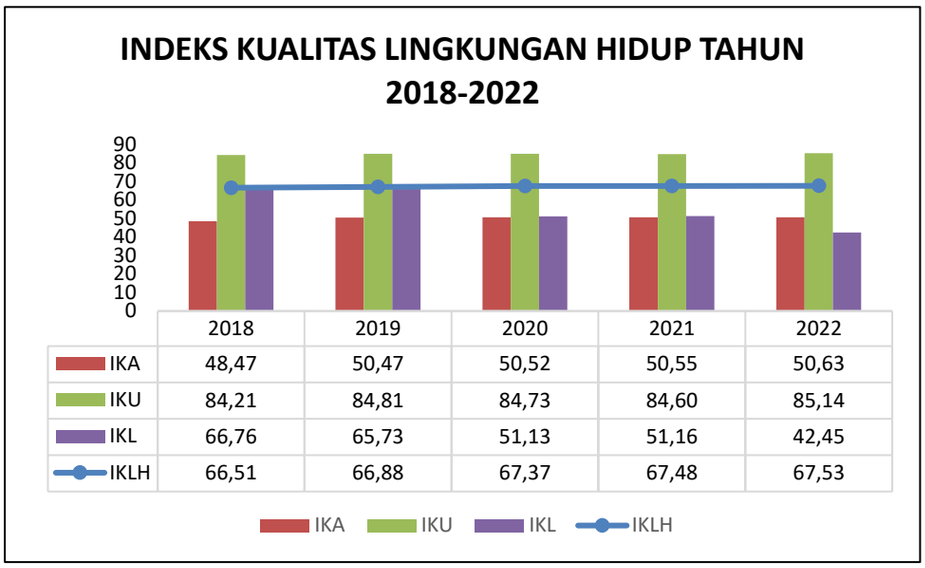


*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,2023*

**Gambar 2.80.**

**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022**

Perkembangan capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022 menunjukkan hasil cukup baik, dengan nilai capaian IKLH tahun 2018 sebesar 66,51 dan tahun 2022 sebesar 67,53 atau terjadi peningkatan sebesar 1,02 poin atau 1,53%. Hal ini mengindikasikan perbaikan kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah merupakan salah satu prioritas utama pembangunan.

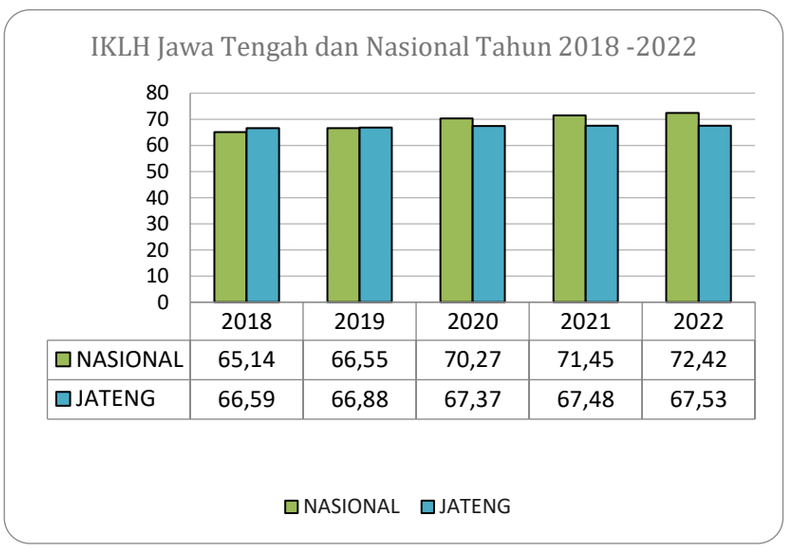


*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022*

**Gambar 2.81.**

**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022**

Nilai IKLH Nasional untuk tahun 2022 adalah 72,42 lebih tinggi dari nilai IKLH Jawa Tengah sebesar 67,53. Meningkatnya IKLH Nasional 2021 sebanyak 1,18 poin disebabkan adanya perbaikan IKU dan IKA Nasional. Nilai IKLH Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022. Jika dihadapkan dengan capaian IKLH Nasional, capaian IKLH Jawa Tengah pada Tahun 2018-2019 berada di atas capaian IKLH Nasional. Sedangkan tahun 2020-2021 capaian Jateng berada di bawah nasional.

Nilai IKLH dipengaruhi oleh nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diketahui bahwa perhitungan nilai

IKLH Provinsi mengalami perubahan nilai pembobotan dan penambahan indikator Indeks kualitas air laut (IKAL) dengan rumus sebagai berikut:

**IKLH Provinsi = (0,34 x IKA) + (0,428 x IKU) + (0,133 x IKL)+ (0,099 x IKAL)**

Perubahan metode perhitungan nilai IKLH berimplikasi terhadap perubahan nilai IKLH secara total, namun demikian tidak menurunkan target capaian akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah (2018-2023). Dalam rangka mendorong dan memperkuat pembangunan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon terutama aspek IKLH, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan target IKLH 2024 sebesar 67,55 (Kategori Sedang) dengan perincian nilai IKU = 85,01; Nilai IKA = 50,66; dan nilai IKL = 42,45, dengan menggunakan baseline data tahun 2022 didasarkan pada :

Perhitungan IKU menggunakan hasil pemantauan dari 2 stasiun AQMS Kota Surakarta dan Kota Semarang (semula hanya menggunakan hasil pemantauan 1 stasiun AQMS di Kota Semarang), sehingga ada penyesuaian terhadap baseline nilai IKU di tahun 2022 sebesar 84,96 dan indeks SO2 dan NO2 sebesar 0,3707.

Penambahan data titik sampel pemantauan kualitas air dari Kabupaten/ Kota sehingga menyebabkan penyesuaian terhadap baseline nilai indeks pencemar air di tahun 2022 sebesar 3,38. Namun perubahan angka tersebut tidak menyebabkan perubahan terhadap nilai IKA karena di dalam metode perhitungan IKA, nilai indeks pencemar air tersebut masih berada pada status mutu yang sama yaitu cemar ringan, sehingga dalam pembobotan nilai indeks dengan persentase status mutu masih sama.

Penetapan target IKLH Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024-2026 ditetapkan dengan mempertimbangkan:

1) Peningkatan jumlah kejadian bencana akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan;
2) Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
3) Berdasarkan SK Menlhk 297/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung air Nasional, terindikasi bahwa sejak tahun 2019 Jawa Tengah daya dukung air telah terlampaui sehingga perlu lebih bijaksana dalam mengelola sumber daya air.
4) Kebijakan Nasional dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan iklim investasi di Jawa Tengah.

### 2.5.3.Perubahan Iklim

Peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perubahan iklim secara global. Perubahan iklim berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, seperti adanya bencana hidrometeorologi, perubahan musim dan kenaikan muka air laut. Penanganan dampak dari perubahan iklim dapat dilakukan melalui aksi mitigasi maupun aksi adaptasi guna meningkatkan resiliensi atau ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan data persebaran indeks kerentanan perubahan iklim di Jawa Tengah (dalam skala kecamatan) menunjukan hasil bahwa mayoritas kecamatan di Provinsi Jawa Tengah berada di kelas kerentanan sedang yaitu sebanyak 442

kecamatan atau 77%. Kecamatan dengan kerentanan kelas sangat rendah sebanyak 68 kecamatan atau 12%, sedangkan kecamatan dengan kelas kerentanan tinggi sebanyak 24 kecamatan atau 4%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi kecamatan yang ada di Provinsi Jawa Tengah saat ini cukup rentan terhadap perubahan iklim yang dikategorikan dari banyaknya kecamatan yang berada di kerentanan kelas sedang. Apabila dilihat dari kondisi geografis maka ancaman wilayah pesisir utara berupa kenaikan muka air laut dan peningkatan banjir dan rob. Kawasan dataran rendah berpotensi terjadi peningkatan banjir, dan dataran tinggi terutama yang memiliki lereng curam dan jenis tanah yang mudah longsor rentan terhadap bencana longsor. Sedangkan untuk pesisir selatan peningkatan cuaca ekstrem pada perairan laut akan meningkatkan ancaman terjangan gelombang laut terhadap aktivitas nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir.

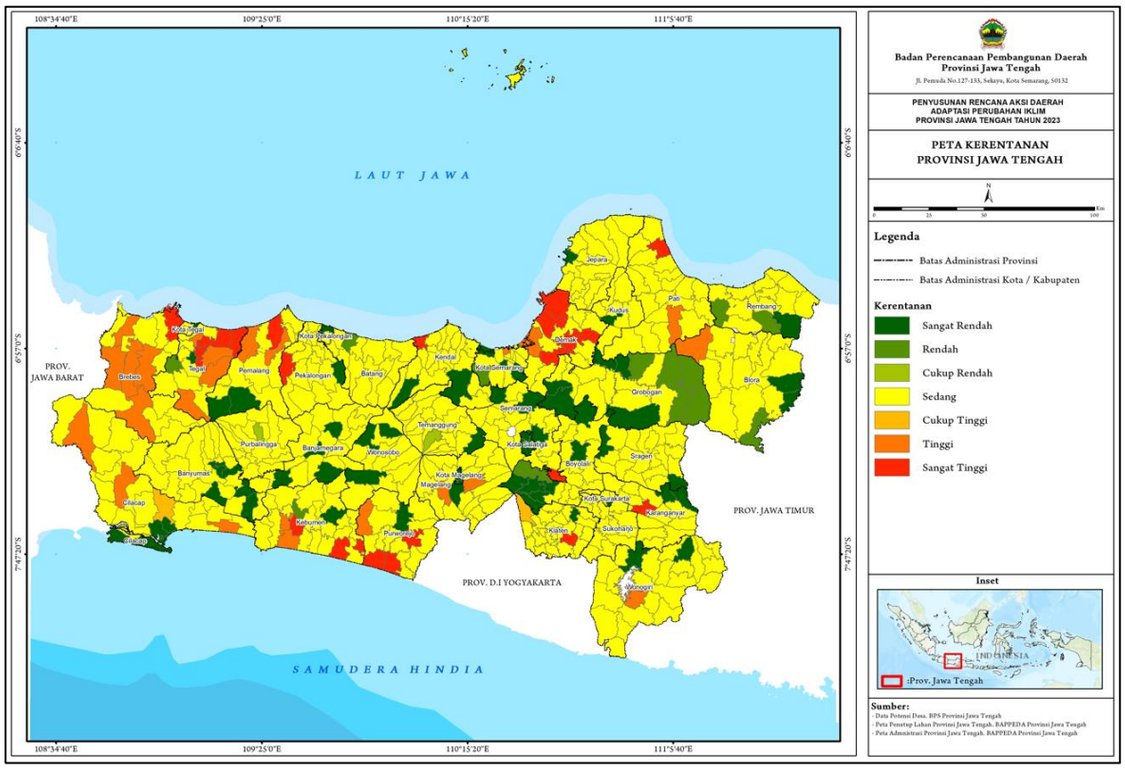


*Sumber: Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.82.**
**Peta Kerentanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah sebesar 145.232,59 $GgCO_2eq$ dengan kontributor utama penyumbang emisi GRK Provinsi Jawa Tengah adalah sektor energi mencapai 73.018,72 $GgCO_2eq$ (50,28 persen), disusul oleh sektor limbah sebesar 47.859,49 $GgCO_2eq$ (32,95 persen). Selain menghasilkan emisi GRK, Provinsi Jawa Tengah mempunyai potensi dalam menyimpan cadangan karbon terutama berasal dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan yang mampu menyerap emisi sebesar 1.538,22 $GgCO_2eq$ (1,06 persen).

**Tabel 2.152.**
**Besaran Emisi GRK Untuk Setiap Sektor Pada Tahun 2022**

| No | Sektor | Emisi ($GgCO_2eq$) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Energi | 73.018,72 | 50,28 |
| 2 | Pertanian | 21.227,59 | 14,62 |

| No | Sektor | Emisi ($GgCO_2eq$) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 3 | Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) | 4.665,01 | 3,21 |
| 4 | Limbah | 47.859,49 | 32,95 |
| 5 | Kehutanan dan Penggunaan Lahan | -1.538,22 | -1,06 |
| | **Total Emisi GRK** | **145.232,59** | **100,00** |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2023*
**Keterangan: Perhitungan besaran emisi GRK tahun 2022, merupakan data tahun 2021 yang dihitung tahun 2022.*

Apabila dilihat dari tren pertumbuhan emisi GRK Provinsi Jawa Tengah terjadi peningkatan emisi dari tahun ke tahun, terutama dari sektor energi. Hal ini dikarenakan Jawa Tengah menjadi lokasi beberapa sumber pembangkit untuk wilayah Jawa dan Bali. Untuk itu kebijakan terkait pembangunan rendah karbon perlu menjadi prioritas di Jawa Tengah. Lonjakan kenaikan juga terdapat pada sektor limbah pada tahun 2020 karena adanya rekalkulasi akibat adanya data baru atau update data dari instansi atau OPD terkait.

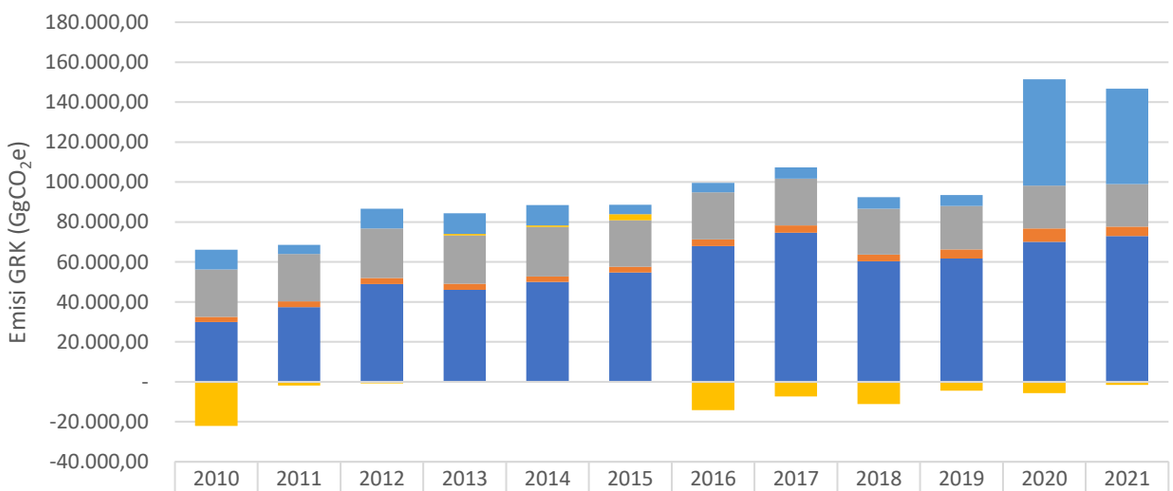


| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMBAH | 9.852, | 4.583, | 9.948, | 10.357 | 10.248 | 4.677, | 4.738, | 5.711, | 5.745, | 5.410, | 53.172 | 47.859 |
| KEHUTANAN | -22.126 | -1.865, | -767,95 | 719,34 | 643,67 | 3.103, | -14.096 | -7.311, | -11.127 | -4.380, | -5.662, | -1.538, |
| PERTANIAN | 23.746 | 23.744 | 24.753 | 24.215 | 24.766 | 23.285 | 23.604 | 23.328 | 23.096 | 21.695 | 21.497 | 21.227 |
| IPPU | 2.636, | 2.832, | 3.048, | 3.099, | 2.850, | 2.866, | 3.324, | 3.736, | 3.331, | 4.649, | 6.737, | 4.665, |
| ENERGI | 29.895 | 37.444 | 48.943 | 46.039 | 49.969 | 54.737 | 67.994 | 74.622 | 60.308 | 61.675 | 70.028 | 73.018 |

*Sumber: SIGNSMART KLHK, 2023*

**Gambar 2.83.**
**Tren Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2021**

Salah satu upaya dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim adalah Pembangunan Rendah Karbon. Pembangunan Rendah Karbon merupakan platform pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalisasi eksploitasi sumber daya alam. Strategi dan kebijakan di dalam Pembangunan Rendah Karbon merupakan aksi mitigasi yang melibatkan multi sektor dan multi pihak. Aksi-aksi mitigasi Pembangunan Rendah Karbon yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten/Kota dilaporkan ke dalam aplikasi AKSARA Bappenas.

Berdasarkan pelaporan yang dilakukan pada aplikasi AKSARA BAPPENAS, potensi penurunan emisi GRK Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu 2010-2022 adalah sebesar 39.530,34 $GgCO_2eq$. Sedangkan potensi penurunan emisi untuk tahun 2022 saja adalah sebesar 1.200,71 $GgCO_2eq$ dengan kontributor utama potensi penurunan emisi GRK dari sektor energi yang mencapai 603,17 $GgCO_2eq$.

Peningkatan aksi-aksi mitigasi pada sektor energi berasal dari sektor transportasi yang merupakan dukungan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sedikitnya angka penurunan emisi di Jawa Tengah pada 2022 ini adalah karena belum optimalnya pelaporan aksi mitigasi pada aplikasi AKSARA, sehingga data yang masuk lebih sedikit dibandingkan aksi mitigasi yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Selain itu industri-industri yang ada di Jawa Tengah juga belum melakukan pelaporan dalam AKSARA sehingga penurunan emisi di sektor IPPU masih kosong (belum ada datanya). Rincian penurunan emisi GRK di Jawa Tengah tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.153.**
**Aksi Penurunan Emisi GRK untuk Setiap Sektor pada Tahun 2022**

| No | Sektor | Emisi ($GgCO_2eq$) |
|---|---|---|
| 1 | Energi | 603,17 |
| 2 | Kawasan Pesisir dan Kelautan (*Blue Carbon*) | 22,16 |
| 3 | Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) | - |
| 4 | Pengelolaan Limbah | 553,90 |
| 5 | Kehutanan dan Penggunaan Lahan (FOLU) | 21,49 |
| | **Total Emisi GRK** | **1.200,71** |

*Sumber: Aplikasi AKSARA BAPPENAS, (https://pprk.bappenas.go.id/aksara/), 2023 (data masuk sampai dengan 23 Oktober 2023 pkl 10.32 WIB)*

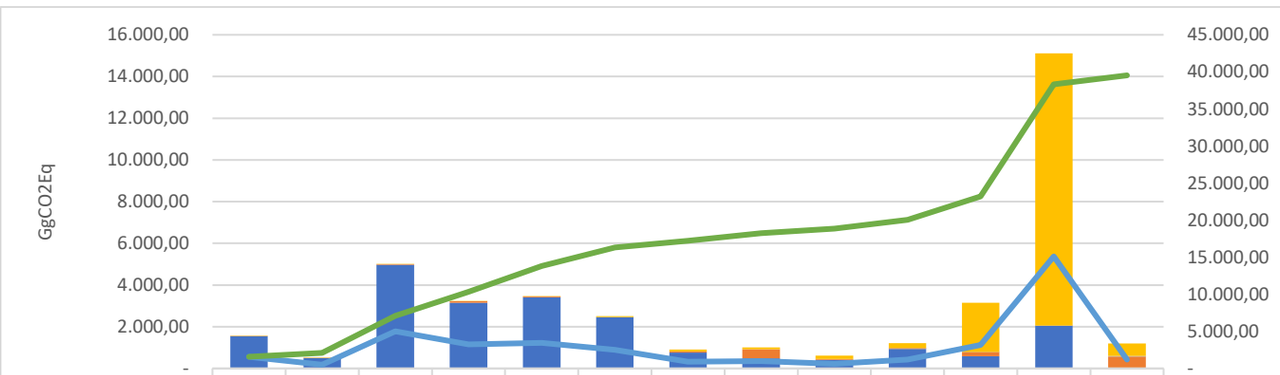


| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi | 24,56 | 2,74 | 12,75 | 14,87 | 13,08 | 40,67 | 87,77 | 89,74 | 170,89 | 231,99 | 2.356, | 13.049 | 603,17 |
| Blue Carbon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,37 | 2,62 | 7,14 | 22,16 |
| Limbah | 8,09 | 2,20 | 33,03 | 80,11 | 33,67 | 19,78 | 60,41 | 426,99 | 32,62 | 32,75 | 212,99 | 5,00 | 553,90 |
| FOLU | 1.549, | 501,75 | 4.968, | 3.148, | 3.419, | 2.445, | 758,47 | 488,28 | 417,46 | 942,87 | 580,78 | 2.048, | 21,49 |
| Total | 1.581, | 506,69 | 5.014, | 3.243, | 3.466, | 2.505, | 906,65 | 1.005, | 620,97 | 1.214, | 3.153, | 15.109 | 1.200, |
| Grand Total | 1.581, | 2.088, | 7.103, | 10.347 | 13.813 | 16.319 | 17.226 | 18.231 | 18.852 | 20.067 | 23.220 | 38.329 | 39.530 |

*Sumber: Aplikasi AKSARA BAPPENAS, (https://pprk.bappenas.go.id/aksara/), 2023 (data masuk sampai dengan 23 Oktober 2023 pkl 10.32 WIB)*

**Gambar 2.84.**
**Aksi Penurunan Emisi GRK Setiap Sektor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2022**

Pada dasarnya terdapat perbedaan sektor antara KLHK dan BAPPENAS. Sehingga data potensi penurunan emisi pada aplikasi AKSARA BAPPENAS tidak bisa disandingkan dengan data tren emisi GRK dari aplikasi SIGNSMART KLHK. Perbedaan tersebut terdapat pada sektor pertanian (dalam aplikasi AKSARA BAPPENAS pertanian masuk dalam sektor lahan, bukan sektor tersendiri) dan sektor kawasan pesisir dan kelautan (*blue carbon*).

Jawa Tengah tercatat memiliki 4.179 aksi penurunan emisi GRK (total kegiatan aksi pembangunan rendah karbon yang telah dilaksanakan dari tahun

2010-2022). Penurunan emisi GRK ini merupakan data agregasi kabupaten/kota dan PD provinsi menurut aplikasi AKSARA BAPPENAS. Data rincian kontribusi kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.154.**
**Besaran Penurunan Emisi GRK Tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada Tahun 2019–2022**

| No | Kabupaten/ Kota | Potensi penurunan Emisi (Ton $CO_2Eq$) | | | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Grand Total | |
| 1 | Cilacap | - | 253,35 | 253,35 | 412.997,35 | 413.504,06 | |
| 2 | Banyumas | 7,43 | 7.411,82 | 7.411,82 | 7.411,82 | 22.242,89 | |
| 3 | Purbalingga | 8.841,22 | 12.461,22 | 12.518,25 | 12.518,25 | 46.338,94 | |
| 4 | Banjarnegara | 454,03 | 454,03 | 454,03 | 454,03 | 1.816,12 | |
| 5 | Kebumen | - | 18,76 | 154,39 | 154,39 | 327,55 | |
| 6 | Purworejo | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 147,17 | |
| 7 | Wonosobo | 17,99 | 6.624,36 | 6.624,36 | 6.624,36 | 19.891,07 | |
| 8 | Magelang | 111,05 | 111,91 | 111,91 | 111,91 | 446,78 | |
| 9 | Boyolali | - | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 256,76 | |
| 10 | Klaten | 5.656,48 | 11.309,79 | 16.564,90 | 16.564,90 | 50.096,07 | |
| 11 | Sukoharjo | 25,53 | 89,34 | 89,34 | 89,34 | 293,53 | |
| 12 | Wonogiri | 894,55 | 2.532,67 | 5.389,64 | 6.351,53 | 15.168,39 | |
| 13 | Karanganyar | 1.190,59 | 1.575,90 | 962.725,90 | 962.725,90 | 1.928.218,29 | |
| 14 | Sragen | 115,93 | 1.459,31 | 2.642,07 | 4.242,34 | 8.459,66 | |
| 15 | Grobogan | 33,48 | 325,98 | 325,98 | 336,04 | 1.021,48 | |
| 16 | Blora | - | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 8,80 | |
| 17 | Rembang | - | - | - | - | - | Hanya berupa aksi pendukung |
| 18 | Pati | 194,67 | 5.798,74 | 5.798,74 | 5.798,74 | 17.590,89 | |
| 19 | Kudus | 7.599,64 | 93.942,84 | 9.395,42 | 9.395,42 | 120.333,31 | |
| 20 | Jepara | 32.861,45 | 36.256,28 | 38.086,95 | 39.298,11 | 146.502,77 | |
| 21 | Demak | - | 18,40 | 20,81 | 21,63 | 60,83 | |
| 22 | Semarang | 12.949,29 | 54.321,20 | 54.412,13 | 176.414,13 | 298.096,76 | |
| 23 | Temanggung | - | 6.028,02 | 6.028,02 | 6.028,02 | 18.084,06 | |
| 24 | Kendal | 246,65 | 264,33 | 264,33 | 11.285,33 | 12.060,64 | |
| 25 | Batang | - | - | - | - | - | Hanya berupa aksi pendukung |
| 26 | Pekalongan | - | - | - | - | - | Belum melakukan pelaporan aksi |
| 27 | Pemalang | - | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 5,55 | |
| 28 | Tegal | - | 0,15 | 17,74 | 17,74 | 35,62 | |
| 29 | Brebes | 15.564,00 | 20.657,54 | 22.203,71 | 32.060,67 | 90.485,92 | |

| No | Kabupaten/ Kota | Potensi penurunan Emisi (Ton $CO_2$Eq) | | | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Grand Total | |
| 30 | Kota Magelang | 111,05 | 111,91 | 111,91 | 111,91 | 446,79 | |
| 31 | Kota Surakarta | 809,81 | 2.135,32 | 2.135,32 | 2.290,36 | 7.370,81 | |
| 32 | Kota Salatiga | 87,57 | 97,00 | 204,73 | 204,73 | 594,03 | |
| 33 | Kota Semarang | 12.949,90 | 54.321,20 | 54.412,13 | 176.414,13 | 298.097,36 | |
| 34 | Kota Pekalongan | - | - | - | - | - | Belum melakukan pelaporan aksi |
| 35 | Kota Tegal | - | 0,16 | 17,74 | 17,74 | 35,64 | |
| **TOTAL** | | **55.507,82** | **100.759,10** | **318.708,69** | **1.208.502,77** | **1.890.067,98** | |

*Sumber: Aplikasi AKSARA BAPPENAS, (https://pprk.bappenas.go.id/aksara/), 2023 (data masuk sampai dengan 23 Oktober 2023 pkl 10.32 WIB)*

Selain aksi-aksi mitigasi pembangunan rendah karbon, upaya lain dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim adalah melalui aksi adaptasi perubahan iklim. Aksi adaptasi ini dibagi menjadi empat sektor yaitu sektor air, pesisir dan kelautan, pertanian, dan kesehatan. Peningkatan ketahanan iklim ditujukan melalui kegiatan-kegiatan untuk menurunkan tingkat kerentanan dan meningkatkan kapasitas ketahanan iklim, sehingga mampu bertahan terhadap dampak dari perubahan iklim, yang dilaksanakan pada lokasi intervensi aksi ketahanan iklim. Lokasi intervensi aksi ketahanan iklim adalah lokasi terdampak perubahan iklim yang dikategorikan dalam 3 tingkatan prioritas yaitu super prioritas, top prioritas, dan prioritas berdasarkan tingkat bahaya, kerentanan, dan risiko bencana yang berpotensi terjadi.

Pada sektor air aksi adaptasi aksi berupa pembangunan infrastruktur untuk penyediaan sumber air dan pengendalian banjir seperti pembangunan embung, pembangunan pelindung tepian atau tebing sungai (dari beton maupun vegetasi), dan pengerukan waduk, danau, sungai, dan saluran air. Untuk sektor kelautan dan pesisir aksi adaptasi berupa penyediaan bangunan/vegetasi pelindung pantai, pengembangan sentra pengelolaan produksi perikanan tangkap laut, dan penguatan regulasi pengelolaan ruang laut. Sementara itu aksi adaptasi pada sektor pertanian berupa rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, peningkatan kapasitas masyarakat terkait climate smart agriculture, dan pengembangan varietas tanaman unggul yang tahan cekaman iklim dan organisme pengganggu tanaman (OPT). Dan pada sektor kesehatan, upaya adaptasi yang dilakukan berupa penambahan fasilitas kesehatan dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait pencegahan KLB penyakit.

Berdasarkan hasil kajian dari Bappenas dalam buku PBI (Pembangunan Berketahanan Iklim) disebutkan bahwa lokasi prioritas ketahanan iklim untuk empat sektor yang berada di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.155.**
**Lokasi Prioritas Ketahanan Iklim di Provinsi Jawa Tengah**

| Sektor | Super Prioritas | Top Prioritas | Prioritas | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Kelautan dan Pesisir | | | | |
| Sub Sektor Kelautan | Batang<br>Pati<br>Pemalang | Brebes<br>Jepara<br>Pekalongan | Cilacap<br>Demak<br>Kebumen | - |

| Sektor | Super Prioritas | Top Prioritas | Prioritas | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | Rembang | Purworejo<br>Tegal<br>Wonogiri<br>Kota Pekalongan | Kendal<br>Kota Semarang<br>Kota Tegal | |
| Sub Sektor Pesisir | | Batang<br>Brebes<br>Jepara<br>Pekalongan<br>Pemalang<br>Purworejo<br>Tegal<br>Kota Pekalongan | Cilacap<br>Demak<br>Kebumen<br>Kendal<br>Kota Semarang<br>Kota Tegal | Dari hasil analisis, didapatkan hasil bahwa sebagian besar kawasan pesisir di provinsi Jawa Tengah didominasi pada tingkat kerentanan tinggi. Untuk provinsi Jawa Tengah, tingkat kerentanan tinggi didominasi oleh faktor erosi pantai, Significant Wave Height, geomorfologi, kemiringan, dan Sea Level Rise (SLR). |
| Air | Banjarnegara<br>Boyolali<br>Grobogan<br>Pati<br>Purbalingga<br>Purworejo<br>Wonogiri<br>Kota Pekalongan | Banyumas<br>Batang<br>Blora<br>Brebes<br>Demak<br>Jepara<br>Karanganyar<br>Kebumen<br>Kendal<br>Klaten<br>Kudus<br>Magelang<br>Pekalongan<br>Pemalang<br>Rembang<br>Semarang<br>Sragen<br>Sukoharjo<br>Tegal<br>Kota Magelang<br>Kota Salatiga<br>Kota Semarang<br>Kota Surakarta<br>Kota Tegal | Cilacap<br>Temanggung<br>Wonosobo | Secara umum, kondisi ketersediaan air di Provinsi Jawa Tengah cenderung berada pada kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara supply dengan demand air di wilayah Jawa Tengah.<br>Dari hasil analisis diperoleh bahwa hampir seluruh WS di provinsi Jawa Tengah berada pada tingkat kekritisan langka absolut kecuali WS Bodri-Kuto (diproyeksikan sampai dengan tahun 2045). Tentunya, hal ini menjadi catatan tersendiri untuk stakeholder terkait untuk merumuskan langkah mitigasi guna menghadapi kelangkaan air. |
| Pertanian | Blora<br>Boyolali<br>Brebes<br>Grobogan<br>Pati<br>Pekalongan<br>Pemalang<br>Purworejo<br>Rembang<br>Tegal<br>Wonogiri | Banjarnegara<br>Banyumas<br>Batang<br>Cilacap<br>Demak<br>Jepara<br>Karanganyar<br>Kebumen<br>Klaten<br>Kudus<br>Magelang<br>Purbalingga<br>Sragen<br>Sukoharjo<br>Temanggung | Kendal<br>Semarang<br>Wonosobo<br>Kota Semarang | |
| Kesehatan (DBD) | - | - | Semarang | Berdasarkan keterangan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah saat ini trend penyakit DBD terjadi hampir di semua kabupaten/kota di Jawa Tengah, bukan lagi hanya Kabupaten Semarang yang kasusnya tinggi. |

| Sektor | Super Prioritas | Top Prioritas | Prioritas | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Kesehatan (Pnaumonia) | - | Banjarnegara<br>Wonogiri | Semarang<br>Klaten<br>Kudus<br>Magelang<br>Semarang<br>Sukoharjo<br>Temanggung | |

*Sumber: Buku Pembangunan Berketahanan Iklim Bappenas, 2021*

### 2.5.4.Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Kualitas air sungai dilihat dari hasil perhitungan dan pengujian status mutu kualitas air sungai tahun 2022 menunjukkan bahwa sungai-sungai dalam kondisi cemar ringan sebanyak 24 sungai dan 1 danau, serta cemar sedang sebanyak 1 sungai yaitu sungai Babon.

**Tabel 2.156.**
**Kualitas Air Sungai di Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

| No | Nama Sungai | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nilai IP | Status Mutu | Nilai IP | Status Mutu | Nilai IP | Status Mutu | Nilai IP | Status Mutu | Nilai IP | Status Mutu |
| 1 | Baki | 3,84 | Cemar Ringan | 3,66 | Cemar Ringan | 5,2 | Cemar Sedang | 4.72 | Cemar Ringan | 4,09 | Cemar Ringan |
| 2 | Premulung | 4,46 | Cemar Ringan | 4,06 | Cemar Ringan | 3,5 | Cemar Ringan | 4.57 | Cemar Ringan | 3,41 | Cemar Ringan |
| 3 | Mungkung | 4,22 | Cemar Ringan | 3,01 | Cemar Ringan | 2,85 | Cemar Ringan | 3.55 | Cemar Ringan | 3,39 | Cemar Ringan |
| 4 | Grompol | 4,67 | Cemar Ringan | 4,03 | Cemar Ringan | 5,33 | Cemar Sedang | 3.84 | Cemar Ringan | 3,33 | Cemar Ringan |
| 5 | Samin | 3,76 | Cemar Ringan | 2,61 | Cemar Ringan | 5,18 | Cemar Sedang | 4.35 | Cemar Ringan | 3,69 | Cemar Ringan |
| 6 | Jlantah | 2,82 | Cemar Ringan | 3,36 | Cemar Ringan | 3,02 | Cemar Ringan | 3.16 | Cemar Ringan | 4,32 | Cemar Ringan |
| 7 | Palur | 4,57 | Cemar Ringan | 4,06 | Cemar Ringan | 6,12 | Cemar Sedang | 5.08 | Cemar Sedang | 4,92 | Cemar Ringan |
| 8 | Pepe | 4,37 | Cemar Ringan | 4,35 | Cemar Ringan | 3,42 | Cemar Ringan | 3.12 | Cemar Ringan | 3,69 | Cemar Ringan |
| 9 | Babon | 2,8 | Cemar Ringan | 3,97 | Cemar Ringan | 6,62 | Cemar Sedang | 4.03 | Cemar Ringan | 5,04 | Cemar Sedang |
| 10 | Bogowonto | 2,09 | Cemar Ringan | 3,51 | Cemar Ringan | 4,02 | Cemar Ringan | 3.22 | Cemar Ringan | 2,91 | Cemar Ringan |
| 11 | Garang | 5,58 | Cemar Sedang | 6,53 | Cemar Sedang | 3,4 | Cemar Ringan | 2.88 | Cemar Ringan | 3,40 | Cemar Ringan |
| 12 | Gung | 2,93 | Cemar Ringan | 3,51 | Cemar Ringan | 2,9 | Cemar Ringan | 3.78 | Cemar Ringan | 3,33 | Cemar Ringan |
| 13 | Kupang | 2,36 | Cemar Ringan | 3,15 | Cemar Ringan | 3,86 | Cemar Ringan | 3.30 | Cemar Ringan | 3,53 | Cemar Ringan |
| 14 | Luk Ulo | 1,31 | Cemar Ringan | 2,94 | Cemar Ringan | 0,91 | Kondisi baik | 3.30 | Cemar Ringan | 2,74 | Cemar Ringan |
| 15 | Lusi | 2,15 | Cemar Ringan | 3,35 | Cemar Ringan | 3,75 | Cemar Ringan | 2.95 | Cemar Ringan | 1,56 | Cemar Ringan |
| 16 | Pemali | 1,85 | Cemar Ringan | 4,66 | Cemar Ringan | 0,77 | Kondisi baik | 3.89 | Cemar Ringan | 3,90 | Cemar Ringan |
| 17 | Sambong | 2,66 | Cemar Ringan | 3,74 | Cemar Ringan | 3,41 | Cemar Ringan | 3.04 | Cemar Ringan | 2,73 | Cemar Ringan |
| 18 | Serang | 2,19 | Cemar Ringan | 4,66 | Cemar Ringan | 2,29 | Cemar Ringan | 2.32 | Cemar Ringan | 2,14 | Cemar Ringan |
| 19 | Serayu | 1,57 | Cemar Ringan | 3,7 | Cemar Ringan | 2,24 | Cemar Ringan | 2.89 | Cemar Ringan | 2,78 | Cemar Ringan |
| 20 | Tuntang | 2,68 | Cemar Ringan | 3,19 | Cemar Ringan | 3,59 | Cemar Ringan | 3.09 | Cemar Ringan | 2,84 | Cemar Ringan |
| 21 | Wulan | 1,77 | Cemar Ringan | 2,13 | Cemar Ringan | 4 | Cemar Ringan | 4.89 | Cemar Ringan | 3,94 | Cemar Ringan |
| 22 | Bengawan Solo | 3,91 | Cemar Ringan | 3,85 | Cemar Ringan | 2,68 | Cemar Ringan | 1.98 | Cemar Ringan | 2,46 | Cemar Ringan |
| 23 | Progo | 1,25 | Cemar Ringan | 4,03 | Cemar Ringan | 2,03 | Cemar Ringan | 1.94 | Cemar Ringan | 1,95 | Cemar Ringan |

| No | Nama Sungai | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nilai IP | Status Mutu | Nilai IP | Status Mutu | Nilai IP | Status Mutu | Nilai IP | Status Mutu | Nilai IP | Status Mutu |
| 24 | Citanduy | 1,97 | Cemar Ringan | 4,62 | Cemar Ringan | 1,97 | Cemar Ringan | 2.14 | Cemar Ringan | 2,62 | Cemar Ringan |
| 25 | Cisangga-rung | 2,83 | Cemar Ringan | 5,28 | Cemar Sedang | 1,94 | Cemar Ringan | 2.75 | Cemar Ringan | 0,61 | Baik |
| 26 | Danau Rawapening | 2,43 | Cemar Ringan | 2,32 | Cemar Ringan | 2 | Cemar Ringan | 2,27 | Cemar Ringan | 3,02 | Cemar Ringan |
| Nilai IP Jawa Tengah | | 2,98 | Cemar Ringan | 3,84 | Cemar Ringan | 3,4 | Cemar Ringan | 3.39 | Cemar Ringan | 3,17 | Cemar Ringan |

*Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Permasalahan utama pencemaran air sungai di Provinsi Jawa Tengah berasal dari pembuangan air limbah domestik, sampah rumah tangga, limbah industri maupun UMKM, serta limbah pertanian dan peternakan. Sektor pertanian dalam arti luas juga termasuk salah satu penyumbang pencemar, terutama terkait penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan. Kondisi pencemaran terbanyak terdapat pada DAS Bengawan Solo dan sungai-sungai di Kabupaten dan Kota Pekalongan. Pada lokasi tersebut terdapat industri tekstil dan industri rayon yang membuang air limbahnya langsung ke sungai. Beberapa penanganan pencemaran sungai dapat dilakukan melalui (1) pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan besar yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap pengolahan air limbah; (2) mengevaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup terhadap pelaku usaha/kegiatan skala besar melalui program Propernas; (3) pemantauan dan uji laboratorium kualitas air sungai dan anak–anak sungainya dan evaluasi terhadap kondisi kualitas air sungai atas dasar laporan hasil pengujian kualitas air sungai dari para pihak terkait; serta (4) pembangunan dan revitalisasi IPAL komunal yang telah terbangun untuk meningkatkan kinerja IPAL.

**Tabel 2.157.**

**Persentase Sampah Yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Timbunan Sampah (Ton/tahun) | 5.418.184 | 5.604.080,65 | 6.055.617,05 | 6.152.654,76 | 6.363.805,99 |
| 2 | Jumlah Sampah Yang Dapat Dikurangi (ton/tahun) | 725.047,58 | 1.069.308,62 | 1.175.675,24 | 1.128.400,92 | 1.320.900,64 |
| 3 | Jumlah sampah yang tertangani (Ton/tahun) | 1.992.430,5 | 2.774.189,20 | 2.626.441,58 | 2.408.372,35 | 2.590.829,95 |
| 4 | Total Pengelolaan Sampah | 2.717.478,1 | 3.843.497,82 | 3.802.116,82 | 3.536.773 | 3.911.730,59 |
| Persentase Pengelolaan Sampah (% ) | | 50,15 | 68,58 | 62,79 | 57,48 | 61,47 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Jumlah timbulan sampah cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari tahun 2018 sejumlah 5.418.184 ton/tahun menjadi 6.363.805,99 ton/tahun pada tahun 2022. Jumlah timbulan sampah sebesar 6.363.805,99 ton/tahun dengan jumlah sampah yang dapat dikurangi sebesar 1.320.900,64 ton/tahun. Sedangkan sampah yang tertangani baru mencakup 2.590.829,95 ton/tahun dengan total pengelolaan sampah sebanyak 3.911.730,59 ton/tahun atau sebesar 61,47 persen. Berikut merupakan data TPA di Jawa Tengah.

**Tabel 2.158.**
**Data TPA di Jawa Tengah per Tahun 2023**

| No | TPA | Kabupaten/ Kota | Usia Pakai s.d Tahun | Ketinggian Sampah (Meter) | Keberadaan Lapisan Geomembran | Keberadaan IPAL | Keberfungsian IPAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPST Tritih Lor | Cilacap | 2019 | 15 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 2 | TPA Malabar | Cilacap | 2025 | 12 | Ada | Ada | Tidak fungsi |
| 3 | TPA Kunci | Cilacap | 2025 | 7 | Ada | Ada | Tidak fungsi |
| 4 | TPST BLE | Banyumas | selamanya | Residu habis diolah secara termal | Tidak gunakan landfill | Ada | Berfungsi |
| 5 | TPA Kalipancur | Purbalingga | 2024 | 6 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 6 | TPA Winong | Banjarnegara | 2030 | 10 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak fungsi |
| 7 | TPA Kaligending | Kebumen | 2030 | 20 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 8 | TPA Semali | Kebumen | 2030 | 20 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 9 | TPA Jetis | Purworejo | 2022 | 12 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 10 | TPA Wonorejo | Wonosobo | 2024 | 50 | Tidak ada | Ada | Tidak fungsi |
| 11 | TPA Pasuruhan | Kab. Magelang | 2017 | 25 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 12 | TPA Klegen | Kab. Magelang | 2028 | 5 | Ada | Tidak ada | Tidak fungsi |
| 13 | TPA Winong | Boyolali | 2024 | 8 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 14 | TPA Troketon | Klaten | 2026 | 10 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 15 | TPA Mojorejo | Sukoharjo | 2025 | 20 | Tidak ada | Ada | Berfungsi |
| 16 | TPA Ngadirojo | Wonogiri | 2026 | 5 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 17 | TPA Baturetno | Wonogiri | 2023 | 7 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak fungsi |
| 18 | TPA Purwantoro | Wonogiri | 2024 | 3 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak fungsi |
| 19 | TPA Slogohimo | Wonogiri | 2026 | 6 | Tidak ada | Tidak Ada | Tidak fungsi |
| 20 | TPA Sukosari Jumantono | Karanganyar | 2023 | 10 | Ada | Ada | Tidak fungsi |
| 21 | TPA Tanggan | Sragen | 2028 | 25 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 22 | TPA Ngembak | Grobogan | 2030 | 14,79 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 23 | TPA Temurejo | Blora | 2031 | 4 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 24 | TPA Jambe | Blora | 2030 | **5** | Tidak ada | Tidak ada | Tidak fungsi |
| 25 | TPA Landoh | Rembang | 2017 | 30 | Ada | Ada | Tidak fungsi |
| 26 | TPA Sukoharjo | Pati | 2027 | 20 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 27 | TPA Tanjungrejo | Kudus | 2025 | 10 | Tidak ada | Ada | Berfungsi |
| 28 | TPA Bandengan | Jepara | 2024 | 10 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 29 | TPA Krasak | Jepara | 2022 | 4 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak fungsi |
| 30 | TPA Karimunjawa | Jepara | 2024 | 1,5 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 31 | TPA Berahan Kulon | Demak | 2040 | 7 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 32 | TPA Blondo | Kab. Semarang | 2019 | 40 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 33 | TPA Sanggrahan | Temanggung | 2021 | 25 | Ada | Ada | Berfungsi |

| No | TPA | Kabupaten/ Kota | Usia Pakai s.d Tahun | Ketinggian Sampah (Meter) | Keberadaan Lapisan Geomembran | Keberadaan IPAL | Keberfungsian IPAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | TPA Darupono Baru | Kendal | 2027 | 12 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 35 | TPA Randukuning | Batang | 2015 | 15 | Tidak ada | Ada | Berfungsi |
| 36 | TPA Degayu | Kota Pekalongan | 2015 | 20 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 37 | TPA Bojonglarang | Kab. Pekalongan | 2010 | 17 | Tidak ada | Ada | Tidak fungsi |
| 38 | TPA Pegongsoran | Pemalang | 2025 | 10 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 39 | TPA Penujah | Kab. Tegal | 2017 | 4 | Tidak ada | Ada | Tidak fungsi |
| 40 | TPA Kaliwlingi | Brebes | 2050 | 10 | Tidak ada | Ada | Tidak fungsi |
| 41 | TPA Kalijurang | Brebes | 2050 | 50 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak fungsi |
| 42 | TPA Banyu Urip | Kota Magelang | 2025 | 15 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 43 | TPA Putri Cempo | Kota Surakarta | 2025 | 20 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak fungsi |
| 44 | TPA Ngronggo | Kota Salatiga | 2026 | 12 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 45 | TPA Jatibarang | Kota Semarang | 2021 | 15 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 46 | TPA Muarareja | Kota Tegal | 2025 | 5 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak fungsi |

*Sumber: Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah cut off Tw. II 2023*

Data di atas menunjukkan bahwa dari 46 TPA, secara teknis terdapat 12 TPA yang telah melebihi usia pakai dan 2 TPA yang usia pakainya habis tahun 2023. Hal ini berarti ada sekitar 30,34% TPA yang usia pakainya habis tahun 2023. Berdasarkan data yang ada 9 dari 46 TPA tidak memiliki IPAL, sedangkan 9 dari 37 IPAL yang ada di TPA tidak berfungsi. Hal ini menyebabkan pengelolaan air lindi tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan pencemaran terhadap air yang ada di sekitar TPA. Permasalahan pengelolaan sampah di Jawa Tengah ini menjadi sorotan tersendiri. Selain karena jumlah timbulan yang semakin meningkat, jumlah TPA yang semakin sedikit, juga dikarenakan oleh banyaknya sarana prasarana pengolahan sampah yang kondisinya sudah rusak, sehingga kinerja pengelolaan sampah menjadi tidak optimal. Secara teknis, kondisi TPA di Jawa Tengah ini masih banyak yang menggunakan sistem *open dumping*. Biaya untuk beralih ke sistem *sanitary landfill* dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan (teknologi RDF maupun *Wasate to Energy*) masih cukup tinggi, sehingga alternatif paling mudah adalah pengelolaan sampah dengan sistem *open dumping* dan masih banyak ditemui masyarakat membakar maupun membuang sampah ke sungai.

Dalam rangka peningkatan pemenuhan dasar untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kawasan (Perpres Nomor 79/2019) yang mendukung KSPN Borobudur, maka diperlukan sistem persampahan terpadu yakni Pembangunan TPST Regional di Kabupaten Magelang. Adapun perkembangan pelaksanaan pembangunan TPST Regional Magelang adalah penyusunan *Feasibility Study* (DLHK, 2019), penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL (DLHK, 2020), penyusunan DED (DLHK, 2021) dan Pertimbangan Teknis Pelepasan Kawasan Hutan, *Feasibility Study* jalan masuk, serta proses persiapan pengadaan tanah (DLHK, 2022), tahun 2023 proses pelaksanaan pengadaan tanah

oleh Tim BPN serta proses pelepasan kawasan hutan (DLHK, Maret 2023), dan progress untuk 2024 adalah akses jalan masuk ke TPST (BMCK, 2024), pembentukan kelembagaan dan penyusunan DED *landfill* (DLHK, 2024), serta penyusunan kajian dampak negatif (DLH Kab. Magelang, 2024).

Selain timbulan sampah, peningkatan aktivitas seperti industri, pelayanan (rumah sakit, hotel dan lain sebagainya) juga akan menambah sumber pencemar dan volume limbah yang dihasilkan. Sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau yang biasa disebut limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) umumnya dihasilkan dari sektor industri. Total Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 1.589.621,42 ton/tahun. Produksi limbah B3 paling besar berasal dari Kabupaten Cilacap karena adanya industri semen, beton dan PLTU Batubara yang berasal dari FABA (*Fly Ash and Bottom Ash*). Berikut merupakan tabel jumlah timbulan limbah B3 per kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2022.

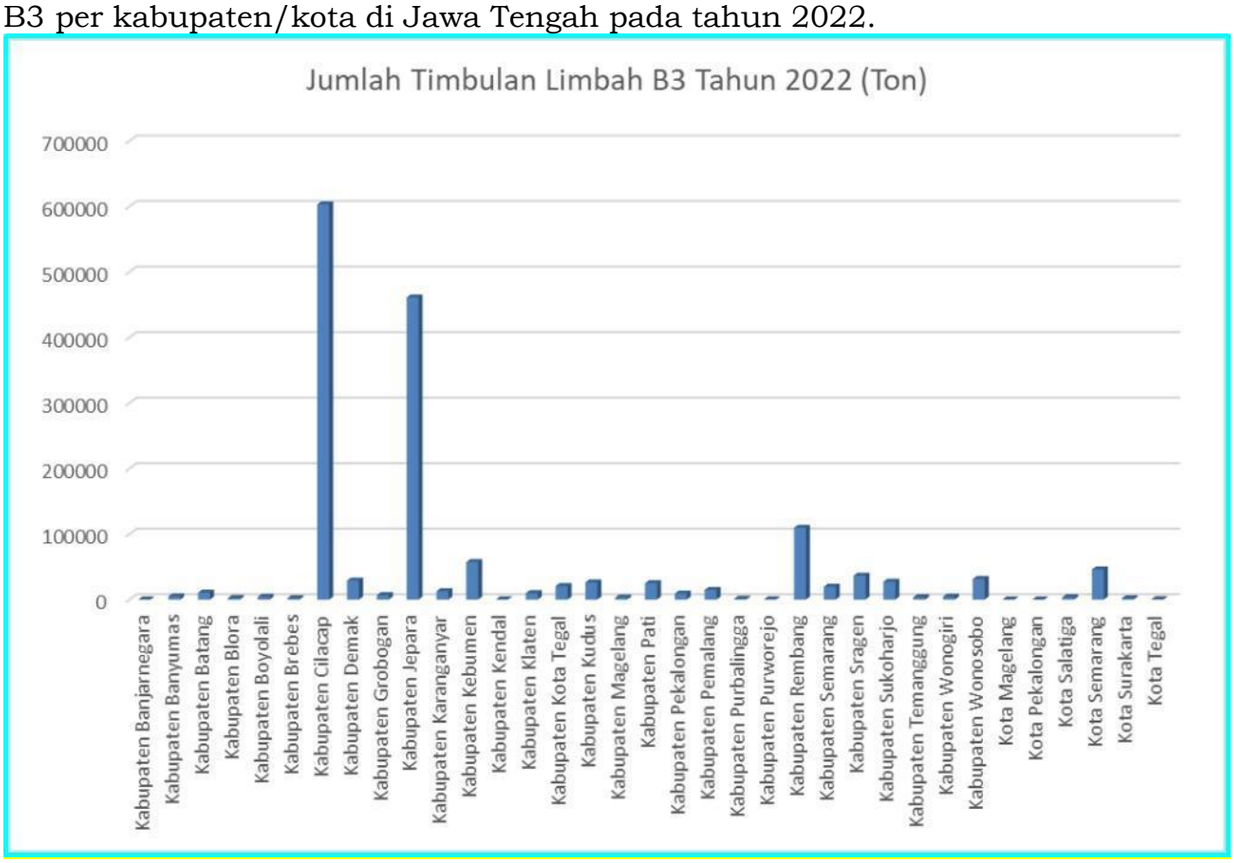


*Sumber : DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.85.**

**Jumlah Limbah B3 Per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2022**

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan sebagaimana ketentuan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan hidup, Pemerintah melaksanakan kegiatan pengawasan penaatan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan pasal 71 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa "Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup". Pengawasan lingkungan yang diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) identik dengan kegiatan pengawasan yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang

pengelolaan lingkungan hidup, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Perkembangan pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha dan/atau kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.159.**
**Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2018 – 2022**

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi | Izin | 46 | 62 | 69 | 83 | 89 |
| 2 | Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | Usaha dan / atau kegiatan | 25 | 35 | 57 | 38 | 63 |
| 3 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan | Usaha dan / atau kegiatan | - | 27 | 49 | 19 | 47 |
| 4 | Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Orang | - | - | - | 6 | 7 |

*Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Selain itu DLHK Provisni Jawa Tengah melakukan pendampingan kepada perusahaa-perusahaan dalam program propernas (proper nasional). Proper adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang dikembangkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) sejak tahun 1995, untuk mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungannya. Dari penilaian proper, perusahaan akan memperoleh citra/reputasi sesuai bagaimana pengelolaan lingkungannya. Citra tersebut dinilai dengan warna emas, hijau, biru, merah dan hitam. Proper emas merupakan proper yg terbaik, artinya perusahaan tersebut sudah menerapkan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh dan kontinu. Jika sebuah perusahaan mendapat 2x warna hitam secara berturut-turut, perusahaan tersebut bisa dituntut dan usaha akan dihentikan. Dari 220 perusahaan yang dibina, terdapat 147 perusahaan atau 66,82% dalam kategori taat (Warna Emas, Hijau, Biru, Biru-P). Berikut merupakan data perusahaan yang dibina oleh DLHK Provisni Jawa Tengah dalam program propernas (proper nasional).

**Tabel 2.160.**
**Rekapitulasi Jumlah Perusahaan di Provinsi Jawa Tengah yang Mengikuti Proper Nasional Tahun 2021-2022**

| Kategori | Jumlah Perusahaan |
|---|---|
| EMAS | 9 |
| HIJAU | 11 |
| BIRU | 123 |
| BIRU-P | 4 |
| MERAH | 73 |
| HITAM | 0 |
| **JUMLAH** | **220** |
| **TINGKAT KETAATAN** | **66,82%** |

*Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2023*

### 2.5.5.Kualitas Lahan di Provinsi Jawa Tengah

Kualitas lahan dinilai dari kondisi tutupan lahan terhadap fungsi lahan. Kondisi ini juga berkaitan dengan semakin meningkatnya luas lahan kritis di Jawa Tengah. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional, luas lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah, sebesar 375.733 ha ( 11,45 persen dari luas daratan Provinsi Jawa Tengah).

Pada tahun 2022, hutan negara/kawasan hutan di Jawa Tengah seluas 766.390 ha dan hutan rakyat seluas 682.425,61 ha, sehingga total luas hutan di Jawa Tengah seluas 1.448.815,61 ha. Berdasarkan status lahan, lahan kritis tersebut 86 persen tersebar di lahan masyarakat/tanah hak, sedangkan sisanya 14 persen tersebar di kawasan hutan (hutan negara). Penanganan lahan kategori kritis di Jawa Tengah dilakukan melalui kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pendekatan pembangunan hutan rakyat dan penghijauan lingkungan pada lahan-lahan yang dibebani hak/lahan masyarakat.

Sedangkan pada lahan kritis yang tersebar di kawasan hutan/hutan negara dilakukan melalui reboisasi hutan baik pada hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Pemulihan lahan kritis di kawasan hutan negara, khususnya yang berkaitan erat dengan permasalahan sosial seperti konflik tenurial, terbatasnya akses kelola hutan dan lain sebagainya dilakukan melalui program perhutanan sosial dengan 5 skema yaitu : (1) Hutan Desa (HD); (2) Hutan Kemasyarakatan (HKm); (3) Hutan Tanaman Rakyat (HTR); (4) Hutan Adat (HA); (5) Kemitraan Kehutanan (KK) dalam bentuk KULIN KK atau Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dan IPHPS atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial. Untuk menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial dalam implementasi penanganan lahan kritis diterapkan melalui agroforestry. Perkembangan upaya penanganan lahan kritis tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.161.**
**Luas Lahan Kritis Dan Penanganannya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Luas Hutan dalam dan luar kawasan (ha) | 1.334.232,13 | 1.334.232,13 | 1.334.232,13 | 1.334.232,13 | 1.334.232,13 |
| Luas Kritis (ha)* | 375.733*) | 375.733*) | 375.733*) | 375.733*) | 375.733 |
| Luas lahan yang direhabilitasi per tahun (ha) | 23.361 | 23.431 | 32.389 | 23.477 | 21.371 |
| Perbandingan luas yang direhabilitasi per tahun (%) | 6,22 | 6,24 | 8,62 | 6,24 | 5,69 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022*
** Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional*

Penanganan lahan kritis di Jawa Tengah tahun 2018-2022 secara konsisten dilakukan pada lahan seluas 124.029 Ha (33%) terhadap luas lahan

kritis sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018

Keberadaan lahan kritis ini telah berkontribusi terhadap penurunan daya dukung DAS, sehingga rehabilitasi lahan kritis difokuskan pada 19 DAS prioritas yang perlu dipulihkan daya dukungnya dan 12 DAS prioritas yang perlu dipertahankan daya dukungnya di di Jawa Tengah.

**Tabel 2.162.**

**Daerah Aliran Sungai Prioritas di Provinsi Jawa Tengah**

| No. | Nama DAS | Keterangan | No. | Nama DAS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAS Progo | Dipulihkan | 1 | DAS Rambut | Dipertahankan |
| 2 | DAS Serayu | Dipulihkan | 2 | DAS Lampir | Dipertahankan |
| 3 | DAS Bogowonto | Dipulihkan | 3 | DAS Banger | Dipertahankan |
| 4 | DAS LukUlo | Dipulihkan | 4 | DAS Babon | Dipertahankan |
| 5 | DAS Tuntang, | Dipulihkan | 5 | DAS Blorong | Dipertahankan |
| 6 | DAS Pemali, | Dipulihkan | 6 | DAS Jragung | Dipertahankan |
| 7 | DAS Solo, | Dipulihkan | 7 | DAS Kaliombo | Dipertahankan |
| 8 | DAS Citandui. | Dipulihkan | 8 | DAS Gede | Dipertahankan |
| 9 | DAS Bodri, | Dipulihkan | 9 | DAS Randugunting | Dipertahankan |
| 10 | DAS Garang, | Dipulihkan | 10 | DAS Jalicokroyasan | Dipertahankan |
| 11 | DAS Serang, | Dipulihkan | 11 | DAS Ijo | Dipertahankan |
| 12 | DAS Cacaban, | Dipulihkan | 12 | DAS Tipar | Dipertahankan |
| 13 | DAS Juwana, | Dipulihkan | - | - | - |
| 14 | DAS Comal, | Dipulihkan | - | - | - |
| 15 | DAS WawarMedono | Dipulihkan | - | - | - |
| 16 | DAS Babakan | Dipulihkan | - | - | - |
| 17 | DAS Gangsa | Dipulihkan | - | - | - |
| 18 | DAS Kupang | Dipulihkan | - | - | - |
| 19 | DAS Lasem | Dipulihkan | - | - | - |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Selain rehabilitasi lahan kritis/ pemulihan DAS, dilakukan juga upaya mempertahankan tutupan lahan melalui inisiatif - inisiatif konservasi kawasan melalui pembentukan KEE (Kawasan Ekosistem Esensial) dan Cagar Biosfer. Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) merupakan kawasan bernilai ekosistem penting yang berada di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. KEE menjadi upaya daerah untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang, dan dinamis dalam perkembangannya. KEE juga dapat menjadi fungsi pemanfaatan

yang memperhatikan keberlanjutan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat ekologinya (lestari). Saat ini di Jawa Tengah sudah ditetapkan 3 (tiga) KEE yang merupakan kawasan ekosistem lahan basah mangrove, sedangkan KEE pada ekosistem terestrial dalam tahap inisiasi untuk penetapan.

Cagar Biosfer merupakan kawasan/ situs yang ditetapkan oleh UNESCO untuk mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan, berdasarkan atas upaya masyarakat lokal dan ilmu pengetahuan yang terpercaya. Usulan penetapan Cagar Biosfer diajukan oleh pemerintah pusat, setiap calon cagar harus memenuhi kriteria tertentu dan sesuai dengan persyaratan minimum sebelum dimasukkan ke dalam jaringan Cagar Biosfer dunia. Cagar Biosfer merupakan kawasan yang ideal untuk menguji dan mendemonstrasikan pendekatan-pendekatan yang mengarah kepada pembangunan berkelanjutan pada tingkat regional. Pengelolaan Cagar Biosfer dibagi menjadi 3 zona yang saling berhubungan, yaitu area inti (Core Area), zona penyangga (Buffer zone), dan area transisi (Transition zone). Hingga tahun 2022, UNESCO telah menetapkan 2 (dua) Cagar Biosfer di Jawa Tengah yaitu Cagar Biosfer Karimun Jawa–Jepara–Muria seluas 1.236.083,97 Ha dan Cagar Biosfer Merapi–Merbabu–Menoreh seluas 254.876,75 Ha

Kondisi tutupan lahan dan hutan bersifat dinamis, seiring dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya. Perubahan tutupan hutan terjadi dari waktu ke waktu, diantaranya karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan, perambahan, pencurian kayu dan kebakaran hutan. Kerusakan kawasan hutan mengalami penurunan, dari tahun sebelumnya, yaitu untuk luas pencurian pohon dari 17,41 Ha berhasil diturunkan menjadi 14,6 Ha, serta luas kebakaran hutan dari 281,50 Ha berhasil diturunkan menjadi 99,97 Ha. Gambaran mengenai kerusakan kawasan hutan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.163.**

**Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun (Ha) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Luas pencurian pohon | 29,00 | 22,88 | 17,41 | 14,6 | 91 |
| 2. | Luas Kebakaran hutan | 4.215,64 | 3.628,84 | 281,50 | 99,97 | 10,79 |
| | Total Luas Kerusakan hutan | 4.244,64 | 3.651,72 | 298,91 | 114,57 | 101,79 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Penanganan lahan juga dilaksanakan di daerah lahan basah/ pesisir melalui konservasi dan rehabilitasi mangrove. Konservasi ekosistem mangrove salah satunya melalui inisiatif pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Sampai dengan tahun 2022 telah ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi 2 (dua) KEE Lahan Basah Mangrove yaitu KEE Segara Anakan dan KEE Kaliwlingi.

**Tabel 2.164.**

**Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove di Jawa Tengah**

| No | Nama KEE | Wilayah Administrasi | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KEE Mojo | Kab.Pemalang | Penetapan (SK Bupati Pemalang nomor 188.4/564/tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017) |

| No | Nama KEE | Wilayah Administrasi | Status |
|---|---|---|---|
| 2 | KEE Muara Kali Ijo | Kab.Kebumen | Penetapan (Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 552.52/31 tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020) |
| 3 | KEE Pasar Bangi | Kab.Rembang | Penetapan (Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 552.52/31 tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020) |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Rehabilitasi lahan basah mangrove dilakukan melalui penanaman mangrove yang dimaksudkan untuk melindungi pantai dari arus dan hempasan ombak, sebagai tempat memijah, membesar dan mencari makan berbagai biota. Perkembangan rehabilitasi lahan basah mangrove sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.165.**

**Rehabilitasi Mangrove Tahun 2018-2022 Di Jawa Tengah**

| NO | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luas rehabilitasi mangrove (Ha) | 30,20 | 58 | 19,4 | 174,12 | 27 | DLHK |
| 2. | Luas Penanaman Mangrove (Ha) | 10,20 | 19.6 | 6.4 | 9 | 8,89 | DKP |

*Sumber: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2023*
*2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2023*

### 2.5.6.Pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan berkelanjutan

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada cagar alam, zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Sedangkan pengolahan hasil hutan berkelanjutan ditentukan sejauh mana pengguna kawasan hutan (yang bersifat perorangan, kelompok masyarakat maupun badan hukum swasta) memenuhi kewajiban terhadap izin/kerjasama yang telah ditetapkan dan industri pengolahan hasil hutan tertib dalam penatausahaan hasil hutan Berikut gambaran perkembangan produksi kayu di Jawa Tengah.

**Tabel 2.166.**

**Produksi Kayu Dari Hutan Rakyat dan Hutan Negara Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Produksi Kayu Asal Hutan Rakyat ($m^3$) | 2.597.954,53 | 2.632.756,10 | 2.682.476,19 | 1.821.315,97 | 2,149,541.51 |
| 2 | Produksi Kayu Asal Hutan Negara ($m^3$) | 254.657 | 278.118,06 | 361.641,11 | 249.517.67 | 328,451.67 |
| | Total Produksi Kayu ($m^3$) | 2.852.611,53 | 2.910.874,16 | 3.044.117,30 | 1.821.315,97 | 2,477,993.17 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Produksi kayu dari hutan rakyat dan hutan negara pada periode 2018 – 2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan kenaikan kecuali untuk tahun 2021 yang mengalami penurunan produksi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 terutama karena adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), yang secara total mengalami penurunan sebesar 40.17 persen dibandingkan tahun 2020. Sedangkan untuk produksi tahun 2022 mengalami

peningkatan sebesar 36.06 persen dibandingkan tahun 2021 walaupun masih tetap lebih rendah dibandingkan periode 2018 – 2020.

Salah satu instrumen untuk mencapai pengelolaan hutan lestari adalah Kepatuhan industri pengolahan hasil hutan dalam penatausahaan hasil hutan melalui Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Industri pengolahan hasil hutan yang memiliki sertifikasi SVLK akan memiliki keunggulan kompetitif terutama di pasar internasional karena memenuhi kriteria produk ramah lingkungan (ecolabel) sehingga akan mendorong implementasi pengelolaan hutan lestari. Berikut gambaran perkembangan pengguna kawasan, industri pengolahan hasil hutan dan di Jawa Tengah.

**Tabel 2.167.**

**Jumlah Pengguna Kawasan, Industri Pengolahan Hasil Hutan dan SVLK di Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Pengguna kawasan hutan | Unit | 179 | 193 | 201 | 203 | 207 |
| 2 | Industri pengolahan hasil hutan kapasitas <6.000 m3 berizin | Unit | 938 | 967 | 999 | 1.007 | 1.026 |
| 3 | Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu | Unit | 636 | 736 | 838 | 894 | 905 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Pengguna kawasan hutan setiap tahun bertambah, dengan jumlah pengguna kawasan sampai dengan tahun 2022 sebanyak 207 unit. Selain itu jumlah industri pengolahan hasil hutan kapasitas <6.000 m3 berizin setiap tahun terus bertambah, dengan jumlah sampai dengan tahun 2022 sebanyak 1.026 unit. Jumlah Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu pada industri hasil hutan meningkat setiap tahun dimana sampai dengan tahun 2022 berjumlah 905 unit. Hal tersebut akan berdampak positif terhadap kinerja ekspor produk hasil hutan.

Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan akses kelola serta pemanfaatan hutan oleh masyarakat, memberi kesempatan masyarakat mengelola hutan secara legal dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan yang tinggal di kawasan hutan. Berikut gambaran perkembangan perhutanan sosial di Jawa Tengah tahun 2018-2022.

**Tabel 2.168.**

**Perkembangan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah Tahun 2018–2022**

| NO | URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Pemberian Akses kelola kawasan hutan untuk masyarakat (ha) | 28.300,87 | 35.173,63 | 35.828,84 | 79.461,49 | 79.461,49 |
| 2 | Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang didampingi (kelompok) | 54 | 79 | 81 | 90 | 90 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Dalam kurun waktu 2018 - 2022, telah diterbitkan SK Perhutanan Sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 90 SK untuk 90 Kelompok Perhutanan Sosial di Jawa Tengah dengan luas total sebesar 79.461,49 Ha. Sebagai salah satu upaya memulihkan dampak pandemi Covid-19 dilakukan penguatan perhutanan sosial yang diarahkan pada penataan kelembagaan, pengembangan usaha kelompok dalam bentuk pendampingan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok serta pengelolaan kawasan berdasar perencanaan teknis

### 2.5.7. Penataan Ruang

Menindaklajuti terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 melakukan revisi Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dilakukan revisi seuai amanah Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengintegrasikan antara matra darat dengan matra laut.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 sebagai dokumen rencana tata ruang matra laut, pada tahun 2022 dilakukan reviu untuk diintegrasikan pada revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah dan pada tahun 2023 dokumen materi teknis yang disusun/direviu telah mendapatkan persetujuan teknis dari Kementrian Kelautan Perikan, sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang.

Sesuai dengan Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban dalam menyusun Rencana Tata Ruang. Kebutuhan dokumen Rencana Tata Ruang bagi Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, acuan pemanfaatan ruang dalam pembangunan sectoral dan penerbitan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut serta pemberian ha katas tanah dan hak pengelolaan. Perkembangan status penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.169.**

**UPDATE STATUS RTRW KAB/KOTA DI JATENG**

per24 Oktober 2023

Kabupaten/Kota yang telah menyelesaikan revisi RTRW sebanyak 30 ,sedangkan 5 RTRW Kabupaten/Kota sedang berproses

| NO | KABUPATEN | Revisi &PK | TahapandiProv | | *Proses* | *Proses Evaluasi Gub (Sudah TerbitPersubATR)* | Perda Baru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RekomGub (SebelumUUCK) | BATKPRD Prov(PascaUUCK) | *PersubATR(Sudah TerbitRekomGub/BATKPRDProv)* | | |
| 1 | Kabupaten Cilacap | | | | | | Perda1Tahun2021tentangPerubahan atas Perda 9/2011 tentang RTRW Kab Cilacap |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2011-2031(1April2021) |
| 2 | Kabupaten Banyumas | | | | | | BATKPRDtanggal17Juni2021 |
| 3 | Kabupaten Purbalingga | | | | | | Perda 10 Tahun 2020 tentang Perubahanatas Perda 5/2011 tentang RTRW KabPurbalingga2011-2031(28Agustus2020) |
| 4 | Kabupaten Banjarnegara | | | | | | Sudah keluar SK Gub |
| 5 | Kabupaten Kebumen | | | | | | Linsek pada tanggal 17 Juli 2023 |
| 6 | Kabupaten Purworejo | | | | | | PerdaNo.10Tahun2021tentangRTRWKabPurworejo2021-2041(30Juli2021) |
| 7 | Kabupaten Wonosobo | | | | | | Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 - 2043 (10 Juli 2023) |
| 8 | Kabupaten Magelang | | | | | | BATKPRDtanggal15Agustus2019 |
| 9 | Kabupaten Boyolali | | | | | | Perda8Th2019tentangperubahanatasPerda9Th2011tentangRTRWBoyolali 2011–2031.(17Juli2019) |
| 10 | Kabupaten Klaten | | | | | | Perda Kab. Klaten No. 10 tahun 2021tentangRTRWKab.KlatenTahun 2021-2041 (24November2021) |
| 11 | Kabupaten Sukoharjo | | | | | | Perda 1 Th 2018 tentang perubahan atasPerda14Th2011tentangRTRWSukoharjo 2011–2031.(9maret2018) |
| 12 | Kabupaten Wonogiri | | | | | | PerdaNo.2Tahun2020tentangRTRW Kab Wonogiri2020-2040 |
| 13 | Kabupaten Karanganyar | | | | | | Perda 19 Th 2019 tentang perubahan atasPerda1Th2013tentangRTRWKaranganyar2013–2032.(27Agust2019) |
| 14 | Kabupaten Sragen | | | | | | Perda1Tahun2020tentangperubahanatasPerda 11 Tahun 2011 tentangRTRW KabSragentahun2011–2031tanggal5Mei 2020 |
| 15 | Kabupaten Grobogan | | | | | | Perda Kab. Grobogan No.12 Tahun 2021 ttg RTRW Kab Grobogan Tahun 2021-2041 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ditetapkan 17Des2021 |
| 16 | Kabupaten Blora | | | | | | Perda5Tahun2021tentangRTRWKab Blora2021-2041tanggal1April2021 |
| 17 | Kabupaten Rembang | | | | | | Perda RTRW Kabupaten Rembang No. 2 tahun 2023 per tgl 10 oktober 2023 |
| 18 | Kabupaten Pati | | | | | | Perda 2/2021 tentang Perubahan AtasPerda5/2011tentangRTRWKabPati2010-2030tgl1April2021 |
| 19 | Kabupaten Kudus | | | | | | Perda 1/2022 tentang RTRW KabupatenKudusTahun2022-2042tgl30Maret2022 |
| 20 | Kabupaten Jepara | | | | | | Perda No. 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043 (7 September 2023) |
| 21 | Kabupaten Demak | | | | | | Perda No.1 Tahun 2020 tentang PerubahanAtasPerda6Tahun2011tentangRTRWKab Demak Tahun 2011 - 2031 tanggal 28 Feb 2020 |
| 22 | Kabupaten Semarang | | | | | | Perda No. 6 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Semarang |
| 23 | Kabupaten Temanggung | | | | | | Linsek pada tanggal 17 Juli 2023 |
| 24 | Kabupaten Kendal | | | | | | Perda1Tahun2020tentangperubahanatasPerda20Tahun2011tentangRTRWKab Kendaltahun2011–2031tanggal22Mei 2020 |
| 25 | Kabupaten Batang | | | | | | Perda13Tahun2019tentangRTRWKab Batang2019–2039.(26Des2019) |
| 26 | Kabupaten Pekalongan | | | | | | Perda 3 Tahun 2020 tentang RTRW KabPekalongan2020-2040(5Agustus2020) |
| 27 | Kabupaten Pemalang | | | | | | Perda1Tahun2018tentangRTRW Pemalang2018–2038(8Feb2018) |
| 28 | Kabupaten Tegal | | | | | | BA FPR tanggal 22 Mei 2022 |
| 29 | Kabupaten Brebes | | | | | | Perda13Tahun2019tentangRTRWKab Brebes2019–2039.(23Des2019) |
| 30 | Kota Magelang | | | | | | Perda 2 Tahun 2020 tentang PerubahanAtasPerdaKotaMagelangNo.4Tahun2012tentangRTRWKotaMagelang2011-2031 (17Juli2020) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Kota Surakarta | | | | | | PerdaNo.4Tahun2021tentangRTRW KotaSurakarta2021-2041tanggal9Juli2021 |
| 32 | Kota Salatiga | | | | | | Perda Nomor 3 Th 2023 tentang RTRW Kota Salatiga tahun 2023-2043 tgl 12 Juni 2023 |
| 33 | Kota Semarang | | | | | | Perda No. 5 Th 2021 tentang PerubahanAtas Perda Kota Semarang No.14 Th 2011tentangRTRWKotaSemarang2011-2031 |
| 34 | Kota Pekalongan | | | | | | Perda 9 Tahun 2020 tentang PerubahanAtas Perda Kota Pekalongan No.30 Th 2011tentangRTRWKotaPekalongan2009-2029 |
| 35 | Kota Tegal | | | | | | Perda Kota Tegal No.1 Tahun 2021 tentangperubahan atas Perda Kota Tegal No.4Tahun2012tentangRTRWKotaTegal2011 –2031tanggal24Feb2021 |
| | **JUMLAH** | **35** | **28** | **7** | **35** | **31** | **30** |
| | **%** | **100** | **80,00** | **20,00** | **100,00** | **88,57** | **85,71** |

30 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah pada tabel diatas juga diinformasikan terdapat Rencana Tata Ruang yang masih berproses untuk menjadi Peraturan Daerah. Perlu adanya upaya percepatan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melegalkan dokumen Rencana Tata Ruang untuk mempermudah investasi dan juga sebagai acuan pembangunan di daerah.

**Tabel 2.170.**

**PROGRESS LEGISLASI RDTR KAB/KOTA DIJATENG**

Per 24 Oktober 2023

Terdapat 3 Perda RDTR dan 22 Perkada RDTR

| NO | KABUPATEN | PENYUSUNAN | *PROSES PERSUB ATR* | *PROSES Fasilitasi* | PERDA/ PERKADA BARU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **KAB BANYUMAS** | | | | | |
| 1 | RDTR Kaw Perkotaan Purwokerto | | | | | Perda Kab Banyumas No.6 Tahun 2019 tentang RDTR Kaw Perkotaan Purwokerto Th. 2019 - 2039 |
| 2 | RDTR Kawasan Perkotaan Banyumas | | | | | Perbup No. 9 Tahun 2023 tentang RDTR KP Banyumas Tahun 2023-2043 |
| 3 | RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja | | | | | Perbup No. 4 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja |
| | **KAB BREBES** | | | | | |

| NO | KABUPATEN | PENYUSUNAN | *PROSES PERSUB ATR* | *PROSES Fasilitasi* | PERDA/ PERKADA BARU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDTR Kecamatan Losari | | | | | Perbup No. 14 Tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Losari (26 Mei 2023) |
| 2 | RDTR Kecamatan Tanjung | | | | | Perbup No. 19 Tahun 2023 tentang RDTR Kec. Tanjung |
| 3 | RDTR WP Kecamatan Bulakamba | | | | | Sedang Proses Fasilitasi dengan Biro hukum (23 Mei 2023) |
| 4 | RDTR Perkotaan Ketanggungan-Kersana | | | | | |
| | **KOTA SALATIGA** | | | | | |
| 1 | RDTR Kota Salatiga | | | | | Perda Kota Salatiga No.9 Tahun 2018 tentang RDTR BWP PK I, II, III, IV Kota Salatiga 2017 - 2030 |
| | **KAB SUKOHARJO** | | | | | |
| 1 | RDTR Kec Sukoharjo | | | | | Perbup 91/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Sukoharjo Tahun 2020 - 2039 |
| 2 | RDTR Kec Kartasura | | | | | Perbup 93/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Kartasura Tahun 2020 - 2039 |
| 3 | RDTR Kec Grogol | | | | | Perbup 92/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Grogol Tahun 2020 - 2039 |
| 4 | RDTR Kecamatan Nguter | | | | | |
| 5 | RDTR Kecamatan Bendosari | | | | | |
| | **KAB BOYOLALI** | | | | | |
| 1 | RDTR Kec Sawit | | | | | Perbup 77/2021 tentang RDTR Kec. Sawit Tahun 2021-2041 (12 November 2021) |
| 2 | RDTR Wilayah Perencanaan Mojosongo | | | | | Perbup RDTR Mojosongo No. 68 Tahun 2022 (4 Juli 2022) |
| 3 | RDTR Kecamatan Banyudono | | | | | Perbup RDTR Kecamatan Banyudono No. 106 Tahun 2022 tgl 1 Desember 2022 |
| 4 | RDTR Cepogo | | | | | Proses fasilitasi |
| | **KAB SRAGEN** | | | | | |
| 1 | RDTR Perkotaan Sragen | | | | | Perbup 69 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sragen (22 Desember 2021) |
| 2 | RDTR Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan | | | | | Perbup No. 15 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan Tahun 2023-2043 (31 Maret 2023) |
| 3 | RDTR Gemolong | | | | | Perbup No. 34 Tahun 2023 tentang RDTR Gemolong (21 Agustus 2023) |
| | **KAB PEMALANG** | | | | | |
| 1 | RDTR Kaw Perkotaan Pemalang | | | | | |
| | **KAB BATANG** | | | | | |
| 1 | RDTR Kec Limpung | | | | | Perbup No. 13 Tahun 2023 tentang RDTR WP Limpung |
| 2 | RDTR Kec Tulis | | | | | Perda Kab Batang No.6 Tahun 2020 tentang RDTR BWP Tulis Th. 2020 - 2040 |
| 3 | RDTR Gringsing | | | | | Perbup No. 12 Tahun 2023 tentang RDTR WP Gringsing |
| | **KAB. SEMARANG** | | | | | |
| 1 | RDTR Perkotaan Kecamatan Tengaran | | | | | |

| NO | KABUPATEN | PENYUSUNAN | *PROSES PERSUB ATR* | *PROSES Fasilitasi* | PERDA/ PERKADA BARU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RDTR Kecamatan Bergas | | | | | |
| 3 | RDTR Perkotaan Ungaran | | | | | |
| 4 | RDTR Perkotaan Kecamatan Ambarawa | | | | | |
| | **KAB. BLORA** | | | | | |
| 1 | RDTR Kec. Randublatung | | | | | |
| 2 | RDTR Kec. Jepon | | | | | |
| 3 | RDTR Kec. Kunduran | | | | | |
| 4 | RDTR Kecamatan Blora | | | | | |
| 5 | RDTR Kecamatan Cepu | | | | | |
| | **KOTA SEMARANG** | | | | | |
| 1 | RDTR Kec Tugu | | | | | Proses Fasilitasi |
| 2 | RDTR BWK V Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan | | | | | |
| | **KAB PEKALONGAN** | | | | | |
| 1 | RDTR Kec Kedungwuni | | | | | Perbup Pekalongan 21/2021 tentang RDTR BWP Kecamatan Kedungwuni 2021 - 2041 (9 Juni 2021) |
| 2 | RDTR Kec. Siwalan | | | | | |
| | **KAB PURBALINGGA** | | | | | |
| 1 | RDTR Kaw Perkotaan Purbalingga | | | | | Perbup Purbalingga 46/2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga Tahun 2021 - 2041 (10 Juni 2021) |
| 2 | RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari | | | | | Proses Fasilitasi |
| | **KAB JEPARA** | | | | | |
| 1 | RDTR Kec Jepara | | | | | Perbup Jepara No 55 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Jepara Tahun 2021 - 2041 (26 Oktober 2021) |
| 2 | RDTR Mayong | | | | | |
| 3 | RDTR Kawasan Perkotaan Kalinyamatan | | | | | |
| | **Kab PURWOREJO** | | | | | |
| 1 | RDTR Perkotaan Purworejo Kutoarjo | | | | | Perbup No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo Tahun 2022-2041 |
| 2 | RDTR Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Yogyakarta International Airport | | | | | Linsek 20 Juli 2023 |
| | **KAB KUDUS** | | | | | |
| 1 | RDTR Kawasan Perkotaan Jekulo | | | | | |
| 2 | RDTR Kec. Undaan | | | | | |
| | **KAB KLATEN** | | | | | |
| 1 | RDTR Kecamatan Karangdowo | | | | | |
| 2 | RDTR Kecamatan Gantiwarno | | | | | |
| 3 | RDTR Kecamatan Trucuk | | | | | |
| 4 | RDTR Kecamatan Bayat | | | | | |
| 5 | RDTR Kawasan Perkotaan Prambanan | | | | | Linsek 19 September 2023 |
| 6 | RDTR Kecamatan Wedi | | | | | |
| | **KAB. TEMANGGUNG** | | | | | |
| 1 | RDTR Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh | | | | | |

| NO | KABUPATEN | PENYUSUNAN | *PROSES PERSUB ATR* | *PROSES Fasilitasi* | PERDA/ PERKADA BARU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **KAB. DEMAK** | | | | | |
| 1 | RDTR Perkotaan Demak | | | | | |
| 2 | RDTR Perkotaan Mranggen | | | | | |
| | **KAB CILACAP** | | | | | |
| 1 | RDTR Kaw Perkotaan Cilacap | | | | | Perbup Cilacap 75/2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap Tahun 2021 - 2041 (9 Juni 2021) |
| 2 | RDTR Kawasan Perkotaan Kroya | | | | | |
| 3 | RDTR Kawasan Perkotaan Maos | | | | | |
| 4 | RDTR Kawasan Perkotaan Majenang | | | | | |
| 5 | RDTR Kawasan Perkotaan Dayeuhluhur | | | | | |
| 6 | RDTR Kawasan Perkotaan Sidareja | | | | | Perbup No. 6 Tahun 2023 tentang RDTR Sidareja (4 April 2023) |
| | **KAB KENDAL** | | | | | |
| 1 | RDTR Kecamatan Kaliwungu | | | | | proses fasilitasi |
| 2 | RDTR Kecamatan Brangsong | | | | | proses fassilitasi |
| 3 | RDTR Kecamatan Boja | | | | | |
| 4 | RDTR Kecamatan Patebon | | | | | |
| 5 | RDTR Kecamatan Kendal | | | | | |
| 6 | RDTR Kecamatan Kaliwungu Selatan | | | | | |
| 7 | RDTR Kecamatan Kangkung | | | | | |
| 8 | RDTR Kecamatan Ngampel | | | | | |
| 9 | RDTR Ringinarum | | | | | |
| 10 | RDTR Gemuh | | | | | |
| 11 | RDTR Rowosari | | | | | |
| 12 | RDTR Weleri | | | | | |
| 13 | RDTR Kecamatan Pegandon | | | | | |
| 14 | RDTR Sukorejo | | | | | |
| | **KOTA SURAKARTA** | | | | | |
| 1 | RDTR Perkotaan Surakarta | | | | | Linsek 19 September 2023 |
| | **KAB. KARANGANYAR** | | | | | |
| 1 | RDTR KP Karanganyar | | | | | |
| | **KAB. GROBOGAN** | | | | | |
| 1 | RDTR Kawasan Perkotaan Purwodadi | | | | | |
| 2 | RDTR Gubug | | | | | |
| 3 | RDTR Klambu | | | | | |
| | **KAB. REMBANG** | | | | | |
| 1 | RDTR Perkotaan Rembang | | | | | |
| 2 | RDTR Kecamatan Lasem | | | | | |
| 3 | RDTR Kawasan Koridor Jalan Pantura Kragan-Sluke | | | | | |
| | **KOTA TEGAL** | | | | | |
| 1 | RDTR Kota Tegal | | | | | Hasil fasilitasi keluar tanggal 11 Mei |
| | **KAB. PATI** | | | | | |
| 1 | RDTR Kecamatan Juwana | | | | | |
| 2 | RDTR Kecamatan Batangan | | | | | |
| 3 | RDTR Kecamatan Tayu | | | | | |
| | **KAB. TEGAL** | | | | | |
| 1 | RDTR Slawi-Adiwerna | | | | | |
| 2 | RDTR Talang-Dukuhturi | | | | | |

| NO | KABUPATEN | PENYUSUNAN | *PROSES PERSUB ATR* | *PROSES Fasilitasi* | PERDA/ PERKADA BARU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **KAB. BANJARNEGARA** | | | | | |
| 1 | RDTR Perkotaan Banjarnegara | | | | | |
| | **KAB. WONOSOBO** | | | | | |
| 1 | RDTR Kertek | | | | | |
| 2 | RDTR Perkotaan Wonosobo | | | | | |
| | **KAB KEBUMEN** | | | | | |
| 1 | RDTR Perkotaan Kebumen | | | | | |
| 2 | RDTR Prembun | | | | | |
| | **KOTA MAGELANG** | | | | | |
| 1 | RDTR Kota Magelang | | | | | |
| | **KAB WONOGIRI** | | | | | |
| 1 | RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Wonogiri | | | | | Peraturan Bupati Wonogiri No. 63 Tahun 2022 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Wonogiri Tahun 2022-2042 |
| 2 | RDTR Geopark Nasional Gunungsewu | | | | | |
| 3 | RDTR Kecamatan Pracimantoro | | | | | |
| 4 | RDTR Kecamatan Ngadirojo | | | | | |
| | **33 Kab/Kota** | **98** | **34** | **31** | **25** | **25** |

*Sumber : Dinas PUSDATARU Prov. Jateng, (27Maret 2023)*

Dalam rangka pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan sebesar 20 persen, pemerintah provinsi perlu melakukan upaya pendorongan untuk mewujudkan hal tersebut. Rata-rata luasan RTH publik di Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah sebesar 7,86 persen dari luas perkotaan di Jawa Tengah. Proporsi ini tentunya masih jauh dari angka sebagaimana yang diamanatkan.

**Tabel 2.171.**

**Rata – Rata Luasan RTH Di Kawasan Perkotaan Jawa Tengah**

| No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Semarang | 2.700,68 | 2.700,68 | 2.700,68 | 6,99% | 6,99% | 6,99% |
| 2 | Kab. Semarang | 756,48 | 756,48 | 382,87 | 6,73% | 6,73% | 6,31% |
| 3 | Kota Salatiga | 482,16 | 482,16 | 482,16 | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| 4 | Kab. Kendal | 477,62 | 477,62 | 393,82 | 5,43% | 5,43% | 4,48% |
| 5 | Kab. Demak | 392,02 | 392,02 | 311,56 | 5,49% | 5,49% | 4,37% |
| 6 | Kab. Grobogan | 869,91 | 869,91 | 869,91 | 11,70 % | 11,70 % | 11,70 % |
| 7 | Kab. Pati | 615,39 | 615,39 | 352,47 | 5,66% | 5,66% | 3,88% |
| 8 | Kab. Kudus | 1.036,77 | 1.036,77 | 1.036,77 | 9,92% | 9,92% | 9,92% |
| 9 | Kab. Jepara | 449,05 | 468,35 | 468,35 | 4,72% | 4,88% | 4,88% |
| 10 | Kab. Blora | 547,84 | 547,84 | 547,84 | 12,34 % | 12,34 % | 12,34 % |
| 11 | Kab. Rembang | 448,48 | 448,48 | 448,48 | 16,33 % | 16,33 % | 16,33 % |
| 12 | Kab. Klaten | 611,43 | 611,43 | 547,82 | 6,17% | 6,17% | 5,58% |
| 13 | Kab. Boyolali | 114,44 | 195,68 | 195,68 | 3,20% | 4,96% | 4,96% |
| 14 | Kab. Wonogiri | 357,85 | 357,85 | 316,59 | 5,80% | 5,80% | 7,24% |
| 15 | Kab. Sukoharjo | 998,32 | 998,32 | 177,40 | 6,15% | 6,15% | 2,59% |
| 16 | Kab. Sragen | 208,64 | 242 | 242 | 2,78% | 5,57% | 5,57% |

| No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Kota Surakarta | 583,78 | 583,78 | 583,78 | 12,35 % | 12,35 % | 12,35 % |
| 18 | Kab. Karanganyar | 252,65 | 252,65 | 252,65 | 7,40% | 7,40% | 7,40% |
| 19 | Kab. Purworejo | 524,41 | 524,41 | 524,41 | 7,30% | 7,30% | 7,30% |
| 20 | Kab. Temanggung | 245,45 | 245,45 | 245,45 | 7,56% | 7,56% | 7,56% |
| 21 | Kab. Wonosobo | 504,13 | 504,13 | 504,13 | 14,41 % | 14,41 % | 14,41 % |
| 22 | Kab. Kebumen | 1.434,68 | 1.434,68 | 1.434,68 | 11,00 % | 11,00 % | 11,00 % |
| 23 | Kab. Magelang | 543,62 | 1.055,54 | 1.055,54 | 3,47% | 9,30% | 9,30% |
| 24 | Kota Magelang | 449,15 | 449,15 | 449,15 | 24,22 % | 24,22 % | 24,22 % |
| 25 | Kab. Banjarnegara | 403,23 | 403,23 | 403,23 | 10,03 % | 10,03 % | 10,03 % |
| 26 | Kab. Banyumas | 1.178,83 | 1.178,83 | 1.178,83 | 5,79% | 5,79% | 5,79% |
| 27 | Kab. Batang | 345,47 | 345,47 | 345,47 | 7,51% | 7,51% | 7,51% |
| 28 | Kab. Brebes | 1.185,43 | 1.185,43 | 1.185,43 | 9,62% | 9,62% | 9,62% |
| 29 | Kab. Cilacap | 1.677,33 | 1.677,33 | 1.677,33 | 6,48% | 6,48% | 6,48% |
| 30 | Kota Pekalongan | 294,91 | 294,91 | 294,91 | 6,35% | 6,35% | 6,35% |
| 31 | Kota Tegal | 592,9 | 592,9 | 592,9 | 15,12 % | 15,12 % | 15,12 % |
| 32 | Kab Pekalongan | 196,09 | 120,17 | 120,17 | 3,89% | 4,53% | 4,53% |
| 33 | Kab. Pemalang | 1.267,67 | 1.267,67 | 1.267,67 | 16,72 % | 16,72 % | 16,72 % |
| 34 | Kab. Purbalingga | 164,49 | 164,49 | 164,49 | 5,89% | 5,89% | 5,89% |
| 35 | Kab. Tegal | 377,46 | 377,46 | 203,53 | 5,70% | 5,70% | 6,97% |
| 36 | Jumlah Provinsi Jawa Tengah | 23.288,76 | 23.858,66 | 21.958,15 | 7,49% | 7,91% | 7,86% |

*Sumber: Dinas PUSDATARU Prov. Jateng, 2022*

Selain itu upaya pengendalian pemanfaatan ruang juga dilakukan dengan pengawasan terhadap kinerja Penataan Ruang baik di Provinsi maupun di kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui sistem pengawasn teknis (SIWASTEK). Pengawasan penataan ruang merupakan upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 212 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengawasan penataan ruang dilaksanakan terhadap kinerja pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, dan pelaksanaan penataan ruang; kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang; kinerja pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang; serta kinerja pemenuhan standar teknis penataan ruang kawasan. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 216 PP No. 21/2021 diamanatkan bahwa Gubernur melakukan pengawasan penataan ruang terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Untuk itu, Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 telah melaksanakan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Kementerian ATR/BPN melalui sistem SIWASTEK. Selain itu juga sebagai bentuk provinsi melaksanakan tugas pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Provinsi Jawa Tengah juga telah membentuk Tim Pengawas Provinsi sebagai pelaksana kegiatan pengawasan kinerja penyelenggaraan penatan ruang pada tahun 2022.

Tujuan dari Pengawasan Kinerja TURBINLAK Penataan Ruang dan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai indikator kemajuan Penataan Ruang suatu daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Hasil Siwastek kabupaten kota pada tahun 2022 tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 2.172.**

**Tabel Hasil Pengawasan Kinerja Penyelenggaran Penataan Ruang**

| Kab/Kota | Nilai Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang | Kategori |
|---|---|---|
| **Jepara** | 86 | baik |
| **Cilacap** | 83 | baik |
| **Purbalingga** | 79 | sedang |
| **Klaten** | 79 | sedang |
| **Batang** | 77 | sedang |
| **Blora** | 77 | sedang |
| **Pati** | 75 | sedang |
| **Kota Pekalongan** | 75 | sedang |
| **Boyolali** | 74 | sedang |
| **Kota Seamrang** | 73 | sedang |
| **Kota Magelang** | 73 | sedang |
| **Kota Tegal** | 73 | sedang |
| **Brebes** | 71 | sedang |
| **Temanggung** | 70 | sedang |
| **Purworejo** | 69 | sedang |
| **Grobogan** | 68 | sedang |
| **Pekalongan** | 68 | sedang |
| **Sukoharjo** | 67 | sedang |
| **Rembang** | 66 | sedang |
| **Sragen** | 66 | sedang |
| **Kudus** | 66 | sedang |
| **Banyumas** | 63 | sedang |
| **Wonogiri** | 63 | sedang |
| **Surakarta** | 61 | sedang |
| **Pemalang** | 60 | sedang |
| **Kendal** | 60 | sedang |
| **Magelang** | 60 | sedang |
| **Semarang** | 60 | sedang |
| **Salatiga** | 60 | sedang |
| **Demak** | 58 | sedang |
| **Banjarnegara** | 58 | sedang |
| **Kebumen** | 56 | sedang |
| **Karanganyar** | 56 | sedang |
| **Wonosobo** | 50 | sedang |
| **Tegal** | 46 | buruk |

*Sumber: Dinas PUSDATARU Prov. Jateng, 2022*

### 2.5.8.Energi dan Sumber Daya Mineral

Sistem ketenagalistrikan Jawa Tengah ditransmisikan dari satu kesatuan sistem interkoneksi antar Pulau Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Dengan demikian dalam pemenuhan kebutuhan listrik, Jawa Tengah tidak hanya ditopang oleh pembangkit yang ada di Jawa Tengah namun juga Jawa Barat, Jawa Timur, Madura dan Bali. Sistem ketenagalistrikan di Jawa Tengah merupakan bagian dari satu kesatuan sistem di Pulau Jawa, Pulau Madura dan Pulau Bali yang terhubung secara interkoneksi dengan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV. kecuali wilayah di Kepulauan Karimunjawa. Wilayah Kepulauan Karimunjawa merupakan wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang tidak terhubung dengan sistem JAMALI karena merupakan pulau berlistrik mandiri (Isolated). Pasokan energi di Karimunjawa disuplai oleh PLTD Legon Bajak dengan kapasitas sebesar 2 x 2,2 MW sehingga pada tahun 2016 penduduk di Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan sudah dapat menikmati listrik 24 jam. Selain itu berdasarakan nota kesepahaman antara PLN dan Pemkab Jepara tentang pengalihan pengelolaan kelistrikan di Pulau Karimunjawa pada tanggal 21 Juli 2022, pengelolaan kelistrikan di Pulau Parang, Genting, dan Nyamuk, Kecamatan Karimunjawa telah di ambil alih PLN. Pulau Parang disupply oleh PLTS eksisting sebesar 135,8 KWp dan diesel 350 KVA, melayani pelanggan sebanyak 342KK. Pulau Nyamuk dengan kapasitas PLTS 111KWp dan diesel 100KVA melistriki 177KK serta Pulau Genting disupply oleh PLTS sebesar 36 KWp dan diesel 30KVA melistriki 86 KK. Rencana pada tahun 2023 PLN melalui program dedieselisasi, untuk ketiga pulau tersebut akan dilakukan penambahan kapasitas PLTS dengan rincian Pulau Parang sebesar 645KWp, Pulau Nyamuk sebesar 345KWp dan Pulau Genting sebesar 155KWp. Diharapkan setelah dilakukan penambahan kapasitas PLN, maka diesel sudah tidak digunakan lagi dan 3 pulau tersebut menggunakan *green energy*. Karimunjawa diharapkan menuju *Green Tourism* di Jawa Tengah.

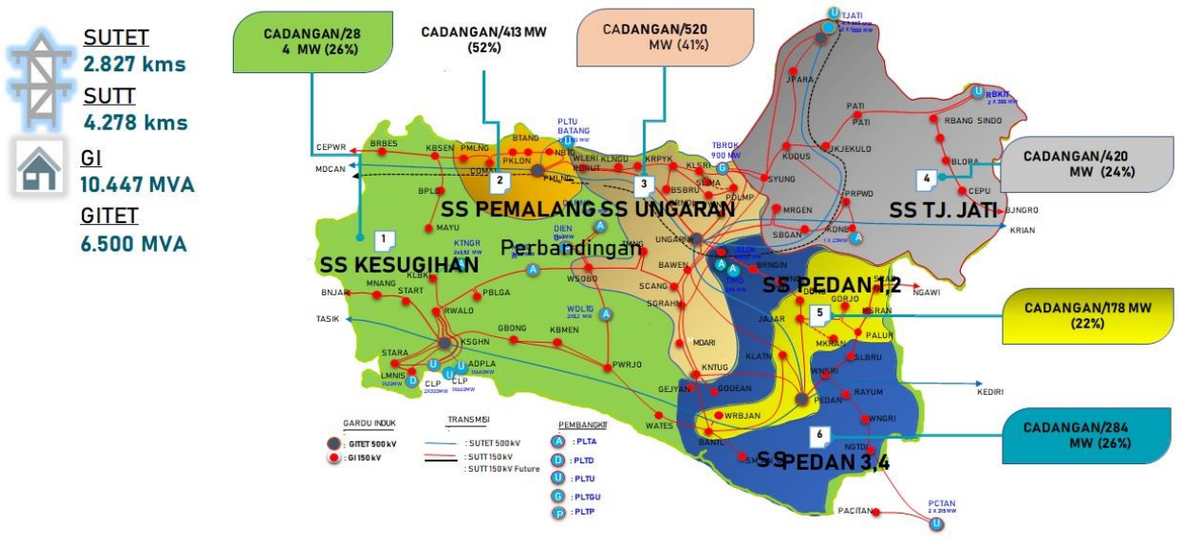


*Sumber: PLN , 2022*

**Gambar 2.86.**
**Sistem Ketenagalistrikan Jawa Tengah dan DIY**

Kelistrikan Jawa Tengah dan DIY disuplai dari 6 subsistem (SS), antara lain : Subsistem Ungaran 1-2, Subsistem Pedan 1-2, Subsistem Pedan 3-4, SubsistemTanjung Jati, Subsistem Kesugihan, dan Subsistem Pemalang. Beban Puncak Sistem Jateng dan DIY sebesar 4851 MW dengan reserve power sebesar 2621 MW.

Selain itu terdapat beberapa pembangkit tenaga listrik yang telah selesai dibangun di Jawa Tengah dalam rangka mendukung Program Listrik 35.000 MW secara nasional. Progress pembangunan pembangkit interkoneksi di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2022, yaitu:

1) PLTU Jawa Tengah/ PLTU Batang (2x1000 MW): *overall progress* 100 persen (per Desember 2022); telah COD Unit 1 pada 15 Agustus 2022 dan Unit 2 pada 31 Agustus 2022;
2) PLTU Jawa 4/ PLTU Tj. Jati B Unit 5 dan 6 (2x1.000 MW): *overall progress* 100 persen (per Desember 2022); telah COD Unit 5 pada 17 Maret 2022 dan Unit 6 pada 30 September 2022;
3) PLTGU Jawa-Bali 1/ Tambaklorok (779 MW): *overall progress* 93,73 persen (per September 2023); Rencana COD pada 26 November 2023 (*estimated*).

Seiring dengan peningkatan kapasitas daya listrik terpasang berbanding lurus dengan konsumsi energi listrik di Jawa Tengah. Selama kurun waktu 2015 hingga 2021 menunjukkan peningkatan konsumsi energi listrik dari 20.418 GWh pada tahun 2015 menjadi 27.365 GWh pada tahun 2020, yang kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 26.661 GWh. Meskipun demikian pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 27.564 GWh.

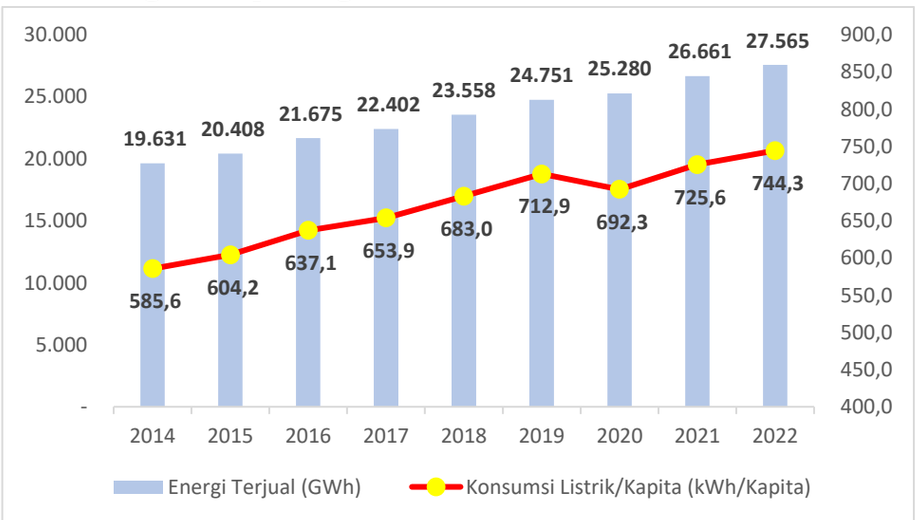


*Sumber: BPS, 2022*

**Gambar 2.87.**
**Konsumsi Energi Listrik di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2015 - 2022 (GWh)**

Selain itu peningkatan kebutuhan energi listrik juga terlihat dari Konsumsi listrik per kapita. Selama kurun waktu 2014 hingga tahun 2022 mengalami trend peningkatan dari 585,6 menjadi 744,3 kWh per Kapita. Konsumsi listrik perkapita erat kaitanya dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi konsumsi listrik perkapita disuatu daerah maka semakin tinggi juga potensi kesejahteraan di daerah tersebut. Konsumsi Listrik di Provinsi Jawa Tengah masih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah tetangga di Pulau Jawa. Menurut data dari PLN UID Jateng DIY, konsumsi litrik Jawa Timur sudah mencapai 907 kWh/kapita, Jawa Barat sebesar 1.012 kWh/kapita, dan DKI Jakarta telah mencapai 3.248 kWh/kapita. Dengan demikian, potensi konsumsi listrik Jawa Tengah masih harus terus didorong dan ditingkatkan. Tidak hanya mendorong pemanfaatan untuk kegiatan konsumtif tetapi utamanya juga mendorong pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif.

Rasio Elektrifikasi (RE) Jawa Tengah sejak tahun 2019 telah mencapai 99,91% dengan Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik) di Jawa Tengah telah mencapai 100%. Berdasarkan data RE masih terdapat 0,12 persen KK belum memiliki listrik secara mandiri. KK belum berlistrik tersebut sebagian besar merupakan rumah tangga miskin. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan akses listrik mandiri bagi rumah tangga tidak mampu melalui program listrik gratis. Program listrik gratis telah dimulai sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2022 dengan total akumulasi sudah 78.955 unit rumah tersambung listrik. Perkembangan rasio elektrifikasi dan akumulasi sambungan listrik gratis selama tahun 2018-2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.173.**
**Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Rasio Elektrifikasi (%) | 98,52 | 99,91 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 2. | Sambungan Listrik Gratis | 13.092 | 27.225 | 40.173 | 55.280 | 78.955 |

*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022*

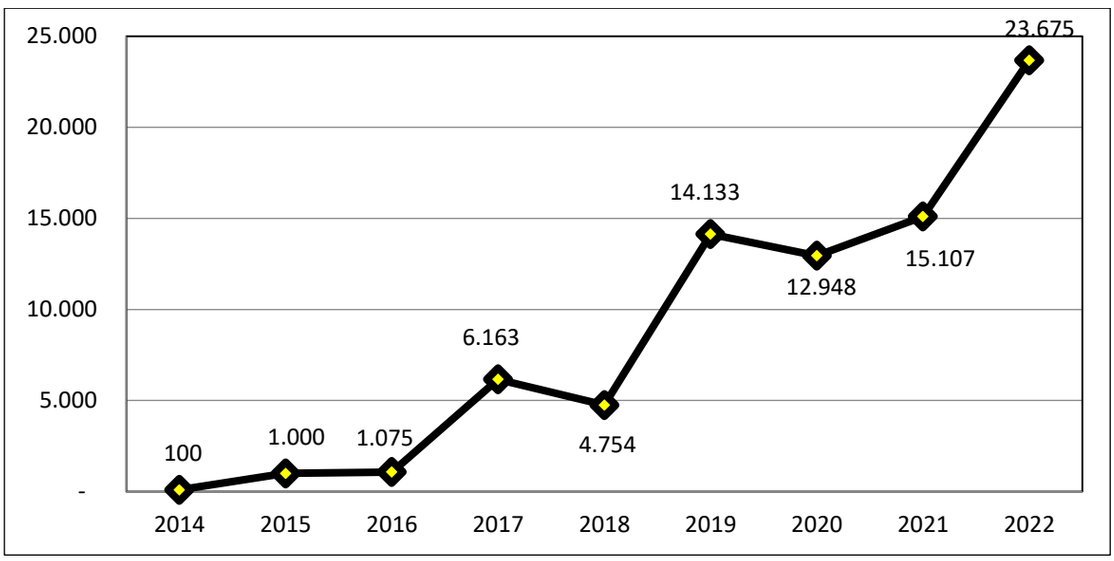


*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 2.88.**
**Program Listrik Gratis di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2014 - 2022 (Unit)**

Kecukupan pemenuhan listrik di Jawa Tengah ditunjukkan dengan Rasio Ketersediaan Daya Listrik yang merupakan perbandingan daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan. Idealnya Rasio Ketersediaan Daya Listrik menunjukkan angka 1 atau 100 persen yaitu menunjukkan bahwa antara daya terpasang sesuai dengan jumlah kebutuhan listrik.

**Tabel 2.174.**
**Rasio Ketersediaan Daya Listrik Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Daya Listrik Terpasang (MW) | 6.325,24 | 6.365 | 7.203 | 7.203 | 9.200 |

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2 | Kebutuhan Listrik (MW) | 5.635 | 5.480 | 5.588 | 5.720 | 6.306 |
| 3 | Rasio Ketersediaan Daya Listrik (angka) | 1,12 | 1,16 | 1,29 | 1,26 | 1,46 |

*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Berdasarkan data-data tersebut dapat dilihat bahwa pasokan listrik di Jawa Tengah sangat memadai bahkan memiliki reserve margin/cadangan sebesar 46 %. Reserve margin yang terjadi diharapkan dapat menjadi sentimen positif dalam menarik tumbuhnya industri di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah siap untuk menerima investasi baru khususnya di Kawasan Industri yang telah tersedia di Jawa Tengah diantaranya Batang Industrial Park ( KI Segayung), Grand Batang City (KIT Batang), KI Kendal (KEK Kendal), KI Wijayakusuma, Tanjung Emas Export Processing Zone (Lamicitra Nusantara), KI Terboyo, LIK Bugangan Baru Semarang, Jatengland Industrial park Sayung, KI Candi, Taman Industri BSB, dan KI Cilacap. Tantangan Ketenagalistrikan bukan lagi tentang ketersediaan tetapi terkait keandalan mutu layanan untuk mengurangi keluhan dari sisi ditribusinya dan keberlanjutan dari sisi produksi energi listriknya.

Jawa Tengah masih memiliki ketergantungan pada energi fosil. Hal tersebut terlihat dari jumlah persentase penggunaan energi fosil sebesar 84,24 persen pada tahun 2022 yang berdampak pada tingginya emisi gas rumah kaca di Jawa Tengah. Peta jalan Provinsi Jawa Tengah terkait transisi energi menuju energi baru terbarukan ada dalam Perda RUED Provinsi Jateng No 12 Tahun 2018. Dalam perda tersebut Pemerintah Jawa Tengah telah mentargetkan persentase EBT dalam bauran energi sebesar 21,32% tahun 2025 dan 28,82% di tahun 2050. Kolaborasi multi-pihak, yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten/provinsi menjadi kebutuhan bersama dan masing-masing pihak punya *resources* dan *capacity* yang bisa dikontribusikan untuk menyiapkan fasilitas energi terbarukan. Dalam hal ini semua pihak memberikan kontribusi sesuai kewenangan.

Walaupun penggunaan energi fosil masih relatif tinggi tetapi penggunaan EBT menunjukkan trend positif setiap tahunnya. Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi, hingga akhir Tahun 2022 telah mencapai 15,76% dari kondisi awal pada tahun 2014 sebesar 7,01%. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus tetap mengupayakan pengembangan dan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan yaitu EBT, mengingat potensi EBT di Jawa Tengah cukup banyak, antara lain energi surya, air, biogas, waste to energy (biomassa), gas rawa, dan panas bumi. Peta Potensi EBT di Jateng dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

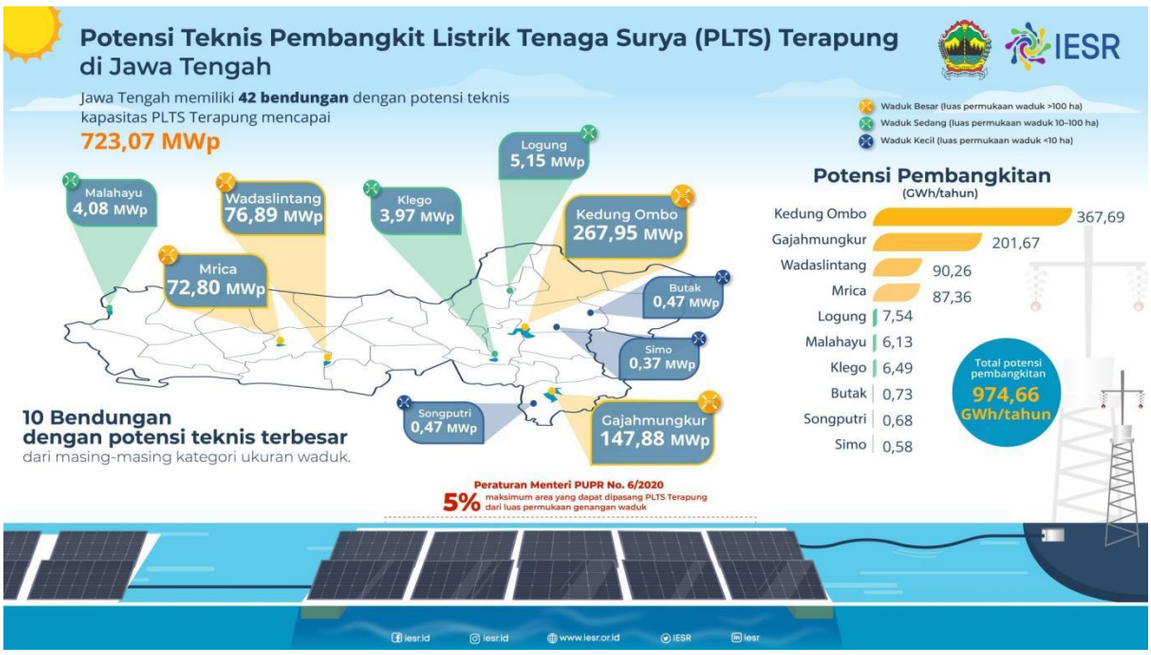


*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, dan IESR 2022*

**Gambar 2.89.**

**Potensi Teknis PLTS Terapung di Jawa Tengah**

Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya terapung di Jawa Tengah mencapai 723,07 MWp. Dua Bendungan dengan potensi terbesar adalah Kedung Ombo dan Gajahmungkur. Kedua bendungan tersebut telah masuk dalam RUPTL PLN 2021-2030 sebagai pembangkit yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sistem.

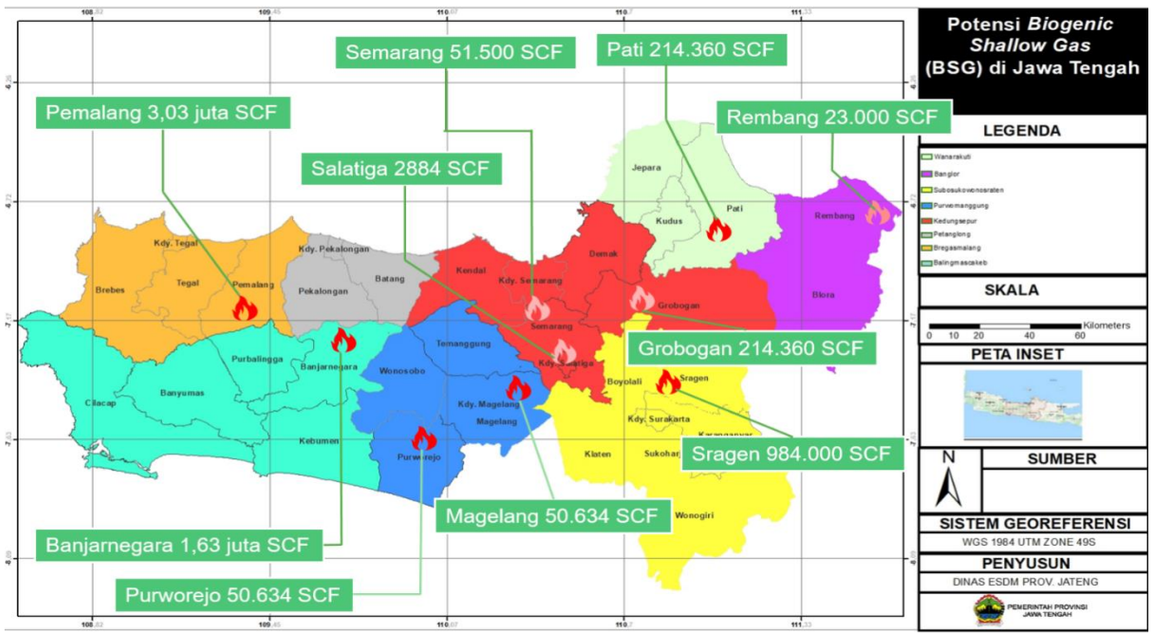


*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 2.90.**

**Potensi Biogenic Shallow Gas (Gas Rawa) di Jawa Tengah**

Total potensi BSG yang diketahui di Jawa Tengah adalah sekitar 14,47 juta SCF (Standart Cubic Feet). Potensi terbesar terpetakan di Kabupaten Pemalang dengan 3,03 juta SCF dan terendah dideteksi di Kota Salatiga sebesar 2.884 SCF. Potensi lainnya tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan variasi besaran potensi cadangan gas rawa (lihat gambar Peta Potensi BSG). Potensi yang besar dapat menjadikan pergeseran gas rawa sebagai sumber energi primer yang dapat secara langsung digunakan dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat sehari-hari. Bentuk optimalisasi sumber daya gas rawa ini, terlihat

pada kegiatan pembangunan infrastruktur instalasi gas rawa (biogenic shallow gas) di Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini telah tersebar pada 6 titik lokasi di 4 kabupaten dengan jumlah jangkauan sambungan sebanyak 340 sambungan rumah.

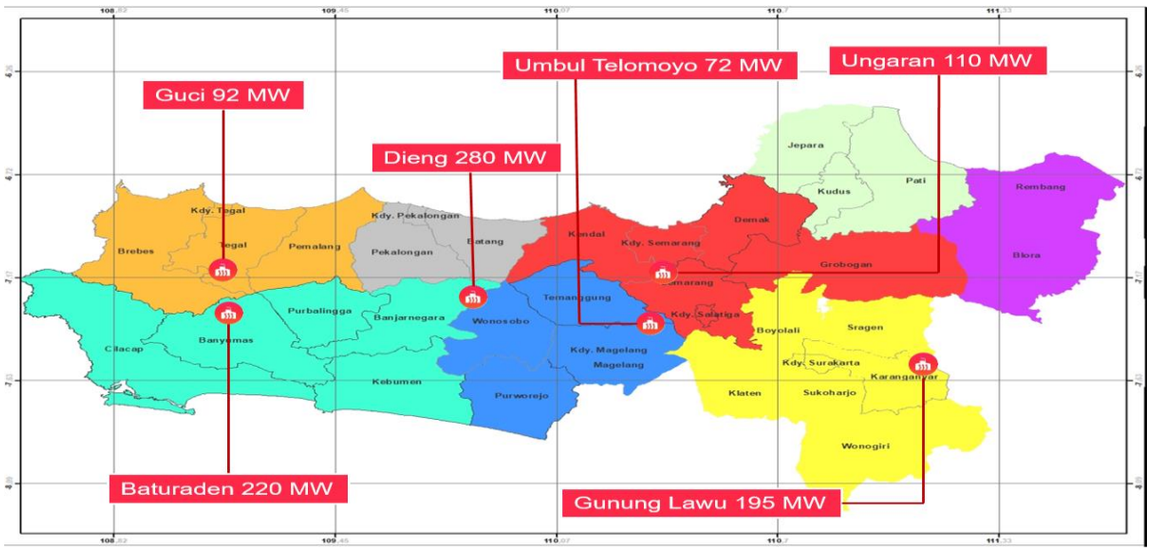


*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 2.91.**
**Potensi Panas Bumi di Jawa Tengah**

Jawa Tengah juga memilki potensi panas bumi cukup besar. Potensi panas bumi yang diperkirakan dapat dikembangkan di Jawa Tengah mencapai 1.981 MW. Potensi panas bumi yang sudah dimanfaatkan di Jawa Tengah sebagai pembangkit adalah di PLTPanas Bumi Dieng dengan kapasitas 70 MW. Baru 3,53 % yang telah termanfaatakan dari total potensi. Pengembangan potensi panas bumi menjadi prioritas karena diharapkan akan menambah pasokan energi listrik berbasis EBT di Jawa Tengah. Melalui pengembangan dan pemanfaatan EBT ini, maka diharapkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terutama dari sektor energi dapat ditekan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menurunkan emisi GRK sektor energi dari 24.512 tCO2e pada tahun 2019 menjadi 123.401 tCO2e tahun 2023 adalah melalui pembangunan infrastruktur EBT. Perkembangan persentase EBT dalam bauran energi selama tahun 2014-2022 sebagai berikut:

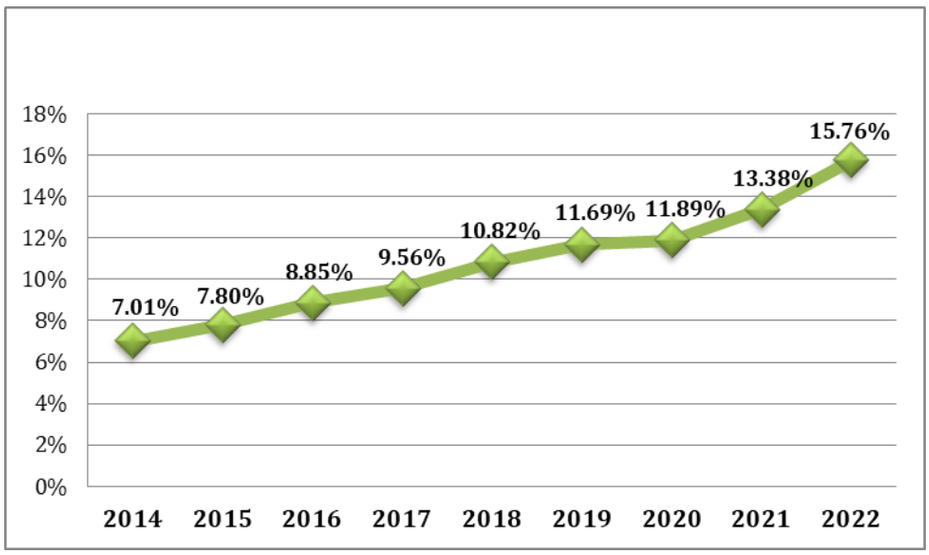


*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 2.92.**
**Persentase EBT Dalam Bauran Energi Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2014 - 2022**

Selain kegiatan pembangunan infrastruktur EBT, upaya dalam penurunan emisi gas rumah kaca, antara lain melalui pelaksanaan penghargaan Desa Mandiri Energi, Hemat Energi dan Air, dan Audit Energi. Penghargaan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi Pemerintah Desa dan masyarakat secara luas dalam melaksanakan diversifikasi energi dan pengembangan teknologi baru berbasis energi baru terbarukan menuju kemandirian energi di Jawa Tengah. Adapun upaya konservasi energi diwujudkan salah satunya dengan pelaksanaan penghargaan Gerakan Hemat Energi dan Air serta audit energi. Gerakan Hemat Energi dan Air menjadi sebuah tindakan promotif untuk mendorong peran serta pemerintah kabupaten/kota, sekolah (SMA/SMK), dan sektor Industri dalam menggerakkan perilaku budaya hemat energi dan air di masa yang akan datang serta mendorong upaya konservasi energi untuk menjaga ketahanan energi. Sedangkan kegiatan Audit Energi dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik gedung, baik instansi pemerintah dan swasta dalam mendukung pelaksanaan konservasi energi.

Sebagai motor penggerak peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan diperlukan langkah strategis untuk mengajak peran serta seluruh masyarakat dalam mewujudkan kemandirian energi daerah, melalui program penyuluh energi. Program penyuluh energi bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memilih, memakai, mengembangkan energi baru terbarukan yang tersedia dan berpotensi di sekitarnya, sehingga akan ada perubahan perilaku masyarakat dari penggunaan energi konvensional (energi fosil) sebagai sumber energi utama menjadi pemanfaatan energi baru terbarukan serta memberikan fasilitasi dalam pembinaan kelembagaan pengelolaan energi di daerah. Adanya program penyuluh energi dapat menjadi katalis terwujudnya desa mandiri energi di Jawa Tengah. Capaian Desa Mandiri Energi (DME) sampai dengan tahun 2022 sejumlah 2.353 desa, yang kemudian berdasarkan tingkat pemanfaatan energi baru terbarukan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yakni DME Inisiatif dengan kondisi eksisting 2.167 desa, DME Berkembang dengan kondisi eksisting 160 desa, dan DME Mapan dengan kondisi eksisting 26 desa. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Energi maupun Hemat Energi dan Air perlu dilakukan

monitoring dan evaluasi terkait dengan pengembangan pemanfaatan EBT di desa tersebut.

Pengembangan suatu wilayah dan pembangunan di berbagai sektor akan mempengaruhi keberadaan air tanah dan siklus air tanah. Penggunaan air yang tidak sesuai kebutuhan dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan mengakibatkan potensi air tanah semakin berkurang. Kondisi ini perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Indeks Ketersediaan Air Tanah Jawa Tengah cenderung menurun secara fluktuatif selama kurun waktu 2016 hingga 2020, sedangkan pada tahun 2022 meningkat.

**Tabel 2.175.**
**Indeks Ketersediaan Air Tanah di Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah potensi aman pengambilan air tanah | 820.185.750 | 820.185.750 | 820.185.750 | 820.185.750 | 820.185.750 |
| Jumlah pengambilan air tanah | 267.633.695 | 263.724.945 | 269.109.632 | 228.463.997 | 223.483.855 |
| Indeks Ketersediaan Air Tanah | 3,06 | 3,08 | 3,05 | 3,59 | 3,67 |

*Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2021*

Berdasarkan tabel di atas kecenderungan ketersediaan air tanah meningkat, yang menandakan bahwa pemenuhan kebutuhan air baku yang bersumber dari air permukaan bisa dikatakan juga meningkat. Potensi Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Tengah cukup memadai, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.37. Jawa Tengah memiliki 31 Cekungan Air Tanah (CAT), yang terdiri dari 6 CAT merupakan lintas provinsi, 19 CAT lintas kabupaten/kota (merupakan kewenangan provinsi), dan 6 CAT dalam wilayah satu kabupaten/kota. Potensi air tanah pada 31 CAT di Jawa Tengah selengkapnya ditunjukkan tabel di bawah.

**Tabel 2.176.**
**Potensi Air Tanah pada 31 CAT di Jawa Tengah**

| Jumlah CAT | Potensi Air Tanah (Juta $m^3$/tahun) | |
|---|---|---|
| | Bebas | Tertekan |
| 19 CAT lintas kab/kota | 6.575,64 | 140,70 |
| 6 CAT lokal (kabupaten) | 355,20 | 5,80 |
| 6 CAT lintas provinsi | 411,15 | 11,30 |
| Jumlah Total | 7.341,99 | 157,80 |

*Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2019*

Pada 25 Cekungan Air Tanah di Jawa Tengah yang berada di CAT dalam Provinsi, 21 CAT telah disusun zona pemanfaatan dan konservasi, yang berdasarkan Permen ESDM No. 31 Tahun 2018 tentang Penyusunan Zona Konservasi Air Tanah. Zona Konservasi Air Tanah dibagi menjadi 4 kategori, yaitu zona imbuhan air tanah, zona aman, zona rawan, zona kritis, zona rusak. Dari 21 CAT yang telah disusun zona pemanfaatan dan konservasi air tanah, terdapat 3 CAT yang masuk zona kritis serta 2 CAT yang masuk zona rusak. 3 CAT yang

terdapat Zona Kritis adalah pada CAT Semarang-Demak, CAT Pekalongan-Pemalang, dan CAT Karanganyar-Boyolali. Sedangkan 2 CAT yang terdapat zona rusak adalah CAT Semarang-Demak dan CAT Pekalongan-Pemalang. Kondisi CAT Semarang-Demak, CAT Pekalongan-Pemalang, dan CAT Karanganyar-Boyolali yang terdapat zona kritis dan rusak disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

a. Kondisi kualitas air tanah yang memiliki nilai daya hantar listrik (DHL) tinggi, >1000 µs/cm, serta nilai zat terlarut (TDS) >1500 ppm;
b. Kondisi muka air tanah mengalami penurunan kedudukan >40% dari kedudukan awal.

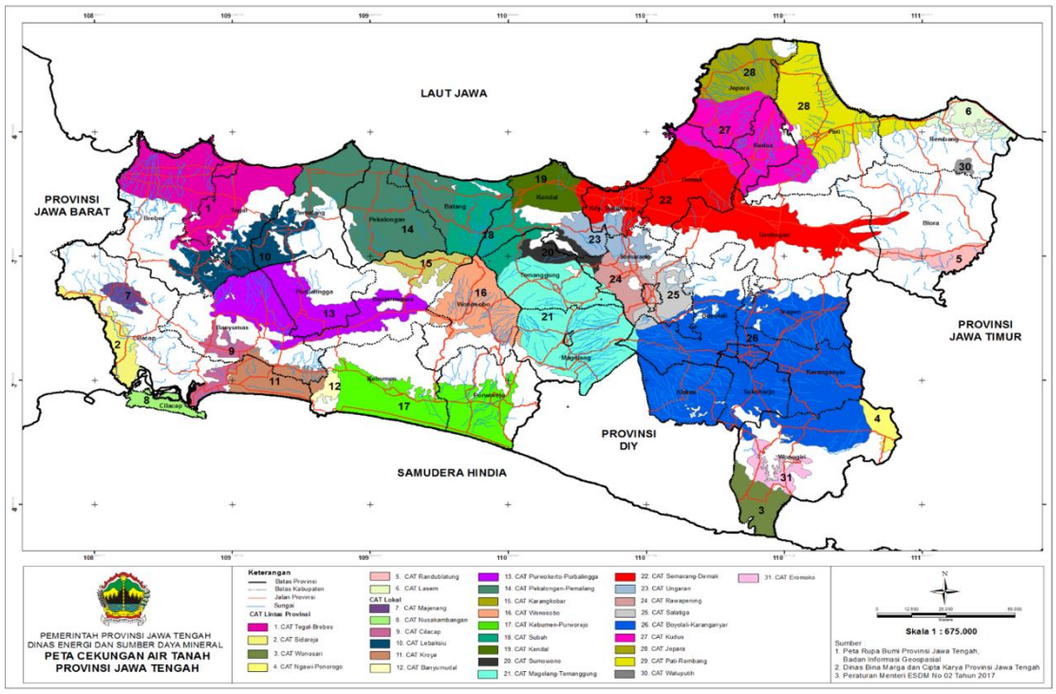


*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2021*

**Gambar 2.93.**
**Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Jawa Tengah**

Dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas air tanah maka diperlukan konservasi air tanah berupa pengendalian pengambilan air tanah dan perbaikan degradasi air tanah. Pentingnya konservasi air tanah belum banyak disosialisasikan dalam bentuk visualisasi meskipun upaya tersebut telah dilakukan kepada masyarakat khususnya generasi muda, melalui penghargaan Hemat Energi dan Air di sekolah-sekolah, sebagai upaya membudayakan hemat pemakaian air.

Kedepan penilaian Indeks Ketersediaan Air Tanah periode 2024 sampai dengan 2026 menggunakan penilaian baru yang lebih detail, yaitu terkait dengan faktor pengambilan air tanah. Pada periode 2018 sampai dengan 2023, penilaian Indeks Ketersediaan Air Tanah untuk faktor pengambilan hanya menggunakan parameter jumlah pengambilan air tanah dari yang berizin saja. Pada periode 2024 sampai dengan 2026 untuk penilaian Indeks Ketersediaan Air Tanah, faktor pengambilan akan menggunakan parameter sebagai berikut :

- Jumlah pengambilan air tanah dari yang berizin;
- Jumlah pengambilan air tanah dari yang tidak berizin;
- Jumlah pengambilan air tanah dari penduduk non PDAM.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk menjaga ketersediaan air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah. Pemanfaatan air tanah dapat dilakukan antara lain melalui pembangunan sumur bor/eksplorasi, sumur resapan/dangkal, dan sumur pantau. Sumur bor/eksplorasi bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sehingga prioritas sasaran pada daerah rawan kekeringan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan dari 8.569 desa/kelurahan di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 7 Desa/Kelurahan termasuk dalam Kelas Bahaya Tinggi kekeringan dan 2.809 Desa/Kelurahan masuk pada Kelas Bahaya Sedang kekeringan.

**Tabel 2.177.**

**Potensi Ancaman Kekeringan Desa/Kelurahan di Jawa Tengah**

| **PROVINSI JAWA TENGAH<br>JUMLAH DESA/KELURAHAN : 8.569** | |
|---|---|
| KELAS BAHAYA TINGGI | 7 DESA/KELURAHAN |
| KELAS BAHAYA SEDANG | 2.809 DESA/KELURAHAN |

*Sumber : Katalog Desa/Kelurahan Rawan Kekeringan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2019*

Selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2020, Dinas ESDM Provinsi telah membangun sebanyak 92 unit sumur di 27 kabupaten/kota, 69 kecamatan, dan 85 desa/kelurahan, sehingga meningkatkan akses air tanah untuk masyarakat di daerah rawan kekeringan. Peta sebaran lokasi bantuan sumur bor untuk daerah rawan kekeringan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

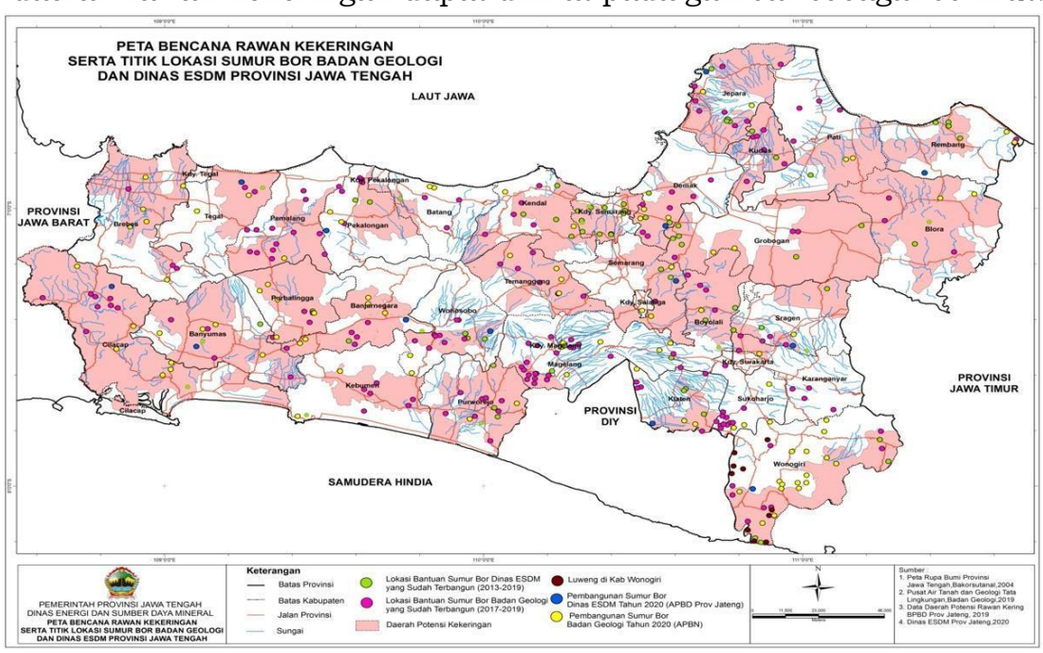


*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2021*

**Gambar 2.94.**

**Peta Titik Lokasi Sumur Bor Badan Geologi dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah overlay dengan Peta Bencana Rawan Kekeringan**

### 2.5.9.Penanggulangan Bencana

#### 1) Wilayah Rawan Bencana

a) Kawasan Potensi Bahaya Banjir, Banjir didefinisikan sebagai kenaikan drastis dari aliran sungai, kolam, danau, dan lainnya,dengan kelebihan aliran tersebut menggenangi keluar dari tubuh air (Smith & Ward 1998). Apabila suatu peristiwa terendamnya air di suatu wilayah yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis maka banjir tersebut dapat disebut Bencana Banjir. Berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, ukuran bahaya (*hazard*) dari banjir adalah ketinggian genangan. Total luas bahaya banjir di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 935.504 Ha dan berada pada kelasTinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu kelas bahaya dengan kelas rendah seluas 19.340 Ha, kelas sedang seluas 469.909 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi seluas 446.255 Ha.

Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir pada kelas rendah adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 2.384 Ha. Pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya banjir adalah Kabupaten Grobogan dengan luas 47.626 Ha. Sedangkan pada kelas tinggi adalah Kabupaten Demak dengan luas 53.960 Ha.

Kabupaten/kota dengan potensi bahaya banjir tinggi meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

b) Kawasan Potensi Bahaya Banjir Bandang, Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba, karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Ukuran bahaya banjir bandang mengacu pada Pedoman Pembuatan Peta Rawan Longsor dan Banjir Bandang akibat runtuhnya bendungan alam yang dibuat oleh Kementerian PU (2012) yaitu asumsi ketinggian genangan banjir bandang setinggi 5 meter.

Potensi luas bahaya banjir bandang dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir bandang. Total luas bahaya ProvinsiJawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruhkabupaten/kota terdampak banjir bandang, sedangkan kelas bahaya banjir bandang Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kotayangterdampak bahaya banjir bandang.

Potensi luas bahaya banjir bandang berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah seluas 104.332 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir bandangtersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 12.678 Ha, kelas sedang seluas32.757Ha, dan daerah yang terdampak bahaya banjir bandang pada kelas tinggi seluas 58.897 Ha.

Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir bandang pada kelas rendah, sedang dan tinggi adalah Kab upaten Brebes dengan luas 1.465 Ha, 4.746 Ha dan 9.574 Ha.

c) Kawasan Potensi Bahaya Cuaca ekstrim, Cuaca ekstrim merupakan fenomena cuaca yang dapat menimbulkan bencana, korban jiwa, dan menghancurkan tatanan kehidupan sosial. Contoh cuaca ekstrim antara lain hujan lebat, hujan es, angin kencang, dan badai taifun. Pada kajian ini pembahasan cuaca ekstrim lebih dititikberatkan kepada angin kencang. Angin kencangmerupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (BNPB). Terjadinya angin kencang diawali dengan terbentuknya siklon yang dapat terjadi ketika wilayah bertekanan udara rendah dikelilingi oleh wilayah bertekanan udara tinggi. Pada umumnya kasus angin kencangdi Indonesia ditandai dengan terbentuknya awan kumulonimbus yang menjulang ke atas. Selanjutnya terjadi hujan lebat dengan hembusan angin kuat dalam waktu relatif singkat. Kejadian tersebut dapat memicu terjadinya angin kencang.

   Potensi bahaya cuaca ekstrim pada tabel tersebut di atas memaparkan jumlah luas kabupaten/kotayang memiliki kondisi rentan terhadap bencana cuaca ekstrim di ProvinsiJawa Tengahberdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya di ProvinsiJawa Tengah ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten/kota. Kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum wilayah Provinsi Jawa Tengah terdampak cuaca ekstrim. Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di ProvinsiJawa Tengahsecara keseluruhan adalahseluas2.832.304 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas rendah seluas 997.704 Ha, pada kelas sedang seluas 324.567 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas

   1.510.033 Ha.

   Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim padakelas rendah dengan luas 84.966 Ha adalah Kabupaten Blora.Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelassedang dengan luas 37.207 Ha adalah Kabupaten Wonogiri. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 104.032 Ha adalah Kabupaten Grobogan.

d) Kawasan Potensi Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya

keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dibuat sesuai metode yang ada di dalam Perka No. 2 BNPB Tahun 2012. Parameter penyusun bahaya gelombang ekstrim dan abrasi terdiri dari parameter tinggi gelombang, arus laut, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai.

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah ProvinsiJawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya kabupaten/kota yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum darikabupaten/kotayang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di ProvinsiJawa Tengah adalah 15.705 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Potensi luas bahaya tersebut meliputiluas bahaya dengan kelas rendah seluas 8.891 Ha, pada kelas sedang seluas 2.282 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 4.532 Ha. Sebaran luas bahaya di Provinsi Jawa Tengah untuk untuk kabupaten/kota terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi, dimana Kabupaten Cilacap memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas rendah, yaitu seluas 1.632 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas sedang adalah KabupatenJeparadengan luas 1.684 Ha, Sedangkan kabupaten/kotayang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas tinggi adalah Kabupaten Cilacap, yaitu 1.027 Ha.

e) Kawasan Potensi Bahaya Gempa Bumi, Gempabumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi, atau runtuhan batuan (BNPB). Metode kajian untuk gempabumi pada dokumen ini menggunakan data guncangan di batuan dasar yang dikonversi menjadi data guncangan di permukaan. Konversi ini dilakukan karena gempa dengan magnitudo yang tinggi di lokasi yang dalam belum tentu menghasilkan guncangan permukaan yang lebih besar dibandingkan gempa dengan magnitudo yang lebih rendah di lokasi yang lebih dangkal. potensi luas bahaya gempabumi kabupaten/kotadi ProvinsiJawa Tengahterpapar bencana gempabumi. Potensi bahaya gempabumi tersebut merupakan luasan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gempabumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya ProvinsiJawa Tengahditentukan berdasarkan total luas bahaya kabupaten/kota. Sedangkan kelas bahaya gempabumi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terdampak bahaya gempabumi. Potensi luas bahaya gempabumi di Provinsi Jawa Tengahsecara keseluruhan adalah 3.277.108 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya gempabumi tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 2.793.772 Ha, kelas sedang seluas 451.437 Ha, dan

daerah yang terdampak bahaya gempa bumi pada kelas tinggi seluas 31.898 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempabumi pada kelas rendah adalah Kabupaten Grobogan dengan luas 201.103 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempabumi pada kelas sedang dengan luas 68.662 Ha adalah Kabupaten Wonogiri. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempabumi pada kelas tinggi seluas 17.341 Ha adalah Kabupaten Klaten.

f) Kawasan Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan, Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan sering menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (Peraturan Menteri Kehutanan No P.12/Menhut/-II/2009 tentang Pengendalian Hutan). Kebakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada wilayah yang vegetasinya rawan untuk terbakar misalnya pada wilayah gambut. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain kekeringan yang berkepanjangan, sambaran petir, dan pembukaan lahan oleh manusia. Analisis bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkembang adalah analisis multi-kriteria yang menggabungkan beberapa parameter yang memiliki hubungan sebagai faktor penyebab terjadinya ancaman karhutla.

   Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak, sedangkan kelas bahaya di Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di ProvinsiJawa Tengahsecara keseluruhan adalah 963.331Hadan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 304.437 Ha, kelas sedang seluas 548.759 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas tinggi seluas 110.135 Ha.

g) Kawasan Potensi Bahaya Kekeringan, Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.1 Kondisi ini bermula saat berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang lama sehingga kebutuhan air dalam tanah tidak tercukupi dan membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Jenis kekeringan yang dikaji dalam dokumen ini adalah kekeringan meteorologis yang merupakan indikasi awal terjadinya bencana kekeringan, sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat kekeringan tersebut. Adapun metode analisis indeks kekeringan yang dilakukan adalah

Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) yang dikembangkan oleh Vicente-Serrano dkk pada tahun 2010. Penentuan kekeringan dengan SPEI membutuhkan data curah hujan dan suhu udara bulanan dengan periode waktu yang cukup panjang. Perhitungan evapotranspirasi menggunakan metode Thornthwaite, maka data suhu yang digunakan adalah hanya suhu bulanan rata-rata. Potensi bahaya kekeringan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kekeringan. Total luas bahaya kekeringan di Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak, sedangkan kelas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdampak bencana kekeringan. Dari hasil kajian dihasilkan total luas bahaya kekeringan di ProvinsiJawa Tengahsecara keseluruhan adalah 3.277.108 Ha dan berada pada kelas Tinggi.Luas bahaya kekeringan tersebut dirinci menjadi kelas sedang seluas2.336.056 Ha dan kelas tinggi seluas 941.051 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas sedang dengan luas 196.387 Ha adalah Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Kendal adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas tinggi seluas 107.775 Ha.

h) Kawasan Potensi Bahaya Tanah Longsor, Tanah longsor merupakan kejadian yang diakibatkan oleh lebih besarnya gaya pendorong yaitu sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah/batuan dibandingkan gaya penahan dari batuan dan kepadatan tanah (Dinas PU, 2012). Peta zona gerakan tanah dari PVMBG disesuaikan dengan kemiringan lereng untuk menghasilkan sebaran wilayah potensi longsor. Kondisi lereng yang curam berpotensi longsor lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi lereng yang landai. Potensi luas bahaya tanah longsor dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana tanah longsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak bahaya tanah longsor, sedangkan kelas bahaya tanah longsor Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana tanah longsor. Potensi luas bahaya tanah longsor di ProvinsiJawa Tengahsecara keseluruhan adalah1.020.772Hadan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya tanah longsor tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 78.622 Ha, kelas sedang seluas 207.456 Ha dan kelas tinggi seluas 734.693 Ha. Kabupaten yang memiliki luastertinggi bahaya tanah longsor pada kelas rendah adalah KabupatenSemarang dengan luas 5.959 Ha. Kabupatenyang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas sedang adalah Kabupaten Wonosobo dengan luas 24.364 Ha. Pada kelas tinggi, kabupatenyang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor adalah Kabupaten Wonogiri dengan luas 62.658 Ha.

i) Kawasan Potensi Bahaya Tsunami, Tsunami adalah fenomena alam yang terjadi akibat aktivasi tektonik di dasar laut yang mengakibatkan pemindahan volume air laut dan berdampak pada masuknya air laut ke daratan dengan kecepatan tinggi. Ukuran bahaya tsunami yang dikaji adalah pada seberapa besar potensi inundasi (genangan) di daratan berdasarkan potensi ketinggian gelombang maksimum yang tiba di garis pantai. Penentuan tingkat bahaya tsunami diperoleh dari hasil perhitungan matematis yang dikembangkan oleh Berryman (2006) berdasarkan perhitungan kehilangan ketinggian tsunami per 1 meter jarak inundasi (ketinggian genangan), nilai jarak terhadap lereng dan kekasaran permukaan. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tsunami pada kelas rendah seluas 3.447 Ha, pada kelas sedang seluas 2.827 Ha, dan pada kelas tinggi dengan luas 19.372 Ha.

j) Kawasan Potensi Bahaya Epidemi, Epidemi adalah suatu keadaanyang menunjukkan kejadian penyakit meningkat dalam waktu singkat dan penyebarannya telah mencakup wilayah yang luas. Wabah adalah kejadian suatu penyakit menular yang meningkat secara nyata melebihi keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Jadi secara harfiah dalam konteks potensi bencana, Epidemi dan Wabah Penyakit (EWP) merupakan potensi ancaman bencana non-alam yang diakibatkan oleh kejadian suatu penyakit menular pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat menimbulkan dampak (risiko) kematian dan gangguan aktivitas masyarakat. Metode yang digunakan dalam penyusunan peta bahaya EWP adalah metode skoring dan pembobotan terhadap parameter berbasis wilayah administrasi kecamatan. Parameter yang digunakan untuk penyusunan peta bahaya EWP adalah terjadinya kepadatan atau prevalensi dari bahaya EWP (berdasarkan data yang tersedia secara nasional), yaitu: Malaria, Demam Berdarah, Campak, Difteri, dan Hepatitis. sebaran luas bahaya epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Jawa Tengah untuk kabupaten/kota terdampak bencana epidemi dan wabah penyakit. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya epidemi dan wabah penyakit pada kelas rendah adalah Kabupaten Grobogan dengan luas 201.386 Ha.

k) Kawasan Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi, Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Bencana ini dapat menimbulkan pencemaran (udara, air dan tanah), korban jiwa, kerusakan bangunan, dan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global. Pengkajian untuk bahaya kegagalan teknologi dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolok ukur penghitungan adalah jenis industri dan kapasitas industri. Berdasarkan parameter-parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya kegagalan teknologi yang meliputi luas bahaya terdampak kegagalan teknologi. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kegagalan teknologi pada kelas rendah adalah Kabupaten Boyolali seluas 3.607 Ha dan Kabupaten Cilacap adalah

wilayah yang memiliki luas tertinggi bahaya kegagalan teknologi pada kelas sedang dengan luas 375 Ha.

l) Kawasan Potensi Bahaya Covid-19, Penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease2019 (Covid-19) merupakan pandemi global dan telah dinyatakan oleh WHO, sehingga merupakan suatu isyarat bahwa dalam menghadapi pandemi ini segala focus kebijakan dan rekomendasi pencegahan harus diprioritaskan. Apalagi wabah penyakit Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara berdasarkan bukti ilmiah (Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/413/2020). Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan penilaian risiko meliputi analisis bahaya, paparan/kerentanan dan kapasitas untuk melakukan karakteristik risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak. Hasil dari penilaian risiko ini diharapkan dapat digunakan untuk menentukan rekomendasi penanggulangan kasus Covid-19. Potensi luas bahaya Covid-19 adalah3.277.108Hadan berada pada kelas Tinggi. Luasbahaya Covid-19 tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 2.346.083 Ha, kelas sedang seluas 605.417 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya Covid-19 pada kelas tinggi seluas 325.608 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Covid-19 pada kelas rendah adalah Kabupaten Cilacap dengan luas190.358 Ha. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Covid-19 pada kelas sedang seluas 50.337 Ha dan pada kelas tinggi seluas 33.967 Ha adalah Kabupaten Wonogiri.

m) Kawasan Potensi Bahaya Likuefaksi, Likuefaksi atau pencairan tanah adalah hilangnya kekuatan dan kekakuan tanah jenuh air akibat adanya perubahan tegangan pada tanah. Akibat dari hilangnya kekuatan tanah ini dapat berupa longsor, perubahan tekstur tanah menjadi lumpur, atau penurunan atau pergerakan tanah secara tiba-tiba menyebabkan daya dukung pondasi menurun dan terjadi kerusakan bangunan/infrastruktur yang lebih besar. Potensi luas bahaya likuefaksi dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di ProvinsiJawa Tengahyang memiliki kondisi rentan terhadap bencana likuefaksiberdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak likuefaksi, sedangkan kelas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari wilayah kabupaten/kota terdampak. Total luas bahaya likuefaksi di Provinsi Jawa Tengahsecara keseluruhan adalah 729.062Hadan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya likuefaksi tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 49.145 Ha, kelas sedang seluas 641.289Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya likuefaksi pada kelas tinggi adalah seluas 38.627 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya likuefaksi pada kelas rendah dengan luas15.054 Ha dan pada kelas tinggi dengan luas16.881Haadalah Kabupaten Cilacap. Sedangkan pada kelas sedang, kabupaten yang

memiliki luas tertinggi bahaya likuefaksi adalah Kabupaten Brebes dengan luas 65.705 Ha.

n) Kawasan Potensi Bahaya Gunungapi, Gunungapi dibedakan menjadi bahaya primer (langsung) dan bahaya sekunder (tidak langsung). Bahaya primer merupakan bahaya yang diakibatkan secara langsung oleh produk erupsi gunungapi, yaitu: aliran lava, awan panas, jatuhan piroklastik (lontaran batu pijar dan hujan abu), gas beracun, dan lahar erupsi. Sedangkan, bahaya sekunder merupakan bahaya yang diakibatkan secara tidak langsung oleh produk erupsi gunungapi, yaitu: lahar dan longsoran gunungapi.

(1) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Dieng di ProvinsiJawa Tengah secara keseluruhan adalah3.816Ha dan berada pada kelas Tinggi.Luas bahayaLetusan Gunungapi Diengtersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas1.168 Ha, kelas sedang seluas 2.054 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunung api Dieng pada kelas tinggi seluas 594 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya letusan gunungapi pada kelas rendahseluas 1.059 Ha, kelas sedang seluas 1.304 Ha dan kelas tinggi seluas 568 Ha adalah Kabupaten Banjarnegara.

(2) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Lawu di ProvinsiJawa Tengah secara keseluruhan adalah10.116Hadan berada pada kelas Sedang. Luas bahaya Letusan Gunungapi Lawu tersebut dirinci menjadi2 (dua) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 5.546 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Lawu pada kelassedang seluas 4.570 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Lawupada kelas rendah seluas 4.652 Ha, dan kelas sedang seluas 4.570 Ha adalah Kabupaten Karanganyar.

(3) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa Tengahsecara keseluruhan adalah 28.239 Ha dan berada pada kelas Tinggi.Luas bahayaLetusan Gunungapi Merapi tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 12.441 Ha, kelas sedang seluas 8.182 Ha, dan kelas tinggi seluas 7.616 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahayaLetusan Gunungapi Merapi pada kelas rendah seluas 7.957 Haadalah Kabupaten Boyolali. Sedangkan Kabupaten Magelang adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Merapi pada kelas sedang dengan luas 3.930 Ha dan kelas tinggi seluas 5.275 Ha.

(4) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Merbabudi ProvinsiJawa Tengahsecara keseluruhan adalah19.819Hadan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Letusan Gunungapi Merbabu tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendahseluas11.474Ha, kelas sedang seluas5.820 Ha,dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Merbabu pada kelas tinggi seluas 2.526 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Merbabu pada kelas rendah seluas 4.790Ha,

kelas sedangseluas 3.163 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 1.358 Ha adalah Kabupaten Boyolali.

(5) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengahsecara keseluruhan adalah22.740 Ha dan berada pada kelas Tinggi.Luas bahayaLetusan Gunungapi Slamet tersebut dirinci menjadi 3(tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 14.631 Ha, kelas sedang seluas 6.288 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Slamet pada kelas tinggi seluas 1.820 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahayaLetusan Gunungapi Slamet pada kelas rendah seluas 3.905Hadan kelas sedang seluas 2.533Ha adalah Kabupaten Banyumas. Sedangkankabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Slamet pada kelas tinggi seluas 723 Ha adalah Kabupaten Pemalang.

(6) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Sumbingdi Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 25.650 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Letusan Gunungapi Sumbing tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas16.553 Ha, kelas sedang seluas7.876 Ha,dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Sumbing pada kelas tinggi seluas 1.221 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sumbing pada kelas rendah seluas6.681 Ha, pada kelas sedang seluas 4.443 Ha dan kelas tinggi seluas 563 Ha adalah Kabupaten Temanggung.

(7) Potensi luas bahayaLetusan Gunungapi Sundorodi Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 23.580 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Letusan Gunungapi Sundoro tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 13.468 Ha, kelas sedang seluas 8.372 Ha, dan kelas tinggi seluas 1.739 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sundoro pada kelas rendah dengan luas 8.236 Ha dan kelas tinggi seluas 981 Ha adalah Kabupaten Wonosobo. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sundoro pada kelassedang adalah Kabupaten Temanggung dengan luas 4.474 Ha.

(8) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Ungarandi ProvinsiJawa Tengahsecara keseluruhanseluas15.404Hadan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Letusan Gunungapi Ungaran tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 13.787 Ha, kelas sedang seluas 526 Ha dan kelas tinggi seluas 1.091 Ha. Kabupaten Semarang merupakan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Ungaran pada kelas rendah seluas 9.254 Ha, sedang seluas 312 Ha dan pada kelas tinggi seluas 617 Ha.

Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang terdiri dari 10 kawasan rawan bencana. Adapun data rumah korban

terdampak bencana di Jawa Tengah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.178.**

**Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kejadian | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjarnegara | 272 | 20 | 58 | 185 | 263 |
| 2 | Banyumas | 189 | 32 | 88 | 113 | 233 |
| 3 | Batang | 34 | 8 | 5 | 50 | 63 |
| 4 | Blora | 25 | 9 | 12 | 43 | 64 |
| 5 | Boyolali | 23 | 0 | 5 | 50 | 55 |
| 6 | Brebes | 79 | 56 | 25 | 286 | 367 |
| 7 | Cilacap | 215 | 40 | 44 | 444 | 528 |
| 8 | Demak | 23 | 8 | 34 | 322 | 364 |
| 9 | Grobogan | 82 | 47 | 24 | 133 | 204 |
| 10 | Jepara | 98 | 16 | 25 | 430 | 471 |
| 11 | Karanganyar | 30 | 13 | 21 | 102 | 136 |
| 12 | Kebumen | 75 | 7 | 7 | 197 | 211 |
| 13 | Kendal | 41 | 7 | 15 | 117 | 139 |
| 14 | Klaten | 45 | 2 | 11 | 36 | 49 |
| 15 | Kota Magelang | 17 | 1 | 1 | 21 | 23 |
| 16 | Kota Pekalongan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kota Salatiga | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 18 | Kota Semarang | 206 | 26 | 40 | 99 | 165 |
| 19 | Kota Surakarta | 18 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 20 | Kota Tegal | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Kudus | 90 | 4 | 9 | 117 | 130 |
| 22 | Magelang | 259 | 10 | 32 | 316 | 358 |
| 23 | Pati | 54 | 27 | 11 | 640 | 678 |
| 24 | Pekalongan | 19 | 3 | 2 | 10 | 15 |
| 25 | Pemalang | 40 | 31 | 43 | 115 | 189 |
| 26 | Purbalingga | 22 | 4 | 10 | 140 | 154 |
| 27 | Purworejo | 15 | 1 | 1 | 15 | 17 |
| 28 | Rembang | 32 | 18 | 37 | 99 | 154 |
| 29 | Semarang | 39 | 12 | 9 | 34 | 55 |
| 30 | Sragen | 37 | 10 | 1 | 50 | 61 |
| 31 | Sukoharjo | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 |

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kejadian | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Tegal | 45 | 162 | 181 | 236 | 579 |
| 33 | Temanggung | 134 | 9 | 72 | 126 | 207 |
| 34 | Wonogiri | 19 | 1 | 4 | 24 | 29 |
| 35 | Wonosobo | 115 | 22 | 34 | 60 | 116 |
| | **TOTAL** | 2.440 | 611 | 869 | 4.616 | 6.096 |

*Sumber: BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Kejadian bencana di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2018-2022 menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 1.753 kejadian di tahun 2021 menjadi 2.396 kejadian di tahun 2022. Selama periode tersebut, kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi yang meliputi tanah longsor, angin topan, banjir dan kebakaran. Dari total desa/kelurahan di Jawa Tengah teridentifikasi sejumlah 1.674 desa/kelurahan (19,5 persen) dari total 8.562 desa/kelurahan di Jawa Tengah merupakan daerah rawan banjir dan 2.136 desa/kelurahan (24,9 persen) rawan tanah longsor.

**Tabel 2.179.**
**Kejadian Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018– 2022**

| No | Jenis Bencana | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Angin topan | 407 | 706 | 629 | 439 | 671 |
| 2 | Banjir | 171 | 171 | 459 | 242 | 374 |
| 3 | Gas beracun | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Gempa bumi | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | Kebakaran | 589 | 718 | 356 | 229 | 312 |
| 6 | Kekeringan | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Letusan gn.Api | 5 | 2 | 12 | 5 | 1 |
| 8 | Tanah longsor | 5 | 18 | 387 | 0 | 1.010 |
| 9 | Tsunami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gelombang pasang | 4 | 6 | 3 | 6 | 24 |
| **Jumlah** | | **1.734** | **1.356** | **2.870** | **1.753** | **2.396** |

*Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, data TW II Tahun 2022*

Selama kurun waktu 2018-2022, kejadian bencana telah menimbulkan korban jiwa paling banyak diakibatkan oleh bencana tanah longsor, pada tahun 2022 saja terdapat 22 orang meninggal dunia, 27 luka berat dan 100 luka ringan.

**Tabel 2.180.**
**Jumlah Korban Akibat Bencana di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| Tahun | Jumlah Kejadian Bencana | Jumlah Korban (Orang) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Meninggal Dunia | Hilang | Luka Berat | Luka Ringan |
| 2018 | 1.734 | 39 | 4 | 17 | 124 |
| 2019 | 2.356 | 39 | 4 | 24 | 175 |
| 2020 | 2.909 | 32 | 3 | 15 | 91 |

| Tahun | Jumlah Kejadian Bencana | Jumlah Korban (Orang) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Meninggal Dunia | Hilang | Luka Berat | Luka Ringan |
| 2021 | 1.753 | 34 | 5 | 14 | 73 |
| 2022 | 2.440 | 22 | 2 | 27 | 100 |
| **Jumlah** | | **166** | **18** | **97** | **563** |

*Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah,*

Taksiran kerugian pada tahun 2018 hingga 2022 jumlah tingkat kerugian fluktuatif dan taksiran kerugian tertinggi terjadi akibat bencana Tanah longsor dengan kerugian Rp 7.052.281.000,- dan kerugian keseluruhan termasuk kebakaran pemukiman ditaksir sebesar Rp 234.248.846.000,-.

**Tabel 2.181.**
**Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah**
**Tahun 2018 – 2022**

| No | Jenis Bencana | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jml | Kerugian (Rp. 000) | Jml | Kerugian (Rp. 000) | Jml | Kerugian (Rp. 000) | Jml | Kerugian (Rp. 000) | Jml | Kerugian (Rp. 000) |
| 1 | Angin Topan | 407 | 5.445.666 | 706 | 15.367.598 | NA | 5.469.095 | 437 | 4.288.779 | 671 | 6.267.966 |
| 2 | Banjir | 171 | 2.924.463 | 171 | 2.777.845 | | 32.798.305 | 242 | 44.106.000 | 374 | 2.367.000 |
| 3 | Tanah Longsor | 555 | 5.111.856 | 718 | 9.354.277 | | 16.806.207 | 740 | 7.098.159 | 1.010 | 7.052.281 |
| 4 | Kekeringan | - | - | 30 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kebakaran | 589 | 33.866.505 | 718 | 55.387.150 | | 18.779.138 | 229 | 52.965.785 | 312 | 217.955.599 |
| 6 | Gempa Bumi | 3 | 65.000 | 5 | 65.000 | | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Letusan Gunung Api | 5 | - | 2 | 0 | | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ombak Besar | 4 | 57.000 | 6 | 0 | | 0 | 6 | 45.000 | 24 | 25.000 |
| 9 | Lainnya | - | - | - | - | | 0 | 46 | 131.687,50 | 44 | 581.000 |
| | **Jumlah** | **1.734** | **47.470.620** | **2.356** | **82.951.870** | **2.870** | **73.582.747** | **1.753** | **108.823.410,5** | **2.440** | **234.248.846** |

*Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, data per tanggal 24 Desember 2022*

*Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, data per tanggal 24 Desember 2022 dan BNPB, IRBI 2022*

**Gambar 2.95.**
**Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah**

Provinsi Jawa Tengah mendasarkan indeks rawan dan risiko bencana yang diterbitkan BNPB termasuk provinsi dengan indeks bencana sedang. Indeks risiko bencana 2022 Provinsi Jawa Tengah pada urutan 10 dengan nilai skor 115,38 dengan kategori sedang.

**Tabel 2.182.**

**Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Tengah**

| No. | Tahun | Skor | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 146,43 | Tinggi |
| 2 | 2019 | 144,91 | Tinggi |
| 3 | 2020 | 132,99 | Sedang |
| 4 | 2021 | 125,73 | Sedang |
| 5 | 2022 | 115,38 | Sedang |

*Sumber: BNPB, IRBI 2022*

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Kabupaten Brebes mendapat urutan tertinggi untuk indeks risiko bencana dengan urutan 1 Provinsi Jawa Tengah dengan nilai skor 171,01 dan urutan 68 Nasional.

**Tabel 2.183.**

**Indeks Risiko Bencana Berdasarkan Kabupaten/Kota**

| NO | KABUPATEN/KOTA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | KELAS RISIKO 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREBES | 211.20 | 211.20 | 211.20 | 211.20 | 211.20 | 189.94 | 189.94 | 171.01 | TINGGI |
| 2 | PEKALONGAN | 183.20 | 183.20 | 183.20 | 183.20 | 183.20 | 172.56 | 160.19 | 168.52 | TINGGI |
| 3 | PATI | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 171.10 | 171.10 | 165.53 | TINGGI |
| 4 | BATANG | 168.40 | 168.40 | 168.40 | 168.40 | 168.40 | 168.40 | 161.93 | 154.49 | TINGGI |
| 5 | PURWOREJO | 215.20 | 215.20 | 215.20 | 215.20 | 215.20 | 190.01 | 163.63 | 144.57 | TINGGI |
| 6 | TEGAL | 212.80 | 212.80 | 212.80 | 212.80 | 212.80 | 181.08 | 158.93 | 141.32 | SEDANG |
| 7 | BANYUMAS | 207.20 | 207.20 | 207.20 | 207.20 | 207.20 | 193.71 | 164.25 | 140.18 | SEDANG |
| 8 | PURBALINGGA | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 148.12 | 139.78 | SEDANG |
| 9 | KOTA PEKALONGAN | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 138.13 | 138.13 | 138.13 | SEDANG |
| 10 | BOYOLALI | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 130.32 | 130.32 | 130.32 | SEDANG |
| 11 | PEMALANG | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 185.70 | 185.70 | 165.97 | 146.38 | 128.55 | SEDANG |
| 12 | SRAGEN | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 133.75 | 126.18 | SEDANG |
| 13 | JEPARA | 163.20 | 163.20 | 163.20 | 163.20 | 163.20 | 148.77 | 135.11 | 122.27 | SEDANG |
| 14 | REMBANG | 171.60 | 171.60 | 171.60 | 171.60 | 171.60 | 151.12 | 131.73 | 117.89 | SEDANG |
| 15 | BLORA | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 135.33 | 123.19 | 113.90 | SEDANG |
| 16 | GROBOGAN | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 154.66 | 131.66 | 111.59 | SEDANG |
| 17 | TEMANGGUNG | 143.20 | 143.20 | 143.20 | 143.20 | 143.20 | 134.51 | 121.33 | 110.38 | SEDANG |
| 18 | WONOGIRI | 145.60 | 145.60 | 145.60 | 145.60 | 145.60 | 124.77 | 124.77 | 108.91 | SEDANG |
| 19 | KOTA MAGELANG | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | SEDANG |
| 20 | BANJARNEGARA | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 127.36 | 127.36 | 107.61 | SEDANG |
| 21 | KOTA TEGAL | 116.80 | 116.80 | 116.80 | 116.80 | 116.80 | 116.80 | 116.80 | 105.36 | SEDANG |
| 22 | DEMAK | 183.60 | 138.20 | 127.42 | 118.21 | 118.21 | 105.77 | 105.21 | 103.88 | SEDANG |
| 23 | CILACAP | 215.20 | 172.90 | 157.92 | 138.61 | 124.20 | 112.75 | 112.75 | 103.72 | SEDANG |
| 24 | KOTA SEMARANG | 183.60 | 124.72 | 124.72 | 120.75 | 113.83 | 115.52 | 108.63 | 103.49 | SEDANG |
| 25 | KUDUS | 131.60 | 131.60 | 131.60 | 131.60 | 131.60 | 130.59 | 119.71 | 102.40 | SEDANG |
| 26 | KEBUMEN | 203.20 | 165.76 | 151.08 | 140.31 | 131.45 | 114.67 | 114.67 | 102.05 | SEDANG |
| 27 | SEMARANG | 143.20 | 143.20 | 143.20 | 143.20 | 143.20 | 118.89 | 118.89 | 101.79 | SEDANG |
| 28 | KENDAL | 167.20 | 156.80 | 142.49 | 124.57 | 111.20 | 98.97 | 100.40 | 97.90 | SEDANG |
| 29 | KARANGANYAR | 130.40 | 130.40 | 130.40 | 130.40 | 130.40 | 108.03 | 108.03 | 91.51 | SEDANG |
| 30 | KOTA SALATIGA | 91.20 | 91.20 | 91.20 | 91.20 | 91.20 | 91.20 | 91.20 | 90.89 | SEDANG |
| 31 | WONOSOBO | 135.20 | 135.20 | 135.20 | 122.94 | 122.94 | 122.94 | 102.83 | 87.55 | SEDANG |
| 32 | KLATEN | 123.20 | 123.20 | 123.20 | 123.20 | 123.20 | 99.24 | 99.24 | 82.18 | SEDANG |
| 33 | SUKOHARJO | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 81.29 | SEDANG |
| 34 | MAGELANG | 143.20 | 96.86 | 90.82 | 90.82 | 81.07 | 71.16 | 71.16 | 77.90 | SEDANG |
| 35 | KOTA SURAKARTA | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 67.96 | 67.96 | 57.17 | SEDANG |

*Sumber: BNPB, IRBI 2022*

Untuk menurunkan nilai indeks risiko bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya mitigasi struktural maupun non-struktural. Upaya mitigasi struktural dilakukan antara lain melalui pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) berbasis masyarakat dan penempatan rambu-rambu jalur evakuasi di lokasi rawan bencana. Sampai dengan tahun 2022, telah terpasang sebanyak 89 unit peralatan EWS dan 377 unit rambu jalur evakuasi.

**Tabel 2.184.**
**Pemasangan EWS Dan Rambu Jalur Evakuasi Tahun 2018 – 2022**

| Tahun | EWS | | | Rambu Jalur Evakuasi |
|---|---|---|---|---|
| | BPBD | ESDM | Total EWS Terpasang (Akumulatif) | |
| 2018 | 9 | - | 60 | 150 |
| 2019 | 15 | - | 75 | 230 |
| 2020 | 1 | - | 76 | - |
| 2021 | 10 | - | 86 | 347 |
| 2022 | 3 | - | 89 | 377 |

*Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Implementasi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) yang dilakukan oleh Jawa Tengah antara lain melalui pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana. Desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Dengan adanya Desa/kelurahan tangguh bencana, warga desa akan mampu mengenali karakter wilayah, potensi kebencanaan, dan cara penanganannya. Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 132 desa, dari total seluruh desa/kelurahan sebanyak 8.562 desa/kelurahan di Jawa Tengah.

**Tabel 2.185.**
**Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2016 – 2022**

| Tahun | Desa Tangguh Bencana yang dibentuk per Tahun | Jumlah Desa Tangguh Bencana yang Terbentuk |
|---|---|---|
| 2018 | 8 | 74 desa |
| 2019 | 18 | 92 desa |
| 2020 | 3 | 95 desa |
| 2021 | 30 | 125 Desa |
| 2022 | 7 | 132 Desa |

*Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang menjadi korban bencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hadir dan berperan serta dalam pemulihan pasca bencana melalui pemberian bantuan akibat bencana di Provinsi Jawa Tengah yang diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2014. Dari 2018 hingga 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangannya membantu korban bencana meliputi rumah atau tempat

usaha, rumah ibadah dan sarana prasarana yang musnah/terbakar habis atau roboh yang datanya dapat kita lihat melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 2.186.**

**Data Bantuan Tidak Terduga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022**

| No | Tahun | Jumlah Kejadian | Roboh | Rusak Berat | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 9 | 277 | 34 | 4.495.000.000 |
| 2 | 2020 | 7 | 60 | 18 | 1.080.000.000 |
| 3 | 2021 | 7 | 206 | 122 | 4.310.000.000 |
| 4 | 2022 | 4 | 9 | 120 | 1.335.000.000 |
| | **Total** | **27** | **552** | **294** | **11.220.000.000** |

*Sumber: BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2022*

## 2.6. Tata Kelola Pemerintahan

Kinerja tata kelola pemerintahan diukur dengan salah satunya adalah indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Implementasi tata kelola pemerintahan daerah diwujudkan dengan pelayanan publik yang baik didukung dengan manajemen organisasi dan sumberdaya aparatur, serta dukungan fungsi-fungsi pendukung pemerintahan. Gambaran kondisi tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut.

### 2.6.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menunjukkan kinerja yang sangat baik. Capaian pada tahun 2022 mencapai angka 80,31, meningkat 1,34 dari tahun 2021 yang sebesar 78,97. Jika dilihat secara 5 tahun, kinerja Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah juga terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan baik sesuai dengan *roadmap* nasional.

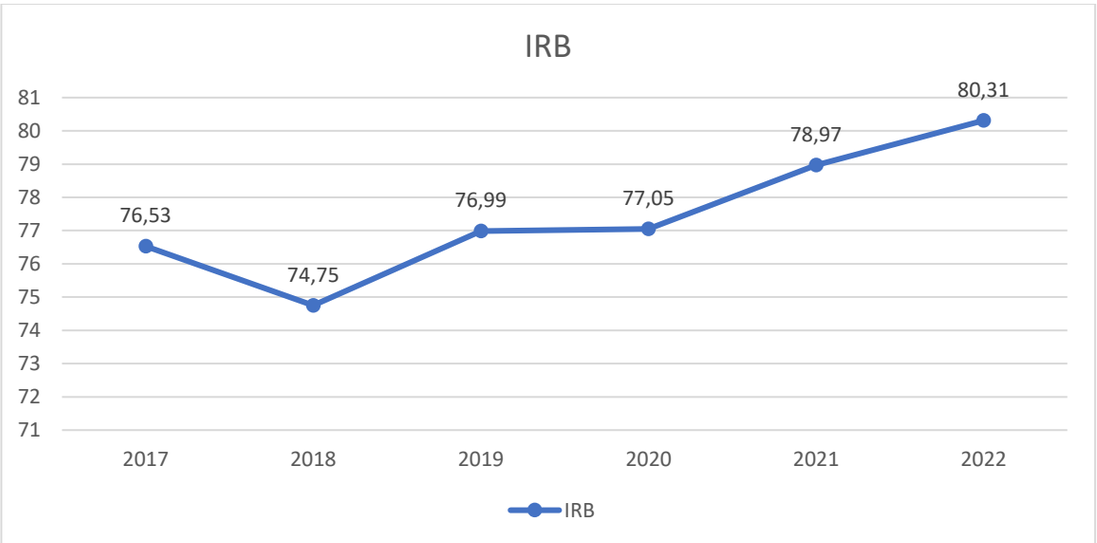


*Sumber: Kemenpan RB, 2023*

**Gambar 2.96.**

**Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah**

Salah satu komponen yang mendukung capaian reformasi birokrasi adalah hasil antara. Terdapat beberapa hasil antara yang memerlukan perhatian karena tidak mengalami peningkatan pada tahun 2022, yaitu kualitas kebijakan dan kualitas pengelolaan pengadaan barang jasa. Hal tersebut mengindikasikan adanya pekerjaan rumah dalam tata kelola sektor tersebut, baik dalam hal kinerja atau tertib administrasinya.

**Tabel 2.187.**
**Catatan Hasil Evaluasi dari Kemenpan RB Tahun 2021 - 2022**

| No | Hasil Antara | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kualitas Kebijakan | 37,97 | 35,65 |
| 2 | ASN Profesional | 51,85 | 54,56 |
| 3 | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 2,74 | 3,34 |
| 4 | Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 78,88 | 65,70 |
| 5 | Kualitas Pelayanan Publik | 4,48 | 4,54 |
| 6 | Kapabilitas APIP | 3 | 3 |
| 7 | Maturitas SPIP | 2 | 3 |
| 8 | Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik | 73,49 | 93,14 |
| 9 | Kualitas Pengelolaan Arsip | 91,31 | 93,45 |
| 10 | Reformasi Hukum | - | 76,25 |

*Sumber: Kemenpan RB, 2023*

Adapun menurut catatan hasil evaluasi dari Kemenpan RB, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Provinsi Jawa Tengah yaitu :

a. Memperkuat kualitas pelaksaanan reformasi birokrasi dengan mengawal capaian makro dan menciptakan reformasi birokrasi yang berdampak
b. Mengoptimalikan digitalisasi reformasi birokrasi dan budaya berAkhlak
c. Menetapkan arah pembangunan reformasi birokrasi ke depa nsesuai dengan isu prioritas yang akan diselesaikan
d. Memperkuat komponen hasil antara yang kurang baik
e. Memperkuat performance based budgeting melalui formalisasi dan pengacuan kebijakan TPP
f. Optimalisasi peran Pemerintah Provinsi sebagai pendamping Pemerintah Kabupaten/Kota terkait implemetnasi reformasi birokrasi berdampak.

Peran atau komitmen pimpinan dalam pengembangan layanan e Government memang dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam penggunaan e-Government/SPBE sebagai pendukung utama pembangunan. Media sosial, audio-visual dan aplikasi digunakan untuk menyapa masyarakat, membangun kesamaan persepsi pembangunan dengan perangkat daerah dan mengkomunikasikan pembangunan dengan masyarakat, memahami permasalahan pembangunan langsung dari masyarakat dan sekaligus eksekusinya, serta pemecahan aduan masalah pembangunan. Diskominfo, menjadi perangkat daerah yang dipercaya Kepala Daerah dalam mewujudkan

pemenuhan persyaratan-persyaratan indikasi SPBE yang baik untuk menunjang kinerjanya. Selama periode 2018-2023, anggaran Diskominfo terkait substansi tugas dan fungsi telah ditingkatkan secara signifikan.

### 2.6.2 Indeks Kepuasan Masyarakat

Amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, berkualitas, terjangkau, dan teratur sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam kurun waktu 2017-2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan standar manajemen mutu melalui fasilitasi dan pendampingan sertifikasi ISO, serta pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Pada tahun 2017 hingga tahun 2021 jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM terus meningkat, dari tahun 2020 ke 2021 terjadi penurunan jumlah UPP yang dilakukan pengukuran disebabkan adanya berbagai permasalahan dalam melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terutama di Satuan Pendidikan (SMA/SMK). Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya sarana dan prasarana yang belum memadai, pergantian petugas pelaksana, pelaksanaan SKM yang lebih dari 1 tim dalam 1 OPD dan tidak saling bersinergi, serta petugas pelaksana tidak melaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

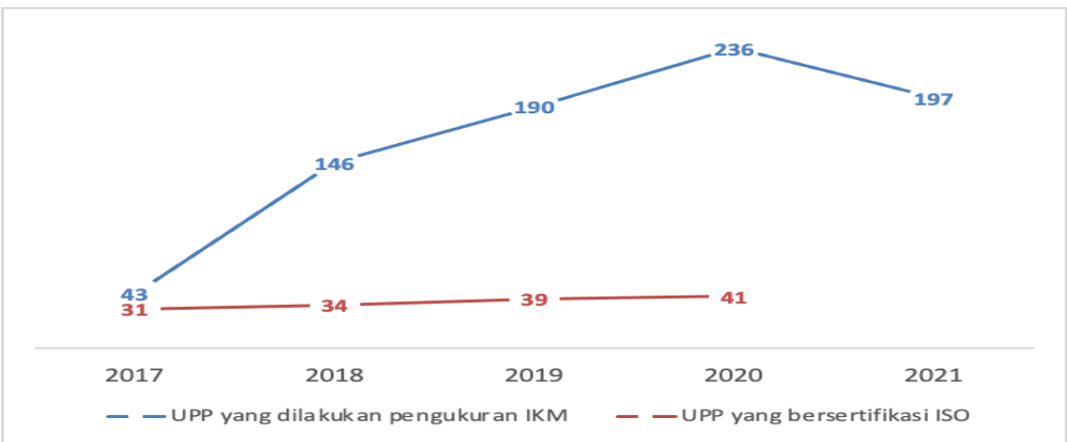


*Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 2.97.**
**Jumlah UPP Bersertifikasi ISO dan UPP Yang Melakukan Pengukuran IKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 (Unit)**

Hasil dari pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks ini merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selama kurun waktu tahun 2017 – 2021 IKM terus mengalami peningkatan, dimana tahun 2021 IKM Jawa Tengah sebesar 84,58, meningkat 0,64 poin dari tahun 2020 yang sebesar 83,94. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkat dan semakin diterima oleh masyarakat.

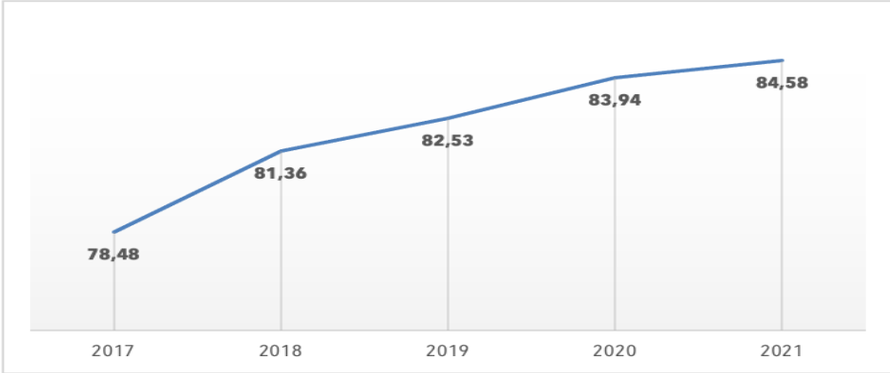


*Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 2.98.**
**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2017-2021**

### 2.6.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peran atau komitmen pimpinan dalam pengembangan layanan e Government memang dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam penggunaan *e-Government*/SPBE sebagai pendukung utama pembangunan.

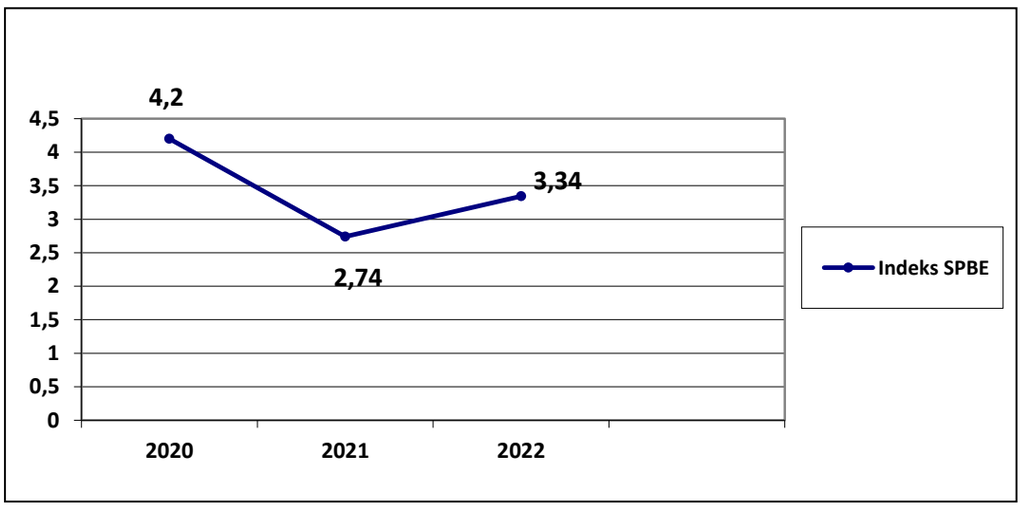


*Sumber : Kemenpan RB, 2022*

**Gambar 2.99.**
**Indeks SPBE Provinsi**

Hasil evaluasi Kemenpan RB tahun 2022 pada grafik di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih angka indeks SPBE sebesar 3,34 dengan predikat "Baik". Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 2,74, mengalami peningkatan capaian kinerja yang cukup signifikan, yaitu sebesar 0,6 poin. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SPBE dari Kemenpan RB pada 4 domain penilaian yaitu Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE (Domain Manajemen SPBE merupakan domain baru yang ditetapkan dalam Permen PAN RB no. 59 Tahun 2020 dimana penilaian menggunakan regulasi yang baru mulai diterapkan pada tahun 2021.), dan Layanan SPBE.

Peran atau komitmen pimpinan dalam pengembangan layanan e Government memang dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam penggunaan e-Government/SPBE sebagai pendukung utama pembangunan.

Media sosial, audio-visual dan aplikasi digunakan untuk menyapa masyarakat, membangun kesamaan persepsi pembangunan dengan perangkat daerah dan mengkomunikasikan pembangunan dengan masyarakat, memahami permasalahan pembangunan langsung dari masyarakat dan sekaligus eksekusinya, serta pemecahan aduan masalah pembangunan. Diskominfo, menjadi perangkat daerah yang dipercaya Kepala Daerah dalam mewujudkan pemenuhan persyaratan-persyaratan indikasi SPBE yang baik untuk menunjang kinerjanya. Selama periode 2018-2023, anggaran Diskominfo terkait substansi tugas dan fungsi telah ditingkatkan secara signifikan.

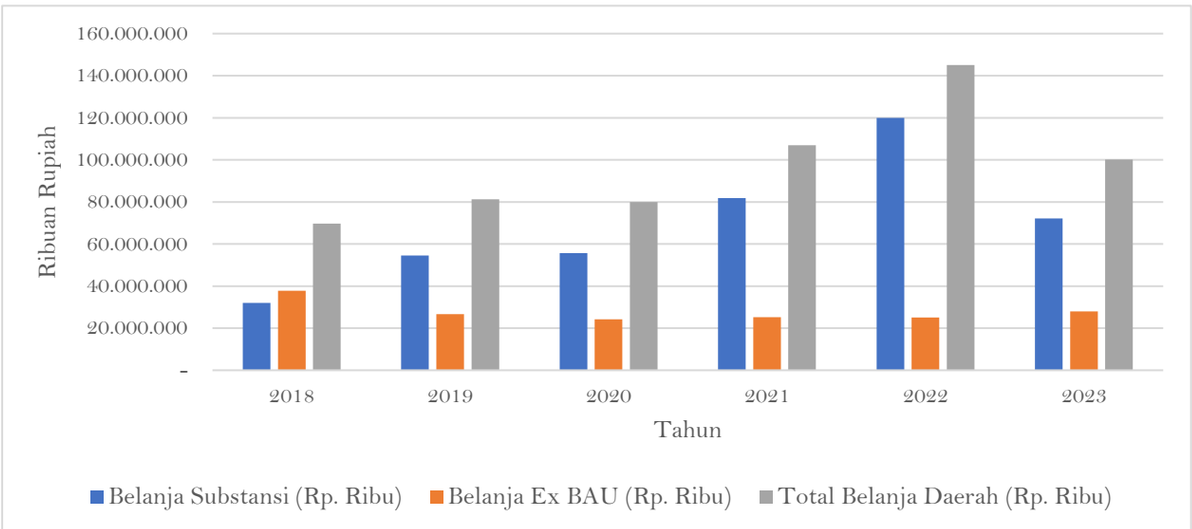


*Sumber: Diskominfo*

**Gambar 2.100.**
**Perkembangan Anggaran Diskominfo Tahun 2018-2023**

Gambar 2.98 di atas menunjukkan bahwa anggaran substansi selalu meningkat signifikan sepanjang Tahun, bahkan pernah sampai 4 kali lipat pada Tahun 2022 dari Tahun Anggaran 2018. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan infrastruktur TIK seperti pembangunan jaringan Fiber Optic, pengadaan server dan storage; pengadaan sarana dan prasarana studio visual - ruang Multi Media Center (MMC), pembangunan pusat data, sewa internet dan sewa aplikasi analisis media serta, sarpras layanan keamanan informasi. Anggaran juga digunakan untuk bisaya operasional komunikasi dan koordinasi pemecahan masalah-masalah pembangunan (video conference, iklan layanan dan, layanan aduan) dan penyediaan portal data.

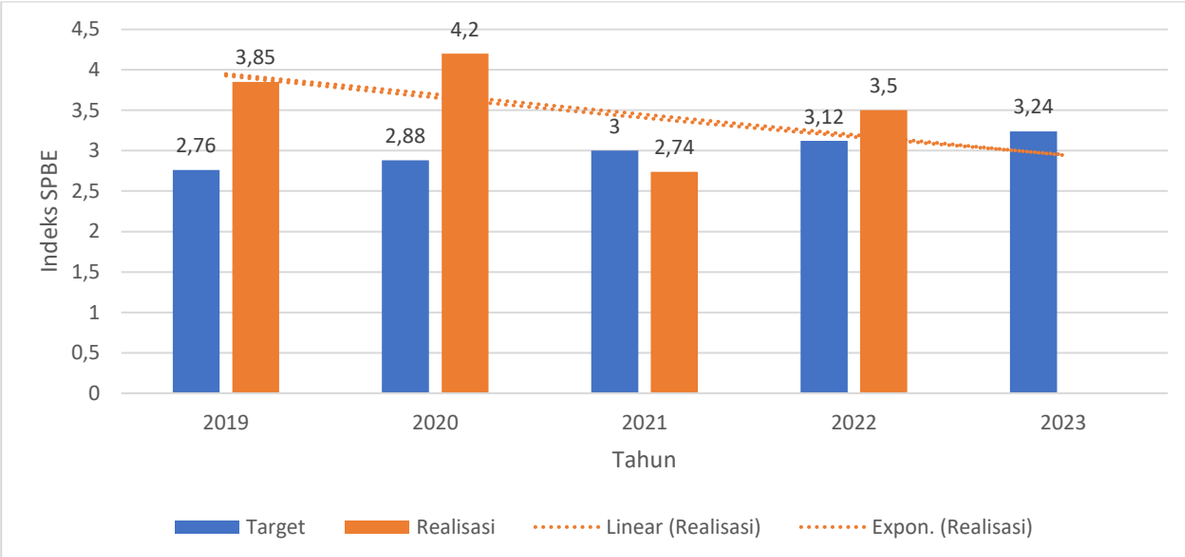


*Sumber: Diskominfo*

**Gambar 2.101.**
**Target dan Realisasi Indeks SPBE Tahun 2019-2023**

Upaya pemenuhan persyaratan implementasi e Government / SPBE yang baik ternyata berpengaruh pada capaian Indeks SPBE-nya. Gambar 2.98 diatas menunjukkan bahwa, sepanjang 2019-2020 target akhir SPBE sudah terlampaui sejak awal penetapan target RPJMD Tahun 2018-2023. Meskipun pada Tahun 2021 sempat mengalami penurunan drastis karena perubahan metode perhitungan dari PermenPan RB No. 5 Tahun 2018 ke PermenPan RB No. 59 Tahun 2020, pada Tahun 2022 dengan perbaikan persyaratan sebagaimana PermenPan RB yang baru dapat naik lagi dan diperkirakan target akhir Indeks SPBE Tahun 2023 tetap terlampaui.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan SPBE telah dilakukan berbagai kegiatan urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian.

**1. Komunikasi dan Informatika**

Pada Urusan Komunikasi dan Informatika telah dilakukan melalui 3 (tiga) layanan yaitu Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra dan Layanan Data Terbuka. Ketiga layanan dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Layanan Pusat Data (*Data Center*)**

Pada akhir Tahun 2022, dalam upaya meningkatkan layanan SPBE telah diselesaikan pembangunan data center. Pembangunan data center telah memperbaiki kondisi data center seperti lokasi data center dapat dipindah ke lokasi yang aman (seperti rawan banjir, pernah mengalami konsleting listrik dan terganggu/terdapat kegiatan lain dalam satu gedung). Kapasitas juga telah ditingkatkan.

.

*Sumber: Diskominfo, 2022*

**Gambar 2.102.**
**Gambar Rencana Bangunan Data Center Provinsi Jawa Tengah**

Meskipun demikian kondisi pusat data saat ini masih perlu ditingkatkan, karena berada dalam tingkatan standard 1 / rated 1, dimana fasilitas pusat data masih belum memiliki *redundancy* seperti belum memiliki *redundancy* jalur power atau kelistrikan, *redundancy genset, redundancy* panel listrik, *redundancy* UPS dan belum memiliki tangki penyimpanan BBM harian, mingguan maupun bulanan

**b. Layanan Jaringan Intra**

Layanan jaringan intra merupakan bagian dari layanan data center sebagaimana diterangkan diatas. Jaringan intra pemerintah merupakan jaringan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam instansi pemerintah daerah (Gambar 2.). Pengembangan jaringan intra dilakukan seperti dengan pemasangan jaringan *Fiber Optic* untuk menghubungkan antar perangkat daerah dengan data center, pemenuhan kapasitas *bandwidth* internet yang lebih cepat dan aman pada semua OPD.

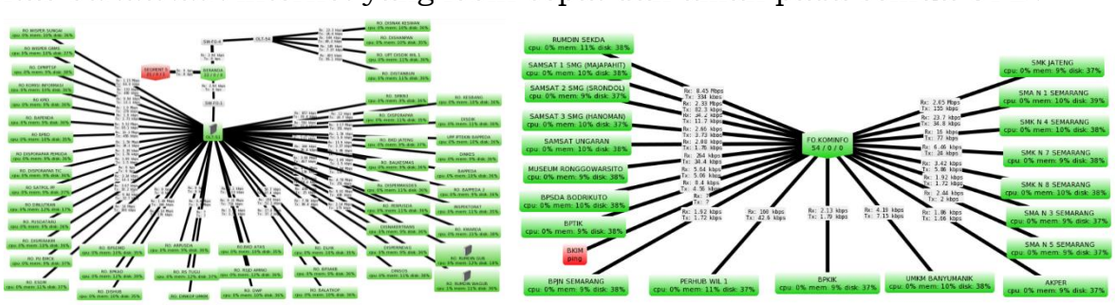


*Sumber: Diskominfo*

**Gambar 2.103.**
**Topologi Jaringan Perangkat Daerah**

Selanjutnya setelah infrastruktur jaringan intra pemerintah terimplementasi dapat digunakan untuk sarana atau media pengembangan teknologi informasi seperti aplikasi berbagi pakai, integrasi aplikasi layanan pemerintah, media *video conference*, media *blow up* berita melalui televisi digital (IPTV), media komunikasi jarak jauh dengan internet (VOIP).

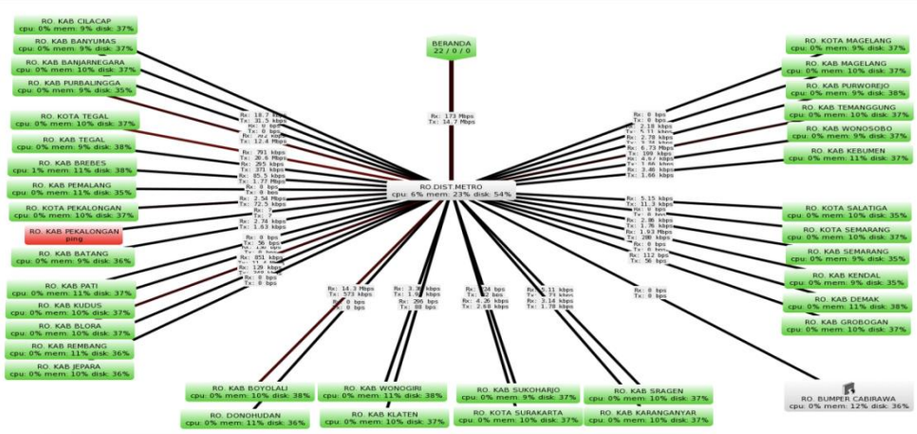


*Sumber: Diskominfo*

**Gambar 2.104.**
**Topologi Jaringan Metro Kab/Kota**

Sampai dengan saat ini, Diskominfo telah menghubungkan jaringan Fiber Optic mandiri antar OPD se Provinsi Jawa Tengah, memiliki jaringan Metro yang menghubungkan 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan tentunya jaringan tersebut terintegrasi dengan data center, yang juga memiliki DRC (*Disaster Recovery Center*) dengan kapasitas bandwidth sebesar 11.800 Mbps.

*Sumber: Diskominfo*

**Gambar 2.105.**
**Kegiatan Live Streaming dan Video Conference**

Diskominfo juga telah menyediakan 33 rak server, 7 server storage termasuk 62 collocation server berupa sewa aplikasi media masa, media sosial dan layanan keamanan informasi berupa Assesment Aplikasi, layanan Email Sanapati, Video Live Streaming dan Video Conference; dan pengembangan 15 unit aplikasi terintegrasi berbagi pakai (Gambar 4). Diskominfo juga sampai dengan saat ini telah memberikan rekomendasi bagi 7 Sistem aplikasi perangkat daerah.

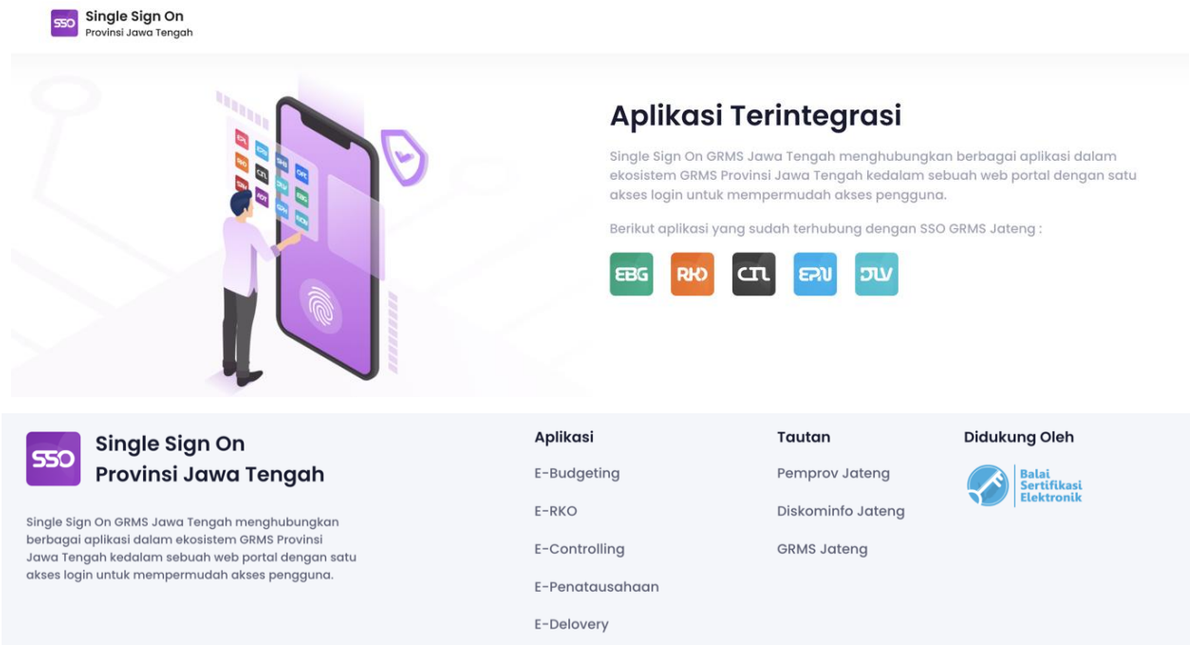


*Sumber: Diskominfo*

**Gambar 2.106.**
**Aplikasi Terintegrasi**

Upaya pemenuhan fasilitas sarpras jaringan intra tersebut sesuai dengan Pergub no. 15 Tahun 2013. Pergub mengharapkan agar Diskominfo mampu memfasilitasi keterpaduan jaringan komputer intranet. Fasilitasi penyusunan aplikasi juga sesuai atas perubahan pergub diatas dengan Pergub No. 45 Tahun 2013 yang memberikan kewenangan Diskominfo untuk melakukan audit terkait usulan sistem informasi / aplikasi / website yang diajukan oleh perangkat daerah. Upaya pengembangan layanan jaringan intra diduga telah berpengaruh pada tingkat kematangan layanannya. Tingkat kematangan level sudah masuk tahap terakhir, yaitu dengan nilai 5. Artinya, pada kematangan kapabilitas layanannya masuk dalam level optimalisasi. Optimalisasi berarti bahwa layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Adapun pada kapabilitas prosesnya masuk pada tahap optimum. Optimum berarti pengaturannya telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.

Meskipun demikian, masih dijumpai adanya sejumlah permasalahan dalam layanan jaringan intra pemerintah. Permasalahan yang sangat besar dampaknya terhadap pelayanan yaitu Fiber Cut atau putusnya jalur fiber optic. Putusnya jalur fiber optic bisa disebabkan karena pekerjaan bangunan/galian oleh pihak exsternal di titik yang dilewati jalur kabel fiber. Permasalahan juga muncul dari jaringan local masing masing perangkat daerah, karena peralatan jaringan seperti router, switch, kabel utp, accespoint belum memenuhi standar yang sesuai, sehingga distribusi bandwidth internet tidak terdistribusi dengan maksimal. Belum lagi realitas perangkat daerah masih melakukan belanja internet / sewa internet mandiri karena alasan untuk mempunyai backup internet. Sebenarnya bukan hanya sewa internet yang diambil alih pengelolaannya oleh Diskominfo, pengadaan server juga seharusnya dikoordinasikan dengan Diskominfo. Pengkoordinasikan tersebut penting mengingat, agar server dapat didata,

terstandarisasi, menjadi satu wadah dan, disinergiskan terlebih, saat ini Diskominfo sudah selesai membangun Data Center dan diresmikan pada awal tahun 2023 dimana data center sudah dirancang dan memiliki kapasitas yang besar dalam mengelola file data dan aplikasi Perangkat Daerah. Server dan storage sebaiknya menyatu dalam data center. Dalam upaya men-standar-kan, mensinergiskan dan efisensi anggaran diskominfo perlu mengidentifikasikan kebutuhan/distribusi jaringan FO dan bandwidth bagi masing-masing Perangkat Daerah.

Hasil pemantauan dinamika aplikasi Perangkat Daerah juga menunjukkan bahwa, aplikasi di Provinsi Jawa Tengah semakin meningkat diberbagai Perangkat Daerah seperti tingkat keaktifannya, perkembangannya, dan ragam layanannya. Meskipun demikian, dari total 881 aplikasi yang terdaftar yang ada di Perangkat Daerah, 113 aplikasi (13,93 %) posisinya tidak aktif. Kondisi ini menggambarkan bahwa aplikasi online sudah biasa digunakan Perangkat Daerah tetapi belum semuanya dapat diakses oleh publik. Adapun perkembangannya dari 881 aplikasi sebanyak 380 aplikasi (46,86%) berstatus transaksional, 319 aplikasi (39,33 %) masih bersifat informatif dan sisanya sudah tidak aktif. Secara umum aplikasi yang ada digunakan untuk memperlancar tugas kedinasan. Gambaran diatas menunjukkan bahwa belum semua aplikasi berjalan aktif, belum bersifat transaksional serta belum sinergis dan terintegrasi satu dengan lainnya. Kebanyakan baru untuk layanan kedinasan saja, masih dibutuhkan perbaikan-perbaikan.

**c. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik**

Layanan pengaduan pelayanan publik menggunakan media online seperti website, whatsapp, android, instagram, SMS, facebook, twitter, layanan hotline, aduan langsung, youtube dan aplikasi Laporgub sendiri. Total pengaduan pada Tahun 2022 adalah 22.980 aduan. Pengaduan umumnya menyangkut permohonan perbaikan jalan, permohonan Bansos Covid, permohonan informasi vaksinasi Covid, aduan bantuan tidak tepat sasaran dan, permohonan penanggulangan banjir. Adapun aduan masyarakat yang sudah selesai ditindaklanjuti sebesar 65,20% (14.983 aduan), yang berada dalam tahap verifikasi sebesar 21,44% (4.927 aduan), yang masih dalam tahap progress sebesar 8,25% (1.895 aduan) dan yang bukan wewenang sebesar 2,68% (615 aduan).

Masyarakat dapat melihat aduan pada laman LaporGub! dan dapat juga mengunggah bukti aduannya ke dalam sistem seperti yang dapat dilihat pada bukti dukung LaporGub! Setiap aduan yang masuk ke dalam LaporGub!, otomatis akan disampaikan kepada instansi terkait. Setiap progres aduan akan terlihat oleh admin LaporGub!, apakah aduan tersebut sudah diverifikasi, proses maupun selesai seperti yang disertakan pada data dukung Indikator Progres Aduan LaporGub! dan Indikator. Progres Aduan LaporGub!. Admin juga dapat mendownload aduan untuk bahan laporan kepada atasan dengan bukti dukung: - Indikator Download Laporan LaporGub! - Indikator Tampilan Review Laporan – Indikator REKAP LaporGub!. Kemudian sistem LaporGub! sudah melakukan Konsolidasi data dengan SP4N LAPOR! Kemenpan-RB, Sehingga aduan LaporGub! dapat juga dilihat di aplikasi SP4N LAPOR! milik Kemenpan-RB dengan proses. Aduan memang tidak semua dijawab, terdapat 42 aduan dikembalikan dan 615 aduan di luar wewenang Pemerintah Daerah. Dari laporan implementasi

LaporGub!, baru terinformasikan secara global bahwa aduan sudah terjawab tetapi tingkat solutifnya belum terinformasikan dalam rekapitulasi aduan LaporGub!.

Meskipun demikian tidak semua layanan mendapatkan jawaban yang solutif atau tidak dapat dijawab. Kondisi ini disebabkan karena level kematangan layanannya belum maksimal. Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik baru mencapai level 3. Artinya, layanan pengaduan publik melalui LaporGub! Secara kapabilitas layanan SPBE masuk dalam kriteria Transaksi, yaitu dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan. Secara kapabilitas proses masuk dalam kriteria terstandarisasi, yaitu pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi pemerintah. Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya terstandarisasi. Pada level 3 ini dalam SPBE sudah masuk predikat Baik (2,6-<3,5). Kenaikan level kematangan misalkan sampai level 4 memungkinkan secara kapabilitas layanannya sudah terkolaborasi sehingga bukan hanya terjadi pertukaran informasi tetapi terjadi integrasi layanan dengan SPBE lainnya sehingga, sesuatu yang dianggap bukan tugas dan fungsinya dapat dikoordinasikan segera.

**2. Statistik.**

Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pengelolaan data statistik sektoral dan geospasial, baik berupa hardware maupun software Pengembangan Single Data System (SDS) dalam rangka merealisasikan arsitektur Big Data Jawa Tengah Berdasarkan Roadmap yang telah ditetapkan serta pengembangan Geospasial dalam rangka mewujudkan Jawa Tengah Satu Peta. Mewujudkan Smart Government dengan penerapan penuh layanan digital publik dan administrasi pemerintahan nasional; dan pemanfaatan Big Data dan Kecerdasan Artifisial (Data Driven Government); Dampak SDI Dalam Rangka Perbaikan Kualitas Perencanaan Pembangunan, konkritnya berupa data prioritas yang akan digunakan sebagai perencanaan pembangunan bukan hanya katalog data; Data terkini atau ter update akan meningkatkan kualitas program secara tepat sasaran. Dengan program yang tepat sasaran tersebut otomatis akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

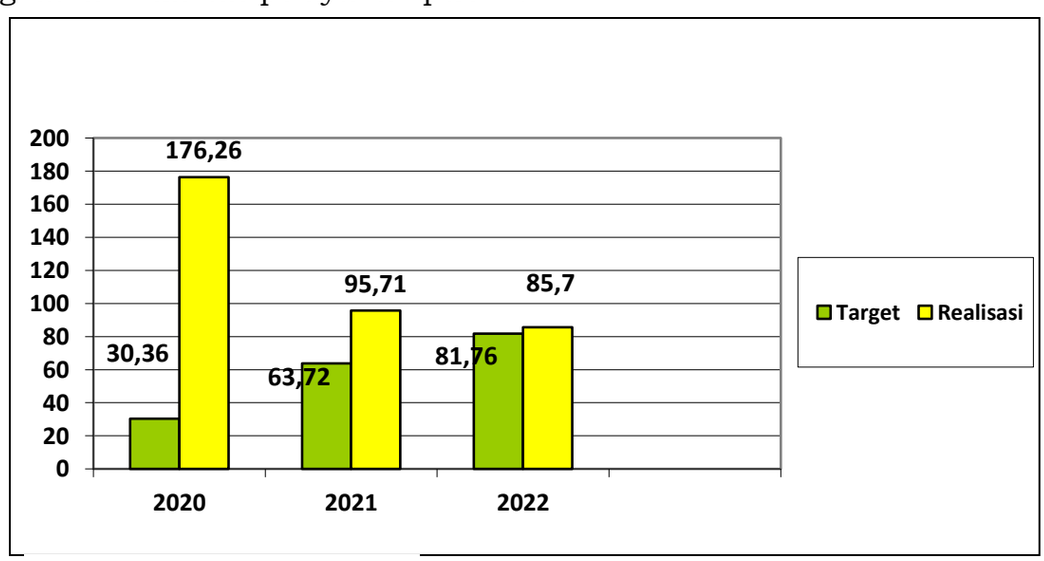


*Sumber : LKPJ, 2022*

**Gambar 2.107.**
**Capaian Kinerja Laju Pemanfaatan Data Sektoral**

Dalam pelaksanaan Tahun 2021, capaian laju pemanfaatan data sektoral sebesar 95,71%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 (63,72%) mengalami peningkatan sebesar 31,99%. Sedangkan pada tahun 2022 laju pemanfaatan data sektoral mencapai 85,70% yang berarti terdapat kenaikan sebesar 3,94% dibandingkan dengan target pada tahun 2022 di triwulan IV yaitu sebesar 81,76%. Capaian pada tahun 2021 dan 2022 tersebut melampaui target karena respon positif OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota yang antusias dalam memanfaatkan aplikasi *Single Data System* (SDS) dalam pengiriman data sektoral, sehingga data sektoral yang masuk melebihi target awal.

Hingga saat ini, Diskominfo telah melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral lingkup Provinsi (SDS). Kegiatan ini berupa Pengumpulan, Pemeriksaan dan Publikasi Data Statistik Sektoral di Lingkup Provinsi Jawa Tengah dan Melaksanakan Forum Data Satu Data Jawa Tengah sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar penyelenggara Satu Data Jawa Tengah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk Menyediakan data dan informasi hasil pembangunan lebih cepat dan akurat untuk perencanaan, pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah melalui Single Data System serta mendukung Pengambilan Kebijakan Pimpinan.

Selanjutnya, dalam menjamin keterbukaan informasi publik telah dilakukan difasilitasi melalui aplikasi portal data. Dalam aplikasi portal data, masyarakat umum dapat mengakses data dan informasi Perangkat Daerah dan mendapatkan informasi publik yang diperlukan. Portal data diharapkan menjadi sarana OPD dalam mempublikasikan data dan informasi yang perlu diketahui publik atas sektor pembangunan yang ditangani. Jadi, aplikasi portal data adalah mendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / PPID Utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi sektor-sektor publik. Aplikasi portal data diharapkan akan menjadi sarana untuk mewujudkan Satu Data Indonesia di Provinsi Jawa Tengah, karena data dari berbagai OPD yang masuk harus melalui tahap pemeriksaan prinsip SDI sebelum dipublikasikan dalam portal data.

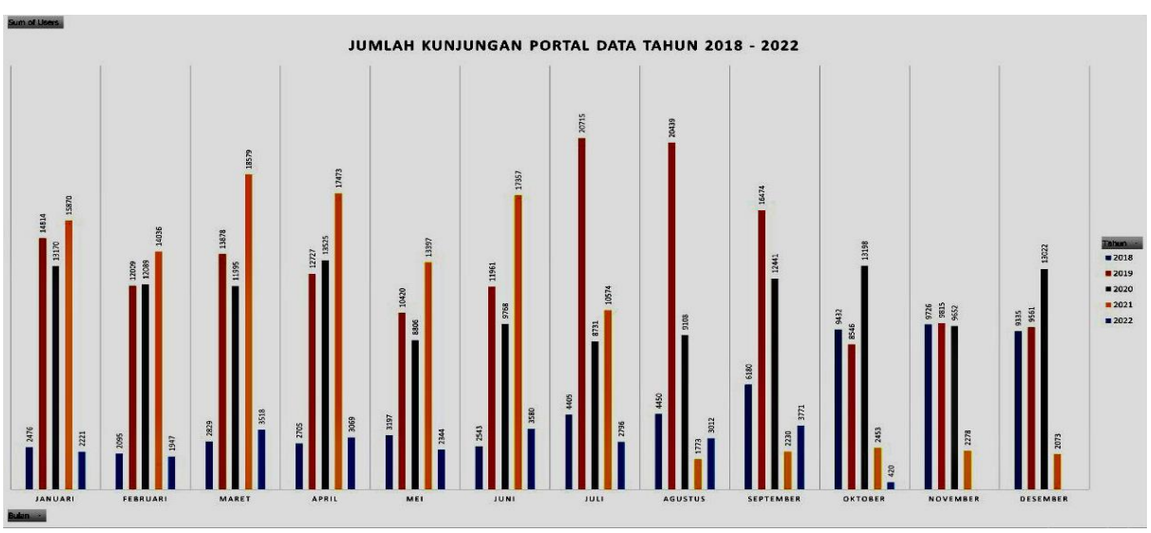


*Sumber: Diskominfo, 2022*

**Gambar 2.108.**

**Grafik Kunjungan Portal Data Tahun 2018-2022**

Trend data yang masuk dalam portal data sepanjang 2018-2022 menunjukan kenaikan yaitu Tahun 2018 sebanyak 13.000 data; Tahun 2019 sebanyak 19.756 data; Tahun 2020 sebanyak 25.439 data; Tahun 2021 sebanyak 30.349 data; Tahun 2022 sebanyak 33.664 data. Meskipun demikian, memperhatikan Gambar 7. Menunjukkan bahwa trend jumlah kunjungan portal dari Tahun 2018-2022 menunjukkan tendensi penurunan. Penurunan terekam dari bulan ke bulan dan dari Tahun ke tahun. Penurunan minat kunjungan diduga faktor internal berupa aplikasi portal data memiliki kelemahan-kelemahan seperti tampilan aplikasi kurang menarik, data kurang menarik, data tidak ter update rutin/kosong dan kurang jelas kemanfaatannya. Adapun faktor eksternal adalah tersedianya penyedia data saingan yang lebih dapat dipercaya/sesuai kebutuhan (Misalkan BPS, data hasil penelitian akademis, dan data Perangkat Daerah). Penurunan trend kunjungan tersebut harus dievaluasi untuk perbaikan. Hasil pencermatan terhadap aplikasi juga, belum diketahui siapa saja yang memanfaatkan portal data tersebut. Pemahaman pengunjung diperlukan untuk mengetahui apakah data dimanfaatkan atau sekedar dilihat sekilas.

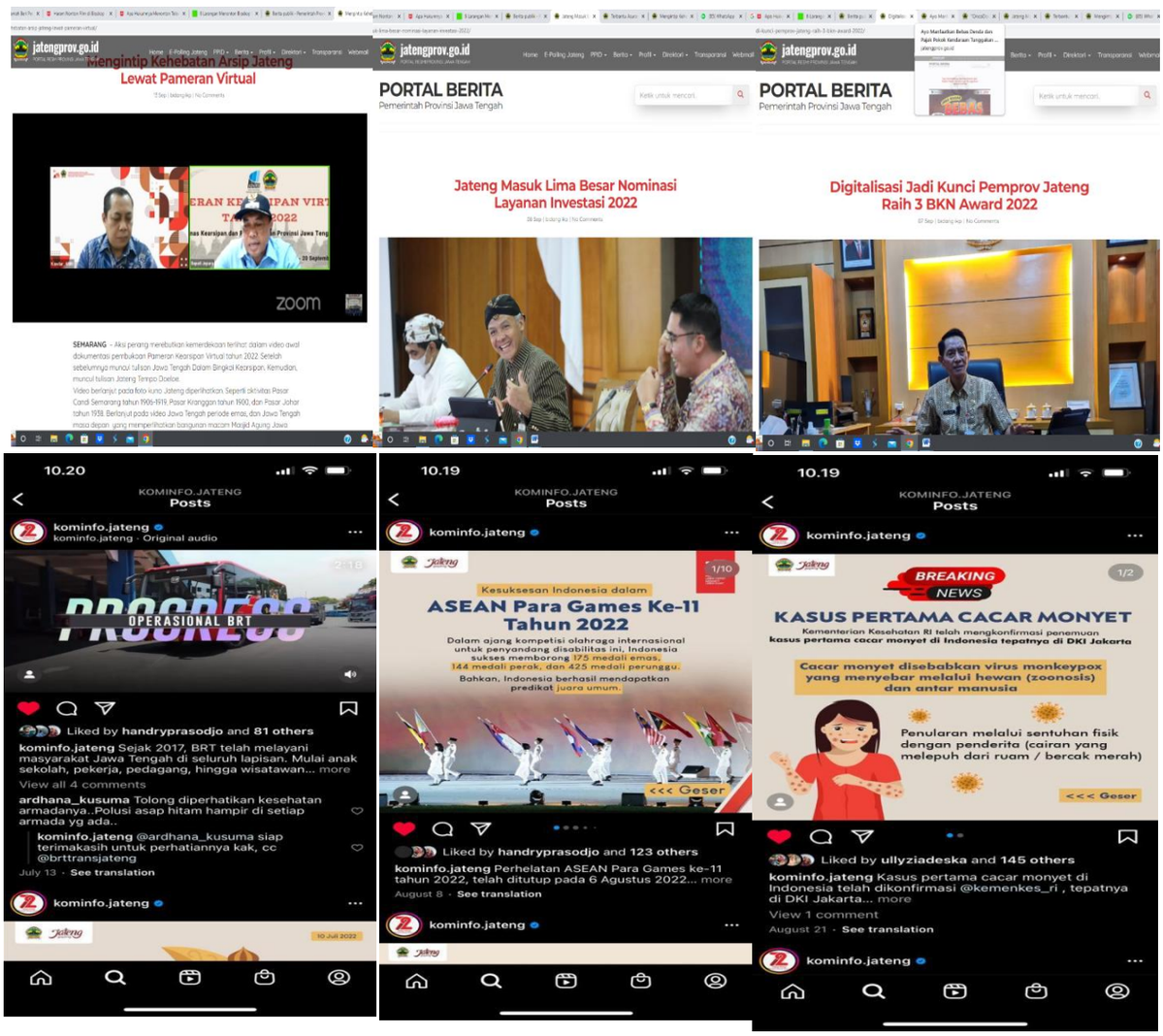


*Sumber:Diskominfo,2022*

**Gambar 2.109.**
**Tampilan Aplikasi Portal Data Jawa Tengah**

Selain disampaikan fasilitasi publikasi hasil pembangunan satu arah dalam bentuk tayangan berita dalam PPID, urusan statistik juga memfasilitasi dukungan

website untuk komunikasi dua arah seperti melalui portal berita pada website jatengprov.go.id. Diskominfo juga mengaktifkan website kominfo jateng untuk komunikasi yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi dengan Diskominfo terkait suatu topik pembangunan sebagaimana terlihat pada Gambar 2.106. Terhadap layanan komunikasi dua arah tersebut terdapat hambatan dalam merespon pihak-pihak yang berkomunikasi, tentu membutuhkan spesialisasi siapa pihak yang menangani, kualitas pemahaman substansi topik yang dibahas dan, jaringan komunikasi antar pihak yang memadai.

**3. Persandian.**

Persandian memiliki peran yang sangat vital dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu untuk mengamankan informasi dengan kriteria CIA (*confidentiality, integrity, availability*) Ketiga aspek tersebut merupakan aspek yang paling penting dalam menciptakan sebuah keamanan informasi yang kuat dan efektif. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 (ayat 2) bahwa Persandian sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kondisi Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini, berdasarkan hasil pelaksanaan dan rekomendasi IT Assessment yang dilakukan oleh BSSN serta kegiatan Penetration Test (Pentes) mandiri dengan memanfaatkan beberapa tools pengamanan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2022 terhadap aplikasi yang telah dibangun/dikembangkan oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diperoleh hasil dalam kondisi yang cukup baik meskipun ada beberapa aplikasi yang masih diperlukan penguatan keamanan, layanan seperti SSL, *firewall* dan anti virus juga diharapkan dapat memperkuat keamanan sistem atau aplikasi dari sisi lalu lintas data dan keamanan *workstation* pengguna.

**Tabel 2.188.**
**Tingkat Kematangan Keamanan Informasi Dalam Kurun Waktu 2020 s.d 2022**

| NO | AREA EVALUASI | TAHUN | |
|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 |
| 1 | Tata Kelola | 118 | 123 |
| 2 | Pengelolaan Risiko | 50 | 67 |
| 3 | Kerangka Kerja | 156 | 159 |
| 4 | Pengelolaan Aset | 147 | 167 |
| 5 | Teknologi dan Keamanan Informasi | 87 | 118 |
| Tingkat Kematangan | | III | III+ |
| Predikat | | CUKUP BAIK (558) | BAIK (634) |

*Sumber : BSSN RI, 2022*

Berdasarkan tabel diatas, capaian tingkat kematangan Keamanan Informasi dalam kurun waktu 2020 s.d 2022 menunjukkan kondisi yang semakin baik, dimana terjadi peningkatan skor tingkat kematangan yang semula 558 pada tingkat III (predikat “Cukup Baik”) di tahun 2021, dan mengalami peningkatan

sebesar 76 poin sehingga capaian menjadi 634 pada tingkat III+ (predikat "Baik") di tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa keamanan informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah terkelola dengan baik pada aspek tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, dan respon. Namun untuk indeks KAMI masih terdapat aspek yang perlu optimalisasi pada aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga, Pengamanan Layanan Infrastruktur dan Perlindungan Data Pribadi (PDP). Meningkatnya Keamanan Informasi Dan Pemanfaatan Persandian Daerah yang diukur melalui Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI), yang dinilai menggunakan instrumen dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta dilakukan visitasi dan evaluasi langsung dari BSSN, dengan hasil Indeks KAMI di level III+ mencapai target, penilaian terdiri dari 8 unsur penilaian yaitu Tata Kelola, Pengelolaan resiko; Kerangka Kerja Keamanan Informasi; Pengelolaan Aset; Teknologi dan Keamanan Informasi; Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga; Pengamanan layanan Infrastruktur; dan Perlindungan data Pribadi.

Hingga saat ini, pada urusan persandian, telah dilakukan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan upaya pengamanan informasi. Upaya pengamanan informasi dilakukan melalui assessment aplikasi; layanan *e mail* sanapati, 49 SSL, 520 antivirus bagi 50 OPD, *live streaming* dan, *conference*. Kegiatan-kegiatan ini untuk menjamin keamanan informasi perangkat daerah. Terdapat 45 OPD yang aplikasinya sudah di pentest dan melakukan tindaklanjut atas hasil pentest nya. Sampai saat ini juga secara aktif terus dilakukan peningkatan kualitas keamanan informasi. Upaya peningkatan keamanan informasi seperti sedang dalam tahap pembuatan Pergub SMKI, *Risk Manajemen*, Arsitektur Keamanan dan SOP.

Upaya pengamanan informasi lebih detil sebagai berikut: dilakukan Digital Forensik dilaksanakan pada alat komunikasi milik Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; Pada layanan pengelolaan Tanda Tangan Elektronik (TTE), Bidang Persandian dan KI menyediakan aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik (MSE) sebagai aplikasi untuk membantu pendaftaran dan pengelolaan Sertifikat elektronik / Tanda Tangan Elektronik untuk seluruh Pejabat / Fungsional hingga staf pelaksana di seluruh OPD Pemprov Jateng dengan basis website dan Aplikasi Mobile. Selain itu Bidang Persandian dan KI juga menyediakan Chatbot "SORE MASE" sebagai layanan helpdesk bagi pemilik TTE yang dapat digunakan bagi pemilik TTE untuk mengecek data yang berkaitan dengan TTE secara realtime dan 24 jam. Hingga saat ini sudah terbit sejumlah 297 TTE; Pengamanan distribusi/pengiriman data atau surat sudah menggunakan email terenkripsi Sanapati baik dari pusat ke provinsi hingga ke kab/kota; Fasilitasi layanan *Video Conference* untuk komunikasi pejabat VVIP seperti Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; Layanan publikasi kegiatan yang ada di Pemprov Jateng melalui *Video Live Streaming* pada kanal medsos *(Youtube, Facebook, Twitter, Tiktok dan Instagram).*

Dalam menjamin keamanan informasi, Provinsi juga sudah membentuk Tim CSIRT atau *Computer Security Incident Response Team* pada Tahun 2020. Tugas Tim CSIRT adalah menerima, meninjau, dan merespon laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Provinsi juga melakukan fasilitasi pembentukan Tim CSIRT di Kabupaten / Kota. Sampai saat ini sudah 11 Kab/Kota telah memiliki Tim CSIRT.

Tim CSIRT Provinsi Jawa Tengah selalu secara rutin melakukan layanan penetration testing, sertifikasi elektronik, kontra penginderaan dan *jamming*. *Pentest / Penetration Testing* dan *IT Security Assement* Mandiri adalah kegiatan pengujian kerentanan aplikasi yang digunakan di lingkup Pemprov Jateng oleh tenaga ahli pada bidang Persandian dan Keamanan Informasi baik pada saat aplikasi belum dirilis maupun pada saat aplikasi sudah dirilis atau sudah berjalan. Hingga saat ini sudah ada 47 OPD dari total 49 OPD aplikasinya telah di pentest dengan status akhir kerentanan LOW; SSL (*security Socket Layer*) adalah sebagai pengaman pertukaran data yang terjadi melalui jaringan internet, SSL sudah diterapkan pada semua sub domain yang digunakan pada aplikasi yang ada di Pemprov Jateng; Anti virus yang bertujuan untuk mengamankan data yang ada pada computer/desktop dari serangan virus atau malware, sebanyak 31 OPD sudah menerapkan anti virus pada desktop atau perangkat komputer yang digunakan; Pengamanan signal atau (Jamming) dilakukan untuk kegiatan yang menghadirkan pejabat VVIP atau Presiden dan Wakil Presiden serta pada kegiatan tes atau ujian kompetensi; Kontra penginderaan merupakan kegiatan untuk melakukan pencegahan terhadap pengawasan pihak lain, termasuk metode-metode yang melibatkan peralatan elektronik dan mendeteksi adanya peralatan surveilance (alat sadap), hal ini dilakukan pada kediaman, ruang kerja dan kendaraan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Upaya peningkatan keamanan informasi juga dilakukan melalui jalur regulasi, agar langkah-langkahnya lebih tertata dan didukung semua perangkat daerah. Regulasi tersebut adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang digunakan sebagai acuan atau dasar pelaksanaan Persandian dan Keamanan Informasi di Provinsi Jawa Tengah. Atas capaian pengamanan informasi, Provinsi Jawa Tengah sudah mendapatkan pengakuan ISO 27001 pada Tahun 2022 tentang Keamanan Informasi dan *Data Center*.

### 2.6.4 Penelitian dan Pengembangan

Sesuai dengan Perpres 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional maka dalam rangka optimalisasi urusan penelitian dan pengembangan serta terciptanya integrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Provinsi Jawa Tengah maka telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu keluaran yang dihasilkan oleh fungsi penelitian dan pengembangan adalah dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi penelitian yang dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Selama kurun waktu tahun 2018-2022 dokumen dan rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.189.**
**Jumlah Dokumen Penelitian dan Rekomendasi/Implementasi Penelitian**

| No. | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dokumen Penelitian | 6 | 9 | 4 | 2 | n/a |
| 2. | Rekomendasi/Implementasi Penelitian | 6 | 9 | 4 | 2 | n/a |

*Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Selama kurun waktu 2017 – 2021 dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi hasil penelitian fluktuatif dan cenderung menurun. Hal ini disebabkan setelah pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan litbang daerah sejak 2017, kegiatan penelitian dalam bentuk Riset Unggulan Daerah (RUD) dan penelitian mandiri sudah tidak difasilitasi lagi. Pada tahun 2021 dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya volume kegiatan penelitian karena pemerintah memfokuskan pada kegiatan dalam upaya penanggulangan dampak pandemi. Upaya untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan hasil litbang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas SDM Peneliti melalui pendidikan dan pelatihan, membangun komunikasi melalui Jaringan Penelitian dan Inovasi, kerjasama dengan pemerintah pusat (Ristek dan LIPI), serta koordinasi dan membangun jejaring antara penelitian dan perencanaan.

Guna mendukung fungsi kelitbangan maka dibentuk beberapa lembaga pendukung kelitbangan di Jawa Tengah antara lain berbentuk *technopark, agro technopark, marine science technopark,* digitalisasi *technopark* dan taman teknologi pertanian. Bentuk kelembagaan *technopark* di Jawa Tengah di Kabupaten/Kota dikelola oleh PD teknis dan mendapatkan pendanaan dari anggaran daerah. *Technopark* dengan bidang fokus dibidang pertanian dan pangan terdapat di Ganesha Sragen dikelola oleh UPT Dinas Tenaga Kerja, *technopark* Lebaksiu yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tegal, *Agrotechnopak* Klaten yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, *Technopark* Pangan Kabupaten Grobogan yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan dan *technopark* perikanan di Kota Pekalongan dikelola oleh UPT Dinas kelautan Perikanan, serta *technopark* dengan bidang fokus otomotif di Kota Surakarta (Solo *Technopark*).

Kelembagaan lain yang memiliki peran untuk menghilirkan inovasi agar dapat menjadi produk yang bisa dijual dan mampu menghasilkan *start up* inovasi adalah Inkubator Bisnis dan Teknologi yang melakukan kegiatan proses pra inkubasi dan inkubasi. Pada proses Pra inkubasi dilakukan dengan meningkatkan sumberdaya manusia untuk mengubah pola pikir dan membentuk calon *start up* menjadi *start up*. Sedangkan proses inkubasi dilakukan dengan melakukan pendampingan, mentoring, pelayanan, fasilitasi, promosi untuk meningkatkan kapasitas produk. Di Jawa Tengah setidaknya terdapat 22 inkubator yang berfungsi aktif dalam memberikan layanan inkubasi.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki Inkubator Wirausaha Inovasi Jawa Tengah (Inwinov Jateng) yang berada di bawah naungan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Alokasi sumber pendanaan berasal dari APBD dan APBN (melalui Kementerian Ristekdikti, BRIN dan Kemenkop UKM). Selama lima tahun terakhir, Inwinov Jateng telah melakukan pembinaan terhadap tenant yang dikelola masyarakat melalui fasilitasi program penguatan inkubator/tenant yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.190.**
**Jumlah Tenant Binaan Inwinov Jateng yang difasilitasi Program Penguatan Inkubator/Tenant**

| No | Tahun | Total Tenant | Program | Sumber Pendanaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 3 Tenant | Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) | Kemenristekdikti |
| 2 | 2019 | 6 Tenant | Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) | Kemenristekdikti |
| 3 | 2020 | 1 Tenant | Startup Inovasi Indonesia (SSI) | BRIN |
| 4 | 2021 | 40 Tenant | Fasilitasi Lembaga Inkubator | Kemenkop UKM |

*Sumber: Bappeda Prov. Jateng, 2022*

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Jawa Tengah yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, kemudian diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (SIDa) Provinsi Jawa Tengah adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah. Pengembangan SIDa di Jawa Tengah ada 4 pilar tematik yaitu 1) Provinsi Inovatif; 2) Kabupaten Kota Inovatif; 3) Desa Inovatif; dan 4) UMKM Inovatif. Semenjak digulirkan tahun 2013, telah difasilitasi pengembangan system inovasi di 35 Kabupaten/Kota, pengembangan inovasi di 90 desa, serta pada 43 UMKM di Jawa Tengah.

Kegiatan lainnya adalah memfasilitasi inovasi masyarakat melalui Krenova atau Kreativitas dan Inovasi Masyarakat, Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk lomba krenova dan penjaringan inovasi. Kegiatan krenova dilakukan dengan 2 jalur dengan tujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki inovasi untuk bisa terlibat dalam kegiatan lomba krenova dan seleksi inovasi dengan jalur penjaringan inovasi. Kegiatan ini diikuti oleh 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang telah menghasilkan karya inovasi sehingga mampu untuk mengatasi kebutuhan teknologi di sekitarnya atau dapat direplikasi di daerah lain, sehingga memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan di masyarakat Jawa Tengah.

Partisipasi masyarakat Jawa Tengah mengikuti kegiatan KRENOVA Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai tahun 2022 terjadi fluktuasi, pada tahun 2017 ke 2018 terjadi peningkatan sedangkan tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan dikarenakan ada 2 kabupaten yang tidak mengikuti lomba krenova dan pembatasan jumlah peserta dari masing-masing Kabupaten/Kota maksimal 5 inovasi. Tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan disebabkan karena dilakukannya 2 mekanisme proses krenova melalui lomba krenova dan penjaringan inovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak

masyarakat yang memiliki inovasi, perlu diberikan kesempatan dan wadah agar inovasi tersebut tersalurkan.

**Tabel 2.191.**
**Jumlah Inovasi Hasil Krenova di Jawa Tengah Tahun 2017-2022**

| No | Tahun | Jumlah Inovasi | Jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 167 | 35 Kabupaten/Kota | • Mulai tahun 2019 Lomba Krenova dibatasi maksimal 5 inovasi per kabupaten/kota;<br>• Lomba krenova belum semua Kabupaten/Kota mengirimkan;<br>• Penjaringan Inovasi Masyarakat baru dimulai tahun 2021. |
| 2 | 2018 | 201 | 35 Kabupaten/Kota | |
| 3 | 2019 | 169 | 35 Kabupaten/Kota | |
| 4 | 2020 | 167 | 34 Kabupaten/Kota | |
| 5 | 2021 | 230 | 35 Kabupaten/Kota | |
| 6 | 2022 | 276 | 34 Kabupaten/Kota | |

*Sumber: Bappeda Prov. Jateng, 2022*

Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi daerah serta untuk mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perhitungan Indeks Inovasi Daerah didasarkan pada 16 indikator satuan pemda dan 20 indikator satuan inovasi. Predikat penilaian IID terbagi menjadi 4 kategori sebagai berikut: 0 (tidak dapat dinilai); 0,01-29,99 (Kurang Inovatif); 30,00-59,99 (Inovatif) dan 60,00-100,00 (Sangat Inovatif).

**Tabel 2.192.**
**Capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

| No | Tahun | Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) | Predikat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 720 | Inovatif | Perubahan Penilaian IID mulai tahun 2021 dengan menggunakan skala perhitungan 0 - 100 |
| 2 | 2019 | 22.560 | Sangat Inovatif | |
| 3 | 2020 | 36.357 | Sangat Inovatif | |
| 4 | 2021 | 62.57 | Sangat Inovatif | |
| 5 | 2022 | Dalam tahap penilaian | | |

*Sumber: Bappeda Prov. Jateng, 2022*

### 2.6.5 Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung oleh sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya dan penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain masih perlunya pengolahan kearsipan sesuai ketentuan, serta belum optimalnya digitalisasi arsip.

**Tabel 2.193.**
**Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2018-2022**

| NO | Tahun | Nilai | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 92,20 | Sangat Baik |
| 2 | 2019 | 79,33 | Sangat Baik |
| 3 | 2020 | 92,08 | Sangat Memuaskan |
| 4 | 2021 | 91,314 | Sangat Memuaskan |
| 5 | 2022 | 93,45 | Sangat Memuaskan |

*Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2021*

Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Penyediaan dan pengelolaan arsip untuk akses dan informasi masyarakat masih perlu dioptimalkan. Berikut data jumlah kunjungan pengguna arsip pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 2.194.**
**Jumlah Pengunjung Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah**

| No | Jenis Layanan | Tahun (orang) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Penelitian atau Mencari Arsip | 721 | 757 | 780 | 209 | 346 | 496 |
| 2 | Kunjungan atau Wisata Arsip | 2.852 | 1.890 | 2.036 | 15.001 | 112 | 3.206 |
| 3 | Magang atau PKL | 238 | 219 | 151 | 103 | 67 | 97 |
| 4 | Konsultasi Kearsipan atau Perpustakaan | 1.033 | 669 | 485 | 206 | 127 | 288 |
| 5 | Umum atau lain-lain | - | 3535 | 594 | 33 | 81 | 338 |
| 6 | Layanan SIKS, Website | - | | | | 11.289 | 41.718 |
| | Jumlah | 4.844 | 7.070 | 4.046 | 15.552 | 12.022 | 46.413 |

*Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2023*

### 2.6.6 Akuntabilitas Kinerja

Salah satu aspek penilaian kinerja pemerintahan dan reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh MenPAN-RB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berturut-turut pada tahun 2018-2022 mendapatkan predikat A. Nilai dan predikat ini meningkat dari tahun 2016-2017 sebelumnya yang hanya mendapatkan predikat BB.

Dari 5 komponen SAKIP yang dievaluasi di tahun 2022, komponen Perencanaan Kinerja mengalami penurunan dari 26,66 menjadi 25,53 atau turun 1,13 poin. Akan tetapi 3 komponen lainnya mengalami peningkatan dan satu komponen caitu Capaian Kinerja tidak dilakukan penilaian di tahun 2022. Meski ada komponen yang mengalami penurunan dan peningkatan, capaian 2022 sebenarnya tidak dapat begitu saja diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena berdasarkan PermenpanRB no 86 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriterita penilainnya. Akan tetapi nilai pada

tahun 2022 menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja mengalami perbaikan.

Terdapat beberapa catatan berdasarkan hasil evaluasi dari KemenpanRB terkait akuntabilitas kinerja :

a. Melakukan reviu dan penyempurnaan penjenjangan kinerja;
b. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment dan meningkatkan keselarasan kinerja individu dengan organisasinya;
c. Meningkatkan kualitas laporan kinerja.

**Tabel 2.195.**
**Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| No. | Komponen Yang Dinilai | Bobot | Nilai | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Perencanaan Kinerja | 30 | 26,38 | 26,77 | 26,64 | 26,66 | 25,53 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 25 | 19,87 | 20,50 | 20,23 | 20,23 | 23,63 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15 | 11,68 | 11,99 | 12,08 | 12,27 | 12,84 |
| 4. | Evaluasi Internal | 10 | 8,26 | 8,26 | 7,02 | 7,21 | 19,13 |
| 5. | Capaian Kinerja | 20 | 13,99 | 14,04 | 14,28 | 14,35 | n/a |
| | Hasil Nilai SAKIP | **100** | **80,18** | **81,56** | **80,25** | **80,72** | **81,13** |
| | Predikat | | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** |

*Sumber: Kemenpan RB, Maret 2022*

### 2.6.7 Manajemen ASN

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen ASN, Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Penilaian dengan sistem merit ini meliputi 8 aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Pengembangan Karier; Promosi dan Mutasi; Manajemen Kinerja; Penggajian, Penghargaan dan Disiplin; Perlindungan dan Pelayanan; serta Sistem Informasi.

Pada tahun 2021, nilai penerapan sistem merit di Provinsi Jawa Tengah sebesar 335,5. Nilai tersebut terus meningkat dari nilai penerapan sistem merit pada tahun 2020 yaitu sebesar 289 yang berarti penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Provinsi Jawa Tengah dalam Kategori Sangat Baik.

**Tabel 2.196.**
**Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| NO | Aspek | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perencanaan Kebutuhan | 60 | 10 | 37,5 | 40 | 40 |
| 2 | Pengadaan | 18 | 30 | 38 | 40 | 40 |
| 3 | Pengembangan Karier | 62,5 | 72,5 | 55 | 75 | 76 |
| 4 | Promosi dan Mutasi | 31 | 30 | 20 | 35 | 35 |
| 5 | Manajemen Kinerja | 42,5 | 50 | 67,5 | 70 | 70 |
| 6 | Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin | 22,5 | 30 | 35 | 37,5 | 37,5 |
| 7 | Perlindungan dan Pelayanan | 8 | 10 | 16 | 14 | 16 |
| 8 | Sistem Informasi | 23 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| **Skor Nilai** | | **267,5** | **280** | **289** | **335,5** | **337,5** |

| NO | Aspek | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indeks Sistem Merit** | | **0,66** | **0,70** | **0,70** | **0,81** | **0,82** |

*Sumber: KASN, 2021*

Capaian Nilai Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah dari aspek Perlindungan dan Pelayanan tahun 2021 sebesar 14 mengalami penurunan nilai sebesar 2 poin dibandingkan 2020 sebesar 16, dikarenakan proses penyesuaian dasar hukum terkait perlindungan hukum kepada pegawai yang terkena kasus hukum dan perlindungan pegawai belum selesai ketika proses penilaian sistem merit tahun 2021 berakhir.

Sedangkan pada capaian Indeks Sistem Merit pada tahun 2022 tidak dirilis oleh Komisi Aparatur Sipil Negara selaku lembaga yang berwenang. Hal ini disebabkan mendasarkan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara No 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah pasal 19 menjelaskan bahwa Instansi Pemerintah dengan kategori sangat baik akan dievaluasi oleh KASN setiap 2 (dua) tahun sekali. Namun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan Penilaian Mandiri dengan capaian 337,5

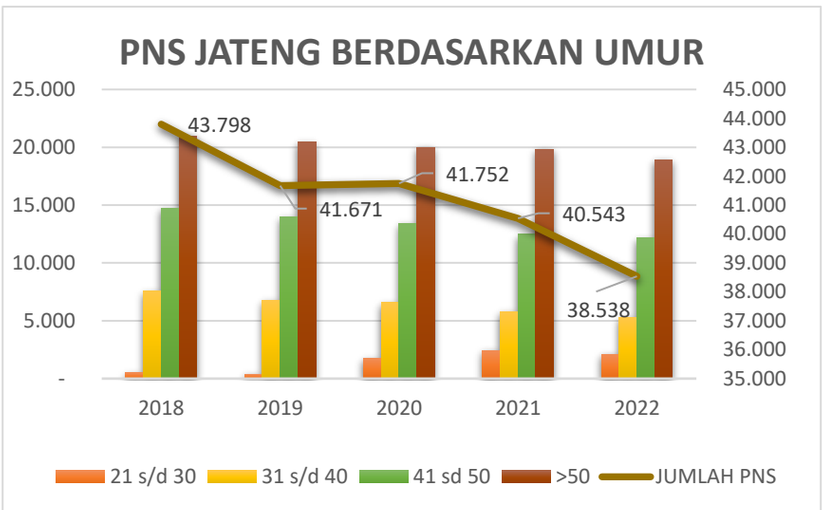


*Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah*

**Gambar 2.110.**

**Perkembangan Jumlah PNS Provinsi Jawa Tengah Kurun Waktu Tahun 2018-2022**

Dalam perkembangannya, jumlah PNS Provinsi Jawa Tengah kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami penurunan sebesar 5.260 orang. Hal ini selaras dengan kebijakan *zero-growht* yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Namun, jumlah PNS Jawa Tengah sekarang masih didominasi oleh usia lebih dari 50 tahun dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan PNS usia 20-30 tahun. Sehingga menguatkan dugaan produktivitas PNS menurun, sehingga perlu adanya modernisasi birokrasi dengan penerapan teknologi informasi. Perlu pemetaan kebutuhan pegawai untuk mengetahui posisi esensial serta pelaksanaan manajemen talenta untuk menyiapkan kader suksesi yang lebih siap, produktif dan berkinerja untuk mengisi jabatan PNS dan mendukung kinerja organisasi.

**Tabel 2.197.**
**PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Mengajukan Tugas Belajar**

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | TAHUN | | | | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | S1/DIV/PROFESI | 7 | 13 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| 2 | S2 | 37 | 15 | 22 | 16 | 26 | 116 |
| 3 | PPDS | 11 | 5 | 5 | 2 | 6 | 29 |
| 4 | S3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 11 | 24 |
| 5 | SUB SPESIALIS | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| | JUMLAH | 61 | 38 | 30 | 22 | 55 | 206 |

*Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Salah satu upaya peningkatan produktivitas dan kompetensi ASN yaitu melalui jalur pendidikan lanjutan dalam bentuk Tugas Belajar. Kurun waktu tahun 2018-2022 Provinsi Jawa Tengah sudah memfasilitasi tugas belajar sebanyak 206 orang. 30 orang untuk jenjang S1/DIV/Profesi, 116 orang untuk jenjang S2, 29 orang untuk jenjang PPDS, 24 orang untuk jenjang S3, dan 7 orang untuk jenjang Sub Spesialis. Pemberian fasilitasi tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan.

Selain melalui jalur pendidikan lanjutan, peningkatan kompetensi ASN juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Selama tahun 2018-2022 kapasitas peneyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terus meningkat secara kuantitas. Hal ini menunjukkan kemampuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat mencakup kalangan ASN secara luas yang tidak terbatas pada ASN Provinsi Jawa Tengah tetapi juga seluruh ASN di Jawa Tengah. Selain pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh BPSDMD, pengembangan kompetensi ASN juga dilakukan melalui sertifikasi. Pada tahun 2022 dari jumlah 50.115 peserta terdapat 46.012 sertifikat terkirim atau sebesar 91,8% peserta tersertifikasi. Hal ini menunjukkan potensi kompetensi SDM ASN yang cukup mumpuni tetapi juga menjadi pekerjaan rumah untuk menuntaskan 9,2% potensi yang tidak tersertifikasi. Hal itu bisa jadi disebabkan karena peserta tidak lulus sertifikasi atau tidak melaporkan kepada BPSDMD selaku leading sector pendidikan dan pelatihan.

**Tabel 2.198.**
**Peningkatan Kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2018-2022**

| Tahun | Target Peserta (orang) | Realisasi Peserta (orang) |
|---|---|---|
| 2018 | 104 | 100 |
| 2019 | 10.110 | 9.820 |
| 2020 | 2.789 | 2.763 |
| 2021 | 6.935 | 6.956 |
| 2022 | 18.932 | 19.838 |

*Sumber : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah 2022*

Meski telah menglami peningkatan kuantitas pendidikan dan pelatihan yang signifikan, pendidikan dan pelatihan ASN di Jawa Tengah belum terstruktur untuk perbaikan kompetensi dan kinerja ASN. Hal ini ditandai dengan belum tersedianya Road Map pengembangan kompetensi berbasis analisi kesenjangan kompetensi dan kinerja ASN yang menjadi acuan untuk pengembangan kompetensi dan karir ASN. Kondisi tersebut menyebabkan gap kompetensi dan kinerja ASN belum terpetakan dengan baik, pengembangan kompetensi belum

sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan kinerja, serta penilaian kinerja ASN belum akurat dalam suatu sistem yang terintegrasi.

### 2.6.8 Administrasi Kependudukan

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2017-2022 menunjukkan tren peningkatan meskipun realisasinya terbilang flutuatif. Hal tersebut disebabkan karena data penduduk wajib KTP yang sangat dinamis, yaitu terdapat perubahan penduduk wajib KTP setiap harinya. Sampai dengan Tahun 2022, realisasi presentasi kepemilikan KTP adalah 98,16 persen. Realisasi tersebut masih perlu ditingkatkan agar pencapaian target presentase penduduk yang memiliki KTP dapat mencapai 100 persen penduduk wajib KTP memiliki identitas resmi penduduk., sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Dalam rangka meningkatkan kinerja tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah peningkatan layanan kependudukan melalui perekaman, penerbitan KTP, dan mendekatkan layanan agar seluruh penduduk wajib KTP memiliki identitas resmi penduduk. Kepemilikan KTP menjadi hal penting dalam administrasi kependudukan karena data tersebut akan digunakan sebagai basis data dalam berbagai intervensi program pemerintah, termasuk salah satunya dalam rangka menentukan sasaran penerima manfaat penanggulangan kemiskinan.

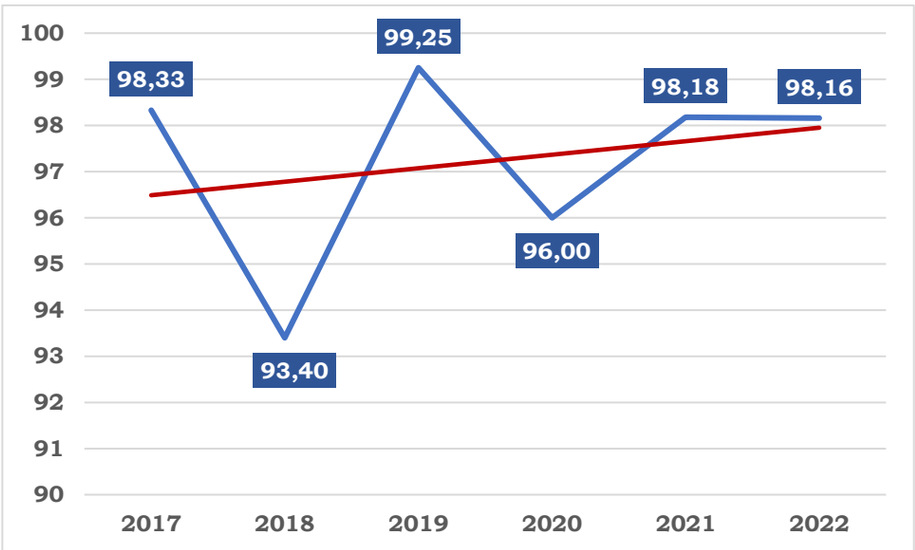


*Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2021*

**Gambar 2.111.**
**Persentase Kepemilikan KTP (KTP-el) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021**

**Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran**

Ditinjau dari tingkat partisipasi 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran dalam kurun waktu tahun 2017-2022, realisasinya meningkat dari 87,42 persen menjadi 96,09 persen. Sementara itu pada tahun 2020, reliasasinya menurun sebesar 4,09 persen menjadi 92 persen. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 3,15 persen menjadi 95.15 dan mengalami kenaikan Kembali menjadi 99,97 di tahun 2022 sehingga tren yang terbentuk dari 2017-2022 menunjukkan capaian tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran cenderung meningkat.

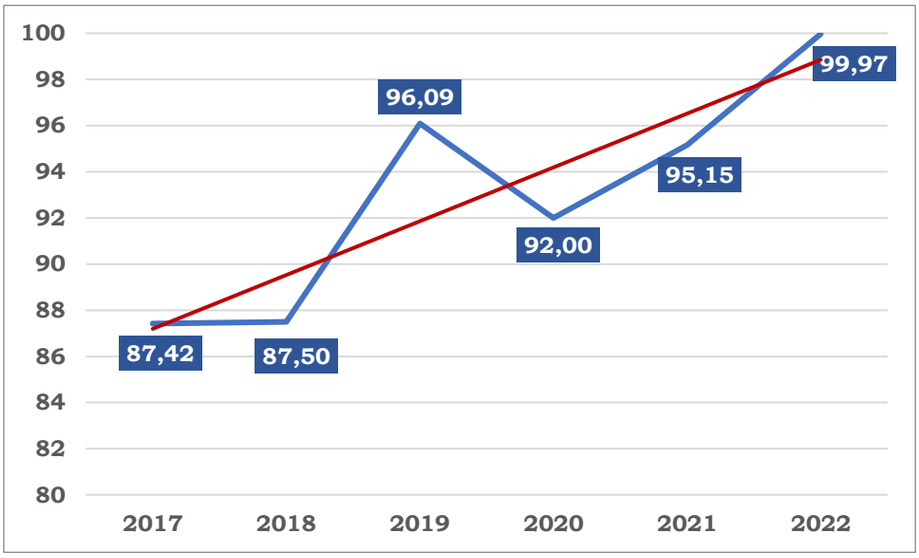


*Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2020*

**Gambar 2.112.**
**Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (%)**

Tren peningkatan tersebut disebebkan oleh pelayanan administrasi kependudukan yang semakin baik serta adanya inovasi yang dilakukan di kabupaten/kota, seperti pelayanan dokumen kependudukan 1 (satu) hari jadi, pelayanan 3 in 1 (*three in one*), bayi lahir pulang dari rumah sakit langsung mendapatkan akta kelahiran, *sms gateway*, dan layanan *online.*

**Cakupan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan**

Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah diketahui dari jumlah penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pada tahun 2021, sebanyak 24 antara lain, Dinas Sosial, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Pandapatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, RS Karyadi, RSJD Surakarta, Biro Kesejahteraan Rakyat, Balkesmas Provinsi, Balkesmas Pati, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPR BKK Jawa Tengah, RS Panti Wiloso, RSJD Amino Gondohutomo, RSJD Soedjarwadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pembangunan di desa dilaksanakan dengan konsep Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa lembaga

kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Untuk memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, dan PDTT dengan gambaran sebagai berikut.

**Tabel 2.199.**
**Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2017-2022**

| Status Desa | Jumlah (desa) s.d. Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sangat tertinggal | 52 | 6 | 2 | - | - |
| Tertinggal | 1.444 | 528 | 262 | 147 | 66 |
| Berkembang | 5.203 | 5.582 | 5.565 | 5.168 | 4331 |
| Maju | 1.038 | 1.576 | 1.841 | 2.295 | 3006 |
| Mandiri | 72 | 117 | 140 | 199 | 406 |
| **Total Desa Terverifikasi** | **7.809** | **7.809** | **7.809** | **7.809** | **7.809** |

*Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Dari data tersebut, pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi status desa sangat tertinggal. Pada tahun 2022, desa dengan status "tertinggal" dan "berkembang" berkurang menjadi 66 desa dan 4331 desa, sementara itu, desa dengan status "maju" dan "mandiri" mengalami peningkatan sejumlah 3006 desa dan 406 desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan desa mengalami peningatan ditandai dengan peningkatan jumlah desa "maju" dan "mandiri". Verifikasi terhadap status kemandirian desa mencakup beberapa indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan lingkungan (ekologi).

Selanjutnya salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dan desa di Jawa Tengah adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa meliputi BUMDes, Pasar Desa, UP2K-PKK dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. Perkembangan lembaga ekonomi desa di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.200.**
**Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah Tahun 2017-2022**

| No | Jenis Lembaga Ekonomi Desa | Jumlah (unit) s.d. Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | BUMDesa | 2.511 | 4.750 | 5.539 | 6.776 | 7.189 |
| 2 | Pasar desa | 1.369 | 1.349 | 1.671 | 1.671 | 1.671 |
| 3 | UED-SP | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | n/a |
| 3 | UP2K-PKK | 22.326 | 22.326 | 22.326 | 22.326 | n/a |

*Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022 perkembangan lembaga ekonomi masyarakat khususnya BUMDesa meningkat signifikan dari 2.511 unit di tahun 2018 menjadi 7.189 unit di tahun 2022. Untuk melihat perkembangan BUMDes berdasarkan Klasifikasi pada tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.201.**
**Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2022**

| NO | KABUPATEN | JML DS | PENILAIAN BUMDES 2022 | | | | | KETERANGAN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DASAR | TUMBUH | BERKEMBANG | MAJU | JUMLAH | *2022 BARU* | *PERTUMBUHAN (%)* | *BUMDES BERBADAN* |
| 1 | Banjarnegara | 266 | 138 | 114 | 5 | 0 | 257 | 86 | 33,46 | 86 |
| 2 | Banyumas | 301 | 91 | 171 | 26 | 11 | 299 | 0 | 0,00 | 63 |
| 3 | Batang | 239 | 132 | 67 | 8 | 1 | 208 | 0 | 0,00 | 11 |
| 4 | Blora | 271 | 147 | 107 | 8 | 1 | 263 | 18 | 6,84 | 10 |
| 5 | Boyolali | 261 | 66 | 112 | 21 | 7 | 206 | 6 | 2,91 | 11 |
| 6 | Brebes | 292 | 115 | 161 | 15 | 1 | 292 | 0 | 0,00 | 20 |
| 7 | Cilacap | 269 | 59 | 179 | 27 | 4 | 269 | 0 | 0,00 | 140 |
| 8 | Demak | 243 | 99 | 94 | 9 | 2 | 204 | 19 | 9,31 | 35 |
| 9 | Grobogan | 273 | 97 | 156 | 16 | 4 | 273 | 0 | 0,00 | 69 |
| 10 | Jepara | 184 | 69 | 96 | 17 | 2 | 184 | 0 | 0,00 | 18 |
| 11 | Karanganyar | 162 | 83 | 70 | 6 | 1 | 160 | 6 | 3,75 | 46 |
| 12 | Kebumen | 449 | 78 | 275 | 44 | 5 | 402 | 0 | 0,00 | 56 |
| 13 | Kendal | 266 | 131 | 105 | 5 | 1 | 242 | 20 | 8,26 | 14 |
| 14 | Klaten | 391 | 142 | 201 | 31 | 17 | 391 | 11 | 2,81 | 15 |
| 15 | Kudus | 123 | 29 | 24 | 3 | 2 | 58 | 13 | 22,41 | 29 |
| 16 | Magelang | 367 | 121 | 189 | 26 | 10 | 346 | 13 | 3,76 | 26 |
| 17 | Pati | 401 | 215 | 180 | 4 | 2 | 401 | 0 | 0,00 | 28 |
| 18 | Pekalongan | 272 | 122 | 90 | 7 | 4 | 223 | 32 | 14,35 | 8 |
| 19 | Pemalang | 211 | 86 | 103 | 18 | 4 | 211 | 0 | 0,00 | 10 |
| 20 | Purbalingga | 224 | 67 | 109 | 35 | 7 | 218 | 16 | 7,34 | 42 |
| 21 | Purworejo | 469 | 118 | 304 | 29 | 6 | 457 | 40 | 8,75 | 73 |
| 22 | Rembang | 287 | 119 | 106 | 19 | 4 | 248 | 22 | 8,87 | 8 |
| 23 | Semarang | 208 | 59 | 97 | 28 | 9 | 193 | 19 | 9,84 | 34 |
| 24 | Sragen | 196 | 100 | 88 | 6 | 0 | 194 | 2 | 1,03 | 51 |
| 25 | Sukoharjo | 150 | 39 | 82 | 5 | 5 | 131 | 6 | 4,58 | 45 |
| 26 | Tegal | 281 | 63 | 97 | 18 | 4 | 182 | 0 | 0,00 | 125 |
| 27 | Temanggung | 266 | 61 | 156 | 37 | 3 | 257 | 52 | 20,23 | 38 |
| 28 | Wonogiri | 251 | 97 | 122 | 6 | 0 | 225 | 0 | 0,00 | 118 |
| 29 | Wonosobo | 236 | 85 | 95 | 11 | 4 | 195 | 32 | 16,41 | 13 |
| | **JUMLAH** | **7.809** | **2.828** | **3.750** | **490** | **121** | **7.189** | **413** | **5,74** | **1.242** |

*Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, April 2022*

Berdasarkan data Penilaian Klasifikasi BUMDesa, dari 7.809 Desa di Jawa Tengah di tahun 2022 BUMDesa dengan kategori Maju sejumlah 121 unit (1,55 persen) dan kategori berkembang 490 unit (4,73 persen), sedangkan BUMDesa dengan kategori Tumbuh sejumlah 3.750 unit (48,02 persen) dan kategori dasar sejumlah 2.828 unit (36,21 persen). Kondisi tersebut cenderung disebabkan karena sebagian besar pembentukan BUMDesa belum didahului dengan proses

identifikasi unit usaha yang sesuai dengan potensi di desa, permodalan yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah serta kurangnya pemahaman kelembagaan BUMDesa, keberpihakan pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDesa masih belum optimal, unit usaha yang dikembangkan belum melakukan jejaring usaha, produk unggulan belum mampu menembus pasar yang luas, serta kualitas SDM pengelola BUMDesa yang masih kurang.

Pembangunan di desa dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan perdesaan, yang merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayananan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang sampai dengan tahun 2022 telah terbentuk 120 kawasan perdesaan. 120 kawasan perdesaan tersebut dikembangkan melalui potensi tematik masing-masing kawasan yang berbeda-beda. Tema pengembangannya diantaranya adalah pertanian, wisata, perkebunan, perikanan, peternakan, dan industri kecil.

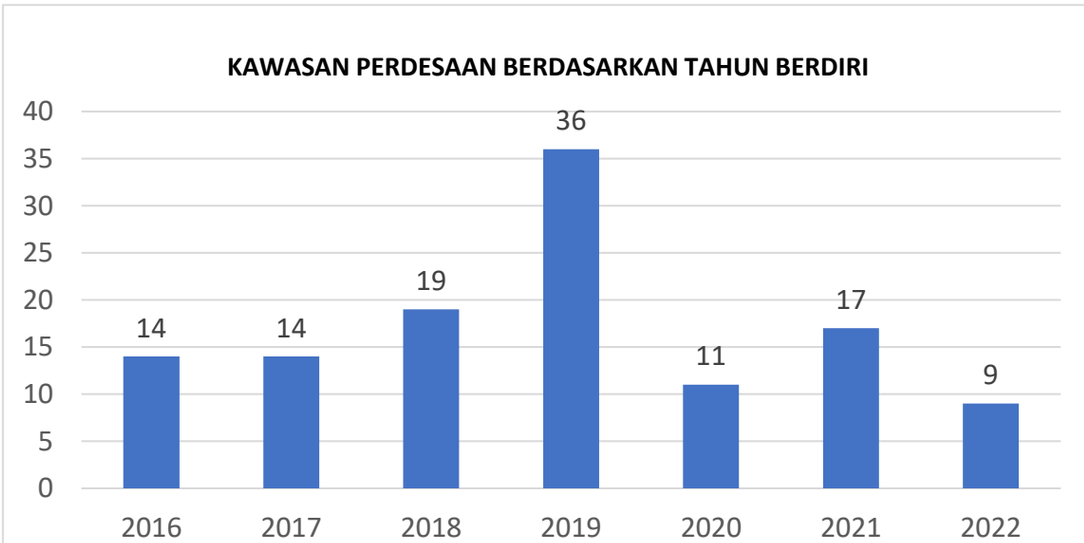


*Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, April 2022*

**Gambar 2.113.**
**Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2022**

120 kawasan perdesaan tersebut tersebar di seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Meski begitu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk kawasan perdesaan yang menjadi priotitas provinsi agar selanjutnya dapat menjadi fokus lokasi intervensi pengembangan desa oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan dengan adanya prioritas tersebut, maka dapat meningkatkan kualitas kawasan perdesaan melalui intervensi yang diberikan dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dan berdampak pada pengurangan kemiskinan di perdesaan.

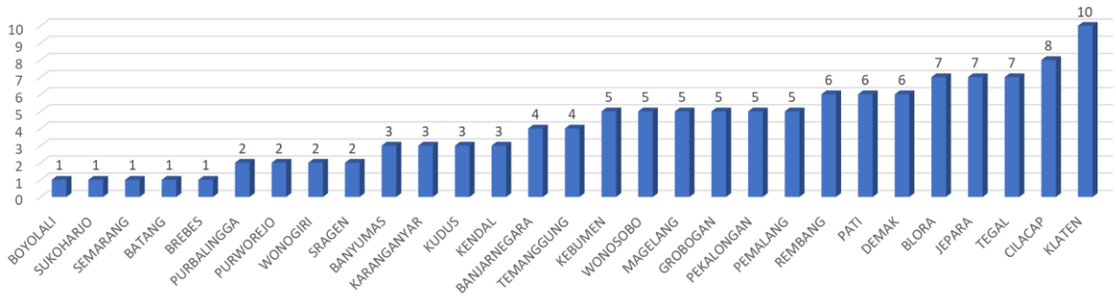


*Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, April 2022*

**Gambar 2.114.**
**Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2021**

Walaupun dari sisi kuantitas meningkat, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain 1) Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap regulasi pembangunan kawasan perdesaan; 2) Belum sinerginya pembangunan kawasan perdesaan baik di Provinsi maupun di Kabupaten; serta 3) Masih lemahnya komitmen pelaku dalam pembangunan.

.

### 2.6.9 Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Kinerja penyelenggaran urusan Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 bidang program dan 7 indikator kinerja. Pada Tahun 2020 realisasi capaian kinerja perencanaan persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) pada lingkup bidang perekonomian, bidang pemerintahan dan sosial budaya, infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada masing – masing bidang mencapai target 90 persen dan untuk Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan pada Tahun 2020 juga sebesar 90 persen. Sehingga indikator urusan Perencanaan sebanyak 7 indikator dengan keseluruhan indikator berstatus telah tercapai.

### 2.6.10 Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada tercapainya terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan terwujudnya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka mencegah penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara responsif (*quick response*). Mendasarkan hasil evaluasi paruh waktu RPJMD dan Renstra PD, kinerja bidang pengawasan Provinsi Jawa Tengah

selama kurun waktu tahun 2018-2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.202.**
**Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2018-2022**

| No. | Kinerja Pengawasan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Tingkat Maturitas SPIP | Nilai 3,023 | Nilai 2,85 | n/a | 3,115 | 3,267 |
| 2. | Tingkat Kapabilitas APIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |

*Sumber: Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Hasil penilaian maturitas SPIP yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2019 mengalami penurunan yang disebabkan perubahan metodologi penilaian. Sedangkan tahun 2020, tidak dilakukan *quality assurance* oleh BPKP serta terdapat perubahan pedoman aplikasi SPIP online, sehingga berakibat tidak ada penilaian maturitas SPIP tahun 2020 yang telah berjalan dan akan dilanjutkan pada tahun 2021. Sedangkan nilai maturitas SPIP pada tahun 2021 sebesar 3,115 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,043. Hal ini disebabkan karena belum menerapkan manajemen resiko sebagai indikator unit kerja. Namun pada Tahun 2022 nilai maturitas SPIP kembali mengalami peninkatan dari 2021 sebesar 3,115 menjadi 3,267. Namun apabila dilihat trend lima tahun, kinerja pengawasan cenderung meningkat yang artinya kebijakan pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik.

Sesuai dengan hasil reviu atas *quality assurance* Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah terhadap penilaian mandiri kapabilitas APIP, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai dengan 2021 Kapabilitas APIP sudah mencapai Level 3 penuh. Ini artinya telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu terwujudnya peran APIP yang efektif baik dari sisi *quality assurance* maupun *consulting partner*.

### 2.6.11 Pertanahan

Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN), lingkup bidang pertanahan merupakan pendukung kegiatan pembangunan fisik dalam hal mengkoordinasikan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan keluaran yaitu ijin penetapan lokasi (penlok) yang bertujuan agar tanah masyarakat yang terkena dampak pembangunan dilindungi secara hukum sehingga tidak dapat dipermainkan makelar tanah dan mendapat ganti untung yang layak dari pemerintah. Pada Tahun 2022 terdapat, penetapan lokasi aktif sebanyak 14 ijin yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.203.**
**Penetapan lokasi aktif Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah Tahun 2022**

| NO | PENLOK | JUMLAH BIDANG | LUAS TANAH ($m^2$) | No. / TANGGAL TERBIT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Penetapan Lokasi Pengadaaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen Di Kab. Temanggung dan Kota Magelang | 147 | 175.800 | 590/12 14 April 2022 |
| 2. | Penetapan Lokasi Pengadaaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen Di Kab. Magelang | 6.849 | 5.792.300 | 590/13 20 April 2022 |
| 3. | Penetapan Lokasi Pengadaaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen Di Kab. Semarang | 2.307 | 3.428.900 | 590/14 21 April 2022 |
| 4. | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Bagi Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi 2 di Kabupaten Demak | 411 | 900 | 590/20 12 Juli 2022 |
| 5. | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Industri Cilacap di Kabupaten Cilacap | 493 | 821.700 | 590/25 5 Agustus 2022 |
| 6. | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 Section 2 (Ampel – Pedan) di Provinsi Jawa Tengah | 271 | 95.400 | 590/33 7 September 2022 |
| 7. | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso di Kabupaten Wonogiri | 850 | 379.300 | 590/43 20 Oktober 2022 |
| 8. | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar | 531 | 1.269.700 | 590/44 20 Oktober 2022 |
| 9. | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Magelang | 183 | 125.900 | 590/45 20 Oktober 2022 |
| 10. | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Tingal di Kabupaten Temanggung | 385 | 131.500 | 590/55 15 Desember 2022 |
| 11. | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Randugunting di Kabupaten Blora | 6 | 14.600 | 590/52 28 November 2022 |
| | **TOTAL** | **± 12.433** | **± 12.236.000** | |

*Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*

**Tabel 2.204.**

**Capaian Penerbitan Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**

| No | Uraian | Tahun | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Pemantauan Penetapan Lokasi | - | - | - | 400 | 526 | 2.217 | 898 |
| 2 | Penetapan Lokasi | - | - | 7.414 | 2.237 | 5928 | 2.811 | 12.433 |

*Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*

**Tabel 2.205.**

**Capaian Kinerja urusan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022**

| NO | URAIAN | REALISASI | | | | TOTAL (S.D AKHIR TAHUN 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1. | Penetapan Lokasi | 2.237 Bidang (242,9 Ha) | 5.928 Bidang (493,4437 Ha) | 2.811 Bidang (± 858,8916 Ha) | + 12.433 Bidang (1.223,60 Ha) | 23.409 Bidang (2.818,835 Ha) |
| 2. | Reforma Agraria | | | | | |
| | a). Sertifikasi LP2B | 100 Bidang | 200 Bidang | 350 Bidang | 150 Bidang | 800 Bidang |
| | b). Sertifikasi Tanah Kas Desa (TKD) | 15 Bidang | 15 Bidang | 0 | 63 Bidang | 93 Bidang |
| | c). Inventarisasi Tanah HP dan HGU | 20 Bidang | 20 Bidang | 10 Bidang | 30 Bidang | 80 Bidang |
| | d). Pelatihan untuk Akses Reforma Agraria | 107 Orang | 100 Orang | 260 Orang | 350 Orang | 817 Orang |

*Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Dalam rangka mempertahankan lahan dikawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan insentif berupa sertipikasi gratis tanah yang yang masuk dalam kawasan LP2B. Melalui program ini diharapkan masyarakat berkomitmen menjaga fungsi lahan serta status lahan yang memiliki kepastian hukum (bersertipikat). Namun hal ini masih perlu dukungan program lainnya yang dapat memberikan insentif dan disinsentif untuk lebih meningkatkan keuntungan bagi masyarakat petani yang memiliki lahan dikawasan LP2B. Capaian stimulasi pembuatan sertipikat lahan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 2.206.**

**Capaian Sertifikasi Lahan LP2B Di Jawa TengahTahun 2022**

| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Jumlah Sertifikat | Jumlah Bidang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cilacap | Sampang | Paberasan | 150 | 50 |
| 2 | Blora | Kunduran | Botoreco | | 50 |
| 3 | Semarang | Bringin | Gogodalem | | 50 |
| **Total** | | | | **150** | |

*Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Untuk mendukung Program Prioritas Nasional yaitu Reforma Agraria, bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mendapatkan mandat sebagai sekretariat GTRA Provinsi yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Reforma Agraria tingkat provinsi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain adalah menginventarisasi potensi penataan aset dan mengkoordinasi serta melakukan fasilitasi penataan akses bagi penerima program Reforma Agraria. Penataan akses yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kebutuhan subyek program reforma agraria antara lain seperti pelatihan kepada kelompok tani dikawasan LP2B dan pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sampah menjadi pupuk organik. Capaian pelaksanaan program Reforma Agraria yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 2.206.

**Tabel 2.207.**

**Capaian Reforma Agraria Di Jawa Tengah Tahun 2022**

| NO | KABUPATEN/ KOTA | KECAMATAN | DESA | KEBUTUHAN AKSES | JUMLAH PENERIMA MANFAAT | BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Tegal | Kecamatan Balapulang | Desa Balapulang Kulon | Sebagian besar masyarakat Desa Balapulang Kulon dengan pekerjaan pokok adalah petani, namun belum didukung dengan irigasi teknis dan merupakan sawah tadah hujan dengan irigasi non teknis, sehingga yang diperlukan adalah pembangunan jaringan irigasi, dan pembangunan embung desa | 50 KK | Pelatihan "Pengelolaan Lahan Pertanian Tadah Hujan" dan "Penanggulangan Hama Wereng" |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | KECAMATAN | DESA | KEBUTUHAN AKSES | JUMLAH PENERIMA MANFAAT | BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (namun sulit terealisir karena jauh dari sumber mata air) atau pun dengan pembuatan sumur bor. Dalam rangka mengatasi atau memperbaiki jaringan irigasi sawah tersebut Pemerintah Desa Balapulang Kulon telah menginisiasi kerjasama dengan Desa sekitar dan Instansi terkait bail Kabupaten maupun Provinsi, namun sampai saat ini belum terealisir, hal ini menyebabkan 50% nya lahan sawah gagal terutama yang letaknya jauh dari sumber air. Selain itu menurut warga penggarap hama yang serig menyerang lahan pertanian adalahan hama wereng. | | |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | KECAMATAN | DESA | KEBUTUHAN AKSES | JUMLAH PENERIMA MANFAAT | BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kabupaten Sragen | Kecamatan Sambirejo | Desa Jetis | Permasalahan yang dihadapi di Desa Jetis yaitu terkait masalah pupuk dikarenakan pembelian pupuk sekarang di batasi sehingga tiddak bias mencakupi luas lahan para petani yang mengaki batkan hasil pertanian yang kurang optimal, sebagian kecil warga masyarakat Desa Jetis berinisiatif untuk membuat pengolahan pupuk kandang organik namun harapannya sebagian besar masyarakat desa dapat menerapkan pembuatan pupuk organik untuk membantu memenuhi kebutuhan pupuk warga sendiri. Selain itu, Pemdes Jetis juga mendapatkan keluhan dari petani terkait penyakit tanaman yang menyerang tanaman mereka seperti busuk leher/jamur pada tanaman | 50 KK | Pelatihan Penanganan Busuk Leher Pada Tanaman Padi dan Pembuatan Pupuk Organik |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | KECAMATAN | DESA | KEBUTUHAN AKSES | JUMLAH PENERIMA MANFAAT | BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dan rata – rata pada tanaman padi | | |
| 3 | Kabupaten Grobogan | Kecamatan Tegowanu | Desa Tegowanu Wetan | Permasalahan yang sering di hadapi oleh petani di antaranya kurangnya pasokan pupuk bagi petani meskipun sudah ada beberapa kelompok tani yang sekarang sudah mengembangkan pupuk organik dari sampah daun – daun kering akan tetapi kelompok tani yang sudah berinisiatif membuat pupuk organik namun masih sebagian kecil. Pemerintah Desa Tegowanu Wetan mempunyai rencana kedepannya desa mereka akan di jadikan obyek wisata terkait tanaman organik. Pemerintah Desa Tegowanu Wetan juga | 50 KK | Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Guna Mendukung Pertanian Organik |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | KECAMATAN | DESA | KEBUTUHAN AKSES | JUMLAH PENERIMA MANFAAT | BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | mengharapkan selain pengolahan sampak organik menjadi pupuk di harpakan juga warga masyarakat bias mengolah sampah rumah tangga guna di jadikan obat, pupuk maupun hal hal lainnya, selain itu karena konsep kedepannya akan dijadikan wisata organik pemerintah desa tegowanu wetan masih terkendala terkait serifikasi organiknya | | |
| 4 | Kabupaten Pati | Kecamatan Gabus | Desa Wuwur | Hasil utama pertanian di Desa Wuwur yaitu padi. Terkait permasalahan yang terdapat di Desa Wuwur yaitu hama tikus serta hama burung. Sementara ini penanganan masih menggunakan setrum/listrik untuk hama tikus serta hama burung hanya secara manual para petani yaitu di usir oleh tangan saja. Dalam hal ini, masyarakat Desa Wuwur | 50 KK | Kegiatan Akses Reform Pelatihan Pemanfatan Burung Hantu (Tyto Alba) sebagai Pengendali Hama Tikus dengan pokok bahsan tata cara pemeliharaan dan pemanfatan burung hantu untuk penanggulangan hama tikus serta penanganan hama tikus untuk meningkatkan perekonomian desa |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | KECAMATAN | DESA | KEBUTUHAN AKSES | JUMLAH PENERIMA MANFAAT | BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | membutuhkan penanganan yang efektif terkait permasalahan hama tikus dan hama burung tersebut. | | |
| 5 | Kabupaten Wonosobo | Kecamatan Kejajar | Desa Sigedang | Potensi yang berada di Desa Sigedang merupakan tanaman kentang, namun selama ini para warga menanam kentang dengan bibt yang di ekspor dari wilayah lain (Jawa Barat). Sejauh ini di Desa Sigedang yaitu belum terlalu banyak warga masyarakat maupun kelompok tani yang berminat untuk melakukan pembuatan bibit kentang sehingga produksi pembibitan kentang masih rendah, padahal telah dilakukan sertifikasi pembibitan kentang. Sehingga secara legalitas bibit kentang sudah dapat di komersilkan maupun di pakai sendiri. | 50 KK | Peningkatan Budidaya Bibit Kentang dan Pengembalian Fungsi Lahan Secara Organik |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | KECAMATAN | DESA | KEBUTUHAN AKSES | JUMLAH PENERIMA MANFAAT | BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kabupaten Sragen | Kecamatan Sambungmacan | Desa Sambung Macan | Desa Sambungmacan memiliki danau kecil yang ditengahnya terdapat pulau kecil, yang merupakan potensi untuk menjadi wisata desa. Dan harapan kedepannya di tengah pulau kecil di danau tersebut akan dikembangkan untuk wisata pertanian organik di Desa Sambungmacan | 50 KK | Pelatihan Pertanian Organik untuk Mendukung Wisata Desa |
| 7 | Kabupaten Cilacap | Kecamatan Maos | Desa Mernek | Mernek telah memiliki 4 pilar MERNEK JENEK yaitu lingkungan lestari, pertanian, perikanan, & pertenakan melimpah, kemandirian ekonomi serta desa aman dan kondusif. Potensi Desa Mernek yang salah satunya yaitu Gapoktan yang aktif memiliki kegiatan rutin dan menjadi salah satu factor untuk mengembangkan wisata Desa organik di Desa Mernek | 50 KK | Pelatihan Pengelolaan Lahan Organik Menuju Wisata Desa |

*Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah , 2022*

## 2.7 Kondusivitas Daerah

Salah satu prasyarat keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari apakah daerah tersebut kondusif, sehingga peran pemerintah untuk dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat menjadi mutlak. Mewujudkan kemanan perlu juga menciptakan kondisi yang teratur, tertib sesuai norma yang berlaku dan juga yang ada di masyarakat. Dengan perwujudan tersebut, maka potensi konflik akan secara simultan dapat ditekan dan stabilitas daerah terjaga. Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2020 saat adanya pandemi *Covid-19* tercatat 113 kasus kejadian konflik. Dilihat dari jumlah kasus yang terjadi hingga tahun 2022, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir konflik masih memerlukan upaya yang cukup keras, karena di tahun 2018 dapat diminimalisir hingga hanya terjadi 18 kasus saja.

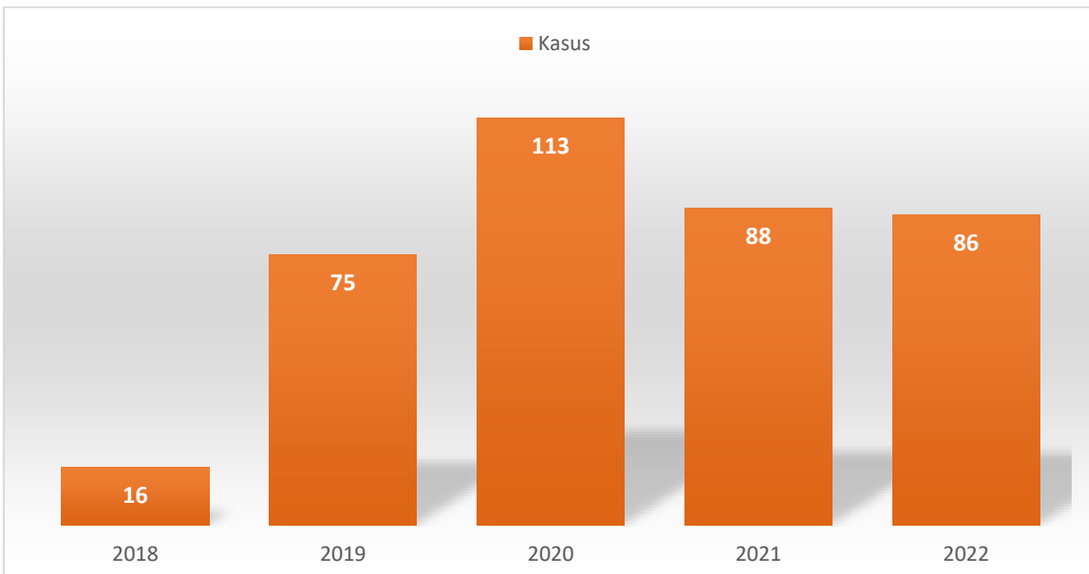


*Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah*

**Gambar 2.115.**
**Rekap Kejadian Konflik di Provinsi Jawa Tengah**

Potensi radikalisme di Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menunjukkan nilai 6,8% atau masih diatas rata-rata nasional. Potensi radikalisme lebih tinggi pada perempuan, generasi muda, dan mereka yang aktif diinternet. Masih menjadi satu kesatuan riset yang dilakukan oleh BNPT, Indeks kebhinekaan masyarkat di Jawa Tengah adalah 89,6% dengan dimensi sikap masih tergolong rendah jika dibanding dengan dimensi pemahaman, hal ini dikarenakan kelompok masyarakat yang tidak dapat mengakses internet dan sosial media, termasuk pada kalangan rural. Melihat pentingnya akses internet dalam meningkatkan internalisasi kebhinekaan, perlu juga disiapkan tentang literasi digital yang ada di masyarakat Jawa Tengah. Hal tersebut karena pada mereka yang aktif diinternet memiliki potensi radikalisme yang lebih tinggi.

Hal lain yang dapat merepresentasikan kondisi umum dalam menjaga kondusivitas wilayah adalah dengan melihat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB. Provinsi Jawa Tengah pada IKUB mengalami penurunan dimana skors tahun 2021 sebesar 75,12, sedangkan di tahun 2022 sebesar 74,28. Selain itu pada penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dengan pengukuran terbaru memperoleh nilai 81,15. Aspek kesetaraan pada penilaian IDI Provinsi Jawa Tengah dikategorikan sedang, dimana pada aspek tersebut memperlihatkan kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dalam

mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, serta anti monopoli sumber daya ekonomi.

Data unjuk rasa pasca terjadinya pandemi *covid*-19 memperlihatkan adanya penurunan, namun terkait dengan unjuk rasa berdasarkan tuntutan yang dibawa, dimana tuntutkan yang ada dalam kategori sosbud masih tergolong tinggi.

**Tabel 2.208.**
**Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022**

| No | Tuntutan | Tahun | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Ideologi | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | |
| 2 | Politik | 7 | 25 | 9 | 15 | n/a | |
| 3 | Ekonomi | 65 | 56 | 87 | 52 | n/a | |
| 4 | Sosbud | 200 | 181 | 234 | 109 | n/a | |
| 5 | Kamtibmas | 9 | 17 | 13 | 13 | n/a | |
| 6 | Pendidikan | 5 | 4 | 7 | 2 | n/a | |
| 7 | Kesehatan | 1 | 5 | 7 | 8 | n/a | |
| | Jumlah | 287 | 288 | 357 | 199 | n/a | |

*Sumber : Polda Jawa Tengah, 2022*

Melihat kondisi existing Provinsi Jawa Tengah terkait dengan kondusivitas wilayah, cipta kondisi secara optimal terus ditingkatkan guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah menegakan norma yang berlaku, tidak terkecuali norma hukum. Penegakan norma hukum adalah ditujukan untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan kepada seluruh masayarakat melalui penyelesaian pelanggar produk hukum daerah.

**Tabel 2.209.**
**Penyelesaian Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

| No | Tahun | Jumlah Pelanggar | Jumlah Pelanggar yang dibina | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 1.000 | 1.000 | 100 |
| 2 | 2019 | 1095 | 1095 | 100 |
| 3 | 2020 | 293 | 293 | 100 |
| 4 | 2021 | 435 | 435 | 100 |
| 5 | 2022 | 250 | 250 | 100 |

*Sumber; Satpol PP Provinsi Jawa Tengah*

Melihat data yang ada terlihat adanya penurunan intensitas karena adanya pandemi covid-19 yang terjadi di tahun 2020. Namun jika dilihat berdasarkan tabel tersebut kinerja penyelesaian pelanggaran Produk hukum daerah tahun 2017-2021 sudah sangat baik dengan persentase 100 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap pelanggaran produk hukum daerah yang terdata dapat diselesaikan melalui cara persuasif dan represif. Namun apabila terindikasi adanya sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana, maka dapat ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Hingga saat ini tercatat 147 Perda yang masih aktif, dengan Perda yang memiliki sanksi hukum (sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana)

sebanyak 65 Perda. Beberapa Perda tidak dapat ditegakkan karena Instansi Teknis sebagai pengampu Perda tidak dapat menjalankan fungsinya dalam sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian karena keterbatasan sumber daya. Disamping itu, informan yang ada tidak dapat mencakup keseluruhan luas wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu adanya alternatif lain untuk memiliki informan di beberapa titik yang terindikasi rawan terjadinya pelanggaran yang menganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Salah satu alternatif yang ada adalah melakukan mobilisasi linmas yang ada di daerah. Persoalan yang perlu menjadi perhatian khusus terkait dengan alternatif tersebut adalah menurunnya rasio linmas yang ada.

**Tabel 2.210.**
**Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

| No | Tahun | Jumlah Linmas | Jumlah Penduduk | Rasio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 311.746 | 34.257.865 | 90,99 |
| 2 | 2019 | 230.782 | 34.490.835 | 66,91 |
| 3 | 2020 | 239.430 | 36.516.035 | 66,57 |
| 4 | 2021 | 240.958 | 36.516.035 | 65,98 |
| 5 | 2022 | n/a | n/a | n/a |

*Sumber : Sat. Polisi Pamong Praja Prov. Jateng dan BPS Jateng, 2022*

Berdasarkan tabel tersebut, rasio jumlah linmas terhadap jumlah penduduk Jawa Tengah semakin menurun karena rendahnya minat masyarakat menjadi anggota linmas, banyak anggota linmas yang meninggal dunia, dan adanya perpindahan anggota linmas keluar provinsi.

## 2.8 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun 2022

Kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2021 dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2021 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Permend Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar agri Nomor 86 Tahun 2017.

Evaluasi mendasarkan pada realisasi kinerja RPJMD di tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 dapat digambarkan dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKPPD) sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.211.**
**Rekapitulasi Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023**

| Indikator | Jumlah Indika-tor | Tercapai ≥ 100% Target Akhir RPJMD | | Akan Tercapai 99% ≤ 60% Target Akhir RPJMD | | Perlu Upaya Keras < 60% Target Akhir RPJMD | | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| **I K U** | 13 | 4 | 30,77 | 8 | 61,54 | 1 | 7,69 | 0 | 0 |
| **I K P P D** | 194 | 91 | 46,91 | 85 | 43,81 | 18 | 9,28 | 0 | 0 |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2022 (hasil analisis)*

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, untuk Indikator Kinerja Utama dari 13 target indikator kinerja utama daerah terdapat 4 indikator tercapai, 8 indikator akan tercapai, 1 Indikator berstatus perlu upaya keras yaitu pertumbuhan ekonomi. dampak akibat pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi 2 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah namun pada triwulan III 2021 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara kumulatif membaik dan tumbuh dibandingkan dengan kumulatif sampai dengan triwulan III 2021 dimana semua lapangan usaha selama tiga triwulan mencatat pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 194 target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibagi dalam 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing terdapat 91 indikator tercapai, 85 indikator akan tercapai, 18 indikator perlu upaya keras.

## 2.9. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan meliputi permasalahan pembangunan daerah makro yang akan diintervensi melalui cross cutting strategy dengan mendasarkan pada hasil analisis gambaran aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing, serta permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan Jawa Tengah dengan mendasarkan gambaran aspek pelayanan umum. Berdasarkan data yang ditampilkan dan hasil Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 maka permasalahan yang perlu untuk diselesaikan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### 2.9.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah ini sifatnya permasalahan makro, dan merupakan permasalahan lintas sektor serta berkaitan dengan isu strategis daerah yang juga perlu menjadi perhatian perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah untuk diselesaikan pada Tahun 2024. Permasalahan pembangunan daerah Jawa Tengah mendasarkan pada hasil analisis gambaran aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing untuk Tahun 2024 sebagai berikut.

1. **Masih cukup tingginya angka kemiskinan.**

   Masih cukup tingginya kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada September 2022 sebesar 10,98 persen, naik 0,05 persen dari bulan Maret 2022, namun apabila dibandingan

dengan periode September 2021 yang sebesar 11,25 persen menurun 0,27 persen. Namun demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang sebesar 9,57 persen. Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Jawa Tengah, juga termasuk ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin.

Karakteristik penduduk miskin di Jawa Tengah sebagian besar antara lain merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan sampai dengan SD/SLTP, penduduk yang tidak bekerja atau bekerja di sektor informal, pengeluaran penduduk lebih banyak untuk makanan, dan penghasilan utamanya bersumber dari sektor pertanian.

Selain melihat karakteristik umum, kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga dari permasalahan sumber daya manusia seperti kurangnya akses pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain permasalahan infrastruktur dasar serta permasalahan aksesbilitas di daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi masih menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kondisi geografis, setiap wilayah akan memiliki karakteristik yang ditentukan oleh letak geografis, kondisi topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, pengguaan lahan hingga tingkat kerawanan terhadap bencana. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap karakteristik potensi sumber daya alam yang menjadi salah satu modal dalam kegiatan perekonomian masyarakat.

2. **Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka.**

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat peran sumber daya manusia sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan. Di sisi lain tantangan bonus demografi dan perubahan industri di era digital atau revolusi industri 4.0 menuntut perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Tengah. Hingga saat ini kualitas sumber daya manusia Jawa Tengah dinilai belum memadai yang ditunjukkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah nasional meskipun termasuk dalam kategori tinggi.

Kualitas sumber daya manusia juga terkait dengan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan ukuran usia harapan hidup. Kualitas usia harapan hidup berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penguatan sistem kesehatan. Selain derajat kesehatan, kebugaran menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia.

Peran perempuan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia Jawa Tengah juga memegang peranan penting terutama sebagai pendidik awal bagi anak dalam proses pembentukan manusia untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak sejak dini. Meskipun demikian pemberdayaan perempuan Jawa Tengah masih perlu perhatian yang ditunjukkan dari beberapa variabel indeks pemberdayaan gender Jawa Tengah yang masih rendah. Tantangan dalam pembangunan perempuan Jawa Tengah yaitu berupa kemauan atau

motivasi, pandangan atau budaya patriarki di masyarakat terhadap perempuan.

Satu hal yang juga menjadi penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Jawa Tengah adalah bagaimana membentuk karakter sumber daya manusia yang tercermin dari internalisasi nilai budaya, agama, dan sikap mental masyarakat Jawa Tengah. Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa kontribusi budaya dalam pembangunan di Jawa Tengah menurun yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan Jawa Tengah tahun 2021 yang semakin menurun dari tahun 2018.

Selain itu kualitas sumber daya manusia Jawa Tengah juga dilihat dari aspek tenaga kerja dimana daya saing tenaga kerja Jawa Tengah belum optimal. Permasalahan ini dapat dilihat dari karakteristik penduduk bekerja di Jawa Tengah yang didominasi oleh lulusan SD sebanyak 43,09 persen di tahun 2021. Sementara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang sebesar 5,95 persen justru didominasi oleh penduduk usia kerja lulusan SMK, dan terendah adalah lulusan SD. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian, karena persaingan tenaga kerja di era globalisasi yang semakin kompetitif dan menuntut kompetensi tenaga kerja yang semakin tinggi agar kesejahteraan penduduk Jawa Tengah semakin meningkat.

3. **Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur.**

   Perekonomian Jawa Tengah masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 sampai dengan triwulan III meningkat positif jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021, yaitu sebesar 5,36 persen (*c to c*) dimana tahun 2021 sebesar 2,63 persen (*c to c*). Perekonomian Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan sektor-sektor unggulan Jawa Tengah (pertanian, industri pengolahan, perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pariwisata), kemudahan investasi, pengendalian inflasi, serta infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang jasa. Tantangan kedepan adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan antar masyarakat dan antar wilayah yang ditunjukan dari Rasio Gini Jawa Tengah. Tahun 2022, Rasio Gini Jawa Tengah sebesar 0,366 menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 0,368.

4. **Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana.**

   Tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Namun disisi lain ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jawa Tengah semakin menurun. Tekanan lingkungan hidup di Jawa Tengah ditunjukkan dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang di tahun 2021 sebesar 67,48 masuk dalam kategori sedang. Selain itu dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan di Jawa Tengah terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara, dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksikan.

Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada terjadinya bencana yang juga tidak dapat diprediksikan apalagi Jawa Tengah sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan Indeks Risiko Bencana Jawa Tengah yang sebesar 125,73 di tahun 2021.

5. **Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi.**

   Dalam rangka menjawab tantangan global, perlu dioptimalkan implementasi reformasi birokrasi antara lain percepatan pelayanan publik yang tepat sasaran, penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kapasitas kelembagaan yang sesuai proses bisnis, kapasitas dan pola pikir sumber daya aparatur yang semakin adaptif dan terbuka, serta birokrasi yang kolaboratif, yang kesemuanya didukung dengan digitalisasi pemerintahan. Reformasi birokrasi ditunjukkan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dimana IRB Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 78,79 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 77,05. Meskipun kinerjanya semakin baik dari tahun ke tahun, namun yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi tidak hanya tentang administrasi namun lebih mendorong agar dapat menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan daerah Jawa Tengah.

6. **Masih perlunya upaya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah.**

   Kondusivitas daerah menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing sebuah daerah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang dinilai cukup kondusif yang ditunjukkan dari semakin menurunnya kejadian konflik sosial, kejadian unjuk rasa, dan lainnya yang menggambarkan kondusivitas daerah Jawa Tengah. Meskipun demikian, di tengah berbagai ancaman global, nasional, dan regional terkait dengan semakin terbukanya informasi tanpa batas (*borderless*), ancaman kemanan dan ketertiban masyarakat, dan ancaman gangguan keamanan lainnya, upaya mitigasi terhadap risiko terancamnya kondusivitas daerah Jawa Tengah ke depan.

### 2.9.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan dari hasil analisis gambaran aspek pelayanan umum yang meliputi seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk Tahun 2024 sebagai berikut.

**A. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

1. Pendidikan

   Permasalahan pokok urusan pendidikan yang masih perlu dioptimalkan ke depan adalah kualitas penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan merata di Jawa Tengah yang ditandai dengan permasalahan antara lain:

   a. Masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan;
   b. Akses pemerataan layanan pendidikan belum memadai;

c. Masih kurangnya mutu pendidikan.

2. Kesehatan

Permasalahan urusan kesehatan berkaitan dengan masih perlunya mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan permasalahan antara lain:

a. Masih tingginya penemuan penyakit menular dan tidak menular serta Kesehatan jiwa;
b. Masih ditemukannya kasus kematian ibu;
c. Masih rendahnya aksesibilitasi pelayanan Kesehatan lansia;
d. Masih tingginya angka stunting dan gizi buruk;
e. Masih belum semua fasilitas pelayanan Kesehatan primer dan rujukan melayani 9 prioritas layanan unggulan;
f. Keterbatasan sarana dan prasarana.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang masih perlu ditangani kedepan terutama terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas dan pengembangan wilayah serta pelayanan dasar bagi masyarakat meliputi:

a. Masih adanya Jalan Provinsi di Jawa Tengah yang belum memenuhi standar jalan kolektor dan masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak ringan. Selain itu terdapat titik rawan longsor pada ruas-ruas Jalan Provinsi yang memerlukan antisipasi maupun penanganan darurat atau khusus saat terjadi bencana;
b. Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi layak termasuk di dalamnya aman;
c. Belum semua bangunan gedung milik daerah dalam kondisi baik;
d. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air yang meliputi permasalahan:
   1) pemanfaatan sumber daya air antara lain masih kurangnya sarana prasarana tampungan air baku, dan banyak sarana prasarana irigasi yang rusak;
   2) pengendalian daya rusak air terutama ditunjukkan dengan adanya kerusakan sarpras sungai dan pengendali banjir;
e. Belum optimalnya ketersediaan rencana tata ruang, implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang;

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman terutama terkait dengan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat, yang meliputi:

a. Masih adanya kebutuhan rumah layak huni;
b. Masih terdapat kawasan kumuh;
c. Kurang optimalnya penyelanggaraan pelayanan dan ketersediaan PSU Permukiman;
d. Belum optimlanya penyelenggaran pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pada urusan ini terkait dengan masih belum optimalnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum terutama terkait dengan permasalahan:

a. Belum optimalnya penegakan perda serta pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
b. Masih belum semua kabupaten/kota memiliki dokumen perencanaan kebencanaan;
c. Masih terbatasnya jumlah pemasangan sistem peringatan dini (*Early Warning System*/EWS) di wilayah rawan bencana;
d. Masih kurangnya edukasi pada masyarakat tentang penanggulangan bencana;
e. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kedaruratan bencana;
f. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam perhitungan kebutuhan pasca bencana dan rehabilitasi serta rekonstruksi.

6. Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial berkaitan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang harus ditangani, yang hingga saat ini penanganannya belum optimal, ditunjukkan dari masih cukup tingginya PPKS. Permasalahan ini didukung dengan permasalahan antara lain:

a. Rendahnya penanganan PPKS;
b. Masih adanya KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang belum mendapatkan bantuan modal dan pendampingan;
c. Masih adanya panti yang kondisinya rusak.

**B. Urusan Wajib Yang Bukan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

1. Tenaga Kerja

Permasalahan utama penyelenggaraan urusan tenaga kerja di Jawa Tengah berkaitan dengan masih cukup tingginya pengangguran, dan belum optimalnya daya saing tenaga kerja, dengan beberapa permasalahan lainnya meliputi:

a. Masih tingginya penduduk usia kerja yang tidak bekerja (*Not in Employment, Education or Training*);
b. Sarana dan Prasarana pada Balai Latihan Kerja yang jauh tertinggal dibandingkan dengan kebutuhan industri saat ini;
c. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja;
d. Belum optimalnya kesejahteraan tenaga kerja;
e. Belum optimalnya hubungan industrial.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan utama urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkaitan dengan belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan pembangunan keluarga yang ditunjukkan dari permasalahan:

a. Masih adanya ketimpangan gender dalam pembangunan;
b. Masih tingginya perkawinan usia anak;
c. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Pangan

Ketahanan pangan dipengaruhi oleh tiga aspek utama yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pada aspek ketersediaan, masih terdapat beberapa komoditas pangan utama yang belum mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Adapun pada aspek keterjangkauan, beberapa komoditas bahan pangan masih mengalami fluktuasi harga. Selain itu masih terdapat kecamatan dan desa di Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori rentan pangan. Selanjutnya pada aspek pemanfaatan pangan, konsumsi pangan masyarakat belum seimbang antar kelompok pangan. Lebih lanjut kondisi dan permasalahan ketahanan pangan sebagai berikut:

a. Ketersediaan Pangan
   Secara umum komoditas pangan utama yaitu beras, jagung, dan kedelai telah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, namun masih terdapat beberapa komoditas pangan yang perlu didorong.
b. Keterjangkauan
   Kondisi keterjangkauan pangan dicerminkan berdasarkan peta kerawanan pangan, secara umum masih terdapat beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan pangan.
c. Pemanfaatan
   Berdasarkan tingkat keberagaman konsumsi pangan masyarakat, masih diperlukan dorongan pada kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan.

4. Pertanahan

Permasalahan utama urusan pertanahan adalah belum optimalnya tata kelola administrasi dan pemanfaatan pertanahan, yang diindikasikan dari beberapa permasalahan antara lain:

a. Masih terdapat konflik atau sengketa permasalahan pertanahan di Jawa Tengah;
b. Masih terdapatnya keterbatasan data yuridis dan data fisik dalam penyelesaian sengketa tanah garapan;
c. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan asset dan akses reforma agraria;
d. Masih tingginya intensitas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Tengah melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum .
e. Belum optimalnya penyelenggaraan Zonasi Nilai Tanah.

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan utama urusan lingkungan hidup adalah degradasi kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh permasalahan antara lain:

a. Masih tingginya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditandai dengan penurunan kualitas air, udara maupun lahan. Permasalahan tersebut dikarenakan masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan limbah, masih rendahnya pangawasan dan pemantauan terhadap industri penghasil limbah, serta masih rendahnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah;

b. Meningkatnya emisi GRK akibat aktivitas ekonomi dan penduduk belum diimbangi dengan capaian penurunan emisi GRK masih rendah.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pokok urusan tersebut adalah belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang ditunjukkan dengan belum optimalnya fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi kabupaten/kota, serta rendahnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kondisi yang masih perlu diupayakan untuk lebih baik dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah bagaimana mewujudkan kemandirian desa di mana hingga saat ini desa yang belum masuk dalam ketegori mandiri di Jawa Tengah masih cukup tinggi, masih perlunya inisiasi pengembangan kawasan perdesaan regional berbasis kewilayahan, serta peningkatan kelembagaan ekonomi desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tantangan utama dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah bagaimana meningkatkan keluarga yang berkualitas karena hingga saat ini kondisinya belum optimal. Permasalahan yang mempengaruhi kualitas keluarga antara lain meliputi:

a. Belum optimalnya pengendalian penduduk;
b. Masih rendahnya kepesertaan KB.

9. Perhubungan

Permasalahan utama pada urusan perhubungan adalah masih diperlukannya upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi. Permasalahan tersebut dipengaruhi beberapa hal antara lain:

a. Masih diperlukannya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Jawa Tengah untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.
b. Masih diperlukannya peningkatan keselamatan perjalanan transportasi utamanya peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan provinsi dalam mendukung pengurangan tingkat kecelakaan;
c. Masih diperlukannya peningkatan kualitas layanan angkutan umum utamanya peningkatan layanan angkutan umum dikawasan aglomerasi perkotaan dan peningkatan pelayanan disimpul transportasi serta integrasi antar moda yang secara bertahap harus dipenuhi.

10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pokok untuk urusan komunikasi dan informatika yang perlu perhatian penanganan ke depan adalah belum optimalnya digitalisasi tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah, yang meliputi permasalahan antara lain:

a. Belum optimalnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
b. Belum optimalnya implementasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tantangan dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah berkaitan dengan upaya meningkatnya perekonomian daerah.

Permasalahan utamanya adalah belum optimalnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap PDRB, yang didukung dengan permasalahan antara lain:

a. Belum optimalnya omset koperasi dan UMKM;
b. Belum optimalnya tingkat kesehatan koperasi.

12. Penanaman Modal

Permasalahan utama pada urusan penanaman modal adalah masih perlunya mendorong peningkatan realisasi penanaman modal di Jawa Tengah. Permasalahan yang masih berpengaruh terhadap permasalahan utama tersebut antara lain:

a. Dinamika regulasi investasi yang terus berubah dan tidak sinkronnya regulasi di pusat dan daerah;
b. Belum sempurnanya pelayanan perijinan melalui aplikasi *One Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA);
c. Ketersediaan lahan yang sesuai dengan tata ruang masih bermasalah di sebagian wilayah;
d. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan DIDU;
e. Ketersediaan infrastruktur pendukung penanaman modal yang belum sepenuhnya mendukung investasi;
f. Belum samanya persepsi antara masyarakat, pemerintah dan investor terhadap penanaman modal yang berakibat masih kurangnya partisipasi terhadap kehadiran penanaman modal;
g. Pertumbuhan dan persebaran penanaman modal yang belum merata di Jawa Tengah;
h. Belum optimalnya keberadaan Kawasan Industri yang masih memiliki berbagai permasalahan seperti harga sewa tanah yang mahal, kurangnya ketersediaan air baku dan energi, kurangnya komitmen pengelola KI, tidak cocoknya kondisi kawasan dengan usaha calon investor.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan utama urusan kepemudaan dan olahraga berkaitan dengan belum optimalnya pembangunan pemuda dan kebugaran masyarakat, dengan permasalahan antara lain meliputi:

a. Daya saing pemuda masih rendah;
b. Prestasi olahraga belum memadai;
c. Tingkat partisipasi olahraga masih kurang.

14. Statistik

Permasalahan utama urusan statistik adalah belum optimalnya pengelolaan data baik data sektoral maupun geospasial dan perwujudan Satu Data Pemerintahan.

15. Persandian

Permasalahan yang masih dijumpai pada urusan persandian di Jawa Tengah adalah belum optimalnya keamanan data dan informasi pemerintahan.

16. Kebudayaan

Permasalahan utama yang masih dihadapi urusan kebudayaan di Jawa Tengah ke depan adalah masih rendahnya internalisasi kebudayaan

dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan tersebut ditandai dengan beberapa permasalahan antara lain:

a. Masih rendahnya partisipasi seni dan budaya masyarakat;
b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya.

17. Perpustakaan

Permasalahan utama urusan perpustakaan adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat yang ditandai dengan masih rendahnya minat baca masyarakat.

18. Kearsipan

Permasalahan utama urusan kearsipan adalah masih belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kearsipan di Jawa Tengah yang ditandai dengan penyediaan dan pengelolaan arsip untuk akses dan informasi masyarakat belum optimal.

**C. Urusan Pilihan**

1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama urusan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah adalah belum optimalnya produksi perikanan secara berkelanjutan, kesejahteraan pelaku usaha perikanan, dan tingginya kerusakan ekosistem perikanan. Lebih lanjut permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya produksi perikanan

Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan tangkap, budidaya, dan garam. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dikarenakan sarana prasarana penangkapan yang belum memadai dan kondisi pelabuhan perikanan yang perlu pengembangan baik dari sisi fasilitas maupun tata kelolanya, sedangkan dari sisi perikanan budidaya, selain dikarenakan kondisi sarana dan prasarana, juga disebabkan oleh penurunan kualitas dan kuantitas induk. Sementara pada produksi garam, juga masih terdapat luasan tambak garam yang belum menerapkan teknologi, sehingga proses produksi garam masih tergantung cuaca. Selain itu, pada ketiganya, baik perikanan tangkap, budidaya, dan garam, masih dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan atau keterampilan SDM untuk mendukung produksi perikanan.

b. Rendahnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan

Kesejahteraan pelaku usaha perikanan berkaitan erat dengan produk perikanan yang mudah busuk (*perishable*) sehingga membutuhkan penanganan yang sesuai standar dari hulu ke hilir, sementara saat ini usaha yang ada masih didominasi usaha skala kecil dan belum sepenuhnya sesuai standar, ditambah jangkauan pemasaran yang masih terbatas. Hal yang lain adalah rendahnya tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah sehingga membutuhkan dorongan lebih kuat untuk meningkatkan preferensi masyarakat terhadap ikan sebagai sumber protein hewani. Secara simultan dibutuhkan juga upaya untuk meningkatkan kompetensi dan atau keterampilan SDM para pelaku usaha perikanan, serta secara khusus pada perikanan tangkap, risiko terjadinya kecelakaan kerja masih cukup tinggi sehingga membutuhkan perlindungan.

c. Tingginya kerusakan ekosistem perikanan

Kerusakan ekosistem perikanan khususnya di wilayah pesisir disebabkan abrasi dan akresi yang cukup tinggi yang imbasnya dapat menyebabkan terjadinya banjir rob. Di sisi lain, masih dibutuhkan edukasi terhadap semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan khususnya lingkungan perairan. Sedangkan pada perikanan budidaya diperlukan upaya untuk mempertahankan ikan jenis endemik lokal yang mulai menurun populasinya.

2. Pariwisata

Penyelenggaraan urusan pariwisata di Jawa Tengah masih menjumpai permasalahan pokok terkait seberapa besar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat berkontribusi terhadap PDRB Jawa Tengah. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh:

a. Kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara belum optimal;
b. Masih rendahnya pengeluaran wisatawan;
c. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Kondisi pertanian ditopang oleh sektor pertanian dan peternakan. Kondisi ini dipengaruhi oleh produksi serta tingkat kesejahteraan petani dan peternak. Lebih lanjut kondisi dan permasalahan sektor pertanian dan peternakan sebagai berikut:

a. Produksi sektor pertanian

Secara umum produksi pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan mencapai target. Namun produksi kedelai masih perlu didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Kesejahteraan petani dan peternak

Berdasarkan tingkat kesejahteraan pelaku usaha, masih diperlukan dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.

4. Kehutanan

Permasalahan utama penyelenggaraan urusan kehutanan adalah masih rendahnya luasan tutupan lahan di Jawa Tengah yang dipengaruhi oleh:

a. Masih adanya lahan kritis dan lahan mangrove yang perlu direhabilitasi;
b. Masih rendahnya penambahan industri pengolah hasil hutan yang memperoleh sertifikasi verifikasi legalitas kayu.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Tantangan yang dihadapi penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral berkaitan dengan ketahanan energi, pengelolaan air tanah, pemanfaatan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut disertai dengan permasalahan antara lain:

a. Belum optimalnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi

Persentase pemanfaatan EBT tahun 2022 sebesar 15,76 persen dari total bauran energi di Jawa Tengah. Sampai dengan saat ini, penggunaan energi fosil mendominasi sebesar 84,24 persen. Efek buruk dari ketergantungan terhadap sumber energi fosil sebagai sumber energi

utama adalah sifatnya yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui, sehingga berpotensi dapat menyebabkan krisis energi.

b. Masih rendahnya konsumsi listrik per kapita

Permasalahan konsumsi listrik erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan. Jika masyarakat pendapatanya bertambah maka pola konsumsi listriknya berpotensi bertambah. Pada sisi *demand,* konsumsi listrik di Provinsi Jawa Tengah masih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah tetangga di Pulau Jawa. Konsumsi listrik di Jawa Tengah sebesar 879,90 kWh/kapita pada 2022, Jawa Timur sebesar 907 kWh/kapita, Jawa Barat sudah mencapai 1.012 kWh/kapita, dan DKI Jakarta telah mencapai 3.248 kWh/kapita. Dengan demikian, potensi konsumsi listrik Jawa Tengah masih harus terus didorong dan ditingkatkan, utamanya juga mendorong pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif. Tingkat *availability* listrik di Jawa Tengah ditunjukkan dengan Rasio Ketersediaan Daya Listrik yang pada tahun 2022 sebesar 1,46. Hal tersebut menunjukan bahwa Jawa Tengah memiliki *reserve margin* (cadangan daya) sebesar 46 persen, yang telah terintegrtasi dalam sistem transmisi Jawa Madura Bali. *Reserve margin* yang terjadi diharapkan dapat menjadi sentimen positif dalam menarik tumbuhnya industri di wilayah Jawa Tengah.

c. Belum optimalnya produktivitas pertambangan dan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan

Potensi pertambangan di Jawa Tengah memiliki sebaran komoditas yang beragam dan cukup melimpah. Masih terdapat komoditas unggulan yang belum mendapatkan perhatian dari masyarakat di daerah sekitar, sehingga pemanfaatan dari potensi tersebut belum optimal. Rangkaian aktivitas pertambangan sering bersinggungan dengan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan antara lain berkurangnya vegetasi hutan, tumbuhan, dan lapisan tanah. Sehingga perlu dorongan untuk melaksanakan pertambangan dengan baik *(Good Mining Practice)* agar dapat mewujudkan keseimbangan antara nilai ekonomis dan nilai lingkungan. Di Jawa Tengah sendiri terdapat 355 pemegang Ijin Usaha Pertambangan, dan dari jumlah tersebut yang telah melaksanakan pertambangan yang baik sebesar 89 persen pada tahun 2022.

d. Meningkatnya pemanfaatan air tanah

Jumlah pengambilan air tanah di Jawa Tengah cenderung naik secara fluktuatif dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Akan tetapi, pada tahun 2021 hingga tahun 2022 jumlah pengambilan air tanah menunjukan penurunan. Walaupun demikian, pengendalian dan pengawasan harus tetap dilaksanakan untuk semakin menurunkan laju pengambilan air tanah utamanya pada wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) kritis.

6. Perdagangan

Penyelenggaraan urusan perdagangan di Jawa Tengah sebagai salah satu sektor unggulan perekonomian Jawa Tengah masih ditemukan permasalahan utama yaitu masih belum optimalnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, sehingga mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut dipengaruhi oleh permasalahan antara lain belum

optimalnya ekspor dan impor Jawa Tengah, belum optimalnya nilai tambah produksi perdagangan, dan fluktuatifnya harga kelompok kebutuhan masyarakat yang juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

7. Perindustrian

   Permasalahan utama di urusan perindustrian yang juga menjadi salah satu sektor unggulan perekonomian Jawa Tengah yaitu masih belum optimalnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan. Beberapa permasalahan yang mempengaruhinya antara lain belum optimalnya produksi industri terutama industri kecil menengah, rendahnya nilai tambah produk industri, serta masih rendahnya kapasitas pelaku industri terutama industri kecil dan menengah.

8. Transmigrasi

   Permasalahan yang dijumpai pada urusan transmigrasi adalah terbatasnya kuota transmigrasi yang tidak sebanding dengan minat transmigrasi masyarakat Jawa Tengah. Hal tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah terkait dengan transmigrasi.

**D. Unsur Pendukung Pemerintahan**

1. Sekretariat Daerah

   Permasalahan utama unsur sekretariat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyedia kebijakan pembangunan daerah adalah belum optimalnya kualitas kebijakan daerah yang dihasilkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh permasalahan antara lain masih rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur dalam melakukan proses analisis kebijakan daerah.

2. Sekretariat DPRD

   Permasalahan utama dalam penyelenggaraan unsur sekretariat DPRD adalah belum optimalnya pelayanan untuk anggota DPRD. Hal tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya kapasitas aparatur dalam pelayanan, serta belum optimalnya sarana prasarana pelayanan bagi anggota DPRD.

**E. Unsur Penunjang Pemerintahan**

1. Perencanaan

   Permasalahan utama dari unsur perencanaan adalah masih perlunya mendorong kinerja perencanaan pembangunan daerah agar lebih berkualitas. Hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan, serta keselarasan perencanaan daerah dengan perencanaan di tingkat pusat maupun perencanaan sektoral lainnya. Di sisi lain, dinamika kebijakan pemerintah pusat juga mempengaruhi kualitas perencanaan dari aspek keselarasan antar perencanaan di tingkat pusat maupun daerah.

2. Keuangan

   Permasalahan utama unsur keuangan adalah belum optimalnya pendapatan daerah dan tata kelola keuangan daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa permasalahan antara lain;

   a. Belum optimalnya penanganan piutang pajak kendaraan bermotor;
   b. Hilangnya beberapa penerimaan objek retribusi karena pemberlakuan regulasi baru (Undang-undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah/HKPD);

c. Masih rendahnya kontribusi pemanfaatan asset daerah terhadap penerimaan PAD;
d. Masih terbatasnya skema pendanaan di luar APBD.

3. Kepegawaian

Permasalahan utama yang masih dijumpai dalam unsur kepegawaian adalah belum optimalnya meritokrasi dalam manajemen ASN dalam hal distribusi ASN sesuai kebutuhan dan kompetensi, serta layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan utama dalam unsur pendidikan dan pelatihan adalah belum optimalnya kompetensi ASN Jawa Tengah ditandai dengan belum terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN dan belum terpenuhinya ASN yang berpredikat kompeten.

5. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan utama dari unsur penelitian dan pengembangan adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang dipengaruhi oleh permasalahan antara lain belum optimalnya kompetensi ASN dalam hal riset dan pengembangan inovasi, serta masih terbatasnya sarana prasarana riset dan inovasi.

**F. Unsur Pengawasan Pemerintahan**

Permasalahan utama dari penyelenggaraan unsur pengawasan pemerintahan adalah masih belum optimalnya pengawasan, pembinaan dan pendampingan bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**G. Unsur Pemerintahan Umum**

Permasalahan utama dari unsur pemerintahan umum di Jawa Tengah adalah belum optimalnya kesatuan bangsa dan politik yang digambarkan dengan stabilitas politik dan ketahanan bangsa yang perlu terus dijaga.

### 2.9.3 Isu Strategis Daerah

Isu Strategis di Jawa Tengah mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, maupun daerah) dan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Perumusan isu strategis dilakukan dengan berbagai metodologi antara lain analisis isu dari berbagai kebijakan yang ada, focus group discussion bersama stakeholder pentahelix, dan analisis pembobotan. Berbagai isu yang diperhatikan dalam perumusan isu strategis daerah baik isu secara global, nasional, maupun daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.212.**
**Isu Strategis Global, Nasional, dan Daerah**

| Isu Global (SDG's) | Isu Nasional (RPJMN) | Isu Daerah (RPJPD) | Isu Daerah (RPD) |
|---|---|---|---|
| 1. Kemiskinan<br>2. Pangan dan Gizi<br>3. Kesehatan<br>4. Pendidikan<br>5. Gender<br>6. Air bersih dan sanitasi<br>7. Energi<br>8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja<br>9. Infrastruktur<br>10. Kesenjangan Kota dan Permukiman<br>11. Produksi dan konsumsi berkelanjutan<br>12. Perubahan iklim<br>13. Sumberdaya kelautan<br>14. Ekosistem daratan<br>15. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan<br>16. Kemitraan global | 1. Stabilitas politik dan keamanan<br>2. Tata kelola birokrasi efektif dan efisien<br>3. Pemberantasan korupsi<br>4. Pertumbuhan ekonomi<br>5. Percepatan pemerataan dan keadilan<br>6. Keberlanjutan pembangunan<br>7. Peningkatan kualitas SDM<br>8. Kesenjangan antar wilayah<br>9. Percepatan pembangunan kelautan | 1. Sosial budaya dan kehidupan beragama<br>2. Ekonomi<br>3. Iptek<br>4. Sarpras<br>5. Politik dan Tata Pemerintahan<br>6. Keamanan dan Ketertiban<br>7. Hukum dan Aparatur<br>8. Wilayah dan Tata Ruang<br>9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Isu Utama:<br>Kesejahteraan Masyarakat (Kemiskinan, Pendapatan Perkapita, Ketimpangan)<br>Isu<br>1. Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan<br>2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif<br>3. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup<br>4. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis |

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, dan perubahan kebijakan nasional maka isu strategis Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut

Isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 yang masih menjadi perhatian utama adalah berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu salah satunya adalah isu kemiskinan. Pada periode Bulan September tahun 2022, angka kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 10,98 persen, naik 0,05 persen dari bulan Maret 2022, namun apabila dibandingan dengan periode September 2021 yang sebesar 11,25 persen menurun 0,27 persen. Namun demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang sebesar 9,57 persen. Isu lainnya adalah masih rendahnya pendapatan per kapita yang di tahun 2021 sebesar 38,67 juta rupiah, meningkat dari tahun 2020 (38,60 juta rupiah), namun masih lebih rendah dibandingkan nasional (61,96 juta rupiah). Selain itu, ketimpangan pendapatan juga masih menjadi isu yang ditunjukkan dari Rasio Gini yang di tahun 2022 periode bulan September sebesar 0,366, yang meskipun menurun jika dibandingkan periode September 2021 yang sebesar 0,368, namun masih termasuk kategori ketimpangan tinggi. Isu tersebut berkaitan dengan isu strategis lainnya yang masih menjadi perhatian dalam pembangunan daerah Jawa Tengah di tahun 2024 sebagai berikut.

**1. Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan**

Secara kumulatif, ekonomi Jawa Tengah sampai dengan triwulan III tahun 2022 tumbuh positif sebesar 5,36 persen (*c to c*), lebih baik dibandingkan triwulan III tahun 2021 yang sebesar 2,63 persen (*c to c*). Namun tantangan ekonomi ke depan masih dihadapkan pada dampak perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan krisis pangan dan energi, serta meningkatnya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat TheFed dikarenakan inflasi yang tinggi. Hal ini berdampak pada perekonomian Indonesia maupun Jawa Tengah yaitu potensi menurunnya ekspor karena melemahnya permintaan global, serta turunnya

nilai tukar rupiah yang berakibat pada meningkatnya harga impor bahan baku industri.

Perekonomian di Jawa Tengah didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, pertanian dalam arti luas, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan pariwisata. Dilihat dari lapangan usaha penyumbang terbesar PDRB secara berurutan pada triwulan III tahun 2022 adalah Industri Pengolahan sebesar 33,40 persen, diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,77 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,58 persen. Selain didukung sektor unggulan, perekonomian Jawa Tengah juga didukung dengan investasi, konsumsi masyarakat, ekspor dan pengelolaan keuangan daerah.

Kondisi perekonomian daerah berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah yang ditunjukkan dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus 2022 sebesar 5,57 persen menurun 0,38 persen poin dibandingkan periode Agustus 2021 yang sebesar 5,95 persen. Pengaruh lainnya adalah pada Nilai Tukar Petani/NTP Jawa Tengah yang di bulan Desember 2022 sebesar 107,27 naik 1,91 persen dibandingkan NTP bulan November sebesar 105,26.

Tantangan yang dihadapi selanjutnya adalah pembangunan ekonomi yang semakin inklusif dengan memperhatikan laju pertumbuhan sekaligus menjaga keberlanjutannya untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu tuntutan akan pembangunan ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup (ekonomi hijau).

Infrastruktur sebagai akses distribusi barang dan jasa, penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan yang dilengkapi dengan transportasi publik, jaringan komunikasi, dan jaringan energi menjadi penting untuk mendukung perekonomian yang inklusif dan berdaya saing. Selain itu, pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah sesuai dengan arah kebijakan 8 (delapan) wilayah pengembangan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan RTRW.

**2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif.**

Pembangunan SDM dihadapkan pada tantangan seperti megatrend global, era disrupsi, dan globalisasi, serta upaya pemulihan dalam tatanan baru (new normal). Pembangunan SDM Jawa Tengah kedepan dihadapkan pada tantangan daya saing yang semakin meningkat, yang digambarkan dari kondisi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah di tahun 2022 sebesar 72,79 dan masih berada di bawah IPM Nasional. Hal itu dikarenakan jumlah penduduk Jawa Tengah yang semakin meningkat sebanyak empat juta jiwa dalam satu dekade, berpotensi memunculkan berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, ketersediaan pangan, dan degradasi lingkungan.

Pembangunan SDM berkualitas berkaitan erat dengan ketersediaan layanan kesehatan berkualitas yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular yang diperkuat dengan pembudayaan gerakan masyarakat untuk hidup sehat dan bugar, mobilisasi pembiayaan sektor non-pemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan, dan beban ganda permasalahan gizi (kelebihan dan kekurangan

gizi), serta akses, mutu, relevansi serta partisipasi pendidikan masih menjadi persoalan penting dalam bidang pendidikan. Transisi demografi dari struktur penduduk usia produktif menuju penduduk usia tua juga memerlukan penyediaan layanan dan perlindungan bagi penduduk lanjut usia untuk menjaga kualitas hidup penduduk lanjut usia.

Selain itu tantangan dalam pembangunan SDM adalah menciptakan SDM berkarakter. Kecenderungan menurunnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal ditandai dengan menurunnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dari 59,12 di tahun 2020 menjadi 55,24 di tahun 2021. Tantangan era disrupsi, globalisasi, dan transformasi digital yang terjadi saat ini menuntut SDM Jawa Tengah agar lebih adaptif tanpa meninggalkan jatidiri sebagai masyarakat Jawa Tengah yang berbudaya berbasis kearifan lokal. Salah satu pendekatan penting dalam pembentukan SDM berkarakter adalah pendekatan keluarga. Kinerja pembangunan keluarga di Jawa tengah ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang menunjukan kecenderungan turun dari 58,00 pada 2020 menjadi 56,10 pada 2021. Adapun Indeks Pembangunan Gender Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari 91,94 pada 2017 menjadi 92,48 pada 2021, tetapi masih terjadi ketimpangan pada komponen harapan lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan, angka harapan hidup laki-laki, serta pengeluaran per kapita perempuan. Selain itu, rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan kecenderungan meningkat dari 8,51 pada 2017 menjadi 8,97 pada 2021, serta angka pernikahan usia anak masih tinggi yaitu 13.595 perkawinan.

**3. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk lebih mensejahterakan hidupnya. Sumber daya alam sebagai salah satu modal dasar pembangunan, maka dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Jawa Tengah, harus memperhatikan unsur-unsur lingkungan, tata ruang, serta masyarakat disekitarnya. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat, namun disisi lain sumber daya alam yang dimiliki jumlahnya semakin terbatas dan daya tampung lingkungan hidup juga semakin menurun. Disisi lain, potensi terjadinya bencana akibat pemanfaatan sumber daya alam juga perlu menjadi perhatian.

Untuk menjaga keberlangsungan pemenuhan sumber daya alam masyarakat di Jawa Tengah, mengurangi resiko bencana alam dan mendukung kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Jawa Tengah. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi resiko bencana.

Daya Dukung Lingkungan Hidup yang merupakan kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya akan berhasil apabila ketersediaan sumber daya alam dan jumlah penduduk di Jawa Tengah berimbang, oleh karena itu tata kelola, konservasi, kesadaran masyarakat, regulasi pemerintah serta aksesibiltas di Jawa Tengah harus terjaga dengan baik. Selain itu daya

tampung lingkungan hidup juga diperlukan karena untuk mengetahui kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukan ke dalamnya. Untuk meningkatkan daya tampung lingkungan hidup maka pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian pencemaran dapat menjadi strategi di masa yang akan datang.

Provinsi Jawa Tengah selain memiliki potensi sumber daya alam, juga memiliki ancaman bencana. Pengurangan kerentanan bencana di Jawa tengah difokuskan pada pengembangan aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan, kesesusaian tata ruang dalam setiap aktivitas pembangunan, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana.

**4. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis**

Kinerja tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah digambarkan dengan membaiknya Indeks Reformasi Birokrasi, yang pada tahun 2021 sebesar 78,79 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 77,05. Namun demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi dapat menjadi katalisator dalam akselerasi pencapaian kinerja pembangunan daerah. Reformasi birokrasi tidak hanya fokus pada persoalan administrasi, namun harus dapat berorientasi pada hasil atau dampak pembangunan daerah terutama penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kualitas lingkungan hidup yang memadai.

Perubahan paradigma reformasi birokrasi tersebut menuntut adanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dengan memperkuat kapasitas dan kemampuan pola pikir sumber daya aparatur, yang secara simultan menuntut adanya proses adaptasi pada sistem dan pola kerja terutama pada proses bisnis pemerintahan meliputi perbaikan manajamen organisasi berbasis risiko, riset, dan inovasi (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan), digitalisasi pemerintahan, dan penguatan pelayanan publik. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin kolaboratif dengan memperluas jejaring dan sinergi kerjasama baik antar pemerintah maupun antara pemerintah dan lembaga non pemerintah.

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

## 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian regional, nasional maupun global serta telaah terhadap kebijakan ekonomi nasional di daerah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

### 3.1.1. Dinamika Perekonomian Global

Tantangan dan risiko baru telah muncul dari faktor global baik dari sisi geopolitik, ekonomi dan keuangan yang sangat kompleks dan dinamis. Dalam *World Economic Outlook* (WEO) Bulan Januari 2023, lembaga keuangan dunia yaitu *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan melambatnya pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 sebesar 3,4 persen, sedangkan tahun 2023 IMF memproyeksikan ekonomi global tumbuh 2,9 persen dan tahun 2024 tumbuh 3,1 persen. World Bank (WB) memproyeksikan lebih rendah lagi untuk pertumbuhan ekonomi global, tahun 2022 tumbuh 2,9 persen, tahun 2023 tumbuh 1,7 persen dan tahun 2024 tumbuh sebesar 2,7 persen. Sedangkan OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) tahun 2023 ekonomi global tumbuh 2,2 persen dan Tahun 2024 tumbuh 2,7 persen.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju juga diperkirakan akan mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) diperkirakan turun oleh WEO IMF menjadi sebesar 1,6 persen di tahun 2022 dan 1,0 persen di tahun 2023. Dalam periode yang sama, proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok adalah 3,2 persen di tahun 2022, dan 4,4 persen di tahun 2023; Jepang diproyeksikan tumbuh 1,7 persen di tahun 2022, dan 1,6 persen di tahun 2023; dan negara Zona Eropa diproyeksikan tumbuh sebesar 3,1 persen di tahun 2022 dan 0,5 persen di tahun 2023. Sedangkan untuk negara-negara berkembang seperti India diproyeksikan tumbuh tinggi sebesar 6,8 persen di tahun 2022 dan 6,1 persen di tahun 2023, termasuk juga pertumbuhan ekonomi di Kawasan ASEAN-5 diperkirakan berada dalam tren meningkat.

Penyebab perlambatan ini terutama adalah menguatnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, periode pengetatan kembali kebijakan moneter di AS pasca Global Financial Crisis (GFC) – yang kita kenal sebagai taper tantrum, pandemi Covid-19, perang di Ukraina yang menyebabkan kenaikkan harga komoditas dan melonjaknya inflasi global, serta dampak perubahan iklim yang semakin sering terjadi.

Meskipun terdapat perlambatan ekonomi global, masih terdapat harapan terjadinya perbaikan ekonomi global di tahun 2024. Tanda-tanda membaik (upside risks) dapat dilihat dari: (1) Moderasi harga komoditas, meskipun masih volatile; (2) Inflasi telah mencapai puncaknya (dalam tren melandai); (3) Laju pengetatan moneter sudah mulai melambat; (4) Relaksasi restriksi Covid-19 di Tiongkok; (5) Penguatan pemulihan ekonomi Asia (i.e. India dan ASEAN-5); (5) Potensi *new growth driver* (*digital, green economy*). Disisi lain terdapat beberapa resiko (*downside risk*) antara lain: (1) Ketidakpastian tensi geopolitik (perang di Ukraina, konflik Semenanjung Korea, tensi AS-Tiongkok-Taiwan, Kompetisi kebijakan

penanganan perubahan iklim); (2) Tingkat suku bunga masih relatif tinggi; (3) Tekanan sektor properti di Tiongkok; (4) *Policy space* (fiskal) relatif sempit; (5) Potensi dampak rambatan isu stabilitas perbankan AS; (6) Potensi dampak rambatan *climate change* (cuaca ekstrim).

### 3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Ditengah gejolak perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Pemulihan ekonomi nasional menunjukkan tren membaik seperti pada saat sebelum Covid-19. Setelah mampu menjaga pertumbuhan positif sebesar 3,69 persen (c-to-c) di tahun 2021 meski dihantam gelombang Covid-19 varian Delta, pemulihan ekonomi berlanjut sampai tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,31 persen (c-to-c). Perbaikan ekonomi nasional dapat dilihat dari konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus menunjukkan tren peningkatan, disertai pemulihan yang kuat di hampir semua sektor ekonomi termasuk transportasi, akomodasi dan konstruksi selain dua sektor utama yaitu manufaktur dan perdagangan. Indikator *Prompt Manufacturing Index* (PMI) atau Indeks Manufaktur Indonesia pada Bulan Desember 2022 masih terus ekspansif, pada level 50,9. Sementara itu, kenaikan harga komoditas global mampu mendorong peningkatan surplus neraca perdagangan Indonesia. Secara kumulatif pada Desember 2022, neraca perdagangan tercatat surplus USD 3,89 miliar. Surplus neraca perdagangan berasal dari tingginya surplus non-migas dipengaruhi oleh meningkatnya ekspor komoditas khususnya batu bara dan CPO. Dengan pembangunan infrastruktur yang masif serta perbaikan iklim investasi dan bisnis yang terus dilakukan, Pemerintah mampu mendorong aktivitas ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun mendekati level pra-pandemi, menjadi 5,86 persen pada Agustus 2022 dari 6,49 persen pada Agustus 2021. Sementara, angka kemiskinan nasional juga konsisten menurun, dari sebelumnya 9,71 persen pada September 2021, turun menjadi sebesar 9,57 persen pada September 2022. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik signifikan, dari sebelumnya 0,414 menjadi 0,380. Berbagai program afirmasi pada pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga walaupun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi di triwulan I-2023 mencapai 5,0 persen (yoy). Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 4,33 persen (yoy) pada Bulan April 2023. Sementara itu *Purchasing Managers Index* nasional bulan April 2023 mencapai 52,7 (berada pada zona ekspansif). Mempertimbangkan berbagai resiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, tema kebijakan fiskal nasional (RKP 2024) Tahun 2024 adalah **Mempercepat Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**, dengan target indikator makro tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi : 5,1 – 5,7 persen;
2. Inflasi : 1,5 – 3,5 persen;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,0 – 5,7 persen;

4. Angka Kemiskinan : 6,5 – 7,5 persen;
5. Rasio Gini : 0,374 – 0,377;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 73,99 – 74,02;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) : 105 – 108;
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) : 107 – 110.

### 3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan tren penguatan. Pada tahun 2021 mampu menjaga pertumbuhan yang positif sebesar 3,32 persen (c-to-c). Ekonomi Jawa Tengah terus tumbuh pada Tahun 2022 sebesar 5,31 persen (c-to-c). Pada triwulan I-2023 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,04 persen (yoy), yang lebih tinggi dari nasional sebesar 5,03 persen (yoy) dan merupakan capaian pertumbuhan ekonomi diatas lima persen berturut-turut.

Pasar domestik dan internasional masih tumbuh meskipun tidak sepesat triwulan sebelumnya. Struktur Perekonomian Jawa Tengah didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pariwisata. Sementara itu, dari sisi komponen pengeluaran Perekonomian di Jawa Tengah didukung oleh Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor dan Investasi yang menjadi motor penggerak perekonomian.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Jawa Tengah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun mendekati level pra-pandemi, menjadi 5,57 persen pada Tahun 2022 dari 5,95 persen pada Tahun 2021. Sementara, Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 11,25 persen di Tahun 2021, turun menjadi 10,98 persen di Tahun 2022. Sedangkan Inflasi di Jawa Tengah pada bulan Desember 2022 sebesar 5,63 persen (*y-o-y*), naik dibandingkan pada bulan November 2022 sebesar 5,16 persen (*y-o-y*). Pada April 2023 inflasi Jateng Kembali turun sebesar 4,40 persen (yoy). Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik signifikan, dari sebelumnya 0,404 (Maret 2022) menjadi 0,392 (September 2022). Berbagai program afirmasi pada pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Jawa Tengah Tahun 2024 diproyeksikan pada kisaran angka 4,70-5,50 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 3,0±1 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Tahun 2024 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2024, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,76-8,96 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,44 – 4,94 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 45,82 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,364 di Tahun 2024.

**Tabel 3.1.**
**Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2024**

| No | Indikator | Satuan | Proyeksi Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,70 - 5,50 |
| 2 | PDRB per kapita | Juta Rp | 45,82 |
| 3 | Inflasi | % | 3,0 ± 1 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,44 – 4,94 |
| 5 | Angka Kemiskinan | % | 9,76-8,96 |
| 6 | Rasio Gini | Angka | 0,364 |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2023*

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada "**Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas**". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:

1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;
5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.
6) Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada *green jobs* dan *green investment* dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
7) Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

## 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya. Kinerja pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020-2022 cenderung meningkat, namun demikian mengalami penurunan di Tahun 2020 sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara global, nasional, dan daerah. Pada Tahun 2021 realisasi pendapatan kembali meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

**1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Penerimaan Pajak Daerah masih menjadi penopang utama sektor pendapatan daerah. Pada tahun anggaran 2022, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 5,432 triliun rupiah meningkat sebesar 673,68 miliar rupiah (14,16 persen) apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2022 sebesar 2,886 triliun rupiah meningkat 110,12 miliar rupiah (3,97 persen) dibandingkan penerimaan Tahun 2021 yang sebesar 2,775 triliun rupiah. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 2,248 triliun rupiah juga mengalami peningkatan 422,07 miliar rupiah (23,11 persen) dibanding penerimaan Tahun 2021 sebesar 1,826 triliun rupiah.

Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) pada Tahun 2022 sebesar 18,802 miliar rupiah mengalami peningkatan sebesar 1,55 miliar rupiah (9,05 persen) dibanding penerimaan Tahun 2021 sebesar 17,24 miliar rupiah. Sementara itu penerimaan Pajak Rokok pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 559,02 miliar rupiah dari realisasi tahun 2021 sebesar 2,339 triliun rupiah menjadi 2,898 triliun rupiah.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan ditiadakannya Pembatasan aktivitas selama PPKM berdampak langsung terhadap meningkatnya intensitas dan volume pemberian jasa dan layanan retribusi yang meliputi jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu. Realisasi penerimaan retribusi pada Tahun 2022 sebesar 115 miliar rupiah mengalami peningkatan sebesar 23,52 miliar rupiah dibandingkan penerimaan Tahun 2021 sebesar 91,63 miliar rupiah.

Selain retribusi, pos penerimaan lainnya yakni Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang tumbuh negatif pada Tahun 2021 dengan nilai sebesar 508,26 miliar rupiah atau tumbuh negatif 4,12 persen dibandingkan realisasi penerimaan Tahun 2020 yang disebabkan adanya koreksi perhitungan piutang Tahun sebelumnya pada Laporan Keuangan PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) sehingga mempengaruhi penerimaan deviden yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2021. Penerimaan ini kemudian tumbuh 7,57 persen di Tahun 2022 dengan nilai realisasi 546,71 miliar rupiah.

**2. Pendapatan transfer**

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Realisasi pendapatan transfer mengalami peningkatan dari 11,70 triliun rupiah pada Tahun 2020 menjadi 11,87 triliun rupiah pada Tahun 2021. Sedangkan pada Tahun 2022 pendapatan transfer adalah sebesar 7,81 triliun rupiah.

**3. Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 – 2022 terutama bersumber pada pendapatan hibah dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 65,728 miliar rupiah mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 23,352 miliar rupiah. Adapun realisasi pada tahun 2022 sebesar 92,434 miliar rupiah.

**Tabel 3.2.**
**Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | |
|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| **PENDAPATAN DAERAH** | **25.393.735.934.148** | **26.633.000.085.963** | **24.167.935.634.127** |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **13.668.282.278.855** | **14.695.474.898.162** | **16.264.618.853.852** |
| Pajak Daerah | 11.139.173.309.780 | 11.718.378.320.505 | 13.484.851.151.740 |
| Retribusi Daerah | 93.279.991.699 | 91.634.269.205 | 115.158.014.199 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 530.091.029.137 | 508.263.876.971 | 546.717.104.899 |

| Uraian | Jumlah (Rp) | | |
|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 1.905.738.818.239 | 2.377.197.927.406 | 2.117.892.583.014 |
| **PENDAPATAN TRANSFER** | **11.702.101.655.293** | **11.871.796.336.054** | **7.810.882.578.787** |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 843.392.119.954 | 1.023.258.872.325 | 909.711.090.450 |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 16.888.016.587 | 12.586.758.109 | 18.989.623.430 |
| Dana Alokasi Umum | 3.438.709.973.000 | 3.432.978.859.000 | 3.435.718.090.405 |
| Dana Alokasi Khusus (fisik) | 350.564.240.958 | 401.885.567.398 | 371.734.785.185 |
| Dana Alokasi Khusus (non fisik) | 6.983.232.690.794 | 6.932.375.674.222 | 3.013.376.489.317 |
| Dana Insentif Daerah | - | 68.710.605.000 | 61.352.500.000 |
| Dana Penyesuaian | 68.212.455.000 | - | - |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 1.102.159.000 | - | - |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **23.352.000.000** | **65.728.851.747** | **92.434.201.488** |
| Pendapatan Hibah | 23.352.000.000 | 64.882.003.502 | 92.161.740.403 |
| Lain lain pendapatan | - | 846.848.245 | 272.461.085 |

*Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2020-2021, 2022 audited.*

Selama kurun waktu tahun 2020-2022, PAD memberikan sumbangan terbesar pada pendapatan daerah, diikuti dengan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2022 kontribusi rata-rata PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 67,30 persen, pendapatan transfer sebesar 32,32 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,38 persen, Sumber pendapatan utama PAD berasal dari komponen pajak daerah dengan kontribusi terhadap PAD pada tahun 2022 mencapai 82,91 persen.

**Tabel 3.3.**
**Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2020 – 2022 (%)**

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | Rata–Rata |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| **PENDAPATAN DAERAH** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **53,83%** | **55,18%** | **67,30%** | **58,77%** |
| Pajak Daerah | 43,87% | 44,00% | 55,80% | 47,89% |
| Retribusi Daerah | 0,37% | 0,34% | 0,48% | 0,40% |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 2,09% | 1,91% | 2,26% | 2,09% |
| Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 7,50% | 8,93% | 8,76% | 8,40% |
| **PENDAPATAN TRANSFER** | **46,08%** | **44,58%** | **32,32%** | **40,99%** |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 3,32% | 2,89% | 3,76% | 3,32% |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 0,07% | 1,00% | 0,08% | 0,38% |
| Dana Alokasi Umum | 13,54% | 12,89% | 14,22% | 13,55% |
| Dana Alokasi Khusus (fisik) | 1,38% | 1,51% | 1,54% | 1,48% |
| Dana Alokasi Khusus (non fisik) | 27,50% | 26,03% | 12,47% | 22,00% |
| Dana Insentif Daerah | 0,00% | 0,26% | 0,25% | 0,17% |
| Dana Penyesuaian | 0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,09% |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | Rata–Rata |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **0,09%** | **0,25%** | **0,38%** | **0,24%** |
| Pendapatan Hibah | 0,09% | 0,24% | 0,38% | 0,24% |
| Lain-Lain Pendapatan | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

*Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2020-2022, 2022 audited*

Mendasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,70-5,50 persen, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2020-2022, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diproyeksikan sebesar 27,114 triliun rupiah. Proyeksi tersebut telah mempertimbangkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga pada Tahun Anggaran 2024 terdapat perubahan struktur pendapatan daerah antara lain dihapusnya beberapa jenis retribusi daerah dan jenis retribusi baru serta perubahan rekening pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ke rekening pendapatan Retribusi Daerah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar 18,500 triliun rupiah, pendapatan transfer sebesar 8,591 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 22,75 miliar rupiah. Pendapatan transfer tahun 2024 diproyeksikan meningkat 390,414 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 8,201 triliun rupiah. Hal tersebut dengan mempertimbangkan kebijakan bahwa pendapatan transfer akan dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi TKDD Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

**Tabel 3.4.**

**Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| NO | URAIAN | TAHUN 2024 |
|---|---|---|
| **1.** | **PAD** | **18.500.149.320.000** |
| 1.1. | Pajak Daerah | 15.754.387.924.000 |
| 1.2. | Retribusi Daerah | 1.728.627.388.000 |
| 1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan | 687.553.929.000 |
| 1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | 329.580.079.000 |
| **2.** | **Pendapatan Transfer** | **8.591.957.067.000** |
| 2.1 | Transfer Pemerintah Pusat | 8.591.957.067.000 |
| 2.2 | Transfer antar daerah | 0 |
| **3.** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **22.750.000.000** |
| | **Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)** | **27.114.856.387.000** |

*Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2023.*

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk dapat mencapai target pendapatan di tahun 2024, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan

masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

a. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
b. Penambahan titik layanan dengan bekerjasama dengan BUMDes, BPR BKK, Mall Pelayanan Publik, dan Badan Usaha lainnya;
c. Kerjasama dengan Kabupaten/Kota, desa, Kepolisian, dan dunia usaha lainnya;
d. Sosialisasi kesadaran pembayaran pajak bekerjasama dengan Babinkamtibmas, Ormas, BUMDes;
e. Menyelenggarakan *Auto Show* serta bekerja sama dengan Gaikindo dalam penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International *Auto Show* (GIIAS) 2024;
f. Pelayanan pajak kendaraan bermotor di perusahaan besar;
g. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI;
h. Pemutakhiran data objek retribusi;
i. Pengembangan sistem informasi retribusi;
j. Optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan;
k. Sosialisasi peraturan dan/atau penyuluhan terkait retribusi dan pendapatan lain;
l. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
m. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha; dan
n. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah pada tahun anggaran 2022 terserap secara optimal dengan realisasi serapan sebesar 95,24 persen. SILPA sebesar 1,236 triliun rupiah berada pada Kas Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar 412 miliar rupiah dan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar 800 miliar rupiah. Kas pada RKUD digunakan sebagai manajemen kas untuk pembayaran Belanja Gaji bulan Januari Tahun 2023 dimana pada saat itu PAD belum sepenuhnya terealisasi. Pendapatan BLUD pada tahun 2021 sebesar 900 miliar rupiah dialokasikan pada APBD Perubahan 2022, karena pada saat tersebut APBD Murni 2022 sudah ditetapkan. Oleh karena itu, realisasi serapan belanja BLUD hanya sebesar 100 miliar rupiah, sehingga sisa kas BLUD pada tahun 2022 sebesar 800 miliar rupiah. Meskipun sudah dirasa cukup optimal dalam penyerapan APBD Tahun 2022, masih terdapat beberapa kendala di pelaksanaan APBD sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan.

Beberapa realisasi belanja mengalami kenaikan, diantaranya Belanja Pegawai karena mulai dibayarkannya Gaji P3K (Pendidikan dan Kesehatan), Belanja Barang dan Jasa karena adanya pelonggaran kegiatan masyarakat, dan Belanja Subsidi yang digunakan dalam rangka penanganan inflasi. Sedangkan realisasi belanja yang mengalami penurunan diantaranya Belanja Modal karena

adanya pengadaan lahan yang belum jadi dilaksanakan karena persyaratan yang belum lengkap dan Belanja Tidak Terduga yang sebagian digunakan untuk penanganan dampak inflasi ternyata tidak dapat dicairkan.

**Tabel 3.5.**
**Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2022**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | |
|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| **BELANJA DAERAH** | **25.651.740.349.991** | **25.842.363.948.300** | **23.926.642.335.690** |
| **BELANJA OPERASI** | **16.223.988.285.131** | **16.825.242.533.039** | **13.456.887.671.949** |
| Belanja Pegawai | 6.483.761.623.794 | 5.685.925.255.020 | 5.902.903.886.767 |
| Belanja Barang dan Jasa | 4.104.637.788.228 | 5.344.064.156.345 | 5.377.369.153.896 |
| Belanja Subsidi | 0 | 90.482.166 | 4.958.884.836 |
| Belanja Hibah | 5.593.181.623.109 | 5.728.982.384.318 | 2.092.761.564.803 |
| Belanja Bantuan Sosial | 42.407.250.000 | 66.180.255.190 | 78.894.181.648 |
| **BELANJA MODAL** | **996.994.505.160** | **1.447.519.464.142** | **1.713.641.630.081** |
| **BELANJA TAK TERDUGA** | **1.783.884.978.571** | **72.303.305.000** | **16.545.479.100** |
| **BELANJA TRANSFER** | **6.646.872.581.129** | **7.497.298.646.119** | **8.763.165.716.275** |
| Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kab/Kota | 4.633.245.749.888 | 5.735.553.033.353 | 6.085.808.822.482 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota | 845.543.195.241 | 493.309.827.766 | 804.934.393.793 |
| Bantuan Keuangan kepada Desa | 1.168.083.636.000 | 1.268.435.785.000 | 1.872.422.500.000 |

*Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2020-2021, 2022 audited.*

Komposisi belanja daerah tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah tahun 2024 diproyeksikan meningkat 6,59 persen dari tahun 2023 menjadi sebesar 28,526 triliun rupiah yang diarahkan pada tema **"Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas"** dengan fokus utama pada:

1. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yaitu:
   a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas;
   b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
   c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
   d. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.
2. Dukungan implementasi kebijakan nasional terutama pada:
   a. penurunan *stunting* menjadi 14 persen;
   b. penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen;
   c. pengendalian inflasi daerah;
   d. implementasi Satu Data Indonesia (SDI);

e. implementasi Desa Anti Korupsi.

3. Dukungan 10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan; sedangkan *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
5. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
6. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
7. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
8. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa; serta
9. Dukungan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2023 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja PD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai tahun 2024 diproyeksikan dengan asumsi termasuk penambahan belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS;
   b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol kesehatan; Belanja barang dan jasa di antaranya digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan Pendidikan sekolah, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dan dukungan pelaksanaan kegiatan;
   c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan

tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Belanja hibah antara lain digunakan untuk pembiayaan dukungan pelaksanaan pilkada serentak, menjaga kondusifitas wilayah, pembinaan kepemudaan dan olahraga;

d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset; Belanja Modal diantaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana;
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
      1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
      2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
      3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
      4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa); Belanja transfer tahun 2024 terdiri atas:
   a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
   b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergi dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

**Tabel 3.6.**
**Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| URAIAN | | JUMLAH (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| **BELANJA DAERAH** | | |
| **BELANJA OPERASI** | | **16.340.057.242.000** |
| 1 | Belanja Pegawai | 7.582.510.238.000 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.015.482.875.000 |
| 3 | Belanja Subsidi | 1.000.000.000 |
| 4 | Belanja Hibah | 2.723.004.129.000 |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 18.060.000.000 |
| **BELANJA MODAL** | | **2.056.751.662.000** |
| **BELANJA TAK TERDUGA** | | **25.000.000.000** |
| **BELANJA TRANSFER** | | **10.104.884.699.000** |
| 1 | Belanja Bagi Hasil | 7.105.634.568.000 |
| 2 | Belanja Bantuan Keuangan | 2.999.250.131.000 |
| **JUMLAH BELANJA** | | **28.526.693.603.000** |

*Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu tahun 2020-2022 penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan.

**Tabel 3.7.**
**Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | |
|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| **PEMBIAYAAN** | **1.119.348.228.370** | **646.485.090.816** | **1.018.773.865.813** |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **1.119.348.228.370** | **861.485.090.816** | **1.909.773.865.813** |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 1.119.095.687.470 | 861.368.883.047 | 1.435.692.146.361 |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 252.540.900 | 116.207.769 | 474.081.719.452 |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **-** | **215.000.000.000** | **891.000.000.000** |

| Uraian | Jumlah (Rp) | | |
|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Pembentukan dana cadangan | - | 200.000.000.000 | 400.000.000.000 |
| Penyertaan modal | - | 15.000.000.000 | 491.000.000.000 |

*Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah 2020-2022 audited.*

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2024 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan penyelenggaraan Pilkada. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 3.8.**
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| **1** | **Penerimaan Pembiayaan** | **1.481.837.216.000** |
| | SiLPA | 581.837.216.000 |
| | Pencairan Dana Cadangan | 900.000.000.000 |
| **2** | **Pengeluaran Pembiayaan** | **70.000.000.000** |
| | Pembentukan Dana Cadangan | - |
| | Penyertaan Modal | 70.000.000.000 |
| **3** | **Pembiayaan Netto Daerah** | **1.411.837.216.000** |

*Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Dari uraian tersebut diatas maka kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.9.**
**Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| URAIAN | | JUMLAH (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| **PENDAPATAN DAERAH** | | |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | | **18.500.149.320.000** |
| 1 | Pajak Daerah | 15.754.387.924.000 |
| 2 | Retribusi Daerah | 1.728.627.388.000 |
| 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan | 687.553.929.000 |
| 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | 329.580.079.000 |
| **PENDAPATAN TRANSFER** | | **8.591.957.067.000** |
| 1 | Transfer Pemerintah Pusat | 8.591.957.067.000 |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | | **22.750.000.000** |
| **JUMLAH PENDAPATAN** | | **27.114.856.387.000** |
| **BELANJA DAERAH** | | |
| **BELANJA OPERASI** | | **16.340.057.242.000** |
| 1 | Belanja Pegawai | 7.582.510.238.000 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.015.482.875.000 |
| 3 | Belanja Subsidi | 1.000.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Belanja Hibah | 2.723.004.129.000 |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 18.060.000.000 |
| **BELANJA MODAL** | | **2.056.751.662.000** |
| **BELANJA TAK TERDUGA** | | **25.000.000.000** |
| **BELANJA TRANSFER** | | **10.104.884.699.000** |
| 1 | Belanja Bagi Hasil | 7.105.634.568.000 |
| 2 | Belanja Bantuan Keuangan | 2.999.250.131.000 |
| **JUMLAH BELANJA** | | **28.526.693.603.000** |
| **SURPLUS/DEFISIT** | | **(1.411.837.216.000)** |
| **PEMBIAYAAN** | | |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | | **1.481.837.216.000** |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 581.837.216.000 |
| 2 | Pencairan dana cadangan | 900.000.000.000 |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | | **70.000.000.000** |
| 1 | Penyertaan modal | 70.000.000.000 |
| **PEMBIAYAAN NETTO** | | **1.411.837.216.000** |
| **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)** | | **0** |

*Sumber: Bapenda, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

### 3.2.4. Sumber Pendanaan Lainnya

Sumber pendanaan pembangunan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

**Tabel 3.10.**
**Realisasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)**
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

| NO | NAMA SKPD | PAGU SKPD | REALISASI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | KEUANGAN | | FISIK |
| | | | (Rp) | (%) | (%) |
| | | | | | |
| **DEKONSENTRASI** | | **162.206.869.000** | **149.431.454.723** | **92,12** | **99,68** |
| 1 | INSPEKTORAT | 495.119.000 | 493.980.226 | 99,77 | 100 |
| 2 | BAPPEDA | 1.602.865.000 | 1.486.497.001 | 92,74 | 100 |
| 3 | DINAS ARPUS | 733.838.000 | 724.811.793 | 98,77 | 100 |
| 4 | DINAS LUTKAN | 2.663.834.000 | 2.178.483.445 | 81,78 | 99,37 |
| 5 | DINAS PORAPAR | 7.799.120.000 | 7.664.975.136 | 98,28 | 100 |
| 6 | DINAS KESEHATAN | 25.858.048.000 | 20.358.041.190 | 78,73 | 100 |
| 7 | DINAS KOPERASI UMKM | 47.275.800.000 | 42.321.296.160 | 89,52 | 100 |
| 8 | DINAS PM PTSP | 811.948.000 | 793.516.780 | 97,73 | 100 |
| 9 | DINAS PERINDAG | 2.171.996.000 | 2.026.906.667 | 93,32 | 100 |
| 10 | DINAS TANBUN | 64.394.745.000 | 63.531.855.417 | 98,66 | 100 |
| 11 | DINAS NAKERTRANS | 6.612.381.000 | 6.157.449.187 | 93,12 | 100 |
| 12 | BIRO PEMOTDAKER | 1.787.175.000 | 1.384.524.472 | 77,47 | 100 |
| | | | | | |
| **TUGAS PEMBANTUAN** | | **423.218.551.000** | **401.803.692.319** | **94,94** | **98,04** |

| NO | NAMA SKPD | PAGU SKPD | REALISASI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | KEUANGAN | | FISIK |
| | | | (Rp) | (%) | (%) |
| 1 | DINAS LUTKAN | 3.083.862.000 | 2.950.330.775 | 95,67 | 99,61 |
| 2 | DINAS PU SDA TARU | 94.648.310.000 | 91.364.013.643 | 96,53 | 100 |
| 3 | DINAS TANBUN | 174.194.816.000 | 167.836.705.216 | 96,35 | 100 |
| 4 | DINAS NAKESWAN | 137.475.121.000 | 125.679.755.618 | 91,42 | 97,32 |
| 5 | DINAS PU BMCK | 13.815.764.000 | 13.763.264.097 | 99,62 | 100 |

*Sumber: Biro Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah 2023.*

**Tabel 3.11.**
**Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)**
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

| NO | NAMA SATKER | NAMA KEWENANGAN | DIPA (Rp) | BLOKIR (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH | Dekonsentrasi | 1.640.922.000 | 0 |
| 2 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH | Dekonsentrasi | 551.296.000 | 551.296.000 |
| 3 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH | Dekonsentrasi dan TP | 7.780.242.000 | 7.780.242.000 |
| 4 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH | Dekonsentrasi dan TP | 6.046.000.000 | 4.416.000.000 |
| 5 | DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TENGAH | Dekonsentrasi | 22.344.574.000 | 5.299.094.000 |
| 6 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH | Dekonsentrasi | 1.407.136.000 | 0 |
| 7 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH | Tugas Pembantuan | 91.995.217.000 | 0 |
| 8 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH | Dekonsentrasi | 544.785.000 | 279.504.000 |
| 9 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TENGAH | Dekonsentrasi | 2.225.025.000 | 1.356.179.000 |
| 10 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH | Dekonsentrasi dan TP | 286.653.724.000 | 58.693.347.000 |
| 11 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH | Tugas Pembantuan | 130.435.252.000 | 14.727.020.000 |
| 12 | DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH | Tugas Pembantuan | 20.053.508.000 | 0 |
| 13 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH | Dekonsentrasi dan TP | 6.271.301.000 | 6.343.488.000 |
| 14 | INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH | Dekonsentrasi | 302.450.000 | 0 |
| 15 | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH | Dekonsentrasi | 2.352.390.000 | 134.412.000 |
| | Jumlah | | **580.603.822.000** | **99.580.582.000** |

*Sumber: Biro Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah 2023*

Melaksanakan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017, Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi sumber pembiayaan diluar APBD, utamanya dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Hal ini tercermin dari realisasi anggaran sebesar 113.561.417.851 rupiah pada tahun anggaran 2022 dan pada tahun 2023 sementara direncanakan sebesar 3.363.774.100 rupiah.

Adapun realisasi kegiatan pada tahun 2022 tertinggi pada Bidang Usaha Ekonomi Rakyat sebesar 45.604.346.549 rupiah dan terendah pada Bidang Energi Baru Terbarukan sebesar 833.245.000 rupiah. Perusahaan dengan alokasi program dan anggaran terbanyak adalah PT Telkom Regional IV Jateng & DIY sebanyak 362 program dengan anggaran sebesar 23.601.008.400 rupiah. Sedangkan realisasi pelaksanaan TJSLP hingga Triwulan II Tahun 2023 telah mencapai 17.123.181.888 rupiah.

**Tabel 3.12.**
**Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

| No | Perusahaan | Jumlah Program | Jumlah Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | PT Telkom Regional IV Jateng & DIY | 362 | 23,601,008,400 |
| 2 | PT. Pertamina Patra Niaga | 67 | 17,541,722,600 |
| 3 | PT Semen Gresik Tbk | 78 | 11.416.858.052 |
| 4 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Semarang | 45 | 7,530,600,595 |
| 5 | Bank Jateng | 34 | 6,904,480,000 |
| 6 | PT Bhimasena Power Indonesia | 172 | 5,280,642,057 |
| 7 | PT Kilang Pertamina International Refinery Unit IV Cilacap | 175 | 3,836,688,850 |
| 8 | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | 5 | 3,366,094,598 |
| 9 | PT Phapros Tbk | 78 | 3.141.113.930 |
| 10 | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah | 78 | 2,930,114,999 |
| 11 | PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | 53 | 2,917,350,000 |
| 12 | PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelabuhan Tanjung Intan | 38 | 2,497,445,893 |
| 13 | PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul.Tbk | 28 | 2,291,630,000 |
| 14 | PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng | 34 | 1.498.445.150 |
| 15 | PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta | 17 | 1,272,210,000 |
| 16 | PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap | 171 | 1,203,620,022 |
| 17 | PT Indonesia Power Semarang PGU | 80 | 1,192,738,250 |
| 18 | PT Sumber Segara Primadaya | 18 | 1,188,218,087 |
| 19 | PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) | 35 | 1,129,295,600 |

| No | Perusahaan | Jumlah Program | Jumlah Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| 20 | PT. Dan Liris | 66 | 986,355,600 |
| 21 | PT Sinar Tambang Arthalestari | 74 | 948,380,000 |
| 22 | PT Jateng Petro Energi | 37 | 895,030,990 |
| 23 | PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) | 122 | 892.674.789 |
| 24 | PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) | 128 | 857.200.599 |
| 25 | PT Indonesia Power Mrica Power Generation Unit | 11 | 829,932,547 |
| 26 | PT. Sri Rejeki Isman Tbk | 36 | 811,547,500 |
| 27 | PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) | 60 | 783.062.300 |
| 28 | PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah | 52 | 690,356,583 |
| 29 | PT Kayu Lapis Indonesia | 90 | 456,973,770 |
| 30 | BPR BKK Demak | 57 | 350,072,500 |
| 31 | PT Jamkrida Jateng | 45 | 342,177,000 |
| 32 | PT BPR Surya Yudhakencana | 36 | 327,193,400 |
| 33 | Angkasa Pura Airports | 6 | 281,248,650 |
| 34 | PT. Dua Kelinci | 76 | 272.488.000 |
| 35 | PT Nojorono Tobacco International | 12 | 244,116,401 |
| 36 | BPR BKK Blora | 49 | 211.224.500 |
| 37 | BPR BKK Pati | 46 | 178.584.800 |
| 38 | BPR BKK Jepara | 30 | 170,094,000 |
| 39 | PD Citra Mandiri Jawa Tengah | 17 | 163.850.000 |
| 40 | BPR BKK Temanggung | 27 | 113,862,000 |
| 41 | BPR BKK Tasikmadu | 50 | 111,619,204 |
| 42 | PT Trans Marga Jateng | 6 | 96,267,450 |
| 43 | PT BPR BKK KOTA Semarang | 20 | 91,546,035 |
| 44 | BPR BKK Purwodadi | 14 | 87,876,750 |
| 45 | PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory | 19 | 87,008,450 |
| 46 | BPR BKK Boyolali | 6 | 85,000,000 |
| 47 | BPR BKK Banjarharjo | 12 | 84,521,000 |
| 48 | BPR BKK Batang | 15 | 42,362,000 |
| 49 | PT. SAS Kreasindo Utama | 11 | 35,554,200 |
| 50 | PT. Intiniaga Tunassejahtera (Wings Group) | 25 | 32,800,000 |
| 51 | PT Pusat Rekeasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah | 5 | 25,500,000 |
| 52 | BPR BKK Kota Tegal | 9 | 23,376,500 |

| No | Perusahaan | Jumlah Program | Jumlah Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| 53 | PT BPR BKK Kota Magelang (Perseroda) | 10 | 11,155,000 |
| 54 | Grand Dian Hotel Slawi | 3 | 9,690,000 |
| 55 | BPR BKK Karangmalang | 2 | 5,966,000 |
| 56 | PT Kenlee Indonesia | 3 | 1,700,000 |
| 57 | PT Pringsewu Cemerlang | 5 | 1,600,000 |
| **TOTAL** | | **2,717** | **113.561.417.851** |

*Sumber: Forum TJSLP Provinsi Jawa Tengah, Per 31 Januari 2023.*

**Tabel 3.13.**
**Rekapitulasi Alokasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Tahun 2022**

| No | Bidang Pokja | Jumlah Program | Jumlah Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bidang Olahraga, Seni, Budaya dan Pariwisata | 309 | 45,558,933,049 |
| 2 | Bidang Kesejahteraan Sosial | 555 | 18,584,058,013 |
| 3 | Bidang Usaha Ekonomi Rakyat | 520 | 10,131,548,144 |
| 4 | Bidang Pendidikan | 274 | 8,449,474,728 |
| 5 | Bidang Kedaruratan | 72 | 5,968,952,935 |
| 6 | Bidang Keagamaan | 318 | 5,651,984,696 |
| 7 | Bidang Pendampingan Umum | 83 | 4,732,777,605 |
| 8 | Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 120 | 3,831,427,928 |
| 9 | Bidang Kesehatan | 206 | 2,246,965,731 |
| 10 | Bidang Infrastruktur | 225 | 2,094,287,075 |
| 11 | Bidang Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan | 26 | 1,852,377,725 |
| 12 | Bidang Energi Baru Terbarukan | 9 | 833,245,000 |
| **TOTAL** | | **2,717** | **109,936,032,629** |

*Sumber: Forum TJSLP Provinsi Jawa Tengah, per 13 Januari 2022.*

**Tabel 3.14.**
**Realisasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Tahun 2022 dan TW.II Tahun 2023**

| No | Bidang Pokja | 2022 | | TW.II Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Program | Jumlah Anggaran (Rp) | Jumlah Program | Jumlah Anggaran (Rp) |
| 1 | Bidang Olahraga, Seni, Budaya dan Pariwisata | 377 | 4.264.840.226 | 34 | 533.771.968 |
| 2 | Bidang Kesejahteraan Sosial | 590 | 19.178.982.253 | 100 | 3.466.735.065 |
| 3 | Bidang Usaha Ekonomi Rakyat | 531 | 45.604.346.549 | 53 | 3.909.809.767 |

| No | Bidang Pokja | 2022 | | TW.II Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Program | Jumlah Anggaran (Rp) | Jumlah Program | Jumlah Anggaran (Rp) |
| 4 | Bidang Pendidikan | 287 | 8.626.191.714 | 75 | 1.422.144.000 |
| 5 | Bidang Kedaruratan | 80 | 2.192.882.845 | 27 | 66.5247.985 |
| 6 | Bidang Keagamaan | 355 | 5.750.422.195 | 72 | 1.020.982.700 |
| 7 | Bidang Pendampingan Umum | 104 | 2.362.040.286 | 26 | 1.612.181.470 |
| 8 | Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 134 | 4.991.587.605 | 29 | 498.770.500 |
| 9 | Bidang Kesehatan | 215 | 6.037.234.363 | 59 | 543.434.833 |
| 10 | Bidang Infrastruktur | 243 | 11.854.467.090 | 38 | 2.812.022.000 |
| 11 | Bidang Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan | 28 | 1.865.177.725 | 9 | 638.081.600 |
| 12 | Bidang Energi Baru Terbarukan | 9 | 833,245,000 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | **2953** | **113.561.417.851** | **522** | **17.123.181.888** |

*Sumber: Forum TJSLP Provinsi Jawa Tengah, per 31 Januari 2023.*

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2024 adalah tahun transisi pertama di mana RPJMD Tahun 2018-2023 telah berakhir seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2024, kebijakan yang menjadi pedoman adalah RPD Tahun 2024-2026. Pembangunan Jawa Tengah dalam RPD Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mencapai tujuan Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari, diukur dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, rasio gini, dan angka kemiskinan.

Mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera adalah keberlanjutan dari tujuan pembangunan Jawa Tengah pada periode RPJMD sebelumnya dan merupakan mandat dari tujuan pembangunan jangka panjang Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata dan semua masyarakat memiliki hak yang sama atas pemenuhan kebutuhan dasarnya (*no one left behind*) agar masyarakat Jawa Tengah dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

Tujuan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera juga dibarengi dengan lestari yang dimaknai sebagai pembangunan masyarakat Jawa Tengah yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keberhasilan pencapaian tujuan daerah selama tahun 2024-2026 ditunjukkan dengan indikator menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita masyarakat Jawa Tengah dari tahun ke tahun, dan menurunnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat.

Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari didukung dengan empat sasaran pembangunan daerah, meliputi:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 4.1.**
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2024**

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari** | | | | |
| | | PDRB per Kapita | Juta Rupiah | 45,82 |
| | | Angka Kemiskinan | % | 9,76-8,96 |
| | | Rasio Gini | Angka | 0,364 |
| | Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan | | | |
| | | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,70 - 5,50 |
| | | Inflasi | % | 3,0 ± 1 |
| | | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,44 - 4,94 |
| | | Nilai Tukar Petani | Angka | 107,45 |
| | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif | | | |
| | | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 73,43 |
| | | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Angka | 60,27 |
| | | Indeks Pembangunan Gender | Angka | 93,03 |
| | | Indeks Pembangunan Keluarga | Angka | 58,20 |
| | Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup | | | |
| | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Angka | 67,55 |
| | | Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana | % | 4,00 |
| | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis | | | |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 81,50 |

## 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

### 4.2.1. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran disampaikan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai masukan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2024 yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan terutama terkait dengan kelengkapan data, permasalahan beberapa sektor yang belum terakomodir, dan arah kebijakan keuangan daerah. Telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD lebih lanjut dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 4.2.**
**Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah**
**Pada Musrenbang Provinsi Tahun 2024**

| NO | POKOK-POKOK PIKIRAN | TELAAH |
|---|---|---|
| | **Data tidak lengkap:** | |
| 1 | Pada Tabel 2.96. untuk Tahun 2022 masih belum ada data Jumlah Bumdes, Pasar desa, UED-SP dan Up2K-PKK. (Bab II hal. 109) | Substasi pokok-pokok pikiran terkait kelengkapan data baik terkait data maupun penyajian dalam tabel atau grafik akan ditindaklanjuti pada Bab II RKPD Tahun 2024 sebagai bahan masukan penyempurnaan dokumen Rancangan RKPD menjadi dokumen RKPD Tahun 2024 |
| 2 | Pada Tabel 2.105 dan 2.106 untuk Tahun 2022 masih belum dilengkapi dengan data keterlibatan perempuan di parlemen serta perempuan sebagai manajer, professional, administasi dan teknis. (Bab II hal.122) | |
| 3 | Pada pembahasan olahraga, tidak dilengkapi dengan Tabel atau grafik yang menunjukkan perkembangan sport development indeks (SDI). (Bab II hal.126) | |
| 4 | Pada Tabel 2.121 untuk Tahun 2022 masih belum dilengkapi data kondisi penyakit tidak menular. (Bab II hal.139) | |
| 5 | Pada Tabel 2.147 untuk Tahun 2022 masih belum dilengkapi data pengiriman transmigran. (Bab II Hal.159) | |
| 6 | Pada Tabel 2.184 untuk Tahun 2022 masih belum dilengkapi data jumlah dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi penelitian. (Bab II hal.224) | |
| 7 | Pada Tabel 2.160 luas pencurian pohon terdata Tahun 2021 seluas 14,6 ha dan Tahun 2022 seluas 91 ha; luas kebakaran hutan Tahun 2021 seluas 99,97 ha dan 2022 seluas 10,79. Data Tahun 2022 berubah signifikan dibanding 2021. Selain itu, pada narasi di atasnya tidak konsisten dengan data pada Tabel, dimana hanya disampaikan analisa kerusakan kawasan hutan sebagai contoh kerusakan hutan dari pencurian pohon dari Tahun 2020 ke 2021 sementara data yang disajikan dalam Tabel sampai dengan Tahun 2022. (Bab II hal.178) | Analisis dan penjelasan terkait data pada tabel yang tidak konsisten, akan diperbaiki dan memastikan kembali semua data dan penjelasannya konsisten, dan dituangkan pada Bab II RKPD Tahun 2024 |
| 8 | Evaluasi terkait Pemberdayaan masyarakat dan desa sudah diusampaikan pada halaman II-109 (ada double pembahasan). (Bab II halaman 232) | Data yang disajikan berulang akan dicermati kembali secara substansi untuk memastikan bahwa data tersebut lebih tepat menjadi data dukung kondisi gambaran umum yang mana dan akan ditindaklanjuti pada Bab II RKPD Tahun 2024 |
| 9 | Dalam uraian yang menjelaskan data pada Tabel 2.205, untuk pertumbuhan ekonomi masih Triwulan III Tahun 2021 (belum diupdate dengan publikasi BPS terbaru yaitu Tahun 2022). (Bab II hal.243) | Semua data yang belum diupdate sampai akhir tahun 2022 akan dicermati kembali dan akan diperbarui pada Bab II RKPD Tahun 2024 |
| | **Permasalahan:** | |
| 10 | a. Permasalahan pendidikan untuk dikaitkan dengan masih tingginya anak tidak sekolah (ATS). | Permasalahan pendidikan akan dicermati kembali secara substansi berdasarkan analisis data dan informasi yang disajikan, dan akan dirumuskan lebih mendalam lagi |

| NO | POKOK-POKOK PIKIRAN | TELAAH |
|---|---|---|
| | b. Selain itu disampaikan salah satu permasalahan pendidikan adalah masih kurangnya mutu pendidikan. Kondisi mutu pendidikan secara umum dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: 1) Kualitas lulusan SMK yang dari hasil penilaian Kemendikbud, tingkat penyerapan lulusan SMK di Jateng sudah mencapai 92,53% pada Tahun 2022.; 2) Kualitas guru dimana kurang lebih 97% telah berkualifikasi D4/S1; 3) Kondisi sarpras yang sesuai data di Rancangan RKPD 2024 hanya terdapat 3 unit sapras SMA rusak sedang/derat dan 25 unit sarpras SLB rusak sedang/berat; 4) Biaya dengan adanya fasilitasi bantuan operasional sekolah/siswa baik negeri maupun swasta. Terkait ini seharusnya mutu pendidikan di Jawa Tengah sudah cukup baik. Untuk itu, dalam perumusan permasalahanya perlu dijabarkan hal-hal startegis yang perlu diintervensi di 2024 untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan (Bab II hal.246) | terutama pada hal-hal strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam RKPD Tahun 2024, dan akan dituangkan pada Bab II RKPD Tahun 2024 |
| 11 | Permasalahan pangan masih belum diuraikan secara spesifik sebagai contoh untuk ketersediaan pangan disampaikan "namun masih terdapat beberapa komoditas pangan yang perlu didorong" dimana belum menggambarkan permasalahan sesungguh-nya yang perlu diintervensi di Tahun 2024 (Bab II hal. 248) | Permasalahan terkait pangan pada Bab II akan dirumuskan lebih lanjut agar lebih spesifik untuk dapat diintervensi melalui program kegiatan pada tahun 2024, dan akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2024 |
| 12 | Permasalahan Lingkungan Hidup belum menguraikan berkaitan dengan masalah sampah dimana sampah merupakan permasalahan selama manusia masih ada. Tetapi belum terlihat yang membahas permasalahan persampahan. Permasalahan sampah jangan digabung dalam permasalahan limbah, harus ada pemilahan antara limbah industri dan sampah utamanya rumah tangga (Bab II hal. 248) | Perumusan permasalahan pengelolaan sampah pada urusan lingkungan hidup akan dijabarkan lebih lanjut, dan dipilah antara permasalahan pengelolaan sampah dan limbah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2024 |
| 13 | Permasalahan pemberdayaan masyarakat dan desa belum secara spesifik menggambarkan permasalahan yang terjadi dan perlu mendapatkan penanganan di 2024 (Bab II hal.249) | Permasalahan pemberdayaan masyarakat dan desa akan dirumuskan kembali lebih detail terutama pada permasalahan yang menjadi prioritas untuk dilakukan penanganan pada tahun 2024, dan akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2024 |
| 14 | Permasalahan urusan pertanian masih belum spesifik seperti terkait kesejahteraan petani dan peternak yang menyampaikan "masih diperlukan dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak", namun belum menjelaskan faktor yang mempengaruhi dan memerlukan penanganan di Tahun 2024. (Bab II hal. 252) | Perumusan permasalahan urusan pertanian akan lebih dijelaskan kembali terutama terkait dengan kesejahteraan petani dan peternak, yang akan dilakukan intervensi pada tahun 2024 dan akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2024 |

| NO | POKOK-POKOK PIKIRAN | TELAAH |
|---|---|---|
| 15 | Konsisten dalam penyusunan target antar bab yang berhubungan. Seperti antara Bab III dan VII. Dimana pajak daerah pada Bab III ditargetkan naik Rp190 M atau tumbuh 1,25%, sedangkan pada Bab VII ditargetkan tumbuh 13,09%. (Bab VII hal.6) | Penyusunan target akan dicermati kembali agar lebih konsisten antar bab, terutama pada target keuangan daerah, dan akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2024 |
| 16 | Tahun 2024 Indeks SO2 dan NO2 ditargetkan 0,37 atau stagnan dengan realisasi tahun 2022 yang sebesar 0,3707 (Bab VII hal.4) | Indikator indeks SO2 dan NO2 merupakan jenis indikator progres negatif, dimana target semakin kecil semakin baik. Indeks ini menggambarkan tingkat pencemaran dimana semakin sedikit nilainya berarti semakin baik tingkat pencemarannya |
| 17 | Tahun 2024 Indeks ketersediaan air tanah ditargetkan 3,60 menurun dari tahun 2022 yang sebesar 3,67 (Bab VII Hal.5) | Perhitungan indeks ketersediaan air tanah tahun 2024 menggunakan metode perhitungan dan variabel yang lebih lengkap dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga berpengaruh terhadap penetapan target mulai tahun 2024 |
| | **Keuangan Daerah:** | |
| 18 | Ada perbedaan perhitungan proporsi rincian pendapatan hibah terhadap total pendapatan daerah di Tabel 3.3 antara Tahun 2020 dan 2021 dengan Tahun 2022. Proporsi pendapatan hibah terhadap total pendapatan daerah Tahun 2020 tertulis 100%. Jika melihat pendapatan hibah Tahun 2020 sebesar Rp23,35M dan total pendapatan daerah adalah Rp25,39T seharusnya proprosinya adalah 0,09%. Demikian pula dengan Tahun 2021 dimana pendapatan hibah sebesar Rp64,88M dan total pendapatan daerah Rp26,63T sehingga proporsi terhadap total pendapatan daerah adalah 0,24%. (Bab III hal.8) | Perhitungan proporsi rincian pendapatan hibah pada Bab III akan dicermati kembali, untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat, dan akan ditindaklanjuti dengan menuangkannya pada Bab III |
| 19 | 1) Ketidaksinkronan target Bab III dan Bab VIII. Mendasarkan hasil perhitungan target PAD pada RKPD 2024 Bab VII, dimana pajak daerah ditargetkan tumbuh 13,09% serta retribusi dan pendapatan lain-lain ditargetkan tumbuh minus 1,2%. Proyeksi PAD Tahun 2024 mendasarkan Target Pertumbuhan Pajak, Retribusi dan pendapatan lain-lain dalam RKPD 2024:<br>a. Pertumbuhan pajak daerah Tahun 2024 pada RKPD Bab VII ditargetkan 13,09% atau sebesar Rp17,264<br>b. Pertumbuhan retribusi dan pendapatan lain-lain Tahun 2024 Bab VII ditargetkan minus 1,12%. Sehingga sesuai target RKPD, pendapatan retibusi Rp136,35M dan pendapatan lain-lain Rp1,85T. Sehingga total PAD Tahun 2024 sesuai target RKPD 2024 Rp19,898T<br>2) Pesimis dalam menentukan PAD Bab III jika | Perhitungan pendapatan daerah akan dicermati kembali, dan akan disesuaikan jika sudah sesuai antara persentase proporsinya sehingga mendapatkan angka pendapatan absolut yang lebih tepat, dengan peningkatan yang lebih sesuai dengan kemampuan potensi yang ada. Hasil perhitungan akan dituangkan dalam Bab III, Bab VI, dan Bab VIII RKPD Tahun 2024 |

| NO | POKOK-POKOK PIKIRAN | TELAAH |
|---|---|---|
| | kita bandingkan APBD untuk PAD Tahun 2023 dengan proyeksi RKPD Tahun 2024, untuk PAD hanya mengalami peningkatan 1,39% atau Rp. 249 Milyar.Kenapa hal tersebut dikatakan pesimis karena:<br>a. Melihat trend pertumbuhan PAD Tahun 2021 – 2023 berkisar 10%.<br>b. Mendasarkan Pendekatan Elastisitas (persentase peningkatan PAD untuk setiap 1 % pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan), yaitu:<br>(1) Nilai elastisitas sebesar 1,85 dihitung dari rata-rata elastisitas dari Tahun 2018- 2023<br>(2) Pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah target Tahun 2024 sebesar 4,7- 5,5%<br>(3) Hasil:<br>a) PAD Tahun 2024 dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi 4,7%, maka diperoleh pertumbuhan PAD Tahun 2024 di angka 8,70% dan PAD Rp21,162T<br>b) PAD Tahun 2024 dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi 5,5%, maka diperoleh pertumbuhan PAD Tahun 2024 di angka 10,18% dan PAD Rp21,742T<br>3) Mendasarkan dari hasil analisa perhitungan target PAD sesuai target pajak, reribusi dan pendapatan lain-lain dalam RKPD serta pendekatan elastisitas pertumbuhan ekonomi, maka proyeksi PAD Tahun 2024 berada pada kisaran Rp19,898T (terendah) sampai dengan Rp21,742T (tertinggi).<br>(Bab III-9 dan VII-6) | |
| 20 | Dalam halaman III-9 RKPD 2024, upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah utamanya untuk retribusi adalah Penghitungan ulang terhadap struktur dan besaran tarif retribusi; Peningkatan kompetensi petugas pelayanan retribusi; Pengembangan aplikasi untuk pelayanan pembayaran retribusi; Peningkatan sarana prasarana pendukung objek retribusi. Tetapi jika membandingkan pendapatan retribusi APBD Tahun 2023 Rp137,9 Milyar dan Tahun 2024 yang sebesar Rp136,3 Milyar justru mengalami penurunan. (Bab III hal. 9) | Akan dilakukan perhitungan kembali terhadap nilai retribusi daerah dengan mempertimbangkan potensi retribusi daerah termasuk yang berasal dari komponen lain-lain PAD yang sah. Hasil perhitungan akan dituangkan kembali pada Bab III dan Bab VI RKPD Tahun 2024 |
| 21 | Belanja Hibah Tahun 2024 yang sebesar Rp1,41T ini menurun dari Tahun 2023 yang sebesar Rp2,23T. Perlu diingat bahwa hibah Tahun 2024 mengakomodir kebutuhan pendanaan Pilkada Serentak yang dari | Belanja hibah pada dokumen Rancangan RKPD belum mengakomodir belanja hibah untuk pilkada serentak tahun 2024. Nilai hibah akan dihitung kembali, dan akan dituangkan dalam Bab III RKPD Tahun 2024 |

| NO | POKOK-POKOK PIKIRAN | TELAAH |
|---|---|---|
| | pencairan dana cadangan ada dana Rp900M termasuk kebutuhan untuk fasilitasi bantuan pendidikan SMA/SMK swasta/MA dan insentif guru ngaji. (Bab III hal.13) | |
| 22 | Pada saat Musrenbangwil di disampaikan dibutuhkan dukungan DPRD untuk penanganan jalan dan sumberdaya air, yaitu kebutuhan anggaran jalan untuk managemen ruas tuntas Tahun 2024 sebesar Rp3,2 T, dari total kebutuhan Rp15 T. Sedangkan untuk kebutuhan infrastruktur sumberdaya air secara total membutuhkan Rp5,7 T. Tetapi jika melihat dari Bab III justru di belanja modal hanya Rp2 T. Untuk itu, sebenarnya bagaimana rencana dari penanganan infrastruktur untuk Tahun 2024. (Bab III hal.13) | Prioritas belanja pada tahun 2024 sebagaimana tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dan mandatori kebijakan dari pemerintah pusat, diarahkan untuk fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, dan penyelenggaraan pilkada serentak. Sehingga berdasarkan perhitungan, untuk belanja modal di tahun 2024 cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu dari Rp1,9 triliun menjadi Rp1,7 triliun. |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023*

### 4.2.2. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024

Tahun 2024 adalah tahun terakhir untuk pemenuhan target sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2024 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 diarahkan pada tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema tersebut dipandang sebagai upaya untuk memenuhi target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode tahun 2025-2029.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, dan penurunan emisi gas rumah kaca, dengan target pada tahun 2024 sebagai berikut:
   a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,7 persen;
   b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0-5,7 persen;
   c. Rasio Gini sebesar 0,374-0,477;
   d. Penurunan emisi GRK sebesar 27,27 persen;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan, dengan target pada tahun 2024 sebagai berikut:
   a. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99-74,02;
   b. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5-7,5 persen.

Selain itu aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan, dengan target pada tahun 2024 sebagai berikut:

a. Nilai Tukar Petani sebesar 105-108;
b. Nilai Tukar Nelayan sebesar 107-110.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024 yaitu 1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, 2) peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, 3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, 4) penguatan daya saing usaha, 5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, 6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, 7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta 8) pelaksanaan Pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Ketujuh PN RKP Tahun 2024 meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing,
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim,
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung perwujudan tema dan sasaran pembangunan nasional tahun 2024, dalam RKP Tahun 2024 ditetapkan strategi pengembangan wilayah. Strategi pengembangan wilayah tahun 2024 ditujukan untuk mempercepat transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masing-masing wilayah, meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah, meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah, meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, serta mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali.

Strategi pengembangan wilayah untuk Wilayah Jawa-Bali terutama untuk didorong dilaksanakan di wilayah Jawa Tengah tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi wilayah
   a. Mempercepat realisasi investasi dan beroperasinya KI Terpadu Batang dan KEK Kendal melalui optimalisasi paket-paket fiskal dan nonfiskal yang disesuaikan dengan potensi/tema pembangunan kawasan;
   b. Mempercepat pengembangan kawasan-kawasan pariwisata unggulan berdasarkan keuntungan kompetitifnya di Kawasan Borobudur dan sekitarnya;
   c. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung pengembangan kawasan melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, perbaikan kesesuaian kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan

pendidikan tinggi vokasi sesuai kebutuhan lapangan kerja, serta pengembangan BLK;

d. Meningkatkan kelayakhunian dan peran WM Semarang sebagai pusat layanan pendukung sektor industri dan ekonomi kreatif;
e. Meningkatkan konektivitas kawasan untuk memperluas jangkauan layanan dan distribusi melalui penyediaan konektivitas inter dan intrawilayah, penyediaan transportasi massal perkotaan sesuai dengan kebutuhan distribusi layanan serta pengembangan sistem transportasi multimoda;
f. Meningkatkan kepastian hukum terkait hak atas tanah, pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama regional Wilayah Jawa-Bali dalam peningkatan daya saing daerah, pengembangan sumber pembiayaan alternatif dan investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wialyah Jawa Bali;
g. Mengedepankan pembangunan rendah karbon melalui peningkatan efektivitas pengendalian alih fungsi lahan dan pengelolaan limbah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
h. Mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah;

2. Strategi pemerataan intrawilayah Jawa-Bali
   a. Meningkatkan hubungan desa-kota di Jawa bagian selatan dan Bali bagian utara dengan mengembangkan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Magelang, dan Kendal, yang bertumpu pada hilirisasi pertanian dan pariwisata inklusif;
   b. Mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas antara Jawa bagian utara dengan Jawa bagian selatan sebagai akselerator pemerataan ekonomi;
   c. Memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM di daerah;
   d. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Jawa-Bali;
   e. Peningkatan pendapatan dan kualitas belanja daerah yang tepat sasaran, dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, produktif, dan akuntabel;
   f. Mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam memperkuat sinergi kebijakan pusat-daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah;
   g. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan (difokuskan pada pendidikan menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi vokasi), serta layanan kesehatan (difokuskan pada puskesmas dan klinik menjangkau langsung masyarakat);
   h. Meningkatkan efektivitas pengendalian alih fungsi lahan dan pengelolaan limbah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
3. Strategi penguatan ketahanan bencana
   a. Pada wilayah ujung barat dan pesisir selatan Pulau Jawa upaya difokuskan untuk mengantisipasi ancaman bencana gempa tektonik, tsunami, dan tanah longsor;

b. Penguatan mitigasi bencana di kawasan perkotaan dan pesisir pantai utara difokuskan untuk mengantisipasi potensi banjir, abrasi garis pantai, dan penurunan muka tanah;
c. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana deteksi dini kebencanaan, serta pengembangan data kebencanaan;
d. Revitalisasi mekanisme kerjasama lintas daerah dan multipihak, khususnya dalam hal sinergi pembiayaan penanggulangan bencana.

Pada tahun 2024, Wilayah Jawa-Bali memiliki sasaran utama dengan target yang harus dicapai meliputi:

a. meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah, dengan indikator kinerja dan targetnya yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,0-5,4 persen;
b. menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan, dengan indikator kinerja dan targetnya yaitu Tingkat Kemiskinan sebesar 9,50-10,00 persen;
c. meningkatnya kesempatan kerja khususnya di perkotaan, dengan indikator kinerja dan targetnya sebesar 4,26-4,96 persen.

### 4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2024 berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada tema pembangunan daerah yaitu **Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas**. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah (PD) dan fokusnya sebagai berikut:

1. **PD 1: Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas**, dengan fokus pada:
   a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:
      1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
      2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
      3) Pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan *(food loss and waste);*
      4) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
      5) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis *green investment*, pengembangan kawasan industri/kawasan peruntukan industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak

yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;

6) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
7) Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah;
8) Penerapan pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) yang diawali dengan penyusunan dokumen pembangunan hijau di Provinsi Jawa Tengah dan ekonomi sirkular (*circular economy*) secara bertahap sebagai *tools* untuk mencapai pembangunan rendah karbon.

b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:
   1) Peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
   2) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi SPAM kabupaten/kota, pembangunan SPAM desa, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
   3) Pemenuhan kebutuhan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi prasarana dan sarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas puskesos;
   4) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antardaerah dan kewilayahan;

c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;

d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;

e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan *database* petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya

saing dan berkelanjutan, dengan indikator kinerjanya yaitu: 1) pertumbuhan ekonomi, 2) inflasi, 3) tingkat pengangguran terbuka, dan 4) nilai tukar petani. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
3) Program Penyelenggaraan Jalan;
4) Program Pengembangan Perumahan;
5) Program Kawasan Permukiman;
6) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
7) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
9) Program Pemberdayaan Sosial;
10) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
11) Program Rehabilitasi Sosial;
12) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
13) Program Penanganan Bencana;
14) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
15) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
16) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
17) Program Pengawasan Keamanan Pangan;
18) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
19) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
20) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat;
21) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
22) Program Pengelolaan Pelayaran;
23) Program Pengelolaan Perkeretaapian;
24) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
25) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
26) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
27) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
28) Program Pengembangan UMKM;
29) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
30) Program Promosi Penanaman Modal;
31) Program Pelayanan Penanaman Modal;
32) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
33) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
34) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
35) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
36) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
37) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
38) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
39) Program Pemasaran Pariwisata;

40) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
41) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
42) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
43) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
44) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat;
45) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
46) Program Penyuluhan Pertanian;
47) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara;
48) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
49) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
50) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
51) Program Pengembangan Ekspor;
52) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
53) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
54) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
55) Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
56) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
57) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
58) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
59) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
60) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
61) Program Perencanaan Tenaga Kerja;
62) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
63) Program Penempatan Tenaga Kerja;
64) Program Hubungan Industrial;
65) Program Pengawasan Ketenagakerjaan;
66) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

2. **PD 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**, dengan fokus pada upaya:
   a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata melalui perluasan akses layanan pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan yang akurat, serta cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, anak tidak sekolah (ATS), serta inklusi; peningkatan digitalisasi pendidikan; peningkatan tata kelola pendidikan didukung dengan penguatan koordinasi secara lintas *stakeholder*, serta optimalisasi peran fungsi instansi/lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat; peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan kerangka regulasi berorientasi pada akses mutu dan relevansi pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan termasuk ATS;
   b. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan prasarana dan sarana, pemenuhan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan *baseline* data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM

kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan *stroke*, masalah kesehatan jiwa serta kejadian luar biasa (KLB)/krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;

c. Meningkatkan penyadaran dan peningkatan literasi masyarakat untuk hidup bugar, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga, serta pemetaan potensi atlet;
d. Meningkatkan dan memperluas akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid, serta penyediaan bahan literasi;
e. Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda;
f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan lokal, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat, peningkatan tata kelola kebudayaan, serta penguatan koordinasi, fasilitasi dengan kabupaten/kota, dan sinergi dengan pemerintah pusat;
g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelengaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, dengan indikator kinerjanya yaitu: 1) indeks pembangunan manusia, 2) indeks pembangunan kebudayaan, 3) indeks pembangunan gender, dan 4) indeks pembangunan keluarga. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Pendidikan;
2) Program Pengembangan Kurikulum;
3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;

5) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
7) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
8) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
9) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;
10) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
11) Program Pengembangan Kebudayaan;
12) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
13) Program Pembinaan Sejarah;
14) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
15) Program Pengelolaan Permuseuman;
16) Program Pembinaan Perpustakaan;
17) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
18) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
19) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
20) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
21) Program Perlindungan Perempuan;
22) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
23) Progam Perlindungan Khusus Anak;
24) Program Pengendalian Penduduk;
25) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
26) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

3. **PD 3: Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung**, dengan fokus pada upaya:
   a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara *ambien*, penyediaan sarana prasarana pengolah limbah dan persampahan (TPST Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
   b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan energi berkelanjutan, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
   c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan,

peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi cekungan air tanah (CAT) Jawa Tengah, serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;

d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/*early warning system* (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan indikator kinerjanya yaitu: 1) indeks kualitas lingkungan hidup, dan 2) persentase penurunan indeks risiko bencana. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
4) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
5) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
6) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
7) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
8) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
9) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
10) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
11) Program Pengelolaan Persampahan;
12) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
13) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
14) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
15) Program Pengelolaan Hutan;
16) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
17) Program Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan;

18) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
19) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian;
20) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;
21) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
22) Program Penanggulangan Bencana.

4. **PD 4: Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif**, dengan fokus pada upaya:
   a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;
   b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerja sama antarpemerintah, dan pemerintah dengan lembaga nonpemerintah.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, dengan indikator kinerjanya yaitu indeks reformasi birokrasi. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2) Program Penataan Bangunan;
3) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
4) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
5) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
6) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
7) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
8) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
9) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
10) Program Pendaftaran Penduduk;
11) Program Pencatatan Sipil;
12) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
13) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
14) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
15) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
16) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
17) Program Pengelolaan Arsip;
18) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
19) Program Penataan Organisasi;
20) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
21) Program Kesejahteraan Rakyat;
22) Program Failitasi dan Koordinasi Hukum;

23) Program Perekonomian dan Pembangunan;
24) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;
25) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan;
26) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
27) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
28) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
29) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
31) Program Kepegawaian Daerah;
32) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
33) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
34) Program Pelayanan Penghubung;
35) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
36) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
37) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
38) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
39) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
40) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
41) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2024 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. PDRB per Kapita sebesar 45,82 juta rupiah;
2. Angka kemiskinan sebesar 9,76-8,96 persen;
3. Rasio Gini sebesar 0,364;
4. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,70-5,50 persen;
5. Inflasi sebesar 3,0 ± 1 persen;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44-4,94 persen;
7. Nilai Tukar Petani sebesar 107,45 persen;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,43;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 60,27;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,03;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,20;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,55;
13. Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 4,00 persen; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 81,50.

Upaya perwujudan tema pembangunan, prioritas daerah, dan pencapaian target IKU Daerah tahun 2024 tersebut didukung dengan **10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan Daerah** sebagai program unggulan daerah tahun 2024. Kesepuluh program prioritas tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil**

Pesta demokrasi di Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan digelarnya Pemilu serentak tahun 2024 yang akan memilih presiden dan wakil presiden, legislatif, serta gubernur dan wakil gubernur. Seluruh lapisan masyarakat yang telah memiliki hak pilih wajib untuk mengikuti pemilu serentak tahun 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan beberapa kegiatan sejak tahun 2023, dan akan dilanjutkan pada tahun 2024 sampai dengan pemilu berakhir. Beberapa kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan antara lain dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu. Masyarakat diajak untuk secara bijaksana menyampaikan hak pilihnya serta ikut berperan serta dalam menjaga kelancaran, keamanan, dan ketertiban selama proses penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak antara lain Forkompimda dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk bersama-sama mempersiapkan pengamanan selama proses pemilu. Selain itu juga dilakukan latihan pengamanan bersama dalam rangka memastikan kesigapan pengamanan selama proses pemilu berlangsung hingga langkah-langkah dalam menghadapi situasi aksi kegaduhan dan unjuk rasa, termasuk dengan situasi kamtibmas lainnya.

2. **Menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyakarat**

Kondusivitas daerah merupakan salah satu prasyarat untuk mendukung perekonomian daerah yang stabil yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang harus dilakukan guna mewujudkan kondusivitas daerah adalah dengan menjaga stabilitas politik, sosial, ekonomi, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan upaya tersebut sebagai salah satu program prioritas yang harus dilakukan, termasuk utamanya pada saat-saat menjelang pemilu serentak pada tahun 2024.

Berbagai strategi telah dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat di antaranya pencegahan gangguan trantibum melalui deteksi dini dan cegah dini; mobilisasi satlinmas untuk membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban, penanggulangan dan pencegahan bencana; penegakan perda provinsi atau peraturan gubernur; pembinaan trantibum terdiri dari pembinaan pengamanan obyek vital (pam obvit) serta pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (turjawali). Selain itu juga dilaksanakan patroli pengendalian trantibum; penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; pengamanan strategis dan tingkat provinsi termasuk pemilu serentak 2024; serta operasi penertiban trantibum (pekat dan cipta kondisi).

Edukasi kepada masyarakat tentang penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, serta pentingnya menjaga stabilitas politik, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat juga strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi agar masyarakat paham tentang arti penting kondusivitas

daerah. Selain itu, dilakukan juga pembinaan kepada partai politik, pemberdayaan dan pengawasan ormas, serta koordinasi dan fasilitasi kepada berbagai pihak dalam rangka pencegahan terjadinya konflik yang dapat mengganggu kondisivitas daerah.

**3. Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan**

Peningkatan inflasi yang terjadi dalam satu tahun terakhir memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian masyarakat dimana terjadi peningkatan harga sehingga mengurangi daya beli masyarakat. Melihat kondisi tersebut, pemerintah pusat menetapkan kebijakan prioritas pengendalian inflasi dan mendorong seluruh pemerintah daerah untuk juga kebijakan pengendalian inflasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui perangkat daerah juga telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program untuk mengendalikan inflasi Jawa Tengah dan pada tahun 2024 juga masih menjadi salah satu prioritas untuk dilaksanakan. Kebijakan yang dilakukan antara lain melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas.

Upaya meningkatkan keterjangkauan akses pangan juga sebagai upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan akses pangan masyarakat di antaranya subsidi harga pangan strategis produsen dan konsumen, gelar pangan murah, fasilitasi distribusi komoditas pangan strategis, cadangan pangan pemerintah (beras, kedelai, jagung dan pangan lokal), bantuan lumbung pangan masyarakat, promosi pangan lokal, fasilitasi desa B2SA (Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), serta fasilitasi kelompok usaha pangan lokal

Di sisi lain, produksi dan produktivitas pertanian juga terus didorong agar ketersediaan bahan pangan tetap terjaga. Berbagai kegiatan dilakukan untuk terus menjaga ketersediaan produk pertanian (termasuk pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan) antara lain peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana, penyediaan bibit dan benih, peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya, penyediaan asuransi petani dan nelayan, penyediaan subsidi bunga kredit bagi petani, pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi, serta rehabilitasi sarana penampungan air (embung).

**4. Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan *stunting***

Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanganan *stunting* merupakan kebijakan Nasional yang harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah. Kebijakan tersebut juga telah dan akan terus didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan menjadi program prioritas pada tahun 2024. Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah akan dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial antara lain bantuan siswa miskin (BSM), seragam siswa miskin, jaminan sosial, pemberian bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program Kartu Jateng Sejahtera (KJS), serta bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia

serta anak dan penyandang disabilitas. Selain program bantuan sosial tersebut terdapat program subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

2. Peningkatan pendapatan masyarakat, diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya peningkatan akses pekerjaan melalui program padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung akses pekerjaan bagi masyarakat miskin; peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program vokasi dan pelatihan; peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan; pendampingan dan penguatan kewirausahaan melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar; serta pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
3. Penurunan wilayah kantong kemiskinan dilakukan melalui sinergi kebijakan, antara lain pemenuhan pelayanan dasar seperti peningkatan infrastruktur perumahan, jambanisasi, air minum dan sanitasi layak, peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Strategi utama tersebut didukung peningkatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan reliabilitas data dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta proses pendataan secara *bottom up*. Ketiga strategi tersebut dilaksanakan melalui pendekatan intervensi berbasis individu dan kewilayahan/spasial. Pendekatan individu menggunakan data mikro yang telah di verifikasi dan validasi serta terintegrasi dalam basis data kemiskinan yang dikelola oleh Dinas Sosial.

Untuk pendekatan kewilayahan difokuskan pada manfaat kolektif dengan skala dan cakupan lebih luas yang dampaknya bersifat jangka menengah dan panjang. Fokus pendekatan kewilayahan antara lain: 1) penanganan kemiskinan di kawasan kumuh, 2) peningkatan aksesibilitas di wilayah dengan kesulitan geografis tinggi, 3) peningkatan produktivitas pertanian, 4) pemberdayaan nelayan dan sektor perikanan, dan 5) pengembangan potensi lokal. Intervensi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) tersebut dilaksanakan secara lintas sektor, terfokus, dan konvergen di wilayah dengan potensi dan permasalahan yang telah diidentifikasi.

Selanjutnya dalam rangka penurunan angka *stunting*, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah dan akan terus melaksanakan berbagai upaya terintegrasi antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan. Berbagai kegiatan dalam bentuk aksi konvergensi *stunting* di Jawa Tengah antara lain peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat; mengembangkan sistem surveilans gizi lokal disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai; pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita; Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita kekurangan gizi; penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, dan bayi di bawah lima tahun; mendorong partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih serta sanitasi; pelatihan bagi peningkatan kompetensi pendidik PAUD yang berorientasi gizi; penyelenggaraan kelas pengasuhan dalam

kegiatan posyandu; penyelenggaraan konseling kesehatan dan reproduksi kepada remaja di tingkat pendidikan menengah pertama dan sederajat; penguatan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di setiap tingkatan pendidikan; mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kawasan Mandiri Pangan yang berkelanjutan; serta penyuluhan pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal.

Program lainnya yang menjadi prioritas untuk dilakukan pada tahun 2024 adalah penurunan angka pengangguran. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi dengan peningkatan sarana pratek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta optimalisasi BLK; pengembangan wirausaha baru; serta program padat karya di berbagai sektor.

**5. Penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi dan karhutla)**

Dampak perubahan iklim semakin dirasakan di Jawa Tengah, terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksi. Perubahan iklim terjadi sebagai dampak dari meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas ekonomi dan penduduk yang belum diimbangi dengan upaya untuk menurunkan emisi GRK. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat antara lain kekeringan, polusi, serta kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu penanganan dampak perubahan iklim menjadi salah satu program prioritas Jawa Tengah pada tahun 2024.

Berbagai upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan yang dapat berdampak pada kekeringan antara lain pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), pengelolaan kebun raya, pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara, pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara, penerapan teknik konservasi tanah dan air hutan dan lahan, pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan, normalisasi/restorasi sungai, serta program konservasi kawasan lindung dan daerah resapan air melalui pengembangan komoditas perkebunan. Selanjutnya upaya mitigasi terhadap kekeringan antara lain dilaksanakan dengan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan konservasi air tanah serta implementasi nilai perolehan air di jawa tengah, pembangunan infrastruktur geologi dan konservasi air tanah berupa sumur resapan dangkal dan sumur pantau, pengelolaan hidrologi dan kualitas air sungai, serta droping air bersih (melalui mekanisme BTT berdasarkan SK kedaruratan bencana kabupaten/kota).

Selanjutnya dalam rangka pengurangan polusi dilakukan kegiatan antara lain pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut; pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah pusat dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan; pengelolaan hidrologi dan kualitas air sungai; serta optimasi lahan dengan penggunaan pupuk organik. Sedangkan dalam upaya

pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan upaya pengendalian, pengawasan, dan perlindungan hutan, mengoptimalkan fungsi pengawas hutan dan lahan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat akan risiko kebakaran hutan dan lahan terutama di musim kemarau.

**6. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi**

Pendidikan vokasi menjadi salah satu dari sepuluh program prioritas Jawa Tengah tahun 2024 dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang lebih berkualitas dan memiliki keterampilan serta kompetensi yang lebih baik. Program prioritas ini lebih diarahkan pada penguatan kualitas pendidikan SMK di Jawa Tengah dalam rangka mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pendidikan SMK antara lain sinkronisasi kurikulum pendidikan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Sinkronisasi ini menjadi penting agar kurikulum pendidikan SMK sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri.

Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan SMK antara lain fasilitasi pendampingan ujian kompetensi keahlian (UKK) SMK, peningkatan sarana prasarana pendidikan SMK khususnya alat praktek, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan SMK *boarding* dan semi *boarding* Jawa Tengah, serta pemberian BOP dan BOSDA untuk SMK. Peningkatan kualitas, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja juga dilaksanakan oleh sektor lainnya antara lain melalui pelatihan khusus tenaga kerja di balai latihan kerja (BLK) dan di balai-balai industri, penyediaan sarana pelatihan di balai-balai tersebut, serta peningkatan sarana pratek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

**7. Pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif**

Salah satu sektor unggulan perekonomian daerah Jawa Tengah adalah sektor pariwisata. Sebagai salah satu sektor unggulan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan program pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu dari sepuluh program prioritas pada tahun 2024. Pengembangan sektor pariwisata pada tahun 2024 difokuskan pada upaya peningkatan promosi pariwisata, pengembangan aplikasi layanan pariwisata dan monitoring pariwisata, serta penyelenggaraan berbagai even pariwisata antara lain even *sport tourism*, kuliner festival, dan *e-sport tournament*.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong peningkatan daya saing sektor UMKM berbasis ekonomi kreatif karena sektor UMKM juga merupakan salah satu sektor unggulan daerah Jawa Tengah yang menopang perekonomian masyarakat Jawa Tengah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong berkembangnya UMKM berbasis ekonomi kreatif antara lain melakukan pelatihan bagi pelaku UMKM, fasilitasi pengembangan pasar berbasis digital, fasilitasi pembiayaan dan modal, pendampingan berkelanjutan, fasilitasi pengembangan teknologi dan inovasi, fasilitasi perlindungan hak atas kekayaan intelektual, serta promosi dan publikasi produk/karya kreatif dengan penyelenggaraan berbagai even festival produk/karya kreatif. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk menciptakan ekosistem

ekonomi kreatif di tiap wilayah kabupaten/kota melalui perwujudan kabupaten/kota kreatif.

**8. Pengembangan sistem ekonomi sirkular dan transisi energi**

Ekonomi sirkular adalah sebuah sistem atau model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linear. Ekonomi sirkular bukan hanya membahas pengelolaan limbah yang lebih baik dengan lebih banyak melakukan daur ulang, namun ekonomi sirkular juga mencakup serangkaian intervensi yang luas di semua sektor ekonomi, seperti efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi karbon.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah mulai mengembangan sistem ekonomi sirkular. Pada tahun 2024, pengembangan sistem ekonomi sirkular juga menjadi salah satu program prioritas yang akan dilakukan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan sistem ekonomi sirkular di Jawa Tengah antara lain pengelolaan sampah dan limbah, pengembangan produk pangan organik, fasilitasi pengembangan industri hijau, pemulihan lahan berkelanjutan, rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang ekonomi sirkular.

Upaya lain dalam pengembangan ekonomi sirkular yang penting adalah terkait dengan pembangunan energi berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Di Jawa Tengah, bauran energi baru terbarukan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung dengan berbagai upaya di antaranya pengembangan dan pembangunan infrastruktur EBT terutama biogas, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) *rooftop*, pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pemanas air tenaga surya (PATS), dan gas rawa. Selain itu juga dilakukan upaya untuk mendorong pengembangan desa mandiri energi, dan pendampingan transisi energi kepada seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

**9. Pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Pelayanan kepada publik merupakan salah satu fungsi dan peran utama penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang dinamis. Salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam perwujudan pelayanan publik adalah dengan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem ini merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pengembangan pelayanan publik berbasis SPBE ini menjadi salah satu program prioritas Jawa Tengah pada tahun 2024. Bentuk kegiatan dari program ini antara lain pengembangan sistem informasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, sistem tata naskah dinas elektronik (*e-office*), sistem pelayanan kepegawaian terpadu, sistem pelayanan masyarakat terintegrasi, sistem pelayanan pengaduan, dan didukung penguatan keamanan sistem informasi. Selain itu, dalam rangka mengakselerasi penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan kebijakan yang mewajibkan setiap perangkat daerah untuk mengembangkan satu inovasi pelayanan publik dalam satu tahun.

**10. Meningkatkan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Salah satu upaya perwujudan reformasi birokrasi di Jawa Tengah adalah penerapan manajemen berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabel. Untuk itu, dalam proses manajemen menjadi penting untuk dilakukan pengawasan terhadap setiap proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi, dalam bentuk reviu atau audit.

Pada tahun 2024, salah satu program prioritas daerah Jawa Tengah adalah meningkatkan pengawasan internal baik pengawasan terhadap organisasi maupun pengawasan terhadap seluruh ASN. Pengawasan terhadap organisasi yang dilakukan adalah dalam rangka menjalankan fungsi *quality assurance*, asistensi, dan *consulting* pada proses manajemen pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta tidak menimbulkan *fraud* di kemudian hari. Berbagai upaya dilakukan untuk perwujudan pengawasan tersebut antara lain penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mendorong penerapan manajemen risiko dalam manajemen pemerintahan, penguatan kapasitas APIP, serta penguatan saber pungli.

Selanjutnya pengawasan terhadap seluruh ASN Jawa Tengah dilakukan dalam rangka penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk aparatur yang profesional dan fungsional, integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur. Upaya yang dilakukan antara lain dengan sosialisasi dan edukasi kepada ASN dalam mewujudkan ASN Berakhlak, penyelenggaraan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, pelatihan teknis dan kompetensi ASN dalam rangka mewudkan ASN yang profesional dan fungsional, dan pengembangan sistem merit.

Berikut ini dapat digambarkan keselarasan dan konsistensi antara: 1) tujuan daerah, sasaran daerah, prioritas daerah, dan sepuluh program prioritas daerah tahun 2024, 2) tema pembangunan daerah dan prioritas daerah tahun 2024 dengan RPD Tahun 2024-2026, dan 3) tema pembangunan daerah dan prioritas daerah tahun 2024 dengan permasalahan daerah dan isu strategis tahun 2024.

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 4.1**
**Gambaran Keselarasan Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Prioritas Daerah, dan 10 (Sepuluh) Program Prioritas Daerah Tahun 2024**

**Tabel 4.3.**
**Konsistensi Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah RPD Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2024, serta Konsistensi Permasalahan Daerah, Isu Strategis, dan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2024**

| RPD Tahun 2024-2026 | RKPD Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|
| **Arah Kebijakan**<br>Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas | **Tema Pembangunan**<br>Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas | | |
| **Prioritas** | **Prioritas Daerah** | **Isu Strategis** | **Permasalahan Daerah** |
| Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas | Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas | Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan | - Masih cukup tingginya angka kemiskinan<br>- Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur |
| Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata | Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata | Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif | Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi era disrupsi |

| RPD Tahun 2024-2026 | RKPD Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|
| Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung | Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung | Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana |
| Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif | Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif | Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis | - Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi<br>- Masih perlunya upaya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023*

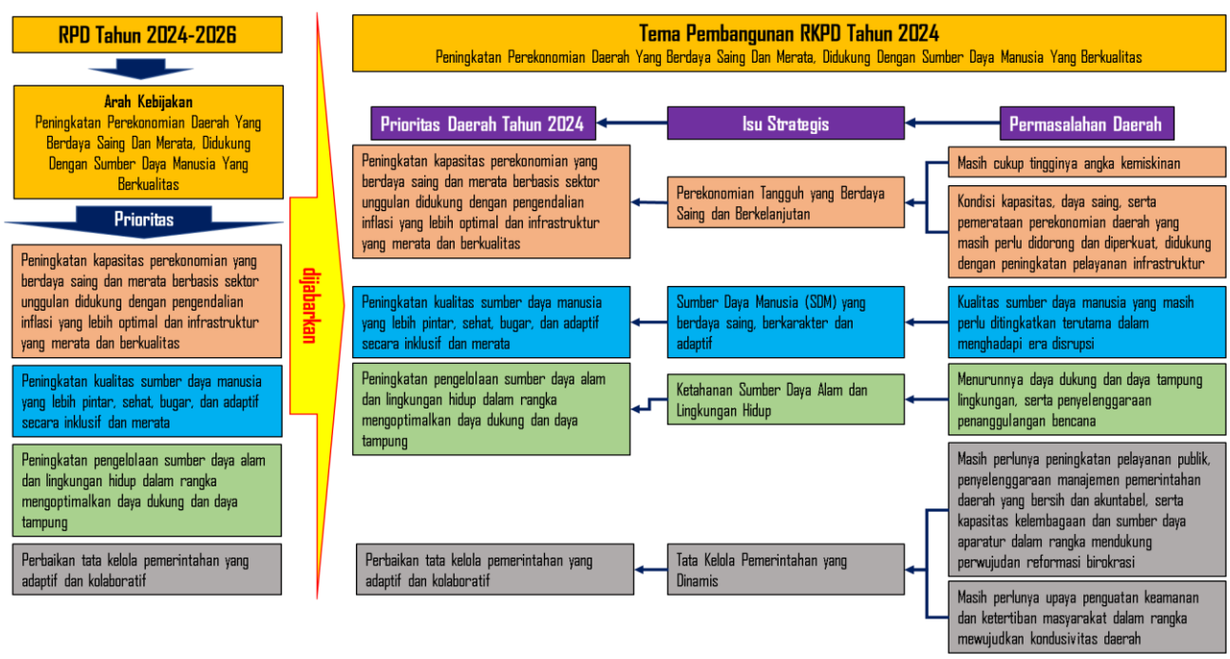


*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 4.2**
**Gambaran Konsistensi Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah RPD Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2024, serta Konsistensi Permasalahan Daerah, Isu Strategis, dan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2024**

Selanjutnya penjabaran dukungan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka perwujudan tema dan prioritas daerah tahun 2024 selengkapnya tertuang dalam tabel sebagai berikut.

## Tabel 4.4.
## Program Prioritas Daerah Mendukung Tema Pembangunan dan Prioritas Daerah Disertai Pagu Indikatif Tahun 2024

**Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari**

**Indikator Kinerja Tujuan Daerah**

**PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah**

**Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%**

**Rasio Gini 0,364**

| Sasaran Daerah | | | Prioritas Daerah | Program Prioritas Daerah | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran | Target | Satu-an | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Sasaran Daerah 1 (S1)** | | | | | | | | | |
| Meningkatnya perekonomian Tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan | | | | | | | | 11.373.494.038.000 | |
| | | | PD. 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas | | | | | 11.373.494.038.000 | |
| IK1. S1. Pertumbuhan Ekonomi | 4,70 - 5,50 | % | | | | | | 11.321.491.165.000 | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM | | | | 14.261.500.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | |
| | | | | | Persentase akses air minum jaringan perpipaan | 54,32 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | 2.978.123.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | | | | | Persentase akses air limbah domestik layak | 91,92 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | 340.675.501.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal | 95,52 | % | | |
| | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal | 86,14 | % | | |
| | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan | 85,23 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan | 88,49 | % | | |
| | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap | 89,43 | % | | |
| | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap | 83,65 | % | | |
| | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang | 99,95 | % | | |
| | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang | 85,51 | % | | |
| | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang | 94,17 | % | | |
| | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang | 93,65 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo | 91,61 | % | | |
| | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo | 94,90 | % | | |
| | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati | 88,12 | % | | |
| | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati | 93,82 | % | | |
| | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi | 86,78 | % | | |
| | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi | 91,18 | % | | |
| | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta | 93,17 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta | 94,78 | % | | |
| | | | | | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur | 47,50 | % | | |
| | | | | | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat | 41,68 | % | | |
| | | | | | Persentase panjang jalan yang dileger | 75,79 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan | 12,85 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi | 31,88 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | 14.917.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dam Kawasan Permukiman |
| | | | | | Persentase rumah layak huni yang disediakan | 0,12 | % | | |
| | | | | | Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani | 2,73 | % | | |
| | | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | 3.108.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dam Kawasan Permukiman |
| | | | | | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh | 3,18 | % | | |
| | | | | | Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | 1.725.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dam Kawasan Permukiman |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman | 40,00 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | 215.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dam Kawasan Permukiman |
| | | | | | Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 2.666.576.000 | Satual Polisi Pamong Praja |
| | | | | | Persentase penegakan produk hukum daerah | 80 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | 9.479.940.000 | Dinas Sosial |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 7,7 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | | | 100.000.000 | Dinas Sosial |
| | | | | | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | 56.760.528.000 | Dinas Sosial |
| | 1 | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti | 1,92 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | 0,07 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri | 0,07 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | 0,08 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | 0,10 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring | 0,06 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede | 0,06 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo | 0,05 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | 0,09 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | 0,07 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | 0,09 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | 0,11 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | 0,08 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | 0,06 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata | 0,12 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | 0,04 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo | 0,12 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | 0,03 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | 0,11 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | 0,06 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | 0,11 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi | 0,06 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | 0,11 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | 0,03 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | 0,03 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | 0,04 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | 0,06 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | 0,05 | % | | |
| | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | 157.256.160.000 | Dinas Sosial |
| | | | | | Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial | 80 | % | | |
| | | | | | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan | 0,02 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | 2.225.500.000 | Dinas Sosial |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | 359.000.000 | Dinas Sosial |
| | | | | | Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | 3.337.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | | | | Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah | 87,8 | kg/kapita/ tahun | | |
| | | | | | Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP) | 0,62 | Angka | | |
| | | | | | Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP) | 87,8 | kg/kapita/ tahun | | |
| | | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | 3.980.500.000 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | | | | Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi | 0,01 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | 2.815.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | | | | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan | 80 | % | | |
| | | | | | Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang dIterbitkan | 80 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | | | | 675.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP) | 6,85 | % | | |
| | | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | 1.625.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | 2.450.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah | 8,96 | % | | |
| | | | | | Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya | 100 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | 127.393.110.000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | Rasio trayek angkutan jalan | 0,51 | Angka | | |
| | | | | | Rasio pemanfatan terminal | 0,218 | Angka | | |
| | | | | | Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis | 0,5 | Angka | | |
| | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | 0,24 | Angka | | |
| | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | 0,01 | Angka | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | 0,2 | Angka | | |
| | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | 0,23 | Angka | | |
| | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | 0,17 | Angka | | |
| | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | 0,21 | Angka | | |
| | | | | | Rasio konektivitas perkotaan | 0,481 | Angka | | |
| | | | | | Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan | 0,38 | Angka | | |
| | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | 0,97 | Angka | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | 0,97 | Angka | | |
| | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | 0,98 | Angka | | |
| | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | 0,97 | Angka | | |
| | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | 0,98 | Angka | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | 0,97 | Angka | | |
| | | | | | Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah | 0,981 | Angka | | |
| | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | 0,81 | Angka | | |
| | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | 0,81 | Angka | | |
| | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | 0,81 | Angka | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | 0,81 | Angka | | |
| | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | 0,81 | Angka | | |
| | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | 0,81 | Angka | | |
| | | | | | Persentase perpindahan moda angkutan umum | 51,72 | % | | |
| | | | | | Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum | 65,38 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | 459.100.000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP | 0,31 | Angka | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai | 0,2 | Angka | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | | | | 1.266.866.000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan | 0,04 | Angka | | |
| | | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | 2.500.000.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | | | Persentase koperasi berkualitas | 25,02 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | 6.513.853.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | | | Persentase SDM koperasi yang berkualitas | 10 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | 8.901.787.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | | | Persentase koperasi provinsi produktif | 48,09 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | 9.072.340.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | | | Persentase usaha mikro mandiri | 81,2 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan wirausaha baru | 23 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | 6.408.609.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | | | Persentase UMKM siap bermitra | 21,06 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | 705.000.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan | 50 | % | | |
| | | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | 1.100.000.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN | 46 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan | 50 | % | | |
| | | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | 1.649.910.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan | 90 | % | | |
| | | | | | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan standar pelayanan | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | 1.510.218.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui | 20 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | 524.000.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan | 10 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 18.793.728.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | 760.245.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | Persentase produksi garam | 1 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | 32.670.252.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending | 63 | % | | |
| | | | | | Persentase produksi perikanan tangkap | 5 | % | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari | 72 | % | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdoyong | 72,72 | % | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto | 81,82 | % | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor | 70 | % | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang | 62,62 | % | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak | 81 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa | 63,63 | % | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan | 72 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | 13.050.491.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | Produksi perikanan budidaya | 600000 | Ton | | |
| | | | | | Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase produksi ikan konsumsi air laut | 5 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | 4.533.575.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | | | | Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan | 13,33 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | 123.700.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | | | | Jumlah kunjungan wisatawan | 49.985.228 | Orang | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | 825.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | | | | Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan) | 6 | Kabupaten/Kota | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | 9.115.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | | | | Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi | 48,98 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | 92.949.520.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | Kesehatan Hewan |
| | | | | | Jumlah populasi ternak potong | 3726434 | (ST)/ (AU) | | |
| | | | | | Jumlah populasi ternak perah | 112876 | (ST)/ (AU) | | |
| | | | | | Jumlah populasi ternak petelur | 246615 | (ST)/ (AU) | | |
| | | | | | Persentase fasilitasi obat hewan | 1 | % | | |
| | | | | | Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan | 4 | Dokum en | | |
| | | | | | Persentase produksi dan distribusi semen beku | 1 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging | 1 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu | 1 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur | 1 | % | | |
| | | | | | Produksi kedelai | 52657 | Ton | | |
| | | | | | Produksi jagung | 3576577 | Ton | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Produksi padi | 9594280 | Ton | | |
| | | | | | Persentase luas lahan yang dioptimasi | 2,5 | % | | |
| | | | | | Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi | 90 | % | | |
| | | | | | Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani | 2,5 | % | | |
| | | | | | Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan | 3 | % | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiayah Surakarta | 85 | % | | |
| | | | | | Produksi bawang merah | 515000 | Ton | | |
| | | | | | Produksi cabai | 341000 | Ton | | |
| | | | | | Produksi durian | 149668 | Ton | | |
| | | | | | Produksi jahe | 34862 | Ton | | |
| | | | | | Produksi melati | 24627 | Ton | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas | 85 | % | | |
| | | | | | Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya | 2 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan | 3 | % | | |
| | | | | | Persentase layanan sertifikasi benih | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang | 85 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan | 1 | % | | |
| | | | | | Produksi kopi | 25927 | Ton | | |
| | | | | | Produksi tebu | 2554553 | Ton | | |
| | | | | | Produksi kelapa | 166687 | Ton | | |
| | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | 5.564.297.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong | 10 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah | 10 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur | 10 | % | | |
| | | | | | Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik | 7420274 | m | | |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | 14.732.035.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | | | | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis | 4 | Dokum en | | |
| | | | | | Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali | 3 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara | 4 | Dokum en | | |
| | | | | | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan | 4 | Dokum en | | |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | 2.635.000.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | | | | | Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam | 5 | % | | |
| | | | | | Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) | 15 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | 20.740.985.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | | | | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong | 1,02 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah | 3,11 | % | | |
| | | | | | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur | 2,27 | % | | |
| | | | | | Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya | 2,5 | % | | |
| | | | | | Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | | | 4.315.593.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah | 60 | % | | |
| | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo | 60 | % | | |
| | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria | 60 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara | 60 | % | | |
| | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan | 60 | % | | |
| | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara | 60 | % | | |
| | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo | 60 | % | | |
| | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan | 60 | % | | |
| | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu | 60 | % | | |
| | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan | 60 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah | 100 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak | 60 | % | | |
| | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi | 60 | % | | |
| | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah | 60 | % | | |
| | | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | 117.640.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2) | 10 | % | | |
| | | | | | Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah | 8,00 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | 634.445.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi | 10 | % | | |
| | | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | 335.444.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi | 30 | % | | |
| | | | | | Persentase kinerja realisasi pupuk | 90 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | 2.980.978.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase kenaikan nilai ekspor non migas | 2 | % | | |
| | | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | 3.482.628.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen | 1 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta | 5 | % | | |
| | | | | | Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang | 10 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | 1.450.443.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri | 10 | % | | |
| | | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | 30.869.870.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase pertumbuhan produksi industri agro | 2,25 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan produksi industri non agro | 2,25 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa | 3,45 | % | | |
| | | | | | Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki | 85 | % | | |
| | | | | | Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif | 4,38 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | | 290.000.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan | 7 | % | | |
| | | | | | Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan | 10 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | 823.525.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional | 1,62 | % | | |
| | | | | | Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional | 2 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | 10.146.505.350.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | Persentase penyampaian LKPD tepat waktu | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase penetapan APBD tepat waktu | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase penyusunan dokumen manajemen kas | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu | 100 | % | | |
| IK2. S1. Inflasi | 3,00 ± 1 | % | | | | | | 8.074.896.000 | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | 6.093.935.000 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | | | | Rata-rata ketercukupan pangan | 1,25 | Angka | | |
| | | | | | Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi | 0,064 | Angka | | |
| | | | | | Rasio cadangan pangan masyarakat | 0,62 | Angka | | |
| | | | | | Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku | 60 | % | | |
| | | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | 1.980.961.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota | 10 | % | | |
| IK3. S1. Tingkat Pengangguran Terbuka | 5,44 - 4,94 | % | | | | | | 39.743.117.000 | |
| | | | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | 180.415.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja | 62,85 | % | | |
| | | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | 30.176.915.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | | | Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi | 38,14 | % | | |
| | | | | | Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas | 4,4 | % | | |
| | | | | | Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi | 2,3 | % | | |
| | | | | | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri | 2,88 | % | | |
| | | | | | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian | 9,45 | % | | |
| | | | | | Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan | 13,13 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran | 46,9 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | 1.780.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | | | Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal | 45,05 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal | 68,1 | % | | |
| | | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | 1.685.787.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | | | Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan | 98 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk | 49,75 | % | | |
| | | | | | Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah | 44,27 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial | 96,15 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | | | | 5.700.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | | | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan | 89,58 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3 | 26,4 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | 220.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | | | Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi | 3,61 | % | | |
| IK4. S1. Nilai Tukar Petani | 107,45 | Angka | | | | | | 4.184.860.000 | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | 1.137.715.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | Indeks harga yang diterima oleh nelayan | 108,27 | Angka | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | 68.970.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya | 111,27 | Angka | | |
| | | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | 2.330.025.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | Jumlah produksi olahan ikan | 160000 | Ton | | |
| | | | | | Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan | 4 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | 400.000.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | | | | Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha | 10 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | 248.150.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV) | 2,8 | % | | |
| **Sasaran Daerah 2 (S2)** | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif | | | | | | | | 4.864.402.301.000 | |
| | | | PD. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata | | | | | 4.864.402.301.000 | |
| IK1. S2. Indeks Pembangunan Manusia | 73,43 | Angka | | | | | | 4.768.135.062.000 | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | 3.708.924.637.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X | 77,81 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X | 28,57 | % | | |
| | | | | | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA | 65 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA | 36 | Angka | | |
| | | | | | Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum | 67,78 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA | 50 | % | | |
| | | | | | Persentase angka putus sekolah SMA | 2,3 | % | | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X | 84,74 | % | | |
| | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI | 87,73 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI | 3,63 | % | | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI | 44,94 | % | | |
| | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV | 25,69 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV | 1,25 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV | 69,8 | % | | |
| | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII | 88,25 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII | 2,52 | % | | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII | 79 | % | | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi | 10 | % | | |
| | | | | | Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi | 10 | % | | |
| | | | | | Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi | 80,3 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V | 1,92 | % | | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V | 78,7 | % | | |
| | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V | 93,71 | % | | |
| | | | | | APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI | 79,86 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI | 90 | % | | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI | 90 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII | 1,96 | % | | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII | 80 | % | | |
| | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII | 81 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII | 77,11 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII | 2,2 | % | | |
| | | | | | Persentase angka putus sekolah SMK | 0,026 | % | | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII | 76,12 | % | | |
| | | | | | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK | 60 | % | | |
| | | | | | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK | 0,55 | Angka | | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMK | 57,35 | % | | |
| | | | | | Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum | 50,35 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I | 1,67 | % | | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I | 0,9 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I | 90,54 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX | 3,22 | % | | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX | 79 | % | | |
| | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX | 54,59 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III | 2,87 | % | | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III | 69,8 | % | | |
| | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III | 75,57 | % | | |
| | | | | | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB | 10,53 | % | | |
| | | | | | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB | 10 | Angka | | |
| | | | | | Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum | 10 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SLB | 68,18 | % | | |
| | | | | | Persentase angka putus sekolah SLB | 3,53 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII | 2,74 | % | | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII | 85,55 | % | | |
| | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII | 72,83 | % | | |
| | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II | 76,59 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II | 1 | % | | |
| | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II | 40,11 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | 751.800.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X | 82,21 | Angka | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV | 81,77 | Angka | | |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII | 86,06 | Angka | | |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V | 88,34 | Angka | | |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI | 83,27 | Angka | | |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI | 86,49 | Angka | | |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII | 85,3 | Angka | | |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII | 89,03 | Angka | | |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I | 89,06 | Angka | | |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX | 85,85 | Angka | | |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III | 83,27 | Angka | | |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII | 88,83 | Angka | | |
| | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II | 81,22 | Angka | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | 341.362.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri) | 76,2 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | | | 742.500.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA | 15 | % | | |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X | 25 | % | | |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV | 10 | % | | |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII | 100 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI | 4,76 | % | | |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK | 93,93 | % | | |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V | 20 | % | | |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I | 3 | % | | |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX | 25 | % | | |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III | 100 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 857.819.545.000 | Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit |
| | | | | | Persentase pemanfaatan informasi kesehatan | 80 | % | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita | 34,28 | % | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo | 100 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase ketersediaan obat dan vaksin | 80 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting | 51,42 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK | 83 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa | 71,42 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati | 100 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta | 95 | % | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | 42,85 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang | 57,14 | % | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | 28,57 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati | 28,57 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten | 100 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten | 28,57 | % | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan fasilitas layanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | 42,85 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang | 57,14 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet Donorejo | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Dr. Moewardi | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan | 66,6 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular | 63,9 | % | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo | 100 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa | 63,9 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM | 80 | % | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi | 100 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pemenuhan fasilitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RS Khusus Mata | 40 | % | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia | 60 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | 937.959.000 | Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit |
| | | | | | Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi | 98 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya | 80 | % | | |
| | | | | | Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | 30 | % | | |
| | | | | | Persentase SDM kesehatan yang terlatih | 20 | % | | |
| | | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | 667.000.000 | Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit |
| | | | | | Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku | 75 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | 1.888.259.000 | Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit |
| | | | | | Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo | 100 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi | 82,85 | % | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | 28,57 | % | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/Kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | 42,85 | % | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | 28,57 | % | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | 28,57 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | 42,85 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Surakarta | 95 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RS Khusus Mata | 50 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | 196.062.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase peningkatan perolehan medali | 28,18 | % | | |
| | | | | | Jumlah masyarakat yang bugar | 750 | Orang | | |
| | | | | | Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi | 50 | Orang | | |
| IK2. S2. Indeks Pembangunan Kebudayaan | 60,27 | Angka | | | | | | 91.363.923.000 | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | 23.675.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | | | | Jumlah wirausaha muda mandiri | 8 | Orang | | |
| | | | | | Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi | 50 | Orang | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | 6.028.042.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional | 19,17 | % | | |
| | | | | | Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan | 23,76 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase cakupan pelestarian seni | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan | 47,61 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | 23.705.940.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | Tingkat partisipasi seni tradisi | 8,89 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | 298.800.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | Persentase akses literasi sejarah | 52,9 | % | | |
| | | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | 704.085.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | Persentase cagar budaya berperingkat nasional | 12,71 | % | | |
| | | | | | Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya | 25,13 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | | 2.265.120.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | Nilai survey kepuasan pengunjung museum | 89,85 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | 34.418.638.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi | 80,56 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca | 23,08 | % | | |
| | | | | | Nilai survey kepuasan masyarakat | 80 | Nilai | | |
| | | | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | | 268.298.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah | 84,67 | % | | |
| IK3. S2. Indeks Pembangunan Gender | 93,53 | Angka | | | | | | 1.475.000.000 | |
| | | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | 1.375.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan | 60 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | 100.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar | 14,29 | % | | |
| IK4. S2. Indeks Pembangunan Keluarga | 58,20 | Angka | | | | | | 3.428.316.000 | |
| | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | 1.052.958.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar | 11 | % | | |
| | | | | | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | 150.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar | 14,29 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | 290.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya | 82,85 | % | | |
| | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | 495.358.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | Rasio korban kekerasan terhadap anak | 11,5 | per 100.000 penduduk | | |
| | | | | | Persentase korban kekerasan anak terlayani | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | 305.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan | 61,11 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | 695.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) | 65,58 | % | | |
| | | | | | Unmetneed | 10 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | 440.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan | 32 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Sasaran Daerah 3 (S3)** | | | | | | | | | |
| Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup | | | | | | | | 251.307.499.000 | |
| | | | PD. 3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung | | | | | 251.307.499.000 | |
| IK1. S3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 67,55 | Angka | | | | | | 246.382.499.000 | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | 104.843.791.000 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang |
| | | | | | Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air | 61,31 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik | 64,31 | % | | |
| | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi | 69,11 | Angka | | |
| | | | | | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi | 52,37 | % | | |
| | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | 77,36 | Angka | | |
| | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | 92,21 | % | | |
| | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | 100 | % | | |
| | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | 62,68 | Angka | | |
| | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | 34,78 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal | 53,26 | % | | |
| | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | 100 | % | | |
| | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | 71,8 | Angka | | |
| | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | 54,6 | % | | |
| | | | | | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto | 50,04 | % | | |
| | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | 100 | % | | |
| | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | 62,85 | Angka | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | 50,00 | % | | |
| | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | 100 | % | | |
| | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | 67,34 | Angka | | |
| | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | 77,78 | % | | |
| | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | 100 | % | | |
| | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | 72,65 | Angka | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | 76,5 | % | | |
| | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | 63.844.279.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | | | | | Persentase akses air minum layak | 91,92 | % | | |
| | | | | | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | 5.670.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | Penataan Ruang |
| | | | | | Persentase implementasi pemanfaatan ruang | 68 | % | | |
| | | | | | Persentase tertib ruang | 56 | % | | |
| | | | | | Persentase ketersediaan rencana tata ruang | 60,71 | % | | |
| | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | 100 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 778.748.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 8.548.361.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Persentase sungai yang meningkat kualitasnya | 4,76 | % | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya | 2,85 | % | | |
| | | | | | Persentase pengujian kualitas air | 100 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pemantauan kualitas udara | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | 1.538.667.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani | 2,02 | % | | |
| | | | | | Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden | 2,6 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | 133.740.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Persentase limbah B3 yang terkelola | 80 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN | | | | 844.280.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | |
| | | | | | Persentase rekomendasi lingkungan hidup | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan | 50 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | 1.904.836.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya | 10,5 | % | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah | 31,43 | % | | |
| | | | | | Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya | 25 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 240.732.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Persentase pengaduan yang ditangani | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | 1.968.700.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Persentase sampah yang tertangani | 42 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | 2.581.455.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat | 3,7 | % | | |
| | | | | | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan | 1,39 | % | | |
| | | | | | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur | 3,7 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif | 5 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | 44.225.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya | 44,44 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | 1.963.639.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan | 70 | % | | |
| | | | | | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat | 2 | % | | |
| | | | | | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur | 2 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan | 2 | % | | |
| | | | | | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan | 61 | % | | |
| | | | | | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat | 61 | % | | |
| | | | | | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur | 61 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | 18.758.156.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan | 35,4 | % | | |
| | | | | | Persentase lahan kritis tertangani | 0,47 | % | | |
| | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1 | 0,02 | % | | |
| | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 1 | 1,38 | % | | |
| | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 1 | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2 | 0,04 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 2 | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 2 | 1,72 | % | | |
| | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3 | 0,03 | % | | |
| | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 3 | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 3 | 1,64 | % | | |
| | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4 | 0,03 | % | | |
| | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 4 | 100 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 4 | 1,46 | % | | |
| | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5 | 0,04 | % | | |
| | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 5 | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 5 | 1,29 | % | | |
| | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6 | 0,09 | % | | |
| | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 6 | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 6 | 2,15 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8 | 0,04 | % | | |
| | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 8 | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 8 | 1,03 | % | | |
| | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9 | 0,04 | % | | |
| | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 9 | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9 | 1,46 | % | | |
| | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10 | 0,03 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 10 | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 10 | 1,03 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi bibit | -40 | % | | |
| | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11 | 0,03 | % | | |
| | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 11 | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 11 | 1,29 | % | | |
| | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7 | 0,09 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 7 | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 7 | 1,55 | % | | |
| | | | | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | | | | 2.966.293.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani | 10 | % | | |
| | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif | 40 | % | | |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 1 | 5 | % | | |
| | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 1 | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 2 | 5 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 2 | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 3 | 5 | % | | |
| | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 3 | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 4 | 5 | % | | |
| | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 4 | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 5 | 5 | % | | |
| | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 5 | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 6 | 5 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 6 | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 8 | 5 | % | | |
| | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 8 | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 9 | 5 | % | | |
| | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 9 | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 10 | 5 | % | | |
| | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 10 | 100 | % | | |
| | | | | | Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura | 70 | Angka | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 11 | 5 | % | | |
| | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 7 | 5 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | 5.313.155.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat | 2,5 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 1 | 0,3 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2 | 0,2 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3 | 0,2 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4 | 0,2 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5 | 0,3 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6 | 0,2 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8 | 0,2 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 9 | 0,2 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10 | 0,2 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11 | 0,2 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7 | 0,3 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | | | | 551.982.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani | 10 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | | | | 2.725.496.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | | | Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah | 27,5 | % | | |
| | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo | 1,6 | % | | |
| | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria | 3,4 | % | | |
| | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara | 1,7 | % | | |
| | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan | 2,2 | % | | |
| | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara | 4,1 | % | | |
| | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo | 1,8 | % | | |
| | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan | 2,4 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu | 1,6 | % | | |
| | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan | 2,7 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak | 2,9 | % | | |
| | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi | 2,8 | % | | |
| | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah | 1,6 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | | | | 7.684.499.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah | 590300,484 | SBM | | |
| | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo | 39608,43 | SBM | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria | 23599,9 | SBM | | |
| | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara | 125685,73 | SBM | | |
| | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan | 122,33 | SBM | | |
| | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara | 91,75 | SBM | | |
| | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo | 39480,034 | SBM | | |
| | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan | 78666,36 | SBM | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu | 39363, 76 | SBM | | |
| | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan | 78562, 37 | SBM | | |
| | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak | 39394, 34 | SBM | | |
| | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi | 86438, 18 | SBM | | |
| | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah | 39287, 3 | SBM | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | 13.477.465.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah | 63,81 | % | | |
| | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo | 49,7 | % | | |
| | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria | 51,09 | % | | |
| | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara | 49,97 | % | | |
| | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan | 49,36 | % | | |
| | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara | 49,96 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo | 49,95 | % | | |
| | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan | 49,66 | % | | |
| | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu | 49,57 | % | | |
| | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan | 49,59 | % | | |
| | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak | 51,86 | % | | |
| | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi | 49,64 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah | 49,08 | % | | |
| IK2. S3. Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana | 4,00 | % | | | | | | 4.925.000.000 | |
| | | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | 4.925.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | | Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya | 0,12 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan darurat bencana | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik | 2,86 | % | | |
| | | | | | Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana | 2 | % | | |
| **Sasaran Daerah 4 (S4)** | | | | | | | | | |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis | | | | | | | | 12.037.489.765.000 | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | PD. 4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif | | | | | 12.037.489.765.000 | |
| IK1. S4. Indeks Reformasi Birokrasi | 81,50 | Angka | | | | | | 12.037.489.765.000 | |
| | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 10.077.719.213.000 | Semua Perangkat Daerah |
| | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | 100 | % | | Seluruh Perangkat Daerah |
| | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | 100 | % | | Seluruh Perangkat Daerah |
| | | | | | Cost Recovery Rate Total RSUD Dr. Moewardi | 82 | % | | RSUD Dr. Moewardi |
| | | | | | Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | 82 | % | | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |
| | | | | | Cost Recovery Rate Total RSUD Tugurejo | 53,25 | % | | RSUD Tugurejo |
| | | | | | Cost Recovery Rate Total RSUD Kelet Donorejo | 35 | % | | RSUD Kelet Donorejo |
| | | | | | Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo | 43 | % | | RSJD Dr. Amino Gondohutomo |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Cost Recovery Rate Total RSJD Surakarta | 33 | % | | RSJD Surakarta |
| | | | | | Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | 46,5 | % | | RSJD Dr. RM. Soedjarwadi |
| | | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | 18.699.123.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | | | | | Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah | 5,83 | % | | |
| | | | | | Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis | 11,94 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | 4.048.300.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | | | | | Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi | 45,38 | % | | |
| | | | | | Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi | 43,49 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 1.775.000.000 | Satual Polisi Pamong Praja |
| | | | | | Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum | 29,57 | % | | |
| | | | | | Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah | 67,15 | % | | |
| | | | | | Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina | 40,03 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | 150.000.000 | Satual Polisi Pamong Praja |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran | 100 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | 229.800.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak | 25 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | | | | 400.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dam Kawasan Permukiman |
| | | | | | Persentase fasilitasi penetapan lokasi | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | 600.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dam Kawasan Permukiman |
| | | | | | Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan | 100 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | | 590.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dam Kawasan Permukiman |
| | | | | | Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | 240.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | Persentase penduduk yang memiliki KTP-el | 97 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | 220.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98% | 97 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | 240.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan | 16,67 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | 24.523.773.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | Nilai keterbukaan informasi publik | 31 | Angka | | |
| | | | | | Nilai survey kepuasan komunikasi publik | 78 | Angka | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | 13.442.779.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi | 72 | % | | |
| | | | | | Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi | 15 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | 1.257.329.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah | 24 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | 2.000.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80% | 25 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | 780.346.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya | 25,97 | % | | |
| | | | | | Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan pengunjung arsip | 19 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | | 103.000.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip | 12,19 | % | | |
| | | | | | Persentase arsip yang diselamatkan | 19,47 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | | | 1.710.656.000 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi | 66 | % | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya | 85,71 | % | | |
| | | | | | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif | 88,1 | % | | |
| | | | | | Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A | 60 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB | 14,29 | % | | |
| | | | | | Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A | 64,28 | % | | |
| | | | | | Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan | 50 | % | | |
| | | | | | Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan | 88,73 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | | | | 3.783.000.000 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Tingkat efektivitas kerjasama daerah | 95 | % | | |
| | | | | | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti | 95 | % | | |
| | | | | | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah | 95 | % | | |
| | | | | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | 140.639.161.000 | Sekretariat Daerah |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar | 81 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar | 82 | % | | |
| | | | | | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik | 54 | % | | |
| | | | | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | | | | 2.438.990.000 | |
| | | | | | Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan | 96 | % | | |
| | | | | | Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji | 96 | % | | |
| | | | | | Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani | 96 | % | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota peduli HAM | 96 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | 4.912.642.000 | Sekretariat Daerah |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang pertanian | 87 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan | 85 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur | 85 | % | | |
| | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan | 83 | % | | |
| | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan | 78 | % | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan | 85 | % | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha | 81 | % | | |
| | | | | | Persentase nilai kemandirian BLUD | 55 | % | | |
| | | | | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | 2.505.000.000 | Sekretariat Daerah |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa | 90 | % | | |
| | | | | | Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik | 80 | % | | |
| | | | | | Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa | 81 | % | | |
| | | | | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | | 1.685.000.000 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Persentase capaian pelaksanaan APBD | 98,7 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian pelaksanaan APBN | 95,5 | % | | |
| | | | | | Persentase realisasi bantuan keuangan | 85 | % | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah | 85 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | 390.574.350.000 | Sekretariat DPRD |
| | | | | | Persentase layanan bagian humas | 95 | % | | |
| | | | | | Persentase fasilitasi penyusunan raperda | 95 | % | | |
| | | | | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | 5.814.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase dokumen evaluasi yang diamanahkan regulasi | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | 6.653.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | 100 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | 6.114.433.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik | 84,02 | % | | |
| | | | | | Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | 32.644.010.000 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan | -25,14 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan | 28,17 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang | 11,59 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang | 18,71 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan | -16,7 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan | 20,29 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang | 12,45 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaran bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan | 41,78 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang | -15,14 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang | 19,33 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan | 19,62 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan | 13,51 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | -20,86 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora | 13,4 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora | 19,93 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora | 12,4 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | 20,16 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora | -18,49 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora | 20,31 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1 | 24,91 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang | 38,33 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo | 4,96 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1 | 18,18 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang | 15,23 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang | 13,44 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo | 23,68 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1 | -21,85 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo | 12,21 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1 | 20,87 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo | -12,81 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo | 24,01 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo | 22,01 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo | 22,39 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta | 3,8 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang | -23,43 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen | 25,05 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang | 20,24 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta | 19,79 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen | 20,82 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta | 6,58 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen | 13,41 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang | 30,76 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta | -22,24 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo | 13,38 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo | -24,77 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo | 20,95 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang | 11,83 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen | -18,63 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang | 11,27 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta | 20,21 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas | 25,25 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang | -17,02 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen | 20,99 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang | 20,84 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas | 19,52 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten | 24,85 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas | 13,75 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas | -25,89 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati | 16,61 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten | 18,99 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati | 15,79 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten | 13,42 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung | 32,03 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung | 23,36 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung | 13,59 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung | -20,87 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung | 21,35 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati | 13,58 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten | -24,67 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal | -25,92 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas | 20,26 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten | 20,93 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati | -18,76 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal | 12,2 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati | 19,45 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen | 19,63 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap | 23,27 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen | 26,51 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal | 19,25 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap | 16,42 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen | 8,21 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan | 22,34 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen | -25,1 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap | 11,83 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal | 20,49 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen | 19,89 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan | 20,87 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap | -13,57 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang | 34,47 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang | 19,55 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang | 13,59 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang | -25,13 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang | 22,12 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap | 20,24 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan | 13,12 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal | 66,86 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal | 14,12 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan | -20,94 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo | 23 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo | 25,8 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan | 19,94 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo | 1,76 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal | -25,7 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | -25,99 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang | -53,02 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang | 16,85 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang | 9,11 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang | -13,62 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang | 21,76 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal | 20,57 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara | 22,63 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | 20,94 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga | 14,57 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II | 6,61 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara | 14,71 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga | 28,72 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri | 11,97 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II | 18,66 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara | 19 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes | 44 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga | 13,77 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalinga | -15,51 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes | 20,1 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II | 12,53 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri | 20,9 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara | -22,19 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes | 12,88 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II | -17,94 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga | 20,9 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD KAbupaten Wonogiri | 12,75 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara | 10,98 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri | -20,99 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes | -22,26 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II | 20,09 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri | 20,4 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara | 45,72 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes | 20,83 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus | 12,4 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar | 30,62 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara | 21,49 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar | 21,98 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus | 18,96 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar | 9,35 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus | 7,24 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar | -16,8 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara | 13,44 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus | -21,23 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar | 21,21 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara | -25,11 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus | 20,31 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara | 20,31 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali | 23,05 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali | 19,89 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali | 13,03 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali | -25,7 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali | 20,48 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III | 21,98 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III | 15,09 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III | 12,2 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III | -17,96 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III | 20,2 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang | 9,5 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang | 23,93 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang | 13,7 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang | -20,16 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang | 19,97 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga | 2,24 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga | 23,51 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga | 6,69 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga | 20,52 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga | -25,36 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal | 32,43 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak | 23,16 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak | 20,8 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal | 18,31 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak | 10,78 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal | 12,95 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak | -24,27 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal | -25,77 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal | 20,75 | % | | |
| | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak | 19,8 | % | | |
| | | | | | Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah | 100 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor | 72 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain | -7,67 | % | | |
| | | | | | Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal | 13,27 | % | | |
| | | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | 13.243.893.000 | Badan Kepegawaian Daerah |
| | | | | | Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu | 100 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | 19.589.676.000 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | | | | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial | 100 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan | 85 | % | | |
| | | | | | Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan) | 3,5 | Angka | | |
| | | | | | Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | 5.050.000.000 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase pelaksanaan riset dan inovasi | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | | | | 2.772.186.000 | Badan Penghubung |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan penghubung | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | 6.073.727.000 | Inspektorat |
| | | | | | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri | 83 | % | | |
| | | | | | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu | 85 | % | | |
| | | | | | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah | 85 | % | | |
| | | | | | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah | 85 | % | | |
| | | | | | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah | 85 | % | | |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | 2.766.222.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3 | 10,2 | % | | |
| | | | | | Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korups (IEPK) level 3 | 10,2 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | 2.168.341.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Indeks Ideologi Pancasila | 3 | Nilai | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | 1.022.991.617.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| Tujuan Daerah: Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari<br>Indikator Kinerja Tujuan Daerah<br>PDRB per Kapita 45,82 Juta Rupiah<br>Angka Kemiskinan 9,76 - 8,96%<br>Rasio Gini 0,364 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran Daerah** | | | **Prioritas Daerah** | **Program Prioritas Daerah** | **Indikator Kinerja Program** | **Target** | **Satuan** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **PD Penanggung Jawab** |
| **Uraian Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran** | **Target** | **Satu-an** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi | 75 | Nilai | | |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | 76.846.013.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Indeks kinerja ormas | 75,34 | Nilai | | |
| | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | 1.031.422.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Indeks toleransi | 74,1 | % | | |
| | | | | | Indeks penguatan dampak ekonomi | 3 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | 138.463.763.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Indeks kewaspadaan Nasional | 73 | Angka | | |
| | | | **TOTAL** | | | | | **28.526.693.603.000** | |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023*

### 4.2.4. Keselarasan RKPD Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024

Rencana kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 ditetapkan selain dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024, juga disusun dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2024. Keselarasan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dengan RKP Tahun 2024 ditunjukkan dengan keselarasan tema pembangunan, prioritas, sasaran dan indikator sasaran, target pengembangan wilayah, dan dukungan program prioritas daerah. Keselarasan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

**Tabel 4.5.**
**Keselarasan Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024**

| No | RKP Tahun 2024 | RKPD Tahun 2024 |
|---|---|---|
| **A** | **Tema Pembangunan** | |
| | Mempercepat **Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** | Peningkatan **Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata**, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas |
| **B** | **Prioritas** | |
| 1 | Memperkuat **ketahanan ekonomi** untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | Peningkatan **kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata** berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan **infrastruktur yang merata** dan berkualitas |
| 2 | Mengembangkan wilayah untuk **mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan** | |
| 3 | Meningkatkan **sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing** | Peningkatan **kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif** secara inklusif dan merata |
| 4 | **Revolusi mental** dan **pembangunan kebudayaan** | |
| 5 | Memperkuat **infrastruktur** untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan **infrastruktur yang merata dan berkualitas** |
| 6 | Membangun **lingkungan hidup**, meningkatkan **ketahanan bencana**, dan **perubahan iklim** | Peningkatan **pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup** dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung |
| 7 | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan **transformasi pelayanan publik** | Perbaikan **tata kelola pemerintahan** yang adaptif dan kolaboratif |

*Sumber: Bappenas, 2023 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Tabel 4.6.**
**Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024**

| No | Indikator | Target RKP Tahun 2024 | Target RKPD Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,0 – 5,4 | 4,70 – 5,50 |
| 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,26 – 4,96 | 5,44 – 4,94 |
| 3 | Rasio Gini (Angka) | 0,374 – 0,477 | 0,364 |
| 4 | Penurunan emisi GRK (%) | 27,27 | - |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia | 73,99 – 74,02 | 73,43 |
| 6 | Tingkat Kemiskinan (%) | 9,50 – 10,00 | 9,76 – 8,96 |
| 7 | Nilai Tukar Petani | 105 – 108 | 107,45 |
| 8 | Nilai Tukar Nelayan*) | 107 – 110 | 105 |

*Sumber: Bappenas, 2023 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023*
*Keterangan: *) Indikator sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan*

**Tabel 4.7.**
**Keselarasan Target Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2024 dengan Target Pengembangan Wilayah Jawa Tengah Dalam RKP Tahun 2024**

| No | Indikator | Target Jawa Tengah dalam RKP Tahun 2024 | Target RKPD Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,0 – 5,4 | 4,70 – 5,50 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan (%) | 9,50 – 10,00 | 9,76 – 8,96 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,26 – 4,96 | 5,44 – 4,94 |

*Sumber: Bappenas, 2023 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Tabel 4.8.**
**Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024**

| No | Prioritas Nasional | Program Pembangunan Daerah | Pagu Indikatif (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| **PN 1** | **Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan - Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)** | | |
| **PP1** | **Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)** | | **7.684.499.000** |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | 7.684.499.000 |
| **PP2** | **Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi** | | **107.569.287.000** |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 104.843.791.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | 2.725.496.000 |

| No | Prioritas Nasional | Program Pembangunan Daerah | Pagu Indikatif (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| **PP3** | **Peningkatan Ketersediaan, Akses, Dan Kualitas Konsumsi Pangan** | | **148.962.596.000** |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 8.530.935.000 |
| | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 763.000.000 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 2.815.000.000 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 92.533.194.000 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 5.964.297.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 14.980.185.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 2.635.000.000 |
| | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 20.740.985.000 |
| **PP4** | **Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan** | | **51.616.134.000** |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | 1.471.342.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 32.731.667.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 13.119.461.000 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1.963.639.000 |
| | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 2.330.025.000 |
| **PP5** | **Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi** | | **25.674.249.000** |
| | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 2.500.000.000 |
| | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 6.513.853.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 8.901.787.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 1.350.000.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 6.408.609.000 |
| **PP6** | **Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi** | | **37.472.523.000** |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 705.000.000 |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 1.100.000.000 |

| No | Prioritas Nasional | Program Pembangunan Daerah | Pagu Indikatif (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 1.649.910.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 1.510.218.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 524.000.000 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 30.869.870.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 290.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 823.525.000 |
| **PP7** | **Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri** | | **10.982.539.000** |
| | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 117.640.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 634.445.000 |
| | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 2.316.405.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 2.980.978.000 |
| | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 3.482.628.000 |
| | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 1.450.443.000 |
| **PP8** | **Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi** | | **138.173.575.000** |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 4.533.575.000 |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 123.700.000.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 825.000.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 9.115.000.000 |
| **PN 2** | **Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan** | | **10.115.524.699.000** |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 5.670.000.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | 675.000.000 |
| | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 1.625.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 2.450.000.000 |

| No | Prioritas Nasional | Program Pembangunan Daerah | Pagu Indikatif (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 220.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 10.104.884.699.000 |
| **PN 3** | **Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing** | | |
| **PP1** | **Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan** | | **1.700.000.000** |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 240.000.000 |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 220.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 240.000.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 305.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 695.000.000 |
| **PP2** | **Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial** | | **591.381.586.000** |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 432.049.926.000 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 157.106.160.000 |
| | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 2.225.500.000 |
| **PP3** | **Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan** | | **2.321.762.837.000** |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 1.892.500.000.000 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 425.769.619.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 937.959.000 |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 667.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1.888.259.000 |
| **PP4** | **Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas** | | **3.689.017.849.000** |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 3.687.182.187.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 751.800.000 |
| | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 341.362.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 742.500.000 |
| **PP5** | **Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda** | | **24.495.476.000** |

| No | Prioritas Nasional | Program Pembangunan Daerah | Pagu Indikatif (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 1.292.360.000 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 1.052.958.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 250.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 229.800.000 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 290.000.000 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 495.358.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 360.000.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 20.525.000.000 |
| **PP6** | **Pengentasan Kemiskinan** | | **216.792.361.000** |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 21.742.450.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 78.105.779.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 2.978.123.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 14.917.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 9.479.940.000 |
| | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | 100.000.000 |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 56.760.528.000 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 150.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 359.000.000 |
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 82.640.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 900.000.000 |
| | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 3.217.500.000 |
| | | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | 400.000.000 |
| | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 600.000.000 |
| | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 590.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 80.000.000 |

| No | Prioritas Nasional | Program Pembangunan Daerah | Pagu Indikatif (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 7.722.340.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 3.150.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | 89.140.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 1.120.525.000 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 416.326.000 |
| | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 3.936.730.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | 9.894.340.000 |
| **PP7** | **Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing** | | **235.585.117.000** |
| | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | 180.415.000 |
| | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 30.176.915.000 |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 1.780.000.000 |
| | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 1.685.787.000 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | 5.700.000.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 196.062.000.000 |
| **PN 4** | **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan** | | |
| **PP1** | **Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter** | | **2.168.341.000** |
| | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 2.168.341.000 |
| **PP2** | **Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia** | | **33.001.987.000** |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 6.028.042.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 23.705.940.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | 298.800.000 |
| | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 704.085.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | 2.265.120.000 |

| No | Prioritas Nasional | Program Pembangunan Daerah | Pagu Indikatif (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| **PP3** | **Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial** | | **140.170.583.000** |
| | | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | 139.139.161.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 1.031.422.000 |
| **PP4** | **Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter** | | **39.736.936.000** |
| | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 34.418.638.000 |
| | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | 268.298.000 |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 5.050.000.000 |
| **PN 5** | **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar** | | |
| **PP1** | **Infrastruktur Pelayanan Dasar** | | **22.022.123.000** |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 18.699.123.000 |
| | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 3.108.000.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 215.000.000 |
| **PP2** | **Infrastruktur Ekonomi** | | **473.842.877.000** |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 340.675.501.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 4.048.300.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 127.393.110.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 459.100.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | 1.266.866.000 |
| **PP3** | **Infrastruktur Perkotaan** | | **1.725.000.000** |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 1.725.000.000 |
| **PP4** | **Energi dan Kelistrikan** | | **7.898.718.000** |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | 4.315.593.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | 3.583.125.000 |
| **PP5** | **Transformasi Digital** | | **13.442.779.000** |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 13.442.779.000 |
| **PN 6** | **Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim** | | |

| No | Prioritas Nasional | Program Pembangunan Daerah | Pagu Indikatif (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| **PP1** | **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup** | | **41.392.138.000** |
| | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 778.748.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 8.548.361.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 1.538.667.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 133.740.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 844.280.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 1.904.836.000 |
| | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 240.732.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 1.968.700.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | 1.781.218.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 18.758.156.000 |
| | | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | 2.966.293.000 |
| | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 1.376.425.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | 551.982.000 |
| **PP2** | **Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim** | | **4.925.000.000** |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 4.925.000.000 |
| **PN 7** | **Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik** | | **1.022.991.617.000** |
| **PP1** | **Konsolidasi demokrasi** | | **1.022.991.617.000** |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 1.022.991.617.000 |
| **PP2** | **Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola** | | **8.779.078.825.000** |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 8.204.012.941.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 24.523.773.000 |

| No | Prioritas Nasional | Program Pembangunan Daerah | Pagu Indikatif (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 1.257.329.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 2.000.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 780.346.000 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 103.000.000 |
| | | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | 1.710.656.000 |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 3.783.000.000 |
| | | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | 1.500.000.000 |
| | | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | 2.438.990.000 |
| | | PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN | 4.912.642.000 |
| | | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 2.505.000.000 |
| | | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 1.685.000.000 |
| | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 390.574.350.000 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 5.814.000.000 |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 6.653.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 41.620.651.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 6.114.433.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 32.644.010.000 |
| | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 13.243.893.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 19.589.676.000 |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | 2.772.186.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 6.073.727.000 |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 2.766.222.000 |
| **PP3** | **Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional** | | **219.901.352.000** |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 4.441.576.000 |
| | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 150.000.000 |

| No | Prioritas Nasional | Program Pembangunan Daerah | Pagu Indikatif (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 76.846.013.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 138.463.763.000 |
| | | **TOTAL** | **28.526.693.603.000** |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023*

### 4.2.5. Inovasi Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 dikembangkan berbagai inovasi kebijakan pemerintah daerah. Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 yaitu Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, serta mendukung pada kebijakan nasional tahun 2024 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Inovasi kebijakan tersebut sebagai berikut.

**1. Program "Tuku Lemah Oleh Omah"**

Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni masih menjadi salah satu permasalahan yang ada di Jawa Tengah. Kondisi ini menjadi tugas besar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dapat mengatasi tingginya kesenjangan antara angka ketersediaan dan kebutuhan rumah atau disebut *backlog*. Berdasarkan data dari Disperakim Provinsi Jawa Tengah angka *backlog* di Jawa Tengah pada akhir tahun 2022 sebanyak 372.246 unit. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menekan angka *backlog* dengan beberapa program perumahan bersubsidi. Salah satunya adalah program "Tuku Lemah Oleh Omah".

Program Tuku Lemah Oleh Omah adalah program rumah subsidi dari Provinsi Jawa Tengah yang diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak mampu membeli rumah sendiri. Program ini dilaksanakan melalui mekanisme pemberian bantuan sosial material bangunan. Implementasi dari program "Tuku Lemah Oleh Omah" yaitu:

**a. Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (PB *Backlog*)**

Salah satu bentuk fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Povinsi Jawa Tengah dalam menyediakan rumah yang layak huni adalah dengan menyediakan bantuan stimulan bagi masyarakat untuk pembangunan rumah dalam rangka pemenuhan *backlog* di Provinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut PB *backlog*). Bentuk bantuan yang diberikan adalah bantuan sosial barang dengan nilai bantuan yaitu 35 juta rupiah untuk pembelian material bangunan dengan sistem pembelanjaan dilakukan oleh kelompok masyarakat (swakelola) dan 1,8 juta rupiah untuk upah tenaga padat karya. Bantuan yang diberikan berupa stuktur RUSPIN dan komponen arsitektur (dinding, atap, dan lainnya). Beberapa keunggulan RUSPIN yaitu waktu perakitan cepat, hanya dibutuhkan waktu 2 hari untuk merakit rumah

tipe 36 (1 bulan siap ditempati), komponen ringan sehingga mudah dirakit tanpa alat bantu mekanis, mendukung konsep rumah tumbuh, dan sudah teruji tahan gempa (Puslitbang Kementerian PUPR).

Kriteria penerima bantuan adalah:

1) Masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah;
2) Tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
3) Penghasilan dibawah Rp. 3 juta/bulan;
4) Berusia produktif;
5) Bersedia swadaya;
6) Tidak boleh disewakan/dialihkan kepemilikannya;
7) Memiliki lahan dengan kepemilikan yang sah, sesuai dengan tata ruang dan aman dari bencana. Jika belum memiliki lahan, dapat membentuk komunitas (PB Komunitas) dan membeli lahan secara bersama-sama dalam 1 hamparan untuk kemudian dipecah sesuai kavling.

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2023 sebanyak 1.254 unit rumah PB *backlog* telah dibangun melalui anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah.

**Gambar 4.3**
**Pembangunan Rumah Sederhana Sehat di Provinsi Jawa Tengah (PB *Backlog*)**

**b. Bantuan Sosial Pembangunan Baru Relokasi (PB Relokasi)**

PB relokasi merupakan bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat kepada masyarakat miskin yang terkena relokasi program pemerintah. Sasaran dari bantuan ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di rusunawa, rumah liar, sempadan sungai, lokasi rawan bencana, lahan milik pemerintah (KAI, Pelindo, Pemakaman Umum), dimana lokasi-lokasi ini telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk dilakukan relokasi dan harus mencari tempat tinggal baru.

Bantuan stimulan PB relokasi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan SPM Perumahan Rakyat daerah provinsi yaitu "fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah". Kriteria penerima bantuan PB relokasi dikhususkan bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah, sedangkan kriteria lainnya sama dengan PB *backlog*. Ada 2 jenis PB relokasi:

1) Rumah Tapak (1 lantai)

Besarnya nilai bantuan yaitu 35 juta rupiah untuk bantuan pembelian material bangunan dan 1,8 juta rupiah untuk upah tenaga padat karya. Untuk struktur dan komponen bangunan sama dengan PB *backlog* .

2) Rumah Vertikal/ "OPTIMIS (Omah Panel Tingkat Milik Sejahtera)"

Besarnya nilai bantuan yaitu 50 juta rupiah untuk pembelian material dan 1,8 juta rupiah untuk upah tenaga padat karya. Bantuan yang diberikan berupa struktur RUSPIN 2 lantai tipe 36 (lantai 1: 18 $m^2$; lantai 2: 18 $m^2$) dan komponen arsitektur (dinding, atap, dan lainnya).

**Gambar 4.4**
**Pembangunan Baru Relokasi di Provinsi Jawa Tengah (PB Relokasi)**

**c. Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana (PB Bencana)**

Bantuan stimulan kepada masyarakat miskin yang terdampak bencana khususnya yang mengalami tingkat kerusakan berat/roboh atau berada di lokasi rawan bencana melalui bantuan sosial berupa bantuan stimulan material bahan bangunan. Merupakan upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan SPM Perumahan yaitu "penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi". Nilai bantuan sebesar 50 juta rupiah untuk pembelian material bangunan dan 1,8 juta rupiah untuk upah tenaga padat karya. Mekanime dan kriteria penerima bantuan sama dengan PB *backlog* dan PB relokasi.

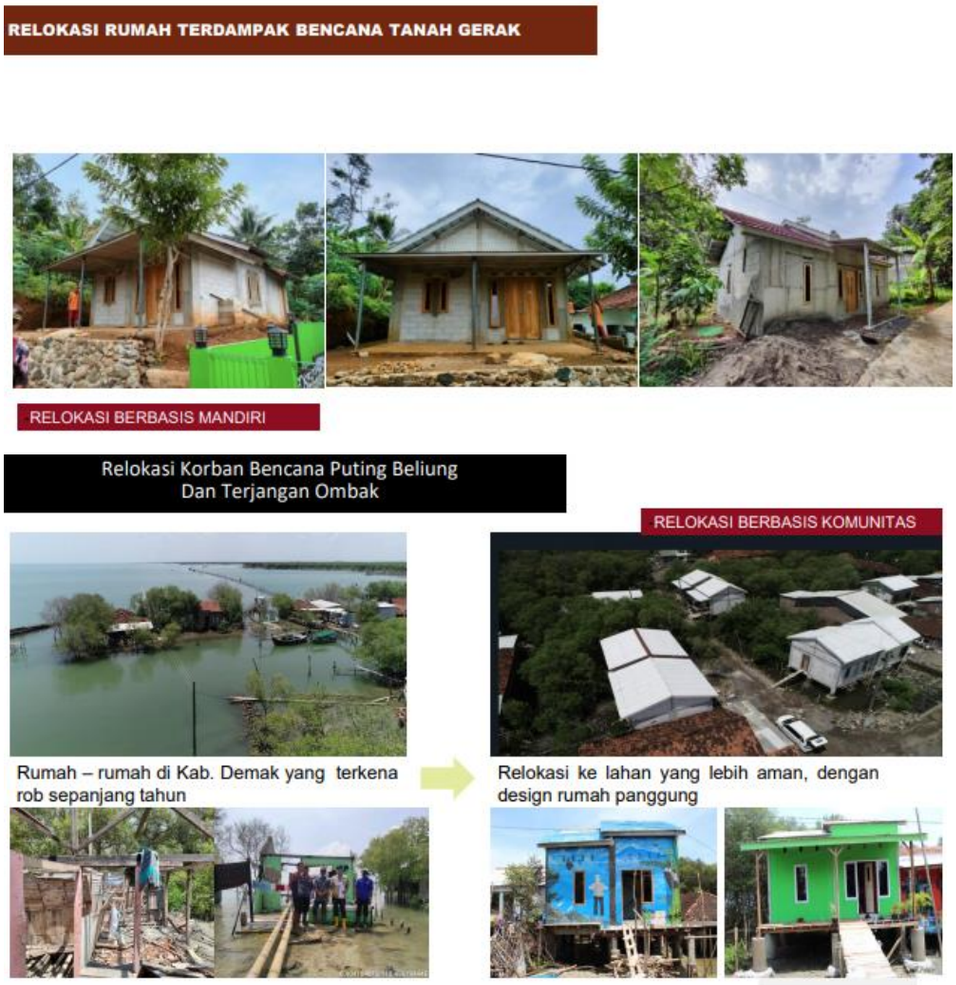


**Gambar 4.5**
**Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah (PB Bencana)**

Melalui Program "Tuku Lemah Oleh Omah" ini terdapat 2 inovasi yang ditonjolkan yaitu:

1) Inovasi Struktur Bangunan
   - Teknologi unggul RUSPIN
   - Efisiensi biaya
   - Efisiensi waktu
   - Jaminan mutu
   - Mudah direplikasi
   - Dapat dikembangkan
2) Inovasi Pemberdayaan Masyarakat
   - Berbasis komunitas
   - Swakelola Pokmas
   - Berbasis lingkungan
   - tata ruang yang berkelanjutan

**2. Pengembangan Desa Wisata**

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi pariwisata yang cukup beragam mulai dari wisata alam, budaya, maupun hasil buatan. Dalam upaya meningkatkan perekonomian, Jawa Tengah bertekad mengembangkan pariwisata

sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah baik pada skala provinsi hingga skala pemerintah desa.

Dalam rangka mewujudkan dampak ekonomi pada skala desa yang terkait dengan sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang perlu untuk memberdayakan seluruh potensi wisata di desa dengan membentuk dan mengembangkan Desa Wisata. Selain itu juga guna mendukung pengembangan desa wisata, saat ini Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

Kehadiran Desa Wisata diharapkan mampu memberikan dampak ganda (*multiplier effec*t) dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Wisata tersebut. Pada sisi yang lain, keberadaan Desa Wisata merupakan salah satu jawaban dari perkembangan kecenderungan pasar wisata, dimana orientasi pilihan wisatawan telah mengalami pergeseran pada pilihan-pilihan wisata yang menyajikan keasrian wilayah pedesaan, pola hidup masyarakat pedesaan, wisata kembali ke alam (*back to nature*), akomodasi yang mampu memberikan interaksi dengan penduduk setempat (*homestay*) dan produk yang berskala kecil namun unik.

Harapannya dengan Desa Wisata ini produk wisata akan lebih bernuansa natural (alami) sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan, sehingga dapat mengembangkan pariwisata berdampingan dengan kebudayaan tanpa merusak kebudayaan yang ada. Disisi lain pranata sosial kepariwisataan dan pengelolaan juga menjadi sangat vital, dimana desa wisata diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi agen perubah bagi kemajuan pengembangan suatu wilayah/daerah.

Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah telah mengalami perkembangan dari segi jumlah dari tahun 2019-2022 sebagai berikut:

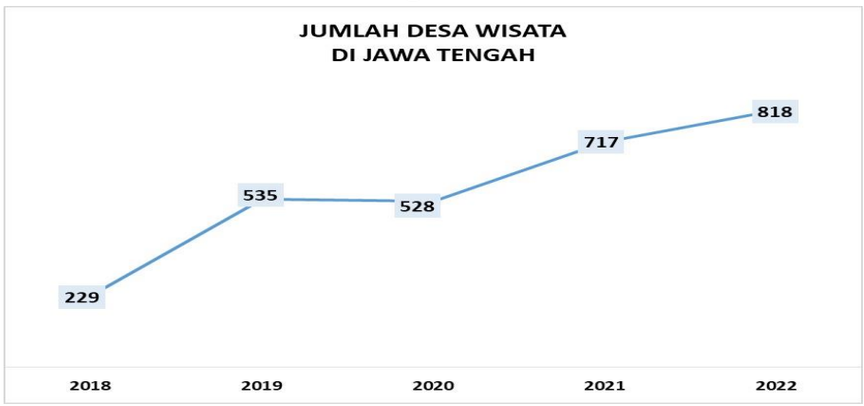


| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Jumlah Desa Wisata 535 | Jumlah Desa Wisata 528 | Jumlah Desa Wisata 717 | Jumlah Desa Wisata 818 |
| Rintisan : n/a<br>Berkembang: n/a<br>Maju : n/a | Rintisan : n/a<br>Berkembang: n/a<br>Maju : n/a | Rintisan : 337<br>Berkembang: 94<br>Maju : 31 | Rintisan : 409<br>Berkembang: 110<br>Maju : 34 |
| Belum Melaporkan kriteria : 353 | Belum Melaporkan kriteria : 528 | Belum Melaporkan kriteria : 255 | Belum Melaporkan kriteria : 265 |

**Gambar 4.6**
**Perkembangan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022**

Jumlah desa wisata terus mengalami kenaikan, namun belum ada data tentang perkembangan kenaikan kelas/perkembangan dari rintisan ke berkembang atau ke maju maupun sebaliknya.

Dalam rangka mendorong pengembangan desa wisata di Provinsi Jawa Tengah guna menghidupkan perekonomian masyarakat sampai pada tingkat desa, Pemerintah Provinsi memiliki kebijakan pemberian bantuan kepada pemerintah desa di Jawa Tengah dalam bentuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Adapun dukungan bantuan keuangan yang sudah diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pemberdayaan desa wisata adalah sebagai berikut.

**Gambar 4.7**
**Perkembangan Alokasi Bantuan Keuangan Desa Wisata di Jawa Tengah Tahun 2020-2023**

Secara konsisten dari tahun 2020-2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah konsen terhadap pembangunan dan pemberdayaan desa wisata melalui pemberian bankeu desa wisata. Dimana Desa wisata yang telah menerima bantuan dari tahun 2020-2023 berjumlah 604 Desa, dengan total bankeu sebesar 84,3 M.

Desa Wisata Jawa Tengah selain telah mengalami perkembangan dari segi jumlah. Kinerja Desa Wisata di Jawa Tengah juga terlihat dari prestasi di tingkat nasional dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia, antara lain sebagai berikut prestasinya:

1. Tahun 2021
   - Juara 1 ADWI kategori Souvenir (Desa Wisata Sumber Bulu, Kab. Karanganyar);
   - Juara 2 ADWI Kategori Desa Wisata Rintisan (Desa Wisata Pandanrejo, Kab. Purworejo);
   - Juara 3 ADWI kategori Desa Wisata Berkembang (Desa Wisata Karanganyar, Kab. Magelang);
   - Juara 2 ADWI kategori Desa Wisata Maju (Desa Wisata Dieng Kulon, Kab. Banjarnegara);
   - Juara 3 ADWI kategori Souvenir (Desa Wisata Cikakak, Kab. Banyumas);
   - Peringkat 5 ADWI kategori Homestay (Desa Wisata Sangiran, Kab. Sragen);
   - Juara 3 kategori alam BCA Desa Wisata Awards 2021 (Desa Wisata Nadulang, Kab. Pemalang);
   - Juara 1 kategori kreatif BCA Desa Wisata Awards 2021 (Desa Wisata Ngrombo, Kab. Sukoharjo);
   - Juara 2 kategori kreatif BCA Desa Wisata Awards 2021 (Desa Wisata Pagak, Kab. Banjarnegara);

- Juara 1 kategori budaya BCA Desa Wisata Awards 2021 (Desa Wisata Karangturi, Kab. Rembang);
- Juara terbaik kategori digital BCA Desa Wisata Awards 2021 (Desa Wisata Kemuning, Kab. Karanganyar);

2. Tahun 2022
   - 50 Besar ADWI tahun 2022 (Desa Wisata Bugisan, Kab. Klaten dan Desa Wisata Sembungan, Kab. Wonosobo);
   - Juara 1 ADWI Desa Wisata Rintisan (Desa Sambungan);
   - Juara Harapan 2 ADWI Kategori Digital dan Kreatif ( Desa Bugisan);
   - Juara 1 Anugerah Pesona Indonesia (API) Awards 2022 kategori Destinasi Belanja Terbaik (Desa Wisata Asap Indah, Desa Wonosari, Kabupaten Demak);
   - Juara 1 Anugerah Pesona Indonesia (API) Awards 2022 kategori Dataran Tinggi ( Dusun Girpasang, Kabupaten Klaten);
   - Juara 3 Anugerah Pesona Indonesia (API) Awards 2022 Kategori Wisata Olahraga dan Petualangan (Kalitalang Bike Park , Kabupaten Klaten).

# BAB V
# ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

## 5.1. Kebijakan Umum

Pembangunan wilayah di Jawa Tengah memperhatikan berbagai faktor terutama yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, dalam RKPD Tahun 2024 ini, selain memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), pengembangan wilayah juga memperhatikan 17 (tujuh belas) wilayah ekoregion yang berada di Jawa Tengah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion di Indonesia.

A. 5 (lima) Ekoregion yang seluruhnya berada di wilayah Jawa Tengah
   1) Ekoregion kompleks dataran fluvial Batang – Demak – Pati – Blora. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Batang, Blora, Demak, Grobogan, Jepara, Kendal, Kudus, Pati, Rembang, Semarang.
   2) Ekoregion kompleks pegunungan vulkanik Gunung Muria. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Jepara, Kudus, dan Pati.
   3) Ekoregion kompleks perbukitan vulkanik Gunung Slamet – Merapi. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud
   4) Ekoregion kompleks perbukitan struktural Gunung Beser – Wadaslintang
   5) Ekoregion kompleks dataran fluvial Cilacap

B. 1 (satu) Ekoregion yang wilayahnya terdapat di Banten – DIY – Jakarta – Jawa Barat - Jawa Tengah – Jawa Timur yaitu ekoregion kompleks dataran organic/ coral Jawa. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Jepara, Kendal, dan Rembang.

C. 1 (satu) Ekoregion yang wilayahnya terdapat di Banten – Jakarta – Jawa Barat dan Jawa Tengah yaitu Ekoregion kompleks dataran fluvial Cilegon – Indramayu – Pekalongan. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Brebes, Tegal, Pemalang, dan Batang.

D. 1 (satu) Ekoregion yang wilayahnya terdapat di Banten – Jawa Barat dan Jawa Tengah yaitu Ekoregion kompleks pegunungan vulkanik Gunung Halimun, Gunung Salak, dan Gunung Sawal. Kabupaten di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Cilacap.

E. 1 (satu) Ekoregion yang wilayahnya terdapat di Jawa Barat dan Jawa Tengah yaitu ekoregion kompleks perbukitan struktural Jonggol – Sumedang – Cilacap. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Banyumas, Cilacap, Brebes, dan Tegal.

F. 4 (empat) Ekoregion yang wilayahnya terdapat di Jawa Timur dengan Jawa Tengah yaitu:
   1) Ekoregion kompleks perbukitan struktural Kendal – Pati – Rembang – Tuban – Gresik. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Batang, Blora, Boyolali, Demak, Grobogan, Karanganyar, Kendal, Pati, Semarag, Sragen, Surakarta.
   2) Ekoregion kompleks dataran struktural Rembang – Tuban. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Blora, Grobogan, Kudus, Pati, dan Rembang.

3) Ekoregion kompleks pegunungan vulkanik Lawu Utara. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri.
4) Ekoregion kompleks perbukitan karst Pati – Rembang – Tuban. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Blora, Kudus, Pati, Rembang, Grobogan

G. 3 (tiga) Ekoregion yang wilayahnya terdapat di Jawa Timur, DI. Yogyakarta, dan Jawa Tengah
1) Ekoregion kompleks dataran vulkanik Bantul – Nganjuk – Probolinggo. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Boyolali, Karanganyar, Klaten, dan Magelang.
2) Ekoregion kompleks perbukitan struktural Wonosari – Trenggalek. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri.
3) Ekoregion kompleks perbukitan karst Gunungkidul. Kabupaten di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Wonogiri.

Sementara itu, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Arah diarahkan pada sektor pertanian, industri dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah. Berdasarkan hal tersebut maka pembangunan di Jawa Tengah harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang serta melakukan upaya mitigasi dan adaptasi dan penanganan yang bersifat hulu-hilir. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dan degradasi lingkungan yang menjadi ancaman di Jawa Tengah terutama pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi pengembangan tinggi dan sangat tinggi. Selain itu, dalam rangka untuk pemerataan pembangunan di Jawa Tengah maka upaya pembangunan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan/disparitas antar wilayah maupun di dalam wilayah melalui peningkatan aksesibilitas dan sumberdaya manusia, pengoptimalan sektor unggulan.

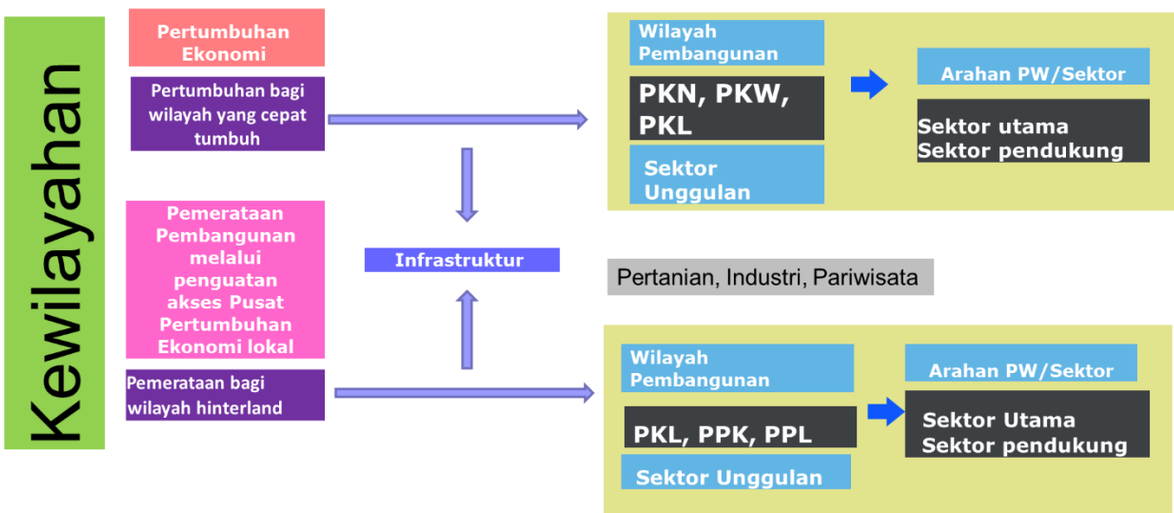


*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 5.1**

**Konsep Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah**

## 5.2. Arahan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Kondisi umum wilayah yang dikaitkan dengan adaptasi dan mitigasi terhadap ancaman bencana dan perubahan iklim, pengembangan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi 4 (empat) koridor yaitu:

1. Koridor yang dikembangkan dengan percepatan, pengendalian dan rehabilitasi sebagai upaya pengurangan risiko bencana di sepanjang Koridor Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa;
2. Koridor yang dikembangkan dengan memantabkan pembangunan serta pengendalian di sepanjang koridor Semarang hingga Solo dan Koridor Jepara-Kudus-Rembang;
3. Koridor yang dikembangkan dengan percepatan dengan mitigasi berada pada koridor Utara-Selatan di bagian barat Jawa Tengah di sepanjang Koridor Brebes hingga Cilacap dan koridor Rembang-Blora di bagian timur Jawa Tengah; dan
4. Koridor yang dikembangkan dengan percepatan dan upaya konservasi karena merupakan bagian hulu di Jawa Tengah berada pada koridor wilayah tengah Jawa Tengah.

Atas dasar itu, pengembangan wilayah Jawa Tengah ditujukan pada upaya: (1) ekspansi/perluasan yaitu memperluas cakupan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah; dan (2) konsolidasi/pemantapan yaitu mengintensifkan sistem keruangan yang ada supaya sesuai dengan peran dan fungsinya. Melalui tujuan dimaksud, maka pola pengembangan yang dilakukan adalah secara (1) Dispersi/Menyebar berupa penyebaran kegiatan ke seluruh bagian wilayah; (2) Konsentrasi/Mengumpul berupa pemusatan kegiatan pada pusat-pusat tertentu.

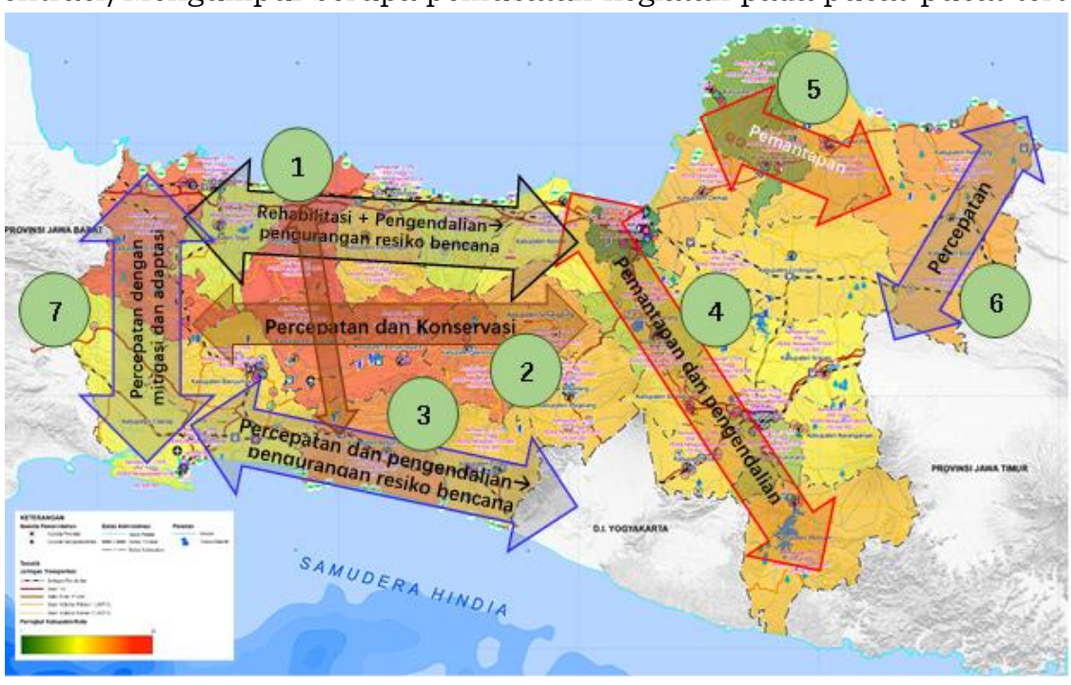


*Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Revisi RTRW)*

**Gambar 5.2**
**Arahan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah**

Strategi penanganan yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan gambar di atas adalah sebagai berikut.

1. Strategi penanganan (1): rehabilitasi dan pengendalian pengurangan risiko bencana, di antaranya:

a. Merehabilitasi prasarana perkotaan terdampak bencana perubahan iklim di wilayah pesisir utara (Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak);
b. Mitigasi bencana dengan penguatan desain struktur infrastruktur, adaptasi dan harmoni dengan alam;
c. Pengendalian pertumbuhan perkotaan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung;
d. Optimalisasi dan pengembangan kawasan industri;
e. Pelestarian dan pengendalian lahan sawah dilindungi;

2. Strategi penanganan (2): peningkatan pembangunan dan konservasi dengan pemanfaatan jasa lingkungan, di antaranya:
   a. Pemantapan pusat pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan konservasi lingkungan untuk wisata hijau; pengembangan wisata hijau (berbasis konservasi);
   b. Pengendalian (pengawasan dan penertiban) dan rehabilitasi kawasan lindung;
   c. Pengembangan prasarana dan sarana yang sesuai untuk mendukung mitigasi bencana;
   d. Optimalisasi pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata strategis.
3. Strategi penanganan (3): percepatan dan pengendalian guna pengurangan risiko bencana dan pengendalian ruang pertahanan negara, di antaranya:
   a. Pemantapan jalur ekonomi lintas selatan;
   b. Inisiasi pengembangan kawasan industri di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap;
   c. Peningkatan desain struktur untuk mitigasi bencana terhadap tsunami dan gempa tektonik;
   d. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
   e. Pemantapan sistem perkotaan menuju perwujudan perkotaan yang kompak;
   f. Pengendalian ruang pesisir untuk pertahanan negara.
4. Strategi penanganan (4) dan (5): pemantapan dan pengendalian koridor Semarang, Solo, Jogja dan Jepara-Kudus-Pati, di antaranya:
   a. Penguatan prasarana dan sarana untuk mendukung pengembangan kawasan wisata Borobudur-Temanggung-Dieng, Borobudur, Boyolali, Solo;
   b. Penguatan jalur Jepara-Kudus-Juwana-Pati.
5. Strategi penanganan (6) dan (7): percepatan dan mitigasi bencana, di antaranya:
   a. Peningkatan akses di Brebes-Cilacap dan Blora-Rembang;
   b. Peningkatan kerapatan jaringan pendukung di Brebes-Cilacap dan Blora-Rembang;
   c. Pengembangan kawasan perbatasan;
   d. Penyediaan infrastruktur sumberdaya air untuk pengendali banjir dan kekeringan.

## 5.3. Arahan Per Wilayah Pengembangan

Wilayah pengembangan di Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) wilayah pengembangan (WP) meliputi WP Kedungsepur, WP Jekutibanglor, WP Purwomanggung, WP Subosukawonosraten, WP Bregasmalang, WP Barlingmas-

cakeb, dan WP Petanglong. Pengembangan tujuh WP tersebut bertujuan untuk lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk, serta menciptakan pemerataan pembangunan berciri kuat terciptanya produk unggulan.

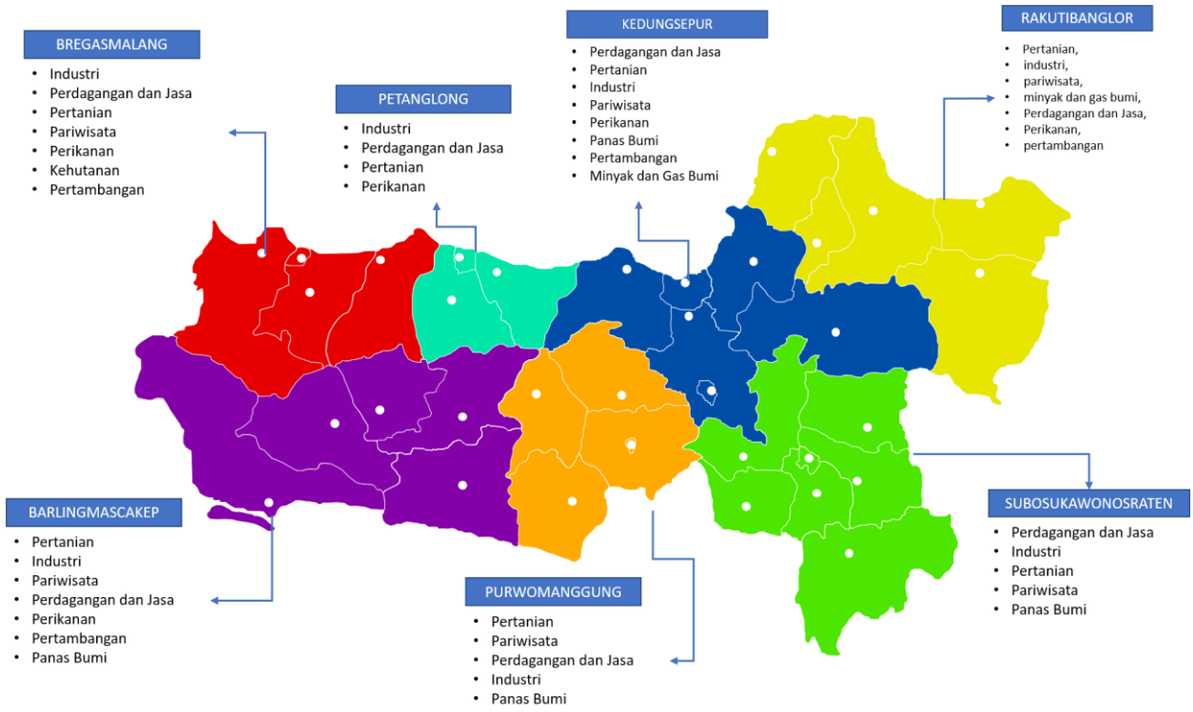


*Sumber: Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029*

**Gambar 5.3**

**Sektor Unggulan Wilayah Pengembangan Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029**

Arahan pengembangan wilayah di tujuh wilayah pengembangan tersebut pada tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut.

### 5.3.1. Wilayah Pengembangan (WP) Kedungsepur

#### a. Analisis kinerja pembangunan WP Kedungsepur

Kondisi WP Kedungsepur dapat digambarkan memiliki kesenjangan/ disparitas tinggi. Hal ini ditunjukkan dari gambaran Kota Semarang dan Kota Saltiga yang memiliki PDRB per kapita tinggi di atas rata-rata nasional, serta Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang memiliki PDRB per kapita di atas rata-rata Jawa Tengah. Sedangkan Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan memiliki PRDB per kapita di bawah rata-rata Jawa Tengah. Kondisi tersebut menggambarkan terjadi kesenjangan/disparitas antara *primary city* dengan *secondary city*.

Selanjutnya, untuk capaian kinerja pembangunan makro di WP Kedungsepur yang masih memerlukan perhatian karena di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah dari aspek penanganan pengangguran. Capaian tingkat pengangguran terbuka (TPT) empat kabupaten/kota di WP Kedungsepur pada tahun 2022 di bawah capaian TPT provinsi. Secara rata-rata angka kemiskinan di WP Kedungsepur juga memerlukan perhatian karena di atas angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Secara lengkap capaian kinerja indikator makro pembangunan di WP Kedungsepur pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut..

**Tabel 5.1.**
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Kedungsepur Tahun 2022**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Grobogan | 5,98 | 11,80 | 4,40 | 70,97 |
| 2 | Kabupaten Demak | 5,25 | 12,09 | 6,11 | 73,76 |
| 3 | Kabupaten Semarang | 5,31 | 7,27 | 4,81 | 74,67 |
| 4 | Kabupaten Kendal | 5,69 | 9,48 | 7,34 | 73,19 |
| 5 | Kota Semarang | 5,73 | 4,25 | 7,60 | 84,08 |
| 6 | Kota Salatiga | 5,53 | 4,73 | 5,58 | 84,35 |
| **Rata-rata WP** | | **5,58** | **8,27** | **5,97** | **76,84** |
| **Jawa Tengah** | | **5,31** | **10,93** | **5,57** | **72,79** |
| **Nasional** | | **5,31** | **9,57** | **5,86** | **72,91** |

*Sumber: BPS, 2023*

Di WP Kedungsepur terdapat beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah di antaranya sektor perdagangan dan jasa, pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, *real estate*, serta penyediaan akomodasi dan pengadaan air. Kawasan strategis di WP Kedungsepur yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan antara lain:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya antara lain Kawasan Masjid Agung Demak (Kawasan Strategis Provinsi/KSP) dan Candi Gedongsongo (KSP);
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi antara lain Kawasan Perkotaan Kedungsepur (Kawasan Strategis Nasional/KSN), Kawasan Industri (KI) Kendal–Semarang–Demak (KSP), dan Kawasan Agropolitan Semarboyong (KSP);
c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup antara lain Kawasan Rawa Pening (KSP).

**b. Analisis daya saing WP Kedungsepur**

Nilai rata-rata Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) WP Kedungsepur tahun 2022 adalah sebesar 3,577, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,531. Nilai ini merupakan yang tertinggi kedua jika dibandingkan dengan WP lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Dalam tinjauan internal WP Kedungsepur, nilai IDSD Kota Semarang merupakan yang tertinggi yakni sebesar 3,937. Untuk nilai IDSD Kota Salatiga dan Kabupaten Kendal berada di atas rata-rata nilai IDSD WP Kedungsepur dengan nilai masing-masing sebesar 3,812 dan 3,628. Di sisi lain, nilai IDSD Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Demak berada di bawah rata-rata nilai IDSD WP Kedungsepur, dengan nilai masing-masing sebesar 3,499, 3,481, dan 3,107. Secara umum, nilai IDSD WP Kedungsepur ini memiliki kecenderungan yang rendah pada dimensi pendidikan, keuangan daerah, dan infrastruktur transportasi. Selain itu, penilaian pada dimensi teknologi dan stabilitas pasar, beberapa kabupaten/kota memiliki nilai sangat rendah terutama Kabupaten Demak.

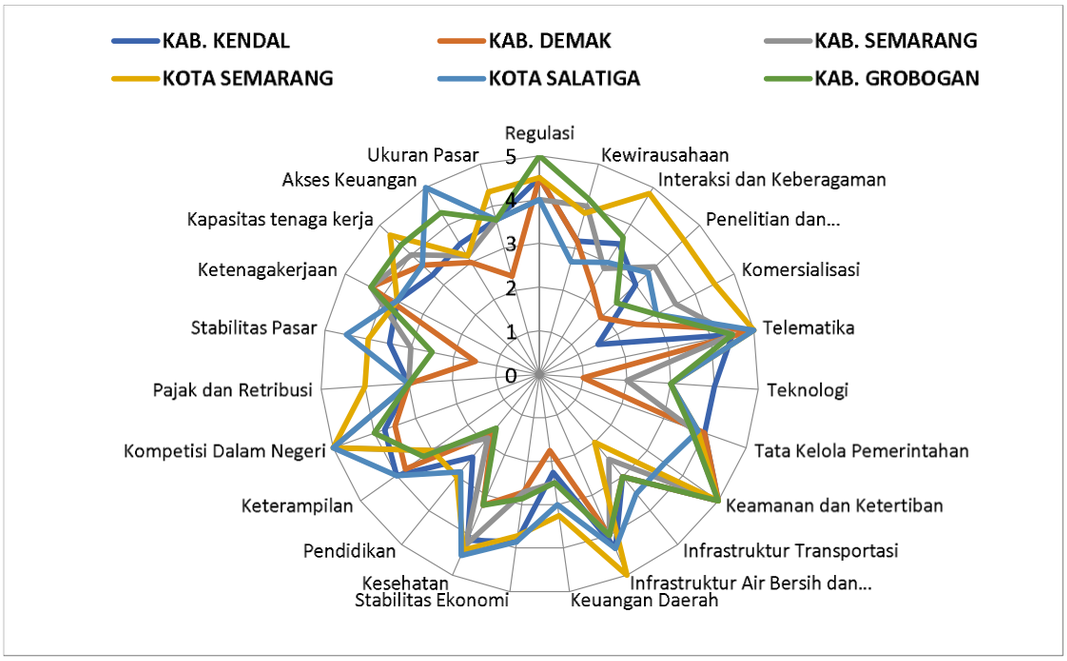


*Sumber: Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 5.4**

**Nilai IDSD Kabupaten/Kota di WP Kedungsepur Tahun 2022**

Kondisi daya saing WP Kedungsepur masih berada pada tahap penguatan kapasitas daya saing. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai beberapa indikator faktor pendukung daya saing yang masih rendah, antara lain pada dimensi teknologi dan stabilitas pasar. Beberapa indikator yang berkontribusi pada rendahnya nilai daya saing wilayah ini antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, rendahnya investasi nasional, rendahnya kapasitas infrastruktur jalan, serta kolaborasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi.

Dengan memperhatikan potensi pengembangan perdagangan dan jasa pada wilayah ini, serta memperhatikan fungsi dan peran, maka penguatan interaksi antarkabupaten/kota perlu ditingkatkan dalam rangka efisiensi. Berkaitan dengan hal ini, maka perlu peningkatan kapasitas infrastruktur jalan dan kreativitas untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta penguatan investasi produktif yang memiliki *multiplier effect* terhadap ekonomi lokal tinggi. Di samping itu, penguatan kolaborasi perlu dilakukan antara lain dengan perguruan tinggi lokal untuk peningkatan inovasi dan teknologi.

**c. Analisis daya dukung dan daya tampung terhadap air dan pangan di WP Kedungsepur**

Daya dukung dan daya tampung air dan pangan di wilayah Kedungsepur telah terlampaui. Dari 6 (enam) Kabupaten/Kota di wilayah Kedungsepur status daya dukung dan daya tampung air nya telah terlampaui semua. Kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan akan penyediaan air sehingga diperlukan strategi peningkatan tangkapan air melalui pembangunan waduk, bendungan, pengendalian beban pencemar pada sungai serta pemulihan kerusakan *catchment area* pada daerah hulu untuk memenuhi kebutuhan air yang ada di Jawa Tengah.

Daya dukung dan daya tampung pangan yang telah terlampaui yaitu di Kota Semarang dan Kota Salatiga. Sedangkan Kabupaten Semarang, Kendal, Grobogan dan Demak status daya dukung dan daya tampung pangan masih belum

terlampaui. Untuk mendukung keberlanjutan daya dukung dan daya tampung pangan diperlukan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, selain itu juga konsumsi beras perlu diturunkan, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.

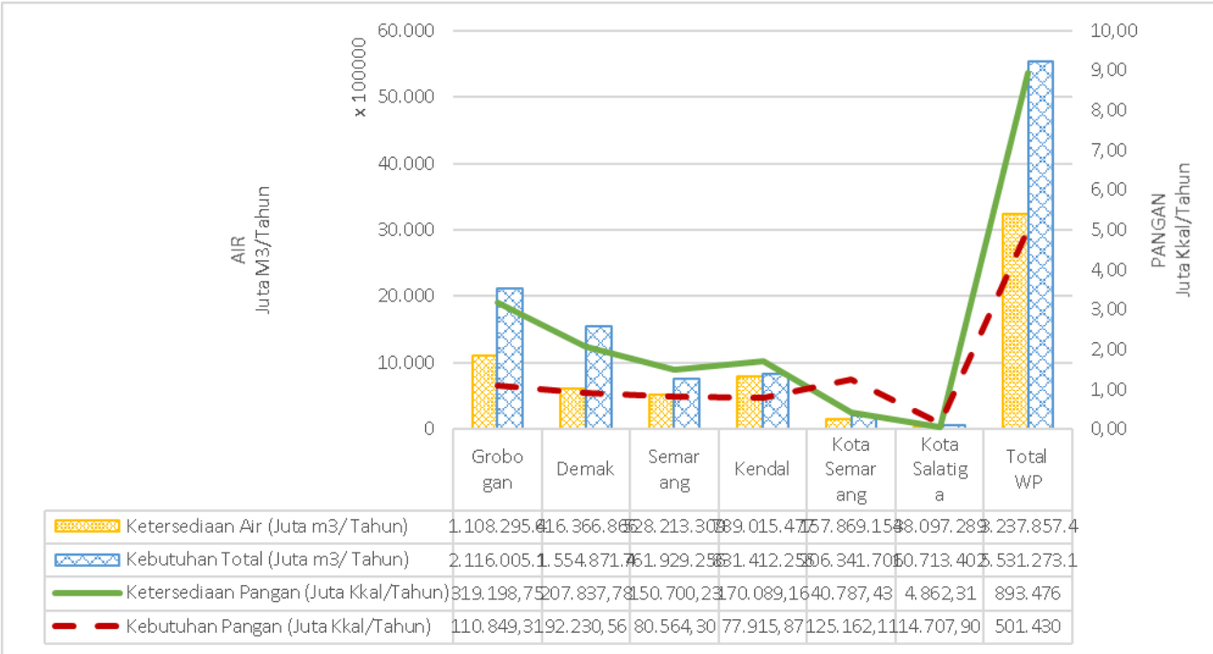


*Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, 2023*

**Gambar 5.5**

**Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur**

**d. Sasaran kinerja pembangunan WP Kedungsepur**

Pengembangan wilayah Kedungsepur tahun 2024 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator makro yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.2.**

**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Kedungsepur Tahun 2024**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Grobogan | 4,00 – 6,00 | 10,03 – 10,64 | 4,18 | 72,10 |
| 2 | Kabupaten Demak | 5,55 – 5,94 | 11,02 – 10,42 | 6,10 – 5,10 | 73,92 |
| 3 | Kabupaten Semarang | 5,20 – 5,60 | 7,10 -6,34 | 4,50 – 4,00 | 75,20 |
| 4 | Kabupaten Kendal | 5,50 – 5,95 | 9,39 – 8,15 | 5,43 | 75,61 |
| 5 | Kota Semarang | 5,70 – 6,50 | 4,00 – 3,82 | 7,60 – 6,50 | 84,4 – 86,00 |
| 6 | Kota Salatiga | 5,29 – 5,96 | 4,32 – 4,18 | 5,70 – 5,20 | 85,10 |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**e. Indikasi program pembangunan WP Kedungsepur**

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja indikator makro pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan beberapa strategi dan rencana program yang terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Di WP Kedungsepur terdapat beberapa proyek strategis nasional (PSN), program prioritas strategis nasional (*Majorproject* RPJMN), indikasi program penataan ruang (RTRW) dan rencana program sektoral yang dapat menjadi pengungkit pembangunan, di antaranya:

1. PSN antara lain pembangunan jalan tol (Semarang–Demak, Bawen–Yogyakarta, dan Semarang *Harbour*); pengembangan kereta api Jakarta–Surabaya; pengembangan *underground* Simpang Lima Kota Semarang; pembangunan Bendung Jragung Kabupaten Semarang; rehabilitasi daerah irigasi Glapan (Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan); pembangunan SPAM Semarang Barat, dan pembangunan transmisi pipa gas ruas Cirebon–Semarang;
2. RPJMN antara lain pengembangan kereta api kecepatan tinggi Pulau Jawa (Jakarta–Semarang); pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan metropolitan Semarang; pengamanan pesisir perkotaan pantura Jawa (Kota Semarang dan Kabupaten Demak); revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan tambak di pantura Jawa;
3. RTRW antara lain memadukan pembangunan Kota Semarang dan wilayah sekitarnya didasarkan pada sektor unggulan yang meliputi perdagangan dan jasa, pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, *real estate*, penyediaan akomodasi, pengadaan air, dan pariwisata;
4. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) antara lain pengembangan jaringan dan layanan kereta api regional Joglosemar dan Kedungsepur; dan pengembangan jaringan dan layanan kereta api perkotaan Semarang.

Terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada tahun 2024 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten/kota di WP Kedungsepur antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di antaranya melalui:
   a. Penyediaan rumah/unit hunian untuk golongan menengah bawah seperti pekerja industri di wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI) Semarang-Kendal-Demak dan Kabupaten Grobogan, serta petani yang lahannya ditetapkan sebagai bagian dari LSD;
   b. Peningkatan layanan penyediaan air bersih pada permukiman di kampung pesisir dan padat;
   c. Peningkatan jaminan ketersediaan pangan (makanan pokok baik nabati maupun hewani);
   d. Pemasangan sambungan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin.
2. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas di antaranya melalui peningkatan pendidikan kejuruan yang dibutuhkan sektor industri di WPPI dan Kawasan peruntukan industri (KPI);
3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di antaranya melalui peningkatan pelayanan, sebaran dan kualitas pelayanan kesehatan ditingkat bawah (puskesmas-polindes) terutama di kawasan perbatasan dan perdesaan yang aksesnya masih rendah;
4. Peningkatan sektor ketenagakerjaan di antaranya melalui:
   a. Meningkatkan penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);
   b. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;

c. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* prasarana dan sarana balai latihan kerja (BLK) dan SMK;
d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
e. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.

5. Pemantapan ketahanan pangan di antaranya melalui:
   a. Pengendalian alih fungsi lahan baku sawah (LSD) ataupun LP2B (sawah utama);
   b. Peningkatan pasokan air baku, khususnya di masa tanam kedua dan ketiga;
   c. Rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi (DI) Dolok, dan DI Penggaron;
   d. Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Kedung Pengilon, DI Pelayaran Sayung Batu, DI Sidopangus, DI Guntur, DI Sucen, DI Senjoyo, Di Dolok, DI Sojomerto;
   e. Rehabilitasi Embung Triharjo, Embung Bancak;
   f. Pemeliharaan Embung Ngerjo;
   g. Penyediaan pasar stasiun agro untuk memudahkan petani menjual produk dan untuk menjaga tingkat harga (menghindari tengkulak).
6. Peningkatan ketahanan air dan lahan berbasis ekoregion di antaranya ditempuh melalui:
   a. Peningkatan ketahanan air, utamanya:
      1) Normalisasi sistem Sungai Silandak Semarang, anak sungai Rawa Pening;
      2) Pembangunan perkuatan tebing Sungai Blukar, Sungai Bodri, Sungai Kendal;
      3) Pemeliharaan Sungai Kendal, Sungai Buntu, Sungai Waridin, Sungai Aji, Sungai Blorong, Sungai Bodri, Sungai Blukar, Sungai Kuto, Sungai Bulanan, Sungai Damar, Sungai Kedondong;
      4) Rehabilitasi pesisir Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang;
      5) Fasilitasi pembangunan waduk dan bendungan di antaranya Waduk Jragung dengan salah satu fungsinya sebagai SPAB Jragung untuk menyediakan SPAM Kota Semarang – Grobogan - Demak, Bendungan Bodri Kabupaten Kendal, Bendung Karet Sungai Bodri Kabupaten Kendal;
      6) Kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam rangka upaya konservasi air tanah pada CAT Semarang-Demak, CAT Kudus, CAT Kendal, CAT Subah, CAT Sumowono, CAT Ungaran, CAT Rawapening, CAT Salatiga, CAT Magelang-Temanggung;
      7) Pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
   b. Peningkatan ketahanan lahan, utamanya rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS Tuntang, DAS Bodri, DAS Garang; serta pengawasan usaha pertambangan serta penertiban PETI di Wilayah Kedungsepur.

7. Peningkatan daya saing pariwisata di antaranya melalui:
   a. Dukungan promosi bersama untuk daya tarik wisata Jateng *Valley*, wisata religi, kawasan wisata Rawa Pening, Candi Gedongsongo, serta pengembangan daya tarik Kota Lama dan kampung wisata di pinggiran Kota Semarang;
   b. Pengembangan desa wisata berbasis konservasi di dataran tinggi (Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal);
   c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
   d. Fasilitasi *event* promosi pariwisata di kawasan strategis pariwisata provinsi (KSPP) Kota Semarang dan sekitarnya, KSPP Gedongsongo–Rawa Pening dan sekitarnya, dan kawasan pengembangan pariwisata provinsi (KPPP) Kendal dan sekitarnya.
8. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di antaranya melalui:
   a. Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
   b. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan;
   c. Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
   d. Pendampingan pelatihan *digital marketing* bagi pelaku UMKM.
9. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di antaranya melalui:
   a. Menjaga kemantapan jalan provinsi utamanya pada koridor Semarang - Purwodadi - Blora, Purwodadi – Gemolong – Solo; koridor Singget (ke arah Cepu), Salatiga – Gubug;
   b. Penyediaan layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) pada koridor Stasiun Tawang – Terminal Bawen, Terminal Mangkang – Weleri dan Terminal Penggaron – Gubug via Godong;
   c. Pengembangan simpul transportasi, utamanya peningkatan Terminal Tipe B Purwodadi.
10. Peningkatan ketahanan energi di antaranya melalui fasilitasi pengembangan transmisi SUTET Ungaran-Ampel-Pedan sirkit II, fasilitasi gardu induk (GI) 150 KV KTT KEK Kendal dan SUTT Inc (Weleri – Kaliwungu) dan Tambak Lorok II / Gajah dan SUTT Inc (Sayung – Kudus); pembangunan infrastruktur EBT potensi lokal (Biogas, Gas Rawa, PLTMH, PLTS Atap); fasilitasi pemanfaatan energi alternatif berbasis potensi lokal (pengembangan panas bumi WKP Gunung Ungaran dan WKP Umbul Telomoyo), dan fasilitasi pembangunan pipa gas distribusi Semarang-Batang-Cirebon.

Beberapa kebutuhan rencana strategis yang merupakan kewenangan kabupaten/kota yang diperlukan sebagai sinergi pengembangan kawasan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan simpul transportasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota (terminal tipe C) dan *re-routing* trayek angkutan perkotaan dan/atau pedesaan sebagai upaya integrasi rencana pengembangan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan;
2. Peningkatan penyediaan jaringan jalan wisata antar kabupaten di antaranya ruas jalan kabupaten penghubung Kabupaten Semarang – Kabupaten Demak, Ruas Ambarawa – Limbangan – Bawang;
3. Peningkatan kapasitas jalan antar pusat PKL dan PPK untuk meningkatkan aksesibilitas ke pusat-pusat pertumbuhan/produksi di perdesaan;

4. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, di antaranya melalui penanganan *stunting* dengan peningkatan kualitas air bersih dan peningkatan pengetahuan orang tua terkait pemberian gizi dan pola asuh anak.

Arah pengembangan wilayah untuk WP Kedungsepur secara spasial dapat dilihat pada gambar berikut.

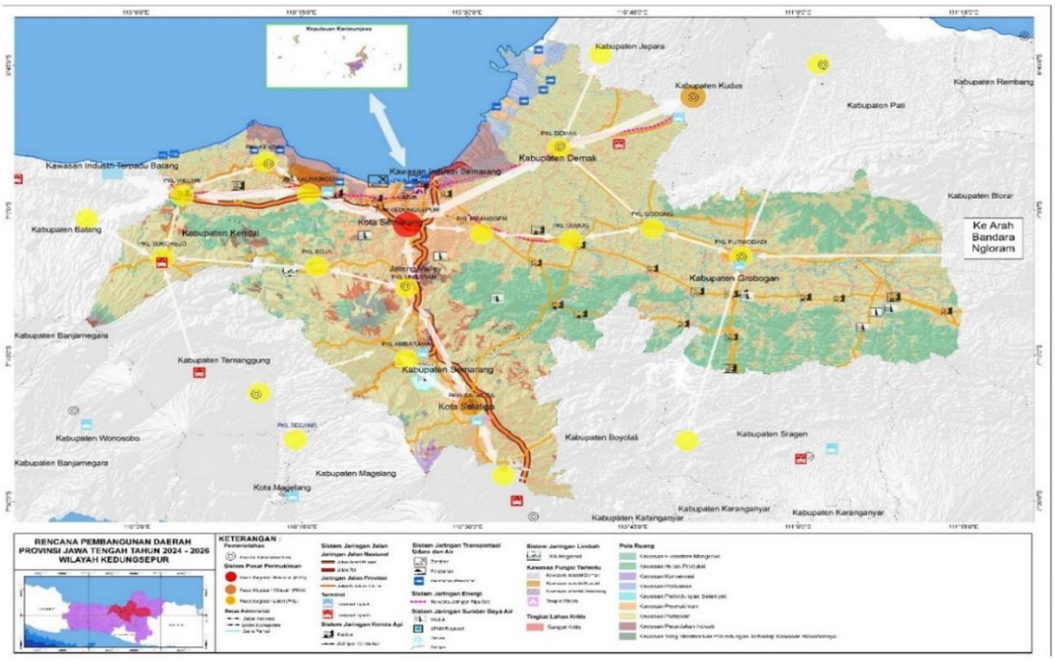


*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 5.6**
**Arah Pengembangan WP Kedungsepur**

### 5.3.2. Wilayah Pengembangan Jekutibanglor

#### a. Analisis kinerja pembangunan WP Jekutibanglor

WP Jekutibanglor merupakan gabungan dari 2 (dua) WP yaitu WP Wanarakuti dan WP Banglor. Secara umum, WP ini menghadapi permasalahan di bidang pendidikan, perekonomian, dan sumber daya lingkungan yang menyebabkan angka kemiskinan tinggi, sejalan dengan tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Kondisi makro pembangunan wilayah Jekutibanglor saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.3.**
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Jekutibanglor Tahun 2022**

| No | Kabupaten | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Jepara | 5,95 | 6,88 | 4,10 | 73,15 |
| 2 | Kabupaten Kudus | 2,23 | 7,41 | 3,21 | 75,89 |
| 3 | Kabupaten Pati | 5,56 | 9,33 | 4,45 | 73,14 |
| 4 | Kabupaten Blora | 2,68 | 11,53 | 3,70 | 69,95 |
| 5 | Kabupaten Rembang | 5,55 | 14,65 | 1,76 | 71,00 |
| **Rata-rata WP** | | **4,39** | **9,96** | **3,44** | **72,63** |
| **Jawa Tengah** | | **5,31** | **10,93** | **5,57** | **72,79** |
| **Nasional** | | **5,31** | **9,57** | **5,86** | **72,91** |

*Sumber: BPS, 2023*

Lokasi WP Jekutibanglor berada di utara Jawa Tengah dengan potensi yang dapat dioptimalkan adalah perdagangan dan jasa, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, penyediaan akomodasi, penggalian dan pertambangan. Kawasan strategis yang ada di wilayah pengembangan ini adalah Kawasan Industri Rembang; destinasi pariwisata Semarang – Karimunjawa dan sekitarnya; kawasan strategis pariwisata Rembang – Lasem dan sekitarnya, serta kawasan pengembangan pariwisata Blora – Cepu dan sekitarnya. Kawasan strategis ini dapat dijadikan daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan.

**b. Analisis daya saing WP Jekutibanglor**

Nilai rata-rata IDSD WP Jekutibanglor tahun 2022 adalah sebesar 3,271, menurun dari rata-rata tahun sebelumnya yang sebesar 3,392. Nilai rata-rata IDSD wilayah ini merupakan yang tertinggi ke-5. Dalam tinjauan internal WP Jekutibanglor, nilai IDSD yang tertinggi adalah di Kabupaten Rembang sebesar 3,619. Nilai IDSD Kabupaten Kudus merupakan tertinggi ke-2 di wilayah ini dengan nilai sebesar 3,385. Selain itu, nilai IDSD pada Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Blora, masing-masing sebesar 3,238, 3,196, dan 2,917, berada di bawah rata-rata nilai IDSD WP Jekutibanglor. Secara umum nilai ini masih relatif rendah pada dimensi pendidikan, teknologi, serta penelitian dan pengembangan.

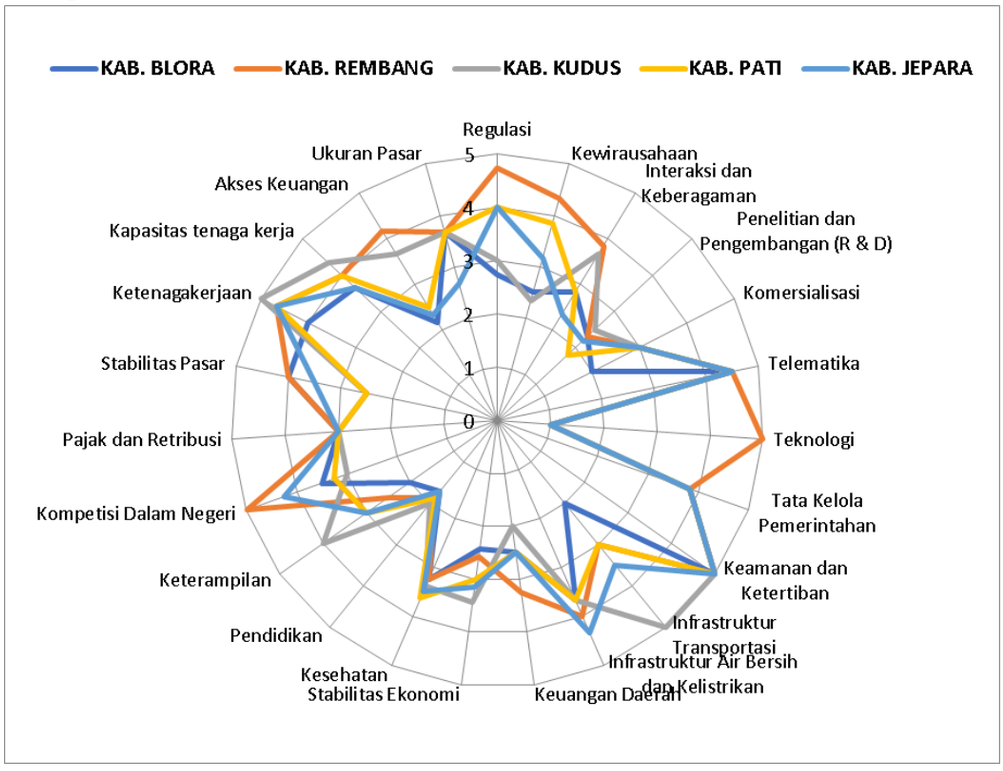


*Sumber: Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 5.7**
**Nilai IDSD Kabupaten di WP Jekutibanglor Tahun 2022**

Kondisi daya saing WP Jekutibanglor masih berada pada tahap penguatan kapasitas daya saing. Beberapa indikator pada faktor pendukung daya saing wilayah ini masih lemah khususnya pada jumlah masyarakat berpendidikan tinggi maupun berkeahlian (*skilled*), rendahnya kolaborasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi, serta geliat ekonomi lokal pada sektor UMKM yang cenderung pasif. Dalam rangka mendukung pengembangan potensi perdagangan dan jasa pada

wilayah ini maka diperlukan program dalam rangka meningkatkan pendidikan masyarakat, khususnya yang berorientasi pada penguasaan IPTEK serta kemampuan keahlian (*skill*). Di samping itu, perlu penguatan investasi produktif yang memiliki *multiplier effect* terhadap ekonomi lokal tinggi, serta penguatan kolaborasi perlu dilakukan antara lain dengan perguruan tinggi lokal untuk peningkatan inovasi dan teknologi.

**c. Analisis daya dukung dan daya tampung air dan pangan di WP Jekutibanglor**

Kondisi daya dukung dan daya tampung air di lima kabupaten wilayah Jekutibanglor telah terlampaui. Kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan akan penyediaan air sehingga diperlukan strategi peningkatan tangkapan air melalui pembangunan waduk, bendungan, serta rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

Sementara itu status daya dukung dan daya tampung pangan di Jekutibanglor belum terlampaui. Untuk mendukung keberlanjutan daya dukung dan daya tampung pangan diperlukan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, selain itu juga konsumsi beras perlu diturunkan, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.

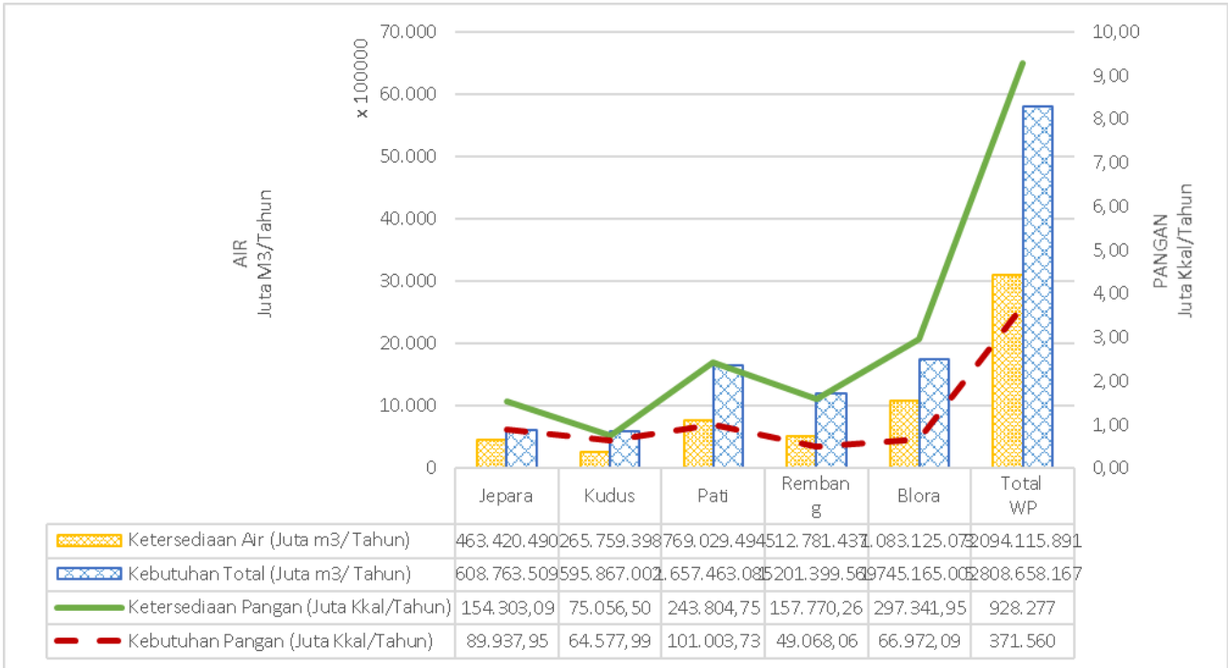


*Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045,2023*

**Gambar 5.8**
**Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Jekutibanglor**

**d. Sasaran kinerja pembangunan WP Jekutibanglor**

Pengembangan wilayah Jekutibanglor untuk tahun 2024 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.4.**
**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Jekutibanglor Tahun 2024**

| No | Kabupaten | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Jepara | 5,20 – 6,20 | 6,65 – 5,95 | 4,00 – 3,60 | 74,00 |
| 2 | Kabupaten Kudus | 2,50 – 3,50 | 6,96 | 3,19 | 76,32 – 76,78 |
| 3 | Kabupaten Pati | 4,36 – 5,28 | 8,58 - 8,3 | 3,66 – 3,32 | 74,34 |
| 4 | Kabupaten Blora | 5,37 – 6,06 | 10,31-10,23 | 4,27 – 3,88 | 71,1 |
| 5 | Kabupaten Rembang | 4,53 – 5,33 | 13,35-13,19 | 3,38 – 3,07 | 72,04 |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**e. Indikasi program pembangunan WP Jekutibanglor**

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja indikator makro pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan beberapa strategi dan rencana program yang terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Di WP Jekutibanglor terdapat beberapa proyek strategis nasional (PSN), program prioritas strategis nasional (*Majorproject* RPJMN), indikasi program penataan ruang (RTRW) dan rencana program sektoral yang dapat menjadi pengungkit pembangunan, di antaranya:

1. PSN antara lain pembangunan Bendungan Randugunting;
2. RPJMN antara lain pembangunan desa terpadu; pengembangan komoditas unggulan kopi; peningkatan komoditas unggulan tebu; pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap;
3. RTRW antara lain pengembangan sektor unggulan berbasis pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa, perikanan, pertambangan dan pariwisata; peningkatan kualitas jalur logistik ke Pelabuhan Tanjung Mas dari kawasan peruntukkan industri (KPI); peningkatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih; serta peningkatan kerapatan dan kualitas jalan khususnya jalan penghubung antarkabupaten dan antarpusat kegiatan lokal;
4. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) antara lain reaktivasi dan peningkatan (revitalisasi) jalur kereta api Semarang-Demak–Kudus–Pati–Juwana–Rembang–Lasem–Jatirogo–Bojonogoro.

Selain itu, terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada tahun 2024 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten di WP Jekutibanglor antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di antaranya melalui
   a. Peningkatan penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
   b. Peningkatan layanan air bersih;
   c. Peningkatan layanan sanitasi dan persampahan di kawasan perkotaan/ permukiman padat;
   d. Pemasangan sambungan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin.
2. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas di antaranya melalui peningkatan akses pendidikan dasar sembilan tahun.
3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di antaranya melalui peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (Parang-Nyamuk).

4. Peningkatan sektor ketenagakerjaan di antaranya melalui:
   a. Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor perdagangan dan jasa (pengolahan non kayu, pengolahan bahan baku lokal (kayu jati), dan lain-lain);
   b. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
   c. *Upskilling* terhadap instruktur serta *upgrading* prasarana dan sarana BLK dan SMK;
   d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan;
   e. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
5. Pemantapan ketahanan pangan di antaranya melalui:
   a. Pengembangan kegiatan mina industri (perikanan budidaya bandeng) dan perikanan tangkap (kepiting/rajungan); dan perlindungan lahan pangan berkelanjutan;
   b. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Siwayut, DI Kramat, DI Logung;
   c. Pemeliharaan jaringan irigasi DI Medani, DI Kedungsapen, DI Widodaren, DI Bakalan, DI Sentul, Di Siwayut, DI Kedungwaru, DI Kramat, DI Logung;
   d. Pemeliharaan Embung Dengkek, Embung Tegalrejo, LS Ngilen.
6. Pendekatan pembangunan berbasis ekoregion diantaranya ditempuh melalui:
   a. Peningkatan ketahanan air, utamanya pada fasilitasi penanganan DAS Sungai Juwana, dan fasilitasi inisiasi proses pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dadi Muria; pembangunan Bendungan Karangnongko; pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam rangka upaya konservasi air tanah pada CAT Lasem, CAT Randublatung, CAT Watuputih, CAT Semarang-Demak, CAT Jepara, CAT Pati-Rembang; serta pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
   b. Peningkatan ketahanan lahan, utamanya pada pengelolaan pertambangan terutama pada jalur tambang di Kendeng; rehabilitasi hutan dan lahan di DAS Serang, DAS Juwana; lanjutan inisiasi Tahura Muria; pengawasan usaha pertambangan; serta penertiban PETI.
7. Peningkatan daya saing pariwisata di antaranya melalui:
   a. Fasilitasi integrasi pengembangan daya tarik wisata (DTW) Karimunjawa dan aglomerasi wisata religi Pati-Kudus-Demak (Raden Patah, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Kudus);
   b. Pengembangan destinasi wisata baru berbasis potensi lokal (eks desa pertambangan minyak tradisional, kereta api mesin uap dengan bahan bakar kayu jati), dan wisata alam (karst dan hutan jati);
   c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi;

d. Fasilitasi *event* promosi pariwisata di wilayah kawasan strategis pariwisata provinsi (KSPP) Karimunjawa dan sekitarnya, KSPP Demak–Kudus dan sekitarnya, serta kawasan pengembangan pariwisata provinsi (KPPP) Pati dan sekitarnya.

8. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di antaranya melalui:
   a. Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
   b. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan;
   c. Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
   d. Pendampingan pelatihan *digital marketing* bagi pelaku UMKM.
9. Peningkatan investasi di antaranya melalui inisiasi proses pembangunan kawasan industri utamanya memfasilitasi investor masuk, mendorong pemberian insentif, serta kemudahan berusaha;
10. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di antaranya melalui:
    a. Menjaga kemantapan jalan provinsi utamanya pada ruas Lasem – Sale (perbatasan Provinsi Jawa Timur); koridor Cepu – Singget (ke arah Grobogan), koridor Jepara – Keling – Pati, koridor Juwana – Ngawen;
    b. Peningkatan fasilitas keselamatan jalan dengan pemasangan LPJU utamanya pada ruas jalan perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur (Lasem – Sale);
    c. Pengembangan simpul transportasi di antaranya melalui fasilitasi optimalisasi Bandara Ngloram Cepu Kabupaten Blora; fasilitasi optimalisasi Pelabuhan Pengumpan Regional Sluke Rembang; fasilitasi lanjutan rencana reaktivasi jalur non aktif kereta api Semarang – Rembang – Bojonegoro.
11. Peningkatan ketahanan energi di antaranya melalui fasilitasi pengembangan gardu induk 150kV Kudus II/Nalumsari dan SUTT Inc (Kudus – Jepara); fasilitasi rencana pengembangan lapangan pertama (POD I) lapangan RBG Blok I wilayah Kerja Blora; pembangunan infrastruktur EBT potensi lokal (biogas, gas rawa, PLTMH, PLTS atap).

Beberapa kebutuhan rencana strategis yang merupakan kewenangan kabupaten yang diperlukan sebagai sinergi pengembangan kawasan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di antaranya melalui penuntasan jalan akses menuju Bandara Ngloram;
2. Peningkatan status Terminal Tipe C Lasem Rembang dan di Kabupaten Jepara menjadi terminal tipe B;
3. Penyediaan infrastruktur dasar industri (jalan menuju KPI dan ketersediaan air baku untuk mendukung industri);
4. Penanganan sampah dan limbah B3 di antaranya melalui percepatan pengembangan TPST;
5. Peningkatan daya saing pariwisata di antaranya melalui pengembangan Kota Pusaka Lasem.

Arah pengembangan wilayah untuk WP Jekutibanglor secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut

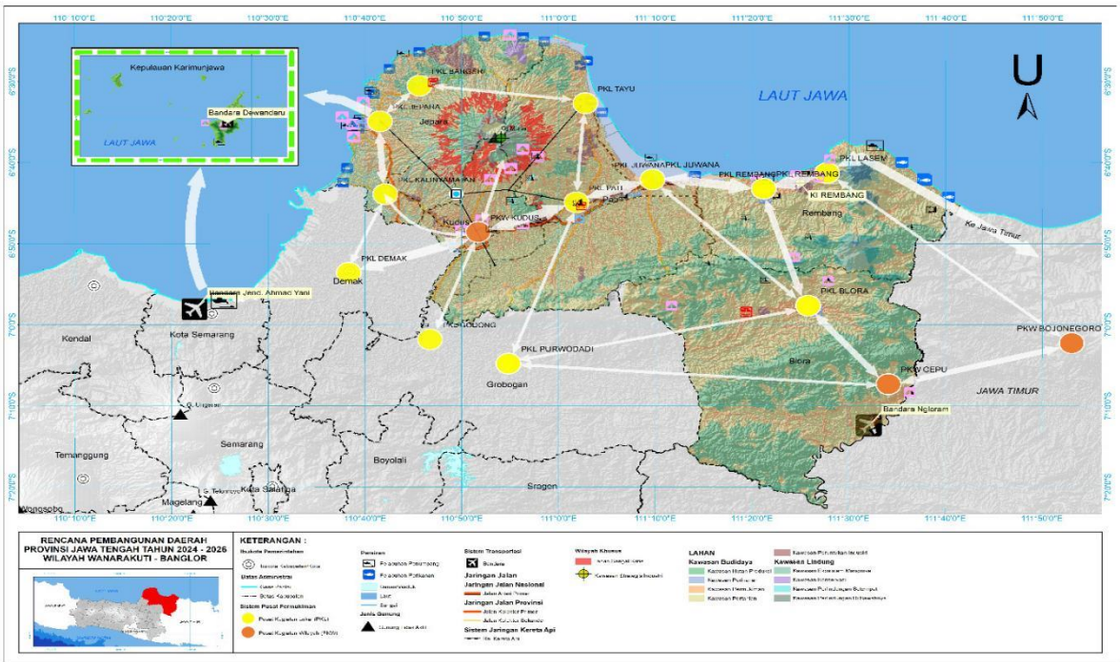


*Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 5.9**
**Arah Pengembangan WP Jekutibanglor**

### 5.3.3. Wilayah Pengembangan Purwomanggung

#### a. Analisis kinerja pembangunan WP Purwomanggung

Wilayah pengembangan Purwomanggung berpusat di kawasan Perkotaan Magelang meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. WP Purwomanggung memiliki kesenjangan/disparitas rendah. Kondisi PDRB per kapita Kabupaten berada dibawah rata-rata Jawa Tengah, IPM tidak terlalu jauh disparitasnya dan tingkat kemiskinan mayoritas masih berada diatas rata-rata Jawa Tengah dan Nasional. Secara lengkap capaian kinerja empat indikator makro pembangunan di WP Purwomanggung yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.5.**
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Purwomanggung Tahun 2022**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Purworejo | 5,36 | 11,53 | 4,45 | 73,60 |
| 2 | Kabupaten Wonosobo | 5,02 | 16,17 | 5,01 | 68,89 |
| 3 | Kabupaten Magelang | 5,46 | 11,09 | 4,97 | 70,85 |
| 4 | Kabupaten Temanggung | 5,20 | 9,33 | 2,54 | 70,77 |
| 5 | Kota Magelang | 5,77 | 7,10 | 6,71 | 80,39 |
| **Rata-rata WP** | | **5,36** | **11,04** | **4,74** | **72,90** |
| **Jawa Tengah** | | **5,31** | **10,93** | **5,57** | **72,79** |
| **Nasional** | | **5,31** | **9,57** | **5,86** | **72,91** |

*Sumber: BPS, 2023*

Di WP Purwomanggung terdapat beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah di antaranya perdagangan dan jasa,

pengadaan air, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, informasi dan komunikasi, dan *real estate*. Kawasan strategis yang berada di WP Purwomanggung yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan antara lain:

a. Kawasan strategis nasional (KSN) dari sudut kepentingan sosial budaya (KSN Borobudur dan sekitarnya); kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya (kawasan Candi Dieng);
b. Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup (KSN Taman Nasional Gunung Merapi); kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan lingkungan hidup (kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, kawasan Dataran Tinggi Dieng, kawasan Gunung Sindoro-Sumbing);
c. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi antara lain kawasan agropolitan Semarboyong (Semarang, Boyolali, Magelang), dan Sobobanjar (Wonosobo, Banjarnegara).

**b. Analisis daya saing WP Purwomanggung**

Nilai rata-rata IDSD WP Purwomanggung tahun 2022 adalah sebesar 3,457 meningkat cukup tinggi dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya yang sebesar 3,107. Dalam tinjauan internal WP Purwomanggung, nilai IDSD pada Kota Magelang merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 4,124, diikuti oleh Kabupaten Magelang sebesar 3,476. Untuk nilai IDSD Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Purworejo berada di bawah rata-rata nilai IDSD WP Purwomanggung dengan nilai masing-masing sebesar 3,420, 3,247, dan 3,016. Secara umum, nilai IDSD wilayah ini cenderung rendah pada dimensi pendidikan, komersialisasi, pajak dan retribusi, serta stabilitas ekonomi.

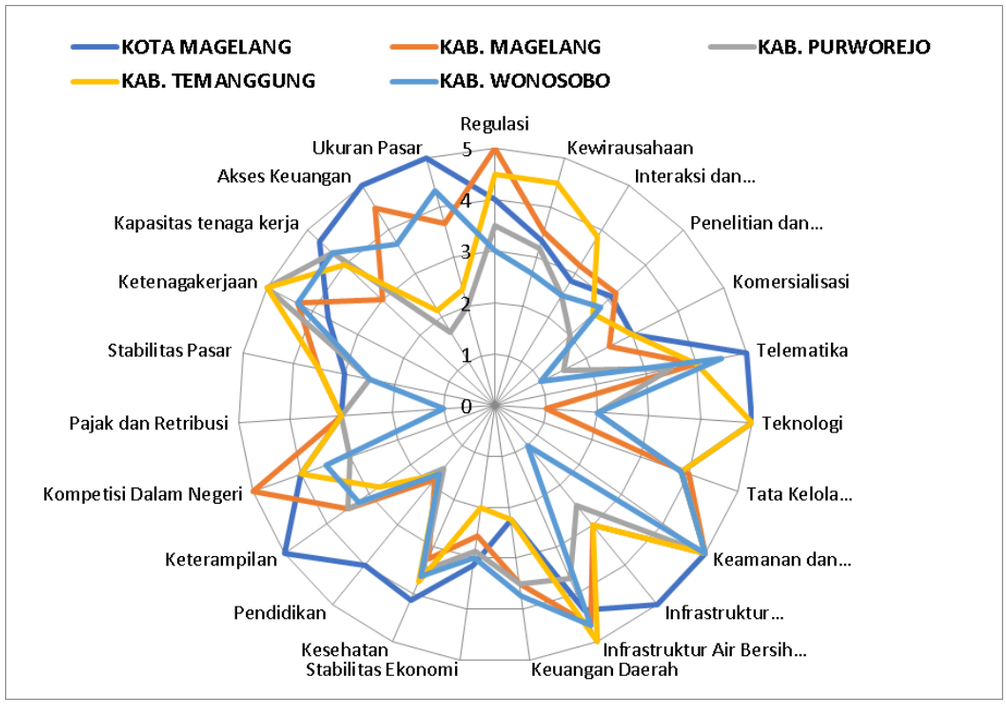


*Sumber: Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 5.10**
**Nilai IDSD Kabupaten/Kota di WP Purwomanggung Tahun 2022**

Kondisi daya saing WP Purwomanggung memiliki kelemahan pada beberapa indikator antara lain pada rendahnya komersialisasi terhadap inovasi teknologi, kurangnya kolaborasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi, serta

rendahnya pendapatan daerah. Di samping itu, masyarakat wilayah ini memiliki ciri tingkat pendidikan yang rendah, namun berkeahlian (*skilled*), serta dukungan pemerintah untuk peningkatan *skill* melalui sekolah vokasi dan balai latihan kerja sangat tinggi. Dengan memperhatikan potensi pengembangan perdagangan dan jasa pada wilayah ini, maka diperlukan program yang mampu mengungkit tingkat pendidikan masyarakat khususnya yang berorientasi pada penguasaan IPTEK. Di samping itu, perlu program peningkatan kreativitas untuk pendapatan daerah, serta riset dan inovasi teknologi perlu diarahkan pada penguatan hilir untuk mendorong peningkatan komersialisasi. Selain itu juga perlu penguatan kolaborasi, khususnya dengan perguruan tinggi lokal untuk peningkatan inovasi dan teknologi.

**c. Analisis daya dukung dan daya tampung air dan pangan di WP Purwomanggung**

Status daya dukung dan daya tampung air dan pangan di wilayah Purwomanggung secara garis besar masih baik dengan status daya dukung dan daya tampung air yang belum terlampaui. Namun demikian kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan akan penyediaan air sehingga diperlukan strategi peningkatan tangkapan air melalui penanganan sedimentasi DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, dan pengembangan kebun regional.

Di sisi lain status daya dukung dan daya tampung pangan di wilayah Purwomanggung telah terlampaui. Untuk mendukung keberlanjutan daya dukung dan daya tampung pangan diperlukan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, selain itu juga konsumsi beras perlu diturunkan, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.

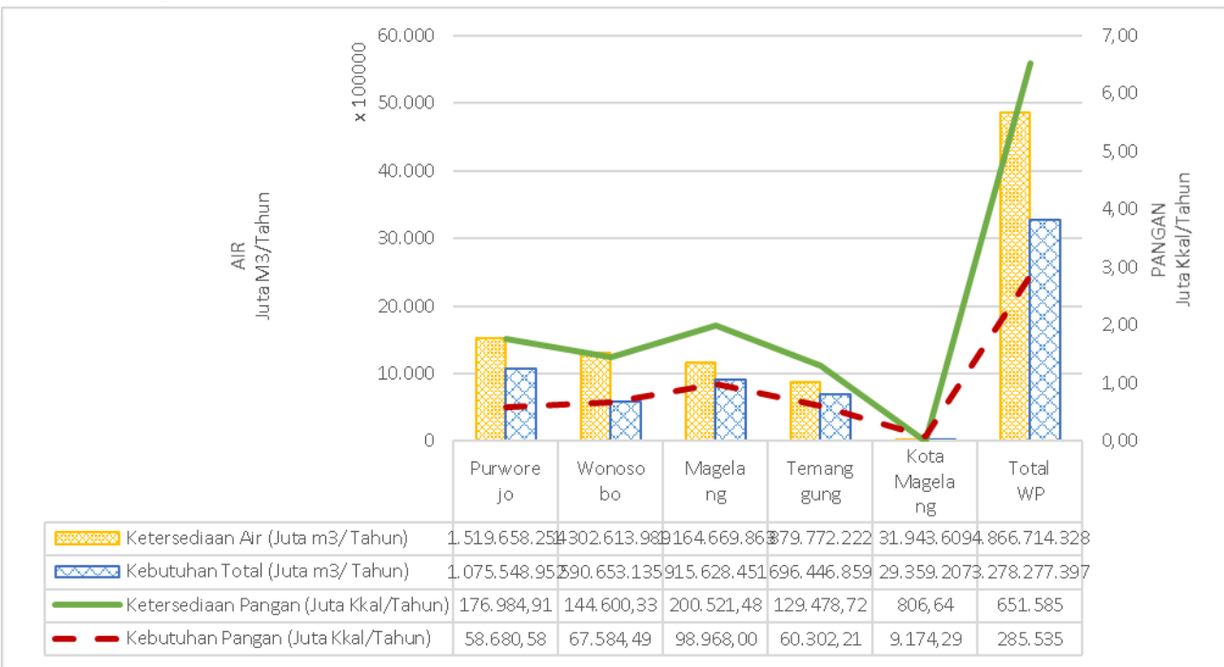


*Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045, 2023*

**Gambar 5.11**

**Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Purwomanggung**

**d. Sasaran kinerja pembangunan WP Purwomanggung**

Pengembangan wilayah Purwomanggung tahun 2024 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator makro yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.6.**
**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Purwomanggung Tahun 2024**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Purworejo | 4,57 - 5,57 | 10,62 – 9,45 | 3,27 | 74,21 |
| 2 | Kabupaten Wonosobo | 3,60 - 4,70 | 15,08 – 14,50 | 3,00 – 4,00 | 70,20 |
| 3 | Kabupaten Magelang | 4,14 – 5,26 | 10,07 – 9,32 | 4,91– 4,48 | 71,42 |
| 4 | Kabupaten Temanggung | 5,27 | 8,50 | 2,52 | 71,77 |
| 5 | Kota Magelang | 5,13-5,77 | 6,80 – 6,36 | 6,50 – 5,80 | 81,94 |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**e. Indikasi program pembangunan WP Purwomanggung**

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja indikator makro pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan beberapa strategi dan rencana program yang terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Di WP Purwomanggung terdapat beberapa proyek strategis nasional (PSN) dan indikasi program penataan ruang (RTRW) yang dapat menjadi pengungkit pembangunan, di antaranya:

1. PSN antara lain pembangunan jalan tol ruas tol Bawen-Yogya Kabupaten Magelang; pembangunan jalan Magelang-Kaliangkrik-batas Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang; peningkatan jalan akses ke Zona Otorita Borobudur dari Purworejo (Benowo-Bener atau Sedayu-Loano) Kabupaten Purworejo; peningkatan infrastruktur di Kawasan Borobudur Kabupaten Magelang; pembangunan tempat pembuangan akhir atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPA/TPST) regional Kabupaten Magelang; peningkatan terminal tipe A Tidar Kota Magelang; pengembangan panas bumi WKP Dieng Area Dieng Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara; pengembangan *geopark* Dieng Kabupaten Wonosobo; pembangunan sekolah vokasi pariwisata/SMK Pariwisata Kabupaten Magelang; pembangunan sekolah vokasi pariwisata/SMK Pariwisata, pembangunan Bendungan Bener, pembangunan *double track* jalur selatan Kabupaten Purworejo;
2. RTRW antara lain pengembangan kawasan perkotaan Purworejo–Kutoarjo menjadi pusat kegiatan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi perdagangan dan jasa, pengadaan air, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, informasi dan komunikasi, *real estate*, dan pariwisata.

Terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada tahun 2024 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten/kota antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di antaranya melalui pemasangan sambungan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin.
2. Peningkatan sektor ketenagakerjaan di antaranya melalui:
   a. Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor perdagangan dan jasa (*handycraft*, makanan minuman, produk hasil pertanian), serta pariwisata;

b. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
c. *Upskilling* terhadap instruktur dan *upgrading* prasarana dan sarana BLK dan SMK;
d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan;
e. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.

3. Pemantapan ketahanan pangan di antaranya melalui:
   a. Pengembangan *food estate*, pengembangan subterminal agribisnis (STA) Temanggung;
   b. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Galeh, DI Kalibutek;
   c. Pemeliharaan jaringan irigasi DI Loning Kragilan, DI Tangsi, DI Catgawen, DI Watujagir, DI Soropadan, DI Galeh, DI Kalibutek.
4. Pendekatan pembangunan berbasis ekoregion di antaranya ditempuh melalui:
   a. Peningkatan ketahanan air, utamanya pada kerjasama antarwilayah dalam penangan sedimentasi DAS Bodri, Serayu, dan Bogowonto; pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam rangka upaya konservasi air tanah pada CAT Wonosobo, CAT Kebumen-Purworejo, CAT Magelang-Temanggung, CAT Subah, CAT Sumowono; dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
   b. Peningkatan ketahanan lahan utamanya pada rehabilitasi hutan dan lahan di DAS Progo, DAS Serayu, DAS Bogowonto, DAS Wawar Medono; inisiasi pengembangan *Geopark* Kawasan Dieng (Wonosobo – Banjarnegara); persiapan pembangunan TPST Regional Magelang, pembangunan fasilitasi sarana TPS3R di wilayah KSPN Borobudur; dan pengawasan usaha pertambangan serta penertiban PETI.
5. Peningkatan daya saing pariwisata di antaranya melalui:
   a. Dukungan promosi dan *event* wisata di kawasan DPP Borobudur-Dieng;
   b. Pengembangan daya tarik wisata di wilayah Purworejo berbasis pelestarian hutan;
   c. Pengembangan desa wisata berbasis pertanian, perkebunan, kawasan hutan, dan kearifan lokal;
   d. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
   e. Fasilitasi *event* promosi pariwisata di wilayah DPP Borobudur-Dieng dan sekitarnya.
6. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di antaranya melalui:
   a. Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
   b. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan;
   c. Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
   d. Pendampingan pelatihan *digital marketing* bagi pelaku UMKM.

7. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah di antaranya melalui:
   a. Menjaga kemantapan jalan provinsi utamanya pada koridor Kertek – Kaliangkrik, koridor Blabak – Jrakah Ke Arah Boyolali; Bruno – Kutoarjo – Ketawang – Jaringan Jalan Selatan – Selatan; ruas Parakan-Patean;
   b. Penyediaan layanan angkutan umum dikawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) pada koridor Kutoarjo Kabupaten Purworejo – Terminal Borobudur Kabupaten Magelang;
   c. Pengembangan simpul transportasi diantaranya melalui lanjutan pembangunan Terminal Tipe B Kutoarjo (Tahap IV).
8. Peningkatan ketahanan energi di antaranya melalui fasilitasi pengembangan panas bumi WKP Dieng Area Dieng Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara; pembangunan infrastruktur EBT potensi lokal (Biogas, gas rawa, PLTMH, PLTS atap).

Arah pengembangan wilayah untuk WP Purwomanggung secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut

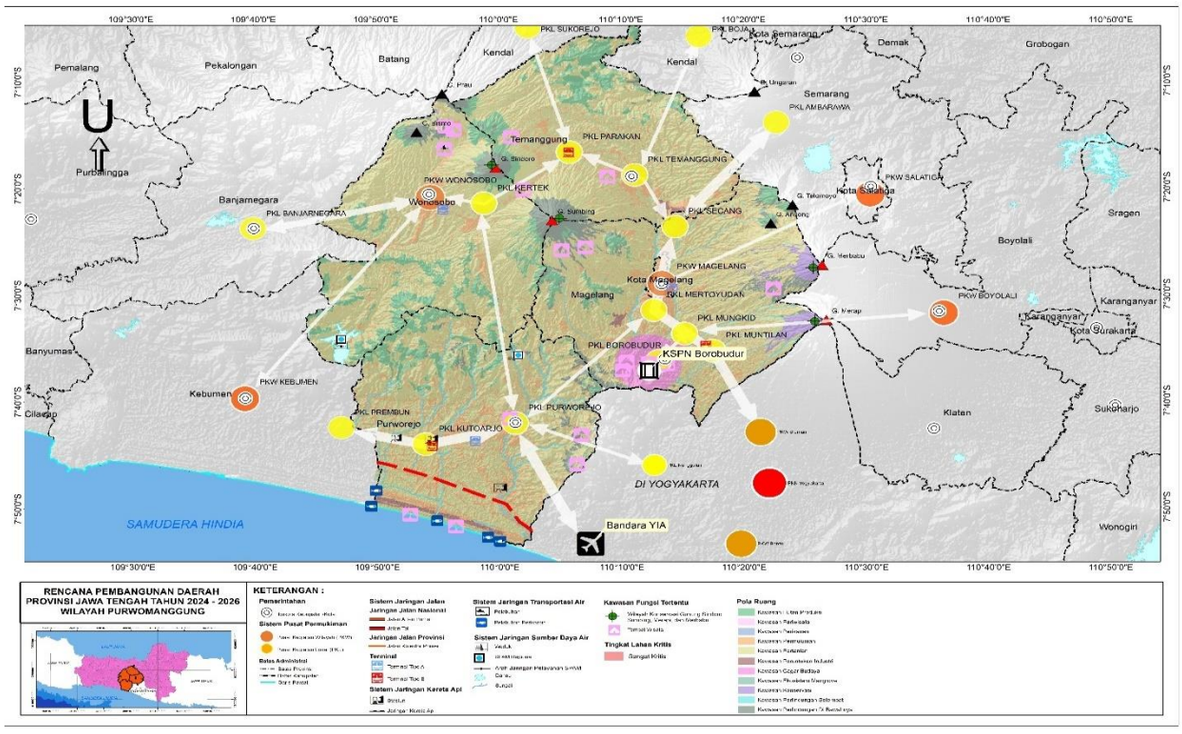


*Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 5.12**
**Arah Pengembangan WP Purwomanggung**

### 5.3.4. Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten

#### a. Analisis kinerja pembangunan WP Subosukawonosraten

Wilayah pengembangan Subosukawonosraten berpusat di kawasan perkotaan Surakarta yang meliputi Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, dan Kota Surakarta. Wilayah pengembangan ini mempunyai kesenjangan/disparitas sedang. Kondisi PDRB per kapita antar kabupaten/kota tidak terpaut jauh dan tingkat kemiskinan mayoritas berada dibawah rata-rata Jawa Tengah dan Nasional. Kondisi makro pembangunan wilayah Subosukawonosraten saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.7.**
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Subosukawonosraten Tahun 2022**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Boyolali | 6,33 | 9,82 | 4,92 | 74,97 |
| 2 | Kabupaten Sukoharjo | 5,61 | 7,61 | 2,47 | 77,94 |
| 3 | Kabupaten Karanganyar | 5,87 | 9,85 | 5,70 | 76,58 |
| 4 | Kabupaten Wonogiri | 5,63 | 10,99 | 1,95 | 71,04 |
| 5 | Kabupaten Sragen | 5,76 | 12,94 | 4,69 | 74,65 |
| 6 | Kabupaten Klaten | 5,90 | 12,33 | 4,31 | 76,95 |
| 7 | Kota Surakarta | 6,25 | 8,84 | 5,83 | 83.08 |
| **Rata-rata WP** | | **5,90** | **10,34** | **4,27** | **76,46** |
| **Jawa Tengah** | | **5,31** | **10,93** | **5,57** | **72,79** |
| **Nasional** | | **5,31** | **9,57** | **5,86** | **72,91** |

*Sumber: BPS,2023*

Di WP Subosukawonosraten terdapat beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah di antaranya industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, perdagangan dan jasa, pengadaan air, penyediaan akomodasi, dan *real estate*. Kawasan strategis di WP Subosukawonosraten yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan antara lain:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya (KSN Prambanan dan KSN Sangiran); kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya (Candi Cetho–Sukuh, Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran);
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi antara lain KSP kawasan agropolitan Girisuka dan Semarboyong; KSP kawasan perkotaan Subosukawonostraten; dan KSP pariwisata terpadu (kawasan Surakarta dan sekitarnya);

1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup antara lain KSP Gunung Lawu.

**b. Analisis daya saing WP Subosukawonosraten**

Berdasarkan perhitungan nilai IDSD pada tahun 2022, kewilayahan Subosukawonosraten merupakan kewilayahan dengan nilai tertinggi dengan rata-rata nilai 3,62. Bila dilihat secara internal di wilayah Subosukawonosraten, nilai IDSD Kota Surakarta merupakan nilai tertinggi dengan total rata-rata nilai 4,36 atau menjadi posisi tertinggi di Jawa Tengah. Setelah Kota Surakarta, nilai rata-rata kabupaten/kota di wilayah Subosukawonosraten ini secara berurutan adalah Kabupaten Sragen (4,15), Kabupaten Wonogiri (3,85), Kabupaten Sukoharjo (3,39), Kabupaten Karanganyar (3,28), Kabupaten Klaten (3,19), dan nilai terendah adalah Kabupaten Boyolali (3,15).

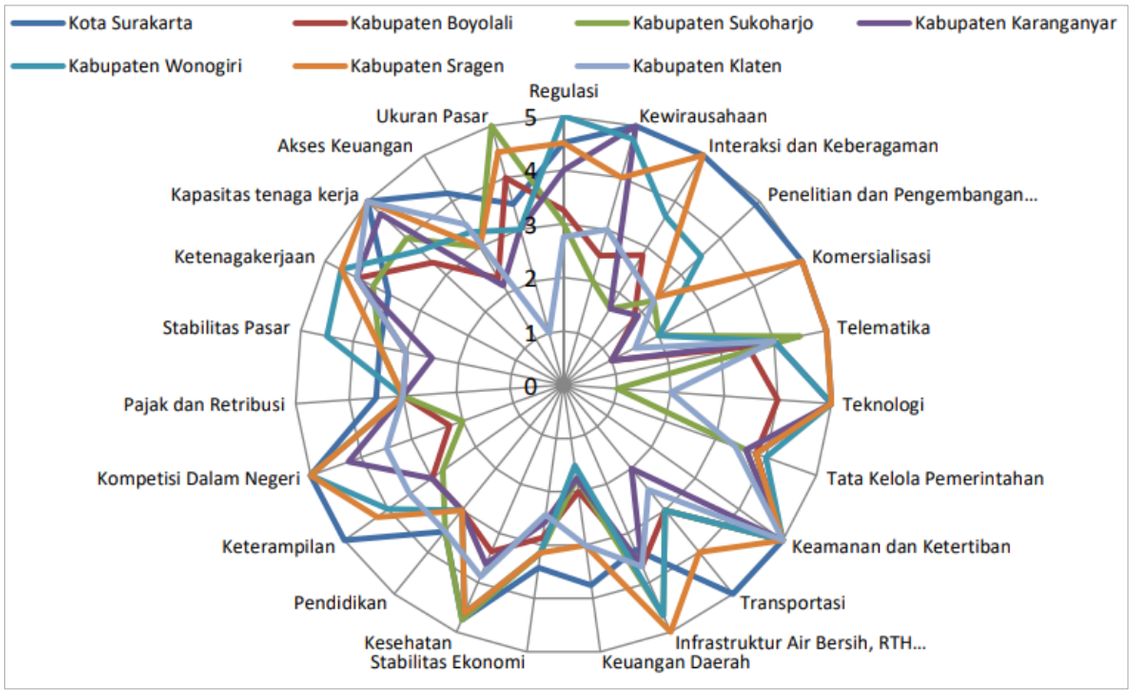


*Sumber: Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 5.13**
**Nilai IDSD Kabupaten/Kota di WP Subosukawonosraten Tahun 2022**

Kondisi daya saing WP Subosukawonosraten masih pada tahap kapasitas berperan pada tingkat basis kecuali Kabupaten Wonogiri dan Kota Surakarta yang sudah mampu berada pada tahap efisiensi pasar dan inovasi sebagai penunjang daya saing. Untuk itu perlu peningkatan faktor penguat dan penunjang daya saing serta efisiensi pasar untuk meningkatkan kapasitas yang berperan dalam kewilayahan. Sedangkan Kabupaten Wonogiri dan Kota Surakarta dapat menjadi *leading actor* dalam peningkatan daya saing daerah di WP Subosukawonosraten.

**c. Analisis daya dukung dan daya tampung air dan pangan di WP Subosukawonosraten**

Status daya dukung dan daya tampung air di 6 kabupaten/kota di WP Subosukawonosraten telah terlampaui semua kecuali Kabupaten Wonogiri. Namun demikian daya dukung daya tamping air di Kabupaten Wonogiri akan terlampaui dalam waktu dekat. Kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan akan penyediaan air sehingga diperlukan strategi peningkatan tangkapan air melalui penanganan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengembangan SPAM regional.

Sementara itu status daya dukung dan daya tampung pangan di WP Subosukawonosraten belum terlampauai, kecuali untuk Kota Surakarta yang sudah tidak memungkinkan adanya pengembangan untuk lahan pertanian. Untuk mendukung keberlanjutan daya dukung dan daya tampung pangan diperlukan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, selain itu juga konsumsi beras perlu diturunkan, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.

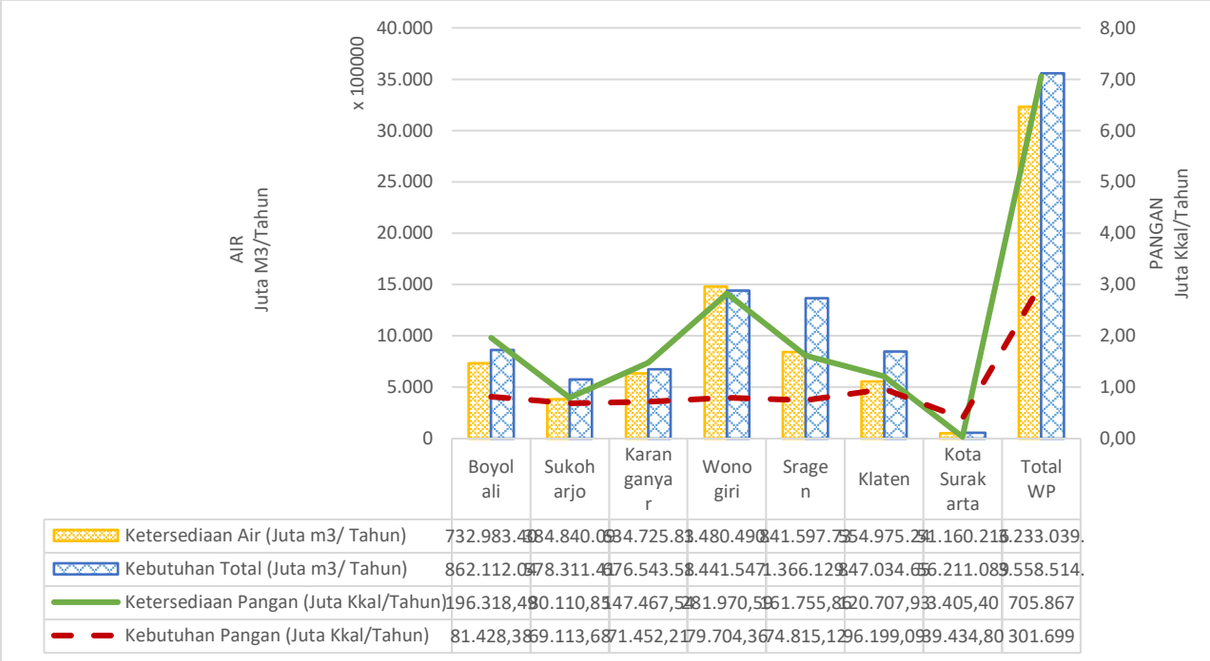


*Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045, 2023*

**Gambar 5.14**

**Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten**

**d. Sasaran kinerja pembangunan WP Subosukawonosraten**

Pengembangan wilayah Subosukawonosraten tahun 2024 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.8.**

**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Subosukawonosraten Tahun 2024**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Boyolali | 5,65 – 6,50 | 7,18 – 5,68 | 3,92 | 76,31 |
| 2 | Kabupaten Sukoharjo | 4,90 - 5,37 | 7,20 – 6,96 | 4,57 – 4,48 | 78,06 |
| 3 | Kabupaten Karanganyar | 6,00 | 8,52 | 5,30 | 77,20 |
| 4 | Kabupaten Wonogiri | 6,00 | 9,18 – 6,62 | 1,95 – 1,75 | 73,60 |
| 5 | Kabupaten Sragen | 5,90 | 11,18 | 4,00 | 75,21 |
| 6 | Kabupaten Klaten | 6,00-6,50 | 11,09 | 4,00 | 77,30 |
| 7 | Kota Surakarta | 6,30 | 7,56 | 5,62 – 5,10 | 84,02 |

*Sumber: Bappeda Provnsi Jawa Tengah, 2023*

**e. Indikasi program pembangunan WP Subosukawonosraten**

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja indikator makro pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan beberapa strategi dan rencana program yang terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Di WP Subosukawonosraten terdapat beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang dapat menjadi pengungkit pembangunan di antaranya:

a. Penambahan lingkup Tol Solo–Yogyakarta–Kulonprogo;
b. Pengembangan Bandara Adi Soemarmo;
c. Pembangunan Bendungan Pidekso Kabupaten Wonogiri dan Bendungan Jlantah Kabupaten Karanganyar; dan

d. Pembangunan SPAM regional Wososukas (Wonogiri, Solo, Sukoharjo dan Karanganyar).

Selain itu, terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada tahun 2024 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten/kota antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di antaranya melalui pemasangan sambungan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin.
2. Peningkatan sektor ketenagakerjaan di antaranya melalui:
   a. Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor perdagangan dan jasa (*handycraft*, makanan minuman, produk hasil pertanian, *furniture*), serta pariwisata;
   b. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
   c. *Upskilling* terhadap instruktur dan *upgrading* prasarana dan sarana BLK dan SMK;
   d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan;
   e. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
3. Pemantapan ketahanan pangan di antaranya melalui:
   a. Perlindungan lahan sawah dilindungi (LSD);
   b. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Bapang, DI Cengklik, DI Klego, DI Wonotoro, DI Kepoh, DI Munggur;
   c. Pemeliharaan jaringan irigasi DI Jetu, DI Braholo, DI Cangkring, DI Lemahbang II, DI Nglasem, DI Sidomakmur, DI Walikan, DI Pulo, DI Bonggo, DI Kepoh, DI Trani, DI Jaban, DI Plosowareng, DI Cengklik, DI Gunung Maling, DI Majegan, DI Ngasem, DI Pakelan, DI Pundung, DI Tritis, DI Bapang, DI Parean, DI Garat, DI Klego, DI Tlatar/ Pager;
   d. Peningkatan ketersediaan air baku irigasi untuk masa tanam kedua dan ketiga.
4. Peningkatan daya saing pariwisata di antaranya melalui:
   a. Dukungan promosi dan *event* wisata di kawasan destinasi pariwisata prioritas (DPP) Solo–Sangiran;
   b. Pengembangan desa wisata dan fasilitas pendukungnya;
   c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
   d. Fasilitasi *event* promosi pariwisata di wilayah DPP Solo–Sangiran;
   e. Fasilitasi integrasi pengembangan daya tarik wisata (DTW) Sangiran–Prambanan–Borobudur.
5. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di antaranya melalui:
   a. Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
   b. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan;
   c. Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
   d. Pendampingan pelatihan *digital marketing* bagi pelaku UMKM.

6. Peningkatan investasi di antaranya melalui fasilitasi pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI) di Kabupaten Wonogiri;
7. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah di antaranya melalui:
   a. Menjaga kemantapan jalan provinsi utamanya pada koridor Surakarta – Grobogan; Surakarta – Sukoharjo – Wonogiri; koridor Wonogiri – ke arah perbatasan dengan Jawa Timur; koridor Klaten – Boyolali, koridor Boyolali - Jrakah – ke arah Kabupaten Magelang; koridor Palur – Karanganyar – Tawangmangu – ke arah Jawa Timur;
   b. Penyediaan layanan angkutan umum dikawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) pada koridor Solo – Sumberlawang via Sangiran dan Solo – Sukoharjo – Wonogiri;
   c. Peningkatan fasilitas keselamatan jalan dengan pemasangan LPJU utamanya pada jalan akses menuju Kawasan *Geopark* Gunung Sewu (Wuryantoro – Eromoko – Pracimantoro);
   d. Fasilitasi optimalisasi layanan integrasi antar moda transportasi untuk mewujudkan Subosukowonosraten sebagai salah satu pintu masuk ke Jawa Tengah dalam hal menunjang pengembangan pariwisata.
8. Pendekatan pembangunan berbasis ekoregion di antaranya ditempuh melalui:
   a. Peningkatan ketahanan air utamanya pada pembangunan jaringan Daerah Irigasi Pidekso Kabupaten Wonogiri; fasilitasi dan pembangunan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Regional (SPAM Regional) Wososukas; pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam rangka upaya konservasi air tanah pada CAT Karanganyar-Boyolali, CAT Wonosari, CAT Ngawi-Ponorogo, dan CAT Eromoko; dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
   b. Peningkatan ketahanan lahan utamanya pada rehabilitasi hutan dan lahan di DAS Solo, Kawasan Merapi dan Lawu (Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen); pemantapan kawasan Tahura KGPA Mangkunegoro I, fasilitasi sarana TPS3R di daerah pengembangan pariwisata, inisiasi pengembangan *Geopark* Kawasan Bayat; reklamasi bekas tambang (Klaten, Boyolali, Wonogiri), dan pengawasan usaha pertambangan serta penertiban PETI.
9. Peningkatan ketahanan energi, diantaranya melalui fasilitasi pengembangan transmisi SUTET Ungaran-Ampel-Pedan sirkit II, fasilitasi pengembangan transmisi rekondukturing SUTT 150 kV Outlet GITET Ampel; serta pembangunan infrastruktur EBT potensi lokal (biogas, gas rawa, PLTMH, PLTS atap).

Beberapa kebutuhan rencana strategis yang merupakan kewenangan kabupaten/kota yang diperlukan sebagai sinergi pengembangan kawasan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan simpul transportasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota (terminal tipe C), utamanya yang dilewati oleh rencana pengembangan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan; dan
2. Pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) Putri Cempo secara terintegrasi.

Arah pengembangan wilayah untuk WP Subosukawonosraten secara spasial dapat dilihat pada gambar berikut.

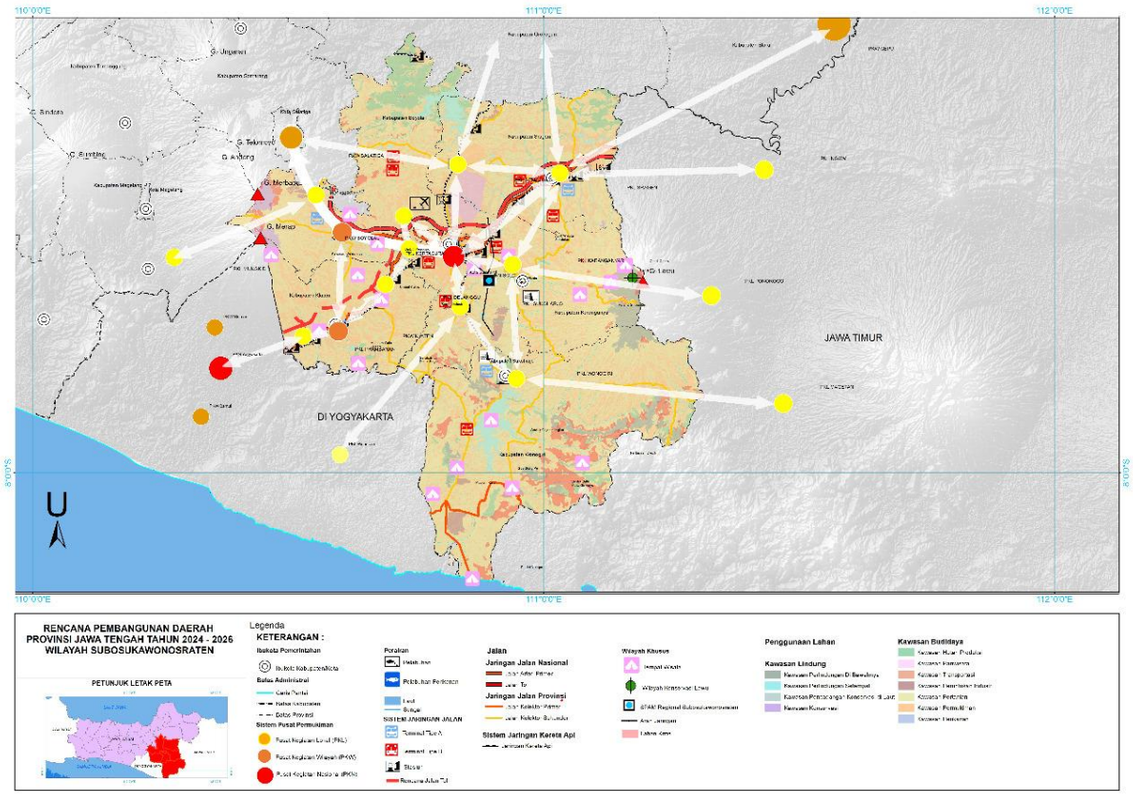


*Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 5.15**
**Arah Pengembangan WP Subosukawonosraten**

### 5.3.5. Wilayah Pengembangan Bregasmalang

#### a. Analisis kinerja pembangunan WP Bregasmalang

Wilayah Pengembangan Bregasmalang berpusat di kawasan perkotaan Tegal meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. memiliki kesenjangan/disparitas sedang. Kondisi PDRB per kapita masing-masing kabupaten/kota tidak terpaut terlalu jauh namun mayoritas di bawah rata-rata Jawa Tengah kecuali Kota Tegal diatas rata-rata nasional. IPM semua kabupaten/kota dibawah rata-rata Jawa Tengah. Secara lengkap capaian kinerja indikator makro pembangunan di WP Bregasmalang meliputi pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.9.**
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Bregasmalang Tahun 2022**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Brebes | 5,61 | 16,05 | 9,48 | 67,03 |
| 2 | Kabupaten Tegal | 5,14 | 7,90 | 9,64 | 69,53 |
| 3 | Kabupaten Pemalang | 5,08 | 15,06 | 6,63 | 67,19 |
| 4 | Kota Tegal | 5,16 | 7,91 | 6,68 | 76,15 |
| **Rata-rata WP** | | **5,25** | **11,73** | **8,11** | **69,98** |
| **Jawa Tengah** | | **5,31** | **10,93** | **5,57** | **72,79** |
| **Nasional** | | **5,31** | **9,57** | **5,86** | **72,91** |

*Sumber: BPS, 2023*

WP Bregasmalang berlokasi di utara jawa dengan wilayah perairan pantai yang cukup panjang. Di WP Bregasmalang terdapat beberapa sektor unggulan sebagai potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah, di antaranya industri, perdagangan dan jasa, pertanian, pariwisata, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Kawasan strategis yang berada di WP Bregasmalang yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan antara lain kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi antara lain kawasan industri Brebes, kawasan agropolitan Manggamas, dan kawasan perkotaan Bregasmalang (KSP).

**b. Analisis daya saing WP Bregasmalang**

Nilai rata-rata IDSD pada WP Bregasmalang tahun 2022 adalah sebesar 3,202, meningkat dari rata-rata nilai tahun sebelumnya yang sebesar 3,002. Masih seperti tahun sebelumnya, nilai rata-rata daya saing pada wilayah ini merupakan yang terendah dibandingkan wilayah lain di Jawa Tengah. Secara umum dimensi yang perlu diungkit pada wilayah ini adalah pada dimensi pendidikan, komersialisasi, dan keuangan daerah.

Dalam tinjauan internal WP Bregasmalang, nilai IDSD pada Kabupaten Tegal merupakan yang tertinggi yakni sebesar 3,318, diikuti oleh nilai IDSD Kota Tegal sebesar 3,299, dan nilai tersebut berada di atas rata-rata nilai IDSD WP Bregasmalang. Adapun nilai IDSD Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang, masing-masing sebesar 3,197 dan 2,994, berada di bawah rata-rata daya saing wilayah Bregasmalang. Mengingat nilai daya saing pada wilayah Bregasmalang merupakan yang terendah, maka perhatian terhadap dimensi daya saing, khususnya pendidikan, komersialisasi, dan keuangan daerah di keempat kabupaten/kota di WP Bregasmalang perlu ditingkatkan.

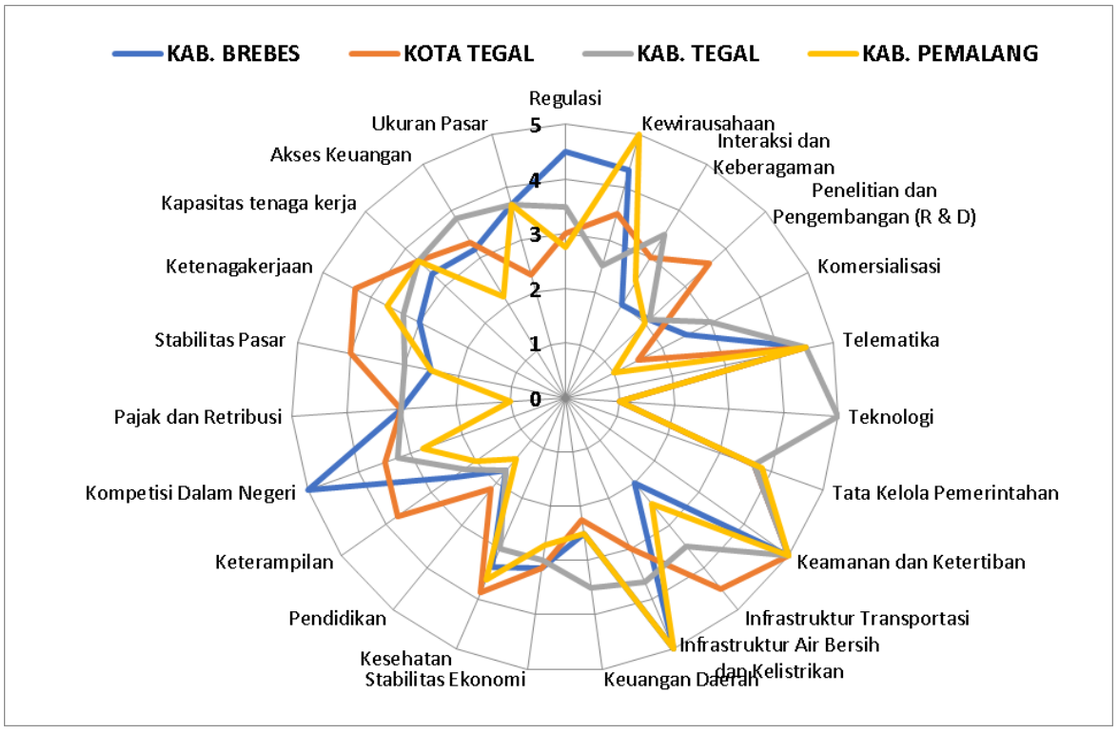


*Sumber: Diolah berdasarkan hasil Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 5.16**

**Nilai IDSD Kabupaten/Kota di WP Bregasmalang Tahun 2022**

Kondisi daya saing WP Bregasmalang masih berada pada tahap penguatan kapasitas daya saing. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai pada beberapa indikator faktor pendukung daya saing yang masih lemah, antara lain pada relatif rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, angka kemiskinan yang tinggi, lemahnya investasi nasional, dan geliat ekonomi lokal pada sektor UMKM yang cenderung pasif. Mengacu pada arah pengembangan WP Bregasmalang untuk pengembangan potensi industri serta perdagangan dan jasa, diperlukan program yang mampu optimal mengungkit tingkat pendidikan masyarakat, baik pendidikan tinggi maupun vokasi, di samping mendorong investasi produktif yang memiliki *multiplier effect* terhadap ekonomi lokal tinggi.

**c. Analisis daya dukung dan daya tampung air dan pangan di WP Bregasmalang**

Berdasarkan perhitungan daya dukung dan daya tampung air, wilayah Bregasmalang status daya dukung dan daya tampung air sudah terlampaui kecuali Kabupaten Brebes. Meski demikian melihat persentase antara kebutuhan dan ketersediaan air daya dukung daya tamping air di Kabupaten Brebes juga akan segera terlampaui. Kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan akan penyediaan air sehingga diperlukan strategi peningkatan tangkapan air melalui pembangunan bendung, pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Regional (SPAM Regonal) dan konservasi sumber air/CAT.

Sedangkan status daya dukung dan daya tampung pangan di wilayah Bregasmalang hanya Kota Tegal yang telah terlampaui mengingat ketersediaan lahan di Kota Tegal sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan menjadi area pertanian. Untuk mendukung keberlanjutan daya dukung dan daya tampung pangan diperlukan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, selain itu juga konsumsi beras perlu diturunkan, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.

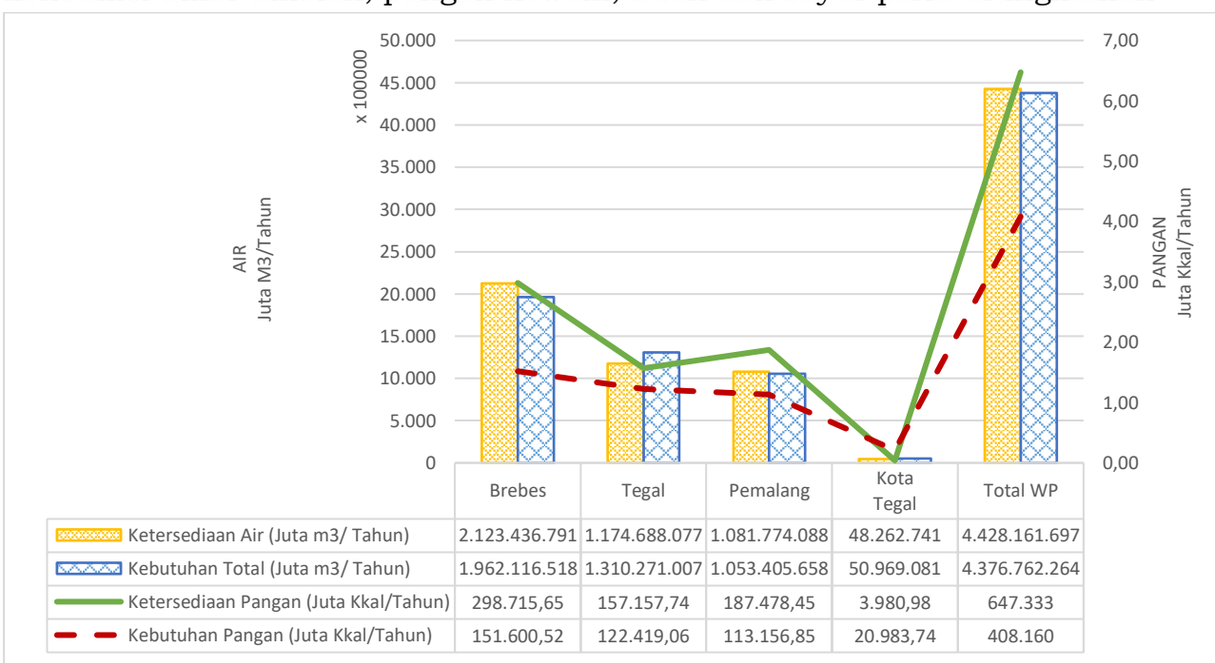


*Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045, 2023*

**Gambar 5.17**

**Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Bregasmalang**

**d. Sasaran kinerja pembangunan WP Bregasmalang**

Pengembangan wilayah Bregasmalang tahun 2024 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.10.**
**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Bregasmalang Tahun 2024**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Brebes | 5,65 – 5,84 | 15,5 – 14,75 | 9,41 – 8,55 | 67,5 – 68,3 |
| 2 | Kabupaten Tegal | 5,20 – 5,50 | 7,80 – 7,10 | 9,64 – 9,40 | 71,00 |
| 3 | Kabupaten Pemalang | 4,80 – 5,40 | 15,18 – 14,18 | 6,48 – 5,88 | 68,95 |
| 4 | Kota Tegal | 5,00 – 6,00 | 6,65 - 5,79 | 6,53 – 5,93 | 77,01 |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**e. Indikasi program pembangunan WP Bregasmalang**

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja indikator makro pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan beberapa strategi dan rencana program yang terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Di WP Bregasmalang terdapat beberapa proyek strategis nasional (PSN), program prioritas strategis nasional (*Majorproject* RPJMN), indikasi program penataan ruang (RTRW) yang dapat menjadi pengungkit pembangunan, di antaranya:

1. PSN antara lain pengembangan jalur kereta api Jakarta–Surabaya, dan pembangunan transmisi pipa gas ruas Cirebon–Semarang;
2. RPJMN antara lain revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan tambak di pantura Jawa;
3. RTRW antara lain pembangunan jalan menuju kawasan industri (KI) Brebes, peningkatan akses Brebes menuju ke selatan, serta konservasi dan pengendalian kawasan atas.

Selain itu, terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada tahun 2024 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten/kota di WP Bregasmalang antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di antaranya melalui penyediaan perumahan untuk MBR perkotaan dan sekitar KPI/KI; penyediaan jaringan air bersih permukiman sekitar KPI dan KI; penyediaan jaringan sanitasi dan persampahan permukiman sekitar KPI dan KI; serta pemasangan sambungan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin.
2. Peningkatan sektor ketenagakerjaan di antaranya melalui:
   a. Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor perdagangan dan jasa (*handycraft*, makanan minuman, produk hasil pertanian), pertanian hortikultura, serta pariwisata (agrowisata);
   b. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
   c. *Upskilling* terhadap instruktur dan *upgrading* prasarana dan sarana BLK dan SMK;
   d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan;

e. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.

3. Pemantapan ketahanan pangan di antaranya melalui:
   a. Pelestarian LSD/LP2B;
   b. Penataan air untuk kebutuhan pertanian dan industri-domestik;
   c. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Pesayangan, DI Kemaron, DI Sidapurna, DI Gondang, DI Parakan Kidang;
   d. Pemeliharaan jaringan irigasi DI Lenggor, DI Karanganyar, DI Gondang, DI Parakan Kidang, DI Beji, DI Kemaron, DI Pesayangan, DI Sidapurna, DI Gangsa Lumingsir, DI Mejagong;
   e. Rehabilitasi Embung Kabukan.
4. Peningkatan daya saing pariwisata di antaranya melalui:
   a. Pendampingan pengemasan produk wisata alam dataran tinggi (pengemasan *geopark* atau kawasan ekonomi esensial/KEE) agar potensi unik tetap lestari;
   b. Fasilitasi jalan wisata dari Pemalang menuju dataran tinggi;
   c. Dukungan dan fasilitasi promosi dan *event* wisata di Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal;
   d. Pengembangan desa wisata serta fasilitas pendukungnya;
   e. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
5. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di antaranya melalui:
   a. Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
   b. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan;
   c. Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
   d. Pendampingan pelatihan *digital marketing* bagi pelaku UMKM.
6. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah di antaranya melalui:
   a. Menjaga kemantapan jalan provinsi utamanya koridor Pemalang – Randudongkal – ke arah Kabupaten Purbalingga, koridor Salem – Bumiayu – Sirampok ke arah Pemalang, Kersana – Salem – ke arah Kabupaten Cilacap;
   b. Pengembangan simpul transportasi diantaranya melalui fasilitasi optimalisasi Pelabuhan Pengumpul Tegal.
7. Pendekatan pembangunan berbasis ekoregion di antaranya ditempuh melalui:
   a. Peningkatan ketahanan air utamanya pada pengendalian banjir dengan perkuatan tebing, sungai/anak sungai Pemali I dan II, Sungai Comal; normalisasi/restorasi Sungai Rambut, Sungai Conang, pembangunan Bendung Karet (Sungai Pemali, Sungai Kabuyutan, Sungai Babakan, dan Sungai Cisanggarung Kabupaten Brebes); pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Regional (SPAM Regional) Bregas; dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
   b. Peningkatan ketahanan lahan utamanya pada rehabilitasi hutan dan lahan di DAS Pemali, DAS Gangsa, DAS Cacaban, DAS Comal, DAS Babakan; pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Mangrove (KEE Kaliwlingi dan KEE Mojo); pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air

tanah dalam rangka upaya konservasi air tanah pada CAT Tegal-Brebes, CAT Lebaksiu, dan CAT Pekalongan-Pemalang.

8. Peningkatan ketahanan energi di antaranya melalui pembangunan pipa gas transmisi Cirebon-Semarang; Pembangunan infrastruktur EBT potensi lokal (biogas, gas rawa, PLTMH, PLTS atap).

Beberapa kebutuhan rencana strategis yang merupakan kewenangan kabupaten/kota yang diperlukan sebagai sinergi pengembangan kawasan antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan agropolitan Manggamas;
2. Penyediaan infrastruktur pendukung KPI dan KI terutama jalan menuju KPI/KI dan jaringan air bersih (penyediaan air baku) dan peningkatan ruang jalur perembetan dari *exit* tol untuk ruang-ruang pemasaran/penarik kegiatan baru.

Arah pengembangan wilayah untuk WP Bregasmalang secara spasial dapat dilihat pada gambar berikut.

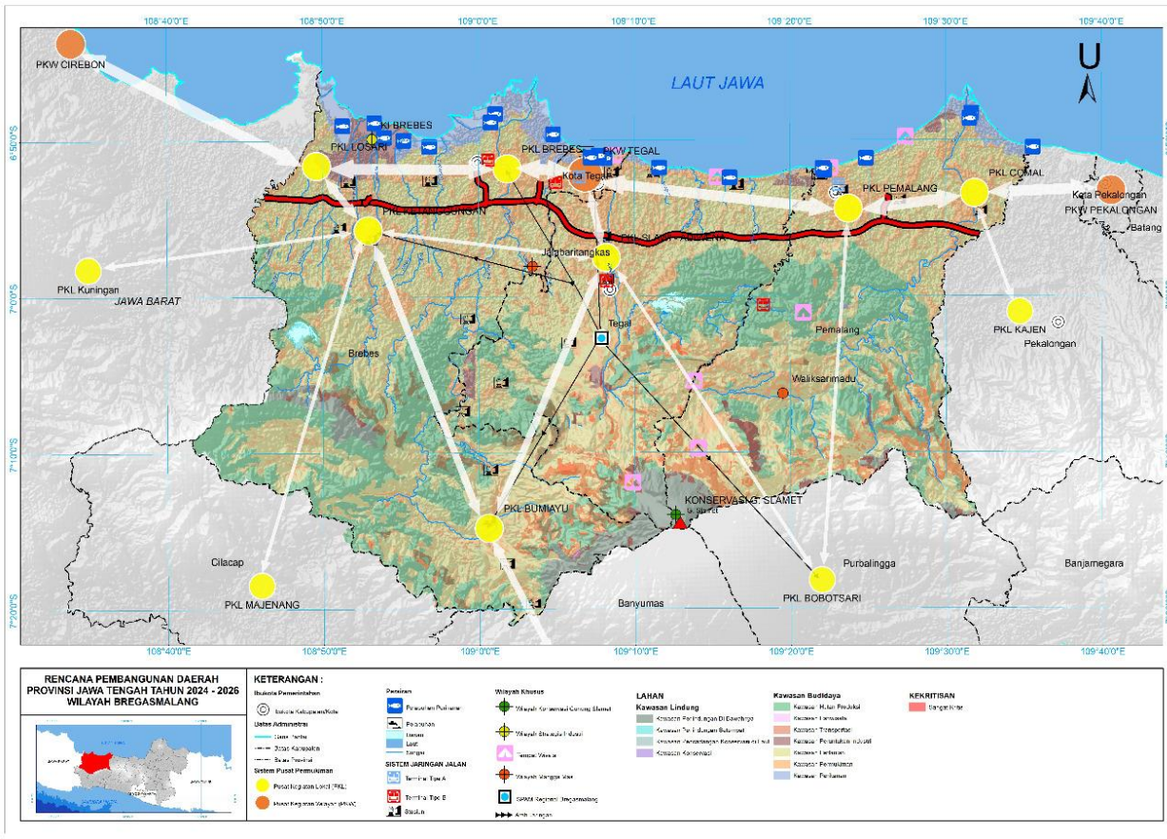


*Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 5.18**
**Arah Pengembangan WP Bregasmalang**

### 5.3.6. Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb

#### a. Analisis kinerja pembangunan WP Barlingmascakeb

Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb berpusat di kawasan perkotaan Purwokerto meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen. Wilayah pengembangan ini memiliki kesenjangan/disparitas tinggi dikarenakan PDRB per kapita Kabupaten Cilacap diatas rata-rata Jawa Tengah dan kabupaten lainnya di bawah rata-rata Jawa Tengah. Kondisi sumber daya manusia tidak merata dan investasi berfokus pada *primary city* sehingga terjadi kesenjangan antara *primary city* dengan *secondary city*. Pencapaian kinerja pembangunan makro pada WP

Barlingmascakeb masih membutuhkan upaya ekstra dengan prioritas adalah penanganan kemiskinan mengingat capaian pada tahun 2022 di semua kabupaten/kota wilayah ini di bawah capaian Jawa Tengah dan Nasional. Secara lengkap capaian makro pembangunan di WP Barlingmascakeb pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.11.**
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Barlingmascakeb Tahun 2022**

| No | Kabupaten | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Banjarnegara | 5,29 | 15,52 | 6,38 | 68,61 |
| 2 | Kabupaten Purbalingga | 5,41 | 15,30 | 5,23 | 69,54 |
| 3 | Kabupaten Banyumas | 5,86 | 12,84 | 6,05 | 73,17 |
| 4 | Kabupaten Cilacap | 5,13 | 11,02 | 9,62 | 70,99 |
| 5 | Kabupaten Kebumen | 5,79 | 16,41 | 5,92 | 70,79 |
| **Rata-rata WP** | | **5,49** | **14,22** | **6,64** | **70,62** |
| **Jawa Tengah** | | **5,31** | **10,93** | **5,57** | **72,79** |
| **Nasional** | | **5,31** | **9,57** | **5,86** | **72,91** |

*Sumber: BPS, 2023*

Di WP Barlingmascakeb terdapat beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah di antaranya pertambangan dan penggalian, pengadaan air, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, informasi dan komunikasi, *real estate*, dan pertanian. Kawasan strategis di WP Barlingmascakeb yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan antara lain:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi antara lain KSP kawasan industri terpadu (Cilacap dan Kebumen), KSP kawasan agropolitan Sobobanjar (Wonosobo-Banjarnegara), Manggaemas (Pemalang, Purbalingga, Tegal, Brebes, Banyumas), kawasan strategis pariwisata terpadu (Kawasan Borobudur–Dieng–Kebumen);
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup antara lain KSN kawasan Pangandaran–Kalipuncang–Segara Anakan–Nusakambangan (Pacangsanak); kawasan dataran tinggi Dieng, serta kawasan lereng Gunung Slamet dan sekitarnya (KSP).

**b. Analisis daya saing WP Barlingmascakeb**

Nilai rata-rata IDSD WP Barlingmascakeb tahun 2022 adalah sebesar 3,240, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,258. Dalam tinjauan internal, nilai IDSD tertinggi adalah pada Kabupaten Purbalingga dengan nilai sebesar 3,519, yang dilanjutkan dengan nilai IDSD Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas masing-masing sebesar 3,357 dan 3,255. Untuk nilai IDSD Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara berada di bawah rata-rata nilai IDSD WP Barlingmascakeb dengan nilai masing-masing sebesar 3,061 dan 3,008. Nilai daya saing WP Barlingmascakeb relatif rendah pada dimensi pendidikan, komersialisasi, pajak dan retribusi, serta keuangan daerah.

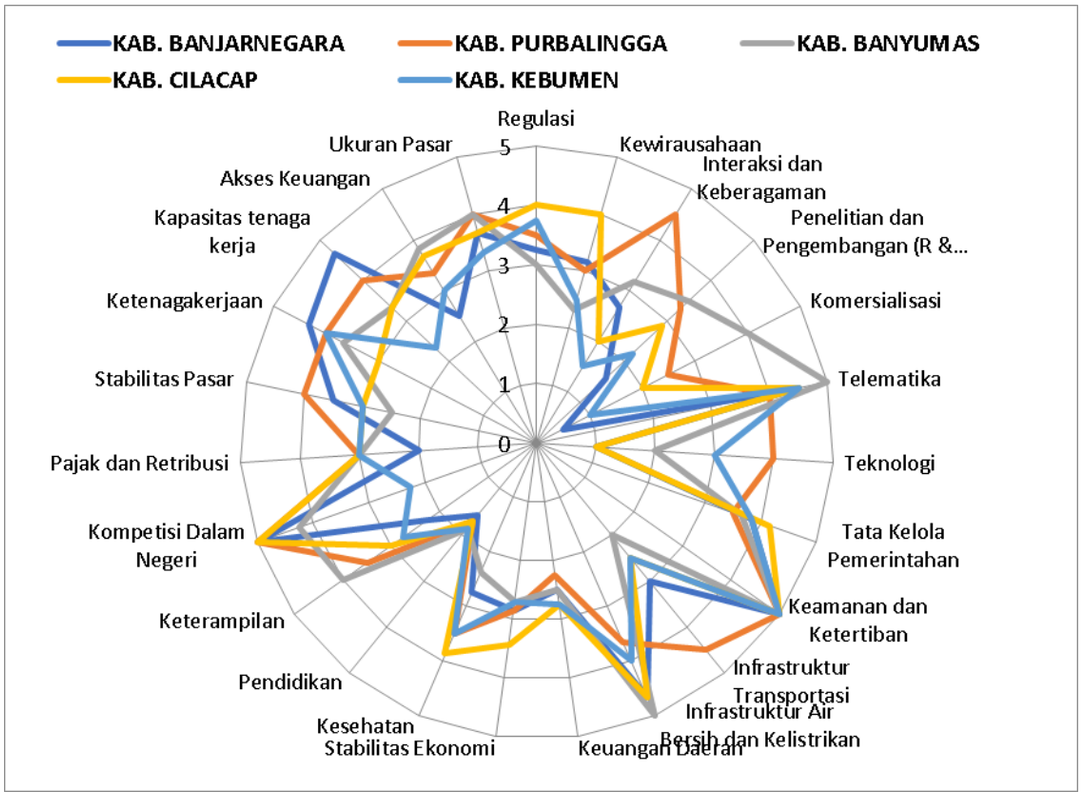


*Sumber: Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 5.19**
**Nilai IDSD Kabupaten di WP Barlingmascakeb Tahun 2022**

Kondisi daya saing wilayah Barlingmascakeb memiliki kelemahan pada beberapa indikator, antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian masyarakat, rendahnya pendapatan daerah, lemahnya investasi nasional, rendahnya pertumbuhan dan dukungan permodalan untuk petani, nelayan, dan UMKM. Dalam rangka mendukung pengembangan potensi pertanian, serta pertambangan dan penggalian, maka diperlukan upaya meningkatkan pendidikan masyarakat, khususnya yang berorientasi pada peningkatan inovasi dan teknologi pertanian dan pertambangan. Di samping itu, dukungan permodalan pada sektor pertanian perlu dioptimalkan, di samping peningkatan investasi yang diarahkan untuk hilirisasi hasil pertanian.

**c. Analisis daya dukung dan daya tampung air dan pangan di WP Barlingmascakeb**

Status daya dukung dan daya tampung air dan pangan di wilayah Barlingmascakeb belum terlampaui semua. Namun demikian kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan akan penyediaan air sehingga diperlukan strategi peningkatan tangkapan air melalui rehabilitasi dan konservasi DAS di wilayah tersebut. Selain itu untuk mendukung keberlanjutan daya dukung dan daya tampung pangan diperlukan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, selain itu juga konsumsi beras perlu diturunkan, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.

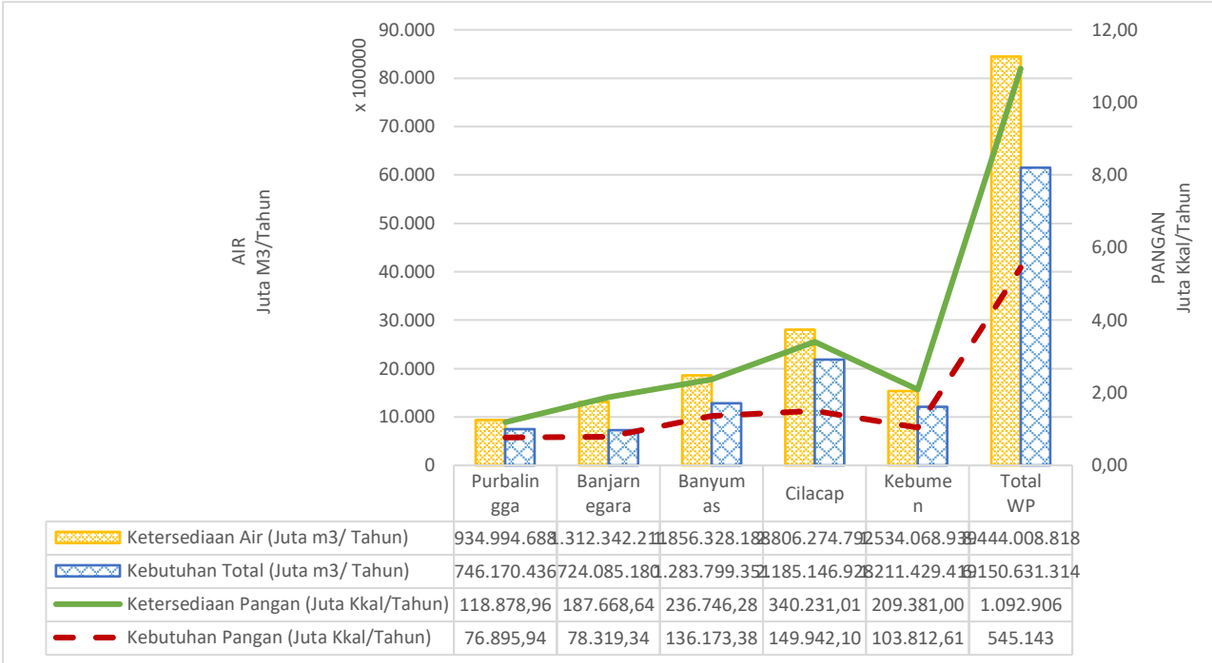


*Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045, 2023*

**Gambar 5.20**

**Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb**

**d. Sasaran kinerja pembangunan WP Barlingmascakeb**

Pengembangan wilayah Barlingmascakeb tahun 2022 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.12.**

**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Barlingmascakeb Tahun 2024**

| No | Kabupaten | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Banjarnegara | 4,50 – 5,50 | 14,46 – 13,59 | 6,54 – 5,94 | 69,74 |
| 2 | Kabupaten Purbalingga | 5,00 – 6,00 | 14,5 – 13,5 | 5,40 – 4,70 | 70,16 |
| 3 | Kabupaten Banyumas | 5,90 – 6,40 | 10,90 – 9,96 | 6,00 – 5,61 | 75,50 |
| 4 | Kabupaten Cilacap | 5,20 – 6,00 | 10,33 | 7,24 | 71,74 |
| 5 | Kabupaten Kebumen | 5,20 - 5,80 | 14,00 - 15,00 | 5,30 - 5,40 | 71,2 - 71,80 |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**e. Indikasi program pembangunan WP Barlingmascakeb**

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja makro pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan beberapa strategi dan rencana program yang terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Di WP Barlingmascakeb terdapat beberapa proyek strategis nasional (PSN) di antaranya pembangunan *double track* Jawa Selatan, dan pembangunan bahan bakar hijau (*green diesel bio refinery revamping* RU IV Cilacap).

Selain itu, terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada tahun 2024–2026 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten di WP Barlingmascakeb antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di antaranya melalui:
   a. Peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman di perbatasan terutama penyediaan air bersih;

b. Pemasangan sambungan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin.

2. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di antaranya melalui peningkatan sebaran dan kualitas pelayanan kesehatan di desa-desa kawasan perbatasan.
3. Peningkatan sektor ketenagakerjaan di antaranya melalui:
   a. Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor pertambangan dan penggalian (las), minyak, perdagangan dan jasa (otomotif, listrik, ac);
   b. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
   c. *Upskilling* terhadap instruktur dan *upgrading* prasarana dan sarana BLK dan SMK;
   d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan;
   e. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan*supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
4. Pemantapan ketahanan pangan di antaranya melalui
   a. Pencegahan alih fungsi lahan pertanian( lahan baku sawah)/LSD;
   b. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Buniayu, DI Piasa, DI Kebasen, DI Banjaran;
   c. Pemeliharaan jaringan irigasi DI Kalisapi, DI Krenceng, DI Banjaran, DI Cijalu;
   d. Rehabilitasi Embung DAS Kalong;
   e. Pemeliharaan Embung Bunter; dan
   f. Pembangunan pasar agro.
5. Peningkatan daya saing pariwisata di antaranya melalui:
   a. Pengembangan paket wisata aglomerasi wisata budaya Borobudur, Temanggung, dataran tinggi Sindoro-Sumbing;
   b. Pengembangan wisata hijau (wisata berbasis konservasi alam) melalui penerapan *ecotourism* di desa wisata dataran tinggi Sindoro-Sumbing;
   c. Peningkatan promosi dan pemasaran wisata berbasis alam (*geopark*).
   d. Dukungan promosi dan *event* wisata di kawasan DPP Nusakambangan–Baturraden;
   e. Pengembangan desa wisata;
   f. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
   g. Fasilitasi *event* promosi pariwisata di wilayah DPP Nusakambangan–Baturraden.
6. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di antaranya melalui:
   a. Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
   b. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan;
   c. Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
   d. Pendampingan pelatihan *digital marketing* bagi pelaku UMKM.
7. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah di antaranya melalui:
   a. Fasilitasi peningkatan jalur logistik (JLSS) sesi Cilacap Kebumen;

b. Menjaga kemantapan jalan provinsi utamanya pada koridor Sokaraja – Purbalingga – Bobotsari - ke arah Pemalang; Purbalingga – Klampok, Purwokerto - Baturaden; koridor Karang Pucung – Cukangleuleus..
c. Penyediaan layanan angkutan umum dikawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) pada koridor Purwokerto – Purbalingga;
d. Pengembangan simpul transportasi utamanya pada fasilitasi optimalisasi Bandara JB. Soedirman Purbalingga;

8. Pendekatan pembangunan berbasis ekoregion diantaranya ditempuh melalui:
   a. Peningkatan ketahanan air utamanya pada pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam rangka upaya konservasi air tanah pada CAT Sidareja, CAT Majenang, CAT Nusakambangan, CAT Cilacap, CAT Kroya, CAT Banyumudal, CAT Purwokerto-Purbalingga, CAT Karangkobar, dan CAT Kebumen-Purworejo; penanganan limbah tahu (pembangunan IPAL UMKM di Kabupaten Purbalingga); dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
   b. Peningkatan ketahanan lahan utamanya pada rehabilitasi dan konservasi di Segara Anakan, penanganan lahan kritis di DAS Citanduy, DAS Serayu, DAS Wawar Medono, Dataran Tinggi Dieng, Gunung Slamet; inisiasi *Geopark* Kawasan Karangsambung dan *Geopark* Kawasan Dieng (Wonosobo - Banjarnegara); inisiasi penetapan KEE Segara Anakan; serta inisiasi penyediaan prasarana dan sarana sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) Regional Banjarnegara – Purbalingga.
9. Peningkatan ketahanan energi di antaranya melalui fasilitasi pengembangan transmisi SUTET 500 kV Rawalo/Kesugihan – Incomer (Adipala – Cilacap); fasilitasi pengembangan transmisi SUTT 150 kV Lomanis-Inc (Semen Nusantara – Rawalo), fasilitasi pengembangan panas bumi WKP Baturaden dan pembangunan Pertamina RDMP RU IV Cilacap; Pembangunan infrastruktur EBT potensi lokal (biogas, gas rawa, PLTMH, PLTS atap).

Beberapa kebutuhan rencana strategis yang merupakan kewenangan kabupaten yang diperlukan sebagai sinergi pengembangan kawasan antara lain sebagai berikut:

1) Penyediaan layanan angkutan umum perkotaan Purwokerto dan sekitarnya;
2) Peningkatan aksesibilitas ke Bandara JB. Soedirman.

Arah pengembangan wilayah untuk WP Barlingmascakeb secara spasial dapat dilihat pada gambar berikut.

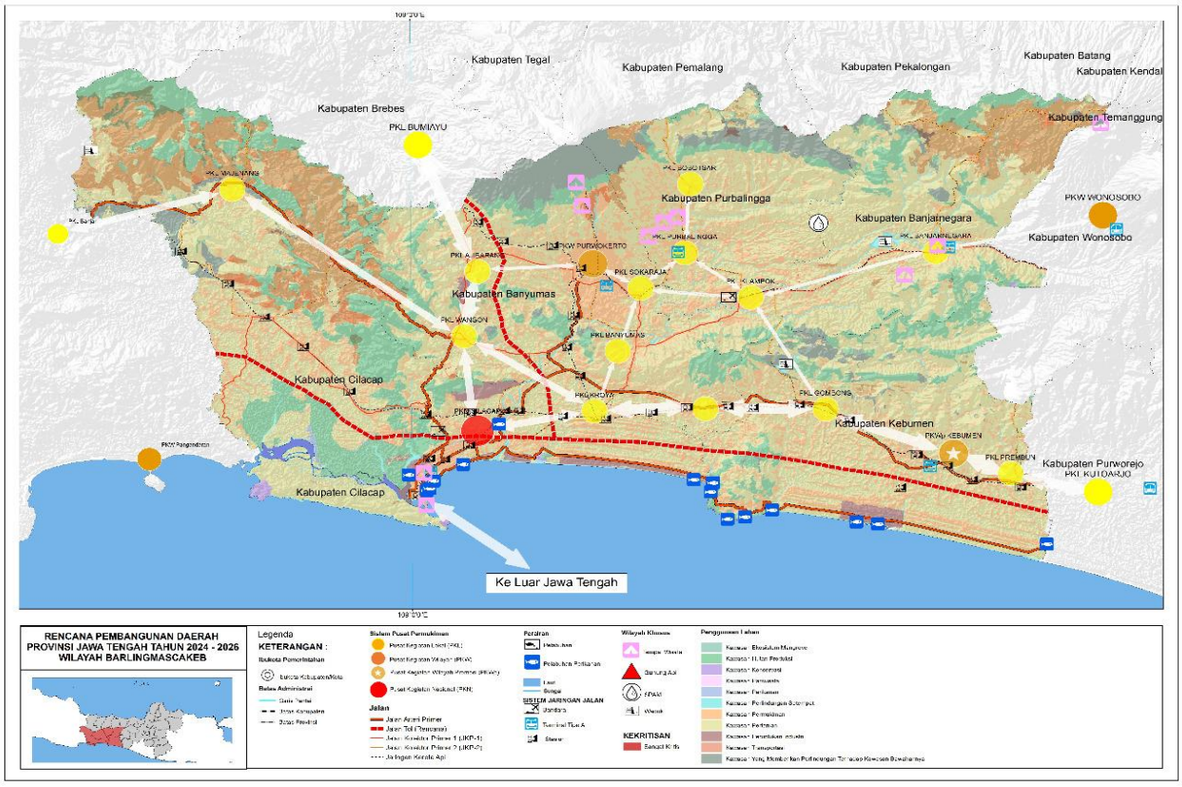


*Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 5.21**
**Arah Pengembangan WP Barlingmascakeb**

### 5.3.7. Wilayah Pengembangan Petanglong

#### a. Analisis kinerja pembangunan WP Petanglong

WP Petanglong berada di sisi utara Jawa Tengah dengan batas bagian utara berupa Laut Jawa yang berpusat di kawasan perkotaan Pekalongan meliputi Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan. WP Petanglong memiliki kesenjangan/disparitas rendah. Kondisi makro pembangunan wilayah Petanglong saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.13.**
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Petanglong Tahun 2022**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Pekalongan | 5,11 | 9,67 | 3,23 | 70,81 |
| 2 | Kabupaten Batang | 5,97 | 8,98 | 6,64 | 69,45 |
| 3 | Kota Pekalongan | 5,76 | 7,00 | 4,98 | 75,90 |
| **Rata-rata WP** | | 5,61 | **8,55** | **4,95** | **72,05** |
| **Jawa Tengah** | | **5,31** | **10,93** | **5,57** | **72,79** |
| **Nasional** | | **5,31** | **9,57** | **5,86** | **72,91** |

*Sumber: BPS, 2023*

Di WP Petanglong terdapat beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah di antaranya perdagangan dan jasa, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, penyediaan akomodasi, pertambangan dan penggalian, informasi dan komunikasi, dan *real estate*. Kawasan strategis yang

berada di WP Petanglong yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan antara lain kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan industri terpadu Batang (KSP), dan kawasan perkotaan Petanglong (KSP).

**b. Analisis daya saing WP Petanglong**

Nilai rata-rata IDSD WP Petanglong tahun 2022 adalah sebesar 3,462, sedikit meningkat dari rata-rata tahun sebelumnya 3,405. Nilai rata-rata ini merupakan yang tertinggi ke-3 pada perwilayahan di Jawa Tengah, di bawah WP Subosukawonosraten dan WP Kedungsepur. Dalam tinjauan internal wilayah Petanglong, nilai IDSD pada Kabupaten Pekalongan merupakan yang tertinggi yakni sebesar 3,589. Untuk nilai IDSD Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan lebih rendah, masing-masing sebesar 3,432 dan 3,366, yang keduanya berada di bawah rata-rata nilai daya saing wilayah Petanglong. Secara umum, nilai IDSD pada WP Petanglong ini rendah pada dimensi komersialisasi, pendidikan, dan teknologi.

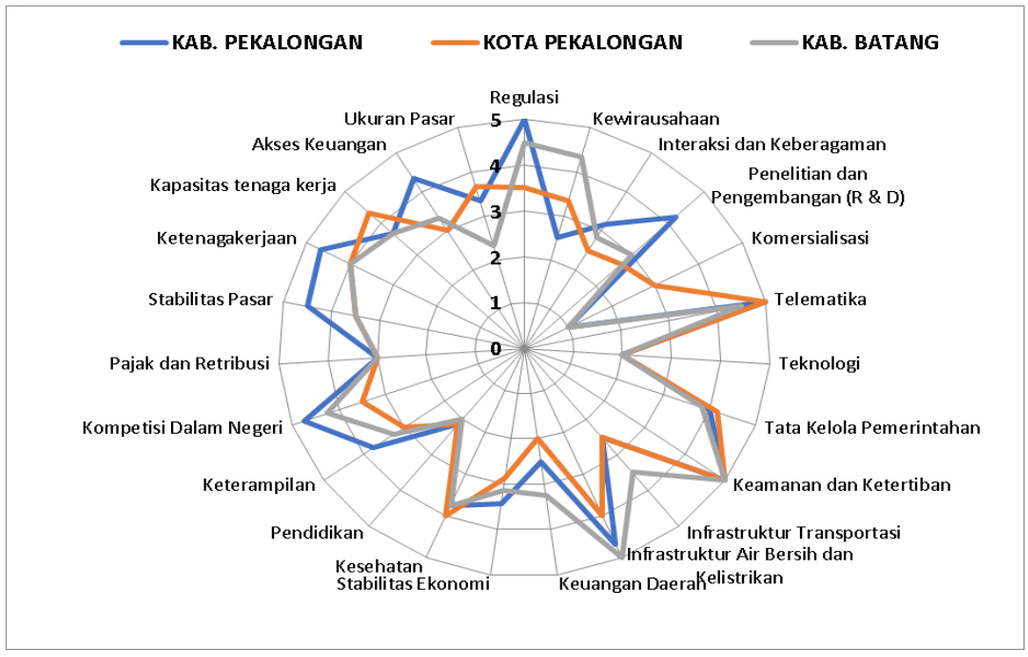


*Sumber: Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 5.22**
**Nilai IDSD Kabupaten/Kota di WP Petanglong Tahun 2022**

Kondisi daya saing WP Petanglong masih berada pada tahap penguatan kapasitas daya saing. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai pada beberapa indikator faktor pendukung daya saing yang masih lemah, antara lain pada dimensi pendidikan, komersialisasi, dan teknologi. Beberapa indikator yang menyebabkan rendahnya dimensi ini antara lain dipengaruhi oleh jumlah komersialisasi riset dan kondisi *techno park*, rendahnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, serta komersialisasi terhadap inovasi teknologi. Dengan memperhatikan potensi pengembangan perdagangan dan jasa, serta keberadaan kawasan industri di wilayah ini, diperlukan program yang mampu optimal mengungkit tingkat pendidikan masyarakat, khususnya yang berorientasi pada penguasaan IPTEK serta kemampuan keahlian (*skill*). Di samping itu, program riset dan inovasi teknologi perlu diarahkan pada penguatan hilir untuk mendorong peningkatan komersialisasi.

**c. Analisis daya dukung dan daya tampung air dan pangan di WP Petanglong**

Di wilayah Petanglong status daya dukung dan daya tampung air dan pangan belum terlampaui kecuali Kota Pekalongan. Meski demikian kecenderungan penurunan daya dukung air maupun pangan akan terus terjadi mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan akan penyediaan air dan pangan. Untuk mendukung keberlanjutan daya dukung dan daya tampung air diperlukan strategi peningkatan tangkapan air melalui pembangunan waduk, pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Regional (SPAM Regional), serta konservasi sumber air di CAT. Sedangkan untuk peningkatan daya dukung dan daya tampung pangan diperlukan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, selain itu juga konsumsi beras perlu diturunkan, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.

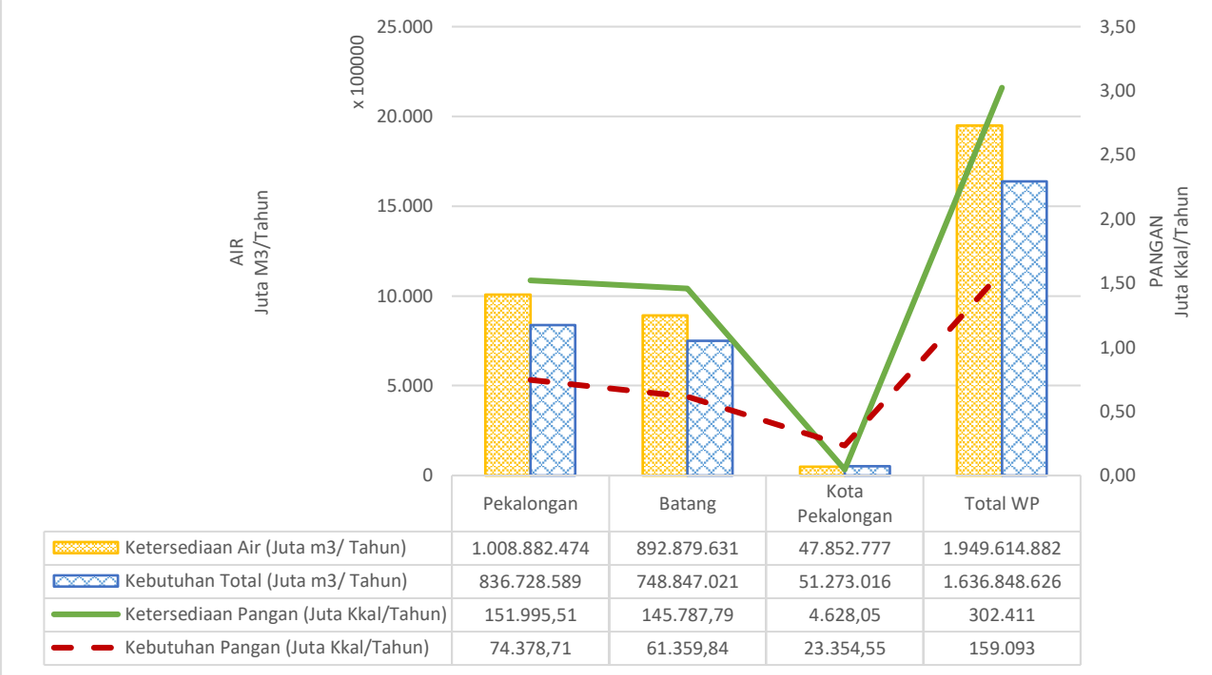


*Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045, 2023*

**Gambar 5.23**
**Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Petanglong**

**d. Sasaran kinerja pembangunan WP Petanglong**

Pengembangan wilayah Petanglong tahun 2024 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.14.**
**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Petanglong Tahun 2024**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Pekalongan | 5,50 - 5,75 | 9.10 - 8,70 | 3,10 - 3,00 | 72,00 |
| 2 | Kabupaten Batang | 5,70 - 6,20 | 8,34 - 7,90 | 5,60 | 70,04 |
| 3 | Kota Pekalongan | 5,40 - 5,80 | 6,30 - 5,93 | 4,50 – 4,70 | 76,70 |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**e. Indikasi program pembangunan WP Petanglong**

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja makro pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan beberapa strategi dan rencana program yang terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Di WP Petanglong terdapat beberapa proyek strategis nasional (PSN), dan program prioritas strategis nasional (*Majorproject* RPJMN), yang dapat menjadi pengungkit pembangunan, di antaranya:

1. PSN antara lain pengembangan kereta api Jakarta–Surabaya, pembangunan kawasan industri terpadu (KIT) Batang, dan pembangunan transmisi pipa gas ruas Cirebon – Semarang;
2. RPJMN antara lain pengamanan pesisir perkotaan pantura Jawa, dan revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan tambak di pantura Jawa.

Keberadaan KIT Batang berpotensi untuk mengembangkan konsep mega wilayah pengembangan (MWP)/super koridor wilayah Petanglong–Kedungsepur sebagai *prime mover* pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada tahun 2024–2026 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten/kota di WP Petanglong antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di antaranya melalui pemasangan sambungan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin.
2. Peningkatan sektor ketenagakerjaan di antaranya melalui:
   a. Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor perdagangan dan jasa (batik, makanan minuman, produk hasil pertanian dan perikanan);
   b. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
   c. *Upskilling* terhadap instruktur dan *upgrading* prasarana dan sarana BLK dan SMK;
   d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan;
   e. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
3. Pemantapan ketahanan pangan di antaranya melalui rehabilitasi jaringan irigasi DI Sudikampir, DI Tapak Menjangan, DI Asem Siketek, DI Kedungdowokramat.
4. Peningkatan daya saing pariwisata di antaranya melalui:
   a. Dukungan promosi dan *event* wisata di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan;
   b. Pengembangan desa wisata beserta fasilitas pendukungnya;
   c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
   d. Fasilitasi *event* promosi pariwisata di wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan.

5. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di antaranya melalui:
   a. Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
   b. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan;
   c. Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
   d. Pendampingan pelatihan *digital marketing* bagi pelaku UMKM.
6. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah di antaranya dengan menjaga kemantapan jalan provinsi utamanya pada ruas koridor Kesesi (Perbatasan Pemalang) – Kajen – Bawang – ke arah Sukorejo Kabupaten Kendal; koridor Pekalongan – Kajen – Ke Arah Banjarnegara dan Wonosobo (pendukung aksesibilitas kawan dieng dari utara);
7. Pendekatan pembangunan berbasis ekoregion di antaranya ditempuh melalui:
   a. Peningkatan ketahanan air utamanya pada pengendalian banjir dengan pembangunan tebing Sungai Bremi Meduri; pemeliharaan Sungai Sragi Lama, Sungai Sragi Baru, Sungai Bremi, Sungai Meduri, Sungai Welo, Sungai Sengkarang, Sungai Kupang, Sungai Sambong, Sungai Sipung, Sungai Sana, Sungai Urang; fasilitasi Pembangunan Waduk Petanglong; pembangunan IPAL UMKM di Kota Pekalongan; pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam rangka upaya konservasi air tanah pada CAT Pekalongan-Pemalang dan CAT Subah; pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
   b. Peningkatan ketahanan lahan di antaranya melalui rehabilitasi lahan kritis di DAS Kupang, dan Kawasan Dieng (Pekalongan, Batang), lanjutan inisiasi KEE Petungkriyono; serta pengawasan usaha pertambangan serta penertiban PETI.

c. Peningkatan ketahanan energi di antaranya melalui pembangunan infrastruktur EBT potensi lokal (biogas, gas rawa, PLTMH, PLTS atap); dan fasilitasi pembangunan pipa gas distribusi Semarang-Batang-Cirebon.

Beberapa kebutuhan rencana strategis yang merupakan kewenangan kabupaten/kota yang diperlukan sebagai sinergi pengembangan kawasan antara lain peningkatan aksesibilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional Batang (eksisting) dan peningkatan ruas jalan Bawang–Dieng. Arah pengembangan wilayah untuk WP Petanglong secara spasial dapat dilihat pada gambar berikut.

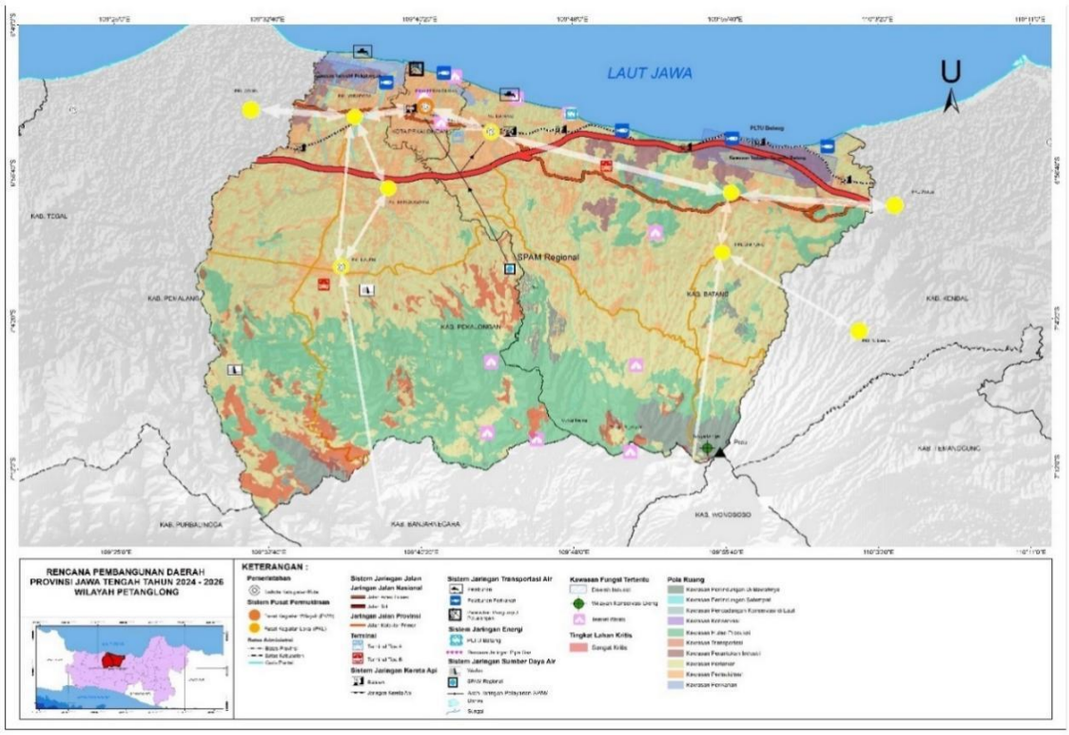


*Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 5.24**
**Arah Pengembangan WP Petanglong**

## 5.4. Arahan Pembangunan Wilayah Perbatasan Antar Provinsi

Ketimpangan pembangunan dan pelayanan publik terjadi pada wilayah perbatasan daerah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena fokus dan arah pembangunan yang belum cermat, kondisi geografis yang kurang menguntungkan, serta kurangnya dukungan prasarana dan sarana infrastruktur dan pelayanan publik seperti pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat serta sosial). Di sisi lain wilayah perbatasan mempunyai fungsi yang strategis sebagai etalase gambaran daerah/wilayah bersangkutan.

Dalam rangka mendorong pembangunan di wilayah perbatasan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah aktif dan intensif melakukan sinergi pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada lima konsep pengembangan pembangunan wilayah perbatasan, yaitu:

1. Keterpaduan dan sinergi penggunaan sumberdaya untuk menyerasikan pembangunan antarwilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan;
2. Keselarasan adalah keberlanjutan pembangunan;
3. Penanganan konflik/potensi konflik;
4. Pemanfaatan bersama adalah pemanfaatan fasilitas/prasarana dan sarana pada wilayah perbatasan; dan
1. Pengawasan dan penanganan bersama adalah upaya pelaksanaan/ implementasi peraturan.

# BAB VI
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

## 6.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2024

Pembangunan daerah tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Pada tahun pertama RPD Tahun 2024-2026, kebijakan pembangunan tahun 2024 diarahkan pada tema **"Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas"** dengan prioritas daerah difokuskan pada peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas; peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata; peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung; serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Pencapaian kinerja pembangunan daerah tahun 2024 tersebut didukung dengan rencana pendanaan yang dapat memenuhi kebutuhan akan belanja dan pembiayaan daerah. Tahun 2024, kerangka pendanaan daerah Jawa Tengah diproyeksikan mengalami peningkatan. Meskipun meningkat namun proyeksi kerangka pendanaan tahun 2024 dihadapkan pada tantangan dan risiko dari faktor global/nasional/regional baik dari sisi geopolitik, ekonomi dan keuangan yang sangat kompleks dan dinamis.

Berikut adalah proyeksi kerangka pendanaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Pendapatan daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp27,114 triliun, belanja daerah sebesar Rp28,526 triliun, dan pembiayaan netto sebesar Rp1,411 triliun.

**Tabel 6.1.**
**Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| URAIAN | | JUMLAH (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| **PENDAPATAN DAERAH** | | |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | | **18.500.149.320.000** |
| 1 | Pajak Daerah | 15.754.387.924.000 |
| 2 | Retribusi Daerah | 1.728.627.388.000 |
| 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 687.553.929.000 |
| 4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 329.580.079.000 |
| **PENDAPATAN TRANSFER** | | **8.591.957.067.000** |
| 1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 8.591.957.067.000 |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | | **22.750.000.000** |
| **JUMLAH PENDAPATAN** | | **27.114.856.387.000** |
| **BELANJA DAERAH** | | |
| **BELANJA OPERASI** | | **16.340.057.242.000** |
| 1 | Belanja Pegawai | 7.582.510.238.000 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.015.482.875.000 |

| URAIAN | | JUMLAH (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| 3 | Belanja Subsidi | 1.000.000.000 |
| 4 | Belanja Hibah | 2.723.004.129.000 |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 18.060.000.000 |
| **BELANJA MODAL** | | **2.056.751.662.000** |
| **BELANJA TAK TERDUGA** | | **25.000.000.000** |
| **BELANJA TRANSFER** | | **10.104.884.699.000** |
| 1 | Belanja Bagi Hasil | 7.105.634.568.000 |
| 2 | Belanja Bantuan Keuangan | 2.999.250.131.000 |
| **JUMLAH BELANJA** | | **28.526.693.603.000** |
| **SURPLUS/DEFISIT** | | **(1.411.837.216.000)** |
| **PEMBIAYAAN** | | |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | | **1.481.837.216.000** |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 581.837.216.000 |
| 2 | Pencairan dana cadangan | 900.000.000.000 |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | | **70.000.000.000** |
| 1 | Penyertaan modal | 70.000.000.000 |
| **PEMBIAYAAN NETTO** | | **1.411.837.216.000** |
| **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)** | | **0** |

*Sumber: Bapenda, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2023*

## 6.2. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2023 dijabarkan dalam enam urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, delapan urusan pilihan, dua unsur pendukung urusan pemerintahan, enam unsur penunjang urusan pemerintahan, satu unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan satu unsur pemerintahan umum.

### A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar

#### 1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Pendidikan**

Program ini diarahkan pada pemerataan layanan prasarana dan sarana pendidikan berbasis pendataan; peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, prasarana dan sarana terutama bagi pendidikan vokasi; peningkatan tata kelola pendidikan dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan multipihak; serta peningkatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi informasi.

**b. Program Pengembangan Kurikulum**

Program ini diarahkan pada pengembangan kurikulum adaptif berorientasi *softskill* dan pendidikan karakter.

**c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Program ini diarahkan pada identifikasi kebutuhan dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

**d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**

Program ini diarahkan pada pengawasan, pengendalian, dan pemerataan layanan pendidikan.

**2. Kesehatan**

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan kesehatan reproduksi melalui pemenuhan prasarana dan sarana, sumber daya manusia, penyusunan regulasi, perbaikan *baseline* data, pemenuhan standar operasional (SOP); peningkatan pelayanan kesehatan santun usia lanjut sesuai standar; pencegahan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat; pendampingan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di 35 kabupaten/kota; deteksi dini penyakit menular dan tidak menular di 35 kabupaten/kota; pengendalian vektor demam berdarah *dengue* dan malaria di kabupaten/kota dengan kasus tinggi; penyusunan rencana epidemologi dan peningkatan respon kejadian luar biasa (KLB) serta krisis kesehatan; penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa/bencana skala provinsi; pendampingan pelayanan bagi orang dalam gangguan jiwa (ODGJ); pemantauan imunisasi dasar rutin dan advokasi untuk pemenuhan *universal child immunization* (UCI) desa; fasilitasi akreditasi kesehatan primer dan rujukan di 35 kabupaten/kota; cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; penguatan rumah sakit dalam kesiapan tanggap darurat krisis kesehatan dan bencana dengan penyiapan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT); pelayanan pengujian kalibrasi; serta pemenuhan prasarana dan sarana di tujuh RSUD/RSJD.

**b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan perencanaan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan tingkat provinsi dan advokasi dukungan pemda; peningkatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan; serta pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

**c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**

Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan; penyediaan logistik (obat-obatan, *reagensia*, bahan habis pakai dan makan minum) di tujuh RSUD/RSJD; pengembangan tanaman obat tradisional di 35 kabupaten/kota; serta penyediaan obat, *reagen* dan vaksin esensial untuk 35 kabupaten/kota.

**d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Program ini diarahkan pada kampanye perubahan perilaku; pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan dan peningkatan peran serta masyarakat (ormas, kader, dunia usaha, perguruan tinggi, mitra, dan lainnya); peningkatan cakupan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui perbaikan *baseline* data,

peningkatan koordinasi, bimbingan teknis; implementasi germas di UPT; penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan di berbagai media, bakti sosial, *daycare*, *home visit/home care*, edukasi pasien dan keluarga pasien serta masyarakat yang dilakukan oleh tujuh RSUD/RSJD, dan *follow up* pasien kusta.

**3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air (SDA); normalisasi/restorasi sungai; operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SDA yang menjadi kewenangan provinsi; penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana dan sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA; pengelolaan hidrologi dan kualitas air; peningkatan *flood forecasting and warning system (FFWS)*; koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi. Kegiatan-kegiatan diatas sekaligus untuk mendukung peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim sektor air.

**b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota melalui pengembangan SPAM regional, pembangunan prasarana sarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pendampingan pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.

**c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional melalui inisiasi penyediaan prasarana dan sarana sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S), serta peningkatan kapasitas kelembagaan prasarana dan sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat di kabupaten/kota.

**d. Program Penataan Bangunan Gedung**

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis provinsi; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.

**e. Program Penyelenggaraan Jalan**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi meliputi peningkatan jalan menuju lebar tujuh meter dengan muatan sumbu terberat (MST) delapan ton, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan penggantian jembatan terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antarwilayah serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin, pembangunan talud dan drainase

jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan.

**f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.

**g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Program ini diarahkan pada penyusunan arahan pengembangan wilayah dan kajian tematik, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.

**4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Rencana program prioritas urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Perumahan**

Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni utamanya bagi masyarakat miskin (PB *backlog*), serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah provinsi.

**b. Program Kawasan Permukiman**

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.

**c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan.

**d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Program ini diarahkan dalam upaya mewujudkan optimalnya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkup perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan melalui penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan data, penyusunan kebijakan dan strategi, serta upaya pembinaan dan pengendalian program.

**5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Rencana program prioritas urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penanganan daerah

rawan kebakaran, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satuan tugas perlindungan masyarakat (satgas linmas).

**b. Program Penanggulangan Bencana**

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui desa/kelurahan tangguh bencana, pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) di daerah rawan bencana, satuan pendidikan aman bencana (SPAB), unit layanan inklusi disabilitas (Unit LIDi), penyusunan dokumen kajian risiko bencana (KRB) dan rencana penanggulangan bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P).

**c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta daerah rawan kebakaran.

**6. Sosial**

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pemberdayaan Sosial**

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan sosial (PSKS), koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang lintas kabupaten/kota.

**b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal.

**c. Program Rehabilitasi Sosial**

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas telantar, anak telantar, warga lanjut usia (lansia) telantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.

**d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antar-warga negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal serta penyaluran bantuan sosial Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).

**e. Program Penanganan Bencana**

Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

**f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pemeliharaan, pengamanan taman makam pahlawan nasional provinsi.

## B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

### 1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja.

**b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan dan mesin), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), pelatihan *housekeeping, tour guide, waiters*, barista, pelatihan SSW (*specified skilled worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, dan konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah.

**c. Program Penempatan Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *online e-makaryo*, pelayanan antarkerja lintas daerah kabupaten/kota berupa orientasi pra pemberangkatan calon tenaga kerja antarkerja antardaerah (TK AKAD); penyebarluasan informasi peluang, mekanisme, dan prosedur kerja; *job canvassing*, perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya produktif; peningkatan kapasitas wirausaha baru binaan; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) baik pra maupun purna penempatan di daerah provinsi, dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam satu daerah provinsi.

**d. Program Hubungan Industrial**

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah provinsi melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama (LKS) bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, serta koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

**e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan**

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan, penarikan pekerja anak, pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak (PPA), penanganan kasus ketenagakerjaan, pemeriksaan dan pengujian obyek keamanan dan keselamatan (K3) di perusahaan, serta pembinaan dan pemeriksaan norma K3 di perusahaan.

**2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Program ini diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi.

**b. Program Perlindungan Perempuan**

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

**c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

**d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis, dan penyajian data gender dan anak.

**e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.

**f. Program Perlindungan Khusus Anak**

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

**3. Pangan**

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, rehabilitasi *rice milling unit*/RMU dan gudang cadangan pangan pemerintah, pengelolaan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal berbasis umbi-umbian, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

**b. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

Program ini diarahkan pada penanganan kerawanan pangan pada lokasi prioritas risiko *stunting*, pengembangan desa mandiri pangan melalui fasilitasi usaha produktif pada lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan dan implementasi pengelolaan serta pencegahan pemborosan pangan *(food loss and waste).*

**c. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pembinaan *higiene* sanitasi, serta penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.

**4. Pertanahan**

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui penetapan lokasi.

**b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

**c. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**

Program ini diarahkan pada fasilitasi peksanaan reforma agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.

**5. Lingkungan Hidup**

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLHD), serta fasilitasi dan validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota.

**b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui fasilitasi pembinaan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan, peningkatan pemantauan terhadap badan air permukaan dan kualitas udara ambien, serta dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan sinergi peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim.

**c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan ruang terbuka hijau/RTH, serta pengelolaan Kebun Raya Baturraden.

**d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**

Program ini diarahkan pada pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan terkait pengelolaan limbah B3 dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah.

**e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan/AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan–upaya pemantauan

lingkungan/UKL-UPL, dokumen evaluasi lingkungan hidup/ DELH, dokumen pengelolaan lingkungan hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).

**f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

**g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada penanganan pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

**h. Program Pengelolaan Persampahan**

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan antara lain penyelesaian persiapan pembangunan TPST Regional Magelang.

**6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pendaftaran Penduduk**

Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di kabupaten/kota melalui bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil), sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan *online* admindukcapil kabupaten/kota, serta monitor ketersediaan blanko KTP-el di kabupaten/kota.

**b. Program Pencatatan Sipil**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten/kota antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.

**c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, dan penyajian data kependudukan berskala provinsi melalui peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan *server* di kabupaten/kota.

**7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Kerjasama Desa**

Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerja sama desa, inventarisasi data kawasan perdesaan, fasilitasi kerja sama antardesa melalui fasilitasi kerja

sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, serta fasilitasi kerja sama antarkawasan perdesaan di Jawa Tengah.

**b. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui fasilitasi penysunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yange mengatur tentang desa, melaksanakan evaluasi perkembangan desa serta melaksankan penilaian melalui penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan, melaksanakan fasilitasi terhadap penetapan dan penegasan batas desa, pembinaan manajemen pemerintahan desa sekaligus fasilitasi terhadap pelaksanaan Program Pembinaan Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa – P3PD), fasilitasi pengelolaan keuangan desa, fasilitasi pengelolaan aset desa, pembinaan percepatan pembangunan desa melalui Bantuan Keuangan Desa, serta pembinaan terhadap pencatatan data dan informasi pemerintah desa.

**c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, pengembangan badan usaha milik desa (BUM-Des) dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa, serta peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mendukung pembangunan desa.

**8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengendalian Penduduk**

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

**b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kepesertaan KB.

**c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

**9. Perhubungan**

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam satu daerah provinsi berupa operasionalisasi layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan; pengelolaan terminal penumpang tipe B berupa pembangunan dan peningkatan terminal; penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi berupa pemenuhan

fasilitas keselamatan jalan utamanya dengan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di ruas jalan provinsi.

**b. Program Pengelolaan Pelayaran**

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi berupa fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan dermaga sungai yang melayani trayek lintas kabupaten/kota; penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional berupa fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (sambil menunggu penyelesaian proses pelimpahan aset); penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, *tally* mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis izin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan.

**c. Program Pengelolaan Perkeretaapian**

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api serta fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretapian di Jawa Tengah, utamanya rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api nonaktif.

**10. Komunikasi dan Informatika**

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antarperangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, layanan *data center,* pengembangan kehumasan, pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM), pengelolaan konten, *website,* dan media sosial terkait informasi pembangunan Jawa Tengah, menyaring/*filter* terhadap berita *hoax* dan berita *fake,* serta peningkatan pelayanan informasi publik, pengembangan kapasitas SDM PPID, dan monev keterbukaan informasi badan publik.

**b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan pendampingan pengelolaan ekosistem terpadu untuk mendukung perwujudan *smart province,* mengembangkan dan mengelola integrasi layanan SPBE melalui sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP), penerbitan dokumen tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK), koordinasi pengembangan layanan Jawa Tengah Cerdas, serta fasilitasi internet desa di 17 kabupaten dalam rangka mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem (PKE), pemenuhan *data center facilities rated III,* layanan *bandwidth* internet untuk perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah serta pengembangan kapasitas SDM pengelola infrastruktur TIK.

**11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di Jawa Tengah.

**b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.

**c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerja sama antarkoperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.

**d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

**e. Program Pengembangan UMKM**

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

**12. Penanaman Modal**

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas, dan dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha.

**b. Program Promosi Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi di Jawa Tengah dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan kepeminatan berusaha hingga terjadi realisasi penanaman modal, dan memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM.

**c. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian

pengaduan, peningkatan kapasitas SDM serta prasarana dan sarana pelayanan.

d. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**
Program ini diarahkan pada kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

e. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**
Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.

**13. Kepemudaan dan Olahraga**

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**
Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan melalui peningkatan jiwa kepemimpinan, kepeloporan serta pemberdayaan pemuda dan kewirausahaan pemuda.

b. **Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**
Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga melalui peningkatan penyadaran dan literasi masyarakat untuk hidup bugar, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga, pemetaan potensi atlet, serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

**14. Statistik**

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** yang diarahkan pada perwujudan *big data* klaster pertanian, pariwisata dan pendidikan, integrasi portal data menuju layanan data terbuka dalam rangka mendukung implementasi Satu Data Jawa Tengah, serta pengembangan geospasial dalam rangka mendukung Satu Peta Jawa Tengah dan peningkatan kapasitas SDM pengelola peta geospasial.

**15. Persandian**

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**, yang diarahkan pada optimalisasi kinerja tim *computer security insident response team* (CSIRT), baik di perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah maupun pendampingan bagi tim CSIRT Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, peningkatan layanan *pentest* dalam rangka meningkatkan keamanan siber, peningkatan literasi keamanan informasi (*security awareness*), peningkatan capaian Indeks KAMI melalui penerapan standar ISO 27001 tentang Standar Manajemen Keamanan Informasi, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keamanan informasi (siber) dan persandian.

**16. Kebudayaan**

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Pengembangan Kebudayaan**
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui pengembangan kebudayaan.

**b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, serta organisasi kebudayaan.

**c. Program Pembinaan Sejarah**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui pelestarian sejarah lokal.

**d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan cagar budaya berbasis pendataan dan pengembangan kerjasama multipihak dan lintas sektor.

**e. Program Pengelolaan Permuseuman**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui peningkatan pengelolaan permuseuman.

**17. Perpustakaan**

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pembinaan Perpustakaan**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan kewenangan provinsi sesuai standar nasional perpustakaan (SNP), peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan dan perluasan akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid serta penyediaan bahan literasi.

**b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**

Program ini diarahkan pada peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan dan perluasan akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid.

**18. Kearsipan**

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Arsip**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi dan perangkat daerah provinsi, serta lembaga kearsipan daerah (LKD) kabupaten/kota melalui peningkatan kepatuhan penyelenggaraan kearsipan sesuai standar pada LKD dan perangkat daerah.

**b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip melalui perlindungan dan penyelamatan arsip pada perangkat daerah tingkat provinsi dan arsip statis pada LKD.

**C. Urusan Pilihan**

**1. Kelautan dan Perikanan**

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Program ini diarahkan pada pengelolaan kawasan konservasi; pemberdayaan masyarakat pesisir melalui fasilitasi prasarana dan sarana usaha sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan; penanaman bibit mangrove; dan fasilitasi teknologi usaha garam rakyat sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional di Jawa Tengah.

**b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; fasilitasi alat penangkapan ikan dengan sasaran masyarakat miskin; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional pelabuhan perikanan pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan kenelayanan; peningkatan prasarana dan sarana pelayanan pelabuhan; inisiasi korporasi pelaku usaha perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan; dan gerai perizinan kapal perikanan.

**c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana budi daya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik); penebaran ikan di perairan umum; revitalisasi prasarana dan sarana loka budi daya; pengembangan kawasan budi daya; fasilitasi prasarana budi daya ikan yang fokus pada sasaran penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem); dan penanganan hama penyakit ikan.

**d. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budi daya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

**e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan angka konsumsi ikan di Jawa Tengah melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) yang fokus pada sasaran penurunan *stunting*; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), rekomendasi SNI (standar nasional Indonesia), dan sertifikat hasil uji (CAT/*certificate* of *analysis*); diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan; serta penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi *e-commerce*.

**2. Pariwisata**

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran baik dalam dan luar negeri, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam dan luar negeri; pengembangan daya tarik

wisata unggulan; penetapan kawasan stategis pariwisata provinsi; perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerbitan tanda usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota; pengelolaan investasi pariwisata; serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.

**b. Program Pemasaran Pariwisata**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis provinsi melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi *event* pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata provinsi; penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri.

**c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana kota kreatif melalui sosialisasi dan pendampingan pengisian borang; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI), pembinaan teknis, pendampingan dan fasilitasi HKI bagi pelaku ekonomi kreatif.

**d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjut melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (kelompok sadar wisata atau pokdarwis, sadar wisata dan sapta pesona, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf, temu mitra parekraf, temu bisnis pelaku ekonomi kreatif atau ekraf); pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimbingan teknis atau bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

**3. Pertanian**

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Program ini oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian potensial ekspor, pembentukan korporasi, subsidi suku bunga kredit, asuransi petani, pembentukan *food estate*, optimalisasi fungsi kartu tani sebagai *database* petani dan lahan, revitalisasi kebun benih, penyediaan alat mesin pertanian atau alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, dan peningkatan kapasitas *startup* wirausaha pertanian, serta pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan aset balai dan program padat karya. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi ternak berkualitas, fasilitasi cara produksi pakan yang baik (CPPB), fasilitasi *good breeding practices* (GBP), fasilitasi *good farming practices* (GFP) dan revitalisasi balai budidaya dan pembibitan ternak.

**b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, dan pendampingan petani tembakau. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diarahkan pada kegiatan pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan dan P3KE melalui program Banter Melaju, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, serta fasilitasi inovasi peternakan.

**c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, fasilitasi nomor kontrol veteriner (NKV), serta perbaikan pola konsumsi dan gizi keluarga rawan *stunting*.

**d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih, serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

**e. Program Penyuluhan Pertanian**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM penyuluh. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diarahkan pada kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui sekolah usaha peternakan rakyat (supra).

**4. Kehutanan**

Rencana program prioritas urusan Kehutanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Hutan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK); pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 $m^3$/tahun; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; dan perbenihan tanaman hutan, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi; pengolahan hayati bahan baku hasil hutan bukan kayu, pembudidayaan HHBK dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya, pengawasan perizinan pengolahan HHBK, rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 $m^3$/tahun,

pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 $m^3$/tahun, fasilitasi pemenuhan komitmen izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUPHHK) dengan kapasitas produksi <6000 $m^3$/tahun; penyusunan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL), pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan; penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar, sertifikasi sumber benih, sertifikasi mutu benih, sertifikasi mutu bibit, pengawasan peredaran benih dan/atau bibit, pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan.

**a. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran *(appendix*) CITES untuk kewenangan daerah provinsi, pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, pengelolaan taman hutan raya (tahura) provinsi, pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi, perencanaan pengelolaan tahura, pengamanan kawasan tahura provinsi, pengawetan tumbuhan, satwa, serta habitat tahura provinsi, pemulihan ekosistem atau penutupan kawasan sesuai rencana pengelolaan tahura provinsi, kerja sama penyelenggaraaan tahura provinsi, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di sekitar tahura provinsi.

**b. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan, penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan, penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial.

**c. Program Pengolahan Daerah Aliran Sungai (DAS)**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS, pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS, pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, serta optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS.

**5. Energi dan Sumber Daya Mineral**

Rencana program prioritas urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian**

Program ini diarahkan pada pengelolaan air tanah berbasis konservasi melalui kegiatan Kajian Konservasi pada Zona Rusak CAT di Jawa Tengah, Pemetaan Potensi Air Tanah pada Kawasan Bentang Alam Karst di Jawa Tengah, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah untuk menjaga keseimbangan neraca air tanah; penyusunan kajian studi kelayakan perizinan air tanah pada wilayah sungai dalam daerah provinsi; Kajian Penyusunan Nilai Harga Air Baku serta Bobot Nilai Air untuk Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah

di Jawa Tengah. Program ini juga ditujukan dalam mendukung pengembangan potensi warisan geologi Provinsi Jawa Tengah, yang mana pada tahun 2024 akan dilaksanakan jelajah *Geopark/Geoheritage* beserta pendampingan dalam penetapan *Geoheritage*. Selain itu, program ini juga ditujukan meningkatkan pelayanan informasi geologi dalam hal mitigasi bencana dan pengembangan wilayah, sehingga diharapkan akan mengurangi resiko akibat bencana geologi (*geological hazard*) termasuk di dalamnya adalah kegiatan monitoring kejadian *Land Subsidence* di pesisir Jawa Tengah.

**b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara**

Program ini diarahkan untuk terwujudnya kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan menerapkan *good mining practice* melalui Penyusunan Perda Pengelolaan Pertambangan di Jawa Tengah; kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan; penyusunan persetujuan teknis izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; pengembangan sistem layanan pertambangan minerba; pemberian penghargaan *good mining practice* sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha pertambangan yang telah memenuhi kategori *good mining practice*; penertiban kegiatan PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dengan pelaksanaan Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan MBLB di Jawa Tengah; Penyusunan wilayah pertambangan rakyat di Jawa Tengah; serta peningkatan kompetensi SDM pada bidang pertambangan dengan melaksanakan bimbingan teknis kepada Mahasiswa Kebumian dan evaluasinya. Program ini juga diarahkan untuk terwujudnya keseimbangan neraca sumber daya mineral melalui kegiatan penyusunan dokumen neraca sumber daya mineral; penyusunan statistik pertambangan; dan pelaksanaan rapat koordinasi terkait akomodasi wilayah pertambangan dalam RTRW Kabupaten/Kota. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi usaha pertambangan melalui kegiatan penetapan harga patokan mineral beserta pengendalian; pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; Intensifikasi potensi opsen pajak mineral bukan logam dan batuan di Jawa Tengah, serta pelaksanaan rekonsiliasi data produksi di Jawa Tengah.

**a. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan**

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi dan transisi energi daerah dengan meningkatkan pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) dalam bauran energi melalui kegiatan pembangunan maupun pengembangan prasarana sarana EBT utamanya pengembangan Biogas, *Biogenic shallow gas* (Gas Rawa), Pompa air tenaga surya, dan PLTS Atap; meningkatkan akses energi bagi masyarakat terutama EBT, pengembangan energi baru terbarukan melalui kajian potensi EBT di Jawa Tengah; meningkatkan edukasi dan peluang *green jobs* kepada masyarakat terhadap pemanfaatan energi alternatif dengan kegiatan pendamping energi; pelatihan instalatur PLTS *Rooftop*, pelatihan instalatur Gas Rawa; pengembangan desa mandiri energi melalui penghargaan DME (Desa Mandiri Energi) sebagai bentuk apresiasi terhadap desa yang telah memenuhi kategori DME inisiatif, DME berkembang, dan DME mapan; serta pemberian penghargaan Hemat Energi dan Air (HEA) sebagai bentuk apresiasi

terhadap pemerintah kabupaten/kota, sekolah (SMA/SMK), dan sektor Industri yang telah menerapkan perilaku budaya hemat energi dan air.

**b. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi daerah dengan meningkatan kehandalan pasokan listrik; meningkatkan konsumsi tenaga listrik per kapita; serta pemerataan dan keterjangkauan akses untuk masyarakat terhadap energi listrik melalui pemenuhan akses listrik terhadap masyarakat miskin yang belum berlistrik; evaluasi regulasi dan atau kebijakan Ketenagalistrikan Daerah; serta sosialisasi penerapan gaya hidup dengan menggunakan peralatan berbasis listrik atau *electrifying lifestyle*. Selain itu, program ini juga diarahkan meningkatkan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) melalui kegiatan Inspeksi keselamatan ketenagalistrikan; Koordinasi K2 bersama *stakeholder* terkait di Jawa Tengah; pendampingan pemantauan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan serta fasilitasi peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis ketenagalistrikan dalam rangka mendukung K2 dan evaluasinya di Jawa Tengah.

**6. Perdagangan**

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**

Program ini diarahkan pada penerbitan surat keterangan asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan angka pengenal importir (API) melalui *post audit* dan verifikasi ekspor/impor di kabupaten/kota.

**b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara *online* dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang sistem resi gudang (SRG).

**c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting di Jawa Tengah, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya, serta minuman beralkohol.

**d. Program Pengembangan Ekspor**

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan penguatan ekspor Jawa Tengah dengan pemberdayaan sumber daya produk subtitusi impor, *export coaching program* (ECP), *coaching program for new exporters* (CPNE), pemetaan potensi desa ekspor, perluasan jejaring promosi dan kerjasama, penilaian

eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta *one on one meeting* dengan atase perdagangan (Atdag)/*Indonesian trade promotion center* (ITPC).

**e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.

**f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM dan pesona produk kriya Jawa Tengah.

**7. Perindustrian**

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan industri baik industri agro dan nonagro melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok usaha industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM).

**b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin serta pengawasan terhadap usaha industri agro dan nonagro.

**c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk izin usaha industri/IUI, izin perluasan usaha industri/IPUI, izin usaha kawasan industri/IUKI, dan izin perluasan kawasan industri/IPKI kewenangan provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, klinik dan pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri.

**8. Transmigrasi**

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** yang diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi antarpemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, dan pelatihan transmigrasi lokal.

## D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

### 1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Administrasi Umum**

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi umum yang menunjang pelaksanaan kegiatan di lingkup sekretariat daerah.

**b. Program Penataan Organisasi**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi; fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota; fasilitasi penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyusunan peta proses bisnis daerah dan fasilitasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

**c. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerja sama antarpemerintah; fasilitasi kerja sama lembaga, badan usaha, dan swasta; pemetaan potensi kerja sama daerah; evaluasi pelaksanaan kerja sama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

**d. Program Kesejahteraan Rakyat**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan prasarana dan sarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan nonpelayanan dasar.

**e. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah nonlitigasi dan hak asasi manusia atau HAM.

**f. Program Perekonomian dan Pembangunan**

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD).

**g. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi

pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

**h. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

**2. Sekretariat DPRD**

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi**

Program ini diarahkan pada kegiatan penunjang pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan, serta perencanaan dan evaluasi kinerja sekretariat DPRD.

**b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.

**E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

**1. Perencanaan**

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.

**b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian; konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial dan budaya; serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

**2. Keuangan**

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten/kota, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten/kota, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten/kota dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

**b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang diamankan, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

**c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.

**3. Kepegawaian**

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah** yang diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi aparatur sipil negara atau ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui perencanaan pengadaan ASN sesuai kebutuhan baik melalui rekrutmen CASN dan/atau fasilitasi mutasi pegawai negeri sipil atau PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan *assestment test*; promosi dan mutasi ASN yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai berdasarkan sistem merit melalui *talent scouting* maupun seleksi terbuka; pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dengan tugas/izin belajar; monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki; memberikan pembinaan disiplin, perlindungan dan penghargaan yang layak bagi ASN; serta pengelolaan data kepegawaian dan layanan kepegawaian berbasis tekonologi informasi yang terintegrasi.

**4. Pendidikan dan Pelatihan**

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis, fungsional, dan manajerial yang komprehensif bagi ASN didukung dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

**5. Penelitian dan Pengembangan**

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah,

pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerja sama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

**6. Penghubung**

Rencana program prioritas unsur penghubung yang akan dilaksanakan adalah **Program Pelayanan Penghubung**, yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan penghubung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya.

**F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Program ini diarahkan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.

**b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Program ini diarahkan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait reformasi birokrasi dan manajemen risiko, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

**G. Unsur Pemerintahan Umum**

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme serta pembentukan kader bela negara.

**b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

**c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

**d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.

**e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**.

Rincian rencana kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 beserta pagu indikatifnya dapat dilihat pada lampiran Buku III. Rekapitulasi rencana kerja program prioritas beserta pagu indikatifnya pada masing-masing urusan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.2**
**Rencana Program Prioritas dan Pagu Indikatif**
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| KODE | URUSAN | PROGRAM | PAGU RKPD (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| X.XX | NON URUSAN | | |
| X.XX.01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 10.096.512.941.000 |
| 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | |
| 1.01.02 | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 3.708.924.637.000 |
| 1.01.03 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 751.800.000 |
| 1.01.04 | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 341.362.000 |
| 1.01.05 | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 742.500.000 |
| 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | |
| 1.02.02 | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 857.819.545.000 |
| 1.02.03 | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 937.959.000 |
| 1.02.04 | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 667.000.000 |
| 1.02.05 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1.888.259.000 |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | |
| 1.03.02 | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 104.843.791.000 |

| KODE | URUSAN | PROGRAM | PAGU RKPD (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.03.03 | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 78.105.779.000 |
| 1.03.05 | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 2.978.123.000 |
| 1.03.08 | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 18.699.123.000 |
| 1.03.10 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 340.675.501.000 |
| 1.03.11 | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 4.048.300.000 |
| 1.03.12 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 5.670.000.000 |
| 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | |
| 1.04.02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 14.917.000.000 |
| 1.04.03 | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 3.108.000.000 |
| 1.04.05 | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 1.725.000.000 |
| 1.04.06 | | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 215.000.000 |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | |
| 1.05.02 | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 4.441.576.000 |
| 1.05.03 | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 4.925.000.000 |
| 1.05.04 | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 150.000.000 |

| KODE | URUSAN | PROGRAM | PAGU RKPD (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | |
| 1.06.02 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 9.479.940.000 |
| 1.06.03 | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | 100.000.000 |
| 1.06.04 | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 56.760.528.000 |
| 1.06.05 | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 157.256.160.000 |
| 1.06.06 | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 2.225.500.000 |
| 1.06.07 | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 359.000.000 |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | |
| 2.07.02 | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | 180.415.000 |
| 2.07.03 | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 30.176.915.000 |
| 2.07.04 | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 1.780.000.000 |
| 2.07.05 | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 1.685.787.000 |
| 2.07.06 | | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | 5.700.000.000 |
| 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | |
| 2.08.02 | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 1.375.000.000 |
| 2.08.03 | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 1.052.958.000 |
| 2.08.04 | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 250.000.000 |
| 2.08.05 | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 229.800.000 |
| 2.08.06 | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 290.000.000 |
| 2.08.07 | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 495.358.000 |

| KODE | URUSAN | PROGRAM | PAGU RKPD (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | |
| 2.09.03 | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 9.430.935.000 |
| 2.09.04 | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 3.980.500.000 |
| 2.09.05 | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 2.815.000.000 |
| 2.10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | |
| 2.10.03 | | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | 400.000.000 |
| 2.10.04 | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 600.000.000 |
| 2.10.06 | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 590.000.000 |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | |
| 2.11.02 | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 778.748.000 |
| 2.11.03 | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 8.548.361.000 |
| 2.11.04 | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 1.538.667.000 |
| 2.11.05 | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 133.740.000 |
| 2.11.06 | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 844.280.000 |
| 2.11.08 | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 1.904.836.000 |
| 2.11.10 | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 240.732.000 |

| KODE | URUSAN | PROGRAM | PAGU RKPD (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.11.11 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 1.968.700.000 |
| 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | |
| 2.12.02 | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 240.000.000 |
| 2.12.03 | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 220.000.000 |
| 2.12.04 | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 240.000.000 |
| 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | |
| 2.13.03 | | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | 675.000.000 |
| 2.13.04 | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 1.625.000.000 |
| 2.13.05 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 2.450.000.000 |
| 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | |
| 2.14.02 | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 305.000.000 |
| 2.14.03 | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 695.000.000 |
| 2.14.04 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 440.000.000 |
| 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | |
| 2.15.02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 127.393.110.000 |
| 2.15.03 | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 459.100.000 |

| KODE | URUSAN | PROGRAM | PAGU RKPD (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.15.05 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | 1.266.866.000 |
| 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | |
| 2.16.02 | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 24.523.773.000 |
| 2.16.03 | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 13.442.779.000 |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | |
| 2.17.03 | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 2.500.000.000 |
| 2.17.05 | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 6.513.853.000 |
| 2.17.06 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 8.901.787.000 |
| 2.17.07 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 9.072.340.000 |
| 2.17.08 | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 6.408.609.000 |
| 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | |
| 2.18.02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 705.000.000 |
| 2.18.03 | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 1.100.000.000 |
| 2.18.04 | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 1.649.910.000 |
| 2.18.05 | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 1.510.218.000 |
| 2.18.06 | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 524.000.000 |
| 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | |
| 2.19.02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 23.675.000.000 |

| KODE | URUSAN | PROGRAM | PAGU RKPD (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.19.03 | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 196.062.000.000 |
| 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | |
| 2.20.02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 1.257.329.000 |
| 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | |
| 2.21.02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 2.000.000.000 |
| 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | |
| 2.22.02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 6.028.042.000 |
| 2.22.03 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 23.705.940.000 |
| 2.22.04 | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | 298.800.000 |
| 2.22.05 | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 704.085.000 |
| 2.22.06 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | 2.265.120.000 |
| 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | |
| 2.23.02 | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 34.418.638.000 |
| 2.23.03 | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | 268.298.000 |
| 2.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | |
| 2.24.02 | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 780.346.000 |
| 2.24.03 | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 103.000.000 |
| 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | |
| 3.25.02 | | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | 3.341.700.000 |
| 3.25.03 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 33.852.192.000 |
| 3.25.04 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 13.119.461.000 |

| KODE | URUSAN | PROGRAM | PAGU RKPD (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 3.25.05 | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1.963.639.000 |
| 3.25.06 | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 2.330.025.000 |
| 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | |
| 3.26.02 | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 4.533.575.000 |
| 3.26.03 | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 123.700.000.000 |
| 3.26.04 | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 825.000.000 |
| 3.26.05 | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 9.115.000.000 |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | |
| 3.27.02 | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 92.949.520.000 |
| 3.27.03 | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 5.964.297.000 |
| 3.27.04 | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 14.980.185.000 |
| 3.27.05 | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 2.635.000.000 |
| 3.27.07 | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 20.740.985.000 |
| 3.28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | |
| 3.28.03 | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 18.758.156.000 |
| 3.28.04 | | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | 2.966.293.000 |
| 3.28.05 | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 5.313.155.000 |

| KODE | URUSAN | PROGRAM | PAGU RKPD (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 3.28.06 | | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | 551.982.000 |
| 3.29 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | |
| 3.29.02 | | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | 2.725.496.000 |
| 3.29.03 | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | 4.315.593.000 |
| 3.29.05 | | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | 7.684.499.000 |
| 3.29.06 | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | 13.477.465.000 |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | |
| 3.30.02 | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 117.640.000 |
| 3.30.03 | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 634.445.000 |
| 3.30.04 | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 2.316.405.000 |
| 3.30.05 | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 2.980.978.000 |
| 3.30.06 | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 3.482.628.000 |
| 3.30.07 | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 1.450.443.000 |
| 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | |
| 3.31.02 | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 30.869.870.000 |
| 3.31.03 | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 290.000.000 |
| 3.31.04 | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 823.525.000 |
| 3.32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | |
| 3.32.03 | | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 220.000.000 |

| KODE | URUSAN | PROGRAM | PAGU RKPD (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | |
| 4.01.02 | | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | 1.710.656.000 |
| 4.01.03 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 3.783.000.000 |
| 4.01.04 | | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | 140.639.161.000 |
| 4.01.05 | | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | 2.438.990.000 |
| 4.01.06 | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 4.912.642.000 |
| 4.01.07 | | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 2.505.000.000 |
| 4.01.08 | | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 1.685.000.000 |
| 4.02 | SEKRETARIAT DPRD | | |
| 4.02.02 | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 390.574.350.000 |
| 5.01 | PERENCANAAN | | |
| 5.01.02 | | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 5.814.000.000 |
| 5.01.03 | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 6.653.000.000 |
| 5.02 | KEUANGAN | | |
| 5.02.02 | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 10.146.505.350.000 |
| 5.02.03 | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 6.114.433.000 |
| 5.02.04 | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 32.644.010.000 |
| 5.03 | KEPEGAWAIAN | | |
| 5.03.02 | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 13.243.893.000 |
| 5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | |
| 5.04.02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 19.589.676.000 |
| 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | |
| 5.05.02 | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 5.050.000.000 |
| 5.07 | PENGELOLAAN PENGHUBUNG | | |
| 5.07.02 | | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | 2.772.186.000 |

| KODE | URUSAN | PROGRAM | PAGU RKPD (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH | | |
| 6.01.02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 6.073.727.000 |
| 6.01.03 | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 2.766.222.000 |
| 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | |
| 8.01.02 | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 2.168.341.000 |
| 8.01.03 | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 1.022.991.617.000 |
| 8.01.04 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 76.846.013.000 |
| 8.01.05 | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 1.031.422.000 |
| 8.01.06 | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 138.463.763.000 |
| **TOTAL** | | | **28.526.693.603.000** |

# BAB VII
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

## 7.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebagai berikut.

**Tabel 7.1.**
**Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| No | Indikator Kinerja Utama Daerah | Satuan | Target Capaian 2024 | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PDRB per Kapita | Juta Rupiah | 45,82 | Sekretariat Daerah |
| 2 | Angka Kemiskinan | % | 9,76-8,96 | Sekretariat Daerah |
| 3 | Rasio Gini | Angka | 0,364 | Sekretariat Daerah |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,70 - 5,50 | Sekretariat Daerah |
| 5 | Inflasi | % | 3,0 ± 1 | Sekretariat Daerah |
| 6 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,44 - 4,94 | Sekretariat Daerah |
| 7 | Nilai Tukar Petani | Angka | 107,45 | Sekretariat Daerah |
| 8 | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 73,43 | Sekretariat Daerah |
| 9 | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Angka | 60,27 | Sekretariat Daerah |
| 10 | Indeks Pembangunan Gender | Angka | 93,03 | Sekretariat Daerah |
| 11 | Indeks Pembangunan Keluarga | Angka | 58,20 | Sekretariat Daerah |
| 12 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Angka | 67,55 | Sekretariat Daerah |
| 13 | Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana | % | 4,00 | Sekretariat Daerah |
| 14 | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 81,50 | Sekretariat Daerah |

## 7.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran daerah, serta IKU perangkat daerah. Indikator kinerja daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.2.**
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Capaian Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **A** | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | |
| 1 | PDRB per Kapita | Juta Rupiah | 45,82 |
| 2 | Angka Kemiskinan | % | 9,76-8,96 |
| 3 | Rasio Gini | Angka | 0,364 |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,70 - 5,50 |
| 5 | Inflasi | % | 3,0 ± 1 |
| 6 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,44 - 4,94 |
| 7 | Nilai Tukar Petani | Angka | 107,45 |
| 8 | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 73,43 |
| 9 | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Angka | 60,27 |
| 10 | Indeks Pembangunan Gender | Angka | 93,03 |
| 11 | Indeks Pembangunan Keluarga | Angka | 58,20 |
| **B** | **Aspek Pelayanan Umum** | | |
| | **Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar** | | |
| | **Pendidikan** | | |
| 1 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 12,94 |
| 2 | Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 8,08 |
| | **Kesehatan** | | |
| 1 | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74,60 |
| 2 | Persentase penurunan kasus kematian ibu | % | 2,00 |
| 3 | Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia | % | 60,00 |
| 4 | Persentase ketercapaian intervensi spesifik dalam penurunan *stunting* | % | 80,00 |
| 5 | Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa | % | 78,00 |
| 6 | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | % | 100,00 |
| 7 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar | % | 49,89 |
| 8 | Persentase capaian SPM di RSUD Moewardi | % | 87,00 |
| 9 | Persentase capaian SPM di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | % | 90,00 |
| 10 | Persentase capaian SPM di RSUD Tugurejo | % | 90,00 |
| 11 | Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo | % | 88,00 |
| 12 | Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo | % | 98,00 |
| 13 | Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta | % | 98,17 |
| 14 | Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi | % | 100,00 |
| 15 | Persentase capaian SPM di RS Mata | % | 100,00 |
| | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | |
| 1 | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap | % | 91,29 |
| 2 | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor | % | 44,48 |
| 3 | Persentase kondisi jembatan provinsi baik | % | 91,18 |
| 4 | Persentase akses air minum aman | % | 40,43 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Capaian Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Persentase akses air limbah domestik aman | % | 10,97 |
| 6 | Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar | % | 49,42 |
| 7 | Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air | % | 61,78 |
| 8 | Persentase keterwujudan penataan ruang | % | 61,57 |
| | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | | |
| 1 | Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat | % | 14,29 |
| 2 | Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat | % | 0,04 |
| 3 | Persentase penurunan kawasan kumuh | % | 55,21 |
| | **Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat** | | |
| 1 | Indeks Penyelenggaraan Trantibum | Angka | 82,00 |
| 2 | Indeks Ketahanan Daerah | Angka | 0,74 |
| | **Sosial** | | |
| 1 | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya | % | 0,55 |
| | **Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar** | | |
| | **Tenaga Kerja** | | |
| 1 | Persentase pengangguran yang ditempatkan | % | 28,60 |
| 2 | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah | % | 62,85 |
| 3 | Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah | Juta Rp | 56,00 |
| 4 | Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten | % | 9,24 |
| 5 | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | % | 45,05 |
| 6 | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) | % | 91,07 |
| 7 | Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan | % | 81,53 |
| | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | |
| 1 | Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha | % | 40,00 |
| 2 | Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan | Per 100.000 | 4,25 |
| 3 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Angka | 66,00 |
| | **Pangan** | | |
| 1 | Indeks Ketahanan Pangan | Skor | 83,00 |
| | **Pertanahan** | | |
| 1 | Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum | % | 100,00 |
| 2 | Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agrarian | % | 100,00 |
| | **Lingkungan Hidup** | | |
| 1 | Indeks Kualitas Air | Angka | 50,66 |
| 2 | Indeks Kualitas Udara | Angka | 85,01 |
| 3 | Indeks Pencemaran Air | Angka | 3,37 |
| 4 | Indeks SO2 dan NO2 | Angka | 0,37 |
| | **Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | |
| 1 | Nilai Level Admindukcapil Provinsi Jawa Tengah | Nilai | 4,00 |
| | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | |
| 1 | Nilai Indeks Desa Mandiri Provinsi Jawa Tengah | % | 0,7318 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Capaian Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | |
| 1 | Angka Kelahiran Total (TFR) | Angka | 2,13 |
| | **Perhubungan** | | |
| 1 | Indeks pelayanan transportasi | Angka | 6,05 |
| 2 | Rasio konektivitas provinsi | Angka | 0,38 |
| 3 | Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan | Angka | 16,098 |
| 4 | *On time performance* layanan transportasi | % | 83,22 |
| | **Komunikasi dan Informatika** | | |
| 1 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Angka | 3,07 |
| | **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** | | |
| 1 | Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB | % | 12,53 |
| 2 | Persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah | % | 0,29 |
| 3 | Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah | % | 7,16 |
| | **Penanaman Modal** | | |
| 1 | Pertumbuhan nilai penanaman modal | % | 4,00 |
| 2 | Persentase realisasi PMA dan PMDN | % | 100,00 |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 90,00 |
| | **Kepemudaan dan Olahraga** | | |
| 1 | Sport Development Index (SDI) | % | 0,42 |
| 2 | Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) | % | 56,85 |
| | **Statistik** | | |
| 1 | Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah | % | 32,00 |
| | **Persandian** | | |
| 1 | Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) | Angka | 636,00 |
| | **Kebudayaan** | | |
| 1 | Angka Melek Budaya | % | 52,32 |
| | **Perpustakaan** | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Angka | 16,00 |
| | **Kearsipan** | | |
| 1 | Nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah | Nilai | 94,00 |
| | **Urusan Pilihan** | | |
| | **Kelautan dan Perikanan** | | |
| 1 | Produksi perikanan | Ton | 927.350 |
| 2 | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | Angka | 105,00 |
| 3 | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) | Angka | 110,00 |
| | **Pariwisata** | | |
| 1 | Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata | % | 8,01 |
| 2 | Nilai tambah ekonomi kreatif | Rupiah | 1.686.000.000.000 |
| | **Pertanian** | | |
| 1 | Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan | % | 3,00 |
| 2 | Nilai Tukar Petani Peternakan | Angka | 100,50 |
| 3 | Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | % | 0,58 |
| 4 | NTP Tanaman Pangan | Angka | 105,19 |
| 5 | NTP Hortikultura | Angka | 108,11 |
| 6 | NTP Perkebunan Rakyat | Angka | 100,59 |
| | **Kehutanan** | | |
| 1 | Indeks kualitas tutupan lahan | Angka | 42,45 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Capaian Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Luas tutupan lahan | Ha | 1.022.457 |
| | **Energi dan Sumber Daya Mineral** | | |
| 1 | Presentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi | % | 18,41 |
| 2 | Tingkat konsumsi tenaga listrik | kWh/kapita | 768,10 |
| 3 | Indeks Ketersediaan Air Tanah | Angka | 3,60 |
| 4 | Persentase penerapan *Good Mining Practice* | % | 53,00 |
| | **Perdagangan** | | |
| 1 | Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan | % | 4,51 |
| | **Perindustrian** | | |
| 1 | Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan | % | 3,25 |
| | **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan** | | |
| | **Sekretariat Daerah** | | |
| 1 | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | 36,10 |
| 2 | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah | % | 80,00 |
| pe | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa | % | 90,00 |
| 4 | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat | % | 90,00 |
| | **Sekretariat DPRD** | | |
| 1 | Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah | Angka | 90,00 |
| 2 | Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD) | % | 75,00 |
| 3 | Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD) | % | 75,00 |
| | **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** | | |
| | **Perencanaan** | | |
| 1 | Persentase keselarasan dan kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan | % | 100,00 |
| 2 | Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi | % | 100,00 |
| 3 | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional | % | 100,00 |
| | **Keuangan** | | |
| 1 | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah | % | 13,09 |
| 2 | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain | % | -7,67 |
| 3 | Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah | % | 97,75 |
| 4 | Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) | % | 84,02 |
| | **Kepegawaian** | | |
| 1 | Indeks Sistem Merit | Angka | 0,86 |
| | **Pendidikan dan Pelatihan** | | |
| 1 | Indeks Kompetensi ASN | Angka | 3,07 |
| 2 | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi | % | 8,67 |
| 3 | Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi | % | 100,00 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Capaian Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **Penelitian dan Pengembangan** | | |
| 1 | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 72,50 |
| | **Pengelolaan Penghubung** | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung | Angka | 85,00 |
| | **Unsur Pengawasan Pemerintahan** | | |
| 1 | Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi | Level | 3,00 |
| 2 | Level kapabilitas APIP | Level | 3,00 |
| 3 | Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah | Level | 3,00 |
| | **Unsur Pemerintahan Umum** | | |
| 1 | Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Nilai | 2,745 |
| **C** | **Aspek Daya Saing** | | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Angka | 67,55 |
| 2 | Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana | % | 4,00 |
| 3 | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 81,50 |

## 7.3. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja program yang dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Indikator kinerja program tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.3.**
**Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA | 65 | % | |
| | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA | 36 | Angka | |
| | Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum | 67,78 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA | 50 | % | |
| | Persentase angka putus sekolah SMA | 2,3 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase angka putus sekolah SMK | 0,026 | % | |
| | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK | 60 | % | |
| | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK | 0,55 | Angka | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMK | 57,35 | % | |
| | Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum | 50,35 | % | |
| | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB | 10,53 | % | |
| | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB | 10 | Angka | |
| | Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum | 10 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SLB | 68,18 | % | |
| | Persentase angka putus sekolah SLB | 3,53 | % | |
| | Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi | 80,3 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi | 10 | % | |
| | Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi | 10 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I | 1,67 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I | 0,9 | % | |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I | 90,54 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II | 76,59 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II | 1 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II | 40,11 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III | 2,87 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III | 69,8 | % | |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III | 75,57 | % | |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV | 25,69 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV | 1,25 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV | 69,8 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V | 1,92 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V | 78,7 | % | |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V | 93,71 | % | |
| | APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI | 79,86 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI | 90 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI | 90 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik | 2,74 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | SMA, SMK dan SLB CABDIN VII | | | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII | 85,55 | % | |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII | 72,83 | % | |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII | 77,11 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII | 2,2 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII | 76,12 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX | 3,22 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX | 79 | % | |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX | 54,59 | % | |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X | 77,81 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X | 28,57 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X | 84,74 | % | |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI | 87,73 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI | 3,63 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI | 44,94 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII | 1,96 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII | 80 | % | |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII | 81 | % | |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII | 88,25 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII | 2,52 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII | 79 | % | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I | 89,06 | Angka | |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II | 81,22 | Angka | |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III | 83,27 | Angka | |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV | 81,77 | Angka | |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V | 88,34 | Angka | |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI | 86,49 | Angka | |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII | 88,83 | Angka | |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII | 89,03 | Angka | |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX | 85,85 | Angka | |
| | Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X | 82,21 | Angka | |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI | 83,27 | Angka | |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII | 85,3 | Angka | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII | 86,06 | Angka | |
| PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri) | 76,2 | % | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA | 15 | % | |
| | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK | 93,93 | % | |
| | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus | 100 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I | 3 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II | 100 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III | 100 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV | 10 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V | 20 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan | 100 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI | | | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII | 100 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII | 100 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX | 25 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X | 25 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI | 4,76 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII | 100 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII | 100 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | Dinas Kesehatan dan RSUD/RSJD |
| | Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita | 34,28 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting | 51,42 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia | 60 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular | 63,9 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa | 63,9 | % | |
| | Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi | 100 | % | |
| | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan | 66,6 | % | |
| | Persentase pemanfaatan informasi kesehatan | 80 | % | |
| | Persentase ketersediaan obat dan vaksin | 80 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | 42,85 | % | |
| | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang | 57,14 | % | |
| | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang | 100 | % | |
| | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa | 100 | % | |
| | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa | 71,42 | % | |
| | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang | 100 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | 42,85 | % | |
| | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang | 57,14 | % | |
| | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten | 100 | % | |
| | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten | 28,57 | % | |
| | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati | 100 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | 28,57 | % | |
| | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati | 28,57 | % | |
| | Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM | 80 | % | |
| | Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK | 83 | % | |
| | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Dr. Moewardi | 100 | % | |
| | Persentase pemenuhan fasilitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | 100 | % | |
| | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo | 100 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pemenuhan fasilitas layanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo | 100 | % | |
| | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet Donorejo | 100 | % | |
| | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo | 100 | % | |
| | Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo | 100 | % | |
| | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta | 95 | % | |
| | Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta | 100 | % | |
| | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | 100 | % | |
| | Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | 100 | % | |
| | Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | 100 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RS Khusus Mata | 40 | % | |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | Dinas Kesehatan dan RSUD/RSJD |
| | Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya | 80 | % | |
| | Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi | 98 | % | |
| | Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | 30 | % | |
| | Persentase SDM kesehatan yang terlatih | 20 | % | |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | Dinas Kesehatan |
| | Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku | 75 | % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | Dinas Kesehatan dan RSUD/RSJD |
| | Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi | 82,85 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | 42,85 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | 28,57 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase kabupaten/Kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | 42,85 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | 28,57 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | 28,57 | % | |
| | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo | 100 | % | |
| | Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo | 100 | % | |
| | Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Surakarta | 95 | % | |
| | Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | 100 | % | |
| | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RS Khusus Mata | 50 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang |
| | Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air | 61,31 | % | |
| | Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik | 64,31 | % | |
| | Indeks kinerja sistem irigasi | 69,11 | Angka | |
| | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi | 52,37 | % | |
| | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | 62,68 | Angka | |
| | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | 34,78 | % | |
| | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal | 53,26 | % | |
| | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | 100 | % | |
| | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | 71,8 | Angka | |
| | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | 54,6 | % | |
| | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto | 50,04 | % | |
| | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | 100 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | 62,85 | Angka | |
| | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | 50 | % | |
| | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | 100 | % | |
| | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | 67,34 | Angka | |
| | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | 77,78 | % | |
| | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | 100 | % | |
| | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | 77,36 | Angka | |
| | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | 92,21 | % | |
| | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | 100 | % | |
| | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | 72,65 | Angka | |
| | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | 76,5 | % | |
| | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di | 100 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | Persentase akses air minum layak | 91,92 | % | |
| | Persentase akses air minum jaringan perpipaan | 54,32 | % | |
| | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota | 100 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | Persentase akses air limbah domestik layak | 93,58 | % | |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah | 5,83 | % | |
| | Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis | 11,94 | % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | Persentase panjang jalan yang dileger | 75,79 | % | |
| | Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan | 100 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan | 100 | % | |
| | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur | 47,5 | % | |
| | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat | 41,68 | % | |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal | 95,52 | % | |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal | 86,14 | % | |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan | 85,23 | % | |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan | 88,49 | % | |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap | 89,43 | % | |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap | 83,65 | % | |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang | 99,95 | % | |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang | 85,51 | % | |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang | 94,17 | % | |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang | 93,65 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo | 91,61 | % | |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo | 94,9 | % | |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati | 88,12 | % | |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati | 93,82 | % | |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi | 86,78 | % | |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi | 91,18 | % | |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta | 93,17 | % | |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta | 94,78 | % | |
| | Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan | 12,85 | % | |
| | Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi | 31,88 | % | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi | 45,38 | % | |
| | Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi | 43,49 | % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase implementasi pemanfaatan ruang | 68 | % | |
| | Persentase tertib ruang | 56 | % | |
| | Persentase ketersediaan rencana tata ruang | 60,71 | % | |
| | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | 100 | % | |
| | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | 100 | % | |
| | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | 100 | % | |
| | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | 100 | % | |
| | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | 100 | % | |
| | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | 100 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | Persentase rumah layak huni yang disediakan | 0,12 | % | |
| | Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani | 2,73 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh | 3,18 | % | |
| | Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman | 100 | % | |
| PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman | 40 | % | |
| PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman | 100 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum | 29,57 | % | |
| | Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah | 67,15 | % | |
| | Persentase penegakan produk hukum daerah | 80 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina | 40,03 | % | |
| PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran | 100 | % | |
| PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya | 0,12 | % | |
| | Persentase penanganan darurat bencana | 100 | % | |
| | Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana | 2 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik | 2,86 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | Dinas Sosial |
| | Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 7,7 | % | |
| PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | | | Dinas Sosial |
| | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan | 100 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | Dinas Sosial |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti | 1,92 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | 0,07 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri | 0,07 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | 0,08 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | 0,1 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring | 0,06 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede | 0,06 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | 0,09 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo | 0,05 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | 0,07 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | 0,09 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | 0,11 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | 0,08 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | 0,06 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata | 0,12 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | 0,04 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo | 0,12 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | 0,03 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | 0,11 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | 0,06 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | 0,11 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi | 0,06 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | 0,11 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | 0,03 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | 0,03 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | 0,04 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | 0,06 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | 0,05 | % | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | Dinas Sosial |
| | Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan | 100 | % | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | Dinas Sosial |
| | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial | 80 | % | |
| | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan | 0,02 | % | |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | Dinas Sosial |
| | Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial | 100 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | sesuai SPM Bidang Sosial | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | Dinas Sosial |
| | Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola | 100 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | |
| PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja | 62,85 | % | |
| PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi | 38,14 | % | |
| | Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas | 4,4 | % | |
| | Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi | 2,3 | % | |
| | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri | 2,88 | % | |
| | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian | 9,45 | % | |
| | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran | 46,9 | % | |
| | Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan | 13,13 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | produktivitas dan/atau kewirausahaan | | | |
| PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal | 45,05 | % | |
| | Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal | 68,1 | % | |
| PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan | 98 | % | |
| | Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk | 49,75 | % | |
| | Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah | 44,27 | % | |
| | Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial | 96,15 | % | |
| PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan | 89,58 | % | |
| | Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3 | 26,4 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan | 60 | % | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar | 11 | % | |
| | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani | 100 | % | |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar | 14,29 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar | 14,29 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | Keluarga Berencana |
| | Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak | 25 | % | |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya | 82,85 | % | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Rasio korban kekerasan terhadap anak | 11,5 | per 100.000 penduduk | |
| | Persentase korban kekerasan anak terlayani | 100 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Rata-rata ketercukupan pangan | 1,25 | Angka | |
| | Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi | 0,064 | Angka | |
| | Rasio cadangan pangan masyarakat | 0,62 | Angka | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku | 60 | % | |
| | Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP) | 0,62 | Angka | |
| | Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah | 87,8 | kg/kapita/tahun | |
| | Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP) | 87,8 | kg/kapita/tahun | |
| PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi | 0,01 | % | |
| PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan | 80 | % | |
| | Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang dIterbitkan | 80 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | |
| PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | Persentase fasilitasi penetapan lokasi | 100 | % | |
| PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan | 100 | % | |
| PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria | 100 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | |
| PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun | 100 | % | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya | 2,85 | % | |
| | Persentase pengujian kualitas air | 100 | % | |
| | Persentase pemantauan kualitas udara | 100 | % | |
| | Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan | 100 | % | |
| | Persentase sungai yang meningkat kualitasnya | 4,76 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani | 2,02 | % | |
| | Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden | 2,6 | % | |
| PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase limbah B3 yang terkelola | 80 | % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase rekomendasi lingkungan hidup | 100 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan | 50 | % | |
| PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya | 10,5 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah | 31,43 | % | |
| | Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya | 25 | % | |
| PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase pengaduan yang ditangani | 100 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase sampah yang tertangani | 42 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | |
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase penduduk yang memiliki KTP-el | 97 | % | |
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen | 97 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | akta kelahiran usia 0-17 diatas 98% | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan | 16,67 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP) | 6,85 | % | |
| PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa | 100 | % | |
| | Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa | 100 | % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | Pencatatan Sipil |
| | Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah | 8,96 | % | |
| | Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya | 100 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) | 100 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan | 61,11 | % | |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) | 65,58 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Unmetneed | 10 | % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan | 32 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | Dinas Perhubungan |
| | Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan | 0,38 | Angka | |
| | Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah | 0,981 | Angka | |
| | Rasio trayek angkutan jalan | 0,51 | Angka | |
| | Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum | 65,38 | % | |
| | Rasio pemanfatan terminal | 0,218 | Angka | |
| | Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis | 0,5 | Angka | |
| | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | 0,24 | Angka | |
| | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | 0,97 | Angka | |
| | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana | 0,81 | Angka | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Perhubungan Wilayah I Kelas A | | | |
| | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | 0,01 | Angka | |
| | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | 0,97 | Angka | |
| | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | 0,81 | Angka | |
| | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | 0,2 | Angka | |
| | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | 0,98 | Angka | |
| | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | 0,81 | Angka | |
| | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | 0,23 | Angka | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | 0,97 | Angka | |
| | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | 0,81 | Angka | |
| | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | 0,17 | Angka | |
| | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | 0,98 | Angka | |
| | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | 0,81 | Angka | |
| | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | 0,21 | Angka | |
| | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | 0,97 | Angka | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | 0,81 | Angka | |
| | Rasio konektivitas perkotaan | 0,481 | Angka | |
| | Persentase perpindahan moda angkutan umum | 51,72 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | Dinas Perhubungan |
| | Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP | 0,31 | Angka | |
| | Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai | 0,2 | Angka | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | | | | Dinas Perhubungan |
| | Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan | 0,04 | Angka | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | Nilai survey kepuasan komunikasi publik | 78 | Angka | |
| | Nilai keterbukaan informasi publik | 31 | Angka | |
| PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi | 72 | % | |
| | Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi | 15 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | |
| PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase koperasi berkualitas | 25,02 | % | |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | Persentase SDM koperasi yang berkualitas | 10 | % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | Persentase koperasi provinsi produktif | 48,09 | % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | Persentase usaha mikro mandiri | 81,2 | % | |
| | Persentase pertumbuhan wirausaha baru | 23 | % | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | Persentase UMKM siap bermitra | 21,06 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan | 50 | % | |
| PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN | 46 | % | |
| | Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan | 50 | % | |
| PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | Terpadu Satu Pintu |
| | Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan | 90 | % | |
| | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat | 100 | % | |
| | Persentase pemenuhan standar pelayanan | 100 | % | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui | 20 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan | 10 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | Jumlah wirausaha muda mandiri | 8 | Orang | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi | 50 | Orang | |
| | Persentase peningkatan perolehan medali | 28,18 | % | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | Jumlah masyarakat yang bugar | 750 | Orang | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi | 50 | Orang | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah | 24 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80% | 25 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional | 19,17 | % | |
| | Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan | 23,76 | % | |
| | Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan | 47,61 | % | |
| | Persentase cakupan pelestarian seni | 100 | % | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Tingkat partisipasi seni tradisi | 8,89 | % | |
| PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Persentase akses literasi sejarah | 52,9 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Persentase cagar budaya berperingkat nasional | 12,71 | % | |
| | Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya | 25,13 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Nilai survey kepuasan pengunjung museum | 89,85 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | |
| PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi | 80,56 | % | |
| | Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca | 23,08 | % | |
| | Nilai survey kepuasan masyarakat | 80 | Nilai | |
| PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah | 84,67 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya | 25,97 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK | 100 | % | |
| | Persentase peningkatan pengunjung arsip | 19 | % | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip | 12,19 | % | |
| | Persentase arsip yang diselamatkan | 19,47 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Persentase produksi garam | 1 | % | |
| | Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif | 5 | % | |
| | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat | 3,7 | % | |
| | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan | 1,39 | % | |
| | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur | 3,7 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Persentase produksi perikanan tangkap | 5 | % | |
| | Indeks harga yang diterima oleh nelayan | 108,27 | Angka | |
| | Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya | 44,44 | % | |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari | 72 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdoyong | 72,72 | % | |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto | 81,82 | % | |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor | 70 | % | |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang | 62,62 | % | |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak | 81 | % | |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo | 100 | % | |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung | 100 | % | |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa | 63,63 | % | |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending | 63 | % | |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan | 72 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan | 100 | % | |
| | Persentase produksi ikan konsumsi air laut | 5 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Produksi perikanan budidaya | 600000 | Ton | |
| | Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya | 111,27 | Angka | |
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan | 70 | % | |
| | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat | 2 | % | |
| | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat | 61 | % | |
| | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan | 2 | % | |
| | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan | 61 | % | |
| | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur | 2 | % | |
| | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah | 61 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | kerja Cabdin Wilayah Timur | | | |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Jumlah produksi olahan ikan | 160000 | Ton | |
| | Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan | 4 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan | 13,33 | % | |
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | Jumlah kunjungan wisatawan | 49.985.228 | Orang | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan) | 6 | Kabupaten/Kota | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi | 48,98 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | Pertanian dan Perkebunan |
| | Jumlah populasi ternak potong | 3726434 | (ST)/(AU) | |
| | Jumlah populasi ternak perah | 112876 | (ST)/(AU) | |
| | Jumlah populasi ternak petelur | 246615 | (ST)/(AU) | |
| | Persentase fasilitasi obat hewan | 1 | % | |
| | Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan | 4 | Dokumen | |
| | Persentase produksi dan distribusi semen beku | 1 | % | |
| | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging | 1 | % | |
| | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu | 1 | % | |
| | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur | 1 | % | |
| | Persentase luas lahan yang dioptimasi | 2,5 | % | |
| | Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi | 90 | % | |
| | Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani | 2,5 | % | |
| | Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan | 100 | % | |
| | Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan | 3 | % | |
| | Produksi kedelai | 52657 | Ton | |
| | Produksi jagung | 3576577 | Ton | |
| | Produksi padi | 9594280 | Ton | |
| | Produksi bawang merah | 515000 | Ton | |
| | Produksi cabai | 341000 | Ton | |
| | Produksi durian | 149668 | Ton | |
| | Produksi jahe | 34862 | Ton | |
| | Produksi melati | 24627 | Ton | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Produksi kopi | 25927 | Ton | |
| | Produksi tebu | 2554553 | Ton | |
| | Produksi kelapa | 166687 | Ton | |
| | Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya | 2 | % | |
| | Persentase layanan sertifikasi benih | 100 | % | |
| | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang | 85 | % | |
| | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiayah Surakarta | 85 | % | |
| | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas | 85 | % | |
| | Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan | 3 | % | |
| | Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan | 1 | % | |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong | 10 | % | |
| | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah | 10 | % | |
| | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur | 10 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha | 10 | % | |
| | Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik | 7420274 | m | |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis | 4 | Dokumen | |
| | Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali | 3 | % | |
| | Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV) | 2,8 | % | |
| | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara | 4 | Dokumen | |
| | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan | 4 | Dokumen | |
| PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam | 5 | % | |
| | Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) | 15 | % | |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Perkebunan |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong | 1,02 | % | |
| | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah | 3,11 | % | |
| | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur | 2,27 | % | |
| | Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya | 2,5 | % | |
| | Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih | 100 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan | 35,4 | % | |
| | Persentase lahan kritis tertangani | 0,47 | % | |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani | 100 | % | |
| | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1 | 0,02 | % | |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 1 | 1,38 | % | |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang | 100 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ditangani di wilayah CDK 1 | | | |
| | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2 | 0,04 | % | |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 2 | 100 | % | |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 2 | 1,72 | % | |
| | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3 | 0,03 | % | |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 3 | 100 | % | |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 3 | 1,64 | % | |
| | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4 | 0,03 | % | |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 4 | 100 | % | |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 4 | 1,46 | % | |
| | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5 | 0,04 | % | |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang | 100 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ditangani di wilayah CDK 5 | | | |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 5 | 1,29 | % | |
| | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6 | 0,09 | % | |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 6 | 100 | % | |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 6 | 2,15 | % | |
| | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8 | 0,04 | % | |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 8 | 100 | % | |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 8 | 1,03 | % | |
| | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9 | 0,04 | % | |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 9 | 100 | % | |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9 | 1,46 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10 | 0,03 | % | |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 10 | 100 | % | |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 10 | 1,03 | % | |
| | Persentase peningkatan produksi bibit | -40 | % | |
| | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11 | 0,03 | % | |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 11 | 100 | % | |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 11 | 1,29 | % | |
| | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7 | 0,09 | % | |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 7 | 100 | % | |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 7 | 1,55 | % | |
| PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani | 10 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif | 40 | % | |
| | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 1 | 5 | % | |
| | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 1 | 100 | % | |
| | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 2 | 5 | % | |
| | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 2 | 100 | % | |
| | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 3 | 5 | % | |
| | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 3 | 100 | % | |
| | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 4 | 5 | % | |
| | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 4 | 100 | % | |
| | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 5 | 5 | % | |
| | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 5 | 100 | % | |
| | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 6 | 5 | % | |
| | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 6 | 100 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 8 | 5 | % | |
| | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 8 | 100 | % | |
| | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 9 | 5 | % | |
| | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 9 | 100 | % | |
| | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 10 | 5 | % | |
| | Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura | 70 | Angka | |
| | Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden | 100 | % | |
| | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 11 | 5 | % | |
| | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 7 | 5 | % | |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat | 2,5 | % | |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 1 | 0,3 | % | |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2 | 0,2 | % | |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3 | 0,2 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4 | 0,2 | % | |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5 | 0,3 | % | |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6 | 0,2 | % | |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8 | 0,2 | % | |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 9 | 0,2 | % | |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10 | 0,2 | % | |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11 | 0,2 | % | |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7 | 0,3 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani | 10 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah | 27,5 | % | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo | 1,6 | % | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria | 3,4 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara | 1,7 | % | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan | 2,2 | % | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara | 4,1 | % | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo | 1,8 | % | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan | 2,4 | % | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu | 1,6 | % | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan | 2,7 | % | |
| | Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah | 100 | % | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak | 2,9 | % | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi | 2,8 | % | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah | 1,6 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah | 60 | % | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo | 60 | % | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria | 60 | % | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara | 60 | % | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan | 60 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara | 60 | % | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo | 60 | % | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan | 60 | % | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu | 60 | % | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan | 60 | % | |
| | Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah | 100 | % | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak | 60 | % | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi | 60 | % | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah | 60 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah | 590300,484 | SBM | |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo | 39608,43 | SBM | |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria | 23599,9 | SBM | |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara | 125685,73 | SBM | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan | 122,33 | SBM | |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara | 91,75 | SBM | |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo | 39480,034 | SBM | |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan | 78666,36 | SBM | |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu | 39363,76 | SBM | |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan | 78562,37 | SBM | |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak | 39394,34 | SBM | |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi | 86438,18 | SBM | |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah | 39287,3 | SBM | |
| PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah | 63,81 | % | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo | 49,7 | % | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria | 51,09 | % | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara | 49,97 | % | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan | 49,36 | % | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara | 49,96 | % | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo | 49,95 | % | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan | 49,66 | % | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu | 49,57 | % | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan | 49,59 | % | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) | 51,86 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Wilayah Semarang Demak | | | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi | 49,64 | % | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah | 49,08 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | |
| PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2) | 10 | % | |
| | Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah | 8 | % | |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi | 10 | % | |
| PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota | 10 | % | |
| | Persentase kinerja realisasi pupuk | 90 | % | |
| | Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi | 30 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase kenaikan nilai ekspor non migas | 2 | % | |
| PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen | 1 | % | |
| | Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta | 5 | % | |
| | Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang | 10 | % | |
| PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri | 10 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | |
| PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase pertumbuhan produksi industri agro | 2,25 | % | |
| | Persentase pertumbuhan produksi industri non agro | 2,25 | % | |
| | Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa | 3,45 | % | |
| | Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki | 85 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif | 4,38 | % | |
| PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan | 7 | % | |
| | Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan | 10 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional | 1,62 | % | |
| | Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional | 2 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | |
| PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi | 3,61 | % | |
| SEKRETARIAT DAERAH | | | | |
| PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | | | Sekretariat Daerah |
| | Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi | 66 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor | 85,71 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | kematangan organisasinya | | | |
| | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif | 88,1 | % | |
| | Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A | 60 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB | 14,29 | % | |
| | Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A | 64,28 | % | |
| | Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan | 50 | % | |
| | Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan | 88,73 | % | |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | | | | Sekretariat Daerah |
| | Tingkat efektivitas kerjasama daerah | 95 | % | |
| | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti | 95 | % | |
| | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah | 95 | % | |
| PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | Sekretariat Daerah |
| | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar | 81 | % | |
| | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar | 82 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik | 54 | % | |
| PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | | | | Sekretariat Daerah |
| | Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan | 96 | % | |
| | Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji | 96 | % | |
| | Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani | 96 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota peduli HAM | 96 | % | |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | Sekretariat Daerah |
| | Persentase capaian kinerja program bidang pertanian | 87 | % | |
| | Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan | 85 | % | |
| | Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur | 85 | % | |
| | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan | 83 | % | |
| | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan | 78 | % | |
| | Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan | 85 | % | |
| | Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha | 81 | % | |
| | Persentase nilai kemandirian BLUD | 55 | % | |
| PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | Sekretariat Daerah |
| | Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa | 90 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik | 80 | % | |
| | Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa | 81 | % | |
| PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | | Sekretariat Daerah |
| | Persentase capaian pelaksanaan APBD | 98,7 | % | |
| | Persentase capaian pelaksanaan APBN | 95,5 | % | |
| | Persentase realisasi bantuan keuangan | 85 | % | |
| | Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah | 85 | % | |
| | Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi | 100 | % | |
| SEKRETARIAT DPRD | | | | |
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | Sekretariat DPRD |
| | Persentase layanan bagian humas | 95 | % | |
| | Persentase fasilitasi penyusunan raperda | 95 | % | |
| PERENCANAAN | | | | |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya | 100 | % | |
| | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya | 100 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian | 100 | % | |
| | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian | 100 | % | |
| | Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | 100 | % | |
| | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | 100 | % | |
| PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi | 100 | % | |
| | Persentase dokumen evaluasi yang diamanahkan regulasi | 100 | % | |
| KEUANGAN | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu | 100 | % | |
| | Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu | 100 | % | |
| | Persentase penetapan APBD tepat waktu | 100 | % | |
| | Persentase penyampaian LKPD tepat waktu | 100 | % | |
| | Persentase penyusunan dokumen manajemen kas | 100 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik | 84,02 | % | |
| | Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu | 100 | % | |
| | Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi | 100 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Badan Pengelola Pendapatan Daerah |
| | Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah | 100 | % | |
| | Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor | 72 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain | -7,67 | % | |
| | Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan | 100 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1 | 24,91 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1 | 18,18 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1 | -21,85 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1 | 20,87 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II | 6,61 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II | 18,66 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II | 12,53 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II | -17,94 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II | 20,09 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III | 21,98 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III | 15,09 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III | 12,2 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III | -17,96 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III | 20,2 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang | 9,5 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang | 23,93 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang | 13,7 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang | -20,16 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang | 19,97 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga | 2,24 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga | 23,51 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga | 6,69 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga | 20,52 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga | -25,36 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal | 32,43 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal | 18,31 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal | 12,95 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal | -25,77 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal | 20,75 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak | 23,16 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak | 20,8 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak | 10,78 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset | -24,27 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | daerah UPPD Kabupaten Demak | | | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak | 19,8 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan | 22,34 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan | 20,87 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan | 13,12 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan | -20,94 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan | 19,94 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta | 3,8 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta | 19,79 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta | 6,58 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta | -22,24 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta | 20,21 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten | 24,85 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten | 18,99 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten | 13,42 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten | -24,67 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten | 20,93 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen | 19,63 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen | 26,51 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air | 8,21 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen | | | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen | -25,1 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen | 19,89 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo | 23 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo | 25,8 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo | 1,76 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | -25,99 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | 20,94 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri | 11,97 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri | 20,9 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD KAbupaten Wonogiri | 12,75 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri | -20,99 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri | 20,4 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar | 30,62 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar | 21,98 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar | 9,35 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar | -16,8 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar | 21,21 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali | 23,05 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali | 19,89 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali | 13,03 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali | -25,7 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali | 20,48 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati | 16,61 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati | 15,79 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati | 13,58 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati | -18,76 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati | 19,45 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora | 13,4 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora | 19,93 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora | 12,4 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora | -18,49 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora | 20,31 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang | 11,59 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang | 18,71 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang | 12,45 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang | -15,14 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang | 19,33 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus | 12,4 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus | 18,96 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus | 7,24 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus | -21,23 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus | 20,31 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara | 22,63 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara | 14,71 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara | 19 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara | -22,19 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara | 10,98 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor | -25,14 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | (PKB) UPPD Kota Pekalongan | | | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan | 28,17 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan | -16,7 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan | 20,29 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaran bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan | 41,78 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan | 19,62 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan | 13,51 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | -20,86 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | 20,16 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang | 38,33 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang | 15,23 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang | 13,44 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang | -23,43 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang | 20,24 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang | 30,76 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang | 11,83 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang | 11,27 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang | -17,02 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang | 20,84 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal | -25,92 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal | 12,2 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal | 19,25 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal | 20,49 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal | 66,86 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal | 14,12 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal | -25,7 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal | 20,57 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal | 13,27 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes | 44 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) | 20,1 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | UPPD Kabupaten Brebes | | | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes | 12,88 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes | -22,26 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes | 20,83 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas | 25,25 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas | 19,52 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas | 13,75 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas | -25,89 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas | 20,26 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap | 23,27 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap | 16,42 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap | 11,83 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap | -13,57 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap | 20,24 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga | 14,57 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga | 28,72 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga | 13,77 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalinga | -15,51 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga | 20,9 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor | 45,72 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara | | | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara | 21,49 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara | 13,44 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara | -25,11 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara | 20,31 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang | -53,02 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang | 16,85 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang | 9,11 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang | -13,62 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan | 21,76 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | aset daerah UPPD Kota Magelang | | | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang | 34,47 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang | 19,55 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang | 13,59 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang | -25,13 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang | 22,12 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen | 25,05 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen | 20,82 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen | 13,41 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen | -18,63 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen | 20,99 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo | 4,96 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo | 23,68 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo | 12,21 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo | -12,81 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo | 22,01 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung | 32,03 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung | 23,36 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung | 13,59 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset | -20,87 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | daerah UPPD Kabupaten Temanggung | | | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung | 21,35 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo | 24,01 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo | 22,39 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo | 13,38 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo | -24,77 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo | 20,95 | % | |
| KEPEGAWAIAN | | | | |
| PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | Badan Kepegawaian Daerah |
| | Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan | 100 | % | |
| | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN | 100 | % | |
| | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi | 100 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu | 100 | % | |
| | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN | 100 | % | |
| | Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN | 100 | % | |
| | Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan | 100 | % | |
| | Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN | 100 | % | |
| PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis | 100 | % | |
| | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional | 100 | % | |
| | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial | 100 | % | |
| | Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan | 85 | % | |
| | Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan) | 3,5 | Angka | |
| | Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan | 100 | % | |
| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | |
| PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | Badan Riset dan Inovasi Daerah |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi | 100 | % | |
| | Persentase pelaksanaan riset dan inovasi | 100 | % | |
| | Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi | 100 | % | |
| | Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi | 100 | % | |
| PENGELOLAAN PENGHUBUNG | | | | |
| PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | | | | Badan Penghubung |
| | Persentase ketercapaian pelayanan penghubung | 100 | % | |
| INSPEKTORAT DAERAH | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | INSPEKTORAT |
| | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri | 83 | % | |
| | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu | 85 | % | |
| | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah | 85 | % | |
| | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah | 85 | % | |
| | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah | 85 | % | |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | INSPEKTORAT |
| | Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3 | 10,2 | % | |
| | Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korups (IEPK) level 3 | 10,2 | % | |
| KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | |
| PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Indeks Ideologi Pancasila | 3 | Nilai | |
| PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Indeks kewaspadaan Nasional | 73 | Angka | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Indeks kinerja ormas | 75,34 | Nilai | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Indeks toleransi | 74,1 | % | |
| | Indeks penguatan dampak ekonomi | 3 | % | |
| PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi | 75 | Nilai | |
| NON URUSAN | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | 100 | % | Seluruh Perangkat Daerah |

| Urusan/Program | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | 100 | % | |
| | Cost Recovery Rate Total RSUD Dr. Moewardi | 82 | % | RSUD Dr. Moewardi |
| | Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | 82 | % | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |
| | Cost Recovery Rate Total RSUD Tugurejo | 55,25 | % | RSUD dr. ADHYATMA, MPH |
| | Cost Recovery Rate Total RSUD Kelet Donorejo | 35 | % | RSUD dr. REHATTA |
| | Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo | 43 | % | RSJD Dr. Amino Gondohutomo |
| | Cost Recovery Rate Total RSJD Surakarta | 33 | % | RSJD dr. ARIF ZAINUDIN |
| | Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | 46,5 | % | RSJD Dr. RM. Soedjarwadi |

# BAB VIII
# PENUTUP

Tahun 2024 sebagai tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 menjadi tahun yang cukup penting karena di tahun 2024 menjadi landasan awal untuk perencanaan tahun berikutnya dalam periode RPD Tahun 2024-2026. Untuk itu maka dalam RKPD Tahun 2024 memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Serangkaian program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Tahun 2024 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergi guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

RKPD Tahun 2024 disusun secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil (*outcome*), terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif, berbasis risiko (*riskbased planning*), dan berbasis pada riset (*researchbased planning*), dengan pendekatan *money follow programme* dan *programme follow result*, dan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan. RKPD Tahun 2024 akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024. Kebijakan dalam RKPD Tahun 2024 harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2024 dalam rangka mewujudkan sasaran dan target pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. RKPD Tahun 2024 juga menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, serta menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan lainnya termasuk didalamnya masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah Jawa Tengah.

Sinergi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024. Dengan demikian diharapkan akan tercapai cita-cita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 yakni “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”.

PJ GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SETDA
IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI ..... I
DAFTAR TABEL ..... III
BUKU II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2022 ..... 1
2.1. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama ..... 1
2.2. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Daerah ..... 2
2.3. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Program ..... 17
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar ..... 17
1. Urusan Pendidikan ..... 17
2. Kesehatan ..... 33
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... 42
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..... 51
5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat ..... 52
6. Sosial ..... 54
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ..... 60
1. Tenaga Kerja ..... 60
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... 63
3. Pangan ..... 65
4. Pertanahan ..... 67
5. Lingkungan Hidup ..... 68
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ..... 72
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..... 73
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..... 75
9. Perhubungan ..... 77
10. Komunikasi dan Informatika ..... 80
11. Koperasi dan UKM ..... 81
12. Penanaman Modal ..... 83
13. Kepemudaan dan Olahraga ..... 85
14. Statistik ..... 86
15. Persandian ..... 86
16. Kebudayaan ..... 87
17. Perpustakaan ..... 88
18. Kearsipan ..... 90

C. Urusan Pilihan ..... 91
1. Perikanan dan Kelautan ..... 91
2. Pariwisata ..... 96
3. Pertanian ..... 97
4. Kehutanan ..... 102
5. Energi dan Sumber Daya Mineral ..... 112
6. Perdagangan ..... 117
7. Perindustrian ..... 119
8. Transmigrasi ..... 121
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ..... 121
1. Sekretariat Daerah ..... 121
2. Sekretariat DPRD ..... 127
E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ..... 128
1. Perencanaan ..... 128
2. Keuangan ..... 130
3. Kepegawaian ..... 156
4. Pendidikan dan Pelatihan ..... 157
5. Penelitian dan Pengembangan ..... 158
6. Penghubung ..... 160
2.4. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan ..... 160
2.5. Unsur Pemerintahan Umum ..... 162

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... 1
Tabel 2. 2 Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... 2
Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan ..... 17
Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan ..... 33
Tabel 2. 5 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... 42
Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..... 51
Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..... 52
Tabel 2. 8 Capaian Kinerja Urusan Sosial ..... 54
Tabel 2. 9 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja ..... 60
Tabel 2. 10 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ..... 63
Tabel 2. 11 Capaian Kinerja Urusan Pangan ..... 66
Tabel 2. 12 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan ..... 67
Tabel 2. 13 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup ..... 68
Tabel 2. 14 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... 72
Tabel 2. 15 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..... 73
Tabel 2. 16 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..... 75
Tabel 2. 17 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan ..... 77
Tabel 2. 18 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika ..... 81
Tabel 2. 19 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM ..... 81
Tabel 2. 20 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal ..... 83
Tabel 2. 21 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga ..... 85
Tabel 2. 22 Capaian Kinerja Urusan Statistik ..... 86
Tabel 2. 23 Capaian Kinerja Urusan Persandian ..... 87
Tabel 2. 24 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan ..... 87
Tabel 2. 25 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan ..... 89
Tabel 2. 26 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan ..... 90
Tabel 2. 27 Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan ..... 91

Tabel 2. 28 Capaian Kinerja Pariwisata ..... 96
Tabel 2. 29 Capaian Kinerja Urusan Pertanian ..... 97
Tabel 2. 30 Capaian Kinerja Kehutanan ..... 102
Tabel 2. 31 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral..... 112
Tabel 2. 32 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan ..... 117
Tabel 2. 33 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian ..... 119
Tabel 2. 34 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi ..... 121
Tabel 2. 35 Capaian Kinerja Sekrateriat Daerah ..... 121
Tabel 2. 36 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD ..... 127
Tabel 2. 37 Capaian Kinerja Perencanaan ..... 128
Tabel 2. 39 Capaian Kinerja Kepegawaian ..... 156
Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan ..... 157
Tabel 2. 41 Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan ..... 158
Tabel 2. 42 Capaian Kinerja Pengawasan ..... 160
Tabel 2. 43 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum ..... 162

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2024

# BUKU II
# EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2022

## 2.1. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama

Capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja Utama Daerah | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2022 | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| 1 | Persentase penurunan konflik SARA | % | 15 | 15,38 | 102,53 | ● | Sekretariat Daerah |
| 2 | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 79 | 80,31 | 101,66 | ● | Sekretariat Daerah |
| 3 | Angka Kemiskinan | % | 10,49-10,30 | 10,98 | 95,54 | ▼ | Sekretariat Daerah |
| 4 | Indeks Gini | Angka | 0,35 | 0,366 | 95,63 | ▼ | Sekretariat Daerah |
| 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,75-5,69 | 5,57 | 96,87 | ▼ | Sekretariat Daerah |
| 6 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,20-5,20 | 5,31 | 126,43 | ● | Sekretariat Daerah |
| 7 | Inflasi | % | 3,0±1 | 5,63 | 53,29 | ▼ | Sekretariat Daerah |
| 8 | PDRB per kapita | Juta Rupiah | 39,56 | 42,15 | 106,55 | ● | Sekretariat Daerah |
| 9 | Indeks Williamson | Angka | 0,57 | 0,656 | 86,89 | ▼ | Sekretariat Daerah |
| 10 | Nilai Tukar Petani | Angka | 103,56 | 107,27 | 103,58 | ● | Sekretariat Daerah |
| 11 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | 72,49 | 72,79 | 100,41 | ● | Sekretariat Daerah |
| 12 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Angka | 92,18 | 92,83 | 100,71 | ● | Sekretariat Daerah |
| 13 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Angka | 67,52 | 67,53 | 100,01 | ● | Sekretariat Daerah |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
● : Tercapai ≥ 100%  ▼ :Perlu Upaya Keras < 100%  NA : Data Belum Tersedia

## 2.2. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Daerah

Capaian indikator kinerja daerah merupakan capaian indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggaran pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran pencapaian misi, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.

Tabel 2. 2
Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2022 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | |
| A | Aspek Kesejahteraan Masyarakat | | | | | |
| 1 | Angka Kemiskinan | % | 10,49-10,30 | 10,98 | 95,54 | ▼ |
| 2 | Indeks Gini | Angka | 0,35 | 0,366 | 95,63 | ▼ |
| 3 | Persentase penduduk miskin perkotaan | % | 9,38-9,22 | 10,02 | 93,61 | ▼ |
| 4 | Persentase penduduk miskin perdesaan | % | 11,65-11,45 | 10,98 | 106,10 | ● |
| 5 | Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah | Ribu Rupiah | 433,38 | NA | NA | NA |
| 6 | Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah | Angka | 61,5 | NA | NA | NA |
| 7 | Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan | % | 30 | NA | NA | NA |
| 8 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,75-5,69 | 5,57 | 103,23 | ● |
| 9 | Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu | % | 7,48 | NA | NA | NA |
| 10 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,20-5,20 | 5,31 | 126,43 | ● |
| 11 | Inflasi | % | 3,0±1 | 5,63 | 53,29 | ▼ |
| 12 | PDRB per kapita | Juta Rupiah | 41,46 | 42,15 | 101,66 | ● |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2022 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | |
| 13 | Indeks Williamson | Angka | 0,57 | 0,656 | 86,89 | ▼ |
| 14 | Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan | % | 3 | NA | NA | NA |
| 15 | Pertumbuhan sektor industri pengolahan | % | 2,93 | NA | NA | NA |
| 16 | Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa | % | 2,82 | 5,87 | 208,16 | ● |
| 17 | Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD | % | 15,3 | NA | NA | NA |
| 18 | Pertumbuhan nilai penanaman modal | % | 4,00-5,00 | 11,72 | 293-234,4 | ● |
| 19 | Nilai Tukar Petani | Angka | 103,56 | 107,27 | 103,58 | ● |
| 20 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | 72,58 | 72,79 | 100,29 | ● |
| 21 | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 7,96 | 7,93 | NA | NA |
| 22 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,88 | 12,81 | NA | NA |
| 23 | Angka Harapan Hidup | Tahun | 74,53 | 74,57 | 100,05 | ● |
| 24 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Angka | 92,18 | 92,83 | 100,71 | ● |
| B | Aspek Pelayanan Umum | | | | | |
| | URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| | PENDIDIKAN | | | | | |
| 1 | Disparitas APK SMA/SMK/SLB | % | 8,76 | 8,78 | 100,23 | ● |
| 2 | Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar | % | 83,8 | 83,83 | 100,04 | ● |
| 3 | Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB | Angka | 0,07 | 0,07 | 100,00 | ● |
| 4 | Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi Akademik | % | 99,15 | 99,85 | 100,71 | ● |
| | KESEHATAN | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2022 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | |
| 5 | Angka Kematian Ibu | 100.000/ KH | 88 | 84,6 | 104,02 | |
| 6 | Angka Kematian Balita | 1.000/KH | 10,45 | 8,2 | 127,44 | |
| 7 | Angka Kematian Bayi | 1.000/KH | 7,9 | 7,02 | 112,54 | |
| 8 | Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi | Angka | 0,2 | 0,23 | 115,00 | |
| 9 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan | % | 63 | 63 | 100,00 | |
| 10 | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi | % | 100 | 100 | 100,00 | |
| 11 | Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa | % | 74 | 85,08 | 114,97 | |
| 12 | Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular | % | 72 | 86,43 | 120,04 | |
| 13 | Persentase Capaian SPM di RSUD Dr. Moewardi | % | 83 | 86,03 | 103,65 | |
| 14 | Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | % | 89 | 89,87 | 100,98 | |
| 15 | Persentase Capaian SPM di RSUD Tugurejo | % | 90 | 91,11 | 101,23 | |
| 16 | Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Kelet Donorejo | % | 85 | 86,73 | 102,04 | |
| 17 | Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. Amino Gondohutomo | % | 100 | 99,62 | 99,62 | |
| 18 | Persentase Capaian SPM di RSJD Surakarta | % | 82 | 98,56 | 120,20 | |
| 19 | Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | % | 95 | 98,35 | 103,53 | |
| | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2022 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | |
| 20 | Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah | % | 13,3 | 14,21 | 106,84 | |
| 21 | Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik | % | 41,35 | 43,5 | 105,20 | |
| 22 | Persentase akses layak air minum Jawa Tengah serta akses sanitasi layak bagi masyarakat | % | 88,83 | 88,97 | 100,16 | |
| 23 | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik | % | 91,55 | 92,49 | 101,03 | |
| 24 | Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | % | 65,2 | 65,81 | 100,94 | |
| 25 | Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air | % | 54,36 | 54,43 | 100,13 | |
| 26 | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR | % | 76,04 | 77,19 | 101,51 | |
| | PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | |
| 27 | Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni | % | 24,76 | 58,54 | 236,43 | |
| 28 | Persentase penurunan kawasan kumuh | % | 25,27 | 15,75 | 137,67 | |
| | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | |
| 29 | Persentase penanganan gangguan tramtibum di Jawa Tengah | % | 100 | 100 | 100,00 | |
| 30 | Persentase kepatuhan hukum, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | % | 100 | 100 | 100,00 | |
| 31 | Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi | % | 100 | 100 | 100,00 | |
| 32 | Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana | % | 10 | 10,35 | 103,5 | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2022 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | |
| 33 | Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB | % | 3 | 3,33 | 111,00 | |
| 34 | Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi | % | 100 | 100 | 100,00 | |
| | SOSIAL | | | | | |
| 35 | Persentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | % | 1,9 | 5,55 | 292,11 | |
| 36 | Persentase peningkatan kapasitas bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | % | 25,74 | 25,74 | 100,00 | |
| | URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| | TENAGA KERJA | | | | | |
| 37 | Persentase pengangguran yang ditangani | % | 9,86 | 28,02 | 284,18 | |
| 38 | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | % | 24,24 | 70,52 | 290,92 | |
| 39 | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan) | % | 90,56 | 90,83 | 100,30 | |
| 40 | Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Juta Rp) | Juta Rupiah | 29,39 | 57,11 | 194,32 | |
| 41 | Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten | % | 5,68 | 12,2 | 214,79 | |
| 42 | Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan | % | 91,07 | 88,1 | 103,37 | |
| 43 | Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah | % | 28,57 | 34 | 119,01 | |
| | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | |
| 44 | Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak | Per 100.000 | 8,15 | 7,47 | 109,10 | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2022 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | |
| 45 | Persentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak | % | 91,43 | 100 | 109,37 | |
| 46 | Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di pemerintah daerah | % | 34,27 | 36,11 | 105,37 | |
| 47 | Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak | % | 60 | 71,42 | 119,03 | |
| 48 | Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG | % | 80 | 80 | 100,00 | |
| 49 | Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Per 100.000 | 8,05 | 4,2 | 191,67 | |
| 50 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Angka | 72,62 | 73,78 | 101,59 | |
| | PANGAN | | | | | |
| 51 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | Angka | 88,44 | 94,4 | 106,74 | |
| 52 | Angka Konsumsi Energi | Kkal/kapita/hari | 2.100 | 2018 | 96,10 | |
| | PERTANAHAN | | | | | |
| 53 | Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | % | 100 | 321,89 | 321,89 | |
| | LINGKUNGAN HIDUP | | | | | |
| 54 | Indeks Pencemaran Air | % | 3,45 | 3,17 | 108,83 | |
| 55 | Indeks Pencemar SO2 dan NO2 | % | 0,2 | 0,2 | 100,00 | |
| | ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | |
| 56 | Persentase penduduk tertib administrasi kependudukan | % | 100 | 100 | 100,00 | |
| | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | |
| 57 | Persentase Peningkatan Desa Mandiri | % | 50,34 | 82,27 | 163,43 | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2022 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | |
| | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | |
| 58 | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) | Angka | 2,2 | 2,15 | 102,27 | ● |
| 59 | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR | Angka | 64,76 | 65,18 | 100,65 | ● |
| 60 | Indeks Pembangunan Keluarga | Angka | 54,38 | 56,1 | 103,16 | ● |
| | PERHUBUNGAN | | | | | |
| 61 | Persentase layanan jaringan distribusi transportasi | % | 47,38 | 54,98 | 116,04 | ● |
| 62 | Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi | % | 23,49 | 29,19 | 124,27 | ● |
| 63 | Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal | % | 46,67 | 46,67 | 100,00 | ● |
| | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | |
| 64 | Indeks Domain Tata Kelola SPBE | Angka | 3,83 | 3,7 | 96,61 | ▼ |
| 65 | Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE | Angka | 3,53 | 3,5 | 99,15 | ▼ |
| 66 | Indeks Domain Layanan SPBE | Angka | 4,17 | 4,62 | 110,79 | ● |
| | KOPERASI DAN UKM | | | | | |
| 67 | Persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah | % | 9,88 | 9,94 | 100,61 | ● |
| 68 | Persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah | % | 21,1 | 21,19 | 100,43 | ● |
| | PENANAMAN MODAL | | | | | |
| 69 | Persentase Realisasi PMA dan PMDN | % | 100 | 104,38 | 104,38 | ● |
| 70 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | % | 90 | 94,28 | 104,76 | ● |
| | KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2022 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | |
| 71 | Indeks Pembangunan Pemuda | % | 55,15 | 54,5 | 98,2 | ▼ |
| 72 | Indeks Pembangunan Keolahragaan | % | 0,63 | 0,63 | 100 | ● |
| | STATISTIK | | | | | |
| 73 | Laju Pemanfaatan Data Sektoral | % | 81,76 | 85,7 | 104,82 | ● |
| | PERSANDIAN | | | | | |
| 74 | Indeks Keamanan Informasi (KAMI) | Level | 3 | 3 | 100,00 | ● |
| | KEBUDAYAAN | | | | | |
| 75 | Persentase Jenis seni budaya yang terlayani | % | 6,2 | 6,2 | 100,00 | ● |
| | PERPUSTAKAAN | | | | | |
| 76 | Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan | % | 72,5 | 83,56 | 115,26 | ● |
| | KEARSIPAN | | | | | |
| 77 | Nilai Pengelolaan Kearsipan LKD Provinsi | Angka | 89,82 | 91,01 | 101,32 | ● |
| | URUSAN PILIHAN | | | | | |
| | KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | |
| 78 | Produksi Perikanan | Ton | 1.018.830,92 | 913011,18 | 89,61 | ▼ |
| 79 | Angka Konsumsi Ikan | kg/kapita/tahun | 38,18 | 38,18 | 100 | |
| | PARIWISATA | | | | | |
| 80 | Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata | % | 3,23 | 3,39 | 104,95 | ● |
| | PERTANIAN | | | | | |
| 81 | Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan | % | 11,6 | 9,94 | 85,69 | ▼ |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2022 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | |
| 82 | Persentase kenaikan produksi daging, susu, telur | % | 3,92 | 4,31 | 109,95 | |
| | KEHUTANAN | | | | | |
| 83 | Kontribusi subsektor Kehutanan terhadap PDRB | % | 0,43 | 0,43 | 100 | |
| 84 | Luas Tutupan Lahan (LTV) | $km^2$ | 10.223,65 | 10224,6 | 100,01 | |
| 85 | Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan | % | 0,47 | -3,79 | -806,38 | |
| | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | |
| 86 | Persentase izin usaha pertambangan operasi produksi melaksanakan *good mining practice* (GMP) | % | 43,5 | 80,32 | 184,64 | |
| 87 | Indeks ketersediaan air tanah | Angka | 3,05 | 3,67 | 120,33 | |
| 88 | Rasio ketersediaan daya listrik | Angka | 1 | 1,45 | 145,00 | |
| 89 | Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi | % | 14,85 | 15,76 | 106,13 | |
| | PERDAGANGAN | | | | | |
| 90 | Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan | % | 2,82 | 4,32 | 153,19 | |
| | PERINDUSTRIAN | | | | | |
| 91 | Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Industri | % | 2,93 | 3,88 | 132,42 | |
| | TRANSMIGRASI | | | | | |
| 92 | Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi | % | 3,18 | 5,28 | 166,04 | |
| | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | |
| | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | |
| 93 | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah | % | 85 | 86,51 | 101,78 | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2022 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | |
| 94 | Persentase Kebijakan yang Efektif | % | 80 | 80,43 | 100,54 | |
| 95 | Efektifitas kebijakan perekonomian daerah | % | 76 | 76,92 | 101,21 | |
| 96 | Persentase efektivitas penyelesaian masalah hukum | % | 95 | 100 | 105,26 | |
| 97 | Persentase efektivitas produk hukum daerah | % | 95 | 100 | 105,26 | |
| 98 | Persentase peningkatan kualitas layanan keagamaan | % | 40 | 42,86 | 107,15 | |
| 99 | Efektivitas kebijakan bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah | % | 90 | 100 | 111,11 | |
| 100 | Ketercapaian laba BUMD | % | 70 | 98,17 | 140,24 | |
| 101 | Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang SDA | % | 80 | 82,61 | 103,26 | |
| 102 | Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat | % | 85 | 85 | 100,00 | |
| 103 | Efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah | % | 88 | 91,97 | 104,51 | |
| 104 | Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa | % | 85 | 92,15 | 108,41 | |
| 105 | Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas | % | 60,98 | 65,85 | 107,99 | |
| 106 | Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B keatas | % | 83,67 | 91,83 | 109,75 | |
| 107 | Persentase OPD dengan Nilai Kematangan Organisasi dalam ketegori minimal sedang | % | 75,61 | 100 | 132,26 | |
| 108 | Nilai IKM layanan Biro Umum | % | 78 | 82,22 | 105,41 | |
| | SEKRETARIAT DPRD | | | | | |
| 109 | Indeks Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah. | % | 88,5 | 90,33 | 102,07 | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2022 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | |
| | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | |
| | PERENCANAAN | | | | | |
| 110 | Persentase perencanaan pembangunan yang berkualitas | % | 90 | 90 | 100,00 | |
| | KEUANGAN | | | | | |
| 111 | Persentase peningkatan pajak daerah | % | 10,58 | 4,58 | 43,29 | |
| 112 | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi daerah dan Pendapatan lain yang sah | % | 2,26 | 2,65 | 117,26 | |
| 113 | Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan | % | 100 | 100 | 100,00 | |
| 114 | Persentase tata kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan | % | 70 | 77,2 | 110,29 | |
| | KEPEGAWAIAN | | | | | |
| 115 | Persentase distribusi penempatan PNS dalam Jabatan | % | 100 | 100 | 100,00 | |
| 116 | Persentase pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi | % | 100 | 100 | 100,00 | |
| | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | |
| 117 | Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi | % | 35,92 | 38,19 | 106,32 | |
| 118 | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya | % | 25 | 50,97 | 203,88 | |
| | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| 119 | Indeks Inovasi Daerah | Nilai | 67 | 71,32 | 106,45 | |
| 120 | Indeks Daya Saing Daerah | Nilai | 4 | 4,12 | 103,00 | |
| | PENGELOLAAN PENGHUBUNG | | | | | |
| 121 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | % | 84 | 85 | 101,19 | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2022 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | |
| | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | |
| 122 | Level Kapabilitas APIP | Level | 3 | 3 | 100,00 | |
| 123 | Nilai Maturitas SPIP | Nilai | 3,18 | 3,26 | 102,51 | |
| | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | |
| 124 | Indeks Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Nilai | 2,97 | 3,75 | 126,26 | |
| 125 | Indeks Ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Nilai | 3,12 | 4,1 | 131,41 | |
| C | Aspek Daya Saing | | | | | |
| 1 | Persentase penurunan konflik SARA | % | 15 | 15,38 | 102,53 | |
| 2 | Indeks Toleransi | Angka | 75,9 | 73,68 | 97,08 | |
| 3 | Persentase tindak pidana yang tertangani | % | 87 | 92,15 | 105,92 | |
| 4 | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 79 | 80,31 | 101,66 | |
| 5 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 86 | 86,5 | 100,58 | |
| 6 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Angka | 3,27 | 3,98 | 121,71 | |
| 7 | Nilai SAKIP | Angka | 84 | NA | NA | NA |
| 8 | Indeks Persepsi Anti Korupsi | Angka | 3,49 | 3,42 | 97,99 | |
| 9 | Opini BPK | Opini | WTP | NA | NA | NA |
| 10 | Nilai Kematangan Organisasi Daerah | Angka | 38 | 40,55 | 106,71 | |
| 11 | Indeks Sistem Merit | Angka | 0,72 | 0,82 | 113,89 | |
| 12 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Angka | 67,52 | 67,53 | 100,01 | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Tahun 2022 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | |
| 13 | Indeks Kualitas Air | Angka | 50,6 | 50,63 | 100,06 | ● |
| 14 | Indeks Kualitas Udara | Angka | 84,95 | 85,14 | 100,22 | ● |
| 15 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Angka | 51,2 | 41,86 | 81,76 | ▼ |
| 16 | Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana | Angka | 3,56 | 3,65 | 102,53 | ● |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Capaian indikator kinerja daerah yang berjumlah 165 indikator terdapat 137 indikator telah tercapai, 11 belum rilis data dan 17 indikator tidak mencapai target Tahun 2022 yaitu:

1. Angka Kemiskinan dikarenakan ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama periode Maret 2022 - September 2022 antara lain Pemerintah menerapkan kebijakan menaikkan harga BBM mulai tanggal 3 September 2022 sebagai akibat adanya kenaikan harga minyak dunia akibat perang Ukraina-Rusia. Kenaikan harga BBM memberikan dampak secara tak langsung pada inflasi berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Selama periode Maret 2022 - September 2022, mengalami inflasi sebesar 3,87 persen. Dampak ke kemiskinan cukup serius dikarenakan semakin tinggi laju inflasi, khususnya inflasi pangan akan semakin tinggi garis kemiskinan. Inflasi bisa menaikkan garis kemiskinan karena harga barang dan jasa menjadi salah satu penentu tolok ukur garis kemiskinan. Kenaikan inflasi akan diikuti dengan penurunan daya beli jika tidak diikuti kenaikan pendapatan, terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin. Mengingat Garis kemiskinan diukur dengan pendekatan pengeluaran atau konsumsi, maka Garis Kemiskinan sangat sensitif terhadap perubahan harga.
2. Indeks Gini dikarenakan pada September Tahun 2022 menurun (membaik) sebesar 0,002 poin dari 0,368 pada Tahun 2021 menjadi sebesar 0,366 Tahun 2022. Rinciannya indeks gini di perkotaan sebesar 0,392 (turun 0,001) dan indeks gini di perdesaan sebesar 0,326 (naik 0,002). Fenomena peningkatan ketimpangan yang tinggi di Kawasan perkotaan mencerminkan bahwa golongan masyarakat berpenghasilan rendah lebih terpapar dampak pelemahan ekonomi yang lebih besar dibandingkan golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Capaian indeks gini Provinsi Jawa Tengah merupakan yang terendah sepulau jawa setelah Provinsi Jawa Timur sebesar 0,365 dan lebih baik dari nasional sebesar 0,381. Upaya dilakukan untuk menurunkan indeks gini di Jawa Tengah

antara lain dengan meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro kecil melalui program Kredit Usaha Rakyat dan Program Kredit Mitra Jateng 25, pendidikan vokasi, pengembangan wirausaha di masyarakat, pengembangan sektor industri pengolahan dan pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja, mempermudah layanan izin usaha melalui aplikasi Online Single Submission (OSS).

3. Persentase penduduk miskin perkotaan dikarenakan masih terdapat efek memar (*scarring effect*) dampak dari pandemic covid-19 yang efeknya lebih terasa pada penduduk miskin di perkotaan. Selain itu kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM mulai tanggal 3 September 2022 sebagai akibat adanya kenaikan harga minyak dunia akibat perang Ukraina-Rusia memberikan dampak secara tak langsung pada inflasi berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Penduduk miskin di perkotaan lebih sensitive akan hal tersebut dikarenakan intensitas aktivitas perekonomian dan mobilitas penduduk di perkotaan yang lebih tinggi, khususnya pada sektor informal dan UMKM, menyebabkan dampak Covid-19 dan kenaikan harga terhadap kemiskinan di perkotaan lebih tinggi. Di sisi lain, wilayah perkotaan bukan basis produksi komoditi pangan, sehingga inflasi pangan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.
4. Inflasi dikarenakan adanya andil inflasi dari kenaikkan harga BBM bersubsidi yaitu Pertalite dan Solar, akibat gejolak ekonomi global perang Rusia-Ukraina serta kenaikkan harga beras, telur ayam ras dan bawang merah akibat curah hujan yg tinggi mengakibatkan penurunan produktivitas. Upaya yg telah dilakukan Pemprov Jateng dalam pengendalian inflasi adalah penanganan pada dampak inflasi (Program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat) dan pada upaya pengendalian inflasi (Menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi antar daerah, dan optimalisasi peran TPID).
5. Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. Amino Gondohutomo dikarenakan beberapa faktor diantaranya :
   a. Pada Instalasi Rawat Jalan
      - Pada indikator jam buka pelayanan sesuai ketentuan, dikarenakan DPJP melakukan kegiatan visite terlebih dahulu & menghadiri jadwal program ECT

   b. Pada Instalasi Rawat Inap
      - Indikator Kejadian re-admission pasien gangguan jiwa tidak kembali dalam perawatan dalam waktu ≤1 bulan. Dikarenakan beberapa factor yaitu penderita tidak minum obat, tidak control ke dokter secara teratur, kurangnya dukungan dari keluarga.
      - Jam visite dokter spesialis, dikarenakan keterbatasan jumlah poliklinik rawat jalan mengakibatkan banyaknya pasien yg dilayani sehingga jam selesai pelayanan melebihi dari yang ditentukan berakibat pada jam visite dokter terlambat.
   c. Pada Instalasi Pelayanan Pengelolaan Limbah
      - Indikator baku mutu limbah, karena terdapat 1 indicator yang tidak memenuhi syarat yakni mikrobiologi atau bakteriologis dalam air limbah melebihi ambang batas yang telah ditentukan
6. Angka Konsumsi Energi dikarenakan capaian angka konsumsi energi beberapa kelompok pangan dibawah AKE ideal diantaranya adalah kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak dan

kacang-kacangan.

7. Indeks Domain Tata Kelola SPBE dikarenakan belum dinilainya data dukung Pergub dan dokumen arsitektur yang berpengaruh pada Indikator Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE, Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
8. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE dikarenakan belum dinilainya data dukung Pergub dan dokumen arsitektur yang juga berpengaruh pada pada Indikator Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data.
9. Indeks Pembangunan Pemuda dikarenakan capaian Tahun 2022 sebesar 54,5% merupakan capaian Tahun 2021 (Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2022 belum dirilis oleh pusat).
10. Produksi Perikanan dikarenakan:
    a. Kondisi sarpras pelabuhan yang overcapacity;
    b. Penurunan sumberdaya ikan; dan
    c. Sebagian besar nelayan kecil belum menerapkan teknologi
11. Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dikarenakan belum optimalnya capaian kinerja indikator tersebut disebabkan adanya penurunan luas tanam dan produktivitas yang diakibatkan oleh serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan bencana banjir. Namun demikian telah dilakukan beberapa upaya untuk mengatasinya antara lain penerapan kebijakan Indeks Pertanaman (IP) 400 untuk komoditas padi, yaitu tanam 4 kali dalam 1 tahun pada lahan yang sama; perlindungan petani melalui fasilitasi premi asuransi usaha tani; dan penerapan pengendalian hama terpadu.
12. Kontribusi subsektor Kehutanan terhadap PDRB dikarenakan pada tahun 2022 hasil tebangan kayu bulat dan hasil hutan kayu lebih rendah dari tahun sebelumnya serta harga kayu yang jauh lebih rendah
13. Persentase peningkatan pajak daerah dikarenakan ketidakmampuan dan/atau ketidakmauan wajib pajak membayar tepat waktu sebelum jatuh tempo serta kelangkaan pasokan chip semikonduktor yang berdampak pada stok kendaraan bermotor baru dan penjualan kendaraan bermotor turun drastis.
14. Indeks Persepsi Anti Korupsi dikarenakan penghitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) semula dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia sejak tahun 2021 dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melalui Survey Penilaian Integritas (SPI). Terdapat perbedaan metode penilaian dimana KemenPAN-RB melakukan survey kepada 100 orang pejabat struktural secara acak di lingkungan Pemprov Jateng. Sedangkan KPK melakukan survey kepada Expert (akademisi, pengusaha), Penerima Manfaat layanan, dan Internal Pegawai Lingkup Pemprov Jateng.
15. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dikarenakan penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) saat ini merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 27 tahun 2021, terdapat perubahan kriteria dimana kelas penutupan lahan pertanian lahan kering campur tidak masuk dalam formulasi perhitungan IKTL. Kelas penutupan lahan ini merupakan areal hutan rakyat yang menjadi kewenangan Provinsi untuk melakukan intervensi.

## 2.3. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Program

### A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

### 1. Urusan Pendidikan

Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | | | |
| | APK SLB | % | 69,1 | 89,16 | 129,03 | | Bidang Pembinaan Diksus |
| | APK SLB Cabdin I | % | 164,88 | 143,10 | 86,79 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | APK SLB Cabdin II | % | 55,45 | 110,37 | 199,04 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | APK SLB Cabdin III | % | 71,99 | 122,07 | 169,57 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | APK SLB Cabdin IV | % | 63,65 | 1142,17 | 1794,45 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |
| | APK SLB Cabdin IX | % | 64,7 | 69,56 | 107,51 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX |
| | APK SLB Cabdin V | % | 120,05 | 134,05 | 111,66 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | APK SLB Cabdin VI | % | 55,45 | 73,33 | 132,24 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI |
| | APK SLB Cabdin VII | % | 188,11 | 195,79 | 104,08 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |
| | APK SLB Cabdin VIII | % | 67,26 | 57,64 | 85,70 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | APK SLB Cabdin X | % | 49,8 | 67,98 | 136,51 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | APK SLB Cabdin XI | % | 30,1 | 61,83 | 205,42 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | APK SLB Cabdin XII | % | 48,77 | 51,34 | 105,27 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | APK SLB Cabdin XIII | % | 80,65 | 96,29 | 119,39 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | APK SMA | % | 27,3 | 29,14 | 106,74 | | Bidang Pembinaan SMA |
| | APK SMA Cabdin I | % | 34,63 | 38,64 | 111,58 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | APK SMA Cabdin II | % | 30,14 | 32,15 | 106,67 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | APK SMA Cabdin III | % | 28,51 | 28,80 | 101,02 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | APK SMA Cabdin IV | % | 25,45 | 25,69 | 100,94 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |
| | APK SMA Cabdin IX | % | 23,06 | 24,80 | 107,55 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX |
| | APK SMA Cabdin V | % | 34,23 | 35,07 | 102,45 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | APK SMA Cabdin VI | % | 25,87 | 25,98 | 100,43 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI |
| | APK SMA Cabdin VII | % | 48,67 | 50,27 | 103,29 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |
| | APK SMA Cabdin VIII | % | 29,71 | 29,06 | 97,81 | | CABANG DINAS |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | | | | | | | PENDIDIKAN VIII |
| | APK SMA Cabdin X | % | 23,11 | 23,64 | 102,29 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | APK SMA Cabdin XI | % | 29,8 | 30,50 | 102,35 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | APK SMA Cabdin XII | % | 21,8 | 21,91 | 100,50 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | APK SMA Cabdin XIII | % | 28,75 | 30,42 | 105,81 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | APK SMK | % | 49,4 | 52,59 | 106,46 | | Bidang Pembinaan SMK |
| | APK SMK Cabdin I | % | 49,83 | 50,29 | 100,92 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | APK SMK Cabdin II | % | 35,5 | 43,15 | 121,55 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | APK SMK CAbdin III | % | 41,82 | 44,92 | 107,41 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | APK SMK Cabdin IV | % | 44,47 | 45,16 | 101,55 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |
| | APK SMK Cabdin IX | % | 48,2 | 54,40 | 112,86 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX |
| | APK SMK Cabdin V | % | 55,61 | 56,10 | 100,88 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | APK SMK Cabdin VI | % | 52,91 | 52,25 | 98,75 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI |
| | APK SMK Cabdin VII | % | 64,5 | 64,17 | 99,49 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | APK SMK Cabdin VIII | % | 50,72 | 47,91 | 94,46 | ▼ | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |
| | APK SMK Cabdin X | % | 53,45 | 53,97 | 100,97 | ● | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | APK SMK Cabdin XI | % | 51,64 | 56,71 | 109,82 | ● | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | APK SMK Cabdin XII | % | 57,4 | 58,97 | 102,74 | ● | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | APK SMK Cabdin XIII | % | 52,89 | 57,59 | 108,89 | ● | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | Persentase guru SLB memenuhi kualifikasi akademik | % | 100 | 99,62 | 99,62 | ▼ | Bidang Ketenagaan Dikbud |
| | Persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik | % | 99,97 | 99,93 | 99,96 | ▼ | Bidang Ketenagaan Dikbud |
| | Persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik | % | 99,94 | 99,89 | 99,95 | ▼ | Bidang Ketenagaan Dikbud |
| | Persentase prasarana sarana SLB Cabdin II sesuai standar | % | 98,63 | 98,65 | 100,02 | ● | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar | % | 87,86 | 87,32 | 99,39 | ▼ | Bidang Ketenagaan Diksus |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin I | % | 89,85 | 90,02 | 100,19 | ● | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin III | % | 85,8 | 86,67 | 101,01 | ● | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IV | % | 80,91 | 84,77 | 104,77 | ● | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IX | % | 79,2 | 83,02 | 104,82 | ● | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin V | % | 94,57 | 92,57 | 97,89 | ▼ | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VI | % | 85,4 | 86,64 | 101,45 | ● | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VII | % | 87,23 | 83,97 | 96,26 | ▼ | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VIII | % | 80,97 | 85,97 | 106,18 | ● | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin X | % | 89,13 | 87,97 | 98,70 | ▼ | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XI | % | 92,86 | 87,14 | 93,84 | ▼ | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XII | % | 92,19 | 85,84 | 93,11 | ▼ | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XIII | % | 81,1 | 80,80 | 99,63 | ▼ | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | Persentase prasarana sarana SMA Cabdin II sesuai standar | % | 73,5 | 76,71 | 104,37 | ● | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar | % | 72,5 | 74,11 | 102,22 | ● | Bidang Pembinaan SMA |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin I | % | 76,56 | 76,61 | 100,07 | ● | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin III | % | 66,85 | 72,38 | 108,27 | ● | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IV | % | 68,88 | 68,51 | 99,46 | ▼ | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IX | % | 77,76 | 80,91 | 104,05 | ● | CABANG DINAS |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | | | | | | | PENDIDIKAN IX |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin V | % | 67,8 | 71,66 | 105,69 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VI | % | 76,87 | 76,87 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VII | % | 74,53 | 78,35 | 105,13 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VIII | % | 76,12 | 75,94 | 99,76 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin X | % | 99,69 | 64,90 | 65,10 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XI | % | 77,8 | 76,63 | 98,50 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XII | % | 71,95 | 66,93 | 93,02 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XIII | % | 75,25 | 73,78 | 98,05 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | Persentase prasarana sarana SMK Cabdin II sesuai standar | % | 87,9 | 87,64 | 99,70 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar | % | 88,9 | 89,36 | 100,52 | | Bidang Pembinaan SMK |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin I | % | 88,8 | 89,10 | 100,34 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin III | % | 87,3 | 90,13 | 103,24 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin IV | % | 85,11 | 86,43 | 101,55 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin IX | % | 89,95 | 89,90 | 99,94 | ▼ | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin V | % | 89,80 | 89,72 | 99,91 | ▼ | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VI | % | 88,21 | 89,55 | 101,52 | ● | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VII | % | 92,25 | 93,28 | 101,12 | ● | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VIII | % | 88,95 | 88,41 | 99,39 | ▼ | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin X | % | 92,5 | 88,94 | 96,15 | ▼ | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XI | % | 88,75 | 89,49 | 100,83 | ● | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XII | % | 90,3 | 90,91 | 100,68 | ● | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XIII | % | 84,15 | 85,14 | 101,18 | ● | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | Persentase SMA Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT | % | 85,9 | 96,62 | 112,48 | ● | Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A |
| | Persentase SMK Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT | % | 75,85 | 89,07 | 117,43 | ● | Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang | % | 18,46 | 13,46 | 72,91 | | Bidang Pembinaan Diksus |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I | % | 0,77 | 3,85 | 500,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II | % | 0,77 | 0,00 | 0,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III | % | 0,77 | 0,00 | 0,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV | % | 0,77 | 0,00 | 0,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX | % | 2,69 | 3,46 | 128,62 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V | % | 0,77 | 1,92 | 249,35 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI | % | 0,77 | 0,00 | 0,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII | % | 3,85 | 2,69 | 69,87 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |
| | Prosentase keikutsertaan | % | 3,46 | 0,77 | 22,25 | | CABANG DINAS |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII | | | | | | PENDIDIKAN VIII |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X | % | 1,15 | 0,76 | 66,09 | ▼ | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI | % | 0,77 | 0,00 | 0,00 | ▼ | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII | % | 1,15 | 0,00 | 0,00 | ▼ | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII | % | 0,77 | 0 | 0,00 | ▼ | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang | % | 8,44 | 11,02 | 130,57 | ● | Bidang Pembinaan SMA |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I | % | 3,1 | 2,41 | 77,74 | ▼ | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II | % | 0,6 | 0,69 | 115,00 | ● | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III | % | 0,17 | 1,03 | 605,88 | ● | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA | % | 0,17 | 0,00 | 0,00 | ▼ | CABANG DINAS |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV | | | | | | PENDIDIKAN IV |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX | % | 0,43 | 0,86 | 200,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V | % | 0,43 | 0,60 | 139,53 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI | % | 0,17 | 0,00 | 0,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII | % | 0,86 | 1,89 | 219,77 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII | % | 0,69 | 1,89 | 273,91 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X | % | 0,43 | 0,60 | 139,53 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI | % | 0,86 | 0,26 | 30,23 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII | % | 0,34 | 0,00 | 0,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA | % | 0,17 | 0,78 | 458,82 | | CABANG DINAS |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII | | | | | | PENDIDIKAN XIII |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang | % | 20,04 | 28,82 | 143,81 | | Bidang Pembinaan SMK |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I | % | 4,01 | 4,20 | 104,74 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II | % | 0,76 | 0,00 | 0,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III | % | 2,86 | 7,60 | 265,73 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV | % | 0,38 | 0,00 | 0,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX | % | 1,15 | 5,34 | 464,35 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V | % | 1,53 | 0,95 | 62,09 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI | % | 0,95 | 0,38 | 40,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang | % | 2,29 | 3,81 | 166,38 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | berjenjang Cabdin VII | | | | | | |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII | % | 2,1 | 1,91 | 90,95 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X | % | 0,95 | 3,43 | 361,05 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI | % | 1,34 | 0,00 | 0,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII | % | 1,34 | 0,00 | 0,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII | % | 0,38 | 1,14 | 300,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | | | |
| | Persentase serapan kurikulum SLB | % | 98,75 | 100,00 | 101,27 | | Bidang Pembinaan Diksus |
| | Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin I | % | 100 | 100 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin II | % | 100 | 100 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin III | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IV | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | | | | | | | PENDIDIKAN IV |
| | Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IX | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX |
| | Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin V | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VI | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI |
| | Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VII | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |
| | Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VIII | % | 100 | 100,00 | 100 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |
| | Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin X | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin I | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin II | % | 100 | 99,98 | 99,98 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin III | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IV | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IX | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin V | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VI | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | | | | | | | PENDIDIKAN VI |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VII | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VIII | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin X | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XI | % | 100 | 99,95 | 99,95 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XII | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin I | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin II | % | 100 | 100 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin III | % | 99,69 | 100,00 | 100,31 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IV | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |
| | Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IX | % | 100 | 100 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX |
| | Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin V | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VI | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI |
| | Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VII | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VIII | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |
| | Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin X | % | 100 | 99,93 | 99,93 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | Prersentase serapan kurikulum SMA | % | 100 | 99,98 | 99,98 | | Bidang Pembinaan SMA |
| | Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XI | % | 100 | 100,00 | 100 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XII | % | 100 | 100,00 | 100 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XIII | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | Presentase serapan kurikulum SMA Cabdin XIII | % | 100 | 99,97 | 99,97 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XI | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XIII | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | Prosentase serapan kurikulum SMK Cabdin XII | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | Prsentase serapan kurikulum SMK | % | 99,3 | 100,00 | 100,70 | | Bidang Pembinaan SMK |
| PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | | | | |
| | Rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB | % | 0,26 | 0,87 | 334,62 | | Bidang Ketenagaan Dikbud |
| | Rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA | % | 0,07 | 1,81 | 2.585,71 | | Bidang Ketenagaan Dikbud |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK | % | 0,07 | 1,92 | 2.742,86 | ● | Bidang Ketenagaan Dikbud |
| PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | | | | | | |
| | Persentase Ijin Pendidikan Khusus yang disetujui | % | 100 | 100,00 | 100,00 | ● | Bidang Pembinaan Diksus |
| | Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMA yang diterbitkan | % | 100 | 110,00 | 110,00 | ● | Bidang Pembinaan SMA |
| | Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMK yang diterbitkan | % | 95 | 96,15 | 101,21 | ● | Bidang Pembinaan SMK |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 179 indikator kinerja dengan 56 indikator tidak mencapai target Tahun 2022 yang dikarenakan antara lain.

1. Indikator APK SLB (Cabdin 1, 6, 8); APK SMA (Cabdin 8); APK SMK (Cabdin 6, 7, 8) dikarenakan perubahan metode perhitungan/penentuan *baseline* (*cut off* siswa);
2. Indikator persentase guru SMA, SMK, SLB memenuhi kualifikasi akademik dikarenakan pasca peralihan guru PPPD masih banyak yang belum berkualifikasi S1/D4, namun motivasi untuk memperoleh gelar pendidikan S1/D4 rendah karena mengingat faktor usia (mendekati masa purna);
3. Indikator persentase prasarana sarana SLB (Induk, Cabdin 5, 7, 10, 11, 12, 13); SMA (Cabdin 4, 8, 10, 11, 12, 13); SMK (Cabdin 2, 5, 8, 9, 10) sesuai standar dikarenakan penurunan porsi APBD & DAK fisik untuk pengadaan sarpras;
4. Indikator prosentase keikutsertaan peserta didik SLB (Induk, Cabdin 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12); SMA (Cabdin 1, 4, 6, 11, 12); SMK (Cabdin 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12) dalam even lomba nasional yang berjenjang dikarenakan belum dilaksanakannya perlombaan tingkat nasional;
5. Indikator persentase serapan kurikulum SMA (Induk, Cabdin 2, 11, 13); SMK (Cabdin 9, 10) dikarenakan terdapat siswa yang tidak mengikuti ujian dikarenakan meninggal / tidak melanjutkan sekolah;

2. Kesehatan

Kinerja penyelenggaran urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 4
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| | Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) | % | 0 | 0 | NA | NA | RSJD Dr. RM. Soedjarwadi |
| | Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) | % | 100 | 100 | 100,00 | | RSJD Surakarta |
| | Persentase Kabupaten/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif | % | 85,71 | 100 | 116,67 | | Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A |
| | Persentase Kabupaten/Kota dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga baik | % | 85 | 85 | 100,00 | | Bidang Kesehatan Masyarakat |
| | Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan | % | 57,14 | 57,14 | 100,00 | | Bidang Kesehatan Masyarakat |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Cakupan Kesehatan Balita | | | | | | |
| | Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Bayi | % | 57,14 | 57,14 | 100,00 | | Bidang Kesehatan Masyarakat |
| | Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Ibu | % | 22,86 | 57,14 | 249,96 | | Bidang Kesehatan Masyarakat |
| | Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa | % | 74 | 74 | 100,00 | | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| | Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam | % | 100 | 100 | 100,00 | | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| | Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang |
| | Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa |
| | Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang |
| | Persentase Kabupaten/Kota | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai Kesehatan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam | | | | | | Masyarakat Wilayah Klaten |
| | Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan KLB/Bencana < 24 Jam | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati |
| | Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa | % | 49 | 49 | 100,00 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa |
| | Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Pati | % | 71,42 | 71,42 | 100,00 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati |
| | Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang | % | 42,85 | 71,42 | 166,67 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang |
| | Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Pati | % | 71,42 | 71,42 | 100,00 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati |
| | Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian | % | 71,4 | 71,4 | 100,00 | | Balai Kesehatan Masyarakat |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa | | | | | | Wilayah Ambarawa |
| | Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten | % | 71,42 | 71,42 | 100,00 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten |
| | Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas magelang | % | 57,14 | 71,42 | 124,99 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang |
| | Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang | % | 71,42 | 71,42 | 100,00 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang |
| | Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten | % | 71,42 | 71,42 | 100,00 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten |
| | Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang | % | 71,42 | 71,42 | 100,00 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang |
| | Persentase ketersediaan Informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan | % | 100 | 100 | 100,00 | | Bidang Sumber Daya Kesehatan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase ketersediaan obat dan vaksin | % | 70 | 70 | 100,00 | | Bidang Sumber Daya Kesehatan |
| | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Ambarawa | % | 91 | 91 | 100,00 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa |
| | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Klaten | % | 91 | 91 | 100,00 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten |
| | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Magelang | % | 91 | 91 | 100,00 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang |
| | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Pati | % | 91 | 91 | 100,00 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati |
| | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Semarang | % | 91,3 | 93,75 | 102,68 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang |
| | Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu | % | 42,85 | 42,86 | 100,02 | | Bidang Pelayanan Kesehatan |
| | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | % | 90 | 98,41 | 109,34 | | RSJD Dr. Amino Gondohutomo |
| | Persentase Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | % | 100 | 100 | 100,00 | | RSUD Dr. Moewardi |
| | Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan | % | 90 | 90,00 | 100,00 | | RSJD Surakarta |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | upaya kesehatan masyarakat | | | | | | |
| | Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | % | 85 | 100 | 117,65 | | RSUD Tugurejo |
| | Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | % | 100 | 100 | 100,00 | | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |
| | Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | % | 100 | 100 | 100,00 | | RSUD Kelet Donorejo |
| | Prosentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit menular | % | 60 | 65 | 108,33 | | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| | Prosentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan | Kabupaten/Kota | 35 | 35 | 100,00 | | Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A |
| | Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes PAK | Sertifikat | 4 | 4 | 100,00 | | Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A |
| | Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di BKIM | % | 66,7 | 66,7 | 100,00 | | Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A |
| | Prosentase pemenuhan upaya kesehatan | % | 100 | 100 | 100 | | RSJD Dr. RM. Soedjarwadi |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | | | |
| | Persentase pemanfaatan SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya | % | 70 | 76,8 | 109,71 | | Bidang Sumber Daya Kesehatan |
| | Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih | % | 0 | 100 | 600,00 | | RSUD Kelet Donorejo |
| | Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih | % | 98 | 100 | 102,04 | | RSJD Surakarta |
| | Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang terlatih | % | 30 | 30 | 100,00 | | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |
| | Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi | % | 91 | 99,53 | 109,37 | | Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | | | | |
| | Persentase sarana produksi dan distribusi farmasi, alkes dan makanan minuman serta pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan | % | 67 | 67 | 100,00 | | Bidang Sumber Daya Kesehatan |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| BIDANG KESEHATAN | | | | | | | |
| | Persentase Capaian Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi | % | 20 | 20 | 100,00 | | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |
| | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi | % | 100 | 100 | 100,00 | | RSUD Kelet Donorejo |
| | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi | % | 17,71 | 28,67 | 161,89 | | RSJD Dr. RM. Soedjarwadi |
| | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi | % | 90 | 108,27 | 103,69 | | RSJD Surakarta |
| | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi | % | 85 | 109,73 | 129,09 | | RSUD Dr. Moewardi |
| | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi | % | 100 | 107,69 | 107,69 | | RSJD Dr. Amino Gondohutomo |
| | Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi | % | 20 | 39,04 | 195,20 | | RSUD Tugurejo |
| | Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | % | 51,43 | 88,57 | 172,21 | | Bidang Kesehatan Masyarakat |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan yang berperan serta secara aktif dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran | % | 50 | 50 | 100,00 | | Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A |
| | Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa | % | 71 | 71 | 100,00 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa |
| | Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten | % | 71,42 | 71,42 | 100,00 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten |
| | Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang | % | 74,42 | 86,71 | 120,01 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang |
| | Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Pati | % | 71,42 | 71,42 | 100,00 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati |
| | Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya | % | 71,42 | 71,42 | 100,00 | | Balai Kesehatan Masyarakat |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang | | | | | | Wilayah Semarang |
| | Prosentase pelanggan yang menjalin kemitraan dengan Balabkes PAK | % | 58 | 58 | 100,00 | ● | Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 64 indikator kinerja seluruh indikator berstatus telah tercapai.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 5
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Target 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | | | |
| | Persentase Daerah Irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | % | 100 | 100,00 | 100,00 | ● | Balai PSDA Bengawan Solo |
| | Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 100 | 100 | 100,00 | ● | Balai PSDA Bodri Kuto |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Target 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai PSDA Pemali Comal |
| | Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo |
| | Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai PSDA Serang Lusi Juana |
| | Persentase daerah irigasi yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai PSDA Serayu Citanduy |
| | Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | Balai PSDA Bengawan Solo |
| | Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai PSDA Bodri Kuto |
| | Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai PSDA Pemali Comal |
| | Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 100 | 91,70 | 91,70 | | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo |
| | Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai PSDA Serang Lusi Juana |
| | Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai PSDA Serayu Citanduy |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Target 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Balai PSDA Serayu Citanduy | | | | | | |
| | Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi | % | 82,8 | 82,80 | 100,00 | | Bidang Irigasi dan Air Baku |
| | Persentase luasan daerah bebas genangan banjir | % | 20,4 | 20,62 | 101,08 | | Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai |
| | Persentase pemenuhan kebutuhan air baku | % | 62 | 62,00 | 100,00 | | Bidang Irigasi dan Air Baku |
| | Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti | % | 44,03 | 44,03 | 100 | | Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis |
| | Persentase Prasarana dan sarana Air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | Balai PSDA Bengawan Solo |
| | Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai PSDA Bodri Kuto |
| | Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai PSDA Pemali Comal |
| | Persentase prasarana sarana airbaku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo |
| | Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai PSDA Serang Lusi Juana |
| | Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai PSDA Serayu Citanduy |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Target 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase sungai dalam kondisi baik | % | 52,25 | 52,32 | 100,13 | | Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai |
| | Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai PSDA Bodri Kuto |
| | Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai PSDA Pemali Comal |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | | | |
| | Persentase akses layak air minum perdesaan | % | 81,55 | 84,08 | 103,10 | | Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung |
| | Persentase akses layak air minum perkotaan | % | 92,15 | 92,45 | 100,33 | | Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung |
| | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab./kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab./Kota | % | 89,39 | 89,39 | 100,00 | | Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Target 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| N SISTEM AIR LIMBAH | | | | | | | |
| | Persentase akses sanitasi air limbah domestik | % | 89,5 | 90,38 | 100,98 | | Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | | | |
| | Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar | % | 14,21 | 14,21 | 100,00 | | Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | | | | |
| | Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang diperiksa keandalannya | % | 14,21 | 14,21 | 100,00 | | Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | | | |
| | Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan | % | 100 | 100 | 100,00 | | Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap | % | 97,63 | 89,23 | 91,40 | | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang | % | 95,49 | 93,01 | 97,40 | | Balai Pengelolaan Jalan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Target 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | | | | | | | Wilayah Magelang |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati | % | 90,6 | 97,69 | 107,83 | | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan | % | 94,92 | 96,05 | 101,19 | | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi | % | 79,53 | 84,87 | 106,71 | | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang | % | 95,33 | 98,69 | 103,52 | | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta | % | 92,99 | 96,5 | 103,77 | | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal | % | 95,39 | 93,63 | 98,15 | | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo | % | 91,52 | 83,33 | 91,05 | | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo |
| | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat | % | 44,53 | 46,32 | 104,02 | | Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat |
| | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan | % | 39,18 | 40,78 | 104,08 | | Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Target 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Pembangunan Wilayah Timur | | | | | | |
| | Persentase panjang jalan yang dileger | % | 99,71 | 99,71 | 100,00 | | Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap | % | 81,74 | 81,74 | 100,00 | | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang | % | 91,89 | 91,89 | 100,00 | | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati | % | 91,49 | 91,49 | 100,00 | | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan | % | 86,07 | 86,07 | 100,00 | | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi | % | 88,82 | 88,62 | 99,77 | | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang | % | 84,13 | 84,13 | 100,00 | | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta | % | 92,66 | 92,66 | 100,00 | | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta. |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal | % | 84,24 | 84,24 | 100,00 | | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal |
| | Persentase panjang jembatan provinsi | % | 92,92 | 92,92 | 100,00 | | Balai Pengelolaan Jalan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Target 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo | | | | | | Wilayah Wonosobo |
| | Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan | % | 85,33 | 85,33 | 100,00 | | Balai Pengujian dan Peralatan |
| | Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi | % | 88,61 | 114,86 | 129,62 | | Balai Pengujian dan Peralatan |
| | Persentase perencanaan, pengawasan, dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan | % | 100 | 83,33 | 83,33 | | Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan |
| PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | | | | |
| | Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi | % | 100 | 100 | 100,00 | | Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung |
| | Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi | % | 16,54 | 16,54 | 100,00 | | Balai Jasa Konstruksi |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | | | |
| | Persentase Dokumen/ arahan pengembangan kewilayahan yang disusun | % | 21,98 | 21,98 | 100,00 | | Bidang Penataan Ruang |
| | Persentase dokumen RTR Kabupaten/ Kota yang dievaluasi | % | 60,14 | 71,51 | 118,91 | | Bidang Penataan Ruang |
| | Persentase Implementasi | % | 76,95 | 77,68 | 100,95 | | Bidang Penataan Ruang |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Target 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang | | | | | | |
| | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | % | 75,13 | 76,70 | 102,09 | ● | Bidang Penataan Ruang |
| | Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | % | 100 | 100 | 100 | ● | Balai PSDA Bengawan Solo |
| | Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 100 | 100 | 100,00 | ● | Balai PSDA Bodri Kuto |
| | Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 100 | 100 | 100,00 | ● | Balai PSDA Pemali Comal |
| | Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 100 | 98,40 | 98,40 | ▼ | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo |
| | Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | % | 100 | 100 | 100,00 | ● | Balai PSDA Serang Lusi Juana |
| | Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | % | 100 | 100 | 100,00 | ● | Balai PSDA Serayu Citanduy |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 68 indikator kinerja. Terdapat 60 indikator telah mencapai target Tahun 2022 dan 8 indikator tidak mencapai target Tahun 2022 dikarenakan hal-hal sebagai berikut antara lain; Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo dikarenakan kejadian banjir pada Triwulan 4 Tahun 2022 cenderung menyebabkan sedikit kerusakan infrastruktur sungai. Serta menurut wilayah sungainya termasuk kewenangan pusat, sehingga beberapa kejadian banjir pada triwulan 4 ditangani Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaran urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh capaian indikator program sebagai berikut.

Tabel 2. 6
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | | | | |
| | Persentase rumah layak huni yang disediakan | % | 6,71 | 6,71 | 100 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani | % | 11,84 | 11,86 | 100,16 | | Bidang Perumahan |
| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | |
| | Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani | % | 17,5 | 27,5 | 157,14 | | Bidang Kawasan Pemukiman |
| PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | | | | |
| | Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani | % | 23,37 | 29,97 | 128,24 | | Bidang Kawasan Pemukiman |
| PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman | % | 100 | 100 | 100,00 | ● | Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja. Seluruh indikator berstatus telah tercapai.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaran urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 7
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| KETERTIBAN UMUM | | | | | | | |
| | Persentase anggota Linmas Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya | % | 0,06 | 1,03 | 1716,67 | ● | Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat |
| | Persentase masyarakat yang meningkat pemahaman dan kesadaran terhadap tramtibum | % | 3,94 | 23,42 | 594,42 | ● | Bidang Pembinaan Masyarakat |
| | Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan | % | 100 | 100 | 100,00 | ● | Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah |
| | Persentase Pemeliharaan Tramtibum Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah | % | 100 | 100 | 100,00 | ● | Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat |
| PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | | | |
| | Persentase pemenuhan logistik bencana | % | 100 | 100 | 100,00 | ● | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Persentase penanganan darurat kebencanaan | % | 100 | 100 | 100,00 | ● | Bidang Penanganan Darurat |
| | Persentase penurunan risiko bencana | % | 1 | 2 | 200,00 | ● | Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi |
| | Persentase rehab rekon pasca bencana | % | 100 | 100 | 100,00 | ● | Bidang Logistik dan Peralatan |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja seluruhnya telah mencapai target.

## 6. Sosial

Kinerja penyelenggaran urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 8
Capaian Kinerja Urusan Sosial

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | | | |
| | Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas | % | 25,74 | 25,74 | 100,00 | | Bidang Pemberdayaan Sosial |
| PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | | | | | | |
| | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mnendapatkan penanganan | % | 100 | 100 | 100,00 | | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | | | |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti | % | 3,28 | 3,28 | 100,00 | | Bidang Rehabilitasi Sosial |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Panti | % | 0,14 | 0,14 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | | | | | | |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | % | 0,11 | 0,11 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | % | 0,11 | 0,11 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | % | 0,18 | 0,18 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring | % | 0,1 | 0,1 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Cepiring |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata | % | 0,17 | 0,17 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Dewanata |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti | % | 0,14 | 0,14 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Pelayanan Sosial Dharma Putera | | | | | | |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | % | 0,06 | 0,06 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | % | 0,09 | 0,09 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri | % | 0,13 | 0,13 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Mandiri |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi utomo | % | 0,12 | 0,12 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | % | 0,18 | 0,18 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti | % | 0,17 | 0,17 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | | | | | | |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | % | 0,06 | 0,06 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | % | 0,13 | 0,13 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo | % | 0,08 | 0,08 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Pendowo |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi | % | 0,13 | 0,13 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Penganthi |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | % | 0,12 | 0,12 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Potroyudan |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti | % | 0,22 | 0,22 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Raharjo |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Pelayanan Sosial Raharjo | | | | | | |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | % | 0,14 | 0,14 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | % | 0,07 | 0,07 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | % | 0,07 | 0,07 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | % | 0,18 | 0,18 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | % | 0,06 | 0,06 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti | % | 0,11 | 0,11 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Turusgede |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Pelayanan Sosial Turusgede | | | | | | |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | % | 0,17 | 0,17 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | % | 0,1 | 0,1 | 100,00 | | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | | | |
| | Persentase fakir miskin yang mendapatkan penanganan | % | 0,23 | 0,38 | 165,22 | | Bidang Penanganan Fakir Miskin |
| | Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | % | 1,46 | 5,53 | 378,77 | | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| | Persentase Rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan | % | 100 | 100 | 100,00 | | Bidang Rehabilitasi Sosial |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | | | |
| | Persentase korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan penanganan | % | 100 | 100 | 100,00 | | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | | | | |
| | Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola | % | 100 | 100 | 100,00 | ● | Bidang Pemberdayaan Sosial |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 35 indikator kinerja berstatus telah tercapai.

## B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

### 1. Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaran urusan Tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 9
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | | | | |
| | Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan | % | 28,57 | 34 | 119,01 | ● | Sekretariat |
| PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITA | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| S TENAGA KERJA | | | | | | | |
| | Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi | % | 37,5 | 37,5 | 100,00 | | Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS |
| | Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi | % | 7,89 | 12,20 | 154,63 | | Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS |
| | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri | % | 1,9 | 4,13 | 217,37 | | Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A |
| | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran | % | 46,62 | 68,72 | 147,40 | | Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A |
| | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian | % | 8,2 | 9,44 | 115,12 | | Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A |
| | Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas | % | 4 | 4,01 | 100,25 | | Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS |
| | Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi | % | 2 | 2,45 | 122,50 | | Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS |
| | Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan | % | 6,5 | 13,38 | 205,85 | | Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | | | |
| | Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal | % | 60 | 70,52 | 117,53 | | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA |
| | Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal | % | 55 | 55,26 | 100,47 | | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA |
| PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | | | |
| | Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan | % | 97,7 | 97,7 | 100,00 | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk | % | 49,65 | 54,59 | 109,95 | | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS |
| | Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial | % | 90,56 | 98,57 | 108,85 | | Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A |
| | Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah | % | 36 | 36,24 | 100,67 | | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS |
| PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | | | | | | | |
| | Persentase peningkatan perusahaan memiliki | % | 25,89 | 25,9 | 100,04 | | Balai Keselamatan Kerja Kelas A |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | kategori baik dalam penerapan K3 | | | | | | |
| | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan | % | 86,21 | 89,56 | 103,89 | ● | Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 17 indikator kinerja seluruh indikator berstatus telah tercapai.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 10

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | | | |
| | Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan | Per 100.000 | 6,42 | 7,9 | 123,05 | | Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | | | |
| | Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring | % | 15 | 20 | 133,33 | | Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat |
| | Rasio korban kekerasan terhadap perempuan | Per 100.000 | 5,7 | 4,38 | 166,67 | | Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | | | |
| | Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender | % | 35 | 63,88 | 182,51 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak | % | 35 | 63,88 | 182,51 | | Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi | % | 15 | 20 | 133,33 | ● | Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | | | |
| | Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama | % | 94,28 | 100 | 106,07 | ● | Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak |
| | Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) | % | 20 | 20 | 100,00 | ● | Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | | | |
| | Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring | % | 15 | 20 | 133,33 | ● | Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat |
| | Rasio korban kekerasan terhadap anak | Per 100.000 | 12,46 | 7,09 | 175,74 | ● | Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 indikator kinerja telah tercapai.

3. Pangan

Kinerja penyelenggaran urusan Pangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 11
Capaian Kinerja Urusan Pangan

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| | Angka Konsumsi Beras | kg/kapita/tahun | 92,3 | 87,9 | 105,01 | | Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan |
| | CV harga pangan strategis (beras) | % | 4,9 | 2,14 | 228,97 | | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan |
| | Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas | kkal/kapita/hari | 3731 | 3797 | 101,77 | | Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan |
| | Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan | Ton | 0,61 | 2,41 | 395,08 | | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan |
| PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | | | | |
| | Prosentase penurunan daerah rawan pangan | % | 1 | 58,73 | 5873 | | Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan |
| PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | | | |
| | Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan | % | 80 | 80,79 | 100,99 | | Bidang Keamanan Pangan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Prosentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamaman Pangan | % | 80 | 90,76 | 113,45 | ● | Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan pangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja dengan seluruh indikator berstatus telah tercapai.

4. Pertanahan

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanahan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 12
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| KEPENTINGAN UMUM | | | | | | | |
| | Persentase pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum | % | 100 | 596,81 | 596,81 | ● | Bidang Pertanahan |
| PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | | | | |
| | Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani | % | 100 | 134,15 | 134,15 | ● | Bidang Pertanahan |
| PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | | | | | |
| | Persentase pelaksanaan reforma agraria | % | 100 | 234,57 | 234,57 | ● | Bidang Pertanahan |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja, dengan seluruh indikator berstatus telah tercapai

5. Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaran urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 13
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | |
| | Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun | % | 100 | 100 | 100,00 | | Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | |
| | Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara | % | 8,57 | 8,57 | 100,00 | | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup |
| | Persentase pemantauan kualitas udara ambien | % | 100 | 105,65 | 105,65 | | Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A |
| | Persentase pengujian kualitas air | % | 100 | 102,73 | 102,73 | | Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A |
| | Persentase sungai yang meningkat kualitasnya | % | 10 | 10 | 100 | | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | | | | | | | Pencemaran Lingkungan Hidup |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | | | |
| | Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani | % | 1,91 | 3,82 | 200 | | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup |
| | Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani di Kebun Raya Baturraden | % | 0,14 | 0,14 | 100,00 | | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | | | |
| | Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan | % | 74,87 | 74,87 | 100,00 | | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan |
| | Persentase rekomendasi lingkungan hidup | % | 100 | 100 | 100 | | Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | | | |
| | Persentase kabupaten/kota yang jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya | % | 17,14 | 17,14 | 100,00 | | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup |
| | Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya | % | 50 | 50 | 100,00 | | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan |
| | Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya | % | 100 | 100 | 100 | | Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembang an Kapasitas Lingkungan Hidup |
| PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | |
| | Persentase pengaduan yang ditangani | % | 100 | 100 | 100,00 | | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase sampah yang dikelola | % | 80 | 61,17 | 76,46 | ▼ | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan lingkungan hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 14 indikator kinerja. Terdapat 13 indikator telah tercapai dan 1 indikator tidak mencapai target Tahun 2022 yaitu: Persentase sampah yang dikelola. Indikator ini belum tercapai dikarenakan data sampah tahun 2022 hanya terkumpul 34 kab/kota (Kota Pekalongan belum mengumpulkan data) sehingga belum bisa menggambarkan pengelolaan sampah secara keseluruhan. Sementara itu timbunan sampah yang ada semakin bertambah jumlahnya sehingga dibutuhkan TPST regional untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang ada.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja penyelenggaran urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 14
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase Kab/Kota yg seluruh penduduk wajib KTP terfasilitasi perekaman KTP-el | % | 95 | 99,95 | 105,21 | ● | Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk |
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | | | |
| | Persentase Kab/Kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen Akta Kelahiran usia 0-17 diatas 95% | % | 92 | 100 | 108,66 | ● | Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | | | | |
| | Persentase institusi yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan | % | 75 | 92,5 | 123,33 | ● | Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja dengan seluruh indikator berstatus telah tercapai.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 15
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENATAAN DESA | | | | | | | |
| | Persentase desa yang memiliki Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat | % | 87,01 | 135,06 | 155,22 | | Bidang Penataan Desa |
| PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | | | | | | | |
| | Persentase pengembangan kawasan perdesaan | % | 86 | 118 | 137,21 | | Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa |
| PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | |
| | Persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya | % | 2,85 | 19,62 | 688,42 | | Bidang Administrasi Pemerintahan Desa |
| | Persentase Desa dengan Sistem Informasi Desa | % | 14,61 | 44,53 | 304,79 | | Bidang Administrasi Pemerintahan Desa |
| | Persentase rekomendasi Gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum | % | 100 | 100 | 100,00 | | Bidang Administrasi Pemerintahan Desa |
| | Presentase fasilitasi regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa | % | 100 | 100 | 100,00 | | Bidang Administrasi Pemerintahan Desa |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | | | |
| | Persentase Desa yang telah memiliki BUMDesa | % | 70,43 | 92,04 | 130,68 | ● | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya | % | 2,62 | 3,12 | 119,08 | ● | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja, seluruh indikator berstatus telah tercapai.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaran urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 16
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | | | |
| | Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR) | % | 25 | 25 | 100,00 | ● | Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat |
| | Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan | % | 19,44 | 42,86 | 220,47 | ● | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Kependudukan) 5 Bidang | | | | | | |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | | | |
| | Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP) | % | 29,5 | 29,58 | 100,27 | ● | Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE |
| | Unmeetneed KB | % | 12,89 | 11,63 | 110,83 | ● | Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan | % | 96,25 | 97,79 | 101,60 | ● | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera |
| | Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota | % | 25 | 25 | 100,00 | ● | Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat |
| | Persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan | % | 90,5 | 91,56 | 101,17 | ● | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja seluruh indikator telah tercapai.

## 9. Perhubungan

Kinerja penyelenggaran urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 17
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | | |
| | Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM | % | 5,03 | 5,49 | 109,15 | | Bidang Angkutan Jalan |
| | Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi | % | 31,92 | 31,92 | 100,00 | | Balai Transportasi Jawa Tengah |
| | Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis | % | 58,33 | 60 | 102,86 | | Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian |
| | Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang | % | 24,48 | 30,03 | 122,67 | | Bidang Lalu Lintas |
| | Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan | % | 8,67 | 8,9 | 102,65 | | Bidang Lalu Lintas |
| | Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana | % | 49,91 | 51,2 | 102,58 | | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Perhubungan Wilayah III Kelas A | | | | | | Wilayah III Kelas A |
| | Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | % | 40,88 | 42,77 | 104,62 | | Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B |
| | Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | % | 50,97 | 52,41 | 102,83 | | Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A |
| | Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | % | 78,71 | 79,71 | 101,27 | | Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A |
| | Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | % | 82,72 | 83,92 | 101,45 | | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A |
| | Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | % | 65,49 | 66,43 | 101,44 | | Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B |
| | Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru | % | 87,65 | 124,87 | 142,46 | | Bidang Angkutan Jalan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | % | 43,75 | 50 | 114,29 | | Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A |
| | Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | % | 35 | 40 | 114,29 | | Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B |
| | Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | % | 21,88 | 28,13 | 128,56 | | Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A |
| | Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | % | 19,23 | 23,08 | 120,02 | | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A |
| | Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | % | 20,69 | 27,59 | 133,35 | | Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A |
| | Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | % | 53,85 | 61,54 | 114,28 | | Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan | % | 21,62 | 28,13 | 130,11 | ● | Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian |
| | Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis | % | 28,57 | 28,57 | 100,00 | ● | Bidang Angkutan Jalan |
| PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | | | | |
| | Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang | % | 37,5 | 37,5 | 100,00 | ● | Bidang Pelayaran |
| | Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa | % | 66,96 | 78,39 | 117,07 | ● | Balai Transportasi Jawa Tengah |
| | Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin | % | 47,01 | 49,25 | 104,76 | ● | Bidang Pelayaran |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | | | | | | | |
| | Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api | % | 15,73 | 17,88 | 113,67 | ● | Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan perhubungan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 24 indikator kinerja berstatus telah tercapai.

## 10. Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 18
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | | | |
| | Nilai Survei Kepuasan Komunikasi Publik | % | 78 | 81 | 103,85 | ● | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik |
| | Persentase badan publik yang terbuka | % | 92 | 92 | 100,00 | ● | Bidang Statistik |
| PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | | | | |
| | Persentase Aplikasi yang Diintegrasikan | % | 70 | 70 | 100,00 | ● | Bidang E-Government |
| | Persentase Ketersediaan Infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi | % | 70 | 70 | 100,00 | ● | Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator kinerja berstatus telah tercapai.

## 11. Koperasi dan UKM

Kinerja penyelenggaran urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 19
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | | | |
| | Persentase Jumlah Koperasi Aktif Provinsi | % | 66,00 | 77,56 | 117,52 | | Bidang Pengawasan |
| PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | | | | |
| | Persentase Jml KSP/KSPPS Prov dng Kategori Sehat | % | 23,50 | 23,73 | 100,98 | | Bidang Pengawasan |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | | | |
| | Persentase SDM KUMKM yang terampil | % | 82 | 99,26 | 121,05 | | Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | | | | |
| | Persentase Koperasi Provinsi yang berkualitas | % | 18,00 | 35,59 | 197,72 | | Bidang Kelembagaan |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | | | |
| | Persentase Usaha Mikro menuju kecil | % | 12,59 | 31,45 | 249,80 | | Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan |
| PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase Usaha Kecil menuju Menengah | % | 23 | 30,97 | 134,65 | ● | Bidang Bina Usaha |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja dengan 6 indikator kinerja dengan seluruh indikator berstatus telah tercapai.

## 12. Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaran urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai beirkut.

Tabel 2. 20
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | | | |
| | Persentase perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dipromosikan | % | 100 | 100 | 100,00 | ● | Bidang Perencanaan dan Pengembangan |
| PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | | | |
| | Rasio Izin Usaha terhadap kepeminatan penanaman modal | % | 8 | 8,99 | 112,38 | ● | Bidang Promosi PM |
| | Rasio realisasi kemitraan usaha terhadap kepeminatan kemitraan Usaha | % | 20 | 20 | 100,00 | ● | Bidang Promosi PM |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | | | |
| | Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan | % | 92 | 100 | 108,70 | ● | Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan |
| | Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat | % | 100 | 100 | 100,00 | ● | Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan |
| | Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Standar Pelayanan | % | 94 | 99,6 | 105,96 | ● | Bidang Pelayanan Perizinan |
| PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | | | |
| | Persentase realisasi proyek penanaman modal | % | 15 | 16,66 | 111,07 | ● | Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM |
| PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | | | | |
| | Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan | % | 80 | 104,53 | 130,66 | ● | Bidang Pengelolaan Data dan Informasi |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja seluruh indikator berstatus telah tercapai.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaran urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 21
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | | | | |
| | Persentase capaian kapasitas kepemudaan | % | 64,06 | 64,06 | 100,00 | | Bidang Kepemudaan |
| | Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda | % | 13,04 | 13,04 | 100,00 | | Bidang Kepemudaan |
| PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | | | | |
| | Persentase atlet PPLOP yang berprestasi | % | 13,89 | 13,89 | 100,00 | | Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase peningkatan prestasi olahraga | % | 43,33 | 43,33 | 100,00 | | Bidang Keolahragaan |
| | Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja dan seluruh indikator telah tercapai

## 14. Statistik

Kinerja penyelenggaran urusan statistik ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 22
Capaian Kinerja Urusan Statistik

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | | | |
| | Persentase Ketersediaan data sektoral | % | 95 | 108 | 113,68 | | Bidang Statistik |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator yang berstatus telah tercapai.

## 15. Persandian

Kinerja penyelenggaran urusan persandian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 23
Capaian Kinerja Urusan Persandian

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | | | |
| | Persentase Perangkat Daerah (PD) memiliki Keamanan Informasi > 80 | % | 66,67 | 70 | 104,99 | ● | Bidang Persandian dan Keamanan Informasi |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan persandian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator yang berstatus telah tercapai.

## 16. Kebudayaan

Kinerja penyelenggaran urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 24
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | | | |
| | Persentase seni budaya Kabupaten/Kota yang terfasilitasi | % | 88,75 | 91,43 | 103,02 | ● | Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A |
| | Presentase ragam budaya terlayani | % | 2,9 | 2,9 | 100,00 | ● | Bidang Pembinaan Kebudayaan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | | | | |
| | Presentase jenis seni tradisi terlayani | % | 6,2 | 6,2 | 100,00 | ● | Bidang Pembinaan Kebudayaan |
| PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | | | | |
| | Persentase sumber belajar berbasis budaya | % | 0,39 | 0,39 | 100,00 | ● | Bidang Pembinaan Kebudayaan |
| PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | | | |
| | Persentase status cagar budaya | % | 22,71 | 22,71 | 100,00 | ● | Bidang Pembinaan Kebudayaan |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | | | | | |
| | Survei Kepuasan Pengunjung Museum | Angka | 89,65 | 89,36 | 99,68 | ▼ | Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator. Terdapat 5 indikator kinerja telah tercapai dan 1 indikator tidak tercapai yaitu Survei Kepuasan Pengunjung Museum dikarenakan status pandemi yang belum dicabut, sehingga tingkat kunjungan museum masih belum optimal.

17. Perpustakaan

Kinerja penyelenggaran urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai bertikut.

Tabel 2. 25
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | | | | |
| | Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka | % | 80,5 | 81,37 | 101,08 | ● | Bidang Pengelolaan Perpustakaan |
| | Persentase Partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus, Kabupaten/Kota dalam pembudayaan gemar membaca | % | 50 | 50 | 100,00 | ● | Bidang Pengembangan Perpustakaan |
| | Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi | % | 80 | 80 | 100,00 | ● | Bidang Pengelolaan Perpustakaan |
| | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Perpustakaan | % | 59,82 | 59,82 | 100,00 | ● | Bidang Pengembangan Perpustakaan |
| | Persentase Perluasan Jejaring Kemitraan | % | 80 | 93,33 | 116,66 | ● | Bidang Pengembangan Perpustakaan |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator. Kinerja seluruh indikator program urusan perpustakaan teracapai. Capaian tertinggi pada indikator persentase perluasan jejaring kemitraan dari target 80% tercapai 93,33% dikarenakan meningkatnya permintaan Kerjasama perpustakaan dari beberapa universitas.

18. Kearsipan

Kinerja penyelenggaran urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 26
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | | | | |
| | Persentase pengelolaan arsip yang diselamatkan | % | 79 | 81,17 | 102,75 | ● | Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip |
| | Persentase Peningkatan Pengunjung Arsip | % | 92,78 | 92,8 | 100,02 | ● | Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip |
| | Persentase perangkat daerah yang tertib arsip | % | 85,11 | 85,11 | 100,00 | ● | Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator yang seluruhnya berstatus telah tercapai.

C. Urusan Pilihan

1. Perikanan dan Kelautan

Kinerja penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 27
Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Persentase Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif | % | 2,5 | 2,5 | 100,00 | | Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil |
| | Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya | % | 1 | 1 | 100,00 | | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A |
| | Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya | % | 1 | 1 | 100,00 | | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A |
| | Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya | % | 0,5 | 0,57 | 114,00 | | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A |
| | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir | % | 5 | 5 | 100,00 | | Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase Peningkatan Produksi Garam | % | 0,1 | 0,05 | 50,00 | ▼ | Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil |
| | Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha | % | 1 | 1 | 100,00 | ● | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A |
| | Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha | % | 1 | 1 | 100,00 | ● | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A |
| | Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha | % | 1 | 1 | 100,00 | ● | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan | % | 100 | 100 | 100,00 | ● | Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan | % | 100 | 90 | 90,00 | ▼ | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan | % | 63,64 | 63,64 | 100,00 | ● | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan | % | 72,73 | 90,91 | 125,00 | ● | Pelabuhan Perikanan Pantai |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | | | | | | | Wonokerto Kelas B |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan | % | 72,73 | 72,73 | 100,00 | | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan | % | 90,91 | 90,91 | 100,00 | | Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan | % | 90,91 | 90,91 | 100,00 | | Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan | % | 90,91 | 90,91 | 100,00 | | Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan | % | 90,91 | 90,91 | 100,00 | | Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan | % | 90,91 | 90,91 | 100,00 | | Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan | % | 100 | 100 | 100,00 | | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B |
| | Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap | % | 0,1 | 0,04 | 40,00 | | Bidang Perikanan Tangkap |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A |
| | Persentase Peningkatan Produksi Benih | % | 2 | 2,5 | 125,00 | | Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A |
| | Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya | % | 0,2 | 0,2 | 100,00 | | Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas |
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan | % | 71 | 71 | 100 | | Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan |
| | Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan | % | 2 | 2 | 100,00 | | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A |
| | Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan | % | 2 | 2 | 100,00 | | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A |
| | Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran | % | 2 | 2 | 100,00 | | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | sektor kelautan dan perikanan | | | | | | Timur Kelas A |
| | Persentase peran aktif kelompok masyaraka pengawas dalam pengawasan sdkp | % | 40 | 40 | 100,00 | | Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu | % | 2 | 2 | 100,00 | | Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A |
| | Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan | % | 2 | 7,12 | 356 | | Bidang Usaha dan Pengembang an Komoditas |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 31 target indikator kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan terdapat 28 indikator tercapai dan 3 indikator tidak tercapai yaitu:

1. Persentase Peningkatan Produksi Garam tidak tercapai dikarenakan bulan produksi relatif pendek disertai dengan adanya kemarau basah, dimana saat musim kemarau namun terkadang masih turun hujan pada waktu-waktu tertentu, sehingga masa panen garam tidak melimpah seperti tahun-tahun sebelumnya.
2. Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan dikarenakan tidak adanya petugas syahbandar sebagai pihak yang memiliki kewenangan menerbitkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar).
3. Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikarenakan terjadi kenaikan Harga BBM per September 2022 yang menyebabkan kebutuhan operasional nelayan meningkat dengan modal yang sama, sehingga menyebabkan nelayan memilih tidak melaut.

2. Pariwisata

Kinerja penyelenggaran urusan Pariwisata ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 28
Capaian Kinerja Pariwisata

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP | % | 9 | 69,57 | 100,00 | | Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata |
| | Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) | % | 56 | 88,4 | 157,86 | | Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata |
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Orang | 11.530.429 | 43.864.056 | 380,42 | | Bidang Pemasaran Pariwisata |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | Persentase Kota Kreatif | % | 5,71 | 11,43 | 200,18 | | Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi Kompetensi | % | 50,69 | 73,81 | 145,61 | ● | Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 5 target indikator kinerja Urusan Pariwisata seluruh indikator berstatus telah tercapai.

3. Pertanian

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 29
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | | Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | Jumlah Populasi ternak | (ST)/(AU) | 3819014 | 3.926.192 | 102,81 | ● | Bidang Budidaya |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase layanan Sertifikasi benih | % | 100 | 100 | 100,00 | | Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A |
| | Persentase Penambahan Jumlah Alsintan | % | 1,98 | 4 | 202,02 | | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian |
| | Persentase penambahan jumlah petani yang mendapatkan jaminan keberlengsungan usaha tani di Jawa Tengah | % | 5 | 5 | 100,00 | | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian |
| | Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengolah Hasil | % | 2,5 | 2,5 | 100,00 | | Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha |
| | Persentase peningkatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan | % | 1 | 1 | 100,00 | | Bidang Veteriner |
| | Persentase Peningkatan Produksi bawang merah, cabe, durian, melati dan jahe | % | 10,8 | 10,8 | 100,00 | | Bidang Hortikultura |
| | Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan | % | 3 | 3 | 100,00 | | Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A |
| | Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas | % | 1,5 | 1,37 | 91,33 | | Balai Benih TPH wilayah Banyumas |
| | Persentase peningkatan produksi benih di | % | 1,5 | 1,5 | 100,00 | | Balai Benih TPH wilayah Semarang |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Balai Benih TPH wilayah Semarang | | | | | | |
| | Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta | % | 1,5 | 1,18 | 78,67 | ▼ | Balai Benih TPH wilayah Surakarta |
| | Persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku | % | 1 | 0,81 | 81,00 | ▼ | Balai Inseminasi Buatan Kelas A |
| | Persentase Peningkatan Produksi Kopi, Tebu, Kelapa | % | 3,1 | 3,1 | 100,00 | ● | Bidang Perkebunan |
| | Persentase Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai | % | 2,9 | 2,55 | 87,93 | ▼ | Bidang Tanaman Pangan |
| | Persentase peningkatan produksi ternak | % | 1 | 1,07 | 107,00 | ● | Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A |
| | Persentase penyaluran pupuk subsidi | % | 100 | 93,25 | 93,25 | ▼ | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | | Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | Persentase Jaringan Irigasi Yang Baik | % | 0,5 | 19,87 | 3974,00 | ● | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian |
| | Persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan | % | 1 | 310 | 31000,00 | ● | Bidang Prasarana, |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | | | | | | | Sarana dan Penyuluhan |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | | | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | Persentase penurunan pemotongan betina produktif | % | 10 | 1,54 | 15,40 | ▼ | Bidang Veteriner |
| | Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) | % | 5 | 5 | 100,00 | ● | Balai veteriner semarang |
| | Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) | % | 5 | 5 | 100,00 | ● | Balai veteriner boyolali |
| | Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) | % | 5 | 5 | 100,00 | ● | Bidang Veteriner |
| PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN | | | | | | | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | Persentase penurunan serangan organisme penganggu tanaman (OPT) | % | 0,15 | 1,63 | 1086,67 | ● | Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | | | Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya | % | 7 | 10 | 142,86 | ● | Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha |
| | Persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan kemitraan | % | 14 | 372 | 2657,14 | ● | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan |
| | Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian | % | 100 | 100 | 100,00 | ● | BALAI PELATIHAN PERTANIAN |
| | Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya | % | 3819014 | 3.926.192 | 102,81 | ● | Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha |
| | Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian | % | 100 | 100 | 100,00 | ● | BALAI PELATIHAN PERTANIAN |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 26 target indikator kinerja Urusan Pertanian terdapat 20 indikator tercapai dan 6 indikator tidak mencapai target Tahun 2022 yaitu:

1. Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas dan di Balai Benih TPH wilayah Surakarta dikarenakan adanya penurunan luas perbanyakan benih dan serangan OPT, sehingga perlu dilakukan yaitu intensifikasi lahan melalui penggunaan varietas benih unggul dan bermutu, serta pengendalian hama terpadu melalui penerapan *Early Warning System.*
2. Persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku dikarenakan Produktivitas bull menurun karena sudah memasuki masa afkir, dan adanya kebijakan penundaan replacement bull sebagai dampak wabah penyakit mulut dan kuku sehingga produksi bull yang ada saat itu tidak optimal.
3. Persentase Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai dikarenakan adanya penurunan luas tanam sehingga mempengaruhi produktivitas tanaman. Penurunan luas tanam dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu dampak perubahan iklim dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Upaya yang perlu dilakukan yaitu penerapan kebijakan Indeks Pertanaman (IP) 400 yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman

melalui sistem tanam sebanyak 4 kali dalam 1 tahun pada lahan yang sama.

4. Persentase penyaluran pupuk subsidi dikarenakan adanya pembatasan alokasi pupuk bersubsidi hanya untuk jenis pupuk Urea dan NPK sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, kendala penggunaan kartu tani, serta penyesuaian e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang membuat beberapa wilayah kehilangan alokasi pupuk bersubsidi.
5. Persentase penurunan pemotongan betina produktif dikarenakan terjadinya wabah penyakit PMK menyebabkan terjadinya pemotongan pada ternak sakit termasuk diantaranya sapi dan kerbau produktif untuk mengurangi kerugian peternak. Banyak terdapat betina produktif yang berada di lokasi dekat kasus terkena kebijakan potong paksa karena adanya PMK.

4. Kehutanan

Kinerja penyelenggaran urusan kehutanan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 30
Capaian Kinerja Kehutanan

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di BSPTH | % | 0,91 | 0,91 | 100,00 | | Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil I | % | 1,38 | 1,38 | 100,00 | | CDK I |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil II | % | 1,45 | 1,5 | 103,45 | | CDK II |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil III | % | 1,49 | 1,69 | 113,42 | | CDK III |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IV | % | 1,68 | 1,68 | 100 | | IXCDK IV |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IX | % | 2,33 | 2,19 | 93,99 | | CDK IX |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil V | % | 1,51 | 1,54 | 101,99 | | CDK V |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VI | % | 2,4 | 2,25 | 93,75 | | CDK VI |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VII | % | 3,06 | 3,34 | 109,15 | | CDK VII |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VIII | % | 1,79 | 1,88 | 105,03 | | CDK VIII |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil X | % | 1,98 | 2,41 | 121,72 | | CDK X |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil XI | % | 2,41 | 2,62 | 108,71 | | CDK XI |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani | % | 100 | 100 | 100,00 | | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil I | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK I |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil II | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK II |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil III | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK III |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IV | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK IV |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IX | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK IX |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil V | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK V |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VI | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK VI |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VII | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK VII |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VIII | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK VIII |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil X | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK X |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil XI | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK 11 |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan | % | 27,08 | 27,08 | 100,00 | | Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil I | % | 0,62 | 0,62 | 100,00 | | CDK I |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil II | % | 0,62 | 0,62 | 100,00 | | CDK II |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil III | % | 0,51 | 0,51 | 100,00 | | CDK III |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang | % | 0,62 | 0,62 | 100,00 | | CDK IV |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | berkelanjutan di CDK Wil IV | | | | | | |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IX | % | 0,62 | 0,62 | 100,00 | | CDK IX |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil V | % | 0,72 | 0,72 | 100,00 | | CDK V |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VI | % | 0,72 | 0,72 | 100,00 | | CDK VI |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VII | % | 0,72 | 0,72 | 100,00 | | CDK VII |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VIII | % | 0,51 | 0,51 | 100,00 | | CDK VIII |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil X | % | 0,51 | 0,51 | 100,00 | | CDK X |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil XI | % | 0,51 | 0,51 | 100,00 | | CDK 11 |
| PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| DAN EKOSISTEMNYA | | | | | | | |
| | Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif | % | 100 | 100 | 100,00 | | Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam |
| | Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil I | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK I |
| | Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil II | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK II |
| | Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil III | % | 100 | 100 | 100,00 | | CCDK III |
| | Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil IV | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK IV |
| | Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil IX | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK IX |
| | Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil V | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK V |
| | Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil VI | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK VI |
| | Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil VIII | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK VIII |
| | Persentase konservasi ekosistem | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK X |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | yang dikelola secara efektif di CDK Wil X | | | | | | |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Kebun Raya Baturraden | % | 0,09 | 0,09 | 100,00 | | Kebun Raya Baturraden |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Tahura KGPAA Mangkunagoro I | % | 0,14 | 0,14 | 100,00 | | Tahura KGPAA Mangkunagoro I |
| | Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani | % | 100 | 100 | 100,00 | | Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam |
| | Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil I | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK I |
| | Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil II | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK II |
| | Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil III | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK III |
| | Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IV | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK IV |
| | Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IX | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK IX |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil V | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK V |
| | Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VI | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK VI |
| | Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VII | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK VII |
| | Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VIII | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK VIII |
| | Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil X | % | 100 | 100 | 100,00 | | CDK X |
| | Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil XI | % | 100 | 100 | 100,00 | | |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat | % | 20 | 20 | 100,00 | | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil I | % | 2,4 | 2,4 | 100,00 | | CDK I |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil II | % | 1,6 | 1,6 | 100,00 | | CDK II |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil III | % | 1,6 | 1,6 | 100,00 | | CDK III |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IV | % | 1,6 | 1,6 | 100,00 | | CDK IV |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IX | % | 1,6 | 1,6 | 100,00 | | CDK IX |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil V | % | 2,4 | 2,4 | 100,00 | | CDK V |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VI | % | 1,6 | 1,6 | 100,00 | | CDK VI |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VII | % | 2,4 | 2,4 | 100,00 | | CDK VII |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VIII | % | 1,6 | 1,6 | 100,00 | | CDK VIII |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok | % | 1,6 | 1,6 | 100,00 | | CDK X |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | masyarakat di CDK Wil X | | | | | | |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil XI | % | 1,6 | 1,6 | 100,00 | ● | CDK XI |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase jumlah DAS yang tertangani | % | 5 | 5 | 100,00 | ● | Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani | % | 17,46 | 17,74 | 101,60 | ● | Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 74 target indikator kinerja Urusan Kehutanan terdapat 72 indikator tercapai dan 2 indikator tidak mencapai target Tahun 2022 yaitu :

1. Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VI dikarenakan ketersediaan bibit yang tidak mencukupi saat waktu yang tepat untuk pelaksanaan penanaman
2. Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IX dikarenakan ketersediaan bibit yang tidak mencukupi saat waktu yang tepat untuk pelaksanaan penanaman serta preferensi masyarakat terhadap bibit tanaman kehutanan yang masih kurang (disebabkan jika tanaman kehutanan sudah tumbuh besar, tajuknya akan menutupi tanaman budidaya semusim yang berakibat menurunnya produktifitas)

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja penyelenggaran urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian indikator kin-erja program sebagai berikut.

Tabel 2. 31
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | | | | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Persentase pelayanan pengujian air tanah | % | 100 | 100 | 100,00 | | Laboratorium Energi dan SDM Kelas A |
| | Persentase pengambilan air tanah | % | 55,48 | 48,22 | 115,06 | | Bidang Geologi dan Air Tanah |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria | % | 12,54 | 9,62 | 130,35 | | Cabang Dinas ESDM Kendeng Muria |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan | % | 0,6 | 0,58 | 103,45 | | Cabang Dinas ESDM Kendeng Selatan |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi | % | 5,33 | 5,18 | 102,90 | | Cabang Dinas ESDM Merapi |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak | % | 14,74 | 12,85 | 114,71 | | Cabang Dinas ESDM Semarang Demak |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan | % | 1,16 | 1,07 | 108,41 | | Cabang Dinas ESDM Serayu Selatan |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah | % | 0,25 | 0,23 | 108,70 | | Cabang Dinas ESDM Serayu Tengah |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara | % | 2,89 | 2,77 | 104,33 | | Cabang Dinas ESDM Serayu Utara |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu | % | 3,29 | 2,84 | 115,85 | | Cabang Dinas ESDM Sewu Lawu |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan | % | 1,1 | 1,07 | 102,80 | | Cabang Dinas ESDM Slamet Selatan |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara | % | 0,97 | 0,79 | 122,78 | | Cabang Dinas ESDM Slamet Utara |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo | % | 4,17 | 3,38 | 123,37 | | Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 8,43 | 7,83 | 107,66 | | Cabang Dinas ESDM Ungaran Telomoyo |
| PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | | | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Persentase Good Mining Practice | % | 88,74 | 89,00 | 100,29 | | Bidang Mineral dan Batubara |
| | Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Muria | % | 4,23 | 5,39 | 127,42 | | Cabang Dinas ESDM Kendeng Muria |
| | Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Selatan | % | 11,55 | 14,25 | 123,38 | | Cabang Dinas ESDM Kendeng Selatan |
| | Persentase good mining practice Wilayah Merapi | % | 12,68 | 10,15 | 80,05 | | Cabang Dinas ESDM Merapi |
| | Persentase good mining practice Wilayah Semarang Demak | % | 4,79 | 4,23 | 88,31 | | Cabang Dinas ESDM Semarang Demak |
| | Persentase good mining practice Wilayah Serayu Selatan | % | 4,51 | 4,89 | 108,43 | | Cabang Dinas ESDM Serayu Selatan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase good mining practice Wilayah Serayu Tengah | % | 3,94 | 4,23 | 107,36 | | Cabang Dinas ESDM Serayu Tengah |
| | Persentase good mining practice Wilayah Serayu Utara | % | 6,48 | 5,68 | 87,65 | | Cabang Dinas ESDM Serayu Utara |
| | Persentase good mining practice Wilayah Sewu Lawu | % | 5,63 | 5,28 | 93,78 | | Cabang Dinas ESDM Sewu Lawu |
| | Persentase good mining practice Wilayah Slamet Selatan | % | 14,37 | 13,68 | 95,20 | | Cabang Dinas ESDM Slamet Selatan |
| | Persentase good mining practice Wilayah Slamet Utara | % | 10,7 | 12,67 | 118,41 | | Cabang Dinas ESDM Slamet Utara |
| | Persentase good mining practice Wilayah Solo | % | 6,76 | 5,46 | 80,77 | | Cabang Dinas ESDM Solo |
| | Persentase good mining practice Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 3,1 | 3,00 | 96,77 | | Cabang Dinas ESDM Ungaran Telomoyo |
| | Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara | % | 100 | 100,00 | 100,00 | | Laboratorium Energi dan SDM Kelas A |
| PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | | | | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi | tCO2e | 105.618 | 105.793,91 | 100,17 | | Bidang Energi Baru terbarukan |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Muria | tCO2e | 1.317,38 | 1.317,38 | 100,00 | | Cabang Dinas ESDM Kendeng Muria |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Selatan | tCO2e | 353,46 | 353,46 | 100,00 | | Cabang Dinas ESDM Kendeng Selatan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Merapi | tCO2e | 2.784,67 | 2.860,45 | 102,72 | | Cabang Dinas ESDM Merapi |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Semarang Demak | tCO2e | 19.770,81 | 19.770,81 | 100,00 | | Cabang Dinas ESDM Semarang Demak |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Selatan | tCO2e | 545,92 | 565,32 | 103,55 | | Cabang Dinas ESDM Serayu Selatan |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Tengah | tCO2e | 745,62 | 748,89 | 100,44 | | Cabang Dinas ESDM Serayu Tengah |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Utara | tCO2e | 841,96 | 863,51 | 102,56 | | Cabang Dinas ESDM Serayu Utara |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Sewu Lawu | tCO2e | 376,99 | 397,98 | 105,57 | | Cabang Dinas ESDM Sewu Lawu |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Selatan | tCO2e | 77.317,80 | 77.317,80 | 100,00 | | Cabang Dinas ESDM Slamet Selatan |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Utara | tCO2e | 287,99 | 288,65 | 100,23 | | Cabang Dinas ESDM Ungaran Slamet Utara |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Solo | tCO2e | 421,84 | 465,52 | 110,35 | | Cabang Dinas ESDM Solo |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Ungaran Telomoyo | tCO2e | 370,09 | 370,09 | 100,00 | | Cabang Dinas ESDM Ungaran Telomoyo |
| PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Persentase pemenuhan listrik | % | 31,49 | 37,21 | 118,16 | | Bidang Ketenagalistrikan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | bagi rumah tangga miskin | | | | | | |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria | % | 2,26 | 2,96 | 130,97 | | Cabang Dinas ESDM Kendeng Muria |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan | % | 3,86 | 4,14 | 107,25 | | Cabang Dinas ESDM Kendeng Selatan |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi | % | 2,98 | 3,04 | 102,01 | | Cabang Dinas ESDM Merapi |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak | % | 1,45 | 1,47 | 101,38 | | Cabang Dinas ESDM Semarang Demak |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan | % | 3,39 | 3,96 | 116,81 | | Cabang Dinas ESDM Serayu Selatan |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah | % | 2,21 | 3,73 | 168,78 | | Cabang Dinas ESDM Serayu Tengah |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara | % | 2,3 | 2,63 | 114,35 | | Cabang Dinas ESDM Serayu Utara |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu | % | 1,85 | 2,04 | 110,27 | | Cabang Dinas ESDM Sewu Lawu |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan | % | 4,02 | 5,25 | 130,60 | | Cabang Dinas ESDM Slamet Selatan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara | % | 4,02 | 5,25 | 130,60 | ● | Cabang Dinas ESDM Ungaran Slamet Utara |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo | % | 1,59 | 1,95 | 122,64 | ● | Cabang Dinas ESDM Solo |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 1,55 | 1,83 | 118,06 | ● | Cabang Dinas ESDM Ungaran Telomoyo |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 54 indikator. Terdapat 47 indikator telah tercapai dan 7 indikator tidak mencapai target Tahun 2022. Tujuh indikator yang tidak tercapai pada program Pengelolaan Mineral dan Batubara diantaranya Persentase good mining practice Wilayah Merapi, Wilayah Semarang Demak, Wilayah Serayu Utara, Wilayah Sewu Lawu, Wilayah Slamet Selatan, Wilayah Solo, Wilayah Ungaran Telomoyo dikarenakan setelah dikembalikannya kewenangan izin usaha pertambangan ke daerah berdasarkan terbitnya Perpres 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Minerba pada tanggal 11 April 2022 maka daerah masih membutuhkan proses penyesuaian dan integrasi sistem perizinan dengan Pemerintah Pusat. Proses serah terima data maupun berkas-berkas perizinan dari Kementerian ESDM baru dapat terlaksana pada Triwulan III Tahun 2022. Selain itu, juknis pengawasan dari Kementerian ESDM baru terbit di TW IV Tahun 2022, sehingga kegiatan pengawasan dan pengendalian pada sektor minerba belum optimal. Adanya ketidaksesuaian tata ruang antara WIUP yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dengan RTRW Kab./Kota, sehingga beberapa izin tidak dapat dilanjutkan.

6. Perdagangan

Kinerja penyelenggaran urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 32
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA di Jawa Tengah | % | 7 | 9,28 | 132,57 | | Bidang Perdagangan Luar Negeri |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi | % | 0,19 | 2,40 | 1263,16 | | Bidang Perdagangan Dalam negeri |
| PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center) | % | 12 | 9,88 | 121,46 | | Bidang Perdagangan Dalam negeri |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Nilai ekspor non migas | Juta US$ | 7.076 | 11.210,92 | 158,44 | | Bidang Perdagangan Luar Negeri |
| PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan | % | 4 | 1,60 | 250,00 | | Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Semarang) | % | 4,17 | 25,22 | 604,80 | ● | BPSMB Semarang |
| | Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Surakarta) | % | 5 | 5,96 | 119,20 | ● | BPSMB Surakarta |
| PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri | % | 8 | 8,55 | 106,88 | ● | Bidang Perdagangan Dalam negeri |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja dengan seluruh indikator telah mencapai target Tahun 2022.

7. Perindustrian

Kinerja penyelenggaran urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 33
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif | % | 4,31 | 4,38 | 101,62 | ● | Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A |
| | Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa | % | 3,17 | 3,55 | 111,99 | ● | Balai Industri Logam dan Kayu Kelas A |
| | Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro | % | 3,00 | 3,39 | 113 | ● | Bidang Industri Agro |
| | Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro | % | 3 | 5,55 | 185,00 | ● | Bidang Industri Non Agro |
| | Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki | % | 70 | 84,36 | 120,51 | ● | Balai Industri Produk Tekstil dan alas Kaki Kelas A |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional | % | 1 | 7,20 | 720,00 | ● | Bidang Industri Agro |
| | Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional | % | 2 | 4,55 | 227,50 | ● | Bidang Industri Non Agro |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinera seluruhnya telah mencapai target Tahun 2022.

8. Transmigrasi

Kinerja penyelenggaran urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 34
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian | % | 3,18 | 3,99 | 125,47 | ● | Balai pelatihan kerja dan transmigrasi Kelas A |
| | Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi | % | 3,18 | 5,28 | 166,04 | ● | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikator kinerja seluruhnya telah tercapai.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaran Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 35
Capaian Kinerja Sekrateriat Daerah

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol | % | 100 | 100 | 100 | | Biro Umum |
| | Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga | % | 100 | 100 | 100 | | Biro Umum |
| | Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | % | 100 | 100 | 100 | | Biro Umum |
| | Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda | % | 100 | 100 | 100 | | Biro Adm Bangda |
| | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda | % | 100 | 100 | 100 | | Biro Organisasi |
| | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adpem | % | 100 | 100 | 100 | | Biro Adm Bangda |
| | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro APBJ | % | 100 | 100 | 100 | | Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
| | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum | % | 100 | 100 | 100 | | Biro Hukum |
| | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan | % | 100 | 100 | 100 | | Biro ISDA |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | SDA dan Asisten Ekbang | | | | | | |
| | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesra | % | 100 | 100 | 100 | | Biro Kesejahteraan rakyat |
| | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | % | 100 | 100 | 100 | | Biro Organisasi |
| | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan | % | 100 | 100 | 100 | | Biro Pemerintahan dan OTDA |
| | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian | % | 100 | 100 | 100 | | Biro Perekonomian |
| PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD | % | 85,36 | 85,36 | 100 | | Biro Organisasi |
| | Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat | % | 85,71 | 85,71 | 100 | | Biro Organisasi |
| | Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya | % | 77,14 | 77,14 | 100 | | Biro Organisasi |
| | Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan | % | 81,58 | 85,88 | 105,27 | | Biro Organisasi |
| | Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya | % | 29,27 | 29,27 | 100 | | Biro Organisasi |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat | % | 91,84 | 91,84 | 100 | | Biro Organisasi |
| | Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat | % | 73,17 | 87,8 | 119,99 | | Biro Organisasi |
| | Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan | % | 73,65 | 73,65 | 100 | | Biro Organisasi |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | Efektivitas kerjasama daerah | % | 90 | 100 | 111,11 | | Biro Pemerintahan dan OTDA |
| | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti | % | 90 | 100 | 111,11 | | Biro Pemerintahan dan OTDA |
| | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah | % | 90 | 100 | 111,11 | | Biro Pemerintahan dan OTDA |
| PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar | % | 90 | 91,64 | 101,82 | | Biro Kesejahteraan rakyar |
| | Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar | % | 90 | 100 | 111,11 | | Biro Kesejahteraan rakyar |
| | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik | % | 40 | 40 | 100,00 | | Biro Kesejahteraan rakyar |
| PROGRAM FASILITASI DAN | | | | | | | Sekretariat Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| KOORDINASI HUKUM | | | | | | | |
| | Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani | % | 95 | 100 | 105,26 | | Biro Hukum |
| | Persentase kabupaten/kota peduli HAM | % | 95 | 100 | 105,26 | | Biro Hukum |
| | Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan | % | 95 | 100 | 105,26 | | Biro Hukum |
| | Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi | % | 95 | 100 | 105,26 | | Biro Hukum |
| PROGRAM PEREKONOMIA NDANPEMBANG UNAN | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | Nilai kemandirian BLUD | % | 50 | 69,34 | 138,68 | | Biro Perekonomian |
| | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan | % | 80 | 87,5 | 109,38 | | Biro Perekonomian |
| | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan | % | 75 | 75 | 100,00 | | Biro Perekonomian |
| | Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur | % | 95 | 98,99 | 104,20 | | Biro ISDA |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan | % | 90 | 97,05 | 107,83 | | Biro ISDA |
| | Presentase capaian kinerja program bidang pertanian | % | 87 | 93,42 | 107,38 | | Biro ISDA |
| | Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha | % | 75 | 85,71 | 114,28 | | Biro Perekonomian |
| | Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan | % | 80 | 94,59 | 118,24 | | Biro Perekonomian |
| PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | Efektivitas Pengadaan secara Elektronik | % | 85 | 95,27 | 112,08 | | Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
| | Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa | % | 93 | 94,8 | 101,94 | | Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
| | Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi | % | 90 | 90 | 100,00 | | Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
| PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | Capaian Pelaksanaan APBD | % | 98 | 99,09 | 101,11 | | Biro Adm Bangda |
| | Capaian Pelaksanaan APBN | % | 95 | 98,99 | 104,20 | | Biro Adm Bangda |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah | % | 80 | 92 | 115,00 | ● | Biro Adm Bangda |
| | Persentase realisasi bantuan keuangan | % | 83 | 99,57 | 119,96 | ● | Biro Adm Bangda |
| | Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi | % | 100 | 100 | 100,00 | ● | Biro Adm Bangda |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 47 indikator kinerja seluruhnya berstatus telah tercapai.

2. Sekretariat DPRD

Kinerja unsur Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 36
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI | | | | | | | Sekretariat DPRD |
| | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD | % | 100 | 100 | 100,00 | ● | Bagian Umum |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD | % | 100 | 100 | 100,00 | ● | Sekretariat DPRD |
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | | | Sekretariat DPRD |
| | Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA | % | 95 | 95 | 100,00 | ● | Bagian Persidangan |
| | Persentase Layanan Bagian Humas | % | 95 | 95 | 100,00 | ● | Bagian Humas |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator kinerja dengan status tercapai.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Kinerja penyelenggaran unsur Perencanaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 37
Capaian Kinerja Perencanaan

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan analisis data pembangunan | % | 90 | 90 | 100,00 | ● | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | yang disusun sesuai peraturan perundang - undangan | | | | | | |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor | % | 90 | 90 | 100,00 | ● | Bidang Kajian dan Pengembangan |
| | Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup | % | 90 | 90 | 100,00 | ● | Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah |
| | Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya | % | 90 | 90 | 100,00 | ● | Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya |
| | Presentasi konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang perekonomian | % | 90 | 90 | 100,00 | ● | Bidang Perekonomian |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja dengan 1 indikator tercapai dan 4 indikator akan tercapai.

2. Keuangan

Kinerja penyelenggaran unsur Keuangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 38
Capaian Kinerja Keuangan

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu | % | 1 | 100 | 10000,00 | | Sekretariat |
| | Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan | % | 100 | 100 | 100,00 | | Sekretariat |
| | Persentase Penetapan APBD tepat waktu | % | 100 | 100 | 100,00 | | Bidang Anggaran |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu | % | 100 | 100 | 100,00 | | Bidang Akuntansi |
| | Persentase realisasi serapan APBD | % | 92 | 98,65 | 107,23 | | Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah | % | 70 | 77,2 | 110,29 | | Bidang Aset daerah |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | | | Badan Pengelola Pendapatan Daerah |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertangani | % | 8 | 8 | 100 | | Bidang Pajak Kendaraan Bermotor |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | | | | | | | Kabupaten Demak |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | | | | | | | Kabupaten Boyolali |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | | | | | | | Kabupaten Batang |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Tegal | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | | | | | | | Kabupaten Banjarnegara |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Magelang | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo | % | 8 | 8 | 100 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. |
| | Persentase Pemanfaatan Informasi Pendapatan Daerah | % | 95 | 95 | 100 | | Bidang Pengelolaan Data dan Pegembangan Pendapatan |
| | Persentase Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah | % | 90 | 100,85 | 112,06 | | Bidang Evaluasi dan Pembinaan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| ` | Persentase Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | % | 9,13 | 8,96 | 98,14 | ▼ | Bidang Retribusi dan Pendapatan lain |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB | % | 10,03 | 8,35 | 83,25 | ▼ | Bidang Pajak Kendaraan Bermotor |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I | % | 5,72 | 5,28 | 92,31 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II | % | 5,44 | 5,10 | 93,75 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III | % | -1,72 | -1,83 | 93,99 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang | % | 13,93 | 12,14 | 87,15 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga | % | 21,52 | 17,12 | 79,55 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal | % | 6,43 | 5,65 | 87,87 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak | % | 7,67 | 6,27 | 81,75 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan | % | 10,48 | 8,35 | 79,68 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta | % | 9,93 | 8,92 | 89,83 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten | % | 8,34 | 6,99 | 83,81 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen | % | 18,90 | 15,53 | 82,17 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | 16,96 | 14,45 | 85,20 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri | % | 11,63 | 9,61 | 82,63 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar | % | 12,29 | 10,29 | 83,73 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali | % | 16,34 | 12,87 | 78,76 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati | % | 3,21 | 2,50 | 77,88 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora | % | -1,70 | -1,93 | 88,08 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang | % | 15,75 | 12,02 | 76,32 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus | % | 13,82 | 10,67 | 77,21 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara | % | 7,22 | 5,45 | 75,48 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan | % | 26,53 | 22,51 | 84,85 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan | % | 18,54 | 14,86 | 80,15 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang | % | 5,67 | 4,89 | 86,24 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang | % | 1,21 | 1,01 | 83,47 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal | % | 6,27 | 5,34 | 85,17 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal | % | 10,15 | 8,30 | 81,77 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes | % | 4,36 | 3,91 | 89,68 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas | % | 13,68 | 11,11 | 81,21 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap | % | 2,70 | 2,26 | 83,70 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga | % | 31,14 | 24,62 | 79,06 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | 19,12 | 14,80 | 77,41 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang | % | 15,71 | 12,19 | 77,59 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang | % | 14,69 | 11,05 | 75,22 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen | % | 14,44 | 11,27 | 78,05 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo | % | 15,45 | 12,48 | 80,78 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung | % | 17,17 | 12,93 | 75,31 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo | % | 23,35 | 16,87 | 72,25 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan Lain lain Pendapatan Yang sah | % | 0,08 | 0,10 | 125,00 | ● | Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok | % | 10,86 | 12,14 | 111,79 | ● | Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan PAP | % | 13,26 | 14,46 | 109,05 | ● | Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II | % | -0,08 | -0,09 | 88,89 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III | % | 106,62 | 144,33 | 135,37 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Semarang | % | 21,50 | 23,50 | 109,30 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga | % | 4,35 | 4,41 | 101,38 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal | % | 32,47 | 46,22 | 142,35 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak | % | 26,99 | 26,11 | 96,74 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Grobogan | % | 29,76 | 31,80 | 106,85 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta | % | 1,09 | 0,98 | 89,91 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP | % | 10,82 | 10,85 | 100,28 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | UPPD Kabupaten Klaten | | | | | | Kabupaten Klaten |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen | % | -72,67 | -6,11 | 1.189,36 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | 4,35 | 3,44 | 79,08 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri | % | 38,20 | 34,91 | 91,39 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar | % | 32,48 | 31,88 | 98,15 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Boyolali | % | 14,91 | 15,78 | 105,84 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati | % | 20,36 | 21,26 | 104,42 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora | % | 39,40 | 36,78 | 93,35 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP | % | 24 | 24,59 | 102,46 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | UPPD Kabupaten Rembang | | | | | | Kabupaten Rembang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus | % | -78 | 406,05 | 100,00 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara | % | 15 | 16,45 | 109,67 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan | % | 60 | 71,21 | 118,68 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang | % | 53,35 | 57,07 | 106,97 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pemalang | % | 12,19 | 13,03 | 106,89 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal | % | 10,53 | 12,21 | 115,95 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes | % | 4,32 | 4,66 | 107,87 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP | % | 8,62 | 9,41 | 109,16 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | UPPD Kabupaten Banyumas | | | | | | Kabupaten Banyumas |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap | % | 7,85 | 7,73 | 98,47 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga | % | 57,91 | 74,06 | 127,89 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | -2,63 | -1,62 | 162,35 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Magelang | % | 50,29 | 52,57 | 104,53 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Magelang | % | 23,11 | 24,38 | 105,50 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kebumen | % | 22,40 | 22,93 | 102,37 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purworejo | % | 11,60 | 11,76 | 101,38 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Temanggung | % | 4,38 | 5,10 | 116,44 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | | | | | | | Kabupaten Temanggung |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo | % | 2,92 | 2,92 | 100,00 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan PBBKB | % | 8 | 8,34 | 104,25 | ● | Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan PKB | % | 7,11 | 6,99 | 98,31 | ▼ | Bidang Pajak Kendaraan Bermotor |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I | % | 5,42 | 4,85 | 89,48 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II | % | 5,39 | 5,73 | 106,31 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III | % | 1,87 | 1,73 | 92,51 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang | % | -1,62 | -1,46 | 110,96 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga | % | -11,87 | -10,31 | 115,13 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal | % | 18,34 | 16,25 | 88,60 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak | % | 7,58 | 7,39 | 97,49 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan | % | 9,70 | 9,32 | 96,08 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta | % | -4,60 | -4,23 | 108,75 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten | % | 7,87 | 7,30 | 92,76 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen | % | 11,15 | 10,71 | 96,05 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | 19,66 | 18,43 | 93,74 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri | % | 0,46 | 0,47 | 102,17 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar | % | 19,10 | 16,58 | 86,81 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali | % | 16,22 | 15,43 | 95,13 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati | % | 4,36 | 4,33 | 99,31 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora | % | 0,19 | 0,20 | 105,26 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang | % | -1,97 | -1,87 | 105,35 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus | % | 2,07 | 2,08 | 100,48 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara | % | 12,94 | 12,69 | 98,07 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan | % | -27,27 | -12,79 | 213,21 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan | % | 29,80 | 25,37 | 85,13 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang | % | 25,43 | 22,43 | 88,20 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang | % | 17,27 | 15,71 | 90,97 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Tegal | % | -30,09 | -13,28 | 226,58 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal | % | 42,59 | 30,81 | 72,34 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes | % | 17,69 | 14,77 | 83,49 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas | % | 12,17 | 11,49 | 94,41 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap | % | 11,11 | 10,63 | 95,68 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga | % | 1,27 | 1,32 | 103,94 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | 25,87 | 21,24 | 82,10 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Magelang | % | -53,99 | 18,21 | 100 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang | % | 18,77 | 16,06 | 85,56 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen | % | 12,12 | 11,27 | 92,99 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo | % | -2,62 | -2,38 | 110,08 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung | % | 13,87 | 12,03 | 86,73 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo | % | 13,95 | 12,86 | 92,19 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah | % | 3,91 | 3,76 | 96,16 | ▼ | Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada | % | 2,74 | 2,68 | 97,81 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | UPPD Kota Semarang I | | | | | | Daerah Kota Semarang I |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II | % | 3,40 | 3,08 | 90,59 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang III | % | 7,38 | 6,75 | 91,46 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang | % | 2,02 | 2,06 | 101,98 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga | % | 1,09 | 1,13 | 103,67 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal | % | 1 | 1,05 | 105,00 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak | % | 0,86 | 0,88 | 102,33 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan | % | 3 | 3,11 | 103,67 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada | % | 9,94 | 10,28 | 103,42 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | UPPD Kota Surakarta | | | | | | |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten | % | 9,84 | 9,95 | 101,12 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sragen | % | 9,18 | 9,60 | 104,58 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | 2,19 | 2,26 | 103,20 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri | % | 1,72 | 1,77 | 102,91 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar | % | 0,46 | 0,47 | 102,17 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali | % | 8,91 | 9,08 | 101,91 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati | % | -26,09 | -26,70 | 97,72 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada | % | 6,49 | 6,74 | 103,85 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | UPPD Kabupaten Blora | | | | | | Kabupaten Blora |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang | % | 2,03 | 1,95 | 96,06 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kudus | % | 1,62 | 1,73 | 106,79 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara | % | 1,41 | 1,61 | 114,18 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan | % | 1,29 | 1,31 | 101,55 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan | % | 2,49 | 2,65 | 106,43 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Batang | % | 0 | 0 | 100,00 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang | % | 10 | 10,10 | 101,00 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang |
| | Persentase peningkatan penerimaan | % | 14,29 | 9,48 | 66,34 | ▼ | Unit Pelayanan Pendapatan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal | | | | | | Daerah Kota Tegal |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Tegal | % | 1,76 | 1,94 | 110,23 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes | % | 9,16 | 9,27 | 101,20 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banyumas | % | 0 | 0 | 100,00 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap | % | 1,40 | 1,44 | 102,86 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga | % | 1,11 | 1,16 | 104,50 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | 0,82 | 0,82 | 100,00 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Magelang | % | 7,27 | 7,63 | 104,95 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada | % | 1,35 | 1,73 | 128,15 | | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | UPPD Kabupaten Magelang | | | | | | Kabupaten Magelang |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen | % | 11,15 | 11,46 | 102,78 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purworejo | % | 6,50 | 6,65 | 102,31 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Temanggung | % | 3,68 | 4,22 | 114,67 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo | % | 10,95 | 11,02 | 100,64 | ● | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki 193 indikator, realisasi pada tahun 2022 terdapat 114 indikator yang capaiannya melebihi 100% dan 79 indikator memiliki capaian dibawah 100%. Dari jumlah 79 indikator kinerja yang tidak mencapai target. Pada indikator kinerja persentase peningkatan penerimaan PKB terdapat 35 indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu pada Persentase Peningkatan Penerimaan PKB pada Bidang PKB, UPPD Kota Semarang I, UPPD Kota Semarang III, UPPD Kabupaten Kendal, UPPD Kabupaten Demak, UPPD Kabupaten Grobogan, UPPD Kabupaten Klaten, UPPD Kabupaten Sragen, UPPD Kabupaten Sukoharjo, UPPD Kabupaten Karanganyar, UPPD Kabupaten Boyolali, UPPD Kabupaten Pati, UPPD Kabupaten Jepara, UPPD Kabupaten Pekalongan, UPPD Kabupaten Batang, UPPD Kabupaten Pemalang, UPPD Kabupaten Tegal, UPPD Kabupaten Brebes, UPPD Kabupaten Banyumas, UPPD Kabupaten Cilacap, UPPD Kabupaten

Banjarnegara, UPPD Kabupaten Magelang, UPPD Kabupaten Kebumen, UPPD Kabupaten Temanggung, UPPD Kabupaten Wonosobo. Ketidaktercapaian target dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, belum pulihnya kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi covid 19.

Pada indikator kinerja persentase peningkatan penerimaan BBNKB terdapat 38 indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu pada Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB Bidang PKB, UPPD Kota Semarang I, UPPD Kota Semarang II, UPPD Kota Semarang III, UPPD Kabupaten Semarang, UPPD Kota Salatiga, UPPD Kabupaten Kendal, UPPD Kabupaten Demak, UPPD Kabupaten Grobogan, UPPD Kota Surakarta, UPPD Kabupaten Klaten, UPPD Kabupaten Sragen, UPPD Kabupaten Sukoharjo, UPPD Kabupaten Wonogiri, UPPD Kabupaten Karanganyar, UPPD Kabupaten Boyolali, UPPD Kabupaten Pati, UPPD Kabupaten Blora, UPPD Kabupaten Rembang, UPPD Kabupaten Kudus, UPPD Kabupaten Jepara, UPPD Kota Pekalongan, UPPD Kabupaten Pekalongan, UPPD Kabupaten Batang, UPPD Kabupaten Pemalang, UPPD Kota Tegal, UPPD Kabupaten Tegal, UPPD Kabupaten Brebes, UPPD Kabupaten Banyumas, UPPD Kabupaten Cilacap, UPPD Kabupaten Purbalingga, UPPD Kabupaten Banjarnegara, UPPD Kota Magelang, UPPD Kabupaten Magelang, UPPD Kabupaten Kebumen, UPPD Kabupaten Purworejo, UPPD Kabupaten Temanggung, UPPD Kabupaten Wonosobo. Ketidaktercapaian target dikarenakan adanya fenomena kelangkaan pasokan chip semikonduktor yang berdampak pada stok dan penjualan motor baru. Data dari Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI) menunjukkan angka penjualan kendaraan bermotor roda dua selama Mei tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis. Selama periode tersebut penjualan domestik pasar roda dua hanya sebanyak 248.235 unit. Angka ini turun sekitar 43% jika dibandingkan pencapaian bulan sebelumnya atau April 2022 yang membukukan penjualan 439.472 unit. Setiap pendaftaran unit kendaraan bermotor baru, selain dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan tarif sebesar 12,5% juga dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif untuk kepemilikan pertama pribadi sebesar 1,5%. Dengan demikian, tidak tercapainya pendapatan BBNKB juga berdampak langsung terhadap penerimaan PKB. sehingga mempengaruhi penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pada indikator kinerja persentase peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan terdapat 8 indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu pada Persentase Peningkatan Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II, UPPD Kabupaten Demak, UPPD Kota Surakarta, UPPD Kabupaten Sukoharjo, UPPD Kabupaten Wonogiri, UPPD Kabupaten Karanganyar, UPPD Kabupaten Blora, UPPD Kabupaten Cilacap. Ketidaktercapaian target dikarenakan ada beberapa yang tutup, adanya pengurangan produksi dan ada beberapa potensi air permukaan dalam perbaikan jaringan pipa.

Pada indikator kinerja persentase peningkatan penerimaan retribusi kayada terdapat 7 indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu pada Persentase

Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah Bidang Retribusi dan PL, UPPD Kota Semarang I, UPPD Kota Semarang II, UPPD Kota Semarang III, UPPD Kabupaten Pati, UPPD Kabupaten Rembang, dan UPPD Kota Tegal. Ketidaktercapaian target diantaranya karena sewa gedung pertemuan yang sepi peminat, beberapa penyewa lahan yang mengundurkan diri, pemanfaatan sewa digital sign di UPPD Kota Semarang I, II, dan III yang semula di sewa oleh PT. SPJT sudah tidak diperpanjang lagi, serta adanya penyesuaian khususnya pemakaian kekayaan daerah pada obyek retribusi kantin sekolah karena kantin belum sepenuhnya beroperasi dan sedang dalam masa transisi pasca pandemi covid19.

Indikator kinerja persentase peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak mencapai target merupakan konsekuensi logis atas divestasi atau penarikan modal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pemegang saham kepada PT. SPJT pada tahun 2022 sehingga berakibat pada menurunnya laba perusahaan dan menurunnya pembagian deviden.

3. Kepegawaian

Kinerja penyelenggaran unsur Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 38
Capaian Kinerja Kepegawaian

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | | | Badan Kepegawaian Daerah |
| | Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian | % | 100 | 100 | 100 | | Bidang Mutasi |
| | Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya | % | 100 | 100 | 100 | | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai |
| | Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar | % | 80 | 80 | 100 | | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai |
| | Presentase penanganan kasus kepegawaian | % | 100 | 100 | 100 | | Bidang Pembinaan dan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | | | | | | | Kesejahteraan Pegawai |
| | Presentase PNS yang terpetakan kompetensinya | % | 80 | 210 | 262,5 | ● | Unit Penilaian Kompetensi ASN kelas A |
| | Presentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan | % | 80 | 80 | 100 | ● | Bidang Informasi Kepegawaian |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja dengan status tercapai

4. Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaran unsur pendidikan dan pelatihan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 39
Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan | Skor | 3,5 | 3,55 | 101,43 | ● | Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu |
| | Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS | % | 100 | 100 | 100 | ● | Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional | % | 100 | 100 | 100 | ● | Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional |
| | Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial | % | 100 | 100 | 100 | ● | Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial |
| | Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis | % | 100 | 100 | 100 | ● | Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis |
| | Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti | % | 79 | 89,23 | 112,95 | ● | Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu |
| | Persentase PNS yang lulus uji kompetensi | % | 80 | 97,65 | 122,06 | ● | Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja dengan status tercapai.

5. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaran urusan penelitian dan pegembangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 40
Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang ekonomi dan industri | % | 20 | 20 | 100 | | UPT Brida |
| | Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang pemerintahan, sosial, dan budaya | % | 20 | 20 | 100 | | UPT Brida |
| | Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | % | 20 | 20 | 100 | | UPT Brida |
| | Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Ekonomi dan Industri | % | 84 | 84 | 100,00 | | UPT Brida |
| | Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya | % | 84 | 84 | 100,00 | | UPT Brida |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | % | 84 | 84 | 100,00 | | UPT Brida |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja dengan 6 indikator akan tercapai

6. Penghubung

Kinerja penyelenggaran unsur penghubung ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | | | | | | | Badan Penghubung |
| | Persentase Ketercapaian Pelayanan Penghubung | % | 100 | 100 | 100 | | Badan Penghubung |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

: Tercapai ≥ 100% :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Penghubung ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja dengan status tercapai.

## 2.4. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Kinerja penyelenggaran unsur pengawasan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 41
Capaian Kinerja Pengawasan

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | | | INSPEKTORAT |
| | Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah | % | 85 | 107,87 | 126,91 | | Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan akuntabilitas Keuangan Daerah |
| | Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Khusus | % | 85 | 112,5 | 132,35 | | Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus |
| | Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah | % | 85 | 127,27 | 149,73 | | Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja PD |
| | Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | % | 85 | 122,78 | 144,45 | | Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan | % | 85 | 127,06 | 149,48 | | Sekretariat |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | | | |
| | Nilai Self Assessment RB Provinsi | Nilai | 85 | 88,35 | 103,94 | | Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan RB |
| | Persentase Capaian Aksi Stranas PK | % | 75 | 84,2 | 112,27 | | Inspektur Pembantu Bidang |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | | | | | | | Pengawasan RB |
| | Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi | % | 100 | 100 | 100,00 | ● | Sekretariat |
| | Persentase Nilai MCP korsupgah | % | 85 | 94,02 | 110,61 | ● | Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan RB |
| | Persentase Penerapan MR di OPD | % | 10 | 10 | 100,00 | ● | Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan RB |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Pemerintahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 indikator kinerja dengan seluruh indikator berstatus telah tercapai.

## *2.5.* Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja penyelenggaran unsur pemerintahan umum ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 42
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Nilai | 3,14 | 4,2 | 133,76 | | Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional |
| PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Nilai | 3,1 | 4 | 129,03 | | Bidang Politik Dalam Negeri |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Nilai | 2,92 | 3,2 | 109,59 | | Bidang Ketahanan Bangsa |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang | Nilai | 3,23 | 3,25 | 100,62 | | Bidang Ketahanan Bangsa |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | | |
| | Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Nilai | 2,7 | 4,8 | 177,78 | ● | Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

● : Tercapai ≥ 100% ▼ :Perlu Upaya Keras < 100% NA : Data Belum Tersedia

Kinerja penyelenggaran urusan Pemerintahan Umum ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja dengan seluruh indikator berstatus telah tercapai.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SETDA
IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2024

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **5.238.338.908.000** | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 74.57 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **5.178.892.703.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 3.2 | 5.178.892.703.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 5.178.892.703.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 5.153.572.939.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 5.032.592.069.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 5.032.592.069.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 5.029.965.692.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 32844 | 5.029.965.692.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2.626.377.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.626.377.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 325.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 325.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0001 | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 3 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.03.0007 | | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 425.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 425.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 3 | 250.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 2 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | | | | 100.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Orang | 3 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 2.666.635.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 2.666.635.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 646.635.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 646.635.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1.100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 1.100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 2 | 70.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 70.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 810.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 50 | 810.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 2 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 10 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 4 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 5 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 310.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 50 | 310.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 114.899.235.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 114.899.235.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 2.488.592.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 2.488.592.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 112.190.643.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 112.190.643.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.855.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 100 | 1.855.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 17 | 240.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 200 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | Bulan | 12 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 3 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 15 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 210 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 250 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.511.650.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 362.150.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 362.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 72.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 72.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 149.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 149.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 230.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 8 | 230.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 30 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 499.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 499.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 278.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 278.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 210.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 210.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 370.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 509 | 370.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 5 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 369 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 493 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.321.150.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 448.650.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 448.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 20.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 8.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 8.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 175.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 6 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 5 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 358.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 358.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 198.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 198.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 434.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 434.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 12 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 15 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang direhabilitasi | Unit | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.302.399.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 416.399.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 416.399.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 158.399.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 10 | 158.399.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 13 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 7 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 4 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 366.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 48 | 366.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 97 | 450.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 18.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 22 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 40.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 68 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.285.850.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN V | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 6.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 6.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 6.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 6.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 607.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 607.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 287.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor | Paket | 1 | 287.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 2 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 57.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 10 | 57.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 57.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 4 | 57.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 452.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Laporan | 1 | 452.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 3.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 188.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 188.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 255.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 255.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 162.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 162.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 3.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 20 | 3.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 12.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya Yang Dipelihara | Unit | 24 | 12.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 61.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Unit Gedung Yang Direhab | Unit | 2 | 61.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Unit Gedung Yang Direhab | Unit | 10 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.576.150.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 478.950.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 478.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 38.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 38.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 4.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 24 | 4.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 48.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 48.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 235.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 235.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 650.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 5 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 500.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 335.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Laporan | 12 | 335.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 108.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 108.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 207.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 207.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 107.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 18 | 107.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 22.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 5 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 18.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 10 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.491.900.000 | Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 245.100.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 2 | 245.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 97.300.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 97.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 8 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Paket | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 78.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Paket | 12 | 78.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 10 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 4 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 749.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 749.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 273.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 273.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 475.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 475.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 465.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 280 | 465.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 10.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 2 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 60 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 210 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 3 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 195.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 195.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 155.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 155.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.483.150.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN III | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 366.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 366.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 60.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 22 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 2 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 15 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 483.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 48 | 483.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 220.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 464.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 68 | 464.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 8 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 3 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 45 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 9.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 3 | 9.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 350.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.496.150.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 377.150.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 377.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 99.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 2 | 99.550.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 179.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 179.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 606.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 10 | 606.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 7 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 546.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 546.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 394.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | | 394.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 188.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 188.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 119.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 5 | 119.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 40 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 55 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 29.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 29.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.888.150.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 100 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 510.150.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 1 | 510.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 93.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 93.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 190.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 190.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 435.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 10 | 435.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 2 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 235.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 235.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 448.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 448.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 240.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 192.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 192.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 465.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 465.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 20 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 20 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 5 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 5 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 80.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas | Unit | 3 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 2.567.200.000 | Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 231.550.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 231.550.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 31.015.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 31.015.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 52.752.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 3 | 52.752.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 33.207.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 33.207.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 19.695.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 19.695.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 17.506.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 17.506.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 2 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 7.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 7.875.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 68.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 68.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 146.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 10 | 146.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 40.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 5 | 40.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.767.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 1.767.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 3.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 660.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 660.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 15.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 15.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.088.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.088.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 386.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 28 | 386.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 2 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 39.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 8 | 39.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 2 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 203.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 6 | 203.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.229.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 430.000.000 | | |
| | | | | | | Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah | % | 100 | 430.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 15.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 95.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 10 | 95.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 2 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 10 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 5 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 319.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 319.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 110.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 110.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 355.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 10 | 355.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 6 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 10 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 24 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 110.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.141.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN X | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 492.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 492.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 33.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 4 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 379.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 379.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 3 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 250.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 27 | 190.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 5 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 15 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 2.795.365.000 | Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 424.354.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 424.354.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 45.990.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 45.990.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 56.909.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 56.909.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 51.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 51.480.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 33.210.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 3 | 33.210.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 10.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 57.515.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 57.515.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 169.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 169.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 196.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 80 | 196.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 3 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 126.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 23 | 126.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.918.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 1.918.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 543.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 543.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.374.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.374.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 211.311.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 21 | 211.311.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 7 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 5 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 66.711.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 66.711.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 89.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 250 | 89.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.196.500.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN II | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 388.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 388.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 65.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 127.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 20 | 127.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 127.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 10 | 127.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 426.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 426.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 216.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 216.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 255.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 15 | 255.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 15 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.336.150.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN I | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 359.150.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 359.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 2 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 2 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 99.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 99.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 152.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 10 | 152.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 132.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 4 | 132.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset Tak Berwujud yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 5 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 445.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 445.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 11 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 20 | 350.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 10 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 5 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.698.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 431.650.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 431.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 29.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 2 | 29.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 65.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 503.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 12 | 503.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 2 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 133.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 8 | 133.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 436.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 21 | 436.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 179.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 179.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 241.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 241.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 327.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 145 | 327.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 37.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 37.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 60 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 21 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 49 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **59.446.205.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.18 | 59.446.205.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 59.446.205.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 59.446.205.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 59.446.205.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | Angka | 100 | 59.446.205.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 59.234.455.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 5 | 59.234.455.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 211.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 6 | 211.750.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| **Meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan inklusif** | | | | | | | | | **3.710.760.299.000** | | |
| | | | | | | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12.94 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | | | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 8.08 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | **Meningkatnya akses pemerataan pendidikan** | | | | | | | | **1.126.294.609.000** | | |
| | | | | | | APK SMA, SMK dan SLB | % | 82.92 | 1.126.294.609.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | | 1.125.210.747.000 | | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I | % | 90.54 | 620.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN I | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I | % | 76.65 | 400.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.003 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 1 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0070 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I | % | 90 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0016 | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel sekolah yang tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi | Ruang | 1 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN I | % | 90.05 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II | % | 76.59 | 1.300.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN II | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II | % | 30.228 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 4 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Kompuer yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.01.02.1.01.0070 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 950.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II | % | 40.571 | 950.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.02.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.01.02.1.02.0016 | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 3 | 400.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 10 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 1 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN II | % | 72 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 2 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III | % | 75.57 | 1.050.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN III | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III | % | 72.39 | 500.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 3 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0070 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III | % | 90.14 | 400.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 1 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0016 | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 2 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN III | % | 86.68 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV | % | 25.69 | 1.238.383.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 688.383.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IV | % | 73.4 | 688.383.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 688.383.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 3 | 688.383.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IV | % | | 400.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | 1.01.02.1.02.0016 | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah ruang guru/ kepala sekolah  ruang guru/ kepala sekolah/ TU yang telah direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Unit | 60 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 3 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IV | % | 84.83 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX | % | 54.59 | 2.200.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX | % | 24.82 | 800.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 1 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 4 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 4 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0070 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 1.250.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX | % | 88.42 | 1.250.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 1 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 1.01.02.1.02.0016 | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 4 | 450.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 4 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi | Ruang | 4 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IX | % | 83.06 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 4 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V | % | 93.71 | 1.150.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN V | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V | % | 69.33 | 500.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 6 | 350.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 2 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0070 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V | % | 88.08 | 500.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0016 | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 6 | 350.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN V | % | 92.5 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI | % | 79.86 | 1.550.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI | % | 80 | 350.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 2 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 1 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0070 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 1.050.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VI | % | 88 | 1.050.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0016 | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 1 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 1 | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 2 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VI | % | 87 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII | % | 72.83 | 850.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII | % | 50.27 | 350.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 2 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Fisika Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Kimia Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Kompuer Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Bahasa Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 2 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 1.01.02.1.01.0070 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII | % | 64.17 | 400.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0016 | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 5 | 400.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VII | % | 188.16 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 5 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII | % | 77.11 | 1.000.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII | % | 78.3 | 450.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 5 | 350.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 1 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0070 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII | % | 89.5 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.01.02.1.02.0016 | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi | Ruang | 2 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VIII | % | 81.05 | 250.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 1 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 3 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X | % | 77.81 | 970.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN X | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X | % | 66.88 | 260.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 2 | 260.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0070 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 560.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X | % | 88.97 | 560.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0016 | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 1 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 2 | 260.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN X | % | 89.97 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI | % | 87.73 | 1.250.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI | % | 82.39 | 500.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 2 | 350.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.01.0070 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI | % | 84.39 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.02.0016 | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 2 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 2 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XI | % | 83.39 | 450.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 2 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 3 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII | % | 81 | 875.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII | % | 75 | 500.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 2 | 350.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 2 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | 1.01.02.1.01.0070 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII | % | 91.2 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0016 | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah ruang guru/ kepala sekolah ruang guru/ kepala sekolah/ TU yang telah direhabilitasi | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 2 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XII | % | 93 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 1 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII | % | 88.25 | 650.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII | % | 75.25 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitas | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 2 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 1 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0070 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII | % | 84.76 | 250.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit pembangunan RPS | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit pembangunan Laboratorium | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit Pembangunan Sarana Prasarana dan utilitas sekolah | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0016 | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah ruang guru/ kepala sekolah ruang guru/ kepala sekolah/ TU yang telah direhabilitasi | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Unit | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | 2 | 250.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 100.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XIII | % | 81.11 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Parasana dan Utilitas Sekolah yang dibangun | Unit | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Unit | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 0 | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 2 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | | | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB | % | 10.53 | 79.403.729.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 79.403.729.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan | Angka | 20 | 79.403.729.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 102.281.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 1 | 102.281.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.03.0004 | | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | 509.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 5 | 509.700.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 28.948.791.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 30 | 28.948.791.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.03.0035 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 40.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 493 | 40.000.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.03.0040 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | 439.422.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 6 | 439.422.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.03.0067 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.03.0077 | | | Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 9.403.535.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 58 | 9.403.535.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA | % | 65 | 423.372.183.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 423.372.183.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan | Angka | 550 | 423.372.183.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 2.277.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 7 | 2.277.600.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0010 | | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | 1.929.795.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 6 | 1.929.795.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0011 | | | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 21.595.968.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 75 | 21.595.968.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 46.248.692.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 98 | 46.248.692.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 2.498.325.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 14 | 2.498.325.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | | | | 745.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 3 | 745.875.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | | | | 2.502.266.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 3 | 2.502.266.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0024 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | | | | 726.975.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 5 | 726.975.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa | | | | 297.675.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 2 | 297.675.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0027 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | 682.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 5 | 682.500.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0028 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 121.750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 2 | 121.750.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0041 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | 212.760.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 45 | 212.760.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 4.748.962.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 38 | 4.748.962.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0070 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | 3.404.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun | Ruang | 7 | 3.404.700.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | 1.202.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 5 | 1.202.850.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | | | | | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK | % | 60 | 578.408.526.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 578.408.526.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan | Angka | 246 | 578.408.526.000 | Bidang Pembinaan SMK | |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | | | | 41.344.526.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun | Ruang | 35 | 41.344.526.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | 13.580.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Ruang | 40 | 13.580.880.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0006 | | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0007 | | | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 8.963.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 56 | 8.963.120.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 0 | | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 81.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 1000 | 81.000.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0033 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | 411.020.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 45 | 411.020.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 0 | | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 22.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 150 | 22.500.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0075 | | | Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB | Angka | 10 | 5.706.203.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 5.706.203.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB | Angka | 10 | 1.421.707.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.02.1.03.0070 | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | 1.421.707.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah | Ruang | 8 | 1.421.707.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB | Angka | 3 | 4.284.496.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.02.1.03.0001 | | | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | 4.284.496.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Unit | 1 | 4.284.496.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA | Angka | 36 | 15.460.850.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 15.460.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru | Angka | 8 | 2.660.850.000 | Bidang Pembinaan SMA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.01.0072 | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | 2.660.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | 9 | 2.660.850.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan | Angka | 306 | 12.800.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0001 | | | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | | | | 12.800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Unit | 3 | 12.800.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK | Angka | 0.55 | 8.155.873.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 8.155.873.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK | Angka | 20 | 3.459.300.000 | Bidang Pembinaan SMK | |
| | | 1.01.02.1.02.0064 | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | 3.459.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | 20 | 3.459.300.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK | Angka | 2 | 4.696.573.000 | Bidang Pembinaan SMK | |
| | | 1.01.02.1.02.0001 | | | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | | | | 4.696.573.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Unit | 2 | 4.696.573.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | | | 341.362.000 | | |
| | | | | | | Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri) | % | 76.2 | 341.362.000 | Bidang Ketenagaan Dikbud | |
| | | | | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi | | | | | 341.362.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SLB | Orang | 23659 | 341.362.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.04.1.01.0002 | | | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | | | | 341.362.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | Laporan | 4 | 341.362.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | | | | | 742.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus | % | 100 | 35.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus | Dokumen | 5 | 35.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.05.1.02.0001 | | | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 5 | 35.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA | % | 15 | 50.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas | Dokumen | 20 | 50.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.05.1.01.0001 | | | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 15 | 50.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK | % | 93.93 | 65.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan | Dokumen | 65 | 65.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | |
| | | 1.01.05.1.01.0001 | | | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 65 | 65.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I | % | 3 | 50.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN I | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I | Dokumen | 2 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 2 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I | Dokumen | 2 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 2 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN I | Dokumen | 2 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II | % | 100 | 50.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN II | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN II | Angka | 3 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Angka | 3 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN II | Angka | 3 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Angka | 3 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN II | Angka | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III | % | 100 | 50.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN III | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN III | Dokumen | 2 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN III | Dokumen | 2 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN III | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV | % | 10 | 50.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN IV | Dokumen | | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN IV | Dokumen | | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN IV | Dokumen | | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX | % | 25 | 50.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN IX | Dokumen | 66 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 3 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX | Dokumen | 154 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 3 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN IX | Dokumen | 14 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 3 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V | % | 20 | 45.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN V | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN V | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN V | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN V | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI | % | 100 | 25.000.000 | | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN VI | Dokumen | 1 | 10.000.000 | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen | Dokumen | 1 | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN VI | Dokumen | 1 | 10.000.000 | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 10.000.000 | | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN VI | Dokumen | 1 | 5.000.000 | | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 5.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII | % | 100 | 50.000.000 | | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN VII | Dokumen | 2 | 20.000.000 | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 2 | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN VII | Dokumen | 2 | 20.000.000 | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 2 | 20.000.000 | | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN VII | Dokumen | 2 | 10.000.000 | | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 2 | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII | % | 100 | 50.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN VIII | Dokumen | 2 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 4 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN VIII | Dokumen | 2 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 4 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 10.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN VIII | Dokumen | 2 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X | % | 25 | 50.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN X | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN X | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN X | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN X | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI | % | 4.76 | 50.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN XI | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN XI | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN XI | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII | % | 100 | 22.500.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN XII | Dokumen | 2 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN XII | Dokumen | 2 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN XII | Dokumen | 1 | 2.500.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 2.500.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII | % | 100 | 50.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN XIII | Dokumen | 2 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 12 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN XIII | Dokumen | 2 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 12 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN XIII | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 12 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | **Meningkatnya mutu pendidikan** | | | | | | | | **2.562.723.240.000** | | |
| | | | | | | Nilai karakter siswa sekolah menengah | Angka | 85.44 | 751.800.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | | 751.800.000 | | |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I | Angka | 89.06 | 65.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN I | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I | Angka | 25 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun | Dokumen | 2 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I | Angka | 126 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun | Dokumen | 126 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I | Angka | 5 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | Dokumen | 2 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II | Angka | 81.22 | 65.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN II | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II | Angka | 55 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II | Angka | 107 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II | Angka | 2 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | % | 100 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III | Angka | 83.27 | 65.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN III | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III | Angka | 24 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun | Dokumen | 2 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III | Angka | 50 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun | Dokumen | 2 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III | Angka | 6 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | Dokumen | 2 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV | Angka | 81.77 | 65.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV | % | 100 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang tersusun | Dokumen | 2 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV | % | 0 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang tersusun | Dokumen | 2 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 15.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV | % | 100 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | Dokumen | 2 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX | Angka | 85.85 | 65.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX | Angka | 66 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX | Angka | 154 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX | Angka | 14 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | Dokumen | 1 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V | Angka | 88.34 | 65.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN V | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V | Unit | 60 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun | Dokumen | 60 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V | Unit | 108 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun | Dokumen | 108 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V | Angka | 29 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | Dokumen | 29 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI | Angka | 86.49 | 37.500.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI | Angka | 33 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas Yang Tersusun | Dokumen | 1 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI | Angka | 26 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan Yang Tersusun | Dokumen | 1 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI | Angka | 3 | 7.500.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus Yang Tersusun | Dokumen | 1 | 7.500.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII | Angka | 88.83 | 65.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII | Angka | 25 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun | Dokumen | 2 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII | Angka | 50 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun | Dokumen | 2 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII | Angka | 5 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | Dokumen | 2 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII | Angka | 89.03 | 47.150.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 32.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII | Angka | 32 | 16.075.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 16.075.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun | Dokumen | 1 | 16.075.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII | Angka | 19 | 16.075.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 16.075.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun | Dokumen | 1 | 16.075.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII | Angka | 13 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | Dokumen | 1 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X | Angka | 82.21 | 65.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN X | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X | Angka | 60 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun | Dokumen | 20 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X | Angka | 146 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun | Dokumen | 4 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X | Angka | 8 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | Dokumen | 2 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI | Angka | 83.27 | 54.150.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 44.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI | Angka | 41 | 21.760.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 21.760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun | Dokumen | 1 | 21.760.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI | Angka | 112 | 22.390.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 22.390.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun | Dokumen | 1 | 22.390.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI | Angka | 4 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII | Angka | 85.3 | 46.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 39.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII | Angka | 35 | 19.500.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 19.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun | Dokumen | 1 | 19.500.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII | Angka | 75 | 19.500.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 19.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun | Dokumen | 1 | 19.500.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII | Angka | 2 | 7.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | Dokumen | 1 | 7.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII | Angka | 86.06 | 47.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 35.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII | Angka | 55 | 16.600.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 16.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun | Dokumen | 1 | 16.600.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII | Angka | 79 | 18.600.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 18.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun | Dokumen | 1 | 18.600.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 11.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII | Angka | 7 | 11.800.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 11.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | Dokumen | 1 | 11.800.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah | Angka | 66.08 | 2.561.971.440.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | | 2.561.971.440.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SLB | % | 68.18 | 999.317.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 999.317.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional | Angka | 15 | 999.317.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 999.317.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 15 | 999.317.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA | % | 50 | 1.399.983.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 1.399.983.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional | Angka | 93 | 1.399.983.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 1.399.983.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 93 | 1.399.983.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I | % | 1.67 | 275.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN I | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I | Angka | 9 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 20 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I | Angka | 15 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 18 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN I | Angka | 3 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 2 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II | % | 1 | 275.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN II | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II | Angka | 3 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 132 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II | Angka | 1 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 85 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN II | Angka | 1 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 4 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III | % | 2.87 | 230.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN III | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III | Angka | 5 | 80.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 20 | 80.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III | Angka | 11 | 80.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 20 | 80.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN III | Angka | 2 | 70.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 3 | 70.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV | % | 1.25 | 275.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IV | Siswa | 2 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 133 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IV | Siswa | | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 86 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IV | Siswa | 2 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 27 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX | % | 3.22 | 275.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX | Angka | 0.52 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 25 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX | Angka | 5.6 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 3 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IX | Angka | 2.8 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 10 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V | % | 1.92 | 275.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN V | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V | Angka | 8 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 3 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V | Angka | 3 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 6 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN V | Angka | 2 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Unit | 3 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI | % | 90 | 262.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 95.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI | Angka | 20 | 95.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 95.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 132 | 95.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 95.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VI | Angka | 20 | 95.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 95.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 80 | 95.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 72.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VI | Angka | 5 | 72.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 72.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 30 | 72.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII | % | 2.74 | 245.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII | Angka | 20 | 90.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 15 | 90.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII | Angka | 6 | 90.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 5 | 90.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VII | Angka | 5 | 65.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 5 | 65.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII | % | 2.2 | 265.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII | Angka | 4 | 90.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 20 | 90.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII | Angka | 5 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 20 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VIII | Angka | 5 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 4 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X | % | 28.57 | 203.150.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN X | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 68.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X | Angka | 5 | 68.150.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 68.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 80 | 68.150.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X | Angka | 5 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 146 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN X | Angka | 3 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 4 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI | % | 3.63 | 275.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI | Angka | 5 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Angka | 30 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI | Angka | 6 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Angka | 40 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XI | Angka | 3 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Angka | 16 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII | % | 1.96 | 275.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII | Angka | 4 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik yang diperoleh Satuan Pendidikan SMA | Siswa | 30 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII | Angka | 3 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 20 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XII | Angka | 2 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 5 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII | % | 2.52 | 251.150.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 76.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII | Angka | 11 | 76.150.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 76.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Angka | 5 | 76.150.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII | Angka | 3 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Angka | 3 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XIII | Angka | 3 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Angka | 3 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMK | % | 57.35 | 1.690.777.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 1.690.777.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional | Angka | 2315 | 1.690.777.000 | Bidang Pembinaan SMK | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 1.690.777.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 2315 | 1.690.777.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi | % | 10 | 460.140.000 | Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 128.180.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Guru SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK | Angka | 2500 | 128.180.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.1.01.0051 | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | 128.180.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | 2500 | 128.180.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 236.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Guru SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK | Angka | 4500 | 236.360.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0043 | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 236.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | 4500 | 236.360.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 95.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Guru SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK | Angka | 275 | 95.600.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.1.03.0050 | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | | | | 95.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | 275 | 95.600.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi | % | 80.3 | 1.267.136.000 | Bidang Ketenagaan Dikbud | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 593.689.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang bersertifikat kompetensi | Angka | 12976 | 593.689.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS | |
| | | 1.01.02.1.01.0051 | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | 593.689.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | 12976 | 593.689.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 551.002.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang bersertifikat kompetensi | Angka | 931 | 551.002.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0043 | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 551.002.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | 931 | 551.002.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 122.445.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang bersertifikat kompetensi | Angka | 690 | 122.445.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.1.03.0050 | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | | | | 122.445.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | 690 | 122.445.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I | % | 0.9 | 51.220.222.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN I | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 19.310.125.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I | Siswa | 44100 | 19.235.125.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 19.235.125.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 27 | 19.235.125.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I | Siswa | 14148 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 98 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 30.000.778.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I | Siswa | 68100 | 29.925.778.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 29.925.778.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 134 | 29.925.778.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I | Siswa | 68100 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 125 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 1.909.319.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN I | Siswa | 1920 | 1.874.319.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 1.874.319.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 25 | 1.874.319.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN I | Siswa | 4694 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 27 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II | % | 40.11 | 25.856.463.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN II | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 13.996.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II | Siswa | 344 | 13.925.535.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 13.925.535.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 1 | 13.925.535.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II | Siswa | 8932 | 70.825.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 70.825.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 1 | 70.825.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 10.542.432.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II | Siswa | 456 | 10.471.607.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 10.471.607.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 1 | 10.471.607.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II | Siswa | 11634 | 70.825.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 70.825.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 1 | 70.825.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 1.317.671.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN II | Siswa | 52 | 1.282.671.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 1.282.671.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 1 | 1.282.671.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN II | Siswa | 136 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 1 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III | % | 69.8 | 36.181.840.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN III | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 15.859.005.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III | Siswa | 34735 | 15.799.005.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 15.799.005.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 56 | 15.799.005.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III | Siswa | 10845 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 18.061.047.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III | Siswa | 53851 | 18.001.047.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 18.001.047.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 101 | 18.001.047.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III | Siswa | 8979 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 2.261.788.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III | Siswa | 1699 | 2.231.788.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 2.231.788.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 2.231.788.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III | Siswa | 375 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV | % | 69.8 | 19.590.981.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 9.673.999.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV | Siswa | 27157 | 9.598.999.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 9.598.999.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 58 | 9.598.999.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV | Siswa | 8500 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 58 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 8.976.209.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV | Siswa | | 8.901.209.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 8.901.209.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 9 | 8.901.209.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV | Siswa | | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 3 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 940.773.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV | Siswa | 983 | 905.773.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 905.773.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 11 | 905.773.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV | Siswa | 172 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 11 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX | % | 79 | 58.001.687.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 21.135.417.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX | Siswa | 13.227 | 21.060.417.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 21.060.417.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 21.060.417.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX | Siswa | 13.227 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 34.979.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX | Siswa | 91.092 | 34.904.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 34.904.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 34.904.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX | Siswa | 91.092 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 1.887.270.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX | Siswa | 2.009 | 1.852.270.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 1.852.270.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 1.852.270.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX | Siswa | 2.009 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V | % | 78.7 | 34.124.340.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN V | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 16.289.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V | Siswa | 30217 | 16.214.680.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 16.214.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 16.214.680.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V | Siswa | 11531 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 100 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 17.216.098.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V | Siswa | 30843 | 17.141.098.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 17.141.098.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 17.141.098.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V | Siswa | 10645 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 100 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 618.562.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN V | Siswa | 314 | 583.562.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 583.562.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 583.562.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN V | Siswa | 100 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 35.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 100 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI | % | 90 | 35.527.775.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 15.041.528.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI | Siswa | 27992 | 14.969.528.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 14.969.528.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan (SMA) yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 100 | 14.969.528.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI | Siswa | 11853 | 72.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 72.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 100 | 72.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 18.794.723.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI | Siswa | 29182 | 18.722.723.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 18.722.723.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 100 | 18.722.723.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI | Siswa | 22627 | 72.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 72.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 100 | 72.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 1.691.524.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI | Siswa | 886 | 1.658.524.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 1.658.524.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 100 | 1.658.524.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI | Siswa | 175 | 33.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 100 | 33.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII | % | 85.55 | 20.548.779.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 9.773.913.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII | Siswa | 30588 | 9.698.913.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 9.698.913.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Atas yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 9.698.913.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII | Siswa | 10457 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 9.850.129.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII | Siswa | 41422 | 9.775.129.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 9.775.129.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 9.775.129.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII | Siswa | 10457 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 924.737.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII | Siswa | 498 | 889.737.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 889.737.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 889.737.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII | Siswa | 428 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII | % | 76.12 | 30.331.942.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 17.002.857.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII | Siswa | 36375 | 16.927.857.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 16.927.857.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 16.927.857.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII | Siswa | 11517 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 12.486.459.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII | Siswa | 60850 | 12.411.459.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 12.411.459.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 12.411.459.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII | Siswa | 19625 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 842.626.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII | Siswa | 1490 | 807.626.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 807.626.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 807.626.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII | Siswa | 445 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X | % | 84.74 | 33.424.059.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN X | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 18.494.384.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X | Siswa | 39572 | 18.424.384.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 18.424.384.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 79 | 18.424.384.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X | Siswa | 40292 | 70.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 79 | 70.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 14.130.557.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X | Siswa | 90337 | 14.057.557.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 14.057.557.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 146 | 14.057.557.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X | Siswa | 91489 | 73.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 73.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 146 | 73.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 799.118.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN X | Siswa | 1622 | 766.118.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 766.118.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 8 | 766.118.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN X | Siswa | 1698 | 33.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 8 | 33.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI | % | 44.94 | 18.261.166.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 11.240.033.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI | Siswa | 27922 | 11.190.033.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 11.190.033.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 41 | 11.190.033.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI | Siswa | 8715 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 41 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 6.267.687.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI | Siswa | 52588 | 6.217.687.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 6.217.687.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 112 | 6.217.687.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI | Siswa | 15625 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 112 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 753.446.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI | Siswa | 636 | 718.446.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 718.446.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 718.446.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI | Siswa | 126 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII | % | 80 | 30.462.565.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 16.373.696.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII | Siswa | 34737 | 16.308.946.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 16.308.946.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 65 | 16.308.946.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII | Siswa | 11579 | 64.750.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 64.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 65 | 64.750.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 12.485.195.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII | Siswa | 92662 | 12.420.445.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 12.420.445.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 146 | 12.420.445.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII | Siswa | 30888 | 64.750.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 64.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 146 | 64.750.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 1.603.674.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII | Siswa | 1651 | 1.588.674.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 1.588.674.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 5 | 1.588.674.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII | Siswa | 550 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 5 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII | % | 79 | 26.065.345.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 13.522.411.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII | Siswa | 24700 | 13.447.411.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 13.447.411.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 57 | 13.447.411.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII | Siswa | 8030 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 57 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 11.318.002.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII | Siswa | 46645 | 11.243.002.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 11.243.002.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 89 | 11.243.002.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII | Siswa | 14904 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 89 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 1.224.932.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII | Siswa | 1401 | 1.189.932.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 1.189.932.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 9 | 1.189.932.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII | Siswa | 320 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 57 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi | % | 10 | 327.910.000 | Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 109.920.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK | Angka | 40 | 109.920.000 | SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.1.01.0041 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | 109.920.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Unit | 4 | 109.920.000 | SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 122.910.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK | Angka | 60 | 122.910.000 | SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0033 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | 122.910.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 6 | 122.910.000 | SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 95.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK | Angka | 30 | 95.080.000 | SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.1.03.0040 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | 95.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Unit | 4 | 95.080.000 | SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum | % | 10 | 84.146.475.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 84.146.475.000 | | |
| | | | | | | Jumlah siswa penerima dana BOS SLB | Angka | 21100 | 83.429.585.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.02.1.03.0052 | | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 83.429.585.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS | Siswa | 21100 | 83.429.585.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi | Angka | 5 | 716.890.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 656.708.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 20 | 656.708.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 60.182.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 190 | 60.182.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum | % | 67.78 | 713.149.986.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 713.149.986.000 | | |
| | | | | | | Jumlah siswa penerima dana BOS SMA | Siswa | 426370 | 706.100.384.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0053 | | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | 706.100.384.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | Siswa | 426370 | 706.100.384.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi | Angka | 1 | 7.049.602.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 6.939.648.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 876 | 6.939.648.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 109.954.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 3 | 109.954.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum | % | 50.35 | 1.335.551.252.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 1.335.551.252.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK | Siswa | 1274225 | 1.318.196.111.000 | Bidang Pembinaan SMK | |
| | | 1.01.02.1.02.0046 | | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 1.318.196.111.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | Unit | 1274225 | 1.318.196.111.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi | Angka | 2 | 17.355.141.000 | Bidang Pembinaan SMK | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 17.325.141.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 7200 | 17.325.141.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 1593 | 30.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun** | | | | | | | | **21.742.450.000** | | |
| | | | | | | Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th | Angka | 70.93 | 21.742.450.000 | | |
| | | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | | 21.742.450.000 | | |
| | | | | | | Persentase angka putus sekolah SLB | % | 3.53 | 1.237.500.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 1.237.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Siswa | | 900.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.02.1.03.0044 | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus | | | | 900.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Siswa | 2000 | 900.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | | | | | Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin | Angka | 4363 | 337.500.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.02.1.03.0038 | | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | 337.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 2250 | 337.500.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase angka putus sekolah SMA | % | 2.3 | 9.967.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 9.967.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin | Siswa | 39100 | 9.967.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0039 | | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | 4.947.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 32980 | 4.947.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0045 | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | | | | 5.020.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Siswa | 6000 | 5.020.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase angka putus sekolah SMK | % | 0.026 | 10.537.950.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 10.537.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin | Angka | 51000 | 10.537.950.000 | Bidang Pembinaan SMK | |
| | | 1.01.02.1.02.0031 | | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | 7.537.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 50253 | 7.537.950.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0037 | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 3.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Siswa | 7000 | 3.000.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat** | | | | | | | | | **33.001.987.000** | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** | |
| | | | | | | Angka Melek Budaya | % | 52.32 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | **Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan** | | | | | | | | **23.895.790.000** | | |
| | | | | | | Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani | % | 28.23 | 23.895.790.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | | 189.850.000 | | |
| | | | | | | Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan | % | 47.61 | 189.850.000 | Bidang Pembinaan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 189.850.000 | | |
| | | | | | | Persentase SDM Kebudayaan berkompeten | % | 5.22 | 189.850.000 | SEKSI KESENIAN | |
| | | 2.22.02.1.01.0002 | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | | 189.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peserta pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Orang | 1726 | 189.850.000 | SEKSI KESENIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | | | 23.705.940.000 | | |
| | | | | | | Tingkat partisipasi seni tradisi | % | 8.89 | 23.705.940.000 | Bidang Pembinaan Kebudayaan | |
| | | | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 23.705.940.000 | | |
| | | | | | | Persentase Lembaga Seni aktif berkarya | % | 21.16 | 23.705.940.000 | SEKSI KESENIAN | |
| | | 2.22.03.1.01.0003 | | | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | | 23.705.940.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Kelompok | 652 | 23.705.940.000 | SEKSI KESENIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | **Meningkatnya pelestarian budaya** | | | | | | | | **6.513.676.000** | | |
| | | | | | | Persentase karya budaya berperingkat nasional | % | 15.89 | 6.513.676.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | | 3.729.072.000 | | |
| | | | | | | Persentase cakupan pelestarian seni | % | 100 | 2.603.640.000 | | |
| | | | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | | | | | 2.603.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok seni yang difasilitasi | Kelompok | 220 | 2.603.640.000 | | |
| | | 2.22.02.1.02.0001 | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | | 2.603.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Jenis | 25 | 2.603.640.000 | | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional | % | 19.17 | 1.125.432.000 | Bidang Pembinaan Kebudayaan | |
| | | | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | | | | | 1.125.432.000 | | |
| | | | | | | Persentase partisipasi Pemanfaatan OPK Peringkat Nasional | % | 61.9 | 1.125.432.000 | SEKSI KESENIAN | |
| | | 2.22.02.1.02.0001 | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | | 1.125.432.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yangDilakukan Pelindungan, Pengembangan danPemanfaatan | Buah | 26 | 1.125.432.000 | SEKSI KESENIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | | 519.484.000 | | |
| | | | | | | Persentase cagar budaya berperingkat nasional | % | 12.71 | 519.484.000 | Bidang Pembinaan Kebudayaan | |
| | | | | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | | | | | 261.040.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase Cagar Budaya Berperingkat Provinsi | % | 7.89 | 261.040.000 | SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN | |
| | | 2.22.05.1.01.0002 | | | Penetapan Cagar Budaya | | | | 261.040.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Ditetapkan | Buah | 242 | 261.040.000 | SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | | | | | 258.444.000 | | |
| | | | | | | Persentase partisipasi pemanfaatan cagar budaya | % | 88.37 | 258.444.000 | SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN | |
| | | 2.22.05.1.02.0003 | | | Pemanfaatan Cagar Budaya | | | | 258.444.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Dimanfaatkan | Buah | 22 | 258.444.000 | SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN | OPD Provinsi ; PROVINSI LAIN ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 2.22.06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | | | | 2.265.120.000 | | |
| | | | | | | Nilai survey kepuasan pengunjung museum | % | 89.85 | 2.265.120.000 | Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Museum Provinsi | | | | | 2.265.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pengunjung museum | Orang | 55000 | 2.265.120.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | 2.22.06.1.01.0001 | | | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | | | | 625.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan | Buah | 1950 | 625.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.22.06.1.01.0003 | | | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | | | | 1.220.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | Kegiatan | 7 | 1.220.120.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.22.06.1.01.0004 | | | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | | | | 420.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia | Unit | 4 | 420.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya & Objek Pemajuan Kebudayaan** | | | | | | | | **2.592.521.000** | | |
| | | | | | | Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan | % | 22.44 | 2.592.521.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | | 2.109.120.000 | | |
| | | | | | | Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan | % | 23.76 | 2.109.120.000 | Bidang Pembinaan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 2.109.120.000 | | |
| | | | | | | Persentase OPK yang Berdaya | % | 22.97 | 2.109.120.000 | SEKSI KESENIAN | |
| | | 2.22.02.1.01.0001 | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | 2.109.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Buah | 144 | 2.109.120.000 | SEKSI KESENIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 2.22.04 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | | | 298.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase akses literasi sejarah | % | 52.9 | 298.800.000 | Bidang Pembinaan Kebudayaan | |
| | | | | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi | | | | | 298.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Karya Literasi sejarah (tokoh sejarah, peristiwa bersejarah, toponimi, sejarah yang terkait dengan hidup dan kehidupan manusia) | % | 52.9 | 298.800.000 | SEKSI SEJARAH DAN TRADISI | |
| | | 2.22.04.1.01.0003 | | | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah | | | | 197.920.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Data dan informasi Sejarah yang dapat di akses masyarakat | Dokumen | 538 | 197.920.000 | SEKSI SEJARAH DAN TRADISI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 2.22.04.1.01.0004 | | | Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal | | | | 100.880.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Penulisan Sejarah Lokal, Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal | Dokumen | 171 | 100.880.000 | SEKSI SEJARAH DAN TRADISI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | | 184.601.000 | | |
| | | | | | | Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya | % | 25.13 | 184.601.000 | Bidang Pembinaan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | | | | | 184.601.000 | | |
| | | | | | | Persentase cagar budaya layak uji peringkat | % | 6.95 | 184.601.000 | SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN | |
| | | 2.22.05.1.02.0001 | | | Pelindungan Cagar Budaya | | | | 103.551.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi | Buah | 271 | 103.551.000 | SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 2.22.05.1.02.0002 | | | Pengembangan Cagar Budaya | | | | 81.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | Buah | 9 | 81.050.000 | SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **8.982.101.194.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Kesehatan

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | **488.278.268.000** | **Dinas Kesehatan** | |
| | | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.6 | | Dinas Kesehatan | |
| | **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN.** | | | | | | | | **480.253.689.000** | | |
| | | | | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar | % | 49.89 | 480.253.689.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 478.933.730.000 | | |
| | | | | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan | % | 66.6 | 433.950.926.000 | Bidang Pelayanan Kesehatan | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase faskes lainnya yang dipenuhi Fasilitas Sapras, alkes , SDM sesuai dengan ketentuan | % | 100 | 300.000.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL | |
| | | 1.02.02.1.01.0004 | | | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di fasilitasi Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar | Unit | 2 | 300.000.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase RS yang dipenuhi Fasilitas Sapras, alkes , SDM sesuai dengan ketentuan | % | 100 | | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | |
| | | 1.02.02.1.01.002 | | | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Unit | 0 | | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 433.084.689.000 | | |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Lainnya sesuai Standar | % | 98.88 | 432.049.926.000 | SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0016 | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | 432.049.926.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Dokumen | 20 | 432.049.926.000 | SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Ketentuan | % | 66.48 | 541.000.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL | |
| | | 1.02.02.1.02.0010 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | | | | 83.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Dokumen | 10 | 83.000.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.02.02.1.02.0020 | | | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas | | | | 458.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas | Dokumen | 25 | 458.000.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Presentase Faskes rujukan Sesuai Ketentuan | % | 66.6 | 493.763.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0023 | | | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | 493.763.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Unit | 20 | 493.763.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 566.237.000 | | |
| | | | | | | Prosentase RS kelas B dan faslitas Pelayanan kesehatan lainnya sesuai standar | % | 100 | 566.237.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | |
| | | 1.02.02.1.04.0001 | | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | 166.237.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | Unit | 20 | 166.237.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan | Unit | 167 | 400.000.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase ketersediaan obat dan vaksin | % | 80 | 36.655.801.000 | Bidang Sumber Daya Kesehatan | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 36.655.801.000 | | |
| | | | | | | Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Vaksin | % | 80 | 36.655.801.000 | SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | 36.655.801.000 | | |
| | | | | | | Pengadaan Obat, Bahan Medis Habis Pakai, di Fasilitas Kesehatan | Paket | 8 | 36.655.801.000 | SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN | |
| | | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa | % | 100 | 963.900.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 963.900.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas | % | 100 | 963.900.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan | Unit | 2 | | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi |
| | | 1.02.02.1.01.0017 | | | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar | Paket | 1 | 25.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | 938.900.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 3 | 938.900.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten | % | 100 | 1.221.028.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 624.618.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas | % | 100 | 624.618.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan, / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan | Unit | 0 | | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi |
| | | 1.02.02.1.01.0017 | | | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | 62.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar | Paket | 2 | 62.400.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | 562.218.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 4 | 562.218.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 596.410.000 | | |
| | | | | | | Angka Kepuasan Pasien di Balkesmas | Angka | 86.5 | 596.410.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | 596.410.000 | | |
| | | | | | | Jumlah standar pelayanan sesuai INM | Angka | 2 | 596.410.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang | % | 100 | 1.431.740.000 | | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 990.740.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas | % | 100 | 990.740.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan | Unit | 0 | | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.02.02.1.01.0017 | | | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar | Paket | 2 | 40.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | 950.740.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 4 | 950.740.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 441.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Angka Kepuasan Pasien | Angka | 87 | 441.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | 441.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah standar pelayanan sesuai INM | Angka | 2 | 441.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati | % | 100 | 1.047.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 819.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas | % | 100 | 819.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | 1.02.02.1.01.0017 | | | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | 57.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar | Paket | 4 | 57.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | 762.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 4 | 762.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 228.000.000 | | |
| | | | | | | Angka Kepuasan Pasien di balkesmas | Angka | 84 | 228.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | 228.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah standar pelayanan sesuai INM | Angka | 2 | 228.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang | % | 100 | 856.325.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 765.200.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas | % | 100 | 765.200.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan | Paket | 2 | | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.02.02.1.01.0017 | | | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar | Paket | 4 | 65.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | 700.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 7 | 700.200.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 91.125.000 | | |
| | | | | | | Angka Kepuasan Pasien | Angka | 87.7 | 91.125.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | 91.125.000 | | |
| | | | | | | Jumlah standar pelayanan sesuai INM | Angka | 2 | 91.125.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM | % | 80 | 1.071.000.000 | Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 1.056.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di BKIM | % | 80 | 1.056.300.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan, / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan | Paket | 10 | | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.02.02.1.01.0017 | | | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar | Paket | 2 | 20.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | 1.036.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 6 | 1.036.300.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 7.700.000 | | |
| | | | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan di BKIM Provinsi Jawa Tengah sesuai standar | % | 95 | 7.700.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0009 | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Dokumen | 4 | | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.02.02.1.02.0011 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 7.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit tidak menular | Dokumen | 4 | 7.700.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Angka kepuasan pelanggan di BKIM | % | 85 | 7.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mutu Layanan kesehatan di BKIM yang sesuai INM | Angka | 2 | 7.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK | % | 83 | 1.286.010.000 | Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 819.740.000 | | |
| | | | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah provinsi | % | 100 | 819.740.000 | SEKSI PELAYANAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.02.02.1.01.0004 | | | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar | Unit | 0 | | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan | Unit | 0 | | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi |
| | | 1.02.02.1.01.0013 | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan faskes regional/regional maintenance center yang di sediakan dan dipelihara | Unit | 0 | | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | 819.740.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 17 | 819.740.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase kab/kota yang mendapatkan pelayanan laboratorium dan PAK sesuai standar pelayanan yang berlaku | % | 62.8 | | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0009 | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promkes | Dokumen | 0 | | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 466.270.000 | | |
| | | | | | | angka kepuasan pelanggan | Angka | | 466.270.000 | | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | 466.270.000 | | |
| | | | | | | Jumlah standar pelayanan sesuai INM | Angka | 3 | 466.270.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pemanfaatan informasi kesehatan | % | 80 | 450.000.000 | Bidang Sumber Daya Kesehatan | |
| | | | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Ketersediaan Informasi Kesehatan Untuk Mendukung Pengambilan Keputusan | % | 88 | 450.000.000 | SEKSI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | |
| | | 1.02.02.1.03.0002 | | | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan | Dokumen | 6 | 450.000.000 | SEKSI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | OPD Provinsi |
| | | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | | 652.959.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya | % | 80 | 500.000.000 | Bidang Sumber Daya Kesehatan | |
| | | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase SDMK yang kompeten dan bermutu | % | 90 | 500.000.000 | SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | |
| | | 1.02.03.1.02.0002 | | | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan SDMK | Dokumen | 5 | 500.000.000 | SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | |
| | | | | | | Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi | % | 98 | 152.959.000 | Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 152.959.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelatihan yang sesuai standart | % | 98 | 152.959.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 1.02.03.1.02.0001 | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 152.959.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat | Orang | 30 | 152.959.000 | SEKSI PELATIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | | | 667.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku | % | 75 | 667.000.000 | Bidang Sumber Daya Kesehatan | |
| | | | | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) | | | | | 667.000.000 | | |
| | | | | | | Presentase penerbitan pengakuan PBF Cabang & Cabang PAK | % | 80 | 667.000.000 | SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN | |
| | | 1.02.04.1.01.0001 | | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK | | | | 667.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan | Angka | 90 | 667.000.000 | SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN | |
| | **MENINGKATNYA KESEHATAN KELOMPOK USIA PADA DAUR HIDUP** | | | | | | | | **2.888.637.000** | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyelengggarakan pelayanan kesehatan lansia | % | 60 | 100.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia | % | 60 | 100.000.000 | Bidang Kesehatan Masyarakat | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Prosentase Kab Kota Denganpelayanan lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 70% | % | 60 | 100.000.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | |
| | | 1.02.02.1.02.0005 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | Dokumen | 2 | 100.000.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase penurunan kasus kematian ibu | % | 2 | 2.788.637.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 1.765.378.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita | % | 34.28 | 1.765.378.000 | Bidang Kesehatan Masyarakat | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 1.765.378.000 | | |
| | | | | | | Prosentase Kab/Kota dengan Kesehatan Kerja dan olahraga yang baik | % | 51.43 | 200.000.000 | SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.02.02.1.02.0007 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga | Dokumen | 4 | 200.000.000 | SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Prosentase kab kota dengan kesling yang baik | % | 57.14 | 550.000.000 | SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA | |
| | | 1.02.02.1.02.0008 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen has?l pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Dokumen | 4 | 550.000.000 | SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | | | Prosentase kab kota dengan Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 70% | % | 54.28 | 100.000.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | |
| | | 1.02.02.1.02.0004 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Dokumen | 2 | 100.000.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Prosentase Kabupaten Kota dengan pelayanan kehamilan sesuai standar (K6) minimal 70% | % | 62.85 | 915.378.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | |
| | | 1.02.02.1.02.0003 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | | | | 915.378.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | Dokumen | 4 | 915.378.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | |
| | | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | 1.023.259.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi | % | 82.85 | 850.000.000 | Bidang Kesehatan Masyarakat | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 582.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kab/kota yang melaksanakan penggerakan Germas | % | 82.85 | 582.000.000 | SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 582.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi | Dokumen | 4 | 582.000.000 | SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 268.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan PHBS di Jawa Tengah | % | 22.85 | 268.000.000 | SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |
| | | 1.02.05.1.02.0001 | | | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 268.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat | Dokumen | 12 | 268.000.000 | SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | % | 28.57 | 27.500.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 27.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja | Kabupaten/Kota | 2 | 27.500.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 27.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor | Dokumen | 2 | 27.500.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | % | 28.57 | 19.200.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 19.200.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja | % | 28.57 | 19.200.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 19.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor | Dokumen | 4 | 19.200.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase kabupaten/Kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | % | 42.85 | 59.599.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 59.599.000 | | |
| | | | | | | Persentase kab/kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja | % | 5 | 59.599.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 59.599.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor | Dokumen | 4 | 59.599.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | % | 28.57 | 29.440.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 29.440.000 | | |
| | | | | | | Persentase kab/kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja | % | 28.57 | 29.440.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 29.440.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor | Dokumen | 4 | 29.440.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | % | 42.85 | 37.520.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 37.520.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja | % | 28.57 | 37.520.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 37.520.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor | Dokumen | 4 | 37.520.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PM DAN PTM SERTA KESWA** | | | | | | | | **4.373.430.000** | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | % | 100 | 1.475.716.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 1.475.716.000 | | |
| | | | | | | Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi | % | 100 | 1.475.716.000 | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 1.475.716.000 | | |
| | | | | | | Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap | % | 98.9 | 975.000.000 | SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI | |
| | | 1.02.02.1.02.0017 | | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 975.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan | Dokumen | 4 | 975.000.000 | SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kejadian bencana yang difasilitasi penanganan krisis kesehatan | % | 100 | 500.716.000 | SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI | |
| | | 1.02.02.1.02.0001 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | 250.716.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Provinsi sesuai standar | Orang | 25000 | 250.716.000 | SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.02.02.1.02.0002 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang sesuai standar | Orang | 1968 | 250.000.000 | SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.02.02.1.02.0018 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasai penerapan SPM bidang kesehatan lintas Kab/Kota | Dokumen | 0 | | SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa | % | 78 | 2.897.714.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 2.897.714.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular | % | 63.9 | 700.000.000 | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kab/kota yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan PM dengan standar capaian HIV dan TB | % | 34.3 | 700.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.02.02.1.02.0011 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Dokumen | 9 | 700.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa | % | 63.9 | 650.000.000 | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM dan Keswa | % | 71.4 | 650.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA | |
| | | 1.02.02.1.02.0011 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Dokumen | 5 | 500.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 1.02.02.1.02.0013 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Dokumen | 2 | 150.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa | % | 71.42 | 698.160.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 276.960.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM | % | 100 | 276.960.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0001 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | Orang | 8000 | | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 1.02.02.1.02.0011 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 276.960.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Dokumen | 4 | 276.960.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 421.200.000 | | |
| | | | | | | Angka Kepuasan Pasien | Angka | 85.5 | 421.200.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | 421.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah standar pelayanan sesuai INM | Angka | 86 | 421.200.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten | % | 28.57 | 187.661.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 187.661.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM | % | 100 | 187.661.000 | SEKSI PELAYANAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.02.02.1.02.0001 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas) | Orang | 8000 | | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 1.02.02.1.02.0011 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 187.661.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Dokumen | 4 | 187.661.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang | % | 57.14 | 255.661.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 255.661.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM | % | 100 | 255.661.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0001 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | Orang | 8000 | 35.000.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 1.02.02.1.02.0011 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 220.661.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Dokumen | 2 | 220.661.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati | % | 28.57 | 165.661.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 165.661.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM | % | 100 | 165.661.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0001 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas) | Orang | 8000 | | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | 1.02.02.1.02.0011 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 165.661.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Dokumen | 4 | 165.661.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang | % | 57.14 | 240.571.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 240.571.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penangulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM | % | 100 | 240.571.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0001 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | 43.810.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas) | Orang | 8000 | 43.810.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.02.02.1.02.0011 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 196.761.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Dokumen | 4 | 196.761.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | **MENURUNNYA PERMASALAHAN GIZI** | | | | | | | | **762.512.000** | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian intervensi spesifik untuk penurunan stunting | % | 80 | 762.512.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 762.512.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting | % | 51.42 | 656.622.000 | Bidang Kesehatan Masyarakat | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 656.622.000 | | |
| | | | | | | Prosentase Kab/Kota dengan pengukuran Balita Usia 0-59 bulan berdasarkan surveilans gizi minimal 30% | % | 57.14 | 656.622.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | |
| | | 1.02.02.1.02.0006 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 656.622.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 2 | 656.622.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | % | 28.57 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif | Kabupaten/ Kota | 2 | | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0004 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Dokumen | 4 | | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | % | 28.57 | | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kab/kota yang difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS) | Kabupaten/ Kota | 2 | | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0004 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS) | Dokumen | 4 | | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | % | 42.85 | 50.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif | Kabupaten/Kota | 2 | 50.000.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0004 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS) | Dokumen | 7 | 50.000.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | % | 28.57 | 25.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS) | Kabupaten/Kota | 2 | 25.000.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0004 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS) | Dokumen | 4 | 25.000.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | % | 42.85 | 30.890.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 30.890.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif | Kabupaten/Kota | 2 | 30.890.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0004 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | | | | 30.890.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Dokumen | 4 | 30.890.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **155.224.127.000** | **Dinas Kesehatan** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 85 | | Dinas Kesehatan | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **154.774.127.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 90 | 154.774.127.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 154.774.127.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 4.911.000.000 | Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 2.544.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 2.544.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2.544.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 2.544.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 169.240.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 169.240.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 32.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 32.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 100.040.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 100.040.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang disediakan | Unit | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.997.343.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 1.997.343.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 680.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 680.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.296.343.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.296.343.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 190.417.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 190.417.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 10 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | JUmlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 2 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 60.417.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 60.417.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 2.134.201.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 840.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 840.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 840.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 840.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 168.093.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 168.093.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 113.093.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 113.093.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 2 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 2 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.046.108.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 1.046.108.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 1.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 262.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 262.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 782.708.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 782.708.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 11 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 60 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 4.313.990.000 | Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 2.273.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 2.273.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2.273.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 2.273.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 171.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 171.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 28.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 28.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 117.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 2 | 117.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 4 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 4 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.655.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 1.655.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 65.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 738.400.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 738.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 31.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 31.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 820.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 820.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 184.490.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 184.490.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 65.500.000 | | |
| | | | | | | Mengukur jumlah peralatan dan mesin lainnya pada perangkat daerah yang dilakukan pemeliharaan dalam satu tahun | Unit | 5 | 65.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 40.990.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 50 | 40.990.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 43.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 43.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 2.419.300.000 | Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 179.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 179.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 49.990.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 49.990.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 20.010.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 20.010.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 64.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 64.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 27.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 46 | 27.500.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 1 | | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 1 | | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 27.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 3 | 27.500.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.057.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 2.057.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 700.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.353.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.353.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 155.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 48 | 155.800.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 28.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 28.800.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 5 | 6.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 36.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 36.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 80.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 5.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.975.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 970.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 970.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 970.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 970.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 160.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 125.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 3 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; ACEH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 755.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 755.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 255.000.000 | | |
| | | | | | | Mengukur hasil dari penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik perangkat daerah dalam satu tahun | Laporan | 4 | 255.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 500.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 5 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 11 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 15 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 130.739.043.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 120.690.967.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 120.690.967.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 119.840.967.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 540 | 119.840.967.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 700.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 5 | 100.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 606.769.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 606.769.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0004 | | | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 531.769.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD | Laporan | 4 | 531.769.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 120.960.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 120.960.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 70.960.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 4 | 70.960.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 25 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.265.213.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.265.213.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 53.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 53.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 246.283.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 246.283.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 13.088.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | 13.088.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 4 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 49.699.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 49.699.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 456.013.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 456.013.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 271.630.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 3 | 271.630.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 4 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 2 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 1 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 2 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 6.774.934.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 6.774.934.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 2.128.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 2.128.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 91.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 91.700.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 4.535.234.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 4.535.234.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.280.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 1.280.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 517.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 4 | 517.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 100.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 100.700.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 492.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 492.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 170.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 2.735.059.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 348.909.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 348.909.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 14.995.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 14.995.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 49.765.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 49.765.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 14.685.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | 14.685.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 35.110.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 35.110.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 23.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 4 | 23.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 199.354.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 199.354.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 989.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 989.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 279.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 279.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 708.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 708.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 397.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 397.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 10 | 110.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 77.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 80 | 77.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 2 | 60.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 90.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 60.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 2.926.440.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 1.452.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 1.452.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.452.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 1.452.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 253.990.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 253.990.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 15.730.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 15.730.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 29.675.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 29.675.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 31.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 31.875.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 25.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 4 | 25.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 8.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 8.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 142.610.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 142.610.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> DESA BEJALEN |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 3 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 2 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.031.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 1.031.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 695.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 695.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 189.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 189.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 72.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 11 | 72.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 29.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 160 | 29.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 0 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 14.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 43.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 43.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 2.620.094.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 1.400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 1.400.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN | Dokumen | 4 | 1.400.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 60.824.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 60.824.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 60.824.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 60.824.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.101.270.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 1.101.270.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 870.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 357.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 357.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 742.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 742.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 58.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 58.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 58.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 8 | 58.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 2 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **450.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.9 | 450.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 62.5 | 450.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 90 | 450.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 10 | 250.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 4 | 200.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **643.502.395.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
RSUD Dr. Moewardi

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | **94.564.509.000** | | |
| | | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.6 | | | |
| | **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD DR MOEWARDI** | | | | | | | | **94.564.509.000** | | |
| | | | | | | Persentase capaian SPM di RSUD Moewardi | % | 87 | 94.564.509.000 | | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 94.564.509.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Dr. Moewardi | % | 100 | 94.564.509.000 | | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 94.564.509.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan alat kedokteran/kesehatan pelayanan | % | 85 | 94.564.509.000 | | |
| | | 1.02.02.1.01.001 0 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | 94.564.509.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik<br>Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | Unit | 1 | 94.564.509.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan alat kedokteran | % | 100 | | | |
| | | 1.02.02.1.01.002 | | | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Unit | 1 | | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA | |
| | | | | | | Jumlah Sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Unit | 1 | | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA | |
| | | | | | | Persentase penyediaan telemedicine RS | % | 60 | | | |
| | | 1.02.02.1.01.002 0 | | | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh<br>Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine<br>untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan<br>yang Berkualitas | Unit | 1 | | SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pelaporan indikator mutu RS sebagai pendukung dokumen perijinan & akreditasi RS | % | 90 | | | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan | Unit | 7 | | SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih RSUD Dr. Moewardi | % | 30 | | | |
| | | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah diklat yang dilaksanakan | Kegiatan | 2 | | | |
| | | 1.02.03.1.02.0001 | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia KesehatanKompetensi dan Kualifikasi Meningkat | Orang | 700 | | BAGIAN DIKLAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Dr. Moewardi | % | 90 | | | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan advokasi pemberdayaan, kemitraan peningkatan peran serta masyarakat & lintas sektor | Kegiatan | 3 | | | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan,Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peranserta Masyarakat dan Lintas Sektor TingkatDaerah Provinsi | Dokumen | 3 | | SUB BAGIAN HUMAS DAN PEMASARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **1.120.346.298.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 85 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **1.120.346.298.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 90 | 1.120.346.298.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 1.120.346.298.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RSUD Dr. Moewardi | % | 82 | 962.500.000.000 | | |
| | | | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 962.500.000.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial | % | 100 | 962.500.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | 962.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | 962.500.000.000 | SUB BAGIAN ANGGARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 157.846.298.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 157.846.298.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 24 | 157.846.298.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 157.846.298.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 1300 | 157.846.298.000 | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | | | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 2 | | SUB BAGIAN ORGANISASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.05.0004 | | | Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah pemutakhiran dokumen pada sistem informasi kepegawaian | Dokumen | 12 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEGAWAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 1 | | SUB BAGIAN MUTASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.9 | | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | | | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 1 | | SUB BAGIAN PERENCANAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 2 | | SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **1.214.910.807.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | **79.141.157.000** | | |
| | | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.6 | | | |
| | **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO** | | | | | | | | **79.141.157.000** | | |
| | | | | | | Persentase capaian SPM di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | % | 90 | 79.141.157.000 | | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 79.141.157.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan fasilitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | % | 100 | 79.141.157.000 | | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 79.141.157.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan sarpras dan alkes untuk UKP rujukan dan UKM, UKM rujukan tingkat daerah provinsi | % | 100 | 79.141.157.000 | | |
| | | 1.02.02.1.01.001 0 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | 79.141.157.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medis fasilitas layanan kesehatan | Paket | 1 | 79.141.157.000 | SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP | OPD Provinsi |
| | | 1.02.02.1.01.002 0 | | | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Ketersediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Paket | 1 | | SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN | OPD Provinsi |
| | | 1.02.02.1.01.002 | | | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Unit | 10 | | SEKSI PERAWATAN RAWAT INAP | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Unit | 1 | | SUBBAGIAN RUMAH TANGGA | OPD Provinsi |
| | | 1.02.02.1.01.002 7 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 1 | | SEKSI PENUNJANG TERAPI | |
| | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit | % | 100 | | | |
| | | 1.02.02.1.04.0002 | | | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | | | | | | |
| | | | | | | Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan RS kelas B | % | 100 | | SEKSI PENJAMINAN MUTU PELAYANAN | OPD Provinsi |
| | | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian SDM kesehatan yang terlatih RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | % | 20 | | | |
| | | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah diklat yang dilaksanakan | Kegiatan | 5 | | | |
| | | 1.02.03.1.02.0001 | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | Orang | 360 | | SEKSI PELATIHAN | OPD Provinsi |
| | | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | % | 100 | | | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan | Kegiatan | 3 | | | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektoral Tingkat Daerah Provinsi | Dokumen | 3 | | SUBBAGIAN TATA USAHA HUKUM DAN HUMAS | OPD Provinsi |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **605.409.567.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 85 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **605.409.567.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 90 | 605.409.567.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 605.409.567.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | % | 82 | 508.000.000.000 | | |
| | | | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 508.000.000.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate (CRR) Parsial | % | 96 | 508.000.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | 508.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | 508.000.000.000 | SUBBAGIAN AKUNTANSI | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 97.409.567.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 97.409.567.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 97.409.567.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 97.409.567.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 823 | 97.409.567.000 | SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | | | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 12 | | SUBBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Laporan | 1 | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit Kendaraan dinas operasional yang diadakan | Unit | 1 | | SEKSI PENUNJANG SARANA PRASARANA NON MEDIS | OPD Provinsi |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.9 | | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | | | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 2 | | SUBBAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | | SUBBAGIAN MONITORING EVALUASI | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **684.550.724.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
RSUD Tugurejo

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | **21.863.444.000** | | |
| | | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.6 | | | |
| | **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD TUGUREJO** | | | | | | | | **21.863.444.000** | | |
| | | | | | | Persentase capaian SPM di RSUD Tugurejo | % | 90 | 21.863.444.000 | | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 21.863.444.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan fasilitas layanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo | % | 100 | 363.444.000 | | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase penyediaan sarana dan prasarana UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | % | 100 | | | |
| | | 1.02.02.1.01.002 | | | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Unit | 1 | | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Unit | 1 | | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 363.444.000 | | |
| | | | | | | Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | 363.444.000 | | |
| | | 1.02.02.1.02.002 2 | | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | 363.444.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelayanan operasional rumah sakit | Dokumen | 12 | 363.444.000 | SUB BAGIAN ORPEG | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo | % | 100 | 21.500.000.000 | | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 21.500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyediaan layanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | % | 100 | 21.500.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | 21.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah alat kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan | Unit | 1 | 21.500.000.000 | SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.02.02.1.01.0020 | | | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | Unit | 1 | | SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase penyediaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | % | 100 | | | |
| | | 1.02.02.1.01.0013 | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintainance center yang disediakan dan dipelihara | Unit | 1 | | SEKSI PENUNJANG NON MEDIK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 1 | | SEKSI PENUNJANG MEDIK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase penyediaan penunjang layanan keperawatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | % | 100 | | | |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Bahan Habis Pakai dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 1 | | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Tugurejo | % | 33 | | | |
| | | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan | Kegiatan | 5 | | | |
| | | 1.02.03.1.02.0001 | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat | Orang | 400 | | SUB BAGIAN DIKLAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Tugurejo | % | 100 | | | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan<br>Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Kegiatan | 3 | | | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Dokumen | 3 | | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **300.265.481.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 85 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **300.265.481.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 90 | 300.265.481.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 300.265.481.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RSUD Tugurejo | % | 55.25 | 211.000.000.000 | | |
| | | | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 211.000.000.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial | % | 83.41 | 211.000.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | 211.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 6 | 211.000.000.000 | SUB BAGIAN ANGGARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 89.265.481.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 89.265.481.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 89.265.481.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 89.265.481.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 765 | 89.265.481.000 | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 2 | | SUB BAGIAN AKUNTANSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Dokumen | 4500 | | SUB BAGIAN TU HUKUM DAN HUMAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.9 | | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 90 | | | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 11 | | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 3 | | SUB BAGIAN MONEV | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **322.128.925.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
RSUD Kelet Donorejo

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | **52.600.000.000** | | |
| | | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.6 | | | |
| | **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD KELET DONOREJO** | | | | | | | | **52.600.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo | % | 88 | 52.600.000.000 | | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 52.400.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet Donorejo | % | 100 | 52.400.000.000 | | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 51.000.000.000 | | |
| | | | | | | Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | 51.000.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.01.001 0 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | 20.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan | Unit | 17 | 20.000.000.000 | SEKSI PENUNJANG MEDIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | 1.02.02.1.01.002 0 | | | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | Unit | | | SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | 1.02.02.1.01.002 | | | Pengembangan Rumah Sakit | | | | 31.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Unit | 50 | | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Unit | 1 | 31.000.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | 1.02.02.1.01.002 7 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Bahan Habis Pakai dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 1 | | SEKSI PENUNJANG NON MEDIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah obat serta fasilitas kesehatan lainnya yang disediakan | Paket | 1 | | SEKSI PENUNJANG MEDIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 1.400.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyediaan layanan dan alkes untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | % | 100 | 1.400.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.02.0011 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Dokumen | 4 | | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | 1.02.02.1.02.0022 | | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | 1.400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelayanan operasional rumah sakit | Dokumen | 12 | 1.400.000.000 | SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Kelet Donorejo | % | 30 | | | |
| | | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah diklat yang dilaksanakan | Kegiatan | 5 | | | |
| | | 1.02.03.1.02.0001 | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat | Orang | 100 | | SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo | % | 100 | 200.000.000 | | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi | Kegiatan | 3 | 200.000.000 | | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peranserta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi | Dokumen | 3 | 200.000.000 | SEKSI PENUNJANG NON MEDIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **95.285.271.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 85 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **95.285.271.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 90 | 95.285.271.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 95.285.271.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RSUD Kelet Donorejo | % | 35 | 54.700.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 54.700.000.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial | % | 88 | 54.700.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | 54.700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 4 | 54.700.000.000 | SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 40.585.271.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 40.585.271.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 14 | 40.585.271.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 40.585.271.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 291 | 40.585.271.000 | SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.9 | | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | | | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 11 | | SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 9 | | SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **147.885.271.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
RSJD Dr. Amino Gondohutomo

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | **42.071.656.000** | | |
| | | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.6 | | | |
| | **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO** | | | | | | | | **42.071.656.000** | | |
| | | | | | | Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo | % | 98 | 42.071.656.000 | | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 41.871.656.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo | % | 100 | 21.371.656.000 | | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 21.000.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Fasilitasi Digitalisasi Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | | | |
| | | 1.02.02.1.01.002 0 | | | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Unit | 1 | | SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | 21.000.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.01.002 | | | Pengembangan Rumah Sakit | | | | 21.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Unit | 4 | | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Unit | 1 | 21.000.000.000 | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 371.656.000 | | |
| | | | | | | Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | 371.656.000 | | |
| | | 1.02.02.1.02.002 2 | | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | 371.656.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit | Dokumen | 12 | 371.656.000 | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo | % | 100 | 20.500.000.000 | | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 20.500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Fasilitas Bahan Habis Pakai Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | | | |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Bahan Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 1 | | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | 20.500.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | 20.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | Unit | 12 | 20.500.000.000 | SEKSI PENUNJANG MEDIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.02.02.1.01.0013 | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara | Unit | 1 | | SEKSI PENUNJANG NON MEDIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Obat di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 1 | | SEKSI PENUNJANG MEDIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Pengelolaan Layanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | % | 100 | | | |
| | | 1.02.02.1.02.0013 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) | Dokumen | 12 | | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase Pengelolaan Layanan Kesehatan Orang dengan Penyalahguna NAPZA | % | 100 | | | |
| | | 1.02.02.1.02.0014 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi medis | Orang | 10 | | SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. Amino Gondohutomo | % | 20 | | | |
| | | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi Latsar, Diklatpim, Peningkatan Kompetensi | Kegiatan | 3 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.02.03.1.02.0001 | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat | Orang | 10 | | SUB BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah jenis kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi seminar, diklat, bimtek, workshop, simposium | Kegiatan | 5 | | | |
| | | 1.02.03.1.02.0001 | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat | Orang | 110 | | SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo | % | 100 | 200.000.000 | | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan bakti sosial | Kegiatan | 1 | 7.875.000 | | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 7.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi | Dokumen | 4 | 7.875.000 | SEKSI PENUNJANG MEDIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan home care, home visit, dropping | Kegiatan | 3 | 99.930.000 | | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 99.930.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi | Dokumen | 4 | 99.930.000 | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan RSTD | Kegiatan | 1 | 92.195.000 | | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 92.195.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi | Dokumen | 4 | 92.195.000 | SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **129.537.748.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 85 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **129.537.748.000** | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 90 | 129.537.748.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 129.537.748.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo | % | 43 | 59.000.000.000 | | |
| | | | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 59.000.000.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial | % | 89 | 58.940.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | 58.940.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN AKUNTANSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | 58.865.000.000 | SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial | % | 89 | 60.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATAUSAHA HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 70.537.748.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 70.537.748.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 70.537.748.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 70.537.748.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 457 | 70.537.748.000 | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.9 | | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | | | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 12 | | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 3 | | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **171.609.404.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
RSJD Surakarta

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | **36.575.729.000** | | |
| | | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.6 | | | |
| | **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD SURAKARTA** | | | | | | | | **36.575.729.000** | | |
| | | | | | | Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta | % | 98.17 | 36.575.729.000 | | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 36.375.729.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta | % | 95 | | | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Fasilitas Digitalisasi Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 95 | | | |
| | | 1.02.02.1.01.002 0 | | | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Unit | 1 | | SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 95 | | | |
| | | 1.02.02.1.01.002 | | | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Unit | 1 | | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta | % | 100 | 470.000.000 | | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 470.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | 470.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.02.002 2 | | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | 470.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Dokumen | 12 | 470.000.000 | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta | % | 95 | 35.905.729.000 | | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 35.905.729.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 95 | 35.905.729.000 | | |
| | | 1.02.02.1.01.001 0 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | 20.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | Unit | 1 | 20.000.000.000 | SEKSI PENUNJANG NON MEDIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 1.02.02.1.01.001 3 | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | |
| | | | | | | Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | Unit | 1 | | SEKSI PENUNJANG NON MEDIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 1.02.02.1.01.002 | | | Pengembangan Rumah Sakit | | | | 15.905.729.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Unit | 1 | 15.905.729.000 | SEKSI PENUNJANG MEDIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 1.02.02.1.01.002 7 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Bahan Habis Pakai dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan | Paket | 3 | | SEKSI PENUNJANG MEDIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan | Paket | 2 | | SEKSI PENUNJANG MEDIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | | | |
| | | 1.02.02.1.02.001 4 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis | Orang | 60 | | SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | | | |
| | | 1.02.02.1.02.001 3 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | |
| | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Dokumen | 12 | | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase Layanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan | % | 100 | | | |
| | | 1.02.02.1.02.001 1 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 1 | | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Surakarta | % | 35 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah diklat yang dilaksanakan | Kegiatan | 5 | | | |
| | | 1.02.03.1.02.0001 | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Orang | 208 | | SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN | |
| | | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Surakarta | % | 95 | 200.000.000 | | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi | Kegiatan | 3 | 200.000.000 | | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Dokumen | 12 | 200.000.000 | SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase capaian kegiatan promosi di tingkat provinsi RSJD Surakarta | % | 95 | | | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan Advokasi, Kemitraan, dan Kerjasama Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Kegiatan | 2 | | | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Dokumen | 2 | | SUB BAGIAN TATAUSAHA HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **116.528.737.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 85 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **116.528.737.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 90 | 116.528.737.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 116.528.737.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RSJD Surakarta | % | 33 | 48.000.000.000 | | |
| | | | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 48.000.000.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial | % | 95 | 48.000.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | 48.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | 48.000.000.000 | SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit | 1 | | SUB BAGIAN AKUNTANSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial | % | 95 | | | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 68.528.737.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 68.528.737.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 68.528.737.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 68.528.737.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 493 | 68.528.737.000 | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | | | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 12 | | SUB BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.9 | | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 90 | | | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 10 | | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 7 | | SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **153.104.466.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | **26.680.000.000** | | |
| | | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.6 | | | |
| | **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD DR. SOEDJARWADI** | | | | | | | | **26.680.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi | % | 100 | 26.680.000.000 | | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 26.480.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | % | 100 | 4.500.000.000 | | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 4.500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Fasilitas Digitalisasi Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | | | |
| | | 1.02.02.1.01.002 0 | | | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Unit | 1 | | SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | 4.500.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.01.002 | | | Pengembangan Rumah Sakit | | | | 4.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Unit | 1 | 3.500.000.000 | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | | | Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Unit | 1 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | | | Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | % | 100 | 480.000.000 | | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 480.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | 480.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.02.002 2 | | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | 480.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelayanan operasional rumah sakit | Dokumen | 12 | 480.000.000 | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | % | 100 | 21.500.000.000 | | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 21.500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | 21.500.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | 21.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | Unit | 9 | 21.500.000.000 | SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | | | |
| | | 1.02.02.1.01.0013 | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara | Unit | 1 | | SEKSI PENUNJANG NON MEDIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 3 | | SEKSI PENUNJANG MEDIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | | | |
| | | 1.02.02.1.02.0014 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis | Orang | 11 | | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | | | Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | | | |
| | | 1.02.02.1.02.0013 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Dokumen | 12 | | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | % | 30 | 35.000.000 | | |
| | | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi Latsar, Diklatpim, Administrasi Dasar | Kegiatan | 3 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.02.03.1.02.0001 | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | Orang | 10 | | SUB BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi seminar, diklat, bimtek, workshop, simposium | Kegiatan | 4 | 35.000.000 | | |
| | | 1.02.03.1.02.0001 | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | Orang | 138 | 35.000.000 | SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | 165.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian kegiatan advokasi dan kemitraan di tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | % | 100 | | | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan Advokasi, Kemitraan dan Kerjasama Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Kegiatan | 2 | | | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Dokumen | 2 | | SUB BAGIAN TATAUSAHA HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | | | Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | % | 100 | 165.000.000 | | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 165.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi | Kegiatan | 7 | 165.000.000 | | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 165.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Dokumen | 7 | 165.000.000 | SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **100.339.294.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 85 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **100.339.294.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 90 | 100.339.294.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 100.339.294.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | % | 46.5 | 49.300.000.000 | | |
| | | | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 49.300.000.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial | % | 95 | 49.300.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | 49.300.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | 49.300.000.000 | SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 51.039.294.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 51.039.294.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 51.039.294.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 51.039.294.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 331 | 51.039.294.000 | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.9 | | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | | | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | | | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan keuangan) | Laporan | 1 | | SUB BAGIAN AKUNTANSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 10 | | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 3 | | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **127.019.294.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Rumah Sakit Khusus Mata

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | **19.538.000.000** | | |
| | | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.6 | | | |
| | **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RS MATA** | | | | | | | | **19.538.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase capaian SPM di RS Mata | % | 100 | 19.538.000.000 | | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 19.188.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RS Khusus Mata | % | 40 | 19.188.000.000 | | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 19.088.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 40 | 19.088.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.01.001 0 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan | Paket | 65 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.02.02.1.01.002 0 | | | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | Unit | 1 | 600.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.02.02.1.01.002 | | | Pengembangan Rumah Sakit | | | | 14.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Paket | 4 | 14.500.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.02.02.1.01.002 7 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | 3.988.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Bahan Habis Pakai dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 2 | 2.411.650.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah obat serta fasilitas kesehatan lainnya yang disediakan | Paket | 3 | 1.576.350.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | % | 30 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.02.02.1.02.0011 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Dokumen | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.02.02.1.02.0022 | | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelayanan operasional rumah sakit | Dokumen | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit | % | 30 | 100.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan | Unit | 1 | 100.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase SDM kesehatan yang terlatih | % | 20 | 250.000.000 | | |
| | | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Junlah diklat yang dilaksanakan | Kegiatan | 2 | 250.000.000 | | |
| | | 1.02.03.1.02.0001 | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat | Orang | 20 | 250.000.000 | | |
| | | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RS Khusus Mata | % | 50 | 100.000.000 | | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi yang dilaksanakan | Kegiatan | 8 | 100.000.000 | | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi | Dokumen | 0 | 69.750.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi | Dokumen | 4 | 30.250.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 85 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 90 | | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RS Khusus Mata | % | 20 | | | |
| | | | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial | % | | | | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | % | 40 | | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | | | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.9 | | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 80 | | | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 1 | | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **19.538.000.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kualitas Jalan Provinsi** | | | | | | | | | **340.675.501.000** | **Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya** | |
| | | | | | | Persentase jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor dan kondisi permukaan mantap | % | 67.88 | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | **Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dengan Kualitas Struktur dan Kapasitas Sesuai Standar Jalan Kolektor** | | | | | | | | **172.116.330.000** | | |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor | % | 44.48 | 172.116.330.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | | 172.116.330.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan | % | 100 | 6.212.367.000 | Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 6.212.367.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan | Dokumen | 8 | 6.212.367.000 | SEKSI RANCANG BANGUN | |
| | | 1.03.10.1.01.004 1 | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | | 2.652.062.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen) | Dokumen | 4 | 2.652.062.000 | SEKSI RANCANG BANGUN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.03.10.1.01.004 3 | | | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | | 3.560.305.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan | Dokumen | 4 | 3.560.305.000 | SEKSI RANCANG BANGUN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat | % | 41.68 | 59.161.042.000 | Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 59.161.042.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat | Km | 3.49 | 59.161.042.000 | SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.003 | | | Rehabilitasi Jalan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Barat | Km | | | SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.003 | | | Rekonstruksi Jalan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan di Wilayah Barat | Km | | | SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | 1.03.10.1.01.003 | | | Pembangunan Jembatan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dibangun di Wilayah Barat | m | | | SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.003 | | | Penggantian Jembatan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian di Wilayah Barat | m | | | SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.003 | | | Pemeliharaan Berkala Jalan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Barat | Km | | | SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.004 0 | | | Pelebaran Jalan Menuju Standar | | | | 59.161.042.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Barat | Km | 3.49 | 59.161.042.000 | SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | 1.03.10.1.01.004 | | | Pembangunan Jalan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dibangun di Wilayah Barat | Km | 0 | | SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur | % | 47.5 | 68.135.780.000 | Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 68.135.780.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur | Km | 1 | 68.135.780.000 | SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0030 | | | Rehabilitasi Jalan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Timur | Km | | | SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0031 | | | Rekonstruksi Jalan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan di Wilayah Timur | Km | | | SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.03.10.1.01.0032 | | | Pembangunan Jembatan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dibangun di Wilayah Timur | m | 0 | | SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 | OPD Provinsi |
| | | 1.03.10.1.01.0036 | | | Penggantian Jembatan | | | | 58.090.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian di Wilayah Timur | m | 37.2 | 58.090.000.000 | SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | 1.03.10.1.01.0038 | | | Pemeliharaan Berkala Jalan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala di Wilayah Timur | Km | | | SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0040 | | | Pelebaran Jalan Menuju Standar | | | | 10.045.780.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Timur | Km | 1 | 10.045.780.000 | SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | 1.03.10.1.01.0042 | | | Pembangunan Jalan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dibangun di Wilayah Timur | Km | | | SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 | |
| | | | | | | Persentase panjang jalan yang dileger | % | 75.79 | 583.380.000 | Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 583.380.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilegerkan S.d Tahun-N | Km | 1386.03 | 583.380.000 | SEKSI RANCANG BANGUN | |
| | | 1.03.10.1.01.0044 | | | Pengelolaan Leger Jalan | | | | 583.380.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan | Dokumen | 8 | 583.380.000 | SEKSI RANCANG BANGUN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan | % | 12.85 | 7.866.953.000 | Balai Pengujian dan Peralatan | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 7.866.953.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang Tersedia | Unit | 53 | 7.866.953.000 | SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT | |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 7.866.953.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peralatan Kebinamargaan bertambah | Unit | 1 | 425.000.000 | SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang dipelihara | Unit | 31 | 2.366.953.000 | SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah persediaan bahan/material konstruksi penanganan kerusakan khusus | Unit | 5575 | 5.075.000.000 | SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | Km | 0 | | SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan | % | 100 | 24.301.808.000 | Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 24.301.808.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah | Dokumen | 10 | 5.621.795.000 | SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN | |
| | | 1.03.10.1.01.0029 | | | Pelebaran Jembatan | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan jembatan | m2 | 1000 | 1.000.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN | |
| | | 1.03.10.1.01.0040 | | | Pelebaran Jalan Menuju Standar | | | | 4.621.795.000 | | |
| | | | | | | Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan | m2 | 1690 | 4.621.795.000 | SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengawasan dan penanggulangan bencana jalan dan jembatan | Dokumen | 13 | 18.680.013.000 | SEKSI PENGAWASAN TEKNIS | |
| | | 1.03.10.1.01.0024 | | | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi | | | | 7.434.889.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dokumen) | Dokumen | 32 | 7.434.889.000 | SEKSI PENGAWASAN TEKNIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | 3.401.136.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana | m | 0.05 | 3.401.136.000 | SEKSI PENGAWASAN TEKNIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 7.843.988.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana | Km | 0.45 | 7.843.988.000 | SEKSI PENGAWASAN TEKNIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi | % | 31.88 | 5.855.000.000 | Balai Pengujian dan Peralatan | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 5.855.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi | Sertifikat | 1100 | 5.855.000.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU | |
| | | 1.03.10.1.01.0028 | | | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | | | | 5.855.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Dokumen | 0 | | SEKSI PENGUJIAN MUTU | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001 | Dokumen | 2 | 354.000.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah pemeliharaan alat uji | Unit | 60 | 204.000.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah penambahan alat uji | Unit | 6 | 4.068.000.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu | Orang | 60 | 789.000.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Sertifikat hasil uji mutu konstruksi | Sertifikat | 1100 | 440.000.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | **Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap** | | | | | | | | **168.559.171.000** | | |
| | | | | | | Persentase kondisi jembatan provinsi baik | % | 91.18 | 20.468.795.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | | 20.468.795.000 | | |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap | % | 83.65 | 1.435.910.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 1.435.910.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap | m | 2871.82 | 1.435.910.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.002 | | | Rehabilitasi Jembatan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Cilacap | m | | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 1.03.10.1.01.002 6 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | 1.435.910.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Cilacap | m | 2871.82 | 1.435.910.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | 1.03.10.1.01.002 | | | Pelebaran Jembatan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Cilacap | m | | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang | % | 93.65 | 1.082.400.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 1.082.400.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang | m | 2164.8 | 1.082.400.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.002 | | | Rehabilitasi Jembatan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Magelang | m | | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | 1.03.10.1.01.002 6 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | 1.082.400.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Magelang | m | 2164.8 | 1.082.400.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | 1.03.10.1.01.002 | | | Pelebaran Jembatan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Magelang | m | | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati | % | 93.82 | 3.365.975.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 3.365.975.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati | m | 2482.95 | 3.365.975.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.002 | | | Rehabilitasi Jembatan | | | | 2.128.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Pati | m | 7 | 2.128.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | 1.03.10.1.01.002 6 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | 1.237.975.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Pati | m | 2475.95 | 1.237.975.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | 1.03.10.1.01.002 | | | Pelebaran Jembatan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Pati | m | | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan | % | 88.49 | 1.452.510.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 1.452.510.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pekalongan | m | 2905.02 | 1.452.510.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Jembatan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Pekalongan | m | 0 | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | 1.452.510.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Pekalongan | m | 2905.02 | 1.452.510.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | 1.03.10.1.01.0029 | | | Pelebaran Jembatan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Pekalongan | m | | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi | % | 91.18 | 3.838.590.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 3.838.590.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi | m | 3682.18 | 3.838.590.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Jembatan | | | | 2.028.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Purwodadi | m | 61 | 2.028.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | 1.810.590.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Purwodadi | m | 3621.18 | 1.810.590.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | 1.03.10.1.01.0029 | | | Pelebaran Jembatan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Purwodadi | m | | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang | % | 85.51 | 2.213.975.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 2.213.975.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang | m | 1781.95 | 2.213.975.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Jembatan | | | | 1.328.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Semarang | m | 10 | 1.328.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | 885.975.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Semarang | m | 1771.95 | 885.975.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0029 | | | Pelebaran Jembatan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Semarang | m | | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta | % | 94.78 | 4.397.800.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta. | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 4.397.800.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta | m | 4942.6 | 4.397.800.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Jembatan | | | | 1.928.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Surakarta | m | 3 | 1.928.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | 2.469.800.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Surakarta | m | 4939.6 | 2.469.800.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 1.03.10.1.01.0029 | | | Pelebaran Jembatan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Surakarta | m | | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal | % | 86.14 | 1.018.500.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 1.018.500.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Tegal | m | 2037 | 1.018.500.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Jembatan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Tegal | m | 0 | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | 1.018.500.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Tegal | m | 2037 | 1.018.500.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.03.10.1.01.0029 | | | Pelebaran Jembatan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Tegal | m | | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo | % | 94.9 | 1.663.135.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 1.663.135.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo | m | 2092.57 | 1.663.135.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0025 | | | Rehabilitasi Jembatan | | | | 628.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Wonosobo | m | 22.3 | 628.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | 1.035.135.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Wonosobo | m | 2070.27 | 1.035.135.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 1.03.10.1.01.0029 | | | Pelebaran Jembatan | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Tegal Wonosobo | m | | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaaan mantap | % | 91.29 | 148.090.376.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | | 148.090.376.000 | | |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap | % | 89.43 | 10.129.976.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 10.129.976.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap | Km | 206.24 | 10.129.976.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0030 | | | Rehabilitasi Jalan | | | | 2.234.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Cilacap | Km | 0 | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Cilacap | Km | 1.34 | 2.234.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | | | Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Cilacap | Km | | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 7.895.976.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Cilacap | Km | 204.9 | 7.895.976.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang | % | 94.17 | 10.748.200.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 10.748.200.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang | Km | 261.08 | 10.748.200.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0030 | | | Rehabilitasi Jalan | | | | 1.674.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Magelang | Km | 0 | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Magelang | Km | 1.1 | 1.674.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | | | Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Magelang | Km | 0 | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 9.074.200.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Magelang | Km | 259.98 | 9.074.200.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati | % | 88.12 | 10.821.800.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 10.821.800.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati | Km | 249.26 | 10.821.800.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0030 | | | Rehabilitasi Jalan | | | | 1.524.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Pati | Km | 0 | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Pati | Km | 1 | 1.524.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Pati | Km | 0 | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 9.297.800.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Pati | Km | 248.26 | 9.297.800.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan | % | 85.23 | 14.704.200.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 14.704.200.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pekalongan | Km | 254.16 | 14.704.200.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0030 | | | Rehabilitasi Jalan | | | | 4.036.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Pekalongan | Km | | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Pekalongan | Km | 2 | 4.036.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Pekalongan | Km | | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 10.668.200.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Pekalongan | Km | 252.16 | 10.668.200.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi | % | 86.78 | 21.848.200.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 21.848.200.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi | Km | 379.69 | 21.848.200.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0030 | | | Rehabilitasi Jalan | | | | 4.024.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi | Km | | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi | Km | 0.6 | 4.024.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi | Km | | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 17.824.200.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Purwodadi | Km | 379.09 | 17.824.200.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang | % | 99.95 | 14.858.450.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 14.858.450.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang | Km | 220.38 | 14.858.450.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0030 | | | Rehabilitasi Jalan | | | | 5.966.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Semarang | Km | 0 | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Semarang | Km | 1.65 | 5.966.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Semarang | Km | 0 | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 8.892.450.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Semarang | Km | 218.68 | 8.892.450.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta | % | 93.17 | 32.673.250.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta. | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 32.673.250.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta | Km | 414.11 | 32.673.250.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0030 | | | Rehabilitasi Jalan | | | | 19.314.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Surakarta | Km | | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Surakarta | Km | 11.6 | 19.314.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Surakarta | Km | | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 13.359.250.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Surakarta | Km | 402.51 | 13.359.250.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal | % | 95.52 | 15.153.700.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 15.153.700.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal | Km | 201.84 | 15.153.700.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0030 | | | Rehabilitasi Jalan | | | | 8.047.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Tegal | Km | 0.1 | 3.000.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Tegal | Km | 2 | 5.047.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Tegal | Km | | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 7.106.700.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Tegal | Km | 199.84 | 7.106.700.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo | % | 91.61 | 17.152.600.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 17.152.600.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo | Km | 248.56 | 17.152.600.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0030 | | | Rehabilitasi Jalan | | | | 7.558.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo | Km | 0 | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo | Km | 5 | 7.558.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo | Km | 0 | | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 9.594.600.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Wonosobo | Km | 243.56 | 9.594.600.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **116.428.954.000** | **Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 60 | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **115.688.954.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 95.8 | 115.688.954.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 115.688.954.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.665.051.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 314.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 314.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 26.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 26.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 3.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 720 | 3.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 181.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 181.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 760.251.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 760.251.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 7.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 114.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 114.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 638.651.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 638.651.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 590.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 56 | 590.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 6 | 140.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 400.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 48 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 96.916.364.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 81.419.826.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 45 | 81.419.826.000 | SUBBAG KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 78.965.506.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 477 | 78.965.506.000 | SUBBAG KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2.014.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.014.320.000 | SUBBAG KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 440.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 19 | 440.000.000 | SUBBAG KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 558.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 13 | 558.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 558.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 13 | 558.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 657.250.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 657.250.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 0 | | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 657.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 590 | 657.250.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 2.588.750.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 2.588.750.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 116.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 116.360.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 455.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 455.140.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 84.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 84.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 2172 | 21.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1.737.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 1.737.350.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 85.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 85.900.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 69.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 69.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 4.399.660.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 565 | 4.399.660.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 0 | | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 1.303.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 438 | 1.303.500.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 3.096.160.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 127 | 3.096.160.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 4.609.278.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 50 | 4.609.278.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 24.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1.750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 1.750.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.835.278.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 26 | 2.835.278.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.683.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 438 | 2.683.600.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1.233.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 30 | 1.233.600.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 800.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 405 | 650.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.679.091.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta. | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 263.010.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 263.010.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 7.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 7.550.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 29.960.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 29.960.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 672 | 3.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Dokumen | 12 | 170.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 547.371.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 547.371.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 121.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 121.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 421.871.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 421.871.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 868.710.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 65 | 868.710.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 144.710.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 6 | 144.710.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 8 | 600.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 124.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 51 | 124.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.718.698.000 | Balai Pengujian dan Peralatan | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 207.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 207.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 672 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.220.098.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 1.220.098.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 2.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 238.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 238.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 978.548.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 978.548.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 291.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 61 | 291.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 133.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 11 | 133.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 57.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 49 | 57.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 2.361.518.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 321.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 321.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 13.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 13.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 16.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 16.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 336 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 190.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.187.658.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 1.187.658.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 220.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 220.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 962.658.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 962.658.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 852.860.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 47 | 852.860.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 125.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 7 | 125.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 660.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 660.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 67.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 36 | 67.560.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.243.632.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 226.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 226.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 14.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 14.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 34.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 34.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 33.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 672 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 130.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 441.532.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 441.532.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 65.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 65.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 373.832.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 373.832.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 575.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 41 | 575.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 150.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 8 | 150.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 380.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 380.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 30 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 840.217.000 | Balai Jasa Konstruksi | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 139.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 139.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 8.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 8.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 8.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 8.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 2.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 672 | 3.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 81.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 81.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 525.717.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 525.717.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 1.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 85.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 85.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 438.917.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 438.917.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 43 | 175.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 4 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 38 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 2.325.778.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 344.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 344.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 12.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 12.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 52.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 52.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 43.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 43.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 672 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 216.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 216.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.105.258.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 1.105.258.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 181.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 181.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 918.258.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 918.258.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 876.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 76 | 876.520.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 152.660.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 10 | 152.660.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 6 | 650.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 73.860.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 60 | 73.860.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.985.207.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 217.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 217.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 8.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 8.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 60.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 60.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 16.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 16.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 27.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 27.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 384 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 670.602.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 670.602.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 170.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 492.602.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 492.602.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.097.305.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 58 | 1.097.305.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 150.805.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 8 | 150.805.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 900.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 900.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 46.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 46 | 46.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.160.950.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 292.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 292.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 48.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 48.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 18.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 39.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 39.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 336 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 175.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 476.244.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 476.244.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 93.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 93.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 377.244.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 377.244.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 392.206.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 33 | 392.206.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 127.206.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 7 | 127.206.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 230.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 230.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 24 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.891.093.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 315.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 315.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 702 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 624.093.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 624.093.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 3.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 520.593.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 520.593.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 952.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 77 | 952.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 107.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 12 | 107.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 10 | 750.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 95.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 55 | 95.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.901.355.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 254.388.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 254.388.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.128.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 7.128.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 33.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 33.480.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 10.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 10.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 33.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 33.480.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 672 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 167.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 167.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 558.087.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 558.087.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 447.687.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 447.687.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.088.880.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 93 | 1.088.880.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 129.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 6 | 129.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 900.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 900.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 59.280.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 85 | 59.280.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah** | | | | | | | | **740.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.1 | 740.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 740.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 740.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 740.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 740.000.000 | SUBBAG PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 420.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 21 | 420.000.000 | SUBBAG PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 320.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 45 | 320.000.000 | SUBBAG PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaan (IRB)** | | | | | | | | | **22.747.423.000** | **Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya** | |
| | | | | | | Indeks Pelayanan Keciptakaryaan | % | 33.6 | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | **Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah** | | | | | | | | **22.747.423.000** | | |
| | | | | | | Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar | % | 49.42 | 22.747.423.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | | 18.699.123.000 | | |
| | | | | | | Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah | % | 5.83 | 18.195.000.000 | Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung | |
| | | | | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | | 18.195.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Lokasi Komplek BGMD yang Diberi Bantuan Teknis Pada Tahun N | Lokasi | 60 | 18.195.000.000 | SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI | |
| | | 1.03.08.1.01.0012 | | | Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat | | | | 150.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Peserta mengikuti pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung kepada penyelenggara bangunan gedung, dan masyarakat | Orang | 160 | 100.000.000 | SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan bangunan gedung negara | Orang | 80 | 50.000.000 | SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.03.08.1.01.0018 | | | Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi | Dokumen | 60 | 180.000.000 | SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.03.08.1.01.0019 | | | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | 17.865.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Dokumen | 2 | 17.865.000.000 | SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis | % | 11.94 | 504.123.000 | | |
| | | | | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | | 504.123.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis pada tahun n | Lokasi | 123 | 504.123.000 | | |
| | | 1.03.08.1.01.0019 | | | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | 504.123.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis sampai dengan tahun Ke-n | Dokumen | 1 | 504.123.000 | | OPD Provinsi |
| | | 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | | | 4.048.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi | % | 45.38 | 200.000.000 | Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung | |
| | | | | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Dokumen | 1 | 200.000.000 | SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI | |
| | | 1.03.11.1.01.0012 | | | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Orang | 320 | 200.000.000 | SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi | % | 43.49 | 3.848.300.000 | Balai Jasa Konstruksi | |
| | | | | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | | | | | 2.635.445.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Bidang Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi | Orang | 10579 | 2.635.445.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | 1.03.11.1.01.0011 | | | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | | | | 1.467.445.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (Orang) | Orang | 1600 | 1.467.445.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.03.11.1.01.0014 | | | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | | | | 1.168.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi | Orang | 800 | 1.168.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | | | | | 750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Kegiatan | 5 | 750.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.03.11.1.02.0008 | | | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data Dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi | Dokumen | 2 | 218.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah pengadaan Buku Konstruksi | Buah | 125 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang terlayani | Kegiatan | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah stand pameran yang dilaksanakan | Unit | 4 | 356.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.03.11.1.02.0009 | | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI | Orang | 80 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | | | | | 462.855.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengawasan bidang jasa konstruksi | Dokumen | 1 | 462.855.000 | | |
| | | 1.03.11.1.03.0006 | | | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | | | | 462.855.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | Laporan | 4 | 462.855.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaan (LH)** | | | | | | | | | **63.844.279.000** | **Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya** | |
| | | | | | | Indeks Pelayanan Keciptakaryaan | % | 33.6 | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | **Meningkatnya Akses Air Minum Aman** | | | | | | | | **63.844.279.000** | | |
| | | | | | | Persentase akses air minum aman | % | 40.43 | 63.844.279.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | | 63.844.279.000 | | |
| | | | | | | Persentase akses air minum layak | % | 91.92 | 3.844.274.000 | Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung | |
| | | | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | | | 3.844.274.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Layak Th-N (Jiwa) | Orang | 33760434 | 3.844.274.000 | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | |
| | | 1.03.03.1.01.001 5 | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | 2.386.184.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan sarpras air minum yang disusun (fs, rispam, ded, amdal) (dokumen) Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen) | Dokumen | 4 | 2.386.184.000 | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.03.03.1.01.001 6 | | | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | 1.458.090.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM (Kab/Kota) | Kabupaten/ Kota | 29 | 1.458.090.000 | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas | % | 100 | 60.000.005.000 | Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | kabupaten/kota | | | | | |
| | | | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | | | 60.000.005.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota | Liter | 20 | 60.000.005.000 | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | |
| | | 1.03.03.1.01.001 7 | | | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | | 60.000.005.000 | | |
| | | | | | | Kapasitas Pembangunan SPAM Regional (Liter/detik) | Liter | 120 | 60.000.005.000 | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Kapasitas Peningkatan SPAM Regional (Liter/detik) | Liter | 0 | | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaan (PE)** | | | | | | | | | **17.239.623.000** | **Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya** | |
| | | | | | | Indeks Pelayanan Keciptakaryaan | % | 33.6 | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | **Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik Aman** | | | | | | | | **2.978.123.000** | | |
| | | | | | | Persentase akses air limbah domestik aman | % | 10.97 | 2.978.123.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | | 2.978.123.000 | | |
| | | | | | | Persentase akses air limbah domestik layak | % | 93.58 | 2.978.123.000 | Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung | |
| | | | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | | | | | 2.978.123.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penduduk yang Sudah Mempunyai Akses Air Limbah Domestik Layak Th-N | Orang | 34724662 | 2.978.123.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN | |
| | | 1.03.05.1.01.001 3 | | | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat | | | | 2.024.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat | RT/KK | 0 | | SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Kapasitas pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional (m3) | m3 | 35 | 2.024.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | m2 | | | SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN | |
| | | 1.03.05.1.01.001 4 | | | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | 954.123.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi dalam pengelolaan air limbah domestik (Kab/Kota) | Kabupaten/ Kota | 18 | 954.123.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.03.05.1.01.001 5 | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun (Dokumen) | Dokumen | 0 | | SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya Akses Air Minum Aman** | | | | | | | | **14.261.500.000** | | |
| | | | | | | Persentase akses air minum aman | % | 40.43 | 14.261.500.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | | 14.261.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase akses air minum jaringan perpipaan | % | 54.32 | 14.261.500.000 | Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | | | 14.261.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Jiwa) | Orang | 19950683 | 14.261.500.000 | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | |
| | | 1.03.03.1.01.0017 | | | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | | 14.261.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lokasi yang mendapatkan hibah Pembangunan SPAM Desa | Lokasi | 25 | 14.261.500.000 | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | OPD Provinsi |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **560.935.780.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **94.856.617.000** | **Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah | Angka | 31.45 | | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah** | | | | | | | | **93.756.617.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 85 | 93.756.617.000 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 93.756.617.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bengawan Solo | % | 100 | 674.142.000 | Balai PSDA Bengawan Solo | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 70.698.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 70.698.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 23.514.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 23.514.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 1.584.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 1.584.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.000 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 7 | 6.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 307.849.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 307.849.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 849.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 849.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 199.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 199.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 108.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 108.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 295.595.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 37 | 295.595.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 142.752.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 24 | 142.752.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 106.493.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 106.493.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 46.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 10 | 46.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bodri Kuto | % | 100 | 739.202.000 | Balai PSDA Bodri Kuto | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 68.150.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 68.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 19.128.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 19.128.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.041.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 15.041.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.061.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 3.061.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 11.130.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 6 | 11.130.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 19.790.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 24 | 19.790.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 290.220.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 27 | 290.220.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 912.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 3 | 912.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 202.980.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 202.980.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 86.328.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 86.328.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 380.832.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 90 | 380.832.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 146.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 21 | 146.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 127.250.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 3 | 127.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 107.382.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 67 | 107.382.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 100 | 469.653.000 | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 77.266.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 77.266.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 17.575.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 17.575.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 13.825.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 14 | 13.825.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 2.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.353.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 3 | 6.353.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 37.313.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 37.313.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 187.588.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 15 | 187.588.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 838.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 838.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 122.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 122.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 64.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 64.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 204.799.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 32 | 204.799.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 86.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 20 | 86.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 48.349.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 9 | 48.349.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serang Lusi Juana | % | 100 | 798.698.000 | Balai PSDA Serang Lusi Juana | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 72.672.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 72.672.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 22.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 10 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 4.392.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 4.392.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 8.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 10 | 8.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 17.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 17.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 246.179.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 25 | 246.179.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.179.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 1.179.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 185.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 185.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 479.847.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 60 | 479.847.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 165.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 27 | 165.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 260.637.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 260.637.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 54.210.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 31 | 54.210.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serayu Citanduy | % | 100 | 581.883.000 | Balai PSDA Serayu Citanduy. | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 106.361.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 106.361.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 19.672.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 19.672.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.809.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 15.809.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 8.380.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 8.380.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 218.458.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 3 | 218.458.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 958.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 958.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 97.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 97.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 257.064.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 49 | 257.064.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 117.580.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 30 | 117.580.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 68.768.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 68.768.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 70.716.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 25 | 70.716.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di Balai PSDA Pemali Comal | % | 100 | 997.495.000 | Balai PSDA Pemali Comal | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 104.900.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 104.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 38.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 38.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 7 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 24 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 34.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 36 | 34.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 430.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 430.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 1.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 254.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 254.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 | 175.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 462.395.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 33 | 462.395.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 280.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 29 | 280.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 3 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 62.395.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 46 | 62.395.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 89.495.544.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 78.913.659.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 78.913.659.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 77.413.659.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 500 | 77.413.659.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 1.500.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 267.784.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 267.784.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 267.784.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 267.784.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 275.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 275.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 20 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 480 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Orang | 100 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.978.665.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 77 | 1.978.665.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.186.335.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 1.186.335.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 47.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 47.350.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 8.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 2 | 8.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 42.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 42.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 184.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Dokumen | 12 | 184.080.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 3 | 250.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 770.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 29 | 770.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 630.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 1 | 630.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0003 | | | Pengadaan Alat Besar | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit alat besar yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 28 | 140.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3.697.644.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 48 | 3.697.644.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 68.874.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 68.874.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 683.980.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 683.980.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 2.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 2.500.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 444.790.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 444.790.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3.592.792.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 410 | 3.592.792.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1.353.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 50 | 1.353.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1.491.882.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 1.491.882.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 747.910.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 285 | 747.910.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah** | | | | | | | | **1.100.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah | Angka | 3.15 | 1.100.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 1.100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 1.100.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 1.100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 1.100.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 500.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 4 | 500.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 3 | 600.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah** | | | | | | | | | **110.513.791.000** | **Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang** | |
| | | | | | | Indeks Pelayanan Sumberdaya Air dan Penataan Ruang | Angka | 61.67 | | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | |
| | **Meningkatnya Keterwujudan Penataan Ruang** | | | | | | | | **5.670.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase keterwujudan penataan ruang | % | 61.57 | 5.670.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | | 5.670.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase implementasi pemanfaatan ruang | % | 68 | 1.000.000.000 | Bidang Penataan Ruang | |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang | Dokumen | 6 | 1.000.000.000 | SEKSI PEMANFAATAN RUANG | |
| | | 1.03.12.1.03.0004 | | | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang | Laporan | 4 | 700.000.000 | SEKSI PEMANFAATAN RUANG | |
| | | 1.03.12.1.03.0006 | | | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang | Dokumen | 2 | 300.000.000 | SEKSI PEMANFAATAN RUANG | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase ketersediaan rencana tata ruang | % | 60.71 | 1.970.000.000 | Bidang Penataan Ruang | |
| | | | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | | | | | 1.190.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan tata ruang | Dokumen | 3 | 1.190.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG | |
| | | 1.03.12.1.01.000 | | | Penetapan RTRW Provinsi | | | | 990.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Arahan Pengembangan Kewilayahan | Dokumen | 1 | 720.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG | |
| | | | | | | Jumlah Perda RTRW Provinsi | Dokumen | 1 | 270.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG | |
| | | 1.03.12.1.01.0009 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi | Orang | 300 | 200.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | | | | | 780.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | Dokumen | 11 | 780.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG | |
| | | 1.03.12.1.02.0008 | | | Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota | | | | 630.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota | Laporan | 10 | 630.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG | |
| | | 1.03.12.1.02.0013 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi | Dokumen | 1 | 150.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | % | 100 | 72.097.000 | Balai PSDA Bengawan Solo | |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | | | | | 72.097.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | Dokumen | 1 | 72.097.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.12.1.04.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | 72.097.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | Dokumen | 1 | 72.097.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 100 | 96.321.000 | Balai PSDA Bodri Kuto | |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | | | | | 96.321.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | Dokumen | 1 | 96.321.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.12.1.04.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | 96.321.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | Dokumen | 1 | 96.321.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 100 | 97.638.000 | Balai PSDA Pemali Comal | |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | | | | | 97.638.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | Dokumen | 1 | 97.638.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.12.1.04.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | 97.638.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Dokumen | 1 | 97.638.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 100 | 72.961.000 | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | | | | | 72.961.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | Dokumen | 1 | 72.961.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.12.1.04.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | 72.961.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai Progo Bogowonto Luk Ulo | Dokumen | 1 | 72.961.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | % | 100 | 76.171.000 | Balai PSDA Serang Lusi Juana | |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | | | | | 76.171.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | Dokumen | 1 | 76.171.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.12.1.04.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | 76.171.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | Dokumen | 1 | 76.171.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | % | 100 | 67.200.000 | Balai PSDA Serayu Citanduy. | |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | | | | | 67.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | Dokumen | 1 | 67.200.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.12.1.04.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | 67.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Dokumen | 1 | 67.200.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tertib ruang | % | 56 | 2.217.612.000 | Bidang Penataan Ruang | |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | | | | | 1.766.693.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang | Dokumen | 5 | 1.766.693.000 | SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | |
| | | 1.03.12.1.04.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | 1.766.693.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Dokumen | 5 | 1.766.693.000 | SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengawasan Penataan Ruang | | | | | 450.919.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang | Dokumen | 2 | 450.919.000 | SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | |
| | | 1.03.12.4.06.0001 | | | Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat | | | | 275.428.000 | | |
| | | | | | | Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat | Dokumen | 1 | 275.428.000 | SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | |
| | | 1.03.12.4.06.0003 | | | Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan | | | | 175.491.000 | | |
| | | | | | | Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan | Dokumen | 1 | 175.491.000 | SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air** | | | | | | | | **104.843.791.000** | | |
| | | | | | | Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air | % | 61.78 | 104.843.791.000 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | | 104.843.791.000 | | |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi | Angka | 69.11 | 5.549.732.000 | Bidang Irigasi dan Air Baku | |
| | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 5.549.732.000 | | |
| | | | | | | Jumlah DI yang direhab | Unit | 5 | 4.749.732.000 | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI | |
| | | 1.03.02.1.02.0014 | | | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | | 4.749.732.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | Km | 1 | 4.749.732.000 | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi | Dokumen | 3 | 800.000.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.02.0037 | | | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi | | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air | Unit | 3 | 530.675.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Kelembagaan Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan | Unit | 1 | 269.325.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | Angka | 67.34 | 8.492.841.000 | Balai PSDA Bengawan Solo | |
| | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 8.492.841.000 | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Bengawan Solo | % | 72.99 | 8.492.841.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.02.0021 | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | 8.492.841.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara diwilayah BPSDA Bengawan Solo | Km | 6.58 | 8.492.841.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | Angka | 71.8 | 6.812.193.000 | Balai PSDA Bodri Kuto | |
| | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 6.812.193.000 | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 70.24 | 6.812.193.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.02.0021 | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | 6.812.193.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | Km | 15.55 | 6.812.193.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | Angka | 62.68 | 7.779.399.000 | Balai PSDA Pemali Comal | |
| | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 7.779.399.000 | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 60.33 | 7.779.399.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.02.0021 | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | 7.779.399.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal | Km | 202.39 | 7.779.399.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | Angka | 77.36 | 4.382.586.000 | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | |
| | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 4.382.586.000 | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 63 | 4.382.586.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.02.0021 | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | 4.382.586.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | Km | 134.51 | 4.382.586.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | Angka | 62.85 | 4.627.878.000 | Balai PSDA Serang Lusi Juana | |
| | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 4.627.878.000 | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Serang Lusi Juana | % | 59.13 | 4.627.878.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.02.0021 | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | 4.627.878.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | Km | 156.787 | 4.627.878.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | Angka | 72.65 | 5.455.543.000 | Balai PSDA Serayu Citanduy. | |
| | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 5.455.543.000 | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Serayu Citanduy | % | 72.65 | 5.455.543.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.03.02.1.02.0021 | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | 5.455.543.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy. | Km | 191.8 | 5.455.543.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik | % | 64.31 | 2.810.081.000 | Bidang Irigasi dan Air Baku | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 2.810.081.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kondisi fisik tampungan air yang terbangun | Dokumen | 2 | 134.241.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0090 | | | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | | | | 134.241.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan | Unit | 1 | 134.241.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | jumlah laporan peningkataan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama dan pengelolaan aset | Dokumen | 4 | 1.700.000.000 | SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET | |
| | | 1.03.02.1.01.0075 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | | | | 1.700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Unit | 2 | 700.000.000 | SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah laporan kerjasama dan pengelolaan aset | Laporan | 2 | 1.000.000.000 | SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Total Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun | Unit | 92 | 975.840.000 | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI | |
| | | 1.03.02.1.01.0078 | | | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | | | | 975.840.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi | Unit | 1 | 975.840.000 | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.03.02.1.01.0120 | | | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | Unit | 0 | | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | % | 100 | 3.000.000.000 | Balai PSDA Bengawan Solo | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 3.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA | Dokumen | 5 | 3.000.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0103 | | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | | | | 3.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Bengawan Solo | Dokumen | 5 | 3.000.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 100 | 2.444.996.000 | Balai PSDA Bodri Kuto | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 2.444.996.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA | Dokumen | 5 | 2.444.996.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.03.02.1.01.0103 | | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | | | | 2.444.996.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | Dokumen | 5 | 2.444.996.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 100 | 3.847.324.000 | Balai PSDA Pemali Comal | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 3.847.324.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA | Dokumen | 5 | 3.847.324.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0103 | | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | | | | 3.847.324.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | Dokumen | 5 | 3.847.324.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 100 | 1.847.037.000 | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.847.037.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA | Dokumen | 5 | 1.847.037.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0103 | | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | | | | 1.847.037.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pendayagunaan SDA di BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | Dokumen | 5 | 1.847.037.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | % | 100 | 2.761.321.000 | Balai PSDA Serang Lusi Juana | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 2.761.321.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA | Dokumen | 5 | 2.761.321.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0103 | | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | | | | 2.761.321.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Serang Lusi Juana | Dokumen | 5 | 2.761.321.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | % | 100 | 2.928.844.000 | Balai PSDA Serayu Citanduy. | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 2.928.844.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA | Dokumen | 5 | 2.928.844.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0103 | | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | | | | 2.928.844.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pendayagunaan SDA di BPSDA  Serayu Citanduy | Dokumen | 5 | 2.928.844.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | % | 77.78 | 1.474.912.000 | Balai PSDA Bengawan Solo | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.474.912.000 | | |
| | | | | | | Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | % | 33.33 | 1.474.912.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0105 | | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | 1.474.912.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | Unit | 10 | 1.474.912.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 54.6 | 726.958.000 | Balai PSDA Bodri Kuto | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 726.958.000 | | |
| | | | | | | Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 9.09 | 726.958.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0105 | | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | 726.958.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | Unit | 8 | 726.958.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 34.78 | 1.612.694.000 | Balai PSDA Pemali Comal | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.612.694.000 | | |
| | | | | | | Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 100 | 1.612.694.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0105 | | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | 1.612.694.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal | Unit | 8 | 1.612.694.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 92.21 | 332.993.000 | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 332.993.000 | | |
| | | | | | | Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 100 | 332.993.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0105 | | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | 332.993.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | Unit | 2 | 332.993.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | % | 50 | 1.454.872.000 | Balai PSDA Serang Lusi Juana | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.454.872.000 | | |
| | | | | | | Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | % | 15 | 1.454.872.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0105 | | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | 1.454.872.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | Unit | 5 | 1.454.872.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | % | 76.5 | 605.321.000 | Balai PSDA Serayu Citanduy. | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 605.321.000 | | |
| | | | | | | Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | % | 10 | 605.321.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0105 | | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | 605.321.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | Unit | 2 | 605.321.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi | % | 52.37 | 16.170.547.000 | Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 16.170.547.000 | | |
| | | | | | | akumulasi panjang sarpras sungai pantai terbangun | Km | 2 | 7.960.000.000 | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI | |
| | | 1.03.02.1.01.0079 | | | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi | Km | 1.5 | 800.000.000 | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.03.02.1.01.0096 | | | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai<br>Lainnya yang Dibangun | Km | 0 | | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.03.02.1.01.0102 | | | Pembangunan Check Dam | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Check Dam yang Dibangun | Unit | 0 | | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.03.02.1.01.0118 | | | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | | | | 7.160.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun | Km | 0.5 | 7.160.000.000 | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA | Kegiatan | 1 | 742.510.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0090 | | | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | | | | 742.510.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan | Unit | 4 | 742.510.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir | Km | 2 | 7.468.037.000 | SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0107 | | | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | | | | 7.468.037.000 | | |
| | | | | | | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara | Km | 2 | 7.468.037.000 | SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto | % | 50.04 | 3.866.137.000 | Balai PSDA Bodri Kuto | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 3.866.137.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 100 | 3.866.137.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0107 | | | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | | | | 3.866.137.000 | | |
| | | | | | | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | Km | 3.53 | 3.866.137.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal | % | 53.26 | 6.996.727.000 | Balai PSDA Pemali Comal | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 6.996.727.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 100 | 6.996.727.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0107 | | | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | | | | 6.996.727.000 | | |
| | | | | | | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara | Km | 6.45 | 6.996.727.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air | % | 61.31 | 8.862.855.000 | Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 8.143.355.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air pendukung Perencanaan Dan Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA | Dokumen | 6 | 1.624.274.000 | SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI | |
| | | 1.03.02.1.01.0103 | | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | | | | 1.174.274.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi | Dokumen | 3 | 1.174.274.000 | SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.03.02.1.01.0104 | | | Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan | Unit | 3 | 450.000.000 | SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi | Dokumen | 14 | 1.979.574.000 | SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0087 | | | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | | | | 638.574.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun | Dokumen | 11 | 638.574.000 | SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.03.02.1.01.0117 | | | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi | | | | 1.341.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun | Dokumen | 3 | 1.341.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA | Dokumen | 5 | 4.539.507.000 | SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN | |
| | | 1.03.02.1.01.0121 | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | | | | 2.933.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | Dokumen | 2 | 2.933.000.000 | SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.03.02.1.01.0122 | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | | | | 1.606.507.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai | Dokumen | 2 | 1.606.507.000 | SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 719.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Irigasi | Dokumen | 1 | 719.500.000 | SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN | |
| | | 1.03.02.1.02.0032 | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | | | | 719.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun | Dokumen | 1 | 719.500.000 | SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **205.370.408.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat** | | | | | | | | | **19.965.000.000** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | |
| | | | | | | Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan | % | 44.79 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | | | | | Persentase rumah layak huni dan terjangkau yang terpenuhi | % | 69.02 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | **Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat** | | | | | | | | **15.132.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat | % | 14.29 | 6.830.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | | | 6.830.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani | % | 2.73 | 6.830.000.000 | Bidang Perumahan | |
| | | | | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana | Dokumen | 2 | 100.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN | |
| | | 1.04.02.1.01.001 1 | | | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi | Dokumen | 2 | 100.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN | |
| | | 1.04.02.1.02.000 1 | | | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana | Orang | 250 | 100.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | | | 5.180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana | Unit | 160 | 5.180.000.000 | SEKSI PERUMAHAN UMUM | |
| | | 1.04.02.1.03.000 1 | | | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | | 3.080.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi | Unit | 125 | 3.080.000.000 | SEKSI PERUMAHAN UMUM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.04.02.1.03.000 4 | | | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | | | | 2.100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun | Unit | 35 | 2.100.000.000 | SEKSI PERUMAHAN UMUM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | | | 1.450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Unit | 11225 | 1.450.000.000 | SEKSI PERUMAHAN SWADAYA | |
| | | 1.04.02.1.04.000 6 | | | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi | | | | 1.450.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi | Laporan | 1 | 1.450.000.000 | SEKSI PERUMAHAN SWADAYA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat | % | 0.04 | 8.302.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | | | 8.087.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase rumah layak huni yang disediakan | % | 0.12 | 8.087.000.000 | Bidang Perumahan | |
| | | | | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | | | 325.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan Penyedian Rumah yang Terkena Relokasi Program Provinsi | Dokumen | 2 | 325.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN | |
| | | 1.04.02.1.01.0010 | | | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi | | | | 325.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi | Dokumen | 2 | 325.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi | Dokumen | 1 | 80.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN | |
| | | 1.04.02.1.02.0009 | | | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP | Orang | 100 | 80.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | | | 7.682.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Unit Pembangunan Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi | Unit | 150 | 7.682.000.000 | SEKSI PERUMAHAN UMUM | |
| | | 1.04.02.1.03.0004 | | | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | | | | 7.682.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan | Unit | 50 | 2.648.000.000 | SEKSI PERUMAHAN UMUM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Program Pemerintah | Unit | 100 | 5.034.000.000 | SEKSI PERUMAHAN UMUM | |
| | | 1.04.06 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | 215.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman | % | 100 | 215.000.000 | Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | | | Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah | | | | | 215.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi | Dokumen | 1 | 215.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | |
| | | 1.04.06.1.01.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah | | | | 215.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah | Laporan | 1 | 215.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | **Meningkatnya kualitas kawasan permukiman** | | | | | | | | **4.833.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase penurunan kawasan kumuh | % | 55.21 | 4.833.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | 3.108.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman | % | 100 | 885.000.000 | Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | | | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | | 885.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia | Dokumen | 1 | 180.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | |
| | | 1.04.03.1.01.0017 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman | Laporan | 1 | 180.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia | Dokumen | 2 | 395.000.000 | SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 1.04.03.1.01.0008 | | | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | | | | 215.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi | Dokumen | 1 | 215.000.000 | SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.04.03.1.01.0017 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Laporan | 1 | 180.000.000 | SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia | Dokumen | 2 | 310.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | | 1.04.03.1.01.0017 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | | 310.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Pengembangan Informasi, serta Publikasi | Laporan | 2 | 310.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh | % | 3.18 | 2.223.000.000 | Bidang Kawasan Permukiman | |
| | | | | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun | Laporan | 3 | 85.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | 1.04.03.1.01.0018 | | | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Laporan | 3 | 85.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | | 2.138.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah15 Ha yang telah disusun | Laporan | 3 | 270.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.04.03.1.02.0002 | | | Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | 270.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | Laporan | 3 | 270.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | | | Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas | Ha | 35 | 1.868.000.000 | SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | 1.04.03.1.02.0003 | | | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki | Unit | 563 | 100.000.000 | SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.04.03.1.02.0014 | | | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | 1.768.000.000 | | |
| | | | | | | Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar | Ha | 35 | 1.768.000.000 | SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | | | 1.725.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman | % | 40 | 1.725.000.000 | Bidang Kawasan Permukiman | |
| | | | | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | | | | | 1.725.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | Laporan | 2 | 1.725.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | 1.04.05.1.01.0002 | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | | | | 1.620.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman | Lokasi | 2 | 1.620.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.04.05.1.01.0003 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman | Laporan | 2 | 105.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **21.926.113.000** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 76 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **20.892.113.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 82 | 20.892.113.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 20.892.113.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 20.892.113.000 | SEKRETARIAT | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 14.970.338.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 6 | 14.970.338.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14.274.338.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 79 | 14.274.338.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 605.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 605.300.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 25.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 25.700.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0008 | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | Dokumen | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 180.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0001 | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 155.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 155.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0007 | | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 140.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 2 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 2 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 50 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 50 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Orang | 10 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.990.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.990.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1.070.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 1.070.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 1.152.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 80 | 1.152.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 165.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 20 | 165.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 987.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 60 | 987.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.709.775.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 36 | 1.709.775.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 185.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 185.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 574.775.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 574.775.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 950.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 950.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 252 | 750.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 30 | 260.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 20 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 130 | 70.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 70 | 350.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **1.034.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.45 | 1.034.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 1.034.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 1.034.000.000 | SEKRETARIAT | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 1.034.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 1.034.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 9 | 600.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 434.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 11 | 434.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **Meningkatkan tata kelola administrasi dan pemanfaatan Pertanahan** | | | | | | | | | **1.590.000.000** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | |
| | | | | | | Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi | % | 100 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | | | | | Persentase reforma agraria yang difasilitasi | % | 100 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | **Terlaksananya penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum** | | | | | | | | **400.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum | % | 100 | 400.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | 2.10.03 | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | | | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi penetapan lokasi | % | 100 | 400.000.000 | Bidang Pertanahan | |
| | | | | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi | | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum | Dokumen | 1 | 400.000.000 | SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH | |
| | | 2.10.03.1.01.0001 | | | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | Dokumen | 5 | 400.000.000 | SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH | |
| | **Terlaksananya reformasi agraria di Provinsi Jawa Tengah** | | | | | | | | **1.190.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agraria | % | 100 | 1.190.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | 2.10.04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan | % | 100 | 600.000.000 | Bidang Pertanahan | |
| | | | | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi | Dokumen | 3 | 600.000.000 | SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN | |
| | | 2.10.04.1.01.0001 | | | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 250.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Dokumen | 1 | 150.000.000 | SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.10.04.1.01.0002 | | | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Dokumen | 10 | 350.000.000 | SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.10.06 | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | | | | 590.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria | % | 100 | 590.000.000 | Bidang Pertanahan | |
| | | | | Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 590.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria | Lokasi | 10 | 590.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN | |
| | | 2.10.06.1.01.0002 | | | Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | 163.460.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 22 | 163.460.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.10.06.1.01.0003 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah | | | | 426.540.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria | Dokumen | 2 | 5.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria | Dokumen | 7 | 421.540.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **43.481.113.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum (PE)** | | | | | | | | | **2.666.576.000** | **Satuan Polisi Pamong Praja** | |
| | | | | | | Indeks Penyelenggaraan Trantibum | Angka | 82 | | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | **Meningkatnya kualitas Penegakan Produk Hukum Daerah** | | | | | | | | **2.666.576.000** | | |
| | | | | | | Skor kinerja penegakan produk hukum daerah | Angka | 6.1 | 2.666.576.000 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | | 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | 2.666.576.000 | | |
| | | | | | | Persentase penegakan produk hukum daerah | % | 80 | 2.666.576.000 | Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah | |
| | | | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 250.000 | | |
| | | | | | | Persentase Penerapan SPM Trantibumlinmas | % | 100 | 250.000 | SEKSI PENINDAKAN | |
| | | 1.05.02.1.01.0015 | | | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 250.000 | | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang menperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada | % | 100 | 250.000 | SEKSI PENINDAKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | | | | | 2.566.326.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina dan diawasi | Orang | 300 | 180.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | |
| | | 1.05.02.1.02.0002 | | | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelanggar yang diawasi | Orang | 200 | 65.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.02.1.02.0003 | | | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | | | | 115.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina | Orang | 100 | 65.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | |
| | | | | | | Pemetaan pelanggaran Perda dan Pergub | Dokumen | 4 | 50.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | |
| | | | | | | Persentase pelanggar Perda dan Pergub yang ditangani | % | 100 | 2.386.326.000 | SEKSI PENINDAKAN | |
| | | 1.05.02.1.02.0001 | | | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | | | | 435.650.000 | | |
| | | | | | | jumlah peserta sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub | Orang | 372 | 435.650.000 | SEKSI PENINDAKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.02.1.02.0003 | | | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | | | | 1.950.676.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang ditindak | Orang | 100 | 1.950.676.000 | SEKSI PENINDAKAN | |
| | | | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembinaan PPNS | Dokumen | 2 | 100.000.000 | SEKSI PENINDAKAN | |
| | | 1.05.02.1.03.0001 | | | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya | Orang | 100 | 100.000.000 | SEKSI PENINDAKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum (RB)** | | | | | | | | | **1.925.000.000** | **Satuan Polisi Pamong Praja** | |
| | | | | | | Indeks Penyelenggaraan Trantibum | Angka | 82 | | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | **Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat** | | | | | | | | **1.925.000.000** | | |
| | | | | | | Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas) | Angka | 12.4 | 1.925.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | | 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | 1.775.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum | % | 29.57 | 725.000.000 | Bidang Pembinaan Masyarakat | |
| | | | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 725.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok masyarakat yang dilakukan penyuluhan | Kelompok | 170 | 163.290.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN | |
| | | 1.05.02.1.01.001 7 | | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | 163.290.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mitra trantib yang dibina | Kelompok | 35 | 21.438.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah sekolah, kelompok masyarakat dan BUMD yang dibina | Kelompok | 135 | 141.852.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah wilayah yang dilakukan pemetaan potensi rawan trantibum | Kabupaten/ Kota | 35 | 561.710.000 | SEKSI KEWASPADAAN | |
| | | 1.05.02.1.01.001 4 | | | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | | | | 425.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peserta konsolidasi kewaspadaan gangguan trantibum | Orang | 140 | 425.000.000 | SEKSI KEWASPADAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.02.1.01.001 7 | | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | 136.710.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan daerah rawan tramtib | Dokumen | 1 | 66.145.000 | SEKSI KEWASPADAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah kasus gangguan trantibum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini | Kasus | 10 | 70.565.000 | SEKSI KEWASPADAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah | % | 67.15 | 600.000.000 | Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | |
| | | | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penanganan gangguan tramtibum | Kegiatan | 74 | 420.000.000 | SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN | |
| | | 1.05.02.1.01.001 7 | | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | 238.060.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah kegiatan pengamanan strategis dan tk Provinsi | Kegiatan | 25 | 89.300.000 | SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pengawalan pejabat VVIP | Kegiatan | 15 | 54.910.000 | SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah patroli pengendalian tramtibum | Kegiatan | 24 | 93.850.000 | SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.02.1.01.001 9 | | | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | 181.940.000 | | |
| | | | | | | Jumlah operasi penertiban trantibum ( pekat, lintas kabkota, cipta kondisi, perbatasan prov.) | Kegiatan | 10 | 148.890.000 | SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase unjuk rasa yang tertangani | % | 100 | 33.050.000 | SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah upaya pencegahan gangguan tramtibum di Jawa Tengah | Kegiatan | 18 | 180.000.000 | SEKSI KETERTIBAN UMUM | |
| | | 1.05.02.1.01.001 7 | | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | 132.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kawasan tertib yang dibina | Lokasi | 8 | 79.365.000 | SEKSI KETERTIBAN UMUM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah peserta pembinaan trantibum | Orang | 120 | 53.535.000 | SEKSI KETERTIBAN UMUM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.02.1.01.001 9 | | | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | 47.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penertiban PNS | Kegiatan | 10 | 47.100.000 | SEKSI KETERTIBAN UMUM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina | % | 40.03 | 450.000.000 | Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat | |
| | | | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas yang diberdayakan | Kelompok | 245 | 125.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS | |
| | | 1.05.02.1.01.001 6 | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jml mobilisasi Satlinmas untuk membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban, penanggulangan dan pencegahan bencana | Kegiatan | 0 | | SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah pemutakhiran data Satgas Linmas dan Satlinmas | Dokumen | 2 | 125.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas yang dilakukan penguatan kelembagaannya | Kelompok | 245 | 325.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SDM SATUAN LINMAS | |
| | | 1.05.02.1.01.001 8 | | | Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | | | | 325.000.000 | | |
| | | | | | | Jml personil Satgas Linmas dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya | Orang | 400 | 325.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SDM SATUAN LINMAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | | | 150.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran | % | 100 | 150.000.000 | Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat | |
| | | | | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kab/kota yang telah dilakukan pemetaan daerah rawan kebakaran | Kabupaten/Kota | 35 | 150.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS | |
| | | 1.05.04.1.01.0022 | | | Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal | Dokumen | 2 | 150.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **19.290.855.000** | **Satuan Polisi Pamong Praja** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 72 | | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **19.063.760.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 80 | 19.063.760.000 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 19.063.760.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 19.063.760.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 12.800.594.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 13 | 12.800.594.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 12.459.594.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 80 | 12.459.594.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 303.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 303.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 38.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 38.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 125.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 125.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 729.200.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 729.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 2 | 140.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 44.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 8 | 44.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 545.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 1740 | 545.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 995.806.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 995.806.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 160.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 64.556.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 64.556.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 76.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 76.250.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 125.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 500.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 57.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 21 | 57.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 57.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 20 | 57.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.662.439.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 3 | 2.662.439.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 3.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 380.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 380.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.279.039.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 2.279.039.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.693.721.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 75 | 1.693.721.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 20 | 450.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 188.721.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 52 | 188.721.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1.040.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 1.040.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **227.095.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3 | 227.095.000 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 227.095.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 227.095.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 227.095.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 227.095.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 117.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 8 | 117.500.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 109.595.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 4 | 109.595.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **23.882.431.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana** | | | | | | | | | **4.925.000.000** | **Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | |
| | | | | | | Indeks Ketahanan Daerah | Angka | 0.74 | | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | **Meningkatnya Kapasitas Penanganan Darurat dan Analisis Kebencanaan** | | | | | | | | **1.500.000.000** | | |
| | | | | | | Angka kematian akibat bencana per 1.000.000 jiwa | Angka | 0.57 | 1.500.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik | % | 2.86 | 1.100.000.000 | Bidang Logistik dan Peralatan | |
| | | | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase sarpras PB yang terpenuhi | % | 100 | 100.000.000 | SEKSI PERALATAN | |
| | | 1.05.03.1.02.001 4 | | | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SEKSI PERALATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase logistik penyelamatan dan evakuasi yang terpenuhi | % | 100 | 1.000.000.000 | SEKSI LOGISTIK | |
| | | 1.05.03.1.03.000 4 | | | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Orang | 5000 | 1.000.000.000 | SEKSI LOGISTIK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase penanganan darurat bencana | % | 100 | 400.000.000 | Bidang Penanganan Darurat | |
| | | | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kejadian bencana yang terpenuhi kajiannya | % | 100 | 125.000.000 | SEKSI SARANA DAN PRASARANA DARURAT | |
| | | 1.05.03.1.02.001 5 | | | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yangDikembangkan Kapasitas Teknis danManajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana | Orang | 200 | 125.000.000 | SEKSI SARANA DAN PRASARANA DARURAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase jumlah bencana yang dilakukan kaji cepat | % | 100 | 50.000.000 | | |
| | | 1.05.03.1.03.000 2 | | | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana | Laporan | 35 | 50.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kejadian bencana yang tertangani | % | 100 | 125.000.000 | SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI | |
| | | 1.05.03.1.03.000 3 | | | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | Laporan | 35 | 50.000.000 | SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.03.1.03.000 5 | | | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | | | | 75.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Laporan | 1 | 75.000.000 | SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase sinkronisasi data bencana pusat dan daerah | % | 100 | 100.000.000 | SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI | |
| | | 1.05.03.1.04.0017 | | | Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan | Dokumen | 35 | 100.000.000 | SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya Kapasitas Upaya Mitigasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan** | | | | | | | | **3.200.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase wilayah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya | % | 4.47 | 3.200.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | | 3.200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya | % | 0.12 | 3.200.000.000 | Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | |
| | | | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | | | | | 1.200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana | % | 0.01 | 1.200.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN | |
| | | 1.05.03.1.01.0002 | | | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | | | | 1.100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana(Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota | Orang | 3000 | 1.100.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.03.1.01.0003 | | | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | | 2.000.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | % | 0.33 | 650.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN | |
| | | 1.05.03.1.02.0013 | | | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Desa | 25 | 500.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.03.1.02.0016 | | | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Orang | 200 | 150.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Upaya kesiapsiagaan terhadap bencana | Kegiatan | 7 | 1.350.000.000 | SEKSI KESIAPSIAGAAN | |
| | | 1.05.03.1.02.0012 | | | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SEKSI KESIAPSIAGAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.03.1.02.0017 | | | Penyusunan Rencana Kontijensi | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SEKSI KESIAPSIAGAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.03.1.02.0018 | | | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana PenanggulanganKedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi | Dokumen | 0 | | SEKSI KESIAPSIAGAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.05.03.1.02.0019 | | | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan GladiKesiapsiagaan | Laporan | 1 | 100.000.000 | SEKSI KESIAPSIAGAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.03.1.02.0021 | | | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | | 1.050.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peralatan Pelindung Diri TerhadapBencana | Unit | 119 | 1.050.000.000 | SEKSI KESIAPSIAGAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya Upaya Pemulihan Bencana** | | | | | | | | **225.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase upaya pemulihan pasca bencana yang difasilitasi | % | 100 | 225.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana | % | 2 | 225.000.000 | Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | |
| | | | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam PB yang terlaksana | % | 100 | 50.000.000 | SEKSI REHABILITASI | |
| | | 1.05.03.1.04.0019 | | | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga danKemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SEKSI REHABILITASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | persentase pelaksanaan pemulihan pasca bencana | % | 100 | 175.000.000 | SEKSI REKONSTRUKSI | |
| | | 1.05.03.1.04.0007 | | | Penanganan Pasca Bencana Provinsi | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SEKSI REKONSTRUKSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.03.1.04.0020 | | | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana | Laporan | 1 | 75.000.000 | SEKSI REKONSTRUKSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **12.931.963.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 77 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **12.706.963.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 90 | 12.706.963.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 12.706.963.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 12.706.963.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 7.526.631.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 7.526.631.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 7.226.631.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 40 | 7.226.631.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 300.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 300.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 100.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 100.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 5.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 40 | 2.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 40 | 3.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.127.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.127.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 10.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 25.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 10 | 25.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 2 | 2.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 50.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 1.000.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 15.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 200.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 200.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 200.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.963.332.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 3 | 2.963.332.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 500.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 480.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 480.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.482.832.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 2.482.832.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 785.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 139 | 785.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 56 | 500.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 5 | 50.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 200.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 75 | 35.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **225.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.12 | 225.000.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 225.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 225.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 5 | 100.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 125.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 5 | 125.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **17.856.963.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Sosial

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** | | | | | | | | | **226.181.128.000** | **Dinas Sosial** | |
| | | | | | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya | % | 0.55 | | Dinas Sosial | |
| | **Meningkatnya kemandirian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berkelanjutan** | | | | | | | | **3.550.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial | % | 0.02 | 3.550.000.000 | Dinas Sosial | |
| | | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | | 3.550.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan | % | 0.02 | 3.550.000.000 | Bidang Penanganan Fakir Miskin | |
| | | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | | | | | 3.550.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Keluarga yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian | Orang | 200 | 1.250.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN | |
| | | 1.06.05.1.02.0002 | | | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota | Orang | 200 | 1.250.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 1) | Orang | 400 | 1.150.000.000 | SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN | |
| | | 1.06.05.1.02.0003 | | | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | 1.150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi | Orang | 400 | 1.150.000.000 | SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 2) | Orang | 400 | 1.150.000.000 | SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN | |
| | | 1.06.05.1.02.0003 | | | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | 1.150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi | Orang | 400 | 1.150.000.000 | SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial** | | | | | | | | **9.838.940.000** | | |
| | | | | | | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dan berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | % | 7.7 | 9.838.940.000 | Dinas Sosial | |
| | | 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | | 9.479.940.000 | | |
| | | | | | | Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | % | 7.7 | 9.479.940.000 | Bidang Pemberdayaan Sosial | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan pengumpulan sumbangan lintas daerah kab./kota yang dilaksanakan sesuai ketentuan | Dokumen | 100 | 150.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL | |
| | | 1.06.02.1.01.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau BarangJumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Dokumen | 100 | 150.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | | | | | 9.329.940.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PSKS yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas | Orang | 1076 | 8.392.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL | |
| | | 1.06.02.1.02.0001 | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 150.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.02.1.02.0002 | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi | | | | 7.112.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya | Orang | 576 | 7.112.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.02.1.02.0004 | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | | | | 1.130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 1.130.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PSKS yang mendapatkan penyuluhan sosial | Orang | 1000 | 937.940.000 | SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL | |
| | | 1.06.02.1.02.0003 | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | 937.940.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi | Orang | 1000 | 937.940.000 | SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | | | 359.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola | % | 100 | 359.000.000 | Bidang Pemberdayaan Sosial | |
| | | | | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | | | | | 359.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah stakeholder yang berperan dalam pananaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial | Orang | 300 | 300.000.000 | SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL | |
| | | 1.06.07.1.01.0002 | | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah stakeholder yang berperan serta dalam penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial | Orang | 200 | 300.000.000 | SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah TMPN Provinsi yang dikelola | Unit | 100 | 59.000.000 | SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL | |
| | | 1.06.07.1.01.0001 | | | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.07.1.01.0002 | | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | Unit | 1 | 9.000.000 | SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Terpenuhinya Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang layak dan tepat sasaran** | | | | | | | | **153.556.160.000** | | |
| | | | | | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial | % | 80 | 153.556.160.000 | Dinas Sosial | |
| | | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | | 153.556.160.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial | % | 80 | 153.556.160.000 | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | |
| | | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | | | | | 153.556.160.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan jaminan sosial | Orang | 12764 | 153.556.160.000 | SEKSI JAMINAN SOSIAL | |
| | | 1.06.05.1.02.0001 | | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | 153.556.160.000 | | |
| | | | | | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Orang | 12764 | 153.556.160.000 | SEKSI JAMINAN SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Terpenuhinya Perlindungan Sosial bagi korban bencana yang memenuhi SPM Bidang Sosial** | | | | | | | | **2.325.500.000** | | |
| | | | | | | Persentase jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial | % | 0.06 | 2.325.500.000 | Dinas Sosial | |
| | | 1.06.03 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan | % | 100 | 100.000.000 | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | |
| | | | | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal | Orang | 100 | 100.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | |
| | | 1.06.03.1.01.0001 | | | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota | Orang | 100 | 100.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | | 2.225.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial | % | 100 | 2.225.500.000 | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | |
| | | | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | | | | | 2.225.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial | Orang | 1500 | 1.509.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM | |
| | | 1.06.06.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 649.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi | Orang | 1500 | 649.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.06.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi | Orang | 1500 | 225.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.06.1.01.0003 | | | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi | Unit | 1500 | 100.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.06.1.01.0004 | | | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | | 385.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi | Orang | 1000 | 385.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.06.1.01.0005 | | | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi | Orang | 1000 | 150.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial | Orang | 1450 | 716.500.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | |
| | | 1.06.06.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 141.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi | Orang | 250 | 141.500.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.06.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi | Orang | 250 | 75.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.06.1.01.0003 | | | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi | Unit | 250 | 50.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.06.1.01.0004 | | | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | | 375.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi | Orang | 1450 | 375.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.06.1.01.0005 | | | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi | Orang | 250 | 75.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial dalam Panti yang memenuhi SPM Bidang Sosial** | | | | | | | | **56.910.528.000** | | |
| | | | | | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial | % | 0.2 | 56.910.528.000 | Dinas Sosial | |
| | | 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | | 56.760.528.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti | % | 1.92 | 4.696.250.000 | Bidang Rehabilitasi Sosial | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 2.157.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti | Orang | 2100 | 2.157.500.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS | |
| | | 1.06.04.1.01.000 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.907.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 2100 | 1.907.500.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 100.000.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | Dokumen | 4 | 150.000.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 1.677.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti | Orang | 1700 | 1.677.500.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 1.502.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Pendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 1700 | 1.502.500.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 175.000.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 380.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti | Orang | 400 | 380.000.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 380.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 400 | 380.000.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | | | | | 481.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti | Orang | 250 | 481.250.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG | |
| | | 1.06.04.1.04.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 306.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan  Provinsi | Orang | 250 | 306.250.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG | |
| | | 1.06.04.1.04.0011 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti | Dokumen | 4 | 175.000.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | % | 0.06 | 1.644.055.000 | Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.102.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | Orang | 100 | 99.425.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 34.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 34.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 25.425.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 25.425.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 10.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 20 | 30.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | Orang | 100 | 1.002.675.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 795.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 795.875.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 182.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 182.800.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 24.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | | | | | 541.955.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | Orang | 50 | 79.050.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.04.0005 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 53.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 53.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0009 | | | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 6.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 6.050.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0010 | | | Pemulangan ke Daerah Asal | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 15.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0011 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial DasarGelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Dokumen | 4 | 5.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial  Adi Yuswo | Orang | 50 | 462.905.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.04.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 393.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 393.375.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 62.330.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 62.330.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0003 | | | Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses | | | | 7.200.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 7.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | % | 0.06 | 1.653.075.000 | Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.208.951.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | Orang | 110 | 106.008.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 35.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 27.008.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 27.008.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 11.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 20 | 33.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | Orang | 110 | 1.102.943.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 875.463.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 875.463.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 201.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 201.080.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 26.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 26.400.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | | | | | 444.124.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | Orang | 40 | 73.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.04.0005 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 52.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 40 | 52.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0009 | | | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 5.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 40 | 5.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0010 | | | Pemulangan ke Daerah Asal | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi | Orang | 40 | 12.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0011 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | | | | 4.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Dokumen | 4 | 4.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | Orang | 40 | 370.324.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.04.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 314.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 40 | 314.700.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 49.864.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 40 | 49.864.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0003 | | | Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses | | | | 5.760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 40 | 5.760.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | % | 0.11 | 2.689.741.000 | Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 562.965.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | Orang | 50 | 79.300.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 53.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 53.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 11.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 11.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | 9.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | Orang | 4 | 5.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | Orang | 50 | 483.665.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 393.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 393.375.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 83.090.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 83.090.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 7.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 2.126.776.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | Orang | 195 | 171.559.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu danAlat Bantu Peraga Sesuai KebutuhanKewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 43.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 195 | 43.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 50.059.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 195 | 50.059.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 19.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 195 | 19.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 58.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 39 | 58.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | Orang | 195 | 1.955.217.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.551.957.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 195 | 1.551.957.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 356.460.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 185 | 356.460.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 46.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak HuniKewenangan Provinsi | Orang | 195 | 46.800.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring | % | 0.06 | 1.539.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Cepiring | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.539.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring | Orang | 140 | 135.355.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 38.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 140 | 38.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 41.355.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 140 | 41.355.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 140 | 14.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 7 | 42.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Cepiring | Orang | 140 | 1.403.745.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.114.225.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 140 | 1.114.225.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 255.920.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 140 | 255.920.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 33.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 140 | 33.600.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata | % | 0.12 | 3.040.564.000 | Panti Pelayanan Sosial Dewanata | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.396.509.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata | Orang | 130 | 126.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 61.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 130 | 61.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 27.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 130 | 27.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 24.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | 24.700.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 13.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar | Dokumen | 4 | 13.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata | Orang | 130 | 1.270.009.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.022.775.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 130 | 1.022.775.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 216.034.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 130 | 216.034.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 31.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 130 | 31.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.102.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata | Orang | 100 | 99.425.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 34.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 34.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 25.425.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 25.425.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 10.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 20 | 30.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata | Orang | 100 | 1.002.675.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 795.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 795.875.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 182.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 182.800.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 24.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | | | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | | | | | 541.955.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata | Orang | 50 | 79.050.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.05.0005 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 53.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 53.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0009 | | | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 6.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 6.050.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0010 | | | Pemulangan ke Daerah Asal | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal | Orang | 50 | 15.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0011 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diLuar HIV/AIDS dan NAPZA | Dokumen | 4 | 5.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata | Orang | 50 | 462.905.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.05.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 393.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 393.375.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 62.330.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 62.330.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0003 | | | Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 7.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | % | 0.08 | 2.133.920.000 | Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 460.932.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | Orang | 50 | 74.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 52.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 52.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 10.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 10.400.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 7.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | 7.600.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar | Dokumen | 4 | 4.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | Orang | 50 | 386.932.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 314.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 314.700.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 66.472.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 66.472.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 5.760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 5.760.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 998.288.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | Orang | 75 | 253.575.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 75 | 24.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 214.575.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 75 | 214.575.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 75 | 7.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 7.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | Orang | 75 | 744.713.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 590.063.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 75 | 590.063.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 141.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 75 | 141.150.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 13.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 75 | 13.500.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 674.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | Orang | 60 | 73.095.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 60 | 30.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 19.095.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 60 | 19.095.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 120 | 6.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 18.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 60 | 18.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | Orang | 60 | 601.605.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 477.525.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 60 | 477.525.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 109.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 60 | 109.680.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 14.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 60 | 14.400.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | % | 0.03 | 1.071.400.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 1.071.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial | Orang | 80 | 268.880.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 24.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 228.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 228.880.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 8.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 8.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial | Orang | 80 | 802.520.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 629.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 629.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 158.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 158.720.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 14.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 14.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | % | 0.05 | 1.576.740.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 1.576.740.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial | Orang | 120 | 391.320.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 120 | 24.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 343.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 120 | 343.320.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 12.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 120 | 12.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 12.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial | Orang | 120 | 1.185.420.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 944.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 120 | 944.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 219.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 120 | 219.720.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 21.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 120 | 21.600.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri | % | 0.07 | 1.929.325.000 | | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 613.525.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri | Orang | 50 | 122.150.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 24.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 88.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 88.150.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 5.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 5.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri | Orang | 50 | 491.375.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 393.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 393.375.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 89.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 89.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 9.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.315.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri | Orang | 120 | 112.590.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 36.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 120 | 36.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 28.590.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 120 | 28.590.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 120 | 12.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 36.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 24 | 36.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri | Orang | 120 | 1.203.210.000 | | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 955.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 120 | 955.050.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 219.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 120 | 219.360.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 28.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 120 | 28.800.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | % | 0.07 | 1.703.306.000 | Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 567.765.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | Orang | 50 | 79.300.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 53.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 53.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 11.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 11.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | 9.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar | Dokumen | 4 | 5.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | Orang | 50 | 488.465.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 393.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 393.375.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 83.090.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 83.090.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 12.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | | | | | 1.135.541.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | Orang | 110 | 117.150.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.04.0005 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 59.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 110 | 59.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0009 | | | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 14.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 110 | 14.150.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0010 | | | Pemulangan ke Daerah Asal | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi | Orang | 110 | 33.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0011 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial DasarGelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Dokumen | 4 | 11.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | Orang | 110 | 1.018.391.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.04.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 865.425.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 110 | 865.425.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 137.126.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provins | Orang | 110 | 137.126.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0003 | | | Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses | | | | 15.840.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/WismaLayak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 110 | 15.840.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | % | 0.11 | 2.618.668.000 | Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 928.241.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial MargoWidodo | Orang | 85 | 97.850.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | | | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 56.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 85 | 56.500.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 16.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 85 | 16.700.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0010 | | | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | 16.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 85 | 16.150.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 8.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | Dokumen | 4 | 8.500.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | Orang | 85 | 830.391.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 668.738.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 85 | 668.738.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 141.253.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 85 | 141.253.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 20.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 85 | 20.400.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | | | | | 1.690.427.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | Orang | 170 | 116.550.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.05.0005 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 170 | 65.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0009 | | | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 9.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 170 | 9.050.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0010 | | | Pemulangan ke Daerah Asal | | | | 25.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal | Orang | 170 | 25.500.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0011 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA | | | | 17.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | Dokumen | 4 | 17.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo WIdodo | Orang | 170 | 1.573.877.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.05.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.337.475.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PemenuhanKebutuhan Permakanan Sesuai dengan StandarGizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 170 | 1.337.475.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 211.922.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 170 | 211.922.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0003 | | | Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses | | | | 24.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 170 | 24.480.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | % | 0.1 | 2.529.433.000 | Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 2.529.433.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | Orang | 240 | 184.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 72.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 240 | 72.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 43.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 240 | 43.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 45.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 240 | 45.600.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar | Dokumen | 4 | 24.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | Orang | 240 | 2.344.633.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.888.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 240 | 1.888.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 398.833.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 240 | 398.833.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 57.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 240 | 57.600.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | % | 0.03 | 1.055.080.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 1.055.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial | Orang | 80 | 268.880.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 24.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 228.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 228.880.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 8.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 8.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial | Orang | 80 | 786.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 629.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 629.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 142.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 142.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 14.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 14.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | % | 0.09 | 2.117.461.000 | Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 2.117.461.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | Orang | 200 | 163.601.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 68.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 68.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 37.601.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 37.601.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 38.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 38.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | Dokumen | 4 | 20.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | Orang | 200 | 1.953.860.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.573.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 1.573.500.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 332.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 332.360.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 48.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 48.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo | % | 0.05 | 1.388.213.000 | Panti Pelayanan Sosial Pendowo | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.388.213.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo | Orang | 125 | 171.850.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 108.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 125 | 108.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 27.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 125 | 27.100.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 23.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | 23.750.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 12.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar | Dokumen | 4 | 12.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pendowo | Orang | 125 | 1.216.363.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 983.438.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 125 | 983.438.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 207.725.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 125 | 207.725.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 25.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 125 | 25.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi | % | 0.06 | 1.758.523.000 | Panti Pelayanan Sosial Penganthi | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 818.048.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi | Orang | 75 | 92.550.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 55.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 75 | 55.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 15.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 70 | 15.300.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 14.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | 14.250.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | Dokumen | 4 | 7.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi | Orang | 75 | 725.498.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 590.063.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 75 | 590.063.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 124.635.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provins | Orang | 75 | 124.635.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 10.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 70 | 10.800.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 940.475.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi | Orang | 70 | 238.270.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 70 | 24.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 200.270.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 70 | 200.270.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 70 | 7.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 7.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi | Orang | 70 | 702.205.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 550.725.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 70 | 550.725.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 138.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 70 | 138.880.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 12.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 70 | 12.600.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | % | 0.07 | 1.870.067.000 | Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 928.241.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan | Orang | 85 | 928.241.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 668.738.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 85 | 668.738.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 141.253.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 85 | 141.253.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 20.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 85 | 20.400.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | | | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 56.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 85 | 56.500.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 16.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 85 | 16.700.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 16.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | 16.150.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 8.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar | Dokumen | 4 | 8.500.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 941.826.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | Orang | 85 | 89.552.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 32.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 85 | 32.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 23.052.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 85 | 23.052.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 8.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 85 | 8.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 25.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 17 | 25.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan | Orang | 85 | 852.274.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 676.494.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 85 | 676.494.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 155.380.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 85 | 155.380.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 20.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 85 | 20.400.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo | % | 0.12 | 3.390.403.000 | Panti Pelayanan Sosial Raharjo | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.499.502.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo | Orang | 140 | 131.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 62.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 140 | 62.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 29.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 140 | 29.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 26.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | 26.600.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | Dokumen | 4 | 14.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo | Orang | 140 | 1.367.702.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.101.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 140 | 1.101.450.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 232.652.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 140 | 232.652.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 33.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 140 | 33.600.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 1.323.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo | Orang | 100 | 330.100.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 24.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 286.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 286.100.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 10.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo | Orang | 100 | 992.950.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 786.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 786.750.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 188.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 188.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 18.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 18.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 567.851.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo | Orang | 50 | 66.513.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 29.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 29.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 17.513.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 17.513.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 10 | 5.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 10 | 15.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo | Orang | 50 | 501.338.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 397.938.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 397.938.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 91.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 91.400.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 12.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | % | 0.11 | 2.893.978.000 | Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 2.220.453.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | Orang | 210 | 168.900.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 69.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 210 | 69.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 39.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 210 | 39.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 39.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | 39.900.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar | Dokumen | 4 | 21.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | Orang | 210 | 2.051.553.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.652.175.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 210 | 1.652.175.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 348.978.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 210 | 348.978.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 50.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Unit | 210 | 50.400.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 673.525.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | Orang | 50 | 177.050.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 24.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 143.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 143.050.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 5.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 5.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | Orang | 50 | 496.475.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 393.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 393.375.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 94.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 94.100.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 9.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | % | 0.04 | 995.251.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 995.251.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | Orang | 90 | 92.843.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 90 | 33.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 23.843.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 90 | 23.843.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 90 | 9.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 27.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 18 | 27.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Sudagaran | Orang | 90 | 902.408.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 716.288.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang  Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 90 | 716.288.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 164.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 90 | 164.520.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 21.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 90 | 21.600.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | % | 0.04 | 1.202.325.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 1.202.325.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial | Orang | 90 | 299.490.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 90 | 24.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 257.490.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 90 | 257.490.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 90 | 9.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 9.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial | Orang | 90 | 902.835.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 708.075.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 90 | 708.075.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 178.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 90 | 178.560.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 16.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak HuniKewenangan Provinsi | Orang | 90 | 16.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | % | 0.11 | 2.739.619.000 | Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.859.979.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | Orang | 175 | 150.351.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 65.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 175 | 65.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 34.101.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 175 | 34.101.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 33.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | 33.250.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 17.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar | Dokumen | 4 | 17.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial taruna Yodha | Orang | 175 | 1.709.628.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.376.813.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 175 | 1.376.813.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 290.815.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 175 | 290.815.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 175 | 42.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 879.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | Orang | 80 | 85.280.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 60.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 9.280.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 9.280.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 8.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 8.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | Orang | 80 | 794.360.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 629.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 629.400.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 150.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 150.560.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 14.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 14.400.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | % | 0.03 | 990.638.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 990.638.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | Orang | 75 | 253.575.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 75 | 24.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 214.575.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 75 | 214.575.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga  Kewenangan Provinsi | Orang | 75 | 7.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 7.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | Orang | 75 | 737.063.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 590.063.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 75 | 590.063.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 133.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 75 | 133.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 13.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 75 | 13.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede | % | 0.06 | 1.592.526.000 | Panti Pelayanan Sosial Turusgede | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.592.526.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede | Orang | 145 | 138.647.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 38.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provins | Orang | 145 | 38.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 42.147.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 145 | 42.147.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 14.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 145 | 14.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 43.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 28 | 43.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Turus Gede | Orang | 145 | 1.453.879.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.154.019.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 145 | 1.154.019.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 265.060.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 145 | 265.060.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 34.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 145 | 34.800.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | % | 0.09 | 2.079.091.000 | Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 562.966.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | Orang | 50 | 79.301.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 53.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 53.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 11.801.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 11.801.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | 9.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar | Dokumen | 4 | 5.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | Orang | 50 | 483.665.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 393.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 393.375.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 83.090.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 83.090.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 7.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | | | | | 1.516.125.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | Orang | 150 | 109.050.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.05.0005 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 63.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 150 | 63.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0009 | | | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 8.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 150 | 8.550.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0010 | | | Pemulangan ke Daerah Asal | | | | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal | Orang | 150 | 22.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0011 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diLuar HIV/AIDS dan NAPZA | Dokumen | 4 | 15.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | Orang | 150 | 1.407.075.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.05.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.180.125.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 150 | 1.180.125.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 205.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 150 | 205.350.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0003 | | | Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses | | | | 21.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 150 | 21.600.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | % | 0.08 | 2.155.641.000 | Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 1.160.390.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | Orang | 100 | 94.600.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 63.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 63.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 11.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 11.600.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 10.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 10.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | Orang | 100 | 1.065.790.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 841.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 841.650.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 206.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 206.140.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 18.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 18.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 995.251.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan SosialWira Adhi Karya | Orang | 90 | 92.843.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 90 | 33.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 23.843.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 90 | 23.843.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 90 | 9.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 27.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 18 | 27.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | Orang | 90 | 902.408.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 716.288.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 90 | 716.288.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 164.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 90 | 164.520.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 21.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 90 | 21.600.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | % | 0.06 | 1.706.135.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 1.706.135.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial | Orang | 130 | 421.930.000 | Panti Pelayanan Sosial  Woro Wiloso | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 24.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 130 | 24.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 371.930.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses keLayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 130 | 371.930.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 13.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 130 | 13.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 13.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 4 | 13.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial | Orang | 130 | 1.284.205.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 1.022.775.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 130 | 1.022.775.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 238.030.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 130 | 238.030.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 23.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 130 | 23.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan | % | 100 | 150.000.000 | Bidang Rehabilitasi Sosial | |
| | | | | Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang diterbitkan | Dokumen | 200 | 150.000.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | |
| | | 1.06.05.1.01.0001 | | | Pengangkatan Anak antar WNI | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 150.000.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **137.357.093.000** | **Dinas Sosial** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 94.1 | | Dinas Sosial | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **136.357.093.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 87.5 | 136.357.093.000 | Dinas Sosial | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 136.357.093.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 227.300.000 | Panti Pelayanan Sosial Cepiring | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 85.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring | % | 100 | 85.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 36.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 36.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 22.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 81.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 81.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 79.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 79.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 60.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring | Unit | 4 | 60.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 13.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 13.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 138.900.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 50.200.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 50.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 2.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 500.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 3.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 17.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 17.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 2.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 3.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 3.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 1.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 20.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 0 | | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 60.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 60.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 1.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 59.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 59.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 28.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 2 | 28.300.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 4.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 4.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 1.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 20.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 2.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 272.600.000 | Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 82.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | % | 100 | 82.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 36.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 36.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gerung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 123.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | Laporan | 4 | 123.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 121.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 121.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 66.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | Unit | 4 | 66.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 19.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 19.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 377.300.000 | Panti Pelayanan Sosial Raharjo | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 134.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo | % | 100 | 134.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 0 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 12.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 44.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 44.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 37.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 37.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 131.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo | Laporan | 4 | 131.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 127.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 127.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 111.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo | Unit | 8 | 111.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 17.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 17.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 341.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 119.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | % | 100 | 119.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 40.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 40.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 10.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 2 | 10.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 139.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | Laporan | 4 | 139.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 136.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 136.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 81.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | Unit | 6 | 81.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 11.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 11.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 246.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 87.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | % | 100 | 87.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 36.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 36.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 2 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 99.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | Laporan | 4 | 99.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 97.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 97.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 58.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | Unit | 4 | 58.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 11.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 11.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | Unit | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi | Unit | 4 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 261.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Penganthi | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 92.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi | % | 100 | 92.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 36.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 36.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 109.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 109.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 107.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 107.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 58.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi | Unit | 4 | 58.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 11.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 11.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 2 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 332.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 114.800.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | % | 100 | 114.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 0 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 40.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 40.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 10.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket/bahan material yang disediakan | Paket | 2 | 10.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 130.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | Laporan | 4 | 130.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 127.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 127.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 86.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada<br>Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | Unit | 4 | 86.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 16.200.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 16.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 279.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 101.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | % | 100 | 101.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 0 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 40.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 40.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 116.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | Laporan | 4 | 116.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 114.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 114.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 60.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | Unit | 4 | 60.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 13.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 13.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 165.000.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 55.200.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | % | 100 | 55.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 2.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 500.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 3.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 17.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 17.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 2.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 3.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 3.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 1.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 25.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | Unit | 0 | | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 70.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | Laporan | 4 | 70.300.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 1.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 69.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 69.300.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 39.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | Unit | 2 | 39.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 3.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 1.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 20.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 243.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 95.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | % | 100 | 95.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 0 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 36.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 36.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket/bahan material yang disediakan | Paket | 2 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 32.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 32.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 93.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | Laporan | 4 | 93.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 91.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 91.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 54.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | Unit | 4 | 54.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 7.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 7.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 3.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 220.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 87.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | % | 100 | 87.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 36.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 36.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 74.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | Laporan | 4 | 74.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 72.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 72.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 57.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | Unit | 4 | 57.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 10.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 10.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 384.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Dewanata | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 154.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata | % | 100 | 154.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 44.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 44.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan material yg disediakan | Paket | 2 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 57.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 57.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 115.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata | Laporan | 4 | 115.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 111.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 111.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 115.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata | Unit | 4 | 115.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 219.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 82.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | % | 100 | 82.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 36.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 36.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 76.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | Laporan | 4 | 76.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 74.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 74.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 60.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | Unit | 4 | 60.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 13.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 13.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 191.000.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 60.200.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 60.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 2.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 3.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 17.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 17.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 2.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 3.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan | Paket | 2 | 3.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 1.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 30.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 0 | | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 83.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 83.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 1.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 82.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 82.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 47.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | | 47.300.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 10.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 10.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara | Unit | 4 | 1.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 20.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 301.300.000 | Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 119.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | % | 100 | 119.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 40.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 40.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Laporan | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 10.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan material yg disediakan | Paket | 2 | 10.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 40.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 102.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | Laporan | 4 | 102.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 99.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 99.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 79.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | Unit | 4 | 79.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 214.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Pendowo | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 90.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo | % | 100 | 90.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 36.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 36.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 27.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 27.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 62.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo | Laporan | 4 | 62.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 60.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 60.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 61.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo | Unit | 4 | 61.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 14.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 14.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 339.900.000 | Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 119.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | % | 100 | 119.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 40.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 40.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 10.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 2 | 10.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 126.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | Laporan | 4 | 126.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 123.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 123.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 93.900.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | Unit | 6 | 93.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 23.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 23.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | Unit | 4 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 129.587.993.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 105.409.013.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 5 | 105.409.013.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 103.759.013.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 599 | 103.759.013.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 1.250.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 4 | 250.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 4 | 150.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 150.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 145.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 145.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 5.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 175.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 4 | 125.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 10 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 2.291.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 2.291.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 420.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 420.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 36.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 36.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 2 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 120.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1.330.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 1.330.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 275.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 5 | 275.780.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 105.780.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 8 | 105.780.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 2 | 170.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 18.082.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 18.082.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 713.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 713.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 17.119.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 17.119.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3.205.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 5 | 3.205.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 6 | 160.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 340.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 20 | 340.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 10 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 2.380.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 10 | 2.380.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 12 | 250.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 365.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 107.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 107.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 0 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 40.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 40.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 10.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 10.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 27.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 27.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 165.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | Laporan | 4 | 165.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 162.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 162.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 92.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | Unit | 6 | 92.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 22.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 22.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 269.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Turusgede | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 100.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede | % | 100 | 100.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 36.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 36.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 37.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 37.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Mengukur penyediaan jasa surat menyurat perangkat daerah dalam satu tahun seperti biaya pengiriman pos dan kelengkapan jasa lainnya | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 112.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede | Laporan | 4 | 112.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 110.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 57.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede | Unit | 4 | 57.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 10.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 10.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 221.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 92.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | % | 100 | 92.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 38.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 38.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 27.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 27.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 74.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | Laporan | 4 | 74.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 72.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 72.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 54.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | Unit | 4 | 54.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 7.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 267.300.000 | Panti Pelayanan Sosial Mandiri | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 80.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri | % | 100 | 80.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 36.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 36.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 17.500.000 | | |
| | | | | | | umlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 17.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 127.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri | Laporan | 4 | 127.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 125.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 125.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 59.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri | Unit | 4 | 59.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 12.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 12.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 157.600.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 60.200.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 60.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 2.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 500.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 3.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 17.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 17.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 2.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 3.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 3.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 1.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 30.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 0 | | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 54.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 54.900.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 1.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 53.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 53.900.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 42.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 2 | 42.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 6.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 1.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 20.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 131.700.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 50.200.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | % | 100 | 50.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 2.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 3.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 17.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 17.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 2.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 3.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 3.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 1.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 20.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | Unit | 0 | | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 53.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | Laporan | 4 | 53.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 1.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 52.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 52.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 27.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | Unit | 2 | 27.700.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 4.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 4.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 1.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 20.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 2.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 166.000.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 70.200.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | % | 100 | 70.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 2.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 500.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 3.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 17.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 17.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 2.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 3.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket/bahan material yang disediakan | Paket | 2 | 3.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 1.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 40.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | Unit | 0 | | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 37.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | Laporan | 4 | 37.300.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 1.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 36.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 36.300.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 58.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | Unit | 2 | 58.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 12.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 1.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 20.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 25.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 160.500.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 60.200.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | % | 100 | 60.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 2.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 0 | 500.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 3.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 17.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 17.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 2.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 3.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 3.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 1.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 30.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | Unit | 0 | | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 56.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | Laporan | 4 | 56.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 1.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 55.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 44.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan<br>Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | Unit | 2 | 44.300.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 7.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 7.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 1.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 20.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 15.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 275.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 102.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | % | 100 | 102.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 36.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 36.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 112.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | Laporan | 4 | 112.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 110.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 60.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | Unit | 4 | 60.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 13.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 13.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **1.000.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 79.8 | 1.000.000.000 | Dinas Sosial | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 1.000.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 5 | 500.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 1 | 500.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **363.538.221.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **89.193.895.000** | **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 90 | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **87.838.589.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 85.1 | 87.838.589.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 87.838.589.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 5.623.085.000 | Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 40.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 40.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 40.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 40.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 155.119.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 155.119.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 0 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 119.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 119.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 0 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.000 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 0 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 146.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 146.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 1.242.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 1.242.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0003 | | | Pengadaan Alat Besar | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit alat besar yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0004 | | | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 264.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 264.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 978.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 978.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 902.681.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 902.681.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 0 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 130.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 770.681.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 770.681.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3.282.585.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 5 | 3.282.585.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0003 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0004 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 3.230.585.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 3.230.585.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 664.213.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 34.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 34.800.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 34.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 34.800.000 | | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 9.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 9.000.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 78.931.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 78.931.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 2.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 1.101.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 0 | 1.101.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 2.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 14.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | | | | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 11.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan | Paket | 1 | 11.700.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 5.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 5.300.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 42.830.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 42.830.000 | | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Unit | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 469.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 469.450.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 500.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 68.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 68.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 400.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 400.950.000 | | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 72.032.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 72.032.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Unit | 1 | 35.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 0 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 37.032.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 37.032.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 900.000.000 | Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan | Paket | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0004 | | | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 838.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 838.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 218.352.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 218.352.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 619.648.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 619.648.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 900.000.000 | Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 43.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 43.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 43.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 43.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 80.965.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 80.965.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.010.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.010.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 9.990.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan | Paket | 1 | 9.990.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 48.965.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 48.965.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0004 | | | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 729.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 27 | 729.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 319.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 319.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 408.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 408.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 46.135.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 10 | 46.135.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 27.760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 7 | 27.760.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 4.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 27 | 4.375.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 900.000.000 | Balai Keselamatan Kerja Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 38.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 24 | 38.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 37.280.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Laporan | 12 | 37.280.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 1.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | Laporan | 12 | 1.320.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 17.799.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 17.799.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 17.799.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 17.799.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 86.211.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 86.211.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.568.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 6.568.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 3.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 3.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 12.903.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 12.903.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 6.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 6.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 46.540.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 46.540.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0004 | | | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 620.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 36 | 620.640.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.178.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.178.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 229.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 229.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 385.962.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 385.962.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 136.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 10 | 136.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 88.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 5 | 88.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0004 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 48.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 48.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 77.651.291.000 | SEKRETARIAT | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 69.400.261.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 69.400.261.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 68.591.333.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 420 | 68.591.333.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 606.246.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 606.246.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 142.152.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 1 | 142.152.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 60.530.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 60.530.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0008 | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0001 | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | 49.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Laporan | 1 | 49.680.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.04.0002 | | | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.04.0007 | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 49.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | Laporan | 1 | 49.680.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 102.220.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 102.220.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 36.300.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 1 | 36.300.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 10 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 20 | 22.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | | | | 33.920.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Orang | 10 | 33.920.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 2.296.142.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 2.296.142.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 133.460.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 133.460.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 85.445.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 85.445.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 82.212.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 82.212.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 990.025.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 990.025.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerahJumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 3 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 600.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 315.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 6 | 315.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 215.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 3 | 215.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 4.205.088.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 4.205.088.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 21.765.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 21.765.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1.238.323.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 1.238.323.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 130.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.815.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 2.815.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.232.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 1.232.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 205.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Unit | 5 | 205.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 10 | 42.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 122.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 5 | 122.600.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 2 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 3 | 130.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 583.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 5 | 583.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 82.650.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 82.650.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 67.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 67.050.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.200.000.000 | Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 54.000.000 | | |
| | | | | | | Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 1 | 54.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 54.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 54.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 132.650.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 132.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 19.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 0 | 19.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 6.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 0 | 6.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 13.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 0 | 13.360.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 10.312.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan | Paket | 0 | 10.312.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 82.578.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 0 | 82.578.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0003 | | | Pengadaan Alat Besar | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit alat besar yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0004 | | | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 973.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 973.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 0 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 198.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 198.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 773.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 773.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 40.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 40.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 26.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 0 | 26.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0003 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0004 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **1.355.306.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.01 | 1.355.306.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 1.355.306.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 0 | 1.355.306.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 1.355.306.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 5 | 1.355.306.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 867.058.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 7 | 867.058.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 488.248.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 5 | 488.248.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| **Meningkatkan Pengurangan Pengangguran** | | | | | | | | | **39.743.117.000** | **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** | |
| | | | | | | Persentase pengangguran yang ditempatkan | % | 28.6 | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | **Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan ( Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja )** | | | | | | | | **5.700.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan | % | 81.53 | 5.700.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | 2.07.06 | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | | | | | | 5.700.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3 | % | 26.4 | 3.500.000.000 | | |
| | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | | | | | 3.500.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan | Laporan | 60.16 | 3.500.000.000 | | |
| | | 2.07.06.1.01.0003 | | | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | | | | 3.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 | Unit | 90 | 3.500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan | % | 89.58 | 2.200.000.000 | Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER | |
| | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | | | | | 2.200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan | % | 55.17 | 381.335.000 | SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN | |
| | | 2.07.06.1.01.0002 | | | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan | | | | 381.335.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan | Kasus | 130 | 381.335.000 | SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN | |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja | % | 29.41 | 550.991.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | | 2.07.06.1.01.0003 | | | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | | | | 550.991.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 | Unit | 155 | 550.991.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan | % | 62.08 | 1.267.674.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | | 2.07.06.1.01.0001 | | | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan | | | | 1.267.674.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pekerja anak yg dikembalikan ke dunia pendidikan | Orang | 30 | 313.490.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | | | | | | Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan pemeriksaan | Unit | 30 | 60.423.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | | | | | | Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja | Unit | 925 | 678.091.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | | | | | | Jumlah Perusahaan yang menerapkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja | Unit | 30 | 46.470.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | | | | | | Jumlah Perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilakukan pemeriksaan | Unit | 40 | 60.200.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | | | | | | Jumlah peserta yang mengikuti FGD optimalisasi pengawasan norma ketenagakerjaan | Orang | 50 | 30.000.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | | | | | | Jumlah peserta yang mengikuti rakor pengawasan ketenagakerjaan | Orang | 160 | 79.000.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | **Meningkatnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja** | | | | | | | | **30.176.915.000** | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten | % | 9.24 | 23.476.915.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | | 23.476.915.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi | % | 38.14 | 394.183.000 | Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS | |
| | | | | Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penganggur atau pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri | % | 30.77 | 250.000.000 | SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 197.044.000 | | |
| | | | | | | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi | Orang | 40 | 197.044.000 | SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0002 | | | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | | 52.956.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas | Unit | 3 | 52.956.000 | SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN | |
| | | | | Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja | | | | | 144.183.000 | | |
| | | | | | | Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga | % | 29.09 | 144.183.000 | SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI | |
| | | 2.07.03.1.02.0001 | | | Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja | | | | 144.183.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi | Unit | 20 | 144.183.000 | SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI | |
| | | | | | | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri | % | 2.88 | 12.500.000.000 | Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A | |
| | | | | Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | 12.500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi | % | 100 | | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi | Orang | 0 | | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | | Jumlah dokumen TNA | Dokumen | 0 | | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | | Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK | % | 20 | | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0002 | | | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | Unit | 0 | | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | | Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri | % | 12.61 | 1.100.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 1.100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Industri pada Tahun n | Orang | 240 | 1.100.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | | Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri - DBHCHT (Dana Bagi HasilCukai Hasil Tembakau) | % | 24.94 | 1.500.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan basis kompetensi di tahun n (DBHCHT) | Orang | 260 | 1.500.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | | Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja | % | 0 | 9.900.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0003 | | | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja | | | | 9.900.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja | Unit | 13 | 9.900.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran | % | 46.9 | 5.500.000.000 | Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A | |
| | | | | Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | 5.500.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi | % | 33.33 | | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi | Orang | 0 | | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | | Jumlah dokumen TNA | Dokumen | 0 | | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | | Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri ) yang diberikan pelatihan | % | 1.33 | 350.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n | Orang | 52 | 350.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | | Persentase jumlah calon tenaga kerja yang diberikan pelatihan - DBHCHT | % | 2.4 | 2.000.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 2.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (DBHCHT/Cukai) - (DBHCHT) | Orang | 372 | 2.000.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | | Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK Semarang 1 | % | 25 | | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0002 | | | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | Dokumen | 2 | | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | | Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja | % | 0 | 3.150.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0003 | | | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja | | | | 3.150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja | Unit | 12 | 3.150.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian | % | 9.45 | 4.526.915.000 | Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A | |
| | | | | Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | 4.526.915.000 | | |
| | | | | | | Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi | % | 66.67 | | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi | Orang | 0 | | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | | Jumlah dokumen TNA (Training NeedAsesment) | Dokumen | 0 | | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | | Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BPK Trans | % | 40 | | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0002 | | | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | Dokumen | 0 | | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | | Persentase penganggur diberikan pelatihan di bidang Pertanian - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau ) | % | 6.4 | 2.000.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 2.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Pertanian pada Tahun n (DBHCHT) | Orang | 452 | 2.000.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | | Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian | % | 64 | 649.715.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 649.715.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Pertanian pada Tahun n | Orang | 220 | 649.715.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | | Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja | % | 100 | 1.877.200.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0003 | | | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja | | | | 1.877.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja | Unit | 670 | 1.877.200.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | | Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi | % | 2.3 | 555.817.000 | Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS | |
| | | | | Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | 555.817.000 | | |
| | | | | | | Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya | % | 75 | 555.817.000 | SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 555.817.000 | | |
| | | | | | | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi yang tersertifikasi | Orang | 113 | 555.817.000 | SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI | |
| | | | | | | Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah | Juta Rupiah | 56 | 6.700.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | | 6.700.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas | % | 4.4 | 700.000.000 | Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS | |
| | | | | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah | | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas | % | 21 | 700.000.000 | SEKSI PRODUKTIVITAS | |
| | | 2.07.03.1.03.0001 | | | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi / Peningkatan Produktivitas | Unit | 275 | 700.000.000 | SEKSI PRODUKTIVITAS | |
| | | | | | | Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan | % | 13.13 | 6.000.000.000 | Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A | |
| | | | | Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | 6.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lembaga ( penyedia dan pengguna tenaga kerja ) yang telah melakukan koordinasi / kesepakatan dan kerjasama dengan BLK dibagi Jumlah kebutuhan lembaga ( penyedia dan pengguna tenaga ) seluruhnya yang harus dilakukan kesepakatan /koordinasi dan kerjasama pada program pelatihan yang dilaksanakan di BLK berdasarkan hasil identifikasi pelatihan / TNA dikalikan 100 persen | Unit | 19 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.07.03.1.01.0002 | | | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | Unit | 0 | | | |
| | | | | | | Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT ) | % | 71 | 1.000.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n - (DBHCHT) | Orang | 500 | 1.000.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | | Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan | % | 4.77 | 560.000.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 560.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n | Orang | 55 | 560.000.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | | Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja | % | 0 | 4.440.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0003 | | | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja | | | | 4.440.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja | Unit | 8 | 4.440.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan | % | | | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.03.0001 | | | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas | Unit | 0 | | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan | % | | | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.04.0001 | | | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah | Dokumen | 0 | | SEKSI PELATIHAN | |
| | **Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah** | | | | | | | | **180.415.000** | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah | % | 62.85 | 180.415.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | 2.07.02 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | | | 180.415.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja | % | 62.85 | 180.415.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | | | | | 180.415.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan | % | 28.57 | 180.415.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | 2.07.02.1.01.0001 | | | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | | 99.415.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja daerah provinsi | Dokumen | 1 | 82.540.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | | | | | Jumlah kab/kota yang di bina dalam penyusunan Rencana Kerja (RTK) Makro | Kabupaten/Kota | 15 | 16.875.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | 2.07.02.1.01.0004 | | | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | | | | 81.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kab/kota yang dibina dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro | Kabupaten/Kota | 15 | 36.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | | | | | Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek penyusunan rencana tenaga kerja (RTK) Mikro | Unit | 15 | 45.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | **Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja** | | | | | | | | **2.000.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | % | 45.05 | 2.000.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | | 1.780.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal | % | 45.05 | 66.500.000 | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA | |
| | | | | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | | | 66.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) ; Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar Negara (AKAN) | % | 19.37 | 66.500.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.04.1.03.0002 | | | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | | | 66.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | Orang | 200 | 66.500.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | | | | | Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal | % | 68.1 | 1.713.500.000 | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA | |
| | | | | Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.435.883.000 | | |
| | | | | | | Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota | % | 60 | 795.921.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja | | | | 159.581.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya | Orang | 100 | 159.581.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.04.1.01.000 | | | Pelayanan Antar Kerja | | | | 542.020.000 | | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat memperoleh informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja | Orang | 500 | 498.090.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | | | | | Jumlah perusahaan dilakukan Job Canvassing / Monitoring Penempatan Tenaga Kerja | Unit | 8 | 15.280.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD | Orang | 75 | 28.650.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.04.1.01.0003 | | | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | | | | 19.310.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | Orang | 100 | 19.310.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.04.1.01.0004 | | | Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) | | | | 75.010.000 | | |
| | | | | | | Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam penempatan tenaga kerja | Unit | 50 | 75.010.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | | | | | Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . | % | 51.85 | 639.962.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |
| | | 2.07.04.1.01.000 | | | Perluasan Kesempatan Kerja | | | | 639.962.000 | | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat berpartisipasi dalam pengurangan pengangguran melalui kegiatan Padat Karya | Orang | 30 | 186.220.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |
| | | | | | | Jumlah petugas lapangan/ pendamping wirausaha mengikuti pemanduan | Orang | 35 | 2.394.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja | Orang | 200 | 413.602.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah wirausaha baru binaan mengikuti pembinaan lanjutan/ upgrading/ short course | Orang | 20 | 37.746.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |
| | | | | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi | | | | | 264.577.000 | | |
| | | | | | | Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal | % | 75 | 187.097.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |
| | | 2.07.04.1.04.0004 | | | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | | | | 187.097.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Keluarga PMI mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan | Orang | 20 | 38.526.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |
| | | | | | | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan | Orang | 60 | 115.622.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |
| | | | | | | Jumlah stakeholder PMI Purna yang terkoordinasi dalam upaya pengembangan Desmigratif | Unit | 75 | 32.949.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |
| | | | | | | Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan | % | 2.83 | 77.480.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |
| | | 2.07.04.1.04.0001 | | | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | | | 74.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | Orang | 50 | 21.580.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |
| | | | | | | Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam pelindungan PMI | Unit | 30 | 52.900.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |
| | | 2.07.04.1.04.0003 | | | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Layanan Terpadu Penempatan PMI yang terkoordinasi | Unit | 9 | 3.000.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |
| | | | | Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 13.040.000 | | |
| | | | | | | Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA ( Tenaga Kerja Asing ) | % | 100 | 13.040.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.04.1.05.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 13.040.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perusahaan pengguna TKA terverifikasi dan layanan penggunaan TKA | Dokumen | 15 | 9.040.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | | | | | Jumlah Stakeholder menerima informasi kebijakan pengendalian dan penggunaan TKA | Unit | 60 | 4.000.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | 3.32.03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian | % | 3.61 | | Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A | |
| | | | | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan | % | 80 | | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 3.32.03.1.01.0006 | | | Pelatihan Transmigrasi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dibidang pertanian | Orang | 0 | | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | | Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi | % | 3.61 | 220.000.000 | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA | |
| | | | | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi | % | 10 | 220.000.000 | SEKSI TRANSMIGRASI | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.32.03.1.01.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Laporan | 5 | 220.000.000 | SEKSI TRANSMIGRASI | |
| | **Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial** | | | | | | | | **1.685.787.000** | | |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) | % | 91.07 | 1.685.787.000 | | |
| | | 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | | 1.685.787.000 | | |
| | | | | | | Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan | % | 98 | 289.609.000 | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS | |
| | | | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota | | | | | 289.609.000 | | |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB | % | 26.87 | 289.609.000 | SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | |
| | | 2.07.05.1.01.0001 | | | Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial | | | | 113.982.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online | Unit | 105 | 113.982.000 | SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | |
| | | 2.07.05.1.01.0002 | | | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial | | | | 26.256.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online | Unit | 105 | 26.256.000 | SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | |
| | | 2.07.05.1.01.0003 | | | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | | | | 149.371.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek | Laporan | 70 | 149.371.000 | SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | |
| | | | | | | Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk | % | 49.75 | 745.626.000 | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS | |
| | | | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 745.626.000 | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk | % | 49.74 | 471.007.000 | SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL | |
| | | 2.07.05.1.02.0001 | | | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 216.683.000 | | |
| | | | | | | Jumlah LKS yang terbentuk untuk mencegah perselisihan hubungan industrial | Unit | 20 | 216.683.000 | SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.07.05.1.02.0003 | | | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | | | | 24.512.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang DiverifikasI | Unit | 1000 | 24.512.000 | SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL | |
| | | 2.07.05.1.02.0004 | | | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi | | | | 229.812.000 | | |
| | | | | | | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | Unit | 1 | 229.812.000 | SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL | |
| | | | | | | Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi | % | 80 | 274.619.000 | SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.05.1.02.0005 | | | Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi | | | | 274.619.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi | Unit | 75 | 274.619.000 | SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial | % | 96.15 | 235.787.000 | | |
| | | | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 235.787.000 | | |
| | | | | | | Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan | % | 96.15 | 74.677.000 | | |
| | | 2.07.05.1.02.0002 | | | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 74.677.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perkara Perselisihan yang  Terselesaikan | Kasus | 125 | 74.677.000 | | |
| | | | | | | Prosentase perusahaan dengan kategori rawan / setengah rawan | % | 36.7 | 161.110.000 | | |
| | | 2.07.05.1.02.0001 | | | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 161.110.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perselisihan yang dicegah | Kasus | 222 | 161.110.000 | | |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah | % | 44.27 | 414.765.000 | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS | |
| | | | | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) | | | | | 414.765.000 | | |
| | | | | | | Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota | % | 2.28 | 414.765.000 | SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.05.1.03.0001 | | | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) | | | | 252.778.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penetapan UMP | Laporan | 1 | 252.778.000 | SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.05.1.03.0003 | | | Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) | | | | 49.356.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penetapan UMK | Laporan | 1 | 49.356.000 | SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.05.1.03.0005 | | | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | | 112.631.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | Orang | 75 | 112.631.000 | SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **128.937.012.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Keluarga Berkualitas** | | | | | | | | | **1.440.000.000** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** | |
| | | | | | | Persentase peningkatan kampung keluarga berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan | % | 2 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | **Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | | | | | | | | **440.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang menjadi wirausaha | % | 100 | 440.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | | 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | | 440.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan | % | 32 | 440.000.000 | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera | |
| | | | | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | ASFR (Age Specific Fertility Rate) | Angka | 19 | 130.000.000 | SEKSI KELUARGA SEJAHTERA | |
| | | 2.14.04.1.01.0008 | | | Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB | Kelompok | 5 | 50.000.000 | SEKSI KELUARGA SEJAHTERA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.14.04.1.01.0020 | | | Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja | Kabupaten/ Kota | 2 | 80.000.000 | SEKSI KELUARGA SEJAHTERA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | 310.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha | % | 30 | 310.000.000 | SEKSI KELUARGA SEJAHTERA | |
| | | 2.14.04.1.02.0006 | | | Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas | Kabupaten/ Kota | 1 | 50.000.000 | SEKSI KELUARGA SEJAHTERA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.14.04.1.02.0007 | | | Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota | Laporan | 1 | 80.000.000 | SEKSI KELUARGA SEJAHTERA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.14.04.1.02.0008 | | | Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | Kelompok | 3 | 180.000.000 | SEKSI KELUARGA SEJAHTERA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota | % | 0 | | Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat | |
| | | | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ketahanan pembangunan keluarga | % | 0 | | SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT | |
| | | 2.14.04.1.02.0008 | | | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mitra dan organisasi masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pembangunan ketahanan keluarga | Kelompok | 0 | | SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Terkendalinya Jumlah Penduduk** | | | | | | | | **1.000.000.000** | | |
| | | | | | | Angka Kelahiran Total (TFR) | Angka | 2.13 | 1.000.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | | 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | | 305.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR) | % | 0 | | Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat | |
| | | | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Dokumen | 0 | | SEKSI DATA DAN INFORMASI | |
| | | 2.14.02.1.02.0008 | | | Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Dokumen | 0 | | SEKSI DATA DAN INFORMASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan | % | 61.11 | 305.000.000 | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan | Kabupaten/Kota | 18 | 300.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK | |
| | | 2.14.02.1.01.0002 | | | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi | Dokumen | 2 | 70.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.14.02.1.01.0007 | | | Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat | Dokumen | 4 | 80.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.14.02.1.01.0015 | | | Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain | Kabupaten/Kota | 2 | 20.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.14.02.1.01.0017 | | | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | Dokumen | 4 | 130.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK | |
| | | 2.14.02.1.02.0008 | | | Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | | 695.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) | % | 65.58 | 595.000.000 | Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE | |
| | | | | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | 595.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP | % | 30.5 | 595.000.000 | SEKSI KELUARGA BERENCANA | |
| | | 2.14.03.1.01.0007 | | | Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | | | | 325.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | Dokumen | 40 | 325.000.000 | SEKSI KELUARGA BERENCANA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.14.03.1.01.0012 | | | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja | | | | 270.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja | Kabupaten/Kota | 18 | 270.000.000 | SEKSI KELUARGA BERENCANA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Unmetneed | % | 10 | 100.000.000 | Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE | |
| | | | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas | % | 10 | 100.000.000 | SEKSI KELUARGA BERENCANA | |
| | | 2.14.03.1.02.0002 | | | Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Kelompok | 6 | 100.000.000 | SEKSI KELUARGA BERENCANA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan** | | | | | | | | | **1.475.000.000** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** | |
| | | | | | | Pengeluaran perempuan per kapita | Ribu Rupiah | 10100 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | **Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan** | | | | | | | | **1.475.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha | % | 40 | 1.475.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | | 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | | 1.375.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan | % | 60 | 1.375.000.000 | Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | |
| | | | | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | | | | | 180.465.000 | | |
| | | | | | | Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi | % | 10 | 180.465.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | |
| | | 2.08.02.1.01.0005 | | | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi | Dokumen | 0 | | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | |
| | | 2.08.02.1.01.0006 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | | | | 48.430.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi | Laporan | 4 | 48.430.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.02.1.01.0007 | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | | | | 82.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG | Dokumen | 80 | 82.640.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.02.1.01.0008 | | | Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | | | | 49.395.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi | Orang | 55 | 49.395.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi | | | | | 1.194.535.000 | | |
| | | | | | | Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya | % | 70 | 1.194.535.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | |
| | | 2.08.02.1.02.0003 | | | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | | | | 1.149.535.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | Orang | 290 | 1.149.535.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.02.1.02.0004 | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | Kelompok | 6 | 45.000.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar | % | 14.29 | 100.000.000 | Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | |
| | | | | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak | % | 100 | 100.000.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | |
| | | 2.08.04.1.01.0001 | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | OPD | 10 | 100.000.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase keterisian indikator oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) provinsi | % | 0 | | Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat | |
| | | | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA | % | 0 | | SEKSI DATA DAN INFORMASI | |
| | | 2.08.05.1.01.0001 | | | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah ketersediaan dokumen data gender dan anak | Dokumen | 0 | | SEKSI DATA DAN INFORMASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **17.435.284.000** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 73.5 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **17.175.284.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 87.9 | 17.175.284.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 16.114.484.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 90 | 959.759.000 | | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 336.264.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 336.264.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 336.264.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 336.264.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 90 | 1.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 10 | 1.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 1.695.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 5 | 1.695.000 | | |
| | | X.XX.01.1.07.000 | | | Pengadaan Mebel | | | | 1.695.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 2 | 1.695.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 170.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 40.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 40.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 130.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 450.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | | 450.800.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 3.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 445.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | 445.800.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 2.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 90 | 15.154.725.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 11.913.925.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 11.913.925.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 11.518.925.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 60 | 11.518.925.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 320.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 320.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 112.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 112.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0001 | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 110.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 2.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.03.0007 | | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 266.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 90 | 266.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 20 | 3.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 25 | 3.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Orang | 50 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 155.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 5 | 155.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 5 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 5 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.151.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 2.151.600.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 650.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 650.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.492.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 1.492.600.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 556.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 556.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 185.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 24 | 185.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 3 | 1.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 254.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 5 | 254.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 116.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 5 | 116.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | | | 1.060.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak | % | 25 | 1.060.800.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 229.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA | % | 9 | 229.800.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | 2.08.05.1.01.0001 | | | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi | | | | 229.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia | Dokumen | 6 | 229.800.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 831.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 90 | 831.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | 2.08.05.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.05.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.05.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.08.05.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.05.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 5 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.05.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 68.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 3 | 68.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.05.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.05.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 230.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 230.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | 2.08.05.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.05.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 97.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 97.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah** | | | | | | | | **260.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.75 | 260.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 45 | 260.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 40 | 260.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.000 1 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 1 | 140.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.000 7 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 1 | 120.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak** | | | | | | | | | **935.358.000** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** | |
| | | | | | | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Angka | 66 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | **Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak** | | | | | | | | **440.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | Angka | 70 | 440.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | | 2.08.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar | % | 14.29 | 150.000.000 | Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak | % | 100 | 150.000.000 | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | |
| | | 2.08.04.1.03.0001 | | | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Orang | 20 | 150.000.000 | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | | 290.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya | % | 82.85 | 290.000.000 | Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak | |
| | | | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA | Kabupaten/Kota | 4 | 240.000.000 | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | |
| | | 2.08.06.1.01.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah  Dokumen Hasil Koordinasi  dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi | Dokumen | 2 | 90.000.000 | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.06.1.01.0003 | | | Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi | OPD | 20 | 150.000.000 | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE | Kelompok | 20 | 50.000.000 | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | |
| | | 2.08.06.1.02.0005 | | | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | Kegiatan | 1 | 33.000.000 | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.06.1.02.0006 | | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak | | | | 17.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak | Kegiatan | 1 | 17.000.000 | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) | % | 0 | | Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat | |
| | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE | Kelompok | 0 | | SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT | |
| | | 2.08.06.1.02.0005 | | | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah lembaga mitra kerja yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak | Kelompok | 0 | | SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.06.1.02.0006 | | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah peserta KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak** | | | | | | | | **495.358.000** | | |
| | | | | | | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | Angka | 75 | 495.358.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | | 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | | 495.358.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring | % | | | Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat | |
| | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi | Kelompok | 0 | | SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT | |
| | | 2.08.07.1.03.0003 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah rapat koordinasi dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi | Kegiatan | 0 | | SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase korban kekerasan anak terlayani | % | 100 | 194.608.000 | | |
| | | | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 194.608.000 | | |
| | | | | | | Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif | % | 100 | 194.608.000 | | |
| | | 2.08.07.1.02.0005 | | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | | | | 76.868.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan) / Jumlah Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | Orang | 1100 | 76.868.000 | | |
| | | 2.08.07.1.02.0006 | | | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi | | | | 117.740.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Orang | 35 | 117.740.000 | | |
| | | | | | | Rasio korban kekerasan terhadap anak | per 100.000 penduduk | 11.5 | 300.750.000 | Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak | |
| | | | | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 166.240.000 | | |
| | | | | | | Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak | % | 31.4 | 166.240.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | 2.08.07.1.01.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | | | | 50.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Dokumen | 1 | 50.750.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.07.1.01.0005 | | | Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi | | | | 115.490.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Dokumen | 15 | 115.490.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif | % | 100 | | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | 2.08.07.1.02.0005 | | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.07.1.02.0006 | | | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 134.510.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya | Kelompok | 15 | 134.510.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | 2.08.07.1.03.0003 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.07.1.03.0004 | | | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi | Kegiatan | 1 | 10.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.08.07.1.03.0006 | | | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | 2.08.07.1.03.0007 | | | Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 15.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.07.1.03.0008 | | | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan | | | | 69.510.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi | Orang | 150 | 69.510.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan** | | | | | | | | | **1.052.958.000** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** | |
| | | | | | | Rasio kekerasan terhadap perempuan | Per 100.000 | 5.4 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | **Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan** | | | | | | | | **1.052.958.000** | | |
| | | | | | | Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan | Per 100.000 | 4.25 | 1.052.958.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | | 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | | 1.052.958.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar | % | 11 | 858.350.000 | Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | |
| | | | | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 125.750.000 | | |
| | | | | | | Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan | % | 43 | 125.750.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | |
| | | 2.08.03.1.01.000 1 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | | | | 50.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | Dokumen | 2 | 50.750.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.03.1.01.000 2 | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | OPD | 2 | 75.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif | % | 100 | | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | |
| | | 2.08.03.1.02.0001 | | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat | Orang | 0 | | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.03.1.02.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Orang | 0 | | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | | | | | 732.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya | Kelompok | 10 | 732.600.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | |
| | | 2.08.03.1.03.0001 | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Dokumen | 3 | 50.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.03.1.03.0002 | | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | Orang | 10 | 100.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.03.1.03.0003 | | | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik | Orang | 100 | 30.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.03.1.03.0004 | | | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | 552.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 4 | 552.600.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring | % | 0 | | Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat | |
| | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi | Kelompok | 0 | | SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.08.03.1.03.0004 | | | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota | Orang | 0 | | SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani | % | 100 | 194.608.000 | | |
| | | | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 194.608.000 | | |
| | | | | | | Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif | % | 100 | 194.608.000 | | |
| | | 2.08.03.1.02.0001 | | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | 76.868.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat | Orang | 95 | 76.868.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.03.1.02.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | | | | 117.740.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Orang | 5 | 117.740.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **22.338.600.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Ketahanan Pangan

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **24.142.048.000** | **Dinas Ketahanan Pangan** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 82 | | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **23.338.048.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 82 | 23.338.048.000 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 23.338.048.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 22.126.048.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 17.314.697.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 3 | 17.314.697.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 16.544.697.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 93 | 16.544.697.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 370.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 370.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Laporan | 12 | 400.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 140.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 120.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Laporan | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.04.0005 | | | Pengolahan Data Retribusi Daerah | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | Laporan | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 240.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 240.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.251.851.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.251.851.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 104.351.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 104.351.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 112.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 112.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 620.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 620.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 195.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 195.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 263.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 20 | 263.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 263.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 20 | 263.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.076.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 36 | 1.076.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 770.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 770.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.830.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 76 | 1.830.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 24 | 250.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 1.500.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 40 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP | % | 100 | 1.212.000.000 | Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP | Dokumen | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 196.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP | % | 100 | 196.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 101.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 101.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 290.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP | Unit | 5 | 290.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 290.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 5 | 290.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 330.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP | Laporan | 36 | 330.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 180.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 356.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP | Unit | 12 | 356.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 306.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 306.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 10 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah** | | | | | | | | **804.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 5 | 804.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 804.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 804.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 804.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 804.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 420.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 8 | 420.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 384.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 18 | 384.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| **Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (I)** | | | | | | | | | **6.093.935.000** | **Dinas Ketahanan Pangan** | |
| | | | | | | Indeks Ketahanan Pangan | Skor | 83 | | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | **Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan** | | | | | | | | **4.070.000.000** | | |
| | | | | | | Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras) | % | 10 | 4.070.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | | 4.070.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku | % | 60 | 4.070.000.000 | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | |
| | | | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | | 4.070.000.000 | | |
| | | | | | | PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS USAHA PADA LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT | % | 20 | 420.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI PANGAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.09.03.1.01.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | | 420.000.000 | | |
| | | | | | | LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI | Kelompok | 10 | 420.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI PANGAN | |
| | | | | | | PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI HARGA | % | 5 | 2.500.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI PANGAN | |
| | | 2.09.03.1.01.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | | 2.500.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN MELALUI SISTEM LOGISTIK DAERAH | Dokumen | 12 | 1.500.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI PANGAN | |
| | | | | | | VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN | Ton | 550 | 1.000.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI PANGAN | |
| | | | | | | PROSENTASE SASARAN STABILISASI HARGA SESUAI DENGAN SOP | % | 100 | 1.150.000.000 | SEKSI HARGA PANGAN | |
| | | 2.09.03.1.01.0009 | | | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi | | | | 1.150.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH INFORMASI HARGA PANGAN | Dokumen | 12 | 150.000.000 | SEKSI HARGA PANGAN | |
| | | | | | | JUMLAH INTERVENSI HARGA PANGAN | Paket | 3 | 1.000.000.000 | SEKSI HARGA PANGAN | |
| | **Meningkatkan Ketersediaan Pangan** | | | | | | | | **2.023.935.000** | | |
| | | | | | | Angka Kecukupan Energi | kkal/kapita/h | 3797 | 2.023.935.000 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | | 2.023.935.000 | | |
| | | | | | | Rasio cadangan pangan masyarakat | Angka | 0.62 | 307.150.000 | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | |
| | | | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi | | | | | 307.150.000 | | |
| | | | | | | PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT | % | 20 | 307.150.000 | SEKSI CADANGAN PANGAN | |
| | | 2.09.03.1.02.0005 | | | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | | | | 307.150.000 | | |
| | | | | | | LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI/DIBINA | Kelompok | 10 | 307.150.000 | SEKSI CADANGAN PANGAN | |
| | | | | | | Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi | Angka | 0.064 | 1.516.785.000 | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | |
| | | | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi | | | | | 1.516.785.000 | | |
| | | | | | | PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI | % | 3 | 1.516.785.000 | SEKSI CADANGAN PANGAN | |
| | | 2.09.03.1.02.0005 | | | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | | | | 1.516.785.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH YANG DIKELOLA | Ton | 85 | 1.516.785.000 | SEKSI CADANGAN PANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Rata-rata ketercukupan pangan | Angka | 1.25 | 200.000.000 | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | |
| | | | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KETERSEDIAAN PANGAN YANG DIUSULKAN | Dokumen | 1 | 200.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI PANGAN | |
| | | 2.09.03.1.01.0013 | | | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH LAPORAN KETERSEDIAAN PANGAN YANG DISUSUN | Dokumen | 12 | 200.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI PANGAN | |
| **Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (PE)** | | | | | | | | | **10.132.500.000** | **Dinas Ketahanan Pangan** | |
| | | | | | | Indeks Ketahanan Pangan | Skor | 83 | | Dinas Ketahanan Pangan | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | **Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan** | | | | | | | | **5.217.500.000** | | |
| | | | | | | Persentase penanganan kecamatan rawan pangan | % | 5 | 5.217.500.000 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | | 1.237.000.000 | | |
| | | | | | | Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP) | kg/kapita/tahun | 87.8 | 900.000.000 | Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan | |
| | | | | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi | | | | | 900.000.000 | | |
| | | | | | | PPH KAB/KOTA > 87 (DRP) | Angka | 33 | 900.000.000 | SEKSI KONSUMSI PANGAN | |
| | | 2.09.03.1.04.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | | | | 900.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH DESA B2SA DI DAERAH RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI | Desa | 12 | 900.000.000 | SEKSI KONSUMSI PANGAN | |
| | | | | | | Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP) | Angka | 0.62 | 337.000.000 | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | |
| | | | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi | | | | | 337.000.000 | | |
| | | | | | | PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT (DMP) | % | 20 | 337.000.000 | SEKSI CADANGAN PANGAN | |
| | | 2.09.03.1.02.0005 | | | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | | | | 337.000.000 | | |
| | | | | | | LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI DESA RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI/DIBINA | Kelompok | 10 | 337.000.000 | SEKSI CADANGAN PANGAN | |
| | | 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | | | 3.980.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi | % | 0.01 | 3.980.500.000 | Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | |
| | | | | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | | | | | 3.980.500.000 | | |
| | | | | | | PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI | % | 5 | 3.980.500.000 | SEKSI KERAWANAN PANGAN | |
| | | 2.09.04.1.02.0004 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi | | | | 3.980.500.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI YANG DIFASILITASI | Desa | 22 | 2.467.500.000 | SEKSI KERAWANAN PANGAN | |
| | | | | | | JUMLAH DESA STUNTING YANG DIINTERVENSI | Desa | 15 | 750.000.000 | SEKSI KERAWANAN PANGAN | |
| | | | | | | JUMLAH PETA FSVA YANG DISUSUN | Dokumen | 1 | 40.000.000 | SEKSI KERAWANAN PANGAN | |
| | | | | | | JUMLAH REKOMENDASI KEBUTUHAN KERAWANAN PANGAN LINTAS SEKTOR | Dokumen | 1 | 40.000.000 | SEKSI KERAWANAN PANGAN | |
| | | | | | | TERSUSUNNYA DOKUMEN MENEJEMEN FOOD LOSS DAN ATAU FOOD WASTE | Dokumen | 1 | 421.000.000 | SEKSI KERAWANAN PANGAN | |
| | | | | | | TERSUSUNNYA PETA KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI | Dokumen | 1 | 262.000.000 | SEKSI KERAWANAN PANGAN | |
| | **Meningkatkan Pemanfaatan Pangan** | | | | | | | | **4.915.000.000** | | |
| | | | | | | Skor PPH provinsi | Skor | 94.5 | 4.915.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | | 2.100.000.000 | | |
| | | | | | | Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah | kg/kapita/tahun | 87.8 | 2.100.000.000 | Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan | |
| | | | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | | 1.000.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REKOMENDASI KETERSEDIAAN SUMBERDAYA PANGAN LOKAL YANG DISUSUN | Dokumen | 1 | 1.000.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL | |
| | | 2.09.03.1.01.0002 | | | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH KELOMPOK / PELAKU USAHA PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL DAN PANGAN POKOK LOKAL YANG DIFASILITASI | Kelompok | 25 | 1.000.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL | |
| | | | | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi | | | | | 1.100.000.000 | | |
| | | | | | | PPH Kab / Kota > 87 | Angka | 33 | 1.100.000.000 | SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN | |
| | | 2.09.03.1.04.0001 | | | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lokasi yang diberikan promosi/edukasi B2SA dan pangan lokal | Lokasi | 10 | 450.000.000 | SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN | |
| | | | | | | Jumlah Paket Bahan Pangan Lokal Yang Dibagikan / Dibantukan | Paket | 2500 | 350.000.000 | SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN | |
| | | 2.09.03.1.04.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH DESA B2SA YANG DIFASILITASI | Desa | 3 | 250.000.000 | SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN | |
| | | | | | | JUMLAH DOKUMEN ANALISIS PPH | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN | |
| | | 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | | 2.815.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan | % | 80 | 1.365.000.000 | Bidang Keamanan Pangan | |
| | | | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.365.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN* | Dokumen | 1 | 325.000.000 | SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN | |
| | | 2.09.05.1.01.0011 | | | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | 325.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH MASYARAKAT YANG TEREDUKASI TENTANG MUTU DAN KEAMANAN PANGAN | Orang | 200 | 325.000.000 | SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN | |
| | | | | | | JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN** | Dokumen | 1 | 400.000.000 | SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | |
| | | 2.09.05.1.01.0011 | | | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH SAMPEL PANGAN SEGAR YANG DIAWASI | sampel | 200 | 400.000.000 | SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | |
| | | | | | | Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran | % | 65 | 75.000.000 | SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | |
| | | 2.09.05.1.01.0011 | | | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH LOKASI PENGAWASAN IJIN EDAR | Lokasi | 40 | 75.000.000 | SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | |
| | | | | | | PROSENTASE KELOMPOK / PELAKU USAHA YANG PENERAPAN HIGIENE SANITASINYA MENINGKAT LEVELNYA | % | 15 | 565.000.000 | SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.09.05.1.01.0009 | | | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | 565.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok yang didampingi dalam penyusunan doksistu | Kelompok | 7 | 265.000.000 | SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN | |
| | | | | | | JUMLAH PELAKU USAHA YANG DIBINA DALAM PENERAPAN HIGIENE SANITASI | Kelompok | 18 | 300.000.000 | SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang dIterbitkan | % | 80 | 1.450.000.000 | Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan | |
| | | | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai | Dokumen | 2 | 1.450.000.000 | SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN | |
| | | 2.09.05.1.01.0006 | | | Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan | | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen sertifikat dan/atau registrasi yang diterbitkan | Dokumen | 35 | 800.000.000 | SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN | |
| | | 2.09.05.1.01.0010 | | | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sampel Pangan yang Diuji | sampel | 100 | 650.000.000 | SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **40.368.483.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas air** | | | | | | | | | **7.830.876.000** | **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan** | |
| | | | | | | Indeks Kualitas Air | Angka | 50.66 | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | **Menurunnya pencemaran air permukaan** | | | | | | | | **7.830.876.000** | | |
| | | | | | | Indeks Pencemaran Air | Angka | 3.37 | 7.830.876.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | | 2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | 778.748.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun | % | 100 | 778.748.000 | Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup | |
| | | | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | | | | | 444.398.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup | Dokumen | 6 | 444.398.000 | SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.02.1.01.0002 | | | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi | | | | 444.398.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi | Dokumen | 6 | 444.398.000 | SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | | | | | 334.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen KLHS yang tervalidasi | Dokumen | 45 | 334.350.000 | SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.02.1.02.0005 | | | Pembinaan Penyelenggaraan KLHS | | | | 334.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan | Dokumen | 45 | 334.350.000 | SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | 5.833.376.000 | | |
| | | | | | | Persentase pengujian kualitas air | % | 100 | 723.376.000 | Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A | |
| | | | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | | | | | 723.376.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas air | Dokumen | 1 | 723.376.000 | SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN | |
| | | 2.11.03.1.01.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | 723.376.000 | | |
| | | | | | | Jumlah titik pengujian kualitas air | sampel | 550 | 723.376.000 | SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase sungai yang meningkat kualitasnya | % | 4.76 | 5.110.000.000 | Bidang  Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | |
| | | | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | | | | | 5.110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah | Unit | 100 | 5.110.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.03.1.01.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | 5.110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran air | Unit | 135 | 5.110.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN | | | | | | 133.740.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase limbah B3 yang terkelola | % | 80 | 133.740.000 | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | |
| | | | | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 133.740.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola | Ton | 1476440 | 133.740.000 | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN | |
| | | 2.11.05.1.01.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | | | | 133.740.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danSinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 denganPemerintah dalam rangka Pengangkutan,Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya | Dokumen | 1 | 133.740.000 | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | | 844.280.000 | | |
| | | | | | | Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan | % | 50 | 287.541.000 | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan | |
| | | | | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 287.541.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha berijin yang taat | Unit | 20 | 287.541.000 | SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | |
| | | 2.11.06.1.01.0006 | | | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | 287.541.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | Kegiatan | 35 | 287.541.000 | SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi lingkungan hidup | % | 100 | 556.739.000 | Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup | |
| | | | | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 556.739.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan / diterbitkan | Dokumen | 10 | 556.739.000 | SEKSI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.06.1.01.0001 | | | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | | 556.739.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang difasilitasi | Dokumen | 10 | 556.739.000 | SEKSI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | 240.732.000 | | |
| | | | | | | Persentase pengaduan yang ditangani | % | 100 | 240.732.000 | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan | |
| | | | | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | | | | | 240.732.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan aduan yang ditangani | Laporan | 15 | 240.732.000 | SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | |
| | | 2.11.10.1.01.0007 | | | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi | | | | 240.732.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani | Laporan | 15 | 240.732.000 | SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **144.518.678.000** | **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 70 | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **143.732.127.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 85 | 143.732.127.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 143.732.127.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 132.060.493.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 126.657.549.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 126.657.549.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 126.507.809.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 677 | 126.507.809.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 68.602.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Laporan | 1 | 68.602.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 81.138.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 81.138.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 145.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 145.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 145.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 145.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.04.0007 | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 383.272.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 383.272.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 51.272.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 1 | 51.272.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 332.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 40 | 332.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 863.608.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 863.608.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 80.440.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 80.440.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 51.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 51.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 77.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 77.300.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 73.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 73.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.668.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Laporan | 1 | 5.668.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 125.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 125.700.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 400.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 947.839.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 947.839.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 609.124.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 1 | 609.124.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 318.715.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 318.715.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.292.896.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 2.292.896.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 600.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 130.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.550.896.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 1.550.896.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 770.329.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 5 | 770.329.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 378.570.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 19 | 378.570.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 3 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 124.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 124.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 217.759.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 217.759.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden | % | 100 | 1.277.458.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 37.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada KR Baturraden | Dokumen | 1 | 37.700.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 37.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah Balai Kebun Raya Baturraden | Paket | 1 | 37.700.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 199.737.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada KR Baturraden | % | 100 | 199.737.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.615.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden | Paket | 1 | 4.615.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 14.897.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden | Paket | 1 | 14.897.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 42.147.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden | Paket | 1 | 42.147.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 16.945.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden | Paket | 1 | 16.945.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 26.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden | Paket | 1 | 26.400.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden | Dokumen | 1 | 3.200.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Balai Kebun Raya Baturraden | Laporan | 1 | 35.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 56.533.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Balai Kebun Raya Baturraden | Laporan | 1 | 56.533.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 152.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada KR Baturraden | Unit | 1 | 152.500.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden | Paket | 0 | | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 17.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden | Unit | 5 | 17.500.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden | Unit | 0 | | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden | Unit | 0 | | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 135.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden | Unit | 1 | 135.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 374.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada KR Baturraden | Laporan | 1 | 374.500.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Balai Kebun Raya Baturraden | Laporan | 1 | 3.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 63.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan balai kebun raya baturraden | Laporan | 1 | 63.500.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden | Unit | 1 | 8.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden | Laporan | 1 | 300.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 513.021.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada KR Baturraden | Unit | 1 | 513.021.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 66.870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Balai Kebun Raya Baturraden | Unit | 2 | 66.870.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 3.345.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara Balai Kebun Raya Baturraden | Unit | 1 | 3.345.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 45.806.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Balai Kebun Raya Baturraden | Unit | 17 | 45.806.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Kebun Raya Baturraden | Unit | 5 | 200.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai kebun Raya Baturraden | Unit | 3 | 50.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 147.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Kebun Raya Baturraden | Unit | 5 | 147.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Tahura | % | 100 | 1.484.601.000 | Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada TAHURA | Dokumen | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah Balai Tahura | Dokumen | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 220.281.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada TAHURA | % | 100 | 220.281.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 12.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Balai Tahura | Paket | 1 | 12.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 14.668.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai tahura | Paket | 1 | 14.668.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 29.328.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Balai Tahura | Paket | 1 | 29.328.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 13.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Balai Tahura | Paket | 1 | 13.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Balai Tahura | Paket | 1 | 20.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.160.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Balai Tahura | Dokumen | 1 | 2.160.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 17.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Balai Tahura | Laporan | 1 | 17.375.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Balai Tahura | Laporan | 1 | 110.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 90.394.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada TAHURA | Unit | | 90.394.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan Balai Tahura | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 57.894.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Balai Tahura | Unit | 5 | 57.894.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Tahura | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Tahura | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 32.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Tahura | Unit | 1 | 32.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 436.277.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada TAHURA | Laporan | | 436.277.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Balai Tahura | Laporan | 1 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 74.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Balai Tahura | Laporan | 1 | 74.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 6.625.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai Tahura | Laporan | 1 | 6.625.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 353.652.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Balai Tahura | Laporan | 1 | 353.652.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 692.649.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada TAHURA | Unit | | 692.649.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 178.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Balai Tahura | Unit | 3 | 178.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara Balai Tahura | Unit | 6 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 33.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Balai Tahura | Unit | 7 | 33.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 278.212.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Tahura | Unit | 4 | 278.212.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 128.687.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Tahura | Unit | 2 | 128.687.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 66.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Tahura | Unit | 3 | 66.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPL2H | % | 100 | 735.147.000 | Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah BPL2H | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 242.897.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 242.897.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan BPL2H | Paket | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 9.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BPL2H | Paket | 1 | 9.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan BPL2H | Paket | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan BPL2H | Paket | 1 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan BPL2H | Paket | 1 | 22.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan BPL2H | Dokumen | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu BPL2H | Laporan | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 147.047.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi BPL2H | Laporan | 1 | 147.047.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 120.470.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 120.470.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan BPL2H | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 110.470.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan BPL2H | Unit | 6 | 110.470.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BPL2H | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BPL2H | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BPL2H | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 170.830.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 170.830.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat BPL2H | Laporan | 1 | 5.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan BPL2H | Laporan | 1 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BPL2H | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 110.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan BPL2H | Laporan | 1 | 110.480.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 175.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 175.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 83.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya BPL2H | Unit | 3 | 83.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara BPL2H | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 32.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara BPL2H | Unit | 1 | 32.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BPL2H | Unit | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BPL2H | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BPL2H | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BSPTH | % | 100 | 988.037.000 | Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BSPTH | Dokumen | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah BSPTH | Dokumen | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 134.922.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BSPTH | % | 100 | 134.922.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan BSPTH | Paket | 1 | 3.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 29.747.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BSPTH | Paket | 1 | 29.747.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 7.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan BSPTH | Paket | 1 | 7.120.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan BSPTH | Paket | 1 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.475.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan BSPTH | Dokumen | 1 | 4.475.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan BSPTH | Dokumen | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu BSPTH | Laporan | 1 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 71.630.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah BSPTH | Laporan | 1 | 71.630.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 33.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BSPTH | Unit | 1 | 33.375.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan BSPTH | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 33.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan BSPTH | Unit | 10 | 33.375.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BSPTH | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BSPTH | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BSPTH | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 547.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BSPTH | Laporan | 1 | 547.640.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.740.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat BSPTH | Laporan | 1 | 1.740.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 129.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan BSPTH | Laporan | 1 | 129.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BSPTH | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 416.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan BSPTH | Laporan | 1 | 416.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 260.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BSPTH | Unit | 1 | 260.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 90.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya BSPTH | Unit | 3 | 90.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara BSPTH | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 14.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara BSPTH | Unit | 12 | 14.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BSPTH | Unit | 3 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BSPTH | Unit | 2 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BSPTH | Unit | 12 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 1 | % | | 728.032.000 | CDK 1 | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 1 | Dokumen | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 200.032.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1 | % | 100 | 200.032.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 1 | Paket | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 25.032.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 1 | Paket | 1 | 25.032.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 1 | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 1 | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 1 | Paket | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 1 | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 1 | Laporan | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 1 | Laporan | 1 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 1 | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 1 | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 1 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 1 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 1 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan<br>CDK 1 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 352.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 1 | Laporan | 1 | 352.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 1 | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 87.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 1 | Laporan | 1 | 87.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 1 | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 1 | Laporan | 1 | 260.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 166.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 1 | Unit | 1 | 166.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 106.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya<br>CDK 1 | Unit | 3 | 106.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara<br>CDK 1 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 1 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 1 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 10 | % | 100 | 689.845.000 | CDK 10 | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 11.300.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 10 | Dokumen | 1 | 11.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 11.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 10 | Dokumen | 1 | 11.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 140.845.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 10 | % | 100 | 140.845.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.010.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 10 | Paket | 1 | 4.010.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 9.564.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 10 | Paket | 1 | 9.564.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 4.325.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 10 | Paket | 1 | 4.325.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 16.076.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 10 | Paket | 1 | 16.076.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.652.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 10 | Paket | 1 | 4.652.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 10 | Dokumen | 1 | 3.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 10 | Laporan | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 73.618.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 10 | Laporan | 1 | 73.618.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 74.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 10 | Unit | 1 | 74.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 10 | Paket | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 44.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 10 | Unit | 12 | 44.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 10 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 10 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 10 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 275.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 10 | Laporan | 1 | 275.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 10 | Laporan | 1 | 1.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 111.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 10 | Laporan | 1 | 111.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 10 | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 163.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 10 | Laporan | 1 | 163.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 187.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 10 | Unit | 1 | 187.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 82.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 10 | Unit | 2 | 82.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara CDK 10 | Unit | 2 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 17.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 10 | Unit | 38 | 17.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 82.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 10 | Unit | 1 | 82.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 10 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 10 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 11 | % | | 777.735.000 | CDK 11 | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 11 | Dokumen | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 45.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 11 | Dokumen | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 197.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 11 | % | 100 | 197.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 11 | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 11 | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 11 | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 11 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 11 | Paket | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 11 | Dokumen | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 11 | Laporan | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 11 | Laporan | 1 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 128.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 11 | Unit | 1 | 128.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 11 | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 11 | Unit | 5 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 11 | Unit | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 11 | Unit | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 11 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 251.482.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 11 | Laporan | 1 | 251.482.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 11 | Laporan | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 11 | Laporan | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 11 | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 190.482.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 11 | Laporan | 1 | 190.482.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 156.253.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11 | Unit | 1 | 156.253.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 11 | Unit | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 2.253.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara CDK 11 | Unit | 20 | 2.253.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 11 | Unit | 20 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 79.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 11 | Unit | 0 | 79.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 11 | Unit | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 11 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 2 | % | 100 | 617.079.000 | CDK 2 | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 2 | Dokumen | 1 | 11.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 2 | Dokumen | 1 | 11.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 118.229.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 2 | % | 100 | 118.229.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.680.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 2 | Paket | 1 | 3.680.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 4.541.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 2 | Paket | 1 | 4.541.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 7.338.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 2 | Paket | 1 | 7.338.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 6.840.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 2 | Paket | 1 | 6.840.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 3.630.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 2 | Paket | 1 | 3.630.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 2 | Dokumen | 1 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 8.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 2 | Laporan | 1 | 8.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 82.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 2 | Laporan | 1 | 82.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 82.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 2 | Unit | 1 | 82.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 13.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 2 | Paket | 1 | 13.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 63.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 2 | Unit | 8 | 63.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 2 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 2 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 2 | Unit | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 279.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 2 | Laporan | 1 | 279.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 2 | Laporan | 1 | 1.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 2 | Laporan | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 2 | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 228.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 2 | Laporan | 1 | 228.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 125.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 2 | Unit | 1 | 125.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 66.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 2 | Unit | 2 | 66.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara CDK 2 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 14.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 2 | Unit | 37 | 14.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 2 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 2 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 2 | Unit | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 3 | % | 100 | 743.774.000 | CDK 3 | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 3.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 3 | Dokumen | 1 | 3.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 3.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 3 | Dokumen | 1 | 3.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 125.872.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 3 | % | 100 | 125.872.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 3 | Paket | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 15.895.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 3 | Paket | 1 | 15.895.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 3 | Paket | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 3 | Paket | 1 | 7.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.797.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 3 | Paket | 1 | 4.797.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 1.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 3 | Dokumen | 1 | 1.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 3 | Laporan | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 75.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi CDK 3 | Laporan | 1 | 75.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 64.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 3 | Unit | 1 | 64.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 3 | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 3 | Unit | 13 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 3 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 3 | Unit | 0 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 3 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 326.732.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 3 | Laporan | 1 | 326.732.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 3 | Laporan | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 66.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 3 | Laporan | 1 | 66.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 3 | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 259.132.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 3 | Laporan | 1 | 259.132.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 223.870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 3 | Unit | 1 | 223.870.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 68.410.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 3 | Unit | 2 | 68.410.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara CDK 3 | Unit | 10 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 20.460.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 3 | Unit | 40 | 20.460.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 3 | Unit | 4 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 3 | Unit | 2 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 3 | Unit | 2 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 4 | % | 100 | 669.430.000 | CDK 4 | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 4 | Dokumen | 1 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 4 | Dokumen | 1 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 194.990.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 4 | % | 100 | 194.990.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 4 | Paket | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 14.615.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 4 | Paket | 1 | 14.615.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 4 | Paket | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 9.170.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 4 | Paket | 1 | 9.170.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.125.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 4 | Paket | 1 | 10.125.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 4.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 4 | Dokumen | 1 | 4.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 29.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 4 | Laporan | 1 | 29.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 115.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 4 | Laporan | 1 | 115.880.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 4 | Unit | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 4 | Paket | 1 | 11.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 19.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 4 | Unit | 10 | 19.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 4 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 4 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 4 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 331.740.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 4 | Laporan | 1 | 331.740.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 4 | Laporan | 1 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 78.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 4 | Laporan | 1 | 78.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 4 | Laporan | 0 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 249.240.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 4 | Laporan | 1 | 249.240.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 103.700.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 4 | Unit | 1 | 103.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 73.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 4 | Unit | 2 | 73.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara CDK 4 | Unit | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 4 | Unit | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 4 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 4 | Unit | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 6.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 4 | Unit | 3 | 6.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 5 | % | | 635.447.000 | CDK 5 | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 13.374.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 5 | Dokumen | 1 | 13.374.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 13.374.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 5 | Dokumen | 1 | 13.374.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 104.605.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 5 | % | 100 | 104.605.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 5 | Paket | 1 | 3.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 6.687.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 5 | Paket | 1 | 6.687.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 8.693.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 5 | Paket | 1 | 8.693.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 5 | Paket | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 6.687.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 5 | Paket | 1 | 6.687.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 5 | Dokumen | 1 | 2.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 5 | Laporan | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 61.788.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 5 | Laporan | 1 | 61.788.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 192.478.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 5 | Unit | 1 | 192.478.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 14.917.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 5 | Paket | 1 | 14.917.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 20.061.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 5 | Unit | 5 | 20.061.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 157.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 5 | Unit | 1 | 157.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 5 | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 5 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 261.990.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 5 | Laporan | 1 | 261.990.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 5 | Laporan | 1 | 2.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 70.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 5 | Laporan | 1 | 70.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 5 | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 189.540.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 5 | Laporan | 1 | 189.540.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 63.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 5 | Unit | 1 | 63.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 50.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 5 | Unit | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara CDK 5 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 13.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 5 | Unit | 12 | 13.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 5 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK5 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 5 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 6 | % | 100 | 549.095.000 | CDK 6 | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 6 | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 6 | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 167.595.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 6 | % | 100 | 167.595.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 6 | Paket | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 6 | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 6 | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 6 | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 6 | Paket | 1 | 11.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 1.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 6 | Dokumen | 1 | 1.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 6 | Laporan | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 99.795.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 6 | Laporan | 1 | 99.795.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 6 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 6 | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 6 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 6 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 6 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 6 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 267.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 6 | Laporan | 1 | 267.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 6 | Laporan | 1 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 6 | Laporan | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 6 | Laporan | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 210.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 6 | Laporan | 1 | 210.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 114.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 6 | Unit | 1 | 114.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 103.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 6 | Unit | 2 | 103.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara CDK 6 | Unit | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 6 | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 6 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 6 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 6 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 7 | % | 100 | 515.927.000 | CDK 7 | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 7 | Dokumen | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 7 | Dokumen | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 101.503.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 7 | % | 100 | 101.503.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 7 | Paket | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 9.813.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 7 | Paket | 1 | 9.813.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 7 | Paket | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 7 | Paket | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 3.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 7 | Paket | 1 | 3.360.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 1.980.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 7 | Dokumen | 1 | 1.980.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 13.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 7 | Laporan | 1 | 13.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 66.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 7 | Laporan | 1 | 66.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 71.400.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 7 | Unit | 1 | 71.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 25.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 7 | Paket | 1 | 25.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 46.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 7 | Unit | 4 | 46.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 7 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 7 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 7 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 137.524.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 7 | Laporan | 1 | 137.524.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 7 | Laporan | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 36.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 7 | Laporan | 1 | 36.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 7 | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 100.524.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 7 | Laporan | 1 | 100.524.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 202.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 7 | Unit | 1 | 202.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 56.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 7 | Unit | 2 | 56.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara CDK 7 | Unit | 10 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 7 | Unit | 18 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 137.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 7 | Unit | 1 | 137.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 7 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 7 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 8 | % | 100 | 605.175.000 | CDK 8 | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 6.687.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 8 | Dokumen | 1 | 6.687.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 6.687.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 8 | Dokumen | 1 | 6.687.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 112.944.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 8 | % | 100 | 112.944.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.012.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 8 | Paket | 1 | 4.012.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.031.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 8 | Paket | 1 | 10.031.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 8.548.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 8 | Paket | 1 | 8.548.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 4.672.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 8 | Paket | 1 | 4.672.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.012.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 8 | Paket | 1 | 4.012.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 1.408.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 8 | Dokumen | 1 | 1.408.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 13.370.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 8 | Laporan | 1 | 13.370.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 66.891.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 8 | Laporan | 1 | 66.891.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 74.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 8 | Unit | 1 | 74.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 13.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 8 | Paket | 1 | 13.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 61.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 8 | Unit | 4 | 61.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 8 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 8 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 8 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 232.660.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 8 | Laporan | 1 | 232.660.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 8 | Laporan | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 36.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 8 | Laporan | 1 | 36.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 8.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 8 | Laporan | 1 | 8.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 185.260.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 8 | Laporan | 1 | 185.260.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 178.884.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 8 | Unit | 1 | 178.884.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 50.153.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 8 | Unit | 2 | 50.153.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 3.009.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara CDK 8 | Unit | 30 | 3.009.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 20.061.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 8 | Unit | 40 | 20.061.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 75.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 8 | Unit | 1 | 75.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.061.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 8 | Unit | 1 | 20.061.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 8 | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 9 | % | 100 | 654.852.000 | CDK 9 | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 4.012.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 9 | Dokumen | 1 | 4.012.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 4.012.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 9 | Dokumen | 1 | 4.012.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 172.129.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 9 | % | 100 | 172.129.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.687.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 9 | Paket | 1 | 6.687.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 34.627.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 9 | Paket | 1 | 34.627.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 23.405.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 9 | Paket | 1 | 23.405.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 20.062.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 9 | Paket | 1 | 20.062.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 11.356.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 9 | Paket | 1 | 11.356.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 9 | Dokumen | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 20.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 9 | Laporan | 1 | 20.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 52.592.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 9 | Laporan | 1 | 52.592.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 90.821.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 9 | Unit | 1 | 90.821.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 9 | Paket | 10 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 50.821.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 9 | Unit | 10 | 50.821.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 9 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 9 | Unit | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 9 | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 195.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 9 | Laporan | 1 | 195.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 9 | Laporan | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 45.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 9 | Laporan | 1 | 45.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 9 | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 147.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 9 | Laporan | 1 | 147.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 192.890.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 9 | Unit | 1 | 192.890.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 76.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 9 | Unit | 2 | 76.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara CDK 9 | Unit | 20 | 500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 37.581.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 9 | Unit | 20 | 37.581.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 46.809.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 9 | Unit | 1 | 46.809.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 26.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 9 | Unit | 1 | 26.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 9 | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **786.551.000** | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3 | 786.551.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 786.551.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 786.551.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 786.551.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 786.551.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 399.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 9 | 399.520.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 387.031.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 5 | 387.031.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan kualitas tutupan lahan** | | | | | | | | | **27.589.586.000** | **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan** | |
| | | | | | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Angka | 42.45 | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | **Meningkatnya luasan tutupan lahan** | | | | | | | | **27.589.586.000** | | |
| | | | | | | Luas tutupan lahan | Ha | 1022457 | 27.589.586.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | | | 18.758.156.000 | | |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani | % | 0.47 | 120.366.000 | | |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 120.366.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) | Ha | 1776 | 120.366.000 | | |
| | | 3.28.03.1.04.0001 | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | | | | 44.486.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) | Dokumen | 1 | 44.486.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.03.1.04.0008 | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | | | | 75.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan | Dokumen | 3 | 75.880.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1 | % | 0.02 | 1.087.854.000 | CDK 1 | |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 1.087.854.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK1 | Ha | 66 | 1.087.854.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0001 | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | | | | 23.924.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 1 | Dokumen | 1 | 23.924.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 209.385.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 1 | Ha | 40 | 209.385.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 292.894.000 | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 1 | Ha | 25 | 292.894.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | 3.28.03.1.04.0005 | | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | | | | 466.472.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK1 | Unit | 29 | 466.472.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.28.03.1.04.0008 | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | | | | 24.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 1 | Laporan | 1 | 24.300.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | 3.28.03.1.04.0009 | | | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan | | | | 70.879.000 | | |
| | | | | | | Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 1 | Ha | 1 | 70.879.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10 | % | 0.03 | 1.089.640.000 | CDK 10 | |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 1.089.640.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 10 | Ha | 100 | 1.089.640.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0001 | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | | | | 30.175.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 10 | Dokumen | 1 | 30.175.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 319.874.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 10 | Ha | 50 | 319.874.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 387.550.000 | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 10 | Ha | 50 | 387.550.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 3.28.03.1.04.0005 | | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | | | | 274.956.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 10 | Unit | 4 | 274.956.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 3.28.03.1.04.0008 | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | | | | 77.085.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 10 | Dokumen | 1 | 77.085.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11 | % | 0.03 | 1.001.937.000 | CDK 11 | |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 1.001.937.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 11 | Ha | 130 | 1.001.937.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0001 | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | | | | 33.405.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 11 | Dokumen | 1 | 33.405.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 236.000.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 11 | Ha | 78 | 236.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 391.495.000 | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 11 | Ha | 52 | 391.495.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 3.28.03.1.04.0005 | | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | | | | 320.976.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 11 | Unit | 16 | 320.976.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 3.28.03.1.04.0008 | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | | | | 20.061.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 11 | Dokumen | 1 | 20.061.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2 | % | 0.04 | 1.129.723.000 | CDK 2 | |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 1.129.723.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK2 | Ha | 137 | 1.129.723.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0001 | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | | | | 28.426.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 2 | Dokumen | 1 | 28.426.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 411.212.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 2 | Ha | 90 | 411.212.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 120.093.000 | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 2 | Ha | 30 | 120.093.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | 3.28.03.1.04.0005 | | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | | | | 387.534.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 2 | Unit | 55 | 387.534.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | 3.28.03.1.04.0008 | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | | | | 23.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 2 | Laporan | 1 | 23.600.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | 3.28.03.1.04.0009 | | | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan | | | | 158.858.000 | | |
| | | | | | | Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 2 | Ha | 17 | 158.858.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3 | % | 0.03 | 1.274.159.000 | CDK 3 | |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 1.274.159.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK3 | Ha | 114 | 1.274.159.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0001 | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | | | | 16.290.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 3 | Dokumen | 1 | 16.290.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 356.047.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 3 | Ha | 62 | 356.047.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 397.729.000 | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 3 | Ha | 51 | 397.729.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 3.28.03.1.04.0005 | | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | | | | 443.909.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 3 | Unit | 58 | 443.909.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 3.28.03.1.04.0008 | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | | | | 30.092.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 3 | Dokumen | 1 | 30.092.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 3.28.03.1.04.0009 | | | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan | | | | 30.092.000 | | |
| | | | | | | Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 3 | Ha | 1 | 30.092.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4 | % | 0.03 | 1.082.500.000 | CDK 4 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 1.082.500.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK4 | Ha | 120 | 1.082.500.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0001 | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 4 | Ha | 1 | 20.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 4 | Ha | 100 | 400.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 4 | Ha | 15 | 150.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | 3.28.03.1.04.0005 | | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | | | | 410.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 4 | Unit | 12 | 410.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | 3.28.03.1.04.0008 | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | | | | 10.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 4 | Dokumen | 1 | 10.500.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | 3.28.03.1.04.0009 | | | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan | | | | 92.000.000 | | |
| | | | | | | Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 4 | Ha | 10 | 92.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5 | % | 0.04 | 1.297.588.000 | CDK 5 | |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 1.297.588.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 5 | Ha | 140 | 1.297.588.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0001 | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | | | | 33.435.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 5 | Dokumen | 1 | 33.435.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 480.762.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 5 | Ha | 105 | 480.762.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 172.700.000 | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 5 | Ha | 20 | 172.700.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 3.28.03.1.04.0005 | | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | | | | 399.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 5 | Unit | 14 | 399.700.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 3.28.03.1.04.0008 | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | | | | 25.411.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 5 | Dokumen | 1 | 25.411.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 3.28.03.1.04.0009 | | | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan | | | | 185.580.000 | | |
| | | | | | | Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 5 | Ha | 25 | 185.580.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6 | % | 0.09 | 1.377.789.000 | CDK 6 | |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 1.377.789.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 6 | Ha | 330 | 1.377.789.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0001 | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | | | | 33.435.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 6 | Dokumen | 1 | 33.435.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 325.119.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 6 | Ha | 150 | 325.119.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 328.870.000 | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 6 | Ha | 175 | 328.870.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 3.28.03.1.04.0005 | | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | | | | 483.068.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 6 | Unit | 32 | 483.068.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 3.28.03.1.04.0008 | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | | | | 66.870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 6 | Dokumen | 1 | 66.870.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 3.28.03.1.04.0009 | | | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan | | | | 140.427.000 | | |
| | | | | | | Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 6 | Ha | 5 | 140.427.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7 | % | 0.09 | 1.224.454.000 | CDK 7 | |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 1.224.454.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 7 | Ha | 350 | 1.224.454.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0001 | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | | | | 33.435.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 7 | Dokumen | 1 | 33.435.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 438.627.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 7 | Ha | 250 | 438.627.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 236.311.000 | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 7 | Ha | 100 | 236.311.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 3.28.03.1.04.0005 | | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | | | | 463.919.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 7 | Unit | 26 | 463.919.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 3.28.03.1.04.0008 | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | | | | 52.162.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK | Laporan | 1 | 52.162.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8 | % | 0.04 | 966.058.000 | CDK 8 | |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 966.058.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 8 | Ha | 145 | 966.058.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0001 | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | | | | 6.687.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 8 | Dokumen | 1 | 6.687.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 246.299.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 8 | Ha | 90 | 246.299.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 201.420.000 | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 8 | Ha | 52.5 | 201.420.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | 3.28.03.1.04.0005 | | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | | | | 369.338.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 8 | Unit | 16 | 369.338.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | 3.28.03.1.04.0008 | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | | | | 50.153.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 8 | Dokumen | 1 | 50.153.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | 3.28.03.1.04.0009 | | | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan | | | | 92.161.000 | | |
| | | | | | | Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 8 | Ha | 3 | 92.161.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9 | % | 0.04 | 921.323.000 | CDK 9 | |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 921.323.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 9 | Ha | 139 | 921.323.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0001 | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | | | | 56.103.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 9 | Dokumen | 1 | 56.103.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 354.248.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 9 | Ha | 85 | 354.248.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 215.510.000 | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 9 | Ha | 54 | 215.510.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 3.28.03.1.04.0005 | | | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | | | | 255.340.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 9 | Unit | 11 | 255.340.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 3.28.03.1.04.0008 | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | | | | 40.122.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 9 | Dokumen | 1 | 40.122.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani | % | 100 | 247.419.000 | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan | |
| | | | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | | 247.419.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan | Dokumen | 1 | 247.419.000 | SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | 247.419.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan | Dokumen | 1 | 247.419.000 | SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 1 | % | 100 | 79.244.000 | CDK 1 | |
| | | | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | | 79.244.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK1 | Dokumen | 1 | 79.244.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | 79.244.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 1 | Dokumen | 1 | 79.244.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 10 | % | 100 | 53.400.000 | CDK 10 | |
| | | | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | | 53.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 10 | Dokumen | 1 | 53.400.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | 53.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 10 | Laporan | 1 | 53.400.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 11 | % | 100 | 25.518.000 | CDK 11 | |
| | | | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | | 25.518.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 11 | Dokumen | 1 | 25.518.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | 25.518.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 11 | Dokumen | 1 | 25.518.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 2 | % | 100 | 26.109.000 | CDK 2 | |
| | | | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | | 26.109.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK2 | Dokumen | 1 | 26.109.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | 26.109.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 2 | Dokumen | 1 | 26.109.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 3 | % | 100 | 53.496.000 | CDK 3 | |
| | | | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | | 53.496.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK3 | Dokumen | 1 | 53.496.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | 53.496.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 3 | Laporan | 1 | 53.496.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 4 | % | 100 | 37.400.000 | CDK 4 | |
| | | | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | | 37.400.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK4 | Dokumen | 1 | 37.400.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | 37.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 4 | Dokumen | 1 | 37.400.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 5 | % | 100 | 50.000.000 | CDK 5 | |
| | | | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 5 | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 5 | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 6 | % | 100 | 91.931.000 | CDK 6 | |
| | | | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | | 91.931.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 6 | Dokumen | 1 | 91.931.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | 91.931.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 6 | Dokumen | 1 | 91.931.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 7 | % | 100 | 57.000.000 | CDK 7 | |
| | | | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | | 57.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 7 | Dokumen | 1 | 57.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | 57.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 7 | Dokumen | 1 | 57.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 8 | % | 100 | 50.153.000 | CDK 8 | |
| | | | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | | 50.153.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 8 | Dokumen | 1 | 50.153.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | 50.153.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit  pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 8 | Dokumen | 1 | 50.153.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 9 | % | 100 | 47.000.000 | CDK 9 | |
| | | | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | | 47.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 9 | Dokumen | 1 | 47.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | 47.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 9 | Dokumen | 1 | 47.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi bibit | % | -40 | 1.705.114.000 | Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A | |
| | | | | Perbenihan Tanaman Hutan | | | | | 1.705.114.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi | Bibit | 600000 | 1.496.053.000 | SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH | |
| | | 3.28.03.1.09.0006 | | | Pembangunan Sumber Benih | | | | 1.496.053.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang diproduksi | Bibit | 600000 | 1.207.323.000 | SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH | |
| | | | | | | Luas sumber benih yang dibangun | Ha | 0.5 | 288.730.000 | SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH | Sertifikat | 75 | 209.061.000 | SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT | |
| | | 3.28.03.1.09.0001 | | | Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar | | | | 18.055.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi teknis penetapan pengada/ pengedar benih dan/atau bibit terdaftar | Dokumen | 12 | 18.055.000 | SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.03.1.09.0002 | | | Sertifikasi Sumber Benih | | | | 14.715.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat sumber benih yang diterbitkan | Sertifikat | 5 | 14.715.000 | SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.03.1.09.0003 | | | Sertifikasi Mutu Benih | | | | 23.405.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat mutu benih yang diterbitkan | Sertifikat | 10 | 23.405.000 | SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.03.1.09.0004 | | | Sertifikasi Mutu Bibit | | | | 66.610.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat mutu bibit yang diterbitkan | Sertifikat | 60 | 66.610.000 | SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.03.1.09.0005 | | | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit | | | | 86.276.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data (Asal usul, jenis mutu) Benih Atau Bibit yang beredar | Dokumen | 2 | 86.276.000 | SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan | % | 35.4 | 969.687.000 | | |
| | | | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | | | | | 404.563.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit usaha/lembaga yang tertib dalam pemanfaatan/penggunaan hutan | Unit | 70 | 404.563.000 | | |
| | | 3.28.03.1.03.0001 | | | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | | | | 153.801.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data dan Informasi terkait Luas Perizinan berusaha pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi | Dokumen | 4 | 153.801.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.03.1.03.0004 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | | | | 250.762.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi | Dokumen | 12 | 250.762.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | | | | | 230.774.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang | Unit | 6 | 230.774.000 | | |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | | | | 150.530.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit managemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi | Unit | 6 | 150.530.000 | | |
| | | 3.28.03.1.06.0004 | | | Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu | | | | 80.244.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit managemen PBPHH HHBK skala kecil dan menengah yang tertib | Unit | 2 | 80.244.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | | 334.350.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan | Unit | 149 | 334.350.000 | | |
| | | 3.28.03.1.07.0001 | | | Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | 133.740.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit managemen yang melaksanakan tertib pelaporan RKOPHH untuk pemegang PBPHH skala usaha kecil dan menengah | Unit | 12 | 133.740.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | 147.114.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPHH berkapasitas 2.000-6.000 m3/tahun | Unit | 12 | 147.114.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.03.1.07.0003 | | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | 53.496.000 | | |
| | | | | | | Jumlah permohonan PBPHH kayu skala kecil dan menengah yang dilayani | Unit | 12 | 53.496.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 1 | % | 1.38 | 398.034.000 | CDK 1 | |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | | | | | 300.939.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK1 | Unit | 5 | 300.939.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | | | | 300.939.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit  pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi di wilayah CDK 1 | Unit | 5 | 300.939.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | | 97.095.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK1 | Unit | 11 | 97.095.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | 97.095.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 1 | Unit | 11 | 97.095.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 10 | % | 1.03 | 147.267.000 | CDK 10 | |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | | | | | 107.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 10 | Unit | 3 | 107.050.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | | | | 107.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit  pembudidaya / pengolah bahan baku  HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 10 | Unit | 3 | 107.050.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | | 40.217.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 10 | Unit | 9 | 40.217.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | 40.217.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 10 | Unit | 9 | 40.217.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 11 | % | 1.29 | 349.730.000 | CDK 11 | |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | | | | | 273.730.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 11 | Unit | 3 | 273.730.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | | | | 273.730.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 11 | Unit | 3 | 273.730.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | | 76.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 11 | Unit | 12 | 76.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | 76.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 11 | Unit | 12 | 76.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 2 | % | 1.72 | 564.437.000 | CDK 2 | |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | | | | | 521.621.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 2 | Unit | 4 | 521.621.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | | | | 521.621.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 2 | Unit | 4 | 521.621.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | | 42.816.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 2 | Unit | 16 | 42.816.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | 42.816.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 2 | Unit | 16 | 42.816.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 3 | % | 1.64 | 185.752.000 | CDK 3 | |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | | | | | 135.569.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK3 | Unit | 6 | 135.569.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | | | | 135.569.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 3 | Unit | 6 | 135.569.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | | 50.183.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK3 | Unit | 13 | 50.183.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | 50.183.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 3 | Unit | 13 | 50.183.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 4 | % | 1.46 | 139.900.000 | CDK 4 | |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | | | | | 101.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK4 | Unit | 3 | 101.450.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | | | | 101.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 4 | Unit | 3 | 101.450.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | | 38.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK4 | Unit | 14 | 38.450.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | 38.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 4 | Unit | 14 | 38.450.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 5 | % | 1.29 | 160.000.000 | CDK 5 | |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 5 | Unit | 3 | 100.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 5 | Unit | 3 | 100.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 5 | Unit | 12 | 60.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 5 | Unit | 12 | 60.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 6 | % | 2.15 | 134.489.000 | CDK 6 | |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | | | | | 75.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 6 | Unit | 9 | 75.320.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | | | | 75.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 6 | Unit | 9 | 75.320.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | | 59.169.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 6 | Unit | 16 | 59.169.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | 59.169.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 6 | Unit | 16 | 59.169.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 7 | % | 1.55 | 281.408.000 | CDK 7 | |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | | | | | 263.108.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 7 | Unit | 3 | 263.108.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | | | | 263.108.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 7 | Unit | 3 | 263.108.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | | 18.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 7 | Unit | 15 | 18.300.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | 18.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 7 | Unit | 15 | 18.300.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 8 | % | 1.03 | 133.740.000 | CDK 8 | |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | | | | | 100.305.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 8 | Unit | 3 | 100.305.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | | | | 100.305.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasitasi CDK 8 | Unit | 3 | 100.305.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | | 33.435.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 8 | Unit | 9 | 33.435.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | 33.435.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 8 | Unit | 9 | 33.435.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9 | % | 1.46 | 196.537.000 | CDK 9 | |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | | | | | 128.960.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 9 | Unit | 4 | 128.960.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | | | | 128.960.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 9 | Unit | 4 | 128.960.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | | 67.577.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 9 | Unit | 13 | 67.577.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | 67.577.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 9 | Unit | 13 | 67.577.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.28.04 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | | | | | | 2.966.293.000 | | |
| | | | | | | Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura | Angka | 70 | 1.473.793.000 | Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi | | | | | 1.473.793.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I | Dokumen | 2 | 804.259.000 | SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA | |
| | | 3.28.04.1.01.0006 | | | Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi | | | | 86.931.000 | | |
| | | | | | | Jumlah permohonan pelayanan pemanfaatan di tahura yang ditindaklanjuti | Dokumen | 50 | 86.931.000 | SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | 3.28.04.1.01.0007 | | | Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi | | | | 96.962.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kerja sama penyelenggaraan tahura yag dilaksanakan | Dokumen | 2 | 96.962.000 | SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | 3.28.04.1.01.0008 | | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi | | | | 120.366.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok masyarakat sekitar tahura yang ditingkatkan / diberdayakan | Kelompok | 1 | 120.366.000 | SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | 3.28.04.1.01.0011 | | | Perencanaan Pengelolaan TAHURA | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana pengelolaan Tahura (Jangka panjang dan jangka pendek) yang ditetapkan | Dokumen | 2 | 500.000.000 | SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | | | Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I | Ha | 231.3 | 669.534.000 | SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.04.1.01.0002 | | | Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi | | | | 338.364.000 | | |
| | | | | | | Operasi kegiatan pengamanan kawasan tahura provinsi | Bulan | 12 | 338.364.000 | SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | 3.28.04.1.01.0003 | | | Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi | | | | 134.170.000 | | |
| | | | | | | Luas kawasan tahura yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi | Ha | 20 | 134.170.000 | SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | 3.28.04.1.01.0005 | | | Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi | | | | 197.000.000 | | |
| | | | | | | Luas areal tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem | Ha | 10 | 197.000.000 | SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani | % | 10 | 86.931.000 | | |
| | | | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 86.931.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pengendalian Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar | Dokumen | 4 | 86.931.000 | | |
| | | 3.28.04.1.02.0001 | | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | | | | 86.931.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES | Laporan | 4 | 86.931.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 1 | % | 5 | 32.101.000 | CDK 1 | |
| | | | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 32.101.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK1 | Jenis | 2 | 32.101.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.04.1.02.0001 | | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | | | | 32.101.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 1 | Dokumen | 1 | 32.101.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 10 | % | 5 | 25.800.000 | CDK 10 | |
| | | | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 25.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 10 | Jenis | 2 | 25.800.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.04.1.02.0001 | | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | | | | 25.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 10 | Dokumen | 1 | 25.800.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 11 | % | 5 | 53.496.000 | CDK 11 | |
| | | | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 53.496.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 11 | Jenis | 2 | 53.496.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.04.1.02.0001 | | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | | | | 53.496.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 11 | Dokumen | 1 | 53.496.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 2 | % | 5 | 24.247.000 | CDK 2 | |
| | | | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 24.247.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK2 | Jenis | 2 | 24.247.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.04.1.02.0001 | | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | | | | 24.247.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 2 | Dokumen | 1 | 24.247.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 3 | % | 5 | 66.870.000 | CDK 3 | |
| | | | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 66.870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK3 | Jenis | 2 | 66.870.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.04.1.02.0001 | | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | | | | 66.870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 3 | Dokumen | 1 | 66.870.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 4 | % | 5 | 25.000.000 | CDK 4 | |
| | | | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK4 | Jenis | 2 | 25.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.04.1.02.0001 | | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 4 | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 5 | % | 5 | 26.748.000 | CDK 5 | |
| | | | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 26.748.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 5 | Jenis | 2 | 26.748.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.04.1.02.0001 | | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | | | | 26.748.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 5 | Dokumen | 1 | 26.748.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 6 | % | 5 | 93.618.000 | CDK 6 | |
| | | | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 93.618.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 6 | Jenis | 2 | 93.618.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.04.1.02.0001 | | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | | | | 93.618.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 6 | Dokumen | 1 | 93.618.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 7 | % | 5 | 15.485.000 | CDK 7 | |
| | | | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 15.485.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 7 | Jenis | 2 | 15.485.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.04.1.02.0001 | | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | | | | 15.485.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 7 | Dokumen | 1 | 15.485.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 8 | % | 5 | 16.718.000 | CDK 8 | |
| | | | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 16.718.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 8 | Jenis | 2 | 16.718.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.04.1.02.0001 | | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | | | | 16.718.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 8 | Dokumen | 1 | 16.718.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 9 | % | 5 | 101.560.000 | CDK 9 | |
| | | | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 101.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 9 | Jenis | 2 | 101.560.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.04.1.02.0001 | | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | | | | 101.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 9 | Dokumen | 1 | 101.560.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif | % | 40 | 364.533.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | | | | | 364.533.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pengendalian pengelolaan Konservasi ekosistem | Dokumen | 7 | 364.533.000 | | |
| | | 3.28.04.1.03.0005 | | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 364.533.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan/pengendalian pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting | Dokumen | 7 | 364.533.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 1 | % | 100 | 19.545.000 | CDK 1 | |
| | | | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | | | | | 19.545.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK1 | Unit | 1 | 19.545.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.04.1.03.0005 | | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 19.545.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 1 | Kelompok | 1 | 19.545.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 10 | % | 0 | | CDK 10 | |
| | | | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK 10 | Unit | 0 | | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.04.1.03.0005 | | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 10 | Kelompok | 0 | | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 2 | % | 100 | 29.223.000 | CDK 2 | |
| | | | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | | | | | 29.223.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK2 | Unit | 1 | 29.223.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.04.1.03.0005 | | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 29.223.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 2 | Kelompok | 1 | 29.223.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 3 | % | 100 | 68.104.000 | CDK 3 | |
| | | | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | | | | | 68.104.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK3 | Unit | 1 | 68.104.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.04.1.03.0005 | | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 68.104.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 3 | Kelompok | 2 | 68.104.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 4 | % | 100 | 81.882.000 | CDK 4 | |
| | | | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | | | | | 81.882.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK4 | Unit | 1 | 81.882.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.04.1.03.0005 | | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 81.882.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 4 | Kelompok | 2 | 81.882.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 5 | % | 100 | 31.429.000 | CDK 5 | |
| | | | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | | | | | 31.429.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK 5 | Unit | 1 | 31.429.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.04.1.03.0005 | | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 31.429.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 5 | Kelompok | 2 | 31.429.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 6 | % | 100 | 66.870.000 | CDK 6 | |
| | | | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | | | | | 66.870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK 6 | Unit | 1 | 66.870.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.04.1.03.0005 | | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 66.870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 6 | Kelompok | 1 | 66.870.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 8 | % | 100 | 14.795.000 | CDK 8 | |
| | | | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | | | | | 14.795.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK 8 | Unit | 1 | 14.795.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.04.1.03.0005 | | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 14.795.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 8 | Kelompok | 1 | 14.795.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 9 | % | 100 | 20.625.000 | CDK 9 | |
| | | | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | | | | | 20.625.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK 9 | Unit | 1 | 20.625.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.04.1.03.0005 | | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 20.625.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 9 | Kelompok | 1 | 20.625.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden | % | 100 | 226.920.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | | | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 226.920.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Jenis Tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden | Jenis | 705 | 226.920.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | |
| | | 3.28.04.1.02.0001 | | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | | | | 226.920.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES | Dokumen | 1 | 226.920.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | | | 5.313.155.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat | % | 2.5 | 533.894.000 | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 533.894.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya | Kelompok | 25 | 533.894.000 | SEKSI PENYULUHAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | | | | 113.794.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitas | Orang | 90 | 113.794.000 | SEKSI PENYULUHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 296.390.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi | Dokumen | 2 | 296.390.000 | SEKSI PENYULUHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | 123.710.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian Perhutanan Sosial | Dokumen | 2 | 123.710.000 | SEKSI PENYULUHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 1 | % | 0.3 | 472.308.000 | CDK 1 | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 472.308.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK1 | Kelompok | 3 | 472.308.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | | | | 74.049.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 1 | Orang | 60 | 74.049.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 268.785.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 1 | Kelompok | 130 | 268.785.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | 129.474.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 1 | Unit | 5 | 129.474.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10 | % | 0.2 | 372.271.000 | CDK 10 | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 372.271.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 10 | Kelompok | 2 | 372.271.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | | | | 133.491.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 10 | Orang | 60 | 133.491.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 182.505.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 10 | Kelompok | 105 | 182.505.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | 56.275.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 10 | Unit | 5 | 56.275.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11 | % | 0.2 | 146.149.000 | CDK 11 | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 146.149.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 11 | Kelompok | 2 | 146.149.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | | | | 43.466.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 11 | Orang | 60 | 43.466.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 38.488.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 11 | Kelompok | 57 | 38.488.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | 64.195.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 11 | Unit | 5 | 64.195.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2 | % | 0.2 | 379.732.000 | CDK 2 | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 379.732.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK2 | Kelompok | 2 | 379.732.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | | | | 53.890.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 2 | Orang | 60 | 53.890.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 181.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 2 | Kelompok | 101 | 181.950.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | 143.892.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 2 | Kelompok | 5 | 143.892.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3 | % | 0.2 | 453.044.000 | CDK 3 | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 453.044.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK3 | Kelompok | 2 | 453.044.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | | | | 51.398.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 3 | Orang | 60 | 51.398.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 231.723.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 3 | Kelompok | 109 | 231.723.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | 169.923.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 3 | Unit | 5 | 169.923.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4 | % | 0.2 | 605.295.000 | CDK 4 | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 605.295.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 4 | Kelompok | 2 | 605.295.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | | | | 116.445.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 4 | Orang | 60 | 116.445.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 298.970.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 4 | Kelompok | 54 | 298.970.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | 189.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 4 | Unit | 5 | 189.880.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5 | % | 0.3 | 540.231.000 | CDK 5 | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 540.231.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 5 | Kelompok | 3 | 540.231.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | | | | 78.907.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 5 | Orang | 60 | 78.907.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 227.279.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 5 | Kelompok | 75 | 227.279.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | 234.045.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 5 | Unit | 5 | 234.045.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6 | % | 0.2 | 422.146.000 | CDK 6 | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 422.146.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 6 | Kelompok | 2 | 422.146.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | | | | 53.496.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 6 | Orang | 60 | 53.496.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 198.040.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 6 | Kelompok | 107 | 198.040.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | 170.610.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 6 | Unit | 5 | 170.610.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7 | % | 0.3 | 537.804.000 | CDK 7 | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 537.804.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 7 | Kelompok | 3 | 537.804.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | | | | 60.183.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 7 | Orang | 60 | 60.183.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 390.690.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 7 | Kelompok | 121 | 390.690.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | 86.931.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 7 | Unit | 5 | 86.931.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8 | % | 0.2 | 525.082.000 | CDK 8 | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 525.082.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 8 | Kelompok | 2 | 525.082.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | | | | 73.557.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 8 | Orang | 60 | 73.557.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 384.655.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 8 | Kelompok | 72 | 384.655.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | 66.870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 8 | Unit | 5 | 66.870.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 9 | % | 0.2 | 325.199.000 | CDK 9 | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 325.199.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 9 | Kelompok | 2 | 325.199.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | | | | 103.649.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 9 | Orang | 60 | 103.649.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 184.616.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 9 | Kelompok | 69 | 184.616.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | 36.934.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 9 | Unit | 5 | 36.934.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 3.28.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | | | | | | 551.982.000 | | |
| | | | | | | Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani | % | 10 | 551.982.000 | | |
| | | | | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 551.982.000 | | |
| | | | | | | Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya | Unit | 5 | 418.242.000 | | |
| | | 3.28.06.1.01.0002 | | | Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS | | | | 150.610.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS | Dokumen | 10 | 150.610.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.06.1.01.0004 | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | | | | 267.632.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok yang diberdayakan dalam pengelolaan DAS | Kelompok | 5 | 267.632.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS | Dokumen | 2 | 133.740.000 | | |
| | | 3.28.06.1.01.0001 | | | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS | | | | 66.870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan | Dokumen | 1 | 66.870.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.06.1.01.0005 | | | Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS | | | | 66.870.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah lembaga yang dibentuk dan/atau dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS | Unit | 8 | 66.870.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan kualitas udara** | | | | | | | | | **8.127.188.000** | **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan** | |
| | | | | | | Indeks Kualitas Udara | Angka | 85.01 | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | **Menurunnya pencemaran udara** | | | | | | | | **8.127.188.000** | | |
| | | | | | | Indeks SO2 dan NO2 | Angka | 0.3698 | 8.127.188.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | 2.714.985.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya | % | 2.85 | 1.197.361.000 | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | |
| | | | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | | | | | 1.197.361.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penurunan emisi grk di tingkat tapak | tCO2e | 20000 | 1.107.361.000 | SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.03.1.01.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | 1.107.361.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan | Dokumen | 1 | 126.439.000 | SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah lokasi aksi mitigasi/adaptasi perubahan iklim yang teregistrasi | Lokasi | 100 | 980.922.000 | SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu udara emisi | Unit | 100 | 90.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.03.1.01.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran udara | Unit | 135 | 90.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pemantauan kualitas udara | % | 100 | 784.554.000 | Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A | |
| | | | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | | | | | 784.554.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas udara | Dokumen | 1 | 784.554.000 | SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN | |
| | | 2.11.03.1.01.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | 784.554.000 | | |
| | | | | | | Jumlah titik pengujian kualitas udara | sampel | 1150 | 784.554.000 | SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan | % | 100 | 733.070.000 | Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A | |
| | | | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | | | | | 733.070.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan | Dokumen | 1 | 733.070.000 | SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN | |
| | | 2.11.03.1.01.0015 | | | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | | | | 733.070.000 | | |
| | | | | | | Jumlah parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi berdasarkan sistem mutu laboratorium lingkungan | Dokumen | 72 | 356.070.000 | SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah peralatan laboratorium yang terpelihara / terkalibrasi | Unit | 70 | 377.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | | 1.538.667.000 | | |
| | | | | | | Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani | % | 2.02 | 798.752.000 | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | |
| | | | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | | | | | 798.752.000 | | |
| | | | | | | Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani | Ha | 50 | 798.752.000 | SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.04.1.01.0001 | | | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | 94.153.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun / ditetapkan / dievaluasi | Dokumen | 1 | 94.153.000 | SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.11.04.1.01.0004 | | | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | 554.483.000 | | |
| | | | | | | Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi | Ha | 50 | 554.483.000 | SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.11.04.1.01.0006 | | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | 150.116.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Kehati | Orang | 60 | 150.116.000 | SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden | % | 2.6 | 739.915.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | | | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | | | | | 739.915.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pelestarian kehati (VAK/Koleksi) di Kebun Raya Baturraden | Unit | 2 | 739.915.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | |
| | | 2.11.04.1.01.0003 | | | Pengelolaan Kebun Raya | | | | 739.915.000 | | |
| | | | | | | Luas Kebun Raya yang dikelola lingkup Kewenangan Provinsi | Ha | 143.5 | 739.915.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | | 1.904.836.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah | % | 31.43 | 664.471.000 | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | |
| | | | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 664.471.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kab/Kota yang ditingkatnkan kapasitas pengurangan sampah | Kabupaten/Kota | 1 | 664.471.000 | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN | |
| | | 2.11.08.1.01.0005 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | | | | 664.471.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat yang meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait pengurangan sampah | Kelompok | 1 | 664.471.000 | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN | |
| | | | | | | Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya | % | 25 | 206.925.000 | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan | |
| | | | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 206.925.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok) | Unit | 2 | 206.925.000 | SEKSI PENYULUHAN | |
| | | 2.11.08.1.01.0003 | | | Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | | | | 206.925.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat | Orang | 400 | 206.925.000 | SEKSI PENYULUHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya | % | 10.5 | 1.033.440.000 | Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup | |
| | | | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 1.033.440.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliaannya | Unit | 158 | 1.033.440.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.08.1.01.0002 | | | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | | 599.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah peduli lingkungan | Unit | 155 | 599.150.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.11.08.1.01.0005 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | | | | 434.290.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | Unit | 3 | 434.290.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | | | 1.968.700.000 | | |
| | | | | | | Persentase sampah yang tertangani | % | 42 | 1.968.700.000 | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | |
| | | | | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | | | | | 1.968.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sampah tertangani | Ton | 3388861 | 1.968.700.000 | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN | |
| | | 2.11.11.1.01.0003 | | | Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik | Unit | 0 | | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.11.11.1.01.0005 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | | | | 1.968.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan | Dokumen | 1 | 1.968.700.000 | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **188.066.328.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Desa Mandiri** | | | | | | | | | **4.750.000.000** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | |
| | | | | | | Nilai Indeks Desa Mandiri Provinsi Jawa Tengah | % | 0.7318 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | **Meningkatnya Kemandirian Desa di Jawa Tengah** | | | | | | | | **4.750.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase Desa Mandiri di Jawa Tengah | % | 6.16 | 4.750.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | 2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA | | | | | | | | |
| | | | | | | Presentase kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan desa | % | 100 | | Bidang Penataan Desa | |
| | | | | Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam rangka Penataan Desa | Desa | 0 | | SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA | |
| | | 2.13.02.1.01.0003 | | | Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa | Dokumen | 1 | | SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA | OPD Provinsi |
| | | 2.13.03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | | | | | | 675.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP) | % | 6.85 | 675.000.000 | Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa | |
| | | | | Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi | | | | | 675.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kerjasama yang di fasilitasi dalam pelaksanaan Kerjasama Desa | Buah | 1 | 200.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA | |
| | | 2.13.03.1.01.0002 | | | Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama Desa yang Dilaksanakan | Dokumen | 1 | 200.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah pengembangan kerjasama antar kawasan perdesaan di Jawa Tengah yang terfasilitasi | Kws | 1 | 475.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN | |
| | | 2.13.03.1.01.0003 | | | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | 475.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan | Dokumen | 1 | 475.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN | OPD Provinsi |
| | | 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | | | 1.625.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa | % | 100 | 600.000.000 | Bidang Penataan Desa | |
| | | | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi | Kabupaten/ Kota | 35 | 220.000.000 | SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0007 | | | Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Dokumen | 1 | | SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA | OPD Provinsi |
| | | 2.13.04.1.01.0008 | | | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Dokumen | 1 | 220.000.000 | SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Desa di Jawa Tengah yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas Desa | Desa | 15 | 50.000.000 | SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0016 | | | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Desa yang termonitor dalam penyusunan produk hukum desa | Desa | 0 | | SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0003 | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Dokumen | 1 | | SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah dokumen regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa yang difasilitasi dan direkomendasikan | Dokumen | 50 | 330.000.000 | SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0001 | | | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa | | | | 330.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati yang Mengatur Desa | Dokumen | 1 | 330.000.000 | SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa | % | 100 | 1.025.000.000 | Bidang Administrasi Pemerintahan Desa | |
| | | | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | 1.025.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah ajuan dokumen tukar menukar tanah kas Desa yang difasilitasi dan direkomendasi | Dokumen | 50 | 250.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0006 | | | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Aset Desa | Dokumen | 1 | 250.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah anggota BPD yang dilatih dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Orang | 0 | | SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0011 | | | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas anggota BPD dalam manajemen Pemerintahan Desa | Dokumen | 0 | | SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah aparatur Kabupaten dan Kecamatan yang dilatih dalam penguatan manajemen Pemerintahan Desa | Orang | 29 | 25.000.000 | SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0002 | | | Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah aparatur yang dilatih dalam pengelolaan keuangan Desa | Orang | 29 | 50.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0005 | | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Terlaksananya fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana pada Pemerintahan Desa | Kabupaten/Kota | 29 | 500.000.000 | SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0012 | | | Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pembinaan percepatan pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan Desa | Dokumen | 1 | 500.000.000 | SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Desa di Jawa Tengah yang menggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan baik | Desa | 10 | 200.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0018 | | | Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota | | | | 200.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pencatatan data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten | Dokumen | 1 | 200.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA | OPD Provinsi |
| | | 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | | 2.450.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah | % | 8.96 | 525.000.000 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | |
| | | | | Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 525.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BUMDes dengan klasifikasi tumbuh/pemula dan berkembang yang di fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolanya | Unit | 270 | 525.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT | |
| | | 2.13.05.1.01.0005 | | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | 525.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa | Dokumen | 1 | 525.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya | % | 100 | 1.775.000.000 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | |
| | | | | Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.775.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah anggota LPMD/K di Jawa Tengah yang dilatih peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat | Orang | 150 | 225.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT | |
| | | 2.13.05.1.01.0002 | | | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) | Dokumen | 1 | 225.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah anggota Pokjanal Posyandu yang difasilitasi peningkatan kapasitas | Orang | 35 | 50.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT | |
| | | 2.13.05.1.01.0003 | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | 50.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Lembaga Adat/Satgas Pelestari Adat yang ditingkatkan kapasitasnya | Unit | 0 | | SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT | |
| | | 2.13.05.1.01.0001 | | | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat | Dokumen | 1 | | SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Kabupaten/Kota | 35 | 1.500.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT | |
| | | 2.13.05.1.01.0009 | | | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga | Dokumen | 1 | 1.500.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) | % | 100 | 150.000.000 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | |
| | | | | Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Jawa Tengah | Kali | 1 | 100.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT | |
| | | 2.13.05.1.01.0007 | | | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Posyantek yang di fasilitasi revitalisasi peran dan fungsinya dalam pemanfaatan TTG di Jawa Tengah | Unit | 0 | 50.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT | |
| | | 2.13.05.1.01.0006 | | | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT | OPD Provinsi |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **18.535.714.000** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 70 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah** | | | | | | | | **18.105.714.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat Dispermades | Angka | 84.75 | 18.105.714.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 18.105.714.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 18.105.714.000 | SEKRETARIAT | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 14.547.776.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 14.547.776.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14.172.776.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 80 | 14.172.776.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 375.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 1 | 375.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | | | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah | Bulan | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.03.0004 | | | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada PD | Bulan | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 745.438.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 745.438.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Bulan | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 10 | 70.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan tercukupinya penyediaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah | Bulan | 12 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Bulan Tercukupinya kebutuhan perlengkapan pendukung perkantoran | Bulan | 12 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.438.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 10.438.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD | Bulan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | Bulan | 12 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 1 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 4 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.152.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 2.152.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah | Bulan | 12 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 547.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 547.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.575.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Bulan | 12 | 1.575.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 560.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 12 | 560.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 185.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 20 | 185.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 10 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Bulan | 12 | 40.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Bulan | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Bulan | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Bulan | 12 | 250.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bulan | 12 | 35.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah** | | | | | | | | **430.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko Dispermades | Nilai | 3 | 430.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 430.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 430.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 430.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen perencanaan, dan evaluasi yang disusun sesuai peraturan perundangan/jumlah jenis dokumen perencanaan, evaluasi yang disusun | % | 100 | 430.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan Dispermades yang tersusun | Dokumen | 5 | 300.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja Dispermades yang tersusun | Dokumen | 5 | 130.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | | **700.000.000** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Nilai Level Admindukcapil Provinsi Jawa Tengah | Nilai | 4 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | **Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan** | | | | | | | | **700.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTPel, KIA, akta kelahiran dan buku pokok pemakaman) di Jawa Tengah | % | 76 | 700.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penduduk yang memiliki KTP-el | % | 97 | 240.000.000 | Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk | |
| | | | | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan | | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penduduk yang terfasilitasi perekaman KTP-el | % | 98 | 240.000.000 | SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK | |
| | | 2.12.02.1.01.0003 | | | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Provinsi | Dokumen | 1 | 240.000.000 | SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK | OPD Provinsi |
| | | 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98% | % | 97 | 220.000.000 | Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk | |
| | | | | Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi Akta Kelahiran | % | 97 | 220.000.000 | SEKSI BINA APARATUR CATATAN SIPIL | |
| | | 2.12.03.1.01.0002 | | | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala Provinsi | Dokumen | 1 | 220.000.000 | SEKSI BINA APARATUR CATATAN SIPIL | OPD Provinsi |
| | | 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan | % | 16.67 | 240.000.000 | Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk | |
| | | | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Institusi/Lembaga/Badan Hukum yang difasilitasi kerjasama pemanfaatan data kependudukan | % | 100 | 240.000.000 | SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK | |
| | | 2.12.04.1.03.0001 | | | Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala Provinsi | Dokumen | 1 | 240.000.000 | SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK | OPD Provinsi |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **23.985.714.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Perhubungan

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **63.544.745.000** | **Dinas Perhubungan** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 78.28 | | Dinas Perhubungan | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **63.198.145.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 80.25 | 63.198.145.000 | Dinas Perhubungan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 63.198.145.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) | % | 100 | 200.200.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 44.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 44.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 11.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 5.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 17.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 17.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 43.200.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 43.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 43.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 43.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 21 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 20 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) | % | 100 | 112.112.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 5 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 62.112.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 62.112.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 35.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 35.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.612.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.612.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 36.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 2 | 36.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) | % | 100 | 138.840.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 72.840.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 72.840.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 37.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 37.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 9.840.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 9.840.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 24 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 39.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 11 | 39.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 10 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) | % | 100 | 148.200.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 77.200.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 77.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 37.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 37.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 4.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 14.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 14.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 39.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 8 | 39.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 7 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) | % | 100 | 161.900.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 88.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 88.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 38.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 38.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 6.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 22.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 26.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 24 | 26.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 26.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 26.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 16 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 15 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) | % | 100 | 134.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 74.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 74.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 36.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 36.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 24 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 38.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 9 | 38.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 8 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) | % | 100 | 306.000.000 | Balai Transportasi Jawa Tengah | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 5.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 41.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 41.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 10.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 10.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 252.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 7 | 252.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 5 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat) | % | 100 | 61.996.893.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 46.370.662.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 2 | 46.370.662.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 45.580.462.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 300 | 45.580.462.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 720.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 720.200.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 70.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 1.155.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 1.155.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1.155.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 1.155.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 125.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 150 | 105.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 2.145.900.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 2.145.900.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 48.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 48.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 112.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 112.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 40 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1.590.400.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 1.590.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 8 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 11.062.931.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 36 | 11.062.931.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 4.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1.589.225.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 1.589.225.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 9.469.706.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 9.469.706.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.137.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 283 | 1.137.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 687.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 73 | 687.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 24 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 92 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 93 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **346.600.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.2 | 346.600.000 | Dinas Perhubungan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 346.600.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 346.600.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 346.600.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 346.600.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 261.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 9 | 261.600.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 4 | 85.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi** | | | | | | | | | **129.119.076.000** | **Dinas Perhubungan** | |
| | | | | | | Indeks Pelayanan Transportasi | Angka | 6.053 | | Dinas Perhubungan | |
| | **Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah** | | | | | | | | **6.574.474.000** | | |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan | Angka | 16.098 | 6.574.474.000 | Dinas Perhubungan | |
| | | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | 5.267.608.000 | | |
| | | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | Angka | 0.81 | 404.650.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | |
| | | | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | 404.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | Unit | 21596 | 404.650.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | | | | 363.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Laporan | 36 | 363.800.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | 40.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Laporan | 2 | 40.850.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | Angka | 0.81 | 115.950.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | |
| | | | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | 115.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah total kendaraan yang di ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | Unit | 989 | 115.950.000 | KEPALA BALAI | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | | | | 95.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Laporan | 36 | 95.950.000 | KEPALA BALAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Laporan | 2 | 20.000.000 | KEPALA BALAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | Angka | 0.81 | 210.625.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | |
| | | | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | 210.625.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | Unit | 2229 | 210.625.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | | | | 185.625.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Laporan | 36 | 185.625.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Laporan | 2 | 25.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | Angka | 0.81 | 197.800.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | |
| | | | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | 197.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | Unit | 6734 | 197.800.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | | | | 167.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Laporan | 36 | 167.800.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Laporan | 2 | 30.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | Angka | 0.81 | 251.990.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | |
| | | | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | 251.990.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | Unit | 3485 | 251.990.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | | | | 221.990.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Laporan | 36 | 221.990.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Laporan | 2 | 30.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | Angka | 0.81 | 195.500.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | 195.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | Unit | 3998 | 195.500.000 | KEPALA BALAI | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | | | | 165.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Laporan | 36 | 165.500.000 | KEPALA BALAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Laporan | 2 | 30.000.000 | KEPALA BALAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | Angka | 0.98 | 433.440.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | |
| | | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | | 433.440.000 | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | Angka | 0.22 | 433.440.000 | SEKSI LALU LINTAS | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | | | | 198.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | Laporan | 78 | 198.480.000 | SEKSI LALU LINTAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | | | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | 234.960.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan | Unit | 2 | 234.960.000 | SEKSI LALU LINTAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | Angka | 0.97 | 330.300.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | |
| | | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | | 330.300.000 | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | Angka | 0.13 | 330.300.000 | KEPALA BALAI | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | | | | 121.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | Laporan | 46 | 121.680.000 | KEPALA BALAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | | | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | 208.620.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan | Unit | 2 | 208.620.000 | KEPALA BALAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | Angka | 0.97 | 332.253.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | |
| | | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | | 332.253.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | Angka | 0.06 | 332.253.000 | SEKSI LALU LINTAS | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | | | | 145.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | Laporan | 56 | 145.680.000 | SEKSI LALU LINTAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | | | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | 186.573.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan | Unit | 1 | 186.573.000 | SEKSI LALU LINTAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | Angka | 0.97 | 466.840.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | |
| | | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | | 466.840.000 | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | Angka | 0.07 | 466.840.000 | SEKSI LALU LINTAS | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | | | | 145.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | Laporan | 56 | 145.680.000 | SEKSI LALU LINTAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | | | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | 321.160.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan | Unit | 1 | 321.160.000 | SEKSI LALU LINTAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | Angka | 0.97 | 399.040.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | |
| | | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | | 399.040.000 | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | Angka | 0.2 | 399.040.000 | SEKSI LALU LINTAS | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | | | | 136.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | Laporan | 52 | 136.080.000 | SEKSI LALU LINTAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | | | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | 262.960.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan | Unit | 5 | 262.960.000 | SEKSI LALU LINTAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | Angka | 0.98 | 335.700.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | |
| | | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | | 335.700.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | Angka | 0.25 | 335.700.000 | KEPALA BALAI | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | | | | 150.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | Laporan | 58 | 150.480.000 | KEPALA BALAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | | | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | 185.220.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan | Unit | 1 | 185.220.000 | KEPALA BALAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah | Angka | 0.981 | 235.000.000 | Bidang Lalu Lintas | |
| | | | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | 235.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah | Unit | 438363 | 235.000.000 | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0004 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi | Laporan | 135 | 200.000.000 | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Laporan | 66 | 35.000.000 | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan | Angka | 0.38 | 1.358.520.000 | Bidang Lalu Lintas | |
| | | | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | | | | | 1.167.200.000 | | |
| | | | | | | Rasio perlengkapan jalan terpasang | Angka | 0.63 | 1.167.200.000 | SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN | |
| | | 2.15.02.1.02.0002 | | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | | | | 1.167.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia | Unit | 154 | 1.167.200.000 | SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | | 116.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng | Kabupaten/Kota | 15 | 46.320.000 | SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN | |
| | | 2.15.02.1.05.0003 | | | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | 46.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | Dokumen | 30 | 46.320.000 | SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ | Dokumen | 12 | 70.000.000 | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | |
| | | 2.15.02.1.05.0005 | | | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi | Laporan | 6 | 70.000.000 | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi | | | | | 75.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi / persetujuan andalalin di Jalan provinsi | Dokumen | 329 | 75.000.000 | SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN | |
| | | 2.15.02.1.06.0006 | | | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan | Dokumen | 58 | 75.000.000 | SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai | Angka | 0.2 | 40.000.000 | Bidang Pelayaran | |
| | | | | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio fasilitas keselamatan penyeberangan sungai terpenuhi | Angka | 0.11 | 40.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | |
| | | 2.15.03.1.10.0009 | | | Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia Provinsi | Unit | 28 | 40.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.15.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | | | | | | 1.266.866.000 | | |
| | | | | | | Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan | Angka | 0.04 | 1.266.866.000 | Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian | |
| | | | | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian | | | | | 1.266.866.000 | | |
| | | | | | | Rasio realisasi rencana induk perkeretaapian | Angka | 0.341 | 1.266.866.000 | SEKSI PERKERETAAPIAN | |
| | | 2.15.05.1.01.0002 | | | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian | Dokumen | 0 | | SEKSI PERKERETAAPIAN | OPD Provinsi |
| | | 2.15.05.1.01.0003 | | | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian | | | | 1.266.866.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian | Laporan | 3 | 1.266.866.000 | SEKSI PERKERETAAPIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya konektivitas provinsi** | | | | | | | | **7.039.578.000** | | |
| | | | | | | Rasio konektivitas provinsi | Angka | 0.38 | 7.039.578.000 | Dinas Perhubungan | |
| | | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | 6.620.478.000 | | |
| | | | | | | Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis | Angka | 0.5 | 80.000.000 | Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian | |
| | | | | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi | | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio implementasi dokumen RIJLLAJ | Angka | 0.47 | 80.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI | |
| | | 2.15.02.1.01.0007 | | | Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi | Laporan | 2 | 80.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | Angka | 0.2 | 160.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | Angka | 0.25 | 160.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | 160.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Unit | 1 | 160.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | Angka | 0.01 | 50.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | |
| | | | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | Angka | 0.25 | 50.000.000 | KEPALA BALAI | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Unit | 1 | 50.000.000 | KEPALA BALAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | Angka | 0.24 | 100.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B  pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | Angka | 0.25 | 100.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Unit | 1 | 100.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | Angka | 0.23 | 50.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | Angka | 0.25 | 50.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Unit | 1 | 50.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | Angka | 0.21 | 160.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | Angka | 0.25 | 160.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Unit | 1 | 160.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | Angka | 0.17 | 50.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | |
| | | | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | Angka | 0.25 | 50.000.000 | KEPALA BALAI | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Unit | 1 | 50.000.000 | KEPALA BALAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | | | | | Rasio konektivitas perkotaan | Angka | 0.481 | 874.690.000 | Balai Transportasi Jawa Tengah | |
| | | | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | | | | | 874.690.000 | | |
| | | | | | | Rasio Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi | Angka | 0.61 | 874.690.000 | SEKSI SARANA DAN PRASARANA | |
| | | 2.15.02.1.02.0002 | | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | | | | 874.690.000 | | |
| | | | | | | Jumlah  Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia | Unit | 6 | 874.690.000 | SEKSI SARANA DAN PRASARANA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Rasio pemanfatan terminal | Angka | 0.218 | 4.605.000.000 | Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian | |
| | | | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | | | | | 4.605.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio terminal tipe B dalam kondisi baik | Angka | 0.37 | 4.605.000.000 | SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN | |
| | | 2.15.02.1.03.0001 | | | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B | Dokumen | 1 | 105.000.000 | SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 2.15.02.1.03.0007 | | | Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Unit | 1 | 1.000.000.000 | SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | 2.15.02.1.03.0010 | | | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | | | | 3.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun | Unit | 1 | 3.500.000.000 | SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN | OPD Provinsi ; PURWOREJO --> KUTOARJO --> KELURAHAN KUTOARJO |
| | | | | | | Rasio trayek angkutan jalan | Angka | 0.51 | 490.788.000 | Bidang Angkutan Jalan | |
| | | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio angkutan barang yang berijin | Angka | 0.3 | 40.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | |
| | | 2.15.02.1.08.0003 | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi<br>D | Unit | 216 | 40.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 160.788.000 | | |
| | | | | | | Rasio kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Angka | 0.71 | 160.788.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN | |
| | | 2.15.02.1.09.0001 | | | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi | | | | 90.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan kewenangan provinsi | Dokumen | 1 | 90.500.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.15.02.1.09.0002 | | | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi | | | | 70.288.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan provinsi | Dokumen | 7 | 70.288.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 115.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan | Angka | 0.04 | 115.000.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN | |
| | | 2.15.02.1.11.0001 | | | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi | | | | 80.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi D | Dokumen | 1 | 80.000.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | 2.15.02.1.11.0002 | | | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi | Dokumen | 1 | 35.000.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin | Angka | 0.55 | 100.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | |
| | | 2.15.02.1.13.0001 | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan | Unit | 22 | 100.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio angkutan taksi terpenuhi | Angka | 0.43 | 35.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | |
| | | 2.15.02.1.14.0004 | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan | Unit | 76 | 35.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio trayek yang ditetapkan pemukhtahiran tarif | Angka | 1 | 40.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | |
| | | 2.15.02.1.15.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Laporan | 1 | 40.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | | | 419.100.000 | | |
| | | | | | | Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP | Angka | 0.31 | 419.100.000 | Bidang Pelayaran | |
| | | | | Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam | | | | | 60.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Daerah Provinsi yang Bersangkutan | | | | | | | |
| | | | | | | Rasio dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasrkan tingkatannya | Angka | 0.2 | 60.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | |
| | | 2.15.03.1.03.0001 | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan | Unit | 2 | 60.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin | Angka | 0.12 | 70.000.000 | SEKSI ANGKUTAN LAUT | |
| | | 2.15.03.1.06.0001 | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ElektronikDO : | Dokumen | 8 | 70.000.000 | SEKSI ANGKUTAN LAUT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | | | | | 79.100.000 | | |
| | | | | | | Berth occupancy ratio | Angka | 0.44 | 79.100.000 | SEKSI KEPELABUHANAN | |
| | | 2.15.03.1.09.0001 | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | | | | 79.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian perizinan | Unit | 8 | 79.100.000 | SEKSI KEPELABUHANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.15.03.1.09.0003 | | | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara | Unit | 0 | | SEKSI KEPELABUHANAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 210.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi | Angka | 0.48 | 210.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.15.03.1.10.0001 | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 210.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan | Laporan | 1 | 210.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 2.15.03.1.10.0002 | | | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun | Unit | 0 | | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | OPD Provinsi |
| | | 2.15.03.1.10.0003 | | | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaanara | Unit | 0 | | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum** | | | | | | | | **115.505.024.000** | | |
| | | | | | | On Time Performance layanan transportasi | % | 83.22 | 115.505.024.000 | Dinas Perhubungan | |
| | | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | 115.505.024.000 | | |
| | | | | | | Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum | % | 65.38 | 924.955.000 | Bidang Angkutan Jalan | |
| | | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 924.955.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani | Orang | 27014404 | 924.955.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | |
| | | 2.15.02.1.08.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi | | | | 924.955.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | Laporan | 3 | 924.955.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase perpindahan moda angkutan umum | % | 51.72 | 114.580.069.000 | Balai Transportasi Jawa Tengah | |
| | | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 114.580.069.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan | Orang | 6810676 | 114.580.069.000 | SEKSI OPERASIONAL | |
| | | 2.15.02.1.08.0003 | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 114.580.069.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Unit | 115 | 114.580.069.000 | SEKSI OPERASIONAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **192.663.821.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan** | | | | | | | | | **41.223.881.000** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** | |
| | | | | | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Angka | 3.07 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | **Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Digital Jawa Tengah** | | | | | | | | **2.000.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) | Angka | 636 | 2.000.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | | 2.000.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80% | % | 25 | 2.000.000.000 | Bidang Persandian dan Keamanan Informasi | |
| | | | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 1.040.000.000 | | |
| | | | | | | Meningkatnya Ketersediaan Layanan yang Menerapkan Prinsip SMKI dan sumber daya pendukung yang memadai | % | 20 | 1.040.000.000 | SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI | |
| | | 2.21.02.1.01.0001 | | | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 221.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah | Dokumen | 1 | 221.200.000 | SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI | OPD Provinsi |
| | | 2.21.02.1.01.0002 | | | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 283.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM Pengelola Persandian dan Keamanan Informasi yang ditingkatkan kapasitasnya | Orang | 100 | 283.500.000 | SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI | OPD Provinsi |
| | | 2.21.02.1.01.0003 | | | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | 169.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi | Laporan | 20 | 169.900.000 | SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI | OPD Provinsi |
| | | 2.21.02.1.01.0004 | | | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 365.400.000 | | |
| | | | | | | 80% Perangkat Daerah Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | % | 20 | 365.400.000 | SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI | OPD Provinsi |
| | | | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi | | | | | 960.000.000 | | |
| | | | | | | Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Jaring Komunkasi Sandi | % | 25 | 960.000.000 | SEKSI SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH | |
| | | 2.21.02.1.02.0001 | | | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 960.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik melalui Jaring Komunikasi Sandi | % | 30 | 960.000.000 | SEKSI SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH | OPD Provinsi |
| | **Meningkatnya Layanan dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah** | | | | | | | | **37.966.552.000** | | |
| | | | | | | Indeks Domain Layanan SPBE | Angka | 3.62 | 9.252.779.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | | | 9.252.779.000 | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi | % | 72 | 9.252.779.000 | Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | |
| | | | | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 5.490.000.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya Domain dan SubDomain yang Aktif | Angka | 1 | 5.490.000.000 | SEKSI INTERNET DAN INTRANET | |
| | | 2.16.03.1.01.0001 | | | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | Buah | 1 | 15.000.000 | SEKSI INTERNET DAN INTRANET | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.16.03.1.01.0002 | | | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Dokumen | 1 | 75.000.000 | SEKSI INTERNET DAN INTRANET | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.16.03.1.01.0003 | | | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | | | | 5.400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapasitas Bandwidth(Mbps) | Angka | 10000 | 5.400.000.000 | SEKSI INTERNET DAN INTRANET | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 3.762.779.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi layanan Pusat Data | OPD | 41 | 3.273.279.000 | SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI | |
| | | 2.16.03.1.02.0003 | | | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | | | | 3.273.279.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Server pada Pusat Data yang digunakan untuk sistem layanan terintegrasi | Buah | 24 | 3.273.279.000 | SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.16.03.1.02.0008 | | | Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah VPS atau Cloud Server yang terintegrasi dengan Pusat Data | Buah | 135 | | SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah regulasi/SOP layanan Infrastruktur TIK | Dokumen | 1 | 489.500.000 | SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI | |
| | | 2.16.03.1.02.0006 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | | | | 289.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah regulasi/SOP yang tersosialisasikan | Dokumen | 1 | 289.500.000 | SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.16.03.1.02.0010 | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM Pengelola Layanan Infrastruktur TIK | Orang | 8 | 200.000.000 | SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Indeks Domain Tata Kelola SPBE | Angka | 2.8 | 4.190.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | | | 4.190.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi | % | 15 | 4.190.000.000 | Bidang E-Government | |
| | | | | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 4.190.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Aplikasi Umum yang Terkelola | % | 24 | 3.190.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI | |
| | | 2.16.03.1.02.0007 | | | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | 3.190.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan atau Dikelola | Angka | 10 | 3.190.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI | |
| | | | | | | Persentase Dokumen Tata Kelola e-Government yang diterbitkan | % | 30 | 700.000.000 | SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.16.03.1.02.0001 | | | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Tata Kelola Teknologi Informasi yang Diterbitkan | Angka | 5 | 700.000.000 | SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT | |
| | | | | | | Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem e-Government yang terintegrasi | % | 15 | 300.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT | |
| | | 2.16.03.1.02.0009 | | | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah OPD atau Instansi yang mengimplementasikan inisiasi Smart Province sesuai Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas | Angka | 10 | 300.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT | |
| | | | | | | Tingkat Pengelolaan Informasi Publik yang Handal, Tepat, Cepat dan Terpercaya | % | 100 | 24.523.773.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | | 24.523.773.000 | | |
| | | | | | | Nilai keterbukaan informasi publik | Angka | 31 | 2.383.000.000 | Bidang Statistik | |
| | | | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 2.383.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Badan Publik yang Terbuka (Informatif) | % | 76 | 2.383.000.000 | SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0006 | | | Pelayanan Informasi Publik | | | | 583.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Daftar Informasi Publik Yang Dipublikasikan Badan Publik | Dokumen | 82 | 583.000.000 | SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.16.02.1.01.0011 | | | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | | | | 1.800.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi | % | 86 | 1.800.000.000 | SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Nilai survey kepuasan komunikasi publik | Angka | 78 | 22.140.773.000 | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | |
| | | | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 22.140.773.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan | Kelompok | 60 | 6.100.000.000 | SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0010 | | | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Komunitas yang diberdayakan | Kelompok | 20 | 350.000.000 | SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0012 | | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | | | | 5.750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah komunitas yang dikoordinasikan | Kelompok | 40 | 5.750.000.000 | SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | | | | | Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan | Konten | 170 | 10.120.000.000 | SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0004 | | | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | | | | 2.015.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan | Konten | 25 | 2.015.500.000 | SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0005 | | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | 4.696.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Internal | Konten | 65 | 4.696.600.000 | SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0007 | | | Layanan Hubungan Media | | | | 823.910.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Eksternal | Konten | 40 | 823.910.000 | SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0008 | | | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | | | | 2.583.990.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Konten yang Dikerjasamakan Dengan Pemangku Kepentingan | Konten | 40 | 2.583.990.000 | SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum | Dokumen | 173 | 5.920.773.000 | SEKSI OPINI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0002 | | | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | | | | 751.327.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi analisis pendapat umum | Dokumen | 80 | 751.327.000 | SEKSI OPINI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0003 | | | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | | | | 1.283.816.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Analisis Berita | Dokumen | 90 | 1.283.816.000 | SEKSI OPINI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0009 | | | Manajemen Komunikasi Krisis | | | | 3.885.630.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi analisis agenda publik | Dokumen | 3 | 3.885.630.000 | SEKSI OPINI PUBLIK | |
| | **Meningkatnya Pelayanan Data Statistik Sektoral dan Geospasial** | | | | | | | | **1.257.329.000** | | |
| | | | | | | Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah | % | 32 | 1.257.329.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | | 1.257.329.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah | % | 24 | 1.257.329.000 | Bidang Statistik | |
| | | | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | | | | | 1.257.329.000 | | |
| | | | | | | Persentase Data Statistik dan Geospasial yang Tervalidasi | % | 30 | 502.000.000 | SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 2.20.02.1.01.0002 | | | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | | | | 502.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM yang mampu melakukan pengolahan data statistik dan geospasial | Angka | 190 | 502.000.000 | SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR | OPD Provinsi |
| | | 2.20.02.1.01.000 | | | Pengembangan Infrastruktur | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Infrastruktur Statistikyang Disediakan/Dikembangkan | Angka | 0 | | SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Big Data | % | 24 | 755.329.000 | SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | |
| | | 2.20.02.1.01.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | | | | 197.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data Statistik Sektoral dan Geospasial yang terkumpul melalui Portal Data | Angka | 50 | 197.500.000 | SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.20.02.1.01.0003 | | | Membangun Metadata Statistik Sektoral | | | | 253.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Metadata Statistik Sektoral dan Gespasial yang Dihimpun | Angka | 40 | 253.000.000 | SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.20.02.1.01.0004 | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah PD yang terlibat dalam pengukuran pembangunanstatistik (IPS) | OPD | 0 | | SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | OPD Provinsi |
| | | 2.20.02.1.01.0006 | | | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | | | | 304.829.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Analisis Statistik Sektoral dan Geospasial | Angka | 4 | 304.829.000 | SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **27.186.611.000** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 68 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **26.536.611.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 78 | 26.536.611.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 26.536.611.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 26.536.611.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 20.486.611.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 20.486.611.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 20.004.611.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 115 | 20.004.611.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 362.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 362.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0004 | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0006 | | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan | Dokumen | 2 | 40.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 18 | 40.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 215.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selama satu tahun anggaran | Dokumen | 3 | 215.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0001 | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 185.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 185.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah, termasuk dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0007 | | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan selama satu tahun anggaran | % | 100 | 110.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 10 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 891.200.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran | % | 100 | 891.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah barang peralatan rumah tangga yang disediakan | Buah | 452 | 40.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 2 | 40.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 4.830.000 | | |
| | | | | | | jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 20 | 4.830.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 99.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 75 | 99.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 511.870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 100 | 511.870.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah yang disediakan sebagai penunjang urusan pemerintah daerah, selama satu tahun anggaran | Unit | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3.930.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun oleh perangkat daerah, selama satu tahun anggaran | Laporan | 4 | 3.930.800.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1.261.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 1.261.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 19.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 19.800.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.640.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 5 | 2.640.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 873.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara, selama satu tahun anggaran | Unit | 239 | 873.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 320.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 20 | 320.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 50 | 3.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 410.000.000 | | |
| | | | | | | umlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 410.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 130.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **650.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3 | 650.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 3 | 650.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 650.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.000 1 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 5 | 450.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.000 7 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 2 | 200.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **68.410.492.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB** | | | | | | | | | **33.396.589.000** | | |
| | | | | | | Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB | % | 12.53 | | | |
| | **Meningkatnya Koperasi Sehat Jawa Tengah** | | | | | | | | **2.500.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah | % | 0.29 | 2.500.000.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| | | 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | | 2.500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase koperasi berkualitas | % | 25.02 | 2.500.000.000 | Bidang Pengawasan | |
| | | | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 1.350.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Koperasi Provinsi yang sudah diperiksa | % | 100 | 1.350.000.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 2.17.03.1.01.0003 | | | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | 1.350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | Unit | 140 | 1.350.000.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 1.150.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Koperasi Simpan Pinjam Provinsi yang sudah diperiksa | % | 100 | 1.150.000.000 | SEKSI PENILAIAN KESEHATAN | |
| | | 2.17.03.1.02.0002 | | | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 1.150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | Unit | 400 | 1.150.000.000 | SEKSI PENILAIAN KESEHATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya Omzet Koperasi dan UMKM Jawa Tengah** | | | | | | | | **30.896.589.000** | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah | % | 7.16 | 30.896.589.000 | | |
| | | 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | | 6.513.853.000 | | |
| | | | | | | Persentase SDM koperasi yang berkualitas | % | 10 | 6.513.853.000 | Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A. | |
| | | | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 6.513.853.000 | | |
| | | | | | | Persentase SDM Koperasi yang meningkat pengetahuannya | % | 89 | 6.513.853.000 | SEKSI PENYELENGGARA | |
| | | 2.17.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | 6.513.853.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | Orang | 1350 | 6.513.853.000 | SEKSI PENYELENGGARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | | | 8.901.787.000 | | |
| | | | | | | Persentase koperasi provinsi produktif | % | 48.09 | 8.901.787.000 | Bidang Kelembagaan | |
| | | | | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 8.901.787.000 | | |
| | | | | | | Persentase Jumlah Koperasi Provinsi yang mengalami peningkatan usahanya | % | 36 | 2.166.901.000 | SEKSI TATALAKSANA | |
| | | 2.17.06.1.01.0002 | | | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | | | | 1.933.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah,Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Unit | 249 | 1.933.550.000 | SEKSI TATALAKSANA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 2.17.06.1.01.0006 | | | Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 233.351.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya | Unit | 10 | 233.351.000 | SEKSI TATALAKSANA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 2.17.06.1.01.0008 | | | Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya | Unit | | | SEKSI TATALAKSANA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Presentase Koperasi Provinsi yang mengalami penguatan manajemen dan kelembagaannya | % | 26.5 | 6.734.886.000 | SEKSI ORGANISASI | |
| | | 2.17.06.1.01.0004 | | | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | | | | 494.405.000 | | |
| | | | | | | Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan | Kelompok | 10 | 494.405.000 | SEKSI ORGANISASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 2.17.06.1.01.0007 | | | Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 444.788.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya | Unit | 100 | 444.788.000 | SEKSI ORGANISASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 2.17.06.1.01.0009 | | | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 5.795.693.000 | | |
| | | | | | | Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan | Unit | 150 | 5.795.693.000 | SEKSI ORGANISASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | | 9.072.340.000 | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan wirausaha baru | % | 23 | 1.350.000.000 | Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A. | |
| | | | | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | | 1.350.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase SDM UMKM dan Wirausaha yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan usahanya | % | 95.41 | 1.350.000.000 | SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.17.07.1.01.0002 | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | | | | 1.350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | Orang | 1050 | 1.350.000.000 | SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase usaha mikro mandiri | % | 81.2 | 7.722.340.000 | | |
| | | | | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | | 7.722.340.000 | | |
| | | | | | | Persentase Usaha Mikro yang meningkat kapasitas usahanya | % | 93.22 | 6.060.520.000 | | |
| | | 2.17.07.1.01.0001 | | | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | | | | 1.058.940.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Unit | 240 | 1.058.940.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 2.17.07.1.01.0010 | | | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil | | | | 149.791.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi | Unit | 30 | 149.791.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 2.17.07.1.01.0011 | | | Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha | | | | 3.252.295.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi | Unit | 500 | 3.252.295.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 2.17.07.1.01.0012 | | | Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil | | | | 1.599.494.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi | Unit | 730 | 1.599.494.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase Usaha Mikro yang meningkat pembiayaannya | % | 93.81 | 1.661.820.000 | | |
| | | 2.17.07.1.01.0007 | | | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | | | 1.661.820.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi | Unit | 660 | 1.661.820.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | | 6.408.609.000 | | |
| | | | | | | Persentase UMKM siap bermitra | % | 21.06 | 6.408.609.000 | | |
| | | | | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | | | | | 6.408.609.000 | | |
| | | | | | | Persentase UMKM yang difasilitasi kemitraannya | % | | 543.760.000 | | |
| | | 2.17.08.1.01.0001 | | | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | | 543.760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar | Orang | 70 | 543.760.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase Usaha Kecil yang meningkat Produksi, Pengolahan, Pemasaran, Jaringan Usaha, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologinya | % | 25 | 5.864.849.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.17.08.1.01.0001 | | | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | | 3.068.704.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia,Serta Desain dan Teknologi | Unit | 385 | 3.068.704.000 | SEKSI PEMASARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.17.08.1.01.0002 | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM | | | | 234.859.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum | Orang | 200 | 234.859.000 | SEKSI PEMASARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.17.08.1.01.0003 | | | Pengembangan Usaha Kecil | | | | 2.561.286.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi | Unit | 150 | 2.561.286.000 | SEKSI PEMASARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **29.442.181.000** | **Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 83 | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **28.442.181.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 89 | 28.442.181.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 28.442.181.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 4.577.280.000 | Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A. | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 440.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 440.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 65.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 145.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 145.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 80.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 46 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 2 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 5 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 6 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3.587.180.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 48 | 3.587.180.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 883.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 883.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.657.580.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 2.657.580.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 470.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 81 | 470.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 4 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 18.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 2 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 15 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 302.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 302.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 75.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 50 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 23.864.901.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 17.154.447.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 38 | 17.154.447.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 16.289.447.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 7 | 16.289.447.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 495.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 495.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 155.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 12 | 155.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 12 | 40.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 175.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 110.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 110.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 12 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 158.070.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 158.070.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 50 | 35.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | | | | 73.070.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Paket | 3 | 73.070.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 2.496.240.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 2.496.240.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 82.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 82.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 85.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 230.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 230.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 54.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 54.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 12.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1.708.240.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 1.708.240.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 435.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 39 | 435.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 341.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 30 | 341.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 2 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 69.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 69.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.892.144.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 48 | 2.892.144.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 700.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.067.144.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 2.067.144.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 619.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 133 | 619.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 25 | 55.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 25 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 25 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 50 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 95.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 95.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 94.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 94.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.000.000.000** | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 80 | 1.000.000.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | | 1.000.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 540.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 3 | 540.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 460.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 4 | 460.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **62.838.770.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **18.793.728.000** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 83 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **18.489.381.000** | | |
| | | | | | | Nilai Kepuasan Masyarakat | Angka | 80 | 18.489.381.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 18.489.381.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 18.489.381.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 15.271.246.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 15.271.246.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14.922.706.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 86 | 14.922.706.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 348.540.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 348.540.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 85.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 85.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 85.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 85.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | 49.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 1 | 49.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 2 | 6.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 50 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 750.951.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 750.951.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 45.131.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 45.131.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 110.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 71.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 71.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 70.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 8.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 70.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 279.820.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 279.820.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 10.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 2 | 10.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 2 | 10.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.021.184.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 2.021.184.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 642.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 642.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 40.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.323.684.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 1.323.684.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 265.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 205 | 265.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 95.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 28 | 95.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 40 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 135 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Perangkat Daerah** | | | | | | | | **304.347.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3 | 304.347.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 304.347.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 304.347.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 304.347.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 304.347.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 158.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 4 | 158.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 146.347.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 4 | 146.347.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| **Meningkatkan pertumbuhan penanaman modal** | | | | | | | | | **5.489.128.000** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | |
| | | | | | | Pertumbuhan nilai penanaman modal | % | 4 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | **Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan** | | | | | | | | **2.173.910.000** | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 90 | 2.173.910.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | | 1.649.910.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan standar pelayanan | % | 100 | 397.140.000 | Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan | |
| | | | | Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 397.140.000 | | |
| | | | | | | Persentase standar pelayanan sesuai ISO | % | 80 | 163.101.000 | SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN | |
| | | 2.18.04.1.01.0008 | | | Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | 163.101.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan Perizinan | Dokumen | 1 | 123.101.000 | SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen ISO yang diterapkan | Dokumen | 1 | 40.000.000 | SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN | |
| | | | | | | Presentase analisis pengembangan sarana prasarana layanan | % | 100 | 234.039.000 | SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN | |
| | | 2.18.04.1.01.0008 | | | Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | 234.039.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis pengembangan sarana prasarana layanan yang disusun | Orang | 1 | 204.039.000 | SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN | |
| | | | | | | Jumlah dokumen evaluasi kinerja aparatur pelayanan | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat | % | 100 | 376.032.000 | Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan | |
| | | | | Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 376.032.000 | | |
| | | | | | | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | % | 100 | 376.032.000 | SEKSI PENANGANAN PENGADUAN | |
| | | 2.18.04.1.01.0008 | | | Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | 376.032.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelayanan fasilitasi penyelesaian pengaduan | Kali | 60 | 55.120.000 | SEKSI PENANGANAN PENGADUAN | |
| | | | | | | Jumlah pelayanan informasi perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat | Kali | 550 | 320.912.000 | SEKSI PENANGANAN PENGADUAN | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan | % | 90 | 876.738.000 | Bidang Pelayanan Perizinan | |
| | | | | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 876.738.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan | Dokumen | 1000 | 294.060.000 | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN | |
| | | 2.18.04.1.02.0007 | | | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | 263.380.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan | Unit | 700 | 263.380.000 | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN | |
| | | 2.18.04.1.02.0008 | | | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | 30.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan | Kali | 2 | 30.680.000 | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN | |
| | | | | | | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan | Dokumen | 1000 | 385.940.000 | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN | |
| | | 2.18.04.1.02.0007 | | | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | 358.378.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan | Unit | 700 | 358.378.000 | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN | |
| | | 2.18.04.1.02.0008 | | | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | 27.562.000 | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan | Kali | 2 | 27.562.000 | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN | |
| | | | | | | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian | Dokumen | 1000 | 196.738.000 | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN | |
| | | 2.18.04.1.02.0007 | | | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | 170.378.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian | Unit | 650 | 170.378.000 | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN | |
| | | 2.18.04.1.02.0008 | | | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | 26.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang perekonomian | Kali | 2 | 26.360.000 | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN | |
| | | 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | | | 524.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan | % | 10 | 524.000.000 | Bidang Pengelolaan Data dan Informasi | |
| | | | | Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 524.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aplikasi yang dikembangkan | Unit | 1 | 355.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | |
| | | 2.18.06.1.01.0002 | | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | 355.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis pengembangan aplikasi | Dokumen | 1 | 355.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | |
| | | | | | | Persentase data dan informasi penanaman modal yang dipublikasikan | % | 100 | 169.000.000 | SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI | |
| | | 2.18.06.1.01.0002 | | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | 169.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis data dan informasi penanaman modal | Dokumen | 4 | 169.000.000 | SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI | |
| | **Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN** | | | | | | | | **3.315.218.000** | | |
| | | | | | | Persentase realisasi PMA dan PMDN | % | 100 | 3.315.218.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | | 705.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan | % | 50 | 705.000.000 | Bidang Perencanaan dan Pengembangan | |
| | | | | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 310.640.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal yang disusun | Dokumen | 1 | 310.640.000 | SEKSI PERENCANAAN | |
| | | 2.18.02.1.01.0001 | | | Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | 310.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kajian Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang disusun | Dokumen | 1 | 310.640.000 | SEKSI PERENCANAAN | |
| | | | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi | | | | | 394.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kajian IPRO Pengembangan Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang dipromosikan | Dokumen | 1 | 394.360.000 | SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEWILAYAHAN | |
| | | 2.18.02.1.02.0005 | | | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi | | | | 394.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kajian IPRO Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang disusun | Dokumen | 1 | 394.360.000 | SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEWILAYAHAN | |
| | | 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | | 1.100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan | % | 50 | 180.000.000 | Bidang Promosi PM | |
| | | | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kemitraan usaha yang dihasilkan | Dokumen | 6 | 180.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA | |
| | | 2.18.03.1.01.0002 | | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi kemitraan usaha | Kali | 12 | 180.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA | |
| | | | | | | Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN | % | 46 | 920.000.000 | Bidang Promosi PM | |
| | | | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 920.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan | Dokumen | 30 | 765.000.000 | SEKSI PROMOSI | |
| | | 2.18.03.1.01.0002 | | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | | | | 707.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah promosi penanaman modal | Kali | 1 | 707.500.000 | SEKSI PROMOSI | |
| | | 2.18.03.1.01.0003 | | | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | | | | 57.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun | Dokumen | 1 | 57.500.000 | SEKSI PROMOSI | |
| | | | | | | Jumlah kepeminatan PMA/PMDN yang dilakukan pengawalan | Dokumen | 30 | 155.000.000 | SEKSI PEMBINAAN | |
| | | 2.18.03.1.01.0002 | | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | | | | 155.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi dan/ atau monitoring kepeminatan PMA/PMDN | Kali | 24 | 155.000.000 | SEKSI PEMBINAAN | |
| | | 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | | 1.510.218.000 | | |
| | | | | | | Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui | % | 20 | 1.510.218.000 | Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM | |
| | | | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 1.510.218.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disetujui | Unit | 20000 | 161.470.000 | SEKSI MONITORING DAN EVALUASI | |
| | | 2.18.05.1.01.0005 | | | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | 161.470.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemantauan Penanaman Modal | Unit | 2000 | 161.470.000 | SEKSI MONITORING DAN EVALUASI | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha dan/atau aparatur yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal | Orang | 500 | 728.637.000 | SEKSI PENGENDALIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.18.05.1.01.0006 | | | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | 728.637.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pembinaan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kali | 10 | 728.637.000 | SEKSI PENGENDALIAN | |
| | | | | | | Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan | Unit | 150 | 450.000.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 2.18.05.1.01.0004 | | | Pengawasan Penanaman Modal | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pengawasan kepatuhan ketentuan penanaman modal | Kali | 75 | 450.000.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | | | | | Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi | % | 75 | 170.111.000 | SEKSI PENGENDALIAN | |
| | | 2.18.05.1.01.0006 | | | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | 170.111.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal | Dokumen | 10 | 170.111.000 | SEKSI PENGENDALIAN | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **24.282.856.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **48.708.773.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 79.31 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **47.796.524.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 75 | 47.796.524.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 47.796.524.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 42.190.568.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 27.628.568.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 27.628.568.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 26.578.568.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 170 | 26.578.568.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.050.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 1.050.000.000 | | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 350.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 350.000.000 | | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 130.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 30 | 30.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 70 | 50.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Orang | 30 | 50.000.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.957.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.957.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 100.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 150.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 100.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 150.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 100.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 12.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 200.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 1.000.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 20.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Dokumen | 1 | 125.000.000 | | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 50.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Unit | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 2 | 50.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 10.020.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 10.020.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 20.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1.250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 1.250.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 150.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 8.600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 8.600.000.000 | | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.055.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 2.055.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 12 | 120.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 12 | 250.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 12 | 35.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 12 | 150.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 12 | 100.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1.300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 12 | 1.300.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 12 | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | | 5.605.956.000 | | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | 125.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 125.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 125.000.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 190.956.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | | 190.956.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 40.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 30.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 3.912.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 3.912.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 6.444.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 6.444.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 10.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 15.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 15.600.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 85.000.000 | | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | | 300.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 3 | 150.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 2 | 150.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3.298.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | | 3.298.600.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 10.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 2.100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 2.100.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 50.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.138.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 1.138.600.000 | | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.691.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | | 1.691.400.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 1 | 30.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 100.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | | | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1.561.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 1.561.400.000 | | |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **912.249.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.01 | 912.249.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 912.249.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 912.249.000 | | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 912.249.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 912.249.000 | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 5 | 650.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 262.249.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 2 | 262.249.000 | | |
| **Meningkatkan Pembangunan Olahraga** | | | | | | | | | **196.062.000.000** | | |
| | | | | | | Sport Development Index (SDI) | % | 0.42 | | | |
| | **Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional kejuaraan Multievent** | | | | | | | | **194.462.000.000** | | |
| | | | | | | Peringkat nasional pada kejuaraan multievent | Peringkat | 4 | 194.462.000.000 | | |
| | | 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | | | 194.462.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi | Orang | 50 | 14.950.000.000 | | |
| | | | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan | Orang | 50 | | | |
| | | 2.19.03.1.01.0004 | | | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga<br>yang Tersedia dan Termanfaatkan | Orang | 0 | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | | | | | 750.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi | Orang | 150 | 750.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.02.000<br>4 | | | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event<br>dan Single Event | Orang | 150 | 500.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.02.000<br>6 | | | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan<br>Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi | Dokumen | 1 | 250.000.000 | | |
| | | | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | | | | | 14.200.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan jumlah atlet dan pelatih berprestasi sesuai jenjang (Kelompok Umur) tingkat nasional | Orang | | 14.200.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.03.000 | | | Seleksi Atlet Daerah | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi | Orang | 500 | 350.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.03.000<br>7 | | | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | | | | 13.850.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | Orang | 280 | 13.850.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan perolehan medali | % | 28.18 | 179.512.000.000 | | |
| | | | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan jumlah  medali yang diperoleh pada jenjang pendidikan | Unit | 50 | 200.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.01.000<br>2 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga<br>dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus | Dokumen | 1 | 200.000.000 | | |
| | | | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | | | | | 53.250.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi | Orang | 500 | 53.250.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.02.000<br>4 | | | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event<br>dan Single Event | Orang | 1 | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event<br>dan Single Event | Orang | 150 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.19.03.1.02.0005 | | | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi | Dokumen | 1 | 350.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.02.0006 | | | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi | | | | 51.400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi | Dokumen | 12 | 51.400.000.000 | | |
| | | | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | | | | | 126.062.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan jumlah atlet berprestasi sesuai jenjang tingkat nasional | Orang | 120 | 126.062.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.03.0006 | | | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | | | | 1.525.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan | Orang | 30 | 1.525.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.03.0007 | | | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | | | | 1.350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | Orang | 6000 | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | Orang | 125 | 350.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.03.0008 | | | Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan | Dokumen | 1 | 250.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.03.0009 | | | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi | | | | 122.937.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan | Orang | 700 | 122.937.000.000 | | |
| | **Meningkatnya Tingkat kebugaran masyarakat** | | | | | | | | **1.600.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase tingkat kebugaran masyarakat | % | 0.183 | 1.600.000.000 | | |
| | | 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | | | 1.600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat yang bugar | Orang | 750 | 1.600.000.000 | | |
| | | | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | | 1.600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan | Unit | 2 | 1.600.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.04.0003 | | | Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Dokumen | 1 | 150.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.04.0005 | | | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi | | | | 1.450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Dokumen | 4 | 1.450.000.000 | | |
| **Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** | | | | | | | | | **138.173.575.000** | | |
| | | | | | | Nilai tambah ekonomi kreatif | Rupiah | 1686000000000 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata | % | 8.01 | | | |
| | **Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai kabupaten/kota kreatif** | | | | | | | | **825.000.000** | | |
| | | | | | | Jumlah kabupaten/kota kreatif | Kabupaten/ | 1 | 825.000.000 | | |
| | | 3.26.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | | | 825.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan) | Kabupaten/ Kota | 6 | 825.000.000 | | |
| | | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | | | | | 625.000.000 | | |
| | | | | | | Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang PMK3I | Kabupaten/ | 2 | 625.000.000 | | |
| | | 3.26.04.1.01.000 3 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif | | | | 625.000.000 | | |
| | | | | | | Penyediaan Sarana Prasarana Prasarana KaTa Kreatif | Unit | 10 | 625.000.000 | | |
| | | | | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi HKI | Orang | 80 | 200.000.000 | | |
| | | 3.26.04.1.02.000 8 | | | Perlindungan Hasil Kreativitas | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Dokumen Perlindungan Hasil kreativitas yang berupa kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif | Dokumen | 80 | 200.000.000 | | |
| | **Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan** | | | | | | | | **137.348.575.000** | | |
| | | | | | | Jumlah pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah | Rupiah | 14054297 | 137.348.575.000 | | |
| | | 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | | 4.533.575.000 | | |
| | | | | | | Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan | % | 13.33 | 4.533.575.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi | | | | | 1.200.000.000 | | |
| | | | | | | Daya Tarik Wisata yang dikembangkan | Lokasi | 5 | 1.200.000.000 | | |
| | | 3.26.02.1.01.000 8 | | | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi | | | | 1.200.000.000 | | |
| | | | | | | Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi jawa Tengah sesuai dengan tahapan (perintisan, pembangunan, Pemantapan, Revitalisasi) | Lokasi | 5 | 1.200.000.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | | | | | 2.833.575.000 | | |
| | | | | | | Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang terkelola | Lokasi | 1 | 2.833.575.000 | | |
| | | 3.26.02.1.02.000 7 | | | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | | | | 2.308.575.000 | | |
| | | | | | | Kawasan Strategis Pariwisata Povinsi yang dikembangkan | Orang | 100 | 2.308.575.000 | | |
| | | 3.26.02.1.02.000 9 | | | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | | | | 525.000.000 | | |
| | | | | | | Masyarakat Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Yang Diberdayakan | Lokasi | 1 | 525.000.000 | | |
| | | | | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 500.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Usaha Pariwiata yang memiliki TDUP/NIB | Dokumen | 100 | 500.000.000 | | |
| | | 3.26.02.1.04.0010 | | | Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi | | | | | | |
| | | | | | | Pengelolaan Investasi Pariwisata | Laporan | 0 | | | |
| | | 3.26.02.1.04.0013 | | | Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | Unit | 350 | 500.000.000 | | |
| | | 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | | | 123.700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kunjungan wisatawan | Orang | 49985228 | 123.700.000.000 | | |
| | | | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | | | | | 123.700.000.000 | | |
| | | | | | | Pengguna  Media Sarpras Pemasaran Pariwisata | Orang | 400000 | 122.150.000.000 | | |
| | | 3.26.03.1.01.0001 | | | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | 117.225.000.000 | | |
| | | | | | | Dokumen hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri | Dokumen | 2 | 117.225.000.000 | | |
| | | 3.26.03.1.01.0006 | | | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | 4.925.000.000 | | |
| | | | | | | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri | Kegiatan | 30 | 4.925.000.000 | | |
| | | | | | | Tujuan Pasar Wisata Potensial | Lokasi | 3 | 1.550.000.000 | | |
| | | 3.26.03.1.01.0005 | | | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | | | 1.550.000.000 | | |
| | | | | | | Hasil Pelaksanaan Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Dokumen | 10 | 1.550.000.000 | | |
| | | 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | | 9.115.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi | % | 48.98 | 9.115.000.000 | | |
| | | | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | | | | | 8.415.000.000 | | |
| | | | | | | Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Orang | 550 | 8.415.000.000 | | |
| | | 3.26.05.1.01.0008 | | | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | | | | 5.800.000.000 | | |
| | | | | | | Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Laporan | 1 | 5.800.000.000 | | |
| | | 3.26.05.1.01.0014 | | | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | | 1.665.000.000 | | |
| | | | | | | orang yang mengikuti peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata | Orang | 300 | 1.665.000.000 | | |
| | | 3.26.05.1.01.0016 | | | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI | | | | 950.000.000 | | |
| | | | | | | SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang dikembangkan Kompetensinya | Orang | 250 | 950.000.000 | | |
| | | | | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif yang di latih dan disertifikasi | Orang | 240 | 700.000.000 | | |
| | | 3.26.05.1.02.0001 | | | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Pelaku SDM Ekraf yang mengikuti pelatihan, bimtek dan pendampingan | Orang | 80 | 225.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.26.05.1.02.0003 | | | Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif | | | | 475.000.000 | | |
| | | | | | | SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti sertifikasi kompetensi | Orang | 160 | 475.000.000 | | |
| **Meningkatkan Pembangunan Pemuda** | | | | | | | | | **23.675.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) | Angka | 56.85 | | | |
| | **Meningkatnya Lapangan dan kesempatan kerja pemuda** | | | | | | | | **13.775.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase lapangan dan kesempatan kerja pemuda | % | 11.05 | 13.775.000.000 | | |
| | | 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | | | 13.775.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah wirausaha muda mandiri | Orang | 8 | 13.775.000.000 | | |
| | | | | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | | | | | 13.775.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah wirausaha muda | Orang | 100 | 3.150.000.000 | | |
| | | 2.19.02.1.01.001 5 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi | | | | 3.150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | Orang | 1000 | 3.150.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan jumlah lokus unggulan hasil pendampingan kepeloporan pemuda | Lokasi | 100 | 7.280.000.000 | | |
| | | 2.19.02.1.01.000 3 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi | | | | 3.155.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | Orang | 8000 | 3.155.000.000 | | |
| | | 2.19.02.1.01.001 2 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi | | | | 4.125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan dari seluruh kabupaten/kota | Orang | 120 | 4.125.000.000 | | |
| | | 2.19.02.1.01.001 3 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | Orang | 0 | | | |
| | | | | | | Tersedianya data capaian IPP domain Pendidikan; Kesehatan dan kesejahteraan; gender dan diskriminasi | Dokumen | 3 | 3.345.000.000 | | |
| | | 2.19.02.1.01.001 0 | | | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | | | | 275.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen penghargaan pemuda provinsi yang berprestasi dan menerima penghargaan yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan | Dokumen | 2 | 275.000.000 | | |
| | | 2.19.02.1.01.0011 | | | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi | | | 720.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil koordinasi sinergis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi RAD/RAD Tingkat Provinsi | Dokumen | 2 | 720.000.000 | | |
| | | 2.19.02.1.01.0014 | | | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi | | | | 2.350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | Orang | 1500 | 2.350.000.000 | | |
| | **Meningkatnya Partisipasi dan kepemimpinan pemuda** | | | | | | | | **9.900.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase partisipasi dan kepemimpinan pemuda | % | 37.25 | 9.900.000.000 | | |
| | | 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | | | 9.900.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi | Orang | 50 | 9.900.000.000 | | |
| | | | | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 9.900.000.000 | | |
| | | | | | | Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan provinsi | Orang | 125 | 9.900.000.000 | | |
| | | 2.19.02.1.02.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha | Orang | 120 | 200.000.000 | | |
| | | 2.19.02.1.02.0004 | | | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi | | | | 9.700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan provinsi | Dokumen | 3 | 9.700.000.000 | | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **406.619.348.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **34.501.051.000** | **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 73 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **34.330.051.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 80 | 34.330.051.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 34.330.051.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 34.330.051.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 29.418.240.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 29.418.240.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 29.176.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 155 | 29.176.560.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 241.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 241.680.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 95.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 95.720.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 90.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 90.720.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0007 | | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 799.135.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 799.135.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 45.135.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 45.135.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 155.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 155.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 9.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah paket bahan/material | Paket | 1 | 90.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 175.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 240.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 253.616.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 2 | 253.616.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 0 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 243.616.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 2 | 243.616.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3.325.260.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 8 | 3.325.260.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1.309.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 3 | 1.309.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.999.860.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 3 | 1.999.860.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 423.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 423.080.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 2 | 35.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 15 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 102.754.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 102.754.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 160.326.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | 160.326.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah** | | | | | | | | **171.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.85 | 171.000.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 171.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 171.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 171.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 171.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 135.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 3 | 135.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 36.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 5 | 36.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| **Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan** | | | | | | | | | **883.346.000** | **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** | |
| | | | | | | Nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah | Nilai | 94 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | **Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi** | | | | | | | | **883.346.000** | | |
| | | | | | | Nilai hasil pengawasan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi | Nilai | 95.32 | 883.346.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | | 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | | | 780.346.000 | | |
| | | | | | | Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya | % | 25.97 | 240.973.000 | Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan | |
| | | | | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi | | | | | 125.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit LKD Prov/Kab/Kota dan Perangkat Daerah yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya | Unit | 20 | 125.200.000 | SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN | |
| | | 2.24.02.1.01.0003 | | | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi | | | | 125.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan provinsi | Laporan | 76 | 125.200.000 | SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN | |
| | | | | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | | | | | 115.773.000 | | |
| | | | | | | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik melalui SIKD | % | 71.42 | 115.773.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN | |
| | | 2.24.02.1.03.0002 | | | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi | | | | 115.773.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD Provinsi | Laporan | 42 | 115.773.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN | |
| | | | | | | Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK | % | 100 | 302.775.000 | Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip | |
| | | | | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi | | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah arsip dinamis inaktif Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian | Arsip | 1000 | 25.000.000 | SEKSI AKUISISI ARSIP | |
| | | 2.24.02.1.01.000 | | | Penyusutan Arsip Dinamis | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Arsip Dinamis yang telah disusutkan | Arsip | 1000 | 25.000.000 | SEKSI AKUISISI ARSIP | |
| | | | | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi | | | | | 277.775.000 | | |
| | | | | | | Jumlah arsip statis yang tersusun daftar inventarisnya | Dokumen | 10500 | 277.775.000 | SEKSI PENGOLAHAN ARSIP | |
| | | 2.24.02.1.02.000 | | | Akuisisi Arsip Statis | | | | 277.775.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi | Arsip | 1100 | 87.262.000 | SEKSI PENGOLAHAN ARSIP | |
| | | | | | | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi | Arsip | 10000 | 106.427.000 | SEKSI PENGOLAHAN ARSIP | |
| | | | | | | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi | Arsip | 500 | 84.086.000 | SEKSI PENGOLAHAN ARSIP | |
| | | | | | | Persentase peningkatan pengunjung arsip | % | 19 | 236.598.000 | Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip | |
| | | | | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | | | | | 236.598.000 | | |
| | | | | | | Jumlah arsip yang terlayankan | Arsip | 800 | 60.398.000 | SEKSI LAYANAN ARSIP | |
| | | 2.24.02.1.03.0001 | | | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | | | | 60.398.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi melalui JIKN | 1 petak /tahun | 3000 | 60.398.000 | SEKSI LAYANAN ARSIP | |
| | | | | | | Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip | Unit | 41 | 176.200.000 | SEKSI PEMANFAATAN ARSIP | |
| | | 2.24.02.1.03.0002 | | | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi | | | | 176.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD Provinsi | Laporan | 2 | 176.200.000 | SEKSI PEMANFAATAN ARSIP | |
| | | 2.24.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | | | | 103.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase arsip yang diselamatkan | % | 19.47 | 53.000.000 | Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip | |
| | | | | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Arsip yang terselamatkan akibat bencana berskala Provinsi | Arsip | 150 | 30.000.000 | SEKSI PELESTARIAN ARSIP | |
| | | 2.24.03.1.02.0001 | | | Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Arsip yg dilakukan evakuasi , identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan akibat bencana | Arsip | 150 | 30.000.000 | SEKSI PELESTARIAN ARSIP | |
| | | | | Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi | | | | | 23.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah khazanah arsip statis LKD Provinsi yang dialihmediakan | Arsip | 256500 | 23.000.000 | SEKSI PELESTARIAN ARSIP | |
| | | 2.24.03.1.04.0002 | | | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | 23.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah daftar arsip yg dilakukan Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip | Arsip | 6500 | 23.000.000 | SEKSI PELESTARIAN ARSIP | |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip | % | 12.19 | 50.000.000 | Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip | |
| | | | | Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi untuk pemusnahan arsip (retensi <10 tahun) | OPD | 5 | 50.000.000 | SEKSI AKUISISI ARSIP | |
| | | 2.24.03.1.01.0001 | | | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yg memiliki retensi dibawah 10 tahun | Arsip | 3000 | 50.000.000 | SEKSI AKUISISI ARSIP | |
| **Meningkatkan Literasi Masyarakat** | | | | | | | | | **34.686.936.000** | **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** | |
| | | | | | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Angka | 16 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | **Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat** | | | | | | | | **34.686.936.000** | | |
| | | | | | | Nilai tingkat kegemaran membaca | Nilai | 73 | 34.686.936.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | | 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | | | 34.418.638.000 | | |
| | | | | | | Nilai survey kepuasan masyarakat | Nilai | 80 | 7.682.654.000 | Bidang Pengelolaan Perpustakaan | |
| | | | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 923.969.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah | Jenis | 6 | 139.969.000 | SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI | |
| | | 2.23.02.1.01.0007 | | | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 39.969.000 | | |
| | | | | | | Jumlah layanan perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yg dikembangkan melalui peningkatan koleksi | Jenis | 5 | 39.969.000 | SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI | |
| | | 2.23.02.1.01.0015 | | | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | | 100.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO 20000 | Unit | 1 | 100.000.000 | SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI | |
| | | | | | | Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah | % | 4.9 | 784.000.000 | SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.02.1.01.0009 | | | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | | | | 784.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan | Eks | 9470 | 784.000.000 | SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 6.758.685.000 | | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat yang menjadi agen literasi | Orang | 20 | 29.360.000 | SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI | |
| | | 2.23.02.1.02.0004 | | | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | 29.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah provinsi yang dikembangkan | Unit | 1 | 29.360.000 | SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI | |
| | | | | | | Jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah | Orang | 2657000 | 6.729.325.000 | SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI | |
| | | 2.23.02.1.02.0002 | | | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 6.729.325.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi | Unit | 7 | 6.729.325.000 | SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI | |
| | | | | | | Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi | % | 80.56 | 26.605.584.000 | Bidang Pengembangan Perpustakaan | |
| | | | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 26.605.584.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi | Unit | 5 | 26.500.584.000 | SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.02.1.01.0002 | | | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi | | | | 26.465.584.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan SNP di wilayah provinsi sesuai kewenangannya | Unit | 3 | 26.465.584.000 | SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.02.1.01.0016 | | | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah data dan informasi perpustakaan | Dokumen | 1 | 35.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN | |
| | | | | | | Jumlah Pustakawan yang lulus sertifikasi | Orang | 10 | 105.000.000 | SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.02.1.01.0004 | | | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perpustakaan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan | Unit | 2 | 30.000.000 | SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.02.1.01.0006 | | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah tenaga perpustakaan yg ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan Tk. Daerah provinsi | Orang | 15 | 75.000.000 | SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | |
| | | | | | | Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca | % | 23.08 | 130.400.000 | Bidang Pengembangan Perpustakaan | |
| | | | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 130.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat | Kegiatan | 2 | 130.400.000 | SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA | |
| | | 2.23.02.1.02.0001 | | | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | | | | 62.800.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah lokus Pembudayaan Gemar Membaca dan literasi pada sat pendidikan menengah dan pendidikn khusus | Lokasi | 3 | 62.800.000 | SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA | |
| | | 2.23.02.1.02.0003 | | | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | 27.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca | Orang | 8 | 27.600.000 | SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA | |
| | | 2.23.02.1.02.0006 | | | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah duta baca Tingkat daerah provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya | Orang | 1 | 40.000.000 | SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA | |
| | | 2.23.03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | | | | 268.298.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah | % | 84.67 | 268.298.000 | Bidang Pengelolaan Perpustakaan | |
| | | | | Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi | | | | | 99.970.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Umum Prov Jateng | Unit | 184 | 99.970.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.03.1.01.0001 | | | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | | | | 23.470.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR | Eks | 2600 | 23.470.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.03.1.01.0002 | | | Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | | | | 76.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | Unit | 3 | 76.500.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | | | Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah | | | | | 51.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah naskah Katalog Induk Derah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan | Dokumen | 2 | 51.000.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.03.1.02.0001 | | | Penerbitan Katalog Induk Daerah | | | | 39.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder lainnya yang diterbitkan | Dokumen | 4350 | 39.200.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.03.1.02.0002 | | | Penerbitan Bibliografi Daerah | | | | 11.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Bibliografi Daerah yang diterbitkan | Dokumen | 1 | 11.800.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | | | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi | | | | | 42.328.000 | | |
| | | | | | | Jumlah koleksi naskah kuno yang dialihmediakan | Eks | 25 | 42.328.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.03.1.03.0002 | | | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | | | 42.328.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Naskah Kuno yang dilakukan Pengembangan yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan | Eks | 5 | 42.328.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | | | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yang diolah | Eks | 367 | 75.000.000 | SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.03.1.04.0001 | | | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi | Eks | 2 | 40.000.000 | SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.23.03.1.04.0002 | | | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi | Eks | 167 | 35.000.000 | SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **70.071.333.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Kelautan dan Perikanan

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan** | | | | | | | | | **3.536.710.000** | **Dinas Kelautan dan Perikanan** | |
| | | | | | | Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) | Angka | 107.78 | | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | **Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)** | | | | | | | | **2.330.025.000** | | |
| | | | | | | Angka Konsumsi Ikan | kg/kapita/ta | 40.12 | 2.330.025.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | | 2.330.025.000 | | |
| | | | | | | Jumlah produksi olahan ikan | Ton | 160000 | 1.162.075.000 | Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas | |
| | | | | Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 111.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Unit Pengolahan Ikan yang terdata | % | 20 | 111.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | 3.25.06.1.01.0001 | | | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi perijinan | Orang | 30 | 20.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.06.1.01.0003 | | | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 91.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan Data | Kabupaten/ Kota | 35 | 91.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | | | | | 1.031.075.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis pelatihan peningkatan keterampilan dan kompetensi | Jenis | 2 | 292.360.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | 3.25.06.1.02.0002 | | | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | | | | 292.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang meningkat keterampilannya | Orang | 300 | 292.360.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | | | | | Jumlah Poklahsar yang Meningkat Usahanya | Unit | 5 | 206.670.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | 3.25.06.1.02.0002 | | | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | | | | 206.670.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi akses permodalan dan kemitraan | Orang | 90 | 19.470.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana yang diberikan kepada pengolah dan pemasar | Paket | 10 | 187.200.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | | | | | Jumlah Usaha Kelautan dan Perikanan yang dipromosikan | Unit | 35 | 532.045.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | 3.25.06.1.02.0002 | | | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | | | | 532.045.000 | | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat terakses GEMARIKAN | Orang | 2000 | 462.045.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | | | | | Jumlah Pengolah dan Pemasar yang difasilitasi Pemasaran | Orang | 120 | 70.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | | | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Perikanan | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | 3.25.06.1.03.0001 | | | Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan dan Penyedia Layanan Jasa Logistik yang dibina | Orang | 25 | 20.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | | | | | Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan | % | 4 | 1.167.950.000 | Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A | |
| | | | | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | | | | | 1.167.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil pengujian produk hasil perikanan | Sertifikat | 400 | 993.163.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN | |
| | | 3.25.06.1.02.0002 | | | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | | | | 993.163.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen ISO 17025:2017 | Dokumen | 1 | 864.473.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Prasarana Laboratorium Penujian Yang Memadai | Paket | 2 | 118.690.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Sarana Laboratorium Pengujian Yang Memadai | Unit | 2 | 10.000.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi sertifikat Good Manufacturing Product (GMP) yang diterbitkan | Sertifikat | 100 | 63.745.000 | SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | |
| | | 3.25.06.1.02.0001 | | | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | | | | 63.745.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina kelayakan dasar | Unit | 80 | 63.745.000 | SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) | Dokumen | 1 | 111.042.000 | SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | |
| | | 3.25.06.1.02.0001 | | | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | | | | 111.042.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen ISO 17065:2012 dan ISO 9001:2015 | Dokumen | 2 | 73.337.000 | SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | JUmlah DOkumen Kesesuaian Produk Yang Akan Disertifiasi | Dokumen | 5 | 14.885.000 | SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya | Orang | 20 | 22.820.000 | SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan** | | | | | | | | **1.137.715.000** | | |
| | | | | | | Nilai Tukar Nelayan | Angka | 105 | 1.137.715.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | | 1.137.715.000 | | |
| | | | | | | Indeks harga yang diterima oleh nelayan | Angka | 108.27 | 1.137.715.000 | Bidang Perikanan Tangkap | |
| | | | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | | | | | 1.137.715.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang memperoleh perlindungan | Orang | 10100 | 1.137.715.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | |
| | | 3.25.03.1.01.0002 | | | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | 1.137.715.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan | Dokumen | 1 | 6.935.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang diberikan premi asuransi | Orang | 10000 | 1.087.855.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah nelayan yang terdaftar kartu nelayan | Orang | 100 | 32.670.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah RTP yang difasilitasi usahanya | Kelompok | 1 | 10.255.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah nelayan yang meningkat ketrampilan dan kompetensi | Orang | 60 | | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | |
| | | 3.25.03.1.02.0003 | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan Yang Ditingkatkan Kompetensinya | Orang | 60 | | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | |
| | **Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan** | | | | | | | | **68.970.000** | | |
| | | | | | | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan | Angka | 110 | 68.970.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | | 68.970.000 | | |
| | | | | | | Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya | Angka | 111.27 | 68.970.000 | Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas | |
| | | | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | | 68.970.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pembudidaya Ikan yang Meningkat Keterampilannya | Orang | 60 | 68.970.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | |
| | | 3.25.04.1.05.0007 | | | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 68.970.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang di fasilitasi sosialisasi kelembagaan | Kelompok | 1 | 17.360.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | |
| | | | | | | Jumlah pembudidaya ikan yang mengikuti pelatihan | Orang | 50 | 51.610.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | |
| **Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan** | | | | | | | | | **4.589.319.000** | **Dinas Kelautan dan Perikanan** | |
| | | | | | | Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi | % | 0.75 | | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | **Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif** | | | | | | | | **4.589.319.000** | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan | % | 62 | 4.589.319.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | 3.25.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | | | 2.581.455.000 | | |
| | | | | | | Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif | % | 5 | 715.287.000 | Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil | |
| | | | | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | | | 715.287.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan | Lokasi | 1 | 404.715.000 | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT | |
| | | 3.25.02.1.01.0002 | | | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | | | | 404.715.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian pencadangan kawasan konservasi | Dokumen | 1 | 404.715.000 | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diverifikasi persyaratan KKPRL | Orang | 5 | 310.572.000 | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT | |
| | | 3.25.02.1.01.0002 | | | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | | | | 310.572.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) | Dokumen | 5 | | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah stakeholder yang melaporkan data kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil | Unit | 20 | | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Stakeholder yang memahami peraturan perundang-undangan | Orang | 200 | 179.955.000 | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Yang Dimanfaatkan | Lokasi | 10 | 130.617.000 | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat | % | 3.7 | 773.390.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | | | 748.540.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola | Lokasi | 2 | 342.248.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | 3.25.02.1.01.0003 | | | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | 342.248.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi | Dokumen | 2 | 62.740.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi yang dibentuk | Unit | 2 | 218.000.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah stakeholder yang memahami ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi | Orang | 60 | 61.508.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Luasan Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang terehabilitasi | Ha | 2 | 406.292.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | 3.25.02.1.01.0003 | | | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | 406.292.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan | Batang | 20000 | 291.292.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Terumbu Karang Buatan Yang ditenggelamkan pada tahun berjalan | Unit | 5 | 115.000.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | | | 24.850.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu | % | 100 | 24.850.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | 3.25.02.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional | | | | 24.850.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha | % | 100 | 24.850.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan | % | 1.39 | 300.554.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | | | 273.679.000 | | |
| | | | | | | Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi | Ha | 2 | 273.679.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | 3.25.02.1.01.0003 | | | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | 273.679.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan | Batang | 20000 | 273.679.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | | | 26.875.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu | % | 100 | 26.875.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | 3.25.02.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional | | | | 26.875.000 | | |
| | | | | | | Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha | % | 100 | 26.875.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur | % | 3.7 | 792.224.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | | | 758.999.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola | Lokasi | 2 | 424.557.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | 3.25.02.1.01.0003 | | | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | 424.557.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi | Dokumen | 2 | 80.800.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi yang dibentuk | Unit | 2 | 318.897.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah stakeholder yang memahami ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi | Orang | 60 | 24.860.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi | Ha | 2 | 334.442.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | 3.25.02.1.01.0003 | | | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | 334.442.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan | Batang | 20000 | 223.274.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Terumbu Karang Buatan Yang ditenggelamkan pada tahun berjalan | Unit | 5 | 111.168.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | | | 33.225.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu | % | 100 | 33.225.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | 3.25.02.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional | | | | 33.225.000 | | |
| | | | | | | Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha | % | 100 | 33.225.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | | 44.225.000 | | |
| | | | | | | Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya | % | 44.44 | 44.225.000 | Bidang Perikanan Tangkap | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 44.225.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lokasi yang dilindungi SDI nya | Lokasi | 1 | 44.225.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | |
| | | 3.25.03.1.02.0003 | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | 44.225.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan Yang Mengetahui Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) Ramah Lingkungan | Orang | 100 | 44.225.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | |
| | | 3.25.05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | 1.963.639.000 | | |
| | | | | | | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat | % | 61 | 106.809.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A | |
| | | | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | | | | | 106.809.000 | | |
| | | | | | | Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan | Kali | 10 | 106.809.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0002 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | | | | 106.809.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi | Unit | 30 | 106.809.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan | % | 61 | 155.143.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A | |
| | | | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | | | | | 155.143.000 | | |
| | | | | | | Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan | Kali | 10 | 155.143.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0002 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | | | | 155.143.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi | Unit | 20 | 155.143.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur | % | 61 | 236.050.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A | |
| | | | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | | | | | 236.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan | Kali | 10 | 236.050.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0002 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | | | | 236.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi | Unit | 30 | 236.050.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan | % | 70 | 664.642.000 | Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | | | | | 575.604.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Aktif yang dibina Membantu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Kelompok | 35 | 87.900.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0004 | | | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | | | | 87.900.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)yang Menerima Sarana dan prasarana | Kelompok | 5 | 87.900.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP | Orang | 18 | 54.040.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0001 | | | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | | | | 22.220.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP | Orang | 60 | 22.220.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.01.0002 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | | | | 17.270.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP | Orang | 60 | 17.270.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.01.0003 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | | | | 14.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP | Orang | 60 | 14.550.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan sampai dengan 12 mil | % | 100 | 433.664.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0001 | | | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | | | | 15.830.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kasus yang ditangani pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil | % | 100 | 15.830.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.01.0002 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | | | | 311.519.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kasus yang ditangani pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil | % | 100 | 311.519.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0003 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | | | | 106.315.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kasus yang ditangani pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil | % | 100 | 106.315.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 89.038.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP | Orang | 180 | 14.870.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.02.0001 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya | | | | | 14.870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP | Orang | 60 | 14.870.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.25.05.1.02.0002 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pada usaha pembudidaya di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP | Orang | 60 | | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.02.0003 | | | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pada usaha pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP | Orang | 60 | | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | | | | | Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya | % | 100 | 74.168.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.02.0001 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya | | | | 13.693.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | % | 100 | 13.693.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.02.0002 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya | | | | 26.425.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | % | 100 | 26.425.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.02.0003 | | | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 34.050.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | % | 100 | 34.050.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat | % | 2 | 298.765.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A | |
| | | | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | | | | | 250.820.000 | | |
| | | | | | | Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil | % | 100 | 250.820.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0001 | | | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | | | | 28.261.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil | Orang | 24 | 28.261.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.01.0002 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | | | | 215.099.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil | Orang | 56 | 215.099.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.01.0003 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | | | | 7.460.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil | Orang | 24 | 7.460.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 47.945.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | % | 100 | 47.945.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.02.0001 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya | | | | 21.235.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhanpada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya | Orang | 15 | 21.235.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.02.0002 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya | | | | 9.420.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya | Orang | 30 | 9.420.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.02.0003 | | | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 17.290.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya | Orang | 30 | 17.290.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan | % | 2 | 252.836.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A | |
| | | | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | | | | | 78.573.000 | | |
| | | | | | | Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil | % | 100 | 78.573.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0001 | | | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | | | | 55.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil | Orang | 15 | 55.950.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.01.0002 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | | | | 11.656.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil | Orang | 30 | 11.656.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.01.0003 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | | | | 10.967.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil | Orang | 18 | 10.967.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 174.263.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | % | 100 | 174.263.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.02.0001 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya | | | | 63.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhanpada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya | Orang | 15 | 63.900.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.02.0002 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya | | | | 53.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Orang | 15 | 53.140.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sesuai denganKewenangannya | | | | | |
| | | 3.25.05.1.02.0003 | | | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 57.223.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | Orang | 30 | 57.223.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur | % | 2 | 249.394.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A | |
| | | | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | | | | | 116.275.000 | | |
| | | | | | | Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil | % | 100 | 116.275.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0001 | | | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | | | | 54.115.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil | Orang | 30 | 54.115.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.01.0002 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | | | | 6.620.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil | Orang | 30 | 6.620.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.01.0003 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | | | | 55.540.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil | Orang | 30 | 55.540.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 133.119.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | % | 100 | 133.119.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.02.0001 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya | | | | 41.815.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhanpada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya | Orang | 18 | 41.815.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.02.0002 | | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya | | | | 42.470.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya | Orang | 18 | 42.470.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.02.0003 | | | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 48.834.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya | Orang | 30 | 48.834.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **55.485.767.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 82 | | | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **54.684.089.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 83 | 54.684.089.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 54.684.089.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 138.280.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 19.665.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 19.665.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 2.355.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 2.355.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 16.710.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 16.710.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 45.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 45.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 1.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 43.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 43.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 73.465.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 73.465.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 15.765.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 15.765.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 7.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 7.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 90.000.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 14.640.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 14.640.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 3.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 5.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 5.640.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 45.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 45.360.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 6.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 39.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 39.360.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 30.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 10.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 15.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 100.000.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 20.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 1.850.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 9.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 8.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 8.650.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 33.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 1.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 32.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 32.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 47.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 47.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 17.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 17.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 25.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 253.000.000 | Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 10.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 203.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 203.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 276.500.000 | Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 22.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 101.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 101.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 153.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 153.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 136.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 136.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 161.000.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 92.700.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 92.700.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 80.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 7.200.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 29.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 29.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 27.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 27.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 38.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 38.800.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 19.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 19.800.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 4.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 15.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 77.000.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 15.260.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 15.260.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 9.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 9.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 5.160.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 5.160.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 30.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 30.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 31.240.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 31.240.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 16.240.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 16.240.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 50.599.009.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 45.906.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 45.906.850.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 44.832.270.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 327 | 44.832.270.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 917.580.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 917.580.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 157.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 157.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 315.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 315.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 30 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.121.546.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.121.546.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 120.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 215.125.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 215.125.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 77.870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 77.870.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 631.551.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 631.551.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 3.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 14.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 1.067.613.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 1.067.613.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0003 | | | Pengadaan Alat Besar | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit alat besar yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 507.613.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 507.613.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 260.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.438.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 1.438.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 8.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 430.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 430.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 650.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 280.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 280.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 240.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 154.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 53.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 53.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 71.000.000 | | |
| | | | | | | Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal | Unit | 1 | 71.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 11.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 168.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 78.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 78.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 15.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 15.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 57.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 57.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 342.100.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 82.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 82.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 22.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 189.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 189.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 186.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 186.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 25.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 94.000.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 24.240.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 24.240.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 420.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 420.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 7.270.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 7.270.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 16.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 16.550.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 39.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 39.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 39.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 39.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 30.460.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 30.460.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 14.510.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 14.510.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 5.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 106.000.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 20.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 2.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 8.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 42.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 40.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 44.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 44.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 14.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 25.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 131.200.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 23.200.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 23.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 3.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 3.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 58.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 58.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 56.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 56.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 608.000.000 | Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 33.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 458.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 458.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 453.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 453.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 117.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 117.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 172.000.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 16.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 16.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 2.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 4.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 119.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 119.800.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 117.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 117.800.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 35.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 35.700.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 5.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 5.700.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 25.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 898.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 11.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 867.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 867.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 865.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 865.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 19.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 19.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 1.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 316.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 224.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 224.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 216.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 216.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 55.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 55.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 53.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 53.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 36.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 36.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 21.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 21.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah** | | | | | | | | **801.678.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 82 | 801.678.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 801.678.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 801.678.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 801.678.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 801.678.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 399.178.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 5 | 399.178.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 402.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 1 | 402.500.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan** | | | | | | | | | **46.480.988.000** | **Dinas Kelautan dan Perikanan** | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan | % | 1 | | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | **Meningkatnya Produksi Garam** | | | | | | | | **760.245.000** | | |
| | | | | | | Produksi garam | Ton | 133320 | 760.245.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | 3.25.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | | | 760.245.000 | | |
| | | | | | | Persentase produksi garam | % | 1 | 760.245.000 | Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil | |
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | | 760.245.000 | | |
| | | | | | | Jumah KUGAR yang meningkat kompetensinya | Kelompok | 25 | 63.700.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | |
| | | 3.25.02.1.03.0001 | | | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil | | | | 63.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah petambak garam yang difasiltasi dan dibina | Orang | 125 | 63.700.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan | Kelompok | 4 | 89.140.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | |
| | | 3.25.02.1.03.0001 | | | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | 89.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat pesisir yang meningkat kapasitas usahanya | Orang | 100 | 89.140.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah KUGAR yang meningkat teknologinya | Kelompok | 5 | 594.605.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | |
| | | 3.25.02.1.03.0001 | | | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | 594.605.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang diberikan ke petambak garam | Jenis | 2 | 307.880.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Luas lahan garam yang menerapkan teknologi | Ha | 20 | 286.725.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah sentra garam rakyat yang didata potensinya | Lokasi | 5 | 12.800.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | |
| | | 3.25.02.1.03.0001 | | | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | 12.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kab/Kota yang melaporkan data potensi garam | Kabupaten/Kota | 9 | 12.800.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya Produksi Perikanan** | | | | | | | | **45.720.743.000** | | |
| | | | | | | Produksi perikanan | Ton | 927350 | 45.720.743.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | | 32.670.252.000 | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdoyong | % | 72.72 | 733.964.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | | 733.964.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan | Jenis | 5 | 301.660.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 301.660.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan | Dokumen | 80 | 68.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 65 | 14.800.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan | Laporan | 12 | 18.860.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan | Orang | 60 | 200.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan | Jenis | 5 | 36.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 36.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai | Unit | 40 | 11.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP | % | 70 | 25.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 14 | 54.404.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 54.404.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 1 | 54.404.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik | % | 40 | | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki | Unit | 1 | | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi | % | 5 | | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi | Orang | 15 | | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya | % | 20 | 341.400.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 341.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya | Orang | 4 | 341.400.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo | % | 100 | 481.375.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A | |
| | | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | | 481.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan | Jenis | 9 | 358.710.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 358.710.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan | Dokumen | 2700 | 284.392.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 100 | 50.368.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan | Laporan | 12 | 16.000.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan | Orang | 300 | 7.950.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan | Jenis | 7 | 19.425.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 19.425.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai | Unit | 2700 | 1.550.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP | % | 100 | 17.875.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 29 | 94.340.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 94.340.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 1 | 94.340.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik | % | 65 | 1.440.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 1.440.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki | Unit | 1 | 1.440.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi | % | 85 | 6.660.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 6.660.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi | Orang | 30000 | 6.660.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya | % | 6 | 800.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya | Orang | 1 | 800.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa | % | 63.63 | 587.181.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | | 587.181.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan | Jenis | 5 | 31.215.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 31.215.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan | Dokumen | 60 | 16.600.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 45 | 6.555.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan | Laporan | 12 | 4.060.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan | Orang | 45 | 4.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan | Jenis | 3 | 26.791.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 26.791.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai | Unit | 50 | 12.025.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP | % | 60 | 14.766.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 40 | 40.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 3 | 40.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik | % | 50 | 107.975.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 107.975.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki | Unit | 2 | 107.975.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi | % | 50 | 50.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi | Orang | 50 | 50.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya | % | 65 | 331.200.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 331.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya | Orang | 50 | 331.200.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor | % | 70 | 1.105.369.000 | | |
| | | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | | 1.105.369.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan | Jenis | 9 | 69.350.000 | | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 69.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan | Dokumen | 2700 | 10.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 1000 | 20.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan | Laporan | 12 | 19.700.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan | Orang | 100 | 19.650.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan | Jenis | 6 | 34.290.000 | | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 34.290.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai | Unit | 1000 | 16.740.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP | % | 2 | 17.550.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 5 | 20.000.000 | | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 1 | 20.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik | % | 50 | 458.710.000 | | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 458.710.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki | Unit | 1 | 458.710.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi | % | 5 | 20.000.000 | | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi | Orang | 3000 | 20.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya | % | 5 | 503.019.000 | | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 503.019.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya | Orang | 1 | 503.019.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan | % | 72 | 581.985.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | | 581.985.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan | Jenis | 5 | 65.295.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 65.295.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan | Dokumen | 128 | 30.220.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 10 | 17.725.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan | Laporan | 12 | 8.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan | Orang | 30 | 9.350.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan | Jenis | 3 | 25.005.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 25.005.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai | Unit | 110 | 18.545.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP | % | 42 | 6.460.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 20 | 18.805.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 18.805.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 1 | 18.805.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik | % | 40 | 200.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki | Unit | 1 | 200.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi | % | 7 | 11.880.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 11.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi | Orang | 10 | 11.880.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya | % | 30 | 261.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 261.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya | Orang | 3 | 261.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending | % | 63 | 4.746.790.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A | |
| | | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | | 4.746.790.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan | Jenis | 5 | 120.068.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 120.068.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan | Dokumen | 30 | 73.860.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 108 | 21.233.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan | Laporan | 12 | 9.575.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan | Orang | 90 | 15.400.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan | Jenis | 7 | 351.868.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 351.868.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai | Unit | 165 | 341.868.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP | % | 25 | 10.000.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 30 | | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 1 | | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik | % | 54 | 4.272.854.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 4.272.854.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki | Unit | 1 | 4.272.854.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi | % | 50 | 2.000.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi | Orang | 80 | 2.000.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya | % | 20 | | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya | Orang | 2 | | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak | % | 81 | 905.895.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A | |
| | | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | | 905.895.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan | Jenis | 6 | 312.285.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 312.285.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan | Dokumen | 300 | 232.095.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 50 | 10.440.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan | Laporan | 12 | 61.250.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan | Orang | 100 | 8.500.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan | Jenis | 4 | 23.275.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 23.275.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai | Unit | 150 | 10.000.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP | % | 100 | 13.275.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 42 | 8.775.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 8.775.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 1 | 8.775.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik | % | 55 | 175.100.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 175.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki | Unit | 1 | 175.100.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi | % | 20 | | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi | Orang | 100 | | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya | % | 7 | 386.460.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 386.460.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya | Orang | 2 | 386.460.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung | % | 100 | 1.120.316.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A | |
| | | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | | 1.120.316.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan | Jenis | 6 | 113.011.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 113.011.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan | Dokumen | 3500 | 9.825.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 3000 | 40.000.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan | Laporan | 12 | 30.186.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan | Orang | 80 | 33.000.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan | Jenis | 5 | 123.269.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 123.269.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai | Unit | 3000 | 79.200.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP | % | 10 | 44.069.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 42.86 | 60.960.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 60.960.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 1 | 60.960.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik | % | 100 | 74.600.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 74.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki | Unit | 1 | 74.600.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi | % | 25 | 33.876.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 33.876.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi | Orang | 3000 | 33.876.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya | % | 3.7 | 714.600.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 714.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya | Orang | 1 | 714.600.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang | % | 62.62 | 886.910.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | | 886.910.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan | Jenis | 6 | 75.940.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 75.940.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan | Dokumen | 100 | 13.435.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 10 | 14.865.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan | Laporan | 12 | 17.640.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan | Orang | 60 | 30.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan | Jenis | 6 | 40.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai | Unit | 3500 | 20.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP | % | 43 | 20.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 20 | 74.990.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 74.990.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 1 | 74.990.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik | % | 46 | 325.570.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 325.570.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki | Unit | 1 | 325.570.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi | % | 6 | 11.910.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 11.910.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi | Orang | 60 | 11.910.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya | % | 18 | 358.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 358.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya | Orang | 2 | 358.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari | % | 72 | 1.216.749.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A | |
| | | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | | 1.216.749.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan | Jenis | 9 | 824.845.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 824.845.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan | Dokumen | 2500 | 657.408.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 100 | 108.650.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan | Laporan | 12 | 44.577.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan | Orang | 300 | 14.210.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan | Jenis | 7 | 66.682.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 66.682.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai | Unit | 1100 | 5.400.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP | % | 100 | 61.282.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 16 | 7.200.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 1 | 7.200.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik | % | 60 | 203.250.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 203.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki | Unit | 1 | 203.250.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi | % | 85 | 32.212.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 32.212.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi | Orang | 7000 | 32.212.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya | % | 15 | 82.560.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 82.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya | Orang | 1 | 82.560.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto | % | 81.82 | 534.952.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | | 534.952.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan | Jenis | 7 | 21.200.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 21.200.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan | Dokumen | 900 | 2.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 70 | 7.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan | Laporan | 12 | 2.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan | Orang | 40 | 9.200.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan | Jenis | 4 | | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai | Unit | 40 | | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP | % | 70 | | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 14 | 70.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 1 | 70.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik | % | 39 | 433.352.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 433.352.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki | Unit | 1 | 433.352.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi | % | 5 | 3.900.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 3.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi | Orang | 10 | 3.900.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya | % | 9 | 6.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 6.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya | Orang | 4 | 6.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase produksi perikanan tangkap | % | 5 | 19.768.766.000 | Bidang Perikanan Tangkap | |
| | | | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | | | | | 17.617.430.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelabuhan yang menerapkan Standar Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 3 | 17.491.025.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | |
| | | 3.25.03.1.01.0002 | | | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | 17.491.025.000 | | |
| | | | | | | Jumlah KUB yang difasilitasi Kelembagaannya | Kelompok | 2 | 20.285.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah pelabuhan perikanan yang ditingkatkan tata kelola dan operasional kepelabuhanannya | Lokasi | 1 | 17.470.740.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah produksi perikanan yang didaratkan | Ton | 327350 | 126.405.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | |
| | | 3.25.03.1.01.0001 | | | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | | | | 126.405.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaporkan Data | Kabupaten/Kota | 34 | 126.405.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 2.151.336.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan | Unit | 240 | 1.046.336.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.25.03.1.02.0003 | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | 1.046.336.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal Perikanan yang Terdaftar Melalui TDKP | Unit | 160 | 245.436.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi alokasi usaha perikanan yang dikeluarkan | Unit | 40 | 800.900.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase Kapal Perikanan yang menerapkan teknologi Penangkapan Ikan | % | 0.25 | 1.105.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | |
| | | 3.25.03.1.02.0003 | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | 1.105.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kapal yang difasilitasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan | Unit | 50 | 1.105.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah lokasi  kapal yang menerapkan Teknologi Penangkapan Ikan | Lokasi | 1 | | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | | 13.050.491.000 | | |
| | | | | | | Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan | % | 100 | 853.195.000 | Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | | 853.195.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kasus Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Ditangani | Kasus | 350 | 447.150.000 | SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN | |
| | | 3.25.04.1.05.0006 | | | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | 447.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kab/Kota yang Melaporkan Data Peredaran Obat Ikan | Kabupaten/Kota | 35 | 45.070.000 | SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Lokasi Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan | Lokasi | 35 | 389.480.000 | SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Terakses Informasi Kesehatan Ikan dan Lingungan | Orang | 350 | 12.600.000 | SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase Pengguna Layanan Pengujian | % | 20 | 391.045.000 | SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN | |
| | | 3.25.04.1.05.0007 | | | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 391.045.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Parameter Pengujian | Unit | 1 | 150.000.000 | SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium | sampel | 400 | 59.337.000 | SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Sertifikasi Laboratorium yang memenuhi standar teknis (2 Sertifikat) | Sertifikat | 2 | 181.708.000 | SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase Petugas Laboratorium yang Meningkat Kompetensinya | % | 29 | 15.000.000 | SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN | |
| | | 3.25.04.1.05.0007 | | | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis pelatihan yang diikuti petugas | Jenis | 5 | 15.000.000 | SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase produksi ikan konsumsi air laut | % | 5 | 9.976.701.000 | Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | | 2.173.755.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Jenis Pelatihan Keterampilan yang diikuti tenaga teknis SDM Loka Air Laut | Jenis | 1 | 20.000.000 | SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA | |
| | | 3.25.04.1.05.0007 | | | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Teknis (SDM) Loka yang Meningkat Keterampilannya | Orang | 10 | 20.000.000 | SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya | Lokasi | 1 | 2.153.755.000 | SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.25.04.1.05.0002 | | | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | 1.582.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang direhabilitasi/dibangung | Unit | 5 | 1.582.400.000 | SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.04.1.05.0004 | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | 571.355.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Produksi Ikan Konsumsi | Kg | 11500 | 571.355.000 | SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | | | | | 7.802.946.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya | Lokasi | 9 | 7.802.946.000 | SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | |
| | | 3.25.04.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | 7.802.946.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ikan Endemik Lokal yang di Produksi | Ekor | 100000 | 41.000.000 | SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Kolam yang dilakukan Rehabilitasi | Unit | 9 | 2.490.905.000 | SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Produksi Benih Unggul | Ekor | 30000000 | 345.000.000 | SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Produksi Calon Induk Bermutu | Ekor | 5000 | 2.767.380.000 | SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Produksi Ikan Konsumsi | Kg | 10000 | 2.158.661.000 | SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Produksi perikanan budidaya | Ton | 600000 | 2.220.595.000 | Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas | |
| | | | | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 249.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan Ijin Usaha | Orang | 117 | 249.650.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | |
| | | 3.25.04.1.01.0002 | | | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | | | | 170.670.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pembenihan yang memiliki sertifikat CPIB | Unit | 5 | 115.730.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah unit pembesaran ikan yang memiliki SP4 CBIB / sertifikat CBIB | Unit | 10 | 43.520.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah unit produksi pakan ikan yang memiliki sertifikat CPPIB | Unit | 1 | 11.420.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan | | | | 78.980.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan data | Kabupaten/Ko | 35 | 78.980.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | |
| | | | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | | 1.970.945.000 | | |
| | | | | | | Jumlah teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya | Jenis | 2 | 1.970.945.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | |
| | | 3.25.04.1.05.0004 | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | 1.970.945.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya | Kelompok | 30 | 1.970.945.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **110.092.784.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kesejahteraan peternak** | | | | | | | | | **648.150.000** | **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan** | |
| | | | | | | Nilai Tukar Petani Peternakan | Angka | 100.5 | | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | **Meningkatnya nilai tambah produk hasil ternak** | | | | | | | | **648.150.000** | | |
| | | | | | | Persentase nilai tambah produk hasil ternak | % | 4.5 | 648.150.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha | % | 10 | 400.000.000 | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan | |
| | | | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha | Unit | 11 | 400.000.000 | SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN | |
| | | 3.27.03.1.01.0019 | | | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pengolahan produk ternak yang terfasilitasi promosi & akses pasar | Kelompok | 5 | 97.945.000 | SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha terfasilitasi sertifikasi produk peternakan | Kelompok | 1 | 44.450.000 | SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi sarpras pengolahan & pemasaran | Kelompok | 10 | 183.350.000 | SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan pengolahan dan pemasaran | Orang | 100 | 74.255.000 | SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN | |
| | | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | | 248.150.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV) | % | 2.8 | 248.150.000 | Bidang Veteriner | |
| | | | | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | | | | | 248.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit usaha yang memperoleh sertifikat NKV | Buah | 12 | 248.150.000 | SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | |
| | | 3.27.04.1.03.0001 | | | Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit | | | | 248.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi NKV | Unit | 35 | 59.800.000 | SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | |
| | | | | | | jumlah sasaran yang terfasilitasi pembinaan higiene sanitasi | Unit | 10 | 188.350.000 | SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **52.410.203.000** | **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 70 | | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **51.966.013.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 81 | 51.966.013.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 51.966.013.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.900.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 230.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 230.500.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 130.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 35.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 45.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 500.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 1 | | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 1 | | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | | Balai veteriner semarang | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.529.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 1.529.500.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 200.000.000 | Balai veteriner semarang | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 40.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.287.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 1.287.500.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 140.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 30.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 25.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 30.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 3.568.500.000 | Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 458.050.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 458.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 117.135.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 117.135.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 50.615.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 50.615.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 260.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 12 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.952.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 2.952.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 285.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 285.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.667.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 2.667.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 157.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 157.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 96.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 96.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 11.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 11.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.900.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 432.790.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 432.790.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 28.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 28.500.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 11.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 11.250.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 21.820.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 21.820.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 100.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 100.140.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 46.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 46.500.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 24.020.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 24.020.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 192.060.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 192.060.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 8.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 8.500.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 106.210.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 106.210.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | 57.210.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 57.210.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 1 | 1.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 18.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 18.000.000 | Balai veteriner boyolali | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 30.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.128.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 1.128.500.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 240.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 28.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 28.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 855.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 855.500.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 232.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 232.500.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 44.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 44.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 52.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 52.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 60.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 1.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 52.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 52.500.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 23.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 23.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 3.902.565.000 | Balai Inseminasi Buatan Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 826.225.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 826.225.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 31.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 31.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 20.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 53.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 53.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 265.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 265.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 18.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 18.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 142.675.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 142.675.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 293.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 293.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 1.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 428.886.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 428.886.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | 285.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 285.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 1 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 132.386.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 132.386.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.444.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 1.444.480.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 11.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 11.480.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 260.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 13.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 13.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.160.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 1.160.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.202.974.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 1.202.974.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 167.794.000 | | |
| | | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Unit | 1 | 167.794.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 283.180.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 283.180.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 336.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 336.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 400.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 40.694.948.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 35.240.648.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 35.240.648.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 34.954.948.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 205 | 34.954.948.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 266.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 266.400.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 1 | 1.500.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 16.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 16.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 900.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0008 | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | Dokumen | 1 | 900.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 204.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 204.300.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.03.0001 | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 700.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0007 | | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 600.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | 34.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Laporan | 1 | 34.300.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.04.0002 | | | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | 600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah | Dokumen | 1 | 600.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.04.0007 | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 33.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | Laporan | 1 | 33.700.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 47.684.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 47.684.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 7.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 5.074.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 1 | 5.074.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 35.110.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 20 | 35.110.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 482.562.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 482.562.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 32.484.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 32.484.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 55.341.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 55.341.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 18.698.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 18.698.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 41.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 41.300.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 45.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 45.050.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 188.164.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 188.164.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 10.275.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 10.275.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 6.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 6.250.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 98.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 98.250.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0004 | | | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan | Unit | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 2.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 40.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 40.250.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 2.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 4.121.604.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 4.121.604.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 800.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 650.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 3.464.804.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 3.464.804.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 465.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 465.600.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 197.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 197.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0004 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Unit | 1 | 500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 145.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 145.600.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **444.190.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.2 | 444.190.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 444.190.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 444.190.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 444.190.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 444.190.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 222.095.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 5 | 222.095.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 222.095.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 1 | 222.095.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| **Meningkatkan pertumbuhan PDRB sub sektor peternakan** | | | | | | | | | **57.508.598.000** | **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan** | |
| | | | | | | Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan | % | 3 | | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | **Tercapainya Produksi Daging** | | | | | | | | **53.614.080.000** | | |
| | | | | | | Produksi daging | Kg | 457685292 | 53.614.080.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 26.857.861.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan | Dokumen | 4 | 11.222.610.000 | Bidang Veteriner | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor | | | | | 11.222.610.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengawasan pelaku usaha obat hewan dan produk hewan | Laporan | 4 | 11.222.610.000 | SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN | |
| | | 3.27.02.1.06.0001 | | | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | | | | 11.222.610.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha obat hewan dan alsin obat hewan yang diawasi | Unit | 3 | 189.535.000 | SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang mendapat pembinaan keamanan produk hewan | Unit | 12 | 11.033.075.000 | SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN | |
| | | | | | | Jumlah populasi ternak potong | (ST)/(AU) | 3726434 | 9.204.580.000 | Bidang Budidaya | |
| | | | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | | | | | 28.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok peternak potong yang meningkat skala usaha nya | Kelompok | 10 | 20.000.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.03.0003 | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok ternak potong yang terfasilitasi peningkatan skala usaha dan produksi ternak | Kelompok | 5 | 20.000.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak potong | Buah | 2 | 8.480.000 | SEKSI PRODUKSI | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.27.02.1.03.0003 | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | | | | 8.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak potong yang menerapkan Good Farming Practices (GFP) | Unit | 2 | | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak potong | Orang | 50 | 8.480.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | | 9.176.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pakan ternak potong yang produknya sesuai standar kualitas pakan | Unit | 2 | 3.598.060.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 3.598.060.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak potong | Orang | 50 | 14.310.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak potong | Unit | 4 | 3.583.750.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak potong | Buah | 1 | 5.578.040.000 | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | 3.27.02.1.04.0004 | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 5.578.040.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak potong yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP) | Unit | 2 | 44.670.000 | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | | | | | jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak potong | Orang | 50 | 39.310.000 | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan bibit ternak potong | Unit | 4 | 5.494.060.000 | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi obat hewan | % | 1 | 102.390.000 | Bidang Veteriner | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor | | | | | 102.390.000 | | |
| | | | | | | Jumlah hewan/ternak yang difasilitasi obat hewan | Ekor | 10000 | 102.390.000 | SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN | |
| | | 3.27.02.1.06.0001 | | | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | | | | 102.390.000 | | |
| | | | | | | Jumlah obat hewan yang di fasilitasi | Unit | 10000 | 102.390.000 | SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging | % | 1 | 3.180.846.000 | Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A | |
| | | | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | | 3.180.846.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak nonruminansia yang mendukung produksi daging | % | 1 | 513.125.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA | |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 513.125.000 | | |
| | | | | | | Jumlah produksi ternak nonruminansia potong | Ekor | 20013 | 513.125.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia yang mendukung produksi daging | % | 1 | 2.667.721.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA | |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 2.667.721.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah bibit ternak ruminansia potong yang ber SKLB | Ekor | 60 | 989.550.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA | |
| | | | | | | Jumlah produksi ternak ruminansia potong | Ekor | 143 | 1.678.171.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA | |
| | | | | | | Persentase produksi dan distribusi semen beku | % | 1 | 3.147.435.000 | Balai Inseminasi Buatan Kelas A | |
| | | | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | | 3.147.435.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Produksi semen segar | Angka | 26250 | 2.038.500.000 | SEKSI PEMELIHARAAN TERNAK DAN PELAYANAN REPRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 2.038.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ternak Pejantan Yang Layak Diproses semen bekunya | Ekor | 26 | 2.038.500.000 | SEKSI PEMELIHARAAN TERNAK DAN PELAYANAN REPRODUKSI | |
| | | | | | | Persentase semen beku yang dihasilkan dari semen segar yang layak diproduksi | % | 80 | 1.108.935.000 | SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI | |
| | | 3.27.02.1.04.0004 | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 1.108.935.000 | | |
| | | | | | | Jumlah semen beku yang terdistribusi | Dosis | 420000 | 1.108.935.000 | SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI | |
| | | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | 333.410.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong | % | 10 | 333.410.000 | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan | |
| | | | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | | 333.410.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok yang menerapkan inovasi peternakan pada ternak potong | Kelompok | 3 | 2.820.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | 2.820.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok ternak potong yang terfasilitasi rekayasa teknologi peternakan | Kelompok | 3 | 2.820.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak potong | Unit | 1 | 6.480.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | 6.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi akses permodalan pada ternak potong | Orang | 30 | 6.480.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak potong | Kelompok | 4 | 324.110.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | 324.110.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak potong | Unit | 4 | 324.110.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | | 14.732.035.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis | Dokumen | 4 | 10.968.185.000 | Bidang Veteriner | |
| | | | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 10.968.185.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan situasi penyakit menular strategis (PHMS) | Laporan | 4 | 10.968.185.000 | SEKSI KESEHATAN HEWAN | |
| | | 3.27.04.1.01.0007 | | | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 10.968.185.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Ternak /hewan Tersurveilans PHMS | Ekor | 2000 | 10.783.185.000 | SEKSI KESEHATAN HEWAN | |
| | | | | | | Jumlah ternak/hewan yang tervaksinasi | Ekor | 100000 | 185.000.000 | SEKSI KESEHATAN HEWAN | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan | Dokumen | 4 | 800.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | | | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi | | | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengujian sampel | Laporan | 4 | 589.275.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | 3.27.04.1.02.0004 | | | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | | 589.275.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sampel yang diuji Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Selatan | sampel | 25700 | 589.275.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | | | | | Jumlah laporan lalu lintas ternak | Laporan | 4 | 124.692.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | 3.27.04.1.02.0004 | | | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | | 124.692.000 | | |
| | | | | | | Jumlah ternak yang diperiksa di pos lalu lintas wilayah Jateng Selatan | Ekor | 1650000 | 124.692.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | | | | | Jumlah laporan pemeriksaan kesehatan hewan | Laporan | 4 | 86.033.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | 3.27.04.1.02.0004 | | | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | | 86.033.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hewan yang terlayani pemeriksaan kesehatan hewan di Wilayah Jateng Selatan | Ekor | 13850 | 86.033.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara | Dokumen | 4 | 800.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | | | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi | | | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengujian sampel | Laporan | 4 | 593.283.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | 3.27.04.1.02.0004 | | | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | | 593.283.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sampel yang diuji Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Utara | sampel | 25000 | 593.283.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | | | | | Jumlah laporan lalu lintas ternak | Laporan | 4 | 87.300.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | 3.27.04.1.02.0004 | | | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | | 87.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ternak yang diperiksa di pos lalu lintas wilayah jateng Utara | Ekor | 1700000 | 87.300.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | | | | | Jumlah laporan pemeriksaan kesehatan hewan | Laporan | 4 | 119.417.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | 3.27.04.1.02.0004 | | | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | | 119.417.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah hewan yang terlayani pemeriksaan kesehatan hewan di Wilayah Jateng Utara | Ekor | 14250 | 119.417.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | | | | | Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali | % | 3 | 2.163.850.000 | Bidang Veteriner | |
| | | | | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | | | | | 2.163.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah RPH yang tidak melakukan pemotongan betina produktif | Unit | 3 | 2.163.850.000 | SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | |
| | | 3.27.04.1.03.0001 | | | Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit | | | | 2.163.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sasaran RPH yang diawasi pemotongan betina produktif | Unit | 5 | 2.163.850.000 | SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | |
| | | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | | 11.690.774.000 | | |
| | | | | | | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong | % | 1.02 | 11.690.774.000 | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan | |
| | | | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | | | | | 11.690.774.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak potong yang terbentuk | Kelompok | 10 | 11.690.774.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | |
| | | 3.27.07.1.03.0006 | | | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani | | | | 11.690.774.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak potong | Kelompok | 34 | 11.433.338.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | |
| | | | | | | Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak potong | Orang | 1920 | 257.436.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | |
| | **Tercapainya Produksi Susu** | | | | | | | | **825.289.000** | | |
| | | | | | | Produksi susu | Kg | 93864946 | 825.289.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 616.309.000 | | |
| | | | | | | Jumlah populasi ternak perah | (ST)/(AU) | 112876 | 118.890.000 | Bidang Budidaya | |
| | | | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok peternak perah yang meningkat skala usaha nya | Kelompok | 6 | | SEKSI PRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.03.0003 | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok ternak perah yang terfasilitasi peningkatan skala usaha dan produksi ternak | Kelompok | 5 | | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak perah | Buah | 2 | | SEKSI PRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.03.0003 | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak perah yang menerapkan Good Farming Practices (GFP) | Unit | 2 | | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak perah | Orang | 50 | | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | | 118.890.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pakan ternak perah yang produknya sesuai standar kualitas pakan | Unit | 2 | 33.420.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 33.420.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak perah | Orang | 50 | 14.310.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak perah | Unit | 4 | 19.110.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak perah | Buah | 1 | 85.470.000 | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | 3.27.02.1.04.0004 | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 85.470.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak perah yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP) | Unit | 1 | 29.650.000 | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | | | | | jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak perah | Orang | 50 | 55.820.000 | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan bibit ternak perah | Unit | 2 | | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu | % | 1 | 497.419.000 | Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A | |
| | | | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | | 497.419.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia yang mendukung produksi susu | % | 1 | 497.419.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA | |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 497.419.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bibit ternak ruminansia perah yang ber SKLB | Ekor | 2 | 159.940.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA | |
| | | | | | | Jumlah produksi ternak ruminansia perah | Ekor | 9 | 337.479.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA | |
| | | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | 60.110.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah | % | 10 | 60.110.000 | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan | |
| | | | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | | 60.110.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok yang menerapkan inovasi peternakan pada ternak perah | Kelompok | 1 | 49.700.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | 49.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok ternak perah yang terfasilitasi rekayasa teknologi peternakan | Kelompok | 1 | 49.700.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak perah | Unit | 1 | 10.410.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | 10.410.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi akses permodalan pada ternak perah | Orang | 20 | 10.410.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak perah | Kelompok | 2 | | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak perah | Unit | 2 | | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | | 148.870.000 | | |
| | | | | | | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah | % | 3.11 | 148.870.000 | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan | |
| | | | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | | | | | 148.870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak perah yang terbentuk | Unit | 2 | 148.870.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | |
| | | 3.27.07.1.03.0006 | | | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani | | | | 148.870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak perah | Kelompok | 14 | 90.060.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | |
| | | | | | | Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak perah | Orang | 360 | 58.810.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | |
| | **Tercapainya Produksi Telur** | | | | | | | | **3.069.229.000** | | |
| | | | | | | Produksi telur | Kg | 344872727 | 3.069.229.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 2.384.765.000 | | |
| | | | | | | Jumlah populasi ternak petelur | (ST)/(AU) | 246615 | 481.530.000 | Bidang Budidaya | |
| | | | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | | | | | 371.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok peternak petelur yang meningkat skala usaha nya | Kelompok | 4 | 284.450.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.03.0003 | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | | | | 284.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok ternak petelur yang terfasilitasi peningkatan skala usaha dan produksi ternak | Kelompok | 5 | 284.450.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak petelur | Buah | 1 | 87.070.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.03.0003 | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | | | | 87.070.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak petelur yang menerapkan Good Farming Practices (GFP) | Unit | 1 | 43.630.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak petelur | Orang | 30 | 43.440.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | | 110.010.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pakan ternak petelur yang produknya sesuai standar kualitas pakan | Unit | 2 | 58.520.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 58.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak petelur | Orang | 30 | 13.310.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak petelur | Unit | 4 | 45.210.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak petelur | Buah | 1 | 51.490.000 | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | 3.27.02.1.04.0004 | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 51.490.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak petelur yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP) | Unit | 1 | 31.150.000 | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | | | | | jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak petelur | Orang | 30 | 20.340.000 | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan bibit ternak petelur | Unit | 4 | | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur | % | 1 | 1.903.235.000 | Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A | |
| | | | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | | 1.903.235.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak nonruminansia yang mendukung produksi petelur | % | 1 | 1.903.235.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA | |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 1.903.235.000 | | |
| | | | | | | Jumlah produksi ternak nonruminansia petelur | Ekor | 26530 | 1.903.235.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA | |
| | | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | 606.480.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur | % | 10 | 606.480.000 | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan | |
| | | | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | | 606.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak petelur | Unit | 1 | 6.480.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | 6.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi akses permodalan pada ternak petelur | Orang | 30 | 6.480.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak petelur | Kelompok | 2 | 600.000.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak petelur | Unit | 2 | 600.000.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | | 77.984.000 | | |
| | | | | | | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur | % | 2.27 | 77.984.000 | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan | |
| | | | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | | | | | 77.984.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak petelur yang terbentuk | Kelompok | 1 | 77.984.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | |
| | | 3.27.07.1.03.0006 | | | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani | | | | 77.984.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak petelur | Kelompok | 4 | 45.420.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | |
| | | | | | | Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak petelur | Orang | 200 | 32.564.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **110.566.951.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Pertanian dan Perkebunan

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Memantapkan Produksi Komoditas Pertanian dan Perkebunan sebagai wujud Kontribusi Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan di Jawa Tengah** | | | | | | | | | **79.113.239.000** | **Dinas Pertanian dan Perkebunan** | |
| | | | | | | Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | % | 0.58 | | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | **Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura** | | | | | | | | **1.278.433.000** | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi bawang merah | % | 2.5 | 240.800.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 240.800.000 | | |
| | | | | | | Produksi bawang merah | Ton | 515000 | 240.800.000 | Bidang Hortikultura | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 240.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Panen Bawang Merah | Ha | 51500 | 240.800.000 | SEKSI TANAMAN SAYURAN | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 240.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Tanam Bawang Merah | Ha | 8 | 240.800.000 | SEKSI TANAMAN SAYURAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi cabe | % | 1.5 | 318.081.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 318.081.000 | | |
| | | | | | | Produksi cabai | Ton | 341000 | 318.081.000 | Bidang Hortikultura | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 318.081.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Panen Cabai | Ha | 43718 | 318.081.000 | SEKSI TANAMAN SAYURAN | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 318.081.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Tanam Cabai | Ha | 15 | 318.081.000 | SEKSI TANAMAN SAYURAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi durian | % | 2.5 | 437.276.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 437.276.000 | | |
| | | | | | | Produksi durian | Ton | 149668 | 437.276.000 | Bidang Hortikultura | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 437.276.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Panen Alpukat | Ha | 13773 | 80.000.000 | SEKSI TANAMAN BUAH | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Tanam Alpukat | Ha | 4 | 80.000.000 | SEKSI TANAMAN BUAH | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Luas Panen Durian | Ha | 11973 | 357.276.000 | SEKSI TANAMAN BUAH | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 357.276.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Tanam Durian | Ha | 4 | 357.276.000 | SEKSI TANAMAN BUAH | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi jahe | % | 3 | 237.276.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 237.276.000 | | |
| | | | | | | Produksi jahe | Ton | 34862 | 237.276.000 | Bidang Hortikultura | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 237.276.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Panen Jahe | Ha | 1599 | 237.276.000 | SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 237.276.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Luas Tanam Jahe | Ha | 1 | 202.276.000 | SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Luas Tanam Kencur | Ha | 1 | 35.000.000 | SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi melati | % | 2 | 45.000.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Produksi melati | Ton | 24627 | 45.000.000 | Bidang Hortikultura | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Panen Melati | Ha | 1.099 | 45.000.000 | SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Tanam Melati | Ha | 1 | 45.000.000 | SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT | OPD Provinsi |
| | **Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan** | | | | | | | | **51.902.680.000** | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi jagung | % | 0.2 | 319.086.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 319.086.000 | | |
| | | | | | | Produksi jagung | Ton | 3576577 | 319.086.000 | Bidang Tanaman Pangan | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 319.086.000 | | |
| | | | | | | Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (jagung) | Ha | 583385 | 319.086.000 | SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 319.086.000 | | |
| | | | | | | Capaian luas tanam bantuan benih Jagung dan Serealia Lainnya | Ha | 200 | 319.086.000 | SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi kedelai | % | 0.2 | 166.358.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 166.358.000 | | |
| | | | | | | Produksi kedelai | Ton | 52657 | 166.358.000 | Bidang Tanaman Pangan | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 166.358.000 | | |
| | | | | | | Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (kedelai) | Ha | 31241 | 166.358.000 | SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 166.358.000 | | |
| | | | | | | Capaian luas tanam bantuan benih kedelai | Ha | 50 | 166.358.000 | SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi padi | % | 0.2 | 51.417.236.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 35.394.582.000 | | |
| | | | | | | Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan | % | 3 | 16.700.000.000 | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 16.700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelembagaan pengelola alsintan | Unit | 580 | 16.700.000.000 | SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 16.700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani yang difasilitasi alsintan | Kelompok | 580 | 16.700.000.000 | SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya | % | 2 | 5.745.643.000 | Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 5.745.643.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah informasi harga pasar yang disebarluaskan | Komoditi | 3 | 55.773.000 | SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 55.773.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kab/kota yang dipublikasikan informasi harga pasar | Kabupaten/Kota | 34 | 55.773.000 | SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU | |
| | | | | | | Jumlah kelompok pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan yang meningkat kapasitas usahanya | Kelompok | 105 | 5.370.196.000 | SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 5.370.196.000 | | |
| | | | | | | Angka persentase susut hasil padi | % | 10.15 | 12.330.000 | SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU | |
| | | | | | | Jumlah alat pasca panen perkebunan/tanaman pangan/hortikultura | Unit | 105 | 5.357.866.000 | SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU | |
| | | | | | | Jumlah kelompok pengolah hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang meningkat kapasitas usahanya | Kelompok | 4 | 319.674.000 | SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 319.674.000 | | |
| | | | | | | Jumlah alat pengolah hasil perkebunan/tanaman pangan/hortikultura | Paket | 35 | 319.674.000 | SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiayah Surakarta | % | 85 | 2.426.960.000 | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta | |
| | | | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | | 2.426.960.000 | | |
| | | | | | | Jumlah produksi benih Buah | Batang | 10000 | 797.464.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 797.464.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Produksi benih Tanaman Buah | Batang | 10000 | 797.464.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | | | | | Jumlah produksi benih Kedelai | Ton | 0.8 | 19.447.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 19.447.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Produksi benih Palawija | Ton | 0.8 | 19.447.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | |
| | | | | | | Jumlah produksi benih Kentang | Ton | 8 | 355.712.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 355.712.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Produksi benih Sayur | Ton | 8 | 355.712.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | | | | | Jumlah produksi benih Padi | Ton | 84 | 1.156.351.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 1.156.351.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Produksi benih Padi | Ton | 84 | 1.156.351.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | |
| | | | | | | Jumlah produksi benih Planlet | Batang | 12000 | 97.986.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 97.986.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Produksi Planlet benih | Batang | 12000 | 97.986.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas | % | 85 | 2.024.498.000 | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas | |
| | | | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | | 2.024.498.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pengembangan tanaman hias | Batang | 12000 | 192.965.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 192.965.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pengembangan Tanaman Hias | Batang | 12000 | 192.965.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | | | | | Jumlah produksi benih bawang merah | Ton | 3 | 72.375.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 72.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah luas Perbanyakan Benih Bawang Merah | Ha | 0.5 | 72.375.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | | | | | Jumlah produksi benih padi | Ton | 92.5 | 1.003.279.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 1.003.279.000 | | |
| | | | | | | Jumlah luas Perbanyakan Benih Padi | Ha | 25 | 1.003.279.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | |
| | | | | | | Jumlah produksi benih palawija | Ton | 0.425 | 7.910.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 7.910.000 | | |
| | | | | | | Jumlah luas Perbanyakan Benih Palawija | Ha | 0.5 | 7.910.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | |
| | | | | | | Jumlah Produksi benih tanaman buah | Batang | 1000 | 747.969.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 747.969.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perbanyakan benih Tanaman Buah | Batang | 1000 | 747.969.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang | % | 85 | 2.443.280.000 | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang | |
| | | | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | | 2.443.280.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perbanyakan benih tanaman buah | Batang | 2000 | 539.802.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 539.802.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perbanyakan benih tanaman buah | Batang | 2000 | 539.802.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | | | | | Jumlah produksi benih padi | Ton | 181.3 | 1.878.478.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 1.878.478.000 | | |
| | | | | | | Luas perbanyakan benih padi | Ha | 49 | 1.878.478.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | |
| | | | | | | Jumlah produksi benih palawija | Ton | 0 | | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | | | |
| | | | | | | Luas perbanyakan benih palawija | Ha | 0 | | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | |
| | | | | | | Jumlah produksi benih sayuran | Ton | 0.2 | 25.000.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Luas perbanyakan benih sayuran | Ha | 0.2 | 25.000.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | | | | | Jumlah produksi sayuran | Ton | 0 | | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | | | |
| | | | | | | Luas pengembangan sayuran | Ha | 0 | | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | | | | | Jumlah produksi tanaman hias | Batang | 0 | | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah pengembangan tanaman hias | Batang | 0 | | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | | | | | Persentase layanan sertifikasi benih | % | 100 | 697.966.000 | | |
| | | | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | | 697.966.000 | | |
| | | | | | | Pengawasan peredaran benih perkebunan | Bulan | 12 | 34.065.000 | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 34.065.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Terpantaunya mutu benih tanaman perkebunan yang beredar | Bulan | 12 | 34.065.000 | | |
| | | | | | | Pengawasan peredaran benih Tanaman Pangan | Bulan | 12 | 174.568.000 | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 174.568.000 | | |
| | | | | | | Terpantaunya mutu benih tanaman pangan yang beredar | Bulan | 12 | 174.568.000 | | |
| | | | | | | Pengujian laboratorium hortikultura | Lembar | 100 | 22.210.000 | | |
| | | 3.27.02.1.02.0001 | | | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih | | | | 22.210.000 | | |
| | | | | | | Terbitnya sertifikat benih tanaman hortikultura | Lembar | 100 | 22.210.000 | | |
| | | | | | | Pengujian laboratorium tanaman pangan | Lembar | 900 | 33.870.000 | | |
| | | 3.27.02.1.02.0001 | | | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih | | | | 33.870.000 | | |
| | | | | | | Terbitnya sertifikat benih tanaman pangan | Lembar | 900 | 33.870.000 | | |
| | | | | | | Sertifikasi benih hortikultura buah | Batang | 300000 | 47.640.000 | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 47.640.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya benih hortikultura tanaman buah bersertifikat | Batang | 300000 | 47.640.000 | | |
| | | | | | | Sertifikasi benih hortikultura sayuran | Ha | 100 | 76.700.000 | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 76.700.000 | | |
| | | | | | | Terpantaunya mutu benih tanaman hortikultura yang beredar | Bulan | 12 | 59.100.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya benih hortikultura tanaman sayuran | Ton | 1200 | 17.600.000 | | |
| | | | | | | Sertifikasi benih padi | Ha | 3200 | 265.568.000 | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 265.568.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya benih padi bersertifikat | Ton | 12800 | 265.568.000 | | |
| | | | | | | Sertifikasi benih palawija | Ha | 600 | 25.050.000 | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 25.050.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya benih palawija bersertifikat | Ton | 720 | 25.050.000 | | |
| | | | | | | Sertifikasi benih tanaman perkebunan | Batang | 500000 | 18.295.000 | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 18.295.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya benih tanaman perkebunan | Batang | 500000 | 18.295.000 | | |
| | | | | | | Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan | % | 100 | 75.000.000 | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah LKMA yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan | Unit | 100 | 75.000.000 | SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah LKMA yang difasilitasi kegiatan pembiayaan | Orang | 100 | 75.000.000 | SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani | % | 2.5 | 416.326.000 | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 416.326.000 | | |
| | | | | | | luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlangsungan usaha tani | Ha | 0 | 416.326.000 | SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 416.326.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Luas lahan yang difasilitasi kegiatan asuransi | Ha | 0 | 416.326.000 | SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase luas lahan yang dioptimasi | % | 2.5 | 151.065.000 | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 151.065.000 | | |
| | | | | | | jumlah luasan lahan yang dioptimasi | Ha | 20 | 151.065.000 | SEKSI LAHAN DAN IRIGASI | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 151.065.000 | | |
| | | | | | | jumlah benih mendukung optimasi lahan | Kg | 250 | 4.000.000 | SEKSI LAHAN DAN IRIGASI | OPD Provinsi |
| | | | | | | jumlah pupuk organik mendukung optimasi lahan | Ton | 10 | 147.065.000 | SEKSI LAHAN DAN IRIGASI | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi | % | 90 | 2.808.312.000 | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 2.808.312.000 | | |
| | | | | | | jumlah kab/kota yang menyalurkan pupuk sesuai alokasi | Kabupaten/Kota | 35 | 2.808.312.000 | SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 2.808.312.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi distribusi pupuk | Orang | 100 | 2.808.312.000 | SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Produksi padi | Ton | 9594280 | 1.905.532.000 | Bidang Tanaman Pangan | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 1.905.532.000 | | |
| | | | | | | Capaian Luas Panen  Tanaman Pangan (padi) | Ha | 1686165 | 1.905.532.000 | SEKSI PADI | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 1.905.532.000 | | |
| | | | | | | Capaian luas tanam  bantuan benih Padi | Ha | 825 | 1.905.532.000 | SEKSI PADI | OPD Provinsi |
| | | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | 4.564.297.000 | | |
| | | | | | | Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik | m | 7420274 | 4.564.297.000 | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian | |
| | | | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | | 4.564.297.000 | | |
| | | | | | | Persentase Jaringan irigasi alternatif | % | 5 | 4.070.000.000 | SEKSI LAHAN DAN IRIGASI | |
| | | 3.27.03.1.01.0001 | | | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | | | | 4.070.000.000 | | |
| | | | | | | Jaringan Irigasi Alternatif yang difasilitasi (unit) | Unit | 176 | 4.070.000.000 | SEKSI LAHAN DAN IRIGASI | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase jaringan irigasi tersier yang baik | % | 1.88 | 494.297.000 | SEKSI LAHAN DAN IRIGASI | |
| | | 3.27.03.1.01.0001 | | | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | | | | 494.297.000 | | |
| | | | | | | jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi (m) | m | 225 | 494.297.000 | SEKSI LAHAN DAN IRIGASI | OPD Provinsi |
| | | 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | | | 2.635.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam | % | 5 | 50.000.000 | Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A | |
| | | | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Luasan lahan yang terdampak Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang bisa ditangani | % | 5 | 50.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN | |
| | | 3.27.05.1.01.0002 | | | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Luasan lahan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang tertangani | Ha | 10 | 50.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) | % | 15 | 2.585.000.000 | Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A | |
| | | | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | | | | | 2.585.000.000 | | |
| | | | | | | Luasan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) terhadap luas pengembangan tanaman | % | 15 | 2.585.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN | |
| | | 3.27.05.1.01.0001 | | | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | 2.585.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Agens Pengendali Hayati (APH) yang diproduksi dan digunakan untuk pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Liter | 400 | 29.173.000 | SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Luasan pengendalian OPT tanaman hortikultura (bawang merah, bawang putih, cabe) | Ha | 20 | 39.370.000 | SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Luasan pengendalian OPT tanaman pangan (padi, jagung kedelai) | Ha | 40 | 232.362.000 | SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Luasan pengendalian OPT tanaman perkebunan (tebu, kelapa, kopi) | Ha | 20 | 2.284.095.000 | SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN | OPD Provinsi |
| | | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | | 8.823.357.000 | | |
| | | | | | | Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya | % | 2.5 | 5.463.357.000 | Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha | |
| | | | | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian | | | | | 270.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya | % | 2.5 | 270.000.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN | |
| | | 3.27.07.1.01.0004 | | | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian | | | | 270.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya | Orang | 100 | 270.000.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | | | | | 5.088.130.000 | | |
| | | | | | | Persentase jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan | % | 0.2 | 5.088.130.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN | |
| | | 3.27.07.1.02.0002 | | | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | | | | 5.088.130.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani yang difasilitasi promosi pemasaran | Kelompok | 30 | 79.000.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan | Kelompok | 30 | 5.009.130.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | | | | | 105.227.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan jumlah penumbuhan dan pengembangan korporasi | % | 20 | 105.227.000 | SEKSI BINA USAHA | |
| | | 3.27.07.1.03.0006 | | | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani | | | | 105.227.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penumbuhan dan pengembangan korporasi | Unit | 1 | 105.227.000 | SEKSI BINA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih | % | 100 | 3.360.000.000 | BALAI PELATIHAN PERTANIAN | |
| | | | | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | | | | | 3.360.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian | Orang | 2100 | 3.360.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 3.27.07.1.02.0001 | | | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | | | | 2.040.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM pertanian | Orang | 1200 | 2.040.000.000 | SEKSI PELATIHAN | OPD Provinsi |
| | | 3.27.07.1.02.0002 | | | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | | | | 1.320.000.000 | | |
| | | | | | | Optimalisasi capaian sasaran teknis SDM pertanian | Orang | 900 | 1.320.000.000 | SEKSI PELATIHAN | OPD Provinsi |
| | **Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan** | | | | | | | | **25.932.126.000** | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi kelapa | % | 0.009 | 1.318.078.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 1.318.078.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan | % | 1 | 1.148.078.000 | Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A | |
| | | | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | | 1.148.078.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman rempah dan penyegar | % | 1 | 440.883.000 | SEKSI PRODUKSI | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 440.883.000 | | |
| | | | | | | Produksi tanaman rempah dan penyegar | Kg | 35000 | 302.245.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Produksi tanaman rempah dan penyegar | Kg | 55000 | 138.638.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman semusim | % | 1 | 520.926.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 520.926.000 | | |
| | | | | | | Produksi tanaman semusim | Ton | 1200 | 520.926.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman tahunan | % | 1 | 186.269.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 186.269.000 | | |
| | | | | | | Produksi tanaman tahunan | Butir | 35000 | 186.269.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Produksi kelapa | Ton | 166687 | 170.000.000 | | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan luas tanaman produktif (TM) kelapa | Ha | 50 | 170.000.000 | | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana produksi tanaman kelapa yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon | Batang | 1000 | 130.000.000 | | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah sarana produksi tanaman tahunan lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon | Batang | 1500 | 40.000.000 | | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi kopi | % | 0.009 | 280.000.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 280.000.000 | | |
| | | | | | | Produksi kopi | Ton | 25927 | 280.000.000 | Bidang Perkebunan | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 280.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan luas tanaman produktif (TM) kopi | Ha | 40 | 280.000.000 | SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 280.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana produksi tanaman kopi yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon | Batang | 12500 | 260.000.000 | SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah sarana produksi tanaman tanaman rempah dan penyegar lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon | Batang | 800 | 20.000.000 | SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi tebu | % | 0.009 | 24.334.048.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 24.334.048.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan | % | 3 | 2.172.440.000 | Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A | |
| | | | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | | 2.172.440.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar siap salur | % | 3 | 242.472.000 | SEKSI BENIH | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 242.472.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya benih tanaman rempah dan penyegar siap tanam | Batang | 10000 | 242.472.000 | SEKSI BENIH | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman semusim siap salur | % | 3 | 1.823.334.000 | SEKSI BENIH | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 1.823.334.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya benih tanaman semusim siap tanam | Batang | 34500 | 1.823.334.000 | SEKSI BENIH | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman tahunan siap salur | % | 4 | 106.634.000 | SEKSI BENIH | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 106.634.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya benih tanaman tahunan siap tanam | Batang | 1500 | 106.634.000 | SEKSI BENIH | |
| | | | | | | Produksi tebu | Ton | 2554553 | 22.161.608.000 | | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 22.161.608.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan luas tanaman produktif (TM) tebu | Ha | 300 | 22.161.608.000 | | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 22.161.608.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bantuan pupuk anorganik untuk tanaman semusim lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon | Kg | 1798800 | 20.561.608.000 | | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah sarana produksi tanaman semusim lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon | Batang | 43200 | 1.500.000.000 | | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah sarana produksi tanaman tebu yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon | Kg | 1500 | 100.000.000 | | OPD Provinsi |
| **Meningkatkan Kesejahteraan Petani** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Angka | 108.56 | | | |
| | **Meningkatnya NTP Hortikultura** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | NTP Hortikultura | Angka | 108.11 | | | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan nilai tambah produk hortikultura | % | 1.5 | | | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | | | |
| | | | | | | jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman hortikultura yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen | Kelompok | 5 | | | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | |
| | | | | | | jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman hortikultura yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen | Kelompok | 5 | | | |
| | **Meningkatnya NTP Perkebunan** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | NTP Perkebunan Rakyat | Angka | 100.59 | | | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan | % | 1.5 | | | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | | | |
| | | | | | | jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman perkebunan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen | Kelompok | 2 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | |
| | | | | | | jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman perkebunan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen | Kelompok | 2 | | | |
| | **Meningkatnya NTP Tanaman Pangan** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | NTP Tanaman Pangan | Angka | 105.19 | | | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan nilai tambah produk tanaman pangan | % | 1.5 | | | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | | | |
| | | | | | | jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman pangan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen | Kelompok | 3 | | | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | |
| | | | | | | jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman pangan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen | Kelompok | 3 | | | |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **145.411.699.000** | **Dinas Pertanian dan Perkebunan** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 100 | | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **144.726.699.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 80 | 144.726.699.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 144.726.699.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 945.000.000 | BALAI PELATIHAN PERTANIAN | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 77.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 77.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 130.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 432.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 432.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 256.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 256.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 76.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 76.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 725.000.000 | Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 435.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 435.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 225.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 165.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 165.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 125.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 102.412.070.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 96.377.408.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 96.377.408.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 92.016.449.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 618 | 92.016.449.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 4.360.959.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 4.360.959.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 230.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 230.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0001 | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 180.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 50 | 45.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 20 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 915.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 915.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 5 | 70.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 5 | 45.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 20 | 600.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 484.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 13 | 484.300.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Unit | 2 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 3 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 289.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 10 | 289.300.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 3 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 195.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 3 | 195.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.182.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 2.182.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 5 | 12.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1.100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 1.100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 135.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 135.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 935.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 935.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.148.362.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 25 | 2.148.362.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 17 | 750.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 389.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 15 | 389.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 227.788.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 227.788.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 336.574.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 336.574.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 445.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 445.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 15.091.030.000 | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 3.914.110.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 3.914.110.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 3.914.110.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 16 | 3.914.110.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 235.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 235.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 150.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 10.836.920.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 10.836.920.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 36.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 36.720.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 7.090.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 9 | 7.090.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 3.669.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 10 | 3.669.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 3.942.704.000 | Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 16.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 16.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 16.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 16.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 86.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 86.400.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | | | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 0 | 10.000.000 | | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | | | | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 10.000.000 | | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 46.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 46.400.000 | | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 8 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 344.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 344.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 135.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 135.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 194.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 194.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3.495.704.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 3.495.704.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 107.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 107.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.033.304.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 49 | 1.033.304.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 2.355.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 2.355.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 754.450.000 | Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 70.680.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 70.680.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 4.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.280.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.280.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 7 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 371.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 371.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 179.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 179.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 190.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 70.370.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 70.370.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 42.620.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 42.620.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 27.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 27.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 11.087.000.000 | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 3.310.417.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 3.310.417.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 3.238.417.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 3.238.417.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 2 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 5 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 52.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 10 | 52.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 315.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 315.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 180.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 130.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 7.459.083.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 7.459.083.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 1 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 7.386.583.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 10 | 7.386.583.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 9.769.445.000 | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 114.695.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 114.695.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 26.155.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 26.155.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah | Laporan | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 43.540.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 43.540.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 5.029.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 5.029.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 10 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.029.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 6 | 5.029.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 351.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 351.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 1.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 4.268.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 4.268.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Unit | 1 | 65.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 56.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 56.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 2.427.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 9 | 2.427.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 1.720.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 6 | 1.720.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **685.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 100 | 685.000.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 685.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 685.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 685.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 685.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 10 | 450.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 235.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 21 | 235.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **224.524.938.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan ketahanan energi** | | | | | | | | | **21.161.964.000** | **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral** | |
| | | | | | | Indeks Ketahanan Energi | Angka | 4.5 | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | **Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan yang berkelanjutan dalam Bauran Energi** | | | | | | | | **7.684.499.000** | | |
| | | | | | | Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi | % | 18.41 | 7.684.499.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | | 3.29.05 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | | | | | | 7.684.499.000 | | |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah | SBM | 590300.484 | 1.461.221.000 | | |
| | | | | Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi | | | | | 1.461.221.000 | | |
| | | | | | | Persentase desa yang melaksanakan Konservasi Energi di Jawa Tengah | % | 28.72 | 1.461.221.000 | | |
| | | 3.29.05.1.10.0002 | | | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota | | | | 1.461.221.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED di Jawa Tengah | Dokumen | 5 | 423.286.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Jawa Tengah | Orang | 2534 | 1.037.935.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria | SBM | 23599.9 | 216.000.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria | |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 216.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Muria | Orang | 203 | 216.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 216.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Kendeng Muria | Unit | 7 | 216.000.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan | SBM | 78666.36 | 655.000.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan | |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 655.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Selatan | Orang | 240 | 655.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 655.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Kendeng Selatan | Unit | 7 | 655.000.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi | SBM | 86438.18 | 538.500.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 538.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Merapi | Orang | 495 | 538.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 538.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Merapi | Unit | 10 | 538.500.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak | SBM | 39394.34 | 482.878.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak | |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 482.878.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Semarang Demak | Orang | 204 | 482.878.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 482.878.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Semarang Demak | Unit | 17 | 482.878.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan | SBM | 122.33 | 274.500.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan | |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 274.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan | Orang | 60 | 274.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 274.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Selatan | Unit | 4 | 274.500.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah | SBM | 39287.3 | 282.000.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah | |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 282.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Tengah | Orang | 177 | 282.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 282.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Tengah | Unit | 4 | 282.000.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara | SBM | 125685.73 | 705.500.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara | |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 705.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara | Orang | 375 | 705.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 705.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Utara | Unit | 11 | 705.500.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu | SBM | 39363.76 | 418.500.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu | |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 418.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Sewu Lawu | Orang | 150 | 418.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 418.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Sewu Lawu | Unit | 5 | 418.500.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan | SBM | 78562.37 | 695.000.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan | |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 695.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Selatan | Orang | 96 | 695.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 695.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Slamet Selatan | Unit | 5 | 695.000.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara | SBM | 91.75 | 207.000.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara | |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 207.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Utara | Orang | 45 | 207.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 207.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Slamet Utara | Unit | 3 | 207.000.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo | SBM | 39608.43 | 934.400.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo | |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 934.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Solo | Orang | 270 | 934.400.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 934.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Solo | Unit | 41 | 934.400.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo | SBM | 39480.034 | 814.000.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo | |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 814.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo | Orang | 219 | 814.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 814.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Ungaran Telomoyo | Unit | 25 | 814.000.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | **Terpenuhinya kebutuhan energi listrik berkelanjutan bagi masyarakat** | | | | | | | | **13.477.465.000** | | |
| | | | | | | Tingkat konsumsi tenaga listrik | KWh/Kapita | 768.1 | 13.477.465.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | | 3.29.06 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | | | 13.477.465.000 | | |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah | % | 63.81 | 1.101.207.000 | | |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 1.101.207.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah | % | 30.19 | 1.101.207.000 | | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 1.101.207.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Jawa Tengah | Laporan | 28 | 1.101.207.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria | % | 51.09 | 490.200.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 58.350.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Muria | % | 100 | 58.350.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | 58.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Kendeng Muria | Dokumen | 35 | 58.350.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 86.700.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria | % | 4.78 | 86.700.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 86.700.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Kendeng Muria | Laporan | 50 | 86.700.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 345.150.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Muria | % | 97.39 | 345.150.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 45.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Kendeng Muria | Dokumen | 1 | 45.250.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 299.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kendeng Muria | RT/KK | 200 | 299.900.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan | % | 49.66 | 1.615.558.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Selatan | % | 100 | 55.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Kendeng Selatan | Dokumen | 20 | 55.000.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 166.780.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan | % | 1.93 | 166.780.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 166.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Kendeng Selatan | Laporan | 55 | 166.780.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 1.393.778.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Selatan | % | 97.39 | 1.393.778.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 86.728.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Kendeng Selatan | Dokumen | 1 | 86.728.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 1.307.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kendeng Selatan | RT/KK | 950 | 1.307.050.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi | % | 49.64 | 1.026.240.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 67.350.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Merapi | % | 100 | 67.350.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 67.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Merapi | Dokumen | 35 | 67.350.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 82.200.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi | % | 1.89 | 82.200.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 82.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Merapi | Laporan | 35 | 82.200.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 876.690.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Merapi | % | 97.39 | 876.690.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 75.750.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Merapi | Dokumen | 1 | 75.750.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 800.940.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Merapi | RT/KK | 550 | 800.940.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak | % | 51.86 | 731.050.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Semarang Demak | % | 100 | 100.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Semarang Demak | Dokumen | 60 | 100.000.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 95.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak | % | 6.34 | 95.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 95.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Semarang Demak | Laporan | 50 | 95.000.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 536.050.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Semarang Demak | % | 97.39 | 536.050.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 36.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Semarang Demak | Dokumen | 1 | 36.000.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 500.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Semarang Demak | RT/KK | 350 | 500.050.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan | % | 49.36 | 1.253.615.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 39.650.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Selatan | % | 100 | 39.650.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | 39.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Selatan | Dokumen | 20 | 39.650.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 51.975.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan | % | 1.34 | 51.975.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 51.975.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Selatan | Laporan | 25 | 51.975.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 1.161.990.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Selatan | % | 97.39 | 1.161.990.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 38.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Selatan | Dokumen | 1 | 38.400.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 1.123.590.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Selatan | RT/KK | 800 | 1.123.590.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah | % | 49.08 | 1.470.690.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 55.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Tengah | % | 100 | 55.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Tengah | Dokumen | 20 | 55.000.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 87.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah | % | 0.78 | 87.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 87.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Tengah | Laporan | 25 | 87.500.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 1.328.190.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Tengah | % | 97.39 | 1.328.190.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 76.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Tengah | Dokumen | 1 | 76.400.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 1.251.790.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Tengah | RT/KK | 900 | 1.251.790.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara | % | 49.97 | 513.790.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 48.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Utara | % | 100 | 48.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | 48.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Utara | Dokumen | 25 | 48.000.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 103.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara | % | 2.56 | 103.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 103.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Utara | Laporan | 55 | 103.500.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 362.290.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Utara | % | 97.39 | 362.290.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 34.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Utara | Dokumen | 1 | 34.300.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 327.990.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Utara | RT/KK | 200 | 327.990.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu | % | 49.57 | 1.061.465.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 47.150.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Sewu Lawu | % | 100 | 47.150.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 47.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Sewu Lawu | Dokumen | 25 | 47.150.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 51.975.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu | % | 1.74 | 51.975.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 51.975.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Sewu Lawu | Laporan | 25 | 51.975.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 962.340.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Sewu Lawu | % | 97.39 | 962.340.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 33.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Sewu Lawu | Dokumen | 1 | 33.200.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 929.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Sewu Lawu | RT/KK | 650 | 929.140.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan | % | 49.59 | 1.479.790.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 52.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Slamet Selatan | % | 100 | 52.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 52.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Slamet Selatan | Dokumen | 35 | 52.500.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 73.680.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan | % | 1.78 | 73.680.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 73.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Slamet Selatan | Laporan | 45 | 73.680.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 1.353.610.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Selatan | % | 97.39 | 1.353.610.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 57.960.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Slamet Selatan | Dokumen | 1 | 57.960.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 1.295.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Slamet Selatan | RT/KK | 950 | 1.295.650.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara | % | 49.96 | 1.515.450.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 52.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Slamet Utara | % | 100 | 52.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 52.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Slamet Utara | Dokumen | 20 | 52.500.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 97.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara | % | 2.52 | 97.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 97.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Slamet Utara | Laporan | 35 | 97.500.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 1.365.450.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Utara | % | 97.39 | 1.365.450.000 | SEKSI ENERGI | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 64.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Slamet Utara | Dokumen | 1 | 64.100.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 1.301.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Slamet Utara | RT/KK | 950 | 1.301.350.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo | % | 49.7 | 800.010.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 49.470.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Solo | % | 100 | 49.470.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 49.470.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Solo | Dokumen | 25 | 49.470.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 87.040.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo | % | 2 | 87.040.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 87.040.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Solo | Laporan | 45 | 87.040.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 663.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Solo | % | 97.39 | 663.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 61.910.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Solo | Dokumen | 1 | 61.910.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 601.590.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Solo | RT/KK | 400 | 601.590.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 49.95 | 418.400.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 92.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 100 | 92.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | 92.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Ungaran Telomoyo | Dokumen | 45 | 92.500.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 2.52 | 125.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Ungaran Telomoyo | Laporan | 50 | 125.000.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 200.900.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 97.39 | 200.900.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 45.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Ungaran Telomoyo | Dokumen | 1 | 45.600.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 155.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Ungaran Telomoyo | RT/KK | 100 | 155.300.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| **Meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB** | | | | | | | | | **4.315.593.000** | **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral** | |
| | | | | | | Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB | % | 2.13 | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | **Meningkatnya produktivitas pemanfaatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan** | | | | | | | | **4.315.593.000** | | |
| | | | | | | Persentase penerapan Good Mining Practice (GMP) | % | 53 | 4.315.593.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | | 3.29.03 | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | | | | | 4.315.593.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah | % | 100 | 362.380.000 | Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A | |
| | | | | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | | 362.380.000 | | |
| | | | | | | Persentase realisasi pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah | % | 100 | 362.380.000 | SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL | |
| | | 3.29.03.1.01.000 6 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut | | | | 362.380.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut di Jawa Tengah | Laporan | 240 | 362.380.000 | SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah | % | 60 | 1.969.170.000 | | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | 1.720.770.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah | % | 60 | 1.720.770.000 | | |
| | | 3.29.03.1.03.000 4 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 1.720.770.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Jawa Tengah | Laporan | 4 | 1.720.770.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | | | | | 248.400.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase deviasi harga pasar dengan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | % | 10 | 248.400.000 | | |
| | | 3.29.03.1.07.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | | | | 248.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam | Laporan | 1 | 248.400.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria | % | 60 | 143.400.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | 143.400.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria | % | 60 | 143.400.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 30.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Muria | Dokumen | 15 | 30.700.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 112.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Muria | Laporan | 30 | 112.700.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan | % | 60 | 196.650.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | 196.650.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan | % | 60 | 196.650.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 52.725.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Selatan | Dokumen | 29 | 52.725.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 143.925.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Selatan | Laporan | 55 | 143.925.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi | % | 60 | 232.500.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | 232.500.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi | % | 60 | 232.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Merapi | Dokumen | 50 | 75.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut | | | | 157.500.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Merapi | Laporan | 45 | 157.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak | % | 60 | 170.000.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak | % | 60 | 170.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 59.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Semarang Demak | Dokumen | 30 | 59.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 111.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Semarang Demak | Laporan | 40 | 111.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan | % | 60 | 132.140.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | 132.140.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan | % | 60 | 132.140.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin | | | | 32.400.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Selatan | Dokumen | 10 | 32.400.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 99.740.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Selatan | Laporan | 40 | 99.740.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah | % | 60 | 100.975.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | 100.975.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah | % | 60 | 100.975.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 20.725.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Tengah | Dokumen | 10 | 20.725.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 80.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Tengah | Laporan | 24 | 80.250.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara | % | 60 | 142.400.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | 142.400.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara | % | 60 | 142.400.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 37.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Utara | Dokumen | 20 | 37.400.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Utara | Laporan | 30 | 105.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu | % | 60 | 133.820.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | 133.820.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu | % | 60 | 133.820.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 47.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Sewu Lawu | Dokumen | 25 | 47.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 86.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Sewu Lawu | Laporan | 30 | 86.320.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan | % | 60 | 253.508.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | 253.508.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan | % | 60 | 253.508.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 53.670.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Selatan | Dokumen | 21 | 53.670.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 199.838.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Selatan | Laporan | 45 | 199.838.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara | % | 60 | 199.500.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | 199.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara | % | 60 | 199.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 62.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Utara | Dokumen | 35 | 62.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 137.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Utara | Laporan | 60 | 137.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo | % | 60 | 197.900.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | 197.900.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo | % | 60 | 197.900.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 82.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Solo | Dokumen | 50 | 82.400.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha | | | | 115.500.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Solo | Laporan | 35 | 115.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 60 | 81.250.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | 81.250.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 60 | 81.250.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Ungaran Telomoyo | Dokumen | 15 | 22.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 58.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Ungaran Telomoyo | Laporan | 20 | 58.750.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **54.876.920.000** | **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 71 | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **53.908.232.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 90.25 | 53.908.232.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 53.908.232.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.002.502.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 305.900.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 305.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 98.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 98.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 20.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 3 | 20.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 32.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 3 | 32.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 13.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 13.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 119.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 119.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 103.825.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 18 | 103.825.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 48.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 48.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 55.825.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 7 | 55.825.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 358.577.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 358.577.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 88.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 88.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 264.827.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 264.827.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 38 | 170.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 65.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 30 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 894.615.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 214.665.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 214.665.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 35.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 35.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 22.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 3 | 22.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.815.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 3.815.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 8.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 8.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 102.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 102.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 50 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 424.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 424.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 88.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 88.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 331.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 331.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 156.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 43 | 156.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 47.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 47.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 8.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 2 | 8.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 26.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 37 | 26.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 867.500.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 254.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 254.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 103.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 103.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 8.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 8.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 76.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 76.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 51 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 7 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 387.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 387.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 64.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 64.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 318.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 318.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 102.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 18 | 102.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 17.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 17.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 60.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 14 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 914.131.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 294.116.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 294.116.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 123.596.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 123.596.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 15.895.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 15.895.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 24.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 24.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 8.625.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 8.625.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 8.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 8.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 97.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 97.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 36.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 37 | 36.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 36.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 37 | 36.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 442.915.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 442.915.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 85.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 352.915.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 352.915.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 76.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 25 | 76.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 23.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 23.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 6.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 1 | 6.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 16.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 20 | 16.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 823.018.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 239.713.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 239.713.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 60.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 60.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 35.102.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 5 | 35.102.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 8.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 8.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 106.811.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 106.811.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 67.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 35 | 67.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 67.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 67.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 368.755.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 368.755.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 73.716.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 73.716.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 290.039.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 290.039.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 83.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 48 | 83.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 23.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 23.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 35.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 44 | 35.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.092.831.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 64.200.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 465.280.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 465.280.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 265.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 265.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 15.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | 15.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 30.330.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 5 | 30.330.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 119.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 119.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 1.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 1.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 1.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 1.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 416.701.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 416.701.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 82.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 82.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 329.201.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 329.201.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 145.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 33 | 145.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 2 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 27 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 777.279.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 219.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 219.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 8.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 8.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 45.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 45.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 12.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 12.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 33.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 3 | 33.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 8.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 8.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 93.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 93.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 403.679.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 403.679.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 60.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 60.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 338.079.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 338.079.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 19 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 38.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 38.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 27.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 15 | 27.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 988.187.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 337.810.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 337.810.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 143.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 143.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 13.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 13.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 33.116.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 3 | 33.116.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 7.594.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 7.594.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 8.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 8.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 119.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 119.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 52.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 39 | 52.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 46.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 38 | 46.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 421.427.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 421.427.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.910.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 3.910.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 83.817.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 83.817.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 333.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 333.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 112.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 12 | 112.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 45.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 45.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 27.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 27.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 936.664.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 279.429.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 279.429.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 125.379.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 125.379.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 26.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | 26.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 19.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 5 | 19.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 5.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 72.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 72.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 8.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 11 | 8.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 3.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 3.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 10 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 465.012.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 465.012.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 83.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 83.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 377.012.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 377.012.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 119.723.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 38 | 119.723.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 38.923.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 38.923.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 3.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 8 | 3.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 27.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 27 | 27.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 40.600.858.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 34.854.878.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 34.854.878.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 34.062.298.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 190 | 34.062.298.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 395.340.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 395.340.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 135.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 12 | 135.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0006 | | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan | Dokumen | 12 | 45.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 217.240.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 217.240.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 345.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 345.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 45.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 188.600.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 188.600.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 36 | 40.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 13.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 72 | 13.600.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Orang | 10 | 35.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.381.104.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.381.104.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 202.354.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 202.354.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 3 | 35.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 5 | 180.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 58.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 58.750.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 600.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 722.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 6 | 722.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 690.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 4 | 690.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.519.026.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 2.519.026.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 21.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 21.250.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 600.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 16.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 16.600.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.881.176.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 1.881.176.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 590.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 72 | 590.250.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 25.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 4 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 210.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 17 | 210.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 5.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 5 | 5.250.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 20 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 25 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 934.335.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 325.043.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 325.043.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 137.020.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 137.020.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 36.023.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 3 | 36.023.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 102.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 102.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 27.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 6 | 27.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 2 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 410.592.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 410.592.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 87.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 87.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 318.192.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 318.192.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 107.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 47 | 107.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 32.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 42 | 32.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 934.640.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 64.200.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 396.940.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 396.940.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 220.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 220.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 12.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 12.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 28.440.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 2 | 28.440.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 8.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 8.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 102.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 102.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 11.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 11.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 376.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 376.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 71.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 71.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 86.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 19 | 86.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 38.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 38.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 8 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 28.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 28.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 16.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 7 | 16.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.120.672.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 414.158.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 414.158.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 8.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 8.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 225.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 225.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 17.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 3 | 17.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 33.858.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 3 | 33.858.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 102.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 102.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 100.143.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 40 | 100.143.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 57.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 57.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 43.143.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 6 | 43.143.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 302.571.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 302.571.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 233.371.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 233.371.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 239.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 20 | 239.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 36.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 36.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 6 | 3.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 19.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 10 | 19.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 2.021.000.000 | Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 64.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 285.625.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 285.625.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 107.675.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 107.675.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 16.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 16.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 33.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 33.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 128.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 128.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 758.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 50 | 758.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 758.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 50 | 758.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 439.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 439.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 434.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 434.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 473.925.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 209 | 473.925.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 461.925.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 208 | 461.925.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **968.688.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3 | 968.688.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 968.688.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 968.688.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 968.688.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 968.688.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 603.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 10 | 603.520.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 365.168.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 18 | 365.168.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan** | | | | | | | | | **2.725.496.000** | **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral** | |
| | | | | | | Indeks Pengelolaan Air Tanah | Angka | 301 | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | **Meningkatnya konservasi air tanah** | | | | | | | | **2.725.496.000** | | |
| | | | | | | Indeks Ketersediaan Air Tanah | Angka | 3.6 | 2.725.496.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | | 3.29.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | | | | | | 2.725.496.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah | % | 100 | 984.900.000 | Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 984.900.000 | | |
| | | | | | | Persentase realisasi pengujian air tanah di Jawa Tengah | % | 100 | 984.900.000 | SEKSI PENGUJIAN AIR | |
| | | 3.29.02.1.03.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah | | | | 984.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul di Jawa Tengah | Dokumen | 1450 | 984.900.000 | SEKSI PENGUJIAN AIR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah | % | 27.5 | 709.346.000 | | |
| | | | | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 409.946.000 | | |
| | | | | | | Jumlah cakupan wilayah penyediaan data geologi di Jawa Tengah | Kabupaten/ Kota | 35 | 409.946.000 | | |
| | | 3.29.02.1.01.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | | | | 409.946.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi yang tersedia di Jawa Tengah | Dokumen | 2 | 409.946.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 299.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Jawa Tengah | % | 100 | 299.400.000 | | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 299.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Jawa Tengah | Laporan | 4 | 299.400.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria | % | 3.4 | 63.700.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 63.700.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Muria | % | 100 | 63.700.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 63.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kendeng Muria | Laporan | 25 | 63.700.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan | % | 2.4 | 46.900.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 46.900.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Selatan | % | 100 | 46.900.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 46.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kendeng Selatan | Laporan | 20 | 46.900.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi | % | 2.8 | 58.500.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 58.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Merapi | % | 100 | 58.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 58.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Merapi | Laporan | 25 | 58.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak | % | 2.9 | 148.000.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 148.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Semarang Demak | % | 100 | 89.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 89.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Semarang Demak | Laporan | 45 | 89.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Semarang Demak | % | 100 | 59.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 59.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Semarang Demak | Dokumen | 30 | 59.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan | % | 2.2 | 47.700.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 47.700.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Selatan | % | 100 | 47.700.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 47.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Selatan | Laporan | 20 | 47.700.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah | % | 1.6 | 53.725.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 53.725.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Tengah | % | 100 | 53.725.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 53.725.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Tengah | Laporan | 20 | 53.725.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara | % | 1.7 | 154.800.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 154.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Utara | % | 100 | 92.800.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 92.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Utara | Laporan | 50 | 92.800.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Utara | % | 100 | 62.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 62.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Serayu Utara | Dokumen | 30 | 62.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu | % | 1.6 | 79.500.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 79.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Sewu Lawu | % | 100 | 79.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 79.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Sewu Lawu | Laporan | 25 | 79.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan | % | 2.7 | 84.750.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 84.750.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Selatan | % | 100 | 84.750.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 84.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Slamet Selatan | Laporan | 25 | 84.750.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara | % | 4.1 | 183.000.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 183.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Utara | % | 100 | 108.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 108.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Slamet Utara | Laporan | 50 | 108.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Utara | % | 100 | 75.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Slamet Utara | Dokumen | 40 | 75.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo | % | 1.6 | 63.250.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 63.250.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Solo | % | 100 | 63.250.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 63.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Solo | Laporan | 30 | 63.250.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 1.8 | 47.425.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 47.425.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 100 | 47.425.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 47.425.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Ungaran Telomoyo | Laporan | 25 | 47.425.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **83.079.973.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **61.668.339.000** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 80 | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **60.106.395.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 86.1 | 60.106.395.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 60.106.395.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.233.040.000 | Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 86.280.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 5 | 86.280.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 86.280.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 5 | 86.280.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 307.260.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 307.260.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 5 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 112.260.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 8 | 112.260.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.000 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 2 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 2 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 9 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 9 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 3 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 516.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 3 | 516.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 176.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 176.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 340.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 3 | 340.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 178.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 19 | 178.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 66.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 5 | 66.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 0 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.220.745.000 | Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 76.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 76.080.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 76.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 76.080.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 9.366.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 9.366.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 9.366.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 9.366.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 274.695.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 274.695.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 48.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 48.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 37.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 37.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 45.695.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 3 | 45.695.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 17.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 4 | 17.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 10.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 8 | 10.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 10.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 614.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 3 | 614.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 145.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 145.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 466.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 466.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 235.304.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 41 | 235.304.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 10 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 66.304.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 5 | 66.304.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 89.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 89.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 6.310.070.000 | Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 82.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 82.320.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 82.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 82.320.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 236.570.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 236.570.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 84.070.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 84.070.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 37.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 37.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 48 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 48 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 4.122.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 9 | 4.122.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 4.122.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 8 | 4.122.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.234.180.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 3 | 1.234.180.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 355.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 355.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 878.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 878.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 30 | 600.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 6 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 370.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 370.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 5.694.500.000 | Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 93.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 93.480.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 93.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 93.480.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 318.179.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 318.179.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 84.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 11 | 84.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 19.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 19.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 4.365.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 4.365.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 49.964.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 49.964.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 3.040.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 129 | 3.040.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 3.040.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 3 | 3.040.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.229.620.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 3 | 1.229.620.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 7.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 7.720.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 375.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 375.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 846.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 846.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 973.221.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 30 | 973.221.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 49.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 49.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 202.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 100 | 202.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 525.421.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 525.421.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 125.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 125.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 40.200.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 40.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 2.300.650.000 | Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 88.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 3 | 88.680.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 88.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 88.680.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 522.370.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 522.370.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 34.970.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 34.970.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 139.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 139.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 0 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 2 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 223.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 2 | 223.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 471.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 16 | 471.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | 471.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 0 | 471.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 772.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 772.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 285.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 3 | 285.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 487.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 487.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 401.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 41 | 401.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 26.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 26.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 30.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 30.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 5 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 57.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 3 | 57.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 0 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 0 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 134.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 134.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 29.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 10 | 29.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 10 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 0 | 43.347.390.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 34.385.190.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 5 | 34.385.190.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 33.264.030.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 204 | 33.264.030.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.009.760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 1.009.760.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 21.575.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 12 | 21.575.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 2 | 80.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 9.825.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 9.825.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0008 | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 175.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | 92.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Laporan | 2 | 92.850.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.04.0002 | | | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah | Dokumen | 2 | 65.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.04.0007 | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 27.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | Laporan | 2 | 27.850.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 1.295.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 3 | 1.295.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 2 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 20 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 1.070.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 800 | 1.070.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.498.250.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.498.250.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 111.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 10 | 111.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 160.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 115.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 115.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 813.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 813.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 48.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 48.750.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 316.600.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | % | 33 | 316.600.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 24 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 197.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 22 | 197.850.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 93.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 2 | 93.750.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 4.099.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 2 | 4.099.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1.675.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 1.675.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.414.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 2.414.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.485.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 56 | 1.485.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 40 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 5 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 198.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 25 | 198.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 355.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 355.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 40 | 110.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 487.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 10 | 487.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah** | | | | | | | | **1.561.944.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.05 | 1.561.944.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 1.561.944.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 0 | 1.561.944.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 1.561.944.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 1.561.944.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 742.545.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 5 | 742.545.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 819.399.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 8 | 819.399.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| **Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan** | | | | | | | | | **31.983.395.000** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan | % | 3.25 | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | **Meningkatnya persentase nilai kontribusi sektor industri dalam PDRB** | | | | | | | | **31.983.395.000** | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor industri dalam PDRB | % | 3.89 | 31.983.395.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | | 30.869.870.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif | % | 4.38 | 12.537.469.000 | Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A | |
| | | | | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | | | | 12.537.469.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pelatihan Peningkatan kualitas kemasan dan Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan | Orang | 100 | 12.537.469.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN | |
| | | 3.31.02.1.01.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | 1.141.553.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Dokumen | 3 | 1.141.553.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN | |
| | | 3.31.02.1.01.0005 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | 11.395.916.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat di BIKDK | Dokumen | 1 | 11.395.916.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN | |
| | | | | | | Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa | % | 3.45 | 2.830.100.000 | Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A | |
| | | | | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | | | | 2.830.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan dan yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna | Orang | 340 | 2.830.100.000 | SEKSI PELAYANAN JASA KETEKNIKAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.31.02.1.01.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | 2.830.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Dokumen | 2 | 2.830.100.000 | SEKSI PELAYANAN JASA KETEKNIKAN | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan produksi industri agro | % | 2.25 | 5.170.141.000 | Bidang Industri Agro | |
| | | | | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | | | | 5.170.141.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Informasi Industri Agro | Dokumen | 1 | 85.630.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO | |
| | | 3.31.02.1.01.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | 85.630.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Dokumen | 1 | 85.630.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Industri Agro yang mendapatkan fasilitasi | Orang | 12 | 3.383.911.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO | |
| | | 3.31.02.1.01.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | 1.443.815.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Dokumen | 2 | 1.443.815.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO | |
| | | 3.31.02.1.01.0005 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | 1.940.096.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Dokumen | 1 | 1.940.096.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO | |
| | | | | | | Jumlah SDM Industri Agro Yang dilatih | Orang | 200 | 1.700.600.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI INDUSTRI AGRO | |
| | | 3.31.02.1.01.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | 1.700.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Dokumen | 2 | 1.700.600.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI INDUSTRI AGRO | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan produksi industri non agro | % | 2.25 | 3.843.068.000 | Bidang Industri Non Agro | |
| | | | | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | | | | 3.843.068.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Informasi Industri Non Agro | Dokumen | 1 | 40.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO | |
| | | 3.31.02.1.01.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Dokumen | 1 | 40.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Industri Non Agro yang mendapatkan fasilitasi | Orang | 9 | 2.966.838.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO | |
| | | 3.31.02.1.01.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | 1.318.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Dokumen | 2 | 1.318.480.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO | |
| | | 3.31.02.1.01.0005 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | 1.648.358.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Dokumen | 1 | 1.648.358.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO | |
| | | | | | | Jumlah SDM Industri Non Agro Yang dilatih | Orang | 100 | 836.230.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI NON AGRO | |
| | | 3.31.02.1.01.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | 836.230.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Dokumen | 3 | 836.230.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI NON AGRO | |
| | | | | | | Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki | % | 85 | 6.489.092.000 | Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A | |
| | | | | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | | | | 6.489.092.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peserta pelatihan industri produk tekstil dan alas kaki | Orang | 2000 | 6.489.092.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL | |
| | | 3.31.02.1.01.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | 6.489.092.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Dokumen | 4 | 6.489.092.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL | |
| | | 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | | | | 290.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan | % | 7 | 80.000.000 | Bidang Industri Agro | |
| | | | | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan | Dokumen | 5 | 80.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO | |
| | | 3.31.03.1.01.0003 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI,IPKI Kewenangan Provinsi | Dokumen | 1 | 40.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO | |
| | | 3.31.03.1.01.0004 | | | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis prizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah -Tinggi dan Tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS | Dokumen | 5 | 40.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO | |
| | | | | | | Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan | % | 10 | 210.000.000 | Bidang Industri Non Agro | |
| | | | | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | | | | | 210.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan | Dokumen | 50 | 210.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO | |
| | | 3.31.03.1.01.0003 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI,IPKI Kewenangan Provinsi | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO | |
| | | 3.31.03.1.01.0004 | | | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | | 185.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis prizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah -Tinggi dan Tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS | Dokumen | 2 | 185.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO | |
| | | 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | | | 823.525.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional | % | 1.62 | 507.525.000 | Bidang Industri Agro | |
| | | | | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | 507.525.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penambahan Industri Agro dalam SIINAS | Unit | 20 | 507.525.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO | |
| | | 3.31.04.1.01.0001 | | | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | 394.692.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Dokumen | 2 | 394.692.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO | |
| | | 3.31.04.1.01.0002 | | | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Provinsi melalui SIINaS | Dokumen | 1 | 40.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO | |
| | | 3.31.04.1.01.0003 | | | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | 72.833.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINas | Dokumen | 1 | 72.833.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional | % | 2 | 316.000.000 | Bidang Industri Non Agro | |
| | | | | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | 316.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri Non Agro dalam SIINAS | Unit | 28 | 316.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO | |
| | | 3.31.04.1.01.0001 | | | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO | |
| | | 3.31.04.1.01.0002 | | | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Provinsi melalui SIINaS | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO | |
| | | 3.31.04.1.01.0003 | | | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | 241.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINas | Dokumen | 1 | 241.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO | |
| **Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (Inf)** | | | | | | | | | **1.980.961.000** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan | % | 4.51 | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | **Terjaganya Inflasi Pangan Bergejolak** | | | | | | | | **1.980.961.000** | | |
| | | | | | | Inflasi pangan bergejolak | % | 4 | 1.980.961.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | | | 1.980.961.000 | | |
| | | | | | | Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota | % | 10 | 1.980.961.000 | Bidang Perdagangan Dalam Negeri | |
| | | | | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 76.665.000 | | |
| | | | | | | Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipantau ketersediaannya | Komoditi | 10 | 76.665.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | 3.30.04.1.01.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | | | | 76.665.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat distributor dan sub distributor | Laporan | 2 | 76.665.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | | | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | | | 1.904.296.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang di pantau Harganya | Unit | 34 | 487.656.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | 3.30.04.1.02.0001 | | | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | | | | 487.656.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | Laporan | 12 | 487.656.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | | | | | Jumlah lokasi operasi pasar yang dilakukan pemantauan harga kapokmas | Lokasi | 35 | 1.416.640.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | 3.30.04.1.02.0002 | | | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 1.416.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kab / kota dalam 1 provinsi | Laporan | 4 | 1.416.640.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| **Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (PE)** | | | | | | | | | **9.001.578.000** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan | % | 4.51 | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | **Meningkatnya persentase nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB** | | | | | | | | **9.001.578.000** | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB | % | 4.82 | 9.001.578.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | | | 117.640.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah | % | 8 | 50.000.000 | Bidang Perdagangan Luar Negeri | |
| | | | | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Presentase kenaikan penerbitan Dokumen keterangan asal | % | 3.5 | 50.000.000 | SEKSI EKSPOR DAN IMPOR | |
| | | 3.30.02.1.04.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penerbitan SKA | Dokumen | 104000 | 50.000.000 | SEKSI EKSPOR DAN IMPOR | |
| | | | | | | Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2) | % | 10 | 67.640.000 | Bidang Perdagangan Dalam Negeri | |
| | | | | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor | | | | | 12.660.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Distributor Terdaftar yang Terlayani Rekomendasi SIUP MB | Unit | 2 | 12.660.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | 3.30.02.1.01.0001 | | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 12.660.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SIUP MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perozonan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik | Dokumen | 2 | 12.660.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | | | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan | | | | | 42.100.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi perijinan berusaha bagi distributor bahan berbahaya | Unit | 15 | 42.100.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | 3.30.02.1.02.0001 | | | Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | 42.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil fasilitasi perizinan berusaha terintegrasi secara elesktronik | Dokumen | 15 | 42.100.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | | | Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar | | | | | 12.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Distributor Terdaftar yang Terlayani Rekomendasi Bahan Berbahaya | Unit | 1 | 12.880.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | 3.30.02.1.03.0001 | | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | 12.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat rekomendasi perdagangan besar/ Distribusi Bahan Berbahaya melalui OSS | Dokumen | 1 | 12.880.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | | | | | Persentase peningkatan pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi | % | 0 | | Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | |
| | | | | Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha Bahan Berbahaya Yang diawasi | Orang | 0 | | SEKSI TERTIB NIAGA | |
| | | 3.30.02.1.03.0003 | | | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pengawasan distribusi , pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya | Laporan | 0 | | SEKSI TERTIB NIAGA | |
| | | 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | | 634.445.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi | % | 10 | 634.445.000 | Bidang Perdagangan Dalam Negeri | |
| | | | | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas | | | | | 634.445.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Pasar Rakyat yang Dilatih | Orang | 80 | 162.490.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH | |
| | | 3.30.03.1.01.0002 | | | Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | | | | 162.490.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan persiapan pembangunan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | Laporan | 3 | 162.490.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH | |
| | | | | | | Jumlah Persiapan dan Pembangunan Pusat Distribusi Regional dan Pusat DIstribusi Provinsi | Kegiatan | 1 | 80.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH | |
| | | 3.30.03.1.01.0001 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | Unit | 0 | 80.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH | |
| | | | | | | Realisasi transaksi dipasar lelang | Kali | 13 | 391.955.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | 3.30.03.1.01.0003 | | | Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas | | | | 391.955.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pengguna pasar lelang komoditas yang berpartisipasi | Orang | 410 | 391.955.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | | | 335.444.000 | | |
| | | | | | | Persentase kinerja realisasi pupuk | % | 90 | 265.284.000 | Bidang Perdagangan Dalam Negeri | |
| | | | | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | | | | | 265.284.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pengadaan pupuk dan pestisida yang diawasi | Kegiatan | 1 | 36.500.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | 3.30.04.1.03.0002 | | | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi | | | | 36.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida tingkat daerah provinsi | Laporan | 1 | 36.500.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha distribusi pupuk bersubsidi yang diperiksa perizinannya | Orang | 20 | 31.100.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | 3.30.04.1.03.0004 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida | | | | 31.100.000 | | |
| | | | | | | jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida | Laporan | 6 | 31.100.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | 3.30.04.1.03.0005 | | | Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil Pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan distribusi | Laporan | 0 | | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pupuk yang pendistribusiannya tidak sesuai ketentuan | Orang | 15 | 197.684.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | 3.30.04.1.03.0003 | | | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | | | | 197.684.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dengan realisasi minimal 90 % | Laporan | 1 | 197.684.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | | | | | Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi | % | 30 | 70.160.000 | Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | |
| | | | | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | | | | | 70.160.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha Pupuk Bersubsidi Yang diawasi | Orang | 80 | 70.160.000 | SEKSI TERTIB NIAGA | |
| | | 3.30.04.1.03.0005 | | | Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi | | | | 70.160.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil Pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan distribusi | Laporan | 0 | 70.160.000 | SEKSI TERTIB NIAGA | |
| | | 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | | | 2.980.978.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan nilai ekspor non migas | % | 2 | 2.980.978.000 | Bidang Perdagangan Luar Negeri | |
| | | | | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | | | | | 2.980.978.000 | | |
| | | | | | | Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri | Dokumen | 3 | 458.846.000 | SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PASAR | |
| | | 3.30.05.1.01.0004 | | | Peningkatan Citra Produk Ekspor | | | | 458.846.000 | | |
| | | | | | | Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi | Komoditi | 4 | 458.846.000 | SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PASAR | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha Yang Melakukan Ekspor | Orang | 1400 | 1.157.191.000 | SEKSI EKSPOR DAN IMPOR | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.30.05.1.01.0002 | | | Pameran Dagang Lokal | | | | 1.157.191.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina | Orang | 60 | 1.157.191.000 | SEKSI EKSPOR DAN IMPOR | |
| | | | | | | Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi | Dokumen | 2 | 1.364.941.000 | SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI | |
| | | 3.30.05.1.01.0001 | | | Pameran Dagang Internasional/Nasional | | | | 1.185.621.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang | Orang | 7 | 1.185.621.000 | SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI | |
| | | 3.30.05.1.01.0002 | | | Pameran Dagang Lokal | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pameran dagang lokal | Orang | 0 | | SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI | |
| | | 3.30.05.1.01.0003 | | | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | | | | 179.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang | Orang | 107 | 179.320.000 | SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI | |
| | | 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | | 3.482.628.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen | % | 1 | 1.642.266.000 | Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | |
| | | | | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 845.190.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Aduan Masyarakat | Laporan | 10 | 421.170.000 | SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN | |
| | | 3.30.06.1.01.0002 | | | Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen | | | | 46.835.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang aktif | Kelompok | 7 | 46.835.000 | SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN | |
| | | 3.30.06.1.01.0003 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | | | | 374.335.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani | Dokumen | 10 | 374.335.000 | SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi | Orang | 300 | 424.020.000 | SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN | |
| | | 3.30.06.1.01.0001 | | | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | | | | 424.020.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Badan Penanganan Sengketa Konsumen (BPSK) yang aktif | Kelompok | 1 | 424.020.000 | SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN | |
| | | | | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 575.056.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Standarisasi Industri | Orang | 50 | 575.056.000 | SEKSI STANDARISASI INDUSTRI | |
| | | 3.30.06.1.02.0006 | | | Pemantauan Mutu Produk | | | | 31.860.000 | | |
| | | | | | | Jumlah komoditi potensial yang dipantau | Komoditi | 13 | 31.860.000 | SEKSI STANDARISASI INDUSTRI | |
| | | 3.30.06.1.02.0007 | | | Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi | | | | 543.196.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat produk yang di terbitkan | Sertifikat | 4 | 543.196.000 | SEKSI STANDARISASI INDUSTRI | |
| | | | | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 222.020.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Barang Beredar Yang diawasi (Unit Barang) | Unit | 100 | 222.020.000 | SEKSI TERTIB NIAGA | |
| | | 3.30.06.1.03.0003 | | | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | | | | 222.020.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi | Laporan | 6 | 222.020.000 | SEKSI TERTIB NIAGA | |
| | | | | | | Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang | % | 10 | 636.450.000 | Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A | |
| | | | | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 636.450.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu | Kegiatan | 990 | 636.450.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.06.1.02.0004 | | | Pengembangan Layanan Kalibrasi | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan | Sertifikat | 990 | 100.000.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.06.1.02.0005 | | | Pengembangan Layanan Pengujian | | | | 536.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang | Dokumen | 40 | 536.450.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.06.1.02.0006 | | | Pemantauan Mutu Produk | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau | Komoditi | | | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.06.1.02.0007 | | | Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan | Sertifikat | | | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | | | | | Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta | % | 5 | 1.203.912.000 | Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A | |
| | | | | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.203.912.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu | Kegiatan | 2787 | 1.203.912.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.06.1.02.0004 | | | Pengembangan Layanan Kalibrasi | | | | 210.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan | Sertifikat | 980 | 210.000.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.06.1.02.0005 | | | Pengembangan Layanan Pengujian | | | | 793.912.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang | Dokumen | 1600 | 793.912.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.06.1.02.0006 | | | Pemantauan Mutu Produk | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah komoditi ekspor yang dipantau | Komoditi | 0 | | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.06.1.02.0007 | | | Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan | Sertifikat | 20 | 200.000.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | | | 1.450.443.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri | % | 10 | 1.450.443.000 | Bidang Perdagangan Dalam Negeri | |
| | | | | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri | | | | | 801.770.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku IKM/UDKM yang difasilitasi promosi | Orang | 20 | 509.100.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | 3.30.07.1.01.0002 | | | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | | | | 509.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepesertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri | Unit | 20 | 509.100.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | | | | | Jumlah pengembangan sistem informasi perdagangan | Kegiatan | 1 | 292.670.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH | |
| | | 3.30.07.1.01.0002 | | | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | | | | 292.670.000 | | |
| | | | | | | Jumlah data dan informasi Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan | Dokumen | 1 | 292.670.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH | |
| | | | | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | | 274.513.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi kemitraan | Dokumen | 25 | 274.513.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | 3.30.07.1.02.0002 | | | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | | | | 274.513.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan, dan jasa akomodasi | Kelompok | 260 | 274.513.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | | | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | | 374.160.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mendapatkan edukasi Penggunaan Produk Dalam Negeri | Orang | 1150 | 374.160.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | 3.30.07.1.03.0002 | | | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | 62.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Sosialisasi peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | Laporan | 1 | 62.900.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | 3.30.07.1.03.0005 | | | Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | | | | 311.260.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stake holder dan tokoh masyarakat | Laporan | 2 | 311.260.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **104.634.273.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sekretariat Daerah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas kebijakan daerah** | | | | | | | | | **157.674.449.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | 36.1 | | | |
| | **Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil** | | | | | | | | **157.674.449.000** | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah | % | 80 | 3.395.656.000 | | |
| | | 4.01.02 | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | | | | | 1.710.656.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB | % | 14.29 | 170.000.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota | Dokumen | 4 | 170.000.000 | | |
| | | 4.01.02.1.02.0001 | | | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota | Laporan | 4 | 170.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya | % | 85.71 | 150.470.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | 150.470.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota | Dokumen | 4 | 150.470.000 | | |
| | | 4.01.02.1.01.0002 | | | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | | | | 150.470.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota | Laporan | 12 | 150.470.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A | % | 64.28 | 272.861.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | | | 272.861.000 | | |
| | | | | | | Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya | Dokumen | 4 | 272.861.000 | | |
| | | 4.01.02.1.02.0002 | | | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | | | | 272.861.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota | Laporan | 4 | 272.861.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan | % | 50 | 314.520.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | | | 314.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan | Dokumen | 4 | 314.520.000 | | |
| | | 4.01.02.1.02.0004 | | | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | | | | 314.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan | Laporan | 12 | 314.520.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif | % | 88.1 | 179.500.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | 179.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota | Dokumen | 4 | 179.500.000 | | |
| | | 4.01.02.1.01.000 | | | Penataan Analisis Jabatan | | | | 179.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota | Laporan | 4 | 179.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A | % | 60 | 95.785.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | | | 95.785.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD | Dokumen | 4 | 95.785.000 | | |
| | | 4.01.02.1.02.0001 | | | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | | 95.785.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD | Laporan | 12 | 95.785.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi | % | 66 | 214.000.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | 214.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi | Dokumen | 4 | 214.000.000 | | |
| | | 4.01.02.1.01.0001 | | | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | | | | 214.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah | Laporan | 12 | 153.680.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah laporan koordinasi , fasilitasi dan asistensi peningkatan kematangan organisasi dan kebijakan perangkat daerah | Laporan | 12 | 60.320.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan | % | 88.73 | 313.520.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | | | 313.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik | Dokumen | 4 | 313.520.000 | | |
| | | 4.01.02.1.02.0005 | | | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | | | | 313.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Laporan | 12 | 313.520.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.08 | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | | | | 1.685.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian pelaksanaan APBD | % | 98.7 | 415.000.000 | | |
| | | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | 415.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD | Dokumen | 4 | 195.000.000 | | |
| | | 4.01.08.1.01.0001 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | | | | 195.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah  Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD | Laporan | 12 | 195.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD | Dokumen | 4 | 220.000.000 | | |
| | | 4.01.08.1.01.0001 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah  Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD | Laporan | 12 | 220.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase capaian pelaksanaan APBN | % | 95.5 | 210.000.000 | | |
| | | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | 210.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN | Dokumen | 4 | 210.000.000 | | |
| | | 4.01.08.1.01.0002 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | | | | 210.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah  Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari  APBN | Laporan | 8 | 210.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah | % | 85 | 467.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | 467.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Dokumen | 4 | 120.000.000 | | |
| | | 4.01.08.1.02.0001 | | | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah | Dokumen | 4 | 120.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap | % | 91 | 347.000.000 | | |
| | | 4.01.08.1.02.0002 | | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | 347.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah | Dokumen | 12 | 347.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase realisasi bantuan keuangan | % | 85 | 490.000.000 | | |
| | | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | 490.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I | Dokumen | 8 | 207.225.000 | | |
| | | 4.01.08.1.01.0003 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | | | | 207.225.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I | Dokumen | 8 | 207.225.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II | Dokumen | 8 | 207.775.000 | | |
| | | 4.01.08.1.01.0003 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | | | | 207.775.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II | Dokumen | 8 | 207.775.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III | Dokumen | 8 | 75.000.000 | | |
| | | 4.01.08.1.01.0003 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III | Dokumen | 8 | 75.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi | % | 100 | 103.000.000 | | |
| | | | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | 103.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah  Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | Dokumen | 2 | 103.000.000 | | |
| | | 4.01.08.1.02.0003 | | | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | | | | 103.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | Dokumen | 2 | 103.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase  capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat | % | 90 | 146.861.151.000 | | |
| | | 4.01.03 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | | | | | | 3.783.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti | % | 95 | 980.000.000 | | |
| | | | | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | | | | | 980.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ | Dokumen | 8 | 980.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.01.0001 | | | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | | | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan AdministrasiKebijakan Pemerintahan | Dokumen | 4 | 550.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.03.1.01.0002 | | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | | | | 230.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi PelaksanaanPemerintahan Umum | Dokumen | 4 | 230.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.03.1.01.0003 | | | Fasilitasi Penataan Wilayah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah | Dokumen | 4 | 200.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah | % | 95 | 1.630.000.000 | | |
| | | | | Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | 1.630.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM | Dokumen | 3 | 225.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.02.0002 | | | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM | Dokumen | 4 | 225.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD | % | 95 | 1.100.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.02.0001 | | | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | | | | 1.100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | Dokumen | 45 | 1.100.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | % | 100 | 305.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.02.0003 | | | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | 305.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Laporan | 37 | 305.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Tingkat efektivitas kerjasama daerah | % | 95 | 1.173.000.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Kerjasama Daerah | | | | | 1.173.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti | % | 95 | 605.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.03.0001 | | | Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah | | | | 605.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah dalam negeri | Dokumen | 9 | 485.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri | Dokumen | 5 | 120.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti | % | 95 | 200.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.03.0002 | | | Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Dalam Negeri | Dokumen | 6 | 100.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri | Dokumen | 4 | 100.000.000 | | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah | % | 95 | 368.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.03.0003 | | | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | 368.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang Dievaluasi | Laporan | 4 | 153.000.000 | | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Kerja Sama  Luar Negeri yang Dievaluasi | Laporan | 4 | 107.550.000 | | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase layanan izin perjalanan ke  Luar Negeri | % | 100 | 107.450.000 | | OPD Provinsi |
| | | 4.01.04 | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | | 140.639.161.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar | % | 81 | 750.000.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | | | | | 750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang  Kesehatan | Dokumen | 4 | 250.000.000 | | |
| | | 4.01.04.1.02.0002 | | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | Dokumen | 8 | 250.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan | Dokumen | 4 | 250.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 4.01.04.1.02.0001 | | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Dokumen | 8 | 250.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial | Dokumen | 4 | 250.000.000 | | |
| | | 4.01.04.1.02.0003 | | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | Dokumen | 8 | 250.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar | % | 82 | 750.000.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | | | | | 750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan | Dokumen | 4 | 225.000.000 | | |
| | | 4.01.04.1.03.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan | Dokumen | 8 | 225.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dokumen | 4 | 300.000.000 | | |
| | | 4.01.04.1.03.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dokumen | 8 | 300.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan | Dokumen | 4 | 225.000.000 | | |
| | | 4.01.04.1.03.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan | Dokumen | 8 | 225.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik | % | 54 | 139.139.161.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | | | | | 139.139.161.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku | Dokumen | 4 | 135.231.286.000 | | |
| | | 4.01.04.1.01.0001 | | | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | | | | 135.231.286.000 | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan | Unit | 750 | 135.231.286.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan | Dokumen | 4 | 3.907.875.000 | | |
| | | 4.01.04.1.01.0002 | | | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | | | | 3.907.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji | Kegiatan | 1 | 1.712.600.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan | Kegiatan | 8 | 2.195.275.000 | | OPD Provinsi |
| | | 4.01.05 | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | | | | | | 2.438.990.000 | | |
| | | | | | | Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani | % | 96 | 680.000.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | 680.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara | Dokumen | 12 | 680.000.000 | | |
| | | 4.01.05.1.02.0001 | | | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | | | | 680.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara | Perkara | 11 | 200.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu | Perkara | 200 | 480.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota peduli HAM | % | 96 | 293.076.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | 293.076.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Dokumen | 12 | 293.076.000 | | |
| | | 4.01.05.1.02.0002 | | | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | | | | 293.076.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen kebijakan yang telah diharmonisasi berdasarkan perspektif HAM | Dokumen | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota | Kabupaten/Kota | 35 | 103.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Sengketa | 7 | 190.076.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan | % | 96 | 874.368.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | | | | | 874.368.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen kajian produk hukum | Dokumen | 12 | 430.118.000 | | |
| | | 4.01.05.1.01.0003 | | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | | | | 430.118.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | Laporan | 12 | 287.168.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | Laporan | 12 | 142.950.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur | Dokumen | 12 | 44.000.000 | | |
| | | 4.01.05.1.01.0002 | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | | | | 44.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah | Laporan | 12 | 44.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Dokumen | 12 | 400.250.000 | | |
| | | 4.01.05.1.01.0001 | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | | | | 400.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah | Laporan | 12 | 150.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah | Laporan | 12 | 250.250.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji | % | 96 | 591.546.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | | | | | 591.546.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 12 | 591.546.000 | | |
| | | 4.01.05.1.01.0004 | | | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | | | | 591.546.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I | Dokumen | 70 | 191.546.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II | Dokumen | 75 | 210.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III | Dokumen | 75 | 190.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa | % | 90 | 7.417.642.000 | | |
| | | 4.01.06 | PROGRAM PEREKONOMIAND ANPEMBANGUNAN | | | | | | 4.912.642.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur | % | 85 | 616.360.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | | | | | 616.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, | Dokumen | 2 | 346.560.000 | | |
| | | 4.01.06.1.02.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | 346.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Laporan | 4 | 346.560.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Dokumen | 2 | 269.800.000 | | |
| | | 4.01.06.1.02.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | 269.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Laporan | 4 | 269.800.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan | % | 85 | 537.760.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | | | | | 537.760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM | Dokumen | 2 | 257.760.000 | | |
| | | 4.01.06.1.02.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | 257.760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM | Laporan | 4 | 257.760.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Dokumen | 2 | 280.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.02.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | 280.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Laporan | 4 | 280.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang pertanian | % | 87 | 1.246.074.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | | | | | 1.246.074.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan | Dokumen | 2 | 180.880.000 | | |
| | | 4.01.06.1.02.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | 180.880.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan  Kelautan dan Perikanan | Laporan | 4 | 180.880.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan | Dokumen | 2 | 199.880.000 | | |
| | | 4.01.06.1.02.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | 199.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan | Laporan | 4 | 199.880.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian | Dokumen | 2 | 865.314.000 | | |
| | | 4.01.06.1.02.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | 865.314.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT | Laporan | 2 | 600.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian | Laporan | 4 | 265.314.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha | % | 81 | 300.000.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha | Dokumen | 2 | 300.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.03.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah  Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha | Laporan | 4 | 300.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan | % | 85 | 1.000.000.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan | Dokumen | 2 | 850.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.03.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | | | | 850.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan | Laporan | 4 | 850.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan | Dokumen | 2 | 150.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.03.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD Jasa Keuangan | Laporan | 4 | 150.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase nilai kemandirian BLUD | % | 55 | 50.000.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD | Dokumen | 2 | 25.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.03.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah  Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | Laporan | 2 | 25.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD | Dokumen | 2 | 25.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 4.01.06.1.03.0005 | | | Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah | Laporan | 2 | 25.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan | % | 83 | 462.448.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | | | | | 462.448.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan | Dokumen | 4 | 220.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.01.0001 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perhubungan | Laporan | 8 | 220.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro | Dokumen | 4 | 242.448.000 | | |
| | | 4.01.06.1.01.0001 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | | | | 242.448.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Makro | Laporan | 8 | 242.448.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan | % | 78 | 700.000.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro | Dokumen | 4 | 315.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.01.0002 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | | | | 315.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Mikro | Laporan | 8 | 315.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan | Dokumen | 4 | 385.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.01.0002 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | | | | 385.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perindustrian dan Perdagangan | Laporan | 8 | 385.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.07 | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | | | 2.505.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa | % | 90 | 1.355.000.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | 1.355.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa | Laporan | 4 | 1.355.000.000 | | |
| | | 4.01.07.1.01.0001 | | | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 280.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi perencanaan Strategi pengadaan barang/jasa | Laporan | 4 | 180.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyusunan SHB | Laporan | 2 | 100.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.07.1.01.0002 | | | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 853.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta (non e purchasing) | Laporan | 12 | 700.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal | Laporan | 4 | 153.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.07.1.01.0003 | | | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 222.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 4 | 222.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa | % | 81 | 506.000.000 | | |
| | | | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | 506.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | Laporan | 4 | 506.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 4.01.07.1.03.0001 | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 157.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah | Laporan | 2 | 157.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.07.1.03.0002 | | | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 173.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan UKPBJ | Laporan | 4 | 173.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.07.1.03.0003 | | | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 176.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa | Laporan | 4 | 176.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik | % | 80 | 644.000.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | 644.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa | Laporan | 4 | 644.000.000 | | |
| | | 4.01.07.1.02.0001 | | | Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik | | | | 203.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik | Laporan | 4 | 203.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.07.1.02.0002 | | | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 315.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem InformasiPengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 2 | 315.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.07.1.02.0003 | | | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 126.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 4 | 126.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **205.630.432.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah | Angka | 76 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **205.440.432.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 82 | 205.440.432.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 205.440.432.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | % | 100 | 4.355.000.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | % | 100 | 25.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 25.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | Laporan | 12 | 30.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 30.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | 210.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | % | 100 | 210.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.11.0002 | | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah yang disediakan | Paket | 4 | 130.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan wakil kepala daerah yang disediakan | Paket | 4 | 30.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.11.0003 | | | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah | Orang | 4 | 40.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Wakil Kepala Daerah | Orang | 4 | 10.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | | | 4.090.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan | % | 100 | 4.090.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.12.0001 | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | 2.950.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan | Paket | 12 | 2.950.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.12.0002 | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan | Paket | 12 | 40.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.12.0003 | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | 1.100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan | Paket | 12 | 1.100.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah | % | 100 | 437.104.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 437.104.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah | % | 100 | 437.104.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 362.104.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan | Laporan | 24 | 362.104.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan | Laporan | 16 | 75.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa | % | 100 | 261.800.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 261.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | % | 100 | 261.800.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 236.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 12 | 236.800.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 12 | 25.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum | % | 100 | 526.209.000 | | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum | % | 100 | 350.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT | Orang | 800 | 350.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 176.209.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum | % | 100 | 176.209.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 166.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Hukum | Laporan | 12 | 166.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 10.209.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Hukum | Laporan | 12 | 10.209.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang | % | 100 | 811.595.000 | | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam | % | 100 | 400.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai | Orang | 8000 | 400.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 411.595.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang | % | 100 | 411.595.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 386.595.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan | Laporan | 12 | 210.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA | Laporan | 12 | 176.595.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan | Laporan | 12 | 15.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA | Laporan | 12 | 10.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat | % | 100 | 495.553.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 495.553.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat | % | 100 | 495.553.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 12 | 350.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 145.553.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 12 | 145.553.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | % | 100 | 720.772.000 | | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 184.115.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi | % | 100 | 184.115.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 141.115.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 4 | 141.115.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 43.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 12 | 43.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 536.657.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | % | 100 | 536.657.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 476.657.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi | Laporan | 12 | 230.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi | Laporan | 12 | 246.657.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi | Laporan | 12 | 20.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi | Laporan | 12 | 40.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan | % | 100 | 840.452.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 840.452.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra | % | 100 | 840.452.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 806.246.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 12 | 425.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama | Laporan | 12 | 381.246.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 34.206.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 12 | 10.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama | Laporan | 12 | 24.206.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian | % | 100 | 290.000.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 290.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian | % | 100 | 290.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 275.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Perekonomian | Laporan | 12 | 275.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Perekonomian | Laporan | 12 | 15.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol | % | 100 | 17.286.000.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 165.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol | % | 100 | 165.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 45.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 120.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | | | | | 14.870.753.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan | Laporan | 12 | 14.870.753.000 | | |
| | | X.XX.01.1.13.0001 | | | Penyiapan Materi Pimpinan | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan | Dokumen | 12 | 300.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.13.0002 | | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | 11.570.753.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan | Laporan | 12 | 11.570.753.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.13.0003 | | | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | | | | 3.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan dokumentasi pimpinan | Laporan | 12 | 3.000.000.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | 2.250.247.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun | Laporan | 12 | 2.250.247.000 | | |
| | | X.XX.01.1.14.0001 | | | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | | | | 2.080.247.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara | Laporan | 12 | 2.080.247.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.14.0002 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah | Laporan | 12 | 150.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.14.0003 | | | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan | Laporan | 1 | 20.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda | % | 100 | 179.415.947.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 108.516.013.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Laporan | 12 | 108.516.013.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 106.601.013.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Bulan | 12 | 106.601.013.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.540.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 1.540.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 12 | 300.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 75.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 742.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 742.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 442.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 442.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 300.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Laporan | 12 | 20.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.04.0007 | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | Laporan | 12 | 20.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 7.418.996.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda | % | 100 | 7.418.996.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 352.437.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 352.437.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 500.718.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 500.718.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 425.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 425.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 120.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 150.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 4.241.605.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 4.241.605.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1.629.236.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 1.629.236.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 3.835.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Paket | 2 | 3.835.500.000 | | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 810.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 2 | 810.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 3.025.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 50 | 3.025.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 24.231.213.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda | Laporan | 12 | 24.231.213.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 7.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 7.000.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 631.213.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 631.213.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 16.600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 16.100.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum | Laporan | 4 | 200.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah | Laporan | 2 | 300.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 6.658.908.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 833 | 6.658.908.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 4 | 250.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1.775.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 182 | 1.775.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 87.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 30 | 87.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 300 | 1.400.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 2.833.908.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 17 | 2.833.908.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 312.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 300 | 312.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | 27.993.317.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda | % | 100 | 27.993.317.000 | | |
| | | X.XX.01.1.11.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 243.094.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah | Orang | 2 | 243.094.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.11.0004 | | | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 27.750.223.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | Orang | 2 | 27.750.223.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **190.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3 | 190.000.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 90 | 190.000.000 | | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 190.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah | Dokumen | 6 | 110.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah | Laporan | 8 | 80.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **363.304.881.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sekretariat DPRD

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **206.595.103.000** | **Sekretariat DPRD** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 70 | | Sekretariat DPRD | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **38.038.533.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 76 | 38.038.533.000 | Sekretariat DPRD | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 38.038.533.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 38.038.533.000 | Bagian Umum | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 1.055.674.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 1.055.674.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1.055.674.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 1.055.674.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 570.101.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 570.101.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 176.808.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 176.808.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 393.293.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 40 | 393.293.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Orang | 0 | | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 3.785.842.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 3.785.842.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 435.701.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 8 | 435.701.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 133.879.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 2 | 133.879.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 480.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 480.500.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.000 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1.600.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 1.600.000.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 980.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 980.400.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 155.362.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 155.362.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 4.026.130.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 991 | 4.026.130.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 6 | | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 494.226.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 154 | 494.226.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.180.972.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 700 | 1.180.972.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 2.350.932.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 131 | 2.350.932.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 19.217.015.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 48 | 19.217.015.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 198.457.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 198.457.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 2.900.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 2.900.000.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 986.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 986.300.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 15.132.258.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 15.132.258.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 7.424.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1619 | 7.424.650.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 502.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 10 | 502.800.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 3.171.286.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Unit | 72 | 3.171.286.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 51.475.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 154 | 51.475.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1.650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 1.650.000.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 2.049.089.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1380 | 2.049.089.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | 1.959.121.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar | % | 100 | 1.959.121.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | |
| | | X.XX.01.1.15.0002 | | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | 1.393.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan | Paket | 5 | 1.393.000.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.15.0003 | | | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | 566.121.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD | Orang | 120 | 566.121.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **168.556.570.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.75 | 168.556.570.000 | Sekretariat DPRD | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 168.556.570.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 168.556.570.000 | BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 1.112.567.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 1.112.567.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 812.567.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 6 | 812.567.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 20 | 300.000.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 20.097.128.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 24 | 20.097.128.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 19.092.128.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 124 | 19.092.128.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.005.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 24 | 1.005.000.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | 147.346.875.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar | % | 100 | 147.346.875.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | |
| | | X.XX.01.1.15.0001 | | | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | 147.346.875.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD | Orang | 120 | 147.346.875.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **Meningkatkan Pelayanan Kedewanan** | | | | | | | | | **390.574.350.000** | **Sekretariat DPRD** | |
| | | | | | | Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah | Angka | 90 | | Sekretariat DPRD | |
| | **Meningkatnya sarana dan prasarana yang tersedia** | | | | | | | | **194.977.771.000** | | |
| | | | | | | Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD) | % | 75 | 194.977.771.000 | Sekretariat DPRD | |
| | | 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | | 194.977.771.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan bagian humas | % | 95 | 194.977.771.000 | Bagian Humas | |
| | | | | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | 76.272.509.000 | | |
| | | | | | | Persentase tercapainya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | % | 100 | 76.272.509.000 | SUB BAGIAN PROTOKOL | |
| | | 4.02.02.1.04.0004 | | | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | 1.900.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli | Orang | 42 | 1.900.000.000 | SUB BAGIAN PROTOKOL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.02.02.1.04.0005 | | | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | Orang | 8 | 400.000.000 | SUB BAGIAN PROTOKOL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.02.02.1.04.0006 | | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | 10.849.896.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat | Dokumen | 7 | 10.849.896.000 | SUB BAGIAN PROTOKOL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.02.02.1.04.0007 | | | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | | 63.122.613.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana kerja DPRD | Dokumen | 6 | 63.122.613.000 | SUB BAGIAN PROTOKOL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pembahasan Kerja Sama Daerah | | | | | 118.705.262.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama | Dokumen | 14 | 118.705.262.000 | SUB BAGIAN PROTOKOL | |
| | | 4.02.02.1.07.0002 | | | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | | | | 118.705.262.000 | | |
| | | | | | | jumlah dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun | Dokumen | 14 | 118.705.262.000 | SUB BAGIAN PROTOKOL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Terwujudnya hubungan antara Setwan dengan DPRD yang baik** | | | | | | | | **195.596.579.000** | | |
| | | | | | | Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD) | % | 75 | 195.596.579.000 | Sekretariat DPRD | |
| | | 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | | 195.596.579.000 | | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi penyusunan raperda | % | 95 | 195.596.579.000 | Bagian Persidangan | |
| | | | | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | | | | | 7.128.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan RAPERDA | Dokumen | 21 | 7.128.600.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.01.0001 | | | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | 7.128.600.000 | | |
| | | | | | | jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan Raperda | Dokumen | 21 | 7.128.600.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | | 1.618.590.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran | Dokumen | 2 | 1.618.590.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.02.000 | | | Pembahasan APBD | | | | 1.618.590.000 | | |
| | | | | | | jumlah dokumen hasil pembahasan APBD | Dokumen | 2 | 1.618.590.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | 15.229.190.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tercapainya kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | % | 100 | 15.229.190.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.03.0001 | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | 2.385.912.000 | | |
| | | | | | | jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Laporan | 48 | 2.385.912.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 4.02.02.1.03.0002 | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | 2.385.912.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Laporan | 48 | 2.385.912.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 4.02.02.1.03.0003 | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | 2.385.912.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 48 | 2.385.912.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 4.02.02.1.03.0004 | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | 2.385.912.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Laporan | 48 | 2.385.912.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 4.02.02.1.03.0005 | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | | 2.385.912.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Laporan | 48 | 2.385.912.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 4.02.02.1.03.0006 | | | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | 850.630.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Dokumen | 2 | 850.630.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 4.02.02.1.03.0007 | | | Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | 2.449.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | Dokumen | 31 | 2.449.000.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | 3.440.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD | Dokumen | 6 | 3.440.000.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.04.0002 | | | Pendalaman Tugas DPRD | | | | 3.440.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD | Dokumen | 6 | 3.440.000.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | | 70.956.205.000 | | |
| | | | | | | Persentase tercapainya kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | % | 100 | 70.956.205.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.05.0001 | | | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | | 30.763.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil Kunjungan Kerja DPRD | Laporan | 12 | 30.763.680.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.02.02.1.05.0002 | | | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun | Dokumen | 1 | 175.000.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.02.02.1.05.0003 | | | Pelaksanaan Reses | | | | 40.017.525.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Reses | Dokumen | 24 | 40.017.525.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | 552.490.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Dokumen | 1 | 552.490.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.06.0001 | | | Penyusunan Kode Etik DPRD | | | | 552.490.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD | Dokumen | 1 | 552.490.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Fasilitasi Tugas DPRD | | | | | 96.671.504.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Fasilitasi Tugas DPRD | Dokumen | 37 | 96.671.504.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.08.0001 | | | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | 96.671.504.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Dokumen | 37 | 96.671.504.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **597.169.453.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **41.348.132.000** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 70.1 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **40.771.679.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 84 | 40.771.679.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 40.771.679.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 40.771.679.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 28.838.610.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 28.838.610.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 28.282.570.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 137 | 28.282.570.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 350.040.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 350.040.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 121.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 12 | 121.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 35.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 260.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 260.900.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 60.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 60.900.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 412.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 412.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 190.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 50 | 105.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 117.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 130 | 117.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 2.701.169.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 2.701.169.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 70.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 125.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 77.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 77.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 220.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 106.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 106.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 180.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 180.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 894.969.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 894.969.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 82.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 82.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 906.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 906.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 790.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 44 | 790.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 1 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 12 | 225.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 215.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 10 | 215.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 28 | 350.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 4.420.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 4.420.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 47.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 47.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1.340.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 1.340.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 3.033.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 3.033.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3.349.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1421 | 3.349.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 45 | 600.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 437 | 35.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 442 | 250.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 221 | 350.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 5 | 24.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1.475.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 6 | 1.475.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 275.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 175 | 275.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 340.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasiv | Unit | 92 | 340.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah** | | | | | | | | **576.453.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | % | 2.91 | 576.453.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 576.453.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 576.453.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 576.453.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 576.453.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 276.453.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 6 | 276.453.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 12 | 300.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas** | | | | | | | | | **12.467.000.000** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | |
| | | | | | | Persentase keselarasan dan kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan | % | 100 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | **Terwujudnya keselerasan dokumen perencanaan** | | | | | | | | **2.807.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional | % | 100 | 2.807.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | 943.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen evaluasi yang diamanahkan regulasi | % | 100 | 943.000.000 | Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan | |
| | | | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | 943.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi yang sesuai amanah regulasi | Dokumen | 4 | 943.000.000 | SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN | |
| | | 5.01.02.1.03.0003 | | | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | 678.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Laporan | 4 | 678.000.000 | SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.01.02.1.03.0004 | | | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 265.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kab/kota yang dievaluasi | Dokumen | 70 | 265.000.000 | SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | 1.864.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | % | 100 | 495.000.000 | Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | |
| | | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | | 495.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Infrastruktur dan Perhubungan | Laporan | 1 | 150.000.000 | SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN | |
| | | 5.01.03.1.03.0003 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Infrukstruktur dan perhubungan | OPD | 3 | 150.000.000 | SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman | Laporan | 1 | 125.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | | 5.01.03.1.03.0007 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pengembangan Wilayah Permukiman dan Pertanahan | OPD | 1 | 125.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup SDH LH | Laporan | 1 | 220.000.000 | SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 5.01.03.1.03.0007 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup SDA dan LH | OPD | 3 | 220.000.000 | SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya | % | 100 | 490.000.000 | Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya | |
| | | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | 490.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup bidang Pemberdes | Laporan | 1 | 140.000.000 | SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | | 5.01.03.1.01.0003 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pemberdes | OPD | 13 | 140.000.000 | SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kesos | Laporan | 1 | 80.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL | |
| | | 5.01.03.1.01.0007 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Kesejahteraan Sosial | OPD | 11 | 80.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup PMS | Laporan | 1 | 270.000.000 | SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL | |
| | | 5.01.03.1.01.0007 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | 270.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pendidikan Mental Spiritual | OPD | 5 | 270.000.000 | SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian | % | 100 | 879.000.000 | Bidang Perekonomian | |
| | | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | | 879.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Eknaker | Laporan | 1 | 367.000.000 | SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | 5.01.03.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | 367.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Ekonomi dan Tenaga Kerja | OPD | 6 | 367.000.000 | SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup KKI | Laporan | 1 | 231.000.000 | SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI | |
| | | 5.01.03.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | 231.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Kerja Sama Keuangan dan Investasi | OPD | 3 | 231.000.000 | SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Tanlut | Laporan | 1 | 281.000.000 | SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN | |
| | | 5.01.03.1.02.0007 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | 281.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Tanlut | OPD | 4 | 281.000.000 | SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN | |
| | **Terwujudnya kesesuaian dokumen perencanaan** | | | | | | | | **9.660.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi | % | 100 | 9.660.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | 4.871.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi | % | 100 | 4.871.000.000 | Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan | |
| | | | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | | | 4.130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan yang diamanahkan regulasi | Dokumen | 2 | 4.130.000.000 | SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN | |
| | | 5.01.02.1.01.0006 | | | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | | | | 4.130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan | Dokumen | 2 | 4.130.000.000 | SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | 741.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis data dan informasi Perencanaan Pembangunan | Dokumen | 1 | 741.000.000 | SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN | |
| | | 5.01.02.1.02.0001 | | | Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | 601.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah | Dokumen | 4 | 601.000.000 | SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.01.02.1.02.0004 | | | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah | Buku | 1 | 140.000.000 | SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | 4.789.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | % | 100 | 1.498.000.000 | Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | |
| | | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | | 1.498.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Infrastruktur dan Perhubungan | Dokumen | 1 | 458.000.000 | SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN | |
| | | 5.01.03.1.03.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | 458.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Infrastruktur dan Perhubungan | Laporan | 4 | 458.000.000 | SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman | Dokumen | 1 | 528.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | | 5.01.03.1.03.0008 | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | 528.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pengembangan Wilayah Permukiman dan Pertanahan | Laporan | 4 | 528.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup SDH LH | Dokumen | 1 | 512.000.000 | SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 5.01.03.1.03.0008 | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | 512.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup SDA dan LH | Laporan | 4 | 512.000.000 | SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya | % | 100 | 2.041.000.000 | Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya | |
| | | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | 2.041.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Kesos | Dokumen | 1 | 744.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL | |
| | | 5.01.03.1.01.0008 | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | 744.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Kesejahteraan Sosial | Laporan | 4 | 744.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pemberdes | Dokumen | 1 | 934.000.000 | SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 5.01.03.1.01.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | 934.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pemberdes | Laporan | 4 | 934.000.000 | SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup PMS | Dokumen | 1 | 363.000.000 | SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL | |
| | | 5.01.03.1.01.0008 | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | 363.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pendidikan Mental Spiritual | Laporan | 4 | 363.000.000 | SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian | % | 100 | 1.250.000.000 | Bidang Perekonomian | |
| | | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | | 1.250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Eknaker | Dokumen | 1 | 360.000.000 | SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | 5.01.03.1.02.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | 360.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Ekonomi dan Tenaga Kerja | Laporan | 4 | 360.000.000 | SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup KKI | Dokumen | 1 | 520.000.000 | SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI | |
| | | 5.01.03.1.02.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | 520.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Kerja Sama Keuangan dan Investasi | Laporan | 4 | 520.000.000 | SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Tanlut | Dokumen | 1 | 370.000.000 | SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN | |
| | | 5.01.03.1.02.0008 | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | | 370.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Tanlut | Laporan | 4 | 370.000.000 | SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **53.815.132.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Pengelola Pendapatan Daerah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **254.235.606.000** | **Badan Pengelola Pendapatan Daerah** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 75 | | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **253.730.606.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 90 | 253.730.606.000 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 253.730.606.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 95 | 192.941.222.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 162.389.407.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 162.389.407.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 161.396.207.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 605 | 161.396.207.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 705.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 705.640.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | | | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 287.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 4 | 287.560.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0008 | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | Dokumen | | | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 400.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0001 | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 400.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerahJumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 400.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.03.0007 | | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Orang | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 9.818.880.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 9.818.880.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 125.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 8.018.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 8.018.880.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 450.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 900.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 900.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 3.257.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 3.257.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 2.250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 1 | 2.250.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.007.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 1.007.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 13.530.935.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 13.530.935.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 2.462.007.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 2.462.007.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 9.558.928.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 9.558.928.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.500.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3.395.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 3.395.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 800.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 95.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 95.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 1.500.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | 95 | 1.446.679.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 278.092.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | 100 | 278.092.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.270.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.270.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 43.540.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 43.540.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 15.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 96.114.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 96.114.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 14.753.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 14.753.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 91.315.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 91.315.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Banjarnegara | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 784.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara | Laporan | 4 | 784.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 152.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 152.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 626.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 626.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 331.187.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banjarnegara | Unit | 1 | 331.187.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 14.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 14.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 159.587.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 159.587.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 35.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 35.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Banjarnegara | Unit | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas | % | 95 | 2.035.559.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 49.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas | Dokumen | 4 | 49.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 49.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 49.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 13.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas | Dokumen | 4 | 13.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 13.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 13.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 282.632.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banyumas | % | 100 | 282.632.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 18.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 18.480.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | umlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 7.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 131.797.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 131.797.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 11.655.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 11.655.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 88.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 88.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Banyumas | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.353.767.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas | Laporan | 4 | 1.353.767.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 314.001.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 314.001.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 27.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 27.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.009.766.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.009.766.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 336.460.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banyumas | Unit | 1 | 336.460.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 132.960.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 132.960.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 35.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 35.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 78.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 78.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang | % | 95 | 1.572.959.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 43.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang | Dokumen | 4 | 43.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 43.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Batang | Dokumen | 4 | 43.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang | Dokumen | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang | Dokumen | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 272.109.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Batang | % | 100 | 272.109.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang | Paket | 1 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 28.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Batang | Paket | 1 | 28.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 21.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Batang | Paket | 1 | 21.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Batang | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 102.694.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Batang UPPD Kabupaten Batang | Paket | 1 | 102.694.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 32.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Batang | Laporan | 4 | 32.375.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 75.240.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang | Laporan | 4 | 75.240.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Batang | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Batang | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Batang | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Batang | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 888.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang | Laporan | 4 | 888.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Batang | Laporan | 4 | 3.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 216.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Batang | Laporan | 4 | 216.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 669.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang | Laporan | 4 | 669.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 364.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Batang | Unit | 1 | 364.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 52.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Batang | Unit | 1 | 52.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 145.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Batang | Unit | 1 | 145.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Batang | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 48.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Batang | Unit | 1 | 48.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Batang | Unit | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 75.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang | Unit | 1 | 75.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang | Unit | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang | Unit | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora | % | 95 | 1.682.777.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD kabupaten Blora | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Blora | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD kabupaten Blora | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 257.821.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD kabupaten Blora | % | 100 | 257.821.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora | Paket | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 36.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Blora | Paket | 1 | 36.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Blora | Paket | 1 | 11.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Blora | Dokumen | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 108.828.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakanUPPD Kabupaten Blora | Paket | 1 | 108.828.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 15.960.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Blora | Laporan | 4 | 15.960.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 70.133.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora | Laporan | 4 | 70.133.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD kabupaten Blora | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Blora | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Blora | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Blora | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.052.726.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD kabupaten Blora | Laporan | 4 | 1.052.726.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Blora | Laporan | 4 | 3.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 155.010.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Blora | Laporan | 4 | 155.010.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora | Laporan | 4 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 890.516.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora | Laporan | 4 | 890.516.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 319.730.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD kabupaten Blora | Unit | 1 | 319.730.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 14.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Blora | Unit | 1 | 14.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 99.630.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Blora | Unit | 1 | 99.630.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Blora | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 42.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Blora | Unit | 1 | 42.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Blora | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora | Unit | 1 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 25.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora | Unit | 1 | 25.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora | Unit | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali | % | 95 | 1.534.126.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 44.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali | Dokumen | 4 | 44.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 44.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 44.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 278.726.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Boyolali | % | 100 | 278.726.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 35.380.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 35.380.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 23.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 23.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.240.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 6.240.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 101.123.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 101.123.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 22.278.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 22.278.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 82.805.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 82.805.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Boyolali | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 892.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali | Laporan | 4 | 892.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 199.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 199.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 689.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 689.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 318.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Boyolali | Unit | 1 | 318.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 24.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 24.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 154.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 154.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 48.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 48.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 23.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 23.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 6.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes | % | 95 | 2.148.219.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Brebes | Dokumen | | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 254.161.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Brebes | % | 100 | 254.161.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes | Paket | 1 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 31.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes | Paket | 1 | 31.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes | Paket | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 11.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes | Dokumen | 4 | 11.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 97.765.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes | Paket | 1 | 97.765.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 22.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Brebes | Laporan | 4 | 22.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 74.296.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes | Laporan | 4 | 74.296.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.484.866.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes | Laporan | 4 | 1.484.866.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Brebes | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 390.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 390.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes UPPD Kabupaten Brebes | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.091.866.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes | Laporan | 4 | 1.091.866.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 356.692.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Brebes | Unit | 1 | 356.692.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 17.212.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Brebes | Unit | 1 | 17.212.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 120.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Brebes | Unit | 1 | 120.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Brebes | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 87.580.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Brebes | Unit | 1 | 87.580.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Brebes | Unit | 1 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes | Unit | 1 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes | Unit | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes | Unit | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap | % | 95 | 2.051.032.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap | Dokumen | 4 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap | Dokumen | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 311.362.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Cilacap | % | 100 | 311.362.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 38.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 38.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 11.850.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 11.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 4.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 4.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 151.756.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 151.756.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 25.512.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 25.512.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 61.244.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 61.244.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Cilacap | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.223.071.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap | Laporan | 4 | 1.223.071.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 258.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 258.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 960.571.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 960.571.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 459.599.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Cilacap | Unit | 1 | 459.599.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 39.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 39.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 221.999.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 221.999.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 51.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 51.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 24.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 24.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak | % | 95 | 1.520.515.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 303.090.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Demak | % | 100 | 303.090.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak | Paket | 1 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 49.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Demak | Paket | 1 | 49.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 27.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Demak | Paket | 1 | 27.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 10.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | 4 | 10.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 115.312.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Demak | Paket | 1 | 115.312.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 20.230.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Demak | Laporan | 4 | 20.230.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 70.298.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak | Laporan | 4 | 70.298.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Demak | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Demak | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Demak | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Demak | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 795.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Demak | Laporan | 4 | 795.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Demak | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 183.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Demak | Laporan | 4 | 183.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 608.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak | Laporan | 4 | 608.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 374.825.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Demak | Unit | 1 | 374.825.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 27.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Demak | Unit | 1 | 27.375.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 166.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Demak | Unit | 1 | 166.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Demak | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 43.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Demak | Unit | 1 | 43.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Demak | Unit | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak | Unit | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 27.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak | Unit | 1 | 27.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak | Unit | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan | % | 95 | 1.529.563.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Grobogan | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan | Dokumen | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan | Dokumen | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 289.095.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Grobogan | % | 100 | 289.095.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan | Paket | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 41.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan | Paket | 1 | 41.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 19.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan | Paket | 1 | 19.320.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan | Dokumen | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 100.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan | Paket | 1 | 100.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 24.625.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Grobogan | Laporan | 4 | 24.625.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 88.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan | Laporan | 4 | 88.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan | Laporan | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 907.618.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan | Laporan | 4 | 907.618.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Grobogan | Laporan | 4 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 233.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan | Laporan | 4 | 233.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 672.718.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan | Laporan | 4 | 672.718.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 285.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Grobogan | Unit | 1 | 285.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Grobogan | Unit | 1 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 109.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Grobogan | Unit | 1 | 109.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Grobogan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 56.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Grobogan | Unit | 1 | 56.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Grobogan | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasiUPPD Kabupaten Grobogan | Unit | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 25.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Grobogan | Unit | 1 | 25.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Grobogan | Unit | 1 | 8.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Jepara | % | 95 | 1.624.741.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Jepara | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 257.028.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Jepara | % | 100 | 257.028.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.154.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.154.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 35.505.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 35.505.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 11.633.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 11.633.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.920.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 5.920.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 97.196.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 97.196.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 17.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 17.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 82.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 82.720.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Jepara | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 995.843.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara | Laporan | 4 | 995.843.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 2.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 300.943.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 300.943.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 692.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 692.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 329.370.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Jepara | Unit | 1 | 329.370.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 16.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 16.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 156.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 156.320.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 54.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 54.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 46.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 46.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 46.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 46.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar | % | 95 | 1.570.857.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 43.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar | Dokumen | 4 | 43.360.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 43.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 43.360.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 273.582.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Karanganyar | % | 100 | 273.582.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 32.610.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 32.610.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 11.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 11.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 100.730.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 100.730.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 20.580.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 20.580.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 99.212.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 99.212.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Karanganyar | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 945.065.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar | Laporan | 4 | 945.065.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.990.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 3.990.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 172.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 172.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 768.575.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 768.575.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 308.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Karanganyar | Unit | 1 | 308.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 143.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 143.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 39.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 39.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 88.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 88.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 29.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 29.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 7.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kebumen | % | 95 | 1.385.857.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 42.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | % | 100 | 8.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 8.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 227.369.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 227.369.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.490.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.490.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 39.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 39.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 12.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 12.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.609.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 6.609.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 84.654.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 84.654.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 22.260.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 22.260.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 55.656.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 55.656.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 802.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 802.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 184.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 184.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 615.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 615.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 306.038.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 306.038.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 112.288.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 112.288.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 60.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharaJumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 60.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 8.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kendal | % | 95 | 1.533.147.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal | Dokumen | 4 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kendal | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 328.902.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kendal | % | 100 | 328.902.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 25.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 25.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 15.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 149.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 149.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 25.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 25.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 74.252.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 74.252.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Kendal | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 862.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal | Laporan | 4 | 862.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 2.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 234.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 234.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 626.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 626.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 299.795.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kendal | Unit | 1 | 299.795.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 26.270.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 26.270.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 97.775.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 97.775.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 54.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 54.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 78.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 78.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 43.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 43.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten | % | 95 | 2.357.813.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 45.014.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten | Dokumen | 4 | 45.014.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 45.014.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 45.014.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 288.790.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Klaten | % | 100 | 288.790.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.954.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 7.954.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 12.204.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 12.204.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 136.333.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 136.333.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 35.693.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 35.693.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 90.606.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 90.606.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Klaten | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten | Laporan | 4 | 1.650.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 3.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 317.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 317.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.329.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.329.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 364.009.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Klaten | Unit | 1 | 364.009.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 29.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 29.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 143.759.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 143.759.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 100.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 100.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 7.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 7.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 34.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 34.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 33.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 33.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus | % | 95 | 1.458.374.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 6.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | 4 | 6.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 6.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | 4 | 6.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 250.724.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kudus | % | 100 | 250.724.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus | Paket | 1 | 6.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus | Paket | 1 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 12.204.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus | Paket | 1 | 12.204.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 9.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | 4 | 9.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 95.055.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus UPPD Kabupaten Kudus | Paket | 1 | 95.055.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 18.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Kudus | Laporan | 4 | 18.550.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 83.965.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus | Laporan | 4 | 83.965.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus | Laporan | 4 | 1.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 836.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kudus | Laporan | 4 | 836.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Kudus | Laporan | 4 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 226.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus | Laporan | 4 | 226.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus | Laporan | | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 606.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus | Laporan | 4 | 606.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 321.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kudus | Unit | 1 | 321.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 12.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Kudus | Unit | 1 | 12.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 109.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Kudus | Unit | 1 | 109.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Kudus | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 39.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Kudus | Unit | 1 | 39.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Kudus | Unit | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 103.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus | Unit | 1 | 103.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 37.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus | Unit | 1 | 37.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus | Unit | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang | % | 95 | 1.714.081.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 273.599.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Magelang | % | 100 | 273.599.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 41.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 41.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 30.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 30.080.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 4.200.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 4.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 99.330.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 99.330.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 36.078.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 36.078.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 53.311.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 53.311.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Magelang | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.016.039.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang | Laporan | 4 | 1.016.039.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 206.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 206.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 805.039.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 805.039.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 371.943.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Magelang | Unit | 1 | 371.943.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 21.488.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 21.488.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 146.455.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 146.455.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 87.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 87.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati | % | 95 | 1.594.919.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pati | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pati | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati | Dokumen | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati | Dokumen | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 237.629.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pati | % | 100 | 237.629.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati | Paket | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 41.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pati | Paket | 1 | 41.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pati | Paket | 1 | 4.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pati | Dokumen | 4 | 7.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 92.992.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Pati | Paket | 1 | 92.992.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 19.090.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pati | Laporan | 4 | 19.090.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 68.847.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati | Laporan | 4 | 68.847.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati | Laporan | 4 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Pati | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Pati | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pati | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pati | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 989.790.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pati | Laporan | 4 | 989.790.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pati | Laporan | 4 | 1.080.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 290.160.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pati | Laporan | 4 | 290.160.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 698.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati | Laporan | 4 | 698.550.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 305.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pati | Unit | 1 | 305.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pati | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 138.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pati | Unit | 1 | 138.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Pati | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 84.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pati | Unit | 1 | 84.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pati | Unit | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati | Unit | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati | Unit | 1 | 9.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati | Unit | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | % | 95 | 1.509.566.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 15.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 15.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 15.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 286.059.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pekalongan | % | 100 | 286.059.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan | Paket | 1 | 6.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan | Paket | | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 51.380.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan | Paket | 1 | 51.380.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 19.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan | Paket | 1 | 19.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 6.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 113.804.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD KAbupaten Pekalongan UPPD Kabupaten Pekalongan | Paket | 1 | 113.804.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 22.125.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pekalongan | Laporan | 4 | 22.125.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 64.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | Laporan | 4 | 64.250.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | Laporan | 4 | 2.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 827.425.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan | Laporan | 4 | 827.425.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pekalongan | Laporan | 4 | 1.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 189.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan | Laporan | 4 | 189.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan | Laporan | 4 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 635.025.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan | Laporan | 4 | 635.025.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 338.582.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | 1 | 338.582.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 24.182.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | 1 | 24.182.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 127.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | 1 | 127.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 56.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | 1 | 56.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | 1 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 39.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | 1 | 39.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang | % | 95 | 1.617.429.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang | Dokumen | 4 | 42.500.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pemalang | Dokumen | 4 | 42.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang | Dokumen | | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang | Dokumen | 4 | 10.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang | Dokumen | 4 | 10.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 271.366.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pemalang | % | 100 | 271.366.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Paket | 1 | 12.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Paket | | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 24.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Paket | 1 | 24.250.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Paket | 1 | 5.750.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Dokumen | 4 | 7.200.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 118.579.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Paket | 1 | 118.579.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 13.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pemalang | Laporan | 4 | 13.650.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 87.437.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang | Laporan | 4 | 87.437.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 2.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang | Laporan | 4 | 2.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | 1 | | | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Paket | | | | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | | | | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 879.925.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang | Laporan | 4 | 879.925.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pemalang | Laporan | 4 | 1.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Laporan | 4 | 180.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Laporan | 4 | 2.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 696.425.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Laporan | 4 | 696.425.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 413.638.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | 1 | 413.638.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 20.438.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | 1 | 20.438.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 179.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | 1 | 179.200.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 44.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | 1 | 44.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | 1 | 12.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | 1 | 110.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 39.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | 1 | 39.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | 1 | 8.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga | % | 95 | 1.444.650.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | 4 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | 4 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 276.084.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Purbalingga | % | 100 | 276.084.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga | Paket | 1 | 4.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 38.100.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga | Paket | 1 | 38.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga | Paket | 1 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 110.329.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga | Paket | 1 | 110.329.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 24.920.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Purbalingga | Laporan | 4 | 24.920.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 70.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga | Laporan | 4 | 70.720.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1.865.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga | Laporan | 4 | 1.865.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 777.186.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga | Laporan | 4 | 777.186.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Purbalingga | Laporan | 4 | 5.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 210.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga | Laporan | 4 | 210.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga | Laporan | 4 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 555.186.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga | Laporan | 4 | 555.186.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 339.380.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | 1 | 339.380.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 25.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | 1 | 25.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 135.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | 1 | 135.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 71.510.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | 1 | 71.510.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 74.170.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | 1 | 74.170.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | 1 | 22.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | 1 | 7.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purworejo | % | 95 | 1.706.860.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 12.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 286.890.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 286.890.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 52.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 52.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 8.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 8.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 6.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 108.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 108.560.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 23.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 23.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 67.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 67.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.115.470.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 1.115.470.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.475.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 2.475.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 190.440.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 190.440.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 922.555.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 922.555.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 13.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 13.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 114.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 114.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 28.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 28.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 1.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 1.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 30.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 30.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 6.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 6.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang | % | 95 | 1.208.132.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang | Dokumen | 4 | 42.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 231.885.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Rembang | % | 100 | 231.885.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.560.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 32.280.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 32.280.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 4.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 4.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 74.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 74.360.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 19.460.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 19.460.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 84.425.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 84.425.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Rembang | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 626.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang | Laporan | 4 | 626.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 150.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 150.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 20.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 453.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 453.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 297.297.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Rembang | Unit | 1 | 297.297.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 17.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 17.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 159.497.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 159.497.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 39.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 39.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 18.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 7.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 7.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Semarang | % | 95 | 2.250.395.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang | Dokumen | 4 | 42.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Semarang | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 291.482.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Semarang | % | 100 | 291.482.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 41.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 41.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 20.875.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 121.863.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 121.863.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 29.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 29.875.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 61.769.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 61.769.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.559.905.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang | Laporan | 4 | 1.559.905.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 437.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 437.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.104.905.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.104.905.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 356.758.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Semarang | Unit | 1 | 356.758.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 32.038.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 32.038.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 193.220.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 193.220.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 57.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 57.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen | % | 95 | 1.350.268.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen | Dokumen | 4 | 42.720.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.720.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 260.233.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sragen | % | 100 | 260.233.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 32.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 32.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 6.840.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 6.840.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 6.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 91.888.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 91.888.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 34.475.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 34.475.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 81.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 81.880.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Sragen | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 748.725.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen | Laporan | 4 | 748.725.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 3.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 186.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 186.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 558.825.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 558.825.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 298.590.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sragen | Unit | 1 | 298.590.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 36.167.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 36.167.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 119.693.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 119.693.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 34.570.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 34.570.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 68.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 68.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 29.460.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 29.460.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 7.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 7.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | 95 | 1.598.935.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | 4 | 42.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | 4 | 42.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 269.820.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | 100 | 269.820.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 8.570.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Paket | 1 | 8.570.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 41.975.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Paket | 1 | 41.975.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 18.020.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Paket | 1 | 18.020.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | 4 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 109.867.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Paket | 1 | 109.867.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 19.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Sukoharjo | Laporan | 4 | 19.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 62.438.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | Laporan | 4 | 62.438.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 960.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo | Laporan | 4 | 960.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Sukoharjo | Laporan | 4 | 3.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 200.400.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Laporan | 4 | 200.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Laporan | 4 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 666.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Laporan | 4 | 666.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 326.865.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | 1 | 326.865.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 34.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | 1 | 34.875.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 91.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | 1 | 91.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 78.715.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | 1 | 78.715.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 6.325.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | 1 | 6.325.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | 1 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 27.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | 1 | 27.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal | % | 95 | 1.551.760.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Tegal | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Tegal | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal | Dokumen | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal | Dokumen | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 249.985.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Tegal | % | 100 | 249.985.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 29.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal | Paket | 1 | 29.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 97.017.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal UPPD Kabupaten Tegal | Paket | 1 | 97.017.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 11.075.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Tegal | Laporan | 4 | 11.075.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 83.593.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal | Laporan | 4 | 83.593.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 868.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Tegal | Laporan | 4 | 868.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Tegal | Laporan | 4 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 157.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal | Laporan | 4 | 157.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 706.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal | Laporan | 4 | 706.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 371.175.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Tegal | Unit | 1 | 371.175.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 32.325.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Tegal | Unit | 1 | 32.325.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 156.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Tegal | Unit | 1 | 156.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Tegal | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 44.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Tegal | Unit | 1 | 44.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Tegal | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal | Unit | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 29.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal | Unit | 1 | 29.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 7.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal | Unit | 1 | 7.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung | % | 95 | 1.494.041.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 283.434.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Temanggung | % | 100 | 283.434.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 3.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | | 3.640.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 57.424.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 57.424.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 15.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 88.254.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 88.254.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 25.410.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 25.410.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 82.156.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 82.156.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Temanggung | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 894.882.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung | Laporan | 4 | 894.882.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.410.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 3.410.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 168.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 168.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 722.872.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 722.872.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 273.225.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Temanggung | Unit | 1 | 273.225.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 16.275.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 16.275.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 107.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 107.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 33.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 2.550.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 2.550.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 84.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 84.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 22.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri | % | 95 | 2.101.317.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri | Dokumen | 4 | 42.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 282.122.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonogiri | % | 100 | 282.122.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 114.932.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 114.932.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 19.390.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 19.390.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 75.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 75.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Wonogiri | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.394.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri | Laporan | 4 | 1.394.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 3.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 318.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 318.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.073.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.073.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 381.995.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonogiri | Unit | 1 | 381.995.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 152.995.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 152.995.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 63.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 63.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo | % | 95 | 1.371.159.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo | Dokumen | 4 | 42.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo | Dokumen | 4 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 295.019.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonosobo | % | 100 | 295.019.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 41.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 41.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 19.794.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 19.794.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 100.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 100.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 22.575.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 22.575.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 93.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 93.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Wonosobo | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 699.040.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo | Laporan | 4 | 699.040.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 541.040.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 541.040.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 322.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonosobo | Unit | 1 | 322.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 22.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Magelang | % | 95 | 1.159.538.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Magelang | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Magelang | Dokumen | 4 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 282.321.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Magelang | % | 100 | 282.321.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 24.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 24.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 18.884.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 18.884.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 3.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 109.142.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 109.142.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 36.435.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 36.435.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 85.060.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 85.060.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Magelang | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 626.185.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Magelang | Laporan | 4 | 626.185.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 1.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 158.610.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 158.610.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 465.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 465.875.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 202.532.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Magelang | Unit | 1 | 202.532.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 19.192.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 19.192.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 90.340.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 90.340.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 28.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 28.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 13.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 13.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 6.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 6.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan | % | 95 | 1.425.630.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Pekalongan | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Pekalongan | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 220.081.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Pekalongan | % | 100 | 220.081.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 12.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan | Paket | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 26.175.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Pekalongan | Paket | 1 | 26.175.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Pekalongan | Paket | 1 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Pekalongan | Dokumen | 4 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 102.953.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Pekalongan | Paket | 1 | 102.953.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 9.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Pekalongan | Laporan | 4 | 9.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 54.403.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan | Laporan | 4 | 54.403.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan | Laporan | 4 | 1.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Pekalongan | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kota Pekalongan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kota Pekalongan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kota Pekalongan UPPD Kota Pekalongan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 866.959.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Pekalongan | Laporan | 4 | 866.959.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kota Pekalongan | Laporan | 4 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 197.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Pekalongan | Laporan | 4 | 197.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan | Laporan | 4 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 667.059.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan | Laporan | 4 | 667.059.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 286.090.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Pekalongan | Unit | 1 | 286.090.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 21.190.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Pekalongan | Unit | 1 | 21.190.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 161.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Pekalongan | Unit | 1 | 161.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kota Pekalongan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 42.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Pekalongan | Unit | 1 | 42.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kota Pekalongan | Unit | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan | Unit | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan | Unit | 1 | 20.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan | Unit | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Salatiga | % | 95 | 1.284.719.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Salatiga | Dokumen | 4 | 42.550.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.550.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Salatiga | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 294.044.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Salatiga | % | | 294.044.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 72.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 72.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 29.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 29.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 87.017.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 87.017.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 20.527.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 20.527.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 68.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 68.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Salatiga | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 612.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Salatiga | Laporan | 4 | 612.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 145.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 145.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 464.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 464.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 335.975.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Salatiga | Unit | 1 | 335.975.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 20.625.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 20.625.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 113.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 113.100.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 1 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 52.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 52.750.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 10.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 98.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 98.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 33.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 33.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 8.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang I | % | 95 | 2.086.245.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 43.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang 1 | Dokumen | 4 | 43.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 43.800.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Semarang I | Dokumen | 4 | 43.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 5.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Semarang 1 | Dokumen | 4 | 5.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 5.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 5.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 269.258.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang 1 | % | 100 | 269.258.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 22.025.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 22.025.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 24.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 24.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 128.384.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 128.384.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 16.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 16.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 67.949.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 67.949.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Semarang 1 | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.531.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang 1 | Laporan | 4 | 1.531.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 321.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 321.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 280.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 280.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 928.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 928.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 235.987.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang 1 | Unit | 1 | 235.987.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 102.110.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 102.110.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 38.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 38.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 33.077.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 33.077.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 54.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 54.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang II | % | 95 | 1.654.551.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Semarang II | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 309.939.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang II | % | 100 | 309.939.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 46.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 46.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 38.340.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 38.340.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 109.874.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 109.874.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 30.240.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 30.240.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 62.485.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 62.485.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Semarang II | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.010.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II | Laporan | 4 | 1.010.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 338.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 338.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 14.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 14.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 655.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 655.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 291.712.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang II | Unit | 1 | 291.712.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 25.312.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 25.312.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 95.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 95.800.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 57.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 57.750.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 10.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 60.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 30.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 30.850.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 12.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 12.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang III | % | 95 | 1.946.701.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang III | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Semarang III | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 290.526.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang III | % | 100 | 290.526.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 54.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 54.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 15.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 112.876.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 112.876.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 24.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 24.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 64.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 64.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Semarang III | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.226.030.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang III | Laporan | 4 | 1.226.030.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 398.580.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 398.580.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 32.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 32.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 793.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 793.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 387.645.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang III | Unit | 1 | 387.645.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 18.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 18.375.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 91.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 91.050.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 87.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 87.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 10.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 124.820.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 124.820.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 48.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 48.400.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 8.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta | % | 95 | 1.631.446.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Surakarta | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Surakarta | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Surakarta | Dokumen | 4 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Surakarta | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 268.238.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Surakarta | % | 100 | 268.238.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta | Paket | 1 | 10.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 1.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Surakarta | Paket | 1 | 1.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 12.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Surakarta | Paket | 1 | 12.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Surakarta | Dokumen | 4 | 6.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 138.890.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Surakarta | Paket | 1 | 138.890.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 26.565.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Surakarta | Laporan | 4 | 26.565.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 70.833.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Surakarta | Laporan | 4 | 70.833.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kota Surakarta | Laporan | 4 | 1.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Surakarta | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kota Surakarta | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kota Surakarta | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kota Surakarta | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.041.725.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Surakarta | Laporan | 4 | 1.041.725.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kota Surakarta | Laporan | 4 | 1.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 290.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Surakarta | Laporan | 4 | 290.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 750.025.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta | Laporan | 4 | 750.025.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 278.983.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Surakarta | Unit | 1 | 278.983.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 13.613.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Surakarta | Unit | 1 | 13.613.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 96.300.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Surakarta | Unit | 1 | 96.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kota Surakarta | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 52.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Surakarta | Unit | 1 | 52.550.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kota Surakarta | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta | Unit | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 47.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta | Unit | 1 | 47.520.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta | Unit | 1 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Tegal | % | 95 | 1.634.824.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Tegal | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Tegal | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kota Tegal | Dokumen | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal | Dokumen | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal | Dokumen | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 286.774.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Tegal | % | 100 | 286.774.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal | Paket | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 74.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Tegal | Paket | 1 | 74.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Tegal | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Tegal | Dokumen | 4 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 86.742.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Tegal UPPD Kota Tegal | Paket | 1 | 86.742.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 17.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Tegal | Laporan | 4 | 17.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 78.382.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Tegal | Laporan | 4 | 78.382.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Tegal | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kota Tegal | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kota Tegal | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kota Tegal | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.045.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Tegal | Laporan | 4 | 1.045.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kota Tegal | Laporan | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 295.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Tegal | Laporan | 4 | 295.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal | Laporan | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 745.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal | Laporan | 4 | 745.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 239.950.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Tegal | Unit | 1 | 239.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 11.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Tegal | Unit | 1 | 11.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 78.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Tegal | Unit | 1 | 78.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kota Tegal | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Tegal | Unit | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kota Tegal | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal | Unit | 1 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah** | | | | | | | | **505.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | | 505.000.000 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 505.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 90 | 505.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 505.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 505.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 245.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 4 | 245.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 4 | 260.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| **Tumbuhnya Pendapatan Asli Daerah** | | | | | | | | | **32.644.010.000** | **Badan Pengelola Pendapatan Daerah** | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah | % | 9.54 | | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | |
| | **Tumbuhnya Pendapatan Pajak Daerah** | | | | | | | | **19.877.336.000** | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah | % | 13.09 | 19.877.336.000 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | |
| | | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | | 19.877.336.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan | % | 100 | 800.000.000 | Bidang Evaluasi dan Pembinaan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB | Laporan | 37 | 290.000.000 | SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.001 2 | | | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | 290.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | Laporan | 37 | 290.000.000 | SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain | Laporan | 37 | 250.000.000 | SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN | |
| | | 5.02.04.1.01.001 3 | | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelola Retribusi Daerah | Laporan | 37 | 250.000.000 | SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya | Laporan | 37 | 260.000.000 | SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA | |
| | | 5.02.04.1.01.000 3 | | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Laporan | 37 | 260.000.000 | SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah | % | 100 | 9.741.439.000 | Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 9.741.439.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Informasi data pendapatan yang tersusun | Dokumen | 4 | 300.209.000 | SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN | |
| | | 5.02.04.1.01.000 9 | | | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | | 300.209.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Dokumen | 4 | 300.209.000 | SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah yang terapkan | Dokumen | 1 | 310.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN | |
| | | 5.02.04.1.01.000 2 | | | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | | | | 310.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah | Dokumen | 1 | 310.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah | Laporan | 4 | 9.131.230.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | |
| | | 5.02.04.1.01.001 4 | | | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | 9.131.230.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Laporan | 4 | 9.131.230.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | 21.49 | 62.515.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 62.515.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara | Ribu Rupiah | 56502827 | 62.515.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.000 8 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 62.515.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Banjarnegara | Dokumen | 4 | 62.515.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas | % | 19.52 | 14.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 14.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas | Ribu Rupiah | 129061431 | 14.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 14.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Banyumas | Dokumen | 4 | 14.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang | % | 15.23 | 19.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 19.800.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Batang | Ribu Rupiah | 66010309 | 19.800.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 19.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Batang | Dokumen | 4 | 19.800.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora | % | 19.93 | 4.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD kabupaten Blora | Ribu Rupiah | 53287860 | 4.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Blora | Dokumen | 4 | 4.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali | % | 19.89 | 10.850.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 10.850.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali | Ribu Rupiah | 86027843 | 10.850.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 10.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Boyolali | Dokumen | 4 | 10.850.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes | % | 20.1 | 8.060.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 8.060.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes | Ribu Rupiah | 122881749 | 8.060.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 8.060.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Brebes | Dokumen | 4 | 8.060.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap | % | 16.42 | 20.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 20.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap | Ribu Rupiah | 131099982 | 20.600.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 20.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Cilacap | Dokumen | 4 | 20.600.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak | % | 20.8 | 5.625.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 5.625.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Demak | Ribu Rupiah | 133862327 | 5.625.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 5.625.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | 4 | 5.625.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan | % | 20.87 | 3.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan | Ribu Rupiah | 106514734 | 3.600.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Grobogan | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara | % | 14.71 | 2.250.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 2.250.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara | Ribu Rupiah | 11216149 | 2.250.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 2.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Jepara | Dokumen | 4 | 2.250.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar | % | 21.98 | 1.300.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.300.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar | Ribu Rupiah | 100913477 | 1.300.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 1.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Karanganyar | Dokumen | 4 | 1.300.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen | % | 20.82 | 47.080.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 47.080.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen | Ribu Rupiah | 70996348 | 47.080.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 47.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kebumen | Dokumen | 4 | 47.080.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal | % | 18.31 | 4.050.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.050.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal | Ribu Rupiah | 98162438 | 4.050.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 4.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kendal | Dokumen | 4 | 4.050.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten | % | 18.99 | 4.826.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.826.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten | Ribu Rupiah | 127166021 | 4.826.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 4.826.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Klaten | Dokumen | 4 | 4.826.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus | % | 18.96 | 3.150.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 3.150.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus | Ribu Rupiah | 108150990 | 3.150.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 3.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | 4 | 3.150.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang | % | 19.55 | 32.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 32.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang | Ribu Rupiah | 91707989 | 32.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 32.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Magelang | Dokumen | 4 | 32.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati | % | 15.79 | 4.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.800.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pati | Ribu Rupiah | 128176158 | 4.800.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 4.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pati | Dokumen | 4 | 4.800.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan | % | 19.62 | 7.650.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 7.650.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan | Ribu Rupiah | 73163777 | 7.650.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 7.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 7.650.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang | % | 11.83 | 2.250.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 2.250.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang | Ribu Rupiah | 86837242 | 2.250.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 2.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pemalang | Dokumen | 4 | 2.250.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga | % | 28.72 | 4.050.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.050.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga | Ribu Rupiah | 66103862 | 4.050.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 4.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | 4 | 4.050.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo | % | 23.68 | 14.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 14.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo | Ribu Rupiah | 52021712 | 14.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 14.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten PUrworejo | Dokumen | 4 | 14.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang | % | 18.71 | 31.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 31.000.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang | Ribu Rupiah | 533687340 | 31.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 31.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Rembang | Dokumen | 4 | 31.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang | % | 23.93 | 9.750.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 9.750.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang | Ribu Rupiah | 119287834 | 9.750.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 9.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Semarang | Dokumen | 4 | 9.750.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen | % | 26.51 | 3.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen | Ribu Rupiah | 101649001 | 3.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Sragen | Dokumen | 4 | 3.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | 25.8 | 11.340.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 11.340.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo | Ribu Rupiah | 121506495 | 11.340.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 11.340.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | 4 | 11.340.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal | % | 14.12 | 9.225.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 9.225.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal | Ribu Rupiah | 104767005 | 9.225.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 9.225.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Tegal | Dokumen | 4 | 9.225.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung | % | 23.36 | 1.575.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.575.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung | Ribu Rupiah | 47675810 | 1.575.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 1.575.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Temanggung | Dokumen | 4 | 1.575.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri | % | 20.9 | 25.850.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 25.850.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri | Ribu Rupiah | 57707065 | 25.850.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 25.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Wonogiri | Dokumen | 4 | 25.850.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo | % | 22.39 | 1.350.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.350.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo | Ribu Rupiah | 52034940 | 1.350.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 1.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Wonosobo | Dokumen | 4 | 1.350.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang | % | 16.85 | 1.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Magelang | Ribu Rupiah | 20760133 | 1.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Magelang | Dokumen | 4 | 1.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan | % | 28.17 | 4.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Pekalongan | Ribu Rupiah | 45171795 | 4.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Pekalongan | Dokumen | 4 | 4.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga | % | 23.51 | 4.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Salatiga | Ribu Rupiah | 33464776 | 4.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Salatiga | Dokumen | 4 | 4.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1 | % | 18.18 | 2.250.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 2.250.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang 1 | Ribu Rupiah | 197889485 | 2.250.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 2.250.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang I | Dokumen | 4 | 2.250.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II | % | 18.66 | 2.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang II | Ribu Rupiah | 171455875 | 2.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang II | Dokumen | 4 | 2.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III | % | 15.09 | 3.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang III | Ribu Rupiah | 154291741 | 3.600.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang III | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta | % | 19.79 | 20.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Surakarta | Ribu Rupiah | 130852551 | 20.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Surakarta | Dokumen | 4 | 20.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal | % | 12.2 | 11.250.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 11.250.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Tegal | Ribu Rupiah | 34106385 | 11.250.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 11.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Tegal | Dokumen | 4 | 11.250.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | 45.72 | 95.350.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 95.350.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara | Ribu Rupiah | 116276950 | 95.350.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 95.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD abupaten Banjarnegara | Dokumen | 4 | 95.350.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas | % | 25.25 | 144.250.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 144.250.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Banyumas | Ribu Rupiah | 272205112 | 144.250.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 144.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Banyumas | Dokumen | 4 | 144.250.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang | % | 38.33 | 142.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 142.800.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Batang | Ribu Rupiah | 114938906 | 142.800.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 142.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Batang | Dokumen | 4 | 142.800.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora | % | 13.4 | 122.030.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 122.030.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Blora | Ribu Rupiah | 104635239 | 122.030.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 122.030.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Blora | Dokumen | 4 | 122.030.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali | % | 23.05 | 84.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 84.000.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Boyolali | Ribu Rupiah | 182016973 | 84.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 84.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Boyolali | Dokumen | 4 | 84.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes | % | 44 | 109.900.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 109.900.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Brebes | Ribu Rupiah | 185332523 | 109.900.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 109.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Brebes | Dokumen | 4 | 109.900.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap | % | 23.27 | 111.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 111.000.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Cilacap | Ribu Rupiah | 262679537 | 111.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 111.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Cilacap | Dokumen | 4 | 111.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak | % | 23.16 | 230.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 230.800.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Demak | Ribu Rupiah | 196403321 | 230.800.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 230.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | 4 | 230.800.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan | % | 22.34 | 87.320.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 87.320.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Grobogan | Ribu Rupiah | 183203586 | 87.320.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 87.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Grobogan | Dokumen | 4 | 87.320.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara | % | 22.63 | 176.125.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 176.125.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Jepara | Ribu Rupiah | 205027570 | 176.125.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 176.125.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Jepara | Dokumen | 4 | 176.125.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar | % | 30.62 | 130.100.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 130.100.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar | Ribu Rupiah | 200314126 | 130.100.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 130.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Karanganyar | Dokumen | 4 | 130.100.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen | % | 25.05 | 149.750.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 149.750.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kebumen | Ribu Rupiah | 149348619 | 149.750.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 149.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kebumen | Dokumen | 4 | 149.750.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal | % | 32.43 | 182.535.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 182.535.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kendal | Ribu Rupiah | 167855813 | 182.535.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 182.535.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kendal | Dokumen | 4 | 182.535.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten | % | 24.85 | 168.650.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 168.650.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Klaten | Ribu Rupiah | 253334739 | 168.650.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 168.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Klaten | Dokumen | 4 | 168.650.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus | % | 12.4 | 116.950.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 116.950.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kusus | Ribu Rupiah | 194131847 | 116.950.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 116.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | 4 | 116.950.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang | % | 34.47 | 118.400.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 118.400.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Magelang | Ribu Rupiah | 181757673 | 118.400.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 118.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Magelang | Dokumen | 4 | 118.400.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati | % | 16.61 | 114.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 114.000.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pati | Ribu Rupiah | 246391747 | 114.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 114.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pati | Dokumen | 4 | 114.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang | % | 30.76 | 192.750.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 192.750.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pemalang | Ribu Rupiah | 168929535 | 192.750.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 192.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pemalang | Dokumen | 4 | 192.750.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga | % | 14.57 | 148.100.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 148.100.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga | Ribu Rupiah | 119316596 | 148.100.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 148.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | 4 | 148.100.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo | % | 4.96 | 141.950.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 141.950.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Purworejo | Ribu Rupiah | 99185663 | 141.950.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 141.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Purworejo | Dokumen | 4 | 141.950.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang | % | 11.59 | 211.700.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 211.700.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Rembang | Ribu Rupiah | 92824390 | 211.700.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 211.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Rembang | Dokumen | 4 | 211.700.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang | % | 9.5 | 175.850.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 175.850.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Semarang | Ribu Rupiah | 209805150 | 175.850.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 175.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Semarang | Dokumen | 4 | 175.850.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Semarang | Unit | 1 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | 5.02.04.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | 5.02.04.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | 5.02.04.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen | % | 19.63 | 192.640.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 192.640.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Sragen | Ribu Rupiah | 197902569 | 192.640.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 192.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Sragen | Dokumen | 4 | 192.640.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | 23 | 118.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 118.000.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo | Ribu Rupiah | 217640859 | 118.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 118.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | 4 | 118.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal | % | 66.86 | 92.950.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 92.950.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Tegal | Ribu Rupiah | 195245988 | 92.950.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 92.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Tegal | Dokumen | 4 | 92.950.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung | % | 32.03 | 98.075.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 98.075.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Temanggung | Ribu Rupiah | 102205992 | 98.075.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 98.075.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Temanggung | Dokumen | 4 | 98.075.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri | % | 11.97 | 97.900.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 97.900.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri | Ribu Rupiah | 137434953 | 97.900.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 97.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Wonogiri | Dokumen | 4 | 97.900.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo | % | 24.01 | 142.050.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 142.050.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo | Ribu Rupiah | 103637332 | 142.050.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 142.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Wonosobo | Dokumen | 4 | 142.050.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang | % | -53.02 | 175.900.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 175.900.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Magelang | Ribu Rupiah | 48307208 | 175.900.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 175.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Magelang | Dokumen | 4 | 175.900.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan | % | -25.14 | 160.969.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 160.969.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Pekalongan | Ribu Rupiah | 70618341 | 160.969.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 160.969.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Pekalongan | Dokumen | 4 | 160.969.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga | % | 2.24 | 79.050.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 79.050.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Salatiga | Ribu Rupiah | 67295135 | 79.050.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 79.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Salatiga | Dokumen | 4 | 79.050.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1 | % | 24.91 | 168.650.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 168.650.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang 1 | Ribu Rupiah | 353504285 | 168.650.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 168.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang I | Dokumen | 4 | 168.650.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II | % | 6.61 | 255.840.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 255.840.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang II | Ribu Rupiah | 296929774 | 255.840.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 255.840.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang II | Dokumen | 4 | 255.840.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III | % | 21.98 | 199.700.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 199.700.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang III | Ribu Rupiah | 266732572 | 199.700.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 199.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang III | Dokumen | 4 | 199.700.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta | % | 3.8 | 177.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 177.800.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Surakarta | Ribu Rupiah | 262535338 | 177.800.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 177.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Surakarta | Dokumen | 4 | 177.800.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD  Kota Tegal | % | -25.92 | 163.594.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 163.594.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Tegal | Ribu Rupiah | 66440861 | 163.594.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 163.594.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD  Kota Tegal | Dokumen | 4 | 163.594.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaran bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan | % | 41.78 | 110.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 110.200.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan | Ribu Rupiah | 125329754 | 110.200.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 110.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 110.200.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor | % | 72 | 3.526.623.000 | Bidang Pajak Kendaraan Bermotor | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 3.526.623.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen regulasi pelayanan PKB | Dokumen | 1 | 1.141.638.000 | SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0002 | | | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | | | | 1.141.638.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Laporan | 1 | 1.141.638.000 | SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PKB dan BBNKB yang terlaksana | Laporan | 2 | 1.140.206.000 | SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0003 | | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 1.140.206.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Laporan | 2 | 1.140.206.000 | SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Laporan regulasi penanganan piutang PKB | Laporan | 1 | 1.094.779.000 | SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 1.094.779.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang pajak | Dokumen | 12 | 1.094.779.000 | SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase penanganan pengajuan keberatan PKB yang terselesaikan | % | 100 | 150.000.000 | SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0011 | | | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti | Dokumen | 1 | 150.000.000 | SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | **Tumbuhnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain** | | | | | | | | **12.766.674.000** | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain | % | -7.67 | 12.766.674.000 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | |
| | | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | | 12.766.674.000 | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | 20.31 | 208.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 208.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara | Unit | 14340 | 208.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 208.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Banjarnegara | Dokumen | 4 | 208.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas | % | 20.26 | 301.341.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 301.341.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas | Unit | 29260 | 301.341.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 301.341.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Banyumas | Dokumen | 4 | 301.341.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang | % | 20.24 | 218.140.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 218.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang | Unit | 14890 | 218.140.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 218.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Batang | Dokumen | 4 | 218.140.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora | % | 20.31 | 337.130.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 337.130.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora | Unit | 11660 | 337.130.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 337.130.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Blora | Dokumen | 4 | 337.130.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali | % | 20.48 | 274.140.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 274.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali | Unit | 16900 | 274.140.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 274.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Boyolali | Dokumen | 4 | 274.140.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes | % | 20.83 | 423.744.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 423.744.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes | Unit | 28620 | 423.744.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 423.744.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Brebes | Dokumen | 4 | 423.744.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap | % | 20.24 | 327.639.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 327.639.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap | Unit | 29710 | 327.639.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 327.639.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Cilacap | Dokumen | 4 | 327.639.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak | % | 19.8 | 269.340.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 269.340.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak | Unit | 21.68 | 269.340.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 269.340.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | 4 | 269.340.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan | % | 19.94 | 354.005.000 | | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 354.005.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan | Unit | 21860 | 354.005.000 | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 354.005.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Grobogan | Dokumen | 4 | 354.005.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara | % | 10.98 | 371.190.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 371.190.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara | Unit | 23470 | 371.190.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 371.190.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Jepara | Dokumen | 4 | 371.190.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar | % | 21.21 | 333.140.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 333.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar | Unit | 16670 | 333.140.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 333.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Karanganyar | Dokumen | 4 | 333.140.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen | % | 20.99 | 322.420.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 322.420.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen | Unit | 17830 | 322.420.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 322.420.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kebumen | Dokumen | 4 | 322.420.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal | % | 20.75 | 298.650.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 298.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal | Unit | 19.86 | 298.650.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 298.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kendal | Dokumen | 4 | 298.650.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten | % | 20.93 | 361.760.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 361.760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten | Unit | 24860 | 361.760.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 361.760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Klaten | Dokumen | 4 | 361.760.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus | % | 20.31 | 274.540.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 274.540.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus | Unit | 15390 | 274.540.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 274.540.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | 4 | 274.540.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang | % | 22.12 | 315.650.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 315.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang | Unit | 16410 | 315.650.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 315.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Magelang | Dokumen | 4 | 315.650.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati | % | 19.45 | 329.460.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 329.460.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati | Unit | 19990 | 329.460.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 329.460.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pati | Dokumen | 4 | 329.460.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | % | 20.16 | 279.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 279.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | 16580 | 279.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 279.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 279.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang | % | 20.84 | 381.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 381.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | 22960 | 381.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 381.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pemalang | Dokumen | 4 | 381.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga | % | 20.9 | 384.860.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 384.860.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | 15610 | 384.860.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 384.860.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | 4 | 384.860.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo | % | 22.01 | 168.158.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 168.158.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo | Unit | 9830 | 168.158.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 168.158.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Purworejo | Dokumen | 4 | 168.158.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang | % | 19.33 | 217.130.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 217.130.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang | Unit | 9440 | 217.130.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 217.130.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Rembang | Dokumen | 4 | 217.130.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang | % | 19.97 | 353.990.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 353.990.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang | Unit | 19.38 | 353.990.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 353.990.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Semarang | Dokumen | 4 | 353.990.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen | % | 19.89 | 359.690.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 359.690.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen | Unit | 18470 | 359.690.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 359.690.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Sragen | Dokumen | 4 | 359.690.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | 20.94 | 204.300.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 204.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | 17660 | 204.300.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 204.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | 4 | 204.300.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal | % | 20.57 | 451.663.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 451.663.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal | Unit | 26530 | 451.663.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 451.663.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Tegal | Dokumen | 4 | 451.663.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung | % | 21.35 | 221.530.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 221.530.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung | Unit | 9480 | 221.530.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 221.530.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Temanggung | Dokumen | 4 | 221.530.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri | % | 20.4 | 347.030.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 347.030.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri | Unit | 13820 | 347.030.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 347.030.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Wonogiri | Dokumen | 4 | 347.030.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo | % | 20.95 | 183.450.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 183.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo | Unit | 9950 | 183.450.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 183.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Wonosobo | Dokumen | 4 | 183.450.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang | % | 21.76 | 313.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 313.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Magelang | Unit | 3420 | 313.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 313.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Magelang | Dokumen | 4 | 313.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan | % | 20.29 | 122.510.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 122.510.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan | Unit | 7270 | 122.510.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 122.510.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Pekalongan | Dokumen | 4 | 122.510.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga | % | -25.36 | 106.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 106.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga | Unit | 4.76 | 106.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 106.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Salatiga | Dokumen | 4 | 106.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1 | % | 20.87 | 277.620.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 277.620.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang 1 | Unit | 24.31 | 277.620.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 277.620.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang I | Dokumen | 4 | 277.620.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II | % | 20.09 | 321.148.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 321.148.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II | Unit | 17.99 | 321.148.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 321.148.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang II | Dokumen | 4 | 321.148.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III | % | 20.2 | 185.750.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 185.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III | Unit | 16.15 | 185.750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 185.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang III | Dokumen | 4 | 185.750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta | % | 20.21 | 397.010.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 397.010.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta | Unit | 17470 | 397.010.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 397.010.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Surakarta | Dokumen | 4 | 397.010.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal | % | 20.49 | 164.736.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 164.736.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Tegal | Unit | 7430 | 164.736.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 164.736.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Tegal | Dokumen | 4 | 164.736.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | 13.44 | 6.525.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 6.525.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara | Ribu Rupiah | 4236000 | 6.525.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 6.525.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Banjarnegara | Dokumen | 4 | 6.525.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas | % | 13.75 | 41.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 41.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Banyumas | Ribu Rupiah | 937000 | 41.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 41.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Banyumas | Dokumen | 4 | 41.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang | % | 13.44 | 33.750.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 33.750.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Batang | Ribu Rupiah | 428000 | 33.750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 33.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Batang | Dokumen | 4 | 33.750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora | % | 12.4 | 3.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 3.600.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Blora | Ribu Rupiah | 98000 | 3.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Blora | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali | % | 13.03 | 9.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Boyolali | Ribu Rupiah | 198000 | 9.000.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Boyolali | Dokumen | 4 | 9.000.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes | % | 12.88 | 1.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.800.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Brebes | Ribu Rupiah | 265000 | 1.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 1.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Brebes | Dokumen | 4 | 1.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap | % | 11.83 | 3.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Cilacap | Ribu Rupiah | 4287000 | 3.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Cilacap | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak | % | 10.78 | 5.325.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 5.325.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Demak | Ribu Rupiah | 242000 | 5.325.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 5.325.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | 4 | 5.325.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan | % | 13.12 | 3.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Grobogan | Ribu Rupiah | 1145000 | 3.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD  Kabupaten Grobogan | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara | % | 19 | 1.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Jepara | Ribu Rupiah | 14000 | 1.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Jepara | Dokumen | 4 | 1.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar | % | 9.35 | 1.725.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.725.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar | Ribu Rupiah | 448000 | 1.725.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 1.725.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Karanganyar | Dokumen | 4 | 1.725.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen | % | 13.41 | 4.125.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.125.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kebumen | Ribu Rupiah | 888000 | 4.125.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 4.125.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kebumen | Dokumen | 4 | 4.125.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal | % | 12.95 | 16.350.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 16.350.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kendal | Ribu Rupiah | 82000 | 16.350.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 16.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kendal | Dokumen | 4 | 16.350.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten | % | 13.42 | 4.664.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.664.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Klaten | Ribu Rupiah | 631000 | 4.664.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 4.664.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Klaten | Dokumen | 4 | 4.664.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus | % | 7.24 | 3.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kudus | Ribu Rupiah | 8500 | 3.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang | % | 13.59 | 8.550.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 8.550.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Magelang | Ribu Rupiah | 863000 | 8.550.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 8.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Magelang | Dokumen | 4 | 8.550.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati | % | 13.58 | 3.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pati | Ribu Rupiah | 95000 | 3.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pati | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan | % | 13.51 | 20.700.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 20.700.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan | Ribu Rupiah | 388000 | 20.700.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 20.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 20.700.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang | % | 11.27 | 2.250.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 2.250.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pemalang | Ribu Rupiah | 256000 | 2.250.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 2.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pemalang | Dokumen | 4 | 2.250.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga | % | 13.77 | 17.100.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 17.100.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga | Ribu Rupiah | 494000 | 17.100.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 17.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | 4 | 17.100.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo | % | 12.21 | 1.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.800.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Purworejo | Ribu Rupiah | 127000 | 1.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 1.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Purworejo | Dokumen | 4 | 1.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang | % | 12.45 | 10.815.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 10.815.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Rembang | Ribu Rupiah | 100000 | 10.815.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 10.815.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Rembang | Dokumen | 4 | 10.815.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang | % | 13.7 | 7.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Semarang | Ribu Rupiah | 1616000 | 7.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Semarang | Dokumen | 4 | 7.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen | % | 8.21 | 1.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.800.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Sragen | Ribu Rupiah | 8500 | 1.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 1.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Sragen | Dokumen | 4 | 1.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | 1.76 | 4.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo | Ribu Rupiah | 285000 | 4.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | 4 | 4.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal | % | 13.27 | 5.025.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 5.025.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Tegal | Ribu Rupiah | 414000 | 5.025.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 5.025.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Tegal | Dokumen | 4 | 5.025.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung | % | 13.59 | 12.450.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 12.450.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Temanggung | Ribu Rupiah | 322000 | 12.450.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 12.450.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Temanggung | Dokumen | 4 | 12.450.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD KAbupaten Wonogiri | % | 12.75 | 4.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.200.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri | Ribu Rupiah | 366000 | 4.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 4.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Wonogiri | Dokumen | 4 | 4.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo | % | 13.38 | 25.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo | Ribu Rupiah | 663000 | 25.000.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Wonosobo | Dokumen | 4 | 25.000.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang | % | 9.11 | 9.166.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 9.166.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Magelang | Ribu Rupiah | 120000 | 9.166.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 9.166.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Magelang | Dokumen | 4 | 9.166.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga | % | 6.69 | 3.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Salatiga | Ribu Rupiah | 52000 | 3.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Salatiga | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II | % | 12.53 | 1.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Semarang II | Ribu Rupiah | 645000 | 1.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Semarang II | Dokumen | 4 | 1.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III | % | 12.2 | 3.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Semarang III | Ribu Rupiah | 408000 | 3.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD  Kota Semarang III | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta | % | 6.58 | 300.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 300.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Surakarta | Ribu Rupiah | 53000 | 300.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Surakarta | Dokumen | 4 | 300.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain | % | -7.67 | 1.498.000.000 | Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.498.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Daerah | Dokumen | 4 | 550.000.000 | SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 5.02.04.1.01.0013 | | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Laporan | 4 | 550.000.000 | SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PBBKB, PAP dan Pajak Rokok yang terlaksana | Laporan | 4 | 468.000.000 | SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN | |
| | | 5.02.04.1.01.0003 | | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 468.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Laporan | 4 | 468.000.000 | SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pendapatan Pajak Lain | Laporan | 4 | 480.000.000 | SUB BIDANG PAJAK LAIN-LAIN | |
| | | 5.02.04.1.01.0005 | | | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | 480.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Laporan | 4 | 480.000.000 | SUB BIDANG PAJAK LAIN-LAIN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | -25.11 | 3.300.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 3.300.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara | Ribu Rupiah | 61558 | 3.300.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 3.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Banjarnegara | Dokumen | 4 | 3.300.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas | % | -25.89 | 4.650.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.650.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Banyumas | Ribu Rupiah | 158620 | 4.650.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 4.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Banyumas | Dokumen | 4 | 4.650.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang | % | -23.43 | 33.750.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 33.750.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan  Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Batang | Ribu Rupiah | 51779 | 33.750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 33.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Batang | Dokumen | 4 | 33.750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora | % | -18.49 | 6.750.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 6.750.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Blora | Ribu Rupiah | 83368 | 6.750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 6.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Blora | Dokumen | 4 | 6.750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali | % | -25.7 | 2.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Boyolali | Ribu Rupiah | 72200 | 2.000.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Boyolali | Dokumen | 4 | 2.000.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes | % | -22.26 | 3.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Brebes | Ribu Rupiah | 95532 | 3.000.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Brebes | Dokumen | 4 | 3.000.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap | % | -13.57 | 3.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Cilacap | Ribu Rupiah | 106928 | 3.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Cilacap | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak | % | -24.27 | 2.175.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 2.175.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Demak | Ribu Rupiah | 63966 | 2.175.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 2.175.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | 4 | 2.175.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan | % | -20.94 | 3.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Grobogan | Ribu Rupiah | 112969 | 3.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Grobogan | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara | % | -22.19 | 1.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Jepara | Ribu Rupiah | 191065 | 1.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Jepara | Dokumen | 4 | 1.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar | % | -16.8 | 1.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar | Ribu Rupiah | 64288 | 1.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Karanganyar | Dokumen | 4 | 1.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen | % | -18.63 | 1.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.800.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kebumen | Ribu Rupiah | 90430 | 1.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 1.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kebumen | Dokumen | 4 | 1.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal | % | -25.77 | 4.050.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.050.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kendal | Ribu Rupiah | 57952 | 4.050.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 4.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kendal | Dokumen | 4 | 4.050.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten | % | -24.67 | 2.100.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 2.100.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Klaten | Ribu Rupiah | 124288 | 2.100.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 2.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Klaten | Dokumen | 4 | 2.100.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus | % | -21.23 | 6.060.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 6.060.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kudus | Ribu Rupiah | 86951 | 6.060.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 6.060.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | 4 | 6.060.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang | % | -25.13 | 1.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.800.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Magelang | Ribu Rupiah | 148336 | 1.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 1.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Magelang | Dokumen | 4 | 1.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati | % | -18.76 | 5.400.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 5.400.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pati | Ribu Rupiah | 89338 | 5.400.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 5.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pati | Dokumen | 4 | 5.400.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | % | -20.86 | 17.850.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 17.850.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | Ribu Rupiah | 53951 | 17.850.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 17.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 17.850.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang | % | -17.02 | 1.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pemalang | Ribu Rupiah | 91716 | 1.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pemalang | Dokumen | 4 | 1.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalinga | % | -15.51 | 2.100.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 2.100.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga | Ribu Rupiah | 61558 | 2.100.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 2.100.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya laporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | 4 | 2.100.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo | % | -12.81 | 7.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Purworejo | Ribu Rupiah | 58332 | 7.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Purworejo | Dokumen | 4 | 7.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang | % | -15.14 | 4.350.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.350.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaat Aset Daerah UPPD Kabupaten Rembang | Ribu Rupiah | 65971 | 4.350.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 4.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Rembang | Dokumen | 4 | 4.350.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang | % | -20.16 | 750.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 750.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Semarang | Ribu Rupiah | 111885 | 750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Semarang | Dokumen | 4 | 750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen | % | -25.1 | 1.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Sragen | Ribu Rupiah | 50463 | 1.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Sragen | Dokumen | 4 | 1.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | -25.99 | 4.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | Ribu Rupiah | 79354 | 4.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | 4 | 4.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal | % | -25.7 | 9.300.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 9.300.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Tegal | Ribu Rupiah | 60204 | 9.300.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 9.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Tegal | Dokumen | 4 | 9.300.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung | % | -20.87 | 1.155.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.155.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Temanggung | Ribu Rupiah | 62278 | 1.155.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 1.155.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Temanggung | Dokumen | 4 | 1.155.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri | % | -20.99 | 1.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.200.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri | Ribu Rupiah | 109465 | 1.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 1.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Wonogiri | Dokumen | 4 | 1.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo | % | -24.77 | 11.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 11.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo | Ribu Rupiah | 78128 | 11.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 11.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Wonosobo | Dokumen | 4 | 11.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang | % | -13.62 | 1.350.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.350.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Magelang | Ribu Rupiah | 53019 | 1.350.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 1.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Magelang | Dokumen | 4 | 1.350.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan | % | -16.7 | 39.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 39.000.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Pekalongan | Ribu Rupiah | 51552 | 39.000.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 39.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Pekalongan | Dokumen | 4 | 39.000.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga | % | 20.52 | 3.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Salatiga | Ribu Rupiah | 51912 | 3.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Salatiga | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1 | % | -21.85 | 3.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang 1 | Ribu Rupiah | 252349 | 3.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang I | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II | % | -17.94 | 4.650.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.650.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang II | Ribu Rupiah | 168076 | 4.650.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 4.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang II | Dokumen | 4 | 4.650.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III | % | -17.96 | 1.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.200.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang III | Ribu Rupiah | 214290 | 1.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 1.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang III | Dokumen | 4 | 1.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta | % | -22.24 | 14.550.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 14.550.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Surakarta | Ribu Rupiah | 135689 | 14.550.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 14.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Surakarta | Dokumen | 4 | 14.550.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal | % | 19.25 | 4.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Tegal | Ribu Rupiah | 207242 | 4.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Tegal | Dokumen | 4 | 4.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **286.879.616.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **43.102.872.000** | **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | % | 76 | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **42.802.877.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 81 | 42.802.877.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 42.802.877.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 37.852.286.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 32.618.710.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 32.618.710.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 29.407.029.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 320 | 29.407.029.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 3.082.601.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 3.082.601.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 89.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 4 | 89.080.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.560.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.560.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 6 | 500.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 3 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 15 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 510.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 510.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 5 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 521 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.161.220.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 2.161.220.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 394.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 394.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 101.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 101.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.655.820.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 1.655.820.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.512.356.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 326 | 1.512.356.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 517.356.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 66 | 517.356.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 108.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 200 | 108.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 887.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 10 | 887.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 4.950.591.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 700.000.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 100.000.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 35000 | 400.000.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 49.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 49.950.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 150.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 150.050.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.231.949.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 2.231.949.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 1.200.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 189.066.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 189.066.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.041.683.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 2.041.683.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.018.642.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 730 | 2.018.642.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 15 | 130.000.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 350 | 70.000.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 630.442.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 350 | 630.442.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 1.188.200.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 15 | 1.188.200.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **299.995.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.6 | 299.995.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 299.995.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 299.995.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 299.995.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 299.995.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 149.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 8 | 149.200.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 150.795.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 1 | 150.795.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | | | | | | | **10.146.505.350.000** | **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah** | |
| | | | | | | Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah | % | 97.75 | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | **Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan** | | | | | | | | **10.146.505.350.000** | | |
| | | | | | | Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan | % | 100 | 10.139.779.949.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | | 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | 10.139.779.949.000 | | |
| | | | | | | Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu | % | 100 | 10.129.884.699.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | 10.129.884.699.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun | Dokumen | 1 | 10.129.884.699.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | 5.02.02.1.05.0008 | | | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | 2.999.250.131.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Dokumen | 1 | 2.999.250.131.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.05.0009 | | | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | 25.000.000.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya laporan Dana Darurat dan Mendesak | Dokumen | 1 | 25.000.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.05.0010 | | | Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi | | | | 7.105.634.568.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya laporan Dana bagi Hasil Provinsi | Dokumen | 1 | 7.105.634.568.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu | % | 100 | 710.450.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 710.450.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota | Dokumen | 105 | 710.450.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 5.02.02.1.02.0002 | | | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | | | | 102.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | Dokumen | 35 | 102.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.02.0003 | | | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | | | | 218.900.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturanaerah tentang Perubahan APBDKabupaten/Kota dan Rancangan PeraturanKepala Daerah tentang Penjabaran PerubahanPBD Kabupaten/Kota | Dokumen | 35 | 218.900.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.02.0004 | | | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | 218.900.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Dokumen | 35 | 218.900.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.02.0005 | | | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | | | | 59.050.000 | | |
| | | | | | | Terlaksanannya Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 59.050.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.02.0012 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | | | | 111.600.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Dokumen | 1 | 111.600.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase penetapan APBD tepat waktu | % | 100 | 9.184.800.000 | Bidang Anggaran | |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | | | 9.184.800.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku | Dokumen | 8 | 4.884.670.000 | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| | | 5.02.02.1.01.0001 | | | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS | Dokumen | 2 | 160.000.000 | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.01.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | 4.724.670.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. | Dokumen | 2 | 4.724.670.000 | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Rencana Perubahan Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku | Dokumen | 8 | 2.787.389.000 | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 5.02.02.1.01.0002 | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun | Dokumen | 2 | 160.000.000 | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.01.0008 | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | 2.627.389.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD. | Dokumen | 2 | 2.627.389.000 | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Tersusunya Dokumen Rencana Anggaran Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan. | Dokumen | 35 | 1.512.741.000 | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN | |
| | | 5.02.02.1.01.0009 | | | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | 1.512.741.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Dokumen | 35 | 1.512.741.000 | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun | % | 100 | 3.925.303.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | | 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | 3.925.303.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyampaian LKPD tepat waktu | % | 100 | 3.925.303.000 | Bidang Akuntansi | |
| | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | | 3.925.303.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan yang disusun | Dokumen | 1 | 983.373.000 | SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | |
| | | 5.02.02.1.04.0002 | | | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | Laporan | 1 | 400.000.000 | SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.04.0011 | | | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | | | | 583.373.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | Orang | 41 | 583.373.000 | SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun | Dokumen | 1 | 568.350.000 | SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA | |
| | | 5.02.02.1.04.0008 | | | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Dokumen | 1 | 220.000.000 | SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.04.0009 | | | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | 348.350.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Dokumen | 1 | 348.350.000 | SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun | Dokumen | 1 | 2.373.580.000 | SUB BIDANG PEMERINTAHAN | |
| | | 5.02.02.1.04.0004 | | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 573.580.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Laporan | 1 | 573.580.000 | SUB BIDANG PEMERINTAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.04.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | | | | 1.800.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | Dokumen | 1 | 1.800.000.000 | SUB BIDANG PEMERINTAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase realisasi APBD | % | 93.25 | 2.800.098.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | | 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | 2.800.098.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyusunan dokumen manajemen kas | % | 100 | 2.800.098.000 | Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah | |
| | | | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | | 2.270.792.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Dokumen | 2 | 747.310.000 | SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | |
| | | 5.02.02.1.03.0006 | | | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | 747.310.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Dokumen | 43 | 747.310.000 | SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.03.0010 | | | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Dokumen | 0 | | SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan Dan Kesra | Dokumen | 1 | 763.271.000 | SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA | |
| | | 5.02.02.1.03.0003 | | | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | 763.271.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Dokumen | 4 | 763.271.000 | SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.03.0011 | | | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | |
| | | | | | | Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang | 0 | | SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas yang disusun | Dokumen | 1 | 760.211.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH | |
| | | 5.02.02.1.03.0001 | | | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Dokumen | 0 | | SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.03.0009 | | | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | 760.211.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Dokumen | 49 | 760.211.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | | | 529.306.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan | Dokumen | 2 | 529.306.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 5.02.02.1.06.0002 | | | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | | 529.306.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Dokumen | 1 | 529.306.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.06.0003 | | | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi | | | | | | |
| | | | | | | Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang | 0 | | SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah** | | | | | | | | | **6.114.433.000** | **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah** | |
| | | | | | | Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) | % | 84.02 | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | **Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan** | | | | | | | | **6.114.433.000** | | |
| | | | | | | Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan | % | 100 | 6.114.433.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | | 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | | 6.114.433.000 | | |
| | | | | | | Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi | % | 100 | 1.854.994.000 | Bidang Aset Daerah | |
| | | | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | 1.854.994.000 | | |
| | | | | | | Meningkatnya jumlah aset yang teramankan | Angka | 70.76 | 1.704.994.000 | SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH | |
| | | 5.02.03.1.01.0007 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | 1.704.994.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah | Laporan | 1 | 1.704.994.000 | SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah | % | 100 | 150.000.000 | SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH | |
| | | 5.02.03.1.01.0009 | | | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Laporan | 41 | 150.000.000 | SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH | |
| | | | | | | Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik | % | 84.02 | 1.456.439.000 | Bidang Aset Daerah | |
| | | | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | 1.456.439.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu | Dokumen | 1 | 1.456.439.000 | SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH | |
| | | 5.02.03.1.01.0005 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah | Laporan | 2 | 400.000.000 | SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.02.03.1.01.0006 | | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | 567.790.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah | Laporan | 41 | 567.790.000 | SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.02.03.1.01.0011 | | | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Laporan | 0 | | SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.02.03.1.01.0012 | | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | 488.649.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah | Laporan | 84 | 488.649.000 | SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu | % | 100 | 2.803.000.000 | Bidang Aset Daerah | |
| | | | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | 2.803.000.000 | | |
| | | | | | | Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan | % | 100 | 2.803.000.000 | SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH | |
| | | 5.02.03.1.01.0003 | | | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | 724.000.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Dokumen | 2 | 724.000.000 | SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.03.1.01.0004 | | | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | 414.000.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Dokumen | 1 | 414.000.000 | SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.02.03.1.01.0008 | | | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah | Laporan | 1 | 220.000.000 | SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.03.1.01.0010 | | | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | 1.445.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Dokumen | 3 | 1.445.000.000 | SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **10.195.722.655.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Kepegawaian Daerah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **61.923.644.000** | **Badan Kepegawaian Daerah** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 80 | | Badan Kepegawaian Daerah | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **61.523.644.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 91 | 61.523.644.000 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 61.523.644.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 91 | 61.468.644.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 26.504.644.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 26.504.644.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 24.937.994.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 150 | 24.937.994.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.471.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 1.471.650.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 7 | 50.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 4 | 25.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0008 | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | Dokumen | 12 | | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0001 | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 150.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0007 | | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Laporan | 2 | 20.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.04.0007 | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | Laporan | 2 | 20.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 30.240.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 30.240.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | 30.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 2 | 30.000.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 30 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 20 | 40.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.534.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.534.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Bulan | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 14.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 180.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 600.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 600.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 140.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 320.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 5 | 320.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Unit | 1 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 4 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 3 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 6 | 170.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; ACEH |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.730.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 1.730.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 700.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 900.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Bulan | 12 | 900.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 970.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 27 | 970.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 27 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 27 | 225.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 3 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 500.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; ACEH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Bulan | 12 | 220.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 89.5 | 55.000.000 | Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **400.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3 | 400.000.000 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 3 | 400.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 400.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 400.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 210.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 18 | 210.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 23 | 190.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN** | | | | | | | | | **13.243.893.000** | **Badan Kepegawaian Daerah** | |
| | | | | | | Indeks Sistem Merit | Angka | 0.86 | | Badan Kepegawaian Daerah | |
| | **Terwujudnya Distribusi Penempatan ASN Dalam Jabatan Yang Akurat dan Akuntabel** | | | | | | | | **9.755.000.000** | | |
| | | | | | | Nilai aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, dan manajemen kinerja | Angka | 355.5 | 9.755.000.000 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| | | 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | | 9.755.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan | % | 100 | 4.010.000.000 | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai | |
| | | | | Mutasi dan Promosi ASN | | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam Jabatan | % | 100 | 650.000.000 | SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL | |
| | | 5.03.02.1.02.000 | | | Pengelolaan Promosi ASN | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan | Orang | 149 | 650.000.000 | SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengembangan Kompetensi ASN | | | | | 3.050.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Kompetensi PNS melalui jalur Pendidikan | % | 100 | 3.050.000.000 | SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN | |
| | | 5.03.02.1.03.000 4 | | | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | | 2.650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang mengikuti ujian kedinasan | Orang | 2000 | 200.000.000 | SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pengembangan kompetensi melalui Jalur Pendidikan | Orang | 66 | 2.450.000.000 | SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.03.02.1.03.001 3 | | | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dimonitoring dan diberikan pembinaan | % | 100 | 50.000.000 | SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.03.02.1.03.001 4 | | | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan fungsional | Orang | 1000 | 25.000.000 | SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen kepegawaian Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai perundang-undangan | Dokumen | 1800 | 325.000.000 | SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | 310.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya | % | 100 | 310.000.000 | SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL | |
| | | 5.03.02.1.04.000 2 | | | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 310.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terevaluasi dan terdatabase Kinerja, Sikap dan Perilakunya | Orang | 40000 | 310.000.000 | SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi | % | 100 | 140.000.000 | Bidang Mutasi | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Mutasi dan Promosi ASN | | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi | % | | 140.000.000 | SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN | |
| | | 5.03.02.1.02.0001 | | | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang melakukan mutasi | Dokumen | 350 | 140.000.000 | SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN | % | 100 | 5.605.000.000 | Bidang Mutasi | |
| | | | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | | | 5.605.000.000 | | |
| | | | | | | persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN | % | 100 | 5.605.000.000 | SUB BIDANG PENGANGKATAN | |
| | | 5.03.02.1.01.0002 | | | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai ASN Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan | Dokumen | 1 | 130.000.000 | SUB BIDANG PENGANGKATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.03.02.1.01.0003 | | | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | 5.475.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Seleksi masuk dan Pembekalan bagi peserta didik Sekolah Kedinasan Provinsi Jawa Tengah | Orang | 400 | 2.075.000.000 | SUB BIDANG PENGANGKATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah seleksi pengadaan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan ASN Kabupaten/Kota di Jawa Tengah | Kegiatan | 1 | 3.400.000.000 | SUB BIDANG PENGANGKATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Terwujudnya Layanan Kepegawaian yang Cepat dan Terintegrasi** | | | | | | | | **3.488.893.000** | | |
| | | | | | | Nilai aspek penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi | Angka | 75.5 | 3.488.893.000 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| | | 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | | 3.488.893.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu | % | 100 | 315.000.000 | Bidang Mutasi | |
| | | | | Mutasi dan Promosi ASN | | | | | 315.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kenaikan Pangkat PNS tepat Waktu | % | | 315.000.000 | SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | |
| | | 5.03.02.1.02.0002 | | | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | 315.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyelesaian Kenaikan Pangkat dan layanan administrasi kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota | Dokumen | 1000 | 315.000.000 | SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan | % | 100 | 677.893.000 | Bidang Informasi Kepegawaian | |
| | | | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | | | 677.893.000 | | |
| | | | | | | Persentase Layanan Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan | % | 30 | 677.893.000 | SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN | |
| | | 5.03.02.1.01.0010 | | | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Penyajian Informasi dan Layanan Kepegawaian Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota | % | 30 | 400.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.03.02.1.01.0011 | | | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | 277.893.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen kepegawaian digital ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terkelola | Dokumen | 150000 | 224.023.000 | SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen kepegawaian fisik ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang terkelola | Dokumen | 16900 | 53.870.000 | SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN | % | 100 | 1.001.000.000 | Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengembangan Kompetensi ASN | | | | | 1.001.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN | % | | 1.001.000.000 | SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI | |
| | | 5.03.02.1.03.0002 | | | Pengelolaan Assessment Center | | | | 1.001.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya | Orang | 300 | 591.000.000 | SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya | Orang | 400 | 180.000.000 | SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipetakan Potensinya | Orang | 15000 | 230.000.000 | SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN | % | 100 | 280.000.000 | Bidang Mutasi | |
| | | | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | | | 280.000.000 | | |
| | | | | | | persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN | % | 100 | 280.000.000 | SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN | |
| | | 5.03.02.1.01.0006 | | | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | 280.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penyelesaian dokumen Pemberhentian ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Dokumen | 2200 | 280.000.000 | SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN | % | 100 | 1.215.000.000 | Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai | |
| | | | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | | | 310.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Pemahaman atas Nilai Dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN | % | 100 | 310.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN | |
| | | 5.03.02.1.01.0008 | | | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | | 310.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan Netralitas ASN | Orang | 300 | 200.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Pemahaman ASN Provinsi Jawa Tengah tentang Radikalisme dan Intoleransi | % | 100 | 110.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | 905.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN | % | 100 | 905.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI | |
| | | 5.03.02.1.04.0004 | | | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | | | | 325.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan | Orang | 300 | 325.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.03.02.1.04.0005 | | | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota yang mendapatkan Tanda Jasa | Orang | 2000 | 90.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.03.02.1.04.0007 | | | Pembinaan Disiplin ASN | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang diberikan pembinaan disiplin | Orang | 550 | 190.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.03.02.1.04.0008 | | | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Penangangan Kasus dan Pelanggaran Disiplin ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | % | 100 | 300.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **75.167.537.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **MENINGKATKAN KOMPETENSI ASN** | | | | | | | | | **19.589.676.000** | **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah** | |
| | | | | | | Indeks Kompetensi ASN | Angka | 3.07 | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | |
| | **TERPENUHINYA HAK PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN** | | | | | | | | **19.133.320.000** | | |
| | | | | | | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi | % | 8.67 | 19.133.320.000 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | |
| | | 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | 19.133.320.000 | | |
| | | | | | | Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan) | Angka | 3.5 | 327.501.000 | Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu | |
| | | | | Pengembangan Kompetensi Teknis | | | | | 29.726.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Teknis | Dokumen | 3 | 29.726.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | |
| | | 5.04.02.1.01.0002 | | | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 4.844.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan | Dokumen | 1 | 4.844.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.04.02.1.01.0004 | | | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 24.882.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan | Dokumen | 18 | 4.327.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi | Angka | 15 | 20.555.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | | 297.775.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi | Dokumen | 3 | 297.775.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | |
| | | 5.04.02.1.02.0006 | | | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional | | | | 59.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan | Dokumen | 10 | 59.550.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.04.02.1.02.0008 | | | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan | | | | 238.225.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan | Dokumen | 13 | 41.631.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu | Dokumen | 1 | 38.739.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah pelatihan yang diakreditasi | Jenis | 1 | 95.307.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi | Angka | 24 | 62.548.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional | % | 100 | 1.350.000.000 | Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional | |
| | | | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | | 1.350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional | Orang | 1140 | 1.350.000.000 | SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL | |
| | | 5.04.02.1.02.0007 | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | 1.350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional | Orang | 430 | 474.584.000 | SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional | Orang | 390 | 503.159.000 | SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional | Orang | 400 | 372.257.000 | SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial | % | 100 | 15.926.520.000 | Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial | |
| | | | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | | 15.926.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial | Orang | 2310 | 15.926.520.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH | |
| | | 5.04.02.1.02.0007 | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | 15.926.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS | Orang | 60 | 199.700.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator | Orang | 200 | 2.530.248.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas | Orang | 230 | 2.292.580.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama | Orang | 120 | 2.104.945.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah | Orang | 1745 | 8.799.047.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis | % | 100 | 1.265.000.000 | Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis | |
| | | | | Pengembangan Kompetensi Teknis | | | | | 1.265.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis | Orang | 2910 | 1.265.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN | |
| | | 5.04.02.1.01.0003 | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah | | | | 1.265.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti | Orang | 920 | 429.818.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan | Orang | 850 | 423.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum | Orang | 1140 | 412.182.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan | % | 85 | 264.299.000 | Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu | |
| | | | | Pengembangan Kompetensi Teknis | | | | | 189.603.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis | Dokumen | 3 | 189.603.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | |
| | | 5.04.02.1.01.000 1 | | | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 42.833.000 | | |
| | | | | | | Jumlah metode pengembangan kompetensi yang disusun/disempurnakan | Dokumen | 1 | 1.500.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan analisi pengembangan kompetensi | Dokumen | 2 | 41.333.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.04.02.1.01.000 2 | | | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 146.770.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan | Dokumen | 20 | 146.770.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | | 74.696.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi | Dokumen | 3 | 74.696.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | |
| | | 5.04.02.1.02.000 1 | | | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional | | | | 70.547.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan | Dokumen | 1 | 1.500.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi | Dokumen | 2 | 20.049.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya | Orang | 24 | 48.998.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.04.02.1.02.0006 | | | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional | | | | 4.149.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan | Dokumen | 1 | 4.149.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **TERPENUHINYA KEBUTUHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI ASN** | | | | | | | | **456.356.000** | | |
| | | | | | | Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi | % | 100 | 456.356.000 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | |
| | | 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | 456.356.000 | | |
| | | | | | | Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan | % | 100 | 456.356.000 | Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu | |
| | | | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | | 456.356.000 | | |
| | | | | | | Jumlah  Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi | Dokumen | 2 | 456.356.000 | SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI | |
| | | 5.04.02.1.02.0002 | | | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi | | | | 37.655.000 | | |
| | | | | | | Jumlah identifikasi kebutuhan skema sertifikasi | Dokumen | 1 | 15.570.000 | SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah kualifikasi asessor kompetensi yang dimiliki | Orang | 2 | 22.085.000 | SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.04.02.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | | | | 418.701.000 | | |
| | | | | | | Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi | Orang | 300 | 418.701.000 | SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH** | | | | | | | | | **47.233.724.000** | **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 72 | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **46.908.724.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 80 | 46.908.724.000 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 46.908.724.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 46.908.724.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 32.253.755.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 6 | 32.253.755.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 29.235.266.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN | Bulan | 12 | 29.235.266.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2.798.479.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 2.798.479.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 56.863.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Dokumen pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan | Dokumen | 1 | 56.863.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 78.868.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat desa | Laporan | 1 | 78.868.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 53.194.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah yang disusun | Laporan | 1 | 53.194.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0008 | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 31.085.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | Dokumen | 1 | 31.085.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 234.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 234.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 234.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 234.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | 79.990.000 | | |
| | | | | | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 79.990.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.04.0007 | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 79.990.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi | Laporan | 1 | 79.990.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 230.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 230.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 1 | | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 49.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 10 | 49.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 181.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 30 | 181.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.996.289.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.996.289.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 173.093.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 173.093.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 188.196.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 188.196.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 374.165.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 374.165.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 305.060.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 305.060.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 76.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 76.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 36.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Bulan | 12 | 36.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Bulan | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 275.070.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Bulan | 12 | 275.070.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 8.505.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Bulan | 12 | 8.505.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 460.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 6 | 460.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 723.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Dokumen | 1 | 723.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 588.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 66 | 588.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 31 | 120.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 9.647.440.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 9.647.440.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Bulan | 12 | 4.800.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 2.428.890.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Bulan | 12 | 2.428.890.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 7.213.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Bulan | 12 | 7.213.750.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.743.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Dokumen | 1 | 1.743.850.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 149.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Bulan | 12 | 149.600.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Bulan | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Bulan | 12 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 564.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Bulan | 12 | 564.250.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **325.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3 | 325.000.000 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 325.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 325.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 325.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 325.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 135.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 10 | 135.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 21 | 190.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **66.823.400.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Penghubung

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Penghubung** | | | | | | | | | **17.558.662.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 71.5 | | | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **17.483.662.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 85 | 17.483.662.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 17.483.662.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 17.483.662.000 | Badan Penghubung | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 9.483.504.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 9.483.504.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 9.435.724.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 55 | 9.435.724.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 37.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 37.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 191.580.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 191.580.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 191.580.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 35 | 191.580.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 50 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 55 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA BARAT |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.572.178.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.572.178.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 71.860.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 71.860.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 154.372.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 154.372.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 18.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 581.946.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 581.946.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 700.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 127.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 199 | 127.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 127.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 36 | 127.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 4.834.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 4.834.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 812.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 812.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 89.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 89.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 3.908.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 3.908.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.194.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 1.194.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 675.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 34 | 675.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 11.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 5 | 11.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 224.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 16 | 224.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 8 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 234.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 234.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko di Badan Penghubung** | | | | | | | | **75.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3 | 75.000.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 75.000.000 | Badan Penghubung | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 9 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 21 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung** | | | | | | | | | **2.772.186.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung | Angka | 85 | | | |
| | **Meningkatnya Pelayanan Publik bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah** | | | | | | | | **2.772.186.000** | | |
| | | | | | | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | % | 85 | 2.772.186.000 | | |
| | | 5.07.02 | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | | | | | | 2.772.186.000 | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan penghubung | % | 100 | 2.772.186.000 | Badan Penghubung | |
| | | | | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | | | | | 2.772.186.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | % | 100 | 485.000.000 | SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI | |
| | | 5.07.02.1.01.0003 | | | Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | | | | 485.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam Pelestarian Seni Budaya Jawa Tengah di Jakarta | Kabupaten/ Kota | 35 | 235.000.000 | SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | | | | | Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi Produk Unggulan Jawa Tengah di Jakarta | Kabupaten/ Kota | 35 | 250.000.000 | SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | | | | | Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat | % | 100 | 2.207.186.000 | SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 5.07.02.1.01.0001 | | | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat | | | | 2.207.186.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelayanan terhadap Unsur Aparatur Pemerintah Jawa Tengah di Jakarta yang terpenuhi | Laporan | 12 | 175.000.000 | SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | | | | | Jumlah masyarakat yang menerima fasilitas Pelayanan Badan Penghubung | Orang | 3684 | 2.032.186.000 | SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | | | | | Persentase Terpenuhinya fasilitasi Pengunjung Anjungan Daerah Jawa Tengah | % | 100 | 80.000.000 | SUB BIDANG ANJUNGAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH | |
| | | 5.07.02.1.01.0003 | | | Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan Anjungan Daerah Jawa Tengah | Kegiatan | 6 | 80.000.000 | SUB BIDANG ANJUNGAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **20.330.848.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
INSPEKTORAT

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **29.717.953.000** | **INSPEKTORAT** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 76 | | INSPEKTORAT | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **29.612.953.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 83.6 | 29.612.953.000 | INSPEKTORAT | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 29.612.953.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 29.612.953.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 23.955.557.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 23.955.557.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 23.955.557.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 138 | 23.955.557.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0008 | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 200.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 200.500.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0001 | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 200.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 200.500.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0007 | | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 618.290.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 618.290.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 578.290.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 50 | 578.290.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Orang | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 533.933.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 533.933.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 195.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 195.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 327.033.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 327.033.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Dokumen | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 6.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 6.900.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 187.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 3 | 187.900.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0003 | | | Pengadaan Alat Besar | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit alat besar yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0004 | | | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 89.900.000 | | |
| | | | | | | umlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 2 | 89.900.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 98.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 1 | 98.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.732.020.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 2.732.020.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 230.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 230.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 667.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 667.600.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.804.420.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 1.804.420.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.384.753.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 70 | 1.384.753.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 39.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 11 | 39.800.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 369.038.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 23 | 369.038.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0003 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Unit | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0004 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Unit | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 20 | 20.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 10 | 120.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 80.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 605.915.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 605.915.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 150.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah** | | | | | | | | **105.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3 | 105.000.000 | INSPEKTORAT | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 105.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 105.000.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 6 | 60.000.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 2 | 45.000.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi** | | | | | | | | | **8.839.949.000** | | |
| | | | | | | Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi | Level | 3 | | | |
| | **Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **2.766.222.000** | | |
| | | | | | | Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah | Level | 3 | 2.766.222.000 | INSPEKTORAT | |
| | | 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | | 2.766.222.000 | | |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korups (IEPK) level 3 | % | 10.2 | 1.686.745.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Pendampingan dan Asistensi | | | | | 1.686.745.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Laporan | 4 | 1.686.745.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | |
| | | 6.01.03.1.02.0003 | | | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | 1.686.745.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Kegiatan | 4 | 1.686.745.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3 | % | 10.2 | 1.079.477.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | | | 198.940.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Kegiatan | 1 | 198.940.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | |
| | | 6.01.03.1.01.0001 | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | | 198.940.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Dokumen | 1 | 198.940.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pendampingan dan Asistensi | | | | | 880.537.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi | Laporan | 5 | 880.537.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | |
| | | 6.01.03.1.02.0002 | | | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | 880.537.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | OPD | 49 | 880.537.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya Peran Pengawasan Internal** | | | | | | | | **6.073.727.000** | | |
| | | | | | | Level Kapabilitas APIP | Level | 3 | 6.073.727.000 | | |
| | | 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | | 6.073.727.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri | % | 83 | 579.243.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | 579.243.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semesteran | Dokumen | 2 | 579.243.000 | SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI | |
| | | 6.01.02.1.01.0007 | | | Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil | | | | 579.243.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Dokumen | 70 | 579.243.000 | SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah | % | 85 | 1.474.400.000 | INSPEKTORAT | |
| | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | 1.474.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah | % | 100 | 1.474.400.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH | |
| | | 6.01.02.1.01.0002 | | | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 1.126.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Laporan | 42 | 1.126.400.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 6.01.02.1.01.000 | | | Reviu Laporan Keuangan | | | | 348.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | Laporan | 20 | 348.000.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu | % | 85 | 1.279.300.000 | INSPEKTORAT | |
| | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | | | 1.279.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | % | 100 | 1.279.300.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS | |
| | | 6.01.02.1.02.0001 | | | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani | Laporan | 4 | 200.000.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 6.01.02.1.02.0002 | | | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | | 1.079.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Laporan | 20 | 1.079.300.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah | % | 85 | 1.420.914.000 | INSPEKTORAT | |
| | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | 1.420.914.000 | | |
| | | | | | | Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah | % | 100 | 1.420.914.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 6.01.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | 1.420.914.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Laporan | 50 | 1.420.914.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah | % | 85 | 1.319.870.000 | INSPEKTORAT | |
| | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | 1.319.870.000 | | |
| | | | | | | Persentase Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | % | 100 | 1.319.870.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | |
| | | 6.01.02.1.01.0003 | | | Reviu Laporan Kinerja | | | | 484.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Laporan | 60 | 484.250.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 6.01.02.1.01.0005 | | | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | | | | 835.620.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | Laporan | 30 | 835.620.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **38.557.902.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | | | | | | **1.241.501.156.000** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | |
| | | | | | | Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Angka | 2.745 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | **Meningkatnya Ketahanan Bangsa** | | | | | | | | **80.045.776.000** | | |
| | | | | | | Indeks Ketahanan IDEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Angka | 2.89 | 80.045.776.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | | 2.168.341.000 | | |
| | | | | | | Indeks Ideologi Pancasila | Nilai | 3 | 2.168.341.000 | Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional | |
| | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | 2.168.341.000 | | |
| | | | | | | Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | % | 80 | 73.854.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | |
| | | 8.01.02.1.01.0004 | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | | | | 73.854.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Orang | 50 | 73.854.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | |
| | | | | | | Persentase masyarakat yang paham tindakan pencegahan ekstrimisme dan terorisme | % | 80 | 2.094.487.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | |
| | | 8.01.02.1.01.0003 | | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | | | | 2.041.395.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Orang | 1050 | 2.041.395.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | |
| | | 8.01.02.1.01.0005 | | | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | | | | 53.092.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Laporan | 4 | 53.092.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | |
| | | 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | | 76.846.013.000 | | |
| | | | | | | Indeks kinerja ormas | Nilai | 75.34 | 76.846.013.000 | Bidang Ketahanan Bangsa | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | | 76.846.013.000 | | |
| | | | | | | Skor variabel program dan kegiatan ormas | Skor | 36.23 | 75.771.865.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | |
| | | 8.01.04.1.01.0005 | | | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 75.771.865.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Laporan | 35 | 75.771.865.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Skor variabel sumber daya ormas | Skor | 39.11 | 1.074.148.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | |
| | | 8.01.04.1.01.0003 | | | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 925.498.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Orang | 1200 | 925.498.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 8.01.04.1.01.0004 | | | Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 148.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Orang | 320 | 148.650.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | |
| | | 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | | 1.031.422.000 | | |
| | | | | | | Indeks penguatan dampak ekonomi | % | 3 | 910.364.000 | Bidang Ketahanan Bangsa | |
| | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | | 910.364.000 | | |
| | | | | | | Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | % | 85 | 910.364.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | |
| | | 8.01.05.1.01.0003 | | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 910.364.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 1210 | 910.364.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Indeks toleransi | % | 74.1 | 121.058.000 | Bidang Ketahanan Bangsa | |
| | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | | 121.058.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | % | 85 | 121.058.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | |
| | | 8.01.05.1.01.0004 | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 70.090.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 100 | 70.090.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 8.01.05.1.01.0005 | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 50.968.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Laporan | 12 | 50.968.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | **Meningkatnya Stabillitas Politik** | | | | | | | | **1.161.455.380.000** | | |
| | | | | | | Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Angka | 2.6 | 1.161.455.380.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | | 1.022.991.617.000 | | |
| | | | | | | IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi | Nilai | 75 | 1.022.991.617.000 | Bidang Politik Dalam Negri | |
| | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | | | 1.022.991.617.000 | | |
| | | | | | | Persentase masyarakat yang paham pendidikan politik | % | 89 | 1.616.822.000 | SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK | |
| | | 8.01.03.1.01.0003 | | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 1.616.822.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Orang | 1680 | 1.616.822.000 | SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik | % | 89 | 1.020.823.144.000 | SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK | |
| | | 8.01.03.1.01.000 5 | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 1.020.823.144.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Laporan | 4 | 1.020.823.144.000 | SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK | |
| | | | | | | Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi | % | 89 | 551.651.000 | SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK | |
| | | 8.01.03.1.01.000 2 | | | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 187.620.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Dokumen | 4 | 187.620.000 | SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK | |
| | | 8.01.03.1.01.000 4 | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 364.031.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Orang | 180 | 364.031.000 | SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK | |
| | | 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | | 138.463.763.000 | | |
| | | | | | | Indeks kewaspadaan Nasional | Angka | 73 | 138.463.763.000 | Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional | |
| | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | | 138.463.763.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial | % | 72 | 761.090.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | |
| | | 8.01.06.1.01.0003 | | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 761.090.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang | 1000 | 761.090.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase penanganan konflik sosial | % | 100 | 137.702.673.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | |
| | | 8.01.06.1.01.0004 | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 910.259.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang | 360 | 910.259.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 8.01.06.1.01.0005 | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 135.313.614.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Laporan | 5 | 135.313.614.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 8.01.06.1.01.0006 | | | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | | | | 1.478.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | Laporan | 3 | 1.478.800.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **18.842.748.000** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 74 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **16.093.778.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 88 | 16.093.778.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 16.093.778.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 16.093.778.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 10.061.779.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 10.061.779.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 9.826.659.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 54 | 9.826.659.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 222.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 222.120.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Laporan | 12 | 1.500.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 12 | 1.500.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 320.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 320.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 80 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 230.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 280 | 230.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.496.806.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.496.806.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 50.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 180.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 85.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 50 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 55.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 55.650.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 721.156.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 24 | 721.156.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 8 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 886.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 41 | 886.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 5 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 801.000.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya peralatan dan mesin lainnya | Unit | 27 | 801.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 9 | 35.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.430.693.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 84 | 2.430.693.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 7.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 36 | 450.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.973.693.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 36 | 1.973.693.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 818.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 352 | 818.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 21 | 225.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 50 | 3.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 80 | 110.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 410.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 410.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 200 | 70.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah** | | | | | | | | **2.748.970.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.5 | 2.748.970.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 2.748.970.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 2.748.970.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 2.748.970.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 2.748.970.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1.081.440.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 16 | 1.081.440.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1.667.530.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 20 | 1.667.530.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **1.260.343.904.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Riset dan Inovasi Daerah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **20.631.203.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 70.1 | | | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **20.201.203.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 84 | 20.201.203.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 20.201.203.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | % | 84 | 20.201.203.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 15.508.730.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 19 | 15.508.730.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 15.065.170.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 45 | 15.065.170.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 223.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 223.560.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 12 | 110.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 110.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 155.388.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 155.388.000 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 135.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 135.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 20.388.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 20.388.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 375.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 375.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 300.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 30 | 50.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 50 | 25.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.103.019.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.103.019.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 30.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 53.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 53.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 13.019.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 13.019.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 113.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 113.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 64.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 64.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 20.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 85.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 600.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 25.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 100.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 327.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 36 | 327.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Unit | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 6 | 25.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | 252.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 252.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 1 | 50.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.601.266.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 1.601.266.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 7.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 567.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 567.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 230.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 230.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 796.766.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 796.766.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.130.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1.172 | 1.130.800.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 391.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 11 | 391.800.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 54 | 12.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 67.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 65 | 67.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 50.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 325.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 325.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 39 | 85.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 200.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah** | | | | | | | | **430.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.91 | 430.000.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 430.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 2.91 | 430.000.000 | | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 430.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 430.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.01.000 1 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 6 | 250.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.000 7 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 12 | 180.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan Kualitas Riset dan Inovasi Daerah** | | | | | | | | | **5.050.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 72.5 | | | |
| | **Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah yang dimanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah** | | | | | | | | **5.050.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase riset dan inovasi daerah yang diterapkan | % | 100 | 5.050.000.000 | | |
| | | 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | 5.050.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi | % | 100 | 1.500.000.000 | | |
| | | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | | 492.329.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah dokumen fasilitasi penelitian dan pengembangan riset inovasi | Dokumen | 1 | 492.329.000 | | |
| | | 5.05.02.1.01.001 2 | | | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | | 36.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola | Dokumen | 1 | 36.750.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.05.02.1.01.001 4 | | | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | | | | 455.579.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | Dokumen | 1 | 455.579.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | | 1.007.671.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pemanfaatan riset inovasi | Dokumen | 1 | 1.007.671.000 | | |
| | | 5.05.02.1.04.000 3 | | | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Dokumen | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.05.02.1.04.000 4 | | | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | 741.069.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil hasil kelitbangan | Laporan | 1 | 741.069.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.05.02.1.04.000 5 | | | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | | | 266.602.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan fasilitasi Hak kekayaan Intelektual | Laporan | 1 | 266.602.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi | % | 100 | 1.000.000.000 | | |
| | | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pengembangan Infrastruktur | Dokumen | 1 | 1.000.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.01.000 3 | | | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | | | | 505.807.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Laporan | 1 | 505.807.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.05.02.1.01.000 4 | | | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | | | | 494.193.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | Laporan | 1 | 494.193.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan riset dan inovasi | % | 100 | 1.250.000.000 | | |
| | | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan | Dokumen | 0 | | | |
| | | 5.05.02.1.01.000 1 | | | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Dokumen | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | | | 204.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan | Dokumen | 1 | 204.400.000 | | |
| | | 5.05.02.1.02.0001 | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | | | | 204.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek aspek sosial | Dokumen | 1 | 204.400.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | | | 568.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan | Dokumen | 1 | 568.800.000 | | |
| | | 5.05.02.1.03.0002 | | | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | | | | 204.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan | Dokumen | 1 | 204.400.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.05.02.1.03.0003 | | | Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah | Dokumen | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.05.02.1.03.0004 | | | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | | 204.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas | Dokumen | 1 | 204.400.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.05.02.1.03.0005 | | | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Dokumen | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.05.02.1.03.0006 | | | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | Dokumen | 0 | | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.05.02.1.03.0007 | | | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Dokumen | 1 | 160.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | | 476.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi | Dokumen | 1 | 476.800.000 | | |
| | | 5.05.02.1.04.0002 | | | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | | | | 476.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Dokumen | 1 | 476.800.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi | % | 100 | 1.300.000.000 | | |
| | | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan | Dokumen | 1 | 800.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.01.0002 | | | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | | | | 475.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Dokumen | 1 | 475.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.05.02.1.01.0013 | | | Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan | | | | 325.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan diterbitkan | Dokumen | 1 | 325.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Dokumen | 1 | 500.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.04.0001 | | | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Dokumen | 1 | 500.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **25.681.203.000** | | |

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SETDA

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003